



LAPORAN KETERANGAN **PERTANGGUNGJAWABAN** BUPATI MUARA ENIM **2025**



H. Edison, SH., M.Hum

Bupati Muara Enim



Ir. Hj. Sumarni, M.Si

Wakil Bupati Muara Enim



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muara Enim Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyampaian LKPJ Bupati Muara Enim Tahun Anggaran 2024 ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan ini disusun berdasarkan pedoman yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengenai Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029. Sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas, LKPJ Bupati Muara Enim Tahun Anggaran 2025 merupakan salah satu upaya untuk memberikan pertanggungjawaban yang jelas kepada masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD/BUMS, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Muara Enim. Dukungan ini telah memungkinkan pelaksanaan program pembangunan berjalan dengan lancar.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi dasar untuk perbaikan serta penyempurnaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Muara Enim di masa yang akan datang, dan dapat mendorong tercapainya perubahan yang lebih baik bagi Kabupaten Muara Enim.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Muara Enim, Maret 2026
BUPATI MUARA ENIM

H. EDISON. S.H., M.Hum.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. DASAR HUKUM.....	I-2
1.2. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH.....	I-5
1.2.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH	I-13
1.3. DATA UMUM DAERAH.....	I-27
1.3.1. KONDISI GEOGRAFIS WILAYAH	I-27
1.3.2. KONDISI DEMOGRAFIS	I-29
1.3.3. KONDISI EKONOMI.....	I-32
1.3.4. JUMLAH PENDUDUK	I-41
1.3.5. JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)	I-42
1.3.6. REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN.....	I-47
1.3.7. REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN.....	I-48
BAB II : PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	II-1
2.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	II-3
2.1.1. REALISASI PENDAPATAN DAERAH	II-7
2.2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH	II-12
2.2.1. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	II-12
2.2.2. REALISASI BELANJA DAERAH.....	II-17
2.3. REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN	II-23
2.4. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	II-25
BAB III : HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	
3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.....	III-1
3.1.1. PELAKSANAAN URUSAN WAJIB	III-2
3.1.2. PELAKSANAAN URUSAN TIDAK WAJIB.....	III-138
3.1.3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	III-315
3.1.4. FUNGSI PENUNJANG	III-420
3.1.5. URUSAN KECAMATAN.....	III-513
3.2. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1. URUSAN PENDIDIKAN OLEH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.....	III-591
2. URUSAN KESEHATAN OLEH DINAS KESEHATAN DAN RSUD H. M. RABAIN.....	III-615
3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	III-661



4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	III-692
5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	III-707
6. URUSAN SOSIAL OLEH DINAS SOSIAL	III-764
3.3. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1. URUSAN TENAGA KERJA OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	III-771
2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	III-780
3. URUSAN PANGAN OLEH DINAS KETAHANAN PANGAN	III-793
4. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP	III-811
5. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	III-828
6. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ..	III-842
7. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	III-850
8. URUSAN PERHUBUNGAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN	III-867
9. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	III-913
10. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH OLEH DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	III-928
11. URUSAN PENANAMAN MODAL OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	III-937
12. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA OLEH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	III-951
13. URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN OLEH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	III-977
3.4. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
1. URUSAN PERIKANAN OLEH DINAS PERIKANAN	III-990
2. URUSAN PARIWISATA OLEH DINAS PARIWISATA	III-1001
3. URUSAN PERTANIAN OLEH DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN, DAN DINAS PERKEBUNAN	III-1015



4. URUSAN PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN ESDM OLEH DINAS PERDAGANGAN	III-1042
3.5. FUNGSI PENUNJANG	
1. SEKRETARIAT DAERAH.....	III-1049
2. SEKRETARIAT DPRD	III-1066
3. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	III-1075
4. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	III-1084
5. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	III-1094
6. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	III-1108
7. INSPEKTORAT	III-1118
8. BADAN PENDAPATAN DAERAH.....	III-1128
9. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	III-1136
3.6. KECAMATAN	
1. KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU (SDU)	III-1145
2. KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH (SDT)	III-1151
3. KECAMATAN SEMENDE DARAT LAUT	III-1157
4. KECAMATAN TANJUNG AGUNG	III-1163
5. KECAMATAN LAWANG KIDUL	III-1170
6. KECAMATAN MUARA ENIM.....	III-1179
7. KECAMATAN UJAN MAS	III-1188
8. KECAMATAN BENAKAT	III-1193
9. KECAMATAN GUNUNG MEGANG.....	III-1204
10. KECAMATAN RAMBANG.....	III-1213
11. KECAMATAN RAMBANG NIRU	III-1221
12. KECAMATAN LUBAI.....	III-1226
13. KECAMATAN LEMBAK	III-1236
14. KECAMATAN KELAKAR.....	III-1243
15. KECAMATAN GELUMBANG	III-1250
16. KECAMATAN MUARA BELIDA.....	III-1258
17. KECAMATAN BELIMBING.....	III-1264
18. KECAMATAN BELIDA DARAT	III-1275
19. KECAMATAN LUBAI ULU	III-1282
20. KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU.....	III-1288
21. KECAMATAN PANANG ENIM	III-1296
22. KECAMATAN SUNGAI ROTAN.....	III-1303
3.7. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN.....	III-1311
3.8. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA.....	III-1313

BAB IV : CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. DANA BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	IV-1
4.1.1. DASAR HUKUM.....	IV-1
4.1.2. JUMLAH ANGGARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN.....	IV-1



4.1.3.	PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	IV-3
4.2.	PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	IV-4
4.2.1.	KERJASAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN (KSDD).....	IV-4
4.2.2.	KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA (KSDPK)	IV-7
4.2.3.	DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH (SINERGI)	IV-14
4.2.4.	PEMBINAAN BATAS WILAYAH.....	IV-34
4.2.5.	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	IV-44
4.2.6.	PENGLOLAAN KAWASAN KHUSUS	IV-59
4.2.7.	PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	IV-63

BAB V : PENUTUP V

LAMPIRAN-LAMPIRAN

REKAPITULASI REALISASI APBD KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024

(UNAUDITED) REALISASI ANGGARAN BELANJA MENURUT PERANGKAT DAERAH



BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAB III	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
BAB IV	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN
BAB V	PENUTUP
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan wujud demokrasi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan memberikan hak, pelimpahan kewenangan, dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, pelayanan publik dan daya saing daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk melakukan percepatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, otonomi daerah diharapkan dapat mendorong daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, kondisi daerah, kekhasan, dan potensi unggulan daerah.

Selain memberikan hak dan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa dan kepentingan sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 154 Ayat (1) mengamanatkan kepada kepala daerah untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tersebut mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tersebut disampaikan kepada DPRD setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Muara Enim berkewajiban untuk menyampaikan LKPJ Bupati Muara Enim Tahun 2025 kepada DPRD Kabupaten Muara Enim dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-



2029. RPJMDD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Muara Enim dalam kurun waktu 2025-2029.

Dalam proses pelaksanaannya, rencana dan program kerja yang dirancang oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan kecamatan-kecamatan yang ada di Muara Enim mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Namun, karena pada 19 Agustus 2025 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 telah disahkan, maka seluruh rencana dan program kerja yang dilaksanakan, berubah acuannya dengan berpedoman pada dokumen RPJMD. Maka acuan terhadap RPJMD ini baru mulai dilaksanakan pada 20 Agustus 2025.

Untuk itu, LKPJ Bupati Muara Enim merupakan informasi terhadap proses pencapaian kinerja dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029. LKPJ Bupati Muara Enim Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban terhadap awal periode perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029.

1.1 Dasar Hukum

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muara Enim Tahun 2025, disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6573).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 210 Tahun 2000);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2004), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2010);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2018; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6219);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781 Tahun 2020);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029;
23. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen LKPJ Bupati Muara Enim Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pengelolaan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025 (Unaudited), dengan menggunakan RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029 sebagai tolak ukur.



2. Membangun pemahaman bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang pengelolaan APBD selama tahun anggaran 2025 sekaligus sebagai bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja tahun anggaran berikutnya.
3. Memperoleh masukan dan umpan balik dari DPRD dalam rangka peningkatan pelayanan publik pada berbagai bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan ke masyarakat.

1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai uraian di atas untuk menentukan tujuan serta sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029 mempedomani Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Muara Enim ialah **Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan dengan tagline Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera “MEMBARA”**. Ada pun penjelasan dari visi tersebut ialah:

- **Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera** atau **MEMBARA** adalah seluruh pemangku kepentingan yang satu tekad secara bersama mengejar ketertinggalan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Muara Enim.
- **Bangkit** adalah ajakan untuk seluruh komponen masyarakat yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama membangun Muara Enim dan mengejar ketertinggalan dari berbagai sektor.
- **Sejahtera** adalah masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya secara berimbang jasmani dan rohani, meningkatnya perlindungan sosial, kualitas hidup dan lingkungannya, juga mampu memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan hidup lainnya, serta meningkatkan kemandirian fiskal untuk percepatan pembangunan daerah.
- **Maju** adalah terus mengalami kemajuan pembangunannya dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif, mengandalkan hilirisasi dan nilai tambah pertanian, pembangunan infrastruktur berkualitas dan merata, memiliki keunggulan dan mampu berkompetisi dengan daerah lain, ditandai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pelayanan publik, pengembangan inovasi daerah, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, serta menjunjung tinggi nilai agama dan budaya daerah.
- **Berkelanjutan** adalah berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan ekonomi sosial berkelanjutan yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup guna menjaga kelestarian lingkungan.



Sementara itu, penjabaran Misi Kabupaten Muara Enim ialah:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Mandiri dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif;
3. Meningkatkan Infrastruktur dan Suprarstruktur Dasar yang Unggul dan Merata;
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Memperkuat Ketahanan Bencana dan Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum;
5. Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, Kredibel dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik.

Ada pun masing-masing jabaran detail keterkaitan antara visi, mis dan sasaran RPJMD ialah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Visi, Misi, dan Tujuan RPJMD Kabupaten Muara Enim
Tahun 2025-2029**

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN		INDIKATOR
VISI: MUARA ENIM BANGKIT RAKYAT SEJAHTERA, MAJU DAN BERKELANJUTAN		
MISI 1: Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia Yang Mandiri dan Berdaya Saing		
1	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia
1.1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun
		Harapan Lama Sekolah
		Usia Harapan Hidup (UHH)
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
MISI 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Tangguh dan Inklusif		
1	Meningkatkan daya saing dan stabilitas ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi
1.1	Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis pengembangan potensi daerah	PDRB Per Kapita
2	Terwujudnya pemerataan pendapatan dan kesempatan ekonomi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini



VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN			INDIKATOR
	2.1	Menurunnya pengangguran dan peningkatan kualitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka
	2.2	Meningkatnya perlindungan sosial adaptif	Persentase Penduduk Miskin
MISI 3: Meningkatkan Infrastruktur dan Supratruktur Dasar yang Unggul dan Merata			
1	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur
	1.1	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas guna mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap
			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
MISI 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Memperkuat Ketahanan Bencana dan Menjamin Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Umum			
1	Meningkatkan kualitas dan ketahanan lingkungan hidup secara berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	1.1	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca secara berkelanjutan	Penurunan Emisi GRK Kumulatif
	Menurunkan risiko bencana melalui mitigasi yang efektif dan penguatan ketahanan daerah		Indeks Risiko Bencana (IRB)
	1.2	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah
	Meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	1.3	Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	Indeks Kota Toleran
MISI 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik			
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi



VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN			INDIKATOR
	1.1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP
	1.2	Meningkatnya kapasitas inovasi daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Inovasi Daerah
	1.3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif	Indeks Pelayanan Publik

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029



Sementara itu, tujuan dan sasaran Kepala Daerah sesuai dengan RPJMD Muara Enim 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
VISI: MUARA ENIM BANGKIT RAKYAT SEJAHTERA, MAJU, DAN BERKELANJUTAN											
MISI 1:	Terwujudnya		Indeks	Indeks	73,1	73,67	74,23	74,8	75,36	75,93	76,49
Meningkatkan	kualitas sumber		Pembangunan								
kualitas sumber	daya manusia		Manusia								
daya manusia	yang mandiri	Meningkatnya	Rata-rata lama	Tahun	8,27	8,39	8,51	8,63	8,75	8,87	8,99
yang Mandiri	dan berdaya	kualitas	sekolah								
dan	saing	sumber	penduduk								
Berdaya Saing		daya manusia	usia di atas 15								
		yang mandiri	tahun								
		dan berdaya	Harapan Lama								
		saing	Sekolah	Tahun	12,02	12,11	12,21	12,3	12,39	12,49	12,59
			Usia Harapan								
			Hidup (UHH)	Tahun	74,49	74,73	74,98	75,22	75,46	75,7	75,95
			Indeks								
			Ketimpangan								
			Gender (IKG)	Tahun	0,55	0,548	0,546	0,544	0,542	0,54	0,538
MISI 2:	Meningkatkan		Laju	Persen	5,89	7,01	7,44	7,65	7,96	8,28	8,6
Mewujudkan	daya saing dan		Pertumbuhan								
pertumbuhan	ekonomi		Ekonomi								
ekonomi	daerah	Meningkatnya									
daerah yang	stabilitas	perekonomian									
tangguh dan	ekonomi	masyarakat									
inklusi	daerah	berbasis									
		pengembangan									
		potensi daerah	PDRB Per Kapita	(Rp Juta)	182,11	193,73	199,92	205,92	211,92	217,92	223,92
			Indeks Gini	Angka	0,309	0,307	0,304	0,301	0,298	0,295	0,292



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI 3: Meningkatkan infrastruktur dan supratruktur dasar yang unggul dan merata	Terwujudnya pemerataan pendapatan dan kesempatan ekonomi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat	Menurunnya pengangguran dan peningkatan kualitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,09	3,88	3,76	3,69	3,61	3,54	3,46
		Meningkatnya perlindungan sosial adaptif	Persentase Penduduk Miskin	Persen	9,79	9,49	9,19	8,89	8,59	8,29	8
	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	3,36	3,6	3,71	3,83	3,95	4,07	4,19
	Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persen	94,72	95,35	95,98	96,61	97,23	97,86	98,48
		guna mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	95,44	96,44	97,44	97,72	98	98,28	98,56
MISI 4: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, memperkuat	Meningkatkan kualitas dan ketahanan lingkungan hidup secara berkelanjutan	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Angka Ton CO2 Ekuivalen	64,35 1.572.294	66,75 1.663.921	67 1.789.670	67,25 1.919.599	67,5 2.053.707	67,76 2.191.994	68,01 2.334.461



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
ketahanan bencana dan menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban umum	Menurunkan risiko bencana melalui mitigasi yang efektif dan penguatan ketahanan daerah	secara berkelanjutan	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	147,41	145,91	144,41	142,91	141,41	139,91	138,41
		Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,3	0,53	0,39	0,66	0,72	0,78	0,84
	Meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat		Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Nilai	n/a	50	55	60	65	70	75
		Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	Indeks Kota Toleran	Indeks	5,39	5,41	5,42	5,44	5,46	5,48	5,5
MISI 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	80,71	81	82	83	84	85	86
		Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai SAKIP	Nilai	76,51	77,01	77,51	78,01	78,51	79,01	80,5



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik	yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik	dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Angka	64,31	65,01	65,25	65,5	65,75	66,06	6,1
		Meningkatnya kapasitas inovasi daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik									
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,56	4,61	4,66	4,71	4,76	4,81	4,86

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2029



1.2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029. Ada pun rincian tersebut berdasarkan RPJMD 2025-2029 ialah:

Tabel 1.3 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Pendidikan yang Berkeadilan	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan secara proporsional pada setiap wilayah
			Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan	Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan penyempurnaan kurikulum
			Pemerataan akses dan mutu layanan dasar	Program guru daerah khusus (Gurdasus)
				Program beasiswa afirmatif untuk siswa miskin
				Kemitraan dengan universitas untuk sekolah vokasi
				Akselerasi transformasi digital di bidang pendidikan
			Memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah melalui peningkatan kompetensi	Fasilitasi pelatihan, pembinaan dan peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan daerah
				Pelatihan kewirausahaan pemuda
				Fasilitasi kapasitas pemuda dalam olahraga
			Meningkatkan pengarusutamaan gender	Peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) melalui



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				pelatihan kerja bagi perempuan
				Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan
				Pusat layanan terpadu korban kekerasan
			Meningkatkan pengendalian penduduk dan memperkuat ketahanan dan pemberdayaan keluarga	Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga
			Penguatan dan pembinaan pelaku sejarah lokal	Meningkatkan sumber daya manusia dalam pembinaan sejarah lokal
			Peningkatan perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan kebudayaan	Meningkatnya perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan kebudayaan
			Penguatan pelaku kesenian tradisional	Meningkatnya pengembangan kesenian tradisional
			Literasi kesehatan dan gaya hidup sehat	Penyediaan materi kesehatan dalam bahan ajar siswa
				Penguatan kebijakan tingkat daerah terkait gerakan aktivitas fisik dan penyediaan sarana olahraga
				Peningkatan kemandirian lansia
				Penerapan aktivitas fisik dan konsumsi sehat (labelling dan cukai makanan tinggi Gula Garam Lemak)



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Pelayanan promotif	Penguatan kesehatan ibu dan anak serta penurunan prevalensi stunting
				Pencegahan penyakit menular (Dengue, TB, malaria, AIDS, NTD) dan PTM
				Kampanye dan pembudayaan hidup sehat
				Penguatan upaya kesehatan jiwa
			Kesehatan preventif/detektif	Skrining kesehatan gratis (paket skrining ulang tahun) pada seluruh penduduk
				Perluasan cakupan imunisasi antigen baru
			Akses dan kualitas pelayanan primer	Penguatan fasyankes primer (sarana, prasarana, alkes, perbekalan kesehatan) sesuai standar
				Penerapan integrasi layanan primer
			Pengobatan dan intervensi lanjutan	Peningkatan RS kelas D/D pratama menjadi kelas C
				Penguatan 10 layanan penyakit prioritas Kanker, jantung, stroke, uronefrologi, KIA, TB dan respiratori, DM, Gastrohepatologi penyakit infeksi emerging, dan jiwa
				Penyiapan RS untuk Pendidikan residen berbasis RS



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan ketahanan sistem kesehatan domestik	Penguatan produksi dalam negeri untuk bahan baku obat, vaksin, dan alat kesehatan
				Pengawasan obat dan makanan yang bermutu dan aman
				Peningkatan kualitas lingkungan
			Memperkuat sistem tanggap darurat kesehatan nasional	Penguatan jaringan laboratorium
				Penguatan sistem kegawatdaruratan hingga tingkat daerah
				Peningkatan dan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan cadangan
			Tata kelola kesehatan	Peningkatan keselarasan kebijakan pusat dan daerah
				Tata Kelola pemerintahan yang baik
				Penguatan kerja sama lintas sektor domestik dan internasional
			Pembiayaan kesehatan	Sinergi dan konsolidasi berbagai sumber pendanaan kesehatan
				Peningkatan Investasi di sektor kesehatan
			Pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan	Peningkatan produksi SDM kesehatan melalui program beasiswa dan kerja sama lembaga pendidikan tinggi
				Pendidikan dokter spesialis berbasis RS



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Penugasan khusus tenaga kesehatan dan tenaga medis di DTPK dan DBK
				Peningkatan kapasitas SDM kesehatan melalui pelatihan teknis prioritas dan penunjang
			Teknologi dan data kesehatan digital	Integrasi data kesehatan dari seluruh fasyankes
				Pemanfaatan aplikasi kesehatan untuk pemantauan kesehatan bagi masyarakat
				Pembentukan Tim Percepatan Investasi Daerah (TPIDa)
				Penerapan <i>precision medicine</i> dan farmakogenetika
2	Meningkatkan daya saing dan stabilitas ekonomi daerah	Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis pengembangan potensi daerah	Meningkatkan ekosistem investasi hijau dan ekonomi kreatif	Pembentukan Tim Percepatan Investasi Daerah (TPIDa)
				Penerbitan investment prospectus tahunan sektor prioritas
				Deregulasi dan simplifikasi perizinan melalui OSS-RBA
				Peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif
			Mendorong industrialisasi yang ramah lingkungan	Fasilitasi kawasan industri terpadu ramah lingkungan
			Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan	Meningkatnya hasil produksi perikanan
			Meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi	Pengembangan PLTS komunal dan bioenergi desa



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			melalui optimalisasi pemanfaatan energi baru terbarukan	Rehabilitasi lahan eks tambang sesuai KLHS
				Edukasi transisi energi masyarakat
			Meningkatkan pertumbuhan industri kecil menengah	Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan industri
				Meningkatnya kualitas informasi industri
				Insentif fiskal daerah untuk UMKM hijau dan agroindustri
				Percepatan KPBU sektor prioritas
			Meningkatkan kesejahteraan petani pekebun	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perkebunan
				Penguatan pengendalian dan mitigasi bencana pertanian khususnya untuk perkebunan
				Meningkatnya kualitas petani pekebun dan kemudahan perizinan usaha pertanian
				Insentif industri pengolahan hasil pertanian/perkebunan
			Meningkatkan Produksi Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	Meningkatkan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian
				Meningkatnya Pengendalian Kesehatan hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner
				Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Meningkatnya penyuluhan pertanian
			Meningkatnya Pendapatan Sektor Perdagangan	Peningkatan Infrastruktur dan Efisiensi Distribusi Perdagangan
				Penguatan Mekanisme Pengendalian Harga dan Ketersediaan Barang
				Peningkatan Kualitas Produk dan Perlindungan Konsumen
				Optimalisasi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
				Peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif
			Meningkatkan pariwisata yang berbasis keunikan lokal dan berdaya saing	Promosi dan Pemasaran Pariwisata yang Inovatif dan Digitalisasi
			Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, Penguatan kapasitas fiskal daerah dan tata kelola keuangan	Optimalisasi aset dan intensifikasi PAD
				Reformasi belanja berbasis hasil (<i>outputbased budgeting</i>)
				Penyusunan <i>Fiscal Risk Analysis</i> tahunan
				Penilaian kinerja fiskal tahunan
			Meningkatkan kualitas koperasi dan UMKM yang berdaya saing	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan manajemen koperasi

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan saling membantu
				Meningkatnya kualitas dan iklim usaha yang kondusif bagi usaha mikro
				Mempromosikan pola konsumsi pangan yang beragam dan bergizi
				Kawasan industri mikro berbasis koperasi
			Meningkatkan kemandirian desa	Peningkatan kualitas pelayanan dan kelembagaan pemerintahan desa
3	Mewujudkan pemerataan pendapatan dan kesempatan ekonomi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat	Menurunnya pengangguran dan peningkatan kualitas tenaga kerja	Penguatan sistem perencanaan, penempatan, dan hubungan industrial yang mendukung penciptaan dan keberlanjutan tenaga kerja	Meningkatkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta meningkatkan stabilitas ketenagakerjaan
				Memperluas akses informasi pasar kerja dan meningkatkan layanan



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				penempatan tenaga kerja
				Mengembangkan sistem perencanaan tenaga kerja yang berbasis data dan kebutuhan industri agar lebih tepat sasaran
				Peningkatan kapasitas keahlian pekerja dari jalur formal dan non formal
		Meningkatnya perlindungan sosial adaptif	Penguatan sistem perlindungan sosial yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan melalui pemberdayaan, penanganan bencana, serta rehabilitasi sosial	Meningkatkan kapasitas kelompok rentan melalui pelatihan dan bantuan ekonomi berbasis komunitas
				Membangun cadangan pangan darurat dan mempercepat distribusinya bagi korban bencana
				Memperluas cakupan dan efektivitas program bantuan sosial bagi kelompok miskin dan rentan
				Mengembangkan layanan rehabilitasi sosial terpadu bagi penyandang disabilitas, lansia, dan korban kekerasan
				Pendataan terpadu kemiskinan ekstrem

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Penguatan sistem ketahanan pangan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi, keamanan, dan diversifikasi pangan	Meningkatkan pemantauan dan intervensi kewaspadaan terhadap rawan pangan
				Meningkatkan kualitas pengawasan keamanan pangan
				Hilirisasi dan infrastruktur irigasi
				Meningkatnya infrastruktur pangan dalam mencapai ketahanan pangan daerah
4	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas guna mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat	Meningkatkan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berkualitas	Meningkatnya penyelenggaraan dan pengendalian dalam pemanfaatan tata ruang dan bangunan gedung
				Memberikan akses pelayanan sanitasi yang layak bagi masyarakat
				Peningkatan Ketersediaan dan Akses Air Minum Berkualitas
				Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Jasa Konstruksi
				Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan
				Integrasi pembangunan infrastruktur dengan RTRW dan RPJPD
			Pengembangan jalan strategis kawasan dan	Revitalisasi infrastruktur jalan strategis



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			infrastruktur digital	Percepatan pembangunan akses ke kawasan produksi
				Penyusunan Masterplan Infrastruktur Digital Desa
			Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan optimalisasi kawasan permukiman yang berkelanjutan	Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan permukiman layak huni yang nyaman dan sehat
				Meningkatkan kualitas kawasan permukiman
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca secara berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan	Meningkatkan kualitas air dan udara
				Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan
			Mendorong pengembangan energi bersih dan pemulihan lingkungan pasca tambang	Penyusunan peta jalan transisi energi daerah
				Pengembangan PLTS atap, PLTBm, dan bioenergi berbasis masyarakat
6	Menurunkan risiko bencana melalui mitigasi yang efektif dan penguatan ketahanan daerah	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Meningkatkan manajemen dan koordinasi bencana pada tahap pra bencana darurat bencana dan pasca bencana	Rehabilitasi lahan bekas tambang
				Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Bencana melalui kemitraan multi pihak dan penataan kelembagaan penanggulangan bencana



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Meningkatkan kualitas pelayanan pemadam dan penyelamatan kebakaran	Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan non-kebakaran yang tangguh, cepat, dan efektif
7	Meningkatkan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	Meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam menjalankan ibadah	Meningkatkan rasa aman, demokratis dan partisipasi masyarakat
			Meningkatkan ketenteraman, keamanan dan ketertiban masyarakat	Penyelesaian penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
8	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Meningkatnya Keselarasan antar dokumen perencanaan
				Meningkatnya hasil evaluasi sebagai bahan dalam perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan
			Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	Integrasi SAKIP, RB, dan SIPD berbasis kinerja
			Meningkatkan kualitas pengawasan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan
		Meningkatnya kapasitas inovasi daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatnya efisiensi pelayanan publik	Pelayanan publik berbasis aplikasi (digitalisasi pelayanan publik)



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			Penguatan pemanfaatan hasil riset dan inovasi	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah
				Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan
		Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif	Meningkatkan pelayanan publik yang cepat, mudah dan profesional	Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas
				Meningkatnya kualitas pelayanan DRPD kepada masyarakat
				Meningkatnya efektivitas administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan
			Peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis SPBE dan data terbuka	Penerapan Perpres No. 95/2018 tentang SPBE secara penuh
				Pembangunan pusat data lokal dan dashboard pelayanan publik
				Penguatan sistem informasi daerah - Integrasi eplanning, ebudgeting, dan e- SAKIP
			Penguatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan	Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDM Aparatur agar lebih profesional, inovatif, dan berorientasi pada



No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				pelayanan masyarakat
			Meningkatnya Indeks Literasi Masyarakat dan Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Meningkatkan kualitas pelayanan dalam mendukung peningkatan literasi masyarakat dan kegemaran membaca
				Mengembangkan kebijakan dan teknologi pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno
				Mewujudkan sistem pengelolaan arsip yang profesional, terstandarisasi, dan berbasis digital
				Memperkuat kebijakan, teknologi, dan sinergi antar instansi dalam perlindungan serta penyelamatan arsip

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Muara Enim 2025-2029

Sedangkan tema pembangunan Kabupaten Muara Enim periode 2025-2029, antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.4 Tema Pembangunan RPJMDD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029

Tahun	Tahap Pembangunan	Tema Pembangunan
Tahap I 2026	Percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif dan peningkatan kualitas pelayanan dasar	Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar
Tahap II 2027	Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemantapan pelayanan publik	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Memantapkan Kualitas Pelayanan Publik



Tahun	Tahap Pembangunan	Tema Pembangunan
Tahap III 2028	Pemerataan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah	Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dan Meningkatkan Daya Saing Daerah
Tahap IV 2029	Pemantapan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah	Memantapkan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Daerah
Tahap V 2030	Perwujudan Kabupaten Muara Enim Bangkit dan Sejahtera “Membara”	Mewujudkan Kabupaten Muara Enim Bangkit dan Sejahtera “Membara”

Sumber: Dokumen RPJMD Kabupaten Muara Enim 2025-2029

1.3 Data Umum Daerah

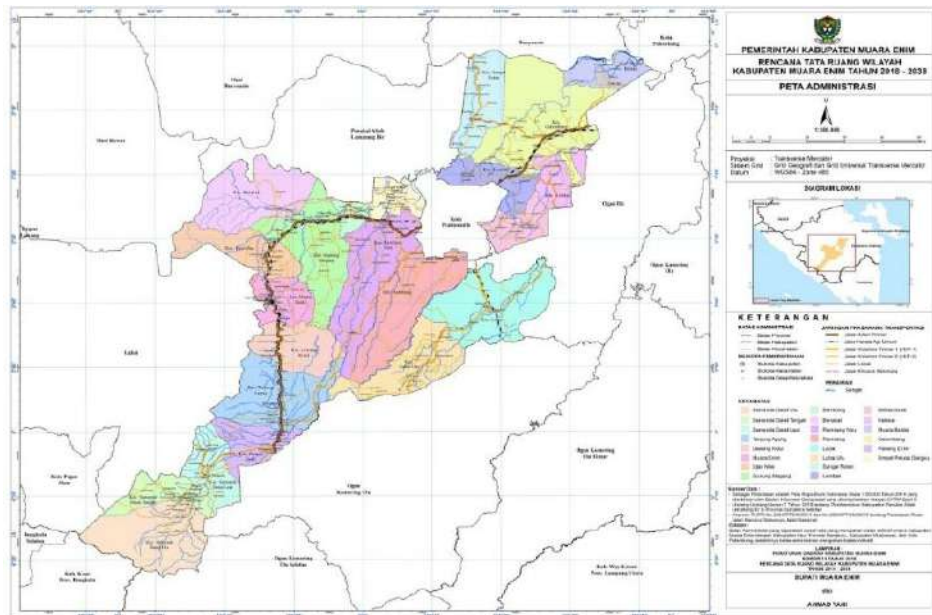
1.3.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Muara Enim saat ini merupakan 1 (satu) dari 17 (tujuh belas) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, secara geografis terletak antara 103°18'57" - 104°40'37", Bujur Timur dan 3°3'40" - 4°22'39", Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Muara Enim ialah 7.383,90 km² terletak di tengah-tengah wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, dan Kota Prabumulih.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kota Prabumulih.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Prabumulih, dan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, dan Kota Prabumulih.



Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Muara Enim



Sumber : RTRW Kabupaten Muara Enim, 2018-2038

Kabupaten Muara Enim secara administratif terdiri atas 22 kecamatan, 246 desa definitif dan 10 kelurahan, dengan ibu kota kabupaten terletak di Kecamatan Muara Enim. Dari 22 kecamatan tersebut, ada 3 kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Gelumbang seluas 724,05 km² atau sebesar 9,81%, Kecamatan Rambang Niru seluas 535,82 km² atau 7,26% dan Kecamatan Tanjung Agung seluas 517,10 km² atau 7,00%.

Berdasarkan topografi, wilayah Kabupaten Muara Enim sebagian besar kecamatan berada di daerah dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 100 meter di atas permukaan laut yang meliputi 11 (sebelas) kecamatan dengan cakupan luas mencapai 3.733,25 km² atau 50,6% dari luas Kabupaten Muara Enim. Sebelas Kecamatan lainnya berada pada ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan laut (mdpl). Lebih rinci, tinggi rata-rata, luas daerah dan jumlah desa/kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Muara Enim, sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1.5 Tinggi Rata-Rata, Luas Daerah dan Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Muara Enim

No.	Kecamatan	Tinggi Rata-Rata dpl (m)	Luas Daerah (km ²)	Persentase thd Luas Kab.(%)	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Semende Darat Ulu	900 - 2.800	488,18	6,61	10
2	Semende Darat Tengah	600 - 1.200	192,64	2,61	12

No.	Kecamatan	Tinggi Rata-Rata dpl (m)	Luas Daerah (km ²)	Persentase thd Luas Kab.(%)	Jumlah Desa/ Kelurahan
3	Semende Darat Laut	500 - 1.400	269,14	3,64	10
4	Tanjung Agung	0 - 1.000	517,10	7,00	14
5	Lawang Kidul	0 - 1.200	287,26	3,89	7
6	Muara Enim	0 - 200	191,50	2,59	16
7	Ujan Mas	0 - 200	311,33	4,22	9
8	Benakat	<100	453,75	6,15	6
9	Gunung Megang	<100	471,36	6,38	13
10	Rambang Niru	0 - 200	535,82	7,26	16
11	Lubai	<100	531,46	7,20	10
12	Rambang	0 - 200	496,85	6,73	13
13	Lembak	<100	205,72	2,79	10
14	Kelekar	<100	158,60	2,15	7
15	Gelumbang	<100	724,05	9,81	23
16	Sungai Rotan	<100	344,14	4,66	19
17	Muara Belida	<100	204,67	2,77	8
18	Belimbing	<100	130,61	1,77	10
19	Belida Darat	<100	370,54	5,02	10
20	Lubai Ulu	0 -200	162,88	2,21	11
21	Empat Petulai Dangku	<100	138,35	1,87	10
22	Panang Enim	100 - 1.100	197,95	2,68	12
Total			7.383,90	100	256

Sumber : RPJMD Kabupaten Muara Enim 2025-2029

1.3.2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim pada tahun 2025 ialah 660.533 jiwa. Jika dilihat dari kelompok umur, penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun) mencapai 455.083 jiwa atau 68,9% dari jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim. Penduduk dengan usia produktif mengalami peningkatan setiap tahunnya, jika ditelaah dari tahun-tahun sebelumnya, maka terjadi peningkatan sebanyak 0,29% dari tahun 2023 ke tahun 2024, dan terjadi pula peningkatan sebanyak 0,75% dari tahun 2024 ke 2025.

Sementara, untuk penduduk usia 0-14 tahun berjumlah 161.130 jiwa atau 24,39% dari keseluruhan penduduk Muara Enim. Angka ini mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir, yang mana persentase jumlah penduduk usia tersebut di tahun 2023 ialah sebesar 26,41% kemudian turun sebanyak 0,58% menjadi 25,83% di tahun 2024, dan masih mengalami penurunan sebanyak 1,44% menjadi 24,39% di tahun 2025.



Ada pun jumlah penduduk usia 65 tahun ke atas ialah 44.320 jiwa atau 6,71% dari keseluruhan penduduk Muara Enim, angka ini juga mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, yang mana dari tahun 2023 ke tahun 2024 meningkat sebanyak 0,29% dan dari tahun 2024 ke tahun 2025 meningkat sebanyak 0,69%. Ada pun jabaran mengenai jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim ialah sebagai berikut:

Tabel 1.4 Tabel Persentase Penduduk Kabupaten Muara Enim Menurut Kelompok Umur Tahun 2023-2025

No.	Kelompok Umur (Tahun)	2023		2024		2025	
		Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%
1	0 – 14	169.070	26,41	168.868	25,83	161.130	24,39
2	15 – 64	434.455	67,86	445.521	68,15	455.083	68,9
3	65 +	36.699	5,73	39.342	6,02	44.320	6,71
Total		640.224	100,00	653.731	100,00	660.533	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim 2026

Jika dilihat dari persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha/sektor ekonomi, di tahun 2025 jumlah penduduk di Kabupaten Muara Enim yang bekerja ialah sebanyak 28.792 jiwa. Sebanyak 48,87% penduduk Kabupaten Muara Enim bekerja pada sektor primer (sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan pertambangan). Penduduk yang bekerja di sektor sekunder seperti di bagian manufaktur dan konstruksi sebesar 9,3%, sedangkan penduduk yang bekerja di sektor tersier seperti di bidang jasa, keuangan, dan transportasi ialah sebesar 41,83%. Ada pun jabaran mengenai persentase penduduk Kabupaten Muara Enim yang bekerja menurut lapangan usaha tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.5. berikut:

Tabel 1.5 Persentase Penduduk Kabupaten Muara Enim yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024-2025

No.	Lapangan Usaha	2024		2025	
		Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%
1	Pertanian, Peternakan, dan Perikanan	3.925	7,85	3.480	12,09
2	Pertambangan dan Penggalan	11.914	23,828	10.590	36,78
3	Industri Pengolahan	3.637	7,274	1.731	6,01



No.	Lapangan Usaha	2024		2025	
		Jumlah (Jiwa)	%	Jumlah (Jiwa)	%
4	Listrik, Gas, dan Air	1.117	2,234	643	2,23
5	Bangunan	3.309	6,618	37	0,13
6	Perdagangan Besar	3.452	6,904	268	0,93
7	Angkutan, Perdagangan, dan komunikasi	1.928	3,856	953	3,31
8	Kuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan	20.718	41,436	11.090	38,52
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan				
Total		50.000	100	28.792	100

Sumber : Kabupaten Muara Enim Dalam Angka 2026

Selain itu, komposisi penduduk jika dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan berdasarkan data terakhir tahun 2025, sebanyak 37,54% penduduk di Kabupaten Muara Enim belum/tidak bersekolah, angka ini naik sebesar 0,26% dari tahun sebelumnya yang mana di tahun 2024 penduduk Muara Enim yang belum/tidak bersekolah ialah 37,28%. Persentase terbesar selanjutnya ialah sebanyak 19,49% penduduk di Muara Enim telah menamatkan SD/Sederajat, angka ini turun dari tahun sebelumnya sebanyak 0,25% yang mana di tahun sebelumnya penduduk Muara Enim yang telah menamatkan SD/Sederajat ialah sebesar 19,74%. Angka tertinggi ketiga dari segi pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk Muara Enim ialah sebanyak 17,69 penduduk Muara Enim telah menamatkan pendidikan SLTA/ sederajat, angka ini naik sebesar 0,14% dari angka sebelumnya yang mana di tahun 2024 penduduk Muara Enim yang telah menamatkan SLTA/Sederajat ialah sebesar 17,55%. Ada pun detail jabaran mengenai data tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 1.6 Data Pendidikan Penduduk Muara Enim Tahun 2023-2025

No	Pendidikan	Tahun 2024				Tahun 2025			
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Tidak/Belum Sekolah	124.892	118.813	243.705	37,28	127.196	120.790	247.986	37,54



No	Pendidikan	Tahun 2024				Tahun 2025			
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	34.675	32.765	67.440	10,32	34.482	32.606	67.088	10,16
3	Tamat SD/Sederajat	62.465	66.561	129.026	19,74	62.272	66.434	128.706	19,49
4	SLTP/Sederajat	35.611	33.283	68.894	10,54	35.709	33.450	69.159	10,47
5	SLTA/Sederajat	63.733	51.020	114.753	17,55	64.889	51.979	116.868	17,69
6	Diploma I/II	1.175	1.854	3.029	0,46	1.160	1.836	2.996	0,45
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	2.422	4.722	7.144	1,09	2.464	4.822	7.286	1,10
8	Diploma IV/Strata I	8.167	10.770	18.937	2,90	8.378	11.227	19.605	2,97
9	Strata II	398	367	765	0,12	417	382	799	0,12
10	Strata III	22	16	38	0,01	23	17	40	0,01
Total		333.560	320.171	653.731	100	336.990	323.543	660.533	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim 2026

1.3.3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Secara umum potensi unggulan daerah Kabupaten Muara Enim lebih didominasi sektor primer yaitu sektor pertanian (perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan), kehutanan, pertambangan, dan energi.

Potensi Perkebunan

Sektor Perkebunan merupakan sektor unggulan Kabupaten Muara Enim yang masih perlu ditingkatkan untuk mendorong percepatan pembangunan. Selain berkontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi, sektor perkebunan juga berkontribusi dalam mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Muara Enim, melalui pembukaan lapangan kerja baru di sektor perkebunan. Komoditas perkebunan yang menjadi produk unggulan di Kabupaten Muara Enim ialah komoditas karet, sawit dan kopi. Dari ketiga komoditas unggulan tersebut, komoditas sawit memiliki lahan terluas dibandingkan komoditas kopi dan karet. Total luas lahan karet pada tahun 2025 seluas 1.094.237,33 Ha, total luas lahan kopi ialah 68.817.5 Ha, sementara total luas lahan sawit ialah 1.722.989,72 Ha. Ada pun jabaran dari produktivitas sektor perkebunan tersebut ialah sebagai berikut:



**Tabel 1.7 Produktivitas Sektor Perkebunan
di Kabupaten Muara Enim Tahun 2023-2025**

URAIAN	TAHUN		
	2023	2024	2025
Luas Tanaman (Rakyat, Negara dan Swasta)			
Karet (Ha)	154.795,75	154.795,75	154.795,75
Kopi (Ha)	23.725,50	23.725,50	23.725,50
Sawit (Ha)	79.584,20	79.584,20	79.584,20
Jumlah Produksi (Rakyat, Negara dan Swasta)			
Karet (Ton)	857.986,67	859.721,08	859.777,58
Kopi (Ton)	29.314,00	29.505,95	29.560,00
Sawit (Ton)	1.630.288,17	1.630.749,80	1.630.921,52
Jumlah Petani Perkebunan Rakyat			
Karet (KK)	79.664,00	79.664,00	79.664,00
Kopi (KK)	15.532,00	15.532,00	15.532,00
Sawit (KK)	12.484,00	12.484,00	12.484,00

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim, Tahun 2026

Potensi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pembangunan di sektor tanaman pangan dan hortikultura diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Muara Enim yang masih berfokus kepada sektor primer. Peningkatan dan percepatan potensi unggulan di bidang tanaman pangan dan hortikultura diharapkan dapat mendorong pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan kesejahteraan masyarakat petani. Adapun komoditas yang dominan dikembangkan di Kabupaten Muara Enim adalah padi (padi sawah, ladang, dan lebak) dengan daerah produksi antara lain di dataran tinggi Semende, Kecamatan Tanjung Agung, Kecamatan Muara Belida, Kecamatan Sungai Rotan dan beberapa Kecamatan di pesisir Sungai Lematang.

Pada tahun 2025 luas lahan padi di Kabupaten Muara Enim adalah 19.527 Ha, dengan produksi sekitar 206.613,43 Ton GKP. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, luas lahan padi tahun ini lebih besar 1.062,97 Ha. Karena itu hasil panen padi tahun ini cenderung mengalami peningkatan sebesar 1,47%.

Komoditas lainnya selain padi juga mengalami peningkatan jumlah produksi. Komoditas produksi sayuran tahun 2025 mencapai 14.129 Ton, jumlah ini meningkat sebanyak 8,16% dari tahun sebelumnya. Kemudian, produksi komoditas buah-buahan juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun



lalu. Tahun 2024, jumlah produksi komoditas buah ialah 13.075 Ton dan pada tahun 2025 jumlah ini mencapai 13.747.7 Ton. Artinya, produksi komoditas buah-buahan mengalami peningkatan sebanyak 4,89% dari tahun sebelumnya.

**Tabel 1.8 Potensi dan Produksi Pertanian
di Kabupaten Muara Enim Tahun 2023-2025**

No.	Potensi Pertanian	Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Luas Lahan Padi	18.464,03	18.464,03	19.527,00
2.	Produksi Padi	200.022,34	203.557,28	206.613,43
3.	Produksi Komoditas Sayuran (Kentang, Cabai, Tomat)	11.889,2	12.975	14.129,3
4.	Produksi Komoditas Buah-Buahan (Alpukat, Duku, Durian, Sawo)	12.397,5	13.075	13.747,7

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim, Tahun 2026

Potensi Kehutanan

Selain potensi perkebunan, tanaman pangan, dan hortikultura, sektor kehutanan yang ada di Kabupaten Muara Enim merupakan potensi yang dapat diolah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Luas areal hutan di Kabupaten Muara Enim saat ini ialah sebesar 254.059,04 Ha. Kawasan hutan yang terluas adalah Hutan Produksi Tetap dengan luas 152.552,8 Ha. Rincian luas kawasan hutan di Kabupaten Muara Enim dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 1.9 Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Muara Enim

URAIAN	LUAS KAWASAN HUTAN (Ha)
Hutan Tetap	
1) Suaka Alam dan Pelestarian Alam	8.702,2
2) Hutan Lindung	57.742
3) Hutan Produksi Terbatas	26.440,03
4) Hutan Produksi Tetap	152.552,8
5) Hutan Produksi Dapat Dikonversi	8.622,01
JUMLAH	254,059,04

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim 2026



Potensi Peternakan

Potensi peternakan di Kabupaten Muara Enim terdiri dari jenis ternak besar (sapi dan kerbau) dan ternak kecil (kambing, domba, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam kampung, dan itik). Secara umum produksi daging ternak dan unggas mengalami di Muara Enim selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Namun, persentase peningkatan produksi tertinggi terjadi pada produksi ayam ras pedaging yang mana pada tahun 2025 jumlah produksinya mencapai 7.099,97 Ton, artinya jumlah produksi ini naik sebesar 97,74 Ton dari tahun sebelumnya. Ada pun jabaran mengenai hal ini ialah sebagai berikut:

Tabel 1.10 Produksi Daging Ternak dan Unggas di Kabupaten Muara Enim Tahun 2023-2025 (Ton)

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Sapi	1125,31	1129,36	1187,14
2.	Kerbau	305,05	315,15	385,25
3.	Kambing	66,75	73,24	77,72
4.	Domba	20,46	30,36	35,88
5.	Ayam Kampung	2240,79	2295,37	23,66
6.	Ayam Ras Petelur	259,55	266,47	302,78
7.	Ayam Ras Pedaging	6754,27	7002,23	7099,97
8.	Itik	268,02	270,23	280,36

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim, Tahun 2026

Potensi Perikanan

Potensi perikanan di Kabupaten Muara Enim cukup besar, baik usaha perikanan di perairan umum maupun budidaya ikan di kolam dan keramba. Pada sektor perikanan darat, produksi perikanan darat sedikit mengalami peningkatan, produksi ikan darat tangkap pada tahun 2024 sebesar 3.484,26 ton dan pada tahun 2025 sebesar 3.516,68 ton. Sedangkan pada sektor perikanan budidaya, jumlah produksi pada tahun 2024 sebesar 9.245,41 ton dan meningkat menjadi 9.625.9 ton pada tahun 2025.



**Tabel 1.11 Produksi Perikanan di Kabupaten Muara Enim
Tahun 2023-2025 (Ton)**

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1.	Perikanan Tangkap	1,03 (3.456,94 Ton)	1,00 (3.484,26 Ton)	1,01 (3.516,68 Ton)
2.	Perikanan Budidaya	4,00 (8.545,77 Ton)	4,16 (9.245,41 Ton)	4,17 (9.625,90 Ton)
3.	Produk Hasil Olahan Perikanan	6,86 (968,92 Ton)	7,31 (1.135,98 Ton)	7,31 (1.214,19 Ton)

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim, Tahun 2026

Potensi Pertambangan dan Energi

Potensi di bidang pertambangan dan energi yang begitu besar di Kabupaten Muara Enim, menjadikan sektor pertambangan dan energi memegang peran yang strategis dalam pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Jika dilihat dari persentase perkembangan peranan kategori pertambangan dan penggalian masih memegang peran dominan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Muara Enim, meskipun peranan sektor tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Selain bahan tambang minyak bumi, gas bumi dan batubara, sektor galian golongan C juga berperan dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muara Enim. beberapa jenis bahan galian seperti batu pecah, pasir pasangan, batu kali, batu koral, pasir sungai, dan kerikil sungai merupakan komoditas yang dihasilkan dari bahan galian golongan C dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

**Tabel 1.12 Jumlah Produksi Bahan Galian Golongan C Dalam
Kabupaten Muara Enim Tahun 2023-2025**

No.	Jenis Bahan	Satuan Unit	Produksi		
			2023	2024	2025
1.	Batu Kali	m ³	25.263,422	30.878,758	25.955,14
2.	Batu Koral (Kerikil Sungai)	m ³	27.589,03	1.590,29	183,84
3.	Kerikil Sungai dan Pasir (Krokos)	m ³	510,44	34.683,708	37.451,86



No.	Jenis Bahan	Satuan Unit	Produksi		
			2023	2024	2025
4.	Batu Pecah Crusher I Uk. (6-20)	m ³	32.828,67	-	30,46
5.	Batu Pecah Crusher I Uk. (2-6)	m ³	15.085,15	-	-
6.	Batu Pecah Crusher I Uk. (0-2)	m ³	15.447,39	-	-
7.	Batu Pecah Crusher II Uk. (0-1)	m ³	58.106,07	-	-
8.	Batu Pecah Crusher II Uk. (2-3)	m ³	82.559,36	-	-
9.	Batu Pecah Crusher II Uk. (3-5)	m ³	11.715,79	-	-
10.	Batu Pecah Crusher II Uk. (5-7)	m ³	966,58	-	164,90
11.	Batu Pecah Crusher II Uk. (7-20)	m ³	35.555,85	951,54	0,39
12.	Andesit	m ³	396.002,161	816.129,495	869.117,87
13.	Batu Pecah Non Crusher	m ³	43.409,45	-	632,16
14.	Pasir Urug	m ³	35.953,647	48.795,074	33.793,13
15.	Pasir Pasangan	m ³	469.169,108	541.881,301	667.448,08
16.	Sirtu (Tidak Diayak)	m ³	41,22	1.878,894	1.247,37
17.	Bahan Timbunan Pilihan/Tanah	m ³	15.320,62	32.555,96	415,21
18.	Tanah Liat	m ³	70.241,996	75.302,473	176,33
19.	Bolder +	m ³	12.286,52	-	-
20.	Bolder -	m ³	24.884	-	1.020,44

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2026



a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kabupaten Muara Enim secara umum masih menunjukkan ciri struktur primer atau struktur ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Sampai tahun 2025 perekonomian Kabupaten Muara Enim masih mengandalkan sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor pertanian, dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ada pun jabaran mengenai hal yang berkaitan dengan PDRB ialah sebagai berikut:

Tabel 1.13 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Muara Enim Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024-2025 (Rp. Juta)

No	Lapangan Usaha	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.307,54	4.995,57	8.374,34	5.242,39
2	Pertambangan dan Penggalian	81.223,87	35.775,78	88.849,68	37.596,28
3	Industri Pengolahan	11.421,40	5.805,94	12.514,89	6.139,10
4	Pengadaan Listrik dan Gas	124,38	69,88	134,84	74,30
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18,38	10,36	19,28	10,47
6	Konstruksi	3.858,33	2.239,76	4.244,26	2373,06
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.855,77	2.831,03	7.573,56	3.111,03
8	Transportasi dan Pergudangan	1.334,81	583,17	1.454,65	618,01
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	460,68	230,05	560,56	251,65
10	Informasi dan Komunikasi	579,14	413,22	629,98	437,95
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	383,14	253,31	428,99	263,82
12	Real Estate	857,02	474,69	957,26	512,38
13	Jasa Perusahaan	12,31	6,58	13,20	6,94
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	842,05	684,39	911,30	692,02
15	Jasa Pendidikan	913,17	624,56	964,60	649,81



No	Lapangan Usaha	Tahun 2024		Tahun 2025	
		Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	333,86	191,62	351,45	200,77
17	Jasa Lainnya	198,56	115,03	213,49	120,21
	Produk Domestik Regional Bruto	116.724,41	55.304,93	128.196,33	58.300,21

Sumber : Kabupaten Muara Enim Dalam Angka 2026

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Muara Enim ialah berasal dari sektor pertambangan yang mana 37.596,28 merupakan harga konstan PDRB pada sektor pertambangan dan 88.849,68 merupakan harga baku dari PDRB tersebut. Ada pun jabaran mengenai distribusi persentase dari masing-masing PDRB tersebut menurut lapangan usaha di Muara Enim akan dijabarkan sebagaimana Tabel 1.14 berikut:

Tabel 1.14 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Muara Enim (persen), tahun 2024-2025

No	Lapangan Usaha	Tahun	
		2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6,26	6,53
2	Pertambangan dan Penggalian	69,59	69,31
3	Industri Pengolahan	9,78	9,76
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02
6	Konstruksi	3,31	3,31
7	Perdagangan Besar dan Eceran	5,87	5,91
8	Transportasi dan Pergudangan	1,14	1,13
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,39	0,44
10	Informasi dan Komunikasi	0,5	0,49
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,33	0,33
12	Real Estat	0,73	0,75
13	Jasa Perusahaan	0,01	0,01
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,72	0,71
15	Jasa Pendidikan	0,78	0,75



No	Lapangan Usaha	Tahun	
		2024	2025
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,29	0,27
17	Jasa Lainnya	0,17	0,17
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100

Sumber : Kabupaten Muara Enim Dalam Angka 2026

Dari data di atas terlihat bahwa sektor pertambangan menyumbang sebesar 69,31% PDRB di Kabupaten Muara Enim, angka ini turun sebanyak 0,38% dari tahun sebelumnya yang mana di tahun 2024 sektor pertambangan menjadi penyumbang PDRB terbesar di Muara Enim dengan persentase yang mencapai 69,69%. Sektor penyumbang PDRB terbesar lainnya ialah sektor industri pengolahan sebanyak 9,76% di tahun 2025 dan 9,78% di tahun 2024 artinya sektor ini mengalami penurunan sebanyak 0,02% dari tahun sebelumnya. Sektor penyumbang PDRB terbesar berikutnya ialah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan persentase sebesar 6,53%, angka ini juga mengalami kenaikan sebesar 0,27% dari tahun sebelumnya, yang mana di tahun 2024 sektor ini hanya menyumbang 6,26% PDRB di Muara Enim.

Perekonomian Kabupaten Muara Enim tahun 2025 tumbuh dengan laju 5,42%, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka laju pertumbuhan ekonomi ini mengalami penurunan sebanyak 0,67%. Sektor yang mengalami penurunan tertinggi ialah sektor pertambangan dan penggalian, di mana laju pertumbuhan PDRB pada tahun ini hanya 6,74%, artinya angka ini turun sebanyak 0,38% dari tahun 2024. Sementara itu, laju pertumbuhan PDRB tertinggi terjadi pada sektor real estate yang mencapai 0,75% di tahun 2025, sementara di tahun 2024 laju PDRB di sektor ini hanya mencapai 0,73%, artinya angka ini naik sebesar 0,02%, laju pertumbuhan PDRB terbesar lainnya terjadi pula di sektor jasa pendidikan yang naik sebesar 6,06% dari tahun sebelumnya, ada pun jabaran mengenai hal tersebut akan dijabarkan pada berikut:

Tabel 1.15 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Muara Enim (persen) tahun 2024–2025

No	Lapangan Usaha	Tahun	
		2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3	4,94
2	Pertambangan dan Penggalian	6,74	5,09
3	Industri Pengolahan	3,21	5,74
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,61	6,32



No	Lapangan Usaha	Tahun	
		2024	2025
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,71	1,05
6	Konstruksi	4,95	5,95
7	Perdagangan Besar dan Eceran	4,89	9,89
8	Transportasi dan Pergudangan	8,17	5,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,03	9,39
10	Informasi dan Komunikasi	7,34	5,98
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,58	4,15
12	Real Estate	8,91	7,94
13	Jasa Perusahaan	5,7	5,54
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,35	1,11
15	Jasa Pendidikan	8,2	4,04
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,35	4,78
17	Jasa Lainnya	4,53	4,51
	Produk Domestik Regional Bruto	5,89	5,42

Sumber : Kabupaten Muara Enim Dalam Angka 2026

b. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Muara Enim pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi sebesar 660.533 ribu jiwa dari jumlah penduduk sebesar 653.731 ribu jiwa pada tahun 2024. Ada pun jabaran mengenai hal tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 1.17 Jumlah Penduduk Kabupaten Muara Enim Menurut Kecamatan (Ribu Jiwa) Tahun 2023-2025

No.	Kecamatan	2023	2024	2025
1.	Semende Darat Laut	29.877	30.499	30.756
2.	Semende Darat Ulu	79.512	82.415	83.633
3.	Semende Darat Tengah	35.067	35.671	36.096
4.	Tanjung Agung	35.834	36.311	36.567
5.	Panang Enim	63.560	65.032	65.613
6.	Rambang	76.102	77.987	78.893



No.	Kecamatan	2023	2024	2025
7.	Lubai	15.346	15.803	16.047
8.	Lubai Ulu	11.436	11.598	11.700
9.	Lawang Kidul	18.204	18.782	19.052
10.	Muara Enim	26.948	27.324	27.488
11.	Ujan Mas	27.538	28.010	28.302
12.	Gunung Megang	28.719	29.180	29.454
13.	Benakat	33.175	33.889	34.193
14.	Belimbing	19.892	20.103	20.242
15.	Rambang Niru	10.549	10.732	10.904
16.	Empat Petulai Dangku	11.730	11.874	12.000
17.	Gelumbang	8.276	8.430	8.512
18.	Lembak	26.833	27.194	27.349
19.	Sungai Rotan	13.504	13.626	13.792
20.	Muara Belida	34.231	35.128	35.657
21.	Kelekar	20.552	20.694	20.822
22.	Belida Darat	13.339	13.449	13.461
Total		640.224	653.731	660.533

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2026

c. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN)

Jumlah pegawai ASN di Kabupaten Muara Enim terdiri dari 5.986 PNS dan 8030 PPPK. Ada pun pendistribusian jumlah pegawai tersebut akan dijabarkan melalui tabel berikut:



**Tabel 1.18 Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kabupaten Muara Enim Tahun 2025**

NO	DINAS		GOLONGAN				JUMLAH
			I	II	III	IV	
I	SEKRETARIAT DAERAH			7	112	17	136
II	SEKRETARIAT DEWAN			9	28	3	40
III	DINAS - DINAS						
	1	DINAS PERKEBUNAN + UPT		3	32	12	47
	2	DINAS PERDAGANGAN + UPT		5	26	5	36
	3	DINAS KESEHATAN + UPT + PUSKESMAS		226	957	45	1228
	4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN + UPT + SKB + GURU	1	74	1643	76	2444
	5	DINAS PERHUBUNGAN + UPT		6	27	4	37
	6	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		2	24	7	33
	7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		2	31	4	37
	8	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA + UPT		226	957	45	1228
	9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN + UPT		6	13	2	21
	10	DINAS PERIKANAN + UPT		2	26	2	30
	11	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN + UPT		18	92	32	142
	12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		4	31	7	42
	13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP + UPT	1	16	32	7	59
	14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		2	26	3	31
	15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		1	27	10	38
	16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG + UPT		6	62	7	75
	17	DINAS SOSIAL + UPT		1	14	4	19
	18	DINAS KETENAGAKERJAAN + UPT		4	34	5	43
	19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		2	29	7	38
	20	DINAS KETAHANAN PANGAN		3	15	6	24



NO	DINAS		GOLONGAN				JUMLAH
			I	II	III	IV	
	21	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		11	35	4	50
	22	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		1	18	3	22
	23	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		1	25	5	31
	24	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		2	15	4	21
IV	BADAN-BADAN						
	1	INSPEKTORAT		1	47	24	72
	2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		1	28	7	36
	3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		9	40	4	53
	4	BADAN PENDAPATAN DAERAH + UPT		13	54	9	76
	5	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			15	6	21
	6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA + UPT		6	32	5	43
	7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		2	18	3	23
	8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		3	18	1	22
V	KANTOR-KANTOR						
	1	RSUD DR.H.M.RABAIN	1	57	285	70	413
	2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		84	32	4	120
VI	KECAMATAN (22 KECAMATAN)		1	76	194	39	310
VII	KELURAHAN (10 KELURAHAN)			3	39	1	43
JUMLAH			4	671	4.203	1.108	5.986

Sumber: BKPSDM Muara Enim, 2026

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah PNS di Kabupaten Muara Enim, paling banyak berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, UPT, SKB, dan Guru yang jumlahnya mencapai 2.444 orang. Selain itu, jumlah PNS terbesar lainnya berasal dari instansi Dinas Kesehatan, UPT, dan Puskesmas sebanyak 1228 orang dan kemudian sebanyak 1228 orang berasal dari Dinas kepemudaan dan Olahraga serta UTPnya. Sementara itu, jumlah PNS paling sedikit berasal dari Dinas Sosial dan UPT yang hanya berjumlah sebanyak 22 orang. Selain itu, ASN



PPPK yang ada di Kabupaten Muara Enim tahun 2025 juga akan dijabarkan melalui tabel berikut:

**Tabel 1.19 Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Kabupaten Muara Enim Tahun 2025**

NO	DINAS		GOLONGAN						JUMLAH
			I	IX	V	VII	X	XI	
I	SEKRETARIAT DAERAH			31	78	2			111
II	SEKRETARIAT DEWAN			11	36	1			48
III	DINAS - DINAS			18	11	2			31
	1	DINAS PERKEBUNAN + UPT		18	11	2			31
	2	DINAS PERDAGANGAN + UPT	16	14	77	3			110
	3	DINAS KESEHATAN + UPT + PUSKESMAS		144	197	868	78	1	1288
	4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN + UPT + SKB + GURU	335	2953	875	2			4165
	5	DINAS PERHUBUNGAN + UPT		22	29	4			55
	6	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH		12	9	1			22
	7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL		12	10	4			26
	8	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA + UPT		13	44	5			62
	9	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN + UPT		10	141				151
	10	DINAS PERIKANAN + UPT		12	32				44
	11	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN + UPT		40	142	8			190
	12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		12	18	6			36
	13	DINAS LINGKUNGAN HIDUP + UPT	75	10	129				214
	14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		13	19				32
	15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		11	17				28

NO	DINAS		GOLONGAN						JUMLAH
			I	IX	V	VII	X	XI	
	16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG + UPT		20	13	3			36
	17	DINAS SOSIAL + UPT		13	18	1			32
	18	DINAS KETENAGAKERJAAN + UPT		14	15				29
	19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		12	11	3			26
	20	DINAS KETAHANAN PANGAN		11	19	1			31
	21	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		11	17	5			33
	22	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		9	16				25
	23	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		10	12	5			27
	24	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		13	23				36
IV	BADAN-BADAN								
	1	INSPEKTORAT		2	5	1			8
	2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		12	16	3			31
	3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH		16	14	2			32
	4	BADAN PENDAPATAN DAERAH + UPT		34	48	16			102
	5	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		8	10				18
	6	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA + UPT		10	10	1			21
	7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		9	7	1			17
	8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		11	17				28
V	KANTOR-KANTOR								
	1	RSUD DR.H.M.RABAIN		26	24	146	52		248
	2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			173				173



NO	DINAS	GOLONGAN						JUMLAH
		I	IX	V	VII	X	XI	
VI	KECAMATAN (22 KECAMATAN)		133	272	9			414
VII	KELURAHAN (10 KELURAHAN)			50				50
JUMLAH		426	3716	2654	1103	130	1	8030

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Tahun 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa, ASN PPPK paling banyak juga berasal dari instansi yang sama dengan ASN PNS yang mana ASN PPPK paling banyak masih berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SKB, UPT, dan Guru, kemudian disusul dengan Dinas Kesehatan, UPT, dan Puskesmas, serta RSUD. M.H. Rabain.

d. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2025 berdasarkan laporan keuangan Unaudited, ditargetkan sebesar Rp.4.149.738.479.203,03 dan terealisasi sebesar Rp.3.956.202.807.557,90 atau 95,33%. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim mengalami peningkatan sebesar Rp.42.098.969.499,74 atau 1,07%. Pendapatan daerah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp.3.697.697.501.915,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.914.103.838.058,16 atau 105,85% (Audited). Adapun komponen-komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 1.19 Rincian Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2025 (Unaudited) dan Tahun 2024 (Audited)

No.	Jenis Pendapatan	2025 (Unaudited)			2024 (Audited)		
		Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan		Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
1.	Pendapatan Asli Daerah	439.188.803.647,03	449.369.599.734,06	102,31	306.635.850.767,00	382.437.801.698,52	124,72
2.	Pendapatan Transfer	3.704.855.450.212,00	3.497.837.500.489,76	94,41	3.377.588.613.451,00	3.524.646.144.599,22	104,35
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.694.225.344,00	8.995.707.334,08	157,97	13.473.037.697,00	7.019.891.760,42	52,10
Total Pendapatan		4.149.738.479.203,03	3.956.202.807.557,90	95,33	3.697.697.501.915,00	3.914.103.838.058,16	105,85

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2025

e. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja



Pada tahun 2025 berdasarkan laporan keuangan Unaudited, alokasi belanja daerah sebesar Rp.4.781.820.110.969,03 dan terealisasi sebesar Rp.4.281.718.954.767,00 atau 89,54%. Sedangkan pada tahun 2024, Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp.4.351.719.271.996,21 dan terealisasi sebesar Rp.3.917.575.460.242,96 atau 90,02% (Audited). Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, maka realisasi belanja daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp.364.143.494.524,04 atau 9,29%. Belanja daerah tersebut dialokasikan untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan transfer yang secara rinci sebagai berikut:

Tabel 1.20 Rincian Komponen Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Menurut Jenis Belanja Tahun 2025 (Audited) dan Tahun 2024 (Audited)

No.	Jenis Belanja Daerah	2025 (Unaudited)			2024 (Audited)		
		Target Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah		Target Belanja Daerah	Realisasi Belanja Daerah	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
1.	Belanja Operasi	2.672.321.562.461,17	2.357.795.953.596,70	88,23	2.549.011.276.706,21	2.236.645.214.872,58	87,75
2.	Belanja Modal	1.538.474.147.337,86	1.364.512.078.293,30	88,69	1.218.008.118.240,00	1.173.510.368.320,38	91,61
3.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	603.038.711,00	12,06	15.000.000.000,00	720.000.000,00	4,80
4.	Transfer	566.024.401.170,00	558.807.884.166,00	98,72	506.699.877.050,00	506.699.877.050,00	100,00
Total Belanja Daerah		4.781.820.110.969,03	4.281.718.954.767,00	89,54	4.351.719.271.996,21	3.917.575.460.242,96	90,02

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2025

f. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali (tertentu), baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah yang dianggarkan merupakan seluruh transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan tersebut secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan yang dianggarkan tahun 2025 ialah sebesar **Rp.650.550.147.898,00** dan terealisasi sebesar **Rp.650.550.147.898,41** atau **100,00% (Unaudited)**. Sedangkan tahun 2024, pembiayaan yang dianggarkan ialah **Rp.660.300.286.213,21** dan terealisasi sebanyak **Rp.660.300.286.213,21** atau **100,00% (Audited)**.

2. Pengeluaran Pembiayaan



Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Muara Enim dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, dan pembayaran pinjaman daerah dari Pemerintah Pusat. Pada tahun 2025, alokasi anggaran untuk Pengeluaran Pembiayaan sebesar **Rp.18.468.516.132,00** dan terealisasi sebesar **Rp.16.278.516.129,04** atau **88,14% (Unaudited)**. Sedangkan pada tahun 2024, pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar **Rp.6.278.516.132,00** dan terealisasi sebesar **Rp.6.278.516.130,00** atau **100,00% (Audited)**.

3. Pembiayaan Netto

Pada tahun 2025, Pembiayaan Netto dianggarkan sebesar **Rp.632.081.631.766,00** dengan realisasi sebesar **Rp.634.271.631.769,37** atau **100,34% (Unaudited)**. Rincian target dan realisasi pembiayaan berdasarkan jenis pembiayaan, dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.21 Rincian Komponen Pembiayaan Kabupaten Muara Enim Menurut Jenis Pembiayaan Tahun 2025 (Unaudited) dan Tahun 2024 (Audited)

No	Jenis Pembiayaan	2025 (Unaudited)			2024 (Audited)		
		Target Pembiayaan	Realisasi Pembiayaan		Target Pembiayaan	Realisasi Pembiayaan	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%
1.	Penerimaan Pembiayaan	650.550.147.898,00	650.550.147.898,41	100,00	660.300.286.213,21	660.300.286.213,21	100,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan	18.468.516.132,00	16.278.516.129,04	88,14	6.278.516.132,00	6.278.516.132,00	100,00
Pembiayaan Netto		632.081.631.766,00	634.271.631.769,37	100,34	654.021.770.081,21	654.021.770.081,21	100,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		308.755.484.560,27			650.550.147.898,41		

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2025



BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAB III	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
BAB IV	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN
BAB V	PENUTUP
LAMPIRAN	

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur mekanisme penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah. Regulasi ini menegaskan bahwa LKPJ memuat capaian pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan dari pemerintah pusat. Pengaturan tersebut diarahkan untuk memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan sebagai instrumen untuk mengukur capaian kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan serta perencanaan program pembangunan daerah pada periode berikutnya. Setiap tahun anggaran, pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan memuat informasi yang komprehensif dan akurat mengenai pelaksanaan kinerja selama satu tahun anggaran. Dengan demikian, laporan tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai capaian, kendala, serta tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu siklus yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mencakup tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai rujukan operasional dalam menjalankan tata kelola keuangan daerah.

Dalam penyampaian informasi terkait pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim berlandaskan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kebijakan umum dalam pengelolaan keuangan daerah mencakup beberapa prinsip pokok sebagai berikut:

1. Sumber utama pendapatan daerah berasal dari Dana Perimbangan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta sumber pendapatan lain yang sah sebagai pendukung pembiayaan pembangunan.
2. Belanja daerah disusun berdasarkan kebutuhan yang terukur dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, objektivitas, serta pendekatan anggaran berbasis kinerja guna mencapai hasil yang optimal.
3. Seluruh penerimaan dan pengeluaran selama tahun anggaran wajib dicatat dan dianggarkan dalam APBD.
4. Target pendapatan ditetapkan berdasarkan estimasi yang rasional dan terukur, sedangkan alokasi belanja merupakan batas maksimal pengeluaran.
5. Setiap penganggaran belanja harus ditopang oleh proyeksi penerimaan yang memadai.
6. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada asas umum sebagai berikut:
 - a. Keuangan daerah dikelola secara tertib, patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparansi, dan akuntabilitas, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
 - b. Pengelolaan keuangan daerah dijalankan dalam suatu sistem yang terpadu dan diwujudkan melalui APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.
 - c. Hak dan kewajiban daerah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya dijabarkan ke dalam komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dalam kerangka sistem



- pengelolaan keuangan daerah.
- d. Pelaksanaan pembangunan daerah dalam kerangka desentralisasi didanai melalui APBD.
 - e. Penyusunan APBD disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kapasitas pendapatan daerah, serta berpedoman pada RKPD guna mendukung penyediaan pelayanan publik dan pencapaian tujuan negara.
 - f. APBD menjadi landasan pengelolaan keuangan daerah untuk periode satu tahun anggaran, dihitung sejak 1 Januari hingga 31 Desember.
 - g. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 1. Pendapatan Daerah;
 2. Belanja Daerah; dan
 3. Pembiayaan Daerah.
 - h. Pendapatan Daerah mencakup seluruh penerimaan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dan menjadi hak daerah dalam satu tahun anggaran tanpa kewajiban pengembalian, yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan.
 - i. Belanja Daerah meliputi seluruh pengeluaran melalui Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran tanpa adanya penerimaan kembali, yang dirinci berdasarkan urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja.
 - j. Pembiayaan Daerah mencakup seluruh transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus, yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan.

2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilaksanakan melalui upaya pemetaan serta optimalisasi berbagai potensi sumber penerimaan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, maupun sumber pendapatan lain yang sah. Strategi ini diarahkan pada penguatan dan perluasan basis PAD, sekaligus pemanfaatan Dana Perimbangan secara maksimal agar daerah memperoleh alokasi yang proporsional sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam implementasinya, langkah-langkah yang ditempuh meliputi penguatan sistem pengawasan, peningkatan koordinasi antarperangkat daerah terkait, serta penyederhanaan mekanisme administrasi pemungutan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah.



Pendapatan Daerah dibagi menurut kelompok pendapatan yang meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari :
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1). Dana Bagi Hasil Pajak;
 - 2). Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA);
 - 3). Dana Alokasi Umum (DAU);
 - 4). Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - 5). Dana Insentif Daerah (DID); dan
 - 6). Dana Desa (DD).
 - b. Transfer Antar Daerah
 - 1). Bagi Hasil Pajak Provinsi; dan
 - 2). Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.
3. Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah, antara lain :
 - a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Pendapatan Lainnya.

Kebijakan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berlandaskan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim melakukan berbagai strategi untuk memperkuat Pendapatan Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Upaya yang ditempuh mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, optimalisasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta penguatan kapasitas pemungutan dan pengawasan. Peningkatan penerimaan daerah diarahkan pada pemaksimalan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan mendorong partisipasi aktif dunia usaha dan masyarakat melalui skema kolaboratif. Selain itu, pemerintah daerah juga membuka ruang keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan itu, langkah perbaikan turut difokuskan pada peningkatan efisiensi pengelolaan APBD serta optimalisasi penerimaan Dana Perimbangan agar diperoleh secara lebih proporsional dan berkeadilan sesuai ketentuan yang berlaku.

a. Intensifikasi Pendapatan Daerah

Upaya intensifikasi dilakukan melalui:

- 1) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah seperti pembayaran pajak



daerah secara online, pelayanan perizinan satu atap.

- 2) Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah seperti merevisi kembali Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- 3) Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah, baik langsung maupun melalui media massa, seperti pemasangan papan himbauan, spanduk, dan pemberian penghargaan.
- 4) Peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah seperti pemasangan tapping box pada objek pajak restoran dan pajak hotel, pemasangan water meter pada objek pajak air tanah, pemasangan KWh meter pada objek pajak penerangan jalan (genset), melakukan uji petik terhadap objek-objek pajak daerah dan retribusi daerah.
- 5) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait, seperti menginventarisasi dan menertibkan objek-objek pajak daerah dan retribusi daerah.
- 6) Optimalisasi penagihan piutang pajak seperti penyelenggaraan Pekan Panutan PBB.
- 7) Mengikuti rapat perhitungan realisasi lifting minyak dan gas alam dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.
- 8) Mengikuti rapat rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara yang dilaksanakan oleh Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.

b. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Upaya ekstensifikasi dilakukan melalui:

- 1). Menerbitkan peraturan daerah tentang retribusi daerah baru yang kontra produktif terhadap perekonomian daerah.
- 2). Pengkajian jenis retribusi daerah yang tidak layak dan perlu disempurnakan.
- 3). Melakukan rekonsiliasi data produksi batubara untuk alokasi dana bagi hasil landrent dan royalti hasil eksploitasi perusahaan tambang pemegang IUP dengan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan.
- 4). Melakukan rekonsiliasi data produksi minyak dan gas alam hasil eksploitasi KKKS Pertamina dengan SKK Migas dan Dinas ESDM Provinsi Sumatera Selatan.
- 5). Peningkatan peran serta badan usaha, masyarakat dan luar negeri untuk pembangunan Kabupaten Muara Enim.



Dalam rangka optimalisasi upaya dan langkah tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengelola beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang didasarkan kepada Peraturan Daerah sebagai berikut :

- 1) Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, terdiri dari :
 - Pajak Hotel
 - Pajak Restoran
 - Pajak Hiburan
 - Pajak Reklame
 - Pajak Penerangan Jalan
 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - Pajak Parkir
 - Pajak Air Tanah
 - Pajak Sarang Burung Walet
 - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- 2) Retribusi Daerah, antara lain :
 - a. Retribusi Jasa Umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011, adalah :
 - Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 - Retribusi Pelayanan Pasar
 - Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - Retribusi Penyedotan Kakus
 - b. Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011, adalah :
 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - Retribusi Terminal
 - Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - Retribusi Rumah Potong Hewan
 - Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
 - Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011, adalah :
 - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol



- Retribusi Izin Trayek
- d. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010.

2.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*), realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim tercatat sebesar **Rp3.956.202.807.557,90** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp4.149.738.479.203,03**, atau mencapai **95,33 persen** dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa secara agregat realisasi pendapatan belum sepenuhnya memenuhi target yang direncanakan pada tahun berjalan. Apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024 (*Audited*), realisasi pendapatan daerah mengalami peningkatan secara nominal. Pada tahun 2024, realisasi pendapatan tercatat sebesar **Rp3.914.103.838.058,16** dari target **Rp3.697.697.501.915,00**, dengan tingkat pencapaian **105,85 persen**. Dengan demikian, secara nominal terjadi kenaikan realisasi pendapatan tahun 2025 sebesar **Rp42.098.969.499,74** dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun komponen-komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2025 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Muara Enim ditargetkan sebesar **Rp439.188.803.647,03** dan terealisasi sebesar **Rp449.369.599.734,06**, atau mencapai **102,31 persen** dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa PAD pada tahun berjalan mampu melampaui target yang direncanakan, meskipun dengan margin yang lebih moderat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai perbandingan, pada Tahun Anggaran 2024 (*Audited*), PAD ditargetkan sebesar **Rp306.635.850.767,00** dan terealisasi sebesar **Rp382.437.801.698,52**, dengan tingkat pencapaian **124,72 persen**. Adapun komponen – komponen PAD tersebut adalah sebagai berikut :

a) Pendapatan Pajak Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*), target Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Muara Enim ditetapkan sebesar **Rp195.567.613.344,00**, dengan realisasi mencapai **Rp194.665.442.709,58**, atau **99,53 persen** dari target yang direncanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah pada tahun berjalan hampir sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Sebagai perbandingan, pada Tahun Anggaran 2024 (*Audited*), Pendapatan Pajak Daerah ditargetkan



sebesar **Rp102.118.871.536,00** dan terealisasi sebesar **Rp127.905.669.439,00**, dengan tingkat pencapaian **125,25 persen** dari target. Meskipun persentase capaian terhadap target pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, peningkatan nilai realisasi menunjukkan adanya pertumbuhan basis pajak daerah serta optimalisasi pemungutan yang semakin menguat dalam mendukung kemandirian fiskal daerah.

b) Pendapatan Retribusi Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*), Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Muara Enim ditargetkan sebesar **Rp186.323.243.953,00** dan terealisasi sebesar **Rp173.275.335.331,76**, atau mencapai **92,99 persen** dari target yang telah ditetapkan. Sebagai perbandingan, pada Tahun Anggaran 2024 (*Audited*), target Pendapatan Retribusi Daerah sebesar **Rp120.847.143.074,00** dengan realisasi sebesar **Rp113.062.672.451,39**, atau **93,56 persen** dari target. Secara nominal, realisasi retribusi daerah tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar **Rp60.212.662.880,37** dibandingkan realisasi tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya penguatan penerimaan dari layanan dan perizinan daerah, meskipun optimalisasi pemungutan masih perlu terus ditingkatkan agar capaian terhadap target dapat lebih maksimal pada periode berikutnya.

c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) ditargetkan sebesar **Rp26.552.719.027,07** dan terealisasi sebesar **Rp26.552.719.027,07**, atau mencapai **100,00 persen** dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa penerimaan dari komponen tersebut terealisasi secara optimal sesuai dengan perencanaan. Pada Tahun Anggaran 2024 (*Audited*), target pendapatan dari sumber yang sama sebesar **Rp31.102.654.447,00** dengan realisasi **Rp31.147.873.242,38**, atau **100,15 persen** dari target.

d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pada Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*), Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar **Rp30.745.227.322,96** dan terealisasi sebesar **Rp54.876.102.665,65**, atau mencapai **178,48 persen**



dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa komponen pendapatan tersebut melampaui target secara signifikan pada tahun berjalan. Sebagai perbandingan, pada Tahun Anggaran 2024 (*Audited*), target penerimaan dari pos yang sama sebesar **Rp52.567.181.710,00** dengan realisasi **Rp110.321.586.565,75**, atau **209,87 persen** dari target. Secara nominal, realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar **Rp55.445.483.900,10** dibandingkan realisasi tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan nilai penerimaan, tingkat capaian terhadap target tetap menunjukkan kinerja yang sangat baik, mencerminkan adanya optimalisasi penerimaan dari berbagai sumber PAD lainnya di luar pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Muara Enim terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pada Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*), total Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar **Rp3.704.855.450.212,00** dan terealisasi sebesar **Rp3.497.837.500.489,76**, atau mencapai **94,41 persen** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar **Rp3.178.794.712.284,00** (**93,92 persen** dari target **Rp3.384.409.910.660,00**) dan Transfer Antar Daerah sebesar **Rp319.042.788.205,76** (**99,56 persen** dari target **Rp320.445.539.552,00**). Capaian ini menunjukkan bahwa meskipun secara agregat belum sepenuhnya memenuhi target, kontribusi terbesar tetap berasal dari transfer pemerintah pusat sebagai komponen utama struktur pendapatan daerah. Sebagai perbandingan, pada Tahun Anggaran 2024 (*Audited*), Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar **Rp3.377.588.613.451,00** dan terealisasi sebesar **Rp3.524.646.144.599,22**, atau **104,35 persen** dari target. Rincian Pendapatan Transfer sebagai berikut :

a). Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pada Tahun Anggaran 2024 (*Audited*), target Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat ditetapkan sebesar **Rp3.115.940.499.950,00** dan terealisasi sebesar **Rp3.198.030.938.052,00**, atau mencapai **102,63 persen** dari target. Memasuki Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*), target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat meningkat menjadi **Rp3.384.409.910.660,00**. Namun, realisasi yang tercatat sebesar **Rp3.178.794.712.284,00**, atau **93,92 persen** dari target. Secara



nominal, realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar **Rp19.236.225.768,00** dibandingkan tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan adanya dinamika dalam penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat, meskipun secara keseluruhan komponen ini tetap menjadi kontributor terbesar dalam struktur pendapatan daerah Kabupaten Muara Enim.

b). Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Tahun Anggaran 2024 (*Audited*) ditargetkan sebesar **Rp261.648.113.501,00** dan terealisasi sebesar **Rp326.615.206.547,22**, atau mencapai **124,83 persen** dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa penerimaan dari skema transfer antar daerah pada tahun tersebut mampu melampaui proyeksi yang direncanakan. Pada Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*), target Pendapatan Transfer Antar Daerah meningkat menjadi **Rp320.445.539.552,00**, dengan realisasi sebesar **Rp319.042.788.205,76**, atau **99,56 persen** dari target. Secara nominal, realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar **Rp7.572.418.341,46** dibandingkan realisasi tahun 2024. Meskipun demikian, kontribusi Pendapatan Transfer Antar Daerah tetap signifikan dalam mendukung struktur pendapatan daerah, serta mencerminkan keberlanjutan koordinasi fiskal antar pemerintah daerah.

3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Komponen pendapatan ini bersumber dari hibah dan penerimaan sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2024 (*Audited*), target ditetapkan sebesar **Rp13.473.037.697,00** dengan realisasi **Rp7.019.891.760,42**, atau **52,10** persen dari target. Sementara itu, pada Tahun 2025 (*Unaudited*) target sebesar **Rp5.694.225.344,00** berhasil direalisasikan sebesar **Rp8.995.707.334,08**, atau **157,97 persen**. Secara nominal, terjadi peningkatan sebesar **Rp1.975.815.573,66** dibandingkan realisasi tahun sebelumnya, yang mencerminkan perbaikan capaian pada sumber penerimaan ini. Adapun rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari :

a). Pendapatan Hibah

Pada Tahun 2024 (*Audited*), Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar **Rp1.325.000.000,00** dengan realisasi **Rp727.192.879,00**, atau **54,88 persen** dari target.



Pada Tahun 2025 (*Unaudited*), target meningkat menjadi **Rp1.548.000.000,00** dan realisasi mencapai **Rp2.229.469.761,00**, atau **144,02 persen**. Secara nominal, terjadi peningkatan sebesar **Rp1.502.276.882,00** dibandingkan realisasi tahun 2024, yang menunjukkan perbaikan signifikan pada penerimaan hibah.

b). Pendapatan Lainnya

Untuk Tahun 2024 (*Audited*), Pendapatan Lainnya ditargetkan sebesar **Rp12.148.037.697,00** dan terealisasi **Rp6.292.698.881,42**, atau **51,80 persen** dari target. Sementara itu, pada Tahun 2025 (*Unaudited*), target ditetapkan sebesar **Rp4.146.225.344,00** dengan realisasi **Rp6.766.237.573,08**, atau **163,19 persen**. Dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi meningkat sebesar **Rp473.538.691,66**, yang mencerminkan adanya perbaikan kinerja pada komponen pendapatan ini.

Secara ringkas Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Muara Enim tahun 2024 (*Audited*) dan 2025 (*Unaudited*) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten Muara Enim
Tahun 2024 (*Audited*) - 2025 (*Unaudited*)

KODE	URAIAN	2024 (AUDITED)			2025 (UNAUDITED)		
		TARGET	REALISASI (Rp.)		TARGET	REALISASI	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
4. PENDAPATAN							
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH							
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	102.118.871.536,00	127.905.669.439,00	125,25	195.567.613.344,00	194.665.442.709,58	99,53
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	120.847.143.074,00	113.062.672.451,39	93,56	186.323.243.953,00	173.275.335.331,76	92,99
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	31.102.654.447,00	31.147.873.242,38	100,15	26.552.719.027,07	26.552.719.027,07	100,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.567.181.710,00	110.321.586.565,75	209,87	30.745.227.322,96	54.876.102.665,65	178,48
PENDAPATAN ASLI DAERAH		306.635.850.767,00	382.437.801.698,52	124,72	439.188.803.647,03	449.369.599.734,06	102,31
4.2. PENDAPATAN TRANSFER							
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	3.115.940.499.950,00	3.198.030.938.052,00	102,63	3.384.409.910.660,00	3.178.794.712.284,00	93,92



KODE	URAIAN	2024 (AUDITED)			2025 (UNAUDITED)		
		TARGET	REALISASI (Rp.)		TARGET	REALISASI	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
4.2.2	Transfer Antar Daerah	261.648.113.501,00	326.615.206.547,22	124,83	320.445.539.552,00	319.042.788.205,76	99,56
PENDAPATAN TRANSFER		3.377.588.613.451,00	3.524.646.144.599,22	104,35	3.704.855.450.212,00	3.497.837.500.489,76	94,41
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH							
4.3.1	Pendapatan Hibah	1.325.000.000,00	727.192.879,00	54,88	1.548.000.000,00	2.229.469.761,00	144,02
4.3.2	Pendapatan lainnya	12.148.037.697,00	6.292.698.881,42	51,80	4.146.225.344,00	6.766.237.573,08	163,19
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		13.473.037.697,00	7.019.891.760,42	52,10	5.694.225.344,00	8.995.707.334,08	157,97
JUMLAH PENDAPATAN		3.697.697.501.915,00	3.914.103.838.058,16	105,85	4.149.738.479.203,03	3.956.202.807.557,90	95,33

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah Kabupaten Muara Enim (diolah), Tahun 2025

2.2. Pengelolaan Belanja Daerah

2.2.1. Kebijakan Belanja Daerah

Pada Tahun Anggaran 2021, pengelolaan belanja daerah dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan normatif dan operasional dalam penyusunan serta pelaksanaan anggaran, dengan tujuan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui kerangka ini, pemerintah daerah diarahkan untuk mengelola anggaran secara profesional dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam empat jenis utama, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer, yang masing-masing memiliki fungsi strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

- Belanja Operasi mencakup pengeluaran rutin yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, serta bantuan sosial. Komponen ini berperan penting dalam menjamin kelangsungan fungsi administrasi dan pelayanan publik agar berjalan secara optimal.
- Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dialokasikan untuk pembentukan atau peningkatan aset tetap dengan manfaat jangka



panjang, seperti pengadaan tanah, peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, jalan, jaringan irigasi, serta infrastruktur lainnya. Alokasi ini bertujuan memperkuat kapasitas sarana dan prasarana daerah guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

- c) Belanja Tidak Terduga disediakan untuk menghadapi kondisi darurat atau kejadian luar biasa yang memerlukan respons cepat, seperti bencana alam atau situasi mendesak lainnya. Keberadaan pos anggaran ini memberikan fleksibilitas fiskal bagi pemerintah daerah dalam mengantisipasi kebutuhan yang tidak direncanakan sebelumnya.
- d) Belanja Transfer merupakan pengeluaran yang dialokasikan untuk penyaluran dana kepada pihak lain, termasuk transfer bagi hasil dan bantuan keuangan. Tujuannya adalah memastikan distribusi sumber daya secara proporsional guna mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pengelompokan belanja yang sistematis tersebut, pemerintah daerah memiliki dasar yang jelas dalam merencanakan dan mengendalikan penggunaan anggaran sesuai prioritas pembangunan. Klasifikasi ini juga memudahkan pengukuran kinerja program serta pelaksanaan evaluasi berkelanjutan dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah. Belanja Daerah digunakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Dalam kerangka tersebut, pengelolaan keuangan daerah merupakan satu kesatuan yang terintegrasi antara kebijakan pendapatan dan kebijakan belanja. Arah kebijakan belanja difokuskan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan sasaran yang tepat serta manfaat yang optimal, khususnya dalam rangka perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal dan potensi daerah.

Pelaksanaan kebijakan belanja juga diselaraskan dengan visi dan misi Kabupaten Muara Enim sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2018–2023, yaitu “Muara Enim untuk Rakyat yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, Sehat, dan Sejahtera.” Visi tersebut dijabarkan dalam sejumlah misi pembangunan, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, cerdas, dan mandiri; pembinaan serta pemberdayaan anak yatim, yatim piatu, dhuafa, dan keluarga miskin hingga mencapai kemandirian; penguatan daya saing ekonomi



daerah melalui pengembangan komoditas dan produk unggulan desa di sektor agribisnis, agroindustri, dan agropolitan; penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang mudah diakses dan tanpa biaya; serta pembangunan infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas, termasuk dukungan terhadap pembangunan Jalan Tol Muara Enim-Indralaya-Palembang.

Pengelolaan keuangan daerah menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu, prinsip efektivitas, efisiensi, ekonomis, transparansi, dan akuntabilitas harus diterapkan secara konsisten dalam setiap tahapan pengelolaan APBD, sehingga mampu menjawab tuntutan masyarakat dan memperkuat kesehatan fiskal daerah. Adapun kebijakan dalam pengelolaan belanja daerah dilakukan melalui beberapa langkah strategis, antara lain: penyelarasan alokasi anggaran dengan pendelegasian kewenangan; peningkatan prioritas pendanaan pada sektor yang menjadi perhatian utama masyarakat; pengakomodasian aspirasi publik melalui pendekatan partisipatif (bottom-up); penguatan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran; serta pelaksanaan belanja berdasarkan prinsip hemat, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah, Pemerintah Kabupaten Muara Enim setiap tahun menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan bidang urusan masing-masing, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, sebagai pedoman operasional pelaksanaan pembangunan daerah sebagai berikut :

a. Urusan Wajib :

- 1). Urusan Wajib Pendidikan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2). Urusan Wajib Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD dr. H. M.Rabain.
- 3). Urusan Wajib Pekerjaan Umum, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4). Urusan Wajib Perumahan, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- 5). Urusan Wajib Penataan Ruang, dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



- 6). Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- 7). Urusan Wajib Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- 8). Urusan Wajib Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- 9). Urusan Wajib Pertanahan, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 10). Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 11). Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 12). Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 13). Urusan Wajib Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- 14). Urusan Wajib Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan.
- 15). Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- 16). Urusan Wajib Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 17). Urusan Wajib Kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- 18). Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- 19). Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- 20). Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian dilaksanakan oleh Perangkat Daerah :
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
 - Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Sekretariat Daerah
 - Sekretariat DPRD
 - Inspektorat Daerah Kabupaten
 - Badan Pendapatan Daerah



- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - Kecamatan Semende Darat Ulu
 - Kecamatan Semende Darat Tengah
 - Kecamatan Semende Darat Laut
 - Kecamatan Tanjung Agung
 - Kecamatan Lawang Kidul
 - Kecamatan Muara Enim
 - Kecamatan Ujan Mas
 - Kecamatan Benakat
 - Kecamatan Gunung Megang.
 - Kecamatan Rambang Niru
 - Kecamatan Lubai
 - Kecamatan Rambang
 - Kecamatan Lembak
 - Kecamatan Kelekar
 - Kecamatan Gelumbang
 - Kecamatan Sungai Rotan
 - Kecamatan Muara Belida
 - Kecamatan Belimbing
 - Kecamatan Belida Darat
 - Kecamatan Lubai Ulu
 - Kecamatan Empat Petulai Dangku
 - Kecamatan Panang Enim
- 21). Urusan Wajib Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan.
- 22). Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 23). Urusan Wajib Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 24). Urusan Wajib Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- 25). Urusan Wajib Komunikasi, Informatika, dan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 26). Urusan Wajib Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.



b. Urusan Pilihan

- 1). Urusan Pilihan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perkebunan.
- 2). Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral, Perdagangan, dan Industri dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan.
- 3). Urusan Pilihan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 4). Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan.
- 5). Urusan Pilihan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan.
- 6). Urusan Pilihan Industri dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan.
- 7). Urusan Pilihan Ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan.

2.2.2. Realisasi Belanja Daerah

Pada Tahun 2024 (*Audited*), belanja daerah Kabupaten Muara Enim dianggarkan sebesar **Rp4.351.719.271.996,21** dan terealisasi sebesar **Rp3.917.575.460.242,96**, atau **90,02 persen** dari pagu anggaran. Pada Tahun 2025 (*Unaudited*), alokasi belanja daerah meningkat menjadi **Rp4.781.820.110.969,03**, dengan realisasi sebesar **Rp4.281.718.954.767,00**, atau **89,54 persen**. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024, realisasi belanja daerah Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar **Rp364.143.494.524,04**. Belanja tersebut digunakan untuk membiayai belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer sebagaimana diuraikan pada bagian berikut:

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan terutama untuk mendanai kebutuhan rutin penyelenggaraan pemerintahan, khususnya belanja pegawai yang meliputi pembayaran gaji pokok dan berbagai tunjangan, baik tunjangan melekat maupun tunjangan lainnya sesuai ketentuan. Komponen ini juga mencakup pembayaran gaji ketiga belas dan keempat belas, serta tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), seperti uang makan, tunjangan bagi guru yang bertugas di wilayah terpencil, tunjangan kesejahteraan tahunan, tunjangan kinerja, serta tunjangan bagi tenaga paramedis. Di samping itu, Belanja Operasi digunakan untuk membiayai belanja barang dan jasa, pembayaran bunga, pemberian subsidi, hibah, dan bantuan



sosial kepada masyarakat. Alokasi anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan aparatur, menjaga keberlangsungan pelayanan publik, serta memperkuat pelaksanaan program pembangunan dan distribusi bantuan sosial secara merata di seluruh wilayah daerah.

Pada Tahun 2024 (*Audited*), anggaran Belanja Operasi Kabupaten Muara Enim ditetapkan sebesar **Rp2.549.011.276.706,21**, dengan realisasi mencapai **Rp2.236.645.214.872,58** atau **87,75 persen** dari pagu yang tersedia. Selanjutnya pada Tahun 2025 (*Unaudited*), alokasi Belanja Operasi meningkat menjadi **Rp2.672.321.562.461,17**, dan hingga akhir periode pelaporan terealisasi sebesar **Rp2.357.795.953.596,70** atau **88,23 persen**. Kenaikan pagu anggaran tersebut menunjukkan adanya penguatan dukungan terhadap penyelenggaraan program dan pelayanan publik. Adapun rincian target dan realisasi Belanja Operasi tahun 2024-2025 menurut jenis belanja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Muara Enim
Tahun 2024 (*Audited*) - 2025 (*Unaudited*)

KODE	URAIAN	2024 (AUDITED)			2025 (UNAUDITED)		
		TARGET	REALISASI (Rp.)		TARGET	REALISASI	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
5. BELANJA							
5.1. BELANJA OPERASI							
5.1.1	Belanja Pegawai	1.201.350.938.398,66	1.059.547.345.085,03	88,20	1.413.990.292.944,69	1.228.547.741.022,42	86,88
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.143.729.958.590,55	997.240.572.419,55	87,19	1.170.205.111.116,48	1.047.806.287.421,44	89,54
5.1.3	Belanja Bunga	9.000.000.000	7.485.321.723,00	83,17	7.000.000.000,00	5.594.914.153,84	79,92
5.1.4	Subsidi	-	-	-	1.206.750.000,00	449.328.000,00	37,23
5.1.5	Hibah	191.550.579.717,00	172.371.975.645,00	89,99	79.919.408.400,00	75.397.682.999,00	94,34
5.1.6	Bantuan Sosial	3.379.800.000,00	0,00	0,00			
BELANJA OPERASI		2.549.011.276.706,21	2.236.645.214.872,58	87,75	2.672.321.562.461,17	2.357.795.953.596,70	88,23

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim (diolah), Tahun 2025



2) Belanja Modal

Belanja Modal Kabupaten Muara Enim dialokasikan untuk kegiatan yang berkaitan dengan perolehan, pengadaan, maupun pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Aset tersebut dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan guna menunjang efektivitas dan kualitas pelayanan publik. Ruang lingkup belanja modal mencakup pengadaan tanah, peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, jalan, jaringan irigasi, serta infrastruktur dan aset tetap lainnya. Alokasi ini difokuskan untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek strategis di bidang infrastruktur yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan sarana kesehatan lainnya menjadi bagian penting dari belanja modal, dengan tujuan memperluas akses serta meningkatkan mutu layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pengembangan infrastruktur dasar berupa jalan dan jembatan diarahkan untuk memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah. Peningkatan sarana irigasi yang mendukung sektor pertanian juga menjadi prioritas, guna mendorong produktivitas dan kesejahteraan petani. Secara keseluruhan, kebijakan belanja modal tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muara Enim secara berkelanjutan.

Pada Tahun 2025 (*Unaudited*), Belanja Modal Kabupaten Muara Enim dialokasikan sebesar **Rp1.538.474.147.337,86**, dengan realisasi mencapai **Rp1.364.512.078.293,30** atau **88,69 persen** dari pagu anggaran. Sementara itu, pada Tahun 2024 (*Audited*), anggaran Belanja Modal ditetapkan sebesar **Rp1.218.008.118.240,00** dan terealisasi sebesar **Rp1.173.510.368.320,38**, atau **91,61 persen**. Kenaikan alokasi pada Tahun 2025 menunjukkan adanya penguatan prioritas pembangunan aset dan infrastruktur daerah guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi. Adapun rincian target dan realisasi Belanja Modal berdasarkan jenis belanja disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2.3
Target dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Muara Enim
Tahun 2024 (Audited) - 2025 (Unaudited)

KODE	URAIAN	2023 (AUDITED)			2024 (UNAUDITED)		
		TARGET	REALISASI (Rp.)		TARGET	REALISASI	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
5.2. BELANJA MODAL							
5.2.1	Belanja Modal Tanah	12.382.090.321,00	10.194.664.000,00	82,33	61.975.000.000,00	17.527.346.000,00	28,28
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.456.945.366,00	160.953.164.95,00	86,79	334.352.258.207,17	312.210.171.967,00	93,37
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	218.979.431.746,00	202.931.222.921,64	92,67	344.727.427.152,00	298.572.404.158,98	86,61
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	850.855.615.359,00	786.229.627.683,74	92,40	782.372.452.613,69	721.758.065.918,32	92,25
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.792.066.558,00	11.788.479.750,00	99,97	12.997.009.365,00	12.982.234.349,00	99,88
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.541.9687.890,00	1.413.209.060,00	91,65	2.050.000.000,00	1.461.855.900,00	71,31
BELANJA MODAL		1.218.008.118.240,00	1.173.510.368.320,38	91,61	1.538.474.147.337,86	1.364.512.078.293,30	88,69

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim (diolah), Tahun 2025

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat luar biasa dan tidak direncanakan sebelumnya, serta tidak terjadi secara rutin, seperti penanganan bencana alam maupun bencana sosial. Pos anggaran ini disediakan untuk mengantisipasi kondisi darurat yang memerlukan respons cepat dan tepat dari pemerintah daerah. Penggunaannya mencakup penanggulangan berbagai peristiwa seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, serta kejadian lain yang tidak dapat diprediksi dan membutuhkan tindakan segera. Selain itu, belanja ini juga dapat



dimanfaatkan untuk menangani situasi darurat sosial, termasuk konflik antar warga atau gangguan ketertiban umum yang memerlukan intervensi pemerintah guna menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. Dengan tersedianya anggaran Belanja Tidak Terduga, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas fiskal untuk memberikan bantuan secara cepat, tepat sasaran, dan proporsional, sehingga dampak negatif dari peristiwa yang terjadi dapat ditekan seminimal mungkin serta proses pemulihan dapat berjalan lebih efektif.

Pada Tahun 2025 (*Unaudited*), Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar **Rp5.000.000.000,00**, dengan realisasi sebesar **Rp603.038.711,00** atau **12,06 persen** dari pagu yang tersedia. Sementara itu, pada Tahun 2024 (*Audited*), alokasi Belanja Tidak Terduga sebesar **Rp15.000.000.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp720.000.000,00**, atau **4,80 persen**. Realisasi yang relatif rendah pada kedua tahun tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembiayaan untuk kondisi darurat maupun kejadian luar biasa masih dalam batas terkendali. Adapun rincian target dan realisasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 (*Audited*) - 2025 (*Unaudited*)

KODE	URAIAN	2024 (AUDITED)			2025 (UNAUDITED)		
		TARGET	REALISASI (Rp.)		TARGET	REALISASI	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
5.3. BELANJA TIDAK TERDUGA							
5.3.1	Belanja Tidak Teduga	15.000.000.000,00	720.000.000,00	4,80	5.000.000.000,00	603.038.711,00	4,80
BELANJA TIDAK TERDUGA		15.000.000.000,00	720.000.000,00	4,80	5.000.000.000,00	603.038.711,00	12,06

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim (diolah), Tahun 2025

4) Belanja Transfer

Alokasi Transfer Kabupaten Muara Enim meliputi Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan. Transfer Bantuan Keuangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan penganggaran bantuan yang bersifat umum maupun khusus. Bantuan tersebut dapat diberikan oleh pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, serta pemerintah daerah lainnya, maupun oleh pemerintah kabupaten/kota



kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya, termasuk dukungan kepada partai politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalokasian transfer ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan fiskal dan memperkuat kapasitas keuangan antarlevel pemerintahan. Dengan demikian, setiap tingkatan pemerintahan memiliki dukungan anggaran yang memadai untuk melaksanakan program pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Pada Tahun 2025 (*Unaudited*), Belanja Transfer dianggarkan sebesar **Rp566.024.401.170,00**, dengan realisasi mencapai **Rp558.807.884.166,00** atau **98,72 persen** dari pagu anggaran. Sementara itu, pada Tahun 2024 (*Audited*), anggaran Belanja Transfer sebesar **Rp506.699.877.050,00** dan terealisasi seluruhnya sebesar **Rp506.699.877.050,00**, atau **100 persen**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyaluran transfer, baik dalam bentuk bagi hasil maupun bantuan keuangan, dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan.

Tabel 2.5
Target dan Realisasi Transfer Kabupaten Muara Enim
Tahun 2024 (*Audited*) - 2025 (*Unaudited*)

KODE	URAIAN	2024 (AUDITED)			2025 (UNAUDITED)		
		TARGET	REALISASI (Rp.)		TARGET	REALISASI	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
5.4. BELANJA TRANSFER							
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	22.333.351.461,00	22.333.351.461,00	100,00	38.193.085.729,00	38.181.085.729,00	99,96
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	484.366.525.589,00	484.366.525.589,00	100,00	527.831.315.441,00	520.626.798.437,00	98,63
BELANJA TRANSFER		506.699.877.050,00	506.699.877.050,00	100,00	566.024.401.170,00	558.807.884.166,00	98,72
JUMLAH BELANJA		4.351.719.271.996,21	3.917.575.460.242,96	90,02	4.781.820.110.969,03	4.281.718.954.767,00	89,54
SURPLUS/(DEFISIT)		(654.021.770.081,21)	(3.471.622.184,80)	0,53	(632.081.631.766,00)	(325.516.147.209,10)	51,49

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim (diolah), Tahun 2025

Dalam pelaksanaan pengelolaan belanja daerah, terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian. Pertama, kapasitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan kegiatan dan administrasi keuangan belum sepenuhnya optimal, sehingga berdampak pada kurang efisiennya proses tata kelola keuangan daerah. Kedua, tingkat profesionalisme penyedia jasa pembangunan masih perlu ditingkatkan, yang pada praktiknya memengaruhi mutu pelaksanaan proyek dan



capaian hasil pembangunan. Sebagai respons atas kondisi tersebut, pemerintah daerah melakukan sejumlah langkah perbaikan, antara lain:

- a) Penguatan kapasitas aparatur melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada manajemen program, pelaksanaan kegiatan, serta administrasi keuangan. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- b) Pelaksanaan pembinaan terhadap penyedia jasa pembangunan guna mendorong peningkatan kualitas kerja sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Pembinaan dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek teknis maupun manajerial.
- c) Peningkatan fungsi pengawasan, pengendalian, dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan agar setiap proyek berjalan sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah ditetapkan. Mekanisme ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan memenuhi prinsip efektivitas dan efisiensi, serta mampu menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Melalui berbagai langkah tersebut, diharapkan pengelolaan belanja daerah dapat semakin akuntabel, efisien, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

2.3. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan antara lain bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali atas pinjaman yang telah diberikan, serta penerimaan piutang daerah. Adapun Pengeluaran Pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman kepada pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan pengelolaan pembiayaan yang tepat, pemerintah daerah dapat menjaga kesinambungan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sekaligus memastikan stabilitas dan kesehatan fiskal daerah dalam menghadapi dinamika serta kebutuhan di masa mendatang.

1. Penerimaan Pembiayaan

Pada Tahun 2024 (*Audited*), Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar **Rp660.300.286.213,21** dan terealisasi seluruhnya sebesar



Rp660.300.286.213,21, atau **100 persen** dari target. Sumber utama penerimaan pembiayaan tersebut berasal dari **Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)** serta pencairan dana cadangan. Sementara itu, pada Tahun 2025 (*Unaudited*), Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar **Rp650.550.147.898,00** dan terealisasi sebesar **Rp650.550.147.898,41**, atau **100 persen**. Penerimaan ini sepenuhnya bersumber dari penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun 2024 (*Audited*), Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar **Rp6.278.516.132,00** dan terealisasi sebesar **Rp6.278.516.132,00**, atau **100 persen**, yang digunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Adapun pada Tahun 2025 (*Unaudited*), anggaran Pengeluaran Pembiayaan meningkat menjadi **Rp18.468.516.132,00**, dengan realisasi sebesar **Rp16.278.516.129,04** atau **88,14 persen**. Pengeluaran ini meliputi penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah serta pembayaran pokok utang.

3. Pembiayaan Netto

Pada Tahun 2024 (*Audited*), Pembiayaan Netto dianggarkan sebesar **Rp654.021.770.081,21** dan terealisasi sepenuhnya sebesar **Rp654.021.770.081,21**, atau **100 persen**. Sementara itu, pada Tahun 2025 (*Unaudited*), Pembiayaan Netto dianggarkan sebesar **Rp632.081.631.766,00** dengan realisasi sebesar **Rp634.271.631.769,37**, atau **100,34 persen**. Adapun **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)** tercatat sebesar **Rp650.550.147.898,41** pada Tahun 2024, sedangkan pada Tahun 2025 (*Unaudited*) sebesar **Rp308.755.484.560,27**. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan daerah berjalan sesuai perencanaan serta tetap menjaga keseimbangan fiskal daerah. Rincian target dan realisasi pembiayaan tahun 2024-2025 berdasarkan jenis pembiayaan dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut



Tabel 2.6
Target dan Realisasi Pembiayaan Kabupaten Muara Enim
Tahun 2024 (Audited) - 2025 (Unaudited)

KODE	URAIAN	2024 (AUDITED)			2025 (UNAUDITED)		
		TARGET	REALISASI (Rp.)		TARGET	REALISASI	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
6. PEMBIAYAAN							
6.1	Penerimaan Pembiayaan	660.300.286.213,21	660.300.286.213,21	100,00	650.550.147.898,00	650.550.147.898,41	100,00
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	560.300.286.213,21	560.300.286.213,21	100,00	650.550.147.898,00	650.550.147.898,41	100,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	6.278.516.132,00	6.278.516.132,00	100,00	18.468.516.132,00	16.278.516.129,04	88,14
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	12.190.000.000,00	10.000.000.000,00	82,03
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	6.278.516.132,00	6.278.516.132,00	100,00	6.278.516.132,00	6.278.516.129,04	99,99
PEMBIAYAAN NETTO		654.021.770.081,21	654.021.770.081,21	100,00	632.081.631.766,00	634.271.631.769,37	100,34
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)		650.550.147.898,41			308.755.484.560,27		
TOTAL APBD		3.917.575.460.242,96			4.281.718.954.767,00		

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim (diolah), Tahun 2025

2.4. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan keuangan merupakan instrumen strategis yang menyediakan informasi bagi Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Di dalamnya, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar mengenai sumber pendanaan, alokasi anggaran, serta realisasi penggunaannya dalam satu periode pelaporan. Dokumen



ini memberikan gambaran komparatif antara anggaran yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya, sehingga memungkinkan evaluasi terhadap tingkat pencapaian target dan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Melalui LRA, dapat diidentifikasi sejauh mana prinsip efisiensi dan efektivitas telah diterapkan dalam penggunaan anggaran, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan pada periode berikutnya. Secara substansial, LRA memuat komponen utama berupa pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Pendapatan daerah mencakup penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, serta transfer dari pemerintah pusat. Adapun belanja daerah meliputi pengeluaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta sektor prioritas lainnya yang mendukung agenda pembangunan daerah.

Secara ringkas Laporan Realisasi APBD Kabupaten Muara Enim tahun 2024 (*Audited*) dan 2025 (*Unaudited*) dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.7. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Muara Enim
Tahun 2024 (*Audited*) - 2025 (*Unaudited*)**

KODE	URAIAN	2024 (AUDITED)			2025 (UNAUDITED)		
		TARGET	REALISASI (Rp.)		TARGET	REALISASI	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
4. PENDAPATAN							
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH							
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	102.118.871.536,00	127.905.669.439,00	125,25	195.567.613.344,00	194.665.442.709,58	99,53
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	120.847.143.074,00	113.062.672.451,39	93,56	186.323.243.953,00	173.275.335.331,76	92,99
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	31.102.654.447,00	31.147.873.242,38	100,15	26.552.719.027,07	26.552.719.027,07	100,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.567.181.710,00	110.321.586.565,75	209,87	30.745.227.322,96	54.876.102.665,65	178,48
PENDAPATAN ASLI DAERAH		306.635.850.767,00	382.437.801.698,52	124,72	439.188.803.647,03	449.369.599.734,06	102,31
4.2. PENDAPATAN TRANSFER							
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	3.115.940.499.950,00	3.198.030.938.052,00	102,63	3.384.409.910.660,00	3.178.794.712.284,00	93,92
4.2.2	Transfer Antar Daerah	261.648.113.501,00	326.615.206.547,22	124,83	320.445.539.552,00	319.042.788.205,76	99,56



KODE	URAIAN	2024 (AUDITED)			2025 (UNAUDITED)		
		TARGET	REALISASI (Rp.)		TARGET	REALISASI	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
PENDAPATAN TRANSFER		3.377.588.613.451,00	3.524.646.144.599,22	104,35	3.704.855.450.212,00	3.497.837.500.489,76	94,41
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH							
4.3.1	Pendapatan Hibah	1.325.000.000,00	727.192.879,00	54,88	1.548.000.000,00	2.229.469.761,00	144,02
4.3.2	Pendapatan lainnya	12.148.037.697,00	6.292.698.881,42	51,80	4.146.225.344,00	6.766.237.573,08	163,19
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		13.473.037.697,00	7.019.891.760,42	52,10	5.694.225.344,00	8.995.707.334,08	157,97
JUMLAH PENDAPATAN		3.697.697.501.915,00	3.914.103.838.058,16	105,85	4.149.738.479.203,03	3.956.202.807.557,90	95,33
5. BELANJA							
5.1. BELANJA OPERASI							
5.1.1	Belanja Pegawai	1.201.350.938.398,66	1.059.547.345.085,03	88,20	1.413.990.292.944,69	1.228.547.741.022,42	86,88
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.143.729.958.590,55	997.240.572.419,55	87,19	1.170.205.111.116,48	1.047.806.287.421,44	89,54
5.1.3	Belanja Bunga	9.000.000.000	7.485.321.723,00	83,17	7.000.000.000,00	5.594.914.153,84	79,92
5.1.4	Subsidi	-	-	-	1.206.750.000,00	449.328.000,00	37,23
5.1.5	Hibah	191.550.579.717,00	172.371.975.645,00	89,99	79.919.408.400,00	75.397.682.999,00	94,34
5.1.6	Bantuan Sosial	3.379.800.000,00	0,00	0,00			
BELANJA OPERASI		2.549.011.276.706,21	2.236.645.214.872,58	87,75	2.672.321.562.461,17	2.357.795.953.596,70	88,23
5.2. BELANJA MODAL							
5.2.1	Belanja Modal Tanah	12.382.090.321,00	10.194.664.000,00	82,33	61.975.000.000,00	17.527.346.000,00	28,28
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.456.945.366,00	160.953.164.95,00	86,79	334.352.258.207,17	312.210.171.967,00	93,37
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	218.979.431.746,00	202.931.222.921,64	92,67	344.727.427.152,00	298.572.404.158,98	86,61
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	850.855.615.359,00	786.229.627.683,74	92,40	782.372.452.613,69	721.758.065.918,32	92,25
5.2.5	Belanja Modal Aset	11.792.066.558,00	11.788.479.750,00	99,97	12.997.009.365,00	12.982.234.349,00	99,88



KODE	URAIAN	2024 (AUDITED)			2025 (UNAUDITED)		
		TARGET	REALISASI (Rp.)		TARGET	REALISASI	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
	Tetap Lainnya						
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.541.9687.890,00	1.413.209.060,00	91,65	2.050.000.000,00	1.461.855.900,00	71,31
BELANJA MODAL		1.218.008.118.240,00	1.173.510.368.320,38	91,61	1.538.474.147.337,86	1.364.512.078.293,30	88,69
5.3. BELANJA TIDAK TERDUGA							
5.3.1	Belanja Tidak Teduga	15.000.000.000,00	720.000.000,00	4,80	5.000.000.000,00	603.038.711,00	12,06
BELANJA TIDAK TERDUGA		15.000.000.000,00	720.000.000,00	4,80	5.000.000.000,00	603.038.711,00	12,06
5.4. BELANJA TRANSFER							
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	22.333.351.461,00	22.333.351.461,00	100,00	38.193.085.729,00	38.181.085.729,00	99,96
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan	484.366.525.589,00	484.366.525.589,00	100,00	527.831.315.441,00	520.626.798.437,00	98,63
BELANJA TRANSFER		506.699.877.050,00	506.699.877.050,00	100,00	566.024.401.170,00	558.807.884.166,00	98,72
JUMLAH BELANJA		4.351.719.271.996,21	3.917.575.460.242,96	90,02	4.781.820.110.969,03	4.281.718.954.767,00	89,54
SURPLUS/(DEFISIT)		(654.021.770.081,21)	(3.471.622.184,80)	0,53	(632.081.631.766,00)	(325.516.147.209,10)	51,49
6. PEMBIAYAAN							
6.1	Penerimaan Pembiayaan	660.300.286.213,21	660.300.286.213,21	100,00	650.550.147.898,00	650.550.147.898,41	100,00
6.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	560.300.286.213,21	560.300.286.213,21	100,00	650.550.147.898,00	650.550.147.898,41	100,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	6.278.516.132,00	6.278.516.132,00	100,00	18.468.516.132,00	16.278.516.129,04	88,14
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	12.190.000.000,00	10.000.000.000,00	82,03



KODE	URAIAN	2024 (AUDITED)			2025 (UNAUDITED)		
		TARGET	REALISASI (Rp.)		TARGET	REALISASI	
		(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	6.278.516.132,00	6.278.516.132,00	100,00	6.278.516.132,00	6.278.516.129,04	99,99
PEMBIAYAAN NETTO		654.021.770.081,21	654.021.770.081,21	100,00	632.081.631.766,00	634.271.631.769,37	100,34
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)		650.550.147.898,41			308.755.484.560,27		
TOTAL APBD		3.917.575.460.242,96			4.281.718.954.767,00		

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim (diolah), Tahun 2025



BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAB III	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
BAB IV	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN
BAB V	PENUTUP
LAMPIRAN	

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah berdasarkan urusan, kewenangan, dan tanggung jawab setiap Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menyusun kebijakan pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025 Kepada DPRD Kabupaten Muara Enim.

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, dikelompokkan ke dalam Urusan Wajib dan Pilihan. Urusan Wajib terdiri dari 22 (dua puluh dua) urusan dan Urusan Pilihan terdiri dari 8 (delapan) urusan yang dilaksanakan oleh 58 (lima puluh delapan) Perangkat Daerah, dengan total belanja daerah sebesar **Rp4.781.820.110.969,03** terealisasi besar **Rp4.281.718.954.767,00** atau **89,54 persen** (Unaudited), yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. **Rp2.549.011.276.706,21** dengan realisasi sebesar **Rp2.357.795.953.596,70** atau **88,23 persen** (Unaudited), Belanja Modal sebesar **Rp1.538.474.147.337,86** dengan realisasi sebesar **Rp1.364.512.078.293,30** atau **88,69 persen** (Unaudited), Belanja Tidak Terduga sebesar **Rp5.000.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp603.038.711,00** atau **12,06 persen** (Unaudited) dan Biaya Transfer sebesar **Rp566.024.401.170,00** dengan realisasi sebesar **Rp558.807.884.166,00** atau **98,72 persen** (Unaudited). 22 (dua puluh dua) Urusan Wajib dan 8 (delapan) Urusan Pilihan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan rincian sebagai berikut:



3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib

3.1.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel 3.1
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
yang dilaksanakan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	91,52%			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	45,38%	tidak terealisasinya penganggaran gaji tenaga operator komputer non-ASN selama 4 bulan, dikarenakan tenaga operator komputer non-ASN tersebut sudah diangkat	Penganggaran gaji tenaga operator komputer non-ASN akan dialihkan kebelanja gaji PPPK paruh waktu	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							menjadi PPPK.		
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	31,50%	tidak terealisasinya penganggaran gaji tenaga operator komputer non-ASN selama 4 bulan, dikarenakan tenaga operator komputer non-ASN tersebut sudah diangkat menjadi PPPK, dan tidak terealisasinya anggaran DED Pembangunan MESS Mahasiswa Putri Yogyakarta karena kegiatan tersebut dibatalkan	Penganggaran gaji tenaga operator komputer non-ASN akan dialihkan kebelanja gaji PPPK paruh waktu, dan DED pembangunan MESS mahasiswa putri akan dialihkan ke pembangunan MESS mahasiswa putra pada tahun 2026	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	68,80%	tidak terealisasinya penganggaran gaji tenaga operator	Penganggaran gaji tenaga operator komputer non-ASN akan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							komputer non-ASN selama 4 bulan, dikarenakan tenaga operator komputer non-ASN tersebut sudah diangkat menjadi PPPK.	dialihkan belanja gaji PPPK paruh waktu	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	60,61%	tidak terealisasinya penganggaran gaji tenaga operator komputer non-ASN selama 4 bulan, dikarenakan tenaga operator komputer non-ASN tersebut sudah diangkat menjadi PPPK.	Penganggaran gaji tenaga operator komputer non-ASN akan dialihkan belanja gaji PPPK paruh waktu	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	72,52%	tidak terealisasinya penganggaran gaji tenaga operator komputer non-	Penganggaran gaji tenaga operator komputer non-ASN akan dialihkan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							ASN selama 4 bulan, dikarenakan tenaga operator komputer non-ASN tersebut sudah diangkat menjadi PPPK.	kebelanja gaji PPPK paruh waktu	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	51,55%	tidak terealisasinya penganggaran gaji tenaga operator komputer non-ASN selama 4 bulan, dikarenakan tenaga operator komputer non-ASN tersebut sudah diangkat menjadi PPPK.	Penganggaran gaji tenaga operator komputer non-ASN akan dialihkan kebelanja gaji PPPK paruh waktu	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	62,58%	tidak terealisasinya penganggaran gaji tenaga operator komputer non-ASN selama 4	Penganggaran gaji tenaga operator komputer non-ASN akan dialihkan kebelanja gaji	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							bulan, dikarenakan tenaga operator komputer non-ASN tersebut sudah diangkat menjadi PPPK.	PPPK paruh waktu	
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	75,01%	tidak terealisasinya penganggaran gaji tenaga operator komputer non-ASN selama 4 bulan, dikarenakan tenaga operator komputer non-ASN tersebut sudah diangkat menjadi PPPK.	Penganggaran gaji tenaga operator komputer non-ASN akan dialihkan kebelanja gaji PPPK paruh waktu	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Negara	100%	91,82%			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	91,82%			
				Sub Kegiatan Penyediaan	100%	78,98%	tidak terealisasinya	Penganggaran gaji tenaga	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			penganggaran gaji tenaga operator komputer non-ASN selama 4 bulan, dikarenakan tenaga operator komputer non-ASN tersebut sudah diangkat menjadi PPPK.	operator komputer non-ASN akan dialihkan kebelanja gaji PPPK paruh waktu	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	88,15%			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100%	82,48%			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	98,78%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	99,74%			
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	79,30%	tidak terealisasinya penganggaran gaji tenaga operator komputer non-ASN selama 4 bulan, dikarenakan tenaga operator komputer non-ASN tersebut sudah diangkat menjadi PPPK.	Penganggaran gaji tenaga operator komputer non-ASN akan dialihkan kebelanja gaji PPPK paruh waktu	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	16,98%			
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	16,98%	Biaya setor pelaksanaan diklat BCKS tidak dapat dilaksanakan/ dir ealisasikan, karena BGTK selaku pelaksana	untuk pelatihan BCKS akan diusulkan melalui anggaran BKPSDM Kab.Muara Enim	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							kegiatan tidak memiliki izin dari Kemendikbud RI, hal ini dikarenakan Struktur Organisasi BGTK belum ditetapkan sebagai BLUD yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan diklat secara mandiri.		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	87,44%			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	98,32%			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	100%	98,37%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	90,31%			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	70,53%	Selisih Satuan Harga antara DPA dan E-Katalog, sehingga yang direalisasikan sesuai dengan real cost/ harga pasar.	anggaran akan disesuaikan dengan satuan harga yang paling mendekati dengan real cost/ harga pasar.	
				Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	5,60%			
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	33,13%	Kegiatan makan dan minum hanya bisa dilaksanakan ketika rapat dengan pihak ketiga, sehingga terjadi keterbatasan untuk pencairan dana	ditahun 2026 anggaran makan minum akan disesuaikan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	94,60%			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	93,73%			
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	93,36%			
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel kantor (APBD-P)	100%	99,93%			
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	100%	93,55%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	67,68%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	72,05%	Selisih Satuan Harga antara DPA dan E-Katalog, sehingga yang direalisasikan sesuai dengan real cost/ harga pasar.	anggaran akan disesuaikan dengan satuan harga yang paling mendekati dengan real cost/ harga pasar.	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	64,01%	Anngaran Iconnect untuk sekolah tidak terealisasi, hal ini dikarenakan sekolah belum berlangganan Iconnect	untuk tahun 2026 sekolah akan berlangganan iconnect	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	84,38%			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	98,01%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	84,22%			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	79,10%			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	100%	98,73%			
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	100%	96,48%			
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar	100%	96,02%			
				Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru Sekolah/Kepala Sekolah/TU	100%	99,87%			
				Sub Kegiatan Pembangunan Ruang	100%	99,82%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Unit Kesehatan Sekolah					
				Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	100%	98,66%			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100%	99,92%			
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	100%	99,80%			
				Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	100%	99,84%			
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	100%	99,89%			
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	100%	99,89%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SD)	100%	82,92%			
				Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (SD)	100%	79,52%	Anggaran belanja makan dan minum rapat kegiatan BIMTEK Akreditasi tidak direalisasikan, hal ini dikarenakan biaya makan dan minum BIMTEK Akreditasi telah tercukupi dengan biaya belanja sewa hotel.	Anggaran Belanja Makan dan Minum BIMTEK ditahun 2026 tidak dianggarkan kembali.	
				Sub Kegiatan Pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar (SD)	100%	93,21%			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar (SD)	100%	98,63%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	100%	99,87%			
				Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100%	82,27%			
				Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan	100%	90,46%			
				Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	100%	49,50%	Anggaran belanja perjalanan Dinas tidak terealisasi seluruhnya, hal ini dikarenakan sesuai dengan surat edaran Bupati No.6 tahun 2025 tentang penyesuaian Pendapatan dan	Untuk tahun 2026 perjalanan Dinas diformulasikan sesuai dengan kebutuhan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD 2025.		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	95,15%			
				Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	100%	87,10%			
				Sub Kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta didik	100%	96,55%			
				Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta didik	100%	98,86%			
				Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	100%	99,29%			
				Sub Kegiatan Rehabilitasi	100%	96,86%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sedang/ Berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah					
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100%	97,25%			
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah	100%	99,24%			
				Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	100%	94,15%			
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%	97,52%			
				Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	100%	99,80%			
				Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan	100%	99,82%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sekolah					
				Sub Kegiatan Pembangunan Laboratorium (SMP)	100%	99,56%			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	100%	99,89%			
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	100%	94,98%			
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	100%	59,18%	Satu bangunan tidak direalisasikan yaitu SMPN 6 Gelumbang, karena sudah dianggarkan dianggarkan revitalisasi	ditahun 2026, akan disesuaikan antara anggaran APBD dan Revitalisasi	
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah	100%	99,83%			
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	100%	99,89%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sekolah (SMP)					
				Sub Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (SMP)	100%	70,37%	Kegiatan PKS SMP tidak bisa direalisasikan uang saku peserta, honor pendamping dalam Kabupaten karena tidak ada SK Bupati, sewa Bis PKS sudah direalisasikan oleh Polres, dan Hadiah O2SN tidak terealisasikan karena kegiatan O2SN tersebut masih tahap uji coba pelaksanaan		
				Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (SMP)	100%	50,02%	Anggaran Perjalanan Dinas pada kegiatan ini tidak terealisasikan dikarenakan tidak ada yang lolos seleksi adiwiyata		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							ditingkat Nasional, dan ditingkat Kabupaten hanya sebagian sekolah yang mengikuti seleksi Adiwiyata		
				Sub Kegiatan Pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP)	100%	99,40%			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP)	100%	96,36%			
				Sub Kegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	100%	94,99%			
				Sub Kegiatan Pengembangan konten digital untuk	100%	86,87%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				pendidikan					
				Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan (SMP)	100%	86,53%			
				Sub Kegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	87,44%			
				Sub Kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	100%	54,95%	Anggaran Perjalan Dinas pada kegiatan ini tidak terealisasikan karena padatnya kegiatan di Kabupaten Muara Enim seperti HUT Kabupaten, Gebyar Kreativitas Siswa dan lain-lain.		
				Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	100%	99,56%			
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis,	100%	88,82%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (SMP)					
				Sub Kegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta didik (SMP)	100%	99,45%			
				Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa	100%	97,42%			
				Sub Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	100%	98,83%			
				Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	100%	96,36%			
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia dini	100%	96,49%			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana	100%	97,60%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan Utilitas PAUD					
				Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	100%	88,08%			
				Sub Kegiatan Pengelolaan dana BOP PAUD	100%	97,33%			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dana BOP PAUD	100%	92,43%			
				Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan PAUD	100%	94,64%			
				Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	100%	99,86%			
				Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta didik PAUD	100%	98,98%			
				Sub Kegiatan Rehabilitasi	100%	95,74%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah					
				Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	100%	95,34%			
				Sub Kegiatan Pengelolaan dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	100%	94,64%			
				Sub Kegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	100%	91,71%			
				Sub Kegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan	100%	79,96%			
				Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru	100%	99,85%			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana	100%	99,75%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan Utilitas Pendidikan Non Formal					
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	100%	91,04%			
				Kegiatan Penetapan Kurikulum Muata Lokal Pendidikan Dasar	100%	91,04%			
				Sub Kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100%	91,04%			
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	100%				
				Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/	100%	85,34%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kesetaraan					
				Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non formal/Kesetaraan	100%	77,32%	Adanya beberapa komponen kegiatan yang terdampak pengurangan efisiensi anggaran sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara penuh.		
				Sub Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	100%	86,37%			
					100%				
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	100%	69,64%			
				Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam	100%	35,55%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Daerah Kabupaten/Kota					
				Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	100%	35,55%	tidak terlaksananya kegiatan sosialisasi Perda Baju Adat, dikarenakan dana yang dianggarkan tidak mencukupi untuk mendapatkan hasil/output yang diharapkan, karena harus melibatkan banyak pihak antara lain Narasumber dari Akademisi, Ahli antropologi Budaya, Sejarawan, desainer, dan lain-lain.	ditahun 2026, penambahan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan dana.	
				Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat	100%	61,88%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				Sub Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	100%	61,88%	pada kegiatan karnaval budaya ada beberapa item yang tidak bisa dicairkan karena ada bantuan dari sponsor/swasta, yaitu tenda riqqing, lighting, blower.	ditahun 2026, penambahan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan dana.	
				Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	90,90%			
				Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	100%	90,90%			
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	100%	64,92%			
				Pembinaan Kesenian	100%	64,92%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	100%	54,06%	Uang Saku Anggota Paduan suara dan honorarium pelatih paduan suara terealisasi hanya sat adanya kegiatan, sedangkan kegiatan yang diikuti tidak sebanyak anggaran yang ditetapkan	ditahun 2026, penambahan anggaran menyesuaikan dana yang dianggarkan dengan banyaknya kegiatan tampil.	
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	100%	98,63%			
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	100%	87,07%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	87,07%			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	100%	87,07%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100	88,51			1. Komisi IV DPRD mendorong agar akses kesehatan merata dan respons tenaga kesehatan lebih cepat, sebagai indikator kepuasan masyarakat terhadap Dinas Kesehatan.
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	48,29			2. Beberapa Puskesmas dan Rumah Sakit mengalami masalah dengan alat kesehatan yang tidak dapat berfungsi, karena tidak ada SDM yang mengoperasikannya atau karena alat tersebut rusak. Oleh karena itu, Komisi IV DPRD merekomendasikan pengadaan alat kesehatan harus diimbangi dengan ketersediaan SDM yang memadai. Selain itu, dilakukan



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									inventarisasi alat kesehatan dengan memperhatikan kondisi dan ketersediaan tenaga medis.
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	47,60	Terdapat beberapa pembangunan atau rehab yang dilaksanakan menggunakan anggaran perubahan Tahun 2025 sehingga anggaran untuk pembuatan beberapa DED tidak terealisasi.	Telah terpenuhi sesuai kebutuhan	3. Komisi IV DPRD mengusulkan untuk mempermudah akses BPJS di setiap tingkat fasilitas kesehatan, agar mobilitas dan perpindahan pasien menjadi lebih efisien.
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	36,45	Anggaran cetak RKA telah disiapkan, namun karena tidak ada permintaan cetak RKA dalam jumlah banyak maka anggaran tidak	Telah terpenuhi sesuai kebutuhan	4. Komisi IV DPRD merekomendasikan untuk meningkatkan kompetensi perawat melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas kesehatan sangat penting agar tenaga kesehatan



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							terrealisasi.		semakin profesional.
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	29,43	Anggaran cetak RKA Perubahan telah disiapkan, namun karena tidak ada permintaan cetak RKA Perubahan dalam jumlah banyak maka anggaran tidak terealisasi.	Telah terpenuhi sesuai kebutuhan	5. Mengenai kondisi RSUD di Gelumbang, Semendo, dan Lubai Ulu yang belum memiliki ruang operasi dan ruang anastesi yang representatif, Komisi IV DPRD merekomendasikan agar fasilitas tersebut segera dibangun beserta tenaga medis yang diperlukan untuk mendukung layanan darurat.
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100	80,11	Anggaran cetak DPA telah disiapkan, namun karena tidak ada permintaan cetak DPA dalam jumlah banyak maka anggaran tidak terealisasi.	Telah terpenuhi sesuai kebutuhan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100	68,90	Anggaran cetak DPA Perubahan telah disiapkan, namun karena tidak ada permintaan cetak DPA Perubahan dalam jumlah banyak maka anggaran tidak terealisasi.	Telah terpenuhi sesuai kebutuhan	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	100	81,00	Terdapat perbedaan antara harga satuan yang tercantum dalam DPA dengan harga riil di lapangan.	Telah terpenuhi sesuai kebutuhan.	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	52,43	Tidak terdapat cek karena seluruh transaksi Bendahara Pengeluaran telah dilaksanakan melalui e-Banking	Telah terpenuhi sesuai kebutuhan dan akan tetap melakukan transaksi melalui e-Banking	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	88,60			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	88,61			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	48,55	Laporan keuangan telah disusun menggunakan sistem aplikasi keuangan sehingga mengurangi cetak laporan keuangan.	Telah terpenuhi sesuai kebutuhan dan akan tetap menyusun laporan keuangan menggunakan sistem aplikasi keuangan	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	66,52			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	65,76	1) Terdapat SILPA ATK Monev Angka Kredit akibat penyesuaian harga toko; 2) Pada kegiatan Nakesdan, tidak seluruh puskesmas mengirimkan	1) Menyesuaikan perencanaan pengadaan ATK Monev dengan harga toko untuk meminimalkan SILPA; 2) Mendorong seluruh puskesmas mengirimkan peserta sesuai seluruh	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							peserta untuk kesembilan kategori; dan 3) Pada kegiatan diklat dan bimbingan teknis, anggaran perjalanan Dinas bimbingan teknis belum mencukupi.	kategori pada kegiatan Nakesdan; dan 3) Menyusun anggaran perjalanan Dinas bimbingan teknis secara memadai agar kegiatan diklat dan bimbingan teknis dapat terlaksana dengan optimal.	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	100,00			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	72,85			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	20,54	Sebelumnya telah dilakukan koordinasi dengan pihak PLN terkait perkiraan dana yang dibutuhkan untuk penambahan daya listrik pada	dilakukan pengkajian ulang dengan pihak terkait	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							24 Puskesmas. Dari hasil koordinasi tersebut diperoleh estimasi biaya yang kemudian dimasukkan ke dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Namun, pada saat pelaksanaan dilakukan kembali koordinasi dengan pihak PLN dan pihak-pihak terkait lainnya, diketahui bahwa anggaran yang telah disiapkan belum mencukupi untuk merealisasikan penambahan daya pada 24		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Puskesmas, karena belum termasuk biaya Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan Nomor Identitas Instalasi (NIDI) untuk setiap penambahan daya per Puskesmas.		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	76,26	Sebagian barang dapat diperoleh dengan harga satuan lebih rendah dari yang direncanakan dalam DPA.	Telah terpenuhi sesuai kebutuhan	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	72,93	Sebagian barang dapat diperoleh dengan harga satuan lebih rendah dari yang direncanakan dalam pagu anggaran, sehingga	Telah terpenuhi sesuai kebutuhan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							meskipun volume fisik tercapai atau mendekati target, nilai realisasi keuangan menjadi lebih kecil dibandingkan pagu yang telah ditetapkan.		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	52,90	Sebagian barang dapat diperoleh dengan harga satuan lebih rendah dari yang direncanakan dalam pagu anggaran, sehingga meskipun volume fisik tercapai atau mendekati target, nilai realisasi keuangan menjadi lebih	Telah terpenuhi sesuai kebutuhan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							kecil dibandingkan pagu yang telah ditetapkan.		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	59,83	realisasi anggaran program penyediaan barang cetak dan penggandaan belum terealisasi sepenuhnya karena komponen penggandaan/f otokopi belum terserap secara optimal akibat kurangnya sosialisasi kepada unit kerja serta masih terbatasnya kebutuhan pencetakan dari pengguna layanan.	Melakukan sosialisasi antar Tim Kerja dan mengadakan MOU kerjasama dengan toko percetakan	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan	100	0,00	Tidak lagi berlangganan	Menghapus anggaran langganan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Peraturan Perundang-undangan			media cetak.	media cetak sehingga realisasi kegiatan sebesar 0 (nol).	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	86,81			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	96,04			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	96,75			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	93,78			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	98,14			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	95,84			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100,00			
				Penyediaan Jasa	100	95,83			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	83,95			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	62,32	Pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi setiap kendaraan operasional Dinas Dinas Kesehatan. administrasi pajak dibayar di bawah harga pagu karena terdapat program pemutihan	Telah terpenuhi sesuai kebutuhan karena terdapat program pemutihan	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	96,53			
				PROGRAM	100	94,73			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	93,76			
				Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	98,18			
				Pengembangan Puskesmas	100	96,90			
				Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	0,00	Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena dokumen atau administrasi belum lengkap	Kegiatan dialihkan pada Tahun Anggaran 2026	
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	100	97,85			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	97,31			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	100	99,27			
				Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	89,85			
				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	100	96,43			
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	90,78			
				Pengembangan Rumah Sakit	100	98,41			
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan	100	94,03			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Minuman di Fasilitas Kesehatan					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	100	89,59			
				distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	100	83,35	Perjalanan Dinas dilakukan sebanyak 12 kali tanpa menginap, sehingga masih terdapat sisa anggaran. Selain itu, terdapat penurunan harga limbah medis antara harga yang tercantum dalam DPA dengan harga yang disepakati pada saat kontrak.	Telah Terpenuhi sesuai Kebutuhan	
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	100	95,62			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Daerah Kabupaten/Kota					
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Hamil Ibu	100	95,56			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bersalin Ibu	100	80,75	Honorarium narasumber tidak direalisasikan seluruhnya karena terdapat narasumber yang tidak dapat hadir pada pelaksanaan kegiatan di Puskesmas Panang Enim.	Melakukan penyesuaian pembayaran honorarium sesuai dengan kehadiran narasumber pada saat pelaksanaan kegiatan.	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Baru Lahir Bayi	100	12,37	Pagu anggaran harga satuan pemeriksaan sampel pada awalnya telah mencakup biaya bahan medis habis pakai (BMHP) dari laboratorium rujukan.	Pagu anggaran disesuaikan dengan ketentuan Kementerian Kesehatan sehingga hanya digunakan untuk pembayaran jasa pemeriksaan dan Puskesmas diarahkan untuk mengajukan klaim	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Namun, berdasarkan kebijakan Kementerian Kesehatan, laboratorium rujukan tidak diperkenankan melakukan pengadaan BMHP, sehingga pagu anggaran tersebut hanya dapat digunakan untuk pembayaran jasa pemeriksaan. Selain itu, pagu anggaran untuk biaya jasa pengiriman sampel ke laboratorium rujukan tidak terealisasi karena tidak terdapat pengajuan klaim pembayaran jasa	biaya pengiriman sampel agar dapat terealisasi sesuai prosedur.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							pengiriman sampel dari Puskesmas.		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100	92,64			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	91,65			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100	87,59			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100	93,28			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	99,51			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes Melitus	100	72,95	Terdapat selisih antara harga satuan pada DPA dengan harga satuan	Telah terpenuhi sesuai kebutuhan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							belanja kegiatan.		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100	89,80			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	65,41	Terdapat selisih antara harga satuan pada DPA dengan harga belanja logistik dan belanja hotel.	Kegiatan telah terlaksana dengan baik.	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100	80,71	Terdapat selisih antara harga satuan pada DPA dengan harga belanja kegiatan hotel dan honorarium narasumber.	Kegiatan telah terlaksana dengan baik.	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	100	64,02	Karena biaya BBM dan kegiatan penyelidikan epidemiologi untuk 2 kasus dilakukan pada 1 Puskesmas.	Kegiatan telah terlaksana dengan baik.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	100	85,84			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gizi	100	67,55	1) Terdapat selisih antara harga satuan pada DPA dengan harga satuan belanja pada pembelian makanan tambahan dan vitamin (PKMK susu); dan 2) Kegiatan Penilaian kinerja Aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi Sumatera Selatan tidak di laksanakan	1) Makanan Tambahan dan Vitamin (PKMK Susu) telah terpenuhi sesuai kebutuhan; dan; dan 2) Berkoordinasi dengan Bappeda Proviinsi terkait pelaksanaan Penilaian Kinerja Stunting untuk tahun yang akan datang	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							sehingga anggaran belanja ATK, cetak, dan perjalanan Dinas luar daerah tidak digunakan/ dikanalir.		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100	91,17			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100	98,03			
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	100	82,92	Terdapat selisih antara harga belanja makan/minum di SIPD dengan harga rill di lapangan (harga rill di lapangan lebih rendah)	Kegiatan telah teraksana dengan baik	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	100	81,02	1) Terdapat selisih antara harga yang	Menyesuaikan belanja alat/bahan kantor dan sewa	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			tercantum di DPA dengan harga riil belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor (ATK) serta belanja sewa hotel fullboard pada pertemuan monitoring dan evaluasi program Kestrad; 2) Perjalanan Dinas dalam daerah monitoring dan evaluasi kestrad terdapat Silpa BBM; dan 3) Selain itu, perjalanan Dinas luar daerah tidak menggunakan biaya penginapan hotel serta tidak memerlukan	hotel fullboard dengan harga riil dan mengalokasikan perjalanan Dinas sesuai kebutuhan.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							BBM karena menggunakan travel.		
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	83,98	Terdapat selisih antara harga satuan pada DPA dengan harga rill belanja sewa hotel (fullboard)	Menyesuaikan dengan harga rill belanja sewa hotel (fullboard) dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	100	94,87			
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	100	87,13			
				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	76,78	Terdapat selisih antara harga satuan pada DPA dengan harga rill belanja sewa hotel (fullboard)	Menyesuaikan dengan harga rill belanja sewa hotel (fullboard) dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100	99,14			
				Deteksi dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	100	81,98	Harga belanja kegiatan yang dilakukan dibawah harga pagu anggaran.	Telah Terpenuhi sesuai Kebutuhan	
				Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100	6,61	1) realisasi biaya tiket perjalanan dan dana DAK Non Fisik tidak terlaksana karena kegiatan masih menggunakan dana APBD; dan 2) Bahan medis habis pakai (BMHP) untuk pemeriksaan HPV DNA baru dapat didistribusikan ke Puskesmas pada bulan November.	Menggunakan dana APBD untuk melaksanakan kegiatan serta mendistribusikan BMHP pemeriksaan HPV DNA ke Puskesmas segera setelah tersedia pada bulan November.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100	79,70	1) Kegiatan konsultasi dan koordinasi ke Provinsi hanya tercapai 4 dari 5 kali pertemuan, dengan realisasi keuangan sebesar 46% karena durasi perjalanan yang berbeda dari perencanaan (1 hari realisasi, 2 hari anggaran); dan 2) Bimbingan teknis ke kecamatan terealisasi 11 dari 13 lokasi, dengan realisasi 65% karena perbedaan antara alokasi anggaran BBM, dan pemakaian riil di lapangan	Menyesuaikan penggunaan anggaran dengan durasi dan kebutuhan riil di lapangan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	61,05	Beberapa alat belanja modal tidak terealisasi karena barang yang dimaksud belum tersedia atau belum tercantum dalam sistem SIPD.	Tidak melakukan pembelian alat belanja modal yang tidak tersedia atau belum terdaftar di SIPD sesuai ketentuan.	
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	100	82,80	Kegiatan workshop penyusunan PPS pasca akreditasi belum dapat dilaksanakan karena akreditasi pada 2 Puskesmas baru dilaksanakan pada bulan Desember 2025, sehingga kegiatan tersebut tidak terealisasi.	Menunda pelaksanaan workshop hingga akreditasi Puskesmas selesai.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100	84,52	Terdapat selisih antara harga satuan pada DPA dengan harga rill belanja sewa hotel (fullboard)	Menyesuaikan dengan harga rill belanja sewa hotel (fullboard) dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.	
				Pelaksanaan Kewaspadaan dini dan Respon Wabah	100	84,56	Terdapat selisih antara harga satuan pada DPA dengan harga rill belanja sewa hotel (fullboard)	Menyesuaikan dengan harga rill belanja sewa hotel (fullboard) dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.	
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	100	99,84			
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	100	80,91	Terdapat selisih antara harga satuan pada DPA dengan harga rill belanja sewa hotel (fullboard)	Menyesuaikan dengan harga rill belanja sewa hotel (fullboard) dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.	
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang	100	81,06	Terdapat selisih antara harga satuan pada	Kegiatan Terlaksana dengan Baik	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dengan HIV (ODHIV)			DPA dengan harga rill belanja sewa hotel (fullboard) dan honorarium narasumber		
				Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	100	82,81	Terdapat selisih antara harga satuan pada DPA dengan harga rill belanja sewa hotel dan pengadaan BMHP	Kegiatan Terlaksana dengan Baik	
				Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	100	79,80	Terdapat perjalanan Dinas yang tidak dilaksanakan karena adanya kesalahan penginputan data di SIPD sehingga terjadi penginputan ganda (terduplikasi)	Telah terpenuhi sesuai kebutuhan.	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	100	74,53	Terdapat selisih antara harga satuan Kartu	Melakukan belanja sesuai dengan harga di katalog	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Reproduksi			Calon Pengantin Sehat dengan harga di katalog pembelian.	pemberlian.	
				Pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	100	54,20	Belum seluruh bayi baru lahir dilakukan pemeriksaan SHK karena sebagian orang tua menolak pengambilan sampel darah, serta Puskesmas tidak mengajukan klaim jasa pengiriman sampel SHK.	Kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan	
				Pengelolaan Layanan Imunisasi	100	84,61	Terdapat selisih antara harga satuan pada DPA dengan harga riil belanja alat tulis kantor, sewa hotel (fullboard), dan BBM.	Telah terpenuhi sesuai kebutuhan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	100	82,58	1) Terdapat selisih antara harga di DPA dengan harga dari toko pada belanja barang habis pakai; 2) Belanja perjalanan Dinas dalam daerah mengalami silpa pada biaya BBM; dan 3) Belanja perjalanan Dinas luar daerah dalam provinsi tidak menggunakan biaya penginapan hotel, serta biaya BBM tidak digunakan karena perjalanan menggunakan travel.	Telah terpenuhi sesuai kebutuhan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	100	93,12			
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100	93,12			
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	94,76			
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	100	97,98			
				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	100	93,09			
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	100	85,16			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				KESEHATAN					
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100	84,52			
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	100	84,59	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa PPPK Paruh Waktu telah terpenuhi. Namun, terdapat perbedaan jumlah orang yang terinput di SIPD dengan jumlah orang rill di lapangan.	Telah Terpenuhi Sesuai Kebutuhan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100	79,77	Adanya penganggaran untuk uang transport dan uang harian pada perjalanan Dinas dalam daerah dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggara n Labkesmas Tingkat 1, sedangkan ketentuan hanya memperbolehk a n penggunaan uang harian. Akibatnya, anggaran untuk uang transport tidak dapat dibelanjakan sehingga realisasi kegiatan tidak maksimal.	Menyesuaikan penggunaan anggaran dengan ketentuan yang berlaku	
				Pengembangan Mutu dan	100	87,73			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	87,73			
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100	78,66			
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	90,85			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	90,85			
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	85,46			
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri	100	85,46			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	100	63,24			
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	100	63,24	1) Kegiatan Food Security dilaksanakan sebanyak 3 kali di dalam kota/kabupaten sehingga tidak memerlukan biaya perjalanan Dinas; dan 2) Belanja modal tidak terealisasi	anggaran perjalanan Dinas untuk kegiatan Food Security dikurangi, sedangkan belanja modal yang tidak terealisasi dialihkan ke bagian umum.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							akibat keterlambatan proses.		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100	79,14			
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	91,27			
				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100	91,27			
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	76,67			
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup	100	76,67	Terdapat selisih antara harga satuan belanja	Telah terpenuhi sesuai kebutuhan dan kegiatan telah	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Bersih dan Sehat			makan dan minum yang tercantum dalam SIPD dengan harga riil di lapangan. Selain itu, waktu pelaksanaan kegiatan sangat terbatas karena kegiatan tersebut dilaksanakan pada awal bulan November dengan menggunakan dana ABT.	dilaksanakan.	
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	77,72			
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan	100	77,72	Pelaksanaan kegiatan digabungkan	Kegiatan telah terlaksana dengan baik.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)			dengan kegiatan lainnya, sehingga tidak dapat melakukan belanja BBM pada salah satu kegiatan. Selain itu, terdapat kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Urusan Wajib Kesehatan	RSUD M H RABAIN							
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	100	86,16			
				PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	100	99,66			
				PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	100	85,61	Capaian Kinerja BLUD yang kurang maksimal	Peningkatan Kinerja Pelayanan, Kinerja Keuangan BLUD, capaian SPM dan IKM yang baik.	
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100	94,31			
				PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM dan UKP	100	94,31			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN / KOTA					
				sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	100	97,67	Kondisi gedung yang sudah cukup layak untuk dilakukan renovasi dan pemeliharaan	Melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan gedung bangunan kantor dan ruang rawat	Telah dilaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi gedung bangunan kantor dan ruang rawat inap dengan menggunakan anggaran APBD Perubahan Tahun 2025
				Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	92,81			
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas	100	98,7			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100				
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100				
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100				
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100				
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100				
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100				
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100				
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100				
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100				
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	54,23				
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman	50,00				



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	54,23				
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	79,26	76,06			
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	79,26	76,06			
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	60,00				
				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	60,00				



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	88,00	90,72			
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	88,00	90,72			
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	60,00				
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	60,00				
				PROGRAM PENATA BANGUNAN GEDUNG	55,00				
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung					
				PROGRAM PENYELENGGARAAN	89,88				



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				JALAN					
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	81,15				
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	100				
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100				
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	100				
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	100				
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten Muara Enim	100				
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100				
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100				



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Perumahan dan Pertanahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	92,43%			Komisi II : DPRD menekankan pentingnya peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman melalui penyusunan rencana dan program kerja yang mencakup pembangunan infrastruktur dasar, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum lainnya.
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			Tindak Lanjut : Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman dengan membangun infrastruktur dasar dan ruang



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									terbuka hijau (RTH) memerlukan strategi terpadu yang melibatkan perencanaan yang matang dan kolaborasi berbagai pihak guna menciptakan hujian yang layak dan berkelanjutan.
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			Komisi II : Pelaksanaan dan evaluasi terhadap bidang perumahan, baik yang bersifat umum dan khusus, harus dilakukan secara berkala.
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%			Tindak Lanjut : Evaluasi di bidang perumahan memang penting



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									untuk dilaksanakan secara berkala, hal diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan program yang berjalan tetap relevan, efektif, dan mampu menyelesaikan permasalahan perumahan di masyarakat. Evaluasi dilakukan bersama-sama sesuai tahapan kegiatan tersebut.
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	40%			Komisi II : Dalam aspek pertanahan, DPRD meminta agar Dinas menangani secara serius urusan perizinan,



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									pengadaan lahan, serta penyelesaian sengketa tanah.
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			Tindak Lanjut : Perizinan: Bidang Pertanahan Dinas Perkimtan senantiasa selalu berkoordinasi dengan OPD Teknis terkait perizinan. Pengadaan Lahan: Bidang Pertanahan akan mengakomodir seluruh usulan pengadaan lahan untuk kepentingan umum dari Dinas/Instansi yang memerlukan tanah. Penyelesaian sengketa tanah: Bidang



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Pertanahan akan berkoordinasi dengan OPD terkait dalam rangka fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan.
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			Komisi II : Menyoroti Program bedah rumah, DPRD meminta agar dilakukan verifikasi yang lebih mendalam melalui survei langsung ke lapangan guna memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, sehingga program tersebut tepat sasaran dan efektif.



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			Tindak Lanjut : Proses verifikasi dan survey yang dilakukan selama ini akan ditingkatkan lagi dengan melibatkan peran serta Pemerintah Desa dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), serta melakukan verifikasi data calon penerima bantuan bedah rumah melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional agar tepat sasaran dan efektif.
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
			Meningkatkan Infrastruktur	Program Pengembangan	5 Unit	79%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dan Supratraktur Dasar yang Unggul dan Merata	Perumahan					
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	100%			
				Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	100%			
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	16%			
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Kawasan Permukiman	552,09 Ha	99,87%			
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100%	100%			
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	100%	99,73%			
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	3 Jenis	99,67%	Terdapat 10 paket kegiatan fisik yang belum selesai pada Tahun Anggaran 2025.	diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan dengan tetap diberlakukan denda sesuai dengan kesepakatan.	
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	100%	99,67%			
				Program Penyelesaian	12 Kasus	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sengketa Tanah Garapan					
				Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100%	100%			
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	5 Persil	73,90%	Terdapat 4 kegiatan pengadaan tanah yang tidak terealisasi pada Tahun Anggaran 2025	Akan dikaji ulang pada tahun anggaran selanjutnya.	
				Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Penatagunaan Tanah	2 Persil	100%			
				Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	100%	100%			
				Program Penatagunaan Tanah	10 Dokumen	100%			
				Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		85,64			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100,00	86,02			
				PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	100,00	94,82			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00	92,43			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100,00	97,81			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100,00	98,44			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100,00	92,87			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100,00	97,53			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar realisasi Kinerja SKPD	100,00	85,30			
				ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	100,00	83,18			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	83,17	Adanya kekosongan ASN di Satuan Polisi Pamong Praja baik 1 (Satu) Orang Kepala Satuan, 1 (Satu) Orang Kepala Bidang, dan 1 (Satu) Orang Kepala Seksi dan 2 (dua) Orang Staf.	Koordinasi intensif dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mengusulkan penunjukan pelaksana tugas (Plt.) atau pelaksana harian (Plh.) pada jabatan yang mengalami	Menindaklanjuti koordinasi dengan BKPSDM melalui penyampaian usulan penunjukan Plt./Plh. pada jabatan yang kosong serta melakukan evaluasi pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								kekosongan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100,00	95,48			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	100,00	86,19			
				ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	100,00	88,40			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100,00	88,40			
				ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	100,00	49,04			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (ABT)	100,00	100,00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	100,00	93,97			
				Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	100,00	21,52	Anggaran dialokasikan untuk persemayaman di luar daerah sebanyak 2 (kali) tidak terealisasi.	Melakukan evaluasi perencanaan dan menyesuaikan perencanaan anggaran dengan kebutuhan riil dan potensi kejadian pada tahun berikutnya.	Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyesuaian alokasi dan perencanaan anggaran pada tahun berikutnya agar sesuai dengan kebutuhan riil dan potensi kejadian.
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,00	77,00			
				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	100,00	90,75			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00	93,19			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100,00	95,66			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,00	76,33			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100,00	99,95			
				Penyediaan Bahan Bacaan perundang-undangan	100,00	55,19	Belanja langganan surat kabar hanya terealisasi 3 (tiga) judul surat kabat dari target 7 (tujuh) judul surat kabar.	Melakukan evaluasi kebutuhan serta menyesuaikan perencanaan belanja langganan surat kabar dengan ketersediaan anggaran dan kebutuhan riil organisasi.	Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan menetapkan prioritas belanja langganan surat kabar serta menyesuaikan alokasi anggaran pada perencanaan tahun berikutnya sesuai kebutuhan instansi.
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00	100,00			
				PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG	100,00	98,91			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				URUSAN PEMERINTAH DAERAH					
				Pengadaan Mebel	100,00	99,12			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00	98,47			
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,00	99,90			
				PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100,00	92,21			
				Penyediaan jasa Surat Menyurat	100,00	85,47			
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100,00	69,17	Efisiensi penggunaan / pemakaian belanja air, listrik dan internet kantor	Melakukan pengendalian dan pemantauan pemakaian air, listrik, dan internet secara berkala.	Menindaklanjuti hasil pemantauan dengan melakukan penyesuaian pola penggunaan serta pengendalian anggaran air, listrik, dan internet pada tahun



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									berikutnya sesuai kebutuhan instansi.
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	100,00	93,25			
				PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100,00	93,54			
				Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Jabatan	100,00	79,66	Tidak terealisasinya pajak kendaraan Dinas plat dua digit. dimana untuk tahun 2025 kendaraan Dinas dua digit hanya sampai dengan nomor urut 30 sedangkan nomot plat yang dimiliki melebihi ketentuan (BG 41 DZ).	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait (BPKAD/BKAD dan Samsat) untuk klarifikasi ketentuan penomoran dan pajak kendaraan Dinas serta Menyesuaikan perencanaan dan penganggaran pajak kendaraan Dinas	Menindaklanjuti hasil koordinasi dengan BPKAD/BKAD dan Samsat melalui penyesuaian status, penomoran, serta penganggaran pajak kendaraan Dinas pada tahun berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								berdasarkan regulasi dan hasil koordinasi.	
				Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,00	96,77			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100,00	68,11	Rendahnya penyerapan keuangan dikarenakan perpajakan izin senpi hanya terealisasi 5 (lima) unit dari target 6 (enam) unit. 1 (satu) unit senpi izin tidak diperpanjang karena rusak berat.	Melakukan inventarisasi dan evaluasi kondisi senjata api secara berkala.	Menindaklanjuti hasil inventarisasi serta mengusulkan penghapusan atau penggantian senjata api pada perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,00	99,80			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,00	82,68			
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100,00	81,84			
				PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1(SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	100,00	81,76			
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	100,00	72,20	Rendahnya penyerapan keuangan dikarenakan tidak terealisasinya perjalanan Dinas kegiatan korsik yang disebabkan tidak adanya undangan dari kecamatan atau	Melakukan koordinasi dan komunikasi aktif dengan kecamatan serta instansi terkait mengenai rencana pelaksanaan kegiatan korsik.	Menindaklanjuti hasil koordinasi dengan kecamatan dan instansi terkait melalui penyusunan jadwal dan perencanaan kegiatan korsik pada tahun berikutnya sesuai



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							instansi lainnya yang berada di luar Kecamatan Muara Enim.		kebutuhan dan potensi pelaksanaan kegiatan.
				Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	100,00	98,61			
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	100,00	66,40	Rendahnya kinerja dan penyerapan keuangan dikarenakan jumlah anggota Satpol PP berkurang signifikan dengan adanya peralihan status dari TKS menjadi PPPK Paruh waktu di OPD lain serta jadwal pelatihan yang direncanakan berbarengan dengan jadwal persiapan dan	Melakukan penyesuaian perencanaan kegiatan dan jadwal pelatihan agar tidak berbenturan dengan tugas pengamanan prioritas serta Mengoptimalkan penugasan dan pemanfaatan personel yang tersedia melalui pengaturan jadwal dan pembagian tugas.	Menindaklanjuti penyesuaian perencanaan dengan menyusun jadwal pelatihan yang terintegrasi dengan kalender tugas pengamanan serta melakukan pengaturan dan evaluasi penugasan personel secara berkala sesuai kebutuhan prioritas.



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							pelaksanaan pengamanan nataru dan pengamanan unjuk rasa sehingga anggota yang mengikuti pelatihan tidak bisa sebanyak target yang ditentukan awal.		
				Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum (ABT)	100,00	95,50			
				Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi dini dan Cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan	100,00	65,69	Rendahnya penyerapan keuangan dikarenakan permintaan pengamanan jumlah poskostis dan rumah ibadah pada hari	Melakukan evaluasi kebutuhan pengamanan berdasarkan permintaan dan realisasi kegiatan tahun berjalan.	Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan menyesuaikan perencanaan dan penganggaran kegiatan pengamanan



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengawasan			besar keagamaan dan tahun baru tidak sebanyak tahun sebelumnya.		pada tahun berikutnya berdasarkan kebutuhan dan permintaan.
				Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Peda dan Perkada melalui Penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa	100,00	98,92			
				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota	100,00	88,52			
				PENEGAKAN PERDA KABUPATEN / KOTA DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA	100,00	82,18			
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	100,00	88,17			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan Bupati / Walikota	100,00	73,06	Rendahnya penyerapan keuangan dikarenakan efisiensi pada belanja bahan cetak, belanja perjalanan Dinas, belanja sewa loader, belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang.	Melakukan evaluasi perencanaan dan realisasi belanja pada setiap jenis kegiatan serta Menyesuaikan perencanaan dan penganggaran belanja dengan kebutuhan instansi.	Menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyesuaian perencanaan dan penganggaran belanja pada tahun berikutnya agar selaras dengan kebutuhan dan prioritas kegiatan instansi.
				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100,00	96,37			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Bidang Ketentraman	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Ururan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100%	86,50%			Terkait rekomendasi Pansus IV DPRD terhadap LKPJ 2024, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim melakukan tindak lanjut dengan mengusulkan penambahan petugas melalui mekanisme <i>outsourcing</i> dan optimalisasi PPPK paruh waktu untuk mengatasi minimnya personil. Selaras dengan instruksi DPRD mengenai standarisasi keahlian, personil baru akan



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									diikutsertakan dalam diklat Pemadam I secara bertahap guna memperoleh sertifikasi kompetensi dasar pemadam dan penyelamatan. Terkait sarana prasarana, Dinas melakukan inventarisir berkala untuk memastikan peralatan dan kendaraan tetap dalam kondisi baik, serta melaksanakan pengadaan secara bertahap dengan skala prioritas guna menyikapi kebijakan efisiensi anggaran akibat



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									pengurangan transfer dana pusat.
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	97,21%			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	83,22%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	99,72%			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	77,93%	Kegiatan ini telah direalisasikan sesuai dengan tagihan dari pihak ketiga serta jumlah kegiatan diklat yang diikuti oleh pegawai	Anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	87,05%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	100%	99,60%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Daerah					
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	78,34%	Kegiatan ini telah direalisasikan sesuai dengan tagihan dari pihak ketiga	Anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	90,31%			
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	100%	89,07%			
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam	100%	92,45%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Daerah Kabupaten/ Kota					
				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100%	92,35%			
				Investigasi Kejadian Kebakaran	100%	98,72%			
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	95,49%			
				Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100%	73,13%	Kegiatan ini telah direalisasikan sesuai dengan jumlah kejadian penyelamatan (rescue) yang dilakukan sepanjang tahun 2025	Anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	59,13			
	Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	92,70			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	100%	83,12	Kegiatan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD tidak terealisasi akibat penyesuaian Mekanisme Pengadaan melalui E-Catalog sehingga tidak sesuai dengan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan	Melakukan Evaluasi Perencanaan dan Mekanisme Pengadaan Melalui E-Katalog guna memastikan Kegiatan dapat terlaksana pada Tahun Anggaran berikutnya	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	100%	89,04			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	100%	99,17			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	88,96			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	50,48			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	50,48	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN karena perkiraan pada Awal Tahun 2025 OPD BPBD Kabupaten Muara Enim meningkat menjadi eselon II.b sehingga untuk anggaran gaji pegawai dianggarkan sesuai dengan kebutuhan peningkatan Eselon dari Eselon III.a	Untuk Anggaran Gaji tetap dianggarkan dan akan disesuaikan kembali sesuai dengan peningkatan Eselon Kantor menjadi Eselon II	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							menjadi Esselon II.b namun sampai Desember 2025 belum terealisasi		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	43,25	Laporan Akhir Tahun Keuangan tidak terealisasi karena akibat penyesuaian Mekanisme Pengadaan melalui E-Catalog sehingga tidak sesuai dengan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan	Melakukan Evaluasi Perencanaan dan Mekanisme Pengadaan Melalui E-Katalog guna memastikan Kegiatan dapat terlaksana pada Tahun Anggaran berikutnya	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100%	80,09	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD karena tidak terealisasi akibat	Melakukan Evaluasi Perencanaan dan Mekanisme Pengadaan Melalui E-Katalog guna memastikan Kegiatan dapat terlaksana pada	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							penyesuaian Mekanisme Pengadaan melalui E-Catalog sehingga tidak sesuai dengan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan	Tahun Anggaran berikutnya	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	91,91			
				Penyusunan perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100%	86,90			
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	99,58			
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	73,01	Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang pada SKPD karena kegiatan Cetak untuk penomoran lebel barang menggunakan Kertas A4 yang	Agar tertib Administrasi dalam Penomoran Barang tetap Bagus untuk Kegiatan Cetak tetap dianggarkan di Tahun berikutnya	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							ditempelkan dengan lakban		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	20,93			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100%	20,93	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi karena Kegiatan Bimtek dan Pelatihan Pengembangan ASN di bidang Kebencanaan Tahun ini hanya belum terlalu banyak sehingga hanya sebagian kegiatan pelatihan serta bimtek yang bisa terserap namun untuk kedepannya tetap dianggarkan dikarenakan	untuk Tahun 2026 tetap dianggarkan dikarenakan akan ada peningkatan Kapasitas SDM melalui Bimtek	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							akan ada peningkatan Kapasitas SDM melalui Bimtek		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	56,45			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	99,67			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	99,70			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	13,13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor karena BBM yang dianggarkan di ABT Tahun 2025 yang diperuntukan untuk alat berat dalam penanganan bencana longsor namun kejadian seperti tanah longsor yang terjadi di tahun 2025 hanya	Sebaiknya untuk Anggaran Tahun 2026 dan 2027 BBM yang di peruntukan untuk Alat Berat tetap di Anggarkan untuk Penanganan Bencana	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							bersekala kecil yang tidak menggunakan alat berat, sehingga penggunaan BBM Alat Berat tidak dapat direalisasikan		
				Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	100%	97,99			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	71,10	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan-Undangan karena beberapa Tabloid/Koran ada yang tidak melakukan penagihan sehingga tidak dilakukan pembayaran	Untuk Tahun berjalan tetap dianggarkan	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	99,87			
				Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	99,41			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
				Pengadaan Mebel	100%	99,99			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	99,25			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	80,93			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	96,21			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	80,32	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik karena Anggaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tidak terealisasi dikarenakan realisasi pemakaian lebih rendah dari perkiraan serta adanya Efisiensi Penggunaan atau At Cost	Melakukan Efisiensi dan Pengendalian Pemakaian Listrik dan Air sehingga realisasi Anggaran lebih rendah dari perkiraan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	79,04			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	10,34	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan karena untuk Pembayaran TNKB (Tanda Lunas Kendaraan Bermotor) dianggarkan 18 Juta tetapi realisasi pembayaran Pajak Berjalan terbayar 1.861.025,00 penyebab Kendaraan	Untuk Kegiatan 2026 dan 2027 tetap dianggarkan sesuai dengan kebutuhan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Dinas Jabatan masih baik tidak mengalami rusak berat dan untuk atau biaya service ringan masih di tanggung oleh pihak Dealer berjalan		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	65,28	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan karena untuk Pembayaran TNKB (Tanda Lunas Kendaraan Bermotor) dianggarkan 18 Juta tetapi realisasi	Untuk Kegiatan 2026 dan 2027 tetap dianggarkan sesuai dengan kebutuhan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							pembayaran Pajak Berjalan terbayar 1.861.025,00 penyebab Kendaraan Dinas Jabatan masih baik tidak mengalami rusak berat dan untuk atau biaya service ringan masih di tanggung oleh pihak Dealer berjalan		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	65,28	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan karena untuk pajak perorangan	Untuk biaya mutasi Plat dan Berkas Administrasi akan segera diusulkan di SIPD Kemendagri Perencanaan/ Anggaran Berjalan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kendaraan Operasional biaya mutasi Plat B ke BG BPBD tidak menganggarkan biaya dari lintas per unit, untuk Kendaraan Roda 2 Operasional dan Kendaraan Roda 4 terbayar		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	99,77			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	99,84			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	78,20	Karena Kegiatan Pemeliharaan/R rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebagian masih dalam kondisi	Untuk lebih cermat dalam menghitung kebutuhan anggaran	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							baik sehingga hanya sedikit memakai biaya pemeliharaan		
				Program Penanggulangan Bencana	100%	73,25			
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100%	85,78			
				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	100%	85,78			
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	80,87			
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	100%	40,13	dikarenakan kegiatan Gladi Kesiapsiagaan berupa apel menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan dan Apel menghadapi banjir dan longsor bekerjasama	Untuk kedepannya agar pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota di Akomodir oleh Pihak BPBD sepenuhnya	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							dengan Instansi terkait dan OPD Lintas Sektor lainnya sehingga ada beberapa yang tidak bisa direalisasikan	supaya tercapai target anggaran yang tersedia oleh karena itu kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota harus dianggarkan karena termasuk di dalam SPM Trantibum linmas	
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	100%	78,07	Gaji TRC hanya dibayarkan sampai bulan 8 dikarenakan telah diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu	Tetap harus dianggarkan dikarenakan untuk pengembangan Kapasitas TRC Lintas Sektor di dalam Penanganan Bencana	
				Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	100%	57,70	dikarenakan SK Bupati untuk Honorarium untuk Tim Tenaga hanya	Tetap harus dianggarkan dikarenakan masa berlakunya	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							bisa dibayarkan selama 3 (tiga) Bulan	Dokumen Renkon selama 3 Tahun dan harus direviu kembali	
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100%	96,63			
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	59,78			
				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	100%	77,44	Karena untuk Kegiatan ATK Cetak Spanduk SPPD terealisasi dengan Kebutuhan tetapi Kegiatan Makan Minum Lintas OPD untuk Kegiatan Kebencanaan tidak ada yang parah dan patal dalam penetapan Status Tanggap Darurat oleh karena itu	Untuk Kegiatan Makan Minum Lintas OPD guna Penanganan Status Tanggap Darurat Bencana Wajib dianggarkan karena bencana tidak bisa di prediksi	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Kegiatan Makan Minum terealisasi sesuai dengan peruntukan dilapangan		
				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	97,00			
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	70,87	karena Kegiatan Pengantaran Logistik yang masih Nihil di Tahun 2025 di 22 Kecamatan 324 Desa, penyebabnya juga banyak pengantaran logistik di dalam Kota Kecamatan Muara Enim	Masih wajib dianggarkan karena kejadian bencana tidak bisa di prediksi	
				Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	100%	41,46	karena uang lelah petugas penanganan bencana tidak terealisasi sesuai dengan anggaran salah	Kegiatan Uang lelah di tahun 2026 dirubah menjadi uang saku petugas penanganan bencana	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							satu penyebabnya Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana tidak begitu panjang dan lama kisaran 1 sampai 2 hari api sudah bisa dipadamkan karena bencana Hidrometeorologi Basah dan Kering tidak begitu parah kejadian masiv		
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	87,83			
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	100%	93,11	karena uang lelah petugas penanganan bencana tidak terealisasi sesuai dengan anggaran salah satu	Kegiatan Uang lelah di tahun 2026 dirubah menjadi uang saku petugas penanganan bencana	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							penyebabnya Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana tidak begitu panjang dan lama kisaran 1 sampai 2 hari api sudah bisa dipadamkan karena bencana Hidrometeorologi Basah dan Kering tidak begitu parah (kejadian masiv		
				Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	100%	95,27			
				Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	100%	100,00			
				Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi	100%	73,75	Koordinasi awal untuk kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Dokumen	perbaiki perencanaan untuk kegiatan yg serupa, serta memperhatikan volume kegiatan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pascabencana (R3P) Kab/Kota			JITUPASNA dan R3P ke BNPB Tidak Melaksanakan kunjungan secara langsung ke BNPB melainkan melalui zoom dan melalui media Handphone, Sehingga biaya Perjalanan Dinas ke BNPB di Jakarta tidak kami Laksanakan secara langsung ke BNPB di Jakarta	perjalan Dinas	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Bidang Sosial	Dinas Sosial		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		87,95			
						91,88			
				Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		73,76			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	80,94			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	74,35	Harga Satuan di SIPD Lebih Besar dari pada Harga di E-catalog	Akan dilakukan Evaluasi Kembali Harga di SIPD dengan Harga Pasar	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1 Dokumen	92,66			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	67,96	Harga Satuan di SIPD Lebih Besar dari pada Harga di E-catalog	Akan dilakukan Evaluasi Kembali Harga di SIPD dengan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Harga Pasar	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	77,84	Harga Satuan di SIPD Lebih Besar dari pada Harga di E-catalog	Akan dilakukan Evaluasi Kembali di SIPD dengan Harga Pasar	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	44,49	dikarenakan tidak terserapnya Gaji Operator Komputer Selama 6 Bulan (1 Orang S1 dan 1 Orang SMA)	Untuk dialihkan dan realisasi belanja ATK tidak terserap dikarenakan pagu anggaran dalam DPA lebih tinggi dari harga pasar saat ini	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		82,11			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34 orang/bulan	82,71			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	5 Laporan	46,77	dikarenakan tidak terserapnya Gaji	Untuk dialihkan dan realisasi	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				tahun SKPD			Operator Komputer Selama 6 Bulan	belanja ATK tidak terserap dikarenakan pagu anggaran dalam DPA lebih tinggi dari harga pasar saat ini	
				Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	15 Laporan	52,86	dikarenakan tidak terserapnya Gaji Operator Komputer Selama 6 Bulan	Untuk dialihkan dan realisasi belanja ATK tidak terserap dikarenakan pagu anggaran dalam DPA lebih tinggi dari harga pasar saat ini	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		80,95			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	6 Orang	80,95			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan Fungsi					
				Administrasi Umum Perangkat Daerah		84,77			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4 paket	97,78			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 paket	77,42	Harga Satuan di SIPD Lebih Besar dari pada Harga di E-catalog	Akan dilakukan Evaluasi Kembali Harga di SIPD dengan Harga Pasar	
				Penyediaan Barang Logistik Kantor	4 Paket	67,01	Karena disesuaikan dengan harga dipasaran	akan dievaluasi dan dikoordinasikan ke bagian yang membidangi	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 paket	100,00			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Dokumen	100,00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	52 Laporan	87,86			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		98,44			
				Pengadaan Mebel	40 Unit	94,38			
				Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	59 Unit	98,29			
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	98,82			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		58,39			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 laporan	89,29			
				Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	53,38	Sesuai pemakaian dan pengurangan daya listrik rumah singgah	Akan di anggarkan sesuai pemakaian	
				Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Laporan	99,77			
				Penyediaan Jasa Pelayan Umum	12 Laporan	57,39	dikarenakan tidak	Untuk dialihkan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kantor			terserapnya Gaji Operator Komputer Selama 6 Bulan	dan realisasi belanja ATK tidak terserap dikarenakan pagu anggaran dalam DPA lebih tinggi dari harga pasar saat ini	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		99,40			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	33 STNK, 9 Unit	99,40			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		71,67			
				Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil		81,15			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	137 Keluarga	81,15			
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota		71,54			
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	64,21	Adanya pengangkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan menjadi PPPK	Optimalisasi anggaran dan koordinasi aturan terkait keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	500075 Jiwa, 3069 Keluarga	69,30	Pendampingan pembuatan regulasi asuransi kematian tidak dapat dilaksanakan karena perubahan regulasi menjadi santunan	Untuk dapat disesuaikan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							kematian, pemberian tali asih pendamping program keluarga harapan (PKH) tidak dapat dibayarkan karena sudah lulus ASN PPK Kementerian Sosial Republik Indonesia		
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Lembaga	88,09			
				Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10 Sertifikat	49,47	Adanya honorarium tim yang tidak dibayarkan dikarenakan tidak adanya konselling dari	Tidak di anggarakan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Masyarakat		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		91,11			
				Pengadaan Mebel		85,97			
				Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	20 Orang	47,62	Karena penganggaran nya dialihkan 7 hari sementara Penerima Manfaat yang berada di rumah singgah hitungan harinya bervariasi (Tidak semua penerima manfaat yang berada di rumah singgah diampu selama 7 hari)	Kegiatan ini tidak dapat prediksi jumlah penerima manfaat PPKS maupun lama mereka dirumah singgah	
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 Orang	48,76	Anggaran tersebut tidak terealisasi berasal dari belanja jasa tenaga	untuk tahun depan tidak dianggarkan lagi dan menunggu outsharsing	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							pelayanan umum dan kebersihan rumah singgah dikareankan adanya pengurangan tenaga honor yang belum mencapai dua tahun sementara tenaga pelayanan umum dan tenaga kebersihan dirumah singgah sudah dirumahkan	dari Pemda Kabupaten Muara Enim	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20 Orang	95,73			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat		92,77			
				Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187 Orang	97,08			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Orang	86,55			
				Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor	40 Orang	82,58			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		88,42			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan		88,66			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	30 Orang	88,66			
				Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil		88,41			
				Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT					
				Pengembangan Potensi Sumber Kesaejahteraan	313998 Orang	73,89	dikarenakan tidak terserapnya gaji	Tidak di anggarkan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sosial Kabupaten/Kota			operator komputer selama 6 bulan (3 orang D3/SMA, dan 2 orang S1)		
				Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	109009 Keluarga	97,84			
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3545 KPM	70,59	dikarenakan tidak terserapnya gaji operator komputer selama 6 bulan (3 orang D3/SMA, dan 2 orang S1)	Tidak di anggarkan	
				Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	80 Orang	96,11			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kabupaten/Kota					
				Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)					
						79,07			
				Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		79,07			
				Penyediaan makanan	450 Orang	79,07	Berkurangnya anggota TAGANA karena lulus PPPK sehingga tali asih tidak dapat lagi diberikan kepada anggota TAGANA yang telah lulus ASN PPPK	Untuk dialihkan	
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		97,24			
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan		97,24			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Nasional Kabupaten/Kota					
				Rehabilitasi Sarana Prasarana	1 Dokumen	97,44			
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Makam	96,44			



3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel 3.2

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			100	90,44			
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan	100	91,98			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	93,58			
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	94,83			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Rka-SKPD	100	94,39			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan	100	92,56			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyusunan Dokumen Perubahan Rka-SKPD					
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dpa-SKPD	100	94,58			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dpa-SKPD	100	92,50			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	100	91,89			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	94,47			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	90,12			
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	100	90,10			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	89,31			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100	89,45			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	95,98			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	100	95,88			
				Kegiatan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100	99,31			
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100	99,31			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	66,40			
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	58,67			
				Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	100,00			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	97,32			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	98,06			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor :	100	95,39			
				- Belanja Barang dan Jasa					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				- Belanja Modal (Alat Penyimpan dan Perlengkapan Kantor)					
				- Belanja Modal (Alat Pendingin)					
				- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					
				- Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)					
				- Belanja Modal Personal Komputer					
				- Belanja Modal Peralatan Personal Komputer					
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	99,01			
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	91,32			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	100	70,50			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perundang-Undangan					
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	99,99			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	99,68			
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	100	99,68			
				- Belanja Modal Mebel (Kursi Kerja dan Meja 1/2 Biro)					
				- Belanja Modal Mebel (Meja Kerja Es Li dan Tempat Tidur Asrama)					
				Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	99,84			
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana	100	99,84			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	85,30			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	99,93			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	78,99			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	98,38			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	92,89			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100	97,04			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemerintah Daerah					
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	100	89,58			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	99,50			
				- Perbaikan Toilet Kantor Lantai Ii	100				
				- Pengecatan Gedung Kantor Luar	100				
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	98,63			
				Program Perencanaan Tenaga Kerja	100	92,72			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (Rtk)	100	92,72			
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	100	92,72			
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100	81,24			
				Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	100	80,77			
				Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	100	80,77			
				Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100	99,89			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	100	99,89			
				Kegiatan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	100	99,46			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	100	99,46			
				Program Penempatan Tenaga Kerja	100	91,01			
				Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	100	77,11			
				Sub Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	100	99,68			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan disabilitas	100	66,54			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Ketenagakerjaan					
				Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	100	41,99			
				Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	100	99,29			
				Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	100	99,29			
				Kegiatan Perlindungan Pmi (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	100	99,08			
				Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	100	99,08			
				Program Hubungan Industrial	100	92,46			
				Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang	100	87,78			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
				Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan Bagi Perusahaan	100	99,62			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	100	83,09			
				Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100	99,58			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan Yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	99,73			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Serta Non Afikasi	100	99,35			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Ururan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Program Penunjang Ururan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	100	98,35	-		
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	100	78,03	Sub kegiatan ini terdiri dari belanja Alat Tulis Kantor dan Bahan Cetak, Belanja terealisasi kurang dari 80% karena harga satuan barang yang dibeli melalui E-Purchasing (E-Catalogue) lebih murah dibandingkan	Penyesuaian Satuan Harga (SSH)	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							estimasi satuan harga (SSH) yang dianggarkan. Selisih tersebut mengakibatkan sisa anggaran meskipun secara kuantitas barang yang dibutuhkan sudah terpenuhi.		
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100	80,66	Sub kegiatan ini terdiri dari belanja Alat Tulis Kantor dan Bahan Cetak, Belanja terealisasi kurang dari 80% karena harga satuan barang yang dibeli melalui E-Purchasing (E-Catalogue) lebih murah dibandingkan estimasi satuan	Penyesuaian Satuan Harga (SSH)	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							harga (SSH) yang dianggarkan. Selisih tersebut mengakibatkan sisa anggaran meskipun secara kuantitas barang yang dibutuhkan sudah terpenuhi.		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100	83,90			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	100	74,55	Sub kegiatan ini terdiri dari belanja Alat Tulis Kantor dan Bahan Cetak, Belanja terealisasi kurang dari 80% karena harga satuan barang yang dibeli melalui E-Purchasing (E-Catalogue) lebih	Penyesuaian Satuan Harga (SSH)	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							murah dibandingkan estimasi satuan harga (SSH) yang dianggarkan. Selisih tersebut mengakibatkan sisa anggaran meskipun secara kuantitas barang yang dibutuhkan sudah terpenuhi.		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	78,31	karena terdapat selisih antara estimasi jumlah pegawai dengan jumlah riil pegawai yang aktif, dimana jumlah pegawai aktual lebih sedikit dari jumlah yang dianggarkan.		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Hal ini disebabkan diantaranya karena adanya perbedaan estimasi jumlah pengangkatan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan perkiraan serta terdapatnya pengurangan jumlah pegawai (mutasi Keluar dan pensiun) yang lebih besar dari proyeksi awal, sehingga anggaran gaji bulan - bulan tersisa untuk pegawai tersebut tidak terealisasi.		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (ABT)	100	94,17			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	58,96	Sub kegiatan ini terdiri dari belanja Alat Tulis Kantor dan Bahan Cetak, Belanja terealisasi kurang dari 80% karena harga satuan barang yang dibeli melalui E-Purchasing (E-Catalogue) lebih murah dibandingkan estimasi satuan harga (SSH) yang dianggarkan. Selisih tersebut mengakibatkan sisa anggaran meskipun secara kuantitas barang yang dibutuhkan sudah terpenuhi.	Penyesuaian Satuan Harga (SSH)	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100	91,39	-		
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah					
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100	88,18	-		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	92,35	-		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	100	98,61	-		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	51,51	rehab gedung PKK belum dilaksanakan sehingga pemasangan terali ditunda sampai	dianggarkan kembali di Tahun 2026	dianggarkan kembali di Tahun 2026



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							diselesaikannya rehab Gedung PKK.		
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	97,38	-		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	31,10	rehab gedung PKK belum dilaksanakan sehingga pemasangan terali ditunda sampai diselesaikannya rehab Gedung PKK.	dianggarkan kembali di Tahun 2026	dianggarkan kembali di Tahun 2026
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	98,71	-		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	100	95,00	-		
				Fasilitas Kunjungan Tamu	100	97,30	-		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100,00	-		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemerintah Daerah					
				Pengadaan Mebel (ABT)	100	95,36	-		
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	92,80	-		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	98,19	-		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	80,09	-		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	99,62	-		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	93,59	-		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	5,29	dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan Rehab Gedung PKK tidak memungkinkan, sehingga ditunda sampai Anggaran Tahun berikutnya	dianggarkan kembali di Tahun 2026	dianggarkan kembali di Tahun 2026
				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan					
				Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota	100	97,21	-		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG termasuk PPRG	100	95,77	-		
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota					
				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100	97,02	-		
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100	97,67	-		
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	96,31	-		
				Program Perlindungan Perempuan			-		
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Program dan Kegiatan, Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (DAK NF)	100	100,00	-		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	77,85	-		
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	50,81	sesuai dengan jumlah korban yang dilayani di Unit Pelayanan Dinas Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak berupa Pelayanan Visum dan Pendampingan Korban Perempuan		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga			-		
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		
				Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	96,53	-		
				Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	67,81	Ada kegiatan bimtek dari pusat, semula dijadwalkan di november, ternyata sampai dg bulan Desember kegiatan bimtek tersebut di batalkan penyelenggaraa		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							nya (undangan bimtek dari pusat tidak ada)		
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender			-		
				Pengumpulan ,Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota			-		
				Penyediaan , Penyajian , dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	100	97,64	-		
				Advokasi dan Penguatan Jejaring Lintas Sektor dalam Penyediaan Data Gender dan Anak	100	99,02	-		
				Advokasi dan Penguatan Jejaring Lintas Sektor dalam Penyediaan Data Gender dan Anak	100	99,02	-		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)					
				Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					
				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100	80,70	dikarenakan Biaya setor perkara Isbat Nikah (PNBP) dianggarkan untuk 2.500 pasang peserta. Namun, realisasinya hanya 1556 pasang. Hal ini disebabkan 944 pasang peserta tidak lolos verifikasi berkas oleh Pengadilan Agama karena kekurangan bukti otentik, sehingga biaya panjar perkara		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							untuk 944 pasang tersebut tidak disetorkan dan menjadi sisa anggaran.		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100	68,20	dikarenakan Sewa gedung hari anak nasional tidak digunakan karena lomba diadakan di ruang rapat Dinas PP dan PA		
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					
				Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100	97,19	-		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan	100	97,15	-		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota					
				Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota. (ABT)	100	90,64	-		
				Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	98,74	-		
				Program Perlindungan Khusus Anak					
				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
				Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100	81,66	-		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten Muara Enim	100	100,00	-		
				Penyediaan Layanan bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang	100	90,30	-		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	76,10	efisiensi perjalanan Dinas.		



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Bidang Pangan	Dinas Ketahanan Pangan		Ururan Wajib Ketahanan Pangan	100%	87,81%			Dinas ketahanan Pangan telah melaksanakan pemetaan daerah rawan pangan secara menyeluruh di seluruh kecamatan pada Kabupaten Muara Enim melalui pengumpulan dan analisis data yang mewakili 3 aspek yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.
				Dinas Ketahanan Pangan	100%	87,81%			Melakukan analisis terkait tingkat kerawamam pangan daerah dan melakukan monitoring dan evaluasi kelapangan serta menyusun laporan sebagai perumusan



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									kebijakan ketahanan pangan.
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	81,96%			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	90,17%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	90,12%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	90,90%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	80,00%			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%	89,79%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan	100%	95,34%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD					
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	96,63%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	76,89%			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	76,88%			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	100%	84,43%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	88,53%			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	89,29%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	77,32%			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	100,00%			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	100%	100,00%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kantor					
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	98,15%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	92,35%			
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	99,79%			
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	100,00%			
				Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	100%	98,40%			
				Penyediaan Infrastruktur dan	100%	98,40%			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
				Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	100%	91,92%			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	100%	91,23%			
				Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	99,36%			
				Program Peningkatan diverifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100%	85,11%			
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan	100%	72,81%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					
				Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	100%	96,93%			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100%	94,97%			
				Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	100%	88,37%			
				Pengembangan Kelembagaan distribusi Pangan Kabupaten/Kota	100%	90,10%			
				Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	100%	61,81%			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyusunan Neraca Bahan Makanan	100%	98,19%			
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	100%	89,05%			
				Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	100%	93,83%			
				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	81,11%			
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi	100%	97,30%			
				Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahunan	100%	97,74%			
				Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	100%	92,24%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	100%	99,27%			
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	99,27%			
				Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	100%	99,46%			
				Pelaksanaan Intervensikewaspadaan Pangan dan Gizi	100%	97,93%			
				Program Pengawasan Kerawanan Pangan	100%	78,14%			
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	78,14%			
				Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal	100%	75,10%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					
				Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	100%	80,82%			
				Penguatan Kelembagaan Pangan Segar Asal Tumbuhan Kabupaten/Kota	100%	81,63%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup		URUSAN WAJIB PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	100	83,46%			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100	78,85%			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	43,67%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	61,65	hal ini disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan belanja cetak penggandaan, fotokopi, dan belanja alat tulis kantor	Evaluasi kembali setiap jadwal pelaksanaan kegiatan	Mengevaluasi kembali setiap jadwal pelaksanaan dan output kegiatan
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-	100	65,45	hal ini disebabkan karena	Evaluasi kembali setiap jadwal	Mengevaluasi kembali setiap jadwal



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				SKPD			disesuaikan dengan kebutuhan belanja cetak penggandaan, fotokopi, dan belanja alat tulis kantor	pelaksanaan kegiatan	pelaksanaan dan output kegiatan
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	34,66	hal ini disebabkan karena dokumen dicetak sesuai dengan kebutuhan	Evaluasi kembali setiap jadwal pelaksanaan kegiatan	Mengevaluasi kembali setiap jadwal pelaksanaan dan output kegiatan
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100	19,49	hal ini disebabkan karena dokumen dicetak sesuai dengan kebutuhan	Evaluasi kembali setiap jadwal pelaksanaan kegiatan	Mengevaluasi kembali setiap jadwal pelaksanaan dan output kegiatan
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100	40,61	hal ini disebabkan karena dokumen dicetak sesuai dengan kebutuhan	Evaluasi kembali setiap jadwal pelaksanaan kegiatan	Mengevaluasi kembali setiap jadwal pelaksanaan dan output kegiatan



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	100	20,15	hal ini disebabkan karena disesuiakan dengan kebutuhan belanja cetak penggandaan, fotokopi, dan belanja alat tulis kantor	Evaluasi kembali setiap jadwal pelaksanaan kegiatan	Mengevaluasi kembali setiap jadwal pelaksanaan dan output kegiatan
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	87,85			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	87,90			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	100,00			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	66,06			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	100	65,91			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	57,74			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	57,74			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	10,20			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	6,17			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100	40,00			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	62,90			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	0,00	karena terdapat kekeliruan pada satuan harga komponen instalasi listrik	Evaluasi kembali satuan harga sesuai dengan kebutuhan	Mengevaluasi kembali satuan harga sesuai dengan kebutuhan
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	35,30			
				Penyediaan Bahan	100	60,36			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Logistik Kantor					
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	27,78			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	24,51			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	93,49			
				Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	100	0,00	karena terdapat belanja perlengkapan arsip yang terinclude di pengadaan gedung bangunan kantor (Gedung Arsip)	Evaluasi kembali perlengkapan yang akan dibelanjakan	Mengevaluasi kembali perlengkapan yang akan dibelanjakan
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	98,33			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	73,63			
				Pengadaan Gedung	100	99,57			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kantor atau Bangunan Lainnya					
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	67,85			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	66,94			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	82,55			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	39,79			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	54,51			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	62,41			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	100	48,94			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	100	58,15			
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	0,00			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	99,43			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	59,24			
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	100	73,65			
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	100	77,24			
				Pengendalian	100	85,00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota					
				Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	100	60,00	Dalam pelaksanaan penyusunan dan implementasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan ketersediaan data, kelembagaan, Koordinasi, Pendanaan, serta implementasi kebijakan.	Upaya pemecahan permasalahan dalam kegiatan RPPLH dilakukan melalui penguatan perencanaan lingkungan yang terintegrasi dengan dokumen pembangunan daerah, peningkatan tata kelola dan Koordinasi lintas sektor, Selain itu dilakukan penguatan data dan sistem informasi	Perlu ditindaklanjuti melalui pengintegritasi an ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu RPJMD, Renstra OPD, dan Renja OPD agar prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan 2. Pemerintah daerah menyusun dan



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								lingkungan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan RPPLH dapat diimplementasikan secara efektif dan adaptif terhadap dinamika pembangunan, dan melakukan workshop dan pendampingan teknis secara intensif.	menetapkan kebijakan, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mendukung pelaksanaan RPPLH
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota	100	40,11			
				Pemantauan dan Evaluasi KLHS	100	40,11	Permasalahan/ Hambatan kegiatan	Upaya Pemecahan masalah yaitu	Perlu adanya rencana kerjasama



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							pemantauan dan evaluasi terhadap KLHS yang sudah mendapat validasi yaitu KLHS RDTR Perkotaan Tanjung Enim belum maksimal pelaksanaannya, terutama yang berhubungan dengan analisis yang memerlukan keahlian atau Tenaga Ahli.	akan bekerjasama dengan tenaga ahli untuk melakukan kegiatan Evaluasi KLHS RDTR Perkotaan Tanjung Enim dalam penyusunan dokumen Evaluasi KLHS.	dengan tenaga ahli untuk pelaksanaan pemantauan dan Evaluasi KLHS Kawasan Perkotaan Tanjung Enim dan Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dari berbagai perguruan tinggi di Provinsi Sumatera Selatan
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	100	68,91	Permasalahan Teknis karena ketiadaan tenaga ahli dan disebabkan oleh efesiensi anggaran 2025		
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan	100	69,39			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota					
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	100	91,57			
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	100	94,92			
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100	55,84	Karena belum terealisasinya sisa anggaran di karenakan belum selesai terbentuknya BL UD Laboratorium Lingkungan		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							karena sisa anggaran tersebut untuk keperluan mendukung berdiri dan operasional BLUD Laboratorium Lingkungan		
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100	66,00			
				Pelaksanaan Rehabilitasi	100	62,94	karena penanaman pohon dilakukan dgn cara swadaya oleh pokmas dan DLH sehingga tidak menggunakan anggaran jasa petugas penanaman serta karena karena dilakukan	Melakukan kegiatan rehabilitasi lahan melibatkan Tim Penggiat Cinta Lingkungan, Kegiatan Forum DAS dan Kegiatan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK),	Membuat Program Kerja Tim Penggiat Cinta Lingkungan, Kegiatan Forum DAS dan Kegiatan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), Kelompok Cinta Lingkungan



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							efisiensi penggunaan anggaran perjalanan Dinas.	Kelompok Cinta Lingkungan dan pelaku Usaha	dan pelaku Usaha dalam Rehabilitasi Lahan
				Koordinasi dan Sinkronisasi dan Pembersihan unsur Pencemar di Kabupaten/Kota	100	52,06	karena tahun 2025 hanya 4 perusahaan yang mengajukan SLO Air Limbah dan Emisi, untuk monitoring dan evaluasi dilakukan secara pasif dengan mengevaluasi dokumen pemantauan air limbah dan udara yang disampaikan pelaku usaha ke DLH Kabupaten Muara Enim	Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Perusahaan yang belum mengurus Izin SLO Air Limbah dan Emisi, serta melibatkan para pihak dalam kegiatan Pertek Air Limbah dan Emisi.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pihak Perusahaan yang belum mengajukan permohonan untuk SLO
				Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	100	75,45	Anggaran Perjalanan Dinas Tidak	Akan Lebih meningkatkan Koordinasi	Koordinasi dan Sinkronisasi



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							terserap	dan Sinkronisasi rehabilitasi dengan Para Pihak seperti Kelompok Pencinta Lingkungan, Pelaku Usaha dan Pihak Sekolah	rehabilitasi dengan Para Pihak seperti Kelompok Pencinta Lingkungan, Pelaku Usaha dan Pihak Sekolah
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	100	24,64			
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	100	24,64			
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	100	48,08	1.Banyaknya pohon-pohon tua dan besar belum pangkas dan dilakukan perapian 2.Keterbatasan peralatan kegiatan 3.Sulitnya	1. Peningkatan Pemeliharaan Pohon: Melakukan pemangkasan dan perapian secara lebih intensif, terutama bagi pohon-pohon	Memperbanyak fungsi tugas OPD dalam perawatan bahan untuk RTH



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Koordinasi waktu melibatkan banyak pihak karena keterbatasan anggaran	yang sudah tua dan berukuran besar yang belum sempat tertangani. 2. Pembaruan Peralatan: Mengatasi keterbatasan alat kerja dengan melakukan pengadaan atau pemeliharaan peralatan agar kegiatan pengelolaan di lapangan dapat berjalan lebih efektif 3. Optimalisasi Koordinasi dan Anggaran: Mencari solusi atas sulitnya Koordinasi waktu yang	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								melibatkan banyak pihak melalui perencanaan anggaran yang lebih baik agar pelaksanaan kegiatan tidak terhambatPera n Organisasi Perangkat Daerah (OPD): Memperbanyak fungsi dan pembagian tugas OPD terkait dalam hal perawatan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pengelolaan RTH	
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	100	0,00	•Pengelolaan sarana dan prasarana keaneka	• Penyusunan SOP pengelolaan sarana dan	Menyusun rencana kerja tahunan serta jadwal



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							ragaman hayati belum dilaksanakan secara optimal • Minimnya pemahaman dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati • Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia	prasarana keanekaragaman hayati • Meningkatkan Koordinasi dan keterlibatan pemangku kepentingan • Optimalisasi pemeliharaan sarana dan prasarana secara berkala	pemeliharaan rutin sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan acuan evaluasi dan mengusulkan kebutuhan anggaran pengelolaan sarana dan prasarana ke dalam perencanaan dan penganggaran instansi pada tahun berikutnya.
				Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	100	6,66	Keterbatasan sarana, prasarana, serta pemeliharaan kawasan menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan	• Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pengelolaan • Penguatan kelembagaan dan penetapan pengelola	Mengajukan kebutuhan anggaran pengelolaan kawasan ke dalam dokumen perencanaan dan



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Taman Keanekaragaman Hayati di luar kawasan hutan, sehingga berpotensi menurunkan kualitas keanekaragaman hayati.	kawasan • Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	penganggaran desa/daerah pada tahun berikutnya dan Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala serta menyusun laporan pengelolaan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan.
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	100	62,68			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyimpanan sementara Limbah B3	100	49,48			
				Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	100	49,48	karena masih ada pelaku usaha penghasil limbah B3 yg belum mengajukan permohonan rincian teknis penyimpanan Limbah B3. dan pemantauan masih dilakukan dengan pemantauan pasif yaitu dengan mengevaluasi laporan neraca limbah B3 yg di kirimkan olah penghasil Limbah B3. dan memantau melalui aplikasi SPEED.	Melakukan pemantauan dan pembinaan secara langsung ke penghasil limbah b3 untuk memberikan pengarahan dan masukkan terkait dgn pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya	Harus tetap memantau dan melakukan pembinaan Terhadap penghasil limbah B3
				Pengumpulan Limbah B3 dalam 1	100	81,10			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				(Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	100	81,10	dikarenakan rapat rapat dengan penghasil LimbahBb3, pemerintah provinsi dan KLH masih dilakukan dengan secara daring atau online.	BerKoordinasi dgn pihak pengelola limbah B3 untuk mengetahui apakah pengelolaan limbah yang kirim oleh penghasil limbah B3 apakah memang benar di kelola dengan baik, dan untuk Koordinasi dgn pemerintah prov dan klh diadakan rapat offline	Harus tetap memantau langsung dan mengetahui limbah B3 yg di kelola oleh endproses benar- benar kelola dengan baik+J14
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN	100	82,07			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	82,07			
				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	100	80,82	- Masih rendahnya pemahaman sebagian pelaku usaha terhadap kewajiban izin lingkungan; - Keterbatasan sumber daya manusia dan waktu dalam pelaksanaan fasilitasi;	- Peningkatan intensitas sosialisasi dan konsultasi; - Penguatan Koordinasi dengan instansi terkait; - Pemberian pembinaan dan teguran administratif sesuai	Perlu adanya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan peningkatan sosialisasi dan layanan konsultasi, memperkuat Koordinasi dengan instansi terkait, serta



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Ketidakpatuhan pelaku usaha dalam penyampaian laporan berkala.	ketentuan peraturan perundang-undangan.	memberikan pembinaan dan teguran administratif kepada pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	85,42			
				PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	100	90,84			
				Peningkatan Kapasitas MHA dan	100	90,84			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH					
				Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	100	90,84			
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100	84,41			
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	100	84,41			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	100	84,41			
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	100	53,30			
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	53,30			
				Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	100	53,30			
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	100	89,53			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	100	89,53			
				Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat	100	88,19			
				Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	100	93,19			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	100	89,95			
				Pengelolaan Sampah	100	90,29			
				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	100	77,33	karena untuk kegiatan hari peduli sampah nasional dan world cleanup day	akan melaksanakan kegiatan hari peduli sampah nasional dan world cleanup	akan memaksimalkan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							berkolaborasi dengan pihak perusahaan, sehingga Untuk spanduk dan konsumsi di fasilitas oleh pihak perusahaan	day seperti cetak spanduk dan konsumsi dengan menggunakan dana APBD Kab. MenimE nim.	sampah, hari peduli sampah nasional, world cleanup day serta lomba kelurahan peduli lingkungan.
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	100	92,34			
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	100	97,88			
				Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	100	93,18			
				Penanganan sampah melalui pengangkutan	100	60,26	disebabkan untuk honorarium /	dana yang tidak terserap dapat	akan berKoordinasi dengan



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							upah petugas pengolah sampah tidak realisasikan karena perubahan status dari KKWT Menjadi PPPK	dialihkan ke pos anggaran lain yang lebih membutuhkan , seperti belanja barang atau modal dan gaji outsourcing	Bappeda dan BPKAD untuk Sisa anggaran belanja pegawai dapat diajukan revisi untuk digeser ke akun belanja lain yang lebih mendesak atau kurang, dalam satu program yang sama atau antar program,
				Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	100	42,16	disebabkan untuk honorarium / upah petugas pengolah sampah tidak realisasikan karena perubahan status dari KKWT Menjadi PPPK	dana yang tidak terserap dapat dialihkan ke pos anggaran lain yang lebih membutuhkan , seperti belanja barang atau modal dan gaji outsourcing	akan berKoordinasi dengan Bappeda dan BPKAD untuk Sisa anggaran belanja pegawai dapat diajukan revisi untuk digeser ke akun belanja lain y+J12:K12ang



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									lebih mendesak atau kurang, dalam satu program yang sama atau antar program
				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta	100	47,46			
				Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	100	47,46	karena pada tahun 2025 belum ada pengumuman adipura sehingga utk kegiatan belanja reward untuk petugas penyapu jalan/petugas kebersihan (sembako) tidak di realisasikan.	apabila pengumuman adipura belum ada, maka reward berupa sembako akan dialihkan untuk kegiatan lain melalui APBD perubahan.	akan berKoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel maupun KLH terkait dengan waktu (jadwal) pengumuman adipura.



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Ururan Administrasi Kependudukan	Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil				80,35			
				Program Penunjang Ururan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	81,59			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	87,76			
				Koordinasi dan Penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	83,90	dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan harga pasar -		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	99,82	dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan harga pasar		
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	86,91	dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan harga pasar		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	86,52	dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan harga pasar		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	98,76	dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan harga pasar		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	79,72			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/ Bulan	79,76			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan	40,25			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	99,98			
				Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran SKPD	1 Laporan	99,78			
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	4 Dokumen	96,55			
				Pengamanan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	96,55			
				Administrasi Kepegawaian	4 Orang	93,94			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perangkat Daerah					
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4 Orang	93,94			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	91,87			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4 Paket	95,19			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	96,01			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4 Paket	78,91	dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan harga pasar		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4 Paket	73,37	dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan harga pasar		
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	89,39			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Dokumen	18,29	dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan harga pasar		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	99,19			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99,63			
				Pengadaan Mebel	1 Paket	99,68			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gdung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	98,56			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	76,42			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	72,54	dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan dan		
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	81,63			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Laporan	73,45			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 Laporan	70,22			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	89,61			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	70,28			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit	94,57			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	99,5			
				Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	58,24			
				Program	99%	72,38			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pendaftaran Penduduk					
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	90%	72,38			
				Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	72,38			
				Program Pencatatan Sipil	100%	83,05			
				Pelayanan Pencatatan Sipil	99%	85,52			
				Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	6 Layanan	85,52			
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	99%	80,73			
				Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	80,73			
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	99%	74,95			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	90%	78,16			
				Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	1 Dokumen	80,59			
				Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	73,64			
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	90%	72,78			
				Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 laporan	68,77			
				Sosialisasi terkait pengelolaan informasi Administrasi	1 Laporan	58,81			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kependudukan					
				Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Laporan	93,10			
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	99%	89,72			
				Penyusunan Profil Kependudukan	99%	89,72			
				Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan dan kebutuhan yang lain	1 Jenis Buku Profil	89,72			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
				Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	60 Dokumen	90,04			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	60 Dokumen	90,86			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	85,34	Harga Satuan di SIPD Lebih Besar dari pada Harga di E-catalog	Akan dilakukan Evaluasi Kembali Harga di SIPD dengan Harga Pasar	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		84,96			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	84,95	disebabkan Penyesuaian dengan jumlah Pegawai dikarenakan	Akan dilakukan penghitungan Gaji dan Tunjangan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							ada yang pensiun dan Mutasi	ASN lebih tepat	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	90,84			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	96,14			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	5 Laporan	75,34	Harga Satuan di SIPD Lebih Besar dari pada Harga di E-catalog	Akan dilakukan Evaluasi Kembali Harga di SIPD dengan Harga Pasar	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		68,29			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 Orang	68,29	Jumlah Biaya Setor yang dianggarkan berbeda dengan Biaya Setor rill Pelatihan	Akan dilakukan Survey SSH terkait Biaya Setor Bimtek/ Pelatihan	
				Administrasi Barang Milik		83,80			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Daerah pada Perangkat Daerah					
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	7 Unit	87,63			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	6 Jenis Laporan	75,47	dikarenakan tidak terserapnya gaji operator komputer selama 6 bulan (3 orang D3/SMA, dan 2 orang S1)	Tidak di anggarakan	
				Administrasi Umum Perangkat Dearah		96,28			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /penerangan Bangunan Kantor	5 Jenis Paket	97,74			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28 Jenis Paket	98,21			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33 Jenis Paket	81,60			
				Penyediaan Barang Cetak dan	5 Jenis Paket	92,53			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penggandaan					
				Penyediaan Bahan dan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 Jenis dokumen	45,69	Hal ini disebabkan terdapat efisien dan efektifitas Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan perkiraan menjadi lebih besar dibandingkan realisasi.	Akan dilakukan Evaluasi Kembali Harga di SIPD dengan Harga Pasar	
				Fasilitas Kunjungan Tamu	48 Kali Rapat	84,15			
				Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	707 OH	98,10			
				Penatausahaan Arsip dinamis Pada OPD	8 Jenis dan 8 Dokumen	67,89	Hal ini disebabkan untuk pencadangan jasa tenaga operator komputer yang telah	tidak di anggarakan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							lulus PPPK Tahun 2025 namun belum dilantik sehingga gaji selama 4 bulan untuk 2orang tidak dapat terealisasi		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		83,70			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400 Materai dan 12 Cek	87,23			
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	3 Jenis Rekening	83,99			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17 Printer, 25 Laptop	92,13			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	82,43	Hal ini disebabkan untuk pencadangan gaji operator komputer	tidak di anggarakan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							yang telah lulus PPPK Tahun 2025 namun belum dilantik sehingga gaji selama 4 bulan untuk 4 orang tidak dapat terealisasi.		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		98,83			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 Mobil dan 24 Motor	97,48			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit Gedung Kantor	99,59			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	37 Unit AC	99,83			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
				Program Penataan Desa		97,07			
				Penyelenggaraan Penataan Desa		97,07			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Desa/ Dusun	97,85			
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	43 Unit	97,06			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		91,21			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		91,21			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10 BUMDes Bersama	91,21	Adanya pengangkatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan menjadi PPPK	Optimalisasi anggaran dan Koordinasi aturan keberadaan TKS Kecamatan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		74,39			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		74,39			
				Program Penataan Desa	246 Desa	64,29	Kegiatan Bupati ngantor di Desa (Bunga Desa) yang telah dianggarkan sebanyak 9 kali hanya terealisasi sebanyak 4 kali karena	dilakukan lagi penyusunan jadwal Bupati Ngantor di Desa secara tepat dan detail.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							keterbatasan waktu		
				Penyelenggaraan Penataan Desa	245 Orang/ Desa	91,70			
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	246 Desa	86,36			
				Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	246 Desa	65,59	Hal ini disebabkan karena pada saat kegiatan tidak ada sesi pemberian materi sehingga untuk honorarium narasumber tidak dapat direalisasikan dan untuk tenda VIP tidak dapat direalisasikan karena pada kegiatan menggunakan ruangan	Solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan penyesuaian atau realokasi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Anggaran honorarium narasumber dan sewa tenda VIP yang tidak terealisasi dapat dialihkan ke kebutuhan lain	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							kantor kejaksaan	dalam kegiatan yang sama atau dicatat sebagai efisiensi. Untuk tertib administrasi, perlu dibuat laporan atau berita acara yang menjelaskan alasan tidak terealisasinya belanja tersebut agar tetap akuntabel.	
				Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	246 Bumdes	92,32			
				Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	246 Desa	98,00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	246 Desa	52,17	Hal ini disebabkan karena Kegiatan yang direncanakan dilaksanakan di 22 Kecamatan mengingat keterbatasan waktu hanya dilaksanakan di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim selama 4 hari sehingga untuk honor Narasumber dan sewa peralatan anggaran dana tidak terserap seluruhnya dan honor operator tidak terserap	Solusi yang dapat dilakukan adalah mengajukan revisi atau pergeseran anggaran sesuai ketentuan karena kegiatan dipusatkan di Aula Dinas PMD Kabupaten Muara Enim selama 4 hari, sehingga sebagian anggaran tidak terserap. dana honor narasumber dan sewa peralatan dapat dialihkan ke kebutuhan lain yang relevan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							karena sudah diangkat PPPK	atau dicatat sebagai efisiensi, sedangkan honor operator tidak direalisasikan karena tugas telah dilaksanakan oleh PPPK. Perlu dibuat laporan atau berita acara sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi.	
				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	246 Desa	65,77			
				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	146 Desa/orang	70,89			
				Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	12 Desa	80,42	Anggaran tersebut tidak terealisasi berasal dari belanja jasa	Untuk tahun depan tidak dianggarkan lagi dan menunggu	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							tenaga pelayanan umum dan kebersihan rumah singgah dikareankan adanya pengurangan tenaga honor yang belum mencapai dua tahun sementara tenaga pelayanan umum dan tenaga kebersihan dirumah singgah sudah dirumahkan	outsharsing dari Pemda Kabupaten Muara Enim	
				Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	246 Desa	84,26	Hal ini disebabkan karena kegiatan penilaian dan penyaringan Lomba Desa Tingkat Nasional	Krosscek terlebih dahulu terkait kegiatan Lomba Desa agar penganggaran nya sesuai	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							dilaksanakan melalui Daring sedangkan Honor Tim Penilai Lomba Desa Tingkat Kabupaten untuk Tim PKK yang menilai ASN.		
				PROGRAM PEMBER DAYAAN LEMBAGA KEMASYA RAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		90,39			
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta		90,39			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	25 Eks Marga	96,04			
				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	110 org/KPM	84,13	Hal ini disebabkan Penyesuaian Narasumber dengan frekuensi kegiatan dan jumlah peserta.	Akan dilakukan penghitungan anggaran yang lebih tepat dan cermat	
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	572 Orang/ Lembaga	96,66			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat					
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	22 Kec	93,19			
				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	22 Kec/ Posyantek	80,75	Karena adanya Pembatalan TTG tingkat Nasional yang telah teranggarkan maka tidak terealisasi sempurna	Dilakukan pergeseran atau Perubahan Anggaran di ABT agar bisa digunakan belanja lainnya	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	22 Kec/1 desa	94,79			
				Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	22 Kec	89,18			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	94,54			Dinas PPKB akan terus berupaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penyajian dan sinkronisasi program-program kegiatan, untuk mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana, Tahun 2025 DPPKB juga mendapatkan Alokasi DAK Non Fisik dan DAK Fisik Sebesar yang terdiri dari: •Pengadaan VTP Kit: 1 Unit •Pengadaan Impant Removal Kit: 10 Unit •Pengadaan Minilaparotomi/Tubectomi Kit: 4 Unit •Pengadaan Laparoskopi: 1 Unit •Pengadaan IUD Kit: 15 Unit •Pembangunan Balai Penyuluh KB: 2 Balai Penyuluh KB



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									•Rehab Balai Penyuluh KB: 8 Balai Penyuluh KB •Kelengkapan Balai Penyuluh KB: 4 Balai Penyuluh KB
				Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	77,46			Dalam upaya pendewasaan usia perkawinan, maka pada tahun 2025 DPPKB Muara Enim melaksanakan orientasi kepada anggota Pusat Informasi dan Konseling remaja (usia 10-24 tahun dan belum menikah) berupa orientasi tentang kita, orientasi upgrade tentang kita bicara life skill dan kekerasan seksual serta orientasi edukasi gizi dan pencegahan anemia. Kegiatan ini bertujuan untuk mencetak fasilitator tingkat kecamatan yang akan memberikan edukasi



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									kepada remaja dan sebaya yang ada di lingkungannya dalam upaya pendewasaan usia perkawinan dan menyiapkan berkehidupan berkeluarga bagi remaja. Sedangkan untuk keluarga yang mempunyai remaja juga akan diselenggarakan orientasi 1001 Cara Bicara Bagi Kader Kelompok Bina Keluarga Remaja yang bertujuan mencetak fasilitator dikecamatan agar dapat menyebarkan kie tentang komunikasi yang efektif dan pola asuh terhadap remaja dan juga Melaksanakan sosialisasi anti narkoba dalam upaya menekan penggunaan narkoba dan meningkatnya



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									HIV/Aids di Kabupaten Muara Enim.
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	89,98			Dalam upaya meningkatkan partisipasi untuk meningkatkan program KB, DPPKB berupaya melaksanakan pembinaan pada 60 Faskes yang pada tahun 2024 hanya 57 faskes. Selain itu, meningkatkan informasi dan edukasi melalui penyuluh KB dan kader terkait program KB dan kesehatan reproduksi terutama pada Pasangan Usia Subur (PUS) sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat kehamilan yang tidak diinginkan.
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	100%	66,43			Upaya KIE juga dilaksanakan melalui media cetak berupa



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perubahan RKA-SKPD					leaflet dan spanduk terkait upaya pencegahan stunting, gizi ibu hamil dan menyusui, dan panduan menuju keluarga kecil bahagia dan Sejahtera.
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100%	82,69			Pada Tahun 2025 juga diintensifkan penguatan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKA) melalui fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha pada 102 Kelompok dan Pemberian Bantuan Alat Teknologi Tepat Guna untuk 30 Kelompok UPPKA
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100%	68,96	Selisih standar harga di DPA dengan harga kontrak dan menyesuaikan kebutuhan.	Koordinasi dengan BPKAD terkait Standar Harga Satuan	
				Koordinasi dan Penyusunan	100%	70,63	Selisih standar harga di DPA	Koordinasi dengan BPKAD	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD			dengan harga kontrak dan menyesuaikan kebutuhan.	terkait Standar Harga Satuan	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	93,87			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	93,88			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Sem esteran SKPD	100%	84,19			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	70,49			
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%	70,49	Perbedaan antara pagu dan kontrak asuransi.		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	64,77			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	100%	64,77	Menyesuaikan Jumlah	Meningkatkan Jumlah Pegawai	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Pegawai yang mengikuti pelatihan	untuk mengikuti pelatihan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	90,88			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	95,44			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	94,98			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%	46,62	Selisih standar harga di DPA dengan harga e-katalog dan menyesuaikan kebutuhan.	Koordinasi dengan BPKAD terkait Standar Harga Satuan	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	70,24	Selisih standar harga di DPA dengan harga e-katalog dan menyesuaikan kebutuhan.	Koordinasi dengan BPKAD terkait Standar Harga Satuan	
				Penyediaan Barang Cetak	100%	55,47	Selisih standar harga di DPA	Koordinasi dengan BPKAD	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan Pengadaan			dengan harga e-katalog dan menyesuaikan kebutuhan.	terkait Standar Harga Satuan	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	99,58			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	43,71	Menyesuaikan Frekuensi Kegiatan Pertemuan		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	99,98			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	98,34			
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	98,34			
				Penyediaan Jasa Penunjang	100%	90,08			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Ururan Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	98,74			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	69,44	Menyesuaikan Kebutuhan Kantor		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	94,90			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ururan Pemerintahan Daerah	100%	97,18			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	98,13			
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi	100%	99,63			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	81,22	Menyesuaikan Kebutuhan Kantor		
				Program Pengendalian Penduduk	100%	90,95			
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100%	83,90			
				Penyediaan dan Pengembangan Materi	100%	87,36			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/ Kota					
				Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana	100%	83,03			
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	97,71			
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	100%	96,88			
				Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	100%	86,02			
				Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	100%	100,00			
				Pengolahan dan Pelaporan Data	100%	97,67			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					
				Program Pembinaan Keluarga Berencana	100%	95,84			
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100%	85,13			
				Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh Bangsa Kencana	100%	79,68	selisih standar harga di DPA dengan harga kontrak.	Koordinasi dengan BPKAD terkait Standar Harga Satuan	
				Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),	100%	97,77			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minlok)					
				Promosi KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100%	89,39			
				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai kearifan Budaya Lokal	100%	94,73			
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100%	98,49			
				Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100%	99,92			
				Pembinaan IMP	100%	95,75			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB					
				Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	100%	98,52			
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100%	97,61			
				Pengendalian	100%	97,07			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pendistribusian Alat dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya					
				Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100%	98,03			
				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100%	97,81			
				Peningkatan Kesertaan KB Pria	100%	94,09			
				Pemberdayaan	100%	98,94			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB					
				Pembinaan Terpadu Kampung KB	100%	98,28			
				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	100%	98,99			
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100%	97,71			
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	100%	97,95			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
				Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	100%	77,42	perubahan harga dan jenis konsumsi pertemuan pada Kelompok PPKS		
				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,BKL,PPKS,PI K-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	100%	98,13			
				Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	100%	98,30			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))					
				Orientasi/ Pelatihan Teknis Pelaksana/ Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	100%	98,35			
				Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	100%	96,58			
				Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	100%	91,41			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	100%	99,13			
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%	95,47			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)	100%	95,15			
				Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja	100%	96,60			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Kewilayahan	Dinas Perhubungan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, kredibel dan berorientasi pada peningkatan Pelayanan Publik	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN	100	92,94			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100	83,99			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	84,06			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	91,54			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	100	86,51			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	100	72,10	Efisiensi anggaran penyesuaian harga	Evaluasi harga dan penyesuaian harga pada anggaran tahun berikutnya	Efisiensi anggaran penyesuaian harga
				Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	100	88,90			
				Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100	78,34	Efisiensi anggaran penyesuain harga	Evaluasi harga dan penyesuaian harga pada anggaran tahun berikutnya	Efisiensi anggaran penyesuain harga
				Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	100	83,82			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	89,09			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	77,65			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		77,64	Penganggaran Lulusan Cpn Sttd 7 Orang dan Belum Turun Sk Cpn dan Jabatan Yang Kosong	Evaluasi harga dan penyesuaian harga pada anggaran tahun berikutnya	
				Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	96,73			
				Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/ Semesteran SKPD	100	75,89	Efisiensi anggaran penyesuaian harga	Evaluasi harga dan penyesuaian harga pada anggaran tahun berikutnya	
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100	91,43			
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100	91,43			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	67,56			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pendidikan dan pelatihan pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi	100	57,83	Tidak Ada Penyelenggara yang Melaksanakan Pelatihan	Evaluasi harga dan penyesuaian harga pada anggaran tahun berikutnya	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100	83,42	Tidak ada Pelaksanaan Kegiatan Abdiyasa / Akut di Provinsi dan Pusat	Evaluasi harga dan penyesuaian harga pada anggaran tahun berikutnya	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	97,23			
				Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	100	100,00			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	99,00			
				Penyediaan bahan logistik kantor	100	81,17	Efisiensi anggaran penyesuaian harga	Evaluasi harga dan penyesuaian harga pada anggaran berikutnya	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	100	96,41			
				penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	92,06			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	99,57			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	99,00			
				pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	99,00			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	95,70			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	98,94			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	77,61			
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100	80,21	Kebutuhan barang/jasa sudah terpenuhi	Evaluasi kebutuhan dan penyesuaian	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								pada tahun anggaran selanjutnya	
				Penyediaan Jasa pelayanan Umum kantor	100	99,47			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	99,67			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	95,32			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	99,97			
				Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	100	99,69			
				PROGRAM	100	94,52			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota	100	95,32			
				Pembangunan Prasarana jalan di jalan kabupaten/Kota	100	96,64			
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota	100	99,54			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	100	99,91			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100	89,31			
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100	98,18			
				Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	100	95,86			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal tipe C (Fasilitas Utama dan penunjang	100	99,50			
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir	100	48,47			
				Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota	100	48,47	Pada Anggaran Belanja Jasa Tenaga Perhubungan Tidak Dapat digunakan Karena Tkwt di dishub Telah diangkat Pppk	Evaluasi kebutuhan dan penyesuaian pada tahun anggaran selanjutnya	
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	97,52			
				Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	98,46			
				Peningkatan Kapasitas Sumbe Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	94,47			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	100	86,70			
				Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	100,00			
				Identifikasi dan Analisis potensi Jumlah kendaraan bermotor wajib Uji	100	96,79			
				Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	100	99,55			
				Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala kendaraan Bermotor	100	98,90			
				Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	89,45			
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	100	90,23			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	100	87,83			
				Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	100	99,55			
				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringan jalan Kabupaten /Kota	100	90,85			
				Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten /kota	100	95,00			
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan kabupaten/Kota	100	97,99			
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	100	97,99			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabuapten/Kota	100	65,82			
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabuapten/Kota	100	65,82	Adanya Perubahan Rute BRT yang Mempengaruhi Perubahan Jarak Tempuh dan Penggunaan BBM	Evaluasi kebutuhan dan penyesuaian pada tahun anggaran selanjutnya	
				PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	100	99,63			
				Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dana Pengoperasian Pelabuhan sungai dan danau	100	99,63			
				Pembangunan dermaga sungai dan danau	100	99,63			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Urusan Pemerintahan Bidang komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	96,83%	Masih terdapatnya daerah sinyal lemah dan blankspot	Melakukan Koordinasi ke Kementerian Kominfo melalui direktorat telekomunikasi dan memberikan data teknis beserta pendukung desa-desa yang masih dalam kondisi sinyal lemah dan blankspot, berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Provinsi Sumsel untuk mendorong percepatan pengentasan daerah sinyal lemah dan blankspot, melakukan	Bahwa program internet desa pada tahun 2025 telah menjangkau 256 Desa dan Kelurahan yang sudah terpasang internet sebagai solusi alternatif bagi Pemerintah Desa/ Kelurahan untuk dapat mengakses internet yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain itu juga telah dipasang wifi publik di ruang terbuka di Ibu Kota Kecamatan dan beberapa lokasi wisata antara lain : wisata danau Kemiri Kec. Lubai Ulu, wisata air terjun bedegung Kec. Panang Enim, Kawasan sport center



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								survey bersama dengan penyelenggara telekomunikasi/ provider ke desa-desa yang potensial untuk di bangun Base Transceiver Station (BTS) baru. Sesuai kewenangan pemerintah daerah sebagai salah satu cara untuk mengatasi desa sinyal lemah dan blankspot Dinas Kominfo SP memfasilitasi jaringan internet desa bagi 256 desa dan kelurahan se Kabupaten Muara Enim, 24 UPTD Puskesmas yang berada di	dan taman desa beringin Kec. Lubai, taman wisata Desa talang balai Kec. Belida Darat, danau Pinang Panjar Kec. Gelumbang.



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Kecamatan serta 13 UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah yang berada di Kecamatan	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	93,66%			Terkait dengan program yang ada di Pemerintah Pusat, diskominfo SP telah melaksanakan jemput bola ke Kementerian Komdigi dengan hasil telah dipasang wifi publik di beberapa wilayah di Kabupaten Muara Enim
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	96,07%			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	93,18%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	93,56%			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	99,15%			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	93,46%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	98,46%			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99,34%			
				Program Informasi dan Komunikasi Publik	100%	99,57%			
				Kegiatan Pengelolaan	100%	99,57%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	100%	94,67%	Kurangnya Bandwith induk untuk suplai kebutuhan internet OPD	Meningkatkan kapasitas bandwith untuk memenuhi kebutuhan internet OPD	
				Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	94,67%			
	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	100%	98,88%	Kurang representatifnya ruangan Network Operation Center (NOC) dan ruang server/ Data Center	Relokasi ke tempat yang lebih representatif sesuai standar	
				Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di	100%	98,88%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	100%	99,89	Masih terdapatnya sistem/ Aplikasi yang belum sesuai standar keamanan informasi	Melaksanakan pengujian sistem/aplikasi dengan pelaksanaan layanan ITSA/Pentest	
				Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	99,86%			
				Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/Kota	100%	99,99%			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Mewujudkan pemulihan ekonomi kerakyatan dengan penguatan kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMK, terutama dalam tata kelola manajemen usaha.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI/Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	35 Koperasi	100%	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT masih cukup rendah	Melakukan pendampingan bagi Koperasi dalam persiapan pelaksanaan RAT dan Sosialisasi pengawasan terhadap kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan koperasi.	Melakukan pendampingan bagi Koperasi dalam persiapan pelaksanaan RAT dan Sosialisasi pengawasan terhadap kepatuhan Koperasi terhadap peraturan perundang-undangan koperasi melalui Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan menambah jumlah output kegiatannya.
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI - Penilaian Kesehatan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	200 Koperasi	100%	Jumlah Koperasi dengan kategori KOPERASI SEHAT masih cukup rendah	Memberikan waktu sebelum penilaian kepada Koperasi dan KSP/USP Koperasi untuk melakukan penilaian mandiri (self assesment) dan memenuhi kriteria	Memberikan pendampingan kepada KSP/USP Koperasi melakukan penilaian mandiri (self assesment) agar persentase koperasi SEHAT dapat terus meningkat.



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								penilaian sebelum dilakukan penilaian kesehatan koperasi yang sebenarnya.	
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN/Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	150 orang	97,33%	Pengelola dan anggota koperasi masih banyak yang tidak memperbarui pengetahuan mereka tentang aturan-aturan perkoperasian	Meningkatkan pengetahuan dan kapasitas SDM Pengelola dan Anggota Koperasi melalui Pelatihan Perkoperasian.	Memperbanyak jenis pelatihan serta jumlah peserta yang akan dilatih
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI/Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	420 Koperasi	100%	Masih terdapat koperasi yang belum memperbarui legalitas usaha, tidak berkembangnya usaha koperasi serta belum adanya akses permodalan dan pemasaran bagi koperasi	Melaksanakan pendampingan penerbitan NPWP dan NIB Koperasi, memfasilitasi kemitraan koperasi serta memfasilitasi dalam perolehan modal melalui perbankan dan akses pemasaran	Melakukan pendampingan penerbitan NPWP dan NIB Koperasi, memfasilitasi kemitraan koperasi serta memfasilitasi dalam perolehan modal melalui perbankan dan akses pemasaran



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui UMK untuk menciptakan daya saing.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)/Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan	1.365 Usaha Mikro	100%	Masih banyak UMK yang belum mendapatkan fasilitas permodalan dan akses pemasaran, serta masih kurangnya daya saing produk	Memfasilitasi program kemitraan UMK dan memperbanyak program-program pelatihan.	Meningkatkan fasilitas program kemitraan UMK dan memperbanyak program-program pelatihan.
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM/Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	300 Usaha Mikro	93,33%	Masih banyak pelaku usaha mikro yang belum bisa naik kelas menjadi wirausaha	Memberikan bantuan peralatan produksi UMK dan memfasilitasi promosi dan penjualan produk-produk UMK	Memberikan bantuan peralatan UMK sesuai dengan kebutuhan dan hasil dari pelatihan yang mereka peroleh dan meningkatkan promosi produk UMK secara daring dan luring.



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Bidang Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100	84,72			
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	66,63			
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	100	76,67	Adanya efesiensi anggaran khususnya pada anggaran Perjalanan Dinas		
				Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota	100	35,24	Sulitnya komunikasi dengan narasumber dalam menentukan kesediaan dan kesiapan narasumber untuk hadir dan narasumber masih menunggu peraturan terbaru,		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							selain itu perjalanan Dinas dilaksanakan secara efektif dan efesien		
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	100	91,3			
				Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	100	94,53			
				Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	100	86,35			
				Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	100	93,04			
				Program Promosi Penanaman Modal	100	48,66			
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	48,66			
				Pelaksanaan Kegiatan	100	48,66	Pameran Promosi		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			Tingkat Provinsi SumSel tidak menyelenggarakan kegiatan Pameran Promosi Penanaman Modal Tahun 2025, namun capaian kinerja kegiatan Pameran Promosi Tingkat Kabupaten dan Tingkat Nasional sebesar 100,00%		
				Program Pelayanan Penanaman Modal	100	73,83			
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	73,83			
				Koordinasi dan sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	100	49,43	Adanya penghematan atau efesiensi dalam merealisasikan belanja		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100	87,41			
				Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100	47,4	Adanya penghematan atau efesiensi dalam merealisasikan belanja		
				Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100	38,1	Adanya penghematan atau efesiensi dalam merealisasikan belanja		
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	69,66			
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	69,66			
				Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang	100	55,84	Dalam rangka efesiensi belanja pada pelaksanaan		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya			anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 2025		
				Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	100	66,6	Adanya kebijakan internal dan adanya kebijakan efisiensi pada anggaran perjalanan Dinas sehingga anggaran perjalanan Dinas tidak dapat terealisasi		
				Pengawasan Penanaman Modal	100	76,39	Efisiensi anggaran dan silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran yang berkenaan berupa selisih belanja dengan pagu anggaran		
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100	69,75			
				Pengelolaan Data dan	100	69,75			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100	69,75	Adanya perbedaan harga di SIPD dengan ecatalog, juga adanya kebijakan efisiensi penggunaan anggaran sehingga disesuaikan dengan kebutuhan		
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100	84,72			
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	66,63			
				Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian	100	76,67	Adanya efisiensi anggaran khususnya pada anggaran		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			Perjalanan Dinas		
				Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	100	35,24	Sulitnya komunikasi dengan narasumber dalam menentukan kesediaan dan kesiapan narasumber untuk hadir dan narasumber masih menunggu peraturan terbaru, selain itu perjalanan Dinas dilaksanakan secara efektif dan efisien		
				Program Promosi Penanaman Modal	100	48,66			
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	48,66			
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	100	48,66	Pameran Promosi Tingkat Provinsi SumSel tidak		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kabupaten/Kota			menyelenggarakan kegiatan Pameran Promosi Penanaman Modal Tahun 2025, namun capaian kinerja kegiatan Pameran Promosi Tingkat Kabupaten dan Tingkat Nasional sebesar 100,00%		
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	69,66			
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	69,66			
				Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	100	55,84	Dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 2025		
				Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	100	66,6	Adanya kebijakan internal dan adanya		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							kebijakan efisiensi pada anggaran perjalanan Dinas sehingga anggaran perjalanan Dinas tidak dapat terealisasi		
				Pengawasan Penanaman Modal	100	76,39	Efisiensi anggaran dan silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran yang berkenaan berupa selisih belanja dengan pagu anggaran		
				Program Pelayanan Penanaman Modal	100	73,83			
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	73,83			
				Koordinasi dan sinkronisasi Penetapan Pemberian	100	49,43	Adanya penghematan atau efesiensi dalam		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Facilitas/Insentif Daerah			merealisasikan belanja		
				Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100	47,4	Adanya penghematan atau efesiensi dalam merealisasikan belanja		
				Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100	38,1	Adanya penghematan atau efesiensi dalam merealisasikan belanja		
				Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	100	47,4	Adanya penghematan atau efesiensi dalam merealisasikan belanja		
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100	69,75			
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	69,75			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100	69,75	Adanya perbedaan harga di SIPD dengan ecatalog, juga adanya kebijakan efisiensi penggunaan anggaran sehingga disesuaikan dengan kebutuhan		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	81%	-	-	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%				
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	78,91	Keterlambatan, efesiensi dan penyesuaian harga barang pada saat pembelian contoh pembelian ATK (pembelian berdasarkan E-katalog)	Pada subkegiatan yang mengalami kurang dari 80% kedepannya akan dilakukan percepatan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program kegiatan yang ada di Dinas Kepemudaaan dan Olahraga	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	86,51			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100%	80,84			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100%	76,25	Keterlambatan, efesiensi dan penyesuaian harga barang pada saat pembelian contoh pembelian ATK (pembelian berdasarkan E-katalog)	Pada subkegiatan yang mengalami kurang dari 80% kedepannya akan dilakukan percepatan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program kegiatan yang ada di Dinas Kepemudaaan dan Olahraga	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	100%	78,15	Keterlambatan, efesiensi dan penyesuaian harga barang pada saat pembelian contoh pembelian ATK (pembelian berdasarkan E-katalog)	Pada subkegiatan yang mengalami kurang dari 80% kedepannya akan dilakukan percepatan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program kegiatan yang ada di Dinas Kepemudaaan dan Olahraga	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	66,13	Keterlambatan, efesiensi dan penyesuaian harga barang pada saat pembelian contoh pembelian ATK (pembelian berdasarkan E-katalog)	Pada subkegiatan yang mengalami kurang dari 80% kedepannya akan dilakukan percepatan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program kegiatan yang ada di Dinas Kepemudaaan dan Olahraga	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%				
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	73,85	Disesuaikan dengan jumlah pegawai yang ada (adanya beberapa pegawai pindah tugas dan pensiun)	Pada subkegiatan yang mengalami kurang dari 80% kedepannya akan dilakukan percepatan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program kegiatan yang ada di Dinas Kepemudaaan dan Olahraga	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	50,26	Keterlambatan, efesiensi dan penyesuaian harga barang pada saat pembelian contoh pembelian ATK (pembelian berdasarkan E-katalog)	Pada subkegiatan yang mengalami kurang dari 80% kedepannya akan dilakukan percepatan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program kegiatan yang ada di Dinas Kepemudaaan dan Olahraga	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	100%	59,09	Keterlambatan, efesiensi dan penyesuaian harga barang pada saat pembelian contoh pembelian ATK (pembelian berdasarkan E-katalog)	Pada subkegiatan yang mengalami kurang dari 80% kedepannya akan dilakukan percepatan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program kegiatan yang ada di Dinas Kepemudaaan dan Olahraga	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%				
				Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100%	85,69			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%				
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	88,17			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	95,83			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	61,34	Keterlamabatan, efesiensi dan penyesuaian harga barang pada saat pembelian	Pada subkegiatan yang mengalami kurang dari 80% kedepannya akan dilakukan percepatan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program kegiatan yang ada di Dinas Kepemudaaan dan Olahraga	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	75,34	Keterlamabatan, efesiensi dan penyesuaian harga barang pada saat pembelian	Pada subkegiatan yang mengalami kurang dari 80% kedepannya akan dilakukan percepatan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program kegiatan yang ada di Dinas Kepemudaaan dan Olahraga	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100%	28,19	Efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan	Pada subkegiatan yang mengalami kurang dari 80% kedepannya akan dilakukan percepatan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program kegiatan yang ada di Dinas Kepemudaaan dan Olahraga	
				Fasilitas Kunjungan Tamu	100%	4,92	Realisasi yang dikeluarkan sesuai kebutuhan	Pada subkegiatan yang mengalami kurang dari 80%	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								kedepannya akan dilakukan percepatan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program kegiatan yang ada di Dinas Kepemudaaan dan Olahraga	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	84,69			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%				
				Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	100%	65,97	Keterlambatan, efesiensi dan penyesuaian harga barang pada saat pembelian contoh pembelian ATK (pembelian berdasarkan E-katalog)	Pada subkegiatan yang mengalami kurang dari 80% kedepannya akan dilakukan percepatan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program kegiatan.	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%				



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	93,13			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	79,10	Sesuai kebutuhan	Pada subkegiatan yang mengalami kurang dari 80% kedepannya akan dilakukan percepatan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program kegiatan yang ada di Dinas Kepemudaaan dan Olahraga	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	40,32	Realisasi yang dikeluarkan sesuai kebutuhan	Pada subkegiatan yang mengalami kurang dari 80% kedepannya akan dilakukan percepatan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program kegiatan yang ada di Dinas Kepemudaaan dan Olahraga	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	89,39			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%				
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	67,13	Dikarenakan efesiensi dan sesuai kebutuhan	Pada subkegiatan yang mengalami kurang dari 80% kedepannya akan dilakukan percepatan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program kegiatan Dinas Kepemudaaan dan Olahraga	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	99,00			
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100%				
				Penyadaran , Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor	100%				



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota					
				Koordinasi , Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kewirausahaan pemuda bagi wirausaha pemuda tingkat kabupaten/kota	100%	81,15	Dikarenakan honorer narasumber disesuaikan dengan SK keputusan Bupati untuk Narasumber yang diverifikasi oleh bagian hukum SPPD Perjalanan menyesuaikan di kegiatan		
				Koordinasi , Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepeloporan pemuda bagi pemuda pelopor tingkat kabupaten/kota	100%	88,10	Terlambatnya pengesahan APBD tahun anggaran 2024 Satu tahun pertimbangan 2024 adalah tahun politik sehingga ada kekhawatiran untuk		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							melaksanakan kegiatan, karena kegiatan kepemudaan lebih banyak menghimpun/ melibatkan pemuda Harga satuan di SIPD tidak sinkron dengan realita harga pada saat realiasiasi kegiatan kemudahan pada saat Koordinasi penambahan SSH dengan tim Anggaran BPKAD		
				Pemberian Penghargaan kepemudaan bagi yang berprestasi dan atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	100%	35,91	1) SK Beasiswa untuk SMA hanya bisa dicairkan selama 4 bulan dianggarkan 12 bulan dikarenakan : -SK		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Pengesahan APBD terlambat dan SK Bupati 2) STAN berdasarkan tagihan 1 tahun tetapi realisasinya 1 semester (6 bulan) 3) TTD sudah dianggarkan 6 orang tahun 2024 tetapi setelah seleksi tidak ada yang lulus		
				Pemberdayaan dan Pembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	100%				
				Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kab upaten/kota	100%	86,86			
				Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan	100%	84,20			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				pengembangan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat kabupaten/kota tingkat Kab upaten/kota					
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	100%				
				Koordinasi sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana olahraga tingkat kabupaten/kota	100%	96,98			
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	100%	86,38			
				Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Kabupaten Muara Enim	100%				



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	100%	83,70			
				Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	100%	86,65			
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100%				
				Pemusatan Latihan Daerah, yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (sport science)	100%	2,61	Keterbatasan waktu tenaga pengajar yang tersedia pada waktu yang telah direncanakan Karena adanya kegiatan pekan olahraga Provinsi (PORPROV) sumsel ke XV dan pekan Paralympic Provinsi (PEPARPROV) Sumsel ke-V	Pada subkegiatan yang mengalami kurang dari 80% kedepannya akan dilakukan percepatan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program kegiatan yang ada di Dinas Kepemudaaan dan Olahraga	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembinaan dan Pengembangan olahraga Berprestasi Kabupaten/Kota	100%	45,38	Tidak adanya pertandingan kopetinsi, serta jadwal kegiatan bersama dengan kegiatan PORPROV sehingga atletnya mengikuti pertandingan di PORPROV	Pada subkegiatan yang mengalami kurang dari 80% kedepannya akan dilakukan percepatan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program kegiatan yang ada di Dinas Kepemudaaan dan Olahraga	
				Pemberian Penghargaan Olahraga bagi yang berprestasi dan atau berjasa dalam memajukan olahraga	100%	70,41	Para insan olahraga (atlit, wasit/juri dan pelatih) yang menerima penghargaan adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan atau kualifikasi dan melalui mekanisme dan ditetapkan oleh tim penilaian	Pada subkegiatan yang mengalami kurang dari 80% kedepannya akan dilakukan percepatan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program kegiatan yang ada di Dinas Kepemudaaan dan Olahraga	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							sesuai dengan peraturan presiden republik Indonesia nomor : 44 tahun 2014 tentang pemberian penghargaan olahraga dan peraturan menteri olahraga nomor 1684 tahun 2015 tentang persyaratan pemberian penghargaan olahraga kepada olahragawan, pembina olahraga, tentang keolahragaan dan organisasi olahraga		
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100%		Pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan olahraga tersebut disatukan dengan		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							kegiatan launching perlindungan pekerjaan rentan kabupaten muara enim dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.		
				Peningkatan kerjasama organisasi Keolahragaan kabupaten/kota dengan lembaga terkait (HIBAH KONI)	100%	100,00			
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100%				
				Pemberian Penghargaan Olahraga bagi yang berprestasi dan atau berjasa dalam memajukan olahraga	100%	70,41	Para insan olahraga(atlit,wasit/juri dan pelatih) yang menerima penghargaan adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan	Pada subkegiatan yang mengalami kurang dari 80% kedepannya akan dilakukan percepatan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program kegiatan yang ada di Dinas	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							atau kualifikasi dan melalui mekanisme dan ditetapkan oleh tim penilaian sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga dan Peraturan Menteri Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tentang Keolahragaan dan Organisasi Olahraga	Kepemudaaan dan Olahraga	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengembangan Olahraga Wisata , Tantangan dan Petualangan	100%	76,23	Pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan olahraga tersebut disatukan dengan kegiatan laouching perlindungan pekerjaan rentan kabupaten muara enim dalam program jaminan social ketenagakerjaan.	Pada subkegiatan yang mengalami kurang dari 80% kedepannya akan dilakukan percepatan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program kegiatan	
				Pemanfaatan Olahraga Tradisional Dalam Masyarakat	100%	98,23			
				Pemasalan olahraga dan penyelenggaraan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah,nasional dan internasional	100%	50,26	Adanya beberapa evem yang digabungkan dalam rangka efesiensi	Pada subkegiatan yang mengalami kurang dari 80% kedepannya akan dilakukan percepatan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program kegiatan yang ada di Dinas	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Kepemudaaan dan Olahraga	
				<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</i>	100%				
				Pengembangan kapasitas SDM kepramukaan tingkat daerah	100%	91,24	Rencana monitoring kegiatan pramuka tingkat nasional berhubung kegiatan di pusat tidak terlaksana maka dari itu tidak dapat direalisasikan		
				Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan (Hibah Pramuka)	100%	100,00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	100	92,75	1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Mengusulkan penambahan anggaran khusus layanan keliling	1. Penambahan pegawai / P3K telah dilaksanakan sesuai dengan pembukaan formasi yang telah ditetapkan sebanyak 26 orang
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100	90,68	2. Fasilitas Layanan perpustakaan belum memadai	2. Rekrut dan latih tenaga pustakawan tambahan, khususnya untuk layanan keliling	2. Penambahan mobil perpustakaan keliling (Pusling) telah dilakukan dengan penambahan 1 unit mobil baru, sehingga saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki 3 unit mobil perpustakaan keliling



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	85,12	3. Kesadaran literasi masyarakat masih harus ditingkatkan	3. Meningkatkan fasilitas perpustakaan misalnya dengan cara perluas koleksi buku fisik dan digital	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 dokumen	86,02	4. Kurangnya evaluasi dan monitoring layanan perpustakaan	4. Program literasi berkelanjutan, kampanye membaca bersama sekolah dan komunitas	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	4 dokumen	73,5	5. Minimnya alokasi dana untuk layanan perpustakaan keliling	5. Bangun sistem monitoring dan evaluasi seperti survey kepuasan pemustaka	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 laporan	89,92			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	89,43			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang / bulan	89,46			
				KorDinasi dan Penyusunan Laporan	2 laporan	79,25			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran					
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	98,45			
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 dokumen	98,45			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	61,18			
				Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 orang	61,18			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	95,73			
				Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	9 paket	86,05			
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	31 paket	73,2			
				Pemeliharaan bahan logistik kantor	2 paket	84,36			
				Penyelenggaraan barang cetakan dan penggandaan	1 paket	83,76			
				Penyelenggaraan	30	98,8			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				trapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan				
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	98,95			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	100			
				Pengadaan Mebel	5 unit	96,51			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	10 unit	98,4			
				Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		98,21			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	59,08			
				Penyediaan jasa surat menyurat	410 laporan	100			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 laporan	58,67			
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 laporan	58,7			
				Pemeliharaan	100	94,74			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	4 unit	84,21			
				Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	3 paket / unit	99,75			
				Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	32 unit	69,81			
				Penataan Organisasi		0			
				Monitoring, Evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana		0			
				Program Pembinaan Perpustakaan	100	98,08			
				Pengelolaan Perpustakaan	100	95,76			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Tingkat Daerah Kabupaten / Kota					
				Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar diseluruh wilayah kabupaten / kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan	100 perpustakaan	98,24			
				Pengembangan perpustakaan ditingkat daerah kabupaten / kota	5 perpustakaan	97,51			
				Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat kabupaten / kota	50 layanan	94,09			
				Peningkatan kapasitas tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah/kota	50 orang	97,64			
				Pengembangan kekhasan koleksi perpustakaan daerah tingkat kabupaten / kota	100 peserta	83,68			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	1000 layanan perpustakaan	98,47			
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	100	98,55			
				Pemilihan duta baca/bunda literasi tingkat kabupaten / kota	30 orang	93,05			
				Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	35 perpustakaan	99,31			
				Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan ditempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	6 perpustakaan	99,78			
				Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	60 orang	95,27			
				Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan	60 orang	82,5			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				husus serta masyarakat					
				Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	100	95,71			
				Pelestarian naskah kuno milik daerah kabupaten/kota	100	95,71			
				Pengembangan pengelolaan dan pengalih mediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	50 exemplar	95,71			
				Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	100	95,84	1. Pengelolaan arsip fisik belum optimal	1. Implementasi sistem klarifikasi dan penataan arsip terintegrasi berbasis digital kearsipan untuk mempermudah pencarian, pelacakan dan monitoring jumlah arsip	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Pengelolaan Arsip	100	96,57	2. Kapasitas dan SDM pengelola kearsipan belum optimal	2. Pelatihan dan serifikasi arsiparis untuk SDM administrasi dan kearsipan	
				Pengelolaan Arsip dinamis Daerah Kabupaten / Kota	100	96,57	3. Kesadaran unit kerja terhadap pentingnya pengelolaan arsip belum merata	3. Sosialisasi, pedoman dan SOP kearsipan yang wajib dipatuhi oleh semua perangkat daerah termasuk sistem retensi, penyimpanan dan pemusnahan	
				Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	400 berkas	91,57	4. Kurangnya monitoring dan evaluasi terjadwal atas layanan pengelolaan arsip	4. Buat sistem pemantauan dan evaluasi berkala	
				Pengawasan arsip dinamis kewenangan kabupaten / kota	56 laporan	99,28	5. Masih perlu adanya bimbingan teknis kearsipan untuk		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							peningkatan pengetahuan dalam pengelolaan kearsipan di masing-masing perangkat daerah		
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah kabupaten / Kota	100	93,51	6. Regulasi yang masih perlu dibuat		
				Akuisis, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	36 arsip	93,51	7. JIKN dan Srikandi perlu di publikasikan dan promosi agar berjalan sesuai perkembangan		
				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten / Kota	100	95,27	8. Peran arsiparis masih sangat dibutuhkan dalam pembinaan dan pengelolaan kearsipan		
				Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan	44 laporan	95,27			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				lembaga kearsipan daerah kabupaten					
				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	100	92,98			
				Pemusnahan Arsip dilindungi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	100	93,22			
				Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun	46 arsip	93,22			
				Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten / Kota	100	92,61			
				Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip	35 arsip	92,61			



3.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Tabel 3.3
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan
yang dilaksanakan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Urusan Pilihan	Dinas Perikanan	Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Melalui Penguatan Komoditas dan Produk Unggulan Desa di Sektor Agribisnis, Agroindustri dan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		71,47			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		73,20			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	58,90			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perangkat Daerah					
				Belanja Barang dan Jasa					
				Alat Tulis Kantor		61,28			
				Bahan Cetak		56,27			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	79,37			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Alat Tulis Kantor		69,56			
				Bahan Cetak		53,42			
				Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		85,35			
				Tenaga Operator Komputer		100,00			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	56,33			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Bahan Cetak		56,33			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	55,91			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Belanja Barang dan Jasa					
				Bahan Cetak		55,91			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	47,31			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Bahan Cetak		47,31			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	84,56			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Alat Tulis Kantor		73,65			
				Bahan Cetak		55,97			
				Tenaga Operator Komputer		100,00			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		64,20			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan	32 Orang/Bulan	63,91			
				Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		56,31			
				Belanja Tambahan		74,74			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penghasilan ASN					
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	100.00			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		100.00			
				Alat Tulis Kantor		75,71			
				Bahan Cetak		52,65			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	81,53			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Alat Tulis Kantor		72,39			
				Bahan Cetak		50.50			
				Benda Pos		42,57			
				Tenaga Operator Komputer		100.00			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		84,67			
				Pendidikan dan	8 Orang	84,67			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
				Belanja Bimbingan Teknis		84,67			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		89,26			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Paket	77,45			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Alat Listrik		77,45			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	97,68			
				Belanja Modal					
				Belanja Modal Pompa		100,00			
				Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		93,91			
				Belanja Modal Alat Pendingin		98,14			
				Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya		97,34			
				Belanja Modal Personal Computer		98,33			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Belanja Modal Peralatan Komputer		96,37			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29 Paket	62,90			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Perabot Kantor		62,9			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Paket	55,81			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Bahan Bakar dan Pelumas		0,00			
				Alat Tulis Kantor		61,47			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	68,98			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Bahan Cetak		68,98			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13 Dokumen	55,18			
				Belanja Barang dan Jasa		55,18			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 Laporan	99,52			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan Konsultasi SKPD					
				Belanja Barang dan Jasa					
				Makanan dan Minuman Rapat		90,01			
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa		100,00			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		96,60			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		96,60			
				Belanja Modal					
				Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		96,60			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80,21			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100,00			
				Belanja Barang dan Jasa					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Benda pos		100,00			
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik		60,97			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Belanja Telepon		3,75			
				Belanja Air		26,67			
				Belanja Listrik		79,31			
				Belanja Internet		34,79			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		98,72			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Service AC		98,72			
				Service Komputer		98,73			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		100,00			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Tenaga Administrasi		100,00			
				Tenaga Keamanan		100,00			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		91,39			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemda					
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan	12 Unit	80,89			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Belanja Bahan Bakar dan Pelumas		91,84			
				Belanja Suku Cadang Alat angkutan		76,04			
				Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan		100,00			
				Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan		82,91			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	98,00			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Penambahan Daya Listrik		99,83			
				Rehab Gedung Kantor		96,90			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		96,80			
				Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		97,49			
				Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	1 Dokumen	93,68			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Belanja Alat Tulis Kantor		63,68			
				Belanja Bahan Cetak		89,53			
				Belanja Bahan/ Alat untuk kegiatan kantor lainnya		94,90			
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat		78,51			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		95,41			
				Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi		100,00			
				Belanja Sosialisasi		74,44			
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa		89,14			
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		97,87			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Belanja Alat Tulis Kantor		79,13			
				Belanja Bahan Cetak		75,00			
				Belanja Benda Pos		100,00			
				Belanja Bahan Komputer		44,22			
				Belanja diserahkan kepada Masyarakat					
				Penyediaan Sarana Penangkapan Ikan KUB Andardise Desa Muara Gula Lama Kec. Ujan Mas		99,25			
				Penyediaan Sarana Penangkapan Ikan		99,20			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				KUB Harapan Maju Desa Harapan Mulia Kec. Muara Belida					
				Penyediaan Sarana Penangkapan Ikan KUB Mandiri Desa Petar Luar Kec. Sungai Rotan		99,02			
				Penyediaan Sarana Penangkapan Ikan KUB Perupok Desa Tanjung Miring Kec. Sungai Rotan		99,22			
				Penyediaan Sarana Penangkapan Ikan KUB Sumber Rezeki 2 Desa Talang Nangka Kec. Lembak		98,18			
				Penyediaan Sarana Penangkapan Ikan KUB Tunas Muda Desa Tanjung Kemala Kec. Lubai		99,06			
				Perahu Penangkapan Ikan Bermesin, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Desa Arisan Musi		98,87			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kec. Muara Belida.					
				Perahu Penangkapan Ikan Bermesin, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Desa Arisan Musi Timur Kec. Muara Belida.		98,80			
				Perahu Penangkap Ikan Tanpa Mesin, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Desa Kartamulia Kec. Gelumbang (Musrenbang)		99,59			
				Perahu Penangkapan Ikan Bermesin, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Desa Kayuara Batu Kec. Muara Belida (Musrenbang)		98,95			
				Perahu Penangkapan Ikan Bermesin, Alat Penangkapan Ikan		98,03			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Desa Mulia Abadi Kec. Muara Belida (Musrenbang)					
				Perahu Penangkapan Ikan Bermesin, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Desa Patra Tani Kec. Muara Belida (Musrenbang)		98,95			
				Perahu Bermesin, Alat Penangkakan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Desa Perjito Kec. Gunung Megang (Musrenbang)		98,89			
				Perahu Penangkapan Ikan Tanpa Mesin, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Desa Petanang Kec. Lembak (Musrenbang)		99,57			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perahu Penangkapan Ikan Tanpa Mesin, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Desa Petar Dalam Kec. Sungai Rotan (Musrenbang)		99,25			
				Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Desa Petar Luar Kec. Sungai Rotan (Pengarustamaan Gender)		94,30			
				Perahu Penangkapan Ikan Bermesin, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Desa Pinang Belarik Kec. Ujan Mas (Musrenbang)		99,03			
				Perahu Penangkapan Ikan Bermesin, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Desa Siku Kec. Empat		98,96			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Petulai dangku (Musrenbang)					
				Perahu Penangkapan Ikan Bermesin, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Desa Sukarami Kec. Sungai Rotan (Musrenbang)		98,95			
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa		76,24			
				Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		92,65			
				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	30 Orang	93,14			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Belanja Alat Tulis Kantor		87,03			
				Belanja Bahan Cetak		86,31			
				Belanja Benda Pos		0,00			
				Belanja Perabot Kantor		64,38			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya		94,53			
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat		99,35			
				Honorarium Narasumber		100,00			
				Belanja Jasa Tenaga Administrasi		100,00			
				Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		100,00			
				Belanja Sewa Hotel		100,00			
				Belanja Kursus Singkat/Pelatihan		97,13			
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa		80,20			
				Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	13 Kelompok	89,52			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Belanja Alat Tulis Kantor		75,19			
				Belanja Bahan Cetak		89,01			
				Belanja Makanan dan		96,94			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Minuman Rapat					
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa		89,16			
				Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	4 Unit Usaha	91,82			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Belanja Alat Tulis Kantor		88,85			
				Belanja Bahan Cetak		77,80			
				Belanja Makanan dan Minuman		99,04			
				Honorarium Narasumber		100,00			
				Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		100,00			
				Belanja Sosialisasi		72,08			
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa		100,00			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		87,26			
				Kegiatan Pemberdayaan		92,78			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembudi Daya Ikan Kecil					
				Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	30 Kelompok	93,52			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Belanja Alat Tulis Kantor		96,24			
				Belanja Bahan Cetak		85,38			
				Belanja Benda Pos		100,00			
				Belanja Bahan Komputer		0,00			
				Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya		96,10			
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat		94,69			
				Honorarium Narasumber		93,06			
				Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		100,00			
				Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		99,91			
				Belanja Sewa Hotell		98,17			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Belanja Kursus Singkat/Pelatihan		99,01			
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa		83,77			
				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	14 Kelompok	96,22			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Belanja Alat Tulis Kantor		75,56			
				Belanja Bahan Cetak		94,91			
				Belanja Bahan Komputer		36,71			
				Belanja diserahkan kepada Masyarakat					
				Sarana Budidaya Ikan Gabus di Desa Sukacinta Kec. Sungai Rotan		99,12			
				Sarana Budidaya Ikan Gabus di Desa Segayam Kec. Gelumbang		98,72			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat		96,94			
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa		92,57			
				Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	10 Kelompok	77,72			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Belanja Alat Tulis Kantor		73,06			
				Belanja Bahan Cetak		71,90			
				Belanja Makanan dan Minuman		99,00			
				Honorarium Narasumber		100,00			
				Tenaga Operator Komputer		100,00			
				Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		100,00			
				Belanja Sosialisasi		68,33			
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa		54,62			
				Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar bagi		50,14			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
				Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Rekomendasi	50,14			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Belanja Alat Tulis Kantor		83,18			
				Belanja Bahan Cetak		71,98			
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		80,04			
				Belanja Makanan dan Minuman		43,80			
				Honorarium Narasumber		90,09			
				Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		100,00			
				Belanja Sewa Hotel		100,00			
				Belanja Sosialisasi		100,00			
				Belanja Perjalanan		36,41			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dinas					
				Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		87,39			
				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	55,92			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Belanja Alat Tulis Kantor		39,00			
				Belanja Bahan Cetak		43,45			
				Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya		43,69			
				Belanja Makanan Minuman Rapat		27,81			
				Belanja Jasa Tenaga Administrasi		50,00			
				Belanja Jasa Informasi dan Teknologi		73,33			
				Belanja Sosialisasi		33,33			
				Belanja Perjalanan Dinas		10,29			
				Penjaminan Ketersediaan Sarana	15 Unit	92,77			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah					
				Belanja Barang dan Jasa					
				Belanja Bahan Kimia		99,51			
				Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan		99,17			
				Belanja Alat Tulis Kantor		75,76			
				Belanja Bahan Cetak		63,06			
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		98,20			
				Belanja diserahkan kepada Masyarakat					
				Bantuan Bibit Ikan Lele di Desa Kepur Kec. Muara Enim..		92,95			
				Bantuan Bibit Ikan Lele di Desa Muara Lawai Kec. Muara Enim Pokdakan Muara Lawai Sejahtera.		92,73			
				Bantuan Bibit Ikan Lele di Desa Pagar Agung Kec. Rambang.		92,73			
				Bantuan Bibit Ikan		92,95			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Lele di Desa Pinang Belarik Kec. Ujan Mas Pokdakan Tani Sejahtera..					
				Bantuan Bibit Lele Desa Menanti Kec. Lubai.		93,52			
				Bantuan Bibit Ikan Lele di Desa Tungkal RT 01 Kec. Muara Enim.		92,73			
				Bantuan Bibit Ikan Lele di Desa Tungkal RT 02 Kec. Muara Enim.		92,73			
				Bantuan Bibit Ikan Lele di Desa Tungkal RT 03 Kec. Muara Enim.		92,73			
				Bantuan Bibit Lele Pokdakan Makmur Jaya Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul..		93,51			
				Bantuan Bibit Nila di Desa Putak Kec. Gelumbang.		91,92			
				Bantuan Mesin Pembuat Pakan Ikan Desa Kota Baru Kec.		98,20			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Lubai.					
				Bantuan Bibit Ikan Lele di Desa Fajar Indah Kec. Gunung Megang		93,31			
				Bantuan Bibit Ikan Lele di Desa Sidomulyo Kec. Gunung Megang		93,16			
				Bantuan Bibit Ikan Lele di Desa Sumaja Makmur Kec. Gunung Megang		93,24			
				Bantuan Bibit Ikan Lele di Desa Tanjung Tiga Kec. Belida Darat (Musrenbang)		93,74			
				Bantuan Bibit Ikan Lele Desa Payabakal Kec. Gelumbang..		93,51			
				Bantuan Bibit Ikan Lele Kel. Pasar 1 Kec. Muara Enim.		93,39			
				Bantuan Bibit Lele Desa Muara Lawai Kec. Muara Enim.		93,53			
				Bantuan Bibit Ikan Nila Desa Karang		93,64			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Endah Selatan Kp.III Kec. Gelumbang.					
				Bantuan Bibit Ikan Nila Desa Payabakal Kec. Gelumbang.		93,64			
				Bantuan Bibit Lele Pokdakan Panoe Bugis Desa Jemenang Kec. Rambang Niru.		93,52			
				Bantuan Bibit Lele Tani Mina Makmur Kel. Gelumbang Kec. Gelumbang		93,51			
				Bantuan Bibit Lele Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung.		93,67			
				Bantuan Bibit Lele Desa Muara Dua Kec. SDL.		93,67			
				Bantuan Bibit Ikan Lele di Desa Ujan Mas Ulu Kec. Ujan Mas Pokdakan Ujan Mas Ulu Mandiri (Musrenbang)		92,95			
				Bantuan Bibit Ikan Lele di Kel. Pasar 1 Kec. Muara Enim Pokdakan Brother		93,45			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Fish					
				Bantuan Bibit Ikan Lele Dusun V Desa Marga Mulya Kec. Rambang Pokdakan Melati (Musrenbang)		93,60			
				Bantuan Bibit Ikan Lele Desa Gaung Asam Kec. Belida Darat (Musrenbang)		92,95			
				Bantuan Bibit Lele Desa Ibul Kec. Belida Darat (Musrenbang)		92,73			
				Bantuan Bibit Lele Desa Karang Agung Kec. Lubai Ulu (Musrenbang)		93,74			
				Bantuan Bibit Lele Desa Kepur Kec. Muara Enim Pokdakan Muda Sepakat (Musrenbang)		93,45			
				Bantuan Bibit Lele Desa Lecah Kec. Lubai Ulu (Musrenbang)		93,59			
				Bantuan Bibit Lele Desa Talang Balai		93,74			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kec. Belida Darat (Musrenbang)					
				Bantuan Bibit Lele di Desa Belimbing Dusun 1 Kec. Belimbing (Musrenbang)		92,73			
				Bantuan Bibit Lele di Dusun 1 Kec. Rambang (Musrenbang)		93,60			
				Bantuan Bibit Lele di Dusun Muara Enim Kec. Muara Enim Pokdakan Karang Sentul Sejahtera (Musrenbang)		93,31			
				Bantuan Bibit Nila di Desa Betung Kec. Benakat (Musrenbang)		93,24			
				Bantuan Bibit Patin di Desa Siku Kec. Empat Petulai dangku (Musrenbang)		0,00			
				Bantuan Mesin Pembuat Pakan Ikan Desa Kayu Ara Kec. Gunung Megang		98,20			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				(Musrenbang)					
				Belanja Natura dan Pakan					
				BBI Bedegung		97,61			
				BBI Pagar Dewa		97,58			
				BBI Patra Tani		95,95			
				Hatchery Dinas Perikanan		95,51			
				Belanja Jasa Tenaga Administrasi		96,97			
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa		72,99			
				Belanja Modal					
				Saluran inlet air BBI unit Bedegung		99,20			
				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	36,31			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Belanja Bahan Kimia		0,00			
				Belanja Alat Tulis Kantor		63,97			
				Belanja Bahan Cetak		63,06			
				Belanja Alat/Bahan		0,00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				untuk Kegiatan Kantor Lainnya					
				Belanja Natura dan Pakan-Pakan		46,11			
				Belanja Jasa Tenaga Laboratorium		20,83			
				Belanja Jasa Tenaga Administrasi		100,00			
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa		28,17			
				Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidaya Ikan di Darat	10 Ha	90,09			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan		99,46			
				Belanja Alat Tulis Kantor		81,57			
				Belanja Bahan Cetak		4,50			
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		99,10			
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa		78,11			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	150 Orang	82,11			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Belanja Bahan Kimia		100,00			
				Belanja Alat Tulis Kantor		76,82			
				Belanja diserahkan kepada Masyarakat					
				Budikdamber Kec. Lubai Ulu (29 KK)		95,36			
				Budikdamber Kec. Rambang (26 KK)		97,47			
				Budikdamber Kec. Sungai Rotan (26 KK)		97,47			
				Kelompok Pembudidayaan Ikan Desa Kayu Ara Kec. Muara Belida (Musrenbang)		92,67			
				Kelompok Pembudidayaan Ikan Desa Lecah Kec. Lubai Ulu (Musrenbang)		92,67			
				Kelompok		92,67			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembudidaya Ikan Desa Lembak Kec. Lembak (Musrenbang)					
				Kelompok Pembudidaya Ikan Desa Menanti Selatan Kec. Kelekar (Musrenbang)		92,67			
				Kelompok Pembudidaya Ikan Desa Muara Gula Lama Kec. Ujan Mas (Musrenbang)		92,67			
				Kelompok Pembudidaya Ikan Desa Mulia Abadi Kec. Muara Belida (Musrenbang)		92,67			
				Kelompok Pembudidaya Ikan Desa Petar Dalam Kec. Sungai Rotan (Musrenbang)		92,67			
				Kelompok Pembudidaya Ikan Desa Sukadana Kec. Sungai Rotan (Musrenbang)		92,67			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kelompok Pembudidaya Ikan Desa Tanjung Karang Kec. Tanjung Agung (Musrenbang)		92,67			
				Kelompok Pembudidaya Ikan Desa Tanjung Medang Kec. Kelekar (Musrenbang)		92,67			
				Kelompok Pembudidaya Ikan Desa Tanjung Raya Kec. Rambang (Musrenbang)		92,67			
				Kelompok Pembudidaya Ikan Desa Teluk Limau Kec. Gelumbang (Musrenbang)		92,67			
				Bantuan Bibit Ikan Nila di Kemang Jaya Kec. Lembak (Pekerjaan tahun 2023)		92,01			
				Kelompok		95,36			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pembudidaya Ikan Desa Tapus Kec. Lembak Pokdakan Tapus Permai.					
				Kelompok Pembudidaya Ikan Muda Mudi Darusalam Kel. Air Lintang Kec. Muara Enim.		92,65			
				Belanja Jasa Tenaga Administrasi		100,00			
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa		42,99			
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		92,87			
				Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		74,66			
				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah	1 Dokumen	74,66			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kabupaten/Kota					
				Belanja Barang dan Jasa					
				Belanja Alat Tulis Kantor		91,86			
				Belanja Bahan Cetak		96,18			
				Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		90,09			
				Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat					
				Bantuan/Subsidi Inflasi Harga Komoditi Ikan		20,63			
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat		100,00			
				Honorarium Narasumber		90,09			
				Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		100,00			
				Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi		100,00			
				Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		100,00			
				Belanja Sewa Hotel		100,00			
				Belanja Sosialisasi		100,00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa		81,39			
				Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		90,33			
				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	20 Unit Usaha	90,33			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Belanja Alat Tulis Kantor		88,54			
				Belanja Bahan Cetak		95,10			
				Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya		98,46			
				Belanja Makanan dan Minuman Rapat		99,39			
				Honorarium Narasumber		90,09			
				Belanja Jasa Tenaga		78,76			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Laboratorium					
				Belanja Tenaga Operator Komputer		66,67			
				Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		99,13			
				Belanja Sewa Hotel		97,60			
				Belanja Sosialisasi		100,00			
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa		91,99			
				Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		96,37			
				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	18000 Ton	96,49			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Belanja Alat Tulis Kantor		82,22			
				Belanja Bahan Cetak		63,46			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya		68,72			
				Belanja diserahkan kepada Masyarakat					
				Bantuan Produk Olahan Ikan (Program Stunting) Desa Fajar Indah Kec. Gunung Megang (TMMD)		97,97			
				Bantuan Produk Olahan Ikan (Program Stunting) Desa Sidomulyo Kec. Gunung Megang (TMMD)		97,97			
				Bantuan Produk Olahan Ikan (Program Stunting) Desa Sumaja Makmur Kec. Gunung Megang (TMMD)		97,97			
				Makanan Sehat Serba Ikan (GEMARIKAN)		96,53			
				Bantuan Produk Olahan Ikan (Program Stunting)		99,10			
				Bantuan Produk		97,97			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Olahan Ikan (Program Stunting) Untuk Anak Kecamatan SDU (dana Insentif Fiskal)					
				Bantuan Produk Olahan Ikan (Program Stunting) Untuk Anak Kecamatan SDT (dana Insentif Fiskal)		97,75			
				Bantuan Produk Olahan Ikan (Program Stunting) Untuk Anak Kecamatan SDL (dana Insentif Fiskal)		98,20			
				Bantuan Produk Olahan Ikan (Program Stunting) Untuk Anak Kecamatan Lembak (dana Insentif Fiskal)		97,86			
				Bantuan Produk Olahan Ikan (Program Stunting) Untuk Anak Kecamatan Sungai Rotan dan Belida Darat (dana Insentif Fiskal)		97,64			
				Belanja Jasa Tenaga Administrasi		100,00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Belanja Jasa Iklan/reklame, film dan pemotretan		100,00			
				Belanja Perjalanan Dinas Biasa		100,00			
				Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Pelaku Usaha	96,19			
				Belanja Barang dan Jasa					
				Belanja Alat Tulis Kantor		75,67			
				Belanja Bahan Cetak		54,05			
				Belanja diserahkan Kepada Masyarakat					
				Belanja Peralatan Pengolahan Ikan (Olahan Pempek) Desa Cinta Kasih Kec. Belimbing		97,01			
				Belanja Peralatan Pengolahan Ikan Salai Desa Segayam Kec. Gelumbang		98,77			
				Belanja Peralatan		98,77			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengolahan Ikan Salai Desa danau Rata Kec. Sungai Rotan					
				Belanja Peralatan Pengolahan Ikan Salai Desa Muara Lawai Kec. Muara Enim		98,77			
				Belanja Peralatan Pengolahan (Olahan Kerupuk - Kemplang) Desa Patra Tani Kec. Muara Belida		97,15			
				Belanja Peralatan Pengolahan (Olahan Kerupuk - Kemplang) Desa Arisan Musi Kec. Muara Belida		95,10			
				Belanja Peralatan Pengolahan Ikan Salai Desa danau Baru Kec. Sungai Rotan		97,40			
				Belanja Peralatan Pengolahan dan Pemasaran Ikan Poklahsar Berkah Fish Desa Suka Menang Kec. Gelumbang		96,18			
				Belanja Peralatan Pengolahan dan		96,80			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemasaran Ikan Poklahsar Mawar Kel. Muara Enim Kec. Muara Enim					
				Belanja Peralatan Pengolahan dan Pemasaran Ikan Poklahsar Tumbuh Bersama Kel. Muara Enim Kec. Muara Enim		96,94			
				Belanja Peralatan Pengolahan dan Pemasaran Ikan Kelurahan Air Lintang Kec. Muara Enim		96,92			
				Belanja Peralatan Pengolahan dan Pemasaran Ikan Desa Tegal Rejo Kec. Lawang Kidul		97,51			
				Belanja Peralatan Pengolahan dan Pemasaran Ikan Poklahsar Rukun Damai Kel. Tungkal Kec. Muara Enim		96,71			
				Belanja Peralatan		98,13			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengolahan dan Pemasaran Ikan Desa Belimbing Kec. Belimbing					
				Belanja Peralatan Pengolahan dan Pemasaran Ikan Desa Gunung Megang Kec. Gunung Megang		97,03			
				Belanja Peralatan Pengolahan dan Pemasaran Ikan Desa Patra Tani Kec. Muara Belida		95,91			
				Belanja Peralatan Pengolahan dan Pemasaran Ikan Desa Gedung Buruk Kec. Muara Belida		96,47			
				Belanja Peralatan Pengolahan dan Pemasaran Ikan Desa Arisan Musi Timur Kec. Muara Belida		95,51			
				Belanja Peralatan Pengolahan dan Pemasaran Ikan Desa Betung Kec. Benakat		96,53			
				Belanja Perjalanan		92,31			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dinas Biasa					

No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	80,67%	Belum optimalnya sinkronisasi dokumen perencanaan, keterbatasan dan rasionalisasi anggaran, serta belum maksimalnya pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan perencanaan dan penganggaran. Selain itu, indikator kinerja program dan kegiatan belum sepenuhnya berbasis outcome dan didukung	Penguatan Koordinasi dengan perangkat daerah terkait, penajaman skala prioritas program dan kegiatan, penyusunan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta peningkatan kualitas indikator kinerja dan sistem monitoring serta evaluasi. Upaya ini juga didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan basis data pariwisata	Diarahkan pada penyempurnaan dokumen perencanaan secara berkelanjutan, optimalisasi penganggaran berbasis kinerja dan output, serta penguatan sistem evaluasi dan pelaporan kinerja melalui penerapan e-SAKIP secara konsisten. Dengan pelaksanaan tindak lanjut tersebut, diharapkan kualitas tata kelola perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							oleh data yang terkelola secara sistematis.	dan ekonomi kreatif.	Kabupaten Muara Enim dapat terus meningkat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	56,85%	Pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah belum sepenuhnya optimal, ditandai dengan keterlambatan proses administrasi, penyesuaian terhadap perubahan kebijakan penganggaran, serta belum maksimalnya pemahaman aparatur terhadap regulasi keuangan	Melakukan peningkatan Koordinasi internal, penguatan pemahaman regulasi keuangan, serta penataan administrasi keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, serta melakukan evaluasi dan pengendalian administrasi keuangan secara berkelanjutan.



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							daerah.		
				Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	61,01%	Pengelolaan administrasi Barang Milik Daerah belum sepenuhnya tertib, ditandai dengan ketidaksesuaian data inventaris, keterlambatan pencatatan, serta belum optimalnya pemahaman pengelola terhadap ketentuan pengelolaan BMD.	Melakukan penataan dan pemutakhiran data BMD, meningkatkan Koordinasi internal, serta memperkuat pemahaman aparatur terhadap regulasi pengelolaan Barang Milik Daerah.	Melaksanakan inventarisasi BMD secara berkala, meningkatkan kapasitas SDM pengelola BMD, serta memperkuat pengendalian dan pengawasan administrasi Barang Milik Daerah secara berkelanjutan.
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	49,17%	Pelaksanaan administrasi kepegawaian belum sepenuhnya tertib dan optimal, ditandai dengan keterlambatan pemutakhiran	Melakukan penataan dan pemutakhiran data kepegawaian, meningkatkan Koordinasi internal, serta memperkuat pemahaman aparatur terhadap	Meningkatkan kapasitas pengelola kepegawaian, mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian, serta melakukan evaluasi administrasi kepegawaian secara



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							data kepegawaian, penyesuaian regulasi kepegawaian yang dinamis, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi kepegawaian.	ketentuan peraturan kepegawaian.	berkelanjutan.
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	92,63%	Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah belum sepenuhnya berjalan optimal, ditandai dengan keterbatasan sarana pendukung, penataan administrasi persuratan dan kearsipan yang belum tertib, serta Koordinasi internal yang perlu ditingkatkan.	Melakukan penataan administrasi umum, peningkatan Koordinasi internal, serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung administrasi.	Meningkatkan tertib administrasi umum, memperkuat sistem persuratan dan kearsipan, serta melakukan evaluasi administrasi umum secara berkala dan berkelanjutan.



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	100%	98,09%	Pelaksanaan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang belum sepenuhnya optimal, antara lain dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, penyesuaian terhadap perubahan regulasi pengadaan, serta keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan.	Melakukan perencanaan pengadaan yang lebih matang, meningkatkan Koordinasi dengan pihak terkait, serta memastikan pelaksanaan pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi pengadaan, memperkuat perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah penunjang, serta melakukan evaluasi pelaksanaan pengadaan secara berkelanjutan.
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100%	69,41	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan belum sepenuhnya optimal, antara lain dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran,	Melakukan perencanaan kebutuhan jasa penunjang secara lebih matang, meningkatkan Koordinasi dengan penyedia jasa dan pihak terkait, serta memastikan	Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, memperkuat pengendalian pelaksanaan jasa penunjang, serta melakukan evaluasi secara berkala guna meningkatkan kualitas layanan pendukung urusan pemerintahan.



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							ketepatan waktu pelaksanaan, serta penyesuaian terhadap perubahan regulasi.	pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	96,85%	Pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah belum sepenuhnya optimal, antara lain dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran, keterlambatan pelaksanaan pemeliharaan, serta belum terdatanya kondisi Barang Milik Daerah secara menyeluruh.	Melakukan pendataan dan penilaian kondisi Barang Milik Daerah secara berkala, menyusun skala prioritas pemeliharaan, serta meningkatkan Koordinasi dalam pelaksanaan pemeliharaan.	Meningkatkan tertib administrasi pemeliharaan, memastikan pemeliharaan dilakukan secara tepat waktu dan berkelanjutan, serta melakukan evaluasi kondisi Barang Milik Daerah secara periodik.
				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	100%	76,22%	Pengelolaan daya tarik wisata belum sepenuhnya optimal, ditandai	Melakukan penataan dan pengembangan daya tarik wisata secara bertahap,	Menyusun rencana pengelolaan daya tarik wisata yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, belum maksimalnya promosi, serta keterbatasan anggaran pengelolaan dan pengembangan.	meningkatkan promosi dan Koordinasi dengan pihak terkait, serta mengoptimalkan peran masyarakat dan pelaku pariwisata.	sarana dan prasarana pendukung, serta melakukan evaluasi pengelolaan daya tarik wisata secara berkala.
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	100%	95,12%	Pengelolaan kawasan strategis pariwisata belum sepenuhnya optimal, antara lain disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, Koordinasi lintas sektor yang belum maksimal, serta keterbatasan anggaran pengembangan	Meningkatkan Koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, melakukan penataan kawasan secara bertahap, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi kawasan strategis pariwisata.	Menyusun rencana pengelolaan kawasan strategis pariwisata secara terpadu dan berkelanjutan, meningkatkan dukungan sarana dan prasarana, serta melakukan evaluasi pengelolaan kawasan secara berkala.



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							kawasan.		
				Pengelolaan Destinasi Wisata Kabupaten/Kota	100%	76,22%	Pengelolaan destinasi wisata belum sepenuhnya optimal, ditandai dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, belum maksimalnya pengelolaan berbasis standar, serta keterbatasan anggaran pengembangan destinasi.	Melakukan penataan dan peningkatan kualitas destinasi wisata secara bertahap, meningkatkan Koordinasi dengan pihak terkait, serta mendorong partisipasi masyarakat dan pelaku pariwisata dalam pengelolaan destinasi.	Menyusun rencana pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung, serta melakukan evaluasi pengelolaan destinasi wisata secara berkala.
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	100%	77,40%	Pelaksanaan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum sepenuhnya optimal, keterbatasan pemahaman pelaku usaha terhadap	Melakukan sosialisasi prosedur dan persyaratan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, meningkatkan Koordinasi dengan perangkat daerah terkait,	Meningkatkan pelayanan penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang efektif dan sesuai ketentuan, memperkuat Koordinasi perizinan, serta melakukan evaluasi dan pembinaan usaha



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							prosedur dan persyaratan, serta Koordinasi perizinan yang masih perlu ditingkatkan.	serta memberikan pendampingan kepada pelaku usaha pariwisata	pariwisata secara berkelanjutan.
				Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri	100%	88,02%	Pelaksanaan pemasaran pariwisata belum sepenuhnya optimal, ditandai dengan keterbatasan anggaran promosi, belum maksimalnya pemanfaatan media digital, serta jangkauan promosi yang masih terbatas.	Meningkatkan strategi pemasaran pariwisata melalui pemanfaatan media digital, memperkuat kerja sama dengan pemangku kepentingan pariwisata, serta mengoptimalkan promosi melalui event dan kegiatan pariwisata.	Menyusun strategi pemasaran pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas SDM pemasaran pariwisata, serta melakukan evaluasi efektivitas kegiatan pemasaran secara berkala.
				Pengembangan Ekosistem ekonomi Kreatif	100%	86,31%	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif belum sepenuhnya optimal, ditandai dengan keterbatasan akses	Melakukan pembinaan dan pendampingan pelaku ekonomi kreatif, meningkatkan fasilitas promosi dan pemasaran produk, serta	Meningkatkan penguatan ekosistem ekonomi kreatif secara berkelanjutan, memperluas akses pasar dan pembiayaan, serta melakukan evaluasi program



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							pembiayaan, pemasaran produk yang belum maksimal, serta kapasitas dan daya saing pelaku ekonomi kreatif yang masih perlu ditingkatkan.	memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait.	pengembangan ekonomi kreatif secara berkala.
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	100%	89,28%	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif belum sepenuhnya optimal, ditandai dengan keterbatasan anggaran, jangkauan peserta yang belum merata, serta perbedaan tingkat kompetensi pelaku pariwisata dan	Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis secara bertahap, meningkatkan kerja sama dengan lembaga terkait, serta menyesuaikan materi pelatihan dengan kebutuhan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.	Meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program peningkatan kapasitas SDM, memperluas jangkauan pelatihan, serta melakukan evaluasi hasil pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							ekonomi kreatif.		

No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Partanian	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan		DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PETERNAKAN		99,82			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		99,93			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100,00			Untuk pemenuhan kebutuhan sarana produksi dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas tanaman



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									pangan secara intergratif dari Hulu ke hilir Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim telah menindaklanjutinya melalui Sub Kegiatan :
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	100,00			1. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B berupa belanja diserahkan kepada masyarakat berupa : Handtraktor (50 unit), Pompa Air 3 Inch (39 unit) Power Tresher (6 Unit) Traktor Roda 4 (6 Unit), Cultivator (13 Unit), Bed Dryer (2 Unit), Mulsa Plastik (143 Rol), Terpal Jemur



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									(18 Lembar), Lapon Lingkr Besi (500 Unit), Selang Drip Plastik (10 Rol), Handsprayer Eleketrik (25 Unit), MesinPemotong Rumput (10 Unit), Alat Irigasi tetes (7 Paket), Pembangunan Gudang Alsintans Brigade Pangan (7 Unit) dan Pembangunan Sumur Bor (2 Unit).
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	100	100,00			2. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani belanja Barang diserahkan kepada masyarakat berupa Pembangunan Jalan Usaha Tani sepanjang 33.456,12 meter
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100	100,00			3. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi Usaha Tani belanja diserahkan kepada masyarakat



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									berupa : Pembangunan irigasi tersier (471,88 M), Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (376,76 M) dan Pembangunan Sumur Bor (2 Unit)
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100	100,00			4. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian, belanja diserahkan kepada masyarakat berupa : Pembangunan Embug (6 Unit).
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	100	100,00			5. Penjaminan Kemurnian dan kelestarian SDG Hewan dan tanaman belanja diserahkan kepada masyarakat berupa kegiatan pengembangan Instensifikasi Tanaman padi dan palawija Berupa bantuan Benih Padi Sebar (BR) seluas 2.234 Ha dan bantuan benih padi melalui



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									optimalisasi peningkatan indeks pertanaman seluas 2000 Ha.
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100,00			Untuk Pembinaan terhadap pelaku usaha yang ada di Kabupaten Muara Enim agar dapat ditingkatkan seperti peningkatan produk-produk olahan dengan harapan masyarakat dapat menerima manfaat maka Dinas Tanaman pangan Hortikultura telah menindaklanjutinya melalui sub kegiatan Pendampingan Unit Usaha dan Produk Hewan berupa kegiatan Sosialisai produk asal ternak yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) serta higienis untuk dikonsumsi sebanyak 30 peserta,



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									pengawasan dan pembinaan uni usaha produk hewan sebanyak 1 unit dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM sebanyak 96 kali.
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100,00			Untuk Penyaluran Pupuk yang bersubsidi dilaksanakan sesuai dengan Juknis Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Kementerian Pertanian, Pupuk Bersubsidi yang diusulkan melalui Program E-RDKK yang alokasinya ditentukan oleh Kementerian Pertanian RI. Tahun 2025 Alokasi Pupuk Subsidi telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan Kabupaten Muara



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									Enim Nomor : 500.6.1/428/KPTS/DT PHP/2025 dengan rincian : Urea (1.618,47 Kg) dan NPK (3.161,01 Kg) Untuk 22 Kecamatan sesuai dengan Alokasi yang diterima dari Kementerian Pertanian dan Selanjutnya dilakukan Realokasi untuk mengoptimalkan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Masing-masing Kecamatan.
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	100,00			Untuk mendorong dan meningkatkan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan pengaliran lainnya, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura telah menganggarkannya pada Tahun 2025



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									melalui Subkegiatan sebagai berikut : 1. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi Usaha Tani belanja diserahkan kepada masyarakat berupa : Pembangunan irigasi tersier (471,88 M), Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (376,76 M) dan Pembangunan Sumur Bor (2 Unit) 2. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian, belanja diserahkan kepada masyarakat berupa : Pembangunan Embung (6 Unit).
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	100,00			
				Sub Kegiatan	100	100,00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100,00			
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100	100,00			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		80,00			
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	80,00	Kurang optimalnya penyerapan keuangan dikarenakan adanya perubahan kebijakan yang sebelumnya anggaran tersebut untuk biaya pelatihan dan	akan dilakukan dengan efisiensi anggaran sesuai jumlah pegawai yang ada dan kabutuhan peningkatan kualitas kompetensi ASN	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Bimbingan Teknis Penyuluh Pertanian dan Perubahan Nomenkatur Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian ditarik ke Kementerian Pertanian RI.		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100,00			
				Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	100,00			
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	100,00			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	100,00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	100,00			
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	100,00			
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	100	100,00			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	100,00			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00			
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (ABT)	100	100,00			
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	100	100,00			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100,00			
				Sub Kegiatan	100	100,00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	100	100,00			
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	100	100,00			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100,00			
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	100,00			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	100,00			
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabil	100	100,00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	100,00			
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		99,52			
				Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		100,00			
				Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	100	100,00			
				Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100	100,00			
				Sub Kegiatan Perbanyak Benih	100	100,00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih					
				Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		100,00			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	100	100,00			
				Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	100	100,00			
				Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	100	100,00			
				Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	100	100,00			
				Kegiatan Pengendalian dan		100,00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	100	100,00			
				Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		98,94			
				Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	100	98,86	Kurang optimalnya realisasi fisik dan keuangan disebabkan oleh pada belanja persediaan yang diserahkan kepada	sebelum mengusulkan proposal dan dilaksanakan CPCL kelompok tani harus memenuhi syarat sebagai	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Masyarakat berupa bantuan untuk budidaya ternak ayam, ada 1 (satu) kelompok tani yang tidak direalisasikan yaitu kelompok tani Desa Muara Gula Baru kecamatan ujanmas dikarenakan tidak memenuhi sebagai kelompok petani penerima manfaat sesuai dengan hasil survey dan verifikasi Calon penerima dan Calon Lokasi	penerima manfaat	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							(CPCL) yang dilaksanakan.		
				Sub Kegiatan Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	100	100,00			
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		100,00			
				Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian		100,00			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	100	100,00			
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	100	100,00			
				Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan	100	100,00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan					
				Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	100				
				Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian					
				Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	100				
				Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	100		Pada Belanja kepada masyarakat terdapat 1 (satu) kegiatan fisik yang tidak direalisasikan	diperlukan Koordinasi yang lebih intensif dengan tim teknis lapangan dan BPP terkait	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							yaitu Pembangunan Jalan Usaha Tani Ataran Pucuk Matang Desa Padang Bindu Kecamatan Panang Enim sebesar Rp. 183.190.080,00 karena telah dilaksanakan pada APBD Perubahan Tahun 2025 dengan lokasi yang sama dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00.	sehingga pelaksanaan lebih matang.	
				Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	100				
				Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi,	100		lokasi lahan milik Pemerintah	diperlukan Koordinasi yang lebih	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan			Kabupaten Muara Enim untuk pembangunan Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) masih dalam proses pengadaan tanah oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Muara Enim sehingga untuk belanja Modal Alat-alat peternakan untuk prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) sebesar Rp. 1.000.000.000,-	intensif dengan tim teknis dan Dinas terkait sehingga perencanaan pelaksanaan lebih matang	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							tidak dapat direalisasikan.		
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		100,00			
				Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		100,00			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	100	100,00			
				Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	100,00			
				Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis		100,00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kesehatan Masyarakat Veteriner					
				Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	100	100,00			
				Sub Kegiatan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	100	100,00			
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		100,00			
				Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		100,00			
				Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100	100,00			
				Sub Kegiatan Penanganan Dampak	100	100,00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan					
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		100,00			
				Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		100,00			
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	100	100,00			
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	100	100,00			
				Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	100				
				Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	100	100,00			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26		Dinas Perkebunan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100,00	100,00	Kurangnya Personil Petugas Lapangan (PPL) di wilayah Kecamatan	Tersedianya alokasi penyediaan SDM untuk memenuhi kebutuhan Petugas Lapangan (PPL) untuk wilayah-wilayah yang belum ada Petugasnya	'Upaya maksimal telah dilakukan dengan melaksanakan pendampingan dan fasilitasi peningkatan mutu produk hasil produksi sawit dan karet sehingga sesuai dengan standarisasi yang dibutuhkan oleh pihak pembeli antara lain diberikannya bantuan sarana pasca panen untuk sawit dan karet yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah
				Perencanaan, Penanganan, dan	100,00	100,00	Kurangnya Sarana	Tersedianya alokasi	'Upaya kerjasama dengan pihak



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Transportasi (Mobil Dinas) untuk Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan	anggaran untuk penyediaan Sarana Transportasi (Mobil Dinas) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan	buyer/pembeli telah dilaksanakan dengan melakukan pendekatan dengan melibatkan pihak-pihak buyer/pembeli disetiap aktivitas pelelangan mandiri disetiap Desa-Desa yang melaksanakan lelang mandiri
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Peningkatan Produksi Perkebunan	Tersedianya alokasi anggaran untuk memenuhi Sarana dan Prasarana Pendukung Peningkatan Hasil Produksi Perkebunan dengan skala	'Upaya yang dilaksanakan yaitu memfasilitasi buyer/pembeli dari dalam Kabupaten Muara Enim maupun dari luar Kabupaten Muara Enim untuk dapat ikut serta dalam pelelangan mandiri dengan menginformasikan



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								prioritas	dan menjalin komunikasi intensif dengan mengedepankan asas-asal jual beli yang tidak terikat dan jujur sesuai dengan standarisasi dalam melaksanakan jual beli produk hasil perkebunan
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Peningkatan Mutu Produksi Perkebunan	Tersedianya alokasi anggaran untuk memenuhi Sarana dan Prasarana Pendukung Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan yang sesuai dengan anjuran	'Pada tahun 2025 anggaran meningkat sebesar 158% dibandingkan tahun 2024, sehingga dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk peningkatan



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									produksi komoditas perkebunan di Tahun 2025
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kurangnya Pelatihan Kapasitas SDM Petugas Lapangan (PPL)	Tersedianya alokasi anggaran untuk Pelatihan Kapasitas SDM Petugas Lapangan (PPL)	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Kurangnya Pelatihan Kapasitas untuk Petani Pekebun	Tersedianya alokasi anggaran untuk Pelatihan Kapasitas untuk Petani Pekebun	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi	1 Dokumen	1 Dokumen			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kinerja SKPD					
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	100,00			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Adminstrasi Barang Milik Daerah Pada	100,00	100,00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perangkat Daerah					
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Jenis Polis Asuransi	2 Jenis Polis Asuransi			
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Dokumen Laporan BMD	1 Dokumen Laporan BMD			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	100,00			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 Orang	4 Orang			
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1 Kali	1 Kali			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	100,00			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Jenis Kom ponen Listrik	12 Jenis Kom ponen Listrik			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23 Jenis Peralatan Kebersihan	23 Jenis Peralatan Kebersihan			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27 Jenis Alat Tulis Kantor	27 Jenis Alat Tulis Kantor			
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6 Jenis Barang Cetakan	6 Jenis Barang Cetakan			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Jenis Surat Kabar	4 Jenis Surat Kabar			
				Fasilitas Kunjungan Tamu	8 Notulen Rapat	8 Notulen Rapat			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Dokumen Perjalan Dinas	12 Dokumen Perjalan Dinas			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	100,00	100,00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34 Unit	34 Unit			
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Jenis Dokumen	2 Jenis Dokumen			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	4 Jenis Jasa Layanan	4 Jenis Jasa Layanan			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jenis Service	1 Jenis Service			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Dokumen Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Dokumen Jasa Pelayanan Umum Kantor			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	100,00	100,00			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan. Dinas Operasional atau Lapangan	2 Jenis Jasa Pemeliharaan Kendaraan	2 Jenis Jasa Pemeliharaan Kendaraan			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor	3 Jenis Pemeliharaan Gedung Kantor			
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	100,00	100,00			
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100,00	100,00			
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi	2 Jenis Pengawasan Penggunaan	2 Jenis Pengawasan Penggunaan			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dan Spesifik Lokasi	Sarana Pendukung Pertanian	Sarana Pendukung Pertanian			
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 Jenis Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 Jenis Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00	100,00			
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Jenis Kegiatan Peningkatan SDG Tanaman	1 Jenis Kegiatan Peningkatan SDG Tanaman			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Jenis Kegiatan Pemanfaatan SDG Tanaman	1 Jenis Kegiatan Pemanfaatan SDG Tanaman			
				Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100,00	100,00			
				Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil.	425 Ha Peremajaan Karet	425 Ha Peremajaan Karet			
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	100,00	100,00			
				Pengembangan Prasarana Pertanian	100,00	100,00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Dokumen (8 Event Promosi, 1 Kegiatan Fasilitas UPPB dan UPH Kopi)	1 Dokumen (8 Event Promosi, 1 Kegiatan Fasilitas UPPB dan UPH Kopi)			
				Pembangunan Prasarana Pertanian	100,00	95,38			
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	65 Paket Pembukaan Jalan Produksi	62 Paket Pembukaan Jalan Produksi			
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	100,00	100,00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100,00	100,00			
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1 Dokumen	1 Dokumen			
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	100,00	75,00			
				Penerbitan Izin Usaha pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten Kota	100,00	75,00			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen			
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	100,00	100,00			
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100,00	100,00			
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	Urusan Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, serta Energi dan Sumber Daya Mineral	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	100	99,17			
				Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	99,17			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	94,84			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	94,92			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	92,93			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	99,40			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	97,74			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (ABT)	100	91,32			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	89,53			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	98,07			
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	100	99,20			
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana distribusi	100	99,20			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				program/kegiatan Perdagangan					
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	100	79,32			
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100	79,32	realisasi kegiatan kurang dari 90% disebabkan honorarium Tim Satgas LPG pada APBD Perubahan TA 2025 hanya dibayarkan kepada anggota tim yang tidak menerima honor dari lebih dari tiga kegiatan, sesuai tindak lanjut temuan BPK RI, serta dibayarkan selama 3 bulan sejak	Pembayaran honorarium Tim Satgas LPG dilaksanakan secara selektif, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta rekomendasi BPK RI, disertai evaluasi perencanaan anggaran pada kegiatan sejenis agar lebih realistis. Seluruh proses pembayaran dan pelaksanaan	Pada TA 2026, perencanaan anggaran honorarium Tim Satgas LPG disusun dengan memperhitungkan batasan jumlah penerima honor sesuai ketentuan BPK RI, disertai penyusunan jadwal kegiatan lebih awal serta penguatan Koordinasi antara bidang teknis, perencanaan, dan keuangan



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							pengesahan DPA Perubahan TA 2025 dari target 4 bulan.	kegiatan didokumentasikan sebagai bahan pertanggungjawaban, serta disusun laporan evaluasi yang menjelaskan penyebab rendahnya realisasi anggaran guna menghindari kesalahan penilaian kinerja.	agar target waktu dan realisasi kegiatan lebih optimal.
							Selain itu, berdasarkan hasil Koordinasi dengan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kabupaten wajib menyusun Peraturan Bupati tentang	Agar kegiatan Sembako Murah Membara Tahun 2025 dapat berjalan, penetapan KPM menggunakan DTSEN Kementerian Sosial dan Data KK penerima Bantuan Pangan	Selanjutnya, pelaksanaan Subsidi Sembako Murah didasarkan pada Peraturan Bupati yang telah ditetapkan, dengan pemutakhiran data penerima manfaat



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Penyelenggaraa n Subsidi Sembako Murah (disahkan 31 Oktober 2025) dan memastikan data penerima manfaat tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain menggunakan DTSEN sebagai acuan utama. Namun, data DTSEN belum tersedia hingga Desember 2025, sehingga turut memengaruhi optimalisasi pelaksanaan kegiatan.	sesuai Keputusan Kepala Bapanas RI Nomor 371 Tahun 2025, sehingga penyaluran komoditi terealisasi berupa gula selama 2 bulan sebanyak 29.304 kg dan minyak goreng selama 1 bulan sebanyak 14.652 liter untuk 4.884 KK.	menggunakan DTSEN untuk mencegah tumpang tindih bantuan. Proses verifikasi didukung berita acara dan dokumentasi sebagai bentuk akuntabilitas sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, serta hasil evaluasi Tahun 2025 dijadikan dasar perbaikan perencanaan pada tahun anggaran berikutnya.
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	100	97,93			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100	97,93			
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	100	97,84			
				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100	97,84			
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	100	99,65			
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100	99,65			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	100	99,75			
				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	100	99,75			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Pendukung Urusan Pemerintahan	Sekretariat Daerah	Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang baik pada pimpinan daerah.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	84,07%	Standar satuan harga di Belanja ATK dan Belanja Cetak yang berbeda dengan standar harga pada e-catalog yang lebih rendah sehingga menyisakan SILPA	-	-
				Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	100%	83,82%	Standar satuan harga di Belanja ATK dan Belanja Cetak yang berbeda dengan standar harga pada e-catalog yang lebih rendah sehingga menyisakan SILPA	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100%	83,03%	Standar satuan harga di Belanja ATK dan Belanja Cetak yang berbeda dengan standar harga pada e-catalog	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							yang lebih rendah sehingga menyisakan SILPA		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	82,31%	Penyediaan bahan logistik kantor berupa bahan bakar minyak Genset keperluan kantor Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan disesuaikan dengan kebutuhan	-	-
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	81,63%	Pengadaan kendaraan Dinas berupa sewa kendaraan Dinas belum dilaksanakan karena Peraturan Bupati tentang sewa kendaraan masih dalam pembahasan	-	-
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	100%	71,38%	penyediaan jasa peralatan kantor berupa sewa	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kantor			tenda, kursi dll disesuaikan dengan volume kegiatan		
				Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	9,57%	Pelaksanaan Outsourcing tenaga kebersihan kantor belum dilaksanakan karena penentuan rasio kebutuhan tenaga Outsourcing masih dalam pembahasan BKPSDM	-	-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	100%	80,55%	Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan	-	-
				Penyedia Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	100%	72%	dihentikannya tunjangan KDH dan WKDH sejak bulan September 2025 dikarenakan tidak ada dasar	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							pembayaran sesuai hasil temuan BPK, sehingga realisasi tidak mencapai target yang telah di tetapkan		
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga KDH	100%	68,16%	Pelaksanaan Outsourcing tenaga kebersihan kantor belum dilaksanakan karena penentuan rasio kebutuhan tenaga Outsourcing masih dalam pembahasan BKPSDM	-	-
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga WKDH	100%	64,34%	Pelaksanaan Outsourcing tenaga kebersihan kantor belum dilaksanakan karena penentuan rasio kebutuhan tenaga Outsourcing masih dalam	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							pembahasan BKPSDM		
				Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	100%	79,77%	Efisiensi Anggaran Biaya Perjalanan Dinas	-	-
				Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	100%	80,33%	Efisiensi Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan Selisih standar satuan harga di Belanja ATK	-	-
				Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	100%	80,30%	Efisiensi Anggaran Biaya Perjalanan Dinas dan Selisih standar satuan harga di Belanja ATK	-	-
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	100%	80,25%	Adanya kegiatan Pembinaan BUMD yang telah dilaksanakan namun tidak menggunakan anggaran yang sudah dianggarkan pada	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							sub kegiatan ini.Kegiatan Koordinasi dan konsultasi lebih banyak dilakukan secara online, sehingga anggaran perjalanan Dinas kurang terserap.		
				Pengendalian dan distribusi Perekonomian	100%	70,39%	Kegiatan Koordinasi dan konsultasi lebih banyak dilakukan secara online.	-	-
				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	100%	38,72%	Banyaknya kegiatan yang dilakukan secara Zoom Meeting.	-	-
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	100%	46,09%	Jadwal kegiatan Koordinasi dengan perangkat daerah terkait tidak dapat terlaksana sesuai rencana karena keterbatasan waktu, padatnya agenda instansi	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/ Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							terkait, serta adanya penyesuaian kalender kerja pemerintah daerah		
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	100%	68,11%	Sebagian kegiatan Koordinasi dilaksanakan secara terbatas atau melalui media daring sehingga tidak membutuhkan anggaran sebesar yang direncanakan sebelumnya.	-	-



3.1.4 Fungsi Penunjang

Tabel 3.4
Pelaksanaan Fungsi Penunjang
yang dilaksanakan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29		Sekretariat DPRD	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	100%	72,71%	Terdapat belanja perjalanan yang belum terealisasi dikarenakan efisiensi dan penghematan anggaran	-	-
				KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	100%	67,19%	Terdapat belanja perjalanan yang belum terealisasi dikarenakan efisiensi dan penghematan anggaran	-	-
				KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD	100%	63,81%	Terdapat belanja perjalanan yang belum terealisasi dikarenakan efisiensi dan penghematan anggaran	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD	100%	63,81%	Terdapat belanja perjalanan yang belum terealisasi dikarenakan efisiensi dan penghematan anggaran	-	-
				KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	100%	74,48%	Terdapat belanja perjalanan yang belum terealisasi dikarenakan efisiensi dan penghematan anggaran	-	-
				PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	100%	77,91%	Pada Penyediaan gaji dan tunjangan ASN sudah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan	-	-
				KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	100%	0%	Terdapat belanja perjalanan yang belum terealisasi dikarenakan efisiensi dan penghematan anggaran	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD	100%	0%	Terdapat belanja perjalanan yang belum terealisasi dikarenakan efisiensi dan penghematan anggaran	-	-
				PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	100%	96,29%	-	-	-
				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	100%	100%	-	-	-
				PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	100%	45,88%	Dalam penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sudah sesuai kebutuhan	-	-
				PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	100%	95,32%	-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PERNYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	100%	78,33%	Dalam penyediaan peralatan rumah tangga sudah sesuai kebutuhan	-	-
				PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	100%	80,55%	Dalam penyediaan bahan logistik kantor sudah sesuai kebutuhan	-	-
				PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	100%	100%	-	-	-
				PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN	100%	70,29%	Dalam penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan sudah sesuai kebutuhan	-	-
				FASILITAS KUNJUNGAN TAMU	100%	100%	-	-	-
				PENYELENG GARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	100%	95,46%	-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN JABATAN	100%	0%	Efisiensi dan penghematan anggaran	-	-
				PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	100%	55,39%	Dari kegiatan penyediaan jasa psurat menyurat telah terlaksana sesuai kebutuhan	-	-
				PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	100%	87,79%	-	-	-
				PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	100%	72,80%	Dari kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor telah terlaksana sesuai kebutuhan	-	-
				PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	100%	78,12%	Dari kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor telah terlaksana sesuai kebutuhan	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	100%	96,80%	-	-	-
				PEMELIHARAAN /REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	100%	94,26%	-	-	-
				PEMELIHARAAN /REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	100%	56,29%	Dari kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya telah terlaksana sesuai kebutuhan	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PENYELENG GARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	100%	99,27%	-	-	-
				PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	100%	96,98%	-	-	-
				PELAKSANAAN MADICAL CHECK UP DPRD	100%	0%	Pelaksanaan sudah sesuai dengan kebutuhan	-	-
				PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	100%	48,61%	Dari kegiatan penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah telah terlaksana sesuai kebutuhan	-	-
				PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	100%	0%	Kegiatan tersebut belum dilaksanakan karena adanya kesibukan lain	-	-
				PENYELENG GARAAN KAJIAN PERUNDANG-	100%	0%	Kegiatan tersebut belum dilaksanakan	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				UNDANGAN			karena adanya kesibukan lain		
				PENYEDIAAN KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI	100%	100%	-	-	-
				PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	100%	100%	-	-	-
				KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH	100%	0%	Kegiatan dilaksanakan sesuai kebutuhan perjalanan Dinas dalam daerah Anggota DPRD	-	-
				PELAKSANAAN RESES	100%	65,07%	Kegiatan Reses Anggota DPRD telah dilaksanakan sesuai kebutuhan kegiatan Reses	-	-
				KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	100%	84,37%	Kegiatan Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD sudah terlaksana sesuai kebutuhan	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31		Bappeda		BAPPEDA KABUPATEN MUARA ENIM	100	86,25			
				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	85,95			
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	92,61			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	96,15			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	85,68			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	88,83			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	100	93,60			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	81,96			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	84,00			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	84,03			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	81,88			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	89,50			
				Pengamanan barang milik daerah SKPD	100	89,27			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	90,73			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	93,26			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100	92,58			
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100	94,36			
				Administrasi umum perangkat daerah	100	90,42			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	98,91			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	98,33			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	91,09			
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	98,23			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100	69,13			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	59,69			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	96,02			
				Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	100	84,92			
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	100	82,56			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	91,91			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	100	89,09			
				Pengadaan Mebel	100	88,31			
				Pengadaan Peralatan Mesin lainnya	100	97,43			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	57,30			
				Penyediaan jasa surat menyurat	100	99,34			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100	70,63			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	100	28,87			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	87,70			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	72,50			
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100	98,10			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	91,88			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	98,11			
				ProgramPerencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah	100	82,20			
				Penyusunan Perencanaan Pendanaan	100	90,45			
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	100	86,75			
				Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat	100	87,46			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	100	90,29			
				Penyiapan bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	100	64,01			
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	100	94,75			
				Analisis data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	79,54			
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	78,71			
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	100	76,46			
				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	100	83,63			
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100	66,58			
				Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100	67,83			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	100	66,10			
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	92,38			
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	89,82			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100	97,83			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	100	98,80			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100	71,46			
				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100	98,36			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100	91,23			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100	88,97			
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100	95,49			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100	97,06			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	100	93,82			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bid. Perekonomian	100	93,63			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	100	98,86			
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmomonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	100	94,66			
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	93,54			
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100	90,58			
				asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	100	96,58			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	100	93,83			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	100	94,84			
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	100	89,73			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Pemerintahan Umum	Badan Kesbangpol		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	100	95,36%			
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	100	95,36%			
				PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	100%	88,59			
				PELAKSANAAN KOORDINASI DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN,	100%	92,79			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN					
				PEMBENTUKAN PASKIBRAKA	100%	95,7			
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	100%	99,06			
				SUB PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA	100%	99,06			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK					
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100%	16,6			
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan	100%	94,43			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100%	99,97			
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di	100%	98,54			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantuan Situasi Politik di Daerah					
				Pelaksanaan Tugas Paskibraka	100%	96,32			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	100%	98,06			
				SUB PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN	100%	98,06			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100%	90,11			
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100%	98,55			
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran, Pemberdayaan, Evaluasi dan Mediasi Sengketa, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100%	98,31			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100%	95,68			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	100%	87,85			
				SUB PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	100%	87,85			
				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas	100%	82,44			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100%	94,59			
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	100%	90,33			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penghayat Kepercayaan di Daerah					
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100%	92,35			
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	100%	92,9			
				SUB PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN	100%	92,25			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK					
				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100%	86,01			
				Pelaksanaan Monitorin, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan	100%	95,61			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
				Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	100%				
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	85,36			
				SUB PROGRAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH					
				PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	1 Dokumen	1 Dokumen			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1 Laporan	1 Dokumen			
				EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1 Laporan	1 Dokumen			
				SUB PROGRAM ADMINISTRASI KEUANGAN					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PERANGKAT DAERAH					
				PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN	2 Dokumen	2 Dokumen			
				KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			
				SUB PROGRAM ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH					
				PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen			
				SUB PROGRAM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAN PERANGKAT DAERAH					
				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	2 Dokumen	2 Dokumen			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				SUB PROGRAM ADMINISTRASI UMUM DAN PERANGKAT DAERAH					
				PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1 Paket	1 Paket			
				PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1 Paket	1 Paket			
				PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	1 Paket	1 Paket			
				PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1 Paket	1 Paket			
				PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1 Paket	1 Paket			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PENYELENG GARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
				SUB PROGRAM PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
				PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	3 Dokumen	3 Dokumen			
				PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	4 Dokumen	4 Dokumen			
				PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM	5 Dokumen	5 Dokumen			
				SUB PROGRAM PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATU KENDARAAN DINAS JABATAN	100%	100%			
				PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	100%	100%			
				PEMELIHARAAN/ REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	100%	100%			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	Ururan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	66,51	Pelaksanaan kegiatan	Melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan setiap bulan	Rekomendasi DPRD : DPRD meminta dilakukan inventarisasi terhadap seluruh aset baik tanah, bangunan serta kendaraan milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Hal ini penting agar status aset dapat dipastikan dan dilakukan pemeliharaan secara optimal sesuai tanggung jawab Pemerintah Daerah.
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	94,81			Tindak Lanjut : Inventarisasi atau sensus Barang Milik Daerah akan dilaksanakan pada tahun 2026.
				Administrasi Keuangan	100	65,59			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perangkat Daerah					
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	71,81			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	12,62			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	84,69			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	75,17			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	84,70			
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	100	97,64			
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100	87,50			
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100	79,70			
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan	100	90,04			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Keuangan Daerah					
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	97,97			
				Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	0	-			
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	100	74,45			
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	74,45			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	KEPEGAWAIAN			Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 oleh Badan Kepegawaian Negara RI yang baru dirilis pada Bulan September 2025 terhadap 7.652 ASN, IP ASN Kabupaten Muara Enim mendapatkan nilai 80,28 dengan kategori sedang dengan rentang nilai antara 71-80. Dari hasil pengukuran terdapat 3 (tiga) dimensi dengan nilai rata-rata	1) Mengupayakan Peningkatan jenjang/tingkat pendidikan ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui peningkatan program tugas belajar bagi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.	Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah memfasilitasi dengan pengusulan formasi seoptimal mungkin untuk mengakomodir tenaga honorer yang ada dan merekrut CPNS, untuk mengisi kekosongan di Unit Kerja diberikan beberapa opsi, pertama melalui rekrutmen BLUD, Penempatan PPPK Paruh Waktu dan Outsourcing



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							baik yaitu dimensi Kinerja (22,28) dengan bobot penilaian 30%, dimensi disiplin (5,00) dengan bobot penilaian 5% dan dimensi Kualifikasi (20,83) dengan bobot penilaian 25%, sedangkan untuk 1 (satu) dimensi dengan nilai rata rata rendah yaitu dimensi Kompetensi (26,39) dengan bobot 40%, belum optimalnya target kinerja tersebut dikarenakan; 1) Belum optimalnya kualifikasi		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							pendidikan ASN 2) Belum optimalnya kompetensi ASN 3) Belum optimalnya kinerja ASN 4) Belum optimalnya kedisiplinan ASN		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA				2) Mengupayakan peningkatan kegiatan pelatihan kepemimpinan dan pelatihan fungsional, serta pelatihan teknis dan kegiatan pengembangan lainnya	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								bagi Aparatur di lingkungan pemerintah kabupaten Muara Enim.	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3) Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan keDinasan, terutama pembangunan gedung diklat.	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen		4) Menerapkan cascading kinerja kedalam perjanjian kinerja individu.	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen		5) Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja ASN.	



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 bulan			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	14 Laporan			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
				Pemulangan Pegawai yang Pensiun	270 Orang	490 Orang			
				Pemindahan Tugas ASN	120 Orang	23 Orang			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Orang	9 Orang			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket			
				Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan	12 Dokumen	12 Dokumen			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	92 Laporan	96 Laporan			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
				Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	2 Unit	2 Unit			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemerintah Daerah					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 Laporan	3 Laporan			
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1 Laporan			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Unit	12 Unit			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	2 Unit			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit			
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Fasilitasi Lembaga Non ASN	250 Orang	186 Orang			
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen			
				Mutasi dan Promosi ASN					
				Pengelolaan Mutasi ASN	25 Dokumen	29 Dokumen			
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1000 Dokumen	834 Dokumen			
				Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen			
				Pengembangan Kompetensi ASN					
				Peningkatan Kapasitas Kinerja	500 Orang	500 Orang			
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	55 Orang	42 Orang			
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					
				Pembinaan disiplin PNS	100 Orang	100 Orang			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional					
				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	24 Laporan	24 Laporan			
				Pembinaan , Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan	1 Dokumen	1 Dokumen			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan.					



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34		Inspektorat Kabupaten	Penguatan kelembagaan melalui pemenuhan kebutuhan SDM, peningkatan tata kelola organisasi dan peningkatan kualitas evaluasi SAKIP fokus asistensi evaluasi SAKIP sesuai dengan hasil LHE AKIP Internal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	disiplin dan integritas aparatur yang perlu ditingkatkan	Pengendalian/ melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pengawasan.	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	Kemampuan personil Auditor/P2U PD untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu masih terbatas.	Meningkatkan kompetensi SDM dalam teknis pengawasan melalui pengikutsertaan dalam diklat sertifikasi keahlian dan diklat teknis pengawasan yang diselenggarakan oleh instansi terkait.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	Kemampuan personil Auditor/P2U PD yang memberikan bimbingan/konsultasi kepada Organisasi Perangkat Daerah masih terbatas.	Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana baik dari sisi kualitas maupun kualitas.	
					1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	Belum adanya perangkat daerah yang mendapatkan predikat WBK/WBBM di Tahun 2025 disebabkan oleh adanya peningkatan kualitas penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan	Mengoptimalkan pendampingan tim penilai internal dari Inspektorat dan sosialisasi zona integritas kepada unit kerja, disamping itu juga mengoptimalkan sinergitas seluruh komponen dalam pembangunan zona integritas.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Reformasi Birokrasi, disamping itu juga belum optimalnya Koordinasi antara unit pembangun integritas dan pendampingan dari tim penilai internal dari Inspektorat sehingga belum ada yang mendapatkan predikat WBK/WBBM.		
					1 Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%	Tingkat Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Muara Enim berada pada level 2	Meningkatkan keselarasan kegiatan pengawasan dan proses audit dengan standar audit yang berlaku.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							(structure) yang menunjukkan bahwa organisasi APIP telah melaksanakan kegiatan pengawasan, proses audit dilakukan secara tetap, rutin, dan berulang, telah membangun infrastruktur namun baru sebagian yang telah selaras dengan standar audit, dengan outcome mampu memberikan keyakinan yang		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							memadai bahwa proses sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi korupsi.		
					1 Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%			
					3 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD/OPD	100%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Gaji ASN dan Tunjangan ASN 72 Orang/12	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					bulan				
					1 Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%			
					12 Laporan Keuangan SKPD	100%			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72 Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.	100%			
					100 Orang yang mengikuti Sosialisasi Perundang-Undangan	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Paket terdiri atas komponen listrik/penerangan bangunan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan logistik serta barang cetakan dan penggandaan	100%			
					2 Dokumen bahan bacaan dan perundang-undangan	100%			
					3 Laporan Fasilitas kunjungan dan laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 Unit Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	100%			
					67 Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	100%			
					1 Unit gedung atau bangunan lainnya yang disediakan	100%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	100%			
					1 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang disediakan	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1 Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100%			
					1 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100%			
					9 Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					dan dibayarkan pajak dan perizinannya				
					1 unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	100%			
					51 unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	100%			
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	100%	100%			
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	65 laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	100%			
					6 laporan hasil reviu laporan kinerja	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					1 laporan hasil revidi laporan keuangan	100%			
					65 laporan hasil pengawasan desa	100%			
					8 dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	100%			
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2 laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	100%			
					50 laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	100%			
				Program Perumusan Kebijakan,	100%	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pendampingan, dan Asistensi					
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1 rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	100%			
				Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	58 perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	100%			
					58 perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					6 kegiatan Koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	100%			
					58 perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35		Badan Pendapatan Daerah	Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah Melalui Penguatan Komoditas dan Produk Unggulan Desa di Sektor Agribisnis, Agroindustri, dan Agropolitan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100	83,33	Hambatan a) Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dan wajib pungut. - Sebagian wajib pajak perdesaan masih enggan menyetorkan langsung ke Kas Daerah atau Bank terdekat yang telah ditunjuk. - Wajib Pajak dalam menyampaikan dan mengisi data mengenai objek dan subjek pajak masih belum akurat/ transparan sehingga masih perlu dilakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap objek pajak di lapangan. - Wajib pungut pajak daerah masih ada	Melakukan sosialisasi penyuluhan tentang Pajak Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait.	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kabupaten Muara Enim melalui Pansus III, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Badan Pendapatan Daerah telah dan akan terus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan melaksanakan pendataan, pemetaan, serta pemutakhiran data objek dan subjek



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							yang belum melakukan pemungutan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara berkelanjutan.
			Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	86,32	b) Kondisi ekonomi masyarakat. - Sebagian besar masyarakat Kabupaten Muara Enim hidup dari mata pencaharian pertanian, rendahnya harga jual hasil pertanian dan perkebunan mengalami penurunan. - Masyarakat wajib pajak lebih mengutamakan kebutuhan primer untuk kelangsungan kehidupan sehari-hari dan	Melakukan kerja sama dengan Kantor Pos, Bank Sumsel Babel dan Bank BRI untuk melayani penerimaan pembayaran Pajak Daerah terutama PBB-P2 dan BPHTB.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							pendidikan anak sekolah.		
				Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	85,39	c) Akurasi data subjek dan objek pajak. • Data wajib pajak yang belum akurat. • Adanya wajib pajak yang sudah tidak berada di alamat terdaftar. • Masih adanya objek pajak ganda, tidak ada objek dan keberatan.	Melakukan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Muara Enim Tanggal 7 Januari 2019 Nomor 900/09/	
				Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	87,99	Kendala • Regulasi pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak konsisten dengan peraturan	Bapenda-I/2019, 900/35/BPKAD-2/2019 dan 010/MRE/1/B/2019 tentang Penerimaan Pembayaran Pajak	Selain itu, Bapenda melakukan identifikasi dan pemetaan potensi pendapatan daerah yang bersumber



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							pelaksanaannya. • Database Pajak Daerah yang masih harus disempurnakan. • Lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak. • Kurangnya SDM aparatur yang berkualifikasi perpajakan. • Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Daerah. • Subjek Pajak Daerah berada di luar daerah sehingga sulit untuk melakukan penagihan pajak. • Terhadap	Daerah secara Online Pemerintah Kabupaten Muara Enim.	dari peran serta perusahaan, retribusi daerah, serta jenis pajak daerah yang berlaku, dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan, serta para pemangku kepentingan lainnya di lingkungan Kabupaten Muara Enim.



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							tidak tercapainya PBB P2 hal ini masih terkait dengan piutang PBB P2 penyerahan dari KPP Pratama Prabumulih pada tahun 2014 dan juga database yang diterima masih banyak tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. • Penerimaan pendapatan daerah dari komponen Pendapatan Asli Daerah, terutama dari sektor Pajak Daerah khususnya PBB P2 masih mengalami hambatan dan kendala, dalam pelaksanaan penerbitan SPPT PBB P2 masih terdapat objek		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							ganda, tidak ada objek dan keberatan. Penagihan PBB P2 khususnya Perdesaan sebagian besar harus dilakukan secara langsung oleh petugas Badan Pendapatan Daerah, UPTD Pendapatan dengan cara Door-to-Door ke desa-desa/kelurahan, masih banyak masyarakat perdesaan yang enggan menyetorkan pembayaran PBB P2 langsung ke Kas Daerah atau Bank terdekat yang telah ditunjuk untuk menerima setoran PBB P2 dan masih rendahnya kesadaran wajib pajak karena		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							kurang mengertinya manfaat dari pembayaran Pajak serta alasan masalah ekonomi. Pada saat petugas Badan Pendapatan Daerah dan UPTD Pendapatan melakukan penagihan Door-to-Door banyak ditemui masyarakat Perdesaan sedang tidak ada di rumah. • Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim menerbitkan SPPT PBB P2 sebanyak 163.218 lembar dengan realisasi sebesar Rp13.714.418.111,00, terdapat objek yang dibebaskan		



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							sebanyak 159.354 SPPT, terdapat penghapusan objek sebanyak 316 objek dengan nilai penghapusan sebesar Rp6.653.420,00 penerimaan Pendapatan PBB P2 belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD.		
				Koordinasi & Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100	80,05		Melakukan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim dengan PT Pos Indonesia (Persero) Tanggal 7 Januari 2019 Nomor 900/09/Bapenda-I/2019, 25/REG3/JKRJ/H K/ 0119 tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Secara	Sebagai upaya peningkatan kepatuhan dan pemahaman wajib pajak serta badan usaha, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Bapenda juga meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Online Pemerintah Kabupaten Muara Enim.	Kabupaten Muara Enim, khususnya terkait ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2010 tentang Peran Serta Badan Usaha Masyarakat dan Luar Negeri. Sosialisasi tersebut difokuskan pada pemahaman perbedaan antara dana peran serta perusahaan dengan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR), sehingga pelaksanaan kewajiban perusahaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi & Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100	86,85		Melakukan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Tanggal 7 Januari 2019 Nomor 900/09/Bapenda-I/2019, 92/180.2-16.03/1/2019 tentang Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Muara Enim.	Ke depan, Bapenda juga akan memperkuat Koordinasi lintas sektor serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pendataan, pemungutan, dan realisasi PAD, guna memastikan peningkatan pendapatan daerah yang berkelanjutan dan akuntabel.
				Koordinasi & Penyusunan Lap Capaian Kinerja &	100	90,91		Melakukan Nota Kesepahaman antara Pemerintah	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kabupaten



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD				Kabupaten Muara Enim dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Tanggal 23 Mei 2019 Nomor 35/MOU/Bappeda /2019, 269/100-16.03/V/2019 tentang Kerja Sama di Bidang Pertanahan	Muara Enim melalui Pansus III serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Badan Pendapatan Daerah telah dan akan terus melakukan pemetaan kewenangan, potensi, serta mekanisme pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah terkait. Selain itu, Bapenda memperkuat Koordinasi dan sinergi lintas OPD



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									melalui penyalarsan kebijakan, pertukaran data, serta harmonisasi pelaksanaan pemungutan agar sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	89,09		Melakukan Kesepakatan Bersama Antara Kantor Wilayah direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tanggal 23	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Mei 2019 Nomor Kep-329/WPJ.03/2019 , 34/MOU/Bappeda /2019 Tentang Koordinasi dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi.	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	80,36		Menerbitkan Surat Edaran Bupati Muara Enim Tanggal 10 Juni 2019 Nomor 973/1114/BAPEN DA-III/2019 tentang Pelaporan dan Pembayaran Transaksi Pajak Hiburan Melalui Sistem Online.	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	79,77		Menerbitkan Surat Edaran Bupati Muara Enim Tanggal 31 Januari 2020 Nomor 973/04/BAPEND A-II/2020 tentang Kewajiban Wajib	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Pajak dan Wajib Pungut yang Telah dipasang/Terintegrasi Alat Sistem perekam Data Transaksi Usaha Web Services (Transaction Monitoring Device) di Hotel, Restoran, Hiburan, Rumah Makan, Kantin dan Warung dalam Kabupaten Muara Enim.	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	99,72		Menerbitkan Surat Bupati Muara Enim Tanggal 23 Maret 2020 Nomor 970/0309/X.Bapenda-II/2020 tentang Pengintegrasian Alat Perekam Transaksi E-Tax/TMD.	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	100	89,49		Melakukan Perjanjian Kerja Sama antara	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD				Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tanggal 30 Juli 2019 Nomor Kep.068/WPJ.03/KP/2019, 970/60/Bapenda-I/PKS/2019 tentang Koordinasi dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	74,34		Melakukan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Enim dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Muara Enim Tanggal 13 Desember 2019 Nomor 900/43/Bapenda-I/2019, 900/96/BPKAD-2/2019, B.7070-KC-IV/12/2019 tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemerintah Kabupaten Muara Enim secara Online."	
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100	74,34			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	54,37			
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	54,37			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	96,15			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	100	80,44			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	98,31			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	98,46			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	85,82			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	98,66			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan	100	92,28			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Peraturan Perundang-undangan					
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	98,22			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	95,42			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	95,93			
				Pengadaan Mebel	100	91,53			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	79,54			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	45,46			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	100	80,39			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	100	80,24			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kantor					
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	98,91			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	100	95,46			
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	99,31			
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	98,32			
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN	100	86,85			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				DAERAH					
				Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100	86,85			
				Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	100	85,11			
				Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	100	99,46			
				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100	89,97			
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	100	85,82			
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	100	90,15			
				Pengolahan, Pemeliharaan & Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	100	92,76			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penilaian Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan & Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB)	100	85,04			
				Penetapan Wajib Pajak Daerah	100	99,96			
				Penelitian & Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	100	77,54			
				Penagihan Pajak Daerah	100	90,30			
				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	100	99,56			
				Pengendalian, Pemeriksaan & Pengawasan Pajak Daerah	100	93,50			
				Pembinaan & Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	100	58,93			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	Urusan Penelitian dan Pengembangan	Badan Penelitian dan Pengembangan		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	89,45			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	48,69	Harga SSH di SIPD lebih besar dari harga penyedia	Belanja sesuai kebutuhan dan harga e-catalog	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	66,72	Harga SSH di SIPD lebih besar dari harga penyedia	Belanja sesuai kebutuhan dan harga e-catalog	
							Adanya kebijakan pengangkatan PPPK sehingga belanja jasa tenaga	Sisa anggaran KKWT sesuai kebutuhan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							administrasi hanya dibayarkan 8 bulan		
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100	87,02			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100	67,37	Harga SSH di SIPD lebih besar dari harga penyedia	Belanja sesuai kebutuhan dan harga e-catalog	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	46,55	Harga SSH di SIPD lebih besar dari harga penyedia	Belanja sesuai kebutuhan dan harga e-catalog	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	77,73	Harga SSH di SIPD lebih besar dari harga penyedia	Belanja sesuai kebutuhan dan harga e-catalog	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	57,65	Harga SSH di SIPD lebih besar dari harga penyedia	Belanja sesuai kebutuhan dan harga e-catalog	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/	100	54,22	Harga SSH di SIPD lebih besar dari harga	Belanja sesuai kebutuhan dan harga e-catalog	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			penyedia		
							Adanya kebijakan pengangkatan PPPK sehingga belanja jasa tenaga administrasi hanya dibayarkan 8 bulan	Sisa anggaran honor KKWT digunakan sesuai kebutuhan	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100	99,84			
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	40,88	Harga SSH di SIPD lebih besar dari harga penyedia	Belanja sesuai kebutuhan dan harga e-catalog	
							Adanya kebijakan pengangkatan PPPK sehingga belanja jasa tenaga administrasi	Sisa anggaran honor KKWT digunakan sesuai kebutuhan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							hanya dibayarkan 8 bulan		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	94,14	Ada formasi jabatan fungsional yang tidak terisi	Belanja sesuai kebutuhan	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	80,36			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	89,07			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	85,86			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100	77,88	Harga SSH di SIPD lebih besar dari harga penyedia	Belanja sesuai kebutuhan dan harga e-catalog	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	99,99			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100	81,33			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	100	96,10			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	86,86			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	51,07	Anggaran dibuat untuk memprediksi kebutuhan dalam satu tahun	Belanja sesuai kebutuhan riil	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	66,67	Adanya kebijakan pengangkatan PPPK sehingga belanja jasa tenaga administrasi hanya	Sisa anggaran honor KKWT digunakan sesuai kebutuhan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							dibayarkan 8 bulan		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	76,24	Perawatan sudah sesuai dengan kebutuhan	Melakukan engine analysis untuk kebutuhan perawatan kendaraan	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	66,13	Perawatan sudah sesuai dengan kebutuhan	Melakukan engine analysis untuk kebutuhan perawatan kendaraan	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	99,7			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	100	88,64			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Bangunan Lainnya					
				Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	97,66			
				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah					
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					
				Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	100	49,69	Adanya penambahan kajian Inflasi pada APBD Perubahan dimana waktu yang tersedia sangat singkat dan tidak akan menghasilkan kajian yang maksimal.	Belanja disesuaikan dengan waktu yang tersedia	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	100	88,40			
				Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	85,42			
				Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	100	78,33	Penganggaran dialokasikan untuk kegiatan selama 4 bulan	Penyesuaian belanja sesuai kebutuhan dengan tidak mengurangi kinerja	
				Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	100	69,14	Penganggaran dialokasikan untuk kegiatan selama 4 bulan	Penyesuaian belanja sesuai kebutuhan dengan tidak mengurangi kinerja	
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	100	70,30	Penganggaran dialokasikan untuk kegiatan selama 4 bulan	Penyesuaian belanja sesuai kebutuhan dengan tidak mengurangi kinerja	
							Adanya kebijakan pengangkatan PPPK sehingga belanja jasa tenaga administrasi hanya dibayarkan 8 bulan	Sisa anggaran honor KKWT digunakan sesuai kebutuhan	
				Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	100	52,46	Penganggaran dialokasikan untuk kegiatan selama 4 bulan	Ada kebijakan Kepala Pusat BRIN yang tidak menerima honor tenaga ahli	
							Adanya kebijakan pengangkatan PPPK sehingga belanja jasa tenaga	Sisa anggaran honor KKWT digunakan sesuai kebutuhan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							administrasi hanya dibayarkan 8 bulan		
				Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	100	81,88			
				Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	100	75,52	Penganggaran dialokasikan untuk kegiatan selama 4 bulan	Penyesuaian belanja sesuai kebutuhan dengan tidak mengurangi kinerja	
							Adanya kebijakan pengangkatan PPPK sehingga belanja jasa tenaga administrasi hanya dibayarkan 8 bulan	Sisa anggaran honor KKWT digunakan sesuai kebutuhan	
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi					
				Penelitian, Pengembangan dan	100	73,22	Penganggaran dialokasikan	Belanja sesuai kebutuhan riil	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			untuk kegiatan selama 10 bulan	dengan tidak mengurangi capaian target	
				Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	100	55,08	Penganggaran dialokasikan untuk kegiatan selama 4 bulan	Ada kebijakan Kepala Pusat BRIN yang tidak menerima honor tenaga ahli	
				diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	100	82,64	Ada anggaran yang tidak dibelanjakan karena keterbatasan waktu		
				Sosialisasi dan diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	100	80,81			
				Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	100	59,82		Belanja sesuai kebutuhan riil dengan tidak mengurangi capaian target	



3.1.5 Urusan Kecamatan

Tabel 3.5
Pelaksanaan Kecamatan
di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Semende Darat Ulu	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	89,96%			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	99.94%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	85,53%			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	96,10%	Kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik	Akan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan	
				Kegiatan	100%	100,00%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	99,94%			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	99,40%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	98,73%			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99,69%	Kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik	Akan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	99,93%			
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%			
				Kegiatan	100%	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan					
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	100%			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	92%			
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	92%			
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	99,73%			
				Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	99,73%			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	99,73%			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan	100%	99,73%	Kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik	Akan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan	
38	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Semende Darat Tengah	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	92,92	-	-	-
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	97,3	Dalam kegiatan tersebut penggunaan ATK belum Maksimal	Untuk tahun selanjutnya kegiatan tersebut direncanakan memaksimalkan Penggunaan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								ATK	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	90,25	Kegiatan sudah dilaksanakan dengan maksimal	Akan dianggarkan sesuai kebutuhan	
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	77,87	Kegiatan diklat sudah dibiayai oleh Dinas yang bersangkutan sehingga anggaran yang ada tidak habis terpakai	Dalam Upaya mengatasi permasalahan tersebut akan mengikuti kegiatan bimtek dan diklat	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	75	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	99,12	-	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	-	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100	93,86	Kegiatan sudah dilaksanakan dengan maksimal	Akan dianggarkan sesuai kebutuhan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Daerah					
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	98,3	Kegiatan sudah dilaksanakan dengan maksimal	Akan dianggarkan sesuai kebutuhan	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	92,32	-	-	-
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100	99,15	-	-	-
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100	74,09	-	-	-
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	99,42	-	-	-
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	99,42	Ada beberapa kegiatan yang tidak sempat dilaksanakan dikarenakan	Pelaksanaan Kegiatan akan dimaksimalkan lagi	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							bertabrakan dengan pemilu dan pilkada		
				Program Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum	100	95,24	-	-	-
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	95,24	-	-	-
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	99,99	-	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	99,99	-	-	-
				Program Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	73,44	-	-	-
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	100	73,44	Ada beberapa kegiatan yang tidak sempat dilaksanakan	Pelaksanaan Kegiatan akan dimaksimalkan lagi	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengawasan Pemerintahan Desa			dikarenakan bertabrakan dengan kegiatan lain		
39	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Semende Darat Laut	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	71,27%			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	66,20%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	77,90%			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	0,00%	Efisiensi Anggaran	Penambahan Anggaran	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	53,22%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	97,94%			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99,74%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	76,17%			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99,02%			
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	90,66%			
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%			
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	100%	81,32%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dilimpahkan kepada Camat					
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	95,33%			
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	95,33%			
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	83,11%			
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	83,11%			
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%			
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	0%	Efisiensi Anggaran	Penambahan Anggaran	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	0,00%	Efisiensi Anggaran	Penambahan Anggaran	
40	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Tanjung Agung	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi	100%	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kepegawaian Perangkat Daerah					
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%			
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%			
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	100%	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dilimpahkan Kepada Camat					
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%			
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban	100%	100%			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%			
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%			
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan	100%	100%			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa					
41	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Lawang Kidul	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	81,13%			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	99,95%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	99,97%			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	86,78%			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	65,00%	Kurangnya minat pegawai yang mengikuti bimtek/diklat/	Memberi pengarahan kepada pegawai untuk	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							pelatihan dan banyak juga bimtek/diklat/pelatihan sudah dianggarkan pada Dinas terkait	mengikuti bimtek/diklat/pelatihan	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	99,88%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	71,16%	Adanya peralihan pegawai kantor dari honorer menjadi ASN PPPK	dana anggaran KKWT sudah dihapuskan	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	94,49%			
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	99,33%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang	100%	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	99,36%			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	99,21%			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	99,24%			
				Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	98,57%			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100,00%			
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	99,93%			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengugasan Kepala Daerah	100%	99,93%			
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	99,92%			
				Fasilitasi, rekomendasi, dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	99,92%			
42	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Muara Enim	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	84,61%			
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	99,80%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	82,72%			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	50,00%	Kurangnya Pengawasan dan pengelolaan Administrasi barang milik daerah serta kurangnya perlindungan asuransi dapat menyebabkan kerugian finansial jika terjadi kehilangan atau kerusakan	Membuat kebijakan asuransi yang jelas, menunjuk petugas administrasi yang bertanggung jawab atas barang milik daerah	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0%	Kurangnya minat pegawai yang mengikuti bimtek/diklat/ pelatihan dan banyak juga bimtek/diklat/ pelatihan sudah dianggarkan pada Dinas terkait	Memberi pengarahan kepada pegawai untuk mengikuti bimtek/diklat/ pelatihan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	96,84%			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99,10%			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	68,30%	Perubahan tarif PDAM dan Listrik mengakibatkan kelebihan anggaran	Menyesuaikan anggaran sesuai dengan perubahan tarif, prioritaskan kebutuhan pokok	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	97,28%			
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	77,80%			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	77,80%	Tidak terealisasinya belanja jasa tenaga operator komputer dikarenakan Perubahan	Menyesuaikan anggaran sesuai dengan perubahan kegiatan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							status pegawai honorer ke PPPK dan anggaran ATK Pelayanan Perizinan Non Usaha dan Pelayanan Siak tidak terpakai seluruhnya		
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	95,69%			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	90,53%			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	96,32%			
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	89,20%			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	100%	89,20%			
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	93,56%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	93,56%			
43	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Ujan Mas	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	82,99%	-	-	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	80,07%	Dalam kegiatan tersebut penggunaan ATK belum Maksimal	Untuk tahun selanjutnya kegiatan tersebut direncanakan memaksimalkan Penggunaan ATK	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	81,12%	Kegiatan sudah dilaksanakan dengan maksimal	Akan dianggarkan sesuai kebutuhan	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian	100%	54,73%	Kegiatan diklat sudah dibiayai oleh Dinas yang	Dalam Upaya mengatasi permasalahan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perangkat Daerah			bersangkutan sehingga anggaran yang ada tidak habis terpakai	tersebut akan mengikuti kegiatan bimtek dan diklat	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	95,84%	-	-	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99,75%	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	80,91%	Kegiatan sudah dilaksanakan dengan maksimal	Akan dianggarkan sesuai kebutuhan	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	86,62%	Kegiatan sudah dilaksanakan dengan maksimal	Akan dianggarkan sesuai kebutuhan	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	98,16%	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan	100%	100,00%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	91,86%	-	-	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	82,47%	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	82,47%	Ada beberapa kegiatan yang tidak sempat dilaksanakan dikarenakan bertabrakan dengan pemilu dan pilkada	Pelaksanaan Kegiatan akan dimaksimalkan lagi	
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	95,00%	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	95,00%	-	-	
				Program Penyelenggaraan	100%	97,87%	-	-	



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Urusan Pemerintahan Umum					
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	97,87%	-	-	
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	68,16%	-	-	
				Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	68,16%	Ada beberapa kegiatan yang tidak sempat dilaksanakan dikarenakan bertabrakan dengan kegiatan lain	Pelaksanaan Kegiatan akan dimaksimalkan lagi	
44	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Benakat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	86%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	96%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	85%	masih terdapat kekosongan pegawai sehingga realisasi keuangan belum maksimal	untuk tahun selanjutnya apabila masih terjadi kelebihan anggaran maka kegiatan tersebut akan dialihkan kepada kegiatan yg lain yg lebih prioritas	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	45%	Kegiatan diklat sudah dibiayai oleh OPD yang bersangkutan sehingga anggaran yang ada tidak habis terpakai	Dalam Upaya mengatasi permasalahan tersebut akan mengikuti kegiatan bimtek dan diklat dengan optimalkan penggunaan anggaran sendiri	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintahan Daerah	100%	97%	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	53%	terjadinya efisiensi penggunaan beban air dan listrik pada kantor kecamatan benakat	untuk tahun selanjutnya apabila masih terjadi kelebihan anggaran maka kegiatan tersebut akan dialihkan kepada kegiatan yg lain yg lebih prioritas	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	-	-	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	99%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	90%	-	-	DPRD memberikan apresiasi atas hasil kerja camat-camat di wilayah kabupaten muara enim dalam melaksanakan roda pembangunan di masing-masing kecamatan walaupun dengan anggaran yang terbatas. Untuk itu, DPRD merekomen dasikan agar tim anggaran kabupaten muara enim dapat meningkatkan anggaran bagi



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									kecamatan sehingga dapat dilakukan pembangunan yang lebih masif, khususnya di kecamatan yang masih minim pembangunan.
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	98%	-	-	Diharapkan dengan adanya peningkatan anggaran nantinya, camat-camat dapat lebih kreatif dalam menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan asli di masing-masing kecamatan.



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									DPRD merekomen dasikan kepada kecamatan untuk segera mendata sarana dan prasarana seperti lampu jalan yang rusak agar dapat segera diperbaiki.
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%			
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	87%	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	87%			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	-	-	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	-	-	
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	90%	-	-	
				Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	90%			
45	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Gunung Megang	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	81,75%			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan	100%	84,31%	Terjadi perubahan kebijakan atau	Melakukan Koordinasi lebih awal dengan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			arahan sehingga kegiatan tidak jadi dilaksanakan.	pimpinan dan instansi terkait untuk menghindari perubahan mendadak.	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	76,36%			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0%	0%			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	55,54%	Pegawai sulit meninggalkan tugas rutin sehingga tidak dapat mengikuti pelatihan.	Menyesuaikan jadwal pelatihan dengan beban kerja pegawai.	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	95,55%			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	90,99%			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	87,26%			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	97,58%			
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	99,14%			
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	Masih banyak ditemukan titik-titik lampu jalan yang rusak tidak kunjung diperbaiki	Memperbaiki titik-titik lampu yang rusak sesuai dengan usulan/laporan Kepala Desa/Lurah	Mengusulkan penambahan anggaran agar titik lampu yang diperbaiki lebih banyak
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	97,59%			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	92,97%			
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%			
				Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	87,02%			
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	87,02%			
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	99%			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	98,86%			
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	90%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	90,36%			
46	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Rambang Niru	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	PROGRAM KECAMATAN	100%	99,10%	-	-	Program Pemeliharaan lampu jalan diseluruh kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim masih banyak di temukan titik titik lampu jalan yang rusak tidak kunjung diperbaiki
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	99,74%	-	-	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan	100%	95,81%	Dalam kegiatan tersebut penggunaan	Untuk tahun selanjutnya kegiatan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			ATK belum Maksimal	tersebut direncanakan memaksimalkan Penggunaan ATK	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	81,60%	Adanya pegawai yang pindah tugas dan Belum terisinya beberapa jabatan di kantor camat, menyebabkan beberapa tugas pokok di beberapa bidang harus tumpang tindih di bidang yang lain, besar harapan kami untuk penambahan pegawai di kantor camat Ujan Mas.	Dalam Upaya mengatasi permasalahan tersebut kami sudah mengusulkan ke BKPSDM Kabupaten Muara Enim	
				Kegiatan Administrasi	100%	73,54%	Kegiatan diklat sudah dibiayai	Dalam Upaya mengatasi	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kepegawaian Perangkat Daerah			oleh Dinas yang bersangkutan sehingga anggaran yang ada tidak habis terpakai	permasalahan tersebut akan mengikuti kegiatan bimtek dan diklat	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	99,86%	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangn Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99,36%	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	91,53%	-	-	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	99,26%	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	99,10%	-	-	
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	100%	99,43%	-	-	



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				dilimpahkan kepada Camat					
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	99,89%	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	99,89%	-	-	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	99,46%	-	-	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	99,45%	-	-	
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	99,71%	-	-	
				Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	99,71%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Lubai	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	PROGRAM KECAMATAN	100%	85,07%	-	-	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	99,93%	-	-	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	99,93%	Dalam kegiatan tersebut penggunaan ATK belum Maksimal	Untuk tahun selanjutnya kegiatan tersebut direncanakan memaksimalkan Penggunaan ATK	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	80,83%			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian	100%	29,92%	Kegiatan diklat sudah dibiayai oleh Dinas yang	Dalam Upaya mengatasi permasalahan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perangkat Daerah			bersangkutan sehingga anggaran yang ada tidak habis terpakai	tersebut akan mengikuti kegiatan bimtek dan diklat	
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	18,29%	-	-	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	97,46%			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100,00%	-	-	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	67,40%			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	98,78%	-	-	
				Program Penyelenggaraan	100%	99,99%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	-	-	Terhadap Program Pemeliharaan lampu jalan diseluruh wilayah kecamatan dalam Kabupaten Muara Enim masih banyak di temukan titik titik lampu jalan yang rusak tidak kunjung diperbaiki
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	99,82%	-	-	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	90,60%	-	-	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	76,40%	-	-	
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	59,52%	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	59,52%	-	-	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	97,59%			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	97,59%			
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	71,60%	-	-	
				Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa	100%	71,60%	-	-	



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Rambang	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100	87,54			
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	75,68			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	86,49			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	0,00	Administrasi asuransi barang milik daerah belum terlaksana secara optimal	Melakukan penataan dan pemenuhan administrasi asuransi barang milik daerah	Melanjutkan proses administrasi asuransi barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	77,64			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	97,45			
				Pengadaan Barang	100	99,21			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	87,99			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	83,93			
				POGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	85,92			
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100	99,99			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	100	67,73			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN	100	66,09			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	66,09			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100	59,24			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	59,24			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100	96,45			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	96,45			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	100	66,15			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100	66,15	Penyesuaian terhadap perubahan peraturan masa jabatan kepala desa	Penyesuaian pelaksanaan kegiatan	Penguatan Koordinasi dan pemantauan
49	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Lembak	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00%	87,34%			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	98,77%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	84,21%			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0%	80%			
				Kegiatan Administrasi	100%	0,00%	Pegawai sulit meninggalkan	Menyesuaikan jadwal pelatihan	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kepegawaian Perangkat Daerah			tugas rutin sehingga tidak dapat mengikuti pelatihan.	dengan beban kerja pegawai.	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	99,88%			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	96,68%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	95,21%			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	96,12%			
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	93,35%			
				Kegiatan Penyelenggaraan	100%	90,91%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah					
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%	Masih banyak ditemukan titik-titik lampu jalan yang rusak tidak kunjung diperbaiki	Memperbaiki titik-titik lampu yang rusak sesuai dengan usulan/laporan Kepala Desa/Lurah	Mengusulkan penambahan anggaran agar titik lampu yang diperbaiki lebih banyak
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	83,33%			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	98,70%			
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	98,70%			
				Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	3%			
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Upaya	100%	3%	Terjadi perubahan	Melakukan Koordinasi lebih	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			kebijakan atau arahan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.	awal dengan pimpinan dan instansi terkait untuk menghindari perubahan mendadak.	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	99%			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	99,80%			
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	0,00%			
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	0,00%	Tidak adanya kegiatan pemilihan kepala desa karena masa jabatan kepala desa belum habis	Melakukan Koordinasi lebih awal dengan pimpinan dan instansi terkait dalam alokasi anggaran kegiatan	



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Kelekar	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	-	-	-
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	100%			
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	-	-	-
				Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	-	-	-
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	-	-	-
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	-	-	-
51	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Gelumbang	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	-	-	-
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan	202 Unit	100%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	-	-	-
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100%	100%	-	-	-
				Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	-	-	-
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	-	-	-
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	-	-	-



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	-	-	-
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	-	-	-
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	-	-	-
52	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Sungai Rotan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	82,42%.			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	36,64%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	78,27%			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	94,37%.			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	31,29%	Terdapat kegiatan yang tidak terealisasi terkait peraturan tidak boleh melaksanakan kegiatan makan minum untuk rapat staf	dialihkan makan minum rapat untuk kunjungan tamu saja, dan efisiensi pada kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	94,00%			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	97,19%.			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	61,56%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Daerah					
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	93,35%			
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	92,96%.			
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	99,94%			
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	82,64%			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	82,28%			
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	82,28%			
				Program Koordinasi Ketentraman dan	100%	60,73%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Ketertiban Umum					
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	60,73%	Sedikit terjadi kejadian bencana	Lebih memperhatikan pengurangan anggaran pada APBD Perubahan	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	91,72%			
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	91,72%			
				Progrm Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	79,21%			
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	79,21%			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Muara Belida	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	81,75%			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	96,45%	Terjadi perubahan kebijakan atau arahan sehingga kegiatan tidak jadi dilaksanakan.	Melakukan Koordinasi lebih awal dengan pimpinan dan instansi terkait untuk menghindari perubahan mendadak.	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	90,13%			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	0%			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian	100%	28,99%	Pegawai sulit meninggalkan tugas rutin	Menyesuaikan jadwal pelatihan dengan beban	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Perangkat Daerah			sehingga tidak dapat mengikuti pelatihan.	kerja pegawai.	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	97,01%			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	98,21%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	81,99%			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99,04%			
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	85,32%			
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana	100%	100%	Masih banyak ditemukan titik-titik lampu jalan	Memperbaiki titik-titik lampu yang rusak	Mengusulkan penambahan anggaran agar



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pelayanan Umum			yang rusak tidak kunjung diperbaiki	sesuai dengan usulan/laporan Kepala Desa/Lurah	titik lampu yang diperbaiki lebih banyak
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	77,38%			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	98,68%			
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	98,68%			
				Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%			
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%			
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	99%			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	99,80%			
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	73,02%			
				Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	73,02%	Masih ada beberapa desa yang belum aktif dan rendahnya kehadiran dalam pembinaan	Penguatan Koordinasi sejak awal perencanaan, peningkatan sosialisasi manfaat kegiatan, serta penyesuaian jadwal dan metode pembinaan agar lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan desa.	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Belimbing	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100	100			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100	98			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	92			
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	96			
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	100			
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100			
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	100	99			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Pengawasan Pemerintahan Desa					
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	96			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	83			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	99			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	89			
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	86			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	93			
55	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Belida Darat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	94,63%			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	99,97%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	94,37%			
				Kegiatan Administrasi Barang	100%	92,22%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Milik Daerah Pada Perangkat Daerah					
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0,00%			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	93,90%			
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99,36%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	94,26%			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	99,75%			
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	97,80%			
				Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan	100%	99,82%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan					
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Pelayanan Umum	100%	97,17%			
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	97,89%			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	97,05%			
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	97,05%			
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	99,93%			
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	99,93%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	94,40%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	94,40%			
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	83,32%			
				Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	83,32%			
56	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Lubai Ulu	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	PROGRAM KECAMATAN	100%	78,92%	-	-	



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	75,73%	-	-	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	78,40%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	75,00%	Kekurangan Pegawai (banyak pegawai memasuki masa purnabakti)	Mengajukan usulan penambahan pegawai ke BKPSDM Kabupaten Muara Enim	
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	100%			
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	68,00%	Kurangnya minat pegawai yang mengikuti bimtek/diklat/ pelatihan	Memberi pengarahan kepada pegawai untuk mengikuti bimtek/diklat/ pelatihan	



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	81,85%	-	-	
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100,00%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	92,88%	-	-	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	80,88%			
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	95,97%	-	-	
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	99,99%	-	-	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	91,82%	-	-	



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	82,77%	-	-	
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	82,77%		-	
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	66,00%			
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	66,19%			
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	99,00%	-	-	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	99,14%	-	-	
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	80,00%	-	-	
				KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN	100%	85,65%	Administrasi pemerintahan desa dan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi	



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA			administrasi keuangan (spj) desa masih banyak yang belum sesuai aturan yang berlaku	pemerintahan desa dan administrasi keuangan secara berkala.	
57	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Empat Petulai dangku	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	85,04%			
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	89,12%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	83,75%			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	0%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	95,67%			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	93,85%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	91,41%			
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	62,02%			
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	64,89%			
				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	0%			
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	99,12%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	90,22%			
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	90,22%			
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	68,38%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	68,38%			
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%			
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100%	100%			
58	Unsur Kewilayahan	Kecamatan Panang Enim	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional,	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	72,87%			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Kredibel, dan Berorientasi pada Peningkatan Pelayanan Publik						
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	62,74%			
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	73,28%			
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100%	97,41%	Kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik	Akan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan	
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	62,50%			
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	69,96%			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	70,67%			



No	Ururan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	94,57%	Kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik	Akan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	62,55			
				Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100%	0%			
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	80,04			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	87,66%			
				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	87,66%			
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0%	0%			



No	Urusan Pemerintah	Pemerintah Daerah	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Target %	Realisasi %	Permasalahan	Upaya Mengatasi	Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0%	0%			
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	99,53%			
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	99,53%	Kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik	Akan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan	
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	7,85%			
				Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	7,85%	Tidak dilakukan Perbaikan Pagu untuk Sub Kegiatan yang seharusnya dihapus / geser, seperti Penegasan Batas Desa dan Pemilihan Kepala Desa.	Meminimalisir kekeliruan input pada TA berikutnya.	



3.2 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN PENDIDIKAN OLEH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan diselenggarakan oleh perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim Pada tahun 2025, dengan alokasi anggaran belanja sebesar **Rp. 1.006.357.040.332,90** dan terealisasi sebesar **Rp. 942.004.992.568,48** atau **93,61%** dan kinerja keluaran (output) sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Operasional

Belanja Operasional dialokasikan sebesar **Rp. 802.196.028.887,90** terealisasi sebesar **Rp. 742.767.869.126,48** atau **92,59%** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp. 204.161.011.445** terealisasi sebesar **Rp. 199.237.123.442** atau **97,59%** yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2025 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim melaksanakan 7 Program dan 19 Kegiatan , dan 104 Sub Kegiatan antara lain yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk program pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp. 631.695.386.367 dengan realisasi sebesar Rp. 577.449.769.828 atau 91,41% program ini terdiri dari 8 (Delapan) Kegiatan , dan 30 SubKegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar **Rp.664.695.386.367** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 301.343.424** atau sebesar **45,38%**. (realisasi yang tidak tercapai di kegiatan ini ialah adanya belanja jasa tenaga operator komputer yang tidak terealisasikan selama 4 bulan di beberapa sub kegiatan, hal ini dikarenakan tenaga operator komputer tersebut telah diangkat menjadi PPPK, dan satu DED Mess Mahasiswa Putri yang dibatalkan).

a. SubKegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar **Rp.387.250.450** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 121.990.106** atau sebesar



31,50%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Dokumen Renstra dan Renja SKPD, serta Dokumen DED Pembangunan Asrama Mahasiswa Putri di Yogyakarta dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- b. SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.45.280.500** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 31.152.403** atau sebesar 68,80%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Dokumen RKA-SKPD tahun anggaran 2025 dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.45.254.656** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.27.428605** atau sebesar 60,61%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Dokumen RKA ABT-SKPD tahun anggaran 2025 dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.64.602.200** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 46.848.508** atau sebesar 72,52%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Dokumen DPA-SKPD tahun anggaran 2025 dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- e. SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.61.611.800** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 31.763.400** atau sebesar 51,55%. Adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Dokumen DPA ABT-SKPD tahun anggaran 2025 dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- f. SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.22.917.700** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 14.341.602** atau sebesar 62,58%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Dokumen Laporan bulanan tahun anggaran 2025 dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- g. SubKegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar **Rp. 37.085.800** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 27.818.800** atau sebesar 75,01%. adapun



Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD tahun anggaran 2024 dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.612.053.715.647 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 561.280.691.569,48 atau sebesar 91,70%.

- a. SubKegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar **Rp.611.767.094.747** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.561.050.946.258** atau sebesar 91,71%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Dokumen Pembayaran Gaji dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. SubKegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar **Rp.237.165.100** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.187.310.583** atau sebesar 78,98%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Dokumen Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.28.955.500** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 25.525.188** atau sebesar 88,15%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun tahun anggaran 2025 dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.20.500.300** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.16.909.540** atau sebesar 82,48%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran tahun anggaran 2025 dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.270.114.322 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.254.653.479 atau sebesar 98,78%.

- a. SubKegiatan Pengamanan barang milik daerah dengan anggaran sebesar **Rp.1.210.902.000** dan realisasi keuangan



sebesar **Rp.1.207.696.073** atau sebesar 99,74%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- b. SubKegiatan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.59.212.322** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.46.957.406** atau sebesar 79,30%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Dokumen dokumen inventaris aset/barang inventaris tahun anggaran 2025 dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.081.691.760 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 353.472.767 atau sebesar 16,98%. (realisasi yang tidak tercapai di kegiatan ini ialah Jasa Kontribusi Asosiasi yang dibatalkan, hal ini dikarenakan Anggaran yang tersedia dalam bentuk gelondongan menggunakan kode rekening kontribusi dan tidak bisa dipecah, pelaksanaan kegiatan pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah seharusnya dikelola oleh Dinas Pendidikan Kab.Muara Enim, BGTK Sumsel hanya dapat mengelola PNPB Fungsional berupa ATK Bahan Ajar, Honor Panitia dan Honor Pengajar).

- a. SubKegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan anggaran sebesar **Rp. 2.081.691.760** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 353.472.767** atau sebesar **16,98%**. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah dokumen hasil laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.987.406.120 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.612.162.305 atau sebesar 90,77%.

- a. SubKegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar **Rp. 64.374.800** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.63.290.600** atau sebesar 98,32%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah dan jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. SubKegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan gedung Kantor dengan anggaran sebesar **Rp.1.458.516.257**



dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.434.762.158** atau sebesar 98,37%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah dan jenis peralatan kebersihan yang disediakan, jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- c. SubKegiatan Penyediaan bahan logistic kantor dengan anggaran sebesar **Rp.63.734.063** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.57.556.293** atau sebesar 90,31%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. SubKegiatan Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar **Rp.26.242.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.18.509.600** atau sebesar 70,53%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah dan jenis barang dan cetakan yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- e. SubKegiatan Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar **Rp. 276.600.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 15.500.000** atau sebesar 5,6%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah dan jenis bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- f. SubKegiatan Fasilitas kunjungan tamu dengan anggaran sebesar **Rp.26.228.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 8.690.000** atau sebesar 33,13%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah peserta rapat yang dipenuhi kebutuhan makan dan minum dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- g. SubKegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.1.071.711.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.1.013.853.654** atau sebesar 94,60%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah aparatur yang mengikuti rapat dalam dan luar daerah dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.



- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 6.299.541.052 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.904.314.996 atau sebesar 93,73%.**
- a. SubKegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran **Rp. 5.166.400.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 4.823.200.010** atau sebesar 93,36%.adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - b. SubKegiatan Pengadaan Mabel dengan anggaran **Rp. 330.141.052** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 329.895.986** atau sebesar 99,93%.adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah mabel yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - c. SubKegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya dengan anggaran **Rp. 803.000.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 751.219.000** atau sebesar 93,55%.adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.548.594.360 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.048.134.863 atau sebesar 67,68%.**
- a. SubKegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar **Rp. 5.676.600** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 4.090.000** atau sebesar 72,05%. Adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah dan jenis kelengkapan surat menyurat yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - b. SubKegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik dengan anggaran sebesar **Rp.1.265.877.760** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 810.284.863** atau sebesar 64,01%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah aplikasi yang dibayarkan biaya hosting, jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.



- c. SubKegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran sebesar **Rp.277.040.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.233.760.000** atau sebesar 84,38%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah tenaga kebersihan dan kemanankantor yang disedikandengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
8. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp.4.790.320.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.694.996.425 atau sebesar 98,01%.**
 - a. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran sebesar **Rp.146.740.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 123.591.425** atau sebesar 84,22%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah dan jenis perizinan yang dibayar, jumlah dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin berkala dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - b. SubKegiatan Pemeliharaan Perlatan dan Mesin lainnya dengan anggaran sebesar **Rp. 66.580.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 52.666.000** atau sebesar 79,10%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah dan jenis Perlatan dan Mesin yang dipelihara dan terpenuhi sara prasarannya dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - c. SubKegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran sebesar **Rp.4.577.000.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 4.518.739.000** atau sebesar 98,73%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

B. Program Pengelolaan Pendidikan

Alokasi anggaran untuk program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp. 364.486.351.709 dengan realisasi sebesar Rp. 356.325.467.516 atau 97,76 % program ini terdiri dari 4 (Empat) Kegiatan , dan 65 SubKegiatan sebagai berikut.



1. **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Dasar dengan anggaran sebesar Rp. 237.217.252.857,90 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 232.311.995.508 atau sebesar 97,93 %.**
 - a. SubKegiatan Pembangunan Ruang Guru Sekolah/Kepala Sekolah/TU dengan anggaran sebesar **Rp. 2.639.661.400** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 2.636.343.000** atau sebesar 99,87 %. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Jumlah Ruang Guru Sekolah/Kepala Sekolah/TU yang dibangun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - b. SubKegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah dengan anggaran sebesar **Rp. 1.601.407.600** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.598.466.000** atau sebesar 99,820%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - c. SubKegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah dengan anggaran sebesar **Rp.91.806.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.91.493.000** atau sebesar 99,66%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Jumlah ruang Perpustakaan Sekolah yang dibangun sebanyak dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - d. SubKegiatan Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah dengan anggaran sebesar **Rp. 22.476.644.500** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 22.233.029.556** atau sebesar 98,92%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun sebanyak dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - e. SubKegiatan rehabilitasi sedang/berat ruang Unit Kesehatan Sekolah dengan anggaran sebesar **Rp.156.952.500** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 156.639.000** atau sebesar 99,80%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah ruang Unit Kesehatan Sekolah yang direhab dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - f. SubKegiatan Pembangunan rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah dengan anggaran sebesar **Rp.1.294.966.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.292.861.000** atau sebesar 99,84%. adapun Output/Keluaran



- dari SubKegiatan ini adalah jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang dibangun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- g. SubKegiatan rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah dengan anggaran sebesar **Rp. 2.255.871.740** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 2.253.365.000** atau sebesar 99,89%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang direhab dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - h. SubKegiatan Pengadaan mebel sekolah dengan anggaran sebesar **Rp.14.478.094.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 14.461.696.788** atau sebesar 99,89%, adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Jumlah mabel sekolah yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - i. SubKegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas siswa(SD) dengan anggaran sebesar **Rp.730.649.725** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.605.866.769** atau sebesar 82,92%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Jumlahsiswa yang mengikuti kompetensi/lomba akademik/non akademik yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - j. SubKegiatan kelembagaan dan management sekolah SD dengan anggaran sebesar **Rp.527.090.175** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.419.136.943** atau sebesar 79,52%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah dokumen laporan hasil ujian dan bimtek Penyelenggaraan proses belajar dan ujian dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - k. SubKegiatan Pengelolaan dana BOS Sekolah dasardengan anggaran sebesar **Rp. 69.448.290.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 69.262.074.938** atau sebesar 99,73%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Jumlah SD Negeri yang mendapat dana bantuan operasional sekolah (BOS) APBD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - l. SubKegiatan Peningkatan Kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah dasar dengan anggaran sebesar **Rp.224.497.500** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.221.412.086** atau sebesar 98,63%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini



- adalah dokumen hasil bimtek pengelolaan dana BOS dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- m. SubKegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah dasar dengan anggaran sebesar **Rp.2.216.060.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.2.213.139.000** atau sebesar 99,87%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Jumlah Laboratorium yang dibangun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - n. SubKegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan dengan anggaran sebesar **Rp.197.149.775** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.162.185.480** atau sebesar 82,27%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Jumlah laporan bimtek Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - o. SubKegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan dengan anggaran sebesar **Rp.217.919.500** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.197.128.000** atau sebesar 90,46%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Jumlah laporan bimtek Pengembangan konten digital untuk pendidikan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - p. SubKegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan dengan anggaran sebesar **Rp.85.9676.174,90** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.102.954.090** atau sebesar 87,39%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah guru yang mengikuti pelatihan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - q. SubKegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan anggaran sebesar **Rp.184.086.500** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.175.153.090** atau sebesar 95,15%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan jumlah kombel yang diadakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - r. SubKegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi dengan anggaran sebesar **Rp.79.305.700** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.69.072.250**



- atau sebesar 87,10%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan kegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- s. SubKegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik dengan anggaran sebesar **Rp. 6.932.845.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 6.693.928.100** atau sebesar 96,55 %. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik yang tersedia dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - t. SubKegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik dengan anggaran sebesar **Rp. 32.159.636.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 31.793.437.128** atau sebesar 98,86 %. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang tersedia dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - u. SubKegiatan Pembangunan ruang kelas baru dengan anggaran sebesar **Rp.8.700.481.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.8.638.939.000** atau sebesar 99,29%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah ruang kelas yang dibangun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - v. SubKegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah dengan anggaran sebesar **Rp.1.092.700.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.1.058.400.000** atau sebesar 96,86%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah Sarana, Prasarana, dan Utilitas Sekolah yang direhab dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - w. SubKegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat ruang kelas Sekolah dengan anggaran sebesar **Rp. 13.082.905.428** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.12.984.030.000** atau sebesar 99,24%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah ruang kelas yang direhab dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - x. SubKegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan anggaran sebesar **Rp. 56.228.522.600** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.52.941.035.611** atau sebesar 94,15%.



adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran sebesar Rp.106.447.510.127 dan realisasi keuangan sebesar Rp.103.859.922.122 atau sebesar 97,57 %.

- a. SubKegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dengan anggaran sebesar **Rp. 1.057.382.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.055.286.000** atau sebesar 99,80%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang dibangun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. SubKegiatan Pembangunan Ruang unit kesehatan sekolah dengan anggaran sebesar **Rp.211.153.800** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.210.778.000** atau sebesar 99,82%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah Ruang unit kesehatan sekolah yang dibangun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. SubKegiatan Pembangunan Laboratorium dengan anggaran sebesar **Rp.72.022.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.71.705.000** atau sebesar 99,56%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah ruang laboratorium yang dibangun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. SubKegiatan Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah dengan anggaran sebesar **Rp.6.326.073.200** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.6.319.040.000** atau sebesar 99,89%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang dibangun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- e. SubKegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah dengan anggaran sebesar **Rp.7.954.841.005** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.7.555.709.600** atau sebesar 94,98%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah pagar sekolah yang dibangun, jumlah conblok yang dibangun, jumlah ruang Ruang kelas yang direhab dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- f. SubKegiatan rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah dengan anggaran sebesar **Rp.482.700.000** dan



- realisasi keuangan sebesar **Rp.285.654.000** atau sebesar 59,18%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah ruang kelas yang direhab dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- g. SubKegiatan Rehabilitasi sedang/berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah dengan anggaran sebesar **Rp.658.398.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.657.294.000** atau sebesar 99,83%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Jumlah sarana, prasarana dan utilitas sekolah yang direhab dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- h. SubKegiatan Pengadaan mebel sekolah dengan anggaran sebesar **Rp.6.653.103.600** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.6.645.873.391** atau sebesar 99,89%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Jumlah mebel sekolah yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- i. SubKegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa dengan anggaran sebesar **Rp.862.037.400** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 581.263.472** atau sebesar 70,37%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Jumlah sekolah yang mengikuti kejuaraan sepakbola gala siswa SMP, dan Jumlah siswa yang mengikuti OSN dan O2SN Tingkat kabupaten dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- j. SubKegiatan Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan anggaran sebesar **Rp.308.600.560** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.154.351.810** atau sebesar 50,02%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi pengawasan sekolah SMP, jumlah sekolah yang mendapatkan penilaian akreditasi dan jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi pengelolaan sekolah adiwiyata dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- k. SubKegiatan Pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran sebesar **Rp.36.849.380.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 36.685.150.493** atau sebesar 99,55%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Jumlah SMP Negeri yang mendapat dana (BOS) APBD Negeri dengan capaian output/keluaran sebesar



100%.

- l. SubKegiatan Peningkatan Kapasitas pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran sebesar **Rp. 300.369.276** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 289.442.620** atau sebesar 96,36%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah dokumen hasil bimtek pengelolaan dana BOS dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- m. SubKegiatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan dengan anggaran sebesar **Rp.112.512.300** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.106.873.181** atau sebesar 94,99%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah dokumen laporan hasil Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- n. SubKegiatan Pengembangan konten digital untuk pendidikan dengan anggaran sebesar **Rp.243.922.200** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 211.891800** atau sebesar 86,87%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Jumlah laporan hasil bimtek Pengembangan konten digital untuk pendidikan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- o. SubKegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan (SMP) dengan anggaran sebesar **Rp.117.031.800** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.101.263.945** atau sebesar 86,53%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah dokumen hasil Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan (SMP) dengan capaian output/keluaran sebesar 100%
- p. SubKegiatan Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan anggaran sebesar **Rp.1.945.746.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.1.701.388.837** atau sebesar 87,44%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah dokumen hasil Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- q. SubKegiatan Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi dengan anggaran sebesar



- Rp.117.114.600** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.64.350.700** atau sebesar 54,95%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah dokumen hasil Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- r. SubKegiatan Pembangunan ruang kelas baru dengan anggaran sebesar **Rp.5.545.540.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 5.521.350.000** atau sebesar 99,56%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah ruang kelas yang dibangun, jumlah ruang kelas baru yang dibangun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - s. SubKegiatan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (SMP) dengan anggaran sebesar **Rp.463.014.386** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.411.229.933** atau sebesar 88,82%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan hasil Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan (SMP) dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - t. SubKegiatan Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik (SMP) dengan anggaran sebesar **Rp. 2.807.500.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 2.791.954.900** atau sebesar 99,45%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Jumlah Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik (SMP) yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - u. SubKegiatan Pengadaan Perlengkapan Siswa dengan anggaran sebesar **Rp. 21.040.422.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 20.497.289.441** atau sebesar 97,42%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah Perlengkapan Siswa yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - v. SubKegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU dengan anggaran sebesar **Rp.1.465.646.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.1.448.561.000** atau sebesar 98,83%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhab yang direhab



dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- w. SubKegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dengan anggaran sebesar **Rp.10.889.000.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.10.492.219.999** atau sebesar 96,36%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dengan anggaran sebesar Rp.18.204.245.704 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.632.160.924 atau sebesar 96,86%.

- a. SubKegiatan Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD dengan anggaran sebesar **Rp.3.960.462.264** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 3.865.566.000** atau sebesar 97,60%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah Area Bermain yang dibangun dan jumlah toilet(jamban) yang dibangun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. SubKegiatan Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD dengan anggaran sebesar **Rp.1.737.720.340** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.530.586.819** atau sebesar 88,08%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah dokumenlaporanhasilKegiatan , jumlah tutor PAUD dan PNF yang mengikutisosialisasi dan jumlahlembaga PAUD yang mengikuti sosialisasi dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. SubKegiatan Pengelolaan dana BOP PAUD dengan anggaran sebesar **Rp.7.903.458.100** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.7.759.225.865** atau sebesar 98,18%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Jumlah TK Negeri yang mendapat dana bantuan operasional sekolah dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. SubKegiatan Peningkatan Kapasitas dana BOP PAUD dengan anggaran sebesar **Rp.727.906.600** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 672.800.454** atau sebesar 92,43%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Jumlah kepalasatuan PAUD dan PKBM yang mnegikuti bimtek dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- e. SubKegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan EvaluasiLayanan di Bidang Pendidikan PAUDdengan



anggaran sebesar **Rp.115.115.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 108.942.394** atau sebesar 94,64%.

- f. SubKegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru dengan anggaran sebesar **Rp.1.652.318.400** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.649.947.000** atau sebesar 99,86%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah ruang kelas yang dibangun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%..
- g. SubKegiatan Pengadaan alat praktek dan peraga siswa dengan anggaran sebesar **Rp.849.965.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 841.321.392** atau sebesar 98,98% adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah APE luarruang PAUD yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- h. SubKegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah dengan anggaran sebesar **Rp.1.257.300.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.203.771.000** atau sebesar 95,74%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah ruang kelas yang direhab dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dengan anggaran sebesar Rp.2.617.343.020 dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.521.388.962 atau sebesar 96,33%.

- a. SubKegiatan Pengelolaan dana BOP sekolah Non Formal/Kesetaraan dengan anggaran sebesar **Rp.1.637.800.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.575.849.650** atau sebesar 96,22%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Jumlah PKBM yang mendapat dana bantuan operasional dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. SubKegiatan Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan dengan anggaran sebesar **Rp.105.389.220** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 96.649.900** atau sebesar 91,71 %. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Jumlah dokumen bimtek pelatihan penggunaan aplikasi dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. SubKegiatan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikan dengan anggaran sebesar **Rp.117.858.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.**



- 94.239.412** atau sebesar 79,96 %. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Jumlah dokumen Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan Bidang Pendidikandengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. SubKegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru dengan anggaran sebesar **Rp.228.900.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 228.558.000** atau sebesar 99,85%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah ruang kelas yang dibangun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - e. SubKegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal dengan anggaran sebesar **Rp.527.395.800** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.526.092.000** atau sebesar 99,75%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang dibangun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

C. Program Pengembangan Kurikulum

Alokasi anggaran untuk program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar **Rp. 344.552.900** dengan realisasi sebesar **Rp. 313.684.418** atau **91,04%** program ini terdiri dari 1 (satu) Kegiatan , dan 1 SubKegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dengan anggaran sebesar Rp. 344.552.900 dengan realisasi sebesar Rp. 313.684.418 atau 91,04%

- a. SubKegiatan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal Pendidikan dasar dengan anggaran sebesar **Rp. 344.552.900** dengan realisasi sebesar **Rp. 313.684.418** atau **91,04%**, output dari sub Kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil dari pelatihan penetapan kurikulum dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

D. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Alokasi anggaran untuk program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar **Rp 6.894.487.888** dengan realisasi sebesar **Rp 5.870.508.690** atau **85,15%**. Program ini terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan ,dan 2 SubKegiatan sebagai berikut.



1. **Kegiatan Pemerataan kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan anggaran sebesar Rp 6.894.487.888 dengan realisasi sebesar Rp 5.870.508.690 atau 85,15%.**
 - a. SubKegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan anggaran sebesar **Rp.778.757.860** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.602.140.815** atau sebesar 77,32%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah dokumen pengawasan satuan pendidikan SMP, guru pemula yang mengikuti program induksi guru pemula, guru yang berkompeten sebagai tim penilai angka kredit jabatan fungsional guru, guru yang mengajukan permohonan penilaian angka kredit jabatan guru, sekolah yang memiliki dokumen penilaian akreditasi yang mendapatkan upah harian lepas dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - b. SubKegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan anggaran sebesar **Rp.6.115.730.028** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.5.268.367.875** atau sebesar 86,14%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah guru pengabdian program muara enim cerdas, jumlah guru yang mengikuti penyiapan calon kepala sekolah, jumlah pendidik dan tenaga kependidikan jenjang PAUD, SD, SMP yang mendapatkan upah harian lepas dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

E. Program Pengembangan Kebudayaan

Alokasi anggaran untuk program Pengembangan Kebudayaan sebesar **Rp. 2.265.000.710** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.577.295.388** atau 69,64% program ini terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan , dan 3 SubKegiatan sebagaiberikut. *(pada Program ini anggaran yang Kurang menyerap anggaran untuk direalisasi adalah kegiatan pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan Pranata Kebudayaan, hal ini dikarenakan Jumlah anggaran narasumber dan narasumber yang ingin didatangkan tidak sesuai, sehingga kegiatan ini tidak dilaksanakan).*



1. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar **Rp.123.468.100** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 43.892.316** atau sebesar 35,55%.
 - a. SubKegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan dengan anggaran sebesar **Rp.123.468.100** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 43.892.316** atau sebesar 35,55%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Jumlah dokumen hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
2. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar **Rp.1.424.032.610** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.881.203.072** atau sebesar 61,88%.
 - a. SubKegiatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi budaya dengan anggaran sebesar **Rp.1.424.032.610** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.881.203.072** atau sebesar 61,88%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah Jumlahpakaianadat yang disediakandengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
3. Kegiatan Pembinaan Lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah Kabupaten/kota dengan anggaran sebesar **Rp.717.500.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.652.200.000** atau sebesar 90,90%.
 - a. SubKegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pembinaan Lembaga adat dengan anggaran sebesar **Rp.717.500.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.652.200.000** atau sebesar 90,90%.

F. Program Pengembangan Kesenian tradisional

Alokasi anggaran untuk program Pengembangan Kesenian tradisional sebesar **Rp.524.648.672** dengan realisasi sebesar **Rp.340.614.728** atau **64,92%** program ini terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan, dan 2 SubKegiatan sebagai berikut. *(pada Program ini anggaran yang Kurang menyerap anggaran untuk direalisasi adalah honor dan uang saku tim Paduan suara, hal ini dikarenakan anggaran pada DPA dianggarkan sebanyak 11 Kegiatan, sedangkan Tim Paduan Suara hanya mengikuti beberapa kegiatan).*

1. Kegiatan Pembinaan kesenian yang Masyarakat pelakunya



dalam Daerah Kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp.524.648.672 dengan realisasi sebesar Rp.340.614.728 atau 64,92%

- a. SubKegiatan Peningkatan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional dengan anggaran sebesar **Rp.396.733.272** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.214.454.728** atau sebesar 54,06%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah jumlah kelompok paduan suara kabupaten muara enim yang terpenuhi sebanyak 1 group dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. SubKegiatan Peningkatan Kapasitas tata Kelola Lembaga kesenian tradisional dengan anggaran sebesar **Rp.127.915.400** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.126.160.000** atau sebesar 98,63%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah dokumen pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, dan dokumen system informasi database bidang kebudayaan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

G. Program Pembinaan Sejarah

Alokasi anggaran untuk program Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebesar **Rp. 146.612.087** dengan realisasi sebesar **Rp. 127.652.000** atau 87,07%. program ini terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan , dan 1 SubKegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Pembinaan Sejarah local dalam 1 daerah Kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 146.612.087 dengan realisasi sebesar Rp. 127.652.000 atau 87,07%.

- a. SubKegiatan Pemberdayaan sumber daya manusia dan Lembaga sejarah local kabupaten/kota dengan anggaran sebesar **Rp. 146.612.087** dengan realisasi sebesar **Rp. 127.652.000** atau 87,07%. adapun Output/Keluaran dari SubKegiatan ini adalah dokumen pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, dan dokumen system informasi database bidang kebudayaan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.



3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Tujuan	Sasaran				% Capaian
	Uraian	Indikator	Target	Realisasi	
Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan dan Peningkatan Pelestarian Warisan Budaya serta Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas tata Kelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya Akses dan Mutu Layanan Pendidikan	Angka rata - rata lama sekolah	8,39	8,45	100,71
		Angka Harapan Lama Sekolah	12,11	12,03	99,33
		Index SPM Pendidikan	78,24		
		Angka partisipasi kasar (APK Pendidikan dasar)	100	97,42	97,42
		Angka partisipasi murni (APM Pendidikan dasar)	100	87,87	87,87
		Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	61,78	56,06	90,74
	Meningkatnya Pelestarian Warisan Budaya Daerah	Persentase Pelestarian Warisan Budaya Daerah yang ditingkatkan	100		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas tata kelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,46	69,25	98,28

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

5. PEGHARGAAN DAN PRESTASI

1. Mberang Udin, S.Pd., M.Pd. (Pengawas Disdikbud Kab. Muara Enim) Prestasi : Juara 1 Pengawas Inovatif Sumatera Selatan Jambore GTK 2024, Juara 2 Pengawas Transformatif Apresiasi GTK 2025, Juara 3 Inovator Prov. Sumatera Selatan Tahun 2025, TOP 10 Inovasi Perangkat Daerah Kab. Muara Enim Tahun 2024
2. Riza Yustanti, S.Pd., M.M (SDN 16 Lawang Kidul): Juara 2 Kepala Sekolah SD Transformatif Apresiasi GTK 2025)
3. Suprpti, S.Si., M.Pd. (Kepala SD Bukit Asam) : Sahabat Sekolah



- Dasar Tingkat Nasional Pelibatan Catur Pusat Pendidikan
4. Giani, S.Pd., M.Pd. (SDN 20 Muara Enim) : Juara 1 GTK Transformatif Apresiasi GTK Sumsel 2025, Juara 2 Inovasi Daerah Kab. Muara Enim 2025
 5. Sri Fitriana, S.H., M.Pd. (SMPN 2 Lawang Kidul) : Juara 1 Inovasi Perangkat Daerah Kab. Muara Enim Tahun 2025
 6. Santi Aryani, S.Pd.I., Gr. (Kepala SDN 21 Lawang Kidul): Juara Harapan 3 Inovasi Daerah Kab. Muara Enim Tahun 2025
 7. Indri Nurhasanah, S.Pd. (SMPN 4 Rambang Niru) : Juara Harapan 2 Inovasi Daerah Kab. Muara Enim Tahun 2025
 8. Hartono, S.Pd (Kepala SMPN 2 Muara Belida) : Juara 3 Kepala Sekolah SMP Dedikatif Apresiasi GTK Sumsel 2025
 9. Yuniar Alamsyah, S.Pd. (SMPN 2 Lubai Ulu) : Juara 3 Inovasi Daerah Kab. Muara Enim Tahun 2025
 10. Suparmanto, S.Pd., M.Pd. (Pengawas Disdikbud Kab. Muara Enim) : Juara 3 Pengawas Dedikatif Apresiasi GTK Sumsel 2025
 11. Irnansyah (SMPN 1 Muara Belida) Juara 1 Guru SMP GTK Inovatif Jambore GTK 2024
 12. Nurul Khasanah, S.Pd.(SMPN 2 Muara Belida) : Juara Harapan 2 GTK Dedikatif Jambore GTK Sumsel Tahun 2024
 13. Wahyu Kurniawan, S.Pd. (SMPN 4 SDT): Juara 2 Guru SMP Inovatif Jambore GTK 2024
 14. Dwi Saharsani, S.Pd.I (SDN 12 Gunung Megang) : Juara 3 Guru SD Dedikatif Jambore GTK Sumsel Tahun 2024
 15. Nelda Diti Efrianti,S.Pd.,Gr (SMP Negeri 4 Semende Darat Ulu) : Juara : Guru Inovatif PPG Prajabatan Apresiasi GTK 2024 dan Terfavorit 2 Nasional
 16. Marlinda (SMPN 1 Muara Enim) : Juara Harapan 1 Inovasi Daerah Tahun 2025.
 17. Juara II Lomba Bertutur Nasional Tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atas nama Zareen Afiqab Alya.
 18. Juara I Karate Putra atas nama M. Marcel Ramadhan SMP Xaverius Tanjung Enim.
 19. Juara II Karate Putra atas nama Rizki Fadil Pratama SMP N 3 Lawang Kidul
 20. Juara III Karate Putra atas nama Rafa Paramudya Hadi SMP N 1 Muara Enim
 21. Juara I Karate Putri atas nama Fhasila Hadiditias SMP 2 Lawang Kidul.
 22. Juara II Karate Putri atas nama Ainiya Evina Nurnida SMP 2



- Lawang Kidul.
23. Juara III Karate Putri atas nama Dzakiyah Afifa Tunnisa SMP N 1 Lembak
 24. Juara I Pencak silat Putra atas nama Rafif Bilal Lesmana SMP Xaverius Tanjung Enim.
 25. Juara II Pencak silat Putra atas nama Citra Marvelino SMP N 1 Muara Enim.
 26. Juara III Pencak silat Putra atas nama Wijaya Krisna SMP N 1 Lawang kidul.
 27. Juara I Pencak silat Putri atas nama Aprilia Dwi SMP N 3 Lawang Kidul.
 28. Juara II Pencak silat Putri atas nama Fitria Novianti SMP N 1 Gelumbang.
 29. Juara III Pencak silat Putri atas nama Fadilah Khoiriah SMP N 1 Ujan Mas.
 30. SD Negeri 12 Tanjung Agung Adiwiyata Mandiri Tahun 2025.
 31. SD Negeri 7 Lawang Kidul Adiwiyata Mandiri Tahun 2025.
 32. SD Negeri 21 Lawang Kidul Adiwiyata Mandiri Tahun 2025.
 33. SD Negeri 1 Lawang Kidul Adiwiyata Mandiri Tahun 2025.
 34. SD Negeri 17 Lawang Kidul Adiwiyata Mandiri Tahun 2025.
 35. SD Negeri 2 Lawang Kidul Adiwiyata Mandiri Tahun 2025.
 36. SD Negeri 11 Lawang Kidul Adiwiyata Nasional Tahun 2025.
 37. SD Negeri 13 Tanjung Agung Adiwiyata Nasional Tahun 2025.
 38. SD Negeri 8 Lawang Kidul Adiwiyata Nasional Tahun 2025.
 39. SD Negeri 11 Tanjung Agung Adiwiyata Nasional Tahun 2025.
 40. SD Negeri 16 Belimbing Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan.
 41. SD Negeri 1 Lubai Ulu Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan.
 42. SD Negeri 2 Lubai Ulu Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan.
 43. SD Negeri 16 Tanjung Agung Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan.
 44. SD Negeri 1 Lubai Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan.
 45. SD Negeri 15 Lubai Ulu Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan.
 46. SD Negeri 17 Muara Enim Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan.
 47. SD Negeri 3 Lubai Ulu Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumatera Selatan.



2. URUSAN KESEHATAN OLEH DINAS KESEHATAN DAN RSUD H. M. RABAIN

DINAS KESEHATAN

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan Wajib Kesehatan diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim. Pada tahun anggaran 2025, alokasi belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 500.227.253.054,83 dan telah terealisasi sebesar Rp. 455.185.234.948,20 atau sebesar 91,00% dan kinerja keluaran (output) sebesar 98,32% dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

A. Belanja Operasional

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 475.930.819.838,83- terealisasi sebesar Rp. 416.262.975.142,93- atau 87,46% yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 101.272.028.542,- terealisasi sebesar Rp. 92.192.982.177,- atau 91,03% yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim memiliki 5 Program, 19 Kegiatan dan 91 Sub Kegiatan yang berkaitan langsung dengan target kinerja sasaran sebagaimana yang ada pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.

5 Program, 19 Kegiatan dan 91 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 288.561.754.596,99 dengan realisasi sebesar Rp. 255.411.541.216,00 atau 88,51%. Program ini terdiri dari 7 (Tujuh) Kegiatan dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 960.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 456.961.500,00 atau sebesar 47,60%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini



adalah terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, yakni: Kajian Konsultasi Perencanaan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Puskesmas Tanjung Raya, Rehab Kantor Dinas Kesehatan, Poskesdes Perjito, Rehab Total Pustu Desa Harapan Jaya, Rehab Total Pustu Desa Kayu Ara Sakti, Rehab Total Poskesdes Desa Guci, Poskesdes Desa Sugih Waras, Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Pajar Bulan, Rehab Berat Pustu Desa Babatan, Rehab Total Poskesdes Desa Datar Lebar, Rehab Total Poskesdes Desa Gaung Asam Kecamatan Belida Darat, Poskesdes Kampung 3 Kelurahan Gelumbang, Poskesdes Arisan Musi, Pustu Gedung Buruk Kecamatan Muara Belida, Rehab Total Poskesdes Gemawang Kecamatan Rambang Niru dan Pembangunan Poskesdes Desa Batu Raja Kecamatan Empat Petulai Dangku.

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 11.246.931,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.100.000,00 atau sebesar 36,45%. Adapun output dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan Dokumen RKA Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim sebanyak 15 Buku.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 15.870.850,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.670.000,00 atau sebesar 29,43%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan Dokumen Perubahan RKA Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim sebanyak 15 Buku.
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 16.290.900,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.050.000,00 atau sebesar 80,11%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim sebanyak 35 Buku.
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 14.649.450,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.094.000,00 atau sebesar 68,90%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan Perubahan DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim



sebanyak 35 Buku.

- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 5.855.850,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.743.000,00 atau sebesar 81,00%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan 3 Dokumen Laporan Capaian Kinerja (LKPJ, LPPD dan LAKIP) sebanyak 10 Buku.
- g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 19.506.100,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.226.850,00 atau sebesar 52,43%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Dokumen Laporan Keuangan dan BMN sebanyak 1 Laporan.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 266.848.047.832,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 236.443.868.929,00 atau sebesar 88,61%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji ASN yang terdiri atas PNS sebanyak 1.635 orang dan PPPK sebanyak 1.535 orang, serta pembayaran Tunjangan Kinerja ASN bagi PNS sebanyak 1.635 orang dan PPPK sebanyak 1.535 orang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim selama 12 bulan.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 10.365.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.031.750,00 atau sebesar 48,55%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 sebanyak 1 laporan.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 770.388.440,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 506.582.855,00 atau sebesar 65,76%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
 - Terlaksananya monitoring dan evaluasi penilaian angka kredit jabatan fungsional pada 24 Puskesmas dan 3 RSUD



di Kabupaten Muara Enim

- Pelaksanaan diklat dan bimbingan teknis bagi ASN di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim
 - Terlaksananya konsultasi ke Kementerian Kesehatan RI (Ditjen Nakes), Kementerian PANRB, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, dan Bapelkes terkait SDM kesehatan
 - Terlaksananya penilaian tenaga kesehatan teladan tingkat Kabupaten Muara Enim
 - Pelaksanaan Program Dokter Internship Indonesia (PIDI).
- b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 17.604.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.604.000,00 atau sebesar 100,00%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya bimbingan mental dan kerohanian bagi pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim sebanyak 4 (empat) kali pertemuan, dengan jumlah peserta sebanyak 90 orang pada setiap pertemuan, yang dilaksanakan dalam bentuk ceramah oleh ustadz dan ustadzah dari Kabupaten Muara Enim.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 547.983.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 112.534.000,00 atau sebesar 20,54%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor untuk mendukung operasional Dinas Kesehatan selama 12 (dua belas) bulan, yang terdiri atas 15 jenis komponen, antara lain baterai kecil dan besar, kabel, fitting lampu, stop kontak, dan komponen pendukung lainnya, serta pengadaan instalasi listrik dari panel utama menuju ruang rawat inap RSUD Lubai Ulu.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 3.140.806.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.395.156.749,00 atau sebesar 76,26%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung perkantoran, meliputi lemari arsip sebanyak 6



unit, UPS sebanyak 26 unit, hand pallet 1 unit, smart access door 8 unit, troli 6 unit, handy talky 4 unit, kursi kerja 102 unit, meja kerja 61 unit, meja racik obat 1 unit, AC cassette 3 unit, PC 11 unit, laptop 3 unit, printer 14 unit, printer A3 2 unit, scanner 7 unit, serta peralatan pendukung lainnya.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 32.846.486,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.954.830,00 atau sebesar 72,93%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya peralatan rumah tangga berupa alat kebersihan sebanyak 34 jenis alat kebersihan dan bahan pembersih lantai serta ruangan untuk mendukung operasional Dinas Kesehatan selama 12 bulan.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 67.863.205,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.896.550,00 atau sebesar 52,90%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya logistik kantor, meliputi alat tulis kantor (ATK) sebanyak 28 jenis untuk mendukung kegiatan rutin maupun program Dinas Kesehatan, serta penyediaan bahan bakar minyak (BBM) kendaraan operasional Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, yaitu BBM Pertamina sebanyak 60 liter dan BBM Dexlite sebanyak 1.098,7 liter selama 12 bulan.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan dengan anggaran sebesar Rp. 28.288.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.924.400,00 atau sebesar 59,83%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya barang cetak dan penggunaan sebanyak 6 jenis, meliputi map dinas, amplop dinas, buku agenda kerja, spanduk, serta penggunaan dokumen fotokopi, untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Kesehatan.
- f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 59.840.000,00 dan realisasi Rp. 51.950.000,00 atau sebesar 86,81%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya 19 kali pertemuan/rapat di Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 813.384.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 781.137.526,00 atau sebesar 96,04%. Adapun output/keluaran



dari sub kegiatan ini terlaksananya 212 kali perjalanan dinas selama 12 bulan, yang terdiri atas 131 kali perjalanan dinas dalam daerah untuk rapat koordinasi dan bimbingan teknis ke Puskesmas dan kecamatan, serta 81 kali perjalanan dinas luar daerah, baik di dalam maupun luar provinsi.

5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 3.950.383.100,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.704.700.000,00 atau sebesar 93,78%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan kendaraan dinas operasional, mobil layanan Cekling Membara, dan pengadaan ambulance puskesmas.
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 8.437.237.700,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.280.089.100,00 atau sebesar 98,14%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah: Terlaksananya Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Drainase RSUD Gelumbang; Pengadaan AC; Pembuatan Cor Beton Akses Jalan RSUD Gelumbang; Pemasangan Conblock Puskesmas Sukarami; Pemasangan Conblock Puskesmas Sumaja Makmur; Pemasangan Conblock Puskesmas Belida Darat; Pemasangan Paving Block dan Rehab Siring Rumah Dinas; Pemasangan Paving Block Halaman Poskesdes Midar Kecamatan Gelumbang; Pembangunan Pagar Poskesdes Desa Karang Endah Selatan Kecamatan Gelumbang; Pembangunan Pagar Poskesdes Suban Jeriji Kecamatan Rambang Niru; Pembangunan Pagar Poskesdes Lubai Persada Kecamatan Lubai Ulu; Pembangunan Pagar Poskesdes Kartamulia Kecamatan Gelumbang; Pembangunan Pagar Poskesdes Payabakal Kecamatan Gelumbang; Pembangunan Pagar Poskesdes Suka Jadi Kecamatan Sungai Rotan; Pembangunan Pagar Poskesdes Teluk Limau Kecamatan Gelumbang; Pembangunan Pagar Poskesdes Jambu Kecamatan Gelumbang; Pembangunan Pagar Poskesdes Air Asam Kecamatan Lubai; Pembangunan Pagar Poskesdes Kasih Dewa Kecamatan Rambang Niru;



Pembangunan Pagar Puskesmas Panang Enim; Pembangunan Pagar Puskesmas Empat Petulai Dangku; Pembangunan Pagar Puskesmas Beringin; Pembangunan Pagar Pustu Karang Endah Kecamatan Gelumbang; Pembangunan Pagar Pustu Tenang Waras Desa Babatan Kecamatan SDL; Pembangunan Pagar Pustu Lubai Persada Kecamatan Lubai Ulu; Pembangunan Pagar Pustu Muara Lematang Kecamatan Sungai Rotan; Pembangunan Dinding Penahan Tanah Puskesmas Pajar Bulan; Pembangunan Drainase RSUD Gelumbang; Kajian Konsultasi Perencanaan (DED) Pembangunan Drainase RSUD Gelumbang; dan Belanja Operasional.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 4.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.000.000,00 atau sebesar 100,00%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembelian 400 lembar materai untuk kelengkapan dokumen selama 12 bulan.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 1.571.047.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.505.574.918,00 atau sebesar 95,83%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran rekening listrik untuk Gedung Dinas Kesehatan, Gudang Farmasi, Labkesda, rumah dinas, Gudang P2M, Puskesmas di Kecamatan Panang Enim, Puskesmas Empat Petulai, serta 3 RSUD; pembayaran rekening PDAM untuk Dinas Kesehatan, Gudang Farmasi, Labkesda, Gedung Labkesda baru, dan 5 rumah dinas; serta pembayaran layanan internet di 7 titik (Dinas Kesehatan 3 titik, Labkesda 1 titik, Gudang Farmasi 2 titik, Gedung PSC 1 titik) selama 12 bulan.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar



Rp. 448.105.852,99 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 279.244.773,00 atau sebesar 62,32%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan pajak kendaraan dinas untuk 13 unit kendaraan operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2025, serta pelayanan servis dan pengadaan suku cadang untuk 13 unit kendaraan dinas roda empat selama 12 bulan.

- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 770.143.100,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 743.445.486,00 atau sebesar 96,53%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, meliputi pemeliharaan AC (*split* dan *standing floor*), genset, PC, printer, serta peralatan komputer lainnya, pemeliharaan gedung, dan rehabilitasi ruang pertemuan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim.

B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

Alokasi anggaran untuk Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp. 204.610.519.409,84 dengan realisasi sebesar Rp. 193.837.588.219,20 atau 94,73%. Program ini terdiri dari 4 (Empat) Kegiatan dan 56 (Lima Puluh Enam) Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 1.887.077.150,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.852.746.700,00 atau sebesar 98,18%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini ialah: Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Poskesdes Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang; Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pustu Kota Padang Kecamatan Semende Darat Tengah; Pembangunan Poskesdes Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang; Pembangunan Pustu Kota Padang Kecamatan Semende Darat; Pembangunan Pustu Desa Jiwa Baru Kecamatan Lubai; Kajian Konsultasi Perencanaan (DED) Pembangunan Poskesdes Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung



Megang; Pembangunan Pustu Kota Padang Kecamatan Semende Darat Tengah; dan Administrasi kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya.

- b. Sub Kegiatan Pengembangan Puskesmas dengan anggaran sebesar Rp. 800.304.405,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.754.740.696,00 atau sebesar 96,90%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
- Jasa Konsultasi Pengawasan Penambahan Ruang Puskesmas Lembak
 - Jasa Konsultasi Pengawasan Penambahan Ruang Puskesmas Muara Belida
 - Pembangunan Gudang Obat Puskesmas Sumaja Makmur Kecamatan Gunung Megang
 - Penambahan Ruang Puskesmas Lembak
 - Penambahan Ruang Puskesmas Muara Belida
 - Pengadaan IPAL Puskesmas Muara Belida
 - Pengadaan IPAL Puskesmas Benakat
 - Pengadaan IPAL Puskesmas Belida Darat
 - Pengadaan Air Bersih Puskesmas Pulau Panggung
 - Pengadaan Air Bersih Puskesmas Sugih Waras
 - Pengadaan Air Bersih Puskesmas Gunung Megang
 - Pengadaan Air Bersih Puskesmas
 - Kajian Konsultasi Perencanaan (DED) Penambahan Ruang Puskesmas Lembak dan Penambahan Ruang Puskesmas Muara Belida
 - Administrasi kegiatan Pengembangan Puskesmas.
- c. Sub Kegiatan Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 478.875,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%.
- d. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas dengan anggaran sebesar Rp. 3.603.547.275,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.526.200.350,00 atau sebesar 97,85%, Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah: Jasa Konsultasi Pengawasan Rehab Total Puskesmas Sumber Mulya; Rehab Total Puskesmas Sumber Mulya; Kajian Konsultasi Perencanaan (DED) Rehab Total Puskesmas Sumber Mulya; dan Administrasi kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas.
- e. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.



13.970.254.775,00 dan realisasi sebesar Rp. 13.594.096.700,00 atau sebesar 97,31%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah:

- Jasa Konsultasi Pengawasan (Rehab Total Poskesdes Air Cekdam Kecamatan Rambang Niru, Rehab Total Poskesdes Gerinam Kecamatan Rambang Niru, Rehab Total Poskesdes Sumber Rahayu, Rehab Total Poskesdes Desa Suka Jadi, Rehab Total Poskesdes Desa Sigam, Rehab Total Poskesdes Desa Mekar Jaya, Rehab Total Pustu Lubai Makmur, Rehab Berat Poskesdes Desa Tanjung Baru, Desa Mulya Abadi, Desa Kayu Ara Batu Kecamatan Muara Belida; Rehab Berat Poskesdes Desa Lubuk Semantung Kecamatan Belida Darat; Rehab Total Pustu Desa Suban Jeriji dan Rehab Total Pustu Desa Padang Bindu Kecamatan Panang Enim; dan Rehab Berat Pustu Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu.
- Rehab Gedung Kantor PSC 119 Mantap Muara Enim
- Rehab Berat Poskesdes Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida
- Rehab Berat Poskesdes Desa Mulya Abadi Kecamatan Muara Belida
- Rehab Berat Poskesdes Desa Lubuk Semantung Kecamatan Belida Darat
- Rehab Berat Poskesdes Desa Kayu Ara Batu Kecamatan Muara Belida
- Rehab Berat Poskesdes Banu Ayu Kecamatan Empat Petulai Dangku
- Rehab Berat Pustu Segamit Kecamatan Semende Darat Ulu
- Rehab Total Poskesdes Air Cekdam Kecamatan Rambang Niru
- Rehab Total Poskesdes Gerinam Kecamatan Rambang Niru
- Rehab Total Poskesdes Sumber Rahayu Kecamatan Rambang
- Rehab Total Poskesdes Desa Sukajadi Kecamatan Sungai Rotan
- Rehab Total Poskesdes Desa Sigam Kecamatan Gelumbang
- Rehab Total Poskesdes Desa Mekar Jaya Kecamatan Lubai Ulu



- Rehab Total Pustu Desa Suban Jeriji Kecamatan Rambang Niru
 - Rehab Total Pustu Desa Padang Bindu Kecamatan Panang Enim
 - Rehab Total Pustu Lubai Makmur Kecamatan Lubai Ulu
 - Rehab Berat Poskesdes Desa Menanti Selatan Kecamatan Kelekar
 - Rehab Berat Poskesdes Muara Gula Baru Kecamatan Ujan Mas
 - Rehab Berat Poskesdes Pandan Enim Kecamatan Tanjung Agung
 - Rehab Berat Poskesdes Talang Beliung Kecamatan Belida Darat
 - Rehab Total Pustu Gumai Kecamatan Gelumbang
 - Rehab Berat Poskesdes Air Keruh Kecamatan Rambang
 - Rehab Berat Pustu Karang Raja Kecamatan Muara Enim
 - Rehab Berat Pustu Kencana Mulia Kecamatan Rambang
 - Rehab Berat Pustu Pinang Belarik Kecamatan Ujan Mas
 - Rehab Berat Poskesdes Melilian Kecamatan Gelumbang
 - Rehab Ringan Poskesdes Desa Siring Agung Kecamatan SDU
 - Rehab Ringan Poskesdes Lebak Budi Kecamatan Panang Enim
 - Rehab Berat Pustu Desa Putak Kecamatan Gelumbang
 - Kajian Konsultasi Perencanaan (DED) Rehab Total Poskesdes
 - Kajian Konsultasi Perencanaan (DED) Rehab Total Pustu dan Perencanaan (DED) Rehab Berat Pustu
 - Kajian Konsultasi Perencanaan (DED) Rehab Berat Poskesdes
 - Administrasi kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan.
- f. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.263.758.550,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.254.544.200,00 atau sebesar 99,27%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah: Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Berat Rumah Dinas Puskesmas Sumaja Makmur dan Pengawasan Rehab Berat Rumah Dinas Puskesmas Gunung Megang; Rehab Berat



Rumah Dinas Puskesmas Sumaja Makmur; Rehab Berat Rumah Dinas Puskesmas Gunung Megang; Rehab Berat Rumah Dinas Kesehatan; Kajian Konsultasi Perencanaan (DED) Rehab Berat Rumah Dinas Puskesmas Sumaja Makmur dan Rehab Berat Rumah Dinas Puskesmas Gunung Megang; dan Administrasi kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan.

- g. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 37.756.968.503,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 33.924.305.571,00 atau sebesar 89,85%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini yaitu: Belanja modal alat kedokteran radiodiagnostic sebanyak 7 unit; Belanja alat kedokteran gigi sebanyak 35 unit; Belanja alat kedokteran jantung sebanyak 7 unit; Belanja alat kedokteran gawat darurat sebanyak 5 set; Tersedianya pengadaan hordeng sebanyak 2 paket, Tersedianya pengadaan manekin sebanyak 2 unit, tersedianya pengadaan nurse call sebanyak 50 set untuk 3 RSUD Kelas D; Tersedianya pengadaan handrill sebanyak 36 buah untuk RSUD SDL; dan Belanja modal alat laboratorium umum sebanyak 47 unit; dan Belanja modal alat kedokteran umum sebanyak 222 unit.
- h. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi dengan anggaran sebesar Rp. 278.872.914,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 268.924.230,00 atau sebesar 96,43%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan kalibrasi alat kesehatan sebanyak 843 unit alat kesehatan di 22 puskesmas di Kabupaten Muara Enim dengan hasil kalibrasi 799 LAIK dan 44 TIDAK LAIK.
- i. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 346.851.572,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 314.859.275,00 atau sebesar 90,78%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pemeliharaan alat kesehatan sebanyak alat kesehatan di 22 puskesmas di Kabupaten Muara Enim, pemeliharaan Coldroom, dan administrasi kegiatan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan.
- j. Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit dengan anggaran



sebesar Rp. 8.755.551.150,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.616.200.850,00 atau sebesar 98,41%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah:

- Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang CSSD RSUD Gelumbang
 - Jasa Konsultansi Perencanaan (DED) Ruang CSSD RSUD Gelumbang
 - Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Ruang HCU RSUD Lubai Ulu
 - Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Ruang Operasi HCU RSUD Gelumbang (BKBK 2025)
 - Pembangunan Gedung Ruang Operasi RSUD Gelumbang Kec.Gelumbang (BKBK 2025)
 - Pembangunan Ruang HCU RSUD Lubai Ulu
 - Kajian Konsultasi Perencanaan (DED) Pembangunan Ruang HCU RSUD Lubai Ulu
 - Administrasi kegiatan Pengembangan Rumah Sakit.
- k. Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 21.345.862.670,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.071.926.800,20 atau sebesar 94,03%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan obat-obatan dan bahan medis habis pakai (BMHP) untuk 24 Puskesmas beserta jaringannya, serta 3 RSUD kelas D di Kabupaten Muara Enim. Selain itu, telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan obat di 18 Puskesmas.
- l. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga dengan anggaran sebesar Rp. 9.089.200,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.143.300,00 atau sebesar 85,59%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga serta Program Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat di 24 Puskesmas.
- m. Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 269.258.800,00 dan realisasi keuangan



sebesar Rp. 224.416.349,00 atau sebesar 83,35%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya distribusi obat, vaksin, bahan medis habis pakai (BMHP), dan alat kesehatan ke 24 Puskesmas serta 3 RSUD kelas D di Kabupaten Muara Enim selama 12 bulan.

2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dengan anggaran sebesar Rp. 364.110.874,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 347.929.836,00 atau sebesar 95,56%. Adapun output/keluaran sub kegiatan ini adalah:
 - Terlaksananya kegiatan Rapat Pengkajian Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMPSR) sebanyak 4 kali dengan total peserta 150 orang.
 - Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon (AMPSR) sebanyak 2 kali dengan total peserta 90 orang.
 - Terlaksananya pemantauan ibu hamil KEK pada 14 Puskesmas.
 - Terlaksananya pencetakan 8.252 buku KIA
 - Terlaksananya audit kasus kematian ibu, bayi, dan balita di 18 Puskesmas.
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Ibu Bersalin dengan anggaran sebesar Rp. 49.775.900,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 40.194.100,00 atau sebesar 80,75%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pendampingan Tim Ahli (Dokter Sp.OG dan Sp.A) ke Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam pelayanan KIA, kegawatdaruratan, dan sistem rujukan maternal neonatal, dengan partisipasi sebanyak 224 peserta di 4 Puskesmas, yaitu Puskesmas Empat Petulai Dangku, Puskesmas Panang Enim, Puskesmas Pulau Panggung, dan Puskesmas Sumber Mulia.
- c. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dengan anggaran sebesar Rp. 966.290.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 119.526.000,00 atau sebesar 12,37%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pemeriksaan sampel skrining SHK (Sistem Hormon dan Kelainan) pada bayi baru lahir sebanyak



2.009 sampel.

- d. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita dengan anggaran sebesar Rp. 219.741.406,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 203.566.950,00 atau sebesar 92,64%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
- Terlaksananya kegiatan Lomba Balita Indonesia tingkat Kabupaten dengan jumlah peserta 48 orang.
 - Terlaksananya pertemuan tindak lanjut pembahasan kasus gizi buruk dengan jumlah peserta 48 orang.
 - Terlaksananya pelacakan kasus gizi buruk sebanyak 12 kasus dari 12 Puskesmas.
- e. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar dengan anggaran sebesar Rp. 19.915.550,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.253.100,00 atau sebesar 91,65%. Adapun output/keluaran sub kegiatan ini adalah terlaksananya pertemuan Rapat Koordinasi tim Pembina UKS tingkat kabupaten dengan jumlah peserta 22 Orang, serta pembinaan Sekolah Sehat ke 3 puskesmas yang belum melakukan penjangkaran kesehatan anak sekolah di Kabupaten Muara Enim.
- f. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif dengan anggaran sebesar Rp. 1.768.885.960,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.549.382.650,00 atau sebesar 87,59%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
- Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas hidup pada usia produktif melalui pengadaan bahan media habis pakai (BMHP) untuk pemeriksaan kolesterol, asam urat, dan gula darah, meliputi 1.600 box strip kolesterol, 640 box strip asam urat, 1.400 box strip gula darah, 1.075 box alkohol swab, dan 1.075 box blood lancet.
 - Terselenggaranya pertemuan peningkatan kapasitas pengelola Program Penyakit Tidak Menular (PTM) Puskesmas di Kabupaten Muara Enim dengan jumlah peserta 24 orang.
 - Pencetakan spanduk 10 meter dan cetak lembar balik sebanyak 19 lembar.
 - Terlaksananya monitoring dan evaluasi program di 7 Puskesmas.
- g. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia



Lanjut dengan anggaran sebesar Rp. 626.900.850,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 584.758.380,00 atau sebesar 93,28%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah:

- Terlaksananya Pelatihan Pelayanan Klaster Usia Produktif dan Lansia di Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 yang diikuti 48 peserta dari 24 Puskesmas (1 orang pemegang program lansia dan 1 orang pemegang pelayanan klaster 3 di Puskesmas);
 - Pencetakan Buku Lansia sebanyak 18.746 buku;
 - Terlaksananya monitoring dan evaluasi program usia lanjut ke 3 Puskesmas;
 - Terlaksananya Pembinaan teknis dan Penguatan Puskesmas Santun Lansia dan Perawatan Jangka Panjang di 8 Puskesmas melalui DAK Non Fisik.
- h. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi dengan anggaran sebesar Rp. 868.956.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 864.733.180,00 atau sebesar 99,51%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
- Terlaksananya pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) untuk pemeriksaan Profil Lipid Reagen LDL sebanyak 100 kit.
 - Terlaksananya belanja alat tulis kantor dan pencetakan media KIE lembar balik hipertensi sebanyak 19 buah;
 - Terlaksananya monitoring dan evaluasi PTM prioritas ke 5 Puskesmas;
 - Terlaksananya konsultasi dan koordinasi program hipertensi ke Dinas kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
- i. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus dengan anggaran sebesar Rp. 33.405.200,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.368.800,00 atau sebesar 72,95%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan alat tulis kantor, pencetakan leaflet Diabetes Melitus, deteksi dini faktor risiko PTM pada instansi dengan sasaran 375 orang, monitoring dan evaluasi program PTM ke Puskesmas, serta konsultasi dan koordinasi program ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
- j. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita



Orang dengan Gangguan Jiwa Berat dengan anggaran sebesar Rp. 90.180.465,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 80.979.590,00 atau sebesar 89,80%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pendampingan oleh Dokter Spesialis Jiwa bagi petugas kesehatan di 10 Puskesmas, yakni Puskesmas Tebat Agung, Puskesmas Lembak, Puskesmas Panang Enim, Puskesmas Benakat, Puskesmas Muara Enim, Puskesmas Sugih Waras, Puskesmas Teluk Lubuk, Puskesmas Sumaja Makmur, Puskesmas Sumber Mulia, dan Puskesmas Beringin.

- k. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis dengan anggaran sebesar Rp. 299.048.400,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 195.609.425,00 atau sebesar 65,41%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pertemuan monitoring dan evaluasi program TB dengan peserta pengelola TB di Puskesmas dan Rumah Sakit dengan tujuan membahas capaian penemuan terduga TB dan pengobatan pasien TB, pelatihan TBC bagi bidan, penyisiran kasus di klinik dan rumah sakit swasta, serta pengadaan logistik dan bahan KIE untuk masyarakat.
- l. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV dengan anggaran sebesar Rp. 108.035.435,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 87.195.056,00 atau sebesar 80,71%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya sero survei di Lapas Muara Enim dan pada populasi kunci (café), terlaksananya monitoring dan evaluasi program HIV bagi pengelola program di Puskesmas, terlaksananya pertemuan triple eliminasi HIV, Sifilis dan Hepatitis serta pengambilan logistik ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
- m. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dengan anggaran sebesar Rp. 17.100.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.948.000,00 atau sebesar 64,02%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyelidikan epidemiologi PD3I, KLB/Wabah, penyakit menular lainnya sebanyak 20 kasus dari 20 Puskesmas.
- n. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana



dan/atau Berpotensi Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 233.562.900,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 200.487.600,00 atau sebesar 85,84%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pelatihan program bencana jumlah peserta 48 orang yang terdiri atas 24 orang pengelola bencana dan 24 orang PSC Puskesmas se-kabupaten Muara Enim. Selain itu, telah dilakukan pemantauan wilayah terdampak banjir di 5 lokasi bencana.

- o. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 2.533.090.200,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.711.053.829,00 atau sebesar 67,55%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
 - Terlaksananya pengadaan bahan medis habis pakai (BMHP) berupa strip HB untuk skrining anemia pada remaja putri sebanyak 580 box (29.000 strip) bagi siswi SMP/SMA sederajat di Kabupaten Muara Enim;
 - Terlaksananya pemberian makanan tambahan dan vitamin (susu bubuk) sebanyak 16.368 kotak untuk 314 balita stunting;
 - Terlaksananya Pertemuan Pencatatan dan Pelaporan Program Gizi melalui Aplikasi E-PPGBM dengan peserta 48 orang petugas gizi/petugas penginput laporan dari 24 Puskesmas;
 - Terlaksananya publikasi stunting yaitu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menginformasikan data stunting dengan peserta lintas sektor dan lintas program dengan jumlah peserta 60 orang;
 - Terlaksananya pemantauan dan monitoring kegiatan Program Gizi ke 10 Puskesmas di Wilayah Kabupaten Muara Enim;
 - Terlaksananya konsultasi, koordinasi, dan penilaian kinerja Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
- p. Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Kerja dan Olahraga dengan anggaran sebesar Rp. 368.618.200,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 336.078.631,00 atau sebesar 91,17%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
 - Terlaksananya upaya peningkatan kebugaran jasmani



melalui kegiatan senam pagi sebanyak 19 kali.

- Terlaksananya pembinaan upaya kesehatan kerja dan olahraga ke Puskesmas sebanyak 7 kali.
 - Terlaksananya pemeriksaan kebugaran jasmani bagi Calon Jamaah Haji dan Anak Sekolah di 10 Lokasi;
 - Terlaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan Pos UKK/Perusahaan sebanyak 8 kali.
 - Terlaksananya orientasi K3 perkantoran dengan jumlah peserta 44 orang dari Puskesmas dan OPD;
 - Peningkatan kapasitas kader Pos UKK dengan jumlah peserta 55 orang;
 - Terlaksananya konsultasi/koordinasi program upaya kesehatan kerja dan olahraga ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 3 kali dan Kementerian Kesehatan RI sebanyak 1 kali.
- q. Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 4.962.376.492,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.864.856.035,00 atau sebesar 98,03%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
- Terlaksananya uji petik sampel makanan secara kimia dan mikrobiologi sebanyak 30 sampel di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim;
 - Terlaksananya inspeksi kesehatan lingkungan Tempat Pengolahan Pangan (TPP) di 10 lokasi;
 - Terlaksananya inspeksi kesehatan lingkungan Tempat-Tempat Umum (TTU) di 10 lokasi;
 - Terlaksananya konsultasi dan koordinasi program TPP dan pengelolaan limbah medis ke Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 3 kali;
 - Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pengelolaan limbah medis RS dan Puskesmas pada 11 Lokasi;
 - Terlaksananya pengiriman sampel makanan ke Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Palembang sebanyak 3 kali;
 - Terlaksananya uji laik higiene PDAM di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Semende Darat Laut dan Kecamatan Ujan Mas;
 - Terlaksananya uji laik Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) sebanyak 5 kali di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim;



- Terlaksananya inspeksi kesehatan lingkungan DAMIU di 5 Lokasi;
- Sasaran Inspeksi Kesehatan Lingkungan SAB di 5 lokasi yaitu Kecamatan Muara Enim, Lawang Kidul, Ujan Mas, Belimbing di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim;
- Konsultasi dan koordinasi Program Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM) ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan BTKL Palembang Sumatera Selatan dilaksanakan 2 kali;
- Terlaksananya pengambilan sampel DAMIU di 5 lokasi dalam wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim;
- Terlaksananya pengambilan sampel Sarana Air Bersih (SAB) di 5 lokasi dalam wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim;
- Terlaksananya pemeriksaan sampel kualitas air pada sarana air bersih keluarga stunting pada 10 lokasi di Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Muara Enim;
- Telah dilaksanakan pendampingan SKAMRT pada 13 lokasi di wilayah kerja Kabupaten Muara Enim;
- Terlaksananya pelatihan Program Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM) dengan jumlah peserta 48 orang dari 24 Puskesmas di Kabupaten Muara Enim.
- Terlaksananya bimbingan teknis Program Kesehatan Lingkungan ke Puskesmas di 5 Lokasi;
- Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan monitoring kegiatan Intervensi Kesehatan Lingkungan (pembangunan jamban dan CTPS) di 10 desa pada Kecamatan Rambang Niru, Lubai, Panang Enim, dan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim;
- Terlaksananya pembangunan jamban dan CTPS sebanyak 350 paket di 10 desa yaitu Desa Indramayu, Desa Muara Meo, Desa Padang Bindu, Desa Air Cek Dam, Desa Manunggal Makmur, Desa Tanjung Menang, Desa Aur, Desa Sukarami, Desa Petar Dalam dan Desa Danau Rata, melalui pihak ketiga.
- Tersedianya jasa tenaga ahli fasilitator STBM serta tenaga pendamping/supervisor kegiatan pendampingan intervensi kesehatan lingkungan (pembangunan jamban



- dan CTPS);
- Terlaksananya konsultasi dan koordinasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
 - Terlaksananya monitoring atau pemantauan desa pelaksana STBM di 10 lokasi/desa;
- r. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 548.075.200,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 454.446.000,00 atau sebesar 82,92%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
- Pengadaan media promosi kesehatan cetak meliputi tempat makan Isi Piringku (802 buah), payung promosi kesehatan (500 buah), roll banner (50 buah), umbul-umbul (83 buah), dan buku rapor cekling Membara (2.000 buku).
 - Tersedianya media KIE Posyandu dan bahan bacaan kader berupa buku percakapan kader (411 buku), lembar balik Posyandu (291 buah), serta media pencatatan kader (269 set).
 - Terlaksananya Gerakan Posyandu Aktif melalui kegiatan jambore kader pada 16 November di halaman Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim dengan peserta 160 kader Posyandu.
 - Terlaksananya Gerakan Aksi Bergizi di SMP Negeri 6 Muara Enim dengan jumlah peserta sebanyak 180 siswa (DAK Non Fisik).
 - Terlaksananya Gerakan Cegah Stunting di Puskesmas Tanjung Enim dengan jumlah peserta sebanyak 183 orang yang terdiri atas ibu hamil, ibu menyusui, keluarga bayi/balita, lintas program, dan lintas sektor (DAK Non Fisik).
 - Terlaksananya Gerakan Bumil Sehat di Puskesmas Tanjung Agung dengan jumlah peserta sebanyak 183 orang yang terdiri atas ibu hamil, lintas sektor, lintas program, dan tokoh masyarakat.
 - Terlaksananya kegiatan Cek Kesehatan Gratis Keliling di 26 lokasi.
- s. Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 53.684.800,00 dan realisasi keuangan



sebesar Rp. 43.493.200,00 atau 81,02%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini antara lain:

- Belanja alat dan bahan kegiatan kantor berupa alat tulis kantor (ATK) untuk Program Kesehatan Tradisional.
 - Belanja bahan cetak berupa spanduk untuk kegiatan pertemuan monitoring dan evaluasi Program Kesehatan Tradisional Tahun 2025.
 - Belanja sewa hotel untuk pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi Program Kesehatan Tradisional Tahun 2025 dengan peserta sebanyak 24 orang pengelola dari 24 Puskesmas di Kabupaten Muara Enim.
 - Pembayaran honorarium narasumber pertemuan monitoring dan evaluasi Program Kesehatan Tradisional Tahun 2025 yaitu dua orang narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
 - Pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring, evaluasi, dan pembinaan TOGA pada delapan Puskesmas di Kabupaten Muara Enim.
 - Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi Kesehatan Tradisional ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
- t. Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 208.729.700,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 175.298.612,00 atau sebesar 83,98%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
- Terlaksananya Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Surveilans dengan peserta sebanyak 48 orang dari 24 Puskesmas.
 - Terlaksananya Pertemuan Validasi Data Surveilans dengan peserta sebanyak 24 orang pengelola surveilans dari 24 Puskesmas.
 - Terlaksananya bimbingan teknis Program Surveilans ke Puskesmas sebanyak 12 kali.
 - Terlaksananya konsultasi Program Surveilans ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 2 kali.
 - Terlaksananya verifikasi sinyal/rumor, penyelidikan epidemiologi (PE) dan pelacakan kontak penyakit berpotensi KLB/wabah, investigasi kasus KIPI, serta PE penyakit menular lainnya, keracunan makanan, dan penyehatan lingkungan sebanyak 7 kali (DAK Non Fisik).



- u. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) dengan anggaran sebesar Rp. 15.759.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 14.952.030,00 atau sebesar 94,87%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Skrining masalah kesehatan jiwa di 24 Puskesmas Kabupaten Muara Enim.
- v. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza dengan anggaran sebesar Rp. 234.261.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 204.111.372,00 atau sebesar 87,13%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Pelatihan Tenaga Kesehatan masalah kesehatan jiwa bagi perawat dokter puskesmas dari 22 Puskesmas diwilayah Kabupaten Muara Enim.
- w. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular dengan anggaran sebesar Rp. 513.327.338,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 394.153.066,00 atau sebesar 76,78%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
 - Terlaksananya pertemuan evaluasi Program Kusta dan Frambusia dengan peserta yaitu pengelola program dari 24 Puskesmas.
 - Terlaksananya pertemuan Program Hepatitis melalui kegiatan On the Job Training (OJT) aplikasi SIHEPI dengan peserta yaitu pengelola program dari 24 Puskesmas.
 - Terlaksananya kegiatan monitoring ke Puskesmas, konsultasi ke Palembang, pertemuan tata laksana ISPA dan pneumonia, serta pencetakan buku petunjuk teknis dan leaflet ISPA.
 - Pengadaan BMHP Jumentik Kit untuk 24 Puskesmas dalam rangka pengendalian vektor, monitoring dan evaluasi program DBD, bimbingan teknis aplikasi Silantor, SIARVI, IKK, dan IKP, serta pengambilan logistik dan konsultasi ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
 - Pelaksanaan Program Rabies yaitu meliputi: penyediaan sarana KIE berupa leaflet, roll banner, dan buku saku pengelola program, serta pertemuan evaluasi dan konsultasi program ke Dinas Kesehatan Provinsi



Sumatera Selatan untuk pemenuhan kebutuhan vaksin VAR.

- x. Sub Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 88.108.961.100,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 87.352.827.319,00 atau sebesar 99,14%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah:

- Terlaksananya pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 yang di daftarkan Pemerintah Daerah (Program Berobat Mudah dan Gratis Kabupaten Muara Enim) bagi masyarakat Kabupaten Muara Enim selama 12 bulan (Rp. 35.000,-) untuk bantuan iuran baru di bayarkan 10 bulan (Rp. 2.800,-), kurang bayar bulan November dan Desember untuk bantuan iuran. Hal ini disebabkan adanya penambahan peserta pada akhir tahun dari segmen lain yang non Aktif dan sedang sakit/dirawat misalnya peserta PBI-JK yang di non Aktifkan oleh Kementerian Sosial, Tenaga Kontrak dalam masa peralihan dan perangkat desa. Adapun peserta BPJS Kesehatan Program Berobat Mudah dan Gratis Kabupaten Muara Enim, sebanyak 195.731 jiwa. Pembayaran iuran ini berdasarkan jumlah peserta terdaftar aktif pada awal bulan berjalan dan peserta susulan dan bayi baru lahir pada bulan berjalan;
- Pembayaran Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Mandiri selama 12 bulan, Pembayaran Bantuan Iuran Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Mandiri sebanyak 7809 jiwa. Pembayaran iuran ini berdasarkan jumlah peserta terdaftar aktif pada bulan berjalan;
- Terlaksananya kegiatan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program JKN dengan jumlah peserta 62 orang;
- Terlaksananya kegiatan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Rujukan dengan jumlah peserta 62 orang;
- Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi program JKN dan program rujukan di 24 puskesmas dan 7 rumah sakit;
- Menghadiri Pertemuan JKN Tingkat Provinsi sebanyak 2 kali dan menghadiri pertemuan Rujukan/Sisrute Tingkat Provinsi sebanyak 2 kali;
- Melakukan Pertemuan dan Rekonsiliasi dengan BPJS



- Kesehatan 4 kali, Pertemuan dan rekonsialiasi Pajak Rokok 1 kali di Kantor BPJS Kesehatan Kedeputusan Wilayah III Palembang;
- Pertemuan Lintas Sektor Program JKN (Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan di Kabupaten Muara Enim, Forum Kemitraan Fasyankes di Kabupaten Muara Enim) sebanyak 2 kali yang di Fasilitas oleh BPJS Kesehatan;
 - Konsultasi Program JKN dan program rujukan ke Dinas Kesehatan Provinsi sebanyak 2 kali.
- y. Sub Kegiatan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah dengan anggaran sebesar Rp. 109.826.700,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 90.031.800,00 atau sebesar 81,98%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Pengadaan alat rapid test urine sebanyak 300 buah serta pelaksanaan pendampingan skrining penyalahgunaan NAPZA di 6 sekolah dan 270 siswa di Kabupaten Muara Enim.
- z. Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional dengan anggaran sebesar Rp. 304.900.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.152.500,00 atau sebesar 6,61%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
- Terlaksananya kegiatan pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional sebanyak 50 sampel dengan hasil 3 sampel dinyatakan positif pertusis, 6 sampel positif campak, 1 positif rubella dan telah dilakukan tindak lanjut.
 - Pengambilan, Pengepakan, Pengiriman dan pemeriksaan spesimen HPV DNA ke laboratorium rujukan sebanyak 114 sampel dengan hasil 6 positif HPV DNA dan telah ditindak lanjut.
- aa. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dengan anggaran sebesar Rp. 226.879.140,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 180.812.761,00 atau sebesar 79,70%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan KKS dan Forum Kabupaten Sehat berupa penyediaan alat tulis kantor; terselenggaranya rapat/evaluasi Tim Pembina, Tim Teknis



maupun Forum Kabupaten Sehat sebanyak 16 kali; terlaksananya kegiatan bimbingan teknis ke 11 kecamatan; terlaksananya evaluasi penyelenggaraan KKS ke 6 kecamatan; konsultasi dan koordinasi ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 4 kali, dan pengambilan penghargaan Swasti Saba ke Kementerian Kesehatan.

- bb. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan, Hibah PMI) dengan anggaran sebesar Rp. 653.815.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 93.900.000,00 atau sebesar 14,36%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Belanja Bahan Bakar dan Pelumas (oli genset dan radiator genset), Refill/Isi Tabung Pemadam Kebakaran, Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Alat Kesehatan Habis Pakai dan Reagen Laboratorium Labkesda), Belanja makan minum, Belanja ATK, Belanja Cetak, Belanja Perabot Kantor, Belanja Jasa Pemantapan Mutu Eksternal (PME), Belanja Jasa Pemusnahan Limbah Padat dan Cair Labkesda, Belanja Jasa Konsultansi Lingkungan, Belanja Jasa Kalibrasi, Belanja pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Operasional, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah, Belanja Setor Pelatihan, Belanja Pemeliharaan AC, Belanja Pemeliharaan Komputer, Belanja Modal Alat Semprot Rumput, Belanja Modal AC 1 PK dan AC Standing Floor, Belanja Modal Mesin Penghancur Kertas, Belanja Modal Komputer, Printer, dan UPS 4 unit, Belanja Modal Laptop 1 unit, dan Belanja Modal Alat Laboratorium Umum.
- cc. Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 220.201.336,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 182.317.014,00 atau sebesar 82,80%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terakreditasinya Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Muara Enim. Pada saat ini, 7 Rumah sakit terakreditasi, 24 Puskesmas terakreditasi, 28 Klinik terakreditasi, 1 Laboratorium terakreditasi, dan 1 UTD terakreditasi. Terdapat peningkatan jumlah fasyankes terakreditasi yaitu 5 Fasyankes klinik, 2 Puskesmas, serta 1 UTD.
- dd. Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat



Massal) dengan anggaran sebesar Rp. 107.270.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 90.660.000,00 atau sebesar 84,52%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pertemuan Kelompok Kerja Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (POKJA KIPI) bagi Koordinator Imunisasi (KORIM) dan dokter/perawat dari 24 Puskesmas di Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 dengan jumlah peserta 48 orang.

ee. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah dengan anggaran sebesar Rp. 62.470.300,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 52.824.000,00 atau sebesar 84,56%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) dengan peserta dari 24 Puskesmas.

ff. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) dengan anggaran sebesar Rp. 394.381.099,90 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 393.738.641,00 atau sebesar 99,84%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah:

- Terlaksananya pembayaran Jasa Tenaga Kesehatan Non-ASN pada Kegiatan PSC 119 untuk periode Januari-Desember 2025;
- Pengadaan Extrafooding/Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh Susu Bearbrand sebanyak 1950 kaleng untuk 13 lokasi, masing-masing 150 kaleng.
- Terlaksananya pembayaran Sewa Alat Komunikasi PSC 119 selama 12 bulan;
- Terlaksananya pertemuan Peningkatan Kapasitas Tim PSC 119 MANTAP dan Jejaring dalam Tatalaksana Kegawatdaruratan Medis Pra-Fasyankes di Kabupaten Muara Enim dengan jumlah peserta 58 orang;
- Terlaksananya 353 Kegiatan Pelayanan PSC 119 dan P3K/event di Kabupaten Muara Enim;
- Terlaksananya kegiatan Rujukan Pasien ke Rumah Sakit sebanyak 6 Kali;
- Terlaksananya Kegiatan PSC 119 Penanggulangan Bencana sebanyak 5 Kali.

gg. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis dengan anggaran sebesar Rp.



- 148.419.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 120.087.000,00 atau sebesar 80,91%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah pencetakan formulir pasien TB, workshop TBC bagi kader, serta pemantauan pengobatan pasien TBC.
- hh. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV (ODHIV) dengan anggaran sebesar Rp. 73.925.300,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 59.923.900,00 atau sebesar 81,06%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengiriman sampel viral load ke RSMH Palembang melalui Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, konfirmasi kasus HIV Loss to Follow Up di Puskesmas, pencetakan 16 banner, pertemuan On the Job Training (OJT) konselor bagi pengelola HIV Puskesmas dan Rumah Sakit dengan 44 peserta, serta pertemuan kader HIV sebanyak 15 orang.
- ii. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria dengan anggaran sebesar Rp. 369.294.864,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 305.824.790,00 atau sebesar 82,81%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan BMHP berupa RDT, kelambu, dan reagen yang didistribusikan ke 24 Puskesmas; monitoring dan evaluasi program bagi pengelola program malaria; pelatihan kader di Puskesmas; pelaksanaan penyelidikan epidemiologi (PE) untuk kasus malaria baru; serta pemetaan daerah reseptif untuk mengidentifikasi tempat perindukan nyamuk di wilayah Kabupaten Muara Enim.
- jj. Sub Kegiatan Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok dengan anggaran sebesar Rp. 255.382.900,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 203.792.400,00 atau sebesar 79,80%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya belanja bahan lainnya berupa pencetakan 85 roll banner dan 2.200 leaflet; monitoring dan evaluasi upaya berhenti merokok serta makan-minum kegiatan rapat Kawasan Tanpa Rokok sebanyak 3 kali; serta pertemuan upaya berhenti merokok selama 2 hari dengan jumlah peserta 48 orang.
- kk. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dengan anggaran sebesar Rp. 63.611.540,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.412.703,00 atau sebesar 74,53%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah



terlaksananya belanja pencetakan Kartu Calon Pengantin Sehat sebanyak 1.191 lembar; pertemuan rapat koordinasi lintas sektor pelayanan kesehatan calon pengantin dengan 24 peserta (pengelola program calon pengantin Puskesmas se-Kabupaten Muara Enim); perjalanan dinas luar daerah sebanyak 1 kali ke Dinas Kesehatan Provinsi; serta perjalanan dinas dalam daerah untuk monitoring dan evaluasi Program Kesehatan Calon Pengantin dan KB di 4 Puskesmas (Gunung Megang, Gelumbang, Muara Belida, dan Pajar Bulan).

ll. Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak dengan anggaran sebesar Rp. 304.824.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 165.200.400,00 atau sebesar 54,20%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah:

- Terlaksananya kegiatan Pertemuan Verifikasi dan analisis data *Maternal Perinatal Death Notification* (MPDN) serta audit kasus kematian maternal dan perinatal yang diikuti oleh 62 Peserta, terdiri dari bidan koordinator dan penanggung jawab aplikasi MPDN di 24 puskesmas, penanggung jawab aplikasi MPDN di RSUD Pemerintah dan Swasta dari Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih.
- Terlaksananya pemeriksaan sampel bayi baru lahir (SHK) sebanyak 1.433 sampel.

mm. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Imunisasi dengan anggaran sebesar Rp. 325.640.400,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 275.522.200,00 atau sebesar 84,61%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah:

- Penyediaan alat tulis kantor kegiatan imunisasi;
- Terlaksananya pertemuan evaluasi program imunisasi yang dihadiri 24 orang pengelola imunisasi puskesmas.
- Terlaksananya pertemuan validasi data imunisasi yang dihadiri 72 peserta, terdiri dari 24 pimpinan puskesmas, 24 pengelola imunisasi dan 24 bidan koordinator puskesmas.
- Terlaksananya supervisi suportif program imunisasi sebanyak 14 kunjungan ke puskesmas.
- Terlaksananya konsultasi program imunisasi dan pengambilan logistik ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 5 kali.

nn. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji dengan



anggaran sebesar Rp. 48.218.600,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.816.972,00 atau sebesar 82,58%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah:

- Belanja barang habis pakai meliputi belanja alat tulis kantor sebanyak 8 jenis, belanja cetak spanduk, belanja makanan dan minuman rapat Pertemuan Program Haji sebanyak 2 kali pertemuan, serta belanja jasa kantor untuk honorarium Narasumber sebanyak 4 JPL dalam rangka Pertemuan Program Haji.
- Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka Pendampingan Pembinaan dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji Kabupaten Muara Enim Tahun 2026 di 10 puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan haji di Muara Enim.
- Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yang meliputi perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan pengambilan Vaksin Meningokokus dan Poliomyelitis, perjalanan dinas dalam rangka pengawalan dan pendampingan keberangkatan Jamaah Haji Kabupaten Muara Enim Tahun 1446H/2025, perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan pendampingan Kepulangan Jamaah Haji Kabupaten Muara Enim Tahun 1446H/2025, dan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pertemuan bimbingan teknis bagi petugas pemeriksa kesehatan haji di Palembang serta perjalanan dalam rangka kegiatan koordinasi program kesehatan haji terkait Akun Siskohatkes dan Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji Tahun 2026.

3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 18.755.089,00 dengan realisasi sebesar Rp. 17.464.000,00 atau sebesar 93,12%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan buku profil kesehatan tahun 2023 sebanyak 26 buku yang telah di distribusikan ke Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, instansi terkait dan 22 puskesmas.



4. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 74.664.287,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 73.159.059,00 atau sebesar 97,98%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan monitoring dan pengawasan bersama serta pengawasan rutin terhadap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Muara Enim, sosialisasi mekanisme pengawasan dan evaluasi perizinan fasilitas pelayanan kesehatan, sosialisasi perizinan dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Puskesmas dan RSUD Dr. H. M. Rabain Muara Enim.
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 144.629.599,94 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 134.640.297,00 atau sebesar 93,09%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) dan Indikator Kinerja Pelayanan (IKP) meliputi 7 Rumah Sakit, 24 Puskesmas, 32 Klinik, 1 Laboratorium, dan 1 Unit Transfusi Darah (UTD). Berdasarkan hasil monitoring melalui dashboard Mutu Fasyankes pada laman *mutufasyankes.kemkes.go.id*, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila diperlukan, diperoleh data keterisian INM dan IKP sebesar 100 persen. Dengan demikian, secara fisik kegiatan pengukuran INM dan IKP terlaksana 100%.

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan



Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar Rp. 5.901.908.448,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.026.201.600,00 atau 85,16%. Program ini terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dan 3 (Tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar dengan anggaran sebesar Rp. 4.662.860.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.944.320.000,00 atau sebesar 84,59%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah tersedianya sebanyak 229 orang tenaga kontrak di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim yang meliputi Dinas Kesehatan, 3 RSUD, Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), dan Gudang Farmasi. Tenaga kontrak tersebut terdiri atas 2 orang apoteker, 9 orang dokter spesialis, 6 orang dokter umum dan dokter gigi, serta 212 orang tenaga administrasi lainnya.
- b. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 64.556.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 51.493.500,00 atau sebesar 79,77%. Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah:
 - Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi penyelenggaraan labkesmas, kegiatan bimbingan teknis penyelenggaraan labkesmas tingkat I ke 24 puskesmas, dan kegiatan evaluasi penyelenggaraan labkesmas.
 - Jumlah Dokumen hasil pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan sebanyak 1 Dokumen.

2. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ dengan anggaran sebesar Rp. 1.174.492.448,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.030.388.100,00 atau sebesar 87,73%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah:



- Terlaksananya Pertemuan Koordinasi Teknis petugas promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan jumlah peserta 24 orang dari 24 puskesmas;
- Terlaksananya Pelatihan Digital Keterampilan Dasar Kader Posyandu dengan jumlah peserta sebanyak 60 kader dari Kecamatan Muara Enim dan Lawang Kidul;
- Terlaksananya Pelatihan Komunikasi Antar Pribadi dilakukan sebanyak 2 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 44 orang terdiri dari petugas promosi kesehatan, pengelola posyandu puskesmas, petugas gizi Puskesmas dan bidan desa;
- Terlaksananya Bimbingan Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu dalam pengelolaan Posyandu Prima dan Posyandu dalam Transformasi Layanan Primer yang dilaksanakan di 3 lokasi yaitu Puskesmas Teluk Lubuk, Puskesmas Benakat dan Puskesmas Gunung Megang (Dana BOK);
- Terlaksananya pertemuan Advokasi dan Koordinasi Kelompok Kerja Operasional Posyandu, Puskesmas, Camat, PKK, dan Mitra dalam Pengelolaan Pustu dan Posyandu dalam Transformasi Layanan Primer yang dilakukan dalam 2 Angkatan dengan jumlah peserta 32 orang per angkatan.

D. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Alokasi anggaran untuk Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sebesar Rp. 544.778.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 428.507.843,00 atau 78,66%. Program ini terdiri dari 3 (Tiga) Kegiatan dan 3 (Tiga) Subkegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perizinan Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

- a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tingkat Lanjut Pengawasan Perizinan Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) dengan anggaran sebesar Rp. 91.817.300,00 dan realisasi sebesar Rp. 83.416.740,00 atau sebesar 90,85%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
 - Telah diterbitkan rekomendasi teknis perizinan baru apotek/toko obat sebanyak 13 sarana, serta rekomendasi



teknis perpanjangan/perubahan perizinan apotek/toko obat sebanyak 19 sarana.

- Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi, dan pengawasan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) di wilayah Kabupaten Muara Enim yang meliputi apotek dan toko obat sebanyak 30 sarana.
- Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis tindak lanjut hasil pengawasan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar) di wilayah Kabupaten Muara Enim dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang.

2. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produksi Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

- a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan, Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRTP sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 263.935.900,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 225.558.880,00 atau sebesar 85,46%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terselenggaranya pemenuhan komitmen pelaku usaha P-IRT melalui kegiatan Bimbingan Teknis Penyuluhan Keamanan Pangan kepada 42 pelaku usaha, dilanjutkan dengan pengawasan dan pemeriksaan 42 sarana IRTP, terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi SPPIRT 1 kali, serta kegiatan Orientasi HSP dan Penjamah Makanan siap saji 1 kali.

3. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi dan Produk Makanan Industri Rumah Tangga

- a. Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 189.025.600,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 119.532.223,00 atau sebesar 63,24%. Adapun output dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan bimbingan teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik kepada 40 pelaku usaha P-IRT, dilanjutkan dengan kegiatan



pemeriksaan 10 sarana IRTP, pemeriksaan sampel produk IRTP sebanyak 25 sampel dan Food Security pada pasar menjelang Ramadhan, Kegiatan Kabupaten sebanyak 4 kali, serta Pemeriksaan Jajanan Anak sekolah ke 4 sekolah.

E. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar Rp. 608.291.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 481.396.070,00 atau 79,14%. Program ini terdiri dari 3 (Tiga) Kegiatan dan 3 (Tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 82.613.700,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 75.401.000,00 atau sebesar 91,27%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
 - Terlaksananya kegiatan Seminar Kesehatan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-80 di Kabupaten Muara Enim dengan jumlah peserta 140 orang.
 - Terlaksananya kegiatan pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan bagi remaja di 5 lokasi sekolah dengan masing-masing lokasi diikuti oleh 45 siswa;

2. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat dengan anggaran sebesar Rp. 244.269.300,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 187.277.600,00 atau sebesar 76,67%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah:
 - Pengadaan spanduk kegiatan hari-hari besar sebanyak 148 m spanduk berbagai tema hari-hari besar;
 - Terlaksananya kegiatan Penyuluhan Germas dengan Mobil Keliling di 6 lokasi (Desa Keban Agung, Desa Gemawang, Desa Belimbing Jaya, Desa Gunung Megang Dalam, Desa Lubuk Nipis, dan Desa Pinang Belarik);
 - Terlaksananya kegiatan Kaji Tiru Kampung Germas ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
 - Terlaksananya Kegiatan Iklan Layanan Masyarakat



(Radio Spot). Kegiatan bekerjasama dengan Radio Serasan Kamajaya 100,8 FM, dengan jumlah spot sebanyak 30 spot. Iklan layanan masyarakat ini berisi mengenai informasi-informasi kesehatan;

3. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Pembinaan/Pelatihan Satuan Karya Pramuka (Saka) Bhakti Husada, Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat TK SD Sekolah Menengah dan Sederajat dengan anggaran sebesar Rp. 281.408.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 218.717.470,00 atau sebesar 77,72%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah:

- Terlaksananya pembinaan Saka Bhakti Husada ranting Puskesmas sebanyak 4 ranting SBH Puskesmas;
- Terlaksananya Pembinaan Posyandu & UPGK ke 14 Posyandu dalam wilayah Kabupaten Muara Enim;
- Terlaksananya kegiatan pelatihan Keterampilan Dasar Kader Posyandu bagi nakes dan kader posyandu sebanyak 2 angkatan dengan jumlah peserta 30 orang per angkatan dari 22 kecamatan di Kabupaten Muara Enim.
- Terlaksananya pertemuan Bimtek Kelompok Kerja Operasional Posyandu dalam pengelolaan posyandu prima dan posyandu dalam transformasi layanan primer. Kegiatan ini dilakukan di 4 lokasi yaitu Puskesmas Muara Belida, Puskesmas Sukarami, Puskesmas Pajar Bulan dan Puskesmas Pulau panggung dengan jumlah kader sebanyak 35 orang;
- Terlaksananya penilaian lomba posyandu berprestasi tingkat Kabupaten Muara Enim;

3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten



Muara Enim Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Meningkatnya Lingkungan Sehat	Indeks Keluarga Sehat	0,70	0,63	90
2.	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,49 Tahun	74,82 Tahun	100,44

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Target 2025	Sasaran (sesuai SK Bupati)	Total Capaian 2025	
				Realisasi	% Cakupan
1		2	3	4	5
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	10.315	95.56	91.97
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	9.917	80.75	91.62
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	9.815	12.37	91.32
4.	Pelayanan Kesehatan Anak Balita mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	47.083	92.64	95.06
5.	Pelayanan Kesehatan Anak Pada Usia Pendidikan Dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	23.320	91.38	99.96
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Usia 15 s/d 59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	418.999	87.59	93.71
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (60 Tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	54.388	93.28	99.38



Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)		Target 2025	Sasaran (sesuai SK Bupati)	Total Capaian 2025	
				Realisasi	% Cakupan
1		2	3	4	5
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	120.865	99.51	99.19
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	7.735	72.95	99.02
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	1.291	89.80	97.68
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	11.971	65.41	124.31
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan sesuai standar	100%	15.983	80.71	104.36

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil mendapatkan pelayanan sesuai standar sebesar 91.97% belum mencapai target yang ditetapkan karena data sasaran kurang tepat, masih banyak ibu hamil melakukan kunjungan awal pada TW II dan TW III, kurangnya pengetahuan ibu tentang pemeriksaan kehamilan, capaian pelayanan di fasilitas swasta tidak terlapor, faktor geografis yang sulit, dan sasaran yang berpindah tempat.	Akan dilakukan transformasi sistem pelayanan kesehatan primer yang bertujuan untuk mendekatkan layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat melalui Integrasi Layanan Primer (ILP) sampai ke desa. Selain itu adanya cek kesehatan gratis keliling (Cekling Membara) hingga ke desa diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Mengintegrasikan semua program yang ada di Dinas Kesehatan serta memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sehingga pengetahuan masyarakat dan penderita mengenai kesehatan semakin bertambah.
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar capaian di tahun 2024 sebesar 91.62%, capaian	sda.



No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
	ini belum sesuai dengan target dikarenakan terjadinya kasus abortus, proses kehamilan kurang berkembang dengan baik, masih ada persalinan dirumah, ibu bersalin di fasilitas kesehatan lain/swasta tidak terdata/terlaporkan, sasaran yang berpindah tempat, dan kurangnya monitoring dan evaluasi secara berkala.	
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar belum mencapai target sebesar 91,32 karena pengelola program tingkat puskesmas selalu berganti ganti sehingga kualitas sistem pencatatan dan pelaporan serta pelayanan belum maksimal. Selain itu, karena bayi yang lahir di pelayanan kesehatan swasta dan ditolong non nakes tidak terlapor/terdata.	sda.
4.	Pelayanan kesehatan anak balita mendapatkan pelayanan sesuai standar belum mencapai target sebesar 95.06% karena masih ada balita yang tidak memantau pertumbuhan dan perkembangannya ke Posyandu/Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pengelola program tingkat puskesmas selalu berganti ganti sehingga kualitas sistem pencatatan dan pelaporan serta pelayanan belum maksimal.	sda.
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar belum mencapai target yaitu sebesar 99.96% karena sering bergantinya pengelola program sehingga mempengaruhi sistem pencatatan dan pelaporan dan terdapat siswa yang tidak hadir saat skrining dilakukan.	sda.
6.	Capaian Pelayanan kesehatan pada usia produktif usia 15 s/d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar masih dibawah target yaitu 93.71 % hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan	sda.
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (60 tahun) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar belum mencapai target sebesar 99.38% dikarenakan kurangnya partisipasi	sda.



No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
	usia lanjut melakukan pelayanan kesehatan di posyandu.	
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar capaian di tahun 2025 sebesar 99.19%. capaian ini masih dibawah target dikarenakan Penderita Hipertensi merasa tidak ada keluhan sehingga tidak melakukan pemeriksaan dan minum obat secara rutin tiap bulan.	sda.
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar belum mencapai target yaitu sebesar 99.02% hal ini dikarenakan penderita Diabetes Mellitus merasa sehat, dan merasa tidak perlu untuk memeriksa gula darah secara rutin dan mengambil obat secara rutin.	sda.
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 97.68% hal ini dikarenakan masih kurangnya ketersediaan obat.	sda.
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sebesar 124.31%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan TB, telah melampaui target. Keberhasilan tersebut di dukung dengan gencarnya kegiatan cekling dan desaku libas TB membara yang menyasar sampai ke pelosok desa serta optimalisasi penemuan kasus, peningkatan akses layanan kesehatan didukung dengan tersediannya alat TCM, kendaraan mobil cekling yang dilengkapi dengan pemeriksaan CKG, PTM dan skrining TB . Serta peran aktif tenaga kesehatan dan masyarakat dalam deteksi dini	sda.
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan sesuai standar sebesar 104.36% capaian ini mencerminkan meningkatnya cakupan pelayanan HIV di kelompok sasaran seperti (ibu hamil, pasien TB, kelompok waria, kelompok LSL, kelompok wps, pasien IMS, warga binaan di lapas, penasun dan catin). pelaksanaan layanan tes dan konseling HIV di faskes berjalan optimal. Integrasi layanan HIV dengan program lain (KIA,TB dan IMS).	sda.



No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
	Ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap seperti alat tes HIV dan obat Anti Retroviral (ARV).	

5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Prestasi yang diperoleh Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 antara lain:

1. Penghargaan dalam Pengendalian Stunting
2. Penanggulangan dan Pencegahan Aids - Tuberkulosis - Malaria (ATM)
3. Swasti Sara Padapa, Keberhasilan Dalam Menyelenggarakan Kabupten/Kota Sehat Tahun 2025
4. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten/Kota Terbaik Tahun 2025 Wilayah Regional I
5. Penghargaan drg. Nia Trisna sebagai Terbaik I Kategori Dokter Gigi Teladan Pada Penganugerahan SDM Kesehatan di Fasyankes Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dan Terbaik I Kategori Dokter Gigi Teladan Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
6. Penghargaan Asnara, S.Gz sebagai Terbaik I Kategori Tenaga Gizi Teladan pada Penganugerahan SDM Kesehatan di Fasyankes Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dan Terbaik I Kategori Tenaga Gizi Teladan Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
7. Penghargaan Feni Agita, A.Md. Far sebagai Terbaik II Kategori Tenaga Kefarmasian Teladan pada Penganugerahan SDM Kesehatan di Fasyankes Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dan Terbaik I Tenaga Kefarmasian Teladan Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
8. Penghargaan Puspa Oktarina, A.Md.KL sebagai Terbaik I Tenaga Sanitasi Lingkungan Teladan pada Penganugerahan SDM Kesehatan di Fasyankes Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dan Terbaik I Tenaga Sanitasi Lingkungan Teladan Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
9. Penghargaan dr. Henri Azis, Sp. A., M. Kes. sebagai Terbaik I Kategori Tenaga Dokter Teladan Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
10. Penghargaan dr. Endah Meliza Tasti sebagai Terbaik II Kategori Tenaga Dokter Teladan Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025



11. Penghargaan drg. Anggun Dwi Jaya Lestari sebagai Terbaik II Kategori Tenaga Dokter Gigi Teladan Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
12. Penghargaan Ns. Eti Suharti, S.Kep sebagai Terbaik I Kategori Tenaga Perawat Teladan Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
13. Penghargaan Ns. Okta Bidasari, S.Kep sebagai Terbaik II Kategori Tenaga Perawat Teladan Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
14. Penghargaan Misdalifah, S.Kep, Ners sebagai Terbaik III Kategori Tenaga Perawat Teladan Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
15. Penghargaan Desi Ratna Sari, Am.Keb sebagai Terbaik I Kategori Tenaga Bidan Teladan Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
16. Penghargaan Sismaya Fitriko, Am.Keb sebagai Terbaik II Kategori Tenaga Bidan Teladan Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
17. Penghargaan Weni Riance, S.Keb sebagai Terbaik III Kategori Tenaga Bidan Teladan Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
18. Penghargaan Febrina Handayani, S.Gz sebagai Terbaik II Kategori Tenaga Gizi Teladan Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
19. Penghargaan Nurhidayati, A.Md.Gz Terbaik III Kategori Tenaga Gizi Teladan Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
20. Penghargaan Fitri Rohmawati, AMF sebagai Terbaik II Tenaga Kefarmasian Teladan Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
21. Penghargaan Apt. Diya Khairani, S.Farm sebagai Terbaik III Tenaga Kefarmasian Teladan Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
22. Penghargaan Lomba Balita Indonesia Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dari kategori 6-24 bulan Kabupaten Muara Enim meraih Juara Harapan 1

RSUD H. M. RABAIN

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan Wajib Kesehatan diselenggarakan oleh RSUD dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2025 alokasi belanja sebesar **Rp.233.739.720.092,37.00.-** dan terealisasi sebesar **Rp.207.812.801.801,86.-** atau sebesar **88,91%** dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

Belanja operasi dialokasikan sebesar **Rp.154.081.522.126,37.-** terealisasi sebesar **Rp.134.465.317.300,86.-** atau **87,29%** yang



diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja barang dan jasa anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. H. Mohamad Rabain yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja modal dialokasikan sebesar **Rp.79.658.197.966,00.-** terealisasi sebesar **Rp.73.347.848.501,00.-** atau **92,08%** yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Muara Enim dan anggaran belanja modal BLUD RSUD dr. H. Mohamad Rabain yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam lingkup RSUD dr. H. Mohamad Rabain Muara Enim.

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2025, RSUD dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim melaksanakan 2 (Dua) program, 3 (Tiga) kegiatan, dan 10 (Sepuluh) subkegiatan yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp.154.906.746.937,37,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp.133.465.294.389,86,00,-** atau **86,16%**. Program tersebut terdiri dari 2 (Dua) kegiatan, dan 2 (Dua) subkegiatan sebagai berikut.

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan:

- a. Subkegiatan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus dengan anggaran sebesar **Rp.6.060.120.012,00.-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.6.039.449.999,00.-** atau sebesar **99,66%**. Adapun indikator dan target dari subkegiatan ini adalah **Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan dengan target output sebanyak 7 Unit Kendaraan Mobil Ambulance dan Mobil Angkutan Jenazah** dengan capaian Output/keluaran sebesar **99,66%**.

2. Kegiatan Peningkatan pelayanan BLUD:

- a. Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dengan pagu anggaran sebesar **Rp.148.846.626.925,37 .-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.127.425.844.390,86.-** atau sebesar **85,61%**. Adapun indikator dan target dari sub kegiatan ini adalah **Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan** dengan target output 12 Bulan dengan capaian Output/keluaran sebesar **85,61**.



B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Alokasi anggaran untuk Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar **Rp.78.832.973.155,00.-** dengan realisasi sebesar **Rp.74.347.507.412,00.-** atau sebesar **94,31%**. Program tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan, dan 4 (empat) subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota:

- a. Subkegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit dengan pagu anggaran sebesar **Rp.10.000.000.000,00.-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.9.767.358.600,00.-** atau sebesar **97,67%**. Adapun indikator dan target dari subkegiatan ini adalah **Jumlah Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit dengan target output 4 gedung dan 4 dokumen** dengan capaian output/keluaran sebesar **97,67%**.
- b. Subkegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp.56.998.077.954,00.-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.52.898.829.213,00.-** atau sebesar **92,81%**. Adapun indikator dan target dari subkegiatan ini adalah **Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan dengan target output 682 Unit Alat Kesehatan** dengan capaian Output/keluaran sebesar **92,81%**.
- c. Subkegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan dengan pagu anggaran sebesar **Rp.11.834.895.201,00.-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.11.681.319.599,00.-** atau sebesar **98,70%**. Adapun indikator dan target dari subkegiatan ini adalah **Jumlah obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan dengan target output 5 Paket** dengan capaian output/keluaran sebesar **98,70%**.



3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Sesuai dengan target kinerja sasaran dalam Renstra, Capaian Indikator Kinerja RSUD dr. H. Mohamad Rabain pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perorangan	Peningkatan Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien	Pelayanan Publik	88,31%	87,92%	99,56%
			Standar Pelayanan Minimal (SPM)	84%	%	%
			Kinerja Keuangan	76,61%	85,61%	111,75%

Secara Umum RSUD dr. H. Mohamad Rabain Muara Enim pada Tahun 2025 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, hal ini dilihat dari rata-rata tingkatan pencapaian indikator kinerjanya sesuai target renstra perangkat daerah.

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1.	Kurangnya jumlah SDM yang dikarenakan imbas dari optimalisasi penempatan pegawai ASN PPPK dari RSUD dr. H. Mohamad Rabain ke Dinas lain;	Telah dilakukan pendidikan dan pelatihan teknis terhadap petugas/SDM yang mendukung pelayanan, serta telah dilaksanakannya seleksi penerimaan karyawan dengan status pegawai BLUD dengan menggunakan seleksi metode CAT guna memenuhi kekurangannya SDM RSUD dr. H. Mohamad Rabain;
2.	Pemenuhan sarana dan prasarana Pendukung yang membutuhkan pemeliharaan dan rehabilitasi yang cukup besar terutama ruang rawat inap pasien dan kondisi bangunan lainnya.	Dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung bangunan rawat inap bagi pasien dan dilakukan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendukung Pelayanan Maksimal melalui peningkatan Anggaran yang bersumber pada Pendapatan BLUD dan Dukungan dari APBD Kabupaten Muara Enim.
3.	Kondisi awal pasien yang berobat ke rumah sakit.	Melakukan survey kepuasan pelanggan di unit-unit pelayanan secara berkala; Tingkatkan pemahaman tufoksi kepada kepala unit, kepala instalasi agar bekerja sesuai dengan tugas pokok dan cascading sehingga kinerja baik bermuara pada



No	Permasalahan	Solusi
		pencapaian standar pelayanan yang ditetapkan;
4.	Beberapa standar yang ditetapkan terlalu tinggi.	Melakukan pemenuhan sarana dan prasarana dasar bagi pasien dan pengunjung sehingga dapat membuat pasien nyaman selama berada dilingkungan RSUD dr. H. Mohamad Rabain.

5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Prestasi yang diperoleh RSUD dr. H. Mohamad Rabain pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. RSUD dr. H. Mohamad Rabain meraih Penghargaan Terbaik ke-III (Ketiga) tingkat Nasional sebagai RS diampu Pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, Urologi, Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA) Tahun 2025.
2. RSUD dr. H. Mohamad Rabain meraih piagam penghargaan Bintang Tiga dari BPJS Kesehatan atas "Komitmen Transformasi Digital Pelayanan" Tahun 2025.



3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR)

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan Wajib Pekerjaan Umum diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim. Total Alokasi Belanja pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 845.934.853.149,04 (delapan ratus empat puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh sembilan koma nol empat rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 742.955.788.603,32 (tujuh ratus empat puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua koma tiga dua rupiah) atau sebesar 87,83%.

A. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek yang dialokasikan untuk membiayai belanja rutin seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dalam program dan kegiatan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim. Anggaran belanja operasi dialokasikan sebesar Rp 116.793.311.409,18 (seratus enam belas milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus sembilan koma satu delapan rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 104.742.453.602,00 (seratus empat milyar tujuh ratus empat puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua rupiah) atau sebesar 89,68%.

B. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi dalam program dan kegiatan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim. Anggaran belanja modal dialokasikan sebesar Rp729.141.541.739,86 (tujuh ratus dua puluh sembilan milyar seratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan koma delapan enam rupiah) dengan realisasi sebesar Rp638.213.335.001,32 (enam ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu satu koma tiga dua rupiah) atau sebesar 87,53%. Adapun program dan kegiatan, capaian indikator sasaran, program,



dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan target kinerja sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 – 2029 serta permasalahan dan solusi dapat dijelaskan sebagai berikut:

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim melaksanakan 10 program, 21 kegiatan, dan 79 sub kegiatan, yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini digunakan untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah kabupaten Muara Enim dan pelaksanaan grand design reformasi birokrasi. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp15.908.518.874,35 (lima belas milyar sembilan ratus delapan juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat koma tiga lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp11.479.378.283,00 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) atau 72,16%. Program ini terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan dan 29 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah untuk memenuhi amanat: a) Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; b) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan c) Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hasil dari kegiatan ini berupa ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan keuangan sebagai



akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Untuk target kinerja, telah tercapai sebesar 100%. Alokasi anggaran belanja untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2023 sebesar Rp121.408.468,00 (seratus dua puluh satu juta empat ratus delapan ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) terealisasi sebesar Rp110.278.900,00 (seratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) atau 90,83%. Terdiri dari 6 (enam) subkegiatan, yaitu:

- a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp39.191.900,00 (tiga puluh sembilan juta seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) dan realisasi sebesar Rp29.016.800,00 (dua puluh sembilan juta enam belas ribu delapan ratus rupiah) atau 74,04%. Output/keluaran subkegiatan ini berupa dokumen rencana kerja tahun 2026 dan dokumen perubahan rencana kerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja output sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan keluaran, yaitu dokumen RKA tahun 2026 dengan target kinerja telah tercapai 100%. Alokasi anggaran subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD tahun 2025 sebesar Rp9.159.100,00 (sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus rupiah) terealisasi sebesar Rp9.052.700,00 (sembilan juta lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) atau 98,84%.
- c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan keluaran (output), yaitu dokumen RKA Perubahan tahun 2025 sebanyak dengan target kinerja telah tercapai 100%. Alokasi anggaran subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD tahun 2025 sebesar Rp14.375.856,00 (empat belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dengan realisasi sebesar Rp13.992.300,00 (tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus rupiah) atau 97,33%.
- d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan keluaran (output), yaitu dokumen DPA tahun 2025 dan RAK tahun 2025 dengan target kinerja telah tercapai sebesar 100%. Alokasi anggaran subkegiatan Koordinasi dan



Penyusunan DPA-SKPD tahun 2025 sebesar Rp24.363.300,00 (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp24.315.400,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus rupiah) atau 99,80%.

- e. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan keluaran, yaitu dokumen DPA Perubahan tahun 2025 dan RAK Perubahan tahun 2025 dengan target kinerja telah tercapai sebesar 100%. Alokasi anggaran sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD tahun 2025 sebesar Rp27.920.156,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus lima puluh enam rupiah) realisasi sebesar Rp27.861.800,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah) atau 99,79%.
 - f. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD dengan keluaran, yaitu dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 dan dokumen laporan realisasi bulanan tahun 2025 dengan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tahun 2025 sebesar Rp6.398.156,00 (enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh enam rupiah) terealisasi sebesar Rp6.039.900,00 (enam juta tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) atau 94,40%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat a) PP Nomor 22 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah dan b) Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Alokasi anggaran kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tahun 2025 sebesar Rp10.612.845.391,18 (sepuluh milyar enam ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh satu koma satu delapan rupiah) terealisasi sebesar Rp7.725.345.439,00 (tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau 72,79%. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) subkegiatan sebagai berikut:



- a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dilaksanakan untuk pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan kepada ASN sebanyak 109 orang selama 12 (dua belas) bulan serta pembayaran gaji 13 dan 14 dengan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran subkegiatan ini sebesar Rp10.513.273.291,18 (sepuluh milyar lima ratus tiga belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu koma satu delapan rupiah) terealisasi sebesar Rp7.660.903.539,00 (tujuh milyar enam ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau 72,87%.
- b. Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dilaksanakan untuk penyusunan dokumen neraca keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Output/keluaran subkegiatan ini berupa dokumen neraca sebanyak 2 buku dengan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran belanja untuk subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD tahun 2025 sebesar Rp25.991.900,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah) terealisasi Rp21.265.400,00 (dua puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) atau 81,82%.
- c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan output/keluaran berupa laporan keuangan akhir tahun sebanyak 2 buku. Dengan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tahun 2025 sebesar Rp36.901.200,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus satu ribu dua ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp16.527.500,00 (enam belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau 44,79%.
- d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan keluaran/output berupa laporan keuangan bulanan sebanyak 12 buku dan laporan semesteran sebanyak 2 buku. Alokasi anggaran subkegiatan ini sebesar Rp36.679.000,00 (tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp26.649.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) atau 72,65%.



3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah memiliki 1 (satu) subkegiatan, yaitu Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan indikator kinerja berupa jumlah premi asuransi kendaraan bermotor barang milik daerah dengan target sebanyak 8 (delapan) unit dan realisasi sebanyak 8 atau 100%. Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan ini sebesar Rp52.864.725,00 (lima puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau 99,31%.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memiliki 1 (satu) Subkegiatan, yaitu Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan indikator kinerja berupa jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam 1 tahun capaian kinerja sebesar 50%. Keluaran/output subkegiatan ini berupa jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan sebanyak 5 (lima) orang dalam 1 tahun. Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan ini sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) terealisasi sebesar Rp61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau 37,27%.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendukung operasional dengan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp1.399.597.770,00 (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp1.074.964.545,00 (satu milyar tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) atau 76,81%. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah terdiri dari 7 (tujuh) subkegiatan, yaitu:

- a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor berupa 6 jenis alat Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Selama 1 tahun,



dengan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran belanja untuk Sub Kegiatan ini sebesar Rp35.326.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp33.375.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau 94,48%.

- b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga berupa jumlah dan jenis peralatan yang dipenuhi dengan output (keluaran) 1 paket perabot kantor dan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan ini sebesar Rp32.338.570,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) teralisasi sebesar Rp31.320.600,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah) atau 96,85%.
- c. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan jenis Komponen adalah jumlah dan jenis Bahan Logistik Kantor dan jenis Komponen yang disediakan dengan output (keluaran), yaitu Jumlah dan jenis alat tulis kantor berupa 35 jenis di tahun 2025, Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan ini sebesar Rp150.425.300,00 (seratus lima puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp45.064.100,00 (empat puluh lima juta enam puluh empat ribu seratus rupiah) atau 29,96%.
- d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan adalah jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan output(keluaran) berupa 7 jenis cetakan yaitu, amplop kop dinas, lembar disposisi, box arsip besar kop dinas, cetak spanduk, karangan bunga, map kop dinas, dan fotocopy. Target kinerja telah tercapai sebesar 100% Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan ini sebesar Rp99.135.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp52.415.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah) atau 52,87%.
- e. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Output/keluaran berupa surat kabar sebanyak 41 eksemplar selama 12 bulan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan ini sebesar Rp98.400.000,00 (sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) terealisasi sebesar



Rp43.980.000,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau 44,70%.

- f. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Output/keluaran subkegiatan ini berupa laporan hasil koordinasi dan konsultasi sebanyak 12 buku. Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan ini sebesar Rp966.114.000,00 (sembilan ratus enam puluh enam juta seratus empat belas ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp859.919.845,00 (delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) atau 89,01%.
 - g. Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan output/keluaran berupa arsip dinamis dan arsip statis, dengan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan ini sebesar Rp17.858.900,00 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp8.890.000,00 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau 49,78%.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Output/keluaran kegiatan ini berupa Jumlah Unit kendaraan mobil dinas/jabatan dan jumlah kendaraan motor dinas/ jabatan tercapai dengan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan ini sebesar Rp1.470.880.358,17 (satu milyar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus lima puluh delapan koma tujuh satu rupiah) terealisasi sebesar Rp1.269.955.252,00 (satu milyar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh dua rupiah) atau 86,34%. Subkegiatan ini terdiri dari 2 (dua) subkegiatan sebagai berikut:
- a. Subkegiatan Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp334.902.400,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua ribu empat ratus rupiah) dan realisasi sebesar Rp333.860.250,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau 99,69%. Output/keluaran subkegiatan ini berupa belanja modal kantor, yaitu Filing Cabinet 4 Laci Type D4A sebanyak 4 unit; Lemari Arsip Pintu Sleding Glass Type



sebanyak 5 buah; Mesin Penghancur Kertas sebanyak 2 unit; Kursi Kerja sebanyak 40 Buah; dan Meja Kerja Pegawai sebanyak 40 Unit dengan capaian kinerja sebesar 100%.

- b. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.135.977.958,17 (satu milyar seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan koma satu tujuh rupiah) dan realisasi sebesar Rp936.095.002,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan puluh lima ribu dua rupiah) atau 82,40%. Output/keluaran subkegiatan ini berupa belanja modal alat laboratorium mekanika tanah dan batuan sebanyak 9 jenis; belanja modal personal komputer sebanyak 10 unit; dan belanja modal peralatan personal computer sebanyak 4 jenis dengan capaian kinerja sebesar 100%. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran pada belanja pengadaan peralatan dan mesin disebabkan besarnya perbedaan harga satuan yang tersedia pada aplikasi SIPD dengan harga pasar.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan ini dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan operasional kantor dengan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan ini sebesar Rp651.839.500,00 (enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp385.255.163,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus enam puluh tiga rupiah) atau 59,10%. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) subkegiatan, yaitu:

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan output/keluaran berupa penyediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos, yaitu meterai sebanyak 300 lembar tercapai sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk subkegiatan ini sebesar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan realisasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau 89,29%.
- b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik output/keluaran subkegiatan ini berupa pembayaran rekening Telepon, Air PDAM, Listrik, dan Internet selama 12 bulan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran belanja untuk subkegiatan ini



sebesar Rp258.699.500,00 (dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) teralisasi sebesar Rp225.815.163,00 (dua ratus dua puluh lima juta delapan ratus lima belas ribu seratus enam puluh tiga rupiah) atau 87,29%

- c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor output/keluaran berupa pembiayaan perbaikan Komputer sebanyak 15 unit dan Printer sebanyak 25 unit dan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran belanja untuk subkegiatan ini Sebesar Rp.28.200.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) atau 3,90%.
- d. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan output/keluaran berupa penyediaan tenaga kebersihan kantor dan UPTD sebanyak 14 orang selama 1 tahun; operator komputer sebanyak 11 orang, dan tenaga keamanan kantor dan UPTD sebanyak 8 orang selama 1 tahun dan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran belanja sebesar Rp361.580.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) teralisasi sebesar Rp155.340.000,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atau 42,96%.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk pengamanan barang milik daerah sesuai amanat PMDN 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.434.082.662,00 (satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dengan realisasi sebesar Rp799.578.984,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) atau 55,76%. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan output/keluaran berupa pemeliharaan kendaraan dinas sebanyak 44 jenis dengan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran belanja



untuk subkegiatan ini sebesar Rp1.211.742.662,00 (satu milyar dua ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) terealisasi sebesar Rp691.426.587,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau 57,06%. Rendahnya capaian realisasi pada subkegiatan ini dipengaruhi oleh belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang terealisasi sebesar 40,45%.

- b. Subkegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan output pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muara Enim. Alokasi anggaran belanja untuk subkegiatan ini sebesar Rp191.840.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp101.552.397,00 (seratus satu juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 52,94%.
- c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dengan output beban jasa service AC sebanyak 40 unit dengan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi Anggaran belanja untuk sub kegiatan ini sebesar Rp30.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah) atau 21,64%.

B. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini dilaksanakan untuk:

Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana irigasi pada daerah irigasi kewenangan kabupaten dengan indikator kinerja yaitu rasio luas daerah irigasikewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi sebesar 100% di mana sebanyak 214 daerah irigasi kewenangan kabupaten sesuai Permen PU 14 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan Kewenangan Daerah Irigasi telah memiliki jaringan irigasi. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp98.066.348.772,69 (sembilan puluh delapan milyar enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma enam sembilan rupiah) realisasi kinerja sebesar Rp84.866.148.117,00 (delapan puluh empat milyar delapan ratus enam puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu seratus



tujuh belas rupiah) atau 86,54%. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) subkegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Subkegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing dengan pagu anggaran sebesar Rp53.870.495.772,69 (lima puluh tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma enam sembilan rupiah) terealisasi sebesar Rp51.184.510.615,00 (lima puluh satu milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus lima belas rupiah) atau 95,01%.
 - b. Subkegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku dengan pagu anggaran sebesar Rp8.030.182.600,00 (delapan milyar tiga puluh juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah) realisasi sebesar Rp6.380.664.400,00 (enam milyar tiga ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah) atau 79,46%. Output/keluaran subkegiatan ini berupa belanja jasa konsultasi konstruksi, yaitu Masterplan Sumber Daya Air / Penyediaan Air Baku di Kabupaten Muara Enim; Kajian dan DED Pembangunan Kolam Retensi Kel Pasar II dan III Kec Muara Enim; dan penyusunan dokumen konsultansi konstruksi lainnya dengan capaian kinerja sebesar 75% dikarenakan terdapat tiga kegiatan yang tidak terlaksana, yaitu DED Tembok Penahan Tanah Jalan Terminal Regional-Karang Raja; Kajian Teknis dan DED Bangunan Perkuatan Tebing Sungai Enim (Desa Bedegung sampai Desa Pulau Panggung Enim); dan Review desain kajian teknis dan DED pengendalian banjir kota muara enim.
2. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja berupa presentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Kegiatan ini dicapai melalui 4 (empat) subkegiatan sebagai berikut:
 - a. Subkegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, dengan pagu sebesar Rp25.793.409.700,00 (dua puluh lima



milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp17.579.788.900,00 (tujuh belas milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) atau 68,16%. Output/keluaran dari subkegiatan ini berupa pembangunan 11 (sebelas) jaringan irigasi di lima kecamatan, yaitu SDU sebanyak 4 jaringan; SDL sebanyak 2 jaringan; SDT sebanyak 2 jaringan; Tanjung Agung sebanyak 2 jaringan; dan Panang Enim sebanyak 2 jaringan. Capaian kinerja subkegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan sebesar 88,49% dikarenakan terdapat dua kegiatan yang tidak selesai sampai dengan 31 Desember dan akan diberi perpanjangan waktu pengerjaan di tahun 2026.

- b. Subkegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, dengan pagu sebesar Rp8.706.844.100,00 (delapan milyar tujuh ratus enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp8.562.700.000,00 (delapan milyar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau 98,34%. Output/keluaran subkegiatan ini berupa rehabilitasi jaringan irigasi sebanyak 14 dan capaian kinerja 100%.
- c. Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan dengan pagu sebesar Rp517.222.300,00 (lima ratus tujuh belas juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp506.785.000,00 (lima ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau 97,98%. Output/keluaran subkegiatan ini berupa 1 (satu) paket kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kabupaten Muara Enim dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- d. Subkegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp499.888.200,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan realisasi sebesar Rp203.611.630,00 (dua ratus tiga juta enam ratus sebelas ribu enam ratus tiga puluh rupiah) atau 40,73%. Output/keluara subkegiatan ini berupa pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada lembaga pengelola irigasi dengan capaian kinerja sebesar 100%.



- e. Subkegiatan Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi, dengan pagu sebesar Rp648.306.100,00 (enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam ribu seratus rupiah) realisasi sebesar Rp448.087.572,00 (empat ratus empat puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) atau 69,12%.

C. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum, dengan indikator kinerja persentase penduduk berakses air minum target tahun 2025 sebesar 79,26% dan realisasi sebesar 76,06%. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum tahun 2025 sebesar Rp26.693.343.190,00 (dua puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh tiga ribu seratus sembilan puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp25.977.403.908,00 (dua puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) atau 97,32%. Program ini dilaksanakan melalui satu kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan pagu anggaran sebesar Rp327.764.829,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah) realisasi sebesar Rp148.779.600,00 (seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) atau 45,39%. Output/keluaran subkegiatan ini berupa Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya dan capaian kinerja sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Penyusunan Rencana Kebijakan, Strategi, dan Teknis SPAM, dengan pagu anggaran sebesar Rp2.069.195.000,00 (dua milyar enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp2.006.197.500,00 (dua milyar enam juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau 96,96%. Output/keluaran dari subkegiatan ini berupa belanja jasa konsultasi konstruksi sebanyak 3 kegiatan, yaitu Penyusunan Rencana Pengembangan SPAM IKK Karang Asam



Kabupaten Muara Enim; Penyusunan Rencana Pengembangan SPAM IKK Talang Gabus Kabupaten Muara Enim; dan Appraisal Jasa Upah Penilaian Bangunan Untuk Sistem Penyediaan Air Minum dengan capaian kinerja sebesar 100%.

- c. Subkegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan, dengan pagu anggaran sebesar Rp22.484.043.616,00 (dua puluh dua milyar empat ratus delapan puluh empat juta empat puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah) terealisasi sebesar Rp22.029.024.884,00 (dua puluh dua milyar dua puluh sembilan juta dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) atau 97,98%. Output/keluaran kegiatan ini berupa pembangunan sistem penyediaan air minum yang merupakan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat sebanyak 41 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- d. Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.812.339.745,00 (satu milyar delapan ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) terealisasi sebesar Rp1.793.401.924,00 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus satu ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) atau 98,96%. Output/keluaran subkegiatan ini berupa belanja persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat sebanyak 7 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 100%.

D. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan fasilitas pengurangan sampah dengan indikator kinerja berupa persentase cakupan ketersediaan fasilitas pengurangan sampah dan alokasi anggaran sebesar Rp25.343.655.511,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus sebelas rupiah) terealisasi sebesar Rp25.241.515.511,00 (dua puluh lima milyar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus lima belas ribu lima ratus sebelas rupiah) atau 99,60%. Program ini memiliki satu kegiatan dan satu subkegiatan, yaitu Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS. Output/keluaran subkegiatan ini berupa belanja barang untuk



diserahkan kepada masyarakat berupa pembangunan TPS 3R sebanyak 8 unit dan belanja aset tetap sebanyak 1 paket serta 3 (tiga) paket belanja aset yang merupakan perpanjangan waktu pengerjaan kegiatan yang tidak selesai di tahun 2024 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

E. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini dilaksanakan untuk pemenuhan pelayanan pengelolaan air limbah domestik di rumah tangga dengan alokasi pagu anggaran untuk program ini sebesar Rp22.827.495.190,00 (dua puluh dua milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh rupiah) dengan realisasi sebesar Rp21.703.800.277,00,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus tiga juta delapan ratus ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 95,08%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota dan 4 (empat) subkegiatan sebagai berikut:

- a. Subkegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman dengan pagu anggaran sebesar Rp21.947.549.600,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) realisasi sebesar Rp21.099.771.777,00 (dua puluh satu milyar sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 96,14%. Output/keluaran dari subkegiatan ini berupa belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat yaitu pembangunan jamban dan tangki septik sebanyak 19 kegiatan dan belanja uang yang diberikan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat sebanyak 14 kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan capaian kinerja 98,11% dikarenakan terdapat 1 kegiatan yang tidak selesai sampai dengan tanggal 31 Desember sehingga diberi perpanjangan waktu di tahun 2026, yaitu "Pembangunan Jamban dan Tangki Septik untuk MBR di Desa Lubai Persada Kecamatan Lubai Ulu" dengan realisasi fisik sebesar 58%.
- b. Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dengan pagu anggaran sebesar Rp226.224.590,00 (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh



rupiah) realisasi sebesar Rp22.487.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) atau 9,94%. Output/keluaran dari subkegiatan ini berupa Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara dengan capaian kinerja sebesar 15%. Rendahnya penyerapan anggaran pada sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ini dikarenakan sampai dengan saat ini UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik belum dapat beroperasi karena masih menunggu ketersediaan operator pelayanan dan pengelolaan lumpur tinja, sehingga anggaran yang dipakai hanya digunakan untuk perawatan kendaraan berupa mobil tangki tinja dan sepeda motor tangki tinja serta biaya administrasi untuk keperluan kantor UPTD.

- c. Subkegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dengan pagu anggaran sebesar Rp151.201.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus satu ribu rupiah) realisasi sebesar Rp84.305.900,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus rupiah) atau 55,76%. Output/keluaran subkegiatan ini berupa penyelenggaraan pembinaan kepada masyarakat terkait pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik target kinerja sebanyak 20 orang peserta pembinaan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Rendahnya penyerapan anggaran pada subkegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) disebabkan oleh Belanja Perjalanan Dinas Biasa yang hanya terealisasi sebesar 30,76% dan Belanja Makanan dan Minuman Rapat yang tidak terealisasi.
- d. Subkegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPALD) alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp502.520.000,00 (lima ratus dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan realisasi sebesar Rp497.235.600,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah) atau 98,95%. Output/keluaran subkegiatan ini berupa belanja jasa konsultasi konstruksi sebanyak 1 paket, yaitu Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah



Domestik (RISPALD) Kabupaten Muara Enim dengan capaian kinerja sebesar 100%.

F. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi luasan kawasan permukiman rawan banjir dengan alokasi anggaran sebesar Rp65.178.495.837,00 (enam puluh milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) terealisasi Rp59.587.662.471,00 (lima puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) atau 91,42%. Program ini terdiri dari satu kegiatan dan 4 (empat) subkegiatan sebagai berikut:

- a. Subkegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan dengan pagu anggaran sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat milyar empat ratus juta rupiah) realisasi sebesar Rp2.783.806.200,00 (dua milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam ribu dua ratus. Output/keluaran subkegiatan ini berupa pembangunan SPAL dengan target sebanyak 8 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 85,42% dikarenakan terdapat satu kegiatan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2025 dan diberi perpanjangan waktu pengerjaan pada tahun 2026, yaitu Pembangunan SPAL Desa Pinang Belarik yang hanya terealisasi sebesar 25% dan terdapat satu kegiatan yang batal dilaksanakan, yaitu Pembangunan SPAL di Aspol Perwira Talang Jawa.
- b. Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp317.868.324,00 (tiga ratus tujuh belas juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dan realisasi sebesar Rp104.840.000,00 (seratus empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) atau 32,98%.
- c. Subkegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dengan pagu anggaran sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) terealisasi sebesar Rp2.921.941.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) atau 88,54%. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa rehab/perbaikan saluran drainase sebanyak 8 kegiatan dengan capaian kinerja



sebesar 97,5% dikarenakan terdapat satu kegiatan yang tidak selesai pada tahun 2025 dengan realisasi fisik 81,22%, yaitu Rehab Siring Jalan Laskar A Tohir Kel Pasar III Muara Enim dan diperpanjang waktu pengerjaannya pada tahun 2026.

- d. Subkegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dengan pagu anggaran sebesar Rp57.160.627.513,00 (lima puluh tujuh milyar seratus enam puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tiga belas rupiah) realisasi sebesar Rp53.777.075.271,00 (lima puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) atau 94,08%. Output/keluaran subkegiatan ini berupa pembangunan drainase perkotaan sebanyak 114 kegiatan dengan capaian kinerja sebesar 96,79% dikarenakan terdapat 7 kegiatan yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2025 dan diperpanjang waktu pengerjaannya pada tahun 2026.

G. Program Penataan Bangunan Gedung

Tujuan Program Penataan Bangunan Gedung adalah meningkatnya Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis bangunan sesuai fungsinya. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Penataan Bangunan Gedung sebesar Rp77.333.325.790,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp44.829.080.340,00 (empat puluh empat milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan puluh ribu tiga ratus empat puluh rupiah) atau 57,97%. Pada Program tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Keluaran (output) dari pelaksanaan masing-masing subkegiatan dari kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Subkegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp56.333.927.500,00 (lima puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) realisasi sebesar Rp25.510.707.700,00 (dua puluh lima milyar lima ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh ribu tujuh



ratus rupiah) atau 45,28%. Output/keluaran subkegiatan ini berupa belanja konsultansi sebanyak 5 kegiatan dan belanja modal sebanyak 12 paket, yaitu Rehab Eks Rumah Dinas Wakil Bupati Muara Enim dan Rehab Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan Bupati Muara Enim. Capaian kinerja subkegiatan ini sebesar 65%. Tidak maksimalnya capaian realisasi subkegiatan ini dipengaruhi oleh dua paket pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu Rehab Rumah Dinas Jabatan Bupati Muara Enim dan Rehab Rumah Dinas Jabatan Wakil Bupati Muara Enim.

- b. Subkegiatan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten / Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp2.389.896.990,00 (dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan realisasi sebesar Rp2.300.590.000,00 (dua milyar tiga ratus juta lima ratus sembilan puluh ribu atau 96,26%. Output/keluaran subkegiatan ini berupa belanja jasa konsultansi konstruksi sebanyak 5 dokumen, yaitu DED Rencana Pembangunan Kantor BPN Muara Enim; Feasibility Study Pembangunan Kantor Bupati Muara Enim Di Islamic Center Muara Enim; DED Penataan Kantor DPRD Muara Enim; DED Pembangunan Gudang Arsip Sekretariat Daerah Kab. Muara Enim; dan Kajian Teknis dan DED Pembangunan Kantor Camat Panang Enim dan capaian kinerja sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota dengan pagu anggaran sebesar Rp17.696.024.000,00 (tujuh belas milyar enam ratus sembilan puluh enam juta dua puluh empat ribu rupiah) realisasi sebesar Rp16.623.334.000,00 (enam belas milyar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) atau 93,94%. Output/keluaran subkegiatan ini berupa belanja modal sebanyak 9 paket pekerjaan dengan capaian kinerja 87,27% dikarenakan terdapat satu kegiatan yang tidak diselesaikan pada tahun 2025 dan akan diperpanjang waktu pengerjaannya pada tahun 2026, yaitu Pembangunan Pagar Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Muara Enim dengan realisasi fisik 85,47%.



- d. Subkegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG. Alokasi anggaran untuk subkegiatan ini sebesar Rp913.477.300,00 (sembilan ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp394.448.640,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan enam ratus empat puluh rupiah) atau 43,18%.

H. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemantapan jalan kewenangan kabupaten kota dengan capaian kinerja sebesar 92,79% atau nilai Baik. Program penyelenggaran jalan di tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp510.823.003.284,00 (lima ratus sepuluh milyar delapan ratus dua puluh tiga juta tiga ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah) terealisasi sebesar Rp459.091.867.640,32 (empat ratus lima puluh sembilan milyar sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 89,87%. Dilaksanakan melalui sebanyak 1 kegiatan dan 14 subkegiatan sebagai berikut:

- a. Subkegiatan Pengelolaan Leger Jalan dengan pagu anggaran sebesar Rp53.102.800,00 (lima puluh tiga juta seratus dua ribu delapan ratus rupiah) realisasi sebesar Rp20.006.000,00 (dua puluh juta enam ribu rupiah) atau 37,67%.
- b. Subkegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan. Dengan pagu anggaran Rp4.877.521.945,00 (empat milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) terealisasi sebesar Rp3.680.022.187,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh juta dua puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) atau 75,45%. Adapun output dari subkegiatan ini berupa dokumen perencanaan pengembangan jaringan jalan/perencanaan teknis penyelenggaran jembatan dengan target sebanyak 9 dokumen, yaitu Penyusunan Data Kondisi Jalan dan Jembatan Tahun 2025 Kabupaten Muara Enim; Perencanaan Ruas Jalan Kabupaten Muara Enim untuk Kegiatan DAK Tahun 2025; Penyusunan Pengembangan



Jaringan Jalan di Kecamatan Lawang Kidul; Penyusunan Pengembangan Jaringan Jalan di Kecamatan Rambang; Amdal Pembangunan Flyover Ruas Jalan Sp. Kepur - Transad; Kajian Teknis dan Inspeksi Pembangunan Jembatan Rangka Baja Sungai Lematang Desa Danau Baru - Danau Tampang; Kajian Teknis dan DED Pembangunan Jembatan Rangka Baja Sungai Lematang Desa Banuayu Kec.Empat Petulai Dangku; DED Penggantian Jembatan Gantung Belakang Pemda Muara Enim; Review DED Pelebaran Ruas Jalan Pulau Panggung - Segamit dengan capaian kinerja sebesar 100%.

- c. Subkegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp105.703.900,00, (seratus lima juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah) realisasi sebesar Rp48.846.440,00 (empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau 46,21%.
- d. Subkegiatan Penggantian Jembatan dengan pagu anggaran sebesar Rp3.840.620.000,00 (tiga milyar delapan ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) realisasi sebesar Rp3.812.053.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua belas juta lima puluh tiga ribu rupiah) atau 99,26%. Output/keluaran dari subkegiatan ini berupa belanja modal penggantian jembatan sebanyak 4 (empat) kegiatan yang mana 2 (dua) di antaranya merupakan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2024 dan diperpanjang waktu pengerjaan pada tahun 2025 dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- e. Subkegiatan Pembangunan Jalan dengan pagu anggaran Rp46.457.133.924,00 (empat puluh enam milyar empat ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) terealisasi sebesar Rp45.916.684.824,00 (empat puluh lima milyar sembilan ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) atau 98,84%. Sub kegiatan ini merupakan pekerjaan pembukaan jalan baru yang mana trase jalan belum ada menjadi ada (dalam kondisi tanah). Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa belanja modal pembangunan jalan sebanyak 8 paket



pekerjaan, yang mana salah satu di antaranya merupakan utang pekerjaan tahun 2024. Dalam subkegiatan ini juga dilaksanakan kegiatan Pembangunan Jalan Menuju Jembatan Rangka Baja Sungai Lematang Kec. Empat Petulai Dangku yang dianggarkan sebesar Rp32.500.000.000 (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan capaian kinerja sebesar 100%.

- f. Subkegiatan Rekonstruksi Jalan dengan pagu anggaran sebesar Rp311.910.815.303,00 (tiga ratus sebelas milyar sembilan ratus sepuluh juta delapan ratus lima belas ribu tiga ratus tiga rupiah) dengan realisasi sebesar Rp276.277.392.860,00 (dua ratus tujuh puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah) atau 88,58%. Sub kegiatan ini merupakan pekerjaan peningkatan lapisan perkerasan yang ada misalnya dari perkerasan agregat menjadi lapisan beton atau lapisan aspal ataupun dari lapisan tanah menjadi agregat atau lapisan beton atau lapisan aspal. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa panjang jalan yang direkonstruksi dengan target sepanjang 112.273,20 m. Dalam subkegiatan ini, terdapat satu kegiatan yang dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK), yaitu Peningkatan Jalan Desa Talang Nangka - Batas Kab.Pali (Desa Pandan). Capaian kinerja subkegiatan ini sebesar 94,56% dikarenakan terdapat 17 paket pekerjaan yang diperpanjang waktu pengerjaannya di tahun 2026.
- g. Subkegiatan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp29.468.240,00 (dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah) realisasi sebesar Rp15.930.650,00 (lima belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah) atau 54,06%.
- h. Subkegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar dengan pagu anggaran Rp15.100.000.000,00 (lima belas milyar seratus juta rupiah) terealisasi sebesar Rp14.754.182.200,00 (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah) atau 97,71%. Sub kegiatan



ini merupakan pekerjaan pelebaran jalan agar sesuai dengan standar, yaitu dengan lebar menjadi 4,5 – 5 meter.

- i. Subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jembatan dengan pagu anggaran sebesar Rp521.528.100,00 (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah) terealisasi sebesar Rp506.728.000,00 (lima ratus enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) atau 97,16%. Adapun output subkegiatan ini berupa operasional pemeliharaan jembatan dengan realisasi kinerja pemeliharaan jembatan sebanyak 15 unit atau sebesar 100%. Subkegiatan ini dilaksanakan secara swakelola berupa pembelian barang dan pembayaran jasa dimana tenaga kerja yang diberdayakan berasal dari masyarakat setempat.
- j. Subkegiatan Rehabilitasi Jembatan dengan pagu anggaran sebesar Rp10.250.000.000,00 (sepuluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) terealisasi sebesar Rp9.526.298.000,00 (sembilan milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) atau 92,94%. Subkegiatan ini merupakan pekerjaan rehabilitasi jembatan (jembatan gantung, jembatan pipa) dapat berupa pengecatan, perbaikan plat, dan pipa. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa jumlah jembatan yang direhab dengan target 15 unit dan realisasi 13 unit atau 84,67%.
- k. Subkegiatan Pembangunan Jembatan dengan pagu anggaran sebesar Rp35.489.703.942,00 (tiga puluh lima milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) terealisasi sebesar Rp27.403.545.249,32 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh sembilan koma tiga dua rupiah) atau 77,22%. Subkegiatan ini merupakan pekerjaan pembangunan jembatan berupa jembatan gantung, jembatan pipa, jembatan beton.
- l. Subkegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan dengan pagu anggaran sebesar Rp248.019.100,00 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan belas ribu seratus rupiah) realisasi sebesar Rp79.408.900,00 (tujuh puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah) atau 32,02%.
- m. Subkegiatan Rehabilitasi Jalan dengan pagu anggaran sebesar Rp80.417.849.130,00 (delapan puluh milyar empat ratus tujuh belas juta delapan ratus empat puluh sembilan



ribu seratus tiga puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp76.558.384.330,00 (tujuh puluh enam milyar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atau 95,20%. Subkegiatan ini merupakan pekerjaan memperbaiki kondisi jalan yang rusak kembali menjadi kondisi baik yang dapat dilalui dengan kecepatan 40 km/jam. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa panjang jalan direhabilitasi dengan target 44.772,31 M. Terdapat satu paket pekerjaan yang diperpanjang waktu pengerjaannya, yaitu Rehab Jalan Menuju MTS Desa Aremantai Kec.SDU dengan realisasi fisik 55,28%.

- n. Subkegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan pagu anggaran sebesar Rp1.521.536.900,00 (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp492.385.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) atau 32,36%. Subkegiatan ini merupakan pekerjaan tebas bayang yaitu membersihkan tanaman yang menutupi badan jalan. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa panjang jalan yang diperbaiki dengan capaian sebesar 33,33%.

I. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Tujuan program Pengembangan Jasa Konstruksi adalah peningkatan kualifikasi tenaga terampil konstruksi bersertifikat dan peningkatan kualifikasi usaha bagi badan usaha jasa konstruksi, tenaga terampil. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Pengembangan Jasa Konstruksi sebesar Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Pengembangan Jasa Konstruksi alokasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp101.448.900,00 (seratus satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) terealisasi Rp25.690.800,00 (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) atau 25,32%. Rendahnya penyerapan anggaran disebabkan oleh tidak terlaksananya belanja perjalanan dinas yang telah dianggarkan sebanyak Rp65.826.000,00. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan satu subkegiatan, yaitu Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota. Output (keluaran) dari subkegiatan tersebut adalah tersusunnya dokumen informasi material/peralatan di Kabupaten Muara Enim yaitu



sebanyak 1 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100%.

J. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dilaksanakan untuk meningkatkan ketaatan para pemangku kepentingan di bidang penataan ruang (pemerintah/swasta/masyarakat) terhadap tata ruang. Untuk meningkatkan ketaatan tersebut, maka dilaksanakan kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan dokumen yang mengatur terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, dokumen pengendalian penataan ruang serta upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Adapun alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yaitu sebesar Rp3.659.217.800,00 (tiga milyar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp3.271.642.791,00 (tiga milyar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) atau 89,41%.

Program ini terdiri dari 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan menetapkan Rencana Tata Ruang yang telah disusun menjadi produk hukum daerah sesuai dengan tahapan dalam aturan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dengan Indikator kinerja tingkat keberadaan peraturan rencana tata ruang. Adapun output (keluaran) dari kegiatan tersebut adalah jumlah dokumen peraturan rencana tata ruang dengan realisasi kinerja sebanyak 1 dokumen atau sebesar 100%. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.270.607.900,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp1.009.822.141,00 (satu milyar sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu seratus empat puluh satu rupiah) atau 79,48%. Pada tahun 2025, kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Subkegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota dengan tolak ukur output serta target dari sub kegiatan adalah jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen Revisi RTRW Kabupaten Muara Enim Tahun



2018-2038. Alokasi anggaran subkegiatan ini sebesar Rp456.944.700,00 (empat ratus lima puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp435.400.140,00 (empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu seratus empat puluh rupiah) atau 95,29% dan capaian kinerja sebesar 100%.

- b. Subkegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp469.600.100,00 (empat ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu seratus rupiah) dan realisasi sebesar Rp458.638.548,00 (empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) atau 97,67%. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa Dokumen Administrasi Persetujuan Substansi RDTR sebanyak 1 dokumen dan capaian kinerja sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp284.957.800,00 (dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan realisasi sebesar Rp64.439.503,00 (enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga rupiah) atau 22,61%. Rendahnya penyerapan anggaran pada subkegiatan ini disebabkan oleh tidak terlaksananya belanja cetak majalah tata ruang yang telah dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dikarenakan belanja tersebut dianggarkan pada APBD-P yang baru disahkan di akhir bulan Oktober. Dengan waktu yang terbatas, tidak ada penyedia yang bersedia melaksanakan belanja tersebut.
- d. Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp59.105.300,00 (lima puluh sembilan juta seratus lima ribu tiga ratus rupiah) dan realisasi sebesar Rp51.343.950,00 (lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau 86,87%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini berupa kegiatan sosialisasi kepada badan-badan dan masyarakat dengan target sebanyak 100 peserta dan realisasi kinerja sebanyak 100 peserta yaitu Sosialisasi



Peraturan Perundangan Dan Pedoman Bidang Penataan Ruang.

2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyelaraskan pelaksanaan penyusunan perencanaan tata ruang daerah yang dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pemangku kepentingan baik dari Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Adapun indikator kinerja untuk kegiatan ini adalah tingkat keselarasan antar dokumen rencana tata ruang dan output (keluaran) dari kegiatan tersebut adalah keselarasan antar dokumen rencana tata ruang. Pada Tahun 2025 untuk target kinerja telah tersebut telah tercapai sebesar 100% dimana antar dokumen rencana tata ruang yang disusun telah dilakukan penyelarasan antar pemangku kepentingan sesuai dengan pedoman penyusunan rencana tata ruang yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 (dua) sub kegiatan, sebagai berikut:
 - a. Subkegiatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota dengan tolak ukur serta target subkegiatan berupa dokumen RDTR yang disusun sebanyak 1 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk subkegiatan ini sebesar Rp1.567.391.400,00 (satu milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan realisasi sebesar Rp1.552.109.268,00 (satu milyar lima ratus lima puluh dua juta seratus sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) atau 99,02%.
 - b. Subkegiatan Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang dengan tolak ukur serta target sub kegiatan jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan yaitu sebanyak 100 orang. Adapun output (keluaran) dari sub kegiatan ini adalah fasilitasi pendidikan dan pelatihan sistem informasi geografis kegiatan peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang kepada 100 orang dengan capaian kinerja sebesar 100%. Adapun alokasi anggaran untuk subkegiatan Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang sebesar Rp151.325.000,00 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp147.400.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) atau 97,41%.



3. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator kinerja berupa tingkat kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang. Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp353.404.300,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat ribu tiga ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp325.899.600,00 (tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) atau 92,22% dan capaian kinerja sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) subkegiatan sebagai berikut:
 - a. Subkegiatan Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan tolak ukur dan target sub kegiatan ini adalah 1 (satu) layanan persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku. Alokasi anggaran sebesar Rp25.839.400,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp15.920.400,00 (lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) atau 61,61%. Adapun output (keluaran) subkegiatan ini berupa dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan target sebanyak 1 dokumen dan capaian kinerja sebesar 100%.
 - b. Subkegiatan Sistem Informasi Penataan Ruang dengan tolak ukur kinerja jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 1 Dokumen berupa Dokumen System Informasi Penataan Ruang dengan capaian kinerja sebesar 100%. target kinerja telah tercapai sebesar 100% melalui alokasi anggaran sebesar Rp327.564.900,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp309.979.200,00 (tiga ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) atau 94,63%.
4. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja adalah tingkat pengendalian pemanfaatan ruang. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang telah berlangsung. Adapun output (keluaran) dari kegiatan tersebut adalah tersedianya dokumen laporan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada tahun



2025 target kinerja tersebut telah tercapai sebesar 100% sedangkan untuk alokasi anggaran sebesar Rp316.489.200,00 (tiga ratus enam belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp236.411.782,00 (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) atau 74,70%. Untuk kegiatan ini terdapat 3 (tiga) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Subkegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK dengan tolak ukur output sub kegiatan yaitu dokumen tekstual dan spasial hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dengan target 2 dokumen. Adapun target kinerja pada tahun 2025 telah tercapai 100% dengan Alokasi anggaran subkegiatan ini sebesar Rp31.893.600,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp22.968.700,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) atau 72,02%.
- b. Subkegiatan Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang dengan tolak ukur output subkegiatan jumlah laporan pelaksanaan tugas dan fungsi forum penataan ruang target sebanyak 2 laporan dan capaian kinerja sebesar 100%. Alokasi anggaran untuk subkegiatan ini sebesar Rp253.742.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp194.865.782,00 (seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah) atau 76,80%.
- c. Subkegiatan Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat dengan indikator jumlah dokumen hasil penilaian kinerja pengaturan, pembinaan dan pelaksanaan penataan ruang dan penilaian kinerja fungsi dan manfaat. Adapun target kinerja pada tahun 2025 telah tercapai 100% melalui output (keluaran) dari sub kegiatan tersebut adalah 2 laporan pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang. Alokasi anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp30.853.600,00 (tiga puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dengan realisasi sebesar



Rp18.577.300,00 (delapan belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 60,21%.

3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realiasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Terpenuhinya infrastruktur berkualitas	Rata-Rata Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum	68,40		
		Terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Terhadap Rencana Tata Ruang	100	100	
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai SAKIP DPUPR	76,50		

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

-

5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Selama tahun 2025, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum memperoleh penghargaan dan prestasi.



4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan Wajib Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Muara Enim. Pada Tahun 2025, alokasi pendapatan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp. 21.410.000,- (dua puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) atau 20,08% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%. Realisasi Keuangan dan Output/Keluaran masih rendah dikarenakan sulitnya penagihan pembayaran kepada pemilik usaha permainan anak di Taman Adipura Muara Enim. Alokasi belanja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan sebesar Rp. 249.752.354.737,60,- (dua ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah koma enam puluh sen) dan terealisasi sebesar Rp. 197.238.065.389,- (seratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau 78,97% dan kinerja keluaran (output) sebesar 93,11% dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Operasional

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 77.880.369.624,60,- (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah koma enam puluh sen) terealisasi sebesar Rp. 72.865.234.670,- (tujuh puluh dua miliar delapan ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau 93,56%, yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 171.871.985.113,- (seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga belas rupiah) terealisasi sebesar Rp. 124.372.830.719,- (seratus dua puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) atau 72,36% yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintahan Kabupaten Muara Enim.



2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Terdiri dari 8 Program, 19 kegiatan dan 50 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 175.784.900,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 111.966.300,- atau 63,70% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, alokasi sebesar Rp. 12.051.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.206.100,- atau 68,09% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

Realisasi keuangan dan *output*/keluaran masih rendah dikarenakan penyerapan belanja ATK dan penggandaan yang kurang baik. Hal ini disebabkan harga satuan ATK dan penggandaan didasarkan pada harga pasar yang berlaku sehingga terjadi penghematan atau sisa anggaran.

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD alokasi sebesar Rp. 18.420.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.473.100,- atau 94,86% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, alokasi sebesar Rp. 24.837.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.368.000,- atau 65,90% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

Realisasi keuangan dan *output*/keluaran masih rendah dikarenakan penyerapan belanja ATK dan penggandaan yang kurang baik. Hal ini disebabkan harga satuan ATK dan penggandaan didasarkan pada harga pasar yang berlaku sehingga terjadi penghematan atau sisa anggaran.

d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, alokasi sebesar Rp. 36.427.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.271.900,- atau 63,89% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

Realisasi keuangan dan *output*/keluaran masih rendah dikarenakan:

1) Penyerapan belanja ATK dan penggandaan yang kurang baik. Hal ini disebabkan harga satuan ATK dan penggandaan didasarkan pada harga pasar yang berlaku



sehingga terjadi penghematan atau sisa anggaran.

- 2) Realisasi anggaran belanja pegawai honor tidak terserap sepenuhnya karena adanya penyesuaian status kepegawaian, di mana beberapa pegawai honor telah lulus dan diangkat sebagai PPPK.
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD alokasi sebesar Rp. 36.016.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.609.500,- atau 68,33% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.
Realisasi keuangan dan *output*/keluaran masih rendah dikarenakan :
 - 1) Penyerapan belanja ATK dan penggandaan yang kurang baik. Hal ini disebabkan harga satuan ATK dan penggandaan didasarkan pada harga pasar yang berlaku sehingga terjadi penghematan atau sisa anggaran.
 - 2) Realisasi anggaran belanja pegawai honor tidak terserap sepenuhnya karena adanya penyesuaian status kepegawaian, di mana beberapa pegawai honor telah lulus dan diangkat sebagai PPPK.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 7.295.215.246,60,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 5.890.941.293,- atau 80,75% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN alokasi sebesar Rp. 7.220.569.246,60,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.836.358.993,- atau 80,83% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD alokasi sebesar Rp. 37.568.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.865.100,- atau 71,51% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.
1. Realisasi keuangan dan *output*/keluaran masih rendah dikarenakan realisasi anggaran belanja pegawai honor tidak terserap sepenuhnya karena adanya penyesuaian status kepegawaian, di mana beberapa pegawai honor telah lulus dan diangkat sebagai PPPK.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD alokasi sebesar Rp. 37.077.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.717.200,- atau



74,76% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

Realisasi keuangan dan *output*/keluaran masih rendah dikarenakan realisasi anggaran belanja pegawai honor tidak terserap sepenuhnya karena adanya penyesuaian status kepegawaian, di mana beberapa pegawai honor telah lulus dan diangkat sebagai PPPK.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 65.814.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 65.218.215,- atau 99,09% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD alokasi sebesar Rp. 65.814.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 65.218.215,- atau 99,09% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 78.000.000,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 14.750.000,- atau 18,91% dan kinerja keluaran (output) sebesar 40%.

a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi alokasi sebesar Rp. 78.000.000,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 14.750.000,- atau 18,91% dan kinerja keluaran (output) sebesar 40%.

Realisasi keuangan dan *output*/keluaran masih rendah dikarenakan pegawai yang akan mengikuti pendidikan/pelatihan tersebut memiliki juga agenda kegiatan dilapangan diwaktu yang bersamaan dan juga sisa waktu tahun anggaran 2025 yang akan berakhir.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.229.045.110,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 1.209.427.389,- atau 98,40% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor alokasi sebesar Rp. 251.788.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 248.817.376,- atau 98,82% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor alokasi sebesar Rp. 103.171.610,- dengan realisasi sebesar Rp.



- 102.996.500,- atau 99,83% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan alokasi sebesar Rp. 35.683.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 35.683.000,- atau 100% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan alokasi sebesar Rp. 38.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 25.520.000,- atau 66,46% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.
Realisasi keuangan dan *output*/keluaran masih rendah dikarenakan kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai kebutuhan.
 - e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD alokasi sebesar Rp. 800.001.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 796.410.513,- atau 99,55% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 6.027.252.510,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 5.809.623.900,- atau 96,39% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan alokasi sebesar Rp. 2.750.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.719.408.500,- atau 98,89% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel alokasi sebesar Rp. 277.252.510,- dengan realisasi sebesar Rp. 276.989.400,- atau 99,91% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya alokasi sebesar Rp. 710.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 702.019.500,- atau 98,88% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp. 1.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 840.556.500,- atau 84,06% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.
 - e. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya alokasi sebesar Rp. 1.290.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.



1.270.650.000,- atau 98,50% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 263.510.000,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 182.133.353,- atau 69,12% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat alokasi sebesar Rp. 8.960.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.960.000,- atau 100% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik alokasi sebesar Rp. 131.370.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 120.613.353,- atau 91,81% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi sebesar Rp. 123.180.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 52.560.000,- atau 42,67% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

Realisasi keuangan dan *output*/keluaran masih rendah dikarenakan realisasi anggaran belanja pegawai honor tidak terserap sepenuhnya karena adanya penyesuaian status kepegawaian, di mana beberapa

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 984.793.227,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 945.173.533,- atau 95,98% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan alokasi sebesar Rp. 404.027.157,- dengan realisasi sebesar Rp. 375.989.533,- atau 93,06% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya alokasi sebesar Rp. 569.146.070,- dengan realisasi sebesar Rp. 567.804.000,- atau 99,76% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya alokasi sebesar Rp. 4.300.000,- dengan realisasi sebesar



Rp. 1.380.000,- atau 32,09% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

Realisasi keuangan dan *output*/keluaran masih rendah dikarenakan sarana dan prasarana gedung kantor masih dalam kondisi baik.

- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya alokasi sebesar Rp. 7.320.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0% dan kinerja keluaran (output) sebesar 0%.

Realisasi keuangan dan *output*/keluaran masih rendah dikarenakan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor masih dalam kondisi baik.

B. Program Pengembangan Perumahan

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Alokasi Anggaran sebesar Rp. 396.822.800,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 365.691.915,- atau 92,15% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

- a. Sub Kegiatan Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan alokasi sebesar Rp. 116.914.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 103.998.741,- atau 88,95% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.
- b. Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota alokasi sebesar Rp. 233.868.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 223.020.075,- atau 95,36% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.
- c. Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota alokasi sebesar Rp. 46.040.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 38.673.099,- atau 84,00% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

2. Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Alokasi Anggaran sebesar Rp. 205.233.600,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 152.126.986,- atau 74,12% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

- a. Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Mekanisme Pengganti Hak



atas Tanah dan/atau Bangunan alokasi sebesar Rp. 205.233.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 152.126.986,- atau 74,12% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

Realisasi keuangan dan *output*/keluaran masih rendah dikarenakan Penyerapan Anggaran Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap dilaksanakan sampai 8 bulan serta penyerapan belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan untuk kegiatan FGD hanya terealisasi untuk konsumsi kegiatan seminar sebesar Rp. 7.200.000,- karena biaya sewa gedung yang dianggarkan tidak digunakan untuk kegiatan FGD yang selanjutnya menggunakan gedung/ruang rapat milik BAPPEDA Kabupaten Muara Enim.

3. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Alokasi Anggaran sebesar Rp. 140.050.700,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 22.279.080,- atau 15,91% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota alokasi sebesar Rp. 140.050.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.279.082,- atau 15,91% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

Realisasi keuangan dan *output*/keluaran masih rendah dikarenakan tidak ada penyerapan anggaran makan minum rapat sebesar Rp. 1.556.000,- serta tidak ada penyerapan anggaran belanja jasa konsultansi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural spesifikasi: DED rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota sebesar Rp. 100.000.000,-. Hal ini disebabkan program relokasi perumahan dilakukan secara bertahap dan berjenjang dimana pada tahun 2025 dianggarkan survei kelayakan serta DED perencanaan pada Desa Gumay Kecamatan Gelumbang dan tahap pembangunan rumah pada tahun 2026. Setelah dilakukan peninjauan lapangan secara bersama dan rapat pembahasan lebih lanjut disepakati bahwa belum siapnya kondisi lapangan dikarenakan fasilitas akses jalan, akses listrik dan air yang masih cukup tinggi pembiayaan ataupun penganggarannya sehingga direkomendasikan mencari



alternatif lain. Hal ini secara tidak langsung mengubah penganggaran pembangunan rumah di tahun 2026 dan penundaan perencanaan DED di APBDP 2025 termasuk penyerapan makan minum.

4. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 147.876.900,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 134.024.864,- atau 90,63% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan alokasi sebesar Rp. 105.694.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.670.634,- atau 94,30% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum alokasi sebesar Rp. 42.182.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 34.354.230,- atau 81,44% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

C. Program Kawasan Permukiman

1. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di bawah 10 Ha Alokasi Anggaran sebesar Rp. 514.716.400,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 480.190.966,- atau 93,29% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP alokasi sebesar Rp. 514.716.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 480.190.966,- atau 93,29% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.
2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Alokasi Anggaran sebesar Rp. 47.001.089.300,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 46.497.028.409,- atau 98,93% dan kinerja keluaran (output) sebesar 99,73%.
 - a. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni alokasi sebesar Rp. 39.380.857.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 38.950.103.515,- atau 98,91% dan kinerja keluaran (output) sebesar 98,92%.



- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh alokasi sebesar Rp. 77.229.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 75.198.202,- atau 97,37% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.
- c. Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh alokasi sebesar Rp. 2.289.984.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.244.280.692,- atau 98,00% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.
- d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh alokasi sebesar Rp. 5.253.018.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.227.446.000,- atau 99,51% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

D. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 119.413.768.071,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 114.642.501.670,- atau 96,00% dan kinerja keluaran (output) sebesar 99,67%.
 - a. Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan alokasi sebesar Rp. 529.757.780,- dengan realisasi sebesar Rp. 517.801.108,- atau 97,74% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian alokasi sebesar Rp. 110.989.564.043,- dengan realisasi sebesar Rp. 107.874.228.847,- atau 97,19% dan kinerja keluaran (output) sebesar 98,34%.
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan alokasi sebesar Rp. 426.759.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 285.519.169,- atau 66,90% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.
Realisasi keuangan dan *output*/keluaran masih rendah dikarenakan :
 - 1) Pelaksanaan perjalanan dinas kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan digunakan sesuai dengan kebutuhan riil (bukti pengeluaran sah).



- 2) Tenaga Kerja Waktu Tertentu sebanyak 4 (empat) orang yang biasa melaksanakan Jasa Kantor sudah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Sehingga anggaran jasa kantor tidak bisa direalisasikan.
- d. Sub Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan alokasi sebesar Rp. 7.376.319.008,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.937.992.518,- atau 80,50% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.
- e. Sub Kegiatan Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang alokasi sebesar Rp. 91.368.040,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.960.028,- atau 29,51% dan kinerja keluaran (output) sebesar 75%.

Realisasi keuangan dan *output*/keluaran masih rendah dikarenakan :

- 1) Rendahnya realisasi belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor karena terjadi selisi harga antara DPA dengan harga riil toko karena untuk anggaran tahun 2025 belanja barang pakai habis sudah menggunakan katalog elektronik dan menyesuaikan harga yang ada dari pihak ketiga.
- 2) Rendahnya realisasi jasa tenaga operator komputer verifikasi dan penyerahan PSU karena tenaga kerja waktu tertentu sebanyak 2 (dua) sudah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sehingga anggaran jasa tenaga operator komputer tidak bisa direalisasikan.
- 3) Rendahnya realisasi belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan pada kegiatan verifikasi dan penyerahan PSU dikarenakan berdasarkan permohonan masyarakat terkait penyerahan PSU terhadap developer-developer yang tidak dapat dihubungi atau ditemui yang belum menyerahkan PSU. Maka berdasarkan Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2024 akan dilakukan pemanggilan developer melalui surat kabar atau media publik lainnya. Tetapi karena SDM dan kegiatan fisik tahun anggaran perubahan 2025 banyak sehingga bisa dilakukan sebanyak 3 kali pemanggilan developer melalui surat kabar itupun digabung untuk 3-4 developer



yang bermasalah melalui surat kabar sebanyak 3 (tiga) kali.

- 4) Rendahnya realisasi belanja perjalanan dinas dalam daerah pada kegiatan verifikasi dan penyerahan PSU perumahan dikarenakan koordinasi dilakukan melalui telpon dan penyerahan PSU saat ini fokus terhadap penyerahan PSU yang developernya tidak dapat dihubungi, sehingga anggaran perjalanan dinas luar kabupaten jarang dilakukan.

E. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Anggaran sebesar Rp. 205.613.195,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 114.017.739,- atau 55,45% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

- a. Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota alokasi sebesar Rp. 122.759.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 79.311.528,- atau 64,61% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

Realisasi keuangan dan *output*/keluaran masih rendah dikarenakan adanya biaya anggaran perjalanan dinas, ATK dan makan minum tidak terserap secara optimal dan sudah sesuai dengan kebutuhan riil (bukti pengeluaran sah).

- b. Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota alokasi sebesar Rp. 82.853.395,- dengan realisasi sebesar Rp. 34.706.211,- atau 41,89% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

Realisasi keuangan dan *output*/keluaran masih rendah dikarenakan adanya biaya anggaran perjalanan dinas, ATK dan makan minum tidak terserap secara optimal dan sudah sesuai dengan kebutuhan riil (bukti pengeluaran sah).

F. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Anggaran sebesar Rp. 64.302.284.955,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 19.472.301.684,- atau 30,28% dan kinerja keluaran (output) sebesar 73,90%.

- a. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelesaian



Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota alokasi sebesar Rp. 1.627.284.955,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 1.284.495.684,- atau 78,93% dan kinerja keluaran (output) sebesar 78,57%.

Realisasi keuangan dan *output*/keluaran masih rendah dikarenakan anggaran nilai kontrak disesuaikan dengan jumlah pemilik dan luasan lahan pada masing - masing kegiatan pengadaan tanah.

- b. Sub Kegiatan Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota alokasi sebesar Rp. 62.675.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.187.806.000,- atau 29,02% dan kinerja keluaran (output) sebesar 69,23%.

Realisasi keuangan dan *output*/keluaran masih rendah dikarenakan:

- 1) Pengadaan tanah untuk Pembangunan RS Rabain dan Puskesmas Tanjung Raya batal dikarenakan tidak adanya kesepakatan harga antara pemilik lahan dengan hasil penilaian KJPP.
- 2) Pengadaan tanah untuk Pembangunan jalan desa kasai dikarenakan adanya penolakan masyarakat terhadap usulan trase yang telah di buat Detail engineering Desain (DED) oleh Dinas PUPR sehingga tahapan pengadaan tanah tidak dapat dilaksanakan.
- 3) Pengadaan tanah untuk Pembangunan Kolam Retensi Kelurahan Pasar II dikarenakan adanya tumpang tindih kepemilikan lahan sehingga akan berpotensi menimbulkan konflik dilapangan.

G. Program Pengelolaan Tanah Kosong

- 1. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Alokasi Anggaran sebesar Rp. 915.309.354,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 739.743.478,- atau 80,82% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong alokasi sebesar Rp. 915.309.354,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 739.743.478,- atau 80,82% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.
- b.



H. Program Penatagunaan Tanah

1. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Anggaran sebesar Rp. 390.174.469,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 388.924.613,- atau 99,68% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah alokasi sebesar Rp. 390.174.469,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 388.924.613,- atau 99,68% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%.

3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	- Jumlah rumah korban bencana yang tertangani	5 Unit	0 Unit	0 %
			- Jumlah rumah yang terdampak relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten yang tertangani	5 Unit	0 Unit	0 %
			- Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani	1.000 Unit	1.463 Unit	146,30 %
		2. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	- Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani	0,5 Ha	6,79 Ha	1.358%
		3. Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	- Luas tanah milik pemerintah yang tercatat di KIB	5 Persil	9 Persil	180%



4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Masih rendahnya pendapatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan pada Tahun Anggaran 2025.	Meningkatkan pengawasan dan pendataan penyewa lokasi usaha permainan anak secara berkala, mengoptimalkan sistem penagihan retribusi, termasuk penjadwalan pembayaran yang lebih jelas, melakukan sosialisasi kepada penyewa terkait kewajiban pembayaran retribusi dan dasar hukumnya serta berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk penguatan regulasi dan penerapan sanksi administratif secara bertahap.
2.	Terdapat 10 paket kegiatan fisik yang belum selesai pada Tahun Anggaran 2025.	Diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan dengan tetap diberlakukan denda sesuai dengan kesepakatan.
3.	Terdapat 4 kegiatan pengadaan tanah yang tidak terealisasi pada Tahun Anggaran 2025	Akan dikaji ulang pada tahun anggaran selanjutnya.

5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Muara Enim mendapatkan 2 (dua) Perhargaan, yaitu :

1. Piagam Penghargaan dari Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim atas dukungannya dalam Program Tiga Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat di Deliniasi Perdesaan Melalui Program RTLH dalam APBD Sebanyak 1.504 Unit pada tanggal 19 Juni 2025.
2. Piagam Penghargaan dengan Nomor : 910/KPTS/DPKP/2025 dari Gubernur Sumatera Selatan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai JUARA I dalam BERES AWARD 2025 kategori Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Mendukung Program 3 Juta Rumah pada tanggal 08 Desember 2025.



5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (DPKP), BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

OPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2025, alokasi belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim sebesar Rp.20.212.105.652,- (Dua Puluh Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Seratus Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.17.310.099.044,- (Tujuh Belas Milyar Tiga Ratus Sepuluh Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 85,64 Persen, untuk membiayai belanja operasi dan belanja modal dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Operasional

Belanja Operasi dialokasikan sebesar **Rp. 19.508.595.549,- (Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp.16.624.949.112,- (Enam Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Belas Rupiah)** atau **85,22 Persen** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp.703.510.103,- (Tujuh Ratus Tiga Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Seratus Tiga Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp.685.149.932,- (Enam Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah)** atau **97,39 persen** yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kinerja Satpol PP dan menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim melaksanakan sebanyak 2 (dua) program dan 10 (Sepuluh) kegiatan, dan 42 (empat puluh dua) Subkegiatan yaitu:



A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Alokasi anggaran untuk program **penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota** sebesar **Rp.18.387.375.352,- (Delapan Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp.15.816.801.319,- (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Seribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah)** atau sebesar **86,02 Persen** program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan, dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah dengan anggaran sebesar **Rp.57.862.075- (Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah)** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.54.867.250,- (Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)** atau sebesar **94,82 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah 4 (Empat) dokumen yang terdiri dari Rencana Kerja Induk Satpol PP tahun 2026 dan Rencana Kerja Perubahan Satpol PP tahun 2025, Rancangan Renstra dan Renstra Final Tahun 2025-2029 sebanyak 4 (Empat) buku dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
- b. Subkegiatan Kordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 5.045.800,- (Lima Juta Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah)** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 4.935.140 (Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah)** atau sebesar **97,81 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah berupa 1 (Satu) dokumen yang terdiri atas Rencana Kerja dan Anggaran



- (RKA) Satpol PP tahun anggaran 2025 sebanyak 8 (Delapan) buku dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.6.068.600,- (Enam Juta Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah)** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.5.973.915,- (Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Belas Rupiah)** atau sebesar **98,44 Persen**. Adapun Output / Keluaran dari subkegiatan ini adalah berupa 1 (Satu) dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satpol PP tahun anggaran 2025 sebanyak 8 (Sepuluh) buku dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.16.410.000,- (Enam Belas Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.15.239.700,- (Lima Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah)** atau sebesar **92,87 Persen**. Adapun Output / Keluaran adalah berupa 1 (satu) dokumen DPA-SKPD Satpol PP tahun anggaran 2025 sebanyak 65 (Enam puluh lima) buku dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.19.840.700,- (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.19.351.520,- (Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah)** atau sebesar **97,53 Persen**. Adapun Output / Keluaran dari subkegiatan ini berupa 1 (satu) Perubahan dokumen DPA-SKPD Satpol PP tahun anggaran 2025 sebanyak 65 (Enam puluh lima) dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.



- f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.4.702.975,- (Empat Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.4.011.660,- (Empat Juta Sebelas Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah)** atau sebesar **85,30** Persen. Adapun Output / Keluaran dari subkegiatan ini berupa 4 (empat) laporan yang terdiri dari Dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP dan PK sebanyak 4 (Empat) buku dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar **Rp.11.805.144.075,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Lima Juta Seratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah)** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.9.818.276.631,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)** atau sebesar **83,17** Persen. Subkegiatan ini untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN yang direncanakan dengan target sebanyak 295 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima) orang, dengan realisasi sebanyak 291 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima) orang selama 12 (dua belas) bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 98,64 Persen. Terhadap realisasi keuangan yang hanya sebesar 83,17 Persen yang dikarenakan adanya kekosongan ASN di Satuan Polisi Pamong Praja baik 1 (Satu) Orang Kepala Satuan, 1 (Satu) Orang Kepala Bidang, dan 1 (Satu) Orang Kepala Seksi dan 2 (dua) Orang Staf.
- b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.7.590.100,- (Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Rupiah)** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.7.247.050,- (Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Rupiah)** atau sebesar **95,48** Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 (Satu) Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.



- c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan / Triwulan / Semester SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.14.962.500,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.12.895.510,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sepuluh Rupiah)** atau sebesar **86,19** Persen. Adapun Output / Keluaran dari subkegiatan ini adalah laporan keuangan bulanan / Triwulan / Semester SKPD sebanyak 12 (Dua belas) Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat daerah

- a. Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.3.107.500,- (Tiga Juta Seratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.2.746.900,- (Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah)** atau sebesar **88,40** Persen. Adapun Output / Keluaran dari subkegiatan ini adalah laporan penatausahaan barang milik daerah sebanyak 1 (Satu) Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan anggaran sebesar **Rp.9.600.000 (Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.9.600.000,- (Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)** atau sebesar 100 Persen. Adapun Output / Keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 (Satu) Paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen
- b. Subkegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dengan anggaran sebesar **Rp.3.221.700 (Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.3.027.400,- (Tiga Juta Dua**



Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) atau sebesar **93,97** Persen. Adapun Output / Keluaran dari subkegiatan ini adalah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian sebanyak 1 (Satu) Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen

- c. Subkegiatan Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas dengan anggaran sebesar **Rp.129.271.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.27.815.200,- (Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Rupiah)** atau sebesar **21,52** Persen. Adapun Output / Keluaran dari subkegiatan ini berupa 12 (Dua belas) laporan upacara persemayaman ASN yang meninggal dunia dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen. Terhadap realisasi keuangan yang hanya sebesar 21,52 Persen dikarenakan anggaran dialokasikan untuk persemayaman di luar daerah sebanyak 2 (kali) tidak terealisasi.
- d. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan anggaran sebesar **Rp.104.564.000,- (Seratus Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.80.513.452,- (Delapan Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah)** atau sebesar 77,00 Persen. dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik / Penerangan bangunan kantor dengan anggaran sebesar **Rp.17.640.800,- (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.16.439.000,- (Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** atau sebesar **93,19** Persen. Adapun Output / Keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 (satu) paket alat listrik terdiri dari 10 jenis dengan capaian output / keluaran sebesar 100 Persen.
- b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar **Rp.26.538.000,- (Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.25.386.000,- (Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)** atau sebesar **95,66**



Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 3 (Tiga) paket yaitu Isi Tabung Pemadam Kebakaran; Perabot Kantor terdiri dari 24 (dua puluh empat) jenis; Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) terdiri dari 2 (dua) jenis dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

- c. Subkegiatan Penyediaan Bahan logistik kantor dengan anggaran sebesar **Rp.594.280.800,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.453.629.325,- (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)** atau sebesar **76,33** Persen. Adapun Output / Keluaran dari subkegiatan ini adalah 3 (Tiga) Paket jenis bahan logistik yang terdiri dari Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk genset sebanyak 100 Liter dan untuk kendaraan operasional sebanyak 11.880 liter; Alat tulis kantor sebanyak 43 (Empat puluh tiga) jenis; makan dan minum anggota piket selama 12 bulan, dengan capaian output/keluaran sebesar 91,67 Persen.
- d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar **Rp.32.134.200,- (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.32.117.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)** atau sebesar **99,95** Persen. Adapun Output / Keluaran dari subkegiatan ini adalah 5 (Lima) Paket jenis barang cetakan dan penggandaan dengan capaian output / keluaran sebesar 100 Persen.
- e. Subkegiatan Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar **Rp.9.024.000,- (Sembilan Juta Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.4.980.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)** atau sebesar 55,19 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 (Satu) Dokumen surat kabar selama 12 (Dua Belas) bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen. Terhadap penyerapan realisasi keuangan yang tidak mencapai target dikarenakan belanja langganan surat kabar hanya terealisasi 3 (tiga) judul surat kabat dari target 7 (tujuh) judul surat kabar.



- f. Subkegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.911.327.082,74,- (Sembilan Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Dua Rupiah dan Tujuh Puluh Empat Sen)** realisasi keuangan sebesar **Rp.911.304.674,- (Sembilan Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)** atau sebesar 99.9 Persen. Adapun Output / Keluaran dari subkegiatan ini berupa 1 (Satu) laporan hasil koordinasi dan konsultasi baik ke dalam daerah maupun ke luar daerah dengan capaian output / keluaran sebesar 100 Persen.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah

- a. Subkegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar **Rp.266.256.775 (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.263.906.894,- (Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)** atau sebesar 99.12 Persen. Adapun Output /Keluaran dari subkegiatan ini adalah 86 (Delapan Puluh Enam) unit mebel terdiri dari kursi putar, kursi stainless, kursi tamu, kursi tunggu, lemari barang inventaris, meja kerja ½ biro, meja kerja 1 biro, meja Panjang, rak buku dan lemari pakaian dengan capaian output / keluaran sebesar 100 Persen.
- b. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar **Rp.342.903.328,- (Tiga Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.337.653.043,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah)** atau sebesar 98,47 Persen. Adapun Output / Keluaran dari subkegiatan ini berupa 28 (dua puluh delapan) Unit peralatan dan mesin terdiri dari Mesin bor, Mic meja Rapat, Mesin penghancur kertas, AC, Hardcase Soundsystem 8U + mixer, Tripod Camera, Gimbal Camera, Camera Mirrorless, Mic Camera Clip On, Personal Computer , Printer dan pembuatan Sumur Bor dengan capaian output / keluaran sebesar 100 Persen.



- c. Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar **Rp.95.000.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.94.905.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)** atau sebesar 99,90 Persen. Adapun Output / Keluaran dari subkegiatan ini berupa DED Perencanaan Teknis Gedung Kantor Satpol PP sebanyak 1 (satu) unit dengan capaian output / keluaran sebesar 100 Persen.

7. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar **Rp.7.020.000,- (Tujuh Juta Dua Puluh Ribu Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)** atau sebesar 85,47 persen. Adapun output / keluaran dari subkegiatan ini berupa 1 (Satu) Laporan terdiri dari Materai 10.000 sebanyak 600 (Enam ratus) buah dan Paket pengiriman sebanyak 6 (Enam) paket, dengan capaian output / keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar **Rp.134.238.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp. 92.848.379,- (Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)** atau sebesar **69,17** persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini berupa 12 (Dua Belas) Laporan jenis terdiri dari tagihan air, tagihan listrik, dan tagihan internet berlangganan selama 12 (Dua belas) bulan. Rendahnya penyerapan keuangan dikarenakan adanya efisiensi penggunaan / pemakaian belanja air, listrik dan internet kantor dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar **Rp.2.999.680.000,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp. 2.797.320.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)** atau sebesar **93,25** persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini berupa 10 (Sepuluh) laporan penyediaan jasa pelayanan



umum kantor dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar **Rp.50.074.750,- (Lima Puluh Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.39.890.400,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah)** atau sebesar **79,66** Persen. Adapun Output / Keluaran dari subkegiatan ini berupa biaya pajak dan biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 1 (Satu) unit, dengan capaian output / keluaran sebesar 100 Persen. Rendahnya penyerapan keuangan dikarenakan tidak terealisasinya pajak kendaraan dinas plat dua digit. Dimana untuk tahun 2025 kendaraan dinas dua digit hanya sampai dengan nomor urut 30 sedangkan nomot plat yang dimiliki melebihi ketentuan (BG 41 DZ).
- b. Subkegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan dengan anggaran sebesar **Rp.337.733.606,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Enam Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.328.825.211,- (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah)** atau sebesar **96,77** Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 26 (Dua puluh Enam) unit yang terdiri dari Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua) sebanyak 16 (Enam belas) unit, Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (Empat) sebanyak 7 (Tujuh) unit, dan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 (Dua) sebanyak 2 (Dua) unit, dengan capaian output / keluaran sebesar 100 Persen.
- c. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar **Rp.85.451.060,- (Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Puluh Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.58.200.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** atau sebesar



68,11 Persen. Adapun Output / Keluaran dari subkegiatan ini berupa 24 (Dua Puluh Empat) Unit terdiri service mesin fotocopy sebanyak 1 (Satu) unit, service PC dan laptop sebanyak 20 (Dua puluh) unit, service printer sebanyak 12 (Dua belas) unit dan pengurusan izin senjata api sebanyak 6 (Enam) unit dengan capaian output / keluaran sebesar 95,83 Persen. Rendahnya pemyerapan keuangan dikarenakan perpajakan izin senpi hanya terealisasi 5 (lima) unit dari target 6 (enam) unit. 1 (satu) unit senpi izin tidak diperpanjang karena rusak berat.

- d. Subkegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran sebesar **Rp.321.480.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.320.822.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)** atau sebesar **99,80** Persen. Adapun Output / Keluaran dari subkegiatan ini berupa pemeliharaan plafond gedung kantor Satpol PP sebanyak 1 (Satu) unit dan perbaikan ruang Kasat Pol PP sebanyak 1 (satu) unit, dengan capaian output / keluaran sebesar 100 Persen.
- e. Subkegiatan Pemeliharaan / Rehabilitas sarana dan prasarana gedung pendukung kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran sebesar **Rp.21.270.000,- (Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.17.585.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)** atau sebesar **82,68** Persen. Adapun Output / Keluaran dari subkegiatan ini berupa 26 (Dua Puluh Enam) Unit yang terdiri dari batre genset, suku cadang mesin rumput, perbaikan AC dan pemeliharaan genset dengan capaian output / keluaran sebesar 96,15 Persen.

B. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk program **peningkatan ketentraman dan ketertiban umum** sebesar **Rp.1.824.730.300,- (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp.1.493.297.725,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)** atau **81,84** Persen.



Program ini terdiri dari 2 kegiatan, dan 10 Subkegiatan sebagai berikut.

1. Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam (satu) daerah Kabupaten/ Kota

- a. Subkegiatan Koordinasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota dengan anggaran sebesar **Rp.66.260.000,- (Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.47.837.060,- (Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Rupiah)** atau sebesar **72,20** Persen. Adapun Output / Keluaran dari subkegiatan ini berupa dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten / Kota sebanyak 1 (Satu) dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen. Rendahnya penyerapan keuangan dikarenakan tidak terealisasinya perjalanan dinas kegiatan korsik yang disebabkan tidak adanya undangan dari kecamatan atau instansi lainnya yang berada di luar Kecamatan Muara Enim.
- b. Subkegiatan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum dengan anggaran sebesar **Rp.432.288.700,- (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.426.292.568 (Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).** atau sebesar **98,61** Persen. Adapun Output / Keluaran dari subkegiatan ini berupa dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten / Kota sebanyak 1 (Satu) dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- c. Subkegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia dengan anggaran sebesar **Rp.458.350.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.304.350.000,- (Tiga Ratus Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** atau sebesar **66,40** Persen. Adapun Output /



Keluaran dari subkegiatan ini adalah pelatihan anggota Satpol PP sebanyak 40 (empat puluh) orang dari target 62 (enam puluh dua) orang, dengan capaian output / keluaran sebesar 64,52 Persen. Rendahnya kinerja dan penyerapan keuangan dikarenakan jumlah anggota Satpol PP berkurang signifikan dengan adanya peralihan status dari TKS menjadi PPPK Paruh waktu di OPD lain serta jadwal pelatihan yang direncanakan berbarengan dengan jadwal persiapan dan pelaksanaan pengamanan nataru dan pengamanan unjuk rasa sehingga anggota yang mengikuti pelatihan tidak bisa sebanyak target yang ditentukan awal.

- d. Subkegiatan Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dengan anggaran sebesar **Rp.98.288.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.93.863.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)** atau sebesar 95,50 Persen. Adapun Output / Keluaran dari subkegiatan ini berupa dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan sebanyak 5 (Lima) dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- e. Subkegiatan Pencegahan Gangguan Ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan dengan anggaran sebesar **Rp.226.928.000 (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.149.067.132,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Dua Rupiah)** atau sebesar 65,69 Persen. Adapun Output / Keluaran dari subkegiatan ini adalah 12 (Dua belas) laporan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, dan pengawalan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen. Rendahnya penyerapan keuangan dikarenakan permintaan pengamanan jumlah poskostis dan rumah ibadah pada hari besar keagamaan dan tahun baru tidak sebanyak tahun sebelumnya.



- f. Subkegiatan Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa dengan anggaran sebesar **Rp.119.490.000,- (Seratus Sembilan Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.118.201.160,- (Seratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Satu Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah)** atau sebesar **98,92** Persen. Adapun Output / Keluaran dari subkegiatan ini adalah 12 (Dua belas) Laporan penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan dengan capaian output / keluaran sebesar 100 Persen.
- g. Subkegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum dengan anggaran sebesar **Rp.93.750.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.82.989.995 (Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)** atau sebesar **88,52** Persen. Adapun Output / Keluaran dari subkegiatan ini adalah Tongkat lampu lintas sebanyak 72 (Tujuh Puluh Dua) unit yang terdiri dari perlengkapan yustisi, kursi lipat, chainsaw, corong toa speaker, radio HT/UHT dan taser gun dengan capaian output / keluaran sebesar 100 Persen.

2. Penegakan Perda Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota

- a. Subkegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota dengan anggaran sebesar **Rp.83.373.600 (Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah)** realisasi keuangan sebesar **Rp.73.511.760,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah)** atau sebesar **88,17** Persen. Adapun Output / Keluaran dari subkegiatan ini Adalah 5 (Lima) laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlokasi di 5 (Lima) Sekolah Menengah Atas dalam wilayah Kabupaten Muara Enim dengan capaian output / keluaran sebesar 100 Persen.
- b. Subkegiatan Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan anggaran sebesar



Rp.171.106.800,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) realisasi keuangan sebesar **Rp.125.009.200,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah)** atau sebesar **73,06** Persen. Adapun Output / Keluaran dari subkegiatan ini berupa 12 (Dua belas) Laporan pelaksanaan penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah sesuai SOP dengan capaian output / keluaran sebesar 100 Persen. Rendahnya penyerapan keuangan dikarenakan efisiensi pada belanja bahan cetak, belanja perjalanan dinas, belanja sewa loader, belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang.

- c. Subkegiatan Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati / walikota dengan anggaran sebesar **Rp. 74.895.200,- (Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah)** realisasi keuangan sebesar Rp. **72.175.850,- (Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)** atau sebesar 96,37 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini berupa Laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebanyak 12 (Dua belas) laporan dengan capaian output / keluaran sebesar 100 Persen.

3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban umum		Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	50	50	101.58%
			Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	50	72,85	145,7 %
2.		Meningkatkan ketentraman	Tingkat kriminalitas	85	83	102,35%



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
3.		dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	100 %	100 %	100%
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan.	100 %	100 %	100 %
		Meningkatkan tata kelola organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	68,75	71,55	104,07%

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Secara umum, indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2025 telah berhasil direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Namun masih ada beberapa permasalahan yang dihadapi Satpol PP dan solusi yang diajukan sebagai berikut:

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Masih tingginya gangguan keamanan dan ketertiban umum (Kamtibmas) berupa Konflik Berbasis SARA, Anarkis, Separatisme, Pencurian dan Kekerasan, Curanmor dan Tawuran.	Mengimplementasikan sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, serta melakukan patroli rutin di area rawan kejahatan.
		Pembentukan satgas Kabupaten dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan anggota linmas di desa dalam penanganan aksi cepat tanggap rawan bencana serta menjaga keamanan dan ketertiban di desa;
		Peningkatan kompetensi SDM melalui pendelegasian pegawai untuk mengikuti beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis, mulai dari bidang perencanaan, administrasi hingga teknis operasional
		Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana ketertiban umum



No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
2.	Masih Tingginya Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatkan sosialisasi secara masif kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang Perda dan Perkada; Melakukan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait secara intensif. Peningkatan pengawasan dan penegakkan perda dan perkada secara humanis

5. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Tidak ada penghargaan di Tahun 2025.



OPD: DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN (DPKP)

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Pada tahun 2025, Pada tahun anggaran berjalan, alokasi belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim ditetapkan sebesar **Rp20.236.489.757,20** (*dua puluh miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh koma dua rupiah*). Dari total alokasi tersebut, telah terealisasi sebesar **Rp17.599.021.581,00** (*tujuh belas miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah*) atau mencapai **86,97%**. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai belanja operasi dan belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Operasional

Belanja Operasi dialokasikan sebesar **Rp16.679.880.257,20** (*enam belas miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh tujuh koma dua rupiah*). Sampai dengan akhir tahun anggaran, realisasi belanja operasi mencapai **Rp14.058.877.199,00** (*empat belas miliar lima puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah*) atau sebesar **84,29%**. Dana ini diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta komponen operasional lainnya yang mendukung keberlangsungan tugas rutin kedinasan.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp3.556.609.500,00** (*tiga miliar lima ratus lima puluh enam juta enam ratus sembilan ribu lima ratus rupiah*). Realisasi pada sektor ini menunjukkan performa yang sangat tinggi yakni sebesar **Rp3.540.144.382,00** (*tiga miliar lima ratus empat puluh juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah*) atau mencapai **99,54%**. Alokasi ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana guna mendukung peningkatan kinerja pelayanan pemadaman dan penyelamatan, yang sekaligus menjadi aset tetap bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2025, Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim melaksanakan sebanyak 2 (*dua*) program, 13 (*tiga belas*) kegiatan, dan 48 (*empat puluh delapan*) Sub kegiatan yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



Alokasi Anggaran sebesar Rp51.714.700,00 (*lima puluh satu juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp50.270.500,00 (*lima puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah*) atau 97,21%.

- a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.393.400,00 (*enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp6.277.300,00 (*enam juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*) atau 98,18%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan tahun 2025 sebanyak 10 Buku dan perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan tahun 2025 sebanyak 10 Buku, guna memenuhi amanat Permendagri 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
- b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dialokasikan anggaran sebesar Rp5.167.000,00 (*lima juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp4.960.000,00 (*empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah*) atau 95,99%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah berupa 1 dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan tahun anggaran 2025 sebanyak 12 Buku, guna memenuhi amanat Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dialokasikan anggaran sebesar Rp4.899.000,00 (*empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp4.666.600,00 (*empat juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah*) atau 95,26%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah 1 dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan tahun



anggaran 2025 sebanyak 30 Buku, guna memenuhi amanat Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dialokasikan anggaran sebesar Rp14.337.200,00 (*empat belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp13.825.700,00 (*tiga belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah*) atau 96,43%. Adapun Output/keluaran adalah 1 dokumen DPA-SKPD Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan tahun anggaran 2025 sebanyak 40 buku, guna memenuhi amanat Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dialokasikan anggaran sebesar Rp14.163.400,00 (*empat belas juta seratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp14.014.500,00 (*empat belas juta empat belas ribu lima ratus rupiah*) atau 98,95%. Adapun Output/keluaran adalah 1 dokumen Perubahan DPA-SKPD Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan tahun anggaran 2025 sebanyak 40 buku, guna memenuhi amanat Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.754.700,00 (*enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp6.526.400,00 (*enam juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah*) atau 96,62%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah 3 Laporan yaitu Laporan AKIP, Laporan LPPD, Laporan PMPRB guna memenuhi amanat Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran sebesar Rp10.951.420.049,20 (*sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu empat puluh sembilan koma dua puluh rupiah*) dengan Realisasi sebesar Rp9.113.984.920,20 (*sembilan miliar seratus tiga belas juta sembilan*



ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh koma dua puluh rupiah) atau 83,22%.

- a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dialokasikan anggaran sebesar Rp10.941.195.031,20 (*sepuluh miliar sembilan ratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah koma dua puluh*) dengan realisasi sebesar Rp9.104.304.302,00 (*sembilan miliar seratus empat juta tiga ratus empat ribu tiga ratus dua rupiah*) atau 83,21%. Sub kegiatan ini untuk membiayai gaji dan tunjangan PNS sebanyak 20 orang dan 161 PPPK selama 12 (dua belas) bulan.
- b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dialokasikan anggaran sebesar Rp6.068.196,00 (*enam juta enam puluh delapan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp5.612.020,00 (*lima juta enam ratus dua belas ribu dua puluh rupiah*) atau 92,48%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 Buku (Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD), guna memenuhi amanat Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dialokasikan anggaran sebesar Rp4.156.822,00 (*empat juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp4.068.598,00 (*empat juta enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah*) atau 97,88%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semester SKPD sebanyak 4 Buku (Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD) guna memenuhi amanat Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran sebesar Rp283.799.100,00 (*dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp283.007.460,00 (*dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ribu empat ratus enam puluh rupiah*) atau 99,72%.

- a. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah pada



Perangkat Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp279.628.800,00 (*dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp279.036.060,00 (*dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu enam puluh rupiah*) atau 99,79%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini berupa asuransi kendaraan roda empat sebanyak 30 unit, guna memenuhi amanat Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- b. Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.170.300,00 (*empat juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp3.971.400,00 (*tiga juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah*) atau 95,23%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah laporan/buku barang aset milik daerah dengan capaian output/keluaran sebesar 1 laporan/buku asset barang milik daerah.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran sebesar Rp103.260.270,00 (*seratus tiga juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp80.472.726,00 (*delapan puluh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah*) atau 77,93%.

- a. Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dialokasikan anggaran sebesar Rp46.000.000,00 (*empat puluh enam juta rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp35.000.000,00 (*tiga puluh lima juta rupiah*) atau 76,09%. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah 1 paket pengadaan berupa 4 set baju PDU I beserta atribut kelengkapannya.
- b. Subkegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian dialokasikan anggaran sebesar Rp5.260.270,00 (*lima juta dua ratus enam puluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp4.972.726,00 (*empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah*) atau 94,53%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan administrasi kepegawaian dengan capaian output sebesar 1 dokumen administrasi kepegawaian.



- c. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dialokasikan anggaran sebesar Rp52.000.000,00 (*lima puluh dua juta rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp40.500.000,00 (*empat puluh juta lima ratus ribu rupiah*) atau 77,88%. Output/keluaran dari sub kegiatan ini berupa jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 4 (empat) orang untuk Pelatihan/Bimtek/Diklat/Sosialisasi dan 4 (empat) orang untuk kursus, Pelatihan dan diklat penyelamatan dengan capaian output/keluaran sebesar 8 orang.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi Anggaran sebesar Rp1.652.360.506,00 (*satu miliar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus enam rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp1.438.429.027,00 (*satu miliar empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu dua puluh tujuh rupiah*) atau 87,05%.

- a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp15.561.168,00 (*lima belas juta lima ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh delapan rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp15.428.500,00 (*lima belas juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah*) atau 99,15%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah 10 paket yang terdiri dari Baterai Alkalin 2A, Stop Kontak, Kabel Listrik – Lampu 20 Watt, Lampu 20 Watt, Klem Kabel, Fitting Lampu, Kabel NYM 2x2,5 mm, Kabel NYY 2x1,5 mm, Lampu 18 Watt, dan Saklar Ganda.
- b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp560.694.500,00 (*lima ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp558.153.000,00 (*lima ratus lima puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah*) atau 99,55%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah 15 jenis yaitu 4 unit Kipas Blower, 2 unit AC split, 4 unit dispenser, 4 unit kipas angin, 91 meter persegi gorden, 3 unit printer, 2 buah speaker aktif, 3 buah action cam, 1 buah infocus/proyektor, 1 set kamera, 1 unit genset, 10 unit lampu emergency, 1 unit UPS, 1 unit laptop dan 5 unit PC.



- c. Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dialokasikan anggaran sebesar Rp20.550.144,00 (*dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp20.540.000,00 (*dua puluh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah*) atau 99,95%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah 45 Jenis yang terdiri dari Belanja Barang dan Belanja Modal. Belanja Barang berupa Gayung Plastik, Kain Serbet, Karbol Wangi 450ml, Keranjang Sampah Bertutup, Kertas Tisu 900 Gram 2 Ply, Kaset Kaki, Lap Kain Bahan Handuk/Lap Majun, Lap Kanebo, Pel Dorong Slmbu, Pembersih Kaca, Pembersih Kloset 450ml, Pembersih Lantai, Perabotan Kantor-Ember Plastic Ukuran Sedang, Perabotan Kantor, Kapur Barus Bulat Besar, Pewangi Gantung, Pewangi Kendaraan, Pewangi Ruangan Semprot, Pewangi Ruangan Spray, Sabun Cuci, Sabun Cuci Tangan, Sapu Bulu Ayam, Sapu Lantai, Sapu Lidi, Serok Sampah Sikat Kloset+Gagang.
- d. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp185.372.719,00 (*seratus delapan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp160.755.548,00 (*seratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*) atau 86,72%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah 53 paket yang terdiri dari BBM Pertamina, BBM Peralite, Mistar Plastik, Bantalan Cap, Binder Clip No.155, Binder Clips No 111, Binder Klip No.155, Block Note Polos, Box Arsip Besar, Box Rsip Kecil Ukuran 9cm, Buku Agenda Besar Ukuran 20.5 X 30, Isi 200 Lbr, Kulit Tebal, Buku Agenda Folio Isi 200 Lembar, Catridge Canon 740 (Hitam), Cutter, Gunting Kertas Ukuran Besar, Isi Necis Kecil Merk Max No.10, Kertas A4 70 Gram, Kertas HVS 80 Gram Ukuran F4, Klip Kertas No.03, Lakban Hitam, Map Folio Kertas Karton, Map Snelhecter (Bahan Plastic), Mistar Besi 30 Cm, Necis Besar, Pelobang Kertas, Pena Balliner, Pena Biasa Pilot/Standar, Penghapus Pensil Steadler, Pensil 2B, Plastik Jilid/Plastic Cover Transparan, Refill Tinta Data Print Suntikan, Refill Tinta Epson 664 Hitam, Spidol White Board, Stabile, Tinta Stempel, Tip-X Ukuran 20ml, Toner Black (Mesin Fotocopy), Amplop, Amplop Dinas Kecil Ukuran 14x26, Bahan Kertas Keping Tebal, Warna Coklat, Kartu



Kendali Masuk Dan Keluar, Gula Pasir, Isi Ulang Galon, Kopi Bubuk, Persediaan Makan/Minum (Teh Kotak), Nasi Kotak/Prasmanan.

- e. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dialokasikan anggaran sebesar Rp67.372.780,00 (*enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp65.364.200,00 (*enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus rupiah*) atau 97,02%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah 11 Paket yang terdiri dari amplop bupati uk. 14 x 26 cm kertas Samson x super cabinet, amplop dinas kecil pakai ambang daerah berwarna, bahan kissing tebal ukuran 10x25m cabinet, amplop sekda kecil ukuran 14x26cm bahan kissing tebal warna, bahan cetakan barang cetakan - cetak lembar disposisi, jilid spiral, cetak benner/spanduk bahan jenis flexi 280gr, cetak buku + jilid soft cover sampai dengan 250 lembar, kop bupati besar lambing garuda tinta emas uk. Kertas HVS f4, 80 gram, kop surat ½ F4, map snelhecter kop dinas bahan sonstruct dan biaya fotocopy, serta pengadaan belanja modal papan Dharma Wanita.
- f. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dialokasikan anggaran sebesar Rp12.800.000,00 (*dua belas juta delapan ratus ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp5.400.000,00 (*lima juta empat ratus ribu rupiah*) atau 42,19%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah 6 dokumen yaitu belanja surat kabar atau koran sebanyak 64 (*enam puluh empat*) eksemplar.
- g. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dialokasikan anggaran sebesar Rp784.481.500,00 (*tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp607.888.384,00 (*enam ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah*) atau 77,54%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini berupa 3660 laporan hasil koordinasi dan konsultasi baik ke dalam daerah maupun ke luar daerah dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- h. Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dialokasikan anggaran sebesar Rp5.527.695,00 (*lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah*)



dengan realisasi sebesar Rp4.899.395,00 (*empat juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah*) atau 88,63%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah tingkat pengelolaan arsip dinamis dengan capaian output/keluaran sebesar 1 Dokumen terdiri dari Box Arsip Kecil Ukuran 9cm, Catridge Printer 810, Cutter, Gunting Kertas Ukuran Besar, Isi Necis Kecil Merk Max No.10, Kertas Foto/Glossy, Kertas HVS 70 Ukuran A4, Lem Glukos Ukuran Sedang, Map Folio Kertas Karton, Necis Kecil, Pena Balliner, Pena Biasa Pilot/Standar, Spidol White Board dan Fotocopy.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Alokasi Anggaran sebesar Rp2.485.915.000,00 (*dua miliar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp2.476.058.182,00 (*dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah*) atau 99,60%.

- a. Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dialokasikan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp1.995.000.000,00 (*satu miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta rupiah*) atau 99,75%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan dengan capaian output/keluaran pengadaan mobil pemadam kebakaran sebanyak 1 unit.
- b. Subkegiatan Pengadaan Mebel dialokasikan anggaran sebesar Rp255.800.000,00 (*dua ratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp251.720.003,00 (*dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga rupiah*) atau 98,41%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian output/keluaran sebesar 4 jenis yaitu Kursi Rapat 50 buah, lemari arsip 8 unit, meja kerja 14 buah, kursi kerja putar 12 unit, meja resepsionis 1 set, dan kursi besi 6 unit.
- c. Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dialokasikan anggaran sebesar Rp230.115.000,00 (*dua ratus tiga puluh juta seratus lima belas ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp229.338.179,00 (*dua ratus dua puluh*



sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau 99,66%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah 1 paket pengadaan gedung arsip.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi Anggaran sebesar Rp416.101.170,00 (*empat ratus enam belas juta seratus satu ribu seratus tujuh puluh rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp325.958.652,00 (*tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*) atau 78,34%.

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dialokasikan anggaran sebesar Rp21.645.400,00 (*dua puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp13.795.000,00 (*tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*) atau 63,74%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah dan jenis belanja paket pengiriman, dokumen bermaterai, berperangko dan jenis dokumen kilat tercatat dengan capaian output/keluaran sebesar 2142 laporan.
- b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp164.455.770,00 (*seratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp113.531.652,00 (*seratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah*) atau 69,03%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah Jumlah rekening yang dibayar yaitu sebanyak 4 rekening yaitu, pembayaran tagihan komunikasi, air, listrik, telepon dan speedy.
- c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp230.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh juta rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp198.632.000,00 (*seratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) atau 86,36%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah jasa tenaga kebersihan dan tenaga pelayanan umum dengan capaian output/keluaran sebesar 4 orang.



8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan

Alokasi Anggaran sebesar Rp638.949.096,00 (*enam ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu sembilan puluh enam rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp577.045.163,00 (*lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh lima ribu seratus enam puluh tiga rupiah*) atau 90,31%.

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dialokasikan anggaran sebesar Rp40.783.550,00 (*empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp39.820.185,00 (*tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh lima rupiah*) atau 97,64%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah dan jenis pajak kendaraan dinas/operasional dengan capaian output/keluaran sebesar 2 unit yaitu kendaraan kepala dinas dan kendaraan sekretaris.
- b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dialokasikan anggaran sebesar Rp468.581.410,00 (*empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sepuluh rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp435.202.728,00 (*empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah*) atau 92,88%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan pajak kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 4 dengan capaian output/keluaran sebesar 28 unit mobil operasional pemadam kebakaran.
- c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dialokasikan anggaran sebesar Rp46.216.000,00 (*empat puluh enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp45.942.250,00 (*empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah*) atau 99,41%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah dan jenis kantor yang dipelihara dengan capaian output/keluaran sebesar 3 jenis gedung bangunan pemadam.
- d. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



dialokasikan anggaran sebesar Rp13.570.000,00 (*tiga belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp7.950.000,00 (*tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) atau 58,59%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara/rutin dengan capaian output/keluaran sebesar 6 jenis yaitu pemeliharaan personal computer/notebook sebanyak 15 unit/tahun, pemeliharaan UPS sebanyak 1 kali, pemeliharaan printer 8 unit/tahun.

- e. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dialokasikan anggaran sebesar Rp69.798.136,00 (*enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tiga puluh enam rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp48.130.000,00 (*empat puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu rupiah*) atau 68,96%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/terpelihara dengan capaian output/keluaran sebesar 2 jenis yaitu Isi ulang Alat Pemadam Api Ringan(APAR) sebanyak 81 kali, Service Mesin Fotocopy sebanyak 1 jenis x 4 kali, Pemeliharaan AC Split sebanyak 60 Kali.

B. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Alokasi anggaran untuk program ini ditetapkan sebesar Rp3.652.969.866,00 (*tiga miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp3.253.794.951,00 (*tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah*) atau 89,07%. Program ini terdiri dari 5 (*lima*) kegiatan, dan 13 (*tiga belas*) Sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadam, dan Penyelamatan Kebakaran

Alokasi Anggaran sebesar Rp2.059.059.700,00 (*dua miliar lima puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp1.903.652.600,00 (*satu miliar sembilan ratus tiga juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah*) atau 92,45%.

- a. Subkegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar



Rp12.457.724,00 (*dua belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp11.530.665,00 (*sebelas juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus enam puluh lima rupiah*) atau 92,56%. Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan kebakaran. Dengan peserta yaitu perangkat desa, masyarakat desa, dan kelompok ibu-ibu desa. Adapun pusat pelayanan masyarakat yaitu kantor kepala desa.

- b. Subkegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp908.514.608,00 (*sembilan ratus delapan juta lima ratus empat belas ribu enam ratus delapan rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp825.770.493,00 (*delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah*) atau 90,90%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah laporan kebakaran ada 46 (empat puluh enam) kejadian dan penanganan kebakaran waktu tanggap (*response time*) ada 42 dari 46 kejadian.
- c. Subkegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp30.874.956,00 (*tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp27.678.295,00 (*dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah*) atau 89,62%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini sebesar 1 laporan/data yaitu laporan penanganan bahan berbahaya dan beracun yang ditangani.
- d. Subkegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dialokasikan anggaran sebesar Rp496.387.279,00 (*empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp433.068.900,00 (*empat ratus tiga puluh tiga juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah*) atau 87,24%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah aparatur yang lulus bersertifikat Diklat *Medical First Responder* (MFR) Jumlah 30 Orang Persentase 100%.
- e. Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dialokasikan anggaran sebesar Rp505.000.000,00 (*lima ratus lima juta rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp502.933.200,00



(lima ratus dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah) atau 99,59%. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar teknis terkait sebanyak 4 jenis yaitu 4 unit chainsaw, 13 unit selang pemadam, dan 10 set APD lengkap.

- f. Subkegiatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, serta Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dialokasikan anggaran sebesar Rp105.825.133,00 (*seratus lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp102.671.047,00 (*seratus dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat puluh tujuh rupiah*) atau 97,02%. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah perjanjian kerja sama yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Muara Enim yaitu Kabupaten Lahat, Kabupaten Pali, Kabupaten Prabumulih, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten OKU.

2. Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Alokasi Anggaran sebesar Rp40.151.758,00 (*empat puluh juta seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp37.079.903,00 (*tiga puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah*) atau 92,35%.

- a. Subkegiatan Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran dialokasikan anggaran sebesar Rp19.488.058,00 (*sembilan belas juta empat ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh delapan rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp17.567.272,00 (*tujuh belas juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah*) atau 90,14%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini sebesar 1 laporan yaitu laporan jumlah sarana proteksi kebakaran yang di data. Tempat yang dilaksanakan di sekolah-sekolah Kabupaten Muara Enim.
- b. Subkegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran dialokasikan anggaran sebesar Rp20.663.700,00 (*dua puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp19.512.631,00 (*sembilan belas juta lima ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah*) atau 94,43%.



Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah tempat yang dilaksanakan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran di sekolah-sekolah Kabupaten Muara Enim.

3. Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran

Alokasi anggaran sebesar Rp49.573.728,00 (*empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp48.938.578,00 (*empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah*) atau 98,72%.

- a. Subkegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran dialokasikan anggaran sebesar Rp49.573.728,00 (*empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp48.938.578,00 (*empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah*) atau 98,72%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini sebesar 1 laporan yaitu laporan jumlah penelitian, pengujian penyebab kejadian kebakaran yang diinvestigasi sepanjang tahun 2025.

4. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Alokasi anggaran sebesar Rp734.163.858,00 (*tujuh ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp701.041.691,00 (*tujuh ratus satu juta empat puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah*) atau 95,49%.

- a. Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat dialokasikan anggaran sebesar Rp111.933.180,00 (*seratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp108.842.107,00 (*seratus delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah*) atau 97,24%. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah jumlah peserta sosialisasi pencegahan penanggulangan dengan capaian output/keluaran sebesar 1 laporan (laporan yang sudah dilakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat) kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Sosialisasi dan Edukasi



di 10 Desa Kecamatan Lembak.

- b. Subkegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran dialokasikan anggaran sebesar Rp622.230.678,00 (*enam ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp592.199.584,00 (*lima ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah*) atau 95,18%. Adapun output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah Jumlah Desa/Kelurahan yang terbentuk dan terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya sebanyak 100 Desa/Kelurahan dengan output 40 orang relawan pemadam kebakaran di setiap 22 kecamatan di Kabupaten Muara Enim yang dilakukan pembinaan.

5. Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

Alokasi Anggaran sebesar Rp770.020.822,00 (*tujuh ratus tujuh puluh juta dua puluh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp563.082.179,00 (*lima ratus enam puluh tiga juta delapan puluh dua ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah*) atau 73,13%.

- a. Subkegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia dialokasikan anggaran sebesar Rp466.076.850,00 (*empat ratus enam puluh enam juta tujuh puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp347.070.904,00 (*tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh*) atau 74,47%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini adalah persentase penanganan peristiwa membahayakan atau mengancam manusia yang ditindak lanjuti dengan capaian output/keluaran sebesar 1 Laporan. Adapun laporan penyelamatan ada 95 (*sembilan puluh lima*) kejadian. Kejadian yang terdiri dari orang hanyut, pemusnahan sarang tawon, evakuasi anjing dalam sumur, evakuasi ular, evakuasi kucing, evakuasi orang masuk sumur, evakuasi pohon tumbang dan evakuasi penanganan cincin.



- b. Subkegiatan Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi dialokasikan anggaran sebesar Rp303.943.972,00 (*tiga ratus tiga juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp216.011.275,00 (*dua ratus enam belas juta sebelas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah*) atau 71,07%. Adapun Output/keluaran dari Sub kegiatan ini jumlah Laporan hasil pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal dengan capaian output/keluaran sebesar 1 Laporan.

3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Untuk mengevaluasi sejauh mana pencapaian target kinerja sasaran yang tertuang dalam dokumen Renstra tahun 2025-2029, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim menyajikan rincian capaian indikator tahun 2025 sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Meningkatnya pelayanan cepat tanggap pemadaman dan penyelamatan	Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>)	89,5%	91,30%	102,01 %
2.		Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas tata kelola Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Nilai SAKIP DPKP	71,18	N/A	N/A

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Berdasarkan hasil evaluasi lapangan dan analisis, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim menghadapi beberapa tantangan strategis yang memerlukan penanganan terpadu. Uraian berikut menjelaskan keterkaitan antara kendala yang dihadapi dengan langkah-langkah solusi yang diambil:



No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Belum optimalnya jumlah aparaturnya yang memiliki sertifikasi kompetensi pemadam dan penyelamatan.	Mengikutsertakan seluruh ASN dalam Diklat Pemadam I secara bertahap, termasuk memprioritaskan sertifikasi bagi PPPK paruh waktu eks Satpol PP agar memenuhi standar kualifikasi.
2.	Kurangnya jumlah personil di beberapa kecamatan.	Mengajukan usulan penambahan petugas melalui mekanisme <i>outsourcing</i> dan optimalisasi tenaga PPPK penuh dan paruh waktu.
3.	Keterbatasan anggaran pengadaan sarpras (termasuk mobil <i>rescue</i> dan ambulans) akibat kebijakan efisiensi dan pengurangan transfer daerah dari Kemenkeu.	Melakukan pengadaan sarpras secara bertahap dengan skala prioritas, serta aktif mengajukan usulan melalui dana hibah maupun proposal CSR perusahaan.
4.	Luas wilayah cakupan tidak sebanding dengan jumlah pos dan armada yang tersedia.	Mengoptimalkan UPT yang sudah dibentuk serta memberdayakan relawan pemadam kebakaran (Redkar) untuk mempercepat respon awal kebakaran.

5. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Untuk periode tahun 2025, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim belum mencatatkan prestasi dalam bentuk penghargaan formal.



OPD: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan Wajib Badan Penanggulangan Bencana Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim. Pada Tahun 2025, alokasi belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar **Rp. 11.748.539.945,00 (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)** dan terealisasi sebesar **Rp. 7.249.878.323,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)** atau **61,71% (Enam Puluh Satu Koma Tujuh Puluh Satu Persen)**. dan kinerja keluaran (output) sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar **Rp. 10.939.376.945,00 (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah)** terealisasi sebesar **Rp. 6.445.472.495,00 (Enam Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)** atau **58,92% (Lima Puluh Delapan Koma Sembilan Puluh Dua Persen)** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja Langsung dialokasikan sebesar **Rp. 809.163.000,00 (Delapan Ratus Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)** terealisasi sebesar **Rp. 804.405.828,00 (Delapan Ratus Empat Juta Empat Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah)** atau **99,41% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Satu Persen)** yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana penunjang kinerja Aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim melaksanakan sebanyak 2 program, 12 kegiatan dan 39 subkegiatan, antara lain yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Alokasi anggaran untuk program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 9.607.866.089,00 (Sembilan**



Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 5.681.626.272,00 (Lima Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah)** atau **59,13% (Lima Puluh Sembilan Koma Tiga Belas Persen)**, dengan capaian kinerja output **59,13% (Lima Puluh Sembilan Koma Tiga Belas Persen)**. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan urusan Wajib Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari 8 kegiatan dan 26 subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat : a) Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah; b) Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dengan hasil kegiatan berupa ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan sebagai akuntabilitas kinerja perangkat daerah

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 4.479.600,00 (Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 3.723.340,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah) atau 83,12% (Delapan Puluh Tiga Koma Dua Belas Persen), Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersusunnya Jumlah Penyusunan Dokumen RKA SKPD sebanyak 1 Dokumen. (Karena Anggaran Kegiatan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD tidak terealisasi akibat penyesuaian Mekanisme Pengadaan melalui E-Catalog sehingga tidak sesuai dengan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 10.439.150,00 (Sepuluh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 9.295.201,00 (Sembilan



Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Satu Rupiah) atau 89,04% (Delapan Puluh Sembilan Koma Empat Persen), Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini berupa DPPA Tahun Anggaran 2025 dan DPA tahun anggaran 2026 sebanyak 1 Dokumen.

- c. Sub Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 14.318.000,00 (Empat Belas Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 14.199.071,00 (Empat Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah) atau 99,17% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Tujuh Belas Persen). Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini berupa DPPA Perubahan Tahun Anggaran 2025 dan DPA Perubahan sebanyak 1 Dokumen.
- d. Sub Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 3.073.800,00 (Tiga Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.734.501,00 (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Ratus Satu Rupiah) atau 88,96% (Delapan Puluh Delapan Koma Sembilan Puluh Enam Persen). Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini berupa Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 sebanyak 1 Dokumen.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat

- a) PP 12 tahun 2019 tentang Keuangan Daerah; dan
- b) Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- a. Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 6.460.968.815,00 (Enam Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.3.261.542.579,00 (Tiga Milyar Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) atau 50,48% (Lima Puluh Koma Empat Puluh Delapan Persen). Subkegiatan ini untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN sebanyak 53 orang selama 12 (dua belas) bulan dan pembayaran gaji 13 dan 14 dengan capaian output/keluaran sebesar 50,48%. (Karena perkiraan pada Awal Tahun 2025 OPD BPBD Kabupaten Muara Enim meningkat menjadi eselon II.b sehingga untuk anggaran gaji pegawai dianggarkan sesuai dengan kebutuhan peningkatan Esselon dari Esselon III.a menjadi Esselon II.b namun sampai Desember 2025 belum terealisasi).



- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 2.933.000,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar dengan realisasi sebesar Rp.1.268.600,00 (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) atau Rp. 43,25% (Empat Puluh Tiga Koma Dua Puluh Lima Persen). Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah tersusunnya Jumlah Dokumen/Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir sebanyak 1 Laporan. (Anggaran Kegiatan Laporan Akhir Tahun Keuangan tidak terealisasi akibat penyesuaian Mekanisme Pengadaan melalui E-Catalog sehingga tidak sesuai dengan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan).
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 3.622.975,00 (Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.901.600,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Enam Ratus Rupiah) atau 80,09% (Delapan Puluh Koma Sembilan Persen). Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah tersusunnya Jumlah Dokumen/Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran sebanyak 1 Laporan. (Karena Anggaran Kegiatan Semesteran tidak terealisasi akibat penyesuaian Mekanisme Pengadaan melalui E-Catalog sehingga tidak sesuai dengan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan).

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp 103.104.939,00 (Seratus Tiga Juta Seratus Empat Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 89.600.000,00 (Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atau 86,90% (Delapan Puluh Enam koma Sembilan Puluh Persen). Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah tersusunnya Jumlah Dokumen/Laporan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD sebanyak 1 Dokumen.
- b. Sub Kegiatan Pengaman Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp 75.431.400,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 75.112.629,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Sembilan



Rupiah) atau 99,58% (Sembilan Puluh Sembilan koma Lima Puluh Delapan Persen). Kegiatan ini dilaksanakan untuk pengamanan barang milik daerah berupa pembayaran asuransi kendaraan roda 4 sebanyak 10 unit.

- c. Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp 3.272.100,00 (Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.389.061,00 (Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Satu Rupiah) atau 73,01 (Tujuh Puluh Tiga koma Nol Satu Persen). Kegiatan ini dilaksanakan untuk pengamanan barang milik daerah berupa Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang pada SKPD BPBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 sebanyak 1 Laporan. (Karena kegiatan Cetak untuk penomoran lebel barang menggunakan Kertas A4 yang ditempelkan dengan lakban putih).

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp 75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 15.700.000,00 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) atau 20,93% (Dua Puluh koma Sembilan Puluh Tiga Persen). Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Kursus Singkat atau Pelatihan dan Bimbingan Teknis 25 orang, Kursus Singkat atau Pelatihan 25 Orang. (Karena Kegiatan Bimtek dan Pelatihan Pengembangan ASN di bidang Kebencanaan Tahun ini hanya belum terlalu banyak sehingga hanya sebagian kegiatan pelatihan serta bimtek yang bisa terserap namun untuk kedepannya tetap dianggarkan dikarenakan akan ada peningkatan Kapasitas SDM melalui Bimtek).

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 12.158.800,00 (Dua Belas Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 12.118.200,00 (Dua Belas Juta Seratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah) atau 99,67% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Enam Puluh Tujuh Persen). Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah tersusunnya Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan berupa (pembelian alat listrik sebanyak 1 Paket terdiri dari : 1). Baterai AAA 2).



Baterai Ukuran Kecil 3). Batu Baterai Batu Baterai – Baterai Kotak 4). Bola Lampu Spiral 45 Watt 5). Bola Lampu TL 20 Watt 6). Fitting Lampu 7). Kabel Listrik Clam Kabel 10 mm 8). Kabel Listrik NYM 2x2 mm 9). Kabel NYM 4x2,5 mm 10). Lakban Listrik 11). Lampu Sorot LED 100 Watt 12). MCB 13). Stater 14). Stekker Listrik 15). Stop Kontak Listrik sebanyak 1 Paket selama 12 bulan.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 15.657.800,00 (Lima Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 15.610.300,00 (Lima Belas Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Tiga Ratus Rupiah) atau 99,70% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Tujuh Puluh Persen). Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah : 1 Paket (Perabot Kantor).
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 484.930.541,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 63.689.221,00 (Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) atau 13,13% (Tiga Belas Koma Tiga Belas Persen). Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah tersusunnya Jumlah dan Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan sebanyak 4 Paket berupa (Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabotan Kantor). (Karena BBM yang dianggarkan di ABT Tahun 2025 yang diperuntukan untuk alat berat dalam penanganan bencana longsor namun kejadian seperti tanah longsor yang terjadi di tahun 2025 hanya bersekala kecil yang tidak menggunakan alat berat, sehingga penggunaan BBM Alat Berat tidak dapat direalisasikan).
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 7.389.375,00 (Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 7.240.500,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) atau 97,99% (Sembilan Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Sembilan Persen). Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya Jumlah dan Jenis Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan sebanyak 2 Paket berupa (cetakan dan penggandaan (ATK dan Bahan Cetak, Foto Copy) dengan capaian output keluaran sebesar 97,99% (Sembilan Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Sembilan Persen).
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan, dengan anggaran sebesar Rp. 6.722.600,00 (Enam



Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 4.780.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) atau 71,10% (Tujuh Puluh Satu Koma Sepuluh Persen). Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah tersusunnya Jumlah dan Jenis Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan sebanyak 7 Dokumen surat kabar/majalah dengan capaian output keluaran sebesar 71,10% (Tujuh Puluh Satu Koma Sepuluh Persen). (Karena beberapa Tabloid/Koran ada yang tidak melakukan penagihan sehingga tidak dilakukan pembayaran).

- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 446.596.080,00 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 446.037.078,00 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Delapan Rupiah). Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersusunnya Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi BPBD dan Makan Minum Rapat sebanyak 2 Laporan dengan capaian output keluaran sebesar 99,87% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Tujuh Persen).

6. Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 176.500.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 176.489.928,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) atau 99,99% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Sembilan Persen). Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah 66 Unit berupa terlaksananya Jumlah Pembelian Mebel (Meja Kerja ½ Biro, Meja Kerja 1 Biro, Kursi Kerja dan Meja Rapat). Pembelian Kursi Kerja Pejabat (Kursi Kerja/Rapat dan Kursi Kerja Rapat/Rapat Susun) dengan capaian output keluaran sebesar 99,99% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Sembilan Persen).
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 633.513.000,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 628.748.400,00 (Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 99,25% (Sembilan Puluh Sembilan



Koma Dua Puluh Lima Persen). Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah 39 Unit berupa terlaksananya Jumlah Pembelian Peralatan Alat Studio (Tas Kamera), Pembelian Smart TV (Smart TV 85 Inch), Pembelian Alat Pendingin AC (AC 1 PK), Pembelian Sound System (Sound System Rapat), Pembelian Alat Studio (Kamera, Lensa Sony, Lensa Canon, Dji Asmo), Belanja Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah (Drone Pemetaan), Pembelian Komputer PC (Komputer PC dan Laptop), Pembelian Printer (Printer APC BR1500GI Power-Saving Back-UPS Pro 1500, 230V APC BACK UPS PRO BR 1600VA, 8 OUTLETS, AVR, LCD INTERFACE), Pembelian Peralatan Komputer Lainnya (Kamera Zoom Meeting) dengan capaian output keluaran sebesar 99,25% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Dua Puluh Lima Persen).

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- a. Sub Kegiatan jasa surat menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 8.960.000,00 (Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar 8.620.000,00 (Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau 96,21% (Sembilan Puluh Enam Koma Dua Puluh Satu Persen). Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah berupa terlaksananya Jumlah Pembelian Benda Pos 1 Laporan : 1). Materai 10.000 sebanyak 800 Lembar dengan capaian output keluaran sebesar 96,21% (Sembilan Puluh Enam Koma Dua Puluh Satu Persen).
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 227.015.400,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 182.348.701,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah) atau 80,32% (Delapan Puluh Koma Tiga Puluh Dua Persen). Adapun output/keluaran dari Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tersusunnya 4 Laporan belanja tagihan tlp, air, listrik, internet dan Penambah Daya Listrik selama 12 bulan. (Karena Anggaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tidak terealisasi dikarenakan realisasi pemakaian lebih rendah dari perkiraan serta adanya Efisiensi Penggunaan atau At Cost).



8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 18.000.000,00 (Delapan Belas Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.861.025,00 (Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Puluh Lima Rupiah) atau 10,34% (Sepuluh Koma Tiga Puluh Empat Persen). Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini 1 Unit Kendaraan Roda 4 berupa Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan. (Karena untuk Pembayaran TNKB (Tanda Lunas Kendaraan Bermotor) dianggarkan 18 Juta tetapi realisasi pembayaran Pajak Berjalan terbayar 1.861.025,00 penyebab Kendaraan Dinas Jabatan masih baik tidak mengalami rusak berat dan untuk atau biaya service ringan masih di tanggung oleh pihak Dealer berjalan).
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 386.071.500,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 252.042.292,00 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) atau 65,28% (Enam Puluh Lima Koma Dua Puluh Delapan Persen). Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dan Jenis Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Disediakan sebanyak 40 Unit Kendaraan. (Karena untuk pajak perorangan Kendaraan Operasional biaya mutasi Plat B ke BG BPBD tidak menganggarkan biaya dari lintas per unit, untuk Kendaraan Roda 2 Operasional dan Kendaraan Roda 4 terbayar).
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar, Rp. 199.542.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah) atau 99,77% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Tujuh Puluh Tujuh Persen). Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini berupa Pemeliharaan Gedung Bangunan (Sekat Partisi Ruangan, Pengecatan Kantor BPBD, Pemasangan Badrop Ruang Kalaksa).
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan



anggaran sebesar Rp. 120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.119.807.045,00 (Seratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Tujuh Ribu Empat Puluh Lima Rupiah) atau 99,84% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Delapan Puluh Empat Persen). Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini Jumlah dan Jenis Perlengkapan Kerja yang dipelihara Secara Rutin/Berkala sebanyak 4 Unit Peralatan berupa Pemeliharaan Gedung Kantor (Pemeliharaan Sarana Prasarana Penunjang Gedung).

- e. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 107.707.214,00 (Seratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah) dengan realisasi sebesar, Rp. 84.225.000,00 (Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 78,20% (Delapan Puluh Delapan Koma Lima Puluh Lima Persen). Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini berupa Jumlah dan Jenis Perlengkapan Kerja yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala sebanyak 6 Sub Kegiatan berupa (Pengisian Isi Ulang Tabung Apar, Isi Ulang Tabung gas LPG 12 KG, Pemeliharaan Perbaikan CCTV, Perbaikan Mesin Rumput, Perbaikan Chainsaw, Bongkar Pasang AC 1-PK, Pemeliharaan AC Split), Pemeliharaan Instalasi Listrik, Pemeliharaan Instalasi Air, Pemeliharaan Peralatan Mesin Air, Pemeliharaan Mesin Genset, Pemeliharaan Komputer/Laptop dan Notebook dan Printer). (Karena Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebagian masih dalam kondisi baik sehingga hanya sedikit memakai biaya pemeliharaan)

B. Program Penanggulangan Bencana.

Alokasi anggaran untuk program Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 2.140.673.856,00 (Dua Milyar Seratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.568.252.051,00 (Satu Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Puluh Satu Rupiah) atau 73,26% (Tujuh Puluh Tiga Koma Dua Puluh Enam Persen). Program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 13 sub kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk:



- a. Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dengan anggaran sebesar Rp. 71.774.175,00 (Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 61.567.100,00 (Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) atau 85,78% (Delapan Puluh Lima Koma Tujuh Puluh Delapan Persen). Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini berupa Jumlah Warga Negara termasuk Kelompok Rentan di Kawasan Rawan Bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi sesuai jenis Ancaman Bencana yang ada di Kawasan tempat tinggalnya selama 1 Tahun sebanyak 120 Orang.

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

memberikan informasi rawan bencana dikawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana yang keberhasilannya diukur berdasarkan perbandingan penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi terhadap keseluruhan penduduk dengan target sebesar 100% dan capaian kinerja sebanyak 120 Pelajar SD Daerah Rawan Bencana atau realisasi sebesar 80,87%

- a. Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 17.841.726,00 (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 7.160.300,00 (Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah) atau 40,13% (Empat Puluh Koma Tiga Belas Persen). Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini berupa Jumlah Warga Negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan untuk menguji Efektifitas SOP dan Keberfungsian Sarana Prasarana dalam Pengendalian Operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota sebanyak 250 Orang dengan output keluaran 40,13%. (Dikarenakan kegiatan Gladi Kesiapsiagaan berupa apel menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan dan Apel menghadapi banjir dan longsor bekerjasama dengan Instansi terkait dan OPD Lintas Sektor



lainnya sehingga ada beberapa yang tidak bisa direalisasikan).

- b. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 636.487.075,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 496.922.800,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau 78,07% (Tujuh Puluh Delapan Ratus Tujuh Persen). Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini berupa terlatihnya sebanyak 59 Orang Tim Reaksi Cepat BPBD dengan output keluaran sebesar 78,07%. (Gaji TRC hanya dibayarkan sampai bulan 8 dikarenakan telah diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu).
- c. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi dengan anggaran sebesar Rp. 71.277.702,42 (Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah Koma Empat Puluh Dua) dengan realisasi sebesar Rp. 41.125.630,00 (Empat Puluh Satu Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau 57,70% (Lima Puluh Tujuh Ratus Tujuh Puluh Persen). Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini berupa (Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun sebanyak 3 Dokumen dengan output keluaran sebesar 57,70%. (dikarenakan SK Bupati untuk Honorarium untuk Tim Tenaga hanya bisa dibayarkan selama 3 (tiga) Bulan)
- d. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 264.157.638,00 (Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 255.248.366,00 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) atau 96,63% (Sembilan Puluh Enam Ratus Enam Puluh Tiga Persen). Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini berupa Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan di Kawasan Rawan Bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti



Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana sebanyak 1 Kawasan dengan output keluaran 96,63%.

3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

- a. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 138.728.406,58 (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Rupiah Koma Lima Puluh Delapan) dengan realisasi sebesar Rp. 107.437.090,00 (Seratus Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Rupiah) atau 77,44% (Tujuh Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Empat Persen). Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini berupa Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat sebanyak 2 Dokumen dengan Output Keluaran 77,44%. (Karena untuk Kegiatan ATK Cetak Spanduk SPPD terealisasi dengan Kebutuhan tetapi Kegiatan Makan Minum Lintas OPD untuk Kegiatan Kebencanaan tidak ada yang parah dan patal dalam penetapan Status Tanggap Darurat oleh karena itu Kegiatan Makan Minum terealisasi sesuai dengan peruntukan dilapangan).
- b. Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 155.440.525,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 150.783.130,00 (Seratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) atau 97,00% (Sembilan Puluh Tujuh Koma Nol Nol Persen). Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini berupa Jumlah Korban yang berhasil ditemukan, Ditolong dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana sebanyak 500 Orang dengan Output Keluaran 97,00%.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 73.362.775,00 (Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.



51.995.200,00 (Lima Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah) atau 70,87% (Tujuh Puluh Koma Delapan Puluh Tujuh Persen). Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini berupa Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan Output Keluaran 70,87%. (Karena Kegiatan Pengantaran Logistik yang masih Nihil di Tahun 2025 di 22 Kecamatan 324 Desa, penyebabnya juga banyak pengantaran logistik di dalam Kota Kecamatan Muara Enim).

- d. Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 493.829.925,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 204.738.900,00 (Dua Ratus Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau 41,46% (Empat Puluh Satu Koma Empat Puluh Enam Persen). Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini berupa Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana Kabupaten/Kota sebanyak 70 Laporan dengan Output Keluaran 41,46%. (Karena uang lelah petugas penanganan bencana tidak terealisasi sesuai dengan anggaran salah satu penyebabnya Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana tidak begitu panjang dan lama kisaran 1 sampai 2 hari api sudah bisa dipadamkan karena bencana Hidrometeorologi Basah dan Kering tidak begitu parah (kejadian masiv)).

4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

- a. Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 50.278.500,00 (Lima Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 46.816.499,00 (Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) atau 93,11% (Sembilan Puluh Tiga Koma Sebelas Persen). Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Kerja Sama antar



Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana sebanyak 1 Dokumen dengan Output Keluaran 93,11%.

- b. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan dengan anggaran sebesar Rp. 70.141.800,00 (Tujuh Puluh Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 66.821.654,00 (Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) atau 95,27% (Sembilan Puluh Lima Koma Dua Puluh Tujuh Persen). Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia sebanyak 12 Dokumen dengan Output Keluaran 95,27%.
- c. Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 22.250.063,00 (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 22.250.063,00 (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah) atau 100% (Seratus Persen). Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Penyelesaian Dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan Dinyatakan Sah/Legal Paling lama dalam 1 (satu) tahun sebanyak 2 Dokumen dengan Output Keluaran 100%.
- d. Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 75.103.545,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 55.385.319,00 (Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Belas Rupiah) atau 73,75% (Tujuh Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Lima Persen). output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Penyelesaian Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan Sah dan Legal Paling Lama dalam 1 (Satu) Tahun berupa 1 Dokumen dengan Output Keluaran 73,75%. (Koordinasi awal untuk kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Dokumen JITUPASNA dan R3P ke BNPB Tidak Melaksanakan kunjungan secara langsung ke



BNPB melainkan melalui zoom dan melalui media Handphone, Sehingga biaya Perjalanan Dinas ke BNPB di Jakarta tidak kami Laksanakan secara langsung ke BNPB di Jakarta).

3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Tujuan	Sasaran				Persen Capaian
	Uraian	Indikator	Target	Realisasi	
Terwujudnya Ketangguhan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Muara Enim	1 Meningkatkan Tata Kelola Penanggulangan Bencana yang Profesional, Transparan, dan Akuntabel	Presentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang Mendapat Informasi Rawan Bencana	100%	Realisasi keberhasilan masyarakat di kawasan rawan bencana yang mendapatkan informasi rawan bencana melalui meningkatnya pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana di wilayahnya. Hal ini tercermin dari meningkatnya partisipasi dalam kegiatan sosialisasi, edukasi kebencanaan dan penyebaran informasi melalui media sosial serta dukungan lintas sektor	100%
		Persentase Masyarakat di Kawasan Rawan Bencana yang mendapatkan	100%	Realisasi keberhasilan masyarakat di kawasan rawan bencana yang	100%



Tujuan	Sasaran				Persen Capaian
	Uraian	Indikator	Target	Realisasi	
		pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ditunjukan melalui meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Hal ini tercermin dari terselenggaranya kegiatan gladi kesiapsiagaan, pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, pengembangan kapasitas TRC dan penyusunan dokumen rencana kontijensi	
		Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan penyelamatan dan Bencana	100%	Realisasi Kegiatan ini berhasil jika sistem komando mampu mengintegrasikan respon cepat dengan ketersediaan logistik sehingga proses	100%



Tujuan	Sasaran				Persen Capaian
	Uraian	Indikator	Target	Realisasi	
				penyelamatan dan Evakuasi berjalan tanpa hambatan birokrasi yang rumit	
		Persentase Meningkatkan Mutu Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	Realisasi layanan sistem informasi kebencanaan merupakan layanan informasi kebencanaan yang telah tersedia, berfungsi, dan dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Muara Enim. dalam rangka mendukung penyediaan data dan informasi yang cepat, akurat, terintegrasi, dan transparan dalam pengambilan keputusan dan koordinasi lintas sektor pada seluruh tahapan penanggulangan bencana	100%



4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	Kegiatan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD tidak terealisasi akibat penyesuaian Mekanisme Pengadaan melalui E-Catalog sehingga tidak sesuai dengan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan	Melakukan Evaluasi Perencanaan dan Mekanisme Pengadaan Melalui E-Katalog guna memastikan Kegiatan dapat terlaksana pada Tahun Anggaran berikutnya
2	Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN karena perkiraan pada Awal Tahun 2025 OPD BPBD Kabupaten Muara Enim meningkat menjadi eselon II.b sehingga untuk anggaran gaji pegawai dianggarkan sesuai dengan kebutuhan peningkatan Esselon dari Esselon III.a menjadi Esselon II.b namun sampai Desember 2025 belum terealisasi	Untuk Anggaran Gaji tetap dianggarkan dan akan disesuaikan kembali sesuai dengan peningkatan Esselon Kantor menjadi Esselon II
3	Laporan Akhir Tahun Keuangan tidak terealisasi karena akibat penyesuaian Mekanisme Pengadaan melalui E-Catalog sehingga tidak sesuai dengan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan	Melakukan Evaluasi Perencanaan dan Mekanisme Pengadaan Melalui E-Katalog guna memastikan Kegiatan dapat terlaksana pada Tahun Anggaran berikutnya
4	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD karena tidak terealisasi akibat penyesuaian Mekanisme Pengadaan melalui E-Catalog sehingga tidak sesuai dengan Pagu Anggaran yang telah ditetapkan	Melakukan Evaluasi Perencanaan dan Mekanisme Pengadaan Melalui E-Katalog guna memastikan Kegiatan dapat terlaksana pada Tahun Anggaran berikutnya
5	Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang pada SKPD karena kegiatan Cetak untuk penomoran lebel barang menggunakan Kertas A4 yang ditempelkan dengan lakban putih	Agar tertib Administrasi dalam Penomoran Barang tetap Bagus untuk Kegiatan Cetak tetap dianggarkan di Tahun berikutnya
6	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi karena Kegiatan Bimtek dan Pelatihan Pengembangan ASN di bidang Kebencanaan Tahun ini hanya belum terlalu banyak sehingga hanya sebagian kegiatan pelatihan serta bimtek yang bisa terserap namun untuk kedepannya tetap dianggarkan dikarenakan akan ada peningkatan Kapasitas SDM melalui Bimtek	untuk Tahun 2026 tetap dianggarkan dikarenakan akan ada peningkatan Kapasitas SDM melalui Bimtek



No	Permasalahan	Solusi
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor karena BBM yang dianggarkan di ABT Tahun 2025 yang diperuntukan untuk alat berat dalam penanganan bencana longsor namun kejadian seperti tanah longsor yang terjadi di tahun 2025 hanya bersekala kecil yang tidak menggunakan alat berat, sehingga penggunaan BBM Alat Berat tidak dapat direalisasikan	Sebaiknya untuk Anggaran Tahun 2026 dan 2027 BBM yang di peruntukan untuk Alat Berat tetap di Anggarkan untuk Penanganan Bencana
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan karena beberapa Tabloid/Koran ada yang tidak melakukan penagihan sehingga tidak dilakukan pembayaran	Untuk Tahun berjalan tetap dianggarkan
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik karena Anggaran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tidak terealisasi dikarenakan realisasi pemakaian lebil rendah dari perkiraan serta adanya Efisiensi Penggunaan atau At Cost	Melakukan Efisiensi dan Pengendalian Pemakaian Listrik dan Air sehingga Realisasi Anggaran lebih rendah dari perkiraan
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan karena untuk Pembayaran TNKB (Tanda Lunas Kendaraan Bermotor) dianggarkan 18 Juta tetapi realisasi pembayaran Pajak Berjalan terbayar 1.861.025,00 penyebab Kendaraan Dinas Jabatan masih baik tidak mengalami rusak berat dan untuk atau biaya service ringan masih di tanggung oleh pihak Dealer berjalan	Untuk Kegiatan 2026 dan 2027 tetap dianggarkan sesuai dengan kebutuhan
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan karena untuk pajak perorangan Kendaraan Operasional biaya mutasi Plat B ke BG BPBD tidak menganggarkan biaya dari lantas per unit, untuk Kendaraan Roda 2 Operasional dan Kendaraan Roda 4 terbayar	Untuk biaya mutasi Plat dan Berkas Administrasi akan segera diusulkan di SIPD Kemendagri Perencanaan/ Anggaran Berjalan



No	Permasalahan	Solusi
12	Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Karena Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebagian masih dalam kondisi baik sehingga hanya sedikit memakai biaya pemeliharaan	Untuk lebih cermat dalam menghitung kebutuhan anggaran
13	Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Dikarenakan kegiatan Gladi Kesiapsiagaan berupa apel menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan dan Apel menghadapi banjir dan longsor bekerjasama dengan Instansi terkait dan OPD Lintas Sektor lainnya sehingga ada beberapa yang tidak bisa direalisasikan	Untuk kedepannya agar pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota di Akamodir oleh Pihak BPBD sepenuhnya supaya tercapai target anggaran yang tersedia oleh karena itu kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota harus dianggarkan karena termasuk di dalam SPM Trantibumlinmas
14	Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota dikarenakan Gaji TRC hanya dibayarkan sampai bulan 8 dikarenakan telah diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu	Tetap harus dianggarkan dikarenakan untuk pengembangan Kapasitas TRC Lintas Sektor di dalam Penanganan Bencana
15	Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi dikarenakan SK Bupati untuk Honorarium untuk Tim Tenaga hanya bisa dibayarkan selama 3 (tiga) Bulan	Tetap harus dianggarkan dikarenakan masa berlakunya Dokumen Renkon selama 3 Tahun dan harus direviu kembali
16	Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota karena untuk Kegiatan ATK Cetak Spanduk SPPD terealisasi dengan Kebutuhan tetapi Kegiatan Makan Minum Lintas OPD untuk Kegiatan Kebencanaan tidak ada yang parah dan patal dalam penetapan Status Tanggap Darurat oleh karena itu Kegiatan Makan Minum terealisasi sesuai dengan peruntukan dilapangan	Untuk Kegiatan Makan Minum Lintas OPD guna Penangaan Status Tanggap Darurat Bencana Wajib dianggarkan karena bencana tidak bisa di prediksi
17	Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota karena Kegiatan Pengantaran Logistik yang masih Nihil di Tahun 2025 di 22 Kecamatan 324 Desa, penyebabnya juga banyak pengantaran logistik di dalam Kota Kecamatan Muara Enim	Masih wajib dianggarkan karena kejadian bencana tidak bisa di prediksi



No	Permasalahan	Solusi
18	Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana karena uang lelah petugas penanganan bencana tidak terealisasi sesuai dengan anggaran salah satu penyebabnya Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana tidak begitu panjang dan lama kisaran 1 sampai 2 hari api sudah bisa dipadamkan karena bencana Hidrometeorologi Basah dan Kering tidak begitu parah kejadian masiv	Kegiatan Uang lelah di tahun 2026 dirubah menjadi uang saku petugas penanganan bencana
19	Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota Koordinasi awal untuk kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Dokumen JITUPASNA dan R3P ke BNPB Tidak Melaksanakan kunjungan secara langsung ke BNPB melainkan melalui zoom dan melalui media Handphone, Sehingga biaya Perjalanan Dinas ke BNPB di Jakarta tidak kami Laksanakan secara langsung ke BNPB di Jakarta	perbaiki perencanaan untuk kegiatan yg serupa, serta memperhatikan volume kegiatan perjalanan dinas

5. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pada tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muara Enim berhasil meraih penghargaan terbaik ke-3 atas hasil audit sistem kearsipan internal perangkat daerah. Penghargaan ini mencerminkan upaya BPBD dalam meningkatkan tata kelola administrasi dan dokumentasi kelembagaan, sehingga mendukung efektivitas pelayanan publik serta kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Capaian tersebut juga menjadi motivasi bagi BPBD Kabupaten Muara Enim untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan arsip sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi.



6. URUSAN SOSIAL OLEH DINAS SOSIAL

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan Wajib Sosial diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim. Pada Tahun Anggaran 2025, alokasi belanja Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim sebesar **Rp. 21.589.034.029,-** dan Terealisasi sebesar **Rp. 18.986.791.569,71,- atau sebesar (87.95)%**

A. Belanja Operasional

Belanja Operasi sebesar Rp. 12.377.716.029,- (Dua Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Dua Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 80,17%.

B. Belanja Modal

Belanja Modal sebesar Rp.9.211.318.000,- (Sembilan Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) atau sebesar 98,39%.

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Terdiri dari 6 Program,15 Kegiatan, dan 44 Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp. 175.952.950 dengan realisasi sebesar Rp. 129.787.335 atau sebesar (74)%

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 40.766.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 32.997.300,- atau sebesar (80.94)%
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 8.163.975,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.069.844,- atau sebesar (74.35)%
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 19.633.075,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.18.191.981,- atau sebesar (92.66)%
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 33.851.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.004.972,- atau sebesar (67.96)%
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 50.388.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.223.197,- atau sebesar (78)%
- f. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan



anggaran sebesar Rp. 23.149.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.300.041,- atau sebesar (44.49)%

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp. 4.097.892.174 dengan realisasi sebesar Rp. 3.364.692.272 atau sebesar (82.11)%

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 4.022.930.274,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.327.318.012,- atau sebesar (82.71)%
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 36.925.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.270.157,- atau sebesar (46.77)%
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 38.036.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.104.103,- atau sebesar (52.86)%

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp. 133.471.000 dengan realisasi sebesar Rp. 108.044.338 atau sebesar (81)%

- a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 133.471.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 108.044.338,- atau sebesar (80.95)%

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah Alokasi anggaran sebesar Rp. 575.238.900 dengan realisasi sebesar Rp. 487.652.955 atau sebesar (85)%

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 12.091.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.822.610,- atau sebesar (97.78)%
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 22.607.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.501.443,- atau sebesar (77.42)%
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor anggaran sebesar Rp. 84.253.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 56.459.706,- atau sebesar (67.01)%
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



anggaran sebesar Rp. 1.580.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.580.300,- atau sebesar (100)%

- e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan anggaran sebesar Rp. 6.372.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.372.000,- atau sebesar (100)%
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD anggaran sebesar Rp.448.334.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 393.916.896,- atau sebesar (87.86)%

5. Kegiatan Pengadaan barang milk daerah penunjang urusan pemerintah Alokasi anggaran sebesar Rp. 8.726.318.000 dengan realisasi sebesar Rp. 8.589.753.300 atau sebesar (98)%

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel anggaran sebesar Rp. 674.500.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.636.618.300,- atau sebesar (94.38)%
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya anggaran sebesar Rp.622.920.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 612.265.000,- atau sebesar (98.29)%
- c. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya anggaran sebesar Rp.7.428.898.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.340.870.000,- atau sebesar (98.82)%

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp. 325.153.600 dengan realisasi sebesar Rp. 189.853.261 atau sebesar (58)%

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat anggaran sebesar Rp. 3.595.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.210.000,- atau sebesar (89.29)%
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik anggaran sebesar Rp. 204.998.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 109.428.261,- atau sebesar (53.38)%
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor anggaran sebesar Rp. 24.280.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.255.000,- atau sebesar (99.90)%
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor anggaran sebesar Rp. 92.280.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.52.960.000,- atau sebesar (57.39)%

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang



Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp. 328.251.725 dengan realisasi sebesar Rp. 326.292.370 atau sebesar (99)%

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Anggaran sebesar Rp.328.251.725,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 326.292.370,- atau sebesar (99.40)%

B. Program Pemberdayaan Sosial

1. Kegiatan tersebut adalah Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Alokasi anggaran sebesar Rp. 47.524.345 dengan realisasi semester 2 sebesar Rp. 38.564.695 atau sebesar (81)%

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT Anggaran sebesar Rp. 47.524.345,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 38.564.695,- atau sebesar (81.15)%

2. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 3.428.220.333 dengan realisasi sebesar Rp. 2.452.509.514 atau sebesar (72)%

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan kabupaten/Kota Anggaran sebesar Rp. 319.666.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 205.266.820,- atau sebesar (64.21)%
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Anggaran sebesar Rp. 2.530.588.048,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.753.594.974,- Atau sebesar (69.30)%
- c. Sub Kegiatan Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Anggaran Sebesar Rp. 537.850.185,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 473.803.030,- Atau sebesar (88.09)%
- d. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Anggaran Sebesar Rp. 40.116.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.844.690,- Atau sebesar (49.47)%



C. Program Rehabilitasi Sosial

1. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial Alokasi anggaran sebesar Rp. 220.580.775 dengan realisasi sebesar Rp. 189.624.300 atau sebesar (86)%

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Permakan Anggaran Sebesar Rp. 12.736.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.064.400,- Atau sebesar (47.62)%
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang Anggaran Sebesar Rp. 32.789.825,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.15.987.700,- Atau sebesar (48.76)%
- c. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Anggaran Sebesar Rp. 175.054.750,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.167.572.200,- Atau sebesar (95.73)%

2. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Panti Sosial Alokasi anggaran sebesar Rp. 679.280.950 dengan realisasi sebesar Rp. 630.197.864 atau sebesar (93)%

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu Anggaran Sebesar Rp. 473.689.425,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 459.865.328,- Atau sebesar (97.08)%
- b. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Anggaran Sebesar Rp. 14.075.650,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.182.200,- Atau sebesar (86.55)%
- c. Sub Kegiatan Pemberian layanan rujukan Anggaran Sebesar Rp. 191.515.875,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 158.150.336,- Atau sebesar (82.58)%

D. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Kegiatan Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar Alokasi anggaran sebesar Rp. 53.493.575 dengan realisasi sebesar Rp. 47.425.174 atau sebesar (89)%

- a. Sub Kegiatan Rujukan Anak Anak Telantar Anggaran Sebesar Rp. 53.493.575,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.425.611,- Atau sebesar (88.66)%



2. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 747.208.912 dengan realisasi sebesar Rp. 660.586.273 atau sebesar (88)%

- a. Sub Kegiatan Pendataan Fakir miskin cakupan daerah kabupaten /kota Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran Sebesar Rp. 133.878.012,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 98.927.611,- Atau sebesar (73.89)%
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir miskin cakupan daerah kabupaten /kota Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Anggaran Sebesar Rp. 120.922.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 118.316.275,- Atau sebesar (97.84)%
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Anggaran Sebesar Rp.117.174.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 82.708.652,- Atau sebesar (70.59)%
- d. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Anggaran Sebesar Rp. 375.234.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 360.633.735,- Atau sebesar (96.11)%

E. Program Penanganan Bencana

1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.221.764.100 dengan realisasi semester 2 sebesar Rp. 966.031.592 atau sebesar (79)%

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan Anggaran Sebesar Rp.1.221.764.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 966.031.592,- Atau sebesar (79.07)%

F. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 828.682.690 dengan realisasi sebesar Rp. 805.776.326,71 atau sebesar (97)%

- a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Anggaran Sebesar Rp. 657.207.915,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 640.409.371,71,- Atau sebesar (97.44)%
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Anggaran Sebesar Rp. 171.474.775,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 165.366.955,- Atau sebesar (96.44)%



3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Sesuai dengan terget kinerja sasaran dalam Renstra, Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Kesejahteraan PPKS	Persentase PPKS yang Sejahtera	85 %	84,16%	99,01 %

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Masih terdapat perbedaan antara harga satuan pada SIPD dengan harga e-catalog maupun harga pasar aktual, termasuk pada belanja ATK, sehingga berpengaruh terhadap optimalisasi penyerapan anggaran.	Dilakukan evaluasi dan penyesuaian harga satuan SIPD serta pagu anggaran berdasarkan referensi harga pasar aktual melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait.
2.	Sebagian anggaran gaji operator komputer tidak terealisasi selama beberapa bulan akibat keterbatasan ketersediaan tenaga dan penataan kebutuhan SDM.	Dilakukan optimalisasi dan pengalihan anggaran serta penyesuaian perencanaan kebutuhan tenaga pada tahun berikutnya agar lebih sesuai dengan kondisi riil.
3.	Terdapat penyesuaian pelaksanaan kegiatan dan pemberian honorarium/tali asih akibat perubahan regulasi, pengangkatan TKSK dan TAGANA menjadi PPPK, serta perubahan kebijakan program seperti santunan kematian.	Dilakukan penyesuaian kebijakan dan penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta koordinasi lintas perangkat daerah.
4.	Sebagian honorarium tim tidak terealisasi karena belum terdapat kebutuhan layanan dari masyarakat pada periode pelaksanaan kegiatan.	Dilakukan evaluasi perencanaan kegiatan dan penganggaran honorarium agar lebih berbasis kebutuhan aktual masyarakat.
5.	Realisasi anggaran rumah singgah belum optimal, antara lain karena penurunan pemakaian listrik, pengurangan tenaga pelayanan dan kebersihan, serta dinamika jumlah dan lama tinggal penerima manfaat yang sulit diprediksi.	Dilakukan penyesuaian pola penganggaran berbasis kebutuhan riil, peningkatan fleksibilitas pembiayaan layanan, serta penataan tenaga melalui mekanisme yang akan ditetapkan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI



3.3. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. URUSAN TENAGA KERJA OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan Wajib Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh perangkat daerah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2025, alokasi belanja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim sebesar Rp **12.633.074.392,80** (*Dua belas miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah delapan puluh sen*) dan terealisasi sebesar Rp**11.429.477.064,00** (*Sebelas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam puluh empat rupiah*) atau **90,47** Persen dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100 Persen dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp **11.902.602.758,80** (*Sebelas miliar sembilan ratus dua juta enam ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah delapan puluh sen.*) terealisasi sebesar Rp **10.705.536.062,00** (*Sepuluh miliar tujuh ratus lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam puluh dua rupiah*) atau **89,94** Persen yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp **730.471.634,00** (*Tujuh ratus tiga puluh empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah*) terealisasi sebesar Rp**723.941.002,00** (*Tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua rupiah*) atau **99,11** Persen yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim melaksanakan 5 Program, 18 Kegiatan, dan 43 Sub Kegiatan yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Alokasi Anggaran Rp 9.910.777.058,8 Dengan Realisasi Sebesar Rp 9.115.749.578.



1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp 101.626.025 Dengan Realisasi sebesar Rp 95.106.179

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 15.310.375 dengan realisasi sebesar Rp 14.518.765
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 14.707.475,00 dengan realisasi sebesar Rp 13.881.914,00
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 15.251.175,00 dengan realisasi sebesar Rp 14.117.044,00
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 11.279.175,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.667.400,00
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 10.558.175,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.766.839,00
- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 17.681.075,00 dengan realisasi sebesar Rp 16.246.870,00
- g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 16.838.575,00 dengan realisasi sebesar Rp 15.907.347,00

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 6.562.967.434,80 dengan realisasi sebesar 5.914.808.202,00

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN alokasi anggaran sebesar Rp 6.519.824.578,80 dengan realisasi sebesar Rp 5.874.176.402,00
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 6.518.456,00 dengan realisasi sebesar Rp 5.821.440,00
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 4.963.600,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.439.780,00



- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 14.568.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 13.983.600,00
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 17.091.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 16.386.980,00
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 32.102.400 dengan realisasi sebesar Rp 30.657.060**
- a. Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 38.522.880,00 dengan realisasi sebesar Rp 38.255.715,00
- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 118.031.200,00 Dengan Realisasi Sebesar Rp 112.954.000,00**
- a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi alokasi anggaran sebesar Rp 45.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 26.400.000,00
 - b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan alokasi anggaran sebesar Rp 10.350.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.350.000,00
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 1.571.033.786,00 Dengan Realisasi Sebesar Rp 1.542.588.067,00**
- a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor alokasi anggaran sebesar Rp 37.250.600,00 dengan realisasi sebesar Rp 36.528.026,00
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi anggaran sebesar Rp 506.206.444,00 dengan realisasi sebesar Rp 482.871.281,00
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor alokasi anggaran sebesar Rp 141.747.216,00 dengan realisasi sebesar Rp 140.342.480,00



- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan alokasi anggaran sebesar Rp 26.854.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 24.524.000,00
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan alokasi anggaran sebesar Rp 8.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 5.640.000,00
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD alokasi anggaran sebesar Rp 405.142.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 405.118.645,00
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 281.141.100,00 dengan realisasi sebesar Rp 280.699.000,00**
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Meubel alokasi anggaran sebesar Rp 272.586.834,00 dengan realisasi sebesar Rp 271.728.000,00
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 395.056.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 336.981.653,00**
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat alokasi anggaran sebesar Rp 7.735.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.730.000,00
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik alokasi anggaran sebesar Rp 233.011.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 184.051.653,00
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi anggaran sebesar Rp 33.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 33.400.000,00
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi anggaran sebesar Rp 120.360.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 111.800.000,00
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah alokasi anggaran sebesar Rp 1.078.324.420,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.046.396.397,00**
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan alokasi anggaran sebesar Rp 266.302.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 238.566.397,00
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan



Bangunan Lainnya alokasi anggaran sebesar Rp 798.000.000,00 dengan realisasi sebesar 794.000.000,00

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya alokasi anggaran sebesar Rp 14.021.920,00 dengan realisasi sebesar 13.830.000,00

B. Program Perencanaan Tenaga Kerja Alokasi Anggaran Rp 202.741.989,00 Dengan Realisasi Sebesar Rp 187.974.323,00

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Alokasi Anggaran sebesar Rp 202.741.989,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 187.974.323,00

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro alokasi anggaran sebesar Rp 202.741.989,00 dengan realisasi sebesar Rp 187.974.323,00

C. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Alokasi Anggaran Rp1.790.235.550,00 Dengan Realisasi Sebesar Rp 1.454.476.826,00

1. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Alokasi Anggaran sebesar 1.745.225.050,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 1.409.642.026,00

- a. Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi alokasi anggaran sebesar 1.745.225.050,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.409.642.026,00

2. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Alokasi Anggaran sebesar Rp. 15.460.500,00 Dengan Realisasi sebesar Rp. 15.443.300,00

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta alokasi anggaran sebesar Rp15.460.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 15.443.300,00

3. Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil alokasi anggaran sebesar Rp 29.550.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 29.391.500,00

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil 29.550.000,0 dengan realisasi Rp 29.391.500,00



D. Program Penempatan Tenaga Kerja Alokasi Anggaran Rp 488.856.800,00 Dengan Realisasi Sebesar 444.899.022,00

1. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp 181.451.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 139.915.130,00

- a. Sub Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar 86.700.700,00 dengan realisasi sebesar 86.423.382,00
- b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan alokasi anggaran sebesar 55.837.300,00 dengan realisasi sebesar 37.151.449,00
- c. Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja alokasi anggaran Rp 38.913.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 16.340.299,00

2. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja alokasi anggaran Rp 195.720.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 194.329.450,00

- a. Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja alokasi anggaran Rp 195.720.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 194.329.450,00

3. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran Rp 111.685.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 110.654.442,00

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran alokasi anggaran Rp 111.685.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 110.654.442,00

E. Program Hubungan Industrial Alokasi Anggaran Rp 240.463.000,00 Dengan Realisasi Sebesar Rp 222.334.304,00

1. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp 145.070.700,00 dengan realisasi sebesar Rp127.342.365,00

- a. Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan bagi Perusahaan dengan alokasi anggaran sebesar 41.186.400,00 dengan realisasi sebesar 41.029.117,00
- b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan alokasi anggaran sebesar Rp



103.884.300,00 dengan realisasi sebesar Rp 86.313.248,00

2. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Rp 95.392.300,00 dengan realisasi sebesar Rp 94.991.939,00

- a. Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar 56.903.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 56.751,486,00
- b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja//Serikat Buruh serta Non Afiliasi alokasi anggaran sebesar Rp 38.488.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 38.240.453,00

Selain itu dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mengelola **Pendapatan Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)**. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2022 tentang *Retribusi* Penggunaan Tenaga Kerja Asing, maka Realisasi Pendapatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim untuk Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perpanjangan Ijin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)/ RPTKA Tahun 2024 adalah sebesar **Rp4.362.711.792,00** (Empat miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah) atau **174,16 %** dari target Rp **2.505.000.000,00** (Dua miliar lima ratus lima juta rupiah).

3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Menurunkan Pengangguran Terbuka	Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing	Persentase peserta pelatihan berbasis kompetensi yang	80%	89%	111,25%



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
			tersertifikasi kompetensi			
2.		Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja	Tingkat kesempatan kerja	96%	95,87%	99,86%
3.		Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang harmonis	Persentase Perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	92%	80,66%	87,67%

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	1. Kualitas angkatan kerja rendah yang disebabkan karena kurangnya ketrampilan, kurangnya kompetensi dan kurangnya daya juang/karakter. Kondisi ini berdampak tidak <i>link and match</i> antara kualifikasi yang dimiliki angkatan kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Permasalahan muncul karena adanya penumpukan angkatan kerja yang tidak bisa terserap di pasar kerja (menganggur). 2. Permasalahan diatas mendorong terjadinya Tingkat Pengangguran Terbuka dengan tingkat pendidikan menengah dan rendah. 3. Terbatasnya kesempatan kerja formal memicu naiknya jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Muara Enim, sehingga perlu didorong perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat.	1. Melakukan berbagai pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas dengan program-program, dimana dalam program ini peserta yang ada tidak hanya mendapatkan keterampilan yang mumpuni tetapi juga mendapatkan bantuan peralatan setelah masa pelatihan selesai. 2. Optimalisasi kinerja Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dan Industri yang telah dibentuk guna mengakomodir pelaksanaan pelatihan, pemagangan, dan penempatan sesuai skill yang dibutuhkan oleh dunia kerja namun terdapat keterbatasan sarana dan prasarana pemerintah. 3. Menjalin kerjasama dengan Stakeholders terkait untuk pemagangan dan penempatan tenaga kerja baik dalam negeri maupun luar negeri. 4. Program pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi pekerja atau buruh yang



No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
	4. Tidak tersedianya potensi lahan transmigrasi yang baru.	terdampak pandemi, seperti program Tenaga kerja mandiri dan kewirausahaan. 5. Pembukaan layanan konsultasi, informasi serta pengaduan bagi para tenaga kerja atau buruh terkait Hubungan Industrial di perusahaan.

5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

1. Juara Harapan II Audit Kearsipan Internal Tingkat Perangkat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025



2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Bagian ini akan menjelaskan alokasi anggaran belanja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan realisasi anggaran dalam bentuk nominal dan persentase yang dibagi dengan rincian sebagai berikut :

A. Total Belanja 2025

Anggaran 20.512.613.748,10 Realisasi 15.511.693.574 (75,62%)

B. Belanja Operasional

Anggaran 12.779.408.268,10 Realisasi 10.617.658.578 (83,08%)

C. Belanja Modal

Anggaran 7.733.205.480 Realisasi 4.894.034.996 (63,29%)

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim pada tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 20.512.613.748,00 dan terealisasi tahun 2025 sebesar Rp.15.511.693.574,00 dengan persentase 75,62%

Terdiri dari 7 (Tujuh) program dan 20 (dua puluh) kegiatan dan 53 (Lima Puluh Tiga) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 119,113,555,00 dengan Realisasi sebesar Rp. 102.576.600,00

- a. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD alokasi anggaran sebesar **Rp. 43.792.520,00** dengan Realisasi sebesar **Rp.43.070.000,00** dengan persentase **98,35 %**
- b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD alokasi anggaran sebesar **Rp.15.394.600,00** dengan Realisasi sebesar **Rp. 12.013.150,00** dengan persentase **78,03%** Sub kegiatan ini terdiri dari belanja Alat Tulis Kantor dan Bahan Cetak, Belanja terealisasi kurang dari 80% karena harga satuan barang yang dibeli melalui E-Purchasing (E-Catalogue) lebih murah dibandingkan estimasi satuan harga (SSH) yang dianggarkan. Selisih tersebut mengakibatkan sisa anggaran meskipun secara kuantitas barang yang dibutuhkan sudah terpenuhi.



- c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD alokasi anggaran sebesar **Rp.17.373.700,00** dengan Realisasi sebesar **Rp. 14.013.900,00.** dengan persentase **80,66%**
- d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD alokasi anggaran sebesar **Rp. 18.795.700,00** dengan Realisasi sebesar **Rp.15.769.150,00.** dengan persentase **83,90%**
- e. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD alokasi anggaran sebesar **Rp.23.757.035,00** dengan Realisasi sebesar **Rp. 17.710.400,00** dengan persentase **74,55%**, Sub kegiatan ini terdiri dari belanja Alat Tulis Kantor dan Bahan Cetak, Belanja terealisasi kurang dari 80% karena harga satuan barang yang dibeli melalui E-Purchasing (E-Catalogue) lebih murah dibandingkan estimasi satuan harga (SSH) yang dianggarkan. Selisih tersebut mengakibatkan sisa anggaran meskipun secara kuantitas barang yang dibutuhkan sudah terpenuhi.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp.5.490.374.807,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.304.103.069,00

- a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN alokasi anggaran sebesar **Rp.5.434.124.707,00** dengan Realisasi sebesar **Rp.4.255.577.199,00** dengan persentase **78,31%**, Penyerapan dibawah 80 % karena terdapat selisih antara estimasi jumlah pegawai dengan jumlah riil pegawai yang aktif, dimana jumlah pegawai aktual lebih sedikit dari jumlah yang dianggarkan. Hal ini disebabkan diantaranya karena adanya perbedaan estimasi jumlah pengangkatan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan perkiraan serta terdapatnya pengurangan jumlah pegawai (mutasi Keluar dan pensiun) yang lebih besar dari proyeksi awal, sehingga anggaran gaji bulan - bulan tersisa untuk pegawai tersebut tidak terealisasi.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN alokasi anggaran sebesar **Rp. 17.150.000,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp.16.150.000,00,-** dengan persentase **94.17%.**
- c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD alokasi anggaran sebesar **Rp.**



10.349.200,00 dengan Realisasi sebesar **Rp. 6.101.850,00.** dengan persentase **58.96%**. Sub kegiatan ini terdiri dari belanja Alat Tulis Kantor dan Bahan Cetak, Belanja Terealisasi kurang dari 80 % karena harga satuan barang yang dibeli melalui E-Purchasing (E-Katalog) lebih murah dibandingkan estimasi satuan standar harga (SSH) yang dianggarkan. Selisih tersebut mengakibatkan sisa Anggaran meskipun secara kuantitas barang yang dibutuhkan sudah terpenuhi.

- d. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD alokasi anggaran sebesar **Rp.28.750.900,00** dengan Realisasi sebesar **Rp. 26.274.020,00.** dengan persentase **91,39%**.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp. 90.160.400,00 dengan realisasi sebesar Rp.79.500.000,00

- a. Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah Alokasi anggaran sebesar **Rp. 90.160.400,00** dengan realisasi sebesar **79.500.000,00.** dengan persentase **88,18%**

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp. 60.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.55.870.000,00

- a. Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Alokasi anggaran sebesar **Rp. 60.500.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 55.870.000,00.** dengan persentase **92,35%**

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp.3.054.693.292,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.825.978.137,00

- a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Alokasi anggaran sebesar **Rp. 50.848.360,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 50.140.000,00.** dengan persentase **98,61%**
- b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Alokasi anggaran sebesar **Rp.89.940.752,00** dengan realisasi sebesar **Rp.46.332.000,00.** dengan persentase **51,51%.**



- c. Sub kegiatan ini tidak dilaksanakan karena rehab gedung PKK belum dilaksanakan sehingga pemasangan terali ditunda sampai diselesaikannya rehab Gedung PKK.
- d. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Alokasi anggaran sebesar Rp.1.916.766.480,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.866.627.008,00. dengan persentase 98,55%
- e. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Alokasi anggaran sebesar Rp.191.779.700,00 dengan realisasi sebesar Rp.59.649.675,00. dengan persentase 31,10% .
- f. Sub kegiatan ini tidak dilaksanakan karena rehab gedung PKK belum dilaksanakan sehingga pemasangan Horden ditunda sampai diselesaikannya rehab Gedung PKK .
- g. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Alokasi anggaran sebesar Rp.31.557.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.31.150.000,00. dengan persentase 98,71%
- h. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 950.000,00. dengan persentase 95%
- i. Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Alokasi anggaran sebesar Rp.61.450.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 59.790.000,00. dengan persentase 95%
- j. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Alokasi anggaran sebesar **Rp.711.351.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 711.339.454,00.** dengan persentase 100%

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp.3.241.839.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.027.407.988,00,-

- a. Sub kegiatan Pengadaan Mebel alokasi anggaran sebesar **Rp.741.839.000.00,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 707.407.988,00.** dengan persentase 95.36%
- b. Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar **Rp.2.320.000.000,00.** dengan persentase 92,80%



7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp. 683.778.960,00 dengan realisasi sebesar Rp.586.822.966,00

- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat alokasi anggaran sebesar **Rp. 5.560.900,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 5.460.000,00.** dengan persentase **98,19%**
- b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik alokasi anggaran sebesar **Rp.482.810.060,00** dengan realisasi sebesar **Rp.386.692.966,00.** dengan persentase **80,09%.**
- c. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi anggaran sebesar **Rp.195.408.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp.194.670.000,00.** dengan persentase **99,62%**

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.665.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 251.905.836,00

- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan alokasi anggaran sebesar **Rp. 125.560.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp.117.510.836,00.** dengan persentase **93,59%**
- b. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya alokasi anggaran sebesar **Rp.2.540.240.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 134.395.000,00.** dengan persentase **5,29%** . Dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan Rehab Gedung PKK tidak memungkinkan, sehingga ditunda sampai Anggaran Tahun berikutnya.

B. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

1. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 148.792.455,00 dengan realisasi sebesar Rp. 143.562.032,00

- a. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar **Rp.74.289.090,00** dengan realisasi sebesar **Rp.72.212.967,00.** dengan persentase **97.21%**



- b. Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG **termasuk** PPRG alokasi anggaran sebesar **Rp. 74.503.365,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 71.349.065,00.** dengan persentase **95,77%**
 - 2. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 83.343.512,00 dengan realisasi sebesar Rp.80.998.000,00 :**
 - a. Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Alokasi anggaran sebesar **Rp. 21.337.945,00** dengan realisasi sebesar **Rp.20.840.600,00.** dengan persentase **97,02%**
 - b. Sub kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi alokasi anggaran sebesar **Rp 62.005.567,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 60.157.400,00.** dengan persentase **97,02%**
 - 3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp.110.494.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.106.414.778,00**
 - a. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Alokasi anggaran sebesar **Rp.110.494.500,00** dengan realisasi sebesar **Rp.106.414.778,00.** dengan persentase **96,31%**
- C. Program Perlindungan Perempuan**
 - 1. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 451,415.097,00 dengan realisasi sebesar Rp. 362.632.420,00**
 - a. **Sub kegiatan** Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar **Rp.50.676.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 50.676.000,00** dengan persentase **100%**
 - b. **Sub kegiatan** Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar **Rp.400.739.097,00**



dengan realisasi sebesar **Rp.311.956.420,00** dengan persentase **77,85%** Kegiatan telah dilaksanakan 100%, tetapi belanja perjalanan dinas yang ada direkening tersebut untuk koordinasi penanganan kasus terhadap anak yang digunakan sesuai dengan kebutuhan korban.

2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 246.572.800,00 dengan realisasi sebesar Rp.125.286.594,00

- a. **Sub kegiatan** Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar **Rp.246.572.800,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 125.286.594,00** dengan persentase **50,81%** dikarenakan sesuai dengan jumlah korban yang dilayani di Unit Pelayanan Dinas Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak berupa Pelayanan Visum dan Pendampingan Korban Perempuan.

D. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 344.423.353,00 dengan realisasi sebesar Rp. 278.232.753,00

- a. **Sub kegiatan** Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar **Rp. 155.566.745,00** dengan realisasi sebesar **Rp.150.167.800,00** dengan persentase **96,53%**.
- b. **Sub kegiatan** Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar **Rp. 188.856.608,00** dengan realisasi sebesar **Rp.128.064.953,00** dengan persentase **67,81%**, Realisasi Fisik 100% Ada kegiatan bimtek dari pusat, semula dijadwalkan di november, ternyata sampai dg bulan Desember kegiatan bimtek tersebut di batalkan penyelenggaraanya (undangan bimtek dari pusat tidak ada).



E. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

1. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 438.908.900,00 dengan realisasi sebesar Rp.432.157.564,00

- a. **Sub kegiatan** Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Alokasi anggaran sebesar **Rp. 178.178.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 173.974.447,00** dengan persentase **97,64%**
- b. **Sub kegiatan** Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar **Rp.260.730.900,00** dengan realisasi sebesar **Rp.258.183.117,00** dengan persentase **99,02%**

F. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

1. Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.822.113.138,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.459.790.733,00

- a. Sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Alokasi anggaran sebesar **Rp.1.737.499.693,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.402.083.795,00** dengan persentase **80,70%**, dikarenakan Biaya setor perkara Isbat Nikah (PNBP) dianggarkan untuk 2.500 pasang peserta. Namun, realisasinya hanya 1556 pasang. Hal ini disebabkan 944 pasang peserta tidak lolos verifikasi berkas oleh Pengadilan Agama karena kekurangan bukti otentik, sehingga biaya panjar perkara untuk 944 pasang tersebut tidak disetorkan dan menjadi sisa anggaran.
- b. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Alokasi anggaran sebesar **Rp.84.613.445,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 57.706.938,00** dengan persentase **68,20%**, dikarenakan Sewa gedung hari anak nasional tidak digunakan karena lomba diadakan di ruang rapat Dinas PP dan PA.



2. **Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp. 623.847.951,00 dengan realisasi sebesar Rp. 594.866.417,00**
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Alokasi anggaran sebesar **Rp.221.447.900,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 215.232.580,00** dengan persentase **97,19%**
 - b. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dengan Alokasi anggaran sebesar **Rp. 24.440.800,00** dengan realisasi sebesar **Rp.23.744.782,00** dengan persentase **97,15%**
 - c. Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten /Kota dengan Alokasi anggaran sebesar **Rp. 213.610.651,00** dengan realisasi sebesar **Rp.193.617.511,00** dengan persentase **90,64%**
 - d. Sub kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Alokasi anggaran sebesar **Rp. 164.348.600,00** dengan realisasi sebesar **Rp.162.271.544,00** dengan persentase **98,74%**

G. Program Perlindungan Khusus Anak

1. **Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar Rp.510.516.328,00 dengan realisasi sebesar Rp. 426.202.483,00**
 - a. Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Alokasi anggaran sebesar **Rp.459.714.328,00** dengan realisasi sebesar **Rp.375.400.483,00.** dengan persentase **81,66%** dikarenakan efisensi perjalanan dinas.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap anak Kewenangan Kabupaten Muara Enim dengan Alokasi Anggaran Sebesar **Rp. 50.802.000** dengan Realisasi sebesar **Rp.50.802.000,-** dengan Persentase **100 %**



2. Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar **Rp. 136.365.100,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 123.138.300,00**
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Alokasi anggaran sebesar **Rp. 136.365.100,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 123.138.300,00**. dengan persentase **90,30%** .
3. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Alokasi anggaran sebesar **Rp.69.020.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 55.582.000,00**
 - a. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dengan Alokasi anggaran sebesar **Rp. 189.560.600,00** dengan realisasi sebesar **Rp.144.246.904,00**. dengan persentase **76,10%** Kegiatan telah dilaksanakan 100%, tetapi belanja perjalanan dinas yang ada direkening tersebut untuk koordinasi penanganan kasus terhadap anak yang digunakan sesuai dengan kebutuhan korban.

3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya peran serta dan kesetaraan masyarakat dalam pembangunan daerah		Indeks Pengarusutamaan Gender (IPG)	89,85	90,14	100,3
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77,39	69,55	89,9
		Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	Persentase Peningkatan IPG	0,09	0,29	300



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
		Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Persentase Peningkatan IDG	2,87	0	0
	Meningkatnya pemenuhan hak anak		Predikat Kota Layak Anak	Nindya	Nindya	100
		Meningkatkan desa ramah Perempuan dan Peduli Anak	Persentase Desa Ramah perempuan dan Peduli Anak.	10,20	6,7	67

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1.	Belum Optimalnya Kualitas Informasi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak	Penyediaan anggaran tahun berikutnya akan disesuaikan dengan kebutuhan.
2.	Masih tingginya Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Bekerjasama dengan lembaga yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
3.	Masih tingginya kasus pernikahan usia anak	
4.	Lembaga Penyedia Layanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus dan Petugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) belum optimal.	Meningkatkan Dukungan dari organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha dalam mengoptimalkan peran Relawan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5.	Belum Optimalnya Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten.	Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak - hak anak.
6.	Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, yang terstandarisasi masih belum maksimal.	Penguatan Standarisasi Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak.



No	Permasalahan	Solusi
7.	Masih Kurangnya Peran Forum Anak sebagai Pelopor dan Pelapor.	Meningkatkan peran Forum Anak Kabupaten, Forum Anak Kecamatan dan Forum anak Desa/Kelurahan sebagai Pelopor dan Pelapor.
8.	Belum Semua Perangkat Daerah Melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Muara Enim.
9.	Rendahnya Sumbangan Pendapatan Perempuan dalam Keluarga.	Dukungan dari organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha dalam mengoptimalkan peran Relawan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
10.	Belum Optimalnya Pemberdayaan Pada Disabilitas dan Lansia Perempuan.	Meningkatkan kegiatan yang berhubungan dengan Lansia dan Disabilitas
11.	Belum Optimalnya Perempuan sebagai Tenaga Profesional.	Mengoptimalkan kegiatan lembaga layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak.
12.	Masih Kurangnya Partisipasi Perempuan Sebagai Tenaga Profesional dan Lembaga Legislatif.	Mengoptimalkan kegiatan Partisipasi Perempuan Sebagai Tenaga Profesional dan Lembaga Legislatif.

5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Penghargaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muara Enim, antara lain :

1. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Predikat Nindya yang diberikan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tanggal 22 Juli 2022.
2. Penghargaan Tingkat Nasional Sebagai salah satu pemerintah kabupaten terbaik di Indonesia yang dinilai berkomitmen terhadap perlindungan anak dan pelaporan berbasis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP) yang diberikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tanggal 21 Juli 2022.
3. Penghargaan KLA Nindya Kedua pada Tanggal 22 Juli 2023.
4. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Predikat Nindya yang ketiga kalinya pada tanggal 23 Juli 2025.
5. Penghargaan Tingkat Nasional Peringkat ke 2 (dua) sebagai salah satu pemerintah Kabupaten terbaik di Indonesia yang dinilai



berkomitmen terhadap perlindungan anak dan pelaporan berbasis Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP) yang diberikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tanggal 22 Juli 2023.

6. Penghargaan Tingkat Nasional Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Predikat Pratama yang diberikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 2023.



3. URUSAN PANGAN OLEH DINAS KETAHANAN PANGAN

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Pada tahun 2025 Alokasi belanja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 18.243.261.857,- dan terealisasi sebesar Rp. 16.018.517.328,- atau 87,81% dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Operasional

Belanja Operasional dialokasikan sebesar Rp. 17.812.473.457,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 15.596.444.628,- atau sebesar 87,56% yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja Operasional dialokasikan sebesar Rp. 430.788.400,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 422.072.700,- atau sebesar 97,98% yang diarahkan untuk membiayai belanja modal yang menjadi asset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari 5 (lima) program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 40 (Empat Puluh) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 82.578.300,- dengan Realisasi sebesar Rp. 74.457.510,- atau 81,96% terdiri dari:

- a. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp.21.354.600,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 19.244.400,- atau 90,17%. Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 5.630.900,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.118.502,- atau 90,90%. Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA Perubahan SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 14.256.300,- dan telah terealisasi sebesar Rp.11.405.000,- atau 80,00%, Kegiatan ini sudah



teralisasi sisanya dikarenakan selisih harga dengan anggaran yang ada. Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen DPA SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %

- d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 16.054.300,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 14.415.408,- atau 89,79%, Kegiatan ini sudah terealisasi sisanya dikarenakan selisih harga dengan anggaran yang ada. Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen DPA Perubahan SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- e. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp 12.047.200,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 11.485.600,- atau 95,34%. Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan capaian output/Keluaran sebesar 100 %.
- f. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 13.235.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.12.788.600,- atau 96,63%. Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Renstra/Renja dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp.4.102.641.600,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 3.479.706.641,- atau 84,82% terdiri dari :

- a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 5.172.254.384,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.976.229.449,- atau 76,88% Kegiatan ini sudah terealisasi sisanya dikarenakan ada Tambahan Penghasilan Pegawai yang dianggarkan tetapi jabatan nya masih kosong . Output/keluaran dari kegiatan ini adalah pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim per 31 Desember Tahun Anggaran 2025.
- b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 10.975.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.267.100,- atau 84,43% Kegiatan ini sudah terealisasi sisanya dikarenakan selisih harga dengan anggaran yang ada.



Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 33.000.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 33.000.000,- atau 100% terdiri dari :

- a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 33.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 33.000.000,- atau 100%. Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.001.647.695,- dengan Realisasi sebesar Rp. 949.619.790,- atau 94,81% terdiri dari :

- a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar . Rp. 10.037.800,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 9.945.800,- atau 99,08%. Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim dan disesuaikan kebutuhan yang ada dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 453.501.095,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 440.632.100,- atau 97,16%. Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah dan jenis komponen peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan, jumlah dan jenis peralatan kebersihan yang disediakan dan jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran 100%.
- c. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp.85.667.100,- dan telah terealisasi sebesar Rp.57.463.544,- atau 67,08% Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim



Tahun Anggaran 2025 dengan capaian output/keluaran 100 %.

- d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp 17.746.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 13.818.600,- atau 77,87%, Kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan belanja disesuaikan dengan harga pasaran, sedangkan belanja spanduk di cetak sesuai dengan surat edaran yang ada. Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 dengan capaian output/keluaran 100%.
- e. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan dengan anggaran sebesar Rp. 16.099.200,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 16.095.300,- atau 99,98%. Output/keluaran dari Subkegiatan ini Jumlah dan jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan capaian output/keluaran 100 %.
- f. Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 38.430.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 32.483.000,- atau 84,53%. Output/Keluaran dari Subkegiatan ini merupakan makan minum rapat di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim selama Tahun 2025 dengan capaian output/keluaran 100%.
- g. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 380.166.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 379.181.446,- atau 99,74% Output/keluaran dari Subkegiatan ini merupakan jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dengan capaian output/keluaran 100%.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 235.200.860,- dengan Realisasi sebesar Rp. 196.214.550,- atau 83,42% terdiri dari :

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp.5.040.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.500.000,- atau 89,29%. Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis materai yang



disediakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025 dengan capaian output/keluaran 100%.

- b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 106.393.260,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 82.265.168,- atau 77,32%, kegiatan ini tidak terealisasi dikarenakan sesuai dengan pemakaian. Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025 dengan capaian output/keluaran 100%.
- c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 24.950.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 24.950.000,- atau 100%. Output/Keluaran dari Subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki dengan capaian output/keluaran 100%.
- d. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 78.640.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 78.640.000,- atau 100%. Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah jumlah jasa keamanan kantor yang disediakan dan jumlah petugas kebersihan kantor yang disediakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025 dengan capaian output/keluaran 100 %.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 665.037.175,- dengan Realisasi sebesar Rp. 650.741.650,- atau 98,15% :

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 148.837.175,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 135.605.650,- atau 92,35%. Output/keluaran Jumlah dan jenis perizinan kendaraan dinas yang dibayar dan jumlah dan jenis suku cadang yang disediakan dengan capaian output/keluaran 100%



- b. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 498.936.000,- atau 99,79%. Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 2 unit dengan capaian output/keluaran 100%.
- c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 16.200.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 16.200.000,- atau 100%. Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diperbaiki dengan capaian output/keluaran 100 %.

B. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan sebesar Rp.4.605.497.343,- dengan Realisasi sebesar Rp.4.531.978.310,- atau 98,40%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Anggaran Sebesar Rp.4.605.497.343,- dengan Realisasi sebesar Rp.4.531.978.310,- atau 98,40% terdiri dari :

- a. Subkegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 541.215.794,- telah terealisasi sebesar Rp. 497.474.694,- atau 91,92% dengan target jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan sebanyak 1 unit. Sosialisasi Pendampingan Penggunaan Aplikasi Posting Cinta dengan peserta sebanyak 26 (dua puluh enam) orang yang terdiri dari tenaga kesehatan/petugas gizi/kader posyandu yang berasal dari puskesmas lingkup Kabupaten Muara Enim. Guna mendukung kelancaran penggunaan Aplikasi Posting Cinta dilakukan pemeliharaan (maintenance) aplikasi menggunakan jasa pihak ketiga. Disamping itu, kegiatan lain yang dilakukan pada Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur



Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya adalah penyerahan dukungan CSR (Corporate Social Responsibility) pada Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Dukungan ini berupa paket budidaya ikan dalam ember (budikamber) yang diberikan kepada 3 panti, yaitu Panti Raudhatul Taufiq di Desa Kepur, Panti Assaadah di Kelurahan Air Lintang, dan Panti Darul Yatiim di Kelurahan Tanjung Enim.

Realisasi keuangan per tanggal 31 Desember 2024 tidak terealisasi sebesar 8,08% dikarenakan selisih harga belanja alat tulis kantor, belanja cetak, serta Honor Pendamping Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang dianggarkan untuk 4 orang untuk 4 desa/kelurahan tetapi hanya terealisasi sebanyak 3 orang karena hanya diselenggarakan pada 3 kelurahan/desa saja. Kemudian honor tersebut juga dianggarkan sebanyak 4 Bulan pada anggaran perubahan sedangkan anggaran perubahan disahkan pada bulan November sehingga realisasinya hanya dibayarkan sebanyak 2 bulan.

- b. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik dengan anggaran sebesar Rp. 46.248.049,- telah terealisasi sebesar Rp. 42.190.095,- atau 91,23%, dengan target Sosialisasi sebanyak 25 orang kelompok lumbung pangan, bertujuan agar kelompok lumbung dapat mengelola cadangan pangan masyarakat sehingga bermanfaat bagi anggota dan masyarakat sekitar, Lokasi Kegiatan di Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujan Mas.
- c. Subkegiatan Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 4.018.033.500,- telah terealisasi sebesar Rp. 3.992.313.521,- atau 99,36% dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pembangunan Rumah RMU 1 Unit di Gapoktan Sukses Bersama Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida.
 - 2) Pembangunan Rumah RMU 1 Unit di Gapoktan Lebak Makmur 1 Desa Tanjung aru Kecamatan Muara Belida
 - 3) Pengadaan Mesin RMU 1 Unik di Gapoktan Sumber Rahayu Desa Gedung Buruk Kecamatan Muara Belida.



- 4) Pembangunan Gudang Lumbung Pangan 1 unit di Gapoktan Bunga Harapan Desa Kayu Ara Batu Kecamatan Muara Belida.
- 5) Pembangunan Gudang Lumbung Pangan 1 Unit di Gapoktan Lebak Makmur 1 Desa Tanjung Baru Kecamatan Muara Belida
- 6) Pembangunan Rumah RMU 1 Unit di Gapoktan Sukses Bersama Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida.
- 7) Pembangunan Mesin RMU 1 Unit di Gapoktan Sukses Bersama Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida.
- 8) Pembagunan Gudang Lumbung Pangan 1 Unit di Gapoktan Mekar Sari Desa Payaangus Kecamatan Sungai Rotan.
- 9) Pembangunan Rumah RMU 1 Unit di Gapoktan Mawar Merah Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida.
- 10) Pengadaan Mesin RMU 1 Unit di Gapoktan Mawar Merah Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida.
- 11) Pembangunan Gudang Lumbung Pangan 1 Unit di Gapoktan Mawar Merah Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida.
- 12) Pembangunan Gudang Lumbung Pangan 1 Unit di Poktan Ulak Jaya Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida.
- 13) Pembangunan Gudang Lumbung Pangan 1 Unit di Gapoktan Sumber Rahayu Desa Gedung Buruk Kecamatan Muara Belida
- 14) Pengadaan Mesin Bed Dryer 1 Unit di Gapoktan Mawar Merah Desa Harapan Mulia Kecamatan Muara Belida
- 15) Pengadaan Mesin Bed Dryer 1 Unit di Gapoktan Ulak Jaya Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida
- 16) Pengadaan Mesin Bed Dryer 1 Unit di Gapoktan Ulak Jaya Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida
- 17) Pembangunan Gudang Lumbung Pangan 1 Unit di Gapoktan Berkarya Desa Tanjung Miring Kecamatan Sungai Rotan
- 18) Pengadaan Mesin RMU 1 Unit Gapoktan Bekarya Desa Tanjung Miring Kecamatan Sungai Rotan.



C. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar Rp. 5.078.977.200,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 4.332.964.728,- atau 85,11% Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 10 (sepuluh) subkegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan Alokasi Anggaran Sebesar Rp.2.357.146.700,- Dengan Realisasi sebesar Rp.1.716.177.382,- atau 72,81% terdiri dari :

- a. Subkegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan anggaran sebesar Rp. 58.081.600,- telah terealisasi sebesar Rp. 56.298.448,- atau 96,93% dengan target 1 kali pelatihan yang dilaksanakan di Desa Panang Jaya dengan peserta total sebanyak 74 (Tujuh Puluh Empat) orang yang terdiri dari masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM), Ibu Rumah Tangga, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Kader Posyandu, dan Remaja dengan usia siap menikah. Pelatihan Kemandirian Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2025 ini bertujuan agar keluarga dapat tetap mandiri dan berdaya memenuhi kebutuhan pangan keluarga yang bersumber dari pangan lokal yang berada di sekitarnya dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan gizi keluarga. Selain itu melalui pelatihan ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat sehingga dapat menciptakan dan menerapkan pola makan yang benar, tidak asal kenyang tapi memenuhi angka kecukupan gizi yang tepat melalui pemenuhan kebutuhan pangan keluarga yang berasal dari sumber daya lokal seperti pemanfaatan pekarangan rumah.
- b. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi pangan Pokok dan Pangan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.131.078.100,- telah terealisasi sebesar Rp. 124.487.041,- atau 94,97% dengan target 4 kali sidak. sub kegiatan ini untuk memastikan dan memonitoring secara harian ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 12 (dua Belas) Bahan Pangan yaitu beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, telur ayam ras, gula pasir dan minyak goreng. Melakukan sidak ketersediaan dan harga



pangan ke pasar di Kecamatan Muara Enim, Gelumbang dan Lawang Kidul sebanyak 4 kali sidak yaitu :

- 1) Menjelang Puasa Ramadhan
- 2) Menjelang Hari Rya Idul Fitri
- 3) Menjelang Hari Raya Idul Adha
- 4) Menjelang Natal dan Tahun Baru 2026

Anggaran yang tidak terealisasi Karena adanya selisih Harga Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Tulis Kantor, selisih harga bahan Cetak, dan Sisa Honorarium Satuan Tugas Ketahanan Pangan Yang tidak bisa di salurkan kerana sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional. Lampiran No 1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.

- c. Subkegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia dengan anggaran sebesar Rp. 63.149.900,- telah terealisasi sebesar Rp. 55.802.495,- atau 88,37%, Kegiatan ini adalah sebagai berikut:
 1. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap Gapoktan/kelompok tani guna meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan pendapatan sebanyak 5 gapoktan/kelompok tani yaitu :
 - a) Gapoktan Bersatu Desa Siku Kecamatan Empat Petulai Dangku;
 - b) Gapoktan Maju Bersama Desa Kuripan Selatan Kecamatan Empat Petulai Dangku;
 - c) Gapoktan Suka Maju Desa Pelakat Kecamatan SDU
 - d) Gapoktan Pandan Raya Desa Pandan Enim Kecamatan Tanjung Agung;
 - e) Gapoktan Sojangkang Desa Teluk Jaya Kecamatan Kelekar;
 2. Melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebanyak 48 kali melalui dana APBN dan APBD di 22 kecamatan dan desa berkolaborasi dengan Perum Bulog, Dinas TPHP, Dinas Perikanan dan Dinas Perkebunan.
- d. Subkegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.538.560.500,- telah terealisasi sebesar Rp.485.258.470,- atau 90,10. Kegiatan ini Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Rembug Utama Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional



dan Expo Tahun 2025 yang dilaksanakan di Halaman Parkir Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Tenggarong, pada tanggal 19 – 22 September 2024 dengan peserta sebagai berikut :

- 1) Ketua KTNA Kabupaten
- 2) Bendahara KTNA Kabupaten
- 3) Ketua KTNA Kecamatan Benakat
- 4) Ketua KWT Kecamatan Lawang Kidul
- 5) Peninjau
- 6) OPD lingkup pertanian sebagai peserta Expo

Selain itu, kegiatan ini juga untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Peda XVI KTNA Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang dilaksanakan di Pulo Mas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang pada tanggal 4 – 10 November 2025 dengan peserta sebagai berikut :

- 1) Peserta Utama sebanyak 40 orang
 - 2) Pendamping sebanyak 20 orang
 - 3) Panitia sebanyak 15 orang
 - 4) Peninjau sebanyak 20 orang
 - 5) Tim Expo (OPD lingkup pertanian)
- e. Subkegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.1.494.378.600,- telah terealisasi sebesar Rp. 923.732.660,- atau 61,81% dengan target 22 Kecamatan selama 12 bulan, Lokasi 22 Kecamatan. Kegiatan ini untuk :
- 1) Salah satu upaya pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan melalui Gerakan Pangan Murah, Pemerintah Kabupaten Muara Enim mensubsidi harga beras premium sebesar Rp. 3.000,- perkilogram dengan kemasan 5 Kg. Saat ini pelaksanaan gerakan pangan murah telah dilaksanakan sebanyak 48 kali dengan total beras premium sebanyak 144.000 kg;
 - 2) Pemantauan dan pengumpulan data secara rutin (mingguan) di pasar grosir dan eceran terbesar baik pasar di kecamatan maupun pasar di kabupaten yang dilakukan oleh Petugas Pendata Harga Pangan (Enumerator) masing – masing Kecamatan;



- 3) Monitoring harga dan ketersediaan bahan pangan pokok menjelang Hari - hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
 - 4) Melaporkan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen kepada Bupati Muara Enim;
 - 5) Dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat terhadap bahan kebutuhan pokok Pemerintah Kabupaten Muara Enim juga menyelenggarakan Program Subsidi Sembako Murah Membara yang dilaksanakan di 22 Desa di 22 Kecamatan sebanyak 4.884. KPM selama 2 bulan melalui 21 BUMDES dan 1 Warung, Sembako yang di Subsidi berupa Telur (2 Kg/Bulan) dengan subsidi Rp. 5.000/Kg dan Beras (10 Kg/Bulan) dengan Subsidi Rp. 3.000/Kg. terlealisasi Bulan November yang disalurkan yaitu Telur sebanyak 9.768 Kg dan Bulan Desember yang disalurkan yaitu Telur sebanyak 9.768 Kg dan Beras sebanyak 48.840.
- f. Subkegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dengan anggaran sebesar Rp. 71.898.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 70.598.268,- atau 98,19% dengan target Informasi Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM), adapun kegiatan ini untuk :
- 1) Survey Ketersediaan 9 (Sembilan) Kelompok Pangan.
Survey ketersediaan kelompok pangan yang dimaksud yaitu : Padi-padian (Beras), Umbi-umbian (ubi kayu), pangan hewani (daging sapi), minyak dan lemak (minyak goreng), buah/biji berminyak (kelapa), kacang-kacangan (kacang kedelai), gula (gula pasir), sayur dan buah serta bumbu dan lain-lain (bumbu-bumbuan). Adapun data yang didapat dari survey ini digunakan untuk data tambahan pengolahan Neraca Bahan Makanan.
 - 2) Neraca Bahan Makanan (NBM)
Neraca Bahan Makanan (NBM) berdasarkan hasil perhitungan maka diperoleh sebagai berikut : Ketersediaan energi di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2025 sebesar 2.553 kkal/kap/hari, dengan mutu ketersediaan pangan yang ditunjukkan skor PPH sebesar 83,18. Tingkat ketersediaan di Kabupaten Muara Enim mencapai 106% yang menunjukkan bahwa ketersediaan



energi di Kabupaten Muara Enim tergolong **normal** atau **tahan pangan**.

2. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 502.253.800,- dengan Realisasi sebesar Rp. 447.249.645,- atau 89,05% terdiri dari:

- a. Subkegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal dengan anggaran sebesar Rp. 313.480.400,- telah terealisasi sebesar Rp. 294.139.082,- atau 93,83%. Kegiatan ini untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Agro Expo KTNA Nasional tahun 2025 di Kutai Kartanegara dengan rincian penggunaan antara lain untuk sewa stand pameran, dekorasi pameran, dan perjalanan dinas. Dan juga untuk Kegiatan Agri Expo PEDTA KTNA di Kabupaten Empat Lawang dengan rincian penggunaan untuk belanja bahan materi pameran.

Selain itu, kegiatan ini juga memberikan bantuan alat olahan pangan lokal kepada 5 kelompok, yaitu :

- 1) Kelompok Wanita Jaya kecamatan gelumbang, berupa : 1 Unit mesin spinner, 1 unit vaccum frying, 1 unit mesin pemotong kerupuk lontongan, dan 1 unit selaer listrik
 - 2) Kelompok Usaha Bersama, Desa Sukamenang, Kecamatan Gelumbang, berupa : 1 Unit mesin spinner, 1 unit vaccum frying, 1 unit mesin pemotong keripik singkong.
 - 3) Kelompok Berkah Bersama, Desa Arisan Musi Timur, Kecamatan Muara Belida, berupa : 1 Unit mesin spinner, dan 1 unit vaccum frying.
 - 4) Kelompok Menanti Indah, Desa Menanti, Kecamatan Kelekar, berupa : 1 Unit mesin spinner, 1 unit vaccum frying, 1 unit mesin pemotong keripik singkong.
 - 5) Kelompok Wanita Tani Melati, Desa Muara Harapan, Kecamatan Muara Enim, berupa : 1 Unit mesin spinner, 1 unit vaccum frying, 1 unit mesin pemotong keripik singkong, dan 1 unit sealer listrik.
- b. Subkegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.188.773.400,- telah terealisasi sebesar Rp. 153.110.563,- atau 81,11%, dengan



rincian pengadaan beras medium sebanyak 6 ton untuk 3 Gapoktan yaitu:

- 1) Gapoktan Suka Maju, Desa Plakat, Kecamatan SDU
- 2) Gapoktan Maju Bersama Desa Kuripan Selatan Kecamatan Empat Petulai Dangku
- 3) Gapoktan Pandan Raya Desa Pandan Enim Kecamatan Tanjung Agung

3. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dengan anggaran sebesar Rp. 2.219.576.700,- dengan Realisasi sebesar Rp. 2.159.537.701,- atau 97,30% terdiri dari :

- a. Subkegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita per Tahun dengan anggaran sebesar Rp. 2.038.727.100,- telah terealisasi sebesar Rp. 1.992.716.280,- atau 97,74%. dengan target 1 dokumen, Kegiatan ini untuk :
 - 1) Penyusunan dokumen terkait target konsumsi pangan perkapita pertahun, yang hasilnya untuk tahun 2025 Skor PPH Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 adalah 94,80 sedangkan Tingkat kecukupan gizi di Kabupaten Muara Enim untuk konsumsi energi per hari diperoleh nilai sebesar 2.184,84 kkal/kap/hari.
 - 2) Penyaluran bantuan prasarana pemanfaatan pekarangan kepada 43 KWT yang termasuk didalam lokasi prioritas penurunan stunting dan lokasi yang mendukung TMMD, serta penyaluran bantuan pemanfaatan pekarangan dalam pengembangan budidaya perikanan, peternakan dan hortikultura kepada Kelompok KTNA Kabupaten Muara Enim Kelompok KTNA Kabupaten Muara Enim.
 - 3) Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Pekarangan dilaksanakan dengan peserta sebanyak 120 orang yang merupakan kelompok wanita tani penerima bantuan pemanfaat pekarangan.
- b. Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragam Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan anggaran sebesar Rp. 180.849.600,- telah terealisasi sebesar Rp. 166.821.493,- atau 94,24%, dengan target Pelaksanaan Lomba Masak Menu B2SA diikuti oleh seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim,



sedangkan Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Tingkat Kecamatan tahun 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 15 orang masing-masing kecamatan, dilaksanakan di 3 tempat, yaitu : Balai Kantor Camat Lubai untuk peserta dari kecamatan lubai dan kecamatan lubai ulu, Balai Kantor camat SDL untuk peserta dari kecamatan SDL dan SDT, dan Balai kantor camat lembak untuk peserta dari kecamatan lembak dan kelekar.

D. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Alokasi anggaran untuk program Penanganan Kerawanan Pangan sebesar Rp. 952.807.200,- dengan Realisasi sebesar Rp. 945.889.444,- atau 99,27%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 836.426.800,- dengan Realisasi sebesar Rp.831.920.264,- atau 99,46% terdiri dari:

- a. Subkegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar sebesar Rp. 836.426.800,- dengan Realisasi sebesar Rp. 831.920.264,- atau 99,46% dengan target 1227 Paket Sembako yang terdiri dari Beras Premium sebanyak 20 Kg, Minyak Goreng sebanyak 5 liter, Gula Pasir sebanyak 4 Kg, Ikan Sarden Kaleng ukuran kecil sebanyak 5 Kg dan dialokasikan untuk daerah rawan pangan dan daerah stunting sebanyak 4 desa dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Desa Seleman, Kecamatan Tanjung Agung
 - 2) Desa Pagar Dewa, Kecamatan Benakat
 - 3) Desa Gunung Raja, Kecamatan Lubai
 - 4) Desa Sumber Mulya, Kecamatan Lubai Ulu
- b. Subkegiatan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi dengan anggaran sebesar Rp. 116.380.400 dan terealisasi sebesar Rp. 113.969.180 atau 97,93%. Kegiatan ini merupakan kegiatan edukasi pangan bergizi untuk siswa. Pada tahun 2025 dilaksanakan 4 kali sosialisasi edukasi pangan bergizi pada 4 sekolah, yaitu : SD Negeri 3 Muara Enim, SD Negeri 5 Ujan Mas, SD Negeri 15 Lawang Kidul, dan SD Negeri 21



Gunung Megang dengan total jumlah penerima manfaat edukasi adalah 1.050 orang siswa sekolah dasar.

E. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Alokasi anggaran untuk program Pengawasan Keamanan Pangan ini sebesar Rp. 427.463.800,- dengan Realisasi sebesar Rp. 334.014.179,- atau 78,14% %. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 427.463.800,- dengan Realisasi sebesar Rp. 334.014.179,- atau 78,14%% terdiri dari :

- a. Subkegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 213.787.100,- dan Realisasi sebesar Rp. 160.562.165,- atau 75,10%, dengan target pengujian pangan segar asal tumbuhan untuk tahun 2024 sebanyak 45 sampel pangan segar. Pengambilan sampel Pangan segar Asal Tumbuhan dilaksanakan dalam rangka pengawasan keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan telah dilaksanakan pengambilan sampel sesuai dengan target yaitu sebanyak 45 sampel pangan segar. Selain pengujian keamanan pangan melalui Laboratorium juga dilaksanakan pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan pada SPPG dengan pengujian cara cepat yaitu menggunakan Rapid Test Kit untuk mendeteksi apakah ada cemaran bahan berbahaya atau tidak. Hasil uji pada SPPG menunjukkan Negatif, yang berarti tidak terdeteksi bahan berbahaya dan aman untuk dikonsumsi, serta memenuhi persyaratan keamanan pangan. Pada tahun 2025 juga dianggarkan biaya untuk pengujian laboratorium keamanan pangan untuk sewaktu-waktu digunakan ketika terdapat adanya isu-isu keamanan PSAT yang beredar dimasyarakat, seperti cemaran pada jamur enoki dan anggur muscat pada beberapa tahun yang lalu, sehingga isu-isu tersebut harus ditindaklanjuti dengan pengujian keamanan pangan dan melakukan pengujian dengan menggunakan rapid test kit hingga pengujian di laboratorium. Tetapi pada tahun 2025 tidak ada isu keamanan pangan yang terjadi dimasyarakat sehingga uji



laboratorium keamanan pangan hanya dilakukan untuk kegiatan rutin saja.

- b. Subkegiatan Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dengan anggaran sebesar Rp. 120.235.600,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 97.178.994,- atau 80,82% dengan target 8 dokumen Sertifikat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan. Pada tahun 2025 hanya ada 7 pelaku usaha yang mengajukan rekomendasi perizinan PSAT, namun saat dilakukan sidang komisi teknis bersama tim OKKPD hanya 4 komoditi yang lulus uji dan bisa diterbitkan Sertifikat Prima 3 nya.
- c. Subkegiatan Penguatan Kelembagaan Pangan Segar Asal Tumbuhan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.93.441.100,- dan telah terealisasi sebesar Rp.76.273.020,- atau 81,63%. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan sosialisasi tentang keamanan pangan segar sebagai upaya meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan pengawas dalam menjamin pangan segar yang aman, bermutu, dan layak konsumsi. Peserta kegiatan terdiri dari unsur: Petani dan Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan sebanyak 60 orang. Sosialisasi dilaksanakan pada 6 (enam) desa dari 2 (dua) kecamatan, yaitu : Desa Tanjung Agung, Desa Pandan Enim dan Embawang Kecamatan Tanjung Agung dan Desa Suka Rami, Desa Suka Maju dan Desa Suka Jadi Kecamatan Sungai Rotan.

3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pemantapan Ketahanan Pangan Wilayah	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	90	94,80	105,34%



4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Hasil Pengujian Laboratorium Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan belum mewakili secara keseluruhan Kabupaten Muara Enim karena baru 3 Kecamatan yang sampelnya diujikan melalui Laboratorium mengingat biaya pengujian yang cukup tinggi dan keterbatasan Anggaran.	Untuk Kecamatan- kecamatan lain yang pengawasan keamanan pangannya belum dilakukan pengujian melalui Laboratorium , maka dilakukan pengujian dengan cara cepat dengan menggunakan Rapid Test Kit Formalin dan Rapid Test Kit Pestisida mengetahui kandungan formalin dan Cemaran Pestisida pada PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) yang beredar.
2.	Masih banyak Pelaku Usaha, Kelompok Tani dan Gapoktan yang tidak mengajukan Registrasi dan Sertifikasi Jaminan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan atas produknya.	Secara berkala memberikan Informasi kepada masyarakat dengan melaksanakan Sosialisasi Keamanan Pangan baik di Tingkat Kabupaten maupun di Kecamatan dengan melibatkan langsung Pelaku Usaha, Kelompok Tani, Gapoktan, dan Petugas lapangan / penyuluh pertanian serta melaksanakan pembinaan langsung ke pelaku usaha.
3.	Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) selain diikuti oleh TP PKK juga harusnya bisa diikuti oleh Ibu - ibu hamil dan remaja putri.	Diharapkan jumlah pesertanya ditambah agar semakin banyak peserta yang bisa mengikuti sosialisasi.
4.	Keterbatasan SDM yang menyebabkan kesulitan dalam melaksanakan monitoring dan menginventarisasi data kelompok pangan olahan di lapangan.	Melakukan koordinasi dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Untuk mendapatkan data kelompok pangan olahan kecamatan.
5.	Masih rendahnya konsumsi masyarakat terhadap kelompok umbi - umbian dan pangan lokal lainnya	Perlu diadakan kegiatan Sosialisasi pola konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI



4. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan wajib Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Pada tahun anggaran 2025, dialokasikan anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim sebesar Rp 37.271.249.802,- dan terealisasi sebesar Rp 31.107.968.616,- atau 83,46% dan kinerja keluaran (*output*) sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Operasional

Belanja Operasi sebesar Rp. 24.523.334.921,63,- terdiri dari :

1. Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp 11.484.052.559,63,- terealisasi sebesar Rp. 10.026.727.876,- atau 87,90% yang diarahkan untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan PNS dan PPPK, pembulatan gaji serta tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya untuk 217 orang pegawai lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.
2. Belanja barang dan jasa dengan anggaran sebesar Rp 13.039.282.362,- untuk membiayai sebanyak 11 program, 22 kegiatan dan 59 sub kegiatan lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.
3. Belanja Modal

B. Belanja Modal

Dengan anggaran sebesar Rp. 12.747.914.880,- terealisasi sebesar Rp. 12.553.186.041,- atau 98,47% terdiri dari :

1. Belanja Modal peralatan dan mesin dengan anggaran sebesar Rp 12.747.914.880,- terealisasi sebesar Rp 12.553.186.041,- yang diarahkan untuk membiayai belanja peralatan penunjang operasional Lingkup Dinas Lingkungan Hidup.

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2025 Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim melaksanakan 11 program, 22 kegiatan, dan 59 Sub kegiatan.

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Alokasi anggaran untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 17.187.509.523,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.552.969.087,- atau 78,85 %. Program ini terdiri dari 8 (Delapan) kegiatan dan 31 (Tiga Puluh Satu) Sub kegiatan yaitu :



1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 19.556.370,- terealisasi sebesar Rp. 12.055.800,- atau 61,65% hal ini disebabkan karena dokumen dicetak sesuai dengan kebutuhan, Dengan keluaran / output dari sub kegiatan ini yaitu umlah dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 3 dokumen dan terealisasi 100%.
- b. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 11.307.600,- terealisasi sebesar Rp 7.400.600,- atau 65,45% hal ini disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan belanja fotokopi, penggandaan dan belanja alat tulis kantor dengan keluaran / output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD terealisasi 100%.
- c. Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 9.153.000,- terealisasi sebesar Rp 3.172.800,- atau 34,66% hal ini disebabkan karena disesuaikan dengan kebutuhan belanja fotokopi. keluaran output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 100%.
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 16.130.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.144.000,- atau 19,49% hal ini disebabkan karena dokumen dicetak sesuai dengan kebutuhan keluaran/ output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 100%.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 16.130.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.550.000,- atau 40,61% hal disebabkan karena dokumen dicetak sesuai dengan kebutuhan. Keluaran output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen dan terealisasi 100%.



- f. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp 3.224.700,- terealisasi sebesar Rp 649.800,- atau 20,15% keluaran output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 15 laporan dan terealisasi 80%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp 11.382.352.560,- terealisasi sebesar Rp 10.004.609.576,- atau 87,90% keluaran (output) dari kegiatan ini berupa terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan serta TPP pegawai Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 217 orang terealisasi 100%.
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp 5.440.000,- terealisasi sebesar Rp 5.440.000,- atau 100% keluaran (output) dari kegiatan ini berupa dokumen laporan pengadaan barang dan jasa sebanyak 1 dokumen terealisasi 100%.
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp 3.943.829,- terealisasi sebesar Rp 2.605.400,- atau 66,06% hal ini disebabkan keluaran (output) dari kegiatan ini berupa 1 laporan terealisasi 100%
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ emesteran dengan anggaran sebesar Rp 21.353.300,- terealisasi sebesar Rp 14.072.900,- atau 65,91% hal ini dikarenakan keluaran (output) dari kegiatan ini berupa 13 laporan terealisasi 100%.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 17.376.100,- terealisasi sebesar Rp. 10.033.500,- atau 57,74% hal ini disebabkan karena laporan dan asset tidak ada selisih, keluaran output dari kegiatan ini yaitu tersedianya 2 laporan realisasi 100%.



4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp 166.391.000,- terealisasi sebesar Rp 10.273.967,- atau 47,40% hal ini disebabkan karena pelaksanaan diklat dilaksanakan DLHP Provinsi harus memenuhi persyaratan tertentu yang harus dipenuhi sehingga pegawai yang bisa ikut terbatas. Keluaran/ output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 24 orang yang realisasi 6,17%.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang dengan anggaran sebesar Rp 22.500.000,- terealisasi sebesar Rp 9.000.000,- atau 40,00%. Keluaran dari sub kegiatan ini yaitu jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan sebanyak 12 orang yang realisasi 15,00%.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 8.576.650,- terealisasi sebesar Rp 0,- atau 0%. Hal ini disebabkan karena terdapat kekeliruan pada satuan harga komponen instalasi listrik. Keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah paket komponen dan instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 1 paket yang terealisasi 0%.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 46.799.098,- terealisasi sebesar Rp 16.517.800,- atau 35,30% hal ini disebabkan karena adanya belanja lemari arsip dan rak arsip yang tidak dibelanjakan karena sudah terinclude pada pembangunan gedung arsip, dengan keluaran/ output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 3 paket realisasi 80%.
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp 2.802.759.754,- terealisasi sebesar Rp 1.691.773.738,- atau 60,36% hal ini disebabkan penyesuaian kebutuhan yang terjadi di lapangan dengan keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 2 paket realisasi 100%.



- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp 46.355.300,- terealisasi sebesar Rp 12.879.000,- atau 27,78% keluaran output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan sebanyak 2 paket realisasi 100%.
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang dengan anggaran sebesar Rp 22.800.000,- realisasi sebesar Rp 5.588.200,- atau 24,51%. Hal ini disebabkan penyesuaian kebutuhan Keluaran output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah dan jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 3 dokumen realisasi 100%.
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp 406.625.000,- terealisasi sebesar Rp 380.155.178,- atau 93,49%. dengan keluaran output dari sub kegiatan ini yaitu 12 laporan realisasi 90%.
- g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp 15.615.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 00,00%. Hal ini disebabkan karena keluaran output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD sebanyak 1 dokumen realisasi 0,0%

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :

- a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 11.044.500,- atau 73,63% keluaran output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan sebanyak 1 unit realisasi 100%.
- b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 298.700.000,- atau 99,57% dengan keluaran output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah unit gedung atau bangunan lainnya yang sebanyak 1 unit realisasi 100%.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp 6.693.000,- terealisasi sebesar Rp 4.480.000,- atau 66,94% dengan keluaran/ output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah



laporan penyediaan jasa surat menyurat jenis kelengkapan benda pos yang disediakan realisasi 100%.

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp 245.496.960,- terealisasi sebesar Rp 202.651.339,- atau 82,55%. Keluaran output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan realisasi 100%.
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp 128.400.000,- terealisasi sebesar Rp 51.086.400,- atau 39,79% dengan keluaran/output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 1 orang realisasi 100%.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah dengan sub kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggran sebesar Rp 35.611.750,- terealisasi sebesar Rp 22.224.065,- atau 62,41%. Hal ini disebabkan karena kendaraan dinas jabatan disesuaikan kerusakan yang terjadi, Keluaran / output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan sebanyak 1 unit realisasi 100%.
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 932.751.200,- terealisasi sebesar Rp. 456.512.475,- atau 48,98%. Hal ini disebabkan karena disesuaikan dengan kerusakan yang terjadi dan beberapa kendaraan dinas operasional atau lapangan STNK nya bukan atas nama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. Keluaran output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya sebanyak 42 unit realisasi 87,5%.
- c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat dengan anggaran sebesar Rp. 354.923.352,- realisasi sebesar Rp. 206.395.049,- atau 58,15% dengan keluaran output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah



alat besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya sebanyak 4 unit realisasi 100%.

- d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 5.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 00,00% hal ini disesuaikan dengan kerusakan yang terjadi, keluaran output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara sebanyak 17 unit realisasi 00,00%.
- e. Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 83.914.000,- terealisasi sebesar Rp 83.438.000,- atau 99,43% dengan keluaran/ output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 3 unit realisasi 100%.
- f. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 34.630.000,- terealisasi sebesar Rp 20.515.000,- atau 59,24% hal ini disebabkan sebagian peralatan kantor dalam kondisi baik. Keluaran/ output dari sub kegiatan ini yaitu jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi sebanyak 48 unit realisasi 87,5%.

B. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran untuk Program Perencanaan Lingkungan Hidup sebesar Rp.439.175.879,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 323.452.219,- atau 73,65% dengan capaian kinerja output 100%. Program ini terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dan 3 (Tiga) sub Kegiatan yaitu :

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota dengan sub kegiatan :

- a. Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 171.523.950,- terealisasi sebesar Rp 124.886.203 atau 85,00% keluaran dari kegiatan ini yaitu jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota sebanyak 10 Dokumen realisasi 100%.
- b. Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 225.141.029,- terealisasi sebesar Rp 181.514.416,- atau 60,00%, hal ini dikarenakan beberapa kegiatan yang belum terlaksana seperti cetak dokumen final belum



dilaksanakan dikarenakan belum mendapat arahan dan perbaikan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan serta dari Kementerian Lingkungan Hidup. Perjalanan dinas untuk koordinasi hal-hal tersebut juga tidak terealisasi. sebanyak 10 dokumen terealisasi 100%.

2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Muara Enim dengan Sub kegiatan :

- a. Pemantauan dan Evaluasi KLHS dengan anggaran sebesar Rp. 42.510.900,- terealisasi sebesar Rp 17.051.600,- atau 40,11% hal ini disebabkan karena kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap KLHS yang sudah mendapat validasi yaitu KLHS RDTR Perkotaan Tanjung Enim belum maksimal pelaksanaannya, terutama yang berhubungan dengan analisis yang memerlukan keahlian atau tenaga ahli. Ketiadaan tenaga ahli karena termasuk anggaran yang di refocusingkan dan kena efisiensi pada tahun 2025 ini. Keluaran output pada kegiatan ini yaitu jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi sebanyak 10 dokumen realisasi 100%.

C. Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran untuk Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup sebesar Rp 1.170.677.800,- terealisasi sebesar Rp 806.688.497,- atau 68,91% dengan capaian kinerja output 100%. Program ini terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dan 6 (enam) sub Kegiatan yaitu :

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten dengan sub kegiatan :

- a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi, dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan anggaran sebesar Rp 206.271.200,- terealisasi sebesar Rp 188.890.397,- atau 91,57%. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim sebanyak 12 dokumen terealisasi 100%.
- b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap



Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dengan anggaran sebesar Rp. 159.807.200,- terealisasi sebesar Rp 151.689.889,- atau 94,92%. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara, dan laut yang dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan terealisasi 100%.

- c. Pengelola Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 639.225.800,- terealisasi sebesar Rp 356.957.957,- atau 55,84%. hal ini disebabkan karenakan belum selesai terbentuk nya BLUD Laboratorium lingkungan karena sisa anggaran tersebut untuk keperluan, mendukung berdiri dan operasional BLUD laboratorium lingkungan keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu Pelaporan Peningkatan Mutu Laboratorium sebanyak 2 Dokumen terealisasi 100%.

2. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten dengan sub kegiatan :

- a. Pelaksanaan rehabilitasi dengan anggaran sebesar Rp 34.384.000,- terealisasi sebesar Rp 21.640.191,- atau 62,94% hal ini disebabkan karena penanaman pohon dilakukan dgn cara swadaya oleh pokmas dan DLH sehingga tidak menggunakan anggaran jasa petugas penanaman serta karena karena dilakukan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas sebanyak 3 Ha terealisasi 80%.
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemaran dengan anggaran sebesar Rp 48.420.800,- terealisasi sebesar Rp 25.209.592,- atau 52,06%, hal ini dikarenakan tahun 2025 hanya 4 perusahaan yang mengajukan SLO Air Limbah dan Emisi, untuk monitoring dan evaluasi dilakukan secara pasif dengan mengevaluasi dokumen pemantauan air limbah dan udara yang disampaikan pelaku usaha ke DLH Kabupaten Muara Enim sebanyak 4 kegiatan terealisasi 100%.
- c. Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi dengan anggaran sebesar Rp. 82.568.800,- terealisasi sebesar Rp. 62.300.471,- atau 75,45% hal ini disebabkan karena dilakukan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas, keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah kegiatan



koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan sebanyak 3 kegiatan terealisasi 100%.

D. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) sebesar Rp. 151.913.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 37.425.650,- atau 24,64% dengan capaian kinerja output 100%. Program ini terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 3 (Tiga) sub Kegiatan yaitu :

1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan:

- a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan anggaran sebesar Rp 69.079.100,- terealisasi sebesar Rp. 33.124.700,- atau 48,08%. Hal ini disebabkan karena kegiatan pembersihan 3 hutan kota telah dilaksanakan dan pengecetan pohom - pohon di Hutan Kota Aursebanyak 3.79 Ha terealisasi 100%.
- b. Pengelolaan Sarana dan Prasaranan Keanekaragaman Hayati dengan anggaran sebesar Rp. 19.579.800,- terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 00.00% hal ini dikarenakan mulai tahun 2025 sudah ada komitmen 6 perusahaan yang akan berpartisipasi dalam pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana kehati melalui dana CSR sebanyak 12 unit terealisasi 100%.
- c. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan dengan anggaran sebesar Rp 63.254.100,- terealisasi sebesar Rp 4.210.950,- atau 6.66%. hal ini disebabkan karena dianggarkan melalui peran serta 6 perusahaan melalui partisipasi CSR sebanyak 10 unit terealisasi 100%.

E. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. 71.990.130,- dan terealisasi sebesar Rp 45.121.200,- atau 62,68% dengan capaian kinerja output 100%. Program ini terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dan 2 (Dua) sub kegiatan yaitu :

1. Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan sub kegiatan :

- a. Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan anggaran sebesar Rp



41.948.100,- terealisasi sebesar Rp 20.756.060,- atau 49,48%. Hal ini dikarenakan masih ada pelaku usaha penghasil lb3 yg belum mengajukan permohonan rincian teknis penyimpanan lb3. Dan pemantauan masih dilakukan dgn pemantauan pasif yaitu dengan mengevaluasi laporan neraca lb3 yg di kirimkan oleh penghasil Lb3. Dan memantau melalui aplikasi SPEED sebanyak 2 laporan terealisasi 92%.

2. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pengelolaan, dan/ atau Penimbunan dengan anggaran sebesar Rp. 30.042.030,- terealisasi sebesar Rp. 24.365.140,- atau 81,10% hal ini disebabkan karena dikarenakan rapat rapat dgn penghasil Lb3, pemerintah provinsi dan Kementerian lingkungan hidup masih dilakukan dengan secara daring atau online sebanyak 2 dokumen laporan terealisasi 100%.

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Alokasi anggaran untuk Program ini sebesar Rp.229.828.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 188.615.818,- atau 82,07%. Program ini terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 2 (Dua) sub kegiatan yaitu :

1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin dengan sub kegiatan :

- a. Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin dengan anggaran sebesar Rp 167.595.900,- terealisasi sebesar Rp 135.457.458,- atau 80,82%. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu 5 dokumen lingkungan hidup yang di sahkan terealisasi 100%.
- b. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp 62.232.100,- terealisasi sebesar Rp 53.158.360,- atau 85,42%. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah badan usaha



dan/atau kegiatan yang diawasi sebanyak 1 badan usaha terealisasi 100%.

G. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
Alokasi anggaran untuk Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH sebesar Rp. 15.050.315,- dan terealisasi sebesar Rp 13.672.100,- atau 90,84%. Tingkat pencapaian kegiatan ini mencapai 100 %.Program ini Terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) sub kegiatan yaitu :

1. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH dengan sub kegiatan :

- a. Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH dengan anggaran sebesarRp 15.050.315,- terealisasi sebesar Rp 13.672.100,- atau 90,84%. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi sebanyak 1 dokumen terealisasi 100%.

H. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakatsebesar Rp 144.786.165,- dengan realisasi sebesar Rp 122.209.332,- dengan capaian kinerja output sebesar 84,41%. Program ini Terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) sub kegiatan yaitu:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

- a. Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 144.786.165,- terealisasi sebesar Rp. 122.209.332,- atau 84,41% hal ini disebabkan karena biaya hotel hanya untuk tim verifikasi adiwiyata Nasional dan Mandiri dari KLH sedangkan untuk Tim DLHP provinsi tidak direalisasikan krn tidak ikut mendampingi keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah pendampingan



pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang disediakan sebanyak 1 dokumen terealisasi 100%.

I. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Alokasi anggaran untuk Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat sebesar Rp 129.003.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 68.760.278,- atau 53,30% dengan capaian kinerja output sebesar 100%. Program ini Terdiri Dari 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) sub kegiatan yaitu :

1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

- a. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha / Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp. 129.003.600,- terealisasi sebesar Rp. 68.760.278,- atau 53,30% hal ini disebabkan karena kegiatan pemberian penghargaan untuk sekolah adiwiyata kabupaten tahun 2025 tidak dilaksanakan karna sekolah yg mendaftar hanya 2 sekolah banyak sekolah yg belum siap untuk dilakukan penilaian terkait perubahan Permen LH No 52 tahun 2019 menjadi Permen LH No 5 tahun 2025. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/ dunia pendidikan/ Filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH pemberian penghargaan lingkungan sebanyak 1 Entitas terealisasi 100%.

J. Program Penanganan Pengaduan Masyarakat Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran untuk Program Penanganan Pengaduan Masyarakat Lingkungan Hidup sebesar Rp 65.810.300,- dengan realisasi sebesar Rp 58.919.310,- dengan capaian kinerja output sebesar 89,53%. Program ini Terdiri Dari 1 (Satu) Kegiatan dan 2 (Dua) sub kegiatan yaitu :

1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

- a. Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 48.142.600,- terealisasi sebesar Rp 42.455.060,- atau 88,19%. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan



perusakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota yang ditindaklanjuti/ ditangani sebanyak 1 pengaduan terealisasi 100%.

- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/ atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan dengan anggaran sebesar Rp. 17.667.700,- terealisasi sebesar Rp. 16.464.250,- atau 93,19%. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah penerapan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha/ kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota sebanyak 1 perkara terealisasi 100%.

K. Program Pengelolaan Persampahan

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Persampahan sebesar Rp 17.665.505.090,- terealisasi sebesar Rp 15.890.135.125,- atau 89,95% Dengan capaian kinerja output sebesar 100%. Program ini Terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dan 7 (tujuh) sub Kegiatan yaitu:

1. Pengelolaan Sampah dengan sub kegiatan:

- a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan anggaran sebesar Rp 108.257.445,- terealisasi sebesar Rp 83.716.083,- atau 77,33% hal ini disebabkan karena honorarium / upah petugas pengolah sampah tidak realisasikan karena perubahan status dari KKWT Menjadi PPPK. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebanyak 5 kelompok terealisasi 100%.
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan dengan anggaran sebesar Rp 21.307.100,- terealisasi sebesar Rp. 19.676.010,- atau 92,34%. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana bersama pemerintah pusat, provinsi maupun pihak lain di luar kabupaten/kota untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota. Pengelolaan persampahan sesuai dengan rencana induk pengelolaan sampah dan mengacu pada jakstrada sebanyak 7 dokumen terealisasi 100%.



- c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 13.726.278.300,- terealisasi sebesar Rp 13.435.801.443,- atau 97,88%. Keluaran (output) dari kegiatan ini yaitu jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. sebanyak 33 unit terealisasi 100%.
- d. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota dengan anggaran Rp 534.311.245,- terealisasi sebesar Rp 497.847.899,- atau 93,18%. Keluaran dari kegiatan ini yaitu jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan sebanyak 1 dokumen terealisasi 100%.
- e. Penanganan sampah melalui pengangkutan dengan anggaran Rp 2.567.532.800,- terealisasi sebesar Rp 1.547.168.000,- atau 60,26% hal ini disebabkan karena honorarium / upah petugas pengolah sampah tidak realisasikan karena perubahan status dari KKWT Menjadi PPPK. Keluaran dari kegiatan ini yaitu jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan sebanyak 80 ton terealisasi 90%.
- f. Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional dengan anggaran Rp 566.363.200,- terealisasi sebesar Rp 238.789.600,- atau 42,16%. Hal ini disebabkan karena honorarium / upah petugas pengolah sampah tidak realisasikan karena perubahan status dari KKWT Menjadi PPPK. Keluaran kegiatan ini yaitu jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional sebanyak 57,6 ton terealisasi 90%.

2. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta dengan sub kegiatan:

- a. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah dengan anggaran sebesar Rp. 141.455.000,- terealisasi sebesar Rp 67.136.090,- atau 47,46% hal ini disebabkan karena pada tahun 2025 belum ada pengumuman adipura sehingga utk kegiatan belanja reward



untuk petugas penyapu jalan/ petugas kebersihan (sembako) tidak di realisasikan. Keluaran/ output dari kegiatan ini yaitu Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota sebanyak 1 laporan terealisasi 100%.

3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Terpeliharanya Kualitas Air, Kualitas Udara dan Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,74	73,06	109,47
		Terlaksananya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	1,663,921	2,287,005	137,45

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

-

5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Beberapa Penghargaan dan Prestasi yang diperoleh dalam Bidang Lingkungan Hidup selama tahun 2025, yaitu :

No.	NAMA SEKOLAH	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TAHUN ANGGARAN
1.	SDN 13 Tanjung Agung	Adiwiyata Nasional Tk	Menteri	2025
2.	SDN 11 Lawang Kidul	Adiwiyata Nasional Tk	Menteri	2025
3.	SDN 8 Lawang Kidul	Adiwiyata Nasional Tk	Menteri	2025
4.	SDN 11 Tanjung Agung	Adiwiyata Nasional Tk	Menteri	2025
5.	SDN 2 Lawang Kidul	Adiwiyata Nasional Tk	Menteri	2025
6.	MAN 1 Muara Enim	Adiwiyata Nasional Tk	Menteri	2025
7.	SDN 16 Tanjung	Adiwiyata Tk	Gubernur	2025



No.	NAMA SEKOLAH	NAMA PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TAHUN ANGGARAN
	Agung	Provinsi		
8.	SDN 17 Muara Enim	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2025
9.	SDN 16 Belimbing	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2025
10.	SDN 1 Lubai	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2025
11.	SDN 1 Lubai Ulu	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2025
12.	SDN 2 Lubai Ulu	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2025
13.	SDN 13 Lubai Ulu	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2025
14.	SDN 15 Lubai Ulu	Adiwiyata Tk Provinsi	Gubernur	2025
15.	SDN 12 Tanjung Agung	Adiwiyata Tk Mandiri	Menteri	2025
16.	SDN 7 Lawang Kidul	Adiwiyata Tk Mandiri	Menteri	2025
17.	SDN 21 Lawang Kidul	Adiwiyata Tk Mandiri	Menteri	2025
18.	SDN 1 Lawang Kidul	Adiwiyata Tk Mandiri	Menteri	2025
19.	SDN 17 Lawang Kidul	Adiwiyata Tk Mandiri	Menteri	2025
20.	SMP N 2 Lawang Kidul	Adiwiyata Tk Mandiri	Menteri	2025

1. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Sebanyak 8 (Delapan) Sekolah Dan Penghargaan Nirwasita Tantra
2. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Sebanyak 6 (Enam) Sekolah Dan Adiwiyata Mandiri Sebanyak 6 (Enam) Sekolah



5. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim. Pada Tahun Anggaran 2025 alokasi belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp.11.346.401.488,90 dan terealisasi sebesar Rp.9.117.289.988,00 atau 80,35% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp.10.797.439.689,00 terealisasi sebesar Rp.8.583.966.491,00 atau 79,50%, yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp.548.961.800,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.533.323.497,00 atau 97,15% yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim melaksanakan 5 Program, 14 Kegiatan, dan 37 subkegiatan antara lain yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.9.302.024.012,90 dengan realisasi sebesar Rp.7.589.457.439,00 atau 81,59% dengan capaian kinerja output sebesar 100 %. Outcome dari Program ini adalah Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Program ini terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Alokasi anggaran untuk kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp.34.247.958,00 dengan realisasi sebesar Rp.30.055.275,00 atau 87,76% Adapun Output dari kegiatan ini adalah persentase dokumen perencanaan, dokumen penganggaran dan evaluasi



kinerja yang disusun dengan capaian kinerja sebesar 100% :

- a. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp.10.719.700,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.8.993.700,00 atau sebesar 83,90%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis dokumen RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disusun sebanyak 4 dokumen yaitu RKA Induk Tahun 2025, RKA Pergeseran I, RKA Pergeseran II, RKA dan RKA Pergeseran III Tahun 2025 dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp.2.829.600,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.824.500,00 atau sebesar 99,82%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis dokumen RKA Perubahan yang tersusun sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp.11.238.058,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.767.490,00 atau sebesar 86,91%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis dokumen DPA OPD yang tersusun sebanyak 4 dokumen yaitu DPA iInduk Tahun 2025, DPA Pergeseran I, DPA Pergeseran III dan DPA Pergeseran III dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp.7.135.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.173.685,00 atau sebesar 86,52%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis dokumen DPPA OPD yang disusun sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- e. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.324.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.295.900,00 atau sebesar 98,76%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis dokumen SAKIP perangkat daerah yang disusun sebanyak 3 laporan dengan capaian output/ keluaran



sebesar 100%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Alokasi anggaran untuk kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp.7.434.456.348,90 dengan realisasi sebesar Rp. 5.927.086.793,00 atau sebesar 79,72% Adapun Output dari kegiatan ini adalah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu.

- a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 7.421.307.348,90 dan realisasi keuangan sebesar Rp.5.919.581.793,00 atau sebesar 79,76%. Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN telah dilaksanakan kepada 61 orang ASN terbagi dari 36 Orang PNS dan 25 Orang PPPK sebelum bulan berjalan. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu selama 12 bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp. 9.440.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.800.000,00 atau sebesar 40,25%. Adapun output/keluar dari subgkegiatan ini adalah pelaksanaan tugas ASN sebanyak 80 orang yang telah direalisasikan dengan menyelenggarakan kegiatan kerohanian bagi seluruh ASN Disdukcapil sebanyak dua kali, capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp.2.135.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.134.500,00 atau sebesar 99,98%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan perangkat daerah sebanyak 1 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp.1.574.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.570.500,00 atau sebesar 99,78%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis laporan keuangan perangkat daerah sebanyak 1 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.



3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar Rp.71.313.650,00 dengan realisasi sebesar Rp. 68.849.839,00 Atau sebesar 96,55%. Adapun Output dari kegiatan ini adalah Laporan barang milik daerah yang disusun tepat waktu.

- a. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp.71.313.650,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.68.849.839,00 atau sebesar 96,55% guna memenuhi amanat Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah dan jenis barang milik daerah yang dibayarkan asuransi yaitu asuransi untuk 1 Unit Gedung Kantor, asuransi kendaraan roda 2 sebanyak 6 Unit dan asuransi kendaraan roda 4 sebanyak 7 unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Alokasi anggaran sebesar Rp.33.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.31.000.000,00 atau sebesar 93,94%. Adapun Output dari kegiatan ini adalah Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat dan Bimbingan Teknis.

- a. Subkegiatan Penyediaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp.33.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.31.000.000,00 atau sebesar 93,94%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 4 orang dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp.988.211.200,00 dengan realisasi sebesar Rp.907.835.201,00 atau sebesar 91,87%. Adapun Output dari kegiatan ini adalah Sarana dan Prasarana yang terpenuhi.

- a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp.12.968.700,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.12.345.000,00 atau sebesar 95,19%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini



adalah jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan sebanyak 4 Paket dengan 10 Jenis komponen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp.376.569.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.361.561.499,00 atau sebesar 96,01%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan sebanyak 4 paket dengan 13 Jenis Barang dan 22 Unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 25.305.900,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.19.970.000,00 atau sebesar 78,91%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang diadakan sebanyak 3 Paket dengan 25 Jenis Komponen barang dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp.111.376.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.81.718.820,00 atau sebesar 73,37%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis bahan logistik sebanyak 2 paket yaitu berupa bahan bakar dan pelumas seperti BBM untuk mendukung operasional genset kantor dan BBM untuk kendaraan dinas Eselon II, serta perlengkapan alat tulis kantor untuk menunjang kebutuhan operasional dalam kurun waktu selama satu tahun, dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- e. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp.21.898.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.19.576.000,00 atau sebesar 89,39% hal ini dikarenakan sudah sesuai dengan kebutuhan kantor. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan sebanyak 2 Paket berupa Alat Tulis Kantor seperti map dinas 500 pert 100 buah, serta untuk kegiatan bahan cetak seperti blanko surat disposi sebanyak 7 Buku, cetak banner 50 meter, biaya fotocopy sebanyak 13.590 lembar/tahun, serta standing banner dengan capaian



output/keluaran sebesar 100%.

- f. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp.29.520.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.5.400.000,00 atau sebesar 18,29% sesuai dengan tagihan surat kabar. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis surat kabar harian yang disediakan dari 2 Jenis penerbit surat kabar dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- g. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp.410.571.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.407.263.882,00 atau sebesar 99,19%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 24 laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan keluar daerah dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 172.392.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.171.761.998,00 atau sebesar 99,63%. Adapun Output dari kegiatan ini adalah Barang Milik Daerah yang Tersedia.

- a. Subkegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp.164.892.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.164.369.999,00 atau sebesar 99,68%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah paket mebel yang diadakan sebanyak 1 Paket dengan 4 Jenis barang sebanyak 28 Unit berupa lemari arsip pintu kaca sebanyak 6 unit, filling cabinet 2 unit, kusi kerja 10 unit dan meja $\frac{1}{2}$ biro 10 unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya dengan anggran sebesar Rp. 7.500.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.7.391.999,00 atau sebesar 98,56%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini Adalah jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor seperti penyediaan unit permainan anak sebanyak 1 paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.



7. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah.

Alokasi anggaran sebesar Rp.428.020.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.327.073.508,00 atau sebesar 76,42%. Adapun Output dari kegiatan ini adalah Jasa Penunjang Perkantoran yang tersedia.

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp.101.925.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 73.935.200,00 atau sebesar 72,54% sesuai dengan tagihan PT. POS Cabang Muara Enim. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah paket pos pengiriman dokumen kependudukan dan benda pos (materai) yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp.207.715.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.169.558.308,00 atau sebesar 81,63% hal ini dikarenakan sudah sesuai dengan kebutuhan kantor. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis rekening yang dibayar sebanyak 3 Rekening/12 bulan yaitu rekening telepon, rekening air PDAM dan rekening listrik selama kurun waktu 12 bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar Rp.14.200.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.10.430.000,00 atau sebesar 73,45%, sesuai dengan kebutuhan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah peralatan kerja yang diperbaiki sebanyak 2 jenis (Laptop 10 Unit dan printer 10 Unit) dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Subkegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran sebesar Rp.104.180.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.73.150.000,00 atau sebesar 70,22%. Tenaga kebersihan dan keamanan yang dianggarkan berjumlah 6 orang dengan realisasi pembayaran selama 8 bulan, Hal ini dikarenakan sejak bulan September terjadi penataan tenaga Non-ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di mana pegawai honorer pada bagian kebersihan dan keamanan sebagian telah diangkat menjadi



PPPK dan sebagian lainnya dilakukan pengakhiran hubungan kerja. Kebijakan tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Alokasi anggaran sebesar Rp.140.382.856,00 dengan realisasi sebesar Rp.125.794.825,00 atau sebesar 89,61%. Adapun Output dari kegiatan ini adalah Barang milik daerah yang terpelihara.

- b. Subkegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp.12.520.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.8.798.975,00 atau sebesar 70,28%, direalisasikan sesuai dengan kebutuhan servis kendaraan dinas jabatan dan biaya pajak kendaraan. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah kendaraan yang dibayarkan pajak kendaraan Dinas jabatan dan jenis kendaraan dinas yang dipelihara rutin/berkala sebanyak 1 unit mobil jabatan Kepala Dinas serta pembelian suku cadang berupa ban luar kendaraan dinas sebanyak 4 buah dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp.60.280.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.57.005.850,00 atau sebesar 94,57% direalisasikan sesuai dengan kebutuhan servis dan biaya pajak kendaraan dinas operasional. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini kendaraan dinas operasional yang dibayarkan pajak bermotor dan jenis kendaraan dinas operasional yang dipelihara rutin/berkala sebanyak 4 unit kendaraan roda 4 dan 7 unit kendaraan roda 2 dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.49.750.000,00 atau sebesar 99,50%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis gedung kantor sebanyak 1 unit dengan capaian



output/keluaran sebesar 100%.

- e. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.17.582.856,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.10.240.000,00 atau sebesar 58,24%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala sebanyak 2 jenis barang sejumlah 26 unit yaitu pemeliharaan Genset 1 Unit dan Pemeliharaan AC Split 25 Unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

B. Program Pendaftaran Penduduk.

Alokasi anggaran untuk Program ini sebesar Rp.1.384.713.479,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.002.232.277,00 atau sebesar 72,38%. Adapun outcome dari Program ini adalah Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang terpenuhi.

1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.1.384.713.479,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.002.232.277,00 atau sebesar 72,38%. Adapun Output dari kegiatan ini adalah dokumen administrasi kependudukan yang terpenuhi.

- a. Subkegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan anggaran sebesar Rp.1.384.713.479,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.002.232.277,00 atau sebesar 72,38%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah sebanyak 1 Laporan hasil pelayanan pendaftaran penduduk yang terdiri dari Kartu Keluarga sebanyak 51.377 dokumen, KTP-el sebanyak 45.336 dokumen, KIA sebanyak 17.262 dokumen dan Surat Pindah Datang sebanyak 9.630 dokumen serta Surat Pindah Keluar sebanyak 10.636 dokumen. Dari jumlah tersebut hasil pelayanan jemput bola ke 23 kecamatan, sekolah, panti asuhan, pondok pesantren, lembaga pemasyarakatan dll sebanyak KK 405 , KTP 619 dan KIA 223.

C. Program Pencatatan Sipil.

Alokasi anggaran untuk Program ini sebesar Rp.255.390.552,00 dengan realisasi sebesar Rp.212.112.649,00 atau sebesar 83,05%. Adapun outcome dari Program ini adalah Penduduk yang



memiliki Dokumen Pencatatan Sipil

1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 124.075.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.106.105.393,00 atau 85,52%. Adapun Output dari kegiatan ini adalah Dokumen Catatan Sipil yang tersedia.

- a. Subkegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil dengan anggaran sebesar Rp. 124.075.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.106.105.393,00 atau sebesar 85,52% hal ini dikarenakan sudah sesuai dengan kebutuhan kantor. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Akta Kelahiran yang dicetak untuk masyarakat melalui jemput bola yang diadakan selama 30 kali sebanyak 277 Akta kelahiran, akta kematian sebanyak 102 dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.131.315.552,00 dengan realisasi sebesar Rp.106.007.256,00 atau 80,73% Adapun Output dari kegiatan ini adalah Data Pencatatan Sipil yang terpenuhi.

- a. Subkegiatan Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil dengan anggaran sebesar Rp.131.315.552,00 dan realisasi sebesar Rp.106.007.256,00 atau sebesar 80,73%. Hal ini dikarenakan adanya penghematan anggaran pada pengadaan sampul plastik Akta dan formulir pencatatan sipil serta penghematan perjalanan dinas. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah sebanyak 100% akta catatan sipil melalui pelayanan jemput bola dan inovasi pelayanan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%. Realisasi dokumen Pencatatan Sipil yang telah diterbitkan sebanyak 16.887 Akta Kelahiran, 3.796 Akta Kematian, 59 Akta Perkaawinan Non-Muslim dan 4 Akta Perceraian.

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Alokasi anggaran untuk Program ini sebesar Rp.333.350.845,00 dengan realisasi sebesar Rp.249.857.017,00 Adapun outcome dari Program ini adalah Cakupan Layanan Informasi Data



Kependudukan.

1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.134.871.929,00 dengan realisasi sebesar Rp.105.411.703,00. Adapun Output dari kegiatan ini adalah Data Kependudukan dan Jumlah Lembaga/Instansi yang memanfaatkan Data yang terakomodasi.

- a. Subkegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp.87.722.700,00 dengan realisasi Rp. 70.692.728,00 atau sebesar 80,59%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini 1 laporan dengan capaian output/keluaran 100%.
- b. Subkegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp.47.149.229,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.34.718.975,00 atau sebesar 73,64% hal ini dikarenakan adanya penghematan biaya perjalanan dinas luar daerah serta penghematan belanja makan minum yang direalisasikan sesuai harga pasar. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan data kependudukan sebanyak 2 dokumen PKS dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.198.478.916,00 dengan realisasi sebesar Rp.144.445.314,00 atau 72,78%. Adapun Output dari kegiatan ini adalah Koordinasi dengan lembaga pelayanan publik yang terlaksana.

- a. Subkegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dianggarkan sebesar Rp.75.615.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.52.001.199,00 atau sebesar 68,77%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah laporan hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yaitu berjumlah 1 Laporan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan koordinasi antara lembaga



pemerintah dan non-pemerintah dengan terlaksananya kerja sama pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dengan melibatkan 14 lembaga pada tahun 2025 yaitu terdiri dari PT.Bukit Asam Medika Tanjung Enim, PMB “Bunda”Muara enim, PMB Veny Fariza, PMB Iis Sholikah, PMB Semiyati, PMB Sahabat Kelaurga, PMB Tri Yosi Anggraeni, PMB Khoiriyah, PMB Azzahwa, PMB Silvia, PMB Eyik, PMB Muatiara dan PMB Mihrimah, dengan total kerja sama yang terlaksana disdukcapil sebanyak 96 lembaga.

- b. Subkegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan anggaran sebesar Rp.63.984.216,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 37.629.050,00 atau sebesar 58,81 % hal inidikarenakan adanya penghematan biaya perjalanan dinas luar daerah.Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah laporan hasil sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yaitu sebanyak 1 Laporan, sosialisasi terkait PIAK dilakukan di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Muara Enim dengan jumlah sasaran 6 Kelurahan dan 10 Desa serta Kecamatan Gunung Megang dengan sasaran di 13 Desa yang masing-masing diikuti sebanyak 50 peserta terdiri dari aparatur desa, tokoh masyarakat, karang taruna dan PKK desa hingga total realisasi sasaran peserta sosialisasi sebanyak 100 peserta per periode anggaran dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat dianggarkan sebesar Rp.58.879.200,00 dan realisasi keaungan sebesar Rp.54.815.065,00 atau sebesar 93,10%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi dan Edukasi sebanyak 1 Laporan.

E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini Sebesar Rp.70.922.600,00 dengan realisasi sebesar Rp.63.630.606,00 atau 89,72%. Adapun Output dari kegiatan ini adalah cakupan profil kependudukan.

1. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan.

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini Sebesar Rp.70.922.600,00



dengan realisasi sebesar Rp.63.630.606,00 atau 89,72%. Adapun Output dari kegiatan ini adalah Buku Profil yang disusun

- a. Subkegiatan Penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain dengan anggaran sebesar Rp.70.922.600,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.63.630.606,00 atau sebesar 89,72%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis buku yang disusun sebanyak 1 Dokumen buku profil dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang Cepat, Mudah, Transparan, Profesional dan Inovatif	1. Persentase Kepemilikan KTP (%)	99,86%	97,49%	97,63%
	2. Persentase Akta Kelahiran usia (0-18 Tahun)	99,00%	97,19%	98,17%
	3. Indeks pelayanan publik (IPP)	A (4,52)	A (4,51)	99,78%
	4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (3,75)	A (97,47)/ 3,89 (A)	103,73%

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

-

5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

2. Piagam Penghargaan sebagai Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik dengan predikat “Pelayanan Prima “ pada PEKPPP Tahun 2024 oleh Menpar RB.
3. Penghargaan Kategori Top 3 Inovator dengan judul DAKU SETIA pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Se-Sumatera Selatan Tahun 2025
4. Penghargaan Kategori Harapan 3 Pada Hasil Penilaian Sistem Kearsipan Internal Bagi Perangkat Daerah Dan Kecamatan Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
5. Penghargaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim atas Partisipasi dan Kontribusi dalam pelaksanaan Isbat Nikah Massal Membara di Kabupaten Muara Enim Tahun 2025



6. Piagam Penghargaan Inovasi “Artis Dukcapil” (Antar Gratis Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kategori Finalis Top Inovasi KIPP Tahun 2025 Kelompok Umum
7. Piagam Penghargaan Inovasi “BELA DADOKU” Begitu Lahir Dapat Dokumen Kependudukan Kategori Finalis Top Inovasi KIPP Tahun 2025
8. Piagam Penghargaan Inovasi “PEPESAN IKAN ASIN” (Pelayanan Pensiunan, Perkawinan dan Perceraian (Identitas Kependudukan Aparatur Sipil Negara) Kategori Finalis Top Inovator KIPP Tahun 2025



6. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA OLEH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim. Pada Tahun Anggaran 2025, alokasi belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Muara Enim Sebesar Rp. 44.453.551.059,40 dan Terealisasi sebesar Rp. 40.254.685.909,00,- atau sebesar (90,55)%

A. Belanja Operasional

Belanja Operasional dengan Anggaran sebesar Rp. 43.832.778.786,40, dan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.642.460.909,00 atau sebesar (90,44%)

B. Belanja Modal

Belanja Modal sebesar Rp. 620.772.273,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 612.225.000,00 atau sebesar (98,62%)

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan, dan 46 Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- a. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 16.414.600,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.779.152,00 atau sebesar (90,04%)
- b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 16.033.200,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.567.244,00 atau sebesar (90,86%)
- c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar 17.288.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 612.225.000,00 atau sebesar (98,62%)

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan



- anggaran sebesar Rp 10.517.390.862,40 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.935.413.652,00 atau sebesar (84,96%)
- b. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp 34.109.642,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.984.844,00 atau sebesar (90,84%)
 - c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp 9.177.248,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.822.809,00 atau sebesar (96,14%)
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp 23.570.736,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.757.310,00 atau sebesar (75,34%)

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp 59.204.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 51.882.248,00 atau sebesar (87,63%)
- b. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp 27.229.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.549.488,00 atau sebesar (75,%)

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp 87.732.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 59.911.888,00 atau sebesar (68,29%)

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 17.694.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.295.000,00 atau sebesar (97,74%)
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 681.303.024,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 669.137.000,00 atau sebesar (98,21%)
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan



- anggaran sebesar Rp. 48.482.300,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.563.720,00 atau sebesar (81,60%)
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 48.482.300,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.563.720,00 atau sebesar (81,60%)
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 11.391.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.540.000,00 atau sebesar (92,53%)
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.655.000,00 atau sebesar (45,69%)
 - g. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp. 71.820.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 60.435.000,00 atau sebesar (84,69%)
 - h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Anggaran sebesar Rp. 844.718.700,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 828.646.687,00 atau sebesar (98,10%)
 - i. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan Anggaran sebesar Rp. 29.609.300,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.103.141,00 atau sebesar (67,89%)

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Anggaran sebesar Rp. 29.609.300,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.103.141,00 atau sebesar (67,89%)
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Anggaran sebesar Rp. 191.255.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 160.627.523,00 atau sebesar (83,99%)
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Anggaran sebesar Rp. 32.450.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.895.000,00 atau sebesar (92,13%)
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Anggaran sebesar Rp. 275.835.343,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 227.380.000,00 atau sebesar (82,43%)
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



dengan Anggaran sebesar Rp. 275.835.343,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 227.380.000,00 atau sebesar (82,43%)

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Anggaran sebesar Rp. 284.162.850,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 277.006.200,00 atau sebesar (97,48%)
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 400.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 398.367.817,00 atau sebesar (99,59%) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 78.840.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 78.705.000,00 atau sebesar (99,83%)

B. Program Penataan Desa

1. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Tata Wilayah Desa dengan Anggaran sebesar Rp. 118.311.100,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 115.772.827,00 atau sebesar (97,85%)
- b. Sub Kegiatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa dengan Anggaran sebesar Rp. 20.598.263.770,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. Rp19.992.932.627,00 atau sebesar (97,06%)

C. Program Peningkatan Kerjasama Desa

1. Kegiatan Fasilitas Kerjasama Desa

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten Kota dengan Anggaran sebesar Rp. 420.074.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 383.142.969,00 atau sebesar (91,21%)

D. Program Administrasi Pemerintahan Desa

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Administrasi



- Pemerintahan Desa dengan Anggaran sebesar Rp. 420.074.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 383.142.969,00 atau sebesar (91,21%)
- b. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dengan Anggaran sebesar Rp. 365.084.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 334.783.329,00 atau sebesar (91,70%)
 - c. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dengan Anggaran sebesar Rp. 819.100.400,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 707.406.375,00 atau sebesar (91,70%)
 - d. Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa dengan Anggaran sebesar Rp. 819.100.400,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 707.406.375,00 atau sebesar (91,70%)
 - e. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa dengan Anggaran sebesar Rp. 533.508.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 492.517.958,00 atau sebesar (92,32%)
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Anggaran sebesar Rp. 500.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 490.000,00 atau sebesar (92,32%)
 - g. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Desa dengan Anggaran sebesar Rp. 500.310.300,00 Anggaran dan realisasi keuangan sebesar Rp. 261.020.098,00 atau sebesar (52,17%)
 - h. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa dengan Anggaran sebesar Rp. 322.218.300,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 211.930.303,00 Realisasi Rill atau sebesar (65,77%)
 - i. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD dengan Anggaran sebesar Rp. 255.273.700,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 180.952.280,00 Realisasi Rill atau sebesar (70,89%)
 - j. Sub Kegiatan Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan Anggaran sebesar Rp. 422.751.600,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 339.990.599,00 Realisasi Rill atau sebesar (80,42%)
 - k. Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dengan Anggaran sebesar Rp. 339.863.900,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 286.367.732,00 Realisasi Rill atau sebesar (80,42%)



E. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat dengan Anggaran sebesar Rp. 591.121.600,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 567.703.770,00 Realisasi Rill atau sebesar (96,04%)
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan Anggaran sebesar Rp. 154.796.300,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 130.229.030,00 Realisasi Rill atau sebesar (96,04%)
 - c. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan Anggaran sebesar Rp. 208.187.400,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 201.235.547,00 Realisasi Rill atau sebesar (96,04%)
 - d. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan Anggaran sebesar Rp. 110.686.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 103.149.180,00 Realisasi Rill atau sebesar (93,19%)
 - e. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dengan Anggaran sebesar Rp. 442.367.300,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 357.227.835,00 Realisasi Rill atau sebesar (80,75%)
 - f. Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dengan Anggaran sebesar Rp. 649.269.290,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 615.447.980,00 Realisasi Rill atau sebesar (94,79%)
 - g. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan



Kesejahteraan Keluarga dengan Anggaran sebesar Rp. 2.137.667.320,00 Anggaran dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.906.376.090,00 Realisasi Rill atau sebesar (94,79%)

3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Meningkatnya Manajerial Pemerintah Desa	Presentase Pengisian Buku Laporan Administrasi Desa	85%	87%	87%
			Presentase penyampaian APBDes tepat waktu	100%	100%	100%
			Presentase Desa yang mempunyai peta desa	90%	90%	90%
			Presentase Desa Mandiri	75%	78%	78%
		Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa	Presentase BUMDES yang berbadan hukum	56%	60%	59%

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Sebagian anggaran gaji operator komputer tidak terealisasi selama beberapa bulan akibat keterbatasan ketersediaan tenaga dan penataan kebutuhan SDM.	Dilakukan optimalisasi dan pengalihan anggaran serta penyesuaian perencanaan kebutuhan tenaga pada tahun berikutnya agar lebih sesuai dengan kondisi riil.
2.	Masih terdapat perbedaan antara harga satuan pada SIPD dengan harga e-catalog maupun harga pasar aktual, termasuk pada belanja ATK, sehingga berpengaruh terhadap optimalisasi penyerapan anggaran.	Dilakukan evaluasi dan penyesuaian harga satuan SIPD serta pagu anggaran berdasarkan referensi harga pasar aktual melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait.



No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
3.	Kegiatan Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati yaitu Bupati Ngantor di Desa (BUNGA DESA) hanya terlaksana 4 Desa dari 9 Desa yang direncanakan karena keterbatasan waktu	Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati yaitu Bupati Ngantor di Desa (BUNGA DESA) yang semula direncanakan dilaksanakan di 9 desa namun baru terealisasi di 4 desa karena keterbatasan waktu, dapat dioptimalkan melalui penjadwalan ulang berbasis skala prioritas, penerapan sistem klasterisasi wilayah, pendelegasian kepada OPD terkait, serta pemanfaatan teknologi agar seluruh desa tetap terlayani secara efektif dan efisien.
4.	Ada Kegiatan Sarana dan Prasarana Desa terkait Rehabilitasi Kantor Kepala Desa karena adanya masalah di pihak ketiga	Dalam rehabilitasi Kantor Kepala Desa yang bermasalah dengan pihak ketiga, pemerintah desa perlu memeriksa kontrak dan progres pekerjaan terlebih dahulu. Jika terjadi keterlambatan, berikan teguran, kenakan denda, atau lakukan addendum. Jika wanprestasi, putus kontrak secara resmi, bayar sesuai progres riil, dan tunjuk penyedia baru sesuai aturan. Apabila ada indikasi kerugian keuangan desa, lakukan audit dan koordinasi dengan inspektorat. Semua langkah harus terdokumentasi dan sesuai regulasi.

5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

-



7. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muara Enim diselenggarakan oleh perangkat daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2025, alokasi belanja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 31.679.456.605,54,- dan terealisasi sebesar Rp. 30.339.235.882,00,- atau 95,77% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 25.413.044.605,54,- terealisasi sebesar Rp.24.180.227.985,- atau 95,15% yang diarahkan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp6.266.412.000,00,- terealisasi sebesar Rp.6.159.007.897,00,- atau 98,29% yang diarahkan untuk membiayai belanja modal berupa peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan di lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muara Enim melaksanakan 4 (empat) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 52 (Lima Puluh Dua) Sub Kegiatan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp10.759.424.275,59,- dengan realisasi sebesar Rp10.171.624.001,- atau 94,54%. Program ini terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan, sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar



Rp71.895.894,- dengan realisasi sebesar Rp55.688.051,- atau sebesar 77,46%. Dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp23.003.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp20.698.950,- atau sebesar 89,98%.
Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp16.101.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp10.696.298,- atau sebesar 66,43%. Realisasi masih rendah dikarenakan selisih standar harga di DPA dengan harga kontrak.
Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp10.983.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp9.082.100,- atau sebesar 82,69%.
Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp11.557.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.970.401,- atau sebesar 68,96%. Realisasi masih rendah dikarenakan selisih standar harga di DPA dengan harga kontrak dan menyesuaikan kebutuhan.
Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp10.250.394,- dan realisasi keuangan sebesar Rp7.240.302,- atau sebesar 70,63%. Realisasi masih rendah dikarenakan selisih standar harga di DPA dengan harga kontrak dan menyesuaikan kebutuhan.
Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian



Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 7 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.721.469.152,59,- dengan realisasi sebesar Rp3.493.287.093,- atau sebesar 93,87%.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp3.716.302.552,59,- dan realisasi keuangan sebesar Rp3.488.937.092 atau sebesar 93,88%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 26 Orang/bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD, dengan anggaran sebesar Rp5.166.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp4.350.001,- atau sebesar 84,19%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD sebanyak 24 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp147.158.100,- dengan realisasi sebesar Rp103.725.700,- atau sebesar 70,49%.

- a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang milik Daerah SKPD, dengan anggaran sebesar Rp147.158.100,- dengan realisasi sebesar Rp103.725.700,- atau sebesar 70,49%.

Realisasi rendah karena terdapat perbedaan antara pagu dan kontrak asuransi. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD sebanyak 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp115.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp74.480.000,- atau sebesar 64,77%.

- a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan anggaran sebesar



Rp115.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp74.480.000,- atau sebesar 64,77%. Realisasi masih rendah karena sesuai jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah sejumlah 9 Orang ASN yang mengikuti pelatihan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.345.326.214,- dengan realisasi sebesar Rp1.222.623.525,- atau sebesar 90,88%.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp5.968.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp5.695.910,- atau sebesar 95,44%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Komponen alat/bahan Instalasi listrik Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan sebanyak 2 Paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp457.962.664,- dan realisasi keuangan sebesar Rp434.972.455,- atau sebesar 94,98%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan sebanyak 2 Paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan anggaran sebesar Rp29.295.155,- dan realisasi keuangan sebesar Rp13.656.330,- atau sebesar 46,62%. Realisasi masih rendah karena selisih standar harga di DPA dengan harga e-katalog dan menyesuaikan kebutuhan.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Komponen Peralatan Rumah Tangga yang disediakan sebanyak 1 Paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan anggaran sebesar Rp130.393.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp91.584.613,- atau sebesar 70,24%.



Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Komponen Bahan Logistik Kantor yang disediakan sebanyak 4 Paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp29.800.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp16.530.000,- atau sebesar 55,47%.

Realisasi masih rendah karena menyesuaikan kebutuhan Dinas. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah cetakan urusan administrasi perkantoran sebesar 2 Paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan anggaran sebesar Rp. 9.540.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp9.500.000,- atau sebesar 99,58%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Bahan Bacaan (koran) dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan sebanyak 6 eksemplar dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- g. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan anggaran sebesar Rp56.016.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp24.486.000,- atau sebesar 43,71%. Realisasi masih rendah karena adanya pengurangan kegiatan penerimaan tamu secara resmi.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah fasilitas kunjungan tamu sebanyak 12 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp626.350.795,- dan realisasi keuangan sebesar Rp626.198.217,- atau sebesar 99,98%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terselenggaranya koordinasi dan konsultasi SKPD selama 12 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.501.854.200,- dengan realisasi sebesar Rp4.427.000.000,- atau sebesar 98,34%.



- a. **Sub Kegiatan** Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp4.501.854.200,- dengan realisasi sebesar Rp4.427.000.000,- atau sebesar 98,34%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Rehab Total dan Pembangunan Gudang alat dan obat kontrasepsi, ruang/ gudang arsip dan ruang kerja DPPKB dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp531.236.465,- dengan realisasi sebesar Rp478.521.287,- atau sebesar 90,08%.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran sebesar Rp4.760.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp4.700.000,- atau sebesar 98,74%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya laporan penyediaan jasa surat menyurat yang bermaterai sebanyak 12 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp101.316.465,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp70.349.847,- atau sebesar 69,44%.

Realisasi rendah karena menyesuaikan kebutuhan/pemakaian dinas. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran telepon, PDAM, listrik kantor, dan kawat/faksimili/internet/TV berlangganan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Muara Enim sebanyak 12 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran sebesar Rp425.160.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp403.471.440,- atau sebesar 94,90%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya jasa tenaga administrasi, tenaga operatif komputer, tenaga kebersihan, pegawai PPPK Paruh Waktu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama 12 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.



8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp325.484.250,- dengan realisasi sebesar Rp316.298.345,- atau sebesar 97,18%.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp198.224.250,- dan realisasi keuangan sebesar Rp194.526.569 atau sebesar 98,13%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan sebanyak 7 Unit Kendaraan Roda 4 (empat) dan 123 Unit Kendaraan Roda 2 (dua) serta pemeliharaan kendaraan roda dua kantor DPPKB dan lapangan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp99.630.300,- atau sebesar 99,63%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah pemeliharaan 1 unit gedung kantor dan tempat kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya, dengan anggaran sebesar Rp27.260.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp22.141.476,- atau sebesar 81,22%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor berupa AC kantor, Personal Computer dan Laptop, serta Printer yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

B. Program Pengendalian Penduduk

Alokasi anggaran untuk Program Pengendalian Penduduk sebesar Rp685.915.206,- dengan realisasi sebesar Rp623.818.590,- atau 90,95%. Program ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan, sebagai berikut:



1. Kegiatan Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp335.969.006,- dengan realisasi sebesar Rp281.888.140,- atau sebesar 83,90%.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp67.418.184 dengan realisasi keuangan sebesar Rp58.898.650,- atau sebesar 87,36%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah penyediaan dan pengembangan materi pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal sesuai isu lokal Kabupaten/Kota sebanyak 1 Dokumen dengan output/keluaran sebesar 1 kebijakan.

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana, dengan anggaran sebesar Rp268.550.822,- dan realisasi keuangan sebesar Rp222.989.290,- atau sebesar 83,03%.

- i. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Rapat Koordinasi dan Pengendalian Program Bangga Kencana, Rapat Koordinasi dan Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten, serta Rapat Koordinasi TPPS dengan capaian output/keluaran sebesar 1 Kebijakan.

2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten Muara Enim, dengan alokasi anggaran sebesar Rp349.946.200,- dengan realisasi sebesar Rp341.930.450,- atau sebesar 97,71%.

- a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Rp60.612.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp58.722.200,- atau sebesar 96,88%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga sebanyak 1 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Data Dan Informasi Keluarga, dengan anggaran sebesar Rp25.340.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp21.797.850,- atau sebesar 86,02%.



Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya laporan jumlah data dan informasi keluarga sebanyak 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- c. Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga, dengan anggaran sebesar Rp153.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp153.000.000,- atau sebesar 100%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya laporan pemutakhiran wilayah sebanyak 1 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%

- d. Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, dengan anggaran sebesar Rp110.994.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp108.410.400 atau sebesar 97,67%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya dokumen Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB sebanyak 12 Dokumen selama 12 bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

C. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) sebesar Rp12.118.516.280,- dengan realisasi sebesar Rp11.614.116.027,- atau 95,84%. Program ini terdiri dari 4 (empat) Kegiatan dan 13 (tiga belas) Sub Kegiatan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan anggaran sebesar Rp2.097.646.508,- dan realisasi keuangan sebesar Rp1.785.675.567,- atau sebesar 85,13%.

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana, dengan anggaran sebesar Rp1.417.783.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp1.129.625.264,- atau sebesar 79,68%.

Realisasi masih rendah dikarenakan selisih standar harga di DPA dengan harga kontrak. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Tersedianya Operasional di Balai Penyuluh KB sebanyak 20 Balai dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi



Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok), dengan anggaran sebesar Rp453.159.284,- dan realisasi keuangan sebesar Rp443.054.500,- atau sebesar 97,77%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pertemuan Mekanisme Operasional melalui kegiatan Rapat Koordinasi dan Mini Lokakarya di 22 Kecamatan sebanyak 4 kali dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- c. Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang, dengan anggaran sebesar Rp33.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp29.500.000,- atau sebesar 89,39%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Terlaksananya Promosi Media KIE melalui Media Cetak Dan Elektronik Media dengan capaian 3 Dokumen serta capaian output/keluaran sebesar 100%.

- d. Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan anggaran sebesar Rp193.704.224,- dan realisasi keuangan sebesar Rp183.495.803,- atau sebesar 94,73%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya KIE program bangga kencana selama 12 bulan oleh petugas BP4 dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan anggaran sebesar Rp4.391.386.828,- dan realisasi keuangan sebesar Rp4.324.968.885,- atau sebesar 98,49%.

- a. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), dengan anggaran sebesar Rp1.311.287.478,- dan realisasi keuangan sebesar Rp1.310.180.390,- atau sebesar 99,92%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Operasional bagi PPKB dan Sub PPKBD dengan jumlah Kader sebanyak 680 orang selama 12 bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- b. Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB, dengan anggaran sebesar



Rp712.099.350,- dan realisasi keuangan sebesar Rp681.837.495,- atau sebesar 95,75%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pertemuan IMP bagi Kader PPKBD dan sub PPKBD sebanyak 1 kali dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- c. Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), dengan anggaran sebesar Rp2.368.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp2.332.951.000,- atau sebesar 98,52%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Operasional bagi PPKB dan Sub PPKBD dengan jumlah Kader sebanyak 680 orang selama 12 bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

3. Kegiatan Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp4.971.388.744,- dan realisasi keuangan sebesar Rp4.852.375.964,- atau sebesar 97,61%.

- a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, dengan anggaran sebesar Rp831.486.680,- dan realisasi keuangan sebesar Rp807.159.050,- atau sebesar 97,07%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah mendistribusikan Alokasi ke-57 Faskes dalam Kabupaten Muara Enim dengan capaian output/keluaran sebesar 80%.

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dengan anggaran sebesar Rp3.728.883.302,- dan realisasi keuangan sebesar Rp3.855.293.948,- atau sebesar 98,03%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini seperti: terlaksananya pemasangan Implant sebanyak 1500 akseptor, terlaksananya pemasangan IUD sebanyak 250 akseptor, terlaksananya pelayanan MOW sebanyak 34 akseptor dan MOP sebanyak 5 akseptor serta terlaksananya



pencabutan implant sebanyak 100 akseptor dengan capaian output/keluaran sebesar 80%.

- c. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya, dengan anggaran sebesar Rp85.800.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp83.920.502,- atau sebesar 97,81%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Operasional koordinasi dan pembinaan pelayanan KB di Faskes dan petugas RR Faskes sebanyak 57 faskes dengan capaian output/keluaran sebesar 80%.

- d. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria, dengan anggaran sebesar Rp325.218.762,- dan realisasi keuangan sebesar Rp306.002.464,- atau sebesar 94,09%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Sosialisasi / Rapat Pembinaan dan Promosi Partisipasi Pria Dalam ber-KB bagi Petugas Lapangan dan Kader Kelompok KB Pria dengan peserta sebanyak 20 orang dengan capaian output/keluaran sebesar 80%.

4. Kegiatan Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, dengan anggaran sebesar Rp658.094.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp651.095.611,- atau sebesar 98,94%.

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB, dengan anggaran sebesar Rp48.413.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp47.578.923,- atau sebesar 98,28%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini pertemuan pengelolaan rumah dataku dan pembinaan kampung KB sebanyak 1 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 60%.

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung KB, dengan anggaran sebesar Rp609.681.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp603.516.688,- atau sebesar 98,28%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini terlaksananya Pertemuan Pengelolaan Kampung KB, Pertemuan Pembekalan Pokja Kampung KB, Pertemuan Penguatan



Kampung KB, dan Pertemuan Poktan Kampung KB di 22 kecamatan dengan capaian output/keluaran sebesar 60%.

D. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) sebesar Rp8.115.600.843,95,- dengan realisasi sebesar Rp7.929.677.264,- atau 97,71%. Program ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 9 (sembilan) Sub Kegiatan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga, dengan anggaran sebesar Rp7.326.403.643,95,- dan realisasi keuangan sebesar Rp7.176.202.868,- atau sebesar 97,95%.

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) dengan anggaran sebesar Rp134.371.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp104.027.000,- atau sebesar 77,42%.

Realisasi belum optimal karena terdapat perubahan harga dan jenis konsumsi pertemuan pada Kelompok PPKS. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini terlaksananya sosialisasi, konseling, dan rujukan pelayanan PPKS dengan capaian output/keluaran sebanyak 20 Kecamatan.

- b. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) dengan anggaran sebesar Rp1.168.831.850,- dan realisasi keuangan sebesar Rp1.147.016.600 atau sebesar 98,13%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini terlaksananya orientasi tentang kita dan orientasi upgrade tentang kita bagi PKB dan implementasi cegah genting, serta tersalurnya dana operasional poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKA, dan PIK-R) dalam Kabupaten Muara Enim dengan capaian output/keluaran sebanyak 6 kelompok.

- c. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)), dengan anggaran sebesar



Rp1.394.092.290,- dan realisasi keuangan sebesar Rp1.054.589.502,- atau sebesar 98,30%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan adalah pengadaan sarana BKB KIT Stunting sebanyak 106 unit dana APBD dan 12 set DAK Non Fisik dengan capaian output/keluaran sebanyak 118 kelompok BKB

- d. Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)), dengan anggaran sebesar Rp125.346.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp123.279.858,- atau sebesar 98,35%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah orientasi 1.001 cara bicara dan sosialisasi anti narkoba sebanyak 200 orang dengan capaian output/keluaran sebanyak 6 kelompok.

- e. Sub Kegiatan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) dengan anggaran sebesar Rp382.140.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp369.074.778,- atau sebesar 96,58%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan terlaksananya kegiatan edukasi 1.000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) sebanyak 1175 orang dengan capaian output/keluaran sebanyak 47 Lokus Stunting.

- f. Sub Kegiatan Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) dengan anggaran sebesar Rp300.129.703,95,- dan realisasi keuangan sebesar Rp274.346.949,- atau sebesar 91,41%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini terlaksananya kegiatan pertemuan dan sosialisasi peningkatan sosialisasi UPPKA sebanyak 106 orang serta pengadaan ATTG (Alat Teknologi Tepat Guna) untuk 30 kelompok UPPKA dengan capaian output/keluaran sebanyak 6 kelompok.

- g. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)), dengan anggaran sebesar Rp3.821.492.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp3.788.128.800,- atau sebesar 99,13%.



Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini tersalurkannya biaya operasional bagi Tim pendamping Keluarga sebanyak 1.401 orang dengan capaian output/keluaran sebanyak 22 Kecamatan.

2. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan anggaran sebesar Rp789.197.200,- dan realisasi keuangan sebesar R753.474.396,- atau sebesar 99,13%.

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)) dengan anggaran Rp613.334.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp583.595.688,- atau sebesar 95,15%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini yaitu terlaksananya peningkatan kapasitas Mitra (Pengelola dan Kader BKB), peningkatan kapasitas Mitra (Pengelola dan Kader PPKS), Lomba Poktan (BKB, BKL, UPPKA), Orientasi Peningkatan Jenjang Standar 7 Sekolah Lansia, serta Kegiatan Lansia Berdaya (SIDAYA) dan sosialisasi Tamasya dengan capaian output/keluaran sebanyak 6 organisasi.

- b. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja dengan anggaran sebesar Rp175.862.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp169.878.708,- atau sebesar 96,60%.

Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini terlaksananya layanan informasi sistem terintegrasi dan elaborasi berkelanjutan layanan kesehatan mental remaja-, terlaksananya pertemuan konselor dan sebaya sebanyak 72 orang, dan sosialisasi Sinderela di 5 kecamatan dengan capaian output/keluaran sebesar sebanyak 6 organisasi.



3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65,34	65,1	99,63%
2.		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Indeks Partisipasi Masyarakat dalam Program Bangga Kencana (IPaM)	59,00	77,4	131,19%
3.		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DPPKB	79,68	81,10	101,78%

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1	Laporan KB Baru Pasca Persalinan belum mencapai target	Melakukan Pembinaan ke Faskes dan Jejaring tentang Pelaporan KB Baru Pasca Persalinan
2	Rendahnya keikutsertaan Pria dalam Program KB	Melakukan Sosialisasi Program KB Pria di Seluruh Kecamatan (terutama yang memiliki kelompok KB Pria)
3	Belum Optimalnya Pelaporan Sirika dan Siga	Meningkatkan Koordinasi dengan pihak BKKBN Provinsi SUMSEL dalam hal Aplikasi Tersebut

5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Adapun penghargaan yang diraih oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025 yaitu:



1. Terbaik I Regional Luar Jawa Bali I Kategori Rata-rata Pelayanan KB MKJP Terbanyak pada Kegiatan Pelayanan KB Serentak di Pasar Tradisional Tahun 2025.
2. Kader BKB Terbaik TAMASYA di KERABAT Tingkat Nasional Tahun 2025.
3. Terbaik III Rumah Dataku Anak Belai Tingkat Provinsi Sumatera Selatan.
4. Terbaik II Kampung KB Anak Belai Tingkat Provinsi Sumatera Selatan.
5. Juara I Inovasi Daerah Kategori Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten Muara Enim.



8. URUSAN PERHUBUNGAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan Alokasi Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp.82.569.750.472,34 (Delapan Puluh Dua Miliar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah Tiga Puluh Empat Sen) dan terealisasi sebesar 76.741.640.222,00 (Tujuh Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) atau 92,94 %. dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Operasional

Belanja Operasional dialokasikan sebesar Rp.42.945.963.865,34 terealisasi sebesar Rp.37.316.631.628,00 atau 86,89 %, yang diarahkan untuk belanja gaji dan tunjangan ASN/PNS dan PPPK, pembulatan gaji, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya dan Barang Pakai Habis atau Barang dan Jasa.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp.39.611.786.607,00 terealisasi sebesar Rp.39.425.008.694,00 atau 99,53 %, yang diarahkan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Alat Bengkel Alat Ukur, modal Jalan jaringan dan irigasi serta Modal Jaringan Listrik.

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Terdiri dari 3 (Tiga) program, 16 (Enam belas) kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah meningkatkan kinerja aparatur dengan sasaran meningkatnya kinerja pelayanan OPD serta indikator sasaran berupa indeks kepuasan masyarakat. Alokasi anggaran untuk program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sebesar Rp.12.572.276.582,34 dengan realisasi sebesar Rp.10.558.980.993,00 atau 83,99 % dengan capaian kinerja output sebesar 100 % Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 27 (Dua puluh Tujuh) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran ,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat : a) Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara



evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah; b) Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; c) Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dengan hasil kegiatan berupa ketersediaan buku perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan sebagai akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Alokasi anggaran belanja untuk Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2025 sebesar Rp.43.414.701,00 terealisasi sebesar Rp.36.495.002,00 atau 84,06 %.Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Anggaran sebesar Rp.4.784.888,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.380.100,00 atau sebesar 91,54 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Buku Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim (Renja) sebanyak 2 (Dua) dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan Anggaran sebesar Rp. 4.751.967,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.110.800,00 atau sebesar 86,51 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Dokumen RKA Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim 1 (Satu) Dokumen RKA dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan Anggaran sebesar Rp. 4.309.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.107.000,00 atau sebesar 72,10 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Dokumen RKA Perubahan Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim 1 (Satu) Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan Anggaran sebesar Rp.9.836.108,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.8.744.000,00 atau sebesar 88,90 %.



Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa 1 (Satu) Dokumen DPA Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan Anggaran sebesar Rp.10.765.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.433.800,00 atau sebesar 78,34 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Dokumen DPA Perubahan Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim 1 (Satu) Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dengan Anggaran sebesar Rp.5.125.130,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.295.902,00 atau sebesar 83,82%. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan LKPJ Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim sebanyak 1 (Satu) Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Anggaran sebesar Rp.3.842.608,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.423.400,00 atau sebesar 89,09 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah (LKJIP) Tahun 2025 sebanyak 1 (Satu) Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat a) PP 12 tahun 2019 tentang Keuangan Daerah; dan b) Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Alokasi anggaran belanja untuk Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tahun 2025 sebesar Rp. 7.517.171.789,84 terealisasi sebesar Rp. 5.836.708.420,00 atau 77,65 %. Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Anggaran sebesar Rp.7.503.846.765,84 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.825.699.420,00 atau sebesar 77,64 %. Adapun



keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa terlaksananya dan terbayarnya Gaji, TPP, ASN dan PPPK Dishub Kabupaten Muara Enim selama 12 bulan/Bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

- b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan Anggaran sebesar Rp.4.301.041,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.160.400,00 atau sebesar 96,73 %. Adapun keluaran (output) Sub Kegiatan ini Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 8 (Delapan) Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dengan Anggaran sebesar Rp. 9.023.983,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.848.600,00 atau sebesar 75,89 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/semesteran SKPD sebanyak 12 (Dua Belas) Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa pengguna BMD berkewajiban untuk melakukan pengamanan BMD. Alokasi anggaran belanja untuk Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah tahun 2025 sebesar Rp.216.704.250,00 terealisasi sebesar Rp. 198.125.000,00 atau 91,43 %. Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah dengan Anggaran sebesar Rp.216.704.250,00 terealisasi sebesar Rp. 198.125.000,00 atau 91,43 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa 12 (Dua Belas) Dokumen Jaminan Asuransi kendaraan dinas untuk Kendaraan yaitu :



- 1) Isuzu Panter TBR S4F Turbo Touring MUV (Mini Bus) BG 42 DZ
- 2) Daihatsu Luxio 1.5 MT (Mini Bus) BG 1948 DZ
- 3) Isuzu/TBR54F Turbo LM (Mini Bus) BG 461 DZ
- 4) Hino/WU342R HKMTJD3 130 HD TRUK 2018 (Microbus) BG 8053 DZ
- 5) MITSUBISHI COLT DIESEL FE 846 BC (Microbus) BG 7050 DZ
- 6) MITSUBISHI COLT DIESEL FE 846 BC (Microbus) BG 7051 DZ
- 7) Isuzu/NQR71 E-C E2-1 (XX1) (6.1) (Microbus) BG 7347 DZ
- 8) Isuzu/NQR71 E-C E2-1 (XX1) (6.1) (Microbus) BG 7348 DZ
- 9) Isuzu/NQR71 E-C E2-1 (XX1) (6.1) (Microbus) BG 7349 DZ
- 10) Isuzu/NQR71 E-C E2-1 (XX1) (6.1) (Microbus) BG 7350 DZ
- 11) Isuzu/NQR71 E-C E2-1 (XX1) (6.1) (Microbus) BG 7351 DZ
- 12) MITSUBISHI CENTER FE 73 HD (Microbus) BG 7015 DZ
- 13) MITSUBISHI CENTER FE 73 HD (Microbus) BG 7387 DZ
- 14) Toyota New Hilux 2.4 Double Cabin 4X4 M/T BG 8134 DZ
- 15) Mitsubishi/Astrada CR 2.5 A DC Exceed 4X4 M/T BG 8129 DZ

dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim. Alokasi anggaran belanja untuk Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tahun 2025 sebesar Rp. 591.809.650,00 terealisasi sebesar Rp.399.808.190,00 atau 67,56 %. Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan Anggaran sebesar Rp.366.854.750,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.212.140.353,00 atau sebesar 57,83 %. Adapun keluaran



(output) dari sub kegiatan ini berupa ASN dan PPPK yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 9 (sembilan) orang, ASN dan PPPK yang mengikuti Bimtek dengan sertifikat dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

- b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan Anggaran sebesar Rp.224.954.900,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.187.667.837,00 atau sebesar 83,42 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah siswa SMU/Sederajat yang mengikuti sosialisasi Pola pembibitan sekolah ikatan dinas STTD-PTDI sebanyak 1000 (Seribu) orang dari 10 (sepuluh) sekolah yaitu :

- 1) SMA N 1 SEMENDE DARAT LAUT
- 2) SMAN 1 UJAN MAS
- 3) SMA BUKIT ASAM
- 4) SMA N 1 LAWANG KIDUL
- 5) SMA N 1 LEMBAK
- 6) SMA N 1 GELUMBANG
- 7) SMA N 1 MUARA ENIM
- 8) SMA N 2 MUARA ENIM
- 9) MAN MUARA ENIM
- 10) SMA N 3 MUARA ENIM

dan Jumlah siswa SMU/Sederajat yang mengikuti sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas sebanyak 630 orang (enam ratus tiga puluh) orang dari 7 (tujuh) sekolah yaitu :

- 1) SMA N 1 BELIMBING
- 2) SMA N 1 RAMBANG NIRU
- 3) SMA N 1 GUNUNG MEGANG
- 4) SMK 2 MUARA ENIM

dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Perangkat Daerah. Alokasi anggaran belanja untuk Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tahun 2025 sebesar Rp. 1.163.969.916,50 terealisasi sebesar Rp. 1.131.713.700 atau 97,23 %. Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:



- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor dengan Anggaran sebesar Rp. 29.168.980,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.168.980,00 atau sebesar 100 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah dan jenis komponen alat listrik/elektronik sebanyak 20 (Dua Puluh) Paket yaitu Alat Listrik Kantor Dinas Perhubungan, UPTD PKB, UPTD Terminal Muara Enim dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan Anggaran sebesar Rp.91.264.136,50 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 90.351.400,00 atau sebesar 99,00 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah peralatan kantor dan alat rumah tangga sebanyak 40 (Empat Puluh) Paket berupa alat kebersihan Kantor, bahan kimia untuk pembersih, bahan pembersih lainnya dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik dengan Anggaran sebesar Rp. 137.471.700,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.111.591.755,00 atau sebesar 81,17 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah Alat Tulis Kantor sebanyak 42 (Empat Puluh Dua) Paket , Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 2 jenis berupa BBM kendaraan Kepala Dinas dan BBM Mesin Genset, mesin Rumput dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan dengan Anggaran sebesar Rp.24.178.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.311.400,00 atau sebesar 96,41 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah barang cetak dan pengadaan sebanyak 12 (dua belas) Paket berupa Cetak Amplop, Cetak buku kas umum, cetak bend 16 penerimaan, cetak surat tanda setoran, cetak bend 26 kertas ncr & ds warna, cetak lembar disposisi, Cetak map rapat, Cetak Spanduk, Cetak Kwitansi, cetak kop surat, Cetak Amplop Dinas dan Cetak Lainnya dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Bacaan dan peraturan Perundang-Undang dengan Anggaran sebesar Rp. 10.808.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.9.950.000,00 atau sebesar 92,06 %. Adapun keluaran (output) dari sub



kegiatan ini berupa Jumlah dan jenis surat kabar yg berlangganan sebanyak 6 (enam) Dokumen berupa Surat Kabar/Majalah Belanja Harian Lokal, Majalah/Tabloid dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Anggaran sebesar Rp.871.078.300,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.867.340.165,00 atau sebesar 99,57 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Laporan hasil perjalanan dinas sebanyak 256 (dua ratus Lima puluh Enam) laporan notulen rapat dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Perangkat Daerah sesuai amanat Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Alokasi anggaran belanja untuk Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2025 sebesar Rp. 95.541.900,00 terealisasi sebesar Rp. 90.766.641 atau 95,00 %. Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp. 295.541.900,00 terealisasi sebesar Rp. 90.766.641 atau 95,00 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Laptop Acer sebanyak 3 (Tiga) unit yaitu alat bantu lainnya, alat angkutan darat bermotor, alat komunikasi lainnya peralatan komunikasi navigasi, Personal Komputer, Peralatan Komputer, dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan operasional dan administrasi perkantoran Alokasi anggaran belanja untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tahun 2025 sebesar Rp. 1.730.061.342,00 terealisasi sebesar Rp. 1.655.746.192,00 atau 95,70 %. Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:



- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan Anggaran sebesar Rp.4.144.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.100.000,00 atau sebesar 98,94 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa 2 (Dua) laporan Jumlah Materai sebanyak 370 lembar dan Pembelian Materai, dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik dengan Anggaran sebesar Rp.274.383.126,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.212.946.192,00 atau sebesar 77,61 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini 5 (Laporan) terbayarnya tagihan air, tagihan listrik dan internet/wifi/TV untuk Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim, Kantor UPTD PKB Muara Enim, Kantor UPTD Pengelolaan Terminal Muara Enim, Kantor UPTD Pengelolaan Terminal Lawang Kidul, dan Terminal Sp. Kodim Muara Enim selama 12 (dua belas) bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- c. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Anggaran sebesar Rp.27.054.216,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.21.700.000,00 atau sebesar 80,21 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa 6 (Enam) Laporan Jumlah AC yang dirawat/diservice sebanyak 12 unit, dan peralatan computer dan printer yang di perbaiki/diawat sebanyak 10 unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- d. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Anggaran sebesar Rp.1.424.480,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.417.000,00 atau sebesar 99,47%. Adapun keluaran (Output) dari sub kegiatan ini berupa 188 (Seratus Delapan Puluh Delapan) Orang yaitu Honor TKWT 188 Orang x 10 Bulan dan Honor PPPK Paruh Waktu Dishub Kab.Muara Enim sebanyak 4 (Empat) Orang x 2 Bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Perangkat Daerah sesuai amanat Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman



Pengelolaan Barang Milik Daerah. Alokasi anggaran belanja untuk Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025 sebesar Rp. 1.213.603.033,00 terealisasi sebesar Rp. 1.209.617.848 atau 99,67 %. Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak Kendaraan Dinas Jabatan dengan Anggaran sebesar Rp.35.229.750,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.33.580.000,00 atau sebesar 95,32 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah kendaraan dinas jabatan yg dirawat, diservice dan pembayaran pajak tahunan, 5 tahunan (STNK,BPKB) sebanyak 2 Jenis/2 unit kendaraan yaitu:

No.	NOMOR PLAT	JENIS KENDARAAN	KET
1.	BG 1161 DZ	PHANTER TOURING	R4
2.	BG 1160 DZ	TOYOTA INOVA	R4

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Anggaran sebesar Rp.465.687.283,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.465.569.258,00 atau sebesar 99,97 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yg dirawat, diservice dan pembayaran pajak tahunan, 5 tahunan (STNK,BPKB,KIR) sebanyak 2 Jenis 28 unit kendaraan roda 4 dan roda 6 yaitu :

No.	NOMOR PLAT	JENIS KENDARAAN	KET
1	BG 1948 DZ	MINIBUS LUXIO	R6
2	BG 2642 DZ	SEPEDA MOTOR	R2
3	BG 2653 DZ	SEPEDA MOTOR	R2
4	BG 3016 DZ	SEPEDA MOTOR	R2
5	BG 3017 DZ	SEPEDA MOTOR	R2
6	BG 6359 DZ	SEPEDA MOTOR	R2
7	BG 6362 DZ	SEPEDA MOTOR	R2
8	BG 6384 DZ	SEPEDA MOTOR	R2
9	BG 6411 DZ	SEPEDA MOTOR	R2
10	BG 6412 DZ	SEPEDA MOTOR	R2



No.	NOMOR PLAT	JENIS KENDARAAN	KET
11	BG 6711 DZ	SEPEDA MOTOR	R2
12	BG 7014 DZ	BUS SEKOLAH	R6
13	BG 7015 DZ	BUS SEKOLAH	R6
14	BG 7016 DZ	BUS SEKOLAH	R6
15	BG 7018 DZ	BUS SEKOLAH	R6
16	BG 7157 DZ	BUS SEKOLAH	R6
17	BG 7347 DZ	BUS BRT	R6
18	BG 7348 DZ	BUS BRT	R6
19	BG 7349 D	BUS BRT	R6
20	BG 7050 DZ	BUS BRT	R6
21	BG 7051 DZ	BUS BRT	R6
22	BG 8053 DZ	MOBIL DEREK	R6
23	BG 452 DZ (7387)	BUS SEKOLAH	R6
24	BG 451 DZ	BUS SEKOLAH	R6
25	BG 454 DZ (1203)	MINIBUS 4 ORANG	R4
26	BG 8020 DZ	BUS SEKOLAH	R6
27	BG 8129 DZ	BUS BRT	R6
28	BG 8134 DZ	MOBIL PATROLI/FATWAL	R4

- c. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya dengan Anggaran sebesar Rp.712.686.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.710.468.590,00 atau sebesar 99,69 %. Adapun keluaran (Output) dari sub kegiatan ini 2 (Dua) Unit Pemeliharaan dan Interior Gedung Kantor Dishub dan Rehab Kantor UPTD Terminal Tanjung Enim dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

B. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Tujuan program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Adalah untuk meningkatnya Infrastruktur Suprastruktur Dasar yang Berkualitas Secara Merata dan Mendukung Terwujudnya Jalan Tol Muara Enim - Indralaya - Palembang serta indikator sasaran berupa Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik. Alokasi Anggaran untuk program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) sebesar Rp.69.574.739.390,00 dengan realisasi sebesar Rp.65.761.504.192,00 atau 94,52 % dengan capaian kinerja



output sebesar 100 %. Program ini terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan dan 20 (dua Puluh) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan untuk Terpenuhinya Kebutuhan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota di bidang Perhubungan Alokasi Anggaran belanja untuk Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota tahun 2025 sebesar Rp. 65.171.601.103,00 terealisasi sebesar Rp. 62.120.977.684,00 atau 95,32 %. Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten Kota dengan Anggaran sebesar Rp. 60.740.360,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 58.697.600,00 atau 96,64 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa 1 (Satu) Unit Halte berlokasi di Kecamatan Ujan Mas Baru dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/kota dengan Anggaran sebesar Rp.38.066.008.455,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.37.889.028.113,00 atau 99,54 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa terpasangnya Rambu Lalu Lintas sebanyak 125, Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) sebanyak 30 unit, tersedianya Lampu Penerangan Jalan Umum sebanyak 1.390 (Seribu Tiga Ratus Sembilan Puluh) Titik dan Zona Selamat Sekolah sebanyak 5 Titik dengan capaian output / keluaran sebesar 100%.
 - Warning Light 2 Unit Yang Berlokasi depan RS Kim
 - Cermin Tikungan



**TABEL LOKASI PEMASANGAN CERMIN TIKUNGAN TAHUN
ANGGARAN 2025**

No	Desa/Kelurahan	Titik Lokasi Pemasangan	Gambar Cermin Tikungan (Ukuran 100 Cm Terpasang)	Keterangan
Kecamatan Muara Enim				
1	Kelurahan Air Lintang	Jalan Thawalib 3		
2	Kelurahan Air Lintang	Jalan Thawalib 3		
3	Kelurahan Air Lintang	Jalan Thawalib 3		
4	Kelurahan Air Lintang	Jalan Belakang SMA Negeri 2 Muara Enim		
5	Kelurahan Air Lintang	Jalan Mayor Ruslan Simpang Thawalib		
6	Kelurahan Air Lintang	RT. 04 RW. 01		
7	Kelurahan Air Lintang	RT. 04 RW. 01		
8	Kelurahan Air Lintang	Jalan Karet		

No	Desa/Kelurahan	Titik Lokasi Pemasangan	Gambar Cermin Tikungan (Ukuran 100 Cm Terpasang)	Keterangan
9	Kelurahan Air Lintang	Jalan Pandawa Lima		
10	Kelurahan Air Lintang	Darussalam 7		
11	Kelurahan Air Lintang	Darussalam 8 Blok Y		
12	Kelurahan Air Lintang	BSD 3		
13	Kelurahan Air Lintang	Depan Komplek Deksangke		
14	Kelurahan Pasar 1	Jalan Reformasi 9		
15	Kelurahan Pasar 1	Jalan Pesirah		
16	Kelurahan Muara Enim	Simpang SD 20		

No	Desa/Kelurahan	Titik Lokasi Pemasangan	Gambar Cermin Tikungan (Ukuran 100 Cm Terpasang)	Keterangan
17	Kelurahan Muara Enim	Taman Ribang Gale		
18	Kelurahan Muara Enim	Jl. Ayek Puteh 1 RT. 06 / RW. 08		
19	Kelurahan Muara Enim	Jl. Ayek Puteh (Utama) (RT 06 / RW 08)		
Kecamatan Lawang Kidul				
20	Kecamatan Lawang Kidul	Jalan Nanas Air Paku		
21	Kecamatan Lawang Kidul	Air Paku		
22	Kecamatan Lawang Kidul	Tegal Rejo		
23	Kecamatan Lawang Kidul	Tegal Rejo		
24	Kecamatan Lawang Kidul	RW. 04 Kelurahan Tanjung Enim		
25	Kecamatan Lawang Kidul	RW. 04 Kelurahan Tanjung Enim		



No	Desa/Kelurahan	Titik Lokasi Pemasangan	Gambar Cermin Tikungan (Ukuran 100 Cm Terpasang)	Keterangan
26	Desa Lembak	Jalan Pipa		
27	Desa Lembak	Jalan Depati Putih		
28	Desa Lembak	Jalan Kemang		
Kecamatan Muara Enim				
29	Kelurahan Air Lintang	Jalan Karet		
30	Kelurahan Air Lintang	Jl Deksangke RT.001 RW.001 dekat TK Negeri 1 Muara Enim		
31	Kelurahan Air Lintang	Jl.Apel perumahan bumi Serasan damai (BSD) RT 04 RW 04		
32	Kelurahan Air Lintang	Jl.Apel perumahan bumi Serasan damai (BSD) RT 04 RW 04		
33	Kelurahan Air Lintang	Jl proklamasi komplek BTN		
34	Kelurahan Tungkal	Jl. Bujang Rasyid		



❖ Rambu – Rambu Lalu Lintas
TABEL LOKASI PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Desa/ Kelurahan	Keterangan Titik Lokasi Pemasangan	Keterangan Gambar Rambu Lalu Lintas	Gambar Rambu Lalu Lintas	Titik Koordinat
1	BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU		RAMBU PERINGATAN HATI - HATI		
2	BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU		RAMBU PERINGATAN TIKUNGAN TAJAM KEKIRI		
3	BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU		RAMBU PERINGATAN TIKUNGAN TAJAM KEKIRI		
4	BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU		RAMBU PERINGATAN TIKUNGAN TAJAM KANAN		
5	BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU		RAMBU PERINGATAN BANYAK TIKUNGAN		
6	BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU		RAMBU PERINGATAN JEMBATAN		
7	BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU		RAMBU PERINGATAN JEMBATAN		

No	Desa/ Kelurahan	Keterangan Titik Lokasi Pemasangan	Keterangan Gambar Rambu Lalu Lintas	Gambar Rambu Lalu Lintas	Titik Koordinat
8	BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU		RAMBU PERINGATAN TIKUNGAN TAJAM KEKANAN		
9	BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU		RAMBU PERINGATAN TIKUNGAN TAJAM KEKIRI		
10	BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU		RAMBU PERINGATAN TIKUNGAN TAJAM KEKIRI		
11	BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU		RAMBU PERINGATAN SIMPANG TIGA		
12	BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU		RAMBU PERINGATAN JEMBATAN		
13	BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU		RAMBU PERINGATAN JEMBATAN		
14	BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU		RAMBU PERINGATAN TIKUNGAN TAJAM KEKANAN		
15	BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU		RAMBU PERINGATAN TIKUNGAN TAJAM KEKIRI		



No	Desa/ Kelurahan	Keterangan Titik Lokasi Pemasangan	Keterangan Gambar Rambu Lalu Lintas	Gambar Rambu Lalu Lintas	Titik Koordinat
16	BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU		RAMBU PERINGATAN TIKUNGAN TAJAM KEKIRI		
17	BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU		RAMBU PERINGATAN TIKUNGAN TAJAM KEKIRI		
18	BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU		RAMBU PERINGATAN TIKUNGAN TAJAM KEKIRI		
19	BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU		RAMBU PERINGATAN TIKUNGAN TAJAM KEKANAN		
20	BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU		RAMBU PERINGATAN TIKUNGAN TAJAM KEKIRI		
21	BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU		RAMBU PETUNJUK PENYEBERANGAN JALAN		
22	BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU		RAMBU PETUNJUK SEKOLAH		
23	BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU		RAMBU PETUNJUK PENYEBERANGAN JALAN		



No	Desa/ Kelurahan	Keterangan Titik Lokasi Pemasangan	Keterangan Gambar Rambu Lalu Lintas	Gambar Rambu Lalu Lintas	Titik Koordinat
24	BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU		RAMBU PETUNJUK SEKOLAH		
25	BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU		RAMBU PERINGATAN JEMBATAN		
26	BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU		RAMBU PERINGATAN BANYAK TIKUNGAN		
27	BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU		RAMBU PERINGATAN JEMBATAN		
28	BANUAYU KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU		RAMBU PETUNJUK SEKOLAH		
29	GOR PANCASILA MUARA ENIM		RAMBU LARANGAN PARKIR		
30	GOR PANCASILA MUARA ENIM		RAMBU LARANGAN PARKIR		
31	GOR PANCASILA MUARA ENIM		RAMBU LARANGAN PARKIR		



No	Desa/ Kelurahan	Keterangan Titik Lokasi Pemasangan	Keterangan Gambar Rambu Lalu Lintas	Gambar Rambu Lalu Lintas	Titik Koordinat
32	GOR PANCASILA MUARA ENIM		RAMBU LARANGAN PARKIR		
33	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KIRI - 2+000)		RAMBU PERINGATAN BANYAK TIKUNGAN		
34	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KIRI - 2+000)		RAMBU PERINGATAN BANYAK TIKUNGAN		
35	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KIRI - 4+100)		RAMBU PERINGATAN TIKUNGAN TAJAM KEKANAN		
36	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KANAN - 4+500)		RAMBU PERINGATAN TIKUNGAN TAJAM KEKIRI		
37	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KIRI - 5+000)		RAMBU PERINGATAN TIKUNGAN TAJAM KEKANAN		
38	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KANAN - 5+300)		RAMBU PERINGATAN TIKUNGAN TAJAM KEKIRI		



No	Desa/ Kelurahan	Keterangan Titik Lokasi Pemasangan	Keterangan Gambar Rambu Lalu Lintas	Gambar Rambu Lalu Lintas	Titik Koordinat
39	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KIRI - 7+000)		RAMBU PERINGATAN BANYAK TIKUNGAN		
40	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KIRI - 7+300)		RAMBU PERINGATAN TURUNAN CURAM		
41	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KANAN - 7+300)		RAMBU PERINGATAN BANYAK TIKUNGAN		
42	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KANAN - 7+800)		RAMBU PERINGATAN TURUNAN CURAM		
43	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KIRI - 8+000)		RAMBU PERINGATAN BANYAK TIKUNGAN		
44	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KIRI - 8+300)		RAMBU PERINGATAN TIKUNGAN TAJAM KEKIRI		
45	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KANAN - 8+500)		RAMBU PERINGATAN TIKUNGAN TAJAM KEKANAN		



No	Desa/ Kelurahan	Keterangan Titik Lokasi Pemasangan	Keterangan Gambar Rambu Lalu Lintas	Gambar Rambu Lalu Lintas	Titik Koordinat
46	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KIRI - 8+800)		RAMBU PERINGATAN TURUNAN CURAM		
47	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KIRI - 9+100)		RAMBU PERINGATAN JEMBATAN		
48	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KIRI - 9+500)		RAMBU PERINGATAN TURUNAN CURAM		
49	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KANAN - 9+500)		RAMBU PERINGATAN TURUNAN CURAM		
50	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KIRI - 9+900)		RAMBU PERINGATAN TURUNAN CURAM		
51	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KANAN - 10+500)		RAMBU PERINGATAN TURUNAN CURAM		
52	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KIRI - 10+700)		RAMBU PERINGATAN BANYAK TIKUNGAN		



No	Desa/ Kelurahan	Keterangan Titik Lokasi Pemasangan	Keterangan Gambar Rambu Lalu Lintas	Gambar Rambu Lalu Lintas	Titik Koordinat
53	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KIRI - 11+100)		RAMBU PERINGATAN TURUNAN CURAM		
54	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KANAN - 11+100)		RAMBU PERINGATAN BANYAK TIKUNGAN		
55	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KANAN - 11+400)		RAMBU PERINGATAN TURUNAN CURAM		
56	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KIRI - 12+000)		RAMBU PERINGATAN TURUNAN CURAM		
57	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KIRI - 12+300)		RAMBU PERINGATAN JEMBATAN		
58	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KANAN - 12+600)		RAMBU PERINGATAN TURUNAN CURAM		
59	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KIRI - 12+700)		RAMBU PERINGATAN TURUNAN CURAM		



No	Desa/ Kelurahan	Keterangan Titik Lokasi Pemasangan	Keterangan Gambar Rambu Lalu Lintas	Gambar Rambu Lalu Lintas	Titik Koordinat
60	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KANAN - 13+100)		RAMBU PERINGATAN TURUNAN CURAM		
61	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KIRI - 13+300)		RAMBU PERINGATAN JALAN BERGELOMBANG		
62	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KANAN - 13+300)		RAMBU PERINGATAN TIKUNGAN TAJAM KEKIRI		
63	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KANAN - 14+400)		RAMBU PERINGATAN JALAN BERGELOMBANG		
64	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KIRI - 15+000)		RAMBU PERINGATAN TURUNAN CURAM		
65	HARAPAN JAYA - SIMPANG AUR (KANAN - 15+300)		RAMBU PERINGATAN TURUNAN CURAM		



TITIK LOKASI PEMASANGAN RAMBU PENDAHULUAN PETUNJUK JURUSAN (RPPJ) DI KECAMATAN MUARA ENIM Tahun Anggaran 2025

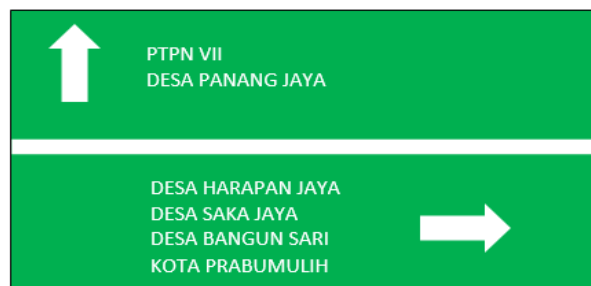
1. Arah RPPJ dari arah Muara Enim



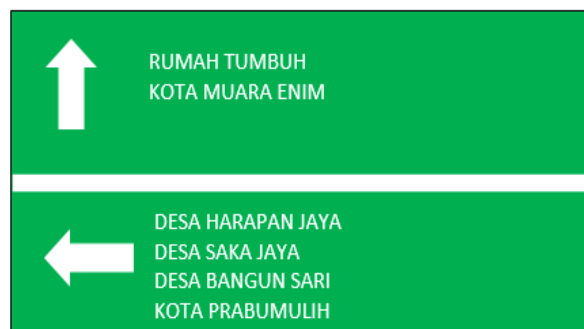
2. Arah RPPJ dari arah Muara Harapan



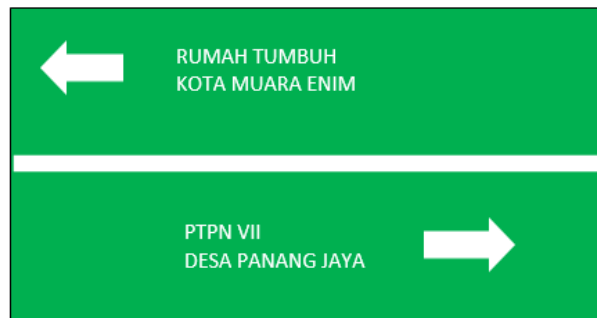
3. Arah RPPJ dari arah Muara Harapan



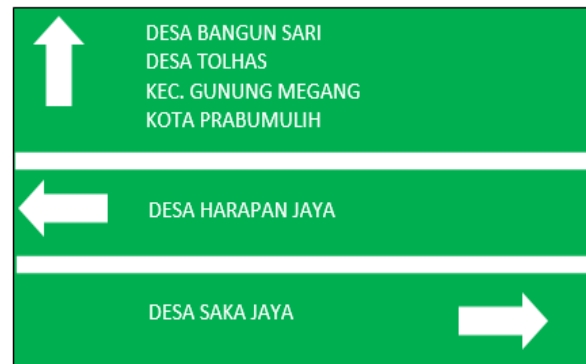
4. Arah RPPJ dari arah Panang Jaya



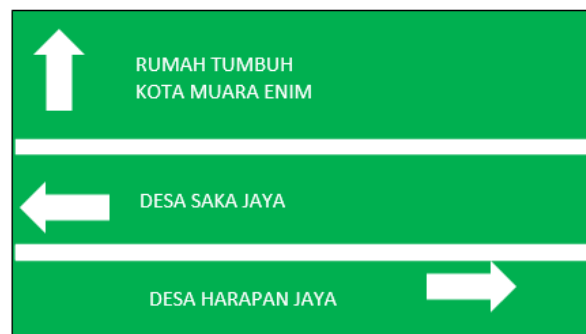
5. Arah RPPJ dari arah Harapan Jaya



6. Arah RPPJ dari arah Muara Enim



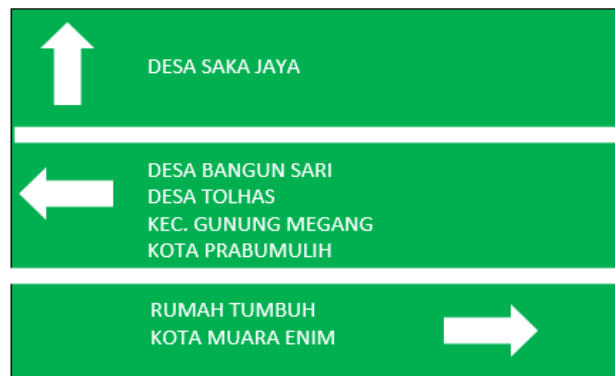
7. Arah RPPJ dari arah Desa Bangun Sari



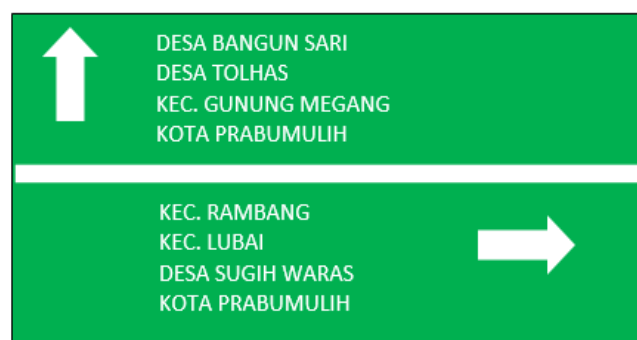
8. Arah RPPJ dari arah Desa Saka Jaya



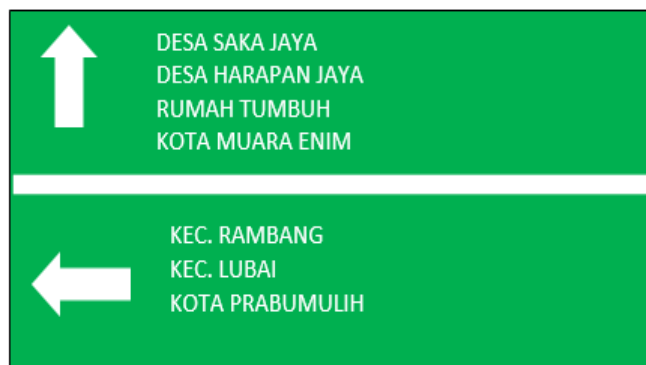
9. Arah RPPJ dari arah Desa Harapan Jaya



10. Arah RPPJ dari arah Desa Kota Muara Enim



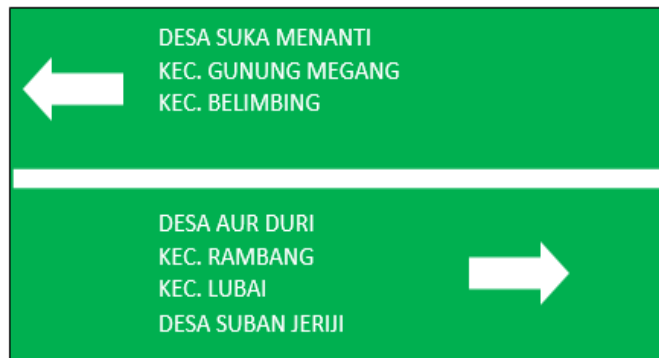
11. Arah RPPJ dari arah Desa Bangun Sari



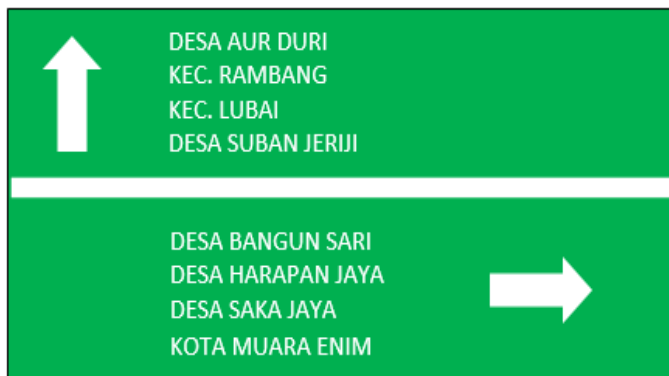
12. Arah RPPJ dari arah Kec. Rambang



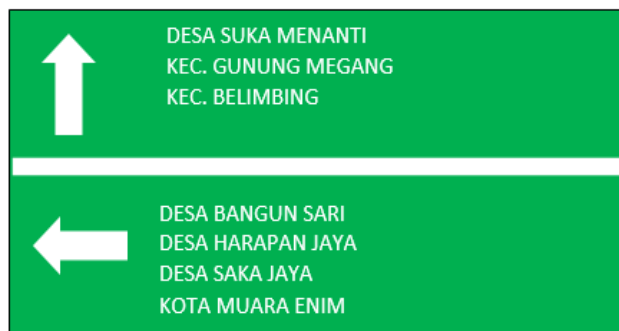
13. Arah RPPJ dari arah Kec. Muara Enim



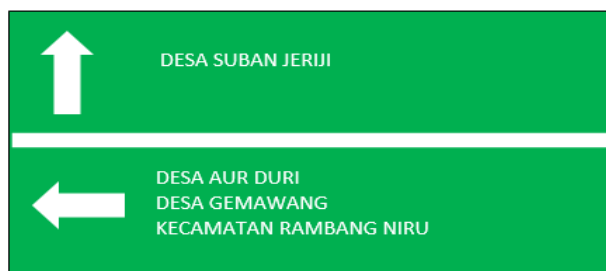
14. Arah RPPJ dari arah Desa Suka Menanti



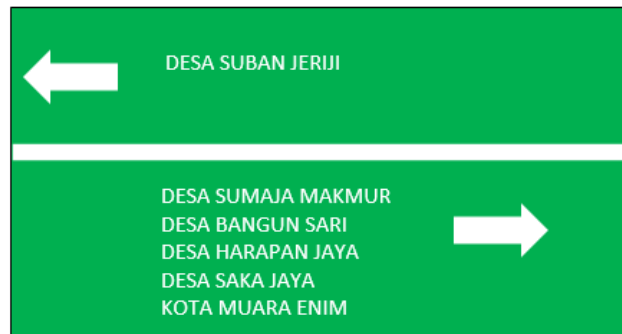
15. Arah RPPJ dari arah Desa Aur Duri



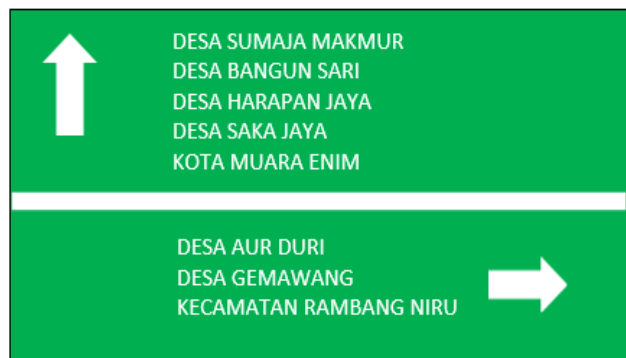
16. Arah RPPJ dari arah Kota Muara Enim



17. Arah RPPJ dari arah Desa Aur Duri



18. Arah RPPJ dari arah Desa Suban Jeriji



19. Arah RPPJ dari arah Kota Muara Enim



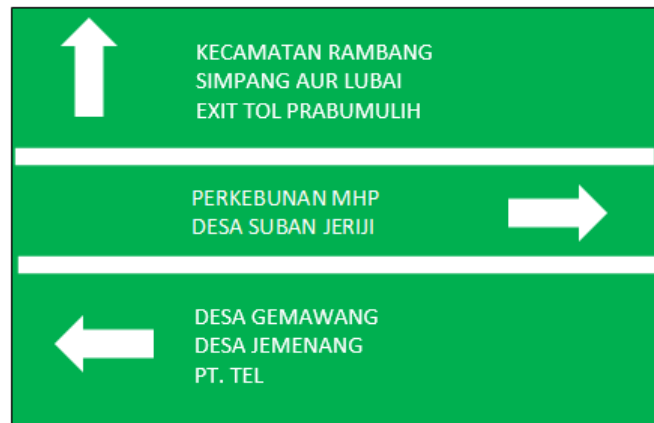
20. Arah RPPJ dari arah Desa Aur Duri



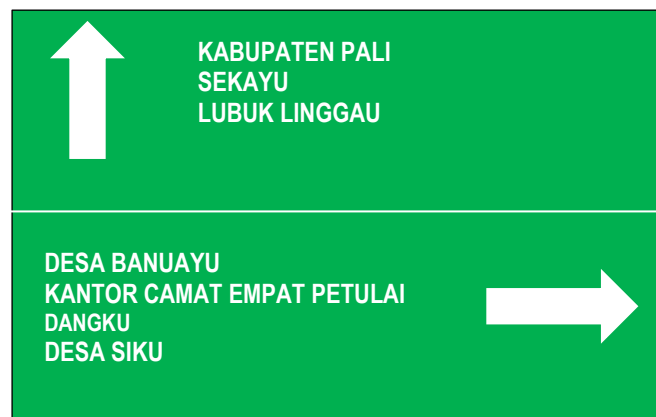
21. Arah RPPJ dari arah Kec. Rambang



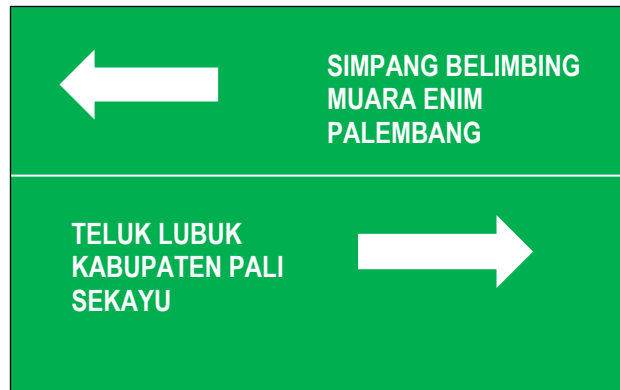
22. Arah RPPJ dari Muara Enim



23. RPPJ dari arah Muara Enim (sebelum jembatan Teluk Lubuk)



24. RPPJ dari arah Banuayu



25. RPPJ dari arah Muara Enim



26. RPPJ dari arah Banuayu



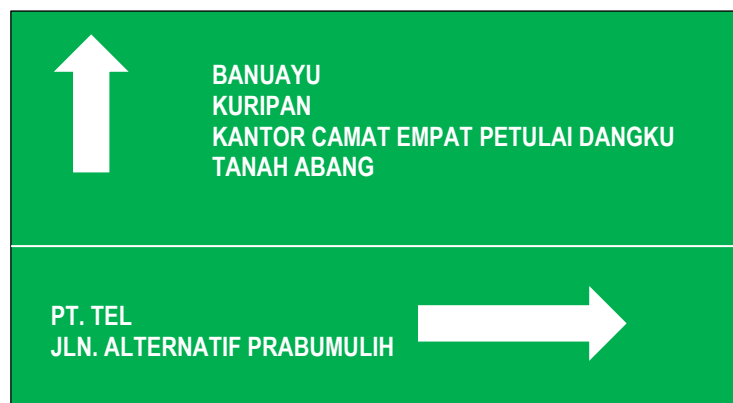
27. RPPJ dari arah Muara Enim



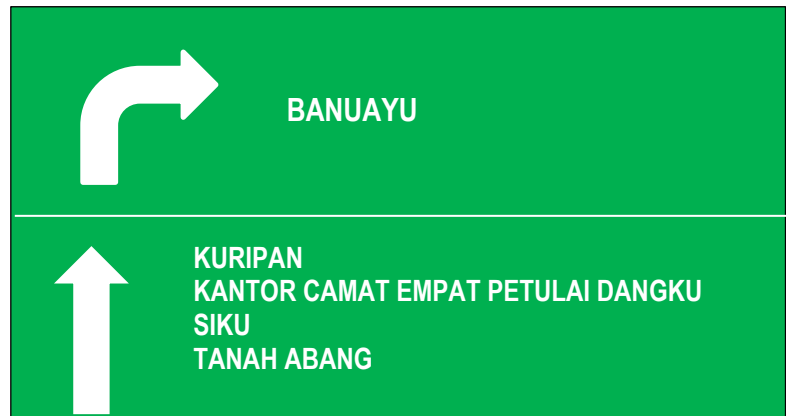
28. RPPJ dari arah Banuayu



29. RPPJ dari arah Muara Enim



30. RPPJ dari arah Muara Enim



❖ Lampu Penerang Jalan Umum

Penerangan Jalan Umum dengan lokasi sebagai berikut :

- 1) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Dusun II Desa Arisan Musi Timur Kecamatan Muara Belida
- 2) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Banuayu Kecamatan Empat Petulai Dangku
- 3) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Bulang Kecamatan Belimbing
- 4) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Dangku Kecamatan Empat Petulai Dangku
- 5) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Kuripan Kecamatan Empat Petulai Dangku
- 6) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan lampu Penerangan Jalan Umum Desa Kuripan Selatan Kecamatan Empat Petulai Dangku
- 7) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Marga Mulya Kecamatan Rambang
- 8) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Pangkalan Babat Kecamatan Empat Petulai Dangku
- 9) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Suban Jeriji Kecamatan Rambang Niru
- 10) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Sumber Rahayu Kecamatan Rambang
- 11) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Dusun 2 Desa Gerinam Kecamatan Rambang Niru
- 12) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Dusun 7 Lais Jaya Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujan Mas



- 13) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Jalan Karet Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim
- 14) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Jl. Selingsingan Ulu Rumah Tumbuh Kecamatan Muara Enim
- 15) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim
- 16) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Perumahan Rapen Tahap 3 dan 4 Kelurahan Muara Enim Kecamatan Muara Enim
- 17) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Perum Griya Lestari Jalan Triton RT 05 RW 03 Kel. Pasar I Kecamatan Muara Enim
- 18) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum RT 01 RW 04 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim
- 19) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum RT 02 RW 01 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim
- 20) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Jalan Umum Daerah Perkantoran Islamic Center Muara Enim
- 21) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Bangun Sari Kecamatan Gunung Megang
- 22) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Gunung Megang Luar Kecamatan Gunung Megang
- 23) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Kayuara Sakti Kecamatan Gunung Megang
- 24) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Lingga RT 02 RW 04 Villa Enim Lestari Kecamatan Lawang Kidul
- 25) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Gunung Megang
- 26) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Panang Jaya Kecamatan Gunung Megang
- 27) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Segayam Menuju Pondok Pesantren Asmaul Husna Kecamatan Gelumbang
- 28) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Tanjung Muning Kecamatan Gunung Megang



- 29) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Ujan Mas Ulu Kec. Ujan Mas
- 30) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim
- 31) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Jalan A Tohir Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim
- 32) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Jalan Kapasantuan RT.03 RW.07 Kel. Muara Enim Kec. Muara Enim
- 33) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Jalan KH Iskandar HBBA, Jalan Al Khair RT 02 RW 05 dan Jalan Cendana Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim
- 34) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Jalan Narada 2 Kelurahan Pasar III Kecamatan Muara Enim
- 35) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Jalan Raden Suradilaga Dusun IV Desa Muara Lawai Kec. Muara Enim
- 36) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Kampung Sukamaju RT 04 RW 05 Kelurahan Air Lintang Kecamatan Muara Enim
- 37) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Perumahan Griya Bumi Enim Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim
- 38) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum RT.04 RW.03 Kel. Pasar I Kec. Muara Enim
- 39) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Lubai Makmur Kecamatan Lubai Ulu
- 40) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Kasih Dewa ke Desa Jemenang Kec. Rambang Niru
- 41) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Muara Harapan Kec. Muara Enim
- 42) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Karang Endah Utara Kec. Gelumbang
- 43) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Sungai Duren Kec Lembak
- 44) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Belakang Bara Catering SDN 10 Kec. Lawang Kidul
- 45) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Jalan Durian RT. 01 RW.02 Kel. Pasar II



- 46) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Ujan Mas Ulu Kec. Ujan Mas
- 47) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Padang Bindu Kec. Panang Enim
- 48) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Meo Kec. Panang Enim
- 49) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Beringin
- 50) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Tanjung Kemala
- 51) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Pagar Gunung
- 52) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Prabu Menang Kec. Lubai Ulu
- 53) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Perumahan Rapen
- 54) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Pajar Indah Kec. Gunung Megang
- 55) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Talang Jawa Kel Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul
- 56) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Kelurahan Air Lintang Kec. Muara Enim
- 57) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Pulau Panggung Kampung VI Kec. SDL
- 58) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Palak Tanah Kec. SDT
- 59) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Dusun 1 Desa Pandan Dulang Kec. Panang Enim
- 60) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Tanjung Karang Kec. Panang Enim
- 61) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Sukaraja Kec. Panang Enim
- 62) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Matas Kec. Panang Enim
- 63) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Sukamenang Kec. Gelumbang
- 64) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Danau Gerak Kec. Semende Darat Ulu
- 65) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum Desa Keban Agung



- 66) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Umum RW. 12 Kelurahan Tanjung Enim
 - 67) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Dusun I Desa Lebak Budi Kecamatan Panang Enim
 - 68) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Jalan Gg. Duku RT. 01 RW.01 Kel. Pasar III Muara Enim
 - 69) Penyediaan dan Pemasangan Jaringan Lampu Penerangan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim.
- c. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan dengan Anggaran sebesar Rp.172.906.180,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.172.748.000,00 atau sebesar 99,91 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa 1 (Satu) Unit Pemeliharaan Halte dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
 - d. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dengan Anggaran sebesar Rp.26,871.946.108,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.24.000.503.971,00 atau sebesar 89,31 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa jumlah Marka yang direhabilitasi dan dipelihara sebanyak 8.726,133 meter, Jumlah Rambu lalu lintas yang direhabilitasi dan dipelihara sebanyak 30 unit dan Jumlah Warning Light yang direhabilitasi dan dipelihara sebanyak 11 Unit.

E. LOKASI REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN TAHUN 2025

NO	Marka Jalan		
1	Jalan Jaksa Agung Basriel Arief	178,896	M ²
2	Simpang Kepur	22,05	M ²
3	Jl.Samping Perumahan Dinas Bupati	64,9	M ²
4	Zebra Cross Depan Kantor DPRD	23,7	M ²
5	Jl.Pramuka	251,78	M ²
6	Jl.Beringin (Depan Rumah Wabub)	58,44	M ²
7	Jalan Veteran,dan Arah Kuburan Cina,Jl.Syafei	293,28	M ²
8	Jembatan Kepur	48,6	M ²



NO	Marka Jalan		
9	Kantor BPKAD	31,13	M ²
10	Jl.Karet	68,88	M ²
11	Masjid Islamic Center	58,44	M ²

NO	GARIS KEJUT		
1	Depan Dapur Nenek Islamic Center	55,1	M ²
2	Depan Kantor DPRD	39,9	M ²
3	Majid Veteran	56,1	M ²
4	Depan Capil	41,70	M ²
5	Depan Kantor Kejaksaan Lama	51	M ²
6	Masjid Al Falah	49,2	M ²
7	Panti Asuhan Assaadah	34,2	M ²
8	Pesantren Darussaadah	35,7	M ²
9	Masjid Muhajirin Belakang PDAM	36,9	M ²
10	Depan Kompi Yonif 141	39	M ²
11	Depan Jalan Permai	19,50	M ²
12	SDN 20	39	M ²
13	Simpang 4 Balai Agung	72,3	M ²
14	Samping Diknas	39	M ²
15	Depan Masjid Babusalam	39	M ²
16	Depan Masjid Masjid Baiturahman	32,4	M ²
17	Depan Pusat Layanan Haji Terpadu	30	M ²
18	Depan Masjid Baitul Mukmin	33	M ²
19	Parkiran Masjid Agung	52,44	M ²
20	RS Karunia Indah Medika	39	M ²
21	Masjid Al Ikhlas	45	M ²
22	RS Rabain	58,8	M ²
23	Gereja	21	M ²
24	Jalan karet	257,76	M ²
25	Jalan RA Kartini	258	M ²
26	Kantor Inspektorat	59,92	M ²
27	Kantor Banwaslu	13,86	M ²
28	Masjid Agung	52,44	M ²
29	Rindam II Sriwijaya	585,00	M ²
30	SDN 6 Kecamatan Gunung Megang	34,08	M ²
31	SDN 7 Kecamatan Gunung Megang	30,48	M ²

dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.



2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C

Kegiatan ini dilaksanakan untuk Terpenuhiya Dokumen Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota Muara Enim. Alokasi Anggaran belanja sebesar Rp. 98.638.900,00 terealisasi sebesar Rp. 97.833.781 atau 98,18 %. Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C dengan Anggaran sebesar Rp. 8.638.900,00 terealisasi sebesar Rp. 8,281.500,00 atau 95,86 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa 1 (Satu) Dokumen berupa alat Tulis kantor, cetak dan makan minum rapat dilingkungan terminal dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- b. Sub Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung) dengan Anggaran sebesar Rp.90.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 89,552.281,00 atau 99,50 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa 1 Unit Rehabilitasi Plafond terminal Samping Kodim dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

3. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Kegiatan ini dilaksanakan untuk Terpenuhiya Dokumen Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota Muara Enim. Alokasi Anggaran belanja untuk Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir tahun 2025 sebesar Rp. 110.097.000,00 terealisasi sebesar Rp.53.359.350,00 atau 48,47 %. Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Anggaran sebesar Rp. 110.097.000,00 terealisasi sebesar Rp.53.359.350,00 atau 48,47 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa 150 orang 3 laporan capaian output/keluaran sebesar 100 %.



4. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Kegiatan ini dilaksanakan Terpenuhinya Kendaraan Lulus Uji di Bidang Perhubungan. Alokasi Anggaran belanja untuk Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor tahun 2025 sebesar Rp.644.179.287,00 terealisasi sebesar Rp.628.190.521,00 atau 97,52%. Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Anggaran sebesar Rp.237.642.530,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.233.980.951,00 atau sebesar 98,46 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Kunci Impact Cordless wrench, alat uji emisi gas buang co/hc (Gas Analyzer), Sprayer Elektrik, Kursi tunggu stainless 4 baris, personal komputer (pc dan printer) Sarana dan prasarana tersebut dibeli untuk kelengkapan peralatan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Anggaran sebesar Rp.93.366.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 88.199.184,00 atau sebesar 94,47 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Penguji sebanyak 4 (Orang) yaitu Diklat Pengujian kendaraan Bermotor Dasar dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- c. Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Anggaran sebesar Rp.18.900.857,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.16.387.135,00 atau sebesar 86,70 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa ATK dan Fotocopy, cetak spanduk + baliho sebanyak 35 (tiga puluh Lima) jenis dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Anggaran sebesar Rp.75.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 75.000.000,00 atau sebesar 100 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah BLUE (Bukti Lulus Uji



Elektronik) berupa Kartu Uji sebanyak 3000 set dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

- e. Sub Kegiatan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji dengan Anggaran sebesar Rp19.593.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.18.965.166,00 atau sebesar 96,79%. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah Identifikasi kendaraan yang diidentifikasi sebanyak 100 kendaraan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- f. Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor dengan Anggaran sebesar Rp145.685.400,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp145.030.400,00 atau sebesar 99,55%. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini Pemeliharaan alat uji/ Kalibrasi sebanyak 1 kali pada 9 (Sembilan) Jenis yaitu Pemeliharaan Alat Uji Kincup Roda (Side Slip), Alat Uji Lampu utama (Head Light Tester), Alat Uji Emisi Gas Buang Mesin Cetus Api (Gas Analyser), Alat Uji Tingkat Suara Klakson (Sound Level Meter), ALAT Uji Rem (Brake Tester), Alat Uji Kecepatan (Speedometer Tester), Alat Uji Berat (Axle load Meter), Alat Uji Kegelapan Mata (tint Tester), Alat Uji Mesin kompresi (Smoke tester) dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Anggaran sebesar Rp.24.692.900,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.24.420.885,00 atau sebesar 98,90 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan berupa Jumlah Laporan Pengujian Kendaraan Bermotor sebanyak 2 (dua) Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- h. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan Anggaran sebesar Rp.29.297.300,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.26.206.800,00 atau sebesar 89,45 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan berupa Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengujian Kendaraan Bermotor sebanyak 100 (Seratus) Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.



5. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan Terwujudnya Lalu Lintas yang Tertib dan Lancar di bidang Perhubungan. Alokasi Anggaran belanja untuk Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota tahun 2025 sebesar Rp. 2.094.072.600,00 terealisasi sebesar Rp.1.889.417.633,00 atau 90,23 %. Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan Anggaran sebesar Rp.1.571.214.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.379.984.942,00 atau sebesar 87,83 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah Petugas pengendalian lalu lintas, angkutan dan parkir yang bertugas di dalam/luar kecamatan Muara Enim, sebanyak 338 orang, Jumlah Petugas Pelaksana Layanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru sebanyak 220 orang dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Sub Kegiatan Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) dengan Anggaran sebesar Rp.310.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.308.600.320,00 atau sebesar 99,55 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa 5 (Lima) Unit Berlokasi di :
 - 1) Tanjung Jati Kabupaten Muara Enim
 - 2) Sd Negeri 10 Ujanmas Kecamatan Ujan Mas
 - 3) MTS Negeri 1 Muara Enim Kecamatan Muara Enim
 - 4) MIN 1 Muara Enim Kecamatan Muara Enim
 - 5) Desa Beringin Kecamatan Lubaidengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- c. Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota dengan Anggaran sebesar Rp.19.577.400,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.785.535,00 atau sebesar 90,85 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah Laporan Notulen Rapat sebanyak 3 (tiga) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- d. Sub Kegiatan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota dengan Anggaran sebesar Rp. 193.280.400,00 dan realisasi keuangan sebesar



Rp.183.046.836,00 atau sebesar 95,00 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa 3 (Tiga) laporan terkait manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

6. Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan Terpenuhinya Rekomendasi Hasil Andalalin Alokasi Anggaran belanja untuk Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota tahun 2025 sebesar Rp. 41.476.500,00 terealisasi sebesar Rp. 40.642.948,00 atau 97,99 %. Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin dengan Anggaran sebesar Rp. 41.476.500,00 terealisasi sebesar Rp. 40.642.948,00 atau 97,99 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah Buku Penilaian Hasil Andalalin sebanyak 5 (lima) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

7. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan atau Barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan Tersedianya Angkutan Orang dan atau Barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota. Alokasi Anggaran belanja untuk Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan atau Barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota tahun 2025 sebesar Rp. 1.414.674.000,00 terealisasi sebesar Rp. 931.082.275,00 atau 65,82 %. Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan atau Barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dengan Anggaran sebesar Rp. 1.414.674.000,00 terealisasi sebesar Rp. 931.082.275,00 atau 65,82 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa Jumlah BBM yang tersedia pengadaan Bus Sekolah sebanyak 2 (Dua) Jenis sewa Bus Haji untuk pengantaran dan penjemputan jamaah haji dari muara enim ke palemang, (solar dan pertalite) untuk kendaraan Bus Rapid



Trans, bus sekolah dan Mobil Derek dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

C. Program Pengelolaan Pelayaran

Tujuan program Pengelolaan Pelayaran adalah Terciptanya Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau yang Murah, Mudah dan Selamat. Alokasi Anggaran untuk program Pengelolaan Pelayaran sebesar Rp.422.734.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.421.155.037,00 atau 99,63 % dengan capaian kinerja output sebesar 100 %. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Kegiatan ini dilaksanakan untuk Tersedianya Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau di bidang Perhubungan Alokasi Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau tahun 2025 sebesar Rp.422.734.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.421.155.037,00 atau 99,63 %. Keluaran (output) dari masing-masing sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Dermaga sungai dan danau dengan Anggaran sebesar Rp.422.734.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.421.155.037,00 atau 99,63 %. Adapun keluaran (output) dari sub kegiatan ini berupa 2 (Dua) Unit bangunan dermaga di Desa Tanjung Baru Kec. Muara Enim dan Desa Arisan Musi Timur Kec. Muara Belida dengan capaian kinerja output sebesar 100 %.

3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terciptanya Pelayanan Transportasi yang Mudah, Murah, Cepat, Aman, Nyaman dan Selamat.	Meningkatnya Keamanan dan Keselamatan Transportasi	Jumlah Kendaraan yang di uji berkala per tahun	2.450	3016	123%
			V/C Rasio Ruas Jalan Kabupaten	0,1088	0,07	64,33%
			Persentase Angkutan Laik Jalan/Kendaraan yang lulus uji	90	118,09	131%



No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase Pelanggaran Kelaikan Jalan Kendaraan	2,86	2,75	96,15%
		Meningkatnya Kuantitas dan kualitas sarana transportasi	Rasio Izin Trayek	9,6E-05	7,6E-06	7,90%
			Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum	524.000	521.331	99,49%
			Jumlah Orang Yang Melalui Terminal Per Tahun	320.000	275.091	85,96%
			Jumlah Angkutan Umum Yang Tersedia	11	11	100%
		Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Prasarana Transportasi	Persentase Ruas Jalan Yang Dilengkapi Kelengkapan Jalan dan Dalam Kondisi Baik	50	49,77	99,54%
			Jumlah Dermaga Angkutan Sungai dan Danau	10	12	120%
			Jumlah Terminal Angkutan Orang (Type C)	2	2	100%

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Minimnya Perusahaan Angkutan Umum yang Melayani Trayek Angkutan Umum	- Pemerintah kabupaten Muara Enim Secara Bertahap akan Mengadaan Bus Angkutan Umum Khususnya untuk Angkutan Umum dan Angkutan Sekolah (Bus Sekolah) - Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat untuk Berusaha di bidang Angkutan Umum.

5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI



9. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA OLEH DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar diselenggarakan oleh perangkat daerah Dinas komunikasi, informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim. Pada Tahun 2025, alokasi belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 31.030.144.962,02,- terealisasi sebesar Rp.29.9487.437.286,- atau 96,51 % dan kinerja keluaran (output) sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar **Rp.27.148.540.635,45,-** terealisasi sebesar **Rp.26.091.478.510,-** atau **96,11%** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja modal dialokasikan sebesar **Rp.3.881.674.700,-** terealisasi **Rp. 3.856.958.776,-** atau **99,36 %** yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

I. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

Dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp.30.207.352.562,02,- dan terealisasi sebesar Rp.29.130.495.838,- atau 96,44%

Terdiri dari 3 Program, 10 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Sebesar Rp.8.001.028.662,02,- dengan realisasi sebesar Rp.7.747.489.222,- atau 96,83% program ini terdiri dari 8 (Delapan) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



Alokasi anggaran kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sebesar Rp.44.097.700,- dengan realisasi sebesar Rp.41.302.150,- atau 93,66% kegiatan ini terdiri dari 6 (Enam) sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD

Alokasi anggaran sebesar **Rp.16.859.400,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.15.833.750,-** atau sebesar **93,92%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen RKA-SKPD yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

b. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD

Alokasi anggaran sebesar **Rp.7.910.700,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.7.500.300,-** atau sebesar **94,81%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

c. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD

Alokasi anggaran sebesar **Rp.5.287.200,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.4.848.050,-** atau sebesar **91,69%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen DPA-SKPD yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

d. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD

Alokasi anggaran sebesar **Rp.5.287.200,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.4.900.550,-** atau sebesar **92,69%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

e. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Alokasi anggaran sebesar **Rp.4.001.400,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.3.801.500,-** atau sebesar **95,00%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang ditargetkan sebanyak 12 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

f. Sub kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah



Alokasi anggaran sebesar **Rp.4.751.800,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.4.418.000,-** atau sebesar **92,98%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditargetkan sebanyak 5 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sebesar Rp.5.639.269.176,02,- dengan realisasi sebesar Rp.5.417.522.048,- atau 96,07%. Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan yaitu antara lain :

a. Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Alokasi anggaran sebesar **Rp.5.630.183.876,02,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.5.408.872.048,-** atau sebesar **96,07%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN ditargetkan sebanyak 76 Orang dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

b. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun Alokasi anggaran sebesar **Rp.4.739.500,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.4.500.000,-** atau sebesar **94,95%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang ditargetkan sebanyak 1 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

c. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD

Alokasi anggaran sebesar **Rp.4.345.800,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.4.150.000,-** atau sebesar **95,49%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang ditargetkan sebanyak 2 laporan keuangan semesteran dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.



3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah sebesar Rp.121.571.350,- dengan realisasi sebesar Rp. 113.274.500,- atau 93,18% Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan antara lain :

- a. Sub kegiatan pengamanan barang milik daerah SKPD dengan anggaran sebesar **Rp.121.571.350,-** dengan realisasi sebesar **113.274.500,-** atau **93,18%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang ditargetkan sebanyak 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah sebesar Rp.22.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp.21.050.000,- atau 93,56%. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan antara lain :

- a. Sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
Alokasi anggaran sebesar **Rp.22.500.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.21.050.000,-** atau **93,56%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah SDM yang mengikuti bimtek/pelatihan yang ditargetkan sebanyak 5 orang dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan administrasi umum perangkat daerah sebesar Rp.1.315.953.899,- dengan realisasi Rp.1.304.736.540,- atau 99,15%. Kegiatan ini terdiri dari 8 (Delapan) kegiatan antara lain :

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Alokasi anggaran sebesar **Rp.23.236.400,-** dengan realisasi sebesar **Rp.23.180.000,-** atau **99,76%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ditargetkan sebanyak 1 paket dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.



- b. Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Alokasi anggaran sebesar **Rp.472.719.500,-** dengan realisasi sebesar **Rp.462.652.791,-** atau **97,87%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dan jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 9 paket dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- c. Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
Alokasi anggaran sebesar **Rp.40.461.099,-** dengan realisasi sebesar **Rp.40.348.000,-** atau **99,72%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 2 Paket dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- d. Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
Alokasi anggaran sebesar **Rp.114.103.900,-** dengan realisasi sebesar **Rp.113.383.699,-** atau **99,37%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 2 paket dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- e. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Alokasi anggaran sebesar **Rp.36.412.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.36.329.050,-** atau **99,77%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 1 paket dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- f. Sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Alokasi anggaran sebesar **Rp.13.574.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.13.530.000,-** atau **99,68%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang ditargetkan sebanyak 10 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- g. Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu
Alokasi anggaran sebesar **Rp.2.664.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.2.530.000,-** atau **94,97%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan fasilitasi



kunjungan tamu yang ditargetkan sebanyak 8 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

- h. Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Alokasi anggaran sebesar **Rp.612.783.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.612.783.000,-** atau **100%** Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang ditargetkan sebanyak 150 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

6. Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sebesar Rp.10.000.000,- dengan realisasi Rp.9.345.975,- atau 93,46%. Kegiatan ini terdiri dari 1 (Satu) sub kegiatan antara lain :

- a. Sub kegiatan pengadaan Mebel

Alokasi anggaran sebesar **Rp.10.000.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.9.345.975,-** atau **93,46%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket mebel yang disediakan yang ditargetkan sebanyak 2 paket dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

7. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar Rp.198.786.250,- dengan realisasi Rp.195.720.619,- atau 98,46%. Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat

Alokasi anggaran sebesar **Rp.10.533.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.10.460.000,-** atau **99,31%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat yang ditargetkan sebanyak 2 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

- b. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Alokasi anggaran sebesar **Rp.142.253.250,-** dengan realisasi sebesar **Rp.139.260.619,-** atau **97,90%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan



penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang harus dibayar yang ditargetkan sebanyak 3 rekening dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

- c. Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
Alokasi anggaran sebesar **Rp.46.000.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.46.000.000,-** atau **100%**.. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang ditargetkan sebanyak 1 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran untuk kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar Rp.648.850.287,- dengan realisasi Rp.644.537.390,- atau 99,34%. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Alokasi anggaran sebesar **Rp.234.640.287,-** dengan realisasi sebesar **Rp.232.184.390,-** atau **98,95%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan yang dibayar pajak yang ditargetkan sebanyak 19 unit dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- b. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan Lainnya
Alokasi anggaran sebesar **Rp.365.800.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.364.343.000,-** atau **99,60%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara yang ditargetkan sebanyak 1 unit gedung kantor dan bandengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- c. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Alokasi anggaran sebesar **Rp.24.950.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.24.660.000,-** atau **98,84%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/rehabilitasi ditargetkan sebanyak 35 unit yaitu



pemeliharaan personal komputer/laptop, printer dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- d. Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Alokasi anggaran sebesar **Rp.23.460.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.23.350.000,-** atau **99,53%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/rehabilitasi yang ditargetkan sebanyak 19 unit yaitu pemeliharaan AC dan pemeliharaan instalasi listrik dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

B. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Alokasi anggaran untuk program informasi dan komunikasi publik sebesar Rp.7.361.753.750,- dengan realisasi Rp.7.330.216.678,- atau 99,57%. program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 6 (Enam) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotam

Alokasi anggaran untuk kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 7.868.107.040,-** dengan realisasi **Rp.7.826.318.594,-** atau **99,47%**. Kegiatan ini terdiri dari 6 (Enam) sub kegiatan berikut :

a. Sub kegiatan Relasi Media

Alokasi anggaran sebesar **Rp.5.809.386.900,-** dengan realisasi sebesar **Rp.5.790.636.115,-** atau **99,68%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media yang ditargetkan sebanyak 130 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

b. Sub kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

Alokasi anggaran sebesar **Rp.93.391.200,-** dengan realisasi sebesar **Rp.89.064.250,-** atau **95,37%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo yang ditargetkan sebanyak



10 Komunitas dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

c. Sub kegiatan pelayanan informasi publik

Alokasi anggaran sebesar **Rp.89.293.100,-** dengan realisasi sebesar **Rp.89.268.800,-** atau **99,97%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan yang ditargetkan sebanyak 10 permohonan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

d. Sub kegiatan monitoring informasi kebijakan opini dan aspirasi publik

Alokasi anggaran sebesar **Rp.67.978.600,-** dengan realisasi sebesar **Rp.67.923.777,-** atau **99,92%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik yang ditargetkan sebanyak 52 Rekomendas dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

e. Sub kegiatan pengelolaan media komunikasi publik

Alokasi anggaran sebesar **Rp.435.472.950,-** dengan realisasi sebesar **Rp.430.921.372,-** atau **98,95%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis yang ditargetkan sebanyak 12 Media dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

f. Sub kegiatan penyusunan konten Alokasi anggaran sebesar **Rp.866.231.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.862.402.364,-** atau **99,56%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini Jumlah Konten Informasi Publik yang ditargetkan sebanyak 100 konten dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

C. Program Aplikasi Informatika

Alokasi anggaran untuk program aplikasi informatika sebesar Rp.14.844.570.150,- dengan realisasi Rp.14.052.789.938,- atau 94,67%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 8 (Delapan) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Alokasi anggaran untuk kegiatan pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar



Rp.14.844.570.150,- dengan realisasi Rp.14.052.789.938,- atau 94,67%. Kegiatan ini terdiri dari 8 (Delapan) sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan PEMDA

Alokasi anggaran **Rp.12.972.400,-** terealisasi sebesar **Rp.12.306.000,- atau 94,86%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan hasil fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda yang ditargetkan sebanyak 1 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

b. Sub kegiatan Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah

Alokasi anggaran sebesar **Rp.90.000.000,-** terealisasi sebesar **Rp.89.445.000,- atau 99,38%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen SPBE dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

c. Sub kegiatan Koordinasi pelaksanaan manajemen SPBE

Alokasi anggaran sebesar **Rp.57.753.500,-** terealisasi sebesar **Rp.57.719.622,- atau 99,94%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

d. Sub kegiatan Pembangunan dan/ atau pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE

Alokasi anggaran sebesar **Rp.1.193.274.450,-** terealisasi sebesar **Rp.1.168.468.848,- atau 97,92%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah umlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE yang ditargetkan sebanyak 3 Aplikasi dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

e. Koordinasi dan fasilitas penyelenggaraan Kabupaten atau Kota cerdas

Alokasi anggaran sebesar **Rp.304.123.900,-** terealisasi sebesar **Rp.302.717.730,- atau 99,54%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas



yang ditargetkan sebanyak 36 Perangkat Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

- f. Sub kegiatan penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah kabupaten/ kota

Alokasi anggaran sebesar **Rp.6.292.502.200,-** terealisasi sebesar **Rp.6.104.706.334,-** atau **97,02%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota yang ditargetkan sebanyak 58 Perangkat Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

- g. Sub kegiatan Implementasi inovasi program kota cerdas sesuai dengan masterplan Kabupaten/ Kota cerdas

Alokasi anggaran sebesar **Rp.3.490.922.700,-** dengan realisasi sebesar **Rp.2.916.006.112,-** atau **83,53%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas yang ditargetkan sebanyak 2 program dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

- h. Sub kegiatan Penyediaan Akses internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE

Alokasi anggaran sebesar **Rp.3.403.021.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp.3.401.420.292,-** atau **99,95%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas yang ditargetkan sebanyak 58 Perangkat Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

II. Urusan Bidang Statistik

Dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp.387.174.000,- terealisasi Rp. 382.819.180,- atau 98,88%.

Terdiri dari 1 Program, 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Alokasi anggaran untuk program penyelenggaraan statistik sektoral sebesar Rp.387.174.000,- terealisasi Rp. 382.819.180,- atau 98,88%.



Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota sebesar Rp.387.174.000,- terealisasi Rp. 382.819.180,- atau 98,88%. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral yang terintegrasi dengan anggaran sebesar Rp.38.452.000,- dengan realisasi sebesar Rp.37.948.700,- atau 98,69%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan dibidang statistik yang ditargetkan sebanyak 100 orang dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Sub kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia
Alokasi anggaran sebesar Rp.348.722.000,- dengan realisasi sebesar Rp.344.870.480,- atau 98,90%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata yang ditargetkan sebanyak 3 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

III. Urusan Bidang Persandian

Dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar **Rp.435.618.400,-** terealisasi **Rp.435.122.268,-** atau **99,89%**. Terdiri dari 1 Program, 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Alokasi anggaran untuk program program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi sebesar Rp.435.618.400,- terealisasi Rp.435.122.268,- atau 99,89%. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota



Alokasi anggaran untuk kegiatan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp, 352.629.900,- terealisasi Rp. 352.139.644,- atau 99,86%. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik

Alokasi anggaran sebesar **Rp.135.416.600,-** dengan realisasi sebesar **Rp.135.371.4003,-** atau **99,97%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik yang di targetkan sebanyak 4 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

- b. Sub kegiatan penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota

Alokasi anggaran sebesar **Rp.217.213.300,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 216.768.244,-** atau **99,80%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditargetkan sebanyak 58 OPD dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

2. Kegiatan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota.

Alokasi anggaran untuk kegiatan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten/kota sebesar Rp. 82.988.500,- terealisasi Rp. 82.982.624,- atau 99,99%. Kegiatan ini terdiri dari 1 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub kegiatan operasionalisasi jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Alokasi anggaran sebesar Rp. 82.988.500,- terealisasi Rp.82.982.624,- atau 99,99%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi yang ditargetkan sebanyak 17 OPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.



3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian
1.	Meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	3,3	3,75	113,63%
2.		Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Informasi Publik yang tersedia dan diumumkan sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	100%	100%	100%

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1.	Masih terdapatnya daerah sinyal lemah dan blankspot	Melakukan koordinasi ke Kementerian Kominfo melalui Direktorat telekomunikasi dan memberikan data teknis beserta pendukung desa-desa yang masih dalam kondisi sinyal lemah dan blankspot, berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Provinsi Sumsel untuk mendorong percepatan pengentasan daerah sinyal lemah dan blankspot, melakukan survey bersama dengan penyelenggara telekomunikasi/ provider ke desa-desa yang potensial untuk di bangun Base Transceiver Station (BTS) baru. Sesuai kewenangan pemerintah daerah sebagai salah satu cara untuk mengatasi desa sinyal lemah dan blankspot Dinas Kominfo SP memfasilitasi jaringan internet desa bagi 256 desa dan kelurahan se Kabupaten Muara Enim, 24 UPTD Puskesmas yang berada di Kecamatan serta 13 UPTB Pengelolaan Pendapatan Daerah yang berada di Kecamatan.
2	Kurangnya Bandwith induk untuk suplai kebutuhan internet OPD	Meningkatkan kapasitas bandwith untuk memenuhi kebutuhan internet OPD



No	Permasalahan	Solusi
3	Kurang representatifnya ruangan Network Operation Center (NOC) dan ruang server/ Data Center	Relokasi ke tempat yang lebih representatif sesuai standar
4.	Masih terdapatnya sistem/ Aplikasi yang belum sesuai standar keamanan informasi	Melaksanakan pengujian sistem/aplikasi dengan pelaksanaan layanan ITSA/ Pentest

5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

1. Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai Terbaik II Kategori Sekretariat/Badan/Dinas Atas Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025.
2. Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagai Harapan I Atas pengelola kearsipan tahun 2025.
3. Penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim Sebagai Harapan I Inovasi Daerah Kategori Perangkat Daerah Dalam Rangka Penilaian/ Asistensi Inovasi Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.
4. Penghargaan dari PPID Sumatera Selatan diberikan kepada Dinas Kominfo Kabupaten Muara Enim sebagai "SLIP PPID AWARD" Tahun 2025 dengan Prestasi Baik Sekali.
5. Penghargaan dari Ketua Umum Indonesia Persada ke LPPL Radio Suara Muara Enim FM dalam ajang 5 th Indonesia Persada.id award 2025 sebagai Nomine Kategori LPPL Paling Inovatif.
6. Penghargaan dari Komisi Penyiaran Daerah Sumatera Selatan kepada LPPL Radio Suara Muara Enim sebagai Nominasi LPPL Radio Terbaik.
7. Penghargaan dari Komisi Penyiaran Daerah Sumatera Selatan kepada LPPL Radio Suara Muara Enim sebagai Terbaik Feature Informasi Pembangunan Daerah Radio.
8. Penghargaan dari Komisi Penyiaran Daerah Sumatera Selatan menetapkan Bupati Muara Enim sebagai Nominasi Kepala Daerah Peduli Penyiaran.



10. URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH OLEH DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Muara Enim mendapatkan alokasi dana untuk kegiatan sebesar Rp. 16.344.240.103,- yang terdiri dari:

A. Belanja Operasional

Belanja operasional Rp. 14.628.440.103,- terealisasi sebesar Rp. 12.707.065.418,- atau 86,87%

B. Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 1.834.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.797.608.430,- atau 97,97%

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Muara Enim dengan Alokasi Anggaran Tahun 2025 sebesar **Rp. 16.344.240.103,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 14.504.673.848** atau **88,74 persen**, terdiri dari 7 Program, 14 kegiatan dan 42 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan anggaran sebesar **Rp. 9.469.525.043,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 8.304.707.871,-** atau (87,70%) dengan rincian :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 106.590.110,- dengan Realisasi sebesar Rp. 92.093.180,- atau 86,40 persen, yang terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, alokasi sebesar **Rp. 28.917.500,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 24.627.600,-** atau **85,17 persen**.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD, alokasi sebesar **Rp. 17.089.090,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 16.564.735,-** atau **96,93 persen**.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD, alokasi sebesar **Rp. 15.009.100,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 14.353.840,-** atau **95,63 persen**.



- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD, alokasi sebesar **Rp. 14.876.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 11.674.065,-** atau **78,48 persen**.
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD, alokasi sebesar **Rp. 8.568.470,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 7.575.630,-** atau **88,41 persen**.
- f. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi sebesar **Rp. 22.129.950,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 17.297.310,-** atau **78,16 persen**.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Alokasi Anggaran sebesar Rp. 6.025.072.243,- dengan Realisasi sebesar Rp. 5.080.938.964,- atau 84,33 persen, yang terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, alokasi sebesar **Rp. 5.997.348.043,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 5.056.697.695,-** atau **84,32 persen**.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, alokasi sebesar **Rp. 3.572.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.905.194,-** atau **81,33 persen**.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD. Alokasi anggaran sebesar **Rp. 24.152.200,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 21.336.075,-** atau **88,34 persen**.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 38.390.800,- dengan Realisasi sebesar Rp. 38.206.500,- atau 99,52 persen.

- a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD alokasi sebesar **Rp. 38.390.800,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 38.206.500,-** atau **99,52 persen**.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 48.000.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 30.500.000,- atau 63,54 persen.

- a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, alokasi sebesar **Rp. 48.000.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 30.500.000,-** atau **63,54 persen**.



5. Kegiatan Umum Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 904.893.912,- dengan Realisasi sebesar Rp. 865.131.223,- atau 95,61 persen.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi sebesar **Rp. 13.153.600,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 11.874.000,-** atau **90,27 persen.**
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi sebesar **Rp. 29.669.600,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 29.406.000,-** atau **99,11 persen.**
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga alokasi sebesar **Rp. 45.924.350,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 45.750.000,-** atau **99,62 persen.**
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor alokasi sebesar **Rp. 61.287.945,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 44.829.786,-** atau **73,15 persen.**
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan alokasi sebesar **Rp. 107.744.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 94.730.600,-** atau **87,92 persen.**
- f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan alokasi sebesar **Rp. 9.597.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 9.440.000,-** atau **98,36 persen.**
- g. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu alokasi sebesar **Rp. 39.375.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 39.106.000,-** atau **99,32 persen.**
- h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD alokasi sebesar **Rp. 598.142.417,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 589.994.837,-** atau **98,64 persen.**

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.719.800.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 1.683.108.430,- .

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan & Mesin Lainnya, alokasi sebesar **Rp. 930.800.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 926.926.430,-** atau **99,58 persen.**
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya, alokasi sebesar **Rp. 789.000.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 756.182.000,-** atau **95,84 persen.**



7. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 120.411.950,- dengan Realisasi sebesar Rp. 115.170.704,- atau 95,65 persen.**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, alokasi sebesar **Rp 16.395.2000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 15.500.000,-** atau **94,54 persen.**
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi sebesar **Rp. 94, 386,750,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 91,110,705,-** atau **96,53 persen.**
 - c. Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor, alokasi sebesar **Rp. 9.630.000.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 8.560.000,-** atau **88,89 persen.**
8. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 506.366.028,- dengan Realisasi sebesar Rp. 399.558.870,- atau 78,91 persen.**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan, alokasi sebesar **Rp. 358.306.180,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 263,658,870,-** atau **73,58 persen.**
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **Rp. 115.000.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 114.500.000,-** atau **99,57 persen.**
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **Rp. 33.059.848,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 21.400.000,-** atau **64,73 persen.**

B. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Dengan anggaran sebesar **Rp. 184.572.500,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 166.777.581,-** atau **95,82 persen** dengan rincian :

1. **Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, alokasi Anggaran sebesar Rp. 184.572.500,- dengan Realisasi sebesar Rp. 166,777,581,- atau 95, 82 persen.**



- a. Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi, alokasi sebesar **Rp. 129.402.100,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 113.914.200,-** atau **88,03 persen**.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, alokasi sebesar **Rp. 55.170.400,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 52.863.381,-** atau **95,82 persen**.

C. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Dengan anggaran sebesar **Rp. 305.362.700,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 278.751.504,-** atau **91,29 persen** dengan rincian :

- 1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi, KSP/USP yang wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 305.362.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 278.751.504,- atau 91,29 persen.**
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi sebesar **Rp. 27.652.300** dengan realisasi sebesar **Rp. 23.712.601,-** atau **85,75 persen**.
 - b. Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan dan Permodalan alokasi sebesar **Rp. 277.719.040,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 255.038.903,-** atau **91,84 persen**.

D. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Dengan anggaran sebesar **Rp. 345.637.065,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 289.255.513,-** atau **83,69 persen** dengan rincian :

- 1. Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, alokasi Anggaran sebesar Rp. 345.637.065,- dengan realisasi sebesar Rp. 289.255.513,- atau 83,69 persen.**
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, alokasi sebesar **Rp. 345.637.065,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 289.255.513,-** atau **83,69 persen**.

E. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Dengan anggaran sebesar **Rp. 3.097.639.245,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 3.045.159.327,-** atau **98,31 persen** dengan rincian :



1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Alokasi Anggaran sebesar Rp. 3.097.639.245,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.045.159.327,- atau 98,31 persen.

- a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi dalam Pengembangan Koperasi, alokasi sebesar **Rp. 190.527.645,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 180.893.620 ,-** atau **94,94 persen.**
- b. 2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota, alokasi sebesar **Rp. 810.029.600,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 808,763,971,-** atau **99,84 persen.**
- c. 3) Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Pembiayaan Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha, alokasi sebesar **Rp. 2.097.082.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.055.501.736,-** atau **98,02 persen.**

F. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro.

Dengan anggaran sebesar **Rp 1.015.740.800,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 866.365.093,-** atau **85,29** dengan rincian :

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan Alokasi anggaran sebesar Rp 1.015.740.800,- dengan Ralisasi sebesar Rp. 866.365.093,- atau 85,29 persen.

- a. Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro, alokasi sebesar **Rp. 15.000.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. ,-** atau **persen.**
- b. Sub Kegiatan Faslitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro sebesar **Rp. 190.106.500,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 175.586.191,-** atau **92,36 persen.**
- c. Sub Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, alokasi sebesar **Rp. 63.884.400,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 61.552.030,-** atau **96,35 persen.**



- d. Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro, alokasi sebesar **Rp. 106, 452, 700,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 91.044.423,-** atau **85,53 persen**.
- e. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan, alokasi sebesar **Rp. 640.297.200,-** dengan realisasi **Rp. 538.182.449,-** atau **84,05 persen**.

G. Program Pengembangan UKM

Dengan anggaran sebesar **Rp 1.925.762.750,-** dan terealisasi sebesar **Rp 1.553.656.959,-** atau **80,68** dengan rincian:

1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil . Alokasi anggaran sebesar **Rp 1.925.762.750,-** dengan realisasi sebesar **Rp 1.553.656.959,-** atau **80,68 persen**.
 - a. Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi **Rp. 1.925.762.750,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.553.656.959,-** atau **80,68 persen**.

3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kualitas Koperasi.	Meningkatnya Kualitas Koperasi.	Persentase Koperasi Sehat	23,36	21,49	92
2.	Meningkatkan Kualitas UMK.	Meningkatnya Kualitas UMK	Persentase UMK Naik Kelas	17,35	31,09	179,19

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
	1. Masih rendahnya kualitas kelembagaan koperasi. 2. Masih rendahnya produktivitas Koperasi dan UMK. 3. Masih kurang kondusifnya iklim usaha bagi pengembangan	1. Melakukan penguatan pada program-program yang menjadi titik lemah di dalam capaian kinerja tersebut, seperti melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan monitoring, Koperasi, memfasilitasi peningkatan



No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
	Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (KUKM) - Masih rendahnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UMK kepada sumber-sumber pembiayaan. - Masih rendahnya daya saing koperasi dan UMK dalam hal kecepatan penguasaan teknologi dengan produk permintaan pasar. - Masih terbatasnya akses pemasaran produk UMK ke konsumen serta terbatasnya kelembagaan peningkatan kapasitas UMK dalam menumbuhkan wirausaha baru. - Masih terbatasnya kemampuan SDM Pengurus/Koperasi di dalam berinovasi mengembangkan modal koperasi - Masih rendahnya kemampuan manajerial pengurus koperasi sehingga sangat lambat di dalam perekrutan anggota yang berakibat pada rendahnya jumlah kepemilikan modal sendiri	jaringan Kerjasama antar Lembaga Koperasi dengan Koperasi, UMK dan dunia usaha lainnya, memfasilitasi promosi produk UMK serta peningkatan kemitraan bagi UMK. - Mendorong upaya peningkatan, pengembangan kapasitas dan jumlah SDM lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Muara Enim di dalam menjalankan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan manajemen kinerja. - Melakukan penguatan kolaborasi dan kemitraan melalui : - Meningkatkan sinergi dengan : - Perangkat daerah lain - Perbankan dan Lembaga pembiayaan - Pengurusan tinggi, BUMN, dan swasta - Mendorong kolaborasi dalam : - Akses pembiayaan - Pemasaran produk UMK - Pendampingan dan inkubasi usaha. - Mendorong pengembangan terhadap Inovasi Layanan dan Digitalisasi - Mengembangkan inovasi layanan publik yang mempermudah koperasi dan UMK. - Mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam : - Pelayanan perizinan - Pembinaan UMK - Promosi dan pemasaran produk. - Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi - Melakukan monev rutin dan terstruktur terhadap pelaksanaan program/kegiatan. - Menyusun tindak lanjut hasil monev secara jelas dan terukur. - Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan perencanaan tahun berikutnya. - Menggunakan adanya peningkatan



No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
		anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan mendasar bagi pengembangan Koperasi dan UMK.

5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Penganugerahan inovasi daerah terbiak Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 (Juara 3 Kategori Perangkat Daerah) : SIGEZIT'S (Strategi Peningkatan Minat Gen Z Berkoperasi melalui "Koperasi Goes to School").



11. URUSAN PENANAMAN MODAL OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2025, alokasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 13.309.411.493,73 dan terealisasi sebesar Rp. 11.000.336.962,00 atau 82,65% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 12.760.981.493,73 terealisasi sebesar Rp. 10.467.569.877,00 atau 82,03% yang dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 548.430.000,00 terealisasi sebesar Rp. 532.767.085,00 atau 97,14% yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi asset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada tahun anggaran 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 Program, 14 Kegiatan, dan 42 Sub Kegiatan antara lain :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 10.437.518.397,73 dengan realisasi sebesar Rp. 8.962.737.355,00 atau sebesar 85,87% dengan capaian kinerja output sebesar 100,00%. Program ini terdiri dari 8 (Delapan) Kegiatan dan 28 (Dua Puluh Delapan) Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 26.965.100,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.446.880,00 atau sebesar 79,54%. Adapun



output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 Dokumen RKA-SKPD tahun 2025 dengan capaian output/keluaran sebesar 100%. Terhadap realisasi keuangan hanya mencapai 79,54%, hal ini dikarenakan masih adanya anggaran belanja jasa tenaga honorarium yang belum dihapuskan.

- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 8.829.400,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.222.930,00 atau sebesar 93,13%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD tahun 2025 dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.
- c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 14.636.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.328.950,00 atau sebesar 97,90%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 Dokumen DPA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.
- d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 9.660.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.335.740,00 atau sebesar 96,64%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.517.700,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.360.600,00 atau sebesar 93,76%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 Dokumen LPPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.
- f. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 9.299.200,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.941.340,00 atau sebesar 96,15%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 Dokumen Renstra, Renja, IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan LKjIP SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 6.751.1777.555,30 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.692.885.814,00 atau sebesar 84,32%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya



60 Orang ASN perbulan yang menerima Gaji dan Tunjangan dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%. Terhadap realisasi keuangan hanya mencapai 84,32%, hal ini dikarenakan tersedianya gaji dan tunjangan untuk Kasubag Umum dan Kependidikan sedangkan jabatan struktural Kasubag Umum dan Kependidikan masih kosong, sehingga terjadi silpa pada belanja gaji dan tunjangan tersebut.

- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp. 68.040.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.690.000,00 atau sebesar 58,33%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah 4 Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%. Terhadap realisasi keuangan hanya mencapai 58,33%, hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan atau tagihan makanan dan minuman rapat menyesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 7.094.900,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.392.885,00 atau sebesar 90,11%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 Laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 43.884.200,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.228.025,00 atau sebesar 71,16%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah 24 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%. Terhadap realisasi keuangan hanya mencapai 71,16%, hal ini dikarenakan adanya perbedaan harga pada DPA dengan harga di ecatalog yang menyebabkan sisa anggaran (silpa) dan masih tersedianya gaji/honor pegawai non PNS/KKWT sebanyak 2 orang dengan kategori S1.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah



- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 148.519.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 119.909.650,00 atau sebesar 80,74%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah asuransi kendaraan dinas roda empat dan asuransi pengamanan gedung kantor. Terhadap realisasi keuangan hanya mencapai 80,74%, hal ini dikarenakan dengan target asuransi kendaraan dinas sebanyak 7 Unit dan asuransi bangunan gedung kantor, dimana realisasi sesuai dengan harga taksiran dari pihak asuransi, namun capaian kinerja sebesar 100,00%.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 132.750.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 115.125.000,00 atau sebesar 86,72%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah sebanyak 35 orang ASN yang mengikuti diklat/bimtek/dan sejenisnya.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 43.451.318,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 43.342.000,00 atau sebesar 99,75%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 paket komponen/instalasi listrik untuk penerangan kantor, dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 382.562.143,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 373.091.600,00 atau sebesar 97,52%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 paket peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.
- c. Penyediaan Bahan Logistik dengan anggaran sebesar Rp. 141.134.868,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 107.265.118,00 atau sebesar 76,00%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini Adalah 1 paket bahan logistik dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%. Terhadap realisasi keuangan hanya mencapai 76,00%, hal ini dikarenakan adanya perbedaan harga di DPA dengan harga di e-catalog



(harga pasar) sehingga belanja barang mengikuti harga e-catalog.

- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 121.096.200,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 113.838.500,00 atau sebesar 94,01%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 paket barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 4.369.200,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.280.000,00 atau sebesar 97,96%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 dokumen media cetak harian surat kabar dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 528.867.828,43 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 508.249.573,00 atau sebesar 96,10%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini berupa 150 Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 112.910.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 100.560.000,00 atau sebesar 89,06%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini Adalah 4 Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.
- b. Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp. 129.500.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 129.360.985,00 atau sebesar 99,89%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah 91 Unit Mebel yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 5.488.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.900.000,00 atau sebesar 89,29%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini berupa pembelian materai, dan jasa



pengiriman surat menyurat dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.

- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 363.526.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 274.284.706,00 atau sebesar 75,45%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah 3 Laporan berupa laporan pembayaran rekening Listrik, rekening air, dan telepon/internet untuk keperluan kantor dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%. Terhadap realisasi keuangan hanya mencapai 75,45%, hal ini dikarenakan realisasi anggaran dipengaruhi oleh besaran tagihan aktual serta upaya efisiensi penggunaan layanan selama pelaksanaan kegiatan. Anggaran awal dicadangkan dengan mempertimbangkan kemungkinan penambahan peralatan elektronik penunjang pekerjaan serta potensi kenaikan tarif dasar listrik dan layanan komunikasi. Namun, implementasi kebijakan penghematan dan optimalisasi penggunaan fasilitas menyebabkan realisasi belanja lebih rendah dari yang telah dianggarkan.
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 812.891.285,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 783.648.000,00 atau sebesar 96,40%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah 3 Laporan berupa pembayaran jasa outsourcing pengamanan kantor dan kebersihan kantor serta honor tenaga jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 193.787.200,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 134.103.059,00 atau sebesar 69,20%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah membiayai pemeliharaan dan pembayaran pajak bagi 15 Unit kendaraan dinas (roda empat dan roda dua) dengan capaian output/keluaran sebesar 100%. Terhadap realisasi keuangan hanya mencapai 69,20%, hal ini dikarenakan oleh kondisi



kerusakan kendaraan yang bersifat insidental dan tidak terjadi secara merata sepanjang tahun anggaran. Anggaran pemeliharaan dicadangkan dalam jumlah relatif besar dengan mengacu pada batas maksimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden terkait standar biaya pemeliharaan kendaraan dinas, sebagai langkah mitigasi terhadap potensi kerusakan berat yang dapat mengganggu operasional dan kegiatan lapangan. Namun demikian, hingga akhir periode pelaporan, sebagian potensi kebutuhan tersebut tidak terealisasi sepenuhnya.

- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 13.260.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.610.800,00 atau sebesar 95,10%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 Unit pemeliharaan operasional mesin genset kantor dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 87.200.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 86.200.000,00 atau sebesar 98,85%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 Unit pemeliharaan rutin gedung kantor dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 108.500.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 63.675.000,00 atau sebesar 58,69%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah pemeliharaan rutin peralatan kerja (komputer, printer, running text, dan ups) dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%. Terhadap realisasi keuangan hanya mencapai 58,69%, hal ini dikarenakan adanya penambahan di perencanaan ABT yaitu perbaikan UPS sebanyak 50 Unit namun hanya terealisasi sebanyak 12 Unit, untuk pemeliharaan sarana prasarana Gedung (pemeliharaan computer dan printer) sesuai dengan kerusakan yang terjadi di DPMPSTP dan harga sesuai tagihan pihak ke - 3.
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran



sebesar Rp. 165.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 153.460.200,00 atau sebesar 93,01%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah 44 Unit pemeliharaan AC dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.

B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Alokasi anggaran Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebesar Rp. 866.185.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 733.805.929,00 atau sebesar 84,72% dengan capaian kinerja output sebesar 100,00%. Terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 5 (Lima) Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 175.157.700,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 134.285.366,00 atau sebesar 76,67%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah 1 Dokumen Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%. Terhadap realisasi keuangan hanya mencapai 76,67%, hal ini dikarenakan adanya efesiensi anggaran khususnya pada anggaran Perjalanan Dinas.
- b. Fasilitas Kemitraan yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 56.025.900,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 19.742.920,00 atau sebesar 35,24%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya 2 (dua) kali rapat/pertemuan yaitu pelaksanaan Fasilitas Peningkatan Kompetensi Pelaku Usaha dan Fasilitas UMKM Siap Bermitra dengan Usaha Besar serta Sosialisasi Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan dan Kewajiban Pelaporan Pelaksanaan Kemitraan Tahun 2025 yang dilaksanakan di Ruang Rapat MPP - DPMPTSP Kabupaten Muara Enim dan terlaksananya 1 (satu) Kesepakatan Kemitraan Usaha antara Usaha Besar dengan UMKM Kabupaten Muara Enim dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%. Terhadap realisasi keuangan hanya mencapai 35,24%, hal ini dikarenakan



sulitnya komunikasi dengan narasumber dalam menentukan kesediaan dan kesiapan narasumber untuk hadir dan narasumber masih menunggu peraturan terbaru, selain itu perjalanan dinas dilaksanakan secara efektif dan efisien.

2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

- a. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 145.471.100,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 137.510.634,00 atau sebesar 94,53%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 - 2045 dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.
- b. Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) dengan anggaran sebesar Rp. 197.210.600,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 170.283.573,00 atau sebesar 86,35%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya data potensi investasi daerah Kabupaten Muara Enim yang termutakhirkan pada Aplikasi PIR Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI serta tersedianya Dokumen dan Booklet Peluang Investasi Industri Pengolahan Serat Daun Nanas di Kabupaten Muara Enim serta tersedianya Buku Laporan Hasil Pekerjaan dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.
- c. Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 292.320.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 271.983.436,00 atau sebesar 93,04%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Hilirisasi Kopi di Kabupaten Muara Enim sebanyak 25 Buku dan Booklet Peluang Investasi Hilirisasi Kopi di Kabupaten Muara Enim sebanyak 100 Buku yang dapat dijadikan bahan promosi investasi baik secara manual maupun melalui aplikasi ataupun media elektronik serta Hasil Penilaian Indeks Potensi Investasi Daerah (IPID) Kabupaten Muara Enim dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.



C. Program Promosi Penanaman Modal

Alokasi anggaran Program Promosi Penanaman Modal sebesar Rp. 591.635.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 287.907.899,00 atau sebesar 48,66% dengan capaian kinerja output sebesar 100,00%. Program ini terdiri dari 1 (Satu) Kegiatan dan 1 (Satu) Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 591.635.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 287.907.899,00 atau sebesar 48,66%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah 2 dokumen laporan dan keikutsertaan dalam kegiatan promosi penanaman modal di Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi, dan Tingkat Nasional dengan capaian output/keluaran sebesar 100,0%. Terhadap realisasi keuangan hanya mencapai 48,66%, hal ini dikarenakan Pameran Promosi Tingkat Provinsi SumSel tidak menyelenggarakan kegiatan Pameran Promosi Penanaman Modal Tahun 2025, namun capaian kinerja kegiatan Pameran Promosi Tingkat Kabupaten dan Tingkat Nasional sebesar 100,00%.

D. Program Pelayanan Penanaman Modal

Alokasi anggaran Program Pelayanan Penanaman Modal sebesar Rp. 737.395.135,00 dengan realisasi sebesar Rp. 544.424.044,00 atau sebesar 73,83% dengan capaian kinerja output sebesar 100,00%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Koordinasi dan sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 115.852.610,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 57.267.731,00 atau sebesar 49,43%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah kepada 50 pelaku usaha dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%. Terhadap realisasi keuangan hanya mencapai 49,43%, hal ini dikarenakan



adanya penghematan atau efisiensi dalam merealisasikan belanja.

- b. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik dengan anggaran sebesar Rp. 491.094.804,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 429.268.359,00 atau sebesar 87,41%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam Kabupaten Muara Enim dan jempot bola dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 5.119 NIB dari target 1.360 NIB atau sebesar 376,39% dari target tahun 2025.
- c. Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan anggaran sebesar Rp. 88.036.821,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 41.729.959,00 atau sebesar 47,40%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah penyelenggaraan fasilitasi konsultasi dan penanganan pengaduan bagi pelaku usaha terkait perizinan dan non perizinan dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%. Terhadap realisasi keuangan hanya mencapai 47,40%, hal ini dikarenakan adanya penghematan atau efisiensi dalam merealisasikan belanja.
- d. Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan anggaran sebesar Rp. 42.410.900,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.157.995,00 atau sebesar 38,10%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan evaluasi terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi komitmen perizinan berusaha berbasis risiko dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%. Terhadap realisasi keuangan hanya mencapai 38,10%, hal ini dikarenakan adanya penghematan atau efisiensi dalam merealisasikan belanja.

E. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Alokasi anggaran Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp. 596.135.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 415.280.828,00 atau sebesar 69,66% dengan capaian kinerja output



sebesar 100,00%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahnya dengan anggaran sebesar Rp. 88.331.900,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.323.210,00 atau sebesar 55,84%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah fasilitasi penyampaian laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) kepada pelaku usaha dan fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya baik melalui klinik LKPM di MPP maupun pendampingan di lapangan atau di Lokasi usaha dengan capaian output/keluaran sebanyak 12 Kegiatan Usaha dari target 6 Kegiatan Usaha atau sebesar 200,00%. Terhadap realisasi keuangan hanya mencapai 55,84%, hal ini dikarenakan dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBD Tahun 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 2025.
- b. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha dengan anggaran sebesar Rp. 224.315.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 149.398.655,00 atau sebesar 66,60%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah penyelenggaraan bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko kepada 100 Pelaku Usaha dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%. Terhadap realisasi keuangan hanya mencapai 66,60%, hal ini dikarenakan adanya kebijakan internal dan adanya kebijakan efisiensi pada anggaran perjalanan dinas sehingga anggaran perjalanan dinas tidak dapat terealisasi.
- c. Pengawasan Penanaman Modal dengan anggaran sebesar Rp. 283.488.200,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 216.558.963,00 atau sebesar 76,39%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah melaksanakan pengawasan perizinan berusaha terkoordinasi dan terintegrasi dengan OPD Teknis terhadap 25 Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha, melaksanakan rapat-rapat Analisa dan verifikasi data profil



dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha, melakukan rapat-rapat evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha, melaksanakan sosialisasi penilaian kepatuhan pelaku usaha melalui LKPM, melaksanakan penilaian dan pemberian penghargaan Top 10 atas LKPM Pelaku Usaha, melaksanakan pemantauan realisasi investasi penanaman modal dengan capaian output/keluaran sebesar 26 Kegiatan Usaha dari target 25 Kegiatan Usaha atau sebesar 104,00%. Terhadap realisasi keuangan hanya mencapai 76,39%, hal ini dikarenakan efisiensi anggaran dan silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran yang berkenaan berupa selisih belanja dengan pagu anggaran.

F. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Alokasi anggaran Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal sebesar Rp. 80.541.761,00 dengan realisasi sebesar Rp. 56.180.907,00 atau sebesar 69,75% dengan capaian kinerja output sebesar 100,00%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan anggaran sebesar Rp. 80.541.761,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 56.180.907,00 atau sebesar 69,75%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah penyusunan laporan capaian jumlah perizinan dan non perizinan yang diterbitkan tahun 2025, penyusunan laporan jumlah persetujuan bangunan Gedung (PBG) tahun 2025, penyusunan laporan jumlah nomor induk berusaha (NIB) tahun 2025 dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%. Terhadap realisasi keuangan hanya mencapai 69,75%, hal ini dikarenakan adanya perbedaan harga di SIPD dengan ecatalog, juga adanya kebijakan efisiensi penggunaan anggaran sehingga disesuaikan dengan kebutuhan.



3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Iklim, Investasi, dan Pelayanan Prima	Meningkatnya Peluang Investasi	Jumlah Kajian Pemetaan Potensi Investasi	1 Kajian	1 Kajian	100%
			Jumlah Promosi / Pameran yang diikuti	3 Event	7 Event	350%
		Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri	955 M	4.717 M *	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Tingkat Ketepatan Waktu Perizinan	1.360 NIB	5.119 NIB	376,39%
			Indeks Kepuasan Masyarakat (rata-rata/tahun)	85	95,12	111,90%

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1.	DPMPSTP masih dibebankan target penerimaan retribusi PBG sedangkan sesuai dengan ketentuan baik PP 6 tahun 2021, Permendagri 138 tahun 2017 maupun Perpres 97 tahun 2014 seharusnya tidak di bebaskan target penerimaan retribusi PBG	Diusulkan kiranya anggaran target penerimaan retribusi PBG dialihkan ke Dinas Teknis (Dinas PUPR)
2.	Masih adanya Pelayanan perizinan dari OPD Teknis yang belum bergabung di MPP Kabupaten Muara Enim	Penempatan petugas pelayanan perizinan OPD Teknis di MPP Kabupaten Muara Enim

5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

1. Peringkat Terbaik I Kategori Sekretariat/ Badan/Dinas Atas Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025



12. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA OLEH DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Alokasi Anggaran Pendapatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Adalah Sebesar **Rp. 742.000.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah)** terealisasi sebesar **Rp. 482.126.500,- (Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)** atau 64.98%

Alokasi Anggaran belanja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **72.755.603.011.30,- (Tujuh Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Ribu Sebelas Rupiah Tiga Puluh Sen)** dan terealisasi sebesar **Rp. 65.153.657.805 (Enam Puluh Lima Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah)** atau 89.55% dan kinerja keluaran (output) sebesar 98,78% Persen dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Operasional

Belanja Operasi dialokasikan sebesar **Rp. 62.743.724.531,30 (Enam Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah Tiga Puluh Sen)** terealisasi sebesar **Rp. 55.265.716.804,00,- (Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah)** atau 88,08 % yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, Belanja Hibah dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp. 10.011.878.480,00,- (Sepuluh Milyar Sebelas Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah)** terealisasi sebesar **Rp. 9.887.941.001,00,- (Sembilan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Satu Rupiah)** atau 98,76% Persen yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi asset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2026 Dinas **Kepemudaan dan Olahraga** Kabupaten Muara Enim melaksanakan **4** program dan **15** kegiatan, dan **41** Sub kegiatan yaitu:



A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Alokasi anggaran untuk program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp 15.033.080.951,53 (Lima Belas Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah Lima Puluh Tiga Sen)** dengan realisasi sebesar **Rp. 12.136.450.073 (Dua Belas Milyar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupiah)** atau **80,73%** Persen program ini terdiri dari 15 kegiatan, dan 43 Sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 27.932.100,00,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.041.904 atau sebesar 78,91%. adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah dokumen RKA – SKPD Dengan capaian output/ keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 31.302.700,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.080.507 atau sebesar 86,51%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah dokumen perubahan RKA SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- c. Subkegiatan Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 33.204.100,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.843.211 atau sebesar 80,84% Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah dokumen DPA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- d. Subkegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 32.746.700,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.968.722 atau sebesar 76,26%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah dokumen perubahan DPA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- e. Subkegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp 46.107.200,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.031.002 atau sebesar 78,15%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah capaian kinerja dan ikhtisar



realisasi kinerja SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen

- f. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 47.115.100,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.158.295 atau sebesar 66,13% Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah tersedianya Laporan Capaian Kinerja dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp 7.590.437.024,53 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.605.888.115 (Unaudited) atau sebesar 73,85%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji ASN dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp 26.289.900,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.213.893 atau sebesar 50,26%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen
- c. Subkegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp 14.668.300,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.666.799 atau sebesar 59,09%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan semesteran dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp 85.553.786,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 73.311.315 atau sebesar 85,69%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp



33.199.350,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.272.600 atau sebesar 88,17%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

- b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 964.311.049,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 924.064.401 atau sebesar 95,83%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jenis perlengkapan kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- c. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 189.744.355,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 116.391.760 atau sebesar 61,34%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah bahan logistik kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar Rp. 36.761.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.697.000 atau sebesar 75,34%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis barang cetak dan penggandaan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- e. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 14.400.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.060.000 atau sebesar 28,19%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- f. Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar Rp. 44.907.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.210.000 atau sebesar 4,92%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- g. Subkegiatan Penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 601.859.100,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 509.685.644 atau sebesar 84,69%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.



5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp 276.562.005,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 185.650.775 atau sebesar 67,13%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Lanjutan Pembangunan gedung kantor dengan capaian output/keluaran 100 persen.
- b. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp 3.000.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.970.065.000 atau sebesar 99,00%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Lanjutan Pembangunan gedung kantor dengan capaian output/keluaran 100 persen.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar Rp.8.590.400,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.8.000.000 atau sebesar 93,13%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dokumen bermaterai dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik sebesar Rp. 854.829.972,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 676.202.241 atau sebesar 79,10%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian output/keluaran 100 persen.
- c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 81.220.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 32.745.000 atau sebesar 40,32%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah peralatan kantor yang diperbaiki dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- d. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar 867.120.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 775.120.000 atau sebesar 89,39%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan waktu penyediaan jasa



keamanan kantor dan jasa kebersihan kantor dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

7. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sebesar Rp. 9.219.600,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.081.889 atau sebesar 65,97%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

B. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Alokasi anggaran untuk program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan sebesar Rp 4.537.542.171,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.822.015.062 atau 62,19% program ini terdiri dari 2 kegiatan, dan 5 Subkegiatan sebagai berikut.

1. Penyadaran , Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Wirausaha Muda Pemula Dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota.

- a. Subkegiatan Koordinasi , Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda bagi Wirausaha Pemula tingkat Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 951.204.900,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 771.936.275 atau sebesar 81,15%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah pelatihan manajemen kewirausahaan pemuda dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/ atau berjasa dalam memajukan potensi Pemuda dengan anggaran sebesar Rp 2.084.302.600,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 748.425.645 atau sebesar 35,91%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah yang menerima penghargaan pemuda dengan realisasi capaian output/keluaran sebesar 100 persen.



- c. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan pengembangan kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 199.226.580,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.175.513.541 atau sebesar 88,10%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda dengan realisasi capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

2. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota

- a. Subkegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat Kabupaten / Kota dengan anggaran sebesar Rp 1.096.578.511,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 952.496.902 atau sebesar 86,86%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah organisasi kepramukaan tingkat Daerah yang meningkat kapasitasnya dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Koordinasi sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.206.229.580,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp.173.642.699 atau sebesar 84,20% adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah organisasi kepemudaan yang di fasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

C. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Alokasi anggaran untuk program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan sebesar Rp 52.557.110.448,77 dengan realisasi sebesar Rp. 49.582.903.252 atau 94,34% program ini terdiri dari 5 kegiatan, dan 11 Subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota



- a. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi Penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana olahraga ditingkat Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 34.809.753.145,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 33.759.920.965 atau sebesar 96,98%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat Kabupaten/Kota yang tersedia dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh satuan pendidikan dasar dengan anggaran sebesar Rp 1.122.697.360.00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 969.822.850 atau sebesar 86,38%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Subkegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 1.065.711.684,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 892.037.719 atau sebesar 83,70%. Adapun output/keluaran pada subkegiatan ini adalah jumlah kejuaraan olahraga multieven dan singleeven tingkat Kabupaten/Kota dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Keikutsertaan anggota kontingen Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga dengan anggaran sebesar Rp.4.342.549.249,73 dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.762.922.931 atau sebesar 86,65%. Adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah jumlah peserta pada penyelenggaraan kejuaraan tingkat Kabupaten/Kota dengan capaian output/keluaran 100 persen.



3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

- a. Subkegiatan Pemusatan Latihan Daerah, yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (Sport Science) dengan anggaran sebesar Rp. 165.033.600,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.312.502 atau sebesar 2,61%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah pemusatan latihan daerah yang berkualitas berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (Sport Science) dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan olahraga prestasi Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 776.361.898,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 352.240.450 atau sebesar 45,38%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah atlet berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- c. Subkegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga bagi yang berprestasi dan/ berjasa dalam memajukan olahraga Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 253.272.050,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 178.338.693 atau sebesar 70,41%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah pemberian penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/ atau berjasa dalam memajukan olahraga dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

4. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

- a. Subkegiatan Peningkatan kerjasama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga terkait (HIBAH KONI) dengan anggaran sebesar Rp 9.049.996.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.049.996.000 atau sebesar 100%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pengembangan organisasi keolahragaan dengan capaian output/keluaran sebesar 0 persen.

5. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi



- a. Subkegiatan Pemasalan Olahraga dan Penyelenggaraan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional dan internasional dengan anggaran sebesar Rp. 648.577.511,33 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 326.002.725 atau sebesar 50,26%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olahraga tradisional di masyarakat capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Pengembangan Olahraga Wisata Tantangan dan Petualangan dengan anggaran sebesar Rp 137.444.650,36 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 104.776.292 atau sebesar 76,23%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- c. Subkegiatan Pemanfaatan Olahraga Tradisional Dalam Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp. 185.713.300,35 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 182.432.125 atau sebesar 98,23%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olahraga wisata, tantangan dan petualangan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

D. Program Pengembangan Kapasitas Pramuka

Alokasi anggaran untuk program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan sebesar Rp 627.869.440,00 dengan realisasi sebesar Rp. 612.289.418 atau 97,52% program ini terdiri dari 1 kegiatan, dan 2 Subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

- a. Subkegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan tingkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 177.869.440,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 162.289.418 atau sebesar 91,24%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah laporan kegiatan kepramukaan tingkat Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan (Hibah Pramuka) dengan anggaran sebesar Rp 450.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 450.000,000 atau sebesar 100%. Adapun output/keluaran dari



subkegiatan ini adalah Jumlah organisasi yang berpartisipasi dalam kegiatan kepramukaan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	48%	55 %	55 %
			Indeks Partisipasi Olahraga	18%	76 %	76 %

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1.	a. Subkegiatan Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD indikator jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD capaiannya <80% dikarenakan Keterlambatan, Efisiensi dan Penyesuaian Harga Barang pada saat Pembelian Contoh Pembelian ATK (Pembelian berdasarkan E- Katalog) b. Subkegiatan koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD dan indikator jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD yang disediakan yang capaiannya < 80 % dikarenakan Keterlambatan, Efisiensi dan Penyesuaian Harga Barang pada saat Pembelian Contoh Pembelian ATK (Pembelian berdasarkan E-Katalog)	Pada Subkegiatan yang mengalami kurang dari 80 % kedepannya akan dilakukan percepatan dan pelaksanaan kegiatan serta evaluasi program Kegiatan yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga



No	Permasalahan	Solusi
	c. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD indikator adalah jumlah jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disediakan yang capaiannya < 80 % dikarenakan Keterlambatan, Efisiensi dan Penyesuaian Harga Barang pada saat Pembelian Contoh Pembelian ATK (Pembelian berdasarkan E-Katalog) d. Subkegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah indikator jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disediakan yang capaiannya < 80 % dikarenakan Keterlambatan, Efisiensi dan Penyesuaian Harga Barang pada saat Pembelian Contoh Pembelian ATK (Pembelian berdasarkan E-Katalog) e. Subkegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN indikator adalah jumlah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN yang disediakan yang capaiannya < 80 % solusinya adalah dikarnakan disesuaikan dengan Jumlah Pegawai yang ada (adanya beberapa pegawai pindah tugas dan Pensiun) f. Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD indikator adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD yang capaiannya < 80 % dikarenakan Keterlambatan, Efisiensi dan Penyesuaian Harga Barang pada	



No	Permasalahan	Solusi
	saat Pembelian Contoh Pembelian ATK (Pembelian berdasarkan E-Katalog) g. Subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD indikator adalah jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD yang capaiannya <80%, dikarenakan Keterlambatan, Efisiensi dan Penyesuaian Harga Barang pada saat Pembelian Contoh Pembelian ATK (Pembelian berdasarkan E-Katalog) h. Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang capaiannya < 80 % dikarenakan Keterlambatan, Efisiensi dan Penyesuaian Harga Barang pada saat Pembelian Contoh Pembelian ATK (Pembelian berdasarkan E-Katalog) i. Subkegiatan Sosialisasi Peraturan perundang undangan adalah jumlah laporan Sosialisasi Peraturan perundang undangan yang capaiannya < 80 % dikarenakan Keterlambatan, Efisiensi dan Penyesuaian Harga Barang pada saat Pembelian Contoh Pembelian ATK (Pembelian berdasarkan E-Katalog). j. Subkegiatan penyediaan bahan logistic kantor indikator jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan yang capaiannya < 80 % dikarenakan	

No	Permasalahan	Solusi
	Keterlambatan, Efisiensi dan Penyesuaian Harga Barang pada saat Pembelian k. Subkegiatan Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan indikator adalah jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan yang capaiannya <80% dikarenakan Keterlambatan, Efisiensi dan Penyesuaian Harga Barang pada saat Pembelian. l. Subkegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dengan indikator adalah jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan yang capaiannya < 80 % dikarenakan Efisiensi dan sesuai dengan kebutuhan. m. Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu indikator adalah jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu yang capaiannya < 80 % dikarenakan realisasi yang dikeluarkan sesuai kebutuhan n. Subkegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik indikator adalah Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik yang disediakan yang capaiannya < 80 % dikarenakan Sesuai Kebutuhan. o. Subkegiatan Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor indikator adalah jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan yang capaiannya < 80 % dikarenakan	

No	Permasalahan	Solusi
	realisasi yang dikeluarkan sesuai kebutuhan p. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan jumlah sarana dan prasarana pendukung Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan capaiannya < 80 % dikarenakan Efisiensi dan Sesuai Kebutuhan. q. Subkegiatan Pemberian penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga dengan indikator adalah jumlah pemberian penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga capaiannya < 80% dikarenakan : 1. Para insan olahraga(atlit,wasit/juri dan pelatih) yang menerima penghargaan adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan atau kualifikasi dan melalui mekanisme dan ditetapkan oleh tim penilaian sesuai dengan peraturan presiden republik Indonesia nomor : 44 tahun 2014 tentang pemberian penghargaan olahraga dan peraturan menteri olahraga nomor 1684 tahun 2015 tentang persyaratan pemberian penghargaan olahraga kepada olahragawan, pembina olahraga, tentang keolahragaan dan organisasi olahraga r. pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan olahraga tersebut disatukan dengan kegiatan	



No	Permasalahan	Solusi
	launching perlindungan pekerja rentan Kabupaten Muara Enim dalam program jaminan social ketenagakerjaan. s. Subkegiatan Pemusatan latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (Sport Scince) dengan indikator jumlah pemusatan latihan daerah yang berkualitas berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (Sport Scince) dengan capainya < 80% dikarenakan : ▪ Keterbatasan waktu tenaga pengajar yang tersedia pada waktu yang telah direncanakan ▪ karena adanya kegiatan pekan olahraga provinsi (PORPROV) Sumsel ke XV dan pekan Paralympic Provinsi (PEPARPROV) Sumatera Selatan ke-V t. Subkegiatan Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi Kabupaten/kota indikatornya jumlah atlet berprestasi kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan dengan capainya <80% dikarenakan tidak adanya pertandingan kompetisi, serta jadwal kegiatan bersamaan dengan kegiatan Porprov sehingga atletnya mengikuti pertandingan di Porprov. u. Subkegiatan Pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualangan indikatornya jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi capainya <80% dikarenakan adanya Perubahan Lokasi kegiatan	



No	Permasalahan	Solusi
	yang semula didesa Pinang Banjar Kecamatan Gelumbang Menjadi di Plaza Gor Pancasila, sehingga terdapat Efisiensi Anggaran untuk sewa mobilitas, sewa peralatan (Rigging) dan perjalanan dinas. v. Subkegiatan Pemasalan olahraga dan penyelenggaraan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional dan internasional indikatornya jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olahraga tradisional di masyarakat capainya <80% dikarenakan adanya beberapa Event yang digabungkan dalam rangka Efisiensi.	

5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

DAFTAR REWARD BONUS ATLET MENDALI EMAS PERORANGAN KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA PROV.SUMSEL XV TAHUN 2025 TANGGAL 13 S.D 31 OKTOBER 2025 DI KAB. MUSI BANYUASIN

NO	CABOR	NAMA	MEDALI	NOMOR PERTANDINGAN
1	Altetik	Farhan Rahman	Emas	Lompat Jangkit
2		Farhan Rahman	Emas	Lompat Jauh
3	Billiard	Intan Asmara P	Emas	9 Bola Pelajar Putri
4		Intan Asmara P	Emas	10 Bola Pelajar Putri
5		M. Alfatih Fabrizio	Emas	9 Bola Pelajar Putra
6		M. Alfatih Fabrizio	Emas	10 Bola Pelajar Putra
7		Nyimas Khavalera Z.A	Emas	10 Bola Putri U 22
8	Catur	Arya Prima	Emas	Standar
9		Arya Prima	Emas	Cepat
10		Vija Arga Laksamana	Emas	Catur Cepat Putra Papan 1
11		Ghaly Nabil S	Emas	Cepat Papan 2



NO	CABOR	NAMA	MEDALI	NOMOR PERTANDINGAN
12	Soft Tennis	Panji Anestesiawan S.	Emas	Tunggal Putra
13	Dance Sport	Hafidzul Kamil	Emas	Line Dancesport Samba
14		Carolin Enjelika	Emas	Solo Latin Medalist
15		Viola Nailal S	Emas	Ffa Rumba
16	Gulat	Faela Adinda	Emas	Kelas 57 Kg
17	Kempo	Fadel Muhamad	Emas	Randori Putra 60 Kg
18		Asy Syifah Berinda D	Emas	Tandoku Putri Kyu Iii
19	Menembak	Qeila Sherina N	Emas	18-41 M Multirange Pi
20		Fajar Ikhla Sul Lizar	Emas	18-41 M Multirange Pa
21	Panahan	Achmad Najib A.	Emas	Recurve Putra
22	Pnjt Tebing	Abimanyu	Emas	Speed U14 Putra
23	P. Silat	Ronaldo Tri Agustinus	Emas	Kelas C
24		Faiz Ahmad	Emas	Kelas E
25		Diah Azhimah	Emas	Kelas D
26	Renang	Muhammad Zarifa	Emas	500 M Gaya Kupu-Kupu Putra
27		Muhammad Zarifa	Emas	100 M Gaya Kupu-Kupu Putra
28		Fadhel Ariq Rivananda	Emas	100 M Gaya Punggung Putra
29	Sepatu Roda	M. Rafif	Emas	10.000 M Putra
30		M. Rafif	Emas	1.000 M Putra
31	Taekwondo	M. Zaky Alphasa	Emas	Kyorugi Senior U-87
32		Azzura Berliano	Emas	Kyorugi Senior U-80
33		Alfi Nimatul H.	Emas	Kyorugi Senior U-73
34		Frety Aprilia	Emas	Kyorugi Senior U-49
35		Zahira Ananda	Emas	Kyorugi Junior U-49
36	Tinju	Deni Alha Fiqri	Emas	67-71 Kg Putra
37	Wushu	M. Fachri Adliansyah	Emas	Nandao
38		Naura Dea Anindya	Emas	Nangun Putri
39		Naura Dea Anindya	Emas	Nanquan Putri
40		Raudi Nasri Filani	Emas	Changhuon
41		M. Rakha Al Raziq	Emas	Gunshu
42		M. Rakha Al Raziq	Emas	Daoshu
43		Firand Andista	Emas	Kelas 75 Kg Putra



NO	CABOR	NAMA	MEDALI	NOMOR PERTANDINGAN
44	Tenis Meja	M. Dennis Reyen	Emas	48 Kg Putra
45		Anisa	Emas	52 Kg Putri
46		Mutiara Razika G	Emas	Tunggal Putri

**DAFTAR REWARD (BONUS) ATLET MENDALI EMAS BEREGU 2-5 ORANG
KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA PROV. SUMSEL XV TAHUN 2025
TANGGAL 13 S/D 31 OKTOBER 2025 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	CABOR	NAMA	MEDALI	NOMOR PERTANDINGAN
1	Billiard	Intan Asmara	Emas	Doble 10 Ball Bebas
2	Catur	Rizki Okto Wijaya	Emas	Beregu Putra Cepat (5)
3	Kempo	Akhmad Safar	Emas	Embu Psngn Pa Kyu 1
4		Chintia Tri Y.	Emas	Embu Psngn Pi Kyu 1
5		Asyifah Berindra	Emas	Embu Psangan Campran Kyu 3
6		Chintia Tri Y.	Emas	Embu Beregu Mix Kyu 1
7	Menembak	Salsabila Putri R	Emas	18-41 M Team Mowen (3)
8	Renang	Muhammad Zarifa	Emas	Men 4x100 M Freestyle Relay (4)
9	Spk Takraw	Akhirusaumi	Emas	Double Event Putri (3)

**DAFTAR REWARD (BONUS) ATLET MENDALI EMAS BEREGU 6-10 ORANG
KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA PROV. SUMSEL XV TAHUN 2025
TANGGAL 13 S/D 31 OKTOBER 2025 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	CABOR	NAMA	MEDALI	NOMOR PERTANDINGAN
1	Soft Tennis	Panji Anestesiawan	Emas	Beregu Putra (6 Orang)

**DAFTAR REWARD (BONUS) ATLET MENDALI EMAS BEREGU 11-20 ORANG
KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA PROV. SUMSEL XV TAHUN 2025
TANGGAL 13 S/D 31 OKTOBER 2025 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	CABOR	NAMA	MEDALI	NOMOR PERTANDINGAN
1	Sepak Takraw	Abdul Haikal Z.	Emas	Tim Beregu Putra (11 Orang)



**DAFTAR REWARD (BONUS) ATLET MENDALI PERAK PERORANGAN
KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA PROV. SUMSEL XV TAHUN 2025
TANGGAL 13 S/D 31 OKTOBER 2025 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	CABOR	NAMA	MEDALI	NOMOR PERTANDINGAN
1	Atletik	Sultan Zahira Al Zabbar	Perak	Lari 800 M
2		Sultan Zahira Al Zabbar	Perak	Lari 1500 M
3		Sabira Aktifa Hidayat	Perak	Lari 400 M
4		Randi Tri Gustira	Perak	Lari Gw.110 M
5	Billiard	Nyimas Khavalera Z.A	Perak	10 Bola Putri U 22
6		Muhammad Rozaq H	Perak	8 Bola Putra U22
7	Catur	Arya Prima	Perak	Kilat
8		Cantika Dwi P.	Perak	Catur Cepat Papan 3
9	Soft Tennis	Kannaya Firla P.	Perak	Tunggal Putri
10	Dance Sport	Hafidzul Kamil	Perak	Ffa Samba
11		Keiko Joese S	Perak	Linedancesport Rumba
12		Elif Azzahra Harahap	Perak	Solo Latin Medalis
13	Kempo	Oskos Pradana	Perak	Randori Putra 45 Kg
14		Cisa Livia Virnandyka	Perak	Randori Putri 40 Kg
15		Syafira	Perak	Randori Putri 55 Kg
16	Menembak	Alisha Nur T	Perak	18-41 M Multirange
17	Panahan	Achmad Najib A.	Perak	Eliminasi Recurve
18	Panjat Tebing	Parraz Dwi Nabilla	Perak	Perorangan Lead U14 Putri
19	Pencak Silat	Rui Jhon Stevens	Perak	Kelas D
20		Satria Sambung	Perak	Kelas F
21		Ferdy Ardiansyah	Perak	Kelas I
22	Renang	Muhammad Mirza	Perak	200 M Gaya Dada
23		Fadhel Ariq Rivananda	Perak	50 M Gaya Punggung
24		M. Sutan Maliki	Perak	Men 200 M Backstroke
25	Wushu	Raudi Nasri Filani	Perak	Jian Shu Pi
26		Keyla Belinda Putri	Perak	Nan Dao Pi
27	B. Sepeda	Artika Tri Putri	Perak	Criterium Rb U-18
28	Bl. Tangkis	Azipa Zahra P	Perak	Tunggal Dws



DAFTAR REWARD (BONUS) ATLET MENDALI PERAK BEREGU 2-5 ORANG
KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA PROV. SUMSEL XV TAHUN 2025
TANGGAL 13 S/D 31 OKTOBER 2025 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO	CABOR	NAMA	MEDALI	NOMOR PERTANDINGAN
1	Bl Tangkis	Bayu Dwi Nugraha	Perak	Ganda Dws Camp (2)
2	Soft Tennis	Kannaya Firla Putri	Perak	Beregu Putri (2 Orang)
3		Panji Anestesiawan	Perak	Ganda Putra (2)
4	Kempo	Reyhan Dwi A.	Perak	Embu Brpsngn Kyu Pa Iv (2)
5		Fadhil Raditya K.	Perak	Embu Brgu Mix Kyu Ii (4)
6		Alda Meyra H.	Perak	Embu Brgu Mix Kyu Iv (4)
7		Rahmadani Sri M.	Perak	Ken Brgu Mix Kyu V (3)
8	Tenis Lap	Dwi Rahmasari	Perak	Beregu Putri (4)
9	E-Sport	Muhammad Ardheqa	Perak	Free Fire (4)
10	Tenis Meja	Fadel Muhammad R.	Perak	Ganda Putra (2)
11		Fadel Muhammad R.	Perak	Beregu Putra (4)

DAFTAR REWARD (BONUS) ATLET MENDALI PERAK BEREGU 6-10 ORANG
KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA PROV. SUMSEL XV TAHUN 2025
TANGGAL 13 S/D 31 OKTOBER 2025 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO	CABOR	NAMA	MEDALI
1	Takraw	Nathifa Sapta G.	Perak

DAFTAR REWARD (BONUS) ATLET MENDALI PERAK BEREGU 11-20 ORANG
KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA PROV. SUMSEL XV TAHUN 2025
TANGGAL 13 S/D 31 OKTOBER 2025 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO	CABOR	NAMA	MEDALI
1	Takraw	Amalis Soleha	Perak

DAFTAR REWARD (BONUS) ATLET MENDALI PERUNGGU PERORANGAN
KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA PROV. SUMSEL XV TAHUN 2025
TANGGAL 13 S/D 31 OKTOBER 2025 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NO	CABOR	NAMA	MEDALI	NOMOR PERTANDINGAN
1	Catur	Vija Arga Laksamana	Perunggu	Catur Standar
2	Soft Tennis	M. Hafidh Atthallah A	Perunggu	Tunggal Putra
3		Miranda Syifa I.	Perunggu	Tunggal Putri
4	Dance Sport	Hafidzul Kamil	Perunggu	Pre Amateur Crj



NO	CABOR	NAMA	MEDALI	NOMOR PERTANDINGAN
5		Hafidzul Kamil	Perunggu	Ffa Jive
6		Viola Nailal S	Perunggu	Ffa Cha Cha
7		Viola Nailal S	Perunggu	1 On 1 Kids
8		Viola Nailal S	Perunggu	Linedancesport Jive
9		Keiko Joese S	Perunggu	Ffa Rumba
10		Mehrunisa Naureen	Perunggu	Solo Latin Medalis
11		Gabriella Aprillia	Perunggu	Solo Latin Medalis
12		Kalila Rifda Nurafrican	Perunggu	Solo Medalis A
13		Almahira Shakara	Perunggu	Solo Latin Medalis Ccc
14		Afika Gustiandi A	Perunggu	Solo Latin Medalis Ccc
15	Gulat	Fawazzaki Ramadam	Perunggu	Kelas 74 Bebas Putra
16		M. Raja Kenzo K	Perunggu	Kelas 57 Bebas Putra
17		Novina Agusliana	Perunggu	Kelas 53 Bebas Putri
18		Haura Insiyah	Perunggu	Kelas 76 Bebas Putri
19	Karate	Fadiyah Puspita	Perunggu	Kumite -68 Kg Putri
20		Agsal Rydo A	Perunggu	Kumite -75 Kg Putra
21	Kempo	Bahtian Rahmat	Perunggu	Randori Putra 50 Kg
22		Ahkmad Safar S	Perunggu	Randori Putra 65 Kg
23		Chintia Tri Yolanda	Perunggu	Randori Putri 45 Kg
24		Keyza Nabila A	Perunggu	Randori Putri 50 Kg
25		Resti Anggre Devi	Perunggu	Randori Putri 60 Kg
26		Rq Pradipta	Perunggu	Tandoku Putra Kyu Iii
27		Aditya Naufal Abiyyu	Perunggu	Tandoku Putra Kyu V
28		Syaqilla Raisya P.Z	Perunggu	Tandoku Putri Kyu Iv
29		Talita Shirin	Perunggu	Tandoku Putri Kyu Vi
30	P. Silat	M. Arjuna	Perunggu	Kelas A
31		Karinsah	Perunggu	Kelas G
32		Parianti	Perunggu	Kelas E
33	Renang	Muhammad Mirza	Perunggu	400 M Gaya Bebas
34		Bagas Anastiawan	Perunggu	Men 200 M Butterfly
35	Sepatu Roda	Humaidi Agha A	Perunggu	200 M Putra
36		Jhoisa Putri	Perunggu	10.000 M Putri
37	Taekwondo	Alpin Alpandowo	Perunggu	Kyorugi Junior U-48
38		Tria Sapitri	Perunggu	Kyorugi Junior U-44
39		Kirana Aqila	Perunggu	Kyorugi Junior U-46
40		Lutfia Apriani	Perunggu	Poomsae Recognized



NO	CABOR	NAMA	MEDALI	NOMOR PERTANDINGAN
41	Tenis Lapangan	Bima Taqwa	Perunggu	Tunggal Putra
42	Wushu	M. Fachri Adliansyah	Perunggu	Nan Quan Pa
43		M. Rakha Al Raziq	Perunggu	Taiji Quan Pa
44		Keyla Belinda Putri	Perunggu	Nan Gun Pi
45		Rimba Cordova	Perunggu	Jhian Shu
46		Rimba Cordova	Perunggu	Qiangsu
47		Fairus	Perunggu	Kelas 45 Kg Putra
48		M. Faisal	Perunggu	56 Kg Putra
49		Putri Maharani	Perunggu	56 Kg Putri
50		Vaniyah Shifa K	Perunggu	48 Kg Putri
51	B. Sepeda	Egytama Farendy	Perunggu	Cross Country 5,4 Km
52		Artika Tri Putri	Perunggu	Itt Rb U-18
53		Rafif Ismat Marzuq	Perunggu	Men U 18 16,8 Km
54		M. Dzahwan Alfarizi	Perunggu	Men U19-22 Itt
55		M. Dzahwan Alfarizi	Perunggu	Crtm 21 Km
56	Tenis Meja	Fawzan Aziz R	Perunggu	Tunggal Putra

**DAFTAR REWARD (BONUS) ATLET MENDALI PERUNGGU BEREGU 2-5 ORANG
KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA PROV. SUMSEL XV TAHUN 2025
TANGGAL 13 S/D 31 OKTOBER 2025 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	CABOR	NAMA	MEDALI	NOMOR PERTANDINGAN
1	Atletik	Sutan Zahir A.	Perunggu	Lari 4x100 M Putra (4 Org)
2		Kirana Larasati	Perunggu	Lari 4x400 M Putri (4 Org)
3	Billiard	Intan Asmara P	Perunggu	Doble 10 Dan 9 Ball (2 Org Pi)
4	Bulu Tangkis	Muh Satrio A	Perunggu	Beregu Putra (5)
5		Keyza Dwi Aryani	Perunggu	Beregu Putri (4)
6		Ayodya Shinta P	Perunggu	Ganda Dws Putri(2)
7	Soft Tennis	Rafael Christeven S.	Perunggu	Ganda Campuran (2)
8		M. Hafidh Atthala	Perunggu	Ganda Campuran (2)
9	Kempo	Fadhil Raditya	Perunggu	Embu Brpsngn Pa Kyu Ii (2)
10		Sapta Ibra A	Perunggu	Embu Brpsngn Kyu Vi (2)
11		Lani Putria A.	Perunggu	Embu Brpsngn Pi Kyu Ii (2)
12		Rahmadani Sri M	Perunggu	Embu Brpsngn Pi Kyu V (2)
13		Fadel Muhammad	Perunggu	Embu Psngn Mix Kyu Ii (2)
14		Alda Meyra H.	Perunggu	Embu Psngn Mix Kyu Iv (2)



NO	CABOR	NAMA	MEDALI	NOMOR PERTANDINGAN
15		Rahmadani Sri M	Perunggu	Embu Psngn Mix Kyu V (2)
16		Chintia Tri Yolanda	Perunggu	Embu Psngn Mix Kyu I (2)
17		Sapta Ibra A	Perunggu	Ken Brgu Mix Kyu Vi (3)
18	Pencak Silat	Prada Shakira	Perunggu	Ganda Putri (2)
19	Renang	Ratu Safira H.	Perunggu	Women 4x50 M Freestyle (4)
20		M.Abimanyu Darmawan	Perunggu	Men 4x100 M Mendle Relay (4)
21	Takraw	Zakia Wulandari	Perunggu	Regu Putri (5)
22		Pandu Satria W.	Perunggu	Quadrant Putra (5)
23	Taekwondo	Putri Syifa Felisya	Perunggu	Poomsae Beregu (3)
24	Tenis Lap	Imam Abdurahman	Perunggu	Beregu Putra (4)
25		Sultan Vidi A.	Perunggu	Ganda Putra (2)
26		Naila Putri F.	Perunggu	Ganda Putri (2)
27		Naila Putri F.	Perunggu	Ganda Campuran (4)
28	Basket	Raihan Adiba	Perunggu	3x3 Beregu Putra (4)
29	Tenis Meja	Raisha Alya Zhafirah	Perunggu	Ganda Putri (2)
30		Raisha Alya Zhafirah	Perunggu	Beregu Putri (4)
31	Panahan	Bintang Aryani	Perunggu	Kualifikasi Mix (2)
32		Bintang Aryani	Perunggu	Eliminasi Recurve (2)

**DAFTAR REWARD (BONUS) ATLET MENDALI PERUNGGU BEREKU 6-10 ORANG
KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA PROV. SUMSEL XV TAHUN 2025
TANGGAL 13 S/D 31 OKTOBER 2025 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	CABOR	NAMA	MEDALI
1	Takraw	Ali Ramadhon	Perunggu
2		Lorenza Dela	Perunggu
3		Febriansyah	Perunggu
4	Basket	Jovi Gani A.	Perunggu

**DAFTAR REWARD (BONUS) PELATIH MENDALI EMAS
KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA PROV. SUMSEL XV TAHUN 2025
TANGGAL 13 S/D 31 OKTOBER 2025 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	CABOR	NAMA	MEDALI
1	Atletik	M. Riyadi	Emas
2	Biliard	M. R Akhasawan	Emas
3	Catur	Azhari Hariono	Emas
4	Soft Tenis	Ogie Julika	Emas
5	Dance Sport	Disvina Permata Sari	Emas
6	Gulat	Destin Natariana	Emas



7	Kempo	Meidi Rafi Andi	Emas
8	Menembak	Fredy Julianto	Emas
9	Panahan	Wawan Priyatna	Emas
10	Panjat Tebing	Miftahur Rahmat	Emas
11	Pencak Silat	Dani Aditia	Emas
12	Renang	Yunan Fahmi	Emas
13	Sepak Takraw	Rohman Syah Putra	Emas
14	Sepatu Roda	Yuzzio Herano	Emas
15	Taekwondo	Andi Panca Saputra	Emas
16	Tinju	A. Riva'i Tuasalamony	Emas
17	Wushu	Gustami Janas	Emas
18	Tenis Meja	A Nizamudin	Emas

**DAFTAR REWARD (BONUS) PELATIH MENDALI PERAK
KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA PROV. SUMSEL XV TAHUN 2025
TANGGAL 13 S/D 31 OKTOBER 2025 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	CABOR	NAMA	MEDALI
1	Atletik	M. Riyadi	Perak
2	Biliard	M. R Akhasawan	Perak
3	Bulutangkis	Rahmat Ramadhani	Perak
4	Catur	Azhari Hariono	Perak
5	Soft Tennis	Ogie Julika	Perak
6	Dance Sport	Disvina Permata Sari	Perak
7	Kempo	Meidi Rafi Andi	Perak
8	Menembak	Fredy Julianto	Perak
9	Panahan	Wawan Priyatna	Perak
10	Panjat Tebing	Miftahur Rahmat	Perak
11	Pencak Silat	Dani Aditia	Perak
12	Renang	Yunan Fahmi	Perak
13	Sepak Takraw	Rohman Syah Putra	Perak
14	Tenis Lapangan	Deby Harfiansyah	Perak
15	Wushu	Gustami Janas	Perak
16	E-Sport	Rafly Darmawansyah	Perak
17	Balap Sepeda	Denni Susanto	Perak
18	Tenis Meja	A Nizamudin	Perak

**DAFTAR REWARD (BONUS) ATLET MENDALI PERunggu BEREKU 11-20 ORANG
KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA PROV. SUMSEL XV TAHUN 2025
TANGGAL 13 S/D 31 OKTOBER 2025 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	CABOR	NAMA	MEDALI
1	Voli Indor	Alghoni	Perunggu



**DAFTAR REWARD (BONUS) PELATIH MENDALI PERUNGGU
KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA PROV. SUMSEL XV TAHUN 2025
TANGGAL 13 S/D 31 OKTOBER 2025 DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	CABOR	NAMA	MEDALI
1	Atletik	M. Riyadi	Perunggu
2	Biliard	M. R Akhasawan	Perunggu
3	Bulutangkis	Rahmat Ramadhani	Perunggu
4	Catur	Azhari Hariono	Perunggu
5	Soft Tennis	Ogie Julika	Perunggu
6	Dance Sport	Disvina Permata Sari	Perunggu
7	Gulat	Destin Natariana	Perunggu
8	Karate	Dwiyanto	Perunggu
9	Kempo	Meidi Rafi Andi	Perunggu
10	Panahan	Wawan Priyatna	Perunggu
11	Pencak Silat	Dani Aditia	Perunggu
12	Renang	Yunan Fahmi	Perunggu
13	Sepak Takraw	Rohman Syah Putra	Perunggu
14	Sepatu Roda	Yuzzio Herano	Perunggu
15	Taekwondo	Andi Panca Saputra	Perunggu
16	Tenis Lapangan	Deby Harfiansyah	Perunggu
17	Voli Indoor	Ahmad Johan W	Perunggu
18	Wushu	Gustami Janas	Perunggu
19	Balap Sepeda	Denni Susanto	Perunggu
20	Bola Basket	Rahmad Putra	Perunggu
21	Tenis Meja	A Nizamudin	Perunggu



13. URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN OLEH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan Wajib Perpustakaan dan Kearsipan diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim. Pada Tahun 2025, alokasi belanja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim sebesar Rp 14.148.996.019,55 (Empat Belas Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Belas Rupiah, Lima Puluh Lima Sen) terealisasi sebesar Rp 13.123.436.935,00 (Tiga Belas Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) atau 92,75%, untuk membiayai belanja operasi dan belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp 11.774.529.519,55 (Sebelas Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah, Lima Puluh Lima Sen) terealisasi sebesar Rp 10.771.816.285,00 (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) atau 91,48% dan kinerja keluaran (output) sebesar 100%, yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp 2.374.466.500,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) terealisasi sebesar Rp 2.351.820.650 (Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 99,05% yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kinerja Dinas Perpustakaan dan menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim melaksanakan 5 (lima) Program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 40 (empat puluh) subkegiatan, antara lain yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 9.881.851.959,55 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah Lima Puluh Lima Sen) dengan realisasi sebesar Rp 8.950.371.973,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) atau 90,57%. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan urusan perpustakaan dengan target sebesar 100 persen dengan realisasi 100 persen yang dicapai melalui 8 (delapan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp 84.698.549 (Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 55.074.398 (Lima Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) atau 85,12%, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp 45.723.400 (Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 39.329.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau 86,02%.
- b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp 8.021.009 (Delapan Juta Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 5.895.197 (Lima Juta Delapan ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau 73,50%.
- c. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 10.954.240 (Sepuluh Juta Sembilan ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua ratus Empat Puluh Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 9.850.201 (Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Satu Rupiah) atau 89,92%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp 6.320.627.567,55 (Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah, Lima Puluh Lima Sen) dengan realisasi sebesar Rp



5.652.757.524,00 (Lima Milyar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau 89,43%.

- a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp 6.305.311.397,55 (Enam Milyar Tiga Ratus Lima Ribu Tiga ratus Sebelas Juta Tiga ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Lima Puluh Lima Sen) dan realisasi keuangan sebesar Rp 5.640.619.624 (Lima Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) atau 89,46%.
- b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp 15.316.170 (Lima Belas Juta Tiga Ratus Enam Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 12.137.900 (Dua Belas Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau 79,25%.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sebesar Rp 48.552.500 (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 47.798.441 (Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) atau 98,45%

- a. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp 48.552.500 (Empat Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 47.798.441 (Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) atau 98,45%.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Perangkat Daerah sebesar Rp 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 33.650.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau 61,18%.

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 33.650.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau 61,18%.



- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp 711.645.074 (Tujuh Ratus Sebelas Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Empat Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 681.243.320 (Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) atau 95,73%.**
- a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 9.337.700 (Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 8.035.000 (Delapan Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 86,05%.
 - b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 29.447.707 (Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 21.557.000 (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau 73,20%.
 - c. Subkegiatan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp 73.978.267 (Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 62.408.351 (Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) atau 84,36%.
 - d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp 16.457.100 (Enam Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 13.784.000 (Tiga Belas Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) atau 83,76%.
 - e. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp 582.424.300 (Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 575.458.969 (Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) atau 98,80%.
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp 1.814.456.500 (Satu Miliar Delapan Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam**



Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.795.353.150 (Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) atau 98,95%.

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp 850.000.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 849.999.150 (Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) atau 100%.
- b. Subkegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp 140.625.000 (Seratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 135.720.002 (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Dua Rupiah) atau 96,51%
- c. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp 269.341.500 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 269.040.000 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) atau 98,40%.
- d. Subkegiatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 554.500.000 (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 544.593.998 (Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) atau 98,21%.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp 380.500.435 (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 224.785.353 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) atau 59,08%.

Kegiatan ini untuk memenuhi kebutuhan operasional dan administrasi perkantoran yang dicapai melalui Subkegiatan sebagai berikut ;

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp 3.550.000 (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp



3.550.000 (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau 100%

- b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp 121.830.435 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 71.475.353 (Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) atau 58,67%
- c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp 255.120.000 (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 149.760.000 (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) atau 58,70%

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp 485.245.234 (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 459.709.787 (Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau 94,74%.

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp 50.024.911 (Lima Puluh Juta Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 42.125.787 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) atau 84,21%.
- b. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp 380.000.000 (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 379.034.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) atau 99,75%
- c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya dengan anggaran sebesar Rp 55.220.323 (Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) dan realisasi



keuangan sebesar Rp 38.550.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau 69,81%.

9. Kegiatan Penataan Organisasi

- a. Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan anggaran sebesar Rp. 1.116.000 (Satu Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 0 atau 0%.

B. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini dilaksanakan untuk ;

1. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 642.258.452 (Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 615.046.700 (Enam Ratus Lima Belas Juta Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) atau 95,76%.

- a. Subkegiatan Pembinaan Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar diseluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional Perpustakaan dengan anggaran sebesar Rp 82.728.448 (Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 81.271.910 (Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah) atau 98,24%
- b. Subkegiatan Pengembangan Perpustakaan ditingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 64.150.804 (Enam Puluh Empat Juta Seratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 62.551.900 (Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau 97,51%.
- c. Subkegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 23.666.152 (Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Dua Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 22.267.449 (Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah) atau 94,09%.
- d. Subkegiatan Peningkatan kapasitas tenaga pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp



102.728.695 (Seratus Dua Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 100.304.891 (Seratus Juta Tiga Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) atau 97,64%.

- e. Subkegiatan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 99.378.153 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 83.157.800 (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau 83,68%.
- f. Subkegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan anggaran sebesar Rp 269.606.200 (Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Ribu Dua Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 265.492.750 (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 98,47%.

2. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 3.182.657.585 (Tiga Miliar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 3.136.481.086 (Tiga Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah) atau 98,55%.

- a. Subkegiatan Pemilihan Duta Baca/ Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 79.610.785 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 74.075.099 (Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) atau 93,05%.
- b. Subkegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial dengan anggaran sebesar Rp 160.418.600 (Seratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 159.306.014 (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Ribu Empat Belas Rupiah) atau 99,31%.



- c. Subkegiatan Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp 2.700.000.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 2.693.927.450 (Dua Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) atau 99,78%.
- d. Subkegiatan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca dengan anggaran sebesar Rp 70.465.100 (Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 67.133.800 (Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau 95,27%
- e. Subkegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Khusus serta Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 172.163.100 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 142.038.723 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau 82,50%.

C. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini dilaksanakan untuk menyelamatkan/melindungi naskah kuno melalui diakuisisi atau dialih media (digitalisasi) atau terdaftar yang ada di Kabupaten Muara Enim yang keberhasilannya ditandai dengan cakupan naskah kuno yang diakuisisi.

Alokasi anggaran untuk Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno sebesar Rp 53.961.088 (Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 51.645.460 (Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah) atau 95,71% . Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan untuk melestarikan naskah kuno yang ada di Kabupaten Muara Enim

- a. Pengembangan, pengelolaan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan di dayagunakan dengan anggaran sebesar Rp 53.961.088 (Lima



Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Delapan Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 51.645.460 (Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah) atau 95,71%.

D. Program Pengelolaan Arsip

Program ini dilaksanakan untuk :

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Arsip sebesar Rp 317.757.835 (Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 304.528.516 (Tiga Ratus Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah) atau 95,84%. Program ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) subkegiatan sebagai berikut :

- 1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 188.759.975 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 182.283.225 (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) atau 96,57%.**
 - a. Subkegiatan Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis dengan anggaran sebesar Rp 66.437.375 (Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 60.836.670 (Enam Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah) atau 91,57%.
 - b. Subkegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 122.322.600 (Seratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) dan realissai keuangan sebesar Rp 121.446.555 (Seratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah) atau 99,28%.
- 2. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 37.170.960 (Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 34.759.194 (Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau 93,51%.**



- a. Subkegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis dengan anggaran sebesar Rp 37.170.960 (Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 34.759.194 (Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau 93,51%.
3. **Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota sebesar Rp 91.826.900 (Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 87.486.097 (Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau 95,27%.**
 - a. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 91.826.900 (Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 87.486.097 (Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau 95,27%.

E. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Alokasi anggaran untuk Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip sebesar Rp 70.509.100 (Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Seratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 65.562.200 (Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) atau 92,98%. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 2 (dua) subkegiatan sebagai berikut :

1. **Pemusnahan Arsip dilingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki retensi dibawah 10 tahun.**
 - a. Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan Arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun dengan anggaran sebesar Rp 43.288.900 (Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 40.354.600 (Empat Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) atau 93,22%



2. Autentikasi Arsip statis dan Arsip hasil alih media kabupaten/kota

- a. Penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip dengan anggaran sebesar Rp 27.220.200 (Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah) dan realisasi keuangan sebesar Rp 25.207.600 (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) atau 92,61%

3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Perpustakaan dan Meningkatkan Tata kelola dan akreditasi Pengelola Kearsipan Kabupaten Muara Enim	1.1 Meningkatkan Indeks Literasi Masyarakat dan Tingkat Kegemaran Membaca	1.1.1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	69,99	8,03	8,03
		1.1.2 Indeks Tingkat Kegemaran Membaca (TGM)	61,24	65,35	65,35
	2.1 Meningkatkan Sistem administrasi Dan pengelolaan Kearsipan daerah	2.1.1 Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	74,5	64,72	64,72

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1.	Bidang Perpustakaan : a. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas b. Fasilitas layanan perpustakaan belum memadai c. Kesadaran literasi masyarakat masih harus ditingkatkan d. Kurangnya evaluasi & monitoring layanan Perpustakaan e. Minimnya alokasi dana untuk layanan perpustakaan keliling.	Solusi dari Permasalahan di Bidang Perpustakaan dengan cara : 4. Mengusulkan penambahan anggaran khusus layanan keliling di APBD. 5. Rekrut dan latih tenaga pustakawan tambahan, khususnya untuk layanan keliling; 6. Meningkatkan fasilitas perpustakaan misalnya dengan cara Perluas koleksi buku fisik & digital.



No	Permasalahan	Solusi
		7. Program literasi berkelanjutan, Kampanye membaca bersama sekolah & komunitas 8. Bangun sistem monitoring & evaluasi seperti Survei kepuasan pemustaka
2.	Bidang Kearsipan : a. Pengelolaan arsip fisik belum optimal b. Kapasitas dan SDM pengelola kearsipan belum optimal c. Kesadaran unit kerja terhadap pentingnya pengelolaan arsip belum merata d. Kurangnya monitoring dan evaluasi terjadwal atas layanan pengelolaan Arsip e. Masih perlu adanya Bimbingan Teknis Kearsipan untuk peningkatan pengetahuan dalam pengelolaan kearsipan di masing-masing Perangkat Daerah. f. Regulasi yang masih perlu dibuat. g. JIKN dan Srikandi perlu di publikasikan dan promosi agar berjalan sesuai perkembangan. h. Peran Arsiparis masih sangat dibutuhkan dalam pembinaan dan pengelolaan kearsipan.	Untuk meningkatkan pengelolaan arsip OPD di lingkup Pemerintah Kabup Muara Enim dengan cara : 1. Implementasi sistem klasifikasi dan penataan arsip terintegrasi berbasis digital kearsipan untuk mempermudah pencarian, pelacakan, dan monitoring jumlah arsip. 2. Pelatihan dan sertifikasi arsiparis untuk SDM administrasi dan kearsipan 3. Sosialisasi, pedoman, dan SOP kearsipan yang wajib dipatuhi oleh semua OPD, termasuk sistem retensi, penyimpanan, dan pemusnahan 4. Buat sistem pemantauan dan evaluasi berkala.

5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

No	Nama Penghargaan	Tahun						Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Lomba Bertutur Tingkat Provinsi Sumatera Selatan	-	-	-	-	Juara I	Juara I	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Lomba Bertutur Nasional Tingkat Sekolah Dasar	-	-	-	-	-	Juara II	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



3.4. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. URUSAN PERIKANAN OLEH DINAS PERIKANAN

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan diselenggarakan oleh perangkat daerah Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim. Pada Tahun 2025, alokasi belanja Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim sebesar **Rp. 23.187.911.273,00 (Unaudited)** dan terealisasi sebesar **Rp.19.769.811.327,00 (Unaudited)** atau **85,26%**, dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar **Rp. 22.423.770.623,00 (Unaudited)** terealisasi sebesar **Rp. 19.014.876.327,00 (Unaudited)** atau **84,79%** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja modal dialokasikan sebesar **Rp. 764.140.650,00 (Unaudited)** dan terealisasi sebesar **Rp. 754.935.000,00 (Unaudited)** atau sebesar **98,79%**, yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi asset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim melaksanakan 4 Program, 18 Kegiatan, dan 43 Sub Kegiatan yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 8.748.457.935,00 (Unaudited)** dengan realisasi sebesar **Rp. 5.938.838.330,00 (Unaudited)** atau **67,88%**. Program tersebut terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 23 (dua puluh empat) subkegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar **Rp.22.392.335,00 (Unaudited)** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.8.696.400,00 (Unaudited)** atau sebesar **38,84%**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 3 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.



- b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp.81.507.333,00 **(Unaudited)** dan realisasi keuangan sebesar Rp.54.359.722,00 **(Unaudited)** atau sebesar 66,69%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp.23.548.650,00 **(Unaudited)** dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.050.000,00 **(Unaudited)** atau sebesar 17,20%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp.13.558.650,00 **(Unaudited)** dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.398.000,00 **(Unaudited)** atau sebesar 32,44%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- e. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp.16.888.650,00 **(Unaudited)** dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.350.000 **(Unaudited)** atau sebesar 25,76%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- f. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp.26.802.099,00 **(Unaudited)** dan realisasi keuangan sebesar Rp.7.816.400,00 **(Unaudited)** atau sebesar 29,16%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



sebanyak 5 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp.6.552.074.308,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.4.428.498.969,00 (**Unaudited**) atau sebesar 67,59%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 75 orang/bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 66,66%.
- b. Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp.22.306.507,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.18.104.874,00 (**Unaudited**) atau sebesar 81,16%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 20 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp.60.523.483,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.23.903.364,00 (**Unaudited**) atau sebesar 39,49%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD sebanyak 14 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp.67.500.000,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.61.500.000,00 (**Unaudited**) atau sebesar 91,11%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan sebanyak 8 orang dengan capaian output/keluaran sebesar 93,00%.



4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp.11.430.713,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.9.577.600,00 (**Unaudited**) atau sebesar 83,79%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 9 paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp.263.535.645,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.255.375.600,00 (**Unaudited**) atau sebesar 96,90%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 5 paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp.48.359.907,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.33.301.907,00 (**Unaudited**) atau sebesar 68,86%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah paket peralatan rumah tanggayang disediakan sebanyak 29 paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp.90.180.552,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.55.984.025,00 (**Unaudited**) atau sebesar 62,08%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 3 paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- e. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp.28.438.200,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.20.442.300,00 (**Unaudited**) atau sebesar 71,88%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan sebanyak 1 paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- f. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan dengan anggaran sebesar Rp.35.520.000,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar



Rp.21.100.000,00 (**Unaudited**) atau sebesar 59,40%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan sebanyak 13 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- g. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp.382.414.300,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.346.922.487,00 (**Unaudited**) atau sebesar 90,72%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 91,32%.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp.6.496.000,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.5.800.000,00 (**Unaudited**) atau sebesar 100,00%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 1 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp.188.994.825,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.122.414.945,00 (**Unaudited**) atau sebesar 64,80%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 4 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp.22.732.800,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.22.732.800,00 (**Unaudited**) atau sebesar 98,69%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan sebanyak 12 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp.295.920.000,00 (**Unaudited**) dan



realisasi keuangan sebesar Rp.42.800.000,00 (**Unaudited**) atau sebesar 14,46%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 48 laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 63,13%.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp.287.422.978,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.192.926.161,00 (**Unaudited**) atau sebesar 67,12%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya sebanyak 12 Unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.194.081.233,00 (**Unaudited**) atau sebesar 97,04%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 Unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

B. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebesar **Rp. 2.547.661.858,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.505.719.557,00** atau **98,35%**. Program tersebut terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) subkegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- a. Subkegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan dengan anggaran sebesar Rp. 196.356.487,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 183.198.050,00 (**Unaudited**) atau sebesar 93,30%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam



Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.

- b. Subkegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dengan anggaran sebesar Rp.2.040.713.087,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.026.943.987,00 (**Unaudited**) atau sebesar 99,33%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia sebanyak 910 Unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.

2. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil dengan anggaran sebesar Rp.249.337.949,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.241.306.460,00 (**Unaudited**) atau sebesar 96,78%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya sebanyak 50 orang dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil dengan anggaran sebesar Rp.27.834.952,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.25.814.500,00 (**Unaudited**) atau sebesar 92,74%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya sebanyak 13 kelompok dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.
- c. Subkegiatan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha dengan anggaran sebesar Rp. 33.419.383,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.456.560,00 (**Unaudited**) atau sebesar 85,15%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha sebanyak 10 Unit Usaha dengan capaian output/keluaran sebesar 100%

C. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar **Rp. 9.456.884.002,00** dengan realisasi sebesar **Rp.**



9.056.776.839,00 atau 95,77%. Program tersebut terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 9 (sembilan) subkegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil.

- a. Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil dengan anggaran sebesar Rp.334.957.645,00 **(Unaudited)** dan realisasi keuangan sebesar Rp.314.708.356,00 **(Unaudited)** atau sebesar 93,95%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas sebanyak 30 kelompok dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.
- b. Subkegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil dengan anggaran sebesar Rp.200.785.649,00 **(Unaudited)** dan realisasi keuangan sebesar Rp.195.109.486,00 **(Unaudited)** atau sebesar 97,17%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan sebanyak 14 kelompok dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.
- c. Subkegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha dengan anggaran sebesar Rp.39.525.495,00 **(Unaudited)** dan realisasi keuangan sebesar Rp.24.439.094,00 **(Unaudited)** atau sebesar 61,83%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usahanya sebanyak 10 kelompok dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

2. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Subkegiatan Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.66.236.583,00 **(Unaudited)** dan realisasi keuangan sebesar Rp.63.867.381,00 **(Unaudited)** atau sebesar 96,42%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah rekomendasi perizinan berusaha bagi pembudidayaan ikan kecil yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sebanyak 50 rekomendasi dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

3. Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.



- a. Subkegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.237.372.782,00 **(Unaudited)** dan realisasi keuangan sebesar Rp.222.310.600,00 **(Unaudited)** atau sebesar 93,65%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.304.652.430,00 **(Unaudited)** dan realisasi keuangan sebesar Rp.290.844.359,00 **(Unaudited)** atau sebesar 95,47%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan sebanyak 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.5.638.279.848,00 **(Unaudited)** dan realisasi keuangan sebesar Rp.5.413.015.958,00 **(Unaudited)** atau sebesar 96,00%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 15 unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Subkegiatan Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat dengan anggaran sebesar Rp.2.324.587.339,00 **(Unaudited)** dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.234.113.454,00 **(Unaudited)** atau sebesar 96,11%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat sebanyak 150 Orang dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- e. Subkegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat dengan anggaran sebesar Rp.310.486.231,00 **(Unaudited)** dan realisasi keuangan sebesar Rp.298.368.151,00 **(Unaudited)**



atau sebesar 98,87%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi sebanyak 10 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 98,87%.

D. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar **Rp. 2.434.907.478,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.268.476.601,00** atau **93,16%**. Program tersebut terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) subkegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil.

- a. Subkegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.430.831.022,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.399.784.270,00 (**Unaudited**) atau sebesar 92,79%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan risiko sebanyak 1 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

2. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.

- a. Subkegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Resiko dengan anggaran sebesar Rp.477.165.058,00 (**Unaudited**) dan realisasi keuangan sebesar Rp.430.722.625,00 (**Unaudited**) atau sebesar 90,27%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko sebanyak 20 unit usaha dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

3. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Subkegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah



Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.703.978.703,00 **(Unaudited)** dan realisasi keuangan sebesar Rp.645.543.650,00 **(Unaudited)** atau 91,70%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 18000 ton suplier dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- b. Subkegiatan Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.822.932.695,00 **(Unaudited)** dan realisasi keuangan sebesar Rp.792.426.056,00 **(Unaudited)** atau 96,29%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 20 pelaku usaha dengan capaian output/keluaran sebesar 100%

3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan	Meningkatnya usaha budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya	4,00 (9.236,53 ton)	4,17 (9.625,90 ton)	104,21
		Meningkatnya usaha perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap	1,00 (3.501,77 ton)	1,01 (3.516,68 ton)	100,42
		Meningkatnya kelompok usaha pengolahan hasil perikanan	Produksi produk hasil olahan perikanan	6,84 (1.135,71 ton)	7,31 (1.214,19 ton)	106,91

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

-

5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Pada Tahun 2025 Belum Ada Penghargaan dan Prestasi yang diterima oleh Dinas Perikanan Kabupaten Muara Enim.



2. URUSAN PARIWISATA OLEH DINAS PARIWISATA

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Tahun Anggaran 2025 dengan alokasi dana sebesar Rp. 17.580.562.277,- dan terealisasi Rp.13.242.460.271,- atau 75,32% sebesar dengan rincian sebagai berikut

A. Belanja Operasional sebesar Rp. 9.819.706.993,- realisasi

B. Belanja Modal sebesar Rp. 7.474.048.200,-

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2025 Dinas Pariwisata Kabupaten Muara Enim melaksanakan 5 Program, 14 Kegiatan, dan 35 Sub Kegiatan yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi sebesar Rp. 12.443.644.129,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.906.860.222,- atau 71,58%

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 198.961.412.100,- (Seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus Rupiah)** Dengan Realisasi sebesar **Rp. 160.493.203,- (Seratus Enam Puluh Juta Empat ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga Rupiah)**

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD alokasi sebesar **Rp. 27.677.400,- (Dua Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 25.135.240,- (Dua Puluh Lima Jut seratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh Rupiah)** atau sebesar **90,82%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah **Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**

b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD alokasi sebesar **Rp. 30.970.829,- (Tiga Puluh Juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh sembilan Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 21.954.520,- (Dua Puluh satu juta sembilan ratus lima puluh empty ribu lima ratus dua puluh Rupiah)** atau sebesar **70,89%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah **Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan**



Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD alokasi sebesar **Rp. 29.334.700,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tuga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 21.311.104,- (Dua Puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu seratus empat Rupiah)** atau sebesar **72,65%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah **Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD** dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD alokasi **Rp. 27.558.100,- (Dua Puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan ribu seratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 22.654.299,- (Dua Puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan Rupiah)** atau sebesar **82,21%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah **Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD** dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD alokasi sebesar **Rp. 40.109.100,- (Empat Puluh Juta sertaus sembilan ribu seratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 30.535.360,- (Tiga Puluh Juta Lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh Ratus Rupiah)** atau sebesar **76,13%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah **Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD** dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**
- f. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi sebesar **Rp. 46.311.283,- (Empat Puluh Enam Juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus delapa puluh tiga Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 38.902.680,- (Tiga Puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu enam ratus delapan puluh Rupiah)** atau sebesar **89,82%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah **Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja**



Perangkat Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar 100%

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 7.090.117.759,- (Tujuh miliar sembilan puluh juta seratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh sembilan Rupiah)** Dengan Realisasi sebesar **Rp. 4.030.399.179,- (Empat Miliar Tiga puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah)**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN alokasi sebesar **Rp. 7.018.424.459,- (Tujuh Miliar Delapan Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.975.244.333,- (Tiga Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua ratus Empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah)** atau sebesar **56,64%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah **Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Hasil Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** dengan capaian Output/Keluaran sebesar **100%**
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD alokasi sebesar **Rp. 35.232.800,- (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Delapan Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 27.566.838,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan ratus tiga puluh delapan Rupiah)** atau sebesar **78,24%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah **Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD** dengan capaian Output/Keluaran sebesar **100%**
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD alokasi sebesar **Rp. 36.460.500,- (Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 27.588.008 ,- (Dua Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Rupiah)** atau sebesar **75,67%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah **Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/**



Semesteran SKPD dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar 100%

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 24.405.700,- (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Rupiah)** Dengan Realisasi sebesar **Rp. 14.890.000,- (Empat Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)**
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)** Dengan Realisasi sebesar **Rp. 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)**
 - a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi alokasi sebesar **Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 29.500.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** atau sebesar **49,17%** adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah **Tersedianya Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Laporan Hasil Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar 100%**
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 1.011.435.505,- (Satu Miliar Sebelas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Rupiah)** Dengan Realisasi **Rp.936.911.975,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor alokasi sebesar **Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 17.197.000,- (Tujuh Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)** atau sebesar **74,77%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah **Tersedianya alat/kelengkapan listrik yang disediakan dan Laporan Hasil Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar 100%**



- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi sebesar **Rp. 209.888.305,- (Dua Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 171.338.500,- (Serastus Tujuh Puluh satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus Rupiah)** atau sebesar **81,63%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah **Tersedianya Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia dan Laporan Hasil Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar **100%**
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bakar Logistik Kantor alokasi sebesar **Rp. 76.419.300,- (Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 57.139.000,- (Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** atau sebesar **74,77%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah **Tersedianya Jenis Logistik Kantor yang tersedia dan Laporan Hasil Penyediaan Bahan Logistik Kantor** dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar **100%**
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan alokasi sebesar **Rp. 21.641.300,- (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 18.931.700,- (Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah)** atau sebesar **87,48%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah **Tersedianya Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan dan Laporan Hasil Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan** dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar **100%**
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD alokasi sebesar **Rp. 680.486.600,- (Enam Ratus Delapan Puluh Juta Empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 672.305.775,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)** atau sebesar **98,80%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah **Tersedianya Laporan Notulen Rapat, Laporan Perjalanan Dinas dan Laporan Hasil Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar **100%**



6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 5.462.442.270,- (Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Rupiah)** Dengan Realisasi **Rp. 5.334.088.000,- (Lima Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Puluh Delapan Rupiah)**
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya alokasi sebesar **Rp. 561.923.850,- (Lima Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 554.525.000, (Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)** atau sebesar **98.68%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Laporan Hasil Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan capaian Output/Keluaran sebesar **100%**
 - b. Sub Kegiatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar **Rp. ,- (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Ratus)** dengan realisasi sebesar **Rp. 489.326.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)** atau sebesar **91.74%** adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya alokasi sebesar **Rp. 3.696.000.000,- (Tiga Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.620.937.000,- (Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)** atau sebesar **97.97%** adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersedianya Gedung yang dibangun dan Laporan Hasil Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan capaian Output/Keluaran sebesar **100%**
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sebesar **Rp. 671.145.300,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 669.300.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)** atau sebesar **99.73%** adapun



output/keluaran dari subkegiatan ini adalah tersedianya pengadaan Mebel dengan capaian output/keluaran sebesar 100%

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 682.500.400,- (Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Empat Ratus Rupiah)** Dengan Reliasasi **Rp. 624.899.524,- (Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat alokasi sebesar **Rp. 3.550.400,- (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.170.000(Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)** atau sebesar **89.29%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini **adalah Tersedianya Materai yang terbeli dan Laporan Hasil Penyediaan Jasa Surat Menyurat** dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar **100%**
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik alokasi sebesar **Rp. 135.120.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp.115.999.524,- (Seratus Lima Belas Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat Rupiah Rupiah)** atau sebesar **85,85%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini **adalah Tersedianya Pembayaran Langganan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Laporan Hasil Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar **100%**
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi sebesar **Rp. 14.990.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 14.340.000,- (Empat Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)** atau sebesar **95.92%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini **adalah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diperbaiki dan Laporan Hasil Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor** dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar **100%**
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi sebesar **Rp. 528.840.000,- (Lima Ratus Dua Puluh**



Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 491.390.000,- (Empat Ratus Sembilan Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)** atau sebesar **92,92%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah **Tersedianya Penjaga Kantor dan Petugas Kebersihan Kantor dan UPTD dan Laporan Hasil Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar **100%**

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 312.690.000,- (Tiga Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)** Dengan Realisasi **Rp. 214.685.875,- (Dua Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan alokasi sebesar **Rp. 159.230.000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 138.785.875,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)** atau sebesar **87,16%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah **Tersedianya Kendaraan Kendaraan dinas/operasioanal yang dipelihara, Jumlah Kendaraan yang diperbaharui perizinannya dan Laporan Hasil Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar **100%**
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya alokasi sebesar **Rp. 153.460.000,- (Seratus Lima Puluh Tufa Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 75.900.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** atau sebesar **49,46%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah **Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dan Laporan Hasil Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar **100%**

B. Program Peningkatan Daya Tarik Daya Destinasi Pariwisata



1. Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 2.765.866.840,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.721.446.521,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah)**
 - a. Sub Kegiatan Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota alokasi sebesar **Rp. 81.999.765,- (Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 79.970.165,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah)** atau sebesar **97,52%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersedianya Penetapan Daya Tarik Wisata dan Laporan Hasil Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dengan capaian Output/Keluaran sebesar **100%**
2. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 2.573.867.486,- (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.535.463.706,- (Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah)**
 - a. Sub Kegiatan Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota alokasi sebesar **Rp. 2.573.867.486,- (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.535.463.706,- (Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah)** atau sebesar **98,51%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersedianya Perencanaan Kawasan Strategis dan Laporan Hasil Perencanaan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota dengan capaian Output/Keluaran sebesar **100%**
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar **Rp. 2.573.867.486,- (Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga**



Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 2.535.463.706,- (Dua Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah)** atau sebesar **94,52%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah **Tersedianya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Laporan Hasil Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar **100%**

3. Kegiatan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 109.999.589,- (Seratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 106.012.650,- (Seratus Enam Juta Dua Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)**
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata dengan anggaran sebesar **Rp. 109.999.589,- (Seratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 106.012.650,- (Seratus Enam Juta Dua Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)** atau sebesar **96,38%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah **Tersedianya Usaha Pariwisata yang dibina dan diawasi dan Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata** dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar **100%**

C. Program Pemasaran Pariwisata

1. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 1.707.045.070,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.456.226.424,- (Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Empat Rupiah)**
 - a. Sub Kegiatan Pengauatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri dengan anggaran sebesar **Rp. 129.999.350,- (Seratus Dua**



Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 127.313.696,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tigas Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah)** atau sebesar **97,93%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini **adalah Terlaksananya Produk Promosi Media Informasi Pariwisata dan Laporan Hasil Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri** dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar **100%**

- b. Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar **Rp. 299.999.820,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 298.151.150,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah)** atau sebesar **97,93%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini **adalah Terlaksananya Kegiatan Penyambutan 5 Even Tertentu dan Laporan Hasil Fasilitas Kegiatan Pemasaran Baik Dalam dan Luar Negeri Kabupaten/Kota** dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar **100%**
- c. Sub Kegiatan Peningkatan Kerja sama dan Kemitraan Pariwisata baik dalam dan luar negeri dengan anggaran sebesar **Rp. 1.157.046.000,- (Satu Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 917.918.178,- (Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)** atau sebesar **79,33%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini **adalah Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata dan Laporan Hasil Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri** dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar **100%**

D. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual



1. Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 694.974.544,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 653.159.200,- (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah)**
 - a. Sub Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Pemasaran dengan anggaran sebesar **Rp. 494.974.544,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 467.393.281,- (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah)** atau sebesar **94,43%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini **adalah Partisipasi dan Terlaksananya Kegiatan Bazaar Ekraf dan Laporan Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran** dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar **100%**
 - b. Sub Sub Kegiatan Fasilitas Kekayaan Intelektual dengan anggaran sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 185.765.919,- (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah)** atau sebesar **92,98%**. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini **adalah Terlaksananya Fasilitas Kekayaan Intelektual dan Laporan Hasil Fasilitas Kekayaan Intelektual** dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar **100%**

E. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Alokasi Anggaran sebesar **Rp. 119.999.900,- (Seratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 102.478.822,- (Seratus Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah)**
 - a. Sub Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif **Rp. 199.999.900,- (Seratus Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 102.478.822,- (Seratus**



Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 85,40%. adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Tersedianya Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata dan Laporan Hasil Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata dengan capaian Ouput/Keluaran sebesar 100%

3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pembangunan Pariwisata	-Jumlah kunjungan wisatawan -Rata-rata lama tinggal Wisatawan	-Jumlah kunjungan wisatawan -Rata-rata lama tinggal Wisatawan	45.000 Orang 2 Hari	90%	90%
2.	Meningkatnya Ekonomi Kreatif	Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki HAKI	20 Orang	90%	90%

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1.	Masih Kurangnya Pegawai / ASN di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Penambahan Pegawai/ ASN di Lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2.	Pengelolaan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif Kabupaten Muara Enim belum optimal akibat keterbatasan SDM, sarana prasarana, promosi, integrasi UMKM, serta keterbatasan anggaran dan koordinasi lintas sektor.	Melalui pengembangan destinasi prioritas, peningkatan kualitas SDM, penguatan promosi dan event, integrasi ekonomi kreatif dengan pariwisata, serta sinergi lintas OPD dan pemangku kepentingan.

5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Dinas Pariwisata dan Ekraf kabupaten Muara Enim sukses menggelar **Kompetisi Desa dengan Potensi Wisata** pertama kalinya di Sumatera Selatan pada Oktober 2025. Kegiatan ini bertujuan menggali serta mengembangkan potensi wisata di desa-desa di Kabupaten Muara Enim.



Hasil kompetisi:

🏆 **Juara I:** *Desa Pagar Dewa* (Kecamatan Lubai Ulu)

🏆 **Juara II:** *Desa Penyandingan* (Kecamatan Semende Darat Laut)

🏆 **Juara III:** *Desa Petar Luar* (Kecamatan Sungai Rotan)
(*plus beberapa kategori tambahan seperti Desa dengan potensi terbaik dan partisipasi warga*)

Walaupun bukan penghargaan formal, pelibatan aktif Kabupaten Muara Enim dalam event pariwisata seperti **Festival Sriwijaya XXXIII 2025** dengan pertunjukan seni daerah turut memberikan pengakuan terhadap usaha pelestarian budaya dan potensi pariwisata lokal – yang merupakan bagian dari capaian Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui pembinaan kesenian.



3. URUSAN PERTANIAN OLEH DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN, DAN DINAS PERKEBUNAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan pilihan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 92.090.407.172,92** dan terealisasi sebesar **Rp. 81.950.453.533,00** atau sebesar **88,99%** dan kinerja keluaran (*output*) fisik sebesar 96,73% dan non fisik sebesar 99,82%, dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

Belanja operasi dialokasikan sebesar **Rp 87.567.584.932,92** terealisasi sebesar **Rp 78.527.663.843,00** atau **89,68%** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja modal dialokasikan sebesar **Rp 4.522.822.240,00** terealisasi sebesar **Rp 3.422.789.690,00** atau **75,68%** yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi asset Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dalam hal ini penyerapan anggaran terkendala pada Belanja Modal Sarana dan Prasarana Rumah Potong Hewan yang tidak dapat direalisasikan dikarenakan pengadaan tanah baru dilaksanakan pada APBD perubahan Tahun 2025 oleh Dinas Perumahan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Muara Enim sehingga Rumah Potong Hewan (RPH) belum bisa dibangun dan pengadaan sarana dan prasarannya pun belum dapat direalisasikan.

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2025, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 program, 18 kegiatan dan 50 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp. 33.220.589.458,00** dengan realisasi sebesar **Rp 26.991.869.663,00** atau **81,25%** dengan kinerja output program sebesar **100%**. Realisasi output kinerja sebesar 100% ini dikarenakan ada beberapa subkegiatan yang pengeluarannya sesuai dengan kebutuhan dinas dan adanya efisiensi anggaran.



Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan yang didalamnya memuat 25 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. **Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.** Alokasi Anggaran sebesar Rp 57.715.800,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 49.208.000,00 atau 85,26% dengan kinerja output kegiatan sebesar **100%**. Dengan rincian 6 (enam) subkegiatan sebagai berikut:
 - a. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Alokasi Anggaran sebesar Rp 5.205.000,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 5.025.000,00 atau 96,54% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
 - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, Alokasi Anggaran sebesar Rp 48.840.000,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 4.840.000,00 atau 100% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
 - c. SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, Alokasi Anggaran sebesar Rp 27.460.000 Dengan Realisasi sebesar Rp 21.019.000,00 atau 76,54% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Penyerapan anggaran kurang maksimal karena belanja Jasa Pengadministrasi Pengolah dan Penginput RKA/RKAP dan DPA/DPPA SKPD masih teranggarkan selama 12 bulan.
 - d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD, Alokasi Anggaran sebesar Rp 9.770.000,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 9.283.000,00 atau 95,02% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
 - e. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Alokasi Anggaran sebesar Rp 2.684.800,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 1.300.000,00 atau 48,42% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan laporan-laporan pertanggungjawaban dan capaian kinerja dinas disesuaikan dengan kebutuhan dan disampaikan dengan softcopy/*paperless* melalui wa atau link google.
 - f. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran sebesar Rp 7.756.000,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 7.741.000,00 atau 99,81% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.



- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.** Alokasi Anggaran sebesar Rp 29.324.930.872,93 Dengan Realisasi sebesar Rp 23.538.012.435,00 atau 80,72% dengan kinerja output kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian 3 (tiga) subkegiatan sebagai berikut:
- a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Alokasi Anggaran sebesar Rp 29.268.982.622,93 Dengan Realisasi sebesar Rp 23.487.317.435,00 atau 79,13% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Kurang optimalnya penyerapan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN dikarenakan saat penganggaran Gaji Pokok dan TPP PPPK dianggarkan sebanyak 8 Bulan sedangkan pada saat pelaksanaannya hanya dicairkan sebanyak 4 Bulan.
 - b. Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Alokasi Anggaran sebesar Rp 24.191.250,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 24.075.000,00 atau 99,52% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
 - c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD, Alokasi Anggaran sebesar Rp 31.757.000,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 26.620.000,00 atau 83,82% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Pada subkegiatan tersebut masih terdapat anggaran belanja jasa tenaga operaator komputer sebanyak 2 orang selama 12 bulan sedangkan pelantikan PPPK TMT bulan september 2025
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.** Alokasi Anggaran sebesar Rp 50.422.500,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 38.191.547,00 atau 75,74% dengan kinerja output kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian 1 (satu) subkegiatan sebagai berikut:
- a. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Alokasi Anggaran sebesar Rp 50.422.500,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 38.191.547,00 atau 75,74% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Kurang optimlanya realisasi keuangan sub kegiatan ini dikarenakan adanya penyesuaian nilai premi Mobil atau kendaraan Dinas yang diajukan dalam asuransi, nilai premi yang diambil meupakan nilai pokok pada mobil.



4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Alokasi Anggaran sebesar Rp 110.000.000,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 57.150.000,00 atau 51,95% dengan kinerja output kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian 1 (satu) subkegiatan sebagai berikut:

- a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Alokasi Anggaran sebesar Rp 110.000.000,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 57.150.000,00 atau 51,95% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Kurang optimalnya penyerapan keuangan dikarenakan adanya perubahan kebijakan yang sebelumnya anggaran tersebut untuk biaya pelatihan dan Bimbingan Teknis Penyuluh Pertanian dan Perubahan Nomenklatur Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian ditarik ke Kementerian Pertanian RI.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Alokasi Anggaran sebesar Rp 1.128.788.172,92 Dengan Realisasi sebesar Rp 1.039.989.254,00 atau 92,13% dengan kinerja output kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian 7 (tujuh) subkegiatan sebagai berikut:

- a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Alokasi Anggaran sebesar Rp 91.785.400,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 91.544.400,00 atau 99,74% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Alokasi Anggaran sebesar Rp 507.294.960,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 505.024.160,00 atau 99,55% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Alokasi Anggaran sebesar Rp 91.081.600,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 54.767.340,00 atau 60,13% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Kurang optimalnya capaian kinerja keuangan dikarenakan adanya efisiensi terhadap barang yang di beli dan beberapa produk tertentu sudah tidak diproduksi lagi oleh produsen barang.
- d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Alokasi Anggaran sebesar Rp 7.536.900,00 Dengan Realisasi



sebesar Rp 7.520.000,00 atau 99,78% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.

- e. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan, Alokasi Anggaran sebesar Rp 13.920.000,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 12.800.000,00 atau 91,95% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
- f. Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, Alokasi Anggaran sebesar Rp 38.341.600,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 8.160.000,00 atau 21,28% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp 30.181.600,00 dikarenakan kegiatan rapat internal yang di hadiri pegawai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim tidak memperoleh anggaran makan minum rapat, kecuali apabila terdapat peserta rapat dari luar Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim. Sedangkan untuk kegiatan yang mengundang peserta rapat dari luar dinas untuk tahun 2025 sedikit.
- g. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Alokasi Anggaran sebesar Rp 378.828.200,99 Dengan Realisasi sebesar Rp 360.173.354,00 atau 95,08% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp 766.188.900,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 709.964.649,00 atau 92,66% dengan kinerja output kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian 3 (tiga) subkegiatan sebagai berikut:

- a. Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Alokasi Anggaran sebesar Rp 328.720.000,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 301.499.999,00 atau 91,72% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Pengadaan Mebel, Alokasi Anggaran sebesar Rp 437.468.900,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 408.464.650,00 atau 93,37% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp 631.423.250,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 499.555.886,00 atau 79,12% dengan kinerja



output kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian 3 (tiga) subkegiatan sebagai berikut:

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alokasi Anggaran sebesar Rp 4.404.000,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 4.400.000,00 atau 99,91% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Alokasi Anggaran sebesar Rp 290.259.250,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 235.435.886,00 atau 81,11% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Belum optimalnya realisasi keuangan sub kegiatan ini dikarenakan pada APBD Perubahan Tahun 2025 telah dianggarkan kegiatan jasa pemasangan Wifi untuk 5 BPP dalam Kabupaten Muara Enim Namun sampai dengan akhir tahun belum adanya kepastian apakah operasional BPP tetap ditanggung APBD atau dikembalikan ke pusat.
- c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor, Alokasi Anggaran sebesar Rp 336.760.000,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 259.720.000,00 atau 77,12% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. dikarenakan pada APBD Perubahan Tahun 2025 DTPHP telah menganggarkan untuk Outsourcing kebersihan dan keamanan baik di Kantor maupun Lapangan Sebanyak 4 Bulan tetapi sampai dengan akhir tahun belum ada petunjuk lebih lanjut dan masih terdapat anggaran PPPK masih dinggaran sebanyak 10 Bulan

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp 1.151.119.468,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 1.059.797.892,00 atau 92,07% dengan kinerja output kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian 4 (empat) subkegiatan sebagai berikut:

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Alokasi Anggaran sebesar Rp 258.550.000,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 205.755.892,00 atau 79,58% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Belum optimalnya realisasi keuangan dikarenakan pengeluaran disesuaikan dengan kebutuhan pajak kendaraan tahun 2025 dan efisiensi anggaran



- b. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Alokasi Anggaran sebesar Rp 70.280.000,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 51.651.500,00 atau 73,49% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Belum optimalnya realisasi keuangan dikarenakan efisiensi terhadap belanja Pemeliharaan Peralatan Computer dan Personal Computer.
- c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Alokasi Anggaran sebesar Rp 770.000.000,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 764.990.500,00 atau 99,35% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Alokasi Anggaran sebesar Rp 52.289.468,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 37.400.000,00 atau 71,52% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Belum optimalnya realisasi keuangan dikarenakan efisiensi terhadap belanja Pemeliharaan Alat Pendingin berupa AC kantor dan Lapangan.

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tersebut adalah :

- a) Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen
- b) Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen
- c) Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen
- d) Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD sebanyak 1 dokumen
- e) Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 1 laporan
- f) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 1 laporan
- g) Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 180 orang/bulan



- h) Jumlah dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 2 dokumen
- i) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semsetran SKPD sebanyak 3 laporan
- j) Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD sebanyak 1 dokumen
- k) Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan sebanyak 1 paket
- l) Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 12 orang
- m) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket
- n) Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket
- o) Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 1 paket
- p) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan sebanyak 1 dokumen
- q) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 1 laporan
- r) Jumlah pengadaan kendaraan dinas oprasional dan lapangan sebanyak 1 unit.
- s) Jumlah pengadaan mebel berupa kursi eselon sebanyak 12 buah, meja rapat sebanyak 2 unit, meja 1 biro sebanyak 12 buah dan kursi rapat sebanyak 85 buah.
- t) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 1 laporan
- u) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 1 laporan
- v) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 83 unit
- w) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 unit
- x) Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 22 unit



- y) Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 28 unit.
- z) Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 1 laporan

B. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Alokasi anggaran untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar **Rp. 16.395.415.475,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 15.466.198.971,00** atau **94,33%** dengan kinerja output fisik sebesar 97,16% dan nonfisik sebesar 99,96%. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian terdiri dari 4 (empat) kegiatan yang di dalamnya memuat 8 (delapan) Subkegiatan, yaitu sebagai berikut:

- 1. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.** Alokasi Anggaran sebesar Rp 1.027.984.280,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 959.199.076,00 atau 93,31% dengan kinerja output kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian 3 (tiga) subkegiatan sebagai berikut:
 - a. Subkegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Speseifik Lokasi. Alokasi Anggaran sebesar Rp 80.248.700,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 69.284.785,00 atau 86,34% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Pada sub kegiatan ini Belanja Makanan dan Minuman Rapat dengan pagu anggaran sebesar 6.300.000 tidak direalisasikan dikarenakan pelaksanaan rapat cukup menggunakan anggaran makan dan minum rutin.
 - b. Subkegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian. Alokasi Anggaran sebesar Rp 543.685.380,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 516.226.982,00 atau 94,95% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
 - c. Subkegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Benih/Biji. Alokasi Anggaran sebesar Rp 404.050.200,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 373.687.309,00 atau 92,49% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
- 2. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewangan Kabupaten/Kota.** Alokasi Anggaran sebesar Rp 5.904.893.900,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 5.484.753.240,00 atau 92,88% dengan kinerja output



kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian 3 (tiga) subkegiatan sebagai berikut:

- a. Subkegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman. Alokasi Anggaran sebesar Rp 437.380.200,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 432.855.922,00 atau 98,97% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman. Alokasi Anggaran sebesar Rp 5.167.460.500,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 4.769.708.641,00 atau 92,30% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman. Alokasi Anggaran sebesar Rp 300.053.200,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 282.188.677,00 atau 94,05% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.

3. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi Anggaran sebesar Rp 313.980.200,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 262.187.613,00 atau 83,50% dengan kinerja output kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian 1 (satu) subkegiatan sebagai berikut:

- a. Subkegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil. Alokasi Anggaran sebesar Rp 313.980.200,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 262.187.613,00 atau 83,50% dengan kinerja output program sebesar 100%. Hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran pada belanja diserahkan kepada masyarakat berupa pembelian bibit padi, pupuk dan racun tanaman.

4. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Ternak Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi Anggaran sebesar Rp 1.686.180.795,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 1.583.804.718,00 atau 93,93% dengan kinerja output kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian 1(satu) subkegiatan sebagai berikut:

- a. Subkegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan. Alokasi Anggaran sebesar Rp 1.686.180.795,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 1.583.804.718,00 atau 93,93% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.



5. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Lain.

Alokasi Anggaran sebesar Rp 7.462.376.3005,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 7.176.254.324,00 atau 96,17% dengan kinerja output kegiatan sebesar 98,94%. Dengan rincian 2 (dua) subkegiatan sebagai berikut:

- a. Subkegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain. Alokasi Anggaran sebesar Rp 6.969.278.900,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 6.708.268.865,00 atau 96,26% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 98,86%. Kurang optimalnya realisasi fisik dan keuangan disebabkan oleh pada belanja persediaan yang diserahkan kepada Masyarakat berupa bantuan untuk budidaya ternak ayam, ada 1 (satu) kelompok tani yang tidak direalisasikan yaitu kelompok tani Desa Muara Gula Baru kecamatan ujanmas dikarenakan tidak memenuhi sebagai kelompok petani penerima manfaat sesuai dengan hasil survey dan verifikasi Calon penerima dan Calon Lokasi (CPCL) yang dilaksanakan.
- b. Subkegiatan Pengadaan Benih Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain. Alokasi Anggaran sebesar Rp 493.097.400,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 467.885.459,00 atau 94,89% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian adalah :

- a) Jumlah dokumen Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi sebanyak 1 dokumen
- b) Jumlah dokumen Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sebanyak 1 dokumen
- c) Jumlah dokumen Perbanyakan benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk benih/bii sebanyak 1 dokumen.
- d) Jumlah dokumen Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman sebanyak 1 dokumen
- e) Jumlah dokumen Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman sebanyak 1 dokumen.
- f) Jumlah SDG Tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian sebanyak 1 varietas unggul baru (VUB)



- g) Jumlah dokumen pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil sebanyak 1 dokumen
- h) Jumlah dokumen Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan sebanyak 1 laporan
- i) Jumlah dokumen pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain sebanyak 1 dokumen.
- j) Jumlah dokumen pengadaan benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain sebanyak 1 dokumen

C. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Alokasi anggaran untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian sebesar **Rp. 38.808.231.955,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 36.179.536.100,00** atau **93,23%** dengan kinerja output program sebesar **88,74 %**. Dalam program ini terdapat kegiatan dengan pencapaian realisasi kurang maksimal yaitu kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian pada subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan dengan pagu anggaran Rp. 1.184.385.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 154.360.197,00 atau 13,03%. Hal ini disebabkan karena pada Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasional Rumah Potong Hewan Belanja Modal Alat-alat peternakan yang dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- belum dapat direalisasikan karena lokasi/lahan milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk pembangunan Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) masih dalam proses pengadaan tanah oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Muara Enim. Pada subkegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung lainnya dengan pagu anggaran Rp. 371.312.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 295.007.991,00 atau 79,45%. Hal ini disebabkan oleh Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan dan Belanja Jasa Administrasi masih teranggarkan selama 12 bulan yang seharusnya hanya 8 bulan karena per September 2025 sudah dilaksanakan pelantikan PPPK.

Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang didalamnya memuat 8 (delapan) Subkegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. **Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian.** Alokasi Anggaran sebesar Rp 16.473.663.150,00 Dengan Realisasi sebesar



Rp 15.103.133.985,00 atau 91,68% dengan kinerja output kegiatan sebesar 80,70%. Dengan rincian 2 (dua) subkegiatan sebagai berikut:

- a. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana dan Pendukung Pertanian Lainnya. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 371.312.500,00 dengan Realisasi sebesar Rp 295.007.991,00 atau 79,45% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Hal ini disebabkan oleh Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan dan Belanja Jasa Administrasi masih teranggarkan selama 12 bulan yang seharusnya hanya 8 bulan karena per September 2025 sudah dilaksanakan pelantikan PPPK. Selain itu juga terdapat efisiensi anggaran pada belanja cetak blangko curah hujan sebesar Rp. 1.755.000,00 dan belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp. 2.919.000,00.
- b. Subkegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 2.240.991.650,00 dengan Realisasi sebesar Rp 1.987.173.933,00 atau 88,67% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 254. 697.147,00 Hal ini disebabkan perbedaan harga benih padi pada DPA dan harga di e-katalog dimana harga e-katalog jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga pada DPA.
- c. Subkegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan. Alokasi Anggaran sebesar Rp. 567.300.600,00 dengan Realisasi sebesar Rp 503.595.287,00 atau 88,77% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
- d. Subkegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B. Alokasi Anggaran sebesar Rp 13.294.058.400,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 12.317356.774,00 atau 92,65% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Pada subkegiatan ini terdiri atas belanja yang diserahkan kepada masyarakat senilai Rp 13.015.443.500,00 dan realisasi Rp 11.925.023.969,00 terdapat sisa anggaran senilai Rp 1.090.419.531,00 dikarenakan perbedaan harga yang direncanakan dengan harga yang terdapat pada e-catalog.



2. **Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian.** Alokasi Anggaran sebesar Rp 22.334.568.805,00 dengan Realisasi sebesar Rp 21.076.402.121,00 atau 94,37% dengan kinerja output kegiatan sebesar 97%. Dengan rincian 5 (lima) subkegiatan sebagai berikut:
- a. Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Embung Pertanian. Alokasi Anggaran sebesar Rp 755.789.700,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 741.228.176,00 atau 98,40% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
 - b. Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani. Alokasi Anggaran sebesar Rp 17.994.097.080,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 17.792.626.912,00 atau 98,88% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 99,12%. Pada Belanja kepada masyarakat terdapat 1 (satu) kegiatan fisik yang tidak direalisasikan yaitu Pembangunan Jalan Usaha Tani Ataran Pucuk Matang Desa Padang Bindu Kecamatan Panang Enim sebesar Rp. 183.190.080,00 karena telah dilaksanakan pada APBD Perubahan Tahun 2025 dengan lokasi yang sama dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00.
 - c. Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani. Alokasi Anggaran sebesar Rp 2.400.296.825,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 2.385.737.036,00 atau 99,39% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
 - d. Subkegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan. Alokasi Anggaran sebesar Rp 1.184.385.200,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 154.360.197,00 atau 13,03% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 15%. Hal ini dikarenakan Hal ini disebabkan karena lokasi lahan milik Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk pembangunan Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) masih dalam proses pengadaan tanah oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Muara Enim sehingga untuk belanja Modal Alat-alat peternakan untutuk prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) sebesar Rp. 1.000.000.000,- tidak dapat direalisasikan.

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian tersebut adalah :

- 1). Jumlah Dokumen koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya sebanyak 1 Dokumen



- 2). Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian sebanyak 1 dokumen.
- 3). Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan sebanyak 1 Dokumen.
- 4). Jumlah Dokumen Lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, Kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan Cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B yang dikelola sebanyak 1 dokumen
- 5). Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara sebanyak 6 unit
- 6). Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara sebanyak 114 unit
- 7). Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi sebanyak 27 unit (18 Irigasi dan 9 sumur Bor).
- 8). Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara sebanyak 2 unit

D. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Alokasi anggaran untuk Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebesar **Rp. 933.204.700,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 842.991.698,00** atau **90,33 %** dengan kinerja output program sebesar **100%**. Terdapat kegiatan dengan pencapaian realisasi keunagan kurang maksimal yaitu subkegiatan Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan yaitu sebesar 84,67%.

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang didalamnya memuat 3 (tiga) Subkegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. **Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota.** Alokasi Anggaran sebesar Rp 620.315.100,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 563.458.175,00 atau 90,83% dengan kinerja output kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian 2 (dua) subkegiatan sebagai berikut:
 - a. Subkegiatan Pelaksanaan Manajemen Resiko Zoonosis. Alokasi Anggaran sebesar Rp 41.662.200,00 Dengan Realisasi



sebesar Rp 41.134.020,00 atau 98,73% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.

- b. Subkegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi Anggaran sebesar Rp 578.652.900,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 522.324.155,00 atau 90,27% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.

2. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner. Alokasi Anggaran sebesar Rp 523.702.500,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 314.098.700,00 atau 59,98% dengan kinerja output program sebesar 100%. Dengan rincian 1 (satu) subkegiatan sebagai berikut:

- a. Subkegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan. Alokasi Anggaran sebesar Rp 129.903.300,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 124.596.978,00 atau 95,92% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Pengawasan unit usaha Produk Hewan. Alokasi Anggaran sebesar Rp 182.986.300,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 154.936.547,00 atau 84,67% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Rendahnya realisasi keuangan dikarenakan pada kegiatan Gerakan Pasar Murah (GPM) atau Operasi Pasar Murah (OPM) yang pelaksanaannya seharusnya 96 kali hanya dilaksanakan Cuma 42 kali karena penganggaran dilakukan pada saat pergeseran di bulan April 2025 sehingga untuk merealisasikannya hanya pada saat atau dapat dihitung setelah anggaran tersebut ditetapkan.

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner kegiatan tersebut adalah :

- a) Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Resiko Zoonosis sebanyak 1 Dokumen
- b) Jumlah Dokumen Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 laporan
- c) Jumlah Dokumen Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan sebanyak 1 Dokumen
- d) Jumlah Dokumen Pengawasan unit usaha Produk Hewan sebanyak 1 Dokumen.



E. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Alokasi anggaran untuk Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian sebesar **Rp 416.552.800,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 383.520.249,00** atau **92,07 %** dengan kinerja output program sebesar **100%**.

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian terdiri dari 1 (satu) kegiatan yang didalamnya memuat 3 (tiga) Subkegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Kabupaten/ Kota. Alokasi Anggaran sebesar Rp 416.552.800,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 383.520.245,00 atau 92,07 % dengan kinerja output kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian 3 (tiga) subkegiatan sebagai berikut:

- a. Subkegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Alokasi Anggaran sebesar Rp 218.640.900,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 189.732.566,00 atau 86,78% dengan kinerja output program sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Alokasi Anggaran sebesar Rp 197.911.900,00 Dengan Realisasi sebesar Rp 193.787.677,00 atau 97,92% dengan kinerja output program sebesar 100%.

Keluaran (*output*) dari pelaksanaan Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian tersebut adalah :

- a) Jumlah Dokumen Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebanyak 1 Dokumen.
- b) Jumlah Dokumen Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebanyak 1 Dokumen

F. Program Penyuluhan Pertanian

Alokasi anggaran untuk Program Penyuluhan Pertanian sebesar **Rp. 2.318.412.785,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.086.336.850,00** atau **90,07%** dengan kinerja output sebesar **100%**. Program Penyuluhan Pertanian terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 4 (Empat) Sub Kegiatan, yaitu :

- 1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian.** Alokasi anggaran untuk kegiatan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian sebesar Rp.



2.316.412.785,00 dengan realisasi sebesar Rp. **2.228.398.192.086.336.8505,00** atau 90,07% dengan kinerja output kegiatan sebesar 100%. Terdiri atas 4 (Empat) subkegiatan yaitu:

- a. Subkegiatan Peningkatan kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa. Alokasi anggaran untuk Program Penyuluhan Pertanian sebesar Rp. 938.747.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 737.762.530,00 atau 78,59% dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%. Kurang realisasi keuangan disebabkan oleh pada pertemuan teknis yang direncanakan dilaksanakan selama 2 hari hanya direalisasikan selama 1 hari karena adanya pemangkasan uang transport dan jumlah peserta pertemuan teknis tersebut.
- b. Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa. Alokasi anggaran untuk Program Penyuluhan Pertanian sebesar Rp. 129.737.625,00 dengan realisasi sebesar Rp. 128.999.775,00 atau 99,43% dengan kinerja output sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian. Alokasi anggaran untuk Program Penyuluhan Pertanian sebesar Rp. 691.607.360,00 dengan realisasi sebesar Rp. 679.594.545,00 atau 98,26 % dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%.
- d. Subkegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian. Alokasi anggaran untuk Program Penyuluhan Pertanian sebesar Rp. 556.320.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 539.980.000,00 atau 97,06 % dengan kinerja output subkegiatan sebesar 100%

3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Presentase Capaian Kinerja (%)
1	Tujuan: Bertambahnya kontribusi PDRB Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Presentase Produksi Padi, Sayur-sayuran, Buah-buahan, Daging dan Telur			
		Produksi Padi	1,50%	1,500%	100,00%
		Produksi Sayuran	5,50%	7,02%	127,64%
		Produksi Buahhan	5%	4,81%	96,20%
	Saran:	Produksi Daging	3%	3,09%	103,00%



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Presentase Capaian Kinerja (%)
	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Produksi Telur	3%	3,30%	110,00%

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1.	Alih Fungsi Lahan Sawah ke Lahan Non Pertanian	Pemanfaatan lahan pekarangan melalui kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman dan direncanakan penyusunan Perda LP2B pada Tahun 2026
2.	Pertumbuhan Produksi dan Produktivitas Belum Optimal	Analisis tentang kerentanan dampak perubahan iklim, inventarisasi dan peta wilayah yang terkena dampak, penyusunan road map rencana aksi adaptasi dan tindakan perubahan iklim dan lingkungan. Selain itu perlu disiapkan berbagai teknologi adaptasi yang baik seperti varietas unggul, teknologi pengelolaan lahan dan air, pemupukan dan paket teknologi adaptasi perubahan iklim.
3.	Daya Saing Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura Rendah	Peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan kelompok tani di desa dan kecamatan sehingga dengan semakin optimalnya kelompok tani, penyediaan produk pertanian secara berkelanjutan dan peningkatan peluang pasar dapat diwujudkan
4.	Permasalahan di bidang peternakan meliputi belum tersedia nya Rumah Potong Hewan, adanya penyakit hewan menular, kurangnya ketersediaan benih/bibit ternak	Melaksanakan kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan memberikan penjaminan peredaran ternak di masyarakat melalui belanja yang diserahkan kepada masyarakat berupa ternak sapi, kambing, itik, dan ayam kepada poktan sehingga dapat menunjang pemenuhan produk hasil peternakan secara berkelanjutan. Selain



No	Permasalahan	Solusi
		itu, Pembangunan Rumah Potong Hewan berserta Sarana dan prasarana pendukungnya akan dianggarkan kembali pada tahun 2024-2026 secara bertahap

5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Muara Enim meraih penghargaan sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Pelepasan varietas Jambat Teras sebagai Varietas Unggul Tanaman Padi Inbrida dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia
2. Surat Keputusan Pelepasan varietas Selebur Rimbe sebagai Varietas Unggul Tanaman Padi Inbrida dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia

DINAS PERKEBUNAN

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian diselenggarakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim. Pada Tahun 2025, alokasi Belanja Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim sebesar **Rp.40.496.490.916,08 (Empat Puluh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Belas Rupiah Delapan Sen)** dan terealisasi sebesar **Rp.36.022.759.083,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah)** atau **88,95%** dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar **Rp.32.602.164.116,08 (Tiga puluh dua milyar enam ratus dua juta seratus enam puluh empat ribu seratus enam belas rupiah delapan sen)** terealisasi pada Tahun 2025 sebesar **Rp.28.430.906.633,00 (Dua puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah)** atau **87,21%** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp.7.894.326.800,00 (Tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus dua puluh enam**



ribu delapan ratus rupiah) terealisasi Tahun 2025 sebesar Rp.7.591.852.450,00 (Tujuh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau 96,17%, yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim khususnya Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim.

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Capaian Program Indikator Sasaran yang berkaitan langsung dengan target kinerja sasaran dalam Rencana Strategis Dinas Perkebunan Kabupaten dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada Tahun 2025, Dinas Perkebunan Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 Program, 16 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan, antara lain yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.82.598.900,- dengan realisasi sebesar Rp.73.847.270.- atau sebesar 88,34%, dengan rincian Sub Kegiatannya sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- f. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.8.487.224.439.- dengan realisasi sebesar Rp.7.440.357.818.- atau sebesar 87,67% dengan rincian Sub Kegiatannya sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;



- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan Semesteran SKPD;
3. **Kegiatan Administrasi Barang Milk Daerah Pada Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.193.527.488.- dengan realisasi sebesar Rp.190.589.071.- atau sebesar 98,48% dengan rincian Sub Keuatannya sebagai berikut :**
- a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - b. Sub Kegiatan Rekomendasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.153.190.000.- dengan realisasi sebesar Rp.71.728.978.- atau sebesar 46,82% dengan rincian Sub Keuatannya sebagai berikut :**
- a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
 - b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undang.
5. **Administrasi Umum Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.635.120.983.- dengan realisasi sebesar Rp.604.713.452.- atau sebesar 95,21% dengan rincian Sub Keuatannya sebagai berikut :**
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang;
 - f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu ;
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
6. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.7.742.804.700,- dengan realisasi sebesar Rp.7.591.852.450.- atau sebesar 98,05% dengan rincian Sub Keuatannya sebagai berikut :**
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.



7. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.336.998.100.- dengan realisasi sebesar Rp.306.024.569.- atau sebesar 90,81% dengan rincian Sub Kegiatannya sebagai berikut :**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
8. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp.1.089.415.486.- dengan realisasi sebesar Rp.781.453.398.- atau sebesar 71,73% dengan rincian Subkegiatan sebagai berikut :**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan. Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

B. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Alokasi anggaran untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar **Rp.8.402.490.558,00 dengan realisasi sebesar Rp.6.948.161.935,00 atau 82,69%**. Program ini terdiri dari 3 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. **Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, alokasi anggaran sebesar Rp.4.250.752.958.- dengan realisasi sebesar Rp.3.724.491.507.- atau sebesar 87,62% dengan rincian Sub Kegiatannya sebagai berikut :**
 - a. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi;
 - b. Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
2. **Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.243.403.400.- dengan realisasi sebesar Rp.119.134.340.- atau sebesar 48,95% dengan rincian Sub Kegiatannya sebagai berikut :**



- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman;
- b. Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.

3. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih / Bibit Ternak dan Tanaman Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.3.908.334.200.- dengan realisasi sebesar Rp.3.104.536.088.- atau sebesar 79,43% dengan rincian Sub Keuatannya sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Tanaman Sekala Kecil.

C. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Alokasi anggaran untuk Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian sebesar **Rp.11.319.166.462,00** dengan realisasi sebesar **Rp.10.707.574.591,00** atau 94,60%. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan dan 2 Subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, alokasi anggaran sebesar Rp.891.958.962.- dengan realisasi sebesar Rp.771.562.035.- atau sebesar 86,50% dengan rincian Sub Keuatannya sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya.

2. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, alokasi anggaran sebesar Rp.10.427.207.500.- dengan realisasi sebesar Rp.9.936.012.556.- atau sebesar 95,29% dengan rincian Sub Keuatannya sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.

D. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Alokasi anggaran untuk Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian sebesar **Rp.767.599.200,00** dengan realisasi sebesar **Rp.594.781.512,00** atau 77,49%. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.767.599.200.- dengan realisasi sebesar Rp.594.781.512.- atau sebesar 77,49% dengan rincian Subkegiatan sebagai berikut :



- a. Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Holtikultura, Dan Perkebunan;
- b. Sub Kegiatan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan.

E. Program Perizinan Usaha Pertanian

Alokasi anggaran untuk Program Perizinan Usaha Pertanian sebesar **Rp.954.132.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp.363.370.369,00** atau 38,08%. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. **Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten Kota, alokasi anggaran sebesar Rp.954.132.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.363.37.369,00 atau sebesar 38,08%** dengan rincian Sub Keempatannya sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian.

F. Program Penyuluhan Pertanian

Alokasi anggaran untuk Program Penyuluhan Pertanian sebesar **Rp.531.228.500,00** dengan realisasi sebesar **Rp.348.303.670,00** atau 65,57% dengan capaian kinerja output sebesar 100%. Program ini terdiri dari 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. **Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, alokasi anggaran sebesar Rp.531.228.500,00 dengan realisasi sebesar Rp.348.303.670,00 atau sebesar 65,57%** dengan rincian Sub Keempatannya sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
 - b. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa;
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.



3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani Pekebun	Meningkatnya produksi komoditas perkebunan	Persentase Produksi Komoditas Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet dan Kopi) (%) - Kelapa Sawit - Karet - Kopi	1.83 1,50 2,00 2,00	1.96 1,61 2,10 2,18	107 107 105 109

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Kurangnya Personil Petugas Lapangan (PPL) di wilayah Kecamatan	Penyediaan SDM untuk memenuhi kebutuhan Petugas Lapangan (PPL) untuk wilayah-wilayah yang belum ada Petugasnya
2.	Kurangnya Sarana Transportasi (Mobil Dinas) untuk Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan	Teralokasinya anggaran untuk penyediaan Sarana Transportasi (Mobil Dinas) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan
3.	Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Peningkatan Produksi Perkebunan	Teralokasinya anggaran untuk memenuhi Sarana dan Prasarana Pendukung Peningkatan Hasil Produksi Perkebunan dengan skala prioritas
4.	Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung Peningkatan Mutu Produksi Perkebunan	Tersedianya alokasi anggaran untuk memenuhi Sarana dan Prasarana Pendukung Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan yang sesuai dengan anjuran
5.	Kurangnya Pelatihan Kapasitas SDM Petugas Lapangan (PPL)	Tersedianya alokasi anggaran untuk Pelatihan Kapasitas SDM Petugas Lapangan (PPL)
6.	Kurangnya Pelatihan Kapasitas untuk Petani Pekebun	Tersedianya alokasi anggaran untuk Pelatihan Kapasitas untuk Petani Pekebun



5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

1. Penghargaan Award Terbaik I Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muara Enim.
2. Terbaik 1 Stand Terbaik pada Pameran Jogja Tiaatex (Trade Invesment Industry Agriculture Tourism Export) Expo 2025 di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Sertifikat Penghargaan Kontes Kopi Spesialti Indonesia XVII – 2025 sebagai Harapan I / Peringkat ke-4 (Empat) Kategori Arabika Wash di Bandar Lampung.



3. URUSAN PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN ESDM OLEH DINAS PERDAGANGAN

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan Pilihan Perdagangan diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim. Pada Tahun Anggaran 2025, alokasi dana untuk membiayai urusan pilihan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim sebesar Rp44.434.555.039,34, dengan realisasi anggaran sebesar Rp43.021.439.866,00 atau 96,82%. Adapun rincian realisasi belanja adalah sebagai berikut:

A. Belanja Operasional

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp15.703.379.739,34, dengan realisasi sebesar Rp14.565.900.826,00 atau 92,76%.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp28.731.175.300,00, dengan realisasi sebesar Rp28.455.539.040,00 atau 99,04%.

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2025, Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim melaksanakan 8 program, 15 kegiatan, dan 36 subkegiatan, yaitu:

A. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan.

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan sebesar Rp178.571.825,00, dengan realisasi sebesar Rp177.085.847,00 atau 99,17%. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) subkegiatan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran sebesar Rp. 178.571.825,- dengan realisasi sebesar Rp.177.085.847,- atau 99,17%, terdiri dari 1 (satu) subkegiatan, yaitu:

- a. Subkegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp178.571.825,00, realisasi sebesar Rp177.085.847,00 atau 99,17%.

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp11.575.914.102,00, dengan realisasi sebesar Rp10.820.682.302,00 atau 93,48%. Program ini terdiri



atas 8 (delapan) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) subkegiatan, sebagai berikut:

- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp162.515.800,00 dengan realisasi sebesar Rp154.256.300,00 atau 94,92%, terdiri dari 6 (enam) subkegiatan, yaitu:**
 - a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp24.571.800,00, realisasi sebesar Rp23.493.800,00 atau 95,61%.
 - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp29.446.200,00, realisasi sebesar Rp28.016.800,00 atau 95,15%.
 - c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp28.173.100,00, realisasi sebesar Rp27.578.700,00 atau 97,89%.
 - d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp28.173.100,00, realisasi sebesar Rp25.816.100,00 atau 91,63%.
 - e. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp30.393.100,00, realisasi sebesar Rp28.703.000,00 atau 94,44%.
 - f. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan anggaran sebesar Rp21.758.500,00, realisasi sebesar Rp20.647.900,00 atau 94,90%.
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.262.721.639,00 dengan realisasi sebesar Rp6.749.261.723,00 atau 92,93%, terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan, yaitu:**
 - a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp7.244.489.139,00, realisasi sebesar Rp6.734.435.723,00 atau 92,96%.
 - b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran sebesar Rp9.712.800,00, realisasi sebesar Rp7.494.500,00 atau 77,16%.
 - c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan anggaran sebesar Rp8.519.700,00, realisasi sebesar Rp7.331.500,00 atau



86,05%.

3. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp42.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp41.750.000,00 atau 99,40%, terdiri dari 1 (satu) subkegiatan, yaitu:**
 - a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dilaksanakan melalui Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan anggaran sebesar Rp42.000.000,00, realisasi sebesar Rp41.750.000,00 atau 99,40%.
4. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.232.171.596,00 dengan realisasi sebesar Rp1.204.347.227,00 atau 97,74%, terdiri dari 6 (enam) subkegiatan, yaitu:**
 - a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp77.852.200,00, realisasi sebesar Rp76.521.500,00 atau 98,29%.
 - b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp52.382.671,00, realisasi sebesar Rp48.014.000,00 atau 91,66%.
 - c. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan anggaran sebesar Rp58.633.950,00, realisasi sebesar Rp41.052.216,00 atau 70,01%.
 - d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp39.014.775,00, realisasi sebesar Rp38.871.300,00 atau 99,63%.
 - e. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran sebesar Rp17.280.000,00, realisasi sebesar Rp13.320.000,00 atau 77,08%.
 - f. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp987.008.000,00, realisasi sebesar Rp986.568.211,00 atau 99,96%.
5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp549.175.300,00 dengan realisasi sebesar Rp501.500.000,00 atau**



91,32%, terdiri dari 2 (dua) subkegiatan, yaitu:

- a. Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp524.175.300,00, realisasi sebesar Rp476.500.000,00 atau 90,90%.
- b. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya/Laptop, dengan anggaran sebesar Rp25.000.000,00, realisasi sebesar Rp25.000.000,00 atau 100,00%.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.321.331.770,00 dengan realisasi sebesar Rp1.182.996.320,00 atau 89,53%, terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan, yaitu:

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat dengan anggaran Rp.5.096.700,- dengan realisasi sebesar Rp 4.730.000,- atau 92,81 Persen.
- b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp. 312.035.070,- dengan realisasi sebesar Rp. 307.548.156,- atau 98,56 Persen.
- c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 1.004.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 870.718.164,- atau 86,71 Persen.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.005.997.997,00 dengan realisasi sebesar Rp986.570.732,00 atau 98,07%, terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan, yaitu:

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat, dengan anggaran sebesar Rp5.096.700,00, realisasi sebesar Rp4.730.000,00 atau 92,81%.
- b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp312.035.070,00, realisasi sebesar Rp307.548.156,00 atau 98,56%.
- c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran sebesar Rp1.004.200.000,00, realisasi sebesar Rp870.718.164,00 atau 86,71%.

C. Program Peningkatan Sarana Distribusi

Alokasi anggaran untuk Program Peningkatan Sarana Distribusi sebesar Rp29.489.500.700,00, dengan realisasi sebesar Rp29.254.247.931,00 atau 99,20%. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) subkegiatan, sebagai berikut:



1. **Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan dialokasikan anggaran sebesar Rp29.489.500.700,00 dengan realisasi sebesar Rp29.254.247.931,00 atau 99,20%, terdiri dari 1 (satu) subkegiatan, yaitu:**
 - a. Subkegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan anggaran sebesar Rp29.489.500.700,00, realisasi sebesar Rp29.254.247.931,00 atau 99,20%.

D. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Barang Penting

Alokasi anggaran untuk Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebesar Rp1.997.406.435,00, dengan realisasi sebesar Rp1.584.317.117,00 atau 79,32%. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) subkegiatan, sebagai berikut:

1. **Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp1.997.406.435,00 dengan realisasi sebesar Rp1.584.317.117,00 atau 79,32%, terdiri dari 2 (dua) subkegiatan, yaitu:**
 - a. Subkegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting serta Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp167.960.000,00, realisasi sebesar Rp123.315.700,00 atau 73,42%.
 - b. Subkegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp1.829.446.435,00, realisasi sebesar Rp1.461.001.417,00 atau 79,86%.

E. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Alokasi anggaran untuk Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen sebesar Rp143.793.589,84, dengan realisasi sebesar Rp140.814.295,00 atau 97,93%. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) subkegiatan, sebagai berikut:

1. **Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan dialokasikan anggaran sebesar Rp143.793.589,84 dengan realisasi sebesar Rp140.814.295,00 atau 97,93%, terdiri dari 2 (dua) subkegiatan, yaitu:**



- a. Subkegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera dan Tera Ulang, dengan anggaran sebesar Rp52.508.621,25, realisasi sebesar Rp50.507.699,00 atau 96,19%.
- b. Subkegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal, dengan anggaran sebesar Rp91.284.968,59, realisasi sebesar Rp90.306.596,00 atau 98,93%.

F. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Alokasi anggaran untuk Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri sebesar Rp96.553.000,00, dengan realisasi sebesar Rp94.465.000,00 atau 97,84%. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) subkegiatan, sebagai berikut:

- 1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dialokasikan anggaran sebesar Rp96.553.000,00 dengan realisasi sebesar Rp94.465.000,00 atau 97,84%, terdiri dari 1 (satu) subkegiatan, yaitu:**
 - a. Subkegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp96.553.000,00, realisasi sebesar Rp94.465.000,00 atau 97,84%.

G. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Alokasi anggaran untuk Program Perencanaan dan Pembangunan Industri sebesar Rp597.220.700,00, dengan realisasi sebesar Rp595.128.660,00 atau 99,65%. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) subkegiatan, sebagai berikut:

- 1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp597.220.700,00 dengan realisasi sebesar Rp595.128.660,00 atau 99,65%, terdiri dari 1 (satu) subkegiatan, yaitu:**
 - a. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri, dengan anggaran sebesar Rp597.220.700,00, realisasi sebesar Rp595.128.660,00 atau 99,65%.

H. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Alokasi anggaran untuk Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional sebesar Rp355.594.688,00, dengan realisasi sebesar Rp354.698.714,00 atau 99,75%. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) subkegiatan, sebagai berikut:



1. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp355.594.688,00 dengan realisasi sebesar Rp354.698.714,00 atau 99,75%, terdiri dari 1 (satu) subkegiatan, yaitu:
 - a. Subkegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas, dengan anggaran sebesar Rp355.594.688,00, realisasi sebesar Rp354.698.714,00 atau 99,75%.

3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan	a Persentase . Peningkatan Pendapatan Daerah Sektor Perdagangan	100,00 %	112,30%	112,30%
			b Persentase . Koefisien Harga Barang Kebutuhan Pokok	10,00%	8,26%	82,60%
2	Meningkatkan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Meningkatnya Sektor Industri Kecil dan Menengah	- Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah	6,80%	7,04%	103,53%
3	Meningkatkan Ketahanan Energi Dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Yang Berkelanjutan	Meningkatkan Pemanfaatan Energi Dan Sumber Daya Mineral Yang Berkelanjutan	- Persentase Pemanfaatan Energi Panas Bumi	100,00 %	100,00%	100,00%

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

-

5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Pada Tahun 2025, tidak terdapat penghargaan dan prestasi yang diterima oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Muara Enim.



3.5. FUNGSI PENUNJANG

1. SEKRETARIAT DAERAH

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim. Pada tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 115.350.644.829,00 terealisasi sebesar Rp. 102.872.288.865,00 atau 89,18 Persen dengan rincian sebagai berikut

A. Belanja Operasional

Belanja Pegawai dialokasikan sebesar Rp. 26.273.000,00 (Unaudited) terealisasi sebesar Rp. 23.592.919.793,00 (Unaudited) atau 89,56 Persen dengan capaian kinerja 100 Persen yang diarahkan untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan PNS, Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya (uang makan dan tunjangan kesejahteraan tahunan).

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 19.743.710,00 (Unaudited) terealisasi Rp. 18.874.911.903,00 (Unaudited) atau 95,60 Persen dengan capaian kinerja 100 Persen yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim.

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim melaksanakan 3 program, 19 Kegiatan dan 64 Subkegiatan antara lain yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Alokasi anggaran untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 96.264.200.241,00 (Unaudited) dengan realisasi sebesar Rp. 86.412.195.556,00 (Unaudited) atau 89,77 Persen program ini terdiri dari 11 kegiatan, dan 41 Subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

a. SubKegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan dengan anggaran sebesar Rp. 136.155.300,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 114.468.990,00 (Unaudited) atau sebesar 84,07 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7



Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

- b. Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 138.571.900,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 126.771.481,00 (Unaudited) atau sebesar 91,48 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- c. Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 110.290.600,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 98.212.392,00 (Unaudited) atau sebesar 89,05 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- d. Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 60.608.000,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 50.802.554,00 (Unaudited) atau sebesar 83,82 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- e. Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 60.606.900,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 50.319.040,00 (Unaudited) atau sebesar 83,03 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 23.922.126.057,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.888.655.575,00 (Unaudited) atau sebesar 91,50 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 129 orang/bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- b. Subkegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 210.556.100,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 178.966.438,00 (Unaudited) atau sebesar 85,00 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini



adalah 1 Bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

- c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun dengan anggaran sebesar Rp. 62.129.700 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 61.887.600 (Unaudited) atau sebesar 99,61 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp.81.931.200,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 75.617.052,00 (audited) atau sebesar 92,29 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 15 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

- a. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 853.886.600,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp.784.136.539,00 (Unaudited) atau sebesar 91,83 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 12 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- a. Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp. 4.720.731.150,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.567.218.140,00 (Unaudited) atau sebesar 96,75 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 18 Paket dan 18 Jenis dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- b. Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp.207.186.200,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp.197.743.043,00 (Unaudited) atau sebesar 95,44 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 50 Orang dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.



5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 630.217.400,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 604.339.050,00 (Unaudited) atau sebesar 95,89 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 33 Paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 630,217,400,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 604,339,050,00 (Unaudited) atau sebesar 95,89 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 62 Paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- c. Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 2,918,520,826,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2,601,765,839,00 (Unaudited) atau sebesar 89,15 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 106 Paket__dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- d. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 509,576,600,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 419,431,540,00 (Unaudited) atau sebesar 82,31 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 60 Jenis, 13.000 Lite Paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- e. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 876,568,300,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 827,996,086,00 (Unaudited) atau sebesar 94,46 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 27 Jenis, 40.000 Lembar Paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- f. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 317,841,000,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 305,061,500,00 (Unaudited) atau sebesar 95,98. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 10 Bahan Bacaan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- g. Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 5.900.920.000,00 (Unaudited) dan realisasi



keuangan sebesar Rp. 5.644.910.400,00 (Unaudited) atau sebesar 95,66 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini 3 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

- h. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 4.360.732.000,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.291.557.502,00 (Unaudited) atau sebesar 98,41 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 12 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 10.583.000.000,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.638.999.999,00 (Unaudited) atau sebesar 81,63 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 34 Unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- b. Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp. 4.295.500.000,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.250.449.474,00 (Unaudited) atau sebesar 98,95 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 164 Unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp.159.060.900,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp.135.400.000,00 (Unaudited) atau sebesar 85,12 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 2 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp 2.060.365.405,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.012.039.363,00 (Unaudited) atau sebesar 97,65 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 4 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 1.872.680.000,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.336.765.000,00 (Unaudited)



atau sebesar 71,38 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 14 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 357.800.000,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 34.240.000,00 (Unaudited) atau sebesar 9,57 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 4 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 686.802.492,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 663.554.050,00 (Unaudited) atau sebesar 96,61 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 2 Unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 1.972.385.836,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.816.747.900,00 (Unaudited) atau sebesar 92,11 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 64 Unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 2.585.808.000,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.082.932.743,00 (Unaudited) atau sebesar 80,55 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 15 Unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- d. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp.114.450.000,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp.107.988.300,00 (Unaudited) atau sebesar 94,35 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 7 Unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.



- e. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 581.100.000,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 515.924.300,00 (Unaudited) atau sebesar 88,78 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 3 Unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

9. Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.711.838.045,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.166.854.500,00 (Unaudited) atau sebesar 68,16 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 12 Paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- b. Subkegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.012.498.045,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 651.429.683,00 (Unaudited) atau sebesar 64,34 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 12 Paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

10. Kegiatan Penataan Organisasi.

- a. Subkegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 527.816.429,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 470.983.813,00 (Unaudited) atau sebesar 89,23 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 4 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- b. Subkegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan anggaran sebesar Rp. 308.525.800,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 300.815.759,00 (Unaudited) atau sebesar 97,50 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 5 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- c. Subkegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi dengan anggaran sebesar Rp. 705.077.048,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 679.545.831,00 (Unaudited) atau sebesar 96,38 Persen. Adapun Output/Keluaran dari



subkegiatan ini adalah 6 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

- d. Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana dengan anggaran sebesar Rp. 145.401.695,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 121.556.928,00 (Unaudited) atau sebesar 83,60 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 2 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- e. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 33.106.155,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.456.370,00 (Unaudited) atau sebesar 85,95 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

11. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

- a. Subkegiatan Fasilitas Keprotokolan dengan anggaran sebesar Rp.12.409.705.900,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp.11.471.019.952,00 (Unaudited) atau sebesar 92,44 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- b. Subkegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan dengan anggaran sebesar Rp. 370.780.200,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 345.832.620,00 (Unaudited) atau sebesar 93,27 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini 1 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- c. Subkegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan dengan anggaran sebesar Rp. 734.670.000,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 716.452.345,00 (Unaudited) atau sebesar 97,52 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 12 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

B. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Alokasi anggaran untuk program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 14.165.574.709,00 (Unaudited) dengan realisasi



sebesar Rp. 12.538.699.108,00 (Unaudited) atau 88,52 persen program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 12 Subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

- a. Subkegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 185.405.540,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 176.255.125,00 (Unaudited) atau sebesar 95,06 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- b. Subkegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan dengan anggaran sebesar Rp. 802.546.475,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 731.395.056,00 (Unaudited) atau sebesar 91,13 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen
- c. Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 630.916.544,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 602.403.888,00 (Unaudited) atau sebesar 95,48 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

2. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.

- a. Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual dengan anggaran sebesar Rp. 3.927.202.910,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.375.249.962,00 (Unaudited) atau sebesar 85,95 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- b. Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan. Evaluasi. dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dengan anggaran sebesar Rp.1.681.348.820,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp.1.533.570.503,00 (Unaudited) atau sebesar 91,21 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- c. Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.4.518.440.620,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.841.860.081,00 (Unaudited) atau



sebesar 85,03 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 4 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

3. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum

- a. Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 512.503.700,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 487.765.048,00 (Unaudited) atau sebesar 95,17 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 3 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- b. Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum dengan anggaran sebesar Rp.657.558.100,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp.646.614.188,00 (Unaudited) atau sebesar 98,34 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 40 Kasus dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- c. Subkegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum dengan anggaran sebesar Rp. 592.999.400,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 568.723.763,00 (Unaudited) atau sebesar 95,91 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 2 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

4. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah

- a. Subkegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 456.364.100,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 414.010.973,00 (Unaudited) atau sebesar 90,72 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 2 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- b. Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri dengan anggaran sebesar Rp.55.534.700,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp.44.612.312,00 (Unaudited) atau sebesar 80,33 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- c. Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama dengan anggaran sebesar Rp.144.753.800,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar



Rp.116.238.209,00 (Unaudited) atau sebesar 80,30 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 2 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

C. Program Perekonomian dan Pembangunan

Alokasi anggaran untuk program Perekonomian dan Pembangunan sebesar Rp. 4.920.869.879,00 (Unaudited) dengan realisasi sebesar Rp. 3.921.394.201,00 (Unaudited) atau 79,69 persen. Program ini terdiri dari 4 kegiatan dan 11 Subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian.

- a. Subkegiatan Koordinasi. Sinkronisasi. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD dengan anggaran sebesar Rp 614.796.900,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 493.375.080,00 (Unaudited) atau sebesar 80,25 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- b. Subkegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dengan anggaran sebesar Rp. 448.313.742,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 315.574.824,00 (Unaudited) atau sebesar 70,39 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- c. Subkegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dengan anggaran sebesar Rp. 377.256.000,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 146.063.050,00 (Unaudited) atau sebesar 38,72 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

2. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.

- a. Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 186.615.875,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 148.861.392,00 (Unaudited) atau sebesar 79,77 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- b. Subkegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 213.905.230,00



(Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 187.624.624,00 (Unaudited) atau sebesar 87,71 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Aplikasi dan 1 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

- c. Subkegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dengan anggaran sebesar Rp. 248.976.690,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 221.069.328,00 (Unaudited) atau sebesar 88,79 persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

3. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.

- a. Subkegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 1.693.798.416,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.483.480.711,00 (Unaudited) atau sebesar 87,58 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- b. Subkegiatan Pengelolaan Layanan Pengaturan secara Elektronik dengan anggaran sebesar Rp. 561.479.950,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 500.113.009,00 (Unaudited) atau sebesar 89,07 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- c. Subkegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dengan anggaran sebesar Rp. 255.560.476,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 242.023.848,00 (Unaudited) atau sebesar 94,70 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 150 Orang dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

4. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam.

- a. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dengan anggaran sebesar Rp. 158.263.500,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp. 72.938.453,00 (Unaudited) atau sebesar 46,09 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini



adalah 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

- b. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup dengan anggaran sebesar Rp.161.903.100,00 (Unaudited) dan realisasi keuangan sebesar Rp.110.269.882,00 (Unaudited) atau sebesar 68,11 Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	BB (69,50)	BB (70,90)	102%
			Nilai SAKIP Komponen Pelaporan	12,75	15	118%
			Nilai SKM Sarana Prasarana Perkantoran	B	B	100%
			Nilai SKM Kabupaten	B (88,10)	B (90,26)	102%
			Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	P4 77,88	P4 77,88	100%
			Tingkat Kepuasan KDH/WKDH terhadap Pelayanan Keprotokolan	3,25 (Puas)	3,25 (Puas)	100%
			Persentase dokumentasi kegiatan KDH/WKDH	85%	89%	110%
			Indeks Kearsipan	B	B	100%



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai LPPD	2,94	-	(ket: Nilai LPPD tahun 2025 belum keluar dari Kemen dagri)
			Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	95%	95%
			Indeks Reformasi Hukum	85	98,16	115%
			Persentase Kerjasama Daerah yang ditindaklanjuti	91,11%	100%	110%
		Meningkatnya Kualitas Koordinasi Penyelenggaraan Perekonomian dan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Inflasi Daerah	2,50	2,88	115%
			Persentase Realisasi Fisik dan Non Fisik	90,50%	91,77%	105%
			Indeks Tata Kelola Pengadaan	55,8	75.35	135%



4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Umat Buddha di Muara Enim merayakan Hari Raya Waisak secara mandiri dan tidak mau menerima bantuan pemerintah dalam mengadakan acara perayaan tersebut.	Pemerintah Daerah selaku pengada perayaan keagamaan rutin berkoordinasi terlebih dahulu kepada pemuka agama dan meminta persetujuan sebelum kegiatan tersebut di masukkan dalam anggaran belanja rutin daerah.

5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 :

1. Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut ke-12 kali atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ;
2. Penghargaan Terbaik Pertama sebagai Kabupaten/Kota dengan Cakupan Imunisasi Rutin tahun 2024 dan triwulan I Tahun 2025 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
3. Peringkat 7 pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Sumatera Selatan Tahun 2025 dengan perolehan 12 medali yaitu 1 emas,3 perak dan 8 perunggu.
4. Predikat BB dengan nilai 76,51 atau naik sebesar 1,1 poin dari tahun 2023 atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Muara Enim tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB);
5. Terbaik I Penyiaran Informasi Pembangunan Daerah Kategori Pendidikan dan Kesehatan di Ajang Anugerah Penyiaran Sumsel 2025 oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Selatan;
6. Penghargaan Top Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 2025 pada Ajang TOP BUMD Awards Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Majalah TOP Business;
7. Terbaik I Regional Luar Jawa Bali I Kategori Rata-rata Pelayanan KB MKJP Terbanyak pada Kegiatan Pelayanan KB Serentak di Pasar Tradisional;
8. Penghargaan Tercepat Bentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) desa/kelurahan se-Sumsel dari Menteri Hukum RI.
9. Penghargaan sebagai Pionir Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Gender di Sumsel dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatera Selatan.
10. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Nindya Tahun



2025 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI.

11. Juara 1 Lomba Desa Tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 yang diraih Desa Lubuk Raman
12. Penghargaan Pin Emas KTNA sebagai Bukti Komitmen Maju dan Sejahterakan Petani.
13. Juara Umum 3 Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) ke-16 Sumsel Tahun 2025 di Musi Banyuasin.
14. Penghargaan Kematangan UKPBJ Proaktif atas Pencapaian Pemenuhan Standart LPSE 2022 sebagai LPSE System Provider oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
15. Terbaik II Penilaian Pengawasan Kearsipan Internal oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Muara Enim tahun 2025.



2. SEKRETARIAT DPRD

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Alokasi dan realisasi anggaran belanja Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam bentuk nominal dan persentase. Uraian ini menggambarkan tingkat capaian pelaksanaan kegiatan, efektivitas penyerapan anggaran, serta kesesuaian penggunaan anggaran dengan kebutuhan riil organisasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim.

A. Belanja Operasional

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Operasional pada Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim dialokasikan sebesar Rp74.181.179.482,00 dan terealisasi sebesar Rp66.674.567.990,00 atau mencapai 89,88%, sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp7.506.611.492,00. Selisih tersebut merupakan sisa anggaran yang mencerminkan efisiensi pelaksanaan belanja serta penyesuaian terhadap kebutuhan riil organisasi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp80.574.109.346,00, realisasi Belanja Operasional Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp13.899.541.356,00. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian kebutuhan operasional, pengendalian belanja, serta optimalisasi penggunaan anggaran berdasarkan skala prioritas kegiatan.

Belanja Operasi tersebut terutama digunakan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, pemeliharaan, serta perjalanan dinas yang secara langsung mendukung operasional perkantoran, fasilitasi kegiatan DPRD, dan layanan administrasi kesekretariatan. Tingkat realisasi yang mencapai hampir 90% menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan efektif, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

B. Belanja Modal

Pada Tahun Anggaran 2025, Belanja Modal pada Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim dialokasikan sebesar Rp5.446.187.964,00 dan terealisasi sebesar Rp3.832.838.502,00 atau mencapai 70,38%, sehingga terdapat selisih anggaran sebesar Rp1.613.349.462,00. Selisih tersebut merupakan sisa anggaran yang mencerminkan efisiensi pelaksanaan belanja serta penyesuaian terhadap kebutuhan riil organisasi dalam



rangka mendukung peningkatan sarana dan prasarana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp1.739.515.000,00, realisasi Belanja Modal Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp2.093.323.502,00, yang menunjukkan adanya peningkatan dukungan terhadap penyediaan sarana dan prasarana kerja.

Belanja Modal digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin serta sarana pendukung lainnya guna meningkatkan kualitas fasilitas kerja dan menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim. Tingkat realisasi menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai kebutuhan organisasi dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim melaksanakan 2 Program, 13 Kegiatan, dan 37 Sub Kegiatan yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini merupakan instrumen utama dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD serta pelayanan administrasi kesekretariatan. Program ini memiliki pagu anggaran sebesar **Rp 48.248.695.246** dengan realisasi keuangan mencapai **Rp 44.304.517.021 (91,83%)**.

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini diarahkan pada penguatan administrasi internal Sekretariat, yang dalam pelaksanaannya terdiri dari rincian sub-kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Terealisasi sebesar Rp 2.719.501 (72,71%) dari pagu Rp 3.740.300. Dokumen berhasil disusun sebanyak 1 Dokumen sebagai dasar perencanaan anggaran.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD
Terealisasi sebesar Rp 1.622.821 (67,19%) dari pagu Rp 2.415.200. Dokumen berhasil disusun sebanyak 1 Dokumen sebagai dasar penyesuaian rencana kerja dan anggaran.
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Terealisasi sebesar Rp 1.942.501 (63,81%) dari pagu Rp 3.044.000. Dokumen berhasil disusun sebanyak 1 Dokumen sebagai pedoman teknis pelaksanaan anggaran.
- d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD



Terealisasi sebesar Rp 1.942.501 (63,81 %) dari pagu Rp 3.044.000. Dokumen berhasil disusun sebanyak 1 Dokumen sebagai dasar hukum pelaksanaan operasional anggaran setelah dilakukannya perubahan.

- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terealisasi sebesar Rp 2.608.501 (74,48%) dari pagu Rp 3.502.400. Dokumen berhasil disusun sebanyak 2 Laporan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memastikan tata kelola keuangan internal yang transparan dan akuntabel di lingkungan Sekretariat DPRD melalui tiga subkegiatan utama, sebagai berikut :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Terealisasi sebesar Rp 6.659.322.641 (77,91%) dari pagu Rp 5.188.507.758. Pembayaran gaji dan tunjangan ASN berhasil dipenuhi selama 12 bulan sebagai wujud pemenuhan hak aparatur dan kelancaran operasional birokrasi.

- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Terealisasi sebesar Rp0 (0%) dari pagu Rp2.140.200. Target kinerja penyusunan laporan keuangan akhir tahun tidak terealisasi melalui alokasi ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran atau pengintegrasian proses pelaporan secara kolektif pada subkegiatan penunjang lainnya.

- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan, Semesteraan SKPD

Terealisasi sebesar Rp0 (0%) dari pagu Rp2.140.200. Target kinerja penyusunan laporan keuangan periodik belum terealisasi pada periode ini dikarenakan adanya penyesuaian mekanisme pelaporan atau efisiensi administratif dalam proses penatausahaan keuangan

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan penatausahaan, pengamanan, dan legalitas aset daerah di lingkungan Sekretariat DPRD terlaksana dengan baik melalui subkegiatan berikut:

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD



Terealisasi sebesar Rp174.320.857 (96,29%) dari pagu Rp181.046.500. Target kinerja penyusunan 3 dokumen pengamanan aset berhasil dipenuhi sebagai upaya perlindungan legalitas dan fisik barang milik daerah di lingkungan Sekretariat DPRD.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini difokuskan pada penguatan manajemen sumber daya aparatur dan tertib administrasi kepegawaian melalui subkegiatan berikut :

a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Terealisasi sebesar Rp148.500.000 (100%) dari pagu Rp148.500.000. Target kinerja pengembangan kompetensi sebanyak 37 orang/kali berhasil dipenuhi secara maksimal guna meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur dalam mendukung tugas serta fungsi perangkat daerah.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini difokuskan pada penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Sekretariat DPRD melalui subkegiatan berikut :

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Terealisasi sebesar Rp19.995.540 (45,88%) dari pagu Rp43.578.000. Target kinerja berupa 1 paket penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor telah dilaksanakan untuk mendukung kelayakan sarana prasarana gedung perkantoran.

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terealisasi sebesar Rp2.970.920.602 (95,32%) dari pagu Rp3.116.727.194. Target kinerja 6 paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor telah dilaksanakan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Terealisasi sebesar Rp2.820.000 (78,33%) dari pagu Rp3.600.000. Target kinerja 1 paket telah direalisasikan untuk mendukung kebutuhan operasional rumah tangga kantor.

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor



Terealisasi sebesar Rp140.836.365 (80,55%) dari pagu Rp174.844.660. Target kinerja 2 paket telah dilaksanakan guna mendukung kegiatan operasional harian perkantoran.

e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Terealisasi sebesar Rp157.973.850 (100,00%) dari pagu Rp157.974.200. Target kinerja 2 paket telah direalisasikan untuk mendukung kelancaran administrasi perkantoran melalui penyediaan dokumen cetak dan penggandaan.

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Terealisasi sebesar Rp91.900.000 (70,29%) dari pagu Rp130.740.000. Target kinerja berupa 25 dokumen telah dilaksanakan guna mendukung peningkatan pemahaman aparatur terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku.

g. Fasilitas Kunjungan Tamu

Terealisasi sebesar Rp1.363.962.680 (100,00%) dari pagu Rp1.364.000.000. Target kinerja berupa 101 laporan telah dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan penerimaan dan pelayanan tamu kedinasan

h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Terealisasi sebesar Rp4.563.567.479 (95,46%) dari pagu Rp4.780.528.000. Target kinerja berupa 38 laporan telah direalisasikan guna mendukung kelancaran koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung ketersediaan sarana pendukung operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan melalui subkegiatan sebagai berikut.

a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan

Terealisasi sebesar Rp0,00 (0,00%) dari pagu anggaran Rp1.405.940.000 dengan target kinerja 1 paket. Tidak terealisasinya anggaran pada subkegiatan ini disebabkan oleh penyesuaian kebijakan dan/atau prioritas kebutuhan perangkat daerah pada tahun anggaran berjalan.



7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini diarahkan untuk menjamin terselenggaranya layanan administrasi dan operasional secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui subkegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terealisasi sebesar Rp5.450.000 (55,39%) dari pagu Rp9.839.000. Target kinerja berupa 2 laporan telah dilaksanakan guna mendukung kelancaran administrasi persuratan di lingkungan Sekretariat DPRD.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terealisasi sebesar Rp504.458.550 (87,79%) dari pagu Rp574.622.850. Target kinerja berupa 4 laporan telah direalisasikan untuk mendukung kebutuhan komunikasi serta pemenuhan utilitas perkantoran.
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terealisasi sebesar Rp15.506.700 (72,80%) dari pagu Rp21.300.000. Target kinerja berupa 3 laporan telah dilaksanakan guna menunjang kelancaran operasional peralatan dan perlengkapan kantor.
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Terealisasi sebesar Rp447.524.016 (78,12%) dari pagu Rp572.886.000. Target kinerja berupa 38 laporan telah dilaksanakan untuk mendukung pelayanan umum perkantoran di lingkungan Sekretariat DPRD.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini diarahkan untuk memastikan sarana dan prasarana pendukung operasional tetap dalam kondisi baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui subkegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Terealisasi sebesar Rp467.419.485 (96,80%) dari pagu Rp482.867.925. Target kinerja berupa 24 unit kendaraan dinas telah dilaksanakan pemeliharaannya guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Sekretariat DPRD.



- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Terealisasi sebesar Rp1.269.552.080 (94,26%) dari pagu Rp1.346.828.000. Target kinerja berupa 3 unit gedung dan bangunan lainnya telah dipelihara dan direhabilitasi untuk menjaga kelayakan serta kenyamanan sarana prasarana perkantoran.
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Pendukung Gedung
Terealisasi sebesar Rp84.120.000 (56,29%) dari pagu Rp149.448.480. Target kinerja berupa 5 unit sarana dan prasarana pendukung telah dilaksanakan pemeliharannya guna menunjang aktivitas operasional perkantoran.Kantor atau Bangunan Lainnya.

9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Kegiatan ini diarahkan untuk menjamin tertib administrasi, ketepatan pembayaran, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan DPRD. Kegiatan ini dilaksanakan melalui subkegiatan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
Terealisasi sebesar Rp25.959.562.734 (99,27%) dari pagu Rp26.150.981.972. Target kinerja berupa 12 bulan pelayanan administrasi keuangan DPRD telah dilaksanakan untuk menjamin ketepatan dan ketertiban pembayaran hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD.
- b. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
Terealisasi sebesar Rp716.782.500 (96,98%) dari pagu Rp739.093.500. Target kinerja berupa 4 paket pakaian dinas dan atribut DPRD telah direalisasikan sesuai ketentuan guna menunjang pelaksanaan tugas kedinasan.
- c. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
Terealisasi sebesar Rp0,00 (0,00%) dari pagu Rp14.000.000. Target kinerja berupa 1 paket belum terealisasi pada tahun anggaran berjalan.

B. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini merupakan instrumen pendukung dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD memiliki pagu anggaran sebesar **Rp31.378.672.200** dengan realisasi keuangan mencapai



Rp26.202.889.471 (83,51%).

1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPRD melalui fasilitasi penyusunan dan pembahasan peraturan daerah serta peraturan DPRD. Kegiatan ini dilaksanakan melalui subkegiatan sebagai berikut :

a. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Terealisasi sebesar Rp57.750.000 (48,61%) dari pagu Rp118.795.050. Target kinerja berupa 2 dokumen Program Pembentukan Peraturan Daerah telah dilaksanakan sebagai dasar perencanaan pembentukan peraturan daerah.

b. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Terealisasi sebesar Rp0,00 (0,00%) dari pagu Rp150.207.000. Target kinerja berupa 2 dokumen rancangan peraturan daerah belum terealisasi pada tahun anggaran berjalan.

c. Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan

Terealisasi sebesar Rp0,00 (0,00%) dari pagu Rp78.574.650. Target kinerja berupa 2 dokumen kajian perundang-undangan belum terealisasi pada tahun anggaran berjalan

2. Peningkatan Kapasitas DPRD

Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dilaksanakan untuk mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

a. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Terealisasi sebesar Rp840.000.000 (100,00%) dari pagu Rp840.000.000. Target kinerja berupa 12 bulan penyediaan kelompok pakar dan tim ahli telah direalisasikan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

b. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

Terealisasi sebesar Rp378.000.000 (100,00%) dari pagu Rp378.000.000. Target kinerja berupa 12 bulan penyediaan tenaga ahli fraksi telah direalisasikan guna mendukung kinerja fraksi DPRD.

3. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi representasi DPRD dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

a. Kunjungan Kerja Dalam Daerah



Terealisasi sebesar Rp0,00 (0,00%) dari pagu Rp206.654.000. Target kinerja berupa 45 laporan kunjungan kerja dalam daerah belum terealisasi pada tahun anggaran berjalan.

b. Pelaksanaan Reses

Terealisasi sebesar Rp175.426.366 (65,07%) dari pagu Rp269.599.500. Target kinerja berupa 3 dokumen hasil reses telah direalisasikan sebagai bentuk penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD.

4. Fasilitas Tugas DPRD

Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD melalui fasilitasi kegiatan kedewanan.

a. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Terealisasi sebesar Rp24.751.713.105 (84,37%) dari pagu Rp29.336.842.000. Target kinerja berupa 45 dokumen koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD telah direalisasikan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mewujudkan Pelayanan Anggota DPRD kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD	1. Survei Kepuasan Anggota DPRD 2. Nilai hasil survei persepsi masyarakat terhadap DPRD	- Baik - Baik	- Baik - Baik	- Baik - Baik



4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Kompetensi Sumber Daya Manusia yang masih perlu ditingkatkan Kualitasnya	Menganggarkan Dana Bimtek / Diklat setiap tahun dalam upaya meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang ada
2.	Masih adanya Staf Sekretariat DPRD yang belum / kurang memahami Tugas Pokok dan Fungsinya	Mengupayakan Pembinaan, Pengawasan dan Mengevaluasi pelaksanaan Tupoksi yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Muara Enim

5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI



3. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim. Pada Tahun 2025, alokasi Dana Induk APBD sebesar Rp.27.223.654.943 (Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) dan Dana Perubahan APBD Rp. 27.222.164.139 (Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah), dengan selisih berkurang sebesar Rp.1.490.804 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah).

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi Perubahan APBD 2025 dialokasikan sebesar **Rp. 26.379.281.113** (Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah), yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, Belanja Hibah dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp. 842.883.026** (Delapan Ratus Juta Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Puluh Enam Rupiah) yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim melaksanakan sebanyak 6 (enam) Program dan 13 (Tiga belas) Kegiatan, dan 43 (empat puluh tiga) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 6.394.046.713 dengan realisasi sebesar Rp 5.457.977.886 atau 85,36 % dengan capaian kinerja output sebesar 100 %. Program tersebut terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) subkegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

alokasi anggaran sebesar Rp. 183.699.900 dengan realisasi sebesar Rp. 183.261.374 atau 99,76 %.

Kegiatan ini terdiri dari 7 Sub Kegiatan sebagai berikut :



- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 11.623.800 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.11.576.000 atau sebesar 99,59 %.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 17.210.700 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.084.000 atau sebesar 99,26 %.
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 43.530.300 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 43.483.740 atau sebesar 99,89 %.
- d. Koordinasi dan penyusunan DPA - SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 20.942.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.891.000 atau sebesar 99,76 %.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 20.643.300 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.598.000 atau sebesar 99,78 %.
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 53.349.100 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 53.264.634 atau sebesar 99,84 %.
- g. Evaluasi kinerja perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 16.400.700 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.364.000 atau sebesar 99,78 %.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 4.309.681.168 dengan realisasi sebesar Rp. 3.510.477.892 atau 81,46 %.

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 4.250.784.880 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.452.584.075 atau sebesar 81,22 %.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 57.893.817 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 57.893.817 atau sebesar 98,30 %.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 22.201.500 dengan realisasi sebesar Rp. 20.803.076 atau 93,70 %

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai Berikut:



- a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 22.201.500 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.803.076 atau 93,70 %.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 72.855.000 dengan realisasi sebesar Rp. 54.533.248 atau 74,85 %.

Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 72.855.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 54.533.248 atau sebesar 74,85 %.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.311.995.069 dengan realisasi sebesar Rp. 1.281.361.382 atau 97,67 %.

Kegiatan ini terdiri dari 6 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 14.906.330 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.624.000 atau sebesar 98,11 %.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 757.405.639 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 750.087.600 atau sebesar 99,03 %.
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 79.079.800 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 78.433.000 atau sebesar 99,18 %.
- d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 39.882.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 27.805.000 atau sebesar 67,85 %.
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 7.440.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.506.000 atau sebesar 20,97 %.
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan anggaran sebesar Rp. 413.281.300 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 409.598.782 atau sebesar 99,11 %.

6. Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 35.349.526 dengan realisasi sebesar Rp. 35.292.450 atau 99,84 %.



Kegiatan ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp. 35.349.526 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.292.450 atau sebesar 99,84 %.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 181.393.300 dengan realisasi sebesar Rp. 131.781.847 atau 72,65 %.

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 109.233.300 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 68.513.347 atau sebesar 62,72 %.
- b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 48.120.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 44.880.000 atau sebesar 93,27 %.
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 24.040.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 18.388.500 atau sebesar 76,49 %.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 276.871.250 dengan realisasi sebesar Rp. 240.446.617 atau 86,85 %.

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 40.268.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 38.283.400 atau sebesar 95,07 %.
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 111.603.250 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 82.731.334 atau sebesar 74,13 %.
- c. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 125.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 119.451.883,27 atau sebesar 95,56 %.



B. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.103.098.447 dengan realisasi sebesar Rp. 2.005.566.348 atau 95,36 %.

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 12.241.700 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.884.300 atau sebesar 88,59 %.
- b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 215.040.434 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 199.539.300 atau sebesar 92,79 %.
- c. Pembentukan Paskibaraka dengan anggaran sebesar Rp. 1.875.816.943 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.795.182.748 atau sebesar 95,70 %.

C. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. Serta Pemantauan Situasi Politik.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 62.028.105.245 dengan realisasi sebesar Rp. 61.872.139.392 atau 99,75 %.

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik dengan anggaran sebesar Rp. 8.330.850 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.382.800 atau sebesar 16,60 %.
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,



Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik dengan anggaran sebesar Rp. 75.301.200 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 71.106.550 atau sebesar 94,43 %.

- c. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik dengan anggaran sebesar Rp. 1.860.542.800 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.859.979.050 atau sebesar 99,97 %.
- d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik dengan anggaran sebesar Rp. 46.929.800 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.242.550 atau sebesar 98,54 %.
- e. Pelaksanaan Tugas Paskibraka dengan anggaran sebesar Rp. 232.208.300 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 224.631.156 atau sebesar 96,32 %.

D. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 667.415.379 dengan realisasi sebesar Rp. 654.484.740 atau 98,06 %.

Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 12.660.790 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.384.600 atau sebesar 90,11 %.
- b. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing di Daerah



dengan anggaran sebesar Rp. 80.446.258 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 79.282.100 atau sebesar 98,55 %.

- c. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 544.558.800 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 535.330.040 atau sebesar 98,31 %.
- d. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas, dan Ormas Asing di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 29.749.531 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 28.463.400 atau sebesar 95,68 %.

E. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 451.537.850 dengan realisasi sebesar Rp. 396.696.297 atau 87,85 %.

Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 184.532.350 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 152.126.957 atau sebesar 82,44 %.
- b. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 52.969.200 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 50.104.640 atau sebesar 94,59 %.
- c. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 158.071.600 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 142.783.850 atau sebesar 90,33 %.



- d. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 55.964.700 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 51.680.850 atau sebesar 92,35 %.

F. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 15.381.752.800 dengan realisasi sebesar Rp. 14.182.636.464 atau 92,20 %.

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Koordinasi dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 15.081.678.600 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.912.411.494 atau sebesar 92,25 %.
- b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 173.795.200 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 149.487.710 atau sebesar 86,01 %.
- c. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 126.279.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 120.737.260 atau sebesar 95,61 %.



3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target			Capaian		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026
Mewujudkan Situasi dan kondisi Kabupaten Muara Enim yang Aman, tenteram dan rukun	Meningkatnya rasa aman, demokratis, partisipatif	Presentase Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

-

5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama Tahun 2025 ada Penghargaan yaitu

1. Penghargaan Atas Keberhasilan Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHAL) Tahun 2025. (KEMENDAGRI RI)
2. Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2025 dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun ke- 80 Kemerdekaan Republik Indonesia (KEMENDAGRI RI)
3. PENGHARGAAN KEBERHASILAN PEMILU DAN PILKADA (KPU MUARA ENIM)



4. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim. Pada Tahun 2025, dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 20.212.666.979** (*Dua Puluh Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp. 17.433.748.099** (*Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) atau **86,25 persen** dengan capaian kinerja sebesar **98,86 persen**.

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Terdiri dari 3 Program, 14 Kegiatan, dan 56 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi anggaran sebesar Rp. 919.173.200 dengan realisasi sebesar Rp. 851.281.497 atau 92,61 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 429.194.000 dengan realisasi sebesar Rp. 412.674.191 atau 96,15 persen.
- b. Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 53.942.300 dengan realisasi sebesar Rp. 46.216.820 atau 85,68 persen.
- c. Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 50.902.000 dengan realisasi sebesar Rp. 45.217.215 atau 88,83 persen.
- d. Koordinasi penyusunan lap. capaian kinerja dan lap. capaian kinerja SKPD.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 270.799.800 dengan realisasi sebesar Rp. 253.464.269 atau 93,60 persen.
- e. Evaluasi kinerja perangkat daerah.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 114.335.100 dengan realisasi sebesar Rp. 93.709.002 atau 81,96 persen. Realisasi belum optimal dikarenakan padatnya jadwal kegiatan Bappeda sehingga tidak terlaksananya rapat penyusunan dokumen SPIP dan Register Resiko Bappeda.



2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 7.436.510.119 dengan realisasi sebesar Rp. 6.246.798.799 atau 84,00 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 7.324.807.277 dengan realisasi sebesar Rp. 6.155.331.012 atau 84,03 persen.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 111.702.842 dengan realisasi sebesar Rp. 91.467.787 atau 81,88 persen. Realisasi belum optimal dikarenakan padatnya jadwal kegiatan Bappeda sehingga tidak terlaksananya rapat penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 183.239.300 dengan realisasi sebesar Rp. 164.003.384 atau 89,50.

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Pengamanan barang milik daerah SKPD.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 154.354.400 dengan realisasi sebesar Rp. 137.795.373 atau 89,27.

b. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 28.884.900 dengan realisasi sebesar Rp. 26.208.011 atau 90,73.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 315.793.000 dengan realisasi sebesar Rp. 294.496.724 atau 93,26 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 196.149.500 dengan realisasi sebesar Rp. 181.595.754 atau 92,58 persen.

b. Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 119.643.500 dengan realisasi sebesar Rp. 112.900.970 atau 94,36 persen.



5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.320.494.642 dengan realisasi sebesar Rp. 1.194.013.092 atau 90,42 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 9 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 58.659.000 dengan realisasi sebesar Rp. 58.021.000 atau 98,91 persen.

- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 46.065.476 dengan realisasi sebesar Rp. 45.296.000 atau 98,33 persen.

- c. Penyediaan bahan logistik Kantor.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 139.940.771 dengan realisasi sebesar Rp. 127.477.548 atau 91,09 persen.

- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 128.548.600 dengan realisasi sebesar Rp. 126.272.600 atau 98,23 persen.

- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 57.600.000 dengan realisasi sebesar Rp. 39.820.000 atau 69,13 persen. Realisasi belum optimal dikarenakan penyesuaian dengan permintaan tagihan bahan bacaan.

- f. Fasilitas Kunjungan Tamu.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 81.900.000 dengan realisasi sebesar Rp. 48.885.000 atau 59,69 persen. Realisasi belum optimal dikarenakan kegiatan ini hanya diperuntukkan untuk makan minum rapat eksternal Bappeda.

- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 595.431.000 dengan realisasi sebesar Rp. 571.752.358 atau 96,02 persen.

- h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 49.911.700 dengan realisasi sebesar Rp. 42.382.561 atau 84,92 persen. Realisasi belum optimal dikarenakan penyesuaian satuan harga belanja Alat Tulis Kantor di e-katalog Inaproc.

- i. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD

Alokasi anggaran sebesar Rp. 162.438.095 dengan realisasi sebesar Rp. 134.106.025 atau 82,56 persen. Realisasi belum



optimal dikarenakan anggaran perjalanan dinas tenaga ahli tidak dilaksanakan, karena rapat dilakukan secara daring (Zoom meeting).

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 2.720.587.375 dengan realisasi sebesar Rp. 2.500.599.947 atau 91,91 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.400.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.247.200.000 atau 89,09 persen.
- b. Pengadaan Mebel
Alokasi anggaran sebesar Rp. 364.900.000 dengan realisasi sebesar Rp. 322.227.944 atau 88,31 persen.
- c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 955.687.375 dengan realisasi sebesar Rp. 931.172.003 atau 97,43 persen.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 640.755.012 dengan realisasi sebesar Rp. 367.163.516 atau 57,30 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 4.530.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.500.000 atau 99,34 persen.
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 428.662.000 dengan realisasi sebesar Rp. 302.743.516 atau 70,63 persen. Realisasi belum optimal dikarenakan disesuaikan dengan tagihan listrik dan air pada bulan yang berjalan.
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 207.563.012 dengan realisasi sebesar Rp. 59.920.000 atau 28,87 persen. Realisasi belum optimal dikarenakan belum ada petunjuk teknis untuk perekrutan tenaga outsourcing



8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 899.353.554 dengan realisasi sebesar Rp. 788.691.597 atau 87,70 Persen.

Kegiatan ini terdiri dari 4 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 244.146.600 dengan realisasi sebesar Rp. 177.016.597 atau 72,50 Persen. Realisasi belum optimal karena pembelanjaan disesuaikan dengan besaran pajak tahunan dan kebutuhan pemeliharaan kendaraan.
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 36.310.000 dengan realisasi sebesar Rp. 35.620.000 atau 98,10 Persen.
- c. Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 499.812.000 dengan realisasi sebesar Rp. 459.215.000 atau 91,88 Persen.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 119.084.954 dengan realisasi sebesar Rp. 116.840.000 atau 98,11 Persen.

B. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.383.389.753 dengan realisasi sebesar Rp. 1.251.249.663 atau 90,45 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Konsultasi Publik.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 163.850.000 dengan realisasi sebesar Rp. 142.142.555 atau 86,75 persen.
- b. Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 134.462.100 dengan realisasi sebesar Rp. 117.604.080 atau 87,46 persen.
- c. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 424.489.329 dengan realisasi sebesar Rp. 383.289.839 atau 90,29 persen.
- d. Penyiapan bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan.



Alokasi anggaran sebesar Rp. 57.611.345 dengan realisasi sebesar Rp. 36.875.953 atau 64,01 persen. Realisasi belum optimal disebabkan pada biaya perjalanan dinas untuk pelaksanaan koordinasi bahan Musrenbang Kecamatan/Desa dilakukan melalui Telp/WA.

- e. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 602.976.979 dengan realisasi sebesar Rp. 571.337.236 atau 94,75 persen.

2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.120.082.374 dengan realisasi sebesar Rp. 890.950.257 atau 79,54 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut.

- a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 773.722.674 dengan realisasi sebesar Rp. 608.992.445 atau 78,71 persen. Realisasi belum optimal dikarenakan honorarium narasumber yang direncanakan 15 orang hanya terpenuhi 13 orang dan kegiatan desk e-walidata direncanakan 4 hari menjadi 2 hari begitu juga dengan pelatihan Satu Data Indonesia terlaksana 3 hari.

- b. Pembinaan, Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 107.502.800 dengan realisasi sebesar Rp. 82.194.776 atau 76,46 persen. Realisasi belum optimal dikarenakan terlaksanakannya penilaian CSR Award dikarenakan waktu yang terbatas dan padatnya jadwal kegiatan di Bappeda.

- c. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 238.856.900 dengan realisasi sebesar Rp. 199.763.036 atau 83,63 persen.

3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 540.236.700 dengan realisasi sebesar Rp. 359.666.438 atau 66,58 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :



- a. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 149.297.700 dengan realisasi sebesar Rp. 101.264.645 atau 67,83 persen. Realisasi belum optimal dikarenakan terbatasnya waktu dan padatnya jadwal kegiatan narasumber sehingga biaya operasional Narasumber tidak terealisasi. Rapat laporan akhir pengembangan e-SAKIP Kabupaten Muara Enim dilaksanakan di Yogyakarta bersama Tim.
- b. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 390.939.000 dengan realisasi sebesar Rp. 258.401.793 atau 66,10 persen. Realisasi yang belum optimal karena koordinasi lebih banyak dilakukan Via Telp/WA.

C. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.236.516.850 dengan realisasi sebesar Rp. 1.110.595.643 atau 89,82 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 6 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 213.958.050 dengan realisasi sebesar Rp. 209.311.237 atau 97,83 persen.
- b. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 230.608.300 dengan realisasi sebesar Rp. 227.838.106 atau 98,80 persen
- c. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 303.104.000 dengan realisasi sebesar Rp. 216.597.230 atau 71,46 persen. Realisasi yang belum dikarenakan Honorarium Tenaga Ahli yang dianggarkan selama 3 bulan hanya terealisasi selama 2 bulan, hal ini disebabkan APBD Perubahan baru disahkan pada tanggal 16 Oktober sehingga MOU hanya dapat dilaksanakan Nopember & Desember.



- d. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 188.854.800 dengan realisasi sebesar Rp. 185.748.574 atau 98,36 persen.
- e. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- i. Alokasi anggaran sebesar Rp. 185.800.500 dengan realisasi sebesar Rp. 169.505.037 atau 91,23 persen.
- f. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengembangan Manusia.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 114.191.200 dengan realisasi sebesar Rp. 101.595.459 atau 88,97 persen.

2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).

Alokasi anggaran sebesar Rp. 739.257.000 dengan realisasi sebesar Rp. 705.883.316 atau 95,49 persen.

Kegiatan ini terdiri dari 5 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD).
Alokasi anggaran sebesar Rp. 274.005.800 dengan realisasi sebesar Rp. 265.955.940 atau 97,06 persen.
- b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Alokasi anggaran sebesar Rp. 58.525.200 dengan realisasi sebesar Rp. 54.907.090 atau 93,82 persen.
- c. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pengembangan Daerah Bidang Perekonomian.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 263.085.300 dengan realisasi sebesar Rp. 246.316.603 atau 93,63 persen.
- d. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA RPJPD, RPJMD dan RKPD
Alokasi anggaran sebesar Rp. 65.151.300 dengan realisasi sebesar Rp. 64.405.368 atau 98,86 persen.



- e. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA. Alokasi anggaran sebesar Rp. 78.489.400 dengan realisasi sebesar Rp. 74.298.315 atau 94,66 persen.

3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Alokasi anggaran sebesar Rp. 757.728.100 dengan realisasi sebesar Rp. 708.354.226 atau 93,54 persen.

Kegiatan tersebut terdiri dari 5 Sub Kegiatan sebagai berikut.

- a. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Alokasi anggaran sebesar Rp. 97.917.500 dengan realisasi sebesar Rp. 88.692.655 atau 90,58 persen.
- b. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 177.074.700 dengan realisasi sebesar Rp. 171.017.819 atau 96,58 persen.
- c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur.
Alokasi anggaran sebesar Rp. 166.412.700 dengan realisasi sebesar Rp. 156.151.831 atau 93,83 persen.
- d. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Alokasi anggaran sebesar Rp. 177.397.300 dengan realisasi sebesar Rp. 168.237.971 atau 94,84 persen.
- e. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Alokasi anggaran sebesar Rp. 138.475.900 dengan realisasi sebesar Rp. 124.253.950 atau 89,73 persen.



3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran			Capaian		
			2024	2025	2026	2024	2025	2026
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Baik	Baik	Baik	Baik (89,60)	Baik (90)	-

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

-

5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

1. Terbaik I AMPL Sriwijaya Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.
2. Top 10 Smart Sanitation Award (SSA) dari Aliasi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) Tahun 2018.
3. Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 untuk Inovasi Gerbang Serasan.
4. Penghargaan Indonesia's Attractiveness Award 2018 Katagori : Gold sebagai Kabupaten Terbaik Sektor Pelayanan Publik dari Indonesia's Attractiveness Award.
5. Penghargaan Top 10 Inovasi Terbaik tingkat Kabupaten Tahun 2024.
6. Penghargaan anugerah Pangripta Sriwijaya kategori terbaik I Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun 2024.
7. Penghargaan Perencanaan Terbaik Ketiga Tingkat Nasional Kategori Kabupaten dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2025.



5. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Dilaksanakan oleh perangkat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim dengan Alokasi Anggaran Tahun 2025 sebesar **Rp663.569.429.721,20** dan terealisasi sebesar **Rp623.023.668.831,84** (*Unaudited*) atau **93,88 Persen** dan kinerja keluaran (*output*) sebesar **100 Persen** dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar **Rp91.511.190.151,20** terealisasi sebesar **Rp62.603.742.427,84** (*Unaudited*) atau **68,41 Persen** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp1.045.838.400,00** terealisasi sebesar **Rp1.009.003.527,00** (*Unaudited*) atau **96,48 Persen** yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar **Rp5.000.000.000,00** terealisasi sebesar **Rp603.038.711,00** (*Unaudited*) atau **12,06 Persen** yang dialokasikan untuk membiayai keperluan darurat yang mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

D. Belanja Transfer

Belanja Transfer dialokasikan sebesar **Rp566.012.401.170,00** terealisasi sebesar **Rp558.807.884.166,00** (*Unaudited*) atau **98,73 Persen** yang dialokasikan untuk membiayai pengeluaran dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Terdiri dari **3 (tiga)** program, **13 (tiga belas)** kegiatan, dan **52** Sub kegiatan yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp74.849.576.298,76** dengan realisasi sebesar **Rp50.915.925.628,00** (*Unaudited*) atau **66,51 Persen** program ini terdiri dari **7** kegiatan, dan **25** Sub kegiatan sebagai berikut.

- 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.** Alokasi Anggaran sebesar **Rp28.431.000,00** dengan Realisasi sebesar **Rp26.955.000,00** atau **94,81 Persen**.



- a. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp 5.179.700,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp 5.050.000,00 (Unaudited)** atau sebesar **97,50 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp3.783.600,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp3.680.000,00 (Unaudited)** atau sebesar **97,26 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp5.162.500,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp5.050.000,00 (Unaudited)** atau sebesar **97,82 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- d. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp6.707.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp6.540.000,00 (Unaudited)** atau sebesar **97,51 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- e. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar **Rp3.667.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp2.855.000,00 (Unaudited)** atau sebesar **77,86 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.



- f. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar **Rp 3.931.200,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp 3.780.000,00 (*Unaudited*)** atau sebesar **96,15 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp71.950.596.320,76 dengan Realisasi sebesar Rp47.189.852.532,00 atau 65,59 Persen.**
- a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar **Rp71.502.373.320,76** dan realisasi keuangan sebesar **Rp46.803.023.967,00 (*Unaudited*)** atau sebesar **65,46 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- b. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar **Rp399.044.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp341.626.965,00 (*Unaudited*)** atau sebesar **85,61 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Administrasi Tugas ASN dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar **Rp14.852.400,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp13.341.600,00 (*Unaudited*)** atau sebesar **89,83 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- d. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar **Rp34.326.600,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp31.860.000,00 (*Unaudited*)** atau sebesar **92,81 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.



3. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp125.625.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp90.210.960,00 atau 71,81 Persen.**
 - a. Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar **Rp125.625.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp90.210.960,00 (Unaudited)** atau sebesar **71,81 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
4. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp133.122.000,00 dengan Realisasi sebesar Rp16.796.655,00 atau 12,62 Persen.**
 - a. Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar **Rp133.122.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp16.796.655,00 (Unaudited)** atau sebesar **11,90 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
5. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp2.126.616.239 dengan Realisasi sebesar Rp 1.801.046.123,00 atau 84,69 Persen.**
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar **Rp25.140.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp12.188.000,00 (Unaudited)** atau sebesar **48,48 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar **Rp807.838.400** dan realisasi keuangan sebesar **Rp774.458.207,00 (Unaudited)** atau sebesar **95,87 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
 - c. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar **Rp514.362.139,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp443.834.019,00 (Unaudited)** atau sebesar **86,29**



Persen. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Bahan Logistik Kantor dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.

- d. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar **Rp402.299.700,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp366.493.514,00 (Unaudited)** atau sebesar **91,10 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- e. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar **Rp26.976.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp13.610.000,00 (Unaudited)** atau sebesar **50,45 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Bahan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- f. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar **Rp350.000.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp190.462.383,00 (Unaudited)** atau sebesar **54,42 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp638.291.500,00 dengan Realisasi sebesar Rp479.818.686,00 atau 75,17 Persen.

- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar **Rp27.291.500,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp11.320.000,00 (Unaudited)** atau sebesar **41,48 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar **Rp384.000.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp311.333.686,00 (Unaudited)** atau sebesar **81,08 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber



Daya Air dan Listrik dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.

- c. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar **Rp227.000.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp157.165.000,00 (Unaudited)** atau sebesar **69,24 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp1.548.066.039 dengan Realisasi sebesar Rp1.311.245.672,00 atau 84,70 Persen.

- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar **Rp288.312.639,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp242.960.772,00 (Unaudited)** atau sebesar **84,27 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- b. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar **Rp893.333.400** dan realisasi keuangan sebesar **Rp866.323.200,00 (Unaudited)** atau sebesar **93,78 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- c. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar **Rp282.480.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp132.434.800,00 (Unaudited)** atau sebesar **46,88 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- d. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar **Rp83.940.000,00** dan



realisasi keuangan sebesar **Rp69.526.900,00 (Unaudited)** atau sebesar **82,83 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.

B. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Alokasi anggaran untuk program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar **Rp582.335.259.542,44** dengan Realisasi sebesar **Rp568.621.202.627,84 (Unaudited)** atau **97,64 Persen** program ini terdiri dari 5 kegiatan, dan 18 Sub kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp1.347.466.416 dengan Realisasi sebesar Rp1.179.063.366,00 atau 87,50 Persen.

- a. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dengan anggaran sebesar **Rp300.399.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp248.790.000,00 (Unaudited)** atau sebesar **82,82 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya KUA PPAS dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Perubahan dengan anggaran sebesar **Rp278.349.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp222.500.000,00 (Unaudited)** atau sebesar **79,94 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya Perubahan KUA PPAS dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan anggaran sebesar **Rp402.626.916,44** dan realisasi keuangan sebesar **Rp369.552.808,00 (Unaudited)** atau sebesar **91,79 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- d. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan anggaran sebesar **Rp366.091.500,00** dan realisasi keuangan sebesar



Rp338.220.558,00 (Unaudited) atau sebesar **92,39 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.

2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp9.168.390.946,00 dengan Realisasi sebesar Rp7.307.205.265,84 atau 79,70 Persen.

- a. Sub kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan anggaran sebesar **Rp1.688.431.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp 1.440.644.066,00 (Unaudited)** atau sebesar **85,32 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- b. Sub kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dengan anggaran sebesar **Rp15.303.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp 15.287.500,00 (Unaudited)** atau sebesar **99,90 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- c. Sub kegiatan Koordinasi Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas dengan anggaran sebesar **Rp7.148.316.850,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp5.711.314.153,84 (Unaudited)** atau sebesar **79,90 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Koordinasi Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- d. Sub kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait dengan anggaran sebesar **Rp189.617.500,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp106.861.746,00 (Unaudited)** atau sebesar **56,36 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub



kegiatan ini adalah terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.

- e. Sub kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar **Rp126.722.596,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp33.097.800,00 (Unaudited)** atau sebesar **26,12 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.

3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp807.001.010,00 dengan Realisasi sebesar Rp726.595.219,00 atau 90,04 Persen.

- a. Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban dengan anggaran sebesar **Rp108.536.500,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp59.697.284,00 (Unaudited)** atau sebesar **55,00 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- b. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran dengan anggaran sebesar **Rp207.116.200,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp200.379.900,00 (Unaudited)** atau sebesar **96,75 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- c. Sub kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar **Rp181.796.800,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp178.190.257,00 (Unaudited)** atau sebesar **98,02 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah



terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.

- d. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar **Rp130.990.200,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp119.170.873,00 (Unaudited)** atau sebesar **90,98 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- e. Sub kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar **Rp178.561.310,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp169.156.905,00 (Unaudited)** atau sebesar **94,73 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.

4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp571.012.401.170,00 dengan Realisasi sebesar Rp559.408.338.777,00 atau 97,97 Persen.

- a. Sub kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan anggaran sebesar **Rp571.012.401.170,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp559.408.338.777,00 (Unaudited)** atau sebesar **97,97 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.

5. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah. Alokasi Anggaran sebesar Rp0 dengan Realisasi sebesar Rp0 atau 0 Persen



- a. Sub kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah dengan anggaran sebesar **Rp0** dan realisasi keuangan sebesar **Rp0 (Unaudited)** atau sebesar **0 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- b. Sub kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar **Rp0** dan realisasi keuangan sebesar **Rp0 (Unaudited)** atau sebesar **0 Persen**. adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.

C. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Alokasi anggaran untuk program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar **Rp4.683.422.080,00** dengan realisasi sebesar **Rp3.487.031.792,00 (Unaudited)** atau **74,45 Persen** program ini terdiri dari 1 kegiatan, dan 10 Sub kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- a. Sub kegiatan Penyusunan Standar Harga dengan anggaran sebesar **Rp442.201.500,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp278.446.432,00 (Unaudited)** atau sebesar **62,97 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Standar Harga dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- b. Sub kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar **Rp96.615.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp35.734.806,00 (Unaudited)** atau sebesar **36,99 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- c. Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar **Rp481.064.754,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp246.190.000,00 (Unaudited)** atau sebesar **51,18**



Persen. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.

- d. Sub kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar **Rp205.960.704** dan realisasi keuangan sebesar **Rp119.027.600,00 (Unaudited)** atau sebesar **57,79 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- e. Sub kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar **Rp150.663.800,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp115.550.700,00 (Unaudited)** atau sebesar **76,69 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- f. Sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar **Rp261.962.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp204.506.940,00 (Unaudited)** atau sebesar **78,07 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- g. Sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar **Rp711.890.800,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp661.115.170,00 (Unaudited)** atau sebesar **54,95 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- h. Sub kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar **Rp79.792.200** dan realisasi keuangan sebesar **Rp45.500.000,00 (Unaudited)** atau sebesar **57,02 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.



- i. Sub kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan anggaran sebesar **Rp218.248.034** dan realisasi keuangan sebesar **Rp88.828.061,00 (Unaudited)** atau sebesar **40,70 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.
- j. Sub kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar **Rp2.035.023.288,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp1.692.132.083,00 (Unaudited)** atau sebesar **83,15 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan capaian output/keluaran sebesar **100 Persen**.

D. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel		Opini Terhadap Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP	WTP
		Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Terhadap Laporan Keuangan BPK	WTP	WTP	100
		Meningkatkan Akuntabilitas dan kualitas kinerja BPKAD	Nilai SAKIP BPKAD	72,00/BB	72,50/BB	100



E. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	Mengingat beban kerja BPKAD dalam mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset daerah guna mencapai opini BPK WTP dan dikaitkan dengan penatausahaan, pengelolaan asset, dan penyusunan laporan keuangan daerah terutama di akhir tahun anggaran selalu mengalami kendala yaitu terbatasnya jumlah ASN	Penambahan jumlah ASN terutama yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi, keuangan, asset daerah, dan hukum.
2	Mengingat pengelolaan keuangan daerah saat ini telah menggunakan teknologi informatika berupa aplikasi SIPD RI yang berbasis internet sehingga memerlukan kestabilan dan kecepatan jaringan internet serta memerlukan beberapa aplikasi pendamping untuk mensupport aplikasi yang telah ada serta perlunya tenaga IT.	Perlunya pengadaan tenaga IT untuk peningkatan operasional aplikasi dan jaringan yang telah ada Perlunya peningkatan jaringan internet dan kapasitas kecepatan internet di BPKAD Perlunya penambahan server untuk aplikasi yang diperlukan

F. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Prestasi yang diterima oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim selama tahun 2025 adalah :

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2024.
2. Penghargaan dari Bank Sumsel Babel kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim sebagai Pemerintah Daerah dengan Implementasi 100% Pembayaran Gaji ASN melalui SIPD RI Tahun 2025.
3. Penghargaan atas kontribusi dan ketaatan membayar tagihan rekening listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya.



6. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan wajib kepegawaian daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muara Enim. Pada Tahun 2025 dialokasikan sebesar **Rp76.607.558.662,01,-** terealisasi sebesar **Rp67.313.437.067,00,-** atau **87,87 persen** dan kinerja keluaran (output) sebesar **99,48 persen** dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar **Rp22.618.079.557,01,-** terealisasi sebesar **Rp19.472.973.267,00,-** atau **86,09 persen** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/ jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja modal dialokasikan sebesar **Rp53.989.479.109,00,-** terealisasi sebesar **Rp47.840.463.800,00,-** atau **88,61 persen** yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi asset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2025, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muara Enim melaksanakan **3 program 13 kegiatan dan 35 Sub kegiatan**. Adapun program dan kegiatan, capaian program indikator sasaran yang berkaitan langsung dengan target kinerja sasaran dalam Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut:

URUSAN KEPEGAWAIAN

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp63.971.097.974,01,-** dengan realisasi keuangan sebesar **Rp56.933.342.546,00,-** atau **88,99 persen** dengan capaian kinerja *output* sebesar **98,83 persen**. Program ini terdiri dari **8 (delapan)** kegiatan dan **24 (dua puluh empat)** sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub kegiatan **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** dengan anggaran sebesar **Rp11.193.380,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp10.166.255,00,-** atau sebesar **90,82 persen**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **3 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.



- b. Sub kegiatan **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** dengan anggaran sebesar **Rp17.617.585,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp16.598.152,00,-** atau sebesar **94,21 persen**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **2 Dokumen RKA-SKPD** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
 - c. Sub kegiatan **Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD** dengan anggaran sebesar **Rp20.497.771,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp19.727.995,00,-** atau sebesar **96,24 persen**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **2 Dokumen** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- a. Sub kegiatan **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** dengan anggaran sebesar **Rp6.521.182.086,01,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp6.226.958.035,00,-** atau sebesar **95,49 persen**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **12 Bulan** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
 - b. Sub kegiatan **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD** dengan anggaran sebesar **Rp11.186.934,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp10.008.892,00,-** atau sebesar **89,47 persen**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **1 Laporan Keuangan Akhir** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
 - c. Sub kegiatan **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD** dengan anggaran sebesar **Rp11.175.571,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp10.356.832,00,-** atau sebesar **92,67 persen**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **14 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
- a. Sub kegiatan **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** dengan anggaran sebesar **Rp162.730.636,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp138.892.775,00,-** atau sebesar **85,35 persen**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah



3 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub kegiatan **Pemulangan Pegawai Yang Pensiun** dengan anggaran sebesar **Rp55.944.349,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp53.841.349,00,-** atau sebesar **96,24 persen**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **270 Orang** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
- b. Sub kegiatan **Pemindahan Tugas ASN** dengan anggaran sebesar **Rp75.866.148,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp70.175.842,-** atau sebesar **92.50 persen**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **120 Orang** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
- c. Sub kegiatan **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi** dengan anggaran sebesar **Rp72.000.000,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp39.560.000,00,-** atau sebesar **54,94 persen**. Hal ini dikarenakan realisasi 9 orang ASN dengan besaran kontribusi yang berbeda-beda sesuai dengan kegiatan penyelenggaraan. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **12 orang** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub kegiatan **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** dengan anggaran sebesar **Rp35.822.588,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp33.053.000,00,-** atau sebesar **92,27 persen**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **1 Paket** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
- b. Sub kegiatan **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** dengan anggaran sebesar **Rp143.220.000,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp127.668.500,00,-** atau sebesar **89,14 persen**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **1 Paket** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
- c. Sub kegiatan **Penyediaan Bahan Logistik Kantor** dengan anggaran sebesar **Rp266.483.700,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp218.704.938,00,-** atau sebesar **82,07 persen**. Hal ini



dikarenakan BBM Operasional Kendaraan Dinas kepala Badan tidak bisa dibelanjakan sesuai dengan rekomendasi dari BPK. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **1 Paket** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**

- d. Sub kegiatan **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan** dengan anggaran sebesar **Rp75.430.000,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp68.211.200,00,-** atau sebesar **90,43 persen**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **1 Paket** maka capaian output/keluaran sebesar **100 persen**
- e. Sub kegiatan **Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang-undangan** dengan anggaran sebesar **Rp28.800.000,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp13.090.000,00,-** atau sebesar **45,45 persen**. Hal ini dikarenakan tagihan sesuai dengan pemakaian media/ surat kabar/ majalah setiap bulannya dimana target 12 media tetapi yang rutin menyampaikan hanya 7 media. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **12 Dokumen** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
- f. Sub kegiatan **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** dengan anggaran sebesar **Rp380.598.700,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp360.711.591,00,-** atau sebesar **94,77 persen**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **92 Laporan** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub kegiatan **Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** dengan anggaran sebesar **Rp55.061.957.862,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp48.750.207.035,-** atau sebesar **88,54 persen**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **2 Unit** dengan capaian output/keluaran sebesar **90 persen**

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub kegiatan **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** dengan anggaran sebesar **Rp9.000.000,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp6.750.000,00,-** atau sebesar **75 persen**. Hal ini dikarenakan Jasa surat-menyurat disesuaikan dengan



kebutuhan belanja materai Rp10.000. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **1 Laporan** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

- b. Sub kegiatan **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** dengan anggaran sebesar **Rp419.041.497,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp259.602.877,00,-** atau sebesar **61,95 persen**. Hal ini dikarenakan di bulan September bertambahnya rekening listrik untuk Diklat BKPSDM tetapi masih dalam proses pemasangan jaringan listrik baru pada tahun 2026 dengan kapasitas 270.000 Kwh. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **3 Laporan** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
- c. Sub kegiatan **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor** dengan anggaran sebesar **Rp45.554.400,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp37.250.000,00,-** atau sebesar **81,77 persen**. Hal ini dikarenakan pemeliharaan mesin fotocopy tidak dapat diperbaiki lagi karena penggantian alat/suku cadang tidak ditemukan lagi dipasaran. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **1 Laporan** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
- d. Sub kegiatan **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** dengan anggaran sebesar **Rp240.930.000,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp227.159.500,00,-** atau sebesar **94,28 persen**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **1 Laporan** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub kegiatan **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** dengan anggaran sebesar **Rp162.624.350,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp109.012.778,00,-** atau sebesar **67,03 persen**. Hal ini dikarenakan pemeliharaan kendaraan dinas disesuaikan dengan kerusakan/pemeliharaan kendaraan dinas tersebut. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **12 unit kendaraan** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.



- b. Sub kegiatan **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** dengan anggaran sebesar **Rp96.792.000,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp86.580.000,00,-** atau sebesar **89,45 persen**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **2 Unit** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
- c. Sub kegiatan **Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan** dengan anggaran sebesar **Rp45.448.417,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp39.055.000,00,-** atau sebesar **85,93 persen**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **3 unit** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

B. Program Kepegawaian Daerah

Alokasi anggaran untuk Program Kepegawaian Daerah sebesar **Rp7.512.493.242,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp5.638.482.425,00,-** atau **75,05 persen** dengan capaian kinerja *output* sebesar **100 persen**. Program ini terdiri dari **4 (empat)** kegiatan dan **9 (Sembilan)** sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**
 - a. Sub kegiatan **Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN** dengan anggaran sebesar **Rp737.650.966,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp672.436.763,00,-** atau sebesar **91,16 persen**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **1 dokumen** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
 - b. Sub kegiatan **Fasilitasi Lembaga Profesi ASN** dengan anggaran sebesar **Rp563.068.360,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp517.016.905,00,-** atau sebesar **91,82 persen**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **250 lembaga** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
 - c. Sub kegiatan **Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian** dengan anggaran sebesar **Rp162.353.800,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp144.128.215,00,-** atau sebesar **88,77 persen**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **3 dokumen** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.



2. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

- a. Sub kegiatan **Pengelolaan Mutasi ASN** dengan anggaran sebesar **Rp66.033.800,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp39.652.603,00,-** atau sebesar **60,05 persen**. Hal ini dikarenakan Pelaksanaan mutasi antar instansi telah dilaksanakan melalui aplikasi SIASN. Sehingga perjalanan dinas hanya bisa dijalankan saat terdapat kendala pada aplikasi dan untuk pengurusan mutasi antar Provinsi yang mengharuskan menyampaikan surat ke BKD Provinsi Sumatera Selatan. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **25 dokumen** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
- b. Sub kegiatan **Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN** dengan anggaran sebesar **Rp127.054.545,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp121.939.253,00,-** atau sebesar **95,97 persen**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **1.000 dokumen** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
- c. Sub kegiatan **Pengelolaan Promosi ASN** dengan anggaran sebesar **Rp2.826.921.327,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp1.464.524.292,00,-** atau sebesar **51,81 persen**. Hal ini dikarenakan pelaksanaan Promosi dan Mutasi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim belum ada arahan/ petunjuk Bupati Muara Enim sebagai PPK untuk pelaksana kegiatan yang dimaksud. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **1 dokumen** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

- a. Sub kegiatan **Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN** dengan anggaran sebesar **Rp25.957.000,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp25.381.663,00,-** atau sebesar **97,78 persen**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **500 Orang** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
- b. Sub kegiatan **Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN** dengan anggaran sebesar **Rp2.840.000.000,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp2.540.000.000,00,-** atau sebesar **89,44 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **80 orang** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.



4. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- a. Sub kegiatan **Pembinaan Disiplin ASN** dengan anggaran sebesar **Rp163.453.444,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp113.402.730,00,-** atau sebesar **69,38 persen**. Hal ini dikarenakan Penganggaran untuk sosialisasi IDIS selama 2 hari, tetapi karena keterbatasan waktu dari narasumber (narasumber dari Badan Kepegawaian Negara) jadi hanya dilaksanakan 1 hari sehingga terdapat selisih anggaran dari sewa penginapan (hotel) serta honor narasumber. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah sebanyak **100 Orang** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

C. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Alokasi anggaran untuk Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar **Rp5.123.967.446,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp4.741.612.096,00,-** atau **92,54 persen** dengan capaian kinerja *output* sebesar **100 persen**. Program ini terdiri dari **1 (satu)** kegiatan dan **2 (dua)** sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

- a. Sub kegiatan **Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan** dengan anggaran sebesar **Rp5.004.743.126,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp4.684.595.158,00,-** atau sebesar **93,60 persen**. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah **24 laporan** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
- b. Sub kegiatan **Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan** dengan anggaran sebesar **Rp119.224.320,00,-** dan realisasi keuangan sebesar **Rp57.016.938,00,-** atau sebesar **47,82 persen**. Hal ini dikarenakan Terbatasnya waktu dan personil di bidang PKA dengan padatnya kegiatan Diklat & Bimtek sepanjang Tahun 2025 sehingga Monitoring dan Evaluasi berfokus hanya pada PNS Tugas Belajar di dalam Provinsi Sumatera Selatan. Adapun output/keluaran dari



subkegiatan ini adalah **1 dokumen** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja		Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
1		2		3		4	5	6
1.	Terwujudnya SDM Aparatur Yang Profesional				Indeks Profesionalitas ASN	75,01	80,28	107,03%
		1.1	Terwujudnya Sistem Merit	1.1.1	Indeks Sistem Merit	137,20 / Buruk	134,51 / Buruk	(1,96%)
		1.2	Meningkatnya Penerapan Manajemen ASN	1.1.2	Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	71.60 (B)	70.20 (B)	(1,95%)
		1.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1.1.3	Indeks Kepuasan Pegawai	Baik (73,00)	Sangat Baik (89,98)	123,26%

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1.	Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 oleh Badan Kepegawaian Negara RI yang baru dirilis pada Bulan September 2025 terhadap 7.652 ASN, IP ASN Kabupaten Muara Enim mendapatkan nilai 80,28 dengan kategori sedang dengan rentang nilai antara 71-80. Dari hasil pengukuran terdapat 3 (tiga) dimensi dengan nilai rata-rata baik yaitu	1) Mengupayakan Peningkatan jenjang/tingkat pendidikan ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui peningkatan program tugas belajar bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. 2) Mengupayakan peningkatan kegiatan pelatihan kepemimpinan dan pelatihan fungsional, serta pelatihan teknis dan



No	Permasalahan	Solusi
	Dimensi Kinerja (22,28) dengan bobot penilaian 30%, Dimensi Disiplin (5,00) dengan bobot penilaian 5% dan Dimensi Kualifikasi (20,83) dengan bobot penilaian 25%, sedangkan untuk 1 (satu) dimensi dengan nilai rata rata rendah yaitu Dimensi Kompetensi (26,39) dengan bobot 40%, belum optimalnya target kinerja tersebut dikarenakan; 1) Belum optimalnya kualifikasi pendidikan ASN 2) Belum optimalnya kompetensi ASN 3) Belum optimalnya kinerja ASN 4) Belum optimalnya kedisiplinan ASN	kegiatan pengembangan lainnya bagi Aparatur di lingkungan pemerintah kabupaten Muara Enim. 3) Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan kedinasan, terutama pembangunan gedung diklat. 4) Menerapkan cascading kinerja kedalam perjanjian kinerja individu. 5) Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja ASN

5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Belum ada



7. INSPEKTORAT

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Pada tahun 2025, Inspektorat Kabupaten Muara Enim mengalokasikan anggaran sebesar Rp31.486.041.567,65 dan realisasi anggaran sebesar Rp22.771.806.318,00 atau 72,32% dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

Belanja operasi dialokasikan sebesar Rp26.422.331.967,65 dan terealisasi sebesar Rp18.215.249.301,00 atau sebesar 68,94% yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja modal dialokasikan sebesar Rp5.063.709.600,00 dan terealisasi sebesar Rp4.556.557.017,00 atau sebesar 89,98% yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal peralatan, mesin, Gedung dan bangunan yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Pada tahun 2025, Inspektorat Kabupaten Muara Enim melaksanakan 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan, yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp24.055.251.828,00 dengan realisasi sebesar Rp20.987.046.672,00 atau sebesar 87,25%. Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 30 (tiga puluh) subkegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp 20.884.025,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp13.985.116,00 atau sebesar 66,97%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 3 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp15.251.760,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp13.311.426,00 atau sebesar 87,28%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.



- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp16.273.690,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp13.390.976,00 atau sebesar 82,29%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp16.620.190,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp13.534.115,00 atau sebesar 81,43%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp16.401.190,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp15.057.760,00 atau sebesar 91,81%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp11.871.605,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp6.502.047,00 atau sebesar 54,77%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 3 Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/OPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp14.063.260.496,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp12.797.797.627,00 atau sebesar 91,00%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 72 orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN serta 12 bulan terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp47.958.100,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp572.200,00 atau sebesar 1,19%. Adapun



output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp7.371.600,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp2.974.588,00 atau sebesar 40,35%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 12 Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Pengamanan Milik Barang Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp197.073.250,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp104.795.000,00 atau sebesar 53,18%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang memuat Premi Asuransi untuk 21 Unit Kendaraan Roda Empat dan 1 Unit Kendaraan Roda Dua dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp2.310.596.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp1.648.214.076,00 atau sebesar 71,33%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 72 orang Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai dengan capaian output/keluaran sebesar 93%.
- b. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan anggaran sebesar Rp7.300.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp7.100.000,00 atau sebesar 97,26%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100 orang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp15.673.200,00



dan realisasi keuangan sebesar Rp7.843.000,00 atau sebesar 50,04%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp15.746.490,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp12.908.600,00 atau sebesar 81,98%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp182.234.375,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp118.296.446,00 atau sebesar 64,91%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp41.428.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp27.315.000,00 atau sebesar 65,93%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Paket Barang Cetak dan Penggandaan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp12.050.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp10.992.000,00 atau sebesar 91,22%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 2 Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- f. Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp18.900.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp7.055.500,00 atau sebesar 37,33%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 3 Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp964.759.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp871.887.610,00 atau sebesar 90,37%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1



Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dengan anggaran sebesar Rp2.120.880.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp2.006.230.000,00 atau sebesar 94,59%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 6 unit Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp942.829.600,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp923.971.767,00 atau sebesar 98,00%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 67 unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.
- c. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp99.900.000,00 atau sebesar 99,90%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100,00%.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp22.490.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp3.500.000,00 atau sebesar 15,56%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Laporan Penyediaan jasa surat menyurat dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp211.997.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp133.675.313,00 atau sebesar 63,06%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang memuat 3 jenis belanja tagihan selama 12 Bulan yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.



- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp48.120.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp18.450.000,00 atau sebesar 38,34%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp34.240.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp34.240.000,00 atau sebesar 100%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp41.841.988,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp23.824.261,00 atau sebesar 56,94%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini 1 unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp285.199.469,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp167.447.994,00 atau sebesar 58,71%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 9 Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp2.235.499.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp1.858.124.250,00 atau sebesar 83,12%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar



Rp30.500.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp24.150.000,00 atau sebesar 79,18%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 51 unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

B. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pengawasan sebesar Rp4.021.949.100,00 dengan realisasi sebesar Rp1.042.808.088,00 atau 25,98%. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 7 (tujuh) subkegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp664.814.700,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp56.907.200,00 atau sebesar 8,56%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 65 laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Reviu Laporan Kinerja dengan anggaran sebesar Rp547.745.400,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp109.887.908,00 atau sebesar 20,06%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 6 laporan hasil reviu laporan kinerja dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Reviu Laporan Keuangan dengan anggaran sebesar Rp97.536.600,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp20.129.407,00 atau sebesar 20,64%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 laporan hasil reviu laporan keuangan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Pengawasan Desa dengan anggaran sebesar Rp612.229.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp49.386.148,00 atau sebesar 8,07%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 65 laporan hasil pengawasan desa dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- e. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan anggaran sebesar Rp326.142.700,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp61.545.570,00 atau sebesar 18,87%. Adapun



output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 8 dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

- a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan anggaran sebesar Rp348.141.700,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp128.811.767,00 atau sebesar 18,87%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 2 laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan anggaran sebesar Rp1.425.339.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp616.140.088,00 atau sebesar 43,23%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 50 laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

C. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi

Alokasi anggaran untuk Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi sebesar Rp3.408.840.640,00 dengan realisasi sebesar Rp741.951.558,00 atau 21,77%. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) subkegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp302.858.540,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp36.045.315,00 atau sebesar 11,90%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

2. Pendampingan dan Asistensi

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp1.099.398.900,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp221.236.986,00 atau sebesar 20,12%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 58 perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.



- b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan anggaran sebesar Rp657.999.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp90.112.695,00 atau sebesar 13,69%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 58 perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan anggaran sebesar Rp1.048.975.300,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp383.277.042,00 atau sebesar 36,54%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 6 kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan anggaran sebesar Rp299.608.400,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp11.279.520,00 atau sebesar 3,76%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 58 perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Maturitas SPIP	3,04 (Level 3)	3,04 (Level 3)	100%
			Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	18	17,39	96,61%
			Indeks Kapabilitas Apip	3,00 (Level 3)	2,35 (Level 2)	78,33%



4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1.	Tidak tercapainya target persentase Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dikarenakan tindaklanjut hasil evaluasi oleh Inspektorat belum di tindaklanjuti oleh OPD	Melakukan pemantauan atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal
2.	Berdasarkan surat BPKP Nomor : HM.02.00/S-853/K/D4/2025 perihal Penyalpaian Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun tentang Peningkatan Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Indeks Kapabilitas Apip tidak sesuai target dikarenakan : 1. Terdapat perubahan Kriteria dan Deskripsi level kapabilitas APIP dalam aturan baru, sehingga tingkatan level pada peraturan sebelumnya tidak setara dengan tingkatan level peraturan baru 2. Penurunan level ini mengarah kepada level yang secara riil menunjukkan kapabilitas APIP dalam melakukan tata Kelola, manajemen risiko, pengendalian intern, serta pengendalian kecurangan , sehingga APIP dapat memberikan nilai tambah dan mendukung pencapaian tujuan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.	Untuk meningkatkan Nilai Kapabilitas APIP maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi BPKP

5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Pada tahun 2025, Inspektorat Kabupaten Muara Enim berhasil menorehkan beberapa penghargaan dan prestasi sebagai berikut.

1. Opini BPK
2. Tingkat Maturitas SPIP bertahan pada level 3.
3. Nilai SAKIP Kabupaten masuk dalam kategori BB.
4. OPD paling responsif SP4N Lapo!



8. BADAN PENDAPATAN DAERAH

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Alokasi Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp29.385.667.357,70 dan terealisasi sebesar Rp24.654.287.505,19 (*Unaudited*) atau sebesar 83,90% yang dibagi dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

Alokasi Sebesar Rp27.410.831.657,70 dengan Realisasi sebesar Rp22.755.838.505,19 (*Unaudited*) atau sebesar 82,99%.

B. Belanja Modal

Alokasi Sebesar Rp1.964.835.700,00 dengan Realisasi sebesar Rp1.898.449.000,00 (*Unaudited*) atau sebesar 82,99%.

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim terdiri dari **2 Program**, **9 Kegiatan** dan **39 Subkegiatan** dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Program ini memiliki target sebesar Rp24.606.500.455,00 dan terealisasi sebesar Rp20.503.367.290,19 (*Unaudited*) atau sebesar 83,33%. Program ini terdiri dari 8 Kegiatan dan 26 Subkegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran sebesar **Rp83.812.735,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp72.346.671,00** (*Unaudited*) atau sebesar **86.32%**.

- a. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD**, alokasi sebesar **Rp14.053.125,00** dengan realisasi sebesar **Rp12.000.000,00** (*Unaudited*) atau sebesar **85.39%**.
- b. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD**, alokasi sebesar **Rp14.053.125,00** dengan realisasi sebesar **Rp12.366.000,00** (*Unaudited*) atau sebesar **87,99%**.
- c. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD**, alokasi sebesar **Rp14.053.125,00** dengan realisasi sebesar **Rp11.250.000,00** (*Unaudited*) atau sebesar **80.05%**.
- d. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD**, alokasi sebesar **Rp24.053.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp20.890.671,00** (*Unaudited*) atau sebesar **86.85%**.
- e. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**, alokasi sebesar



- Rp8.800.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp8.000.000,00** (*Unaudited*) atau sebesar **90.91%**.
- f. **Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, alokasi sebesar **Rp8.800.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp7.840.000,00** (*Unaudited*) atau sebesar **89.09%**.
2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, Alokasi Anggaran sebesar **Rp19.026.381.879,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp15.289.930.601,00** (*Unaudited*) atau sebesar **80.36%**.
- a. **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**, alokasi sebesar **Rp18.371.307.379,00** dengan realisasi sebesar **Rp14.653.881.096,00** (*Unaudited*) atau sebesar **79,77%**.
- b. **Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**, alokasi sebesar **Rp487.175.500,00** dengan realisasi sebesar **Rp485.795.053,00** (*Unaudited*) atau sebesar **99.72%**.
- c. **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**, alokasi sebesar **Rp167.899.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp150.254.452,00** (*Unaudited*) atau sebesar **89,49%**.
3. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**, Alokasi Anggaran sebesar **Rp169.736.500,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp126.186.578,00** (*Unaudited*) atau sebesar **73,34%**.
- a. **Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**, alokasi sebesar **Rp169.736.500,00** dengan Realisasi sebesar **Rp126.186.578,00** (*Unaudited*) atau sebesar **73,34%**.
4. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, Alokasi Anggaran sebesar **Rp60.000.000,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp32.620.000,00** (*Unaudited*) atau sebesar **54.37%**.
- a. **Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**, alokasi sebesar **Rp60.000.000,00** dengan Realisasi **Rp32.620.000,00** (*Unaudited*) atau sebesar **54.37%**.
5. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**, Alokasi Anggaran sebesar **Rp1.564.970.026,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp1.504.676.016,00** (*Unaudited*) atau sebesar **96.15%**.



- a. **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**, alokasi sebesar **Rp35.638.280,00** dengan Realisasi sebesar **Rp28.666.000,00** (*Unaudited*) atau sebesar **80,44%**.
 - b. **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**, alokasi sebesar **Rp345.850.000,00** dengan Realisasi sebesar **Rp339.933.750,00** (*Unaudited*) atau sebesar **98,31%**.
 - c. **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**, alokasi sebesar **Rp106.551.490,00** dengan Realisasi sebesar **Rp104.913.000,00** (*Unaudited*) atau sebesar **98,46%**.
 - d. **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor**, alokasi sebesar **Rp208.931.406,00** dengan Realisasi sebesar **Rp179.380.668,00** (*Unaudited*) atau sebesar **85,82%**.
 - e. **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**, alokasi sebesar **Rp237.369.950,00** dengan Realisasi sebesar **Rp234.197.920,00** (*Unaudited*) atau sebesar **98,66%**.
 - f. **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan**, alokasi sebesar **Rp30.222.000,00** dengan Realisasi sebesar **Rp27.888.000,00** (*Unaudited*) atau sebesar **92,28%**.
 - g. **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**, alokasi sebesar **Rp600.406.900,00** dengan Realisasi sebesar **Rp589.708.678,00** (*Unaudited*) atau sebesar **98,22%**.
6. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, Alokasi Anggaran sebesar **Rp1.243.985.700,00** dengan Realisasi sebesar **Rp 1.186.993.750,00** (*Unaudited*) atau sebesar **95,42%**.
 - a. **Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** alokasi sebesar **Rp1.100.000.000,00** dengan Realisasi sebesar **Rp1.055.200.000,00** (*Unaudited*) atau sebesar **95,93%**.
 - b. **Sub Kegiatan Pengadaan Mebel**, alokasi sebesar **Rp143.985.700** dengan Realisasi sebesar **Rp71.284.307,00** (*Unaudited*) atau sebesar **91,53%**.
 7. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, Alokasi Anggaran sebesar **Rp723.409.550,00** Dengan



Realisasi sebesar **Rp575.369.158,00** (*Unaudited*) atau sebesar **79,54%**.

- a. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**, alokasi sebesar **Rp15.934.400,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp7.244.300,00** (*Unaudited*) atau sebesar **45,46%**.
- b. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**, alokasi sebesar **Rp288.795.150,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp232.174.854,00** (*Unaudited*) atau sebesar **80,39%**.
- c. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**, alokasi sebesar **Rp418.680.000,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp335.950.000,00** (*Unaudited*) atau sebesar **80,24%**.

8. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, Alokasi Anggaran sebesar **Rp1.734.204.425,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp1.715.244.516,19** (*Unaudited*) atau sebesar **98,91%**.

- a. **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan**, alokasi sebesar **Rp162.010.147,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp154.650.606,00** (*Unaudited*) atau sebesar **95,46%**.
- b. **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**, alokasi sebesar **Rp1.500.000.000,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp1.489.612.868,194** (*Unaudited*) atau sebesar **99,31%**.
- c. **Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**, alokasi sebesar **Rp72.194.278,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp70.981.042,00** (*Unaudited*) atau sebesar **98,32%**.

B. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. **Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**, Alokasi Anggaran sebesar **Rp4.779.166.902,50** Dengan Realisasi sebesar **Rp4.150.920.215,00** (*Unaudited*) atau sebesar **86,85%**.
 - a. **Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah**, alokasi sebesar **Rp237.448.050,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp202.089.800,00** (*Unaudited*) atau sebesar **85,11%**.
 - b. **Sub Kegiatan Analisa & Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah**, alokasi sebesar **Rp274.911.950,00**



Dengan Realisasi sebesar **Rp273.439.558,00** (*Unaudited*) atau sebesar **99,46%**.

- c. **Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah**, alokasi sebesar **Rp166.308.625,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp149.634.041,00** (*Unaudited*) atau sebesar **89,97%**.
- d. **Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah**, alokasi sebesar **Rp1.067.537.370,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp916.141.501,00** (*Unaudited*) atau sebesar **85,82%**.
- e. **Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah**, alokasi sebesar **Rp282.409.050,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp254.605.290,00** (*Unaudited*) atau sebesar **90,15%**.
- f. **Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan & Pelaporan Basis Data Pajak Daerah**, alokasi sebesar **Rp512.200.000,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp475.120.000,00** (*Unaudited*) atau sebesar **92,76%**.
- g. **Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan & Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB)**, alokasi sebesar **Rp484.931.417,50** Dengan Realisasi sebesar **Rp412.371.931,00** (*Unaudited*) atau sebesar **85,04%**.
- h. **Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah**, alokasi sebesar **Rp199.095.615,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp199.010.138,00** (*Unaudited*) atau sebesar **99,96%**.
- i. **Sub Kegiatan Penelitian & Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah**, alokasi sebesar **Rp437.877.000,00** dengan Realisasi sebesar **Rp339.538.712,00** (*Unaudited*) atau sebesar **77,54%**.
- j. **Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah**, alokasi sebesar **Rp625.909.900,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp565.165.598,00** (*Unaudited*) atau sebesar **90,30%**.
- k. **Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah**, alokasi sebesar **Rp44.088.375,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp43.895.968,00** (*Unaudited*) atau sebesar **99,56%**.
- l. **Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan & Pengawasan Pajak Daerah**, alokasi sebesar **Rp164.323.400,00** Dengan Realisasi sebesar **Rp153.640.984,00** (*Unaudited*) atau sebesar **93,50%**.
- m. **Sub Kegiatan Pembinaan & Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah**, alokasi sebesar **Rp282.126.150,00** Dengan



Realisasi sebesar **Rp166.266.694,00** (*Unaudited*) atau sebesar **58,93%**.

3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pendapatan Daerah yang semakin meningkat dan Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Semakin Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	26,03	16,71	64,20
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	74,20	74,70	100,67

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Hambatan a) Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dan wajib pungut. - Sebagian wajib pajak perdesaan masih enggan menyetorkan langsung ke Kas Daerah atau Bank terdekat yang telah ditunjuk. - Wajib Pajak dalam menyampaikan dan mengisi data mengenai objek dan subjek pajak masih belum akurat/ transparan sehingga masih perlu dilakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap objek pajak di lapangan. - Wajib pungut pajak daerah masih ada yang belum melakukan pemungutan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b) Kondisi ekonomi masyarakat. - Sebagian besar masyarakat Kabupaten Muara Enim	- Melakukan sosialisasi penyuluhan tentang Pajak Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait. - Melakukan kerja sama dengan Kantor Pos, Bank Sumsel Babel dan Bank BRI untuk melayani penerimaan pembayaran Pajak Daerah terutama PBB-P2 dan BPHTB. - Melakukan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Muara Enim Tanggal 7 Januari 2019 Nomor 900/09/ - Bapenda-I/2019, 900/35/BPKAD-2/2019 dan 010/MRE/1/B/ 2019 tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah secara Online Pemerintah Kabupaten Muara Enim. - Melakukan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim dengan PT Pos Indonesia (Persero) Tanggal 7 Januari 2019 Nomor 900/09/ Bapenda-I/2019, 25/REG3/JKRJ/HK/ 0119 tentang



No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
	hidup dari mata pencaharian pertanian, rendahnya harga jual hasil pertanian dan perkebunan mengalami penurunan. - Masyarakat wajib pajak lebih mengutamakan kebutuhan primer untuk kelangsungan kehidupan sehari-hari dan pendidikan anak sekolah. c) Akurasi data subjek dan objek pajak. - Data wajib pajak yang belum akurat. - Adanya wajib pajak yang sudah tidak berada di alamat terdaftar. - Masih adanya objek pajak ganda, tidak ada objek dan keberatan.	Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online Pemerintah Kabupaten Muara Enim. 6) Melakukan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Tanggal 7 Januari 2019 Nomor 900/09/Bapenda-I/2019, 92/180.2-16.03/1/2019 tentang Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Muara Enim. 7) Melakukan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Tanggal 23 Mei 2019 Nomor 35/MOU/Bappeda/2019, 269/100-16.03/V/2019 tentang Kerja Sama di Bidang Pertanahan
2.	Kendala - Regulasi pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak konsisten dengan peraturan pelaksanaannya. - Database Pajak Daerah yang masih harus disempurnakan. - Lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak. - Kurangnya SDM aparatur yang berkualifikasi perpajakan. - Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Daerah. - Subjek Pajak Daerah berada di luar daerah sehingga sulit untuk melakukan penagihan pajak. - Terhadap tidak tercapainya PBB P2 hal ini masih terkait dengan piutang PBB P2 penyerahan dari KPP Pratama Prabumulih pada tahun 2014 dan juga database yang diterima masih banyak tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. - Penerimaan pendapatan daerah dari komponen Pendapatan Asli	8) Melakukan Kesepakatan Bersama Antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tanggal 23 Mei 2019 Nomor Kep-329/WPJ.03/2019, 34/MOU/Bappeda/2019 Tentang Koordinasi dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi. 9) Menerbitkan Surat Edaran Bupati Muara Enim Tanggal 10 Juni 2019 Nomor 973/1114/BAPENDA-III/2019 tentang Pelaporan dan Pembayaran Transaksi Pajak Hiburan Melalui Sistem Online. 10) Menerbitkan Surat Edaran Bupati Muara Enim Tanggal 31 Januari 2020 Nomor 973/04/BAPENDA-II/2020 tentang Kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Pungut yang Telah Dipasang/Terintegrasi Alat Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Web Services (Transaction Monitoring Device) di Hotel, Restoran, Hiburan, Rumah Makan, Kantin dan Warung dalam Kabupaten Muara Enim. 11) Menerbitkan Surat Bupati Muara Enim Tanggal 23 Maret 2020 Nomor



No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
	Daerah, terutama dari sektor Pajak Daerah khususnya PBB P2 masih mengalami hambatan dan kendala, dalam pelaksanaan penerbitan SPPT PBB P2 masih terdapat objek ganda, tidak ada objek dan keberatan. Penagihan PBB P2 khususnya Perdesaan sebagian besar harus dilakukan secara langsung oleh petugas Badan Pendapatan Daerah, UPTD Pendapatan dengan cara Door-to-Door ke desa-desa/kelurahan, masih banyak masyarakat perdesaan yang enggan menyetorkan pembayaran PBB P2 langsung ke Kas Daerah atau Bank terdekat yang telah ditunjuk untuk menerima setoran PBB P2 dan masih rendahnya kesadaran wajib pajak karena kurang mengertinya manfaat dari pembayaran Pajak serta alasan masalah ekonomi. Pada saat petugas Badan Pendapatan Daerah dan UPTD Pendapatan melakukan penagihan Door-to-Door banyak ditemui masyarakat Perdesaan sedang tidak ada di rumah. • Pada Tahun Anggaran 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim menerbitkan SPPT PBB P2 sebanyak 163.218 lembar dengan realisasi sebesar Rp13.714.418.111,00, terdapat objek yang dibebaskan sebanyak 159.354 SPPT, terdapat penghapusan objek sebanyak 316 objek dengan nilai penghapusan sebesar Rp6.653.420,00 penerimaan Pendapatan PBB P2 belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD.	970/0309/X.Bapenda-II/2020 tentang Pengintegrasian Alat Perekam Transaksi E-Tax/TMD. 12) Melakukan Perjanjian Kerja Sama antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tanggal 30 Juli 2019 Nomor Kep.068/ WPJ.03/KP/2019, 970/60/Bapenda-I/PKS/2019 tentang Koordinasi dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 13) Melakukan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Muara Enim Tanggal 13 Desember 2019 Nomor 900/43/Bapenda-I/2019, 900/96/BPKAD-2/2019, B.7070-KC-IV/12/2019 tentang Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemerintah Kabupaten Muara Enim secara Online.

5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

-



9. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

Urusan penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muara Enim dengan alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 11.456.435.862,00 dan terealisasi sebesar Rp 8.687.275.637,00 yang terdiri dari:

A. Belanja Operasi

Belanja operasi digunakan untuk membiayai belanja pegawai, barang dan jasa. Belanja operasi dialokasikan anggaran sebesar Rp 11.115.481.402,00 dan terealisasi sebesar Rp 8.379.948.032,00 atau 75,39 %.

B. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk membiayai belanja modal peralatan dan mesin. Belanja modal dialokasikan anggaran sebesar Rp 340.954.460,00 dan terealisasi sebesar Rp 307.327.605,00 atau 90,14 %.

2. PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muara Enim melaksanakan 2 program, 11 kegiatan, dan 42 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp 126.724.700,00 dengan realisasi sebesar Rp 88.825.607,00 atau 70,09 %.

Kegiatan ini terdiri dari 6 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp 24.773.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 22.159.138,00 atau 89,45 %.

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Alokasi anggaran sebesar Rp 27.483.200,00 dengan realisasi sebesar Rp 13.382.794,00 atau 48,69 %.

c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Alokasi anggaran sebesar Rp 27.469.600,00 dengan realisasi sebesar Rp 18.328.888,00 atau 66,72 %.

d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Alokasi anggaran sebesar Rp 21.406.300,00 dengan realisasi sebesar Rp 18.627.991,00 atau 87,02 %.

e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD



Alokasi anggaran sebesar Rp 21.202.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 14.283.196,00 atau 67,37 %.

f. **Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Alokasi anggaran sebesar Rp 4.389.700,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.043.600,00 atau 46,55 %.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp 4.421.559.541,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.427.639.215,00 atau 77,52 %.

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Alokasi anggaran sebesar Rp 4.380.853.191,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.405.359.325,00 atau 77,73 %.

b. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

Alokasi anggaran sebesar Rp 6.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.516.500,00 atau 57,65 %.

c. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan/Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD**

Alokasi anggaran sebesar Rp 34.606.350,00 dengan realisasi sebesar Rp 18.763.390,00 atau 54,22 %.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp 73.930.700,00 dengan realisasi sebesar Rp 63.130.324,00 atau 85,39 %.

Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**

Alokasi anggaran sebesar Rp 55.814.700,00 dengan realisasi sebesar Rp 55.724.121,00 atau 99,84 %.

b. **Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD**

Alokasi anggaran sebesar Rp 18.116.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.406.203,00 atau 40,88 %.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp 45.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 42.835.000,00 atau 94,14 %.

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, sebagai berikut:



- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Alokasi anggaran sebesar Rp 45.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 42.835.000,00 atau 94,14 %.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp 990.074.192,00 dengan realisasi sebesar Rp 861.819.433,00 atau 87,05 %.

Kegiatan ini terdiri dari 8 sub kegiatan, sebagai berikut:

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Alokasi anggaran sebesar Rp 8.755.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.036.100,00 atau 80,36%.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Alokasi anggaran sebesar Rp 304.954.460,00 dengan realisasi sebesar Rp 271.627.605,00 atau 89,07 %.
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Alokasi anggaran sebesar Rp 35.171.821,00 dengan realisasi sebesar Rp 30.199.000,00 atau 85,86 %.
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Alokasi anggaran sebesar Rp 90.216.411,00 dengan realisasi sebesar Rp 70.263.840,00 atau 77,88 %.
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Alokasi anggaran sebesar Rp 15.283.600,00 dengan realisasi sebesar Rp 15.281.500,00 atau 99,99 %.
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Alokasi anggaran sebesar Rp 4.140.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.367.000,00 atau 81,33 %.
- g. Fasilitas Kunjungan Tamu
Alokasi anggaran sebesar Rp 25.515.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 24.520.000,00 atau 96,10 %.
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Alokasi anggaran sebesar Rp 506.037.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 439.524.388,00 atau 86,86 %.



6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp 235.758.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 136.607.110,00 atau 57,94 %.

Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Alokasi anggaran sebesar Rp 4.480.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 4.480.000,00 atau 100,00 %.
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Alokasi anggaran sebesar Rp 141.398.900,00 dengan realisasi sebesar Rp 72.207.110,00 atau 51,07 %.
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Alokasi anggaran sebesar Rp 89.880.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 59.920.000,00 atau 66,67 %.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp 705.628.969,00 dengan realisasi sebesar Rp 676.912.050,00 atau 95,93 %.

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, sebagai berikut:

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas, atau Kendaraan Dinas Jabatan
Alokasi anggaran sebesar Rp 13.679.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.429.400,00 atau 76,24 %.
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Alokasi anggaran sebesar Rp 65.399.469,00 dengan realisasi sebesar Rp 43.247.650,00 atau 66,13 %.
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Alokasi anggaran sebesar Rp 600.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 598.200.000,00 atau 99,70 %.
- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Alokasi anggaran sebesar Rp 9.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.775.000,00 atau 88,64 %.
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Alokasi anggaran sebesar Rp 16.650.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 16.260.000,00 atau 97,66 %.



C. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggara Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Alokasi anggaran sebesar Rp 504.532.722,00 dengan realisasi sebesar Rp 250.695.111,00 atau 49,69%.

Kegiatan ini terdiri dari 1 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan

Alokasi anggaran sebesar Rp 504.532.722,00 dengan realisasi sebesar Rp 250.695.111,00 atau 49,69 %.

2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Alokasi anggaran sebesar Rp 1.005.629.945,00 dengan realisasi sebesar Rp 803.594.337,00 atau 79,91 %.

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penelitian dan Pengembangan Aspek-Aspek Sosial

Alokasi anggaran sebesar Rp 298.604.645,00 dengan realisasi sebesar Rp 263.953.003,00 atau 88,40 %

b. Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Alokasi anggaran sebesar Rp 157.381.600,00 dengan realisasi sebesar Rp 134.434.438,00 atau 85,42 %.

c. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan

Alokasi anggaran sebesar Rp 274.260.300,00 dengan realisasi sebesar Rp 214.815.323,00 atau 78,33 %.

d. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Alokasi anggaran sebesar Rp 275.383.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 190.391.573,00 atau 69,14 %.

3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Alokasi anggaran sebesar Rp 944.674.075,00 dengan realisasi sebesar Rp 653.794.867,00 atau 69,21 %.

Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



Alokasi anggaran sebesar Rp 222.430.600,00 dengan realisasi sebesar Rp 156.361.278,00 atau 70,30 %.

b. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

Alokasi anggaran sebesar Rp 273.524.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 143.489.511,00 atau 52,46 %.

c. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

Alokasi anggaran sebesar Rp 237.058.300,00 dengan realisasi sebesar Rp 194.095.228,00 atau 81,88 %.

d. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran sebesar Rp 211.661.175,00 dengan realisasi sebesar Rp 159.848.850,00 atau 75,52 %.

4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Alokasi anggaran sebesar Rp 2.402.422.118,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.681.422.583,00 atau 69,99 %.

Kegiatan ini terdiri dari 5 sub kegiatan, sebagai berikut:

a. Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Alokasi anggaran sebesar Rp 793.676.358,00 dengan realisasi sebesar Rp 581.117.450,00 atau 73,22 %.

b. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi

Alokasi anggaran sebesar Rp 674.838.665,00 dengan realisasi sebesar Rp 371.699.245,00 atau 55,08 %.

c. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif

Alokasi anggaran sebesar Rp 458.906.895,00 dengan realisasi sebesar Rp 379.227.345,00 atau 82,64 %.

d. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Alokasi anggaran sebesar Rp 310.847.800,00 dengan realisasi sebesar Rp 251.183.800,00 atau 80,81 %.

e. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Alokasi anggaran sebesar Rp 164.152.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 98.194.743,00 atau 59,82 %.



3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mewujudkan pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset/ penelitian dalam perumusan kebijakan	Persentase kebijakan berbasis bukti	60%	87,50%	145,83%
		Meningkatnya pengelolaan inovasi dan kekayaan intelektual daerah	Indeks Inovasi Daerah	65,25	79,45	121,76%
			Persentase kekayaan intelektual daerah yang didaftarkan	49,01%	60,71%	123,87%
		Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas tata Kelola Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muara Enim	Nilai SAKIP Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	72,48	74,55	102,86%

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Masih dibutuhkan SDM jabatan fungsional dalam menunjang operasional Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Penambahan SDM jabatan fungsional yang memenuhi kompetensi yang dibutuhkan.
2.	Belum adanya sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan riset.	Memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menunjang kegiatan riset.
3.	Hasil kajian dengan lembaga riset atau perguruan tinggi belum semua diimplementasikan oleh perangkat daerah.	Perangkat Daerah terkait membuat program dan kegiatan yang mengacu pada hasil kajian sehingga menjawab permasalahan di Kabupaten Muara Enim.



5. PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Penghargaan dan prestasi yang diterima oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muara Enim selama tahun 2025 sebagai berikut:

1. Predikat Terbaik III kategori Siswa SLTA (SMA, SMK, MA) Inovatif atas nama Nursukmainah dan Nursinta dari SMA Negeri 1 Unggulan Kabupaten Muara Enim dengan inovasi “Rekayasa Teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya Escanor (PLTS)” pada Pemilihan Inovator Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.
2. Predikat Harapan I kategori Siswa SLTA (SMA, SMK, MA) Inovatif atas nama Syabila Purnamasari dan Ahmad Yusuf dari SMA Negeri 1 Unggulan Kabupaten Muara Enim dengan inovasi “Pemanfaatan Limbah Kulit Pisang Menjadi Bio Baterai dan Pengaplikasiannya pada Lampu Hias” pada Pemilihan Inovator Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.
3. Predikat Harapan II kategori Siswa SLTA (SMA, SMK, MA) Inovatif atas nama Melati Rizky Pratami dan Khairunnisa Fenilianti dari SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim dengan inovasi “Pupuk Organik dari Kulit Bawang Merah” pada Pemilihan Inovator Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.
4. Predikat Terbaik III kategori Masyarakat Umum Inovatif atas nama Mberang Udin, S.Pd SD., M.Pd dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dengan inovasi “GAWAI (Galeri Pengawas Inspiratif) pada Pemilihan Inovator Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.
5. Predikat Terbaik II kategori Tenaga Kesehatan Inovatif atas nama Ertin Widia Ningrum dari Puskesmas Gunung Megang dengan inovasi “Jebol Gawang (Jemput Bola Gangguan Jiwa di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Megang)” pada Pemilihan Inovator Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.
6. Predikat Harapan III kategori Tenaga Kesehatan Inovatif atas nama Weni Mayadita Sari, SKM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim dengan inovasi “REPOT PAK (*Reminder Entry Pelaporan On time Platform Aplikasi Kefarmasian*)” pada Pemilihan Inovator Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.



7. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Muara Enim sebagai penerima Inovasi Administrasi Negara (INAGARA) Tahun 2025 dalam *National Future Learning Forum LAN Award* oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).
8. Predikat Kabupaten Sangat Inovatif dengan skor Indeks Inovasi Daerah 79,45 berdasarkan Hasil Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025 dan penghargaan *Innovative Government Award (IGA)* Tahun 2025.



3.6. KECAMATAN

1. KECAMATAN SEMENDE ULU (SDU)

Alokasi belanja Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 sebesar Rp. 4.441.345.666,13 dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.050.798.641,00 atau 91,21% dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 3.698.366.778,13 terealisasi sebesar Rp. 3.312.148.641,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) atau 89,56 persen yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 742.978.888,00 terealisasi sebesar Rp. 738.650.000, (Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau 99,42 persen yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

1.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2025 Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim melaksanakan 5 program, 14 kegiatan dan 32 sub kegiatan, antara lain yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.882.275.386,13 dengan realisasi sebesar Rp. 3.492.596.141,00 atau 89,96% dengan capaian kinerja output sebesar 100,00 persen. Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp12.310.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp12.310.000 atau sebesar 100 persen.
- b. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 697.500 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 690.000 atau sebesar 98,92 persen.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.650.033.123 dan realisasi keuangan sebesar Rp2.266.374.804,00 atau sebesar 85,52 persen.



- b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 1.687.500 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.687.500 atau sebesar 100 persen.
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - a. Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 7.400.500 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.999.976 atau sebesar 94,59 persen.
 - b. Sub kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.868.750 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.868.750 atau sebesar 100 persen.
- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a. Sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.000.000 atau sebesar 100 persen.
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 5.841.100 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.839.000 atau sebesar 99,96 persen.
 - b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 6.174.600 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.174.000 atau sebesar 99,99 persen.
 - c. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 49.773.925,13 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.718.500 atau sebesar 99,89 persen.
 - d. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 5.360.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.360.000 atau sebesar 100 persen.
 - e. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 2.880.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.880.000 atau sebesar 100 persen.
 - f. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 194.285.400 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 194.197.522 atau sebesar 99,95 persen.



6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

- a. Sub kegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp. 49.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp48.500.000,00 atau sebesar 98.98 persen.
- b. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 129.680.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp128.330.000,00 atau sebesar 98.96 persen.
- c. Sub kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 457.018.888 dan realisasi keuangan sebesar Rp455.040.000,00 atau sebesar 99.57 persen.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 5.215.800 dan realisasi keuangan sebesar Rp5.210.000 atau sebesar 99.89 persen.
- b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 16.324.200 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.375.964 atau sebesar 94,19 persen.
- c. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 14.980.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.980.000 atau sebesar 100 persen.
- d. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 38.520.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 38.520.000 atau sebesar 100 persen.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp84.800.100,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp84.766.125,00 atau sebesar 99.96 persen.
- g. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp121.014.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp120.514.000,00 atau sebesar 99.59 persen.
- h. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 11.410.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp11.260.000,00 atau sebesar 98.69 persen.



B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp333.472.700,15 dengan realisasi sebesar Rp333.241.000,00 atau 99,93 persen dengan capaian kinerja output sebesar 100,00 persen. Program ini terdiri dari 3 (dua) kegiatan dan 5 (Lima) Sub kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
 - a. Sub kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta dengan anggaran sebesar Rp68.501.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp68.501.000,00 atau sebesar 100 persen.
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan
 - a. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp208.880.500,15 dan realisasi keuangan sebesar Rp208.698.800,00 atau sebesar 99,91 persen.
3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
 - a. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran sebesar Rp12.043.400,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp12.043.400,00 atau sebesar 100 persen.
 - b. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan dengan anggaran sebesar Rp14.183.400,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp14.183.400,00 atau sebesar 100 persen.
 - c. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan anggaran sebesar Rp29.864.400,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp29.814.400,00 atau sebesar 99,83 persen.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp27.360.330,00 dengan realisasi sebesar Rp27.253.000,00 atau 99,61 persen dengan capaian kinerja output sebesar 100,00 persen. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (Satu) Sub kegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - a. Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan



anggaran sebesar Rp27.360.330,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp27.253.000,00 atau sebesar 99,61 persen

D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp94.966.000,00 dengan realisasi sebesar Rp94.711.000,00 atau 99,73 persen dengan capaian kinerja output sebesar 100,00 persen. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah**
 - a. Sub kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila pelaksanaan UUD RI 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan RI dengan anggaran sebesar Rp94.966.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp94.711.000,00 atau sebesar 99,73 persen.

E. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp103.271.249,85 dengan realisasi sebesar Rp. 102.997.500,00 atau 99,73 persen dengan capaian kinerja output sebesar 100,00 persen. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) Sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 97.561.049,85 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 97.410.000,00 atau sebesar 99,85 persen.
 - b. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 5.710.200,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.587.500,00 atau sebesar 97,85 persen.



1.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Semende Darat Ulu pada tahun 2025 dapat dilihat pada matrik berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Semende Darat Ulu	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintah	Rata-rata Capaian Kegiatan Pemerintahan yang terselenggara	100	99.93	100
2.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	B	66,15	91.21

1.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatan Semende Darat Ulu pada tahun 2025 menemui beberapa permasalahan dan solusinya adalah sebagai berikut:

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Kurangnya Sarana dan Prasarana di Kantor camat Semende Darat Ulu seperti Laptop, Printer, dll.	Penambahan 2 printer, 3 komputer dan 4 laptop pada akhir tahun 2025.
2.	Tidak ada akses listrik, jaringan internet, dan PDAM di Kantor Camat Semende Darat Ulu.	-Iuran Wifi
3.	Lokasi Kantor Camat Yang Jauh dari Desa.	-

1.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Adapun Penghargaan dan Prestasi yang diraih Kecamatan Semende Darat Ulu tahun 2025 sebagai berikut :

1. Juara Harapan 2 Inovasi Tingkat Kabupaten Muara Enim
2. Juara 3 lomba masak menu B2SA
3. Juara 2 lomba masak menu serba ikan



4. Juara 2 lomba pelaksana terbaik AKU HATINYA PKK Tingkat Kabupaten Muara Enim

2. KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH (SDT)

Alokasi belanja Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 4.628.419.286,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.351.017.490,00 atau 94.01 % dan kinerja keluaran (output) sebesar 96.42 % dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Operasional

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 3.880.719.686 terealisasi sebesar Rp. 3.607.417.890 Atau 92.96% yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 747.699.600 terealisasi sebesar Rp. 743.599.600 atau 99.45 % yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi asset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

2.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2025 Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 program dan 14 kegiatan, dan 34 sub kegiatan yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pagu Anggaran sebesar Rp. 2.924.493.286 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 2.717.355.308

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 7.989.950 dengan Realisasi sebesar Rp. 7.774.000

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, alokasi sebesar Rp. 3.824.950 dengan realisasi sebesar Rp. 3.659.000
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD alokasi sebesar Rp. 1.957.200 dengan realisasi sebesar Rp. 1.946.000
- c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi sebesar Rp. 2.207.800 dengan realisasi sebesar Rp. 2.169.000

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 1.943.111.014 Realisasi sebesar Rp. 1.753.610.044

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN alokasi sebesar Rp. 1.935.692.714 dengan realisasi sebesar Rp. 1.746.224.044
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD alokasi sebesar Rp. 1.361.900 dengan realisasi sebesar Rp. 1.348.000



- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD alokasi sebesar Rp. 6.056.400 dengan realisasi sebesar Rp. 6.038.000
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 5.775.000 Dengan Realisasi sebesar Rp. 4.497.180**
 - a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD alokasi sebesar Rp. 5.775.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.497.180
- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 33.565.000 Dengan Realisasi sebesar Rp. 18.530.000**
 - a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi alokasi sebesar Rp. 0 dengan realisasi sebesar Rp. 0
 - b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan alokasi sebesar Rp. 5.600.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.200.000
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 526.696.450 Dengan Realisasi sebesar Rp. 522.077.319**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor alokasi sebesar Rp. 12.079.600 dengan realisasi sebesar Rp. 12.044.000
 - b. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi sebesar Rp. 295.714.000 dengan realisasi sebesar Rp. 295.382.000
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor alokasi sebesar Rp. 60.659.750 dengan realisasi sebesar Rp. 56.543.550
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan alokasi sebesar Rp. 15.193.000 dengan realisasi sebesar Rp. 15.058.000
 - e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu alokasi sebesar Rp. 13.860.000 dengan realisasi sebesar Rp. 13.860.000
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD alokasi sebesar Rp. 129.190.100 dengan realisasi sebesar Rp. 129.186.769
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 24.000.000 Dengan Realisasi sebesar Rp. 24.000.000**



- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel alokasi anggaran sebesar Rp. 24.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 24.000.000

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 70.364.770 dengan realisasi sebesar Rp. 66.046.765

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat alokasi sebesar Rp. 4.480.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.480.000
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik alokasi sebesar Rp. 10.584.770 dengan realisasi sebesar Rp. 6.826.765
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi sebesar Rp. 26.760.000 dengan realisasi sebesar Rp. 26.200.000
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi sebesar Rp. 28.220.000 dengan realisasi sebesar Rp. 28.220.000

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 340.956.102 Dengan Realisasi sebesar Rp. 335.150.000

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan alokasi sebesar Rp. 27.371.208 dengan realisasi sebesar Rp. 25.870.000
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan alokasi sebesar Rp. 25.584.894 dengan realisasi sebesar Rp. 21.680.000
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya alokasi sebesar Rp. 288.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 287.600.000

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Pagu anggaran sebesar Rp. 599.123.300 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 553.085.482

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Alokasi Anggaran sebesar Rp. 435.699.600 Dengan Realisasi sebesar Rp. 431.999.600

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta alokasi sebesar Rp. 435.699.600 dengan realisasi sebesar Rp. 431.999.600



2. **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Alokasi Anggaran sebesar Rp. 163.423.700 dengan Realisasi sebesar Rp. 121.085.882**
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha alokasi sebesar Rp. 17.261.650 dengan realisasi sebesar Rp. 17.261.650
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan alokasi sebesar Rp. 32.037.800 dengan realisasi sebesar Rp. 32.035.000
 - c. Sub Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan alokasi sebesar Rp. 114.124.250 dengan realisasi sebesar Rp. 71.789.882
- C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Pagu Anggaran sebesar Rp. 687.651.200 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 683.640.200**
1. **Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Alokasi Anggaran sebesar Rp. 687.651.200 dengan Realisasi sebesar Rp. 683.640.200**
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa alokasi sebesar Rp. 40.956.800 dengan realisasi sebesar Rp. 40.186.200
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan alokasi sebesar Rp. 646.694.400 dengan realisasi sebesar Rp. 642.824.000
- D. Program Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum Pagu Anggaran sebesar Rp. 136.260.000 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 129.767.500**
1. **Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Alokasi Anggaran sebesar Rp. 136.260.000 dengan Realisasi sebesar Rp. 129.767.500**
 - a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan alokasi sebesar Rp. 136.260.000 dengan realisasi sebesar Rp. 129.767.500



E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Pagu Anggaran sebesar Rp. 229.281.500 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 229.269.000

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 229.281.500 dengan Realisasi sebesar Rp. 229.269.000

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia alokasi sebesar Rp. 201.532.000 dengan realisasi sebesar Rp. 201.521.500
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan alokasi sebesar Rp. 27.749.500 dengan realisasi sebesar Rp. 27.747.500

F. Program Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pagu Anggaran sebesar Rp. 51.610.000 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 37.900.000

1. Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Alokasi Anggaran sebesar Rp. 51.610.000 dengan Realisasi sebesar Rp. 37.900.000

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa alokasi sebesar Rp. 16.310.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.000.000
- b. Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa alokasi sebesar Rp. 26.400.000 dengan realisasi sebesar Rp. 26.000.000
- c. Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa alokasi Rp. 0 dengan realisasi Rp. 0
- d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan alokasi Rp. 8.900.000 dengan realisasi Rp. 8.900.000



2.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Sesuai dengan target kinerja sasaran dalam Renstra, capaian indikator kinerja Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim pada Tahun 2025, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayan publik kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	100	93.39	
			Persentase urusan pemerintah yang di fasilitasi	100	99.15	
			Persentase PKK aktif	100	100	
			Persentase sarana dan prasarana umum dalam kondisi baik	100	85	
			Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan, Keindahan)	100	95.24	
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Pemerintahan Desa	100	99.99	
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	70	68.64	
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	55	60.35	



2.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Ruangan yang kurang	Akan diajukan ke Dinas Terkait mengenai Penambahan Ruang dan Sarana Prasarana
2.	Kurangnya SDM ASN yg berkompeten	Akan diadakan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi

3. KECAMATAN SEMENDE DARAT LAUT

Alokasi belanja Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim sebesar Rp 4.380.593.603,50,- dan telah terealisasi sebesar Rp 3.759.356.243,00,- atau 85,82% dan kinerja keluaran sebesar 98,79% dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Operasional

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 3.403.570.403,50,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.785.183.043,00,- atau 81,83% yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang termasuk komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp 977.023.200,00,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 974.173.200,00,- atau 99,70% yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025 Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 32 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan, yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 3.729.228.229,- dengan Realisasi sebesar Rp. 3.156.288.743,- atau 84,64%. Program ini terdiri 8 (delapan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 15.949.900,- dengan Realisasi sebesar Rp 10.588.200,- atau 66,20%. terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 8.857.800,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 8.558.200,- atau 96,62%.



- b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 7.092.100,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,- atau 28,20%.
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 2.362.226.554,50,- dengan Realisasi sebesar Rp 1.840.290.988,- atau 77,90%. terdiri dari :**
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.356.252.254,50,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.839.300.988,00,- atau 78,06 %.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 6.084.300,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 990.000,- atau 16,27%
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 11.550.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0,00%. terdiri dari :**
- a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 11.550.000,- dan tidak terealisasi atau realisasi 0,00%.
- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 10.900.300,- dengan Realisasi sebesar Rp 5.801.000,- atau 53,22%. terdiri dari :**
- a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dan tidak terealisasi atau realisasi 0,00%.
 - b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 4.300.000,- dengan terealisasi sebesar Rp. 4.224.000,- atau 98,23%.
 - c. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 1.600.300,- dengan terealisasi sebesar Rp. 1.577.000,- atau 98,54%.
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 156.620.273,- dengan Realisasi sebesar Rp 153.400.062,- atau 97,94%. terdiri dari :**
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 4.878.400,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.695.000,- atau 96,24%.



- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 8.824.700,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 8.768.000,- atau 99,36%.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 25.617.773,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 24.765.000,- atau 96,67%.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 4.471.200,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.305.000,- atau 96,28%.
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 2.160.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.160.000,- atau 100%.
 - f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 6.535.800,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.625.000,- atau 70,76%.
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 104.132.400,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 104.082.062,- atau 99,95%.
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 352.023.200,- dengan Realisasi sebesar Rp 351.123.200,- atau 99,74%. terdiri dari :**
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp. 27.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 27.000.000,- atau 100%.
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 25.023.200,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 25.023.200,- atau 100%.
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 299.100.000,- atau 99,70%.
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 80.120.010,- dengan Realisasi sebesar Rp 62.627.293,- atau 78,17%. terdiri dari :**
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau 100%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.010,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 14.627.293,- atau 97,52%.



- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 51.360.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 34.240.000,- atau 66,67%.

8. Kegiatan Pemeliharaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 739.727.991,- dengan Realisasi sebesar Rp 732.488.000,- atau 99,02%. terdiri dari:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 79.173.825,- dan telah terealisasi sebesar Rp.74.423.000,- 94.00%.
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 660.554,166- dan telah terealisasi sebesar Rp. 658.065.000,- atau 99,62%.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp 181.545.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 166.260.000,- atau 91,58%. Program ini terdiri 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Alokasi Anggaran Sebesar Rp 99.725.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 99.725.000,- atau 100%. terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta dengan anggaran sebesar Rp. 99.725.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 99.725.000,- atau 100%.

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Alokasi Anggaran Sebesar Rp 81.820.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 66.535.000,- atau 81,32%. terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran sebesar Rp. 5.065.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.050.000,- atau 99,70%.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Perizinan dengan anggaran sebesar Rp. 25.400.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 20.320.000,- atau 80,00%.
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait



dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan anggaran sebesar Rp. 51.355.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 41.165.000,- atau 80,16%.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar Rp 221.982.275,- dengan Realisasi sebesar Rp 211.607.500,- atau 95,33%. Program ini terdiri 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Alokasi Anggaran Sebesar Rp 221.982.275,- dengan Realisasi sebesar Rp 211.607.500,- atau 95,33%. terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan anggaran sebesar Rp. 26.728.600,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 26.620.000,- atau 99,59%.
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 195.253.675,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 184.987.500,- atau 94,74%.

D. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebesar Rp 134.048.100,- dengan Realisasi sebesar Rp 111.410.000,- atau 83,11%. Program ini terdiri 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 134.048.100,- dengan Realisasi sebesar Rp 111.410.000,- atau 83,11%. terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 134.048.100,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 111.410.000,- atau 83,11%.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp 113.790.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 113.790.000,- atau 100% Program ini terdiri 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp



113.790.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 113.790.000,- atau 100%. terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan anggaran sebesar Rp. 113.790.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 113.790.000,- atau 100%.

F. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp 0,- dengan Realisasi sebesar Rp 0,- atau 0%. Program ini terdiri 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 93.714.300,- dengan Realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%. terdiri dari :**
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp 0,- dan tidak terealisasi atau realisasi 0%.

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Semende Darat Laut	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	82		
2.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	66	60	90



3.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Kurangnya Sarana dan Prasarana di Kantor Camat Semende Darat Laut seperti Laptop, Printer, dll.	Penambahan 2 printer dan 2 laptop pada akhir tahun 2025.
2.	Kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia terutama dibidang Teknis di Kantor Camat Semende Darat Laut.	Penambahan Tenaga Teknis yang khusus

3.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Adapun Penghargaan dan Prestasi yang diraih Kecamatan Semende darat Laut tahun 2025 sebagai berikut :

1. Juara 2 Lomba Kampung KB Tingkat Provinsi Sumsel
2. Juara 3 Lomba Rumah Dataku Tingkat Provinsi Sumsel
3. Juara 1 e-Reporting DWP Kabupaten Muara Enim
4. Juara 1 Lomba Aku Hatinya PKK Tingkat Kabupaten Muara Enim
5. Juara 1 Posyandu 6 SPM Tingkat Kabupaten Muara Enim
6. Juara 1 Lomba Balita Indonesia Tingkat Kabupaten Muara Enim
7. Juara 2 Kompetisi Desa Potensi Wisata Tingkat Kabupaten Muara Enim
8. Juara 2 Posyantekdes Tingkat Kabupaten Muara Enim

4. KECAMATAN TANJUNG AGUNG

Alokasi Anggaran belanja Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 5.043.617.972,15,- dan terealisasi sebesar Rp. 4834759646.40,- atau 95,86 %, dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Operasional

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 4.183.185.936,15 terealisasi sebesar Rp. 3.985.736.646,40,- atau 95,28 % yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 860.432.036,- terealisasi sebesar Rp. 849.023.000,- atau 98,67 % yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Pada tahun 2024 Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 Program dan 14 Kegiatan dan 36 Subkegiatan, antara lain :



A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- a. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD,
Dengan anggaran sebesar Rp. 18.881.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.863.000,- atau sebesar 99,90 %.
- b. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
Dengan anggaran sebesar Rp. 14.058.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.589.000,- atau sebesar 96,66 %.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,
Dengan anggaran sebesar Rp. 2.223.952.006,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.065.011.574,- atau sebesar 92,85 %.
- b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD,
Dengan anggaran sebesar Rp. 17.111.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.001.000,- atau sebesar 99,35 %.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

- a. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD,
Dengan anggaran sebesar Rp. 5.484.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.170.000,- atau sebesar 94,27 %.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi,
Dengan anggaran sebesar Rp. 53.850.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 48.271.272,- atau sebesar 89,64 %.
- b. Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan,
Dengan anggaran sebesar Rp. 13.852.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.550.000,- atau sebesar 97,82 %.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
Dengan anggaran sebesar Rp 43.111.436,- dengan realisasi sebesar Rp. 42.271.000,- atau sebesar 98,05 %.
- b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
Dengan anggaran sebesar Rp. 18.444.180,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.420.000,- atau sebesar 99,87 %.



- c. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor,
Dengan anggaran sebesar Rp 53.319.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 45.600.000,- atau sebesar 85,52 %.
- d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
Dengan anggaran sebesar Rp. 21.129.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 21.105.000,- atau sebesar 99,89 %.
- e. Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu,
Dengan anggaran sebesar Rp. 16.194.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.180.000,- atau sebesar 99,91 %.
- f. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,
Dengan anggaran sebesar Rp. 269.139.090,- dengan realisasi sebesar Rp. 269.072.074,- atau sebesar 99,98 %.
- g. Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD,
Dengan anggaran sebesar Rp. 2.834.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.830.000,- atau sebesar 99,84 %.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- a. Subkegiatan Pengadaan Mebel,
Dengan anggaran sebesar Rp 40.513.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.080.000,- atau sebesar 98,93 %
- b. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
Dengan anggaran sebesar Rp 277.760.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 274.032.000,- atau sebesar 98,66 %
- c. Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya,
Dengan anggaran sebesar Rp 226.040.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 224.120.000,- atau sebesar 99,15 %

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
Dengan anggaran sebesar Rp 4.480.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.480.000,- atau sebesar 100 %.
- b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dengan anggaran sebesar Rp. 38.111.160,- dengan realisasi sebesar Rp. 34.551.723,- atau sebesar 90,66 %.
- c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor,
Dengan anggaran sebesar Rp 43.870.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 38.520.000,- atau sebesar 87,80 %.



8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Dengan anggaran sebesar Rp. 33.819.264,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.538.412,- atau sebesar 96,21 %.
- b. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Dengan anggaran sebesar Rp. 368.426.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 363.084.000,- atau sebesar 98,55 %.
- c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Dengan anggaran sebesar Rp. 18.210.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.190.000,- atau sebesar 99,89 %.
- d. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, Dengan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.955.000,- atau sebesar 99,63 %.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum.

- a. Subkegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Yang Melibatkan Pihak Swasta, Dengan anggaran sebesar Rp. 83.005.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 83.005.000,- atau sebesar 100 %.

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat.

- a. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, Dengan anggaran sebesar Rp. 10.160.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.160.000,- atau sebesar 100 %.
- b. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Perizinan, Dengan anggaran sebesar Rp. 27.796.474,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.796.000,- atau sebesar 100 %
- c. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan, Dengan anggaran sebesar Rp. 30.753.958,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.753.000,- atau sebesar 100 %



C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

- 1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum.**
 - a. Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa,
Dengan anggaran sebesar Rp. 27.649.129,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.227.000,- atau sebesar 98,47 %.
 - b. Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan,
Dengan anggaran sebesar Rp. 502.098.558,- dengan realisasi sebesar Rp. 494.612.591,- atau sebesar 98,51 %.

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban.

- 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.**
 - a. Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
Dengan anggaran sebesar Rp. 72.781.029,- dengan realisasi sebesar Rp. 69.171.000,- atau sebesar 95,04 %.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

- 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.**
 - a. Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan anggaran sebesar Rp. 387.502.601,- dengan realisasi sebesar Rp. 387.334.000,- atau sebesar 99,96 %.
 - b. Subkegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan,
Dengan anggaran sebesar Rp. 12.199.529,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.575.000,- atau sebesar 94,88 %.

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

- 1. Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.**
 - a. Subkegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.



Dengan anggaran sebesar Rp. 18.441.429,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.379.000,- atau sebesar 99,66 %.

- b. Subkegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dengan anggaran sebesar Rp. 17.702.629,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.530.000,- atau sebesar 99,02 %.

- c. Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan,

Dengan anggaran sebesar Rp. 18.935.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.732.000,- atau sebesar 98,92 %.

4.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik
			Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindak lanjuti	85 %	87 %	87 %
			Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum dalam Kondisi Baik	90 %	90 %	90 %
			Persentase Urusan Pemerintah yang difasilitasi	90 %	95%	95 %
			PKK Aktif	100 %	100 %	100 %
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan	90 %	98 %	98 %



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Pembinaan Desa			
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	BB	B	B

4.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Adanya Tambang Galian C Ilegal yang merusak lingkungan	Kewenangan pertambangan galian C dan tambang batubara sudah diambil alih oleh pihak Provinsi. Pihak Kecamatan sudah menghimbau , membuat edaran dan menginstruksikan kepada Kepala Desa dalam Wilayah Kecamatan Tanjung tentang larangan kegiatan penambangan Galian C dan penambangan Batubara Ilegal.
2.	Banyaknya tambang batubara ilegal sehingga menimbulkan debu yang meresahkan masyarakat	
3.	Banyaknya truk batubara yang melintas sehingga sering menyebabkan kemacetan di jalan raya	Diharapkan Truk Batubara mempunyai jalan tersendiri agar tidak terjadi kemacetan dan mengganggu pengguna jalan raya.
4	Sering terjadi pemadaman listrik sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari.	Pihak terkait agar lebih meningkatkan pelayanan dan kinerja sehingga tidak terjadi pemadaman yg terus menerus.
5	Jaringan internet yang lemah sinyal	Menambah Tower atau pemasangan straling dan sejenisnya.
6	Masih adanya Kekosongan Jabatan Esselon IV meliputi Kasi Kesos, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan, Kassubag Umum dan Kepegawaian	Sudah diusulkan ke BKPSDM Kabupaten Muara Enim untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
7	Kurangnya kendaraan operasional roda 4 untuk menunjang kegiatan Kecamatan	Mengusulkan ke TAPD Kabupaten untuk pemenuhan kendaraan operasional tersebut.
8	Masih banyak masyarakat yang mempunyai rumah tidak layak huni	Sudah diusulkan melalui bantuan bedah rumah ke Dinas terkait.



4.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Prestasi yang diterima oleh Kecamatan Tanjung Agung tahun 2025.

1. Juara II Lomba Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 oleh KP. SPAM Desa Tanjung Bulan Kecamatan Tanjung Agung.
2. Juara II Lomba Rumah Cinta tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 oleh TP. PKK Desa Embawang Kecamatan Tanjung Agung.

5. KECAMATAN LAWANG KIDUL

Alokasi belanja Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim pada tahun 2025 sebesar Rp. 9.398.712.856,00 dan terealisasi sebesar Rp. 8.234.190.337,00 atau 87,61%, dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 8.223.912.856,10 terealisasi sebesar Rp. 7.068.069.837,00 atau 85,95% yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 1.174.800,00 terealisasi sebesar Rp. 1.166.120.500,00 atau 99,26% yang akan dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintahan Kabupaten Muara Enim.

5.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2025 Kantor Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim melaksanakan 5 (Lima) Program , 14 (Empat Belas) Kegiatan, dan 29 Sub Kegiatan, antara lain yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebesar Rp. 6.050.616.137,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.908.894.485,00 atau 81,13%. Program ini terdiri dari:

1. **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan dianggarkan sebesar Rp. 100.453.160,00 dengan realisasi sebesar Rp. 100.400.236,00 atau 99,95 %. Adapun output/keluaran dari kegiatan ini adalah:**

- a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 59.243.994,00 dan Realisasi sebesar Rp. 59.211.368,00 atau 99,94%. Beberapa rincian dari kegiatan ini telah dilaksanakan untuk menyelesaikan penyusunan RENJA, RENSTRA, RKA, DPA, RAK tahun 2025 yaitu pembelian ATK, mencetak, menjilid dan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi



penyusunan RENJA, RENSTRA, RKA, DPA, RAK, tahun 2025 serta uang lembur.

- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran Rp. 41.209.166,00 dan Realisasi sebesar Rp. 41.188.868,00 atau 99,95 %. Beberapa rincian dari kegiatan ini telah dilaksanakan untuk menyelesaikan penyusunan Perbaikan Renja, Renstra 2025-2029, RKA-P, DPPA, RAK-P, Renja tahun 2026, pembelian ATK, dan perjalanan dinas dalam rangka konsultasi penyusunan Dokumen Perubahan.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dan dianggarkan sebesar Rp. 26.227.325,00 dengan realisasi sebesar Rp. 26.220.000,00 atau 99,97%. Adapun Output/Keluaran dari Kegiatan ini adalah :

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 26.227.325,00 dengan realisasi sebesar Rp. 26.220.000,00 atau 99,97%. Beberapa rincian dari kegiatan ini telah dilaksanakan untuk menyelesaikan laporan keuangan yaitu pembelian atk, mencetak, menjilid laporan gaji perbaikan berkas gaji, berkas fisik, laporan keuangan lainnya dan perjalanan dinas konsultasi penyusunan laporan keuangan 2025.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dan dianggarkan sebesar Rp. 12.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.413.800,00 atau 86,78%. Adapun Output/Keluaran dari Kegiatan ini adalah :

- a. Pengamanan Barang Milik Daerah dengan Anggaran Rp. Rp. 12.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.413.800,00 atau 86,78%. Rincian dari kegiatan ini ialah pembayaran pajak dan asuransi kendaraan dinas mobil camat.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 26.000.000,00 atau 65,00%. Adapun Output/ Keluaran dari Kegiatan ini adalah :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran Rp. 40.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 26.000.000,00 atau 65,00%. Rincian kegiatan ialah pembayaran belanja bimbingan teknis (bimtek) bagi pegawai yang mengikuti pelatihan anggaran ini belum terserap 100% dikarenakan keterbatasan pegawai untuk mengikuti pelatihan/bimtek.



5. **Administrasi Umum Perangkat Daerah dan dianggarkan sebesar Rp 539.832.825,00 dengan realisasi sebesar Rp. 539.165.672,00 atau 99,88%. Adapun Output/Keluaran dari Kegiatan ini adalah:**
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp 5.598.419,00 dan realisasi sebesar Rp. 5.595.000,00 atau 99,94%. Rincian dari kegiatan ini ialah digunakan untuk pembayaran/pembelian alat bahan listrik guna keperluan kantor camat dan 3 kelurahan yang terdapat di kecamatan lawang kidul.
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan anggaran Rp. 149.803.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 149.233.500,00 atau 99,62%. Rincian kegiatan telah dilaksanakan untuk keperluan sesuai kebutuhan yaitu pembelian belanja modal mebel (meja $\frac{1}{2}$ biro), belanja modal personal komputer (laptop), belanja modal peralatan personal komputer (printer) untuk kecamatan, serta pembelian perabotan kebersihan kantor guna keperluan kantor camat dan 3 kelurahan di kecamatan lawang kidul.
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp. 52.806.868,00 dan realisasi sebesar Rp 52.799.000, 00 atau 99,99%. Beberapa rincian dari kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada yaitu pembelian alat tulis kantor dan bahan cetak guna keperluan untuk kantor camat dan 3 kelurahan.
 - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 8.713.007,00 dan realisasi sebesar Rp. 8.713.000,00 atau 100%. Beberapa rincian dari kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yaitu pencetakan blangko-blangko dan fotocopy berkas-berkas, pembelian materai dan bahan cetak lainnya.
 - e. Fasilitasi Kunjungan tamu dengan anggaran sebesar Rp. 18.099.250,00 dan realisasi sebesar Rp. 18.099.000,00 atau 100%. Beberapa rincian dari kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada untuk kegiatan makan minum rapat koordinasi bulanan untuk kantor camat dan 3 kelurahan.
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 304.812.281,00 dan realisasi sebesar Rp. 304.726.172,00 atau 99,97%. Beberapa Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai kebutuhan yaitu perjalanan dinas pegawai untuk mengikuti rapat-rapat ke dalam dan luar daerah.



6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan dianggarkan sebesar Rp. 220.262.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 156.729.092,00 atau 71,16%. Adapun Output/Keluaran dari Kegiatan ini adalah :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran Rp. 6.726.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 6.726.000,00 atau 99,99%. Beberapa rincian dari kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai kebutuhan yaitu pembelian benda-benda berharga (Materai).
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik dengan anggaran Rp. 61.776.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 44.033.092,00 atau 71,28%. Beberapa rincian dari kegiatan telah dilaksanakan dikeluarkan sesuai dengan jumlah rekening dan tagihan yang ada.
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp. 151.760.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 105.970.000,00 atau 69,83%. Kegiatan ini telah dibayarkan dari bulan januari – agustus sesuai dengan jumlah tenaga KKWT yang ada yaitu jumlah tenaga administrasi 6 orang, jumlah tenaga operator komputer 1 orang, jumlah tenaga kebersihan 1 orang dan jumlah tenaga keamanan 6 orang untuk kecamatan dan 3 kelurahan

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan dianggarkan sebesar Rp. 38.973.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 36.824.211,00 atau Rp. 94,49%. Adapun Output/Keluaran dari Kegiatan ini adalah :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp. 16.735.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 14.586.711,00 atau 87,16%. Beberapa rincian dari kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tagihan pajak kendaraan dinas tahun 2025 dan kegiatan ini juga untuk pemeliharaan kendaraan dinas yaitu ganti oli serta pembelian sparepart kendaraan dinas yang rusak.
- b. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran Rp. 22.237.500,00 dan realisasi anggaran Rp. 22.237.500,00 atau 100%. Beberapa rincian dari kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yaitu melakukan perbaikan maupun perawatan AC Kantor Camat Lawang Kidul.



B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Alokasi anggaran untuk program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebesar Rp. 2.645.062.675,00 dengan realisasi sebesar Rp. 2.627.372.452,00 atau 99,33%. Program ini terdiri dari:

- 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dan dianggarkan sebesar Rp. 161.548.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 161.548.000,00 atau 100%. Output/Keluaran dari Kegiatan ini adalah:**
 - a. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran Rp. Rp. 161.548.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 161.548.000,00 atau 100%. Beberapa rincian dari kegiatan ini ialah guna untuk keperluan membeli ATK dan pembayaran honor kader posyandu.
- 2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dan dianggarkan sebesar Rp. 1.273.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.265.390.000,00 atau 99,36%. Adapun Output/Keluaran dari Kegiatan ini adalah :**
 - a. Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta dengan anggaran Rp. 1.273.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.265.390.000,00 atau 99,36%. Berapa rincian dari kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yaitu Pemeliharaan lampu jalan yang berada di Kawasan Kecamatan Lawang Kidul, Pembayaran jasa mekanik, honor pejabat pengadaan, Pembangunan gerai UMKM, pembangunan tempat parkir, pembangunan WC umum kantor camat, Rehab WC kantor camat serta Rehab berat kantor lurah (pasar tanjung enim), Rehab kantor lurah tanjung enim, rehab Kantor Lurah Tanjung Enim selatan dan pembuatan siring kantor camat.
- 3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat dan dianggarkan sebesar Rp. 1.210.014.675,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.200.434.452,00 atau 99,21%. Adapun Output/Keluaran dari Kegiatan ini adalah :**
 - a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha dengan anggaran Rp. 4.875.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 4.870.000,00 atau 99,90%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yaitu pembelian atk dan bahan cetak pelayanan umum (PATEN).



- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dengan anggaran Rp. 19.629.675,00 dan realisasi sebesar Rp. 19.628.000,00 atau 99,99%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yaitu pembelian atk dan bahan cetak pelayanan umum dan perjalanan dinas (PATEN).
- c. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan dengan anggaran Rp. 1.185.510.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.175.936.452,00 atau 99,19%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai kebutuhan yang ada untuk kepentingan administrasi penduduk yaitu pembelian atk, konsultasi & koordinasi ke dinas terkait dan pembayaran jasa operator SIAK Kecamatan dan Kelurahan serta Honor RT dan RW 3 Kelurahan.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebesar Rp.665.984.469,00 dengan realisasi sebesar Rp.660.899.400,00 atau 99,24%. Program ini terdiri dari :

- 1. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dan dianggarkan sebesar Rp.354.784.469,00 dengan realisasi sebesar Rp. 349.704.400,00 atau 98,57%. Adapun Output/Keluaran dari kegiatan ini adalah :**
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dengan anggaran Rp.35.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 33.622.000,00 atau 94,18%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai kebutuhan yaitu untuk kegiatan musrenbang di kecamatan lawang kidul.
 - b. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dengan anggaran Rp. 319.084.469,00 dan realisasi sebesar Rp.316.082.400,00 atau 99,06%. Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan seperti PKK, yaitu rapat rutin setiap bulan, biaya transport anggota PKK ke Kabupaten, kegiatan MTQ (Sewa rumah, makan minum, atk, uang saku, sppd) Paskibra (makan minum, atk, sppd, pakaian paski, honor pelatih, uang saku, sewa alat kantor) Kegiatan inovasi, dan kegaitan TTG.
- 2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dan dianggarkan sebesar Rp. 295.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.295.200.000,00 atau 100%. Adapun Output/Keluaran dari kegiatan ini adalah :**
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dengan anggaran Rp. 16.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 15.995.000,00 atau 99,97%.



Kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai kebutuhan yaitu untuk kegiatan musrenbang di 3 Kelurahan.

- b. Pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan anggaran Rp. 295.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp295.200.000,00 atau 100%. Kegiatan ini telah dilaksanakan untuk Honor Ustadz/ustadzah, Imam Mudim dan Rohaniawan.

D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran untuk program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebesar Rp. 26.317.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 26.300.000,00 atau 99,93%. Program ini terdiri dari :

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dianggarkan sebesar 26.317.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 26.300.000,00 atau 99,93%. Adapun Output/Keluaran dari kegiatan ini adalah:**

- a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Menetapkan Pengamanan Pancasila, Peleaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemerintahan dan Pemekiharan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dianggarkan sebesar Rp.26.317.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 26.300.000,00 atau 99,93%. Dengan rincian pembayaran jasa tenaga LPMK, dan SPPD.

E. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Alokasi anggaran untuk program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebesar Rp. 10.732.275,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.724.000,00 atau 99,92%. Program ini terdiri dari:

- 1. Fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dan dianggarkan sebesar sebesar Rp. 10.732.275,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.724.000,00 atau 99,92%. Adapun Output/Keluaran dari kegiatan ini adalah:**

- a. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dengan anggaran Rp.9.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.9.000.000,00 atau 100%. Kegiatan ini berisi mengenai pembayaran honor LPMK.
- b. Koordinasi pelaksanaan pembangunan Kawasan perdesaan di wilayah kecamatan dengan anggaran Rp. 1.732.275,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.724.000,00 atau 99,52%. Berapa rincian dari kegiatan ini telah dilaksanakan untuk melakukan perjalanan dinas ke desa-desa serta pembelian ATK kantor.



5.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan		Indeks Pelayan Publik	78	78	78
2.		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Lawang Kidul	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85	85
3.		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	78	78	78
4		Meningkatnya Akintabilitas Kinerja Kecamatan Lawang Kidul	Nilai SAKIP Kecamatan	56,60	Baik	Baik

5.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Kecamatan Lawang Kidul Kekurangan Fasilitas dalam Pelayanan	Sarana Dan Prasarana di Pelayanan Kantor Camat Lawang Kidul di Rencanakan Akan di Perbaiki
2.	Jaringan Internet yang Lemah Sinyal	Menambah Tower atau Pemasangan Stralink dan Sejenisnya.
3.	Jumlah SDM Pegawai yang Terbatas Dengan Kompetensi yang Tidak Merata	Mengusulkan ke BKPSDM Kabupaten Muara Enim untuk Penambahan Staff (SDM) Untuk Memenuhi Kekurangan Pegawai Tersebut Serta Mengikut Sertakan Pegawai yang Ada Untuk Mengikuti Pelatihan/Bimtek
4.	Sering Terjadinya Pemadaman Listrik Sehingga Mengganggu Aktivitas Sehari-Hari.	Pihak Terkait Agar Lebih Meningkatkan Pelayanan dan Kinerja Sehingga Tidak Terjadi Pemadaman yang Terus



		Menerus.
5.	Banyaknya Tambang Batubara Ilegal Sehingga Menimbulkan Debu yang Meresahkan Masyarakat	Pihak Kecamatan Sudah Menghimbau , Membuat Edaran Dan Menginstruksikan Kepada Kepala Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tanjung Tentang Larangan Kegiatan Penambangan Galian C dan Penambangan Batubara Ilegal.
6.	Banyaknya Truk Batubara yang Melintas Sehingga Sering Menyebabkan Kemacetan di Jalan Raya dan Menyebabkan Jalan Raya/ Umum Menjadi Berlubang	Diharapkan Truk Batubara Mempunyai Jalan Tersendiri Agar Tidak Terjadi Kemacetan dan Mengganggu Pengguna Jalan Raya.
7.	Adanya Tambang Ilegal yang merusak lingkungan	Kewenangan pertambangan galian C dan tambang batubara sudah diambil alih oleh pihak kabupaten

5.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Bagian ini berisi jabaran deskripsi prestasi yang diterima oleh masing masing kecamatan terkait selama tahun 2025:

1. Inovasi Daerah Kategori Kecamatan Dalam Rangka Penilaian/ Asistensi Inovasi Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2026
2. Juara I Tartil Al qur'an MTQ tk Kecamatan di Lubai Kab. Muara Enim
3. Juara I Lomba Kaligrafi MTQ tk Kecamatan di Lubai Kab. Muara Enim
4. Juara I Syarhil Quran MTQ tk Kecamatan di Lubai Kab. Muara Enim
5. Juara II Hafalan Surah al qur'an MTQ tk Kecamatan di Lubai Kab. Muara Enim
6. Penghargaan Juara 1 Sandang Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Muara Enim
7. Juara II Sandang Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sumatera Selatan
8. Juara Harapan III Lomba Masak Seba Ikan Tingkat Kabupaten
9. Juara III Stan Terbaik Tingkat Kabupaten Dalam Rangka HKG PKK Tahun 2025
10. Penghargaan Lomba Posyandu Bidang Kesehatan Dan Kader Berprestasi Tingkat Kabupaten Muara Enim



5.5 KERJASAMA DAN IMPLEMENTASI KERJASAMA DENGAN PIHAK EKSTERNAL

No	Pihak yang diajak bekerjasama	Landasan Kerjasama (No. MoU)	Implementasi Kerjasama (PKS/Kegiatan/Program)
1.	Stakholder (Kantor Urusan Agama), Karang Taruna, Tokoh Agama dan Masyarakat	Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Kecamatan Lawang Kidul 29.b/27/KPTS/IV/2025	Standar Pelayanan Publik Kecamatan Lawang Kidul

6. KECAMATAN MUARA ENIM

Alokasi Anggaran belanja Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 14.657.744.360,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.014.833.157,- atau 88,79% dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 13.109.734.360,00 terealisasi sebesar Rp. 11.476.223.157,00 atau 87,54 % yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 1.548.010.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.538.610.000,00 atau 99,39 % yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

6.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim melaksanakan 5 (Lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 39 (Tiga puluh sembilan) sub kegiatan, yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp. 8.818.310.705,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.461.189.685,- atau 84,61 %. Program tersebut terdiri dari 8 (delapan) kegiatan yaitu (1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah. (6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan



Daerah. (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan 27 (dua puluh tujuh) subkegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 10.407.600 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.387.000 atau sebesar 99,80 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 (satu) dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 10.200.200 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.183.000 atau sebesar 99,83 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD sebanyak 1 (satu) dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 8.704.100 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.683.000 atau sebesar 99,76 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD sebanyak 1 (satu) dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 6.466.700 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.460.000 atau sebesar 99,90 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD sebanyak 1 (satu) dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- e. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 9.121.400 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.098.000 atau sebesar 99,74 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dokumen AKIP sebanyak 4 (empat) dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 6.904.795.925 dan realisasi keuangan sebesar 5.706.988.323 atau sebesar 82,65 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Terlaksananya Pembayaran Gaji ASN sebanyak 12 (dua belas) bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.



- b. Subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 9.806.300 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.769.600 atau sebesar 99,63 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah umlah laporan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD sebanyak 9 (sembilan) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 8.843.200 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.808.000 atau sebesar 99,60 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun sebanyak 4 (empat) dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- a. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 9.151.300 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.069.000 atau sebesar 99,10 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan semester sebanyak 2 (dua) dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 10.969.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.484.437 atau sebesar 50,00 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional Yang Disediakan Jasa Asuransi sebanyak 1 (satu) unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 0 (kosong) orang dengan capaian output/keluaran sebesar 0%.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 7.012.500 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.990.000 atau sebesar 99,68 %.



Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Alat Listrik Yang Dibutuhkan sebanyak 4 (empat) jenis dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 145.642.720 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 135.959.900 atau sebesar 93,35 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Peralatan Yang Dibutuhkan sebanyak 18 (delapan belas) jenis dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 66.712.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 59.645.000 atau sebesar 89,41 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah BBM Yang Disediakan sebanyak 1440 (seribu empat ratus empat puluh) liter dan Jumlah dan Jenis ATK Yang Tersedia 17 (tujuh belas) Jenis dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Subkegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 52.008.760 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 50.631.500 atau sebesar 97,35 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Barang Yang Dicitak sebanyak 3 (tiga) jenis dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- e. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang dengan anggaran sebesar Rp. 3.762.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.220.000 atau sebesar 59,01 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Bahan Bacaan Yang Disediakan sebanyak 3 (tiga) jenis dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- f. Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 76.370.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 75.875.200 atau sebesar 99,35 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Notulen Rapat sebanyak 12 (dua belas) notulen dengan capaian output/keluaran sebesar 99,35 %.
- g. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 288.174.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 288.127.156 atau sebesar 99,98 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah laporan koordinasi dan konsultasi dalam daerah sebanyak 36 (tiga puluh enam) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.



6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Subkegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp. 101.760.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 100.350.000 atau sebesar 98,61 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Pengadaan Mebel sebanyak () unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 164.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 163.015.000 atau sebesar 99,40 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin sebanyak 12 (dua belas) unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 314.913.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 215.097.344 atau sebesar 68,30 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Materai yang disediakan sebanyak 4 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.000.000 atau sebesar 100 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 4 Jumlah Materai yang disediakan sebanyak 4 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 162.783.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 98.337.344 atau sebesar 60,41 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 18 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 8.030.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.900.000 atau sebesar 85,93%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Peralatan Kerja Yang Terpelihara sebanyak 11 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- e. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 139.100.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 104.860.000 atau sebesar 75,38%. Adapun output/keluaran



dari subkegiatan ini adalah 16 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 78.610.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 68.948.225 atau sebesar 97,28%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas / operasional yang disediakan jasa pemeliharaan sebanyak 39 Unit dan jumlah kendaraan dinas / operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan 39 unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 500.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 496.350.000 atau sebesar 99,27%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor Yang Terpelihara sebanyak 9 Unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 15.880.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.050.000 atau sebesar 82,18%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah perlengkapan gedung yang terpelihara sebanyak 9 Unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100%

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Alokasi anggaran untuk program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 145.008.500,- dengan realisasi sebesar Rp 112.814.500,- atau 77,80 %. Program tersebut terdiri dari 1 kegiatan yaitu : (1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat. Keluaran (Output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- a. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran sebesar Rp. 13.233.500 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.233.500 atau sebesar 100 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini



adalah Jumlah Pelayanan Administrasi sebanyak 3 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- b. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Pelayanan Non Perizinan dengan anggaran sebesar Rp. 69.520.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 63.500.000 atau sebesar 91,34 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 8 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan anggaran sebesar Rp. 62.255.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.081,000 atau sebesar 57,96%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 16 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program peningkatan sumber daya aparatur sebesar Rp. 5.354.495.950,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.123.887.772,- atau 95,69 %. Program tersebut terdiri dari 2 kegiatan yaitu (1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. (2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

Keluaran (Output) dan Target dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan anggaran sebesar Rp. 51.244.590 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.144.000 atau sebesar 88,10 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah peserta musrenbang sebanyak 200 orang dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 528.208.690 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 479.440.882 atau sebesar 90,77%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah desa / kelurahan yang menggunakan TTG sebanyak 2 Kelompok, 10 Desa, 50 Orang, 16 Desa / Kelurahan, 38 Posyandu dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- a. Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 35.879.070 dan realisasi keuangan sebesar



Rp. 32.831.090 atau sebesar 91,50 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah peserta musrenbang sebanyak 100 orang 6 kelurahan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- b. Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. 1.680.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.677.485.000 atau sebesar 94,44%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah terbangunnya sarana dan prasarana dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan anggaran sebesar Rp. Rp. 3.059.163.600 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.888.986.800 atau sebesar 94,44%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah pemberdayaan kelurahan sebanyak 6 kelurahan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 25.022.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.319.900,- atau 89.20%. Program tersebut terdiri dari 1 kegiatan yaitu (1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Keluaran (Output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan anggaran sebesar Rp. 25.022.900 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.319.900,- atau 89.20%.

E. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 314.906.305,- dengan realisasi sebesar Rp. 294.621.300,- atau 93,56 %. Program tersebut terdiri dari 1 kegiatan yaitu (1) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

Keluaran (Output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Subkegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa anggaran sebesar Rp. 18.311.305 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.209.000 atau sebesar 88.52%. Adapun output/keluaran dari



subkegiatan ini adalah Jumlah Desa sebanyak 10 (sepuluh) dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- b. Subkegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 273.317.400 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 256.093.300 atau sebesar 93,70 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah 16 desa/ kelurahan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 23.277.600 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.319.000 atau sebesar 95,88 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Desa Yang difasilitasi sebanyak 10 Desa dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

6.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	93,5%	93,5%	100%
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	0,80615 (maju)	0,80615 (maju)	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	60	60	100%

6.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1	Realisasi anggaran Kantor Camat Muara Enim belum mencapai 100%, yang menunjukkan masih terdapat kegiatan atau belanja yang tidak sepenuhnya terserap. Kondisi ini dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan, efisiensi belanja, serta perbedaan antara perencanaan dengan kebutuhan riil selama tahun berjalan.	Menyusun perencanaan dan penganggaran yang lebih realistis dan berbasis kebutuhan riil, serta memperkuat evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar perencanaan tahun berikutnya.



No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
2	Beberapa kegiatan tidak terlaksana secara optimal karena keterbatasan waktu pelaksanaan, perubahan jadwal kegiatan, serta adanya penyesuaian terhadap kondisi dan kebijakan yang berkembang.	Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan agar hambatan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditangani.
3	Kegiatan peningkatan kompetensi aparatur belum sepenuhnya terlaksana, sehingga penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Kantor Camat Muara Enim masih perlu ditingkatkan.	Mendorong pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi aparatur sesuai kebutuhan organisasi serta meningkatkan pembinaan dan pendampingan internal.
4	Dalam pelaksanaan tugas koordinatif, masih ditemukan kendala koordinasi dengan perangkat daerah terkait, pemerintah desa, dan kelurahan, yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan sebagian kegiatan.	Memperkuat peran koordinatif Kantor Camat melalui peningkatan komunikasi dan kerja sama dengan perangkat daerah, pemerintah desa, dan kelurahan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

6.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Penghargaan dan prestasi yang diterima Kecamatan Muara Enim pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Juara 3 Program Kampung Iklim Desa Harapan Jaya Tingkat Nasional.
2. Juara 1 Administratif PKK Tingkat Provinsi.
3. Juara 2 Inovasi Tingkat Kabupaten.
4. Juara 3 Kearsipan Tingkat Kabupaten.
5. Juara 3 Perencanaan Tingkat Kabupaten.
6. Juara 1 Lomba Marawis Putri Tingkat Kabupaten.

7. KECAMATAN UJAN MAS

Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim melaksanakan Urusan Wajib Pemerintahan Umum, pada tahun 2025 dialokasi anggaran sebesar Rp 4.215.273.075,00 terealisasi sebesar Rp 3.563.263.660,00 atau 84,53% dengan capaian kinerja keluaran (output) sebesar 84,53%, dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Operasional

Belanja Operasional dialokasikan sebesar **Rp 3.662.380.399,00** terealisasi sebesar **Rp 3.662.380.399,00** atau **95,72%**, yang diarahkan untuk membiayai belanja gaji dan tunjangan PNS, pembulatan gaji serta tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya juga belanja barang dan jasa.



B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp 552.892.676,00** terealisasi sebesar **Rp 552.892.676,00** atau **100%** yang dialokasikan untuk belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal jalan, jaringan dan irigasi.

7.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2025 Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 Program 13 Kegiatan 31 Sub Kegiatan, antara lain yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp3.427.677.501,00 terealisasi sebesar Rp 2.844.533.726,00 atau 82,99% Program tersebut terdiri dari 7 (Tujuh) Kegiatan dan 21 (Dua Puluh Satu) Sub Kegiatan yaitu (1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah , (a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, (b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, (a) Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN (b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD (3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, (a) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (c) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan/Bimtal (4) Administrasi Umum Perangkat Daerah, (a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor (d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (f) Fasilitas Kunjungan Tamu (g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, (a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, (a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat (b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (c) Penyediaan Jasa Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor (d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 2 dokumen



2. Penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 4 Dokumen
3. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN sebanyak 12 bulan
4. Laporan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/semesyeran SKPD sebanyak 3 laporan
5. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya sebanyak 0 paket
6. Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi sebanyak 2 orang
7. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan/Bimtal sebanyak 25 orang
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 5 jenis
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 11 jenis
10. Penyediaan bahan Logistik kantor sebanyak 23 jenis
11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 9 jenis
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebanyak 3 harian.
13. Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 11 Notulen.
14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 3 laporan.
15. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebanyak 1 unit
16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 2 jenis
17. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 2 Rekening
18. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebanyak 4 jenis
19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebanyak 2 orang
20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebanyak 6 unit
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebanyak 1 unit

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp 251.555.134,00 terealisasi sebesar Rp 246.921.834,00 atau 98,16%. Program tersebut terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan yaitu (1) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum , (a) Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta



(2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat,
(a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha,(b) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan,(c) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Keluaran (output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

1. Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta sebanyak 120 titik perbaikan lampu jalan
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha sebanyak 7 dokumen
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan sebanyak 7 Dokumen.
4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan sebanyak 6 dokumen.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar Rp. 321.024.240,00 dengan realisasi sebesar Rp 264.735.100,00 atau 82,47%. Program tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu (1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, (a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, (b) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

Keluaran (Output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

1. Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Sebanyak 150 orang
2. Jumlah desa yang termonitor pembangunannya sebanyak 9 desa.
3. Terselenggaranya 5 cabang kegiatan MTQ tingkat Kecamatan.
4. Pembinaan Ke Desa sebanyak 9 Desa
5. Kegiatan inovasi yang di kembangkan 1 Kegiatan
6. Pembinaan PKK desa oleh Tim PKK Kecamatan sebanyak 9 PKK Aktif

D. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp 3.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.850.000,00 atau 95%. Program tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 Sub Kegiatan yaitu (1) Kooordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, (a) Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.



Keluaran (Output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

1. Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp 200.968.000,00 dengan realisasi sebesar Rp196.693.000,00 atau 97,87%. Program tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 Sub Kegiatan yaitu (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala daerah, (a) Pembinaan wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, UUD Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (b) Pelaksanaan Tugas forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Keluaran (Output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

1. Jumlah Anggota Paskibra di Kecamatan Ujan Mas sebanyak 40 Orang
2. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebanyak 9 Desa.

F. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp 11.048.200,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.530.000,00 atau 68,16%. Program tersebut terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu (1) Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (a) Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan.

Keluaran (Output) dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah :

1. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Ujan Mas desa yang di fasilitasi sebanyak 9 desa.

7.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	90,67	85



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Terhadap Pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	0	0	0
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB	CC	CC

7.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Ruangan yang Kurang	Akan diajukan ke Dinas Terkait mengenai Penambahan Ruang dan Sarana Prasarana
2.	Belum adanya sarana angkutan barang roda empat (Pick Up)	Akan dianggarkan di tahun 2027

7.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Kecamatan Ujan Mas Tahun 2025 untuk Penghargaan dan Prestasi belum didapat.

8. KECAMATAN BENAKAT

Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 3.601.275.922,20,- (Tiga Milyar Enam Ratus Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Koma Dua Puluh Rupiah) dengan Realisasi sebesar Rp. 3.180.601.416,- (Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Satu Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah) atau sebesar 88,31 Persen, untuk Membiayai Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Operasional

Belanja Operasional dialokasikan sebesar **Rp. 3.335.071.922,20,-** (*Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Koma Dua Puluh Rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp. 2.919.231.416,-** (*Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah*) atau 87,53 Persen yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.



B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp. 266.204.000,-** (*Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Ribu Rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp. 261.370.000,-** (*Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) atau 98,18 Persen yang diarahkan untuk membiaya kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kinerja Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim.

8.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Pada tahun 2025 Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim melaksanakan sebanyak 6 (Enam) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Subkegiatan yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota sebesar **Rp. 3.078.867.409,20,-** (*Tiga Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Koma Dua Puluh Rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp. 2.661.734.772,-** (*Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) atau sebesar 86,45 Persen, program ini terdiri dari 7 (Tujuh) Kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Subkegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- a. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 847.100,-** (*Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp. 828.600,-** (*Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah*) atau sebesar **97,82** Persen. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 (Dua) Dokumen yang terdiri dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 847.100,-** (*Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp. 823.000,-** (*Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*) atau **97,15** Persen. adapun output/keluaran dari subkegiatan ini berupa 1 (Satu) Dokumen yang terdiri atas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Kecamatan Benakat tahun 2024, guna memenuhi amanat Permendagri no 77 tahun 2020



- tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 484.200,- (Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 466.600,- (Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah)** atau **96,37** Persen. Adapun Output/Keluaran adalah berupa 1 (satu) dokumen DPA-SKPD Kecamatan Benakat tahun anggaran 2024 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - d. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 884.100,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 823.000,- (Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah)** atau **93,09** Persen. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini berupa 1 (satu) Perubahan dokumen DPPA-SKPD Kecamatan Benakat tahun anggaran 2024 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - e. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar **Rp. 1.000.600,- (Satu Juta Enam Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 972.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)** atau **97,14** Persen. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini berupa 1 (satu) laporan yang terdiri dari Dokumen LKPJ, LPPD, dan PK sebanyak 3 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar **Rp. 2.619.279.007,- (Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.235.184.353,- (Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah)** atau **85,34** Persen. Subkegiatan ini untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN yang direncanakan dengan target sebanyak 36 (Tiga Puluh Tiga) orang, dengan realisasi sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) orang



selama 12 (dua belas) bulan atau sebesar 91,67 persen.

- b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 1.931.500,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.725.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)** atau **89,31** Persen. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 (Satu) Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.495.500,- (Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah)** atau **99,70** Persen. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini adalah laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semester SKPD sebanyak 1 (Satu) Laporan, guna memenuhi amanat Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan anggaran **Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** atau 45,45 Persen. Subkegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan biaya setor Diklat/bimtek/lainnya dibayarkan oleh OPD BKPSDM Kabupten Muara Enim dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Level-1 di Palembang selama 5 (Lima) hari sehingga penyerapan anggaran tidak terealisasi dengan capaian Output / keluaran sebesar 100 persen.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor dengan anggaran sebesar **Rp. 2.500.400,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Empat Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.457.000,- (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)** atau **98,26** Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah 10 Paket komponen instalasi



- listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian output sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar **Rp. 5.001.237,- (Lima Juta Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.920.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)** atau **98,38** Persen. adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah 13 Paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian output sebesar 100 Persen.
 - c. Subkegiatan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar **Rp. 4.471.035,- (Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Puluh Lima Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.442.000,- (Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah)** atau **99,35** Persen. adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah 5 Paket bahan logistik kantor dengan capaian output sebesar 100 persen.
 - d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan anggaran sebesar **Rp. 1.885.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.819.200,- (Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah)** atau **96,51** Persen. adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah 4 (Empat) paket barang cetakan dan penggandaan dengan capaian output sebesar 100 persen.
 - e. Subkegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan anggaran **Rp. 117.716.650,- (Seratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 117.716.630,- (Seratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah)** atau **100** Persen. adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah 12 (Dua belas) laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD setiap bulannya dengan capaian output sebesar 100 Persen.

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- a. Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar **Rp. 33.564.000,- (Tiga Puluh tiga Juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 29.570.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)** atau **88,10** Persen. Adapun Output / keluaran subkegiatan ini adalah 1 (Satu) Unit Kendaraan



Bermotor Roda 2 (Dua) dengan capaian output / keluaran 100 persen.

- b. Subkegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar **Rp. 14.640.000,- (Empat Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 14.550.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** atau 99,39 Persen. Adapun Output/keluaran subkegiatan ini adalah 41 (Empat Puluh Satu) unit yang terdiri dari 31 (Tiga Puluh Satu) unit kursi plastik dan 10 (Sepuluh) unit kursi rapat dengan capaian output sebesar 100 persen.
- c. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar **Rp. 84.000.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 83.900.000,- (Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** atau 99,93 Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah 2 (Dua) unit Printer, dan 4 (Empat) Unit Laptop dengan capaian output sebesar 100 persen.

6. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah.

- a. Subkegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan anggaran sebesar **Rp. 1.568.000,- (Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.540.000,- (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** atau 98,21 Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah 140 (Seratus Empat Puluh) lembar Materai dengan capaian output sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar **Rp. 23.904.980,- (Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.148.889,- (Tiga Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah)** atau 13,17 Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa berupa 2 (Dua) jenis terdiri dari Belanja tagihan air, dan belanja tagihan listrik, selama 12 (Dua belas) bulan. Rendahnya penyerapan keuangan dikarenakan adanya efisiensi penggunaan/pemakaian belanja air, dan listrik dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- c. Subkegiatan ini jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan anggaran sebesar **Rp. 4.260.000,- (Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** atau 98,59 Persen. Adapun



output/keluaran subkegiatan ini berupa 9 (Sembilan) unit pemeliharaan yang terdiri dari 3 (Tiga) unit pemeliharaan AC, 3 (Tiga) unit pemeliharaan komputer, dan 3 (Tiga) unit pemeliharaan unit printer dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

- d. Subkegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran sebesar **Rp. 17.120.000,- (Tujuh Belas Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah)** atau **93,46** Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 8 (Delapan) Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- a. Subkegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran sebesar **Rp. 38.538.500,- (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 38.503.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah)** atau **99,91** persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 2 (Dua) unit kendaraan yang terdiri dari 1 (Unit) Kendaraan Dinas Mobil Camat, dan 1 (Unit) kendaraan dinas Sekcam dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- b. Subkegiatan pemeliharaan / rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran sebesar **Rp. 91.924.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 91.650.000,- (Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** atau **99,71** persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 1 (Satu) unit pembangunan yang terdiri dari 1 (Satu) unit rehab siring dan jalan pintu gerbang kantor dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar **Rp. 150.208.300,- (Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 148.283.700,- (Seratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah)** atau sebesar **98,72** Persen.



Program ini terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dan 4 (Empat) Subkegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

- a. Subkegiatan Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta dengan anggaran sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) atau 100 Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 50 (Buah) prasarana dan sarana fasilitas pelayanan umum (Pemeliharaan lampu jalan) dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat

- a. Subkegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha dengan anggaran sebesar Rp. 9.805.900,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 9.239.400,- (Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 94,22 Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 6 (Enam) dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan dengan anggaran sebesar Rp. 9.812.800,- (Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 9.246.300,- (Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Rupiah) atau 94,23 Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 6 (Enam) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- c. Subkegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan yang lain yang dilimpahkan dengan anggaran sebesar Rp. 65.589.600,- (Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 64.798.000,- (Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu rupiah) atau 98,79 Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 6 (Enam) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Alokasi anggaran program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebesar Rp. 199.734.628,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh



Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 199.107.219,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Belas rupiah) atau 99,69 Persen. Program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 2 (Dua) subkegiatan sebagai berikut :

1. **Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa.**

- a. Subkegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dengan anggaran sebesar Rp. 24.526.600,- (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 24.489.080,- (Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Rupiah) atau 99,85 Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 12 (Dua Belas) lembaga kemasyarakatan yang mengikuti forum musyawarah pembangunan desa dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 175.208.028,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 174.618.139,- (Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Sembilan rupiah) atau 99,66 persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 4 (Empat) Laporan berupa laporan kegiatan Pelaksanaan MTQ, PKK, Safari Ramadhan dan Penilaian Lomba Desa dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

D. Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum.

Alokasi anggaran program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum sebesar Rp. 2.039.985,- (Dua Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.776.155,- (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Lima rupiah) atau 87,07 persen. Program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 1 (Satu) subkegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - a. Subkegiatan sinergitas kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan dengan anggaran sebesar **Rp. 2.039.985,- (Dua Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima**



rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 1.776.155,- (Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Lima rupiah)** atau **87,07** persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 2 (Dua) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

E. Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Alokasi anggaran program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebesar Rp. 165.482.500,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 165.272.500,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus rupiah) atau 99,87 persen. Program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 2 (Dua) subkegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.

- a. Subkegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara republik indonesia dengan anggaran sebesar Rp. 142.172.500,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 142.172.500,- (Seratus Empat Puluh Dua Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus rupiah) atau 100 persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 35 (tiga puluh lima) orang anggota paskibraka yang terlatih dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 23.310.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.100.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Ribu rupiah) atau 99,10 persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 5 (lima) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Alokasi anggaran program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebesar Rp. 4.943.100,- (empat juta sembilan ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 4.427.070,- (Empat Juta



Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu) atau 89,56 persen. Program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 1 (satu) subkegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

- a. Subkegiatan koordinasi pelaksanaan pembangunan perdesaan di wilayah kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.943.100,- (empat juta sembilan ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 4.427.070,- (Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu) atau 89,56 persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 6 (enam) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

8.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	a. Indeks Kepuasan masyarakat	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya keberdayaan masyarakat desa di Kecamatan	a) Persentase Desa mandiri/ maju di Wilayah Kecamatan	80% 100% 100%	83% 100% 100%	96% 100% 100%
			b) PKK Aktif			
			c) Persentase Pembinaan Pemerintahan Desa / Kelurahan di Wilayah Kecamatan.	100%	100%	100%
			d) Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, ketenteraman dan keindahan) yang ditindaklanj			



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
			uti,			
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	BB	B	86%

8.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Fasilitas Sarana dan Prasaran Kantor yang kurang	Mengenai fasilitas sarana dan prasaran akan diajukan anggaran ke OPD terkait
2.	Beberapa Kendaraan Dinas yang kurang layak	Mengenai adanya beberapa kendaraan dinas yang kurang layak akan diajukan penambahan anggaran pada tahun 2027

8.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Belum ada.

9. KECAMATAN GUNUNG MEGANG

Alokasi belanja Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim sebesar Rp.4.961.576.178,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.169.847.991,- atau 84.04 % dan kinerja keluaran (output) sebesar 84,04 % dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp.4.536.919.906,- terealisasi sebesar Rp. 3.751.624.091,- atau 82,69 % yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang /jasa dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp.424.656.272,- terealisasi sebesar Rp. 418.599.400,- atau 98,57 %, yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang akan menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.



9.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2025 Kecamatan Gunung Megang melaksanakan 6 (enam) program 14 (empat belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan, antara lain yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 4.070.091.805,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.327.465.541,- atau 81,75 % Program tersebut terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- a. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar RP. 7.161.100 dan realisasi keuangan sebesar RP. 6.962.000,- atau 97,22%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD. dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar RP. 1.553.200 dan realisasi keuangan sebesar RP. 385.000 atau 24,79 % Persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat Daerah. dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar RP. 2.840.098.713,- dan realisasi keuangan sebesar RP. 2.169.051.645,- atau 76,37 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah terlaksana nya pembayaran gaji dan tunjangan ASN dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dengan anggaran sebesar RP. 3.093.300 dan realisasi keuangan sebesar RP. 1.887.000,- atau 61,00 Persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar RP. 10.032.000,- dan realisasi keuangan sebesar



RP. - atau 0,0 Persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah terlaksana nya Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD. dengan capaian output/keluaran sebesar - persen.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan anggaran sebesar RP. 17.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar RP. 7.500.000,- atau 44,12 %. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Sub Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan anggaran sebesar RP. 4.751.100,- dan realisasi keuangan sebesar RP. 4.580.500,- atau 96,41 %. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar RP. 1.961.000,- dan realisasi keuangan sebesar RP. 1.947.000,- atau 99,29 %. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar RP. 144.672.500,- dan realisasi keuangan sebesar RP. 142.182.000,- atau 98,28 %. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen
- c. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Daerah dengan anggaran sebesar RP. 41.819.300,- dan realisasi keuangan sebesar RP. 28.954.628,- atau 69,24 %. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen
- d. Sub kegiatan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar RP. 1.200.000,- dan realisasi keuangan sebesar RP. 1.070.000 atau 89,17 Persen. Adapun output/keluaran



dari sub kegiatan ini adalah jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

- e. Sub kegiatan fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 3.501.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.3.420.000,- atau 97,69 Persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu capaian output/keluaran sebesar 100 persen
- f. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar RP. 160.442.800,- dan realisasi keuangan sebesar RP. 160.302.510,- atau 99,91 Persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD capaian output/keluaran sebesar 100 persen

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar RP. 25.056.872,- dan realisasi keuangan sebesar RP. 22.799.400,- atau 90,99 Persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran sebesar RP. 5.600.000,- dan realisasi keuangan sebesar RP. 5.000.000,- atau 89,29 %. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah laporan penyediaan jasa surat menyurat dengan capaian output/keluaran 100 persen.
- b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar RP. 51.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar RP. 43.053.333,- atau 84,42 %. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan dengan capaian output/keluaran 100 persen.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 19.574.658 dan realisasi keuangan sebesar RP. 13.576.000,- atau 69,35 %. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan penyediaan jasa



peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran 100 persen.

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 37.980.000 dengan anggaran sebesar Rp. 37.980.000 atau 100 Persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah tenaga keamanan kantor dan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran 100 persen.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran sebesar Rp. 38.754.392,- dan realisasi keuangan sebesar RP. 27.864.525,- atau 71,90%. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan capaian output/keluaran 100 persen.
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 654.839.870,- dan realisasi keuangan sebesar RP. 648.950.000,- atau 99,10 %. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah gedung kantor yang di pelihara dengan capaian output/keluaran 100 persen.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 169.689.461,- dengan realisasi sebesar Rp. 168.223.000,- atau 99,14 % Program tersebut terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut

1. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

- a. Sub kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta dengan anggaran sebesar RP. 108.944.000,- dan realisasi keuangan sebesar RP. 108.944.000,- atau 100 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara dengan melibatkan pihak swasta dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.



2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

- a. Sub kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non Usaha dengan anggaran sebesar Rp. 2.444.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.995.000,- atau 81,61 %. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan dengan anggaran sebesar RP. 28.742.272,- dan realisasi keuangan sebesar RP. 28.620.000,- atau 99,57 %. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah jumlah laporan pelaksanaan nonperizinan pada urusan pemerintahan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- c. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan dengan anggaran sebesar RP. 29.558.689,- dan realisasi keuangan sebesar RP. 28.664.000,- atau 96,97 %. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 414.099.582,- dengan realisasi sebesar Rp. 384.993.950,- atau 92,97 % Program tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan anggaran sebesar Rp. 32.853.017,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 32.685.600,- atau 99,49 Persen. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 381.246.565,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 352.308.350,- atau 92,41 %. Adapun output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan



masyarakat di wilayah Kecamatan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 114.127.215,- dengan realisasi sebesar Rp. 99.310.000,- atau 87,02 % Program tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 114.127.215,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 99.310.000,- atau 87,02 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian Negara republic indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah Kecamatan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 175.954.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 173.940.000,- atau 98,86 % Program tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

- a. Sub kegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang – undang dasar RI tahun 1945, pelestarian bhinika tunggal ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republic indonesia dengan anggaran sebesar Rp. 163.624.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 161.610.000,- atau 98,77 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara RI tahun 1945, pelestarian bhinika tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republic Indonesia dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Sub kegiatan Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dengan anggaran sebesar RP. 12.330.000,- dan realisasi



keuangan sebesar Rp. 12.330.000,- atau 100 % Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 17.613.915,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.915.500,- atau 90,36 % Program tersebut terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 17.613.915,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.915.500,- atau 90,36 %. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

9.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
	1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	1.1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	1.1.1 Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	86,3 %	86,3 %	86,3 %
		2.1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	2.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	85 %	85 %	85 %
		3.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	3.1.1 Nilai Sakip Kecamatan	60 %	60 %	60 %



9.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Kondisi jalan di beberapa desa masih rusak dan licin saat hujan sehingga menghambat aktivitas warga	Perbaikan dan pengaspalan jalan secara bertahap serta pengawasan kendaraan berat.
2.	Warga masih bergantung pada perkebunan dan pertambangan, penghasilan belum stabil.	Pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, dan dukungan modal usaha.
3.	Fasilitas sekolah terbatas dan masih ada anak yang putus sekolah karena ekonomi.	Peningkatan sarana sekolah dan pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu.
4.	Akses ke puskesmas cukup jauh dan layanan kesehatan belum merata.	Pelayanan kesehatan keliling dan penguatan posyandu.
5.	Dampak aktivitas tambang dan pengelolaan sampah yang belum maksimal.	Pengawasan lingkungan, penghijauan, dan pengelolaan sampah desa.
6.	Proses administrasi masih lambat dan belum sepenuhnya digital.	Digitalisasi layanan dan peningkatan kualitas pelayanan aparatur desa.
7.	Air bersih belum terdistribusi dengan baik, PDAM sering tidak mengalir, dan air yang keluar masih keruh/kotor sehingga tidak layak langsung digunakan.	Perbaikan dan pemerataan jaringan PDAM, peningkatan kualitas pengolahan air, penyediaan filter air sederhana, serta pembangunan sumur bor dan bak penampungan.

9.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Penghargaan dan prestasi yang diterima Kecamatan Gunung Megang Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Terbaik I Lomba Audit Kearsipan Internal Tingkat Kecamatan Dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2025;
2. Juara I Lomba Pada Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025;
3. Piagam Penghargaan Atas Realisasi E-Purchasing Tertinggi Tahun 2024;
4. Peringkat III Pelaporan Pelaksanaan Program Kerja Melalui Pelaporan E-Reporting Antar DWP Kecamatan Se-Kabupaten Muara Enim Tahun 2025;
5. Juara I Lomba Jingle Gelari Pelangi Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025.



10. KECAMATAN RAMBANG

Alokasi anggaran belanja Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 5.129.898.529,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.299.636.290,00 atau 83,82 persen dan kinerja keluaran (output) sebesar 91,32 persen dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Operasional

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 4.778.638.529,00 terealisasi sebesar Rp. 3.950.696.305,00 atau 82,67 persen yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 351.260.000,00 terealisasi sebesar Rp. 348.939.985,00 atau 99,34 persen yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

10.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2025 Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 program, 14 kegiatan dan 34 subkegiatan, antara lain yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.905.904.229,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.419.287.790,00 (Unaudited) atau 87,54 persen dengan capaian kinerja output sebesar 81,25 persen. Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) subkegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 533.300,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 380.000,00 atau sebesar 71,25 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100% dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 533.300,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 380.000,00 atau sebesar 71,25 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100% dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- c. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 604.900,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 505.000,00 atau sebesar 83,48 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100% dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.



2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.704.927.189,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.339.654.620,00 atau sebesar 86,50 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100% dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 1.032.200,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 790.000,00 atau sebesar 76,54 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100% dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar 0,00 atau sebesar 0,00 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 0% dengan capaian output/keluaran sebesar 0,00 persen.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.000.000,00 atau sebesar 100 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100% dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 4.320.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0,00 persen. Adapun output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah 0% dengan capaian output/keluaran sebesar 0,00 persen.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 7.500.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.467.000,00 atau sebesar 99,56 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100% dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 18.787.420,00 dan realisasi keuangan



- sebesar Rp. 16.142.500,00 atau sebesar 85,92 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100% dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- c. Subkegiatan Belanja Modal Peralatan dengan anggaran sebesar Rp. 121.260.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 119.970.000,00 atau sebesar 98,94 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100% dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
 - d. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 20.990.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 220.982.000,00 atau sebesar 99,96 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100% dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
 - e. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 10.396.500,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.390.000,00 atau sebesar 99,94 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100% dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
 - f. Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 20.617.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.000.000,00 atau sebesar 67,91 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100% dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
 - g. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 216.844.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 216.808.686,00 atau sebesar 99,98 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100% dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Subkegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp. 45.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 44.969.985,00 atau sebesar 99,93 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100% dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 85.000.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 84.000.000,00 atau sebesar 98,82 persen. Adapun



output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100% dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 5.207.300,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.000.000,00 atau sebesar 96,02 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100% dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 41.999.820,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.399.466,00 atau sebesar 74,76 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 42.800.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 42.800.000,00 atau sebesar 100 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100 dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas dengan anggaran sebesar Rp. 43.200.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.128.033,00 atau sebesar 28,07 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100% dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 29.320.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.700.000,00 atau sebesar 39,90 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100% dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- c. Subkegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 462.031.300,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 424.820.500,00 atau sebesar 91,95 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100% dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.



B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 175.529.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 150.822.500,00 atau 85,92 persen dengan capaian kinerja output sebesar 100 persen. Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) subkegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

- a. Subkegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta anggaran sebesar Rp. 99.005.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 98.995.000,00 atau sebesar 99,99 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100% dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

- a. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha anggaran sebesar Rp. 10.517.100,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.340.000,00 atau sebesar 88,81 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100% dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan anggaran sebesar Rp. 48.546.900,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.647.500,00 atau sebesar 63,13 persen. Adapun output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah 100% dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- c. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan anggaran sebesar Rp. 17.460.600,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.840.000,00 atau sebesar 67,81 persen. Adapun output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah 100% dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 526.530.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 347.991.000,00 atau 66,09 persen dengan capaian kinerja output sebesar 100 persen. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) subkegiatan sebagai berikut



1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa anggaran sebesar Rp. 45.952.800,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 42.556.000,00 atau sebesar 92,61 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100% dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan anggaran sebesar Rp. 480.578.100,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 305.435.000,00 atau sebesar 63,56 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100% dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 246.990.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 146.305.000,00 atau 59,24 persen dengan capaian kinerja output sebesar 100 persen. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) subkegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan anggaran sebesar Rp. 246.990.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 146.305.000,00 atau sebesar 59,24 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100% dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 176.075.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 169.825.000,00 atau 96,45 persen dengan capaian kinerja output sebesar 100 persen. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Subkegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan



dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia anggaran sebesar Rp. 176.075.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 169.825.000,00 atau sebesar 96,45 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100% dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 98.686.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 65.405.000,00 atau 66,15 persen dengan capaian kinerja output sebesar 66,67 persen. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) subkegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Subkegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum anggaran sebesar Rp. 16.800.000,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0,00 persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 0% dengan capaian output/keluaran sebesar 0,00 persen.
- b. Subkegiatan Fasilitasi Penataan Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa anggaran sebesar Rp. 55.862.200,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 55.820.000,00 atau sebesar 99,92 persen. Adapun output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah 100% dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- c. Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan anggaran sebesar Rp. 26.206.600,00 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.585.000,00 atau sebesar 36,57 persen. Adapun output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah 100% dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.



10.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4		5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik
			2	Presentase Urusan Pemerintah yang Difasilitasi	90%	90%	100%
			3	Persentase PKK Aktif	90%	90%	100%
			4	Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum dalam Kondisi Baik	80%	80%	100%
			5	Persentase Penyelenggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang Ditindaklanjuti	80%	80%	100%
			6	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Pemerintahan Desa	90%	90%	100%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1	Nilai SAKIP Kecamatan	B	B	B



10.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Administrasi asuransi barang milik daerah belum terlaksana secara optimal	Melakukan penataan dan pemenuhan administrasi asuransi barang milik daerah
2.	Penyesuaian terhadap perubahan peraturan masa jabatan kepala desa	Penyesuaian pelaksanaan kegiatan

10.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Penghargaan dan prestasi yang diperoleh Kecamatan Rambang Kabupaten Muara Enim Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Juara IV MTQ Tingkat Kabupaten Tahun 2025
2. Juara Terbaik II Kategori Perangkat Daerah Kecamatan Atas Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2025
3. Juara Harapan II Pupuk Organik Permentasi Kohe Kambing Tahun 2025
4. Juara III Lomba Anugerah Pesona Desa Wisata Tingkat Provinsi Tahun 2025
5. Juara II KP SPAMS Tingkat Kabupaten Tahun 2025
6. Juara I Kampung KB Sekabupaten Muara Enim Tahun 2025
7. Juara I Lomba Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2025
8. Juara II Lomba Kompetisi Pariwisata Desa Sumber Rahayu Tingkat Kabupaten Tahun 2025
9. Juara III Kearsipan dan Perpustakaan Desa di Tingkat Kabupaten Tahun 2025
10. Juara Harapan II Lomba Robbana Tingkat kabupaten Tahun 2025
11. Juara Harapan II Lomba B2SA Tingkat Kabupaten Tahun 2025

11. KECAMATAN RAMBANG NIRU

Dilaksanakan oleh Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 sebesar Rp. 4.500.354.548,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.929.648.329,- atau 87,32%

11.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Terdiri dari 5 (Lima) Program 12 (dua belas) kegiatan dan 30 (Tiga Puluh) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 15.001.300,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 14.372.800,- atau 95,81%



- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, alokasi sebesar Rp. 5.167.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.052.600,- atau 97,78%
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD, alokasi sebesar Rp. 4.795.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.506.600,- atau 93,97%
 - c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi sebesar Rp. 5.038.100,- dengan realisasi sebesar Rp 4.813.600,- atau 95,54%
2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 2.963.198.072,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 2.417.985.507,- atau 81,60 %.**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN alokasi sebesar Rp.2.956.832.372,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.411.710.307,- atau 81,56 %.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD alokasi sebesar Rp. 3.550.800,- dengan realisasi sebesar Rp.3.496.200,- atau 98,46%.
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD alokasi sebesar Rp. 2.814.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.779.000,- atau 98,72%.
3. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 0,- Dengan Realisasi sebesar Rp. 0,-**
 - a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD alokasi sebesar Rp. 0,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,-
4. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 30.276.800,- Dengan Realisasi sebesar Rp.22.265.200,- atau 73,54%.**
 - a. Sub Kegiatan pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi alokasi sebesar Rp. 20.936.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.306.200,- atau 63,56%.
 - b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan alokasi sebesar Rp. 9.340.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.959.000,- atau 95,91%.
5. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 407.927.268,- Dengan Realisasi sebesar Rp.251.056.294,- atau 61,54%.**



- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor alokasi sebesar Rp. 5.887.368,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.850.000,- atau 99,37%.
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi sebesar Rp. 162.515.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 161.970.000,- atau 99,66%.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor alokasi sebesar Rp. 7.300.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.300.000,- atau 100%
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor alokasi sebesar Rp. 15.901.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.875.000,- atau 99,83%.
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan alokasi sebesar Rp.10.141.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.010.000,- atau 98,71%.
 - f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu alokasi sebesar Rp.22.330.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 22.330.000,- atau 100%.
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD alokasi sebesar Rp.183.851.500,- dengan realisasi sebesar Rp.183.841.500,- atau 99,999%.
- 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp.228.556.088,- Dengan Realisasi sebesar Rp.28.177.348,- atau 12,33%.**
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan alokasi sebesar Rp.23.972.688,- dengan realisasi sebesar Rp.23.047.348,- atau 96,14%.
 - b. Sub Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Alokasi Anggaran Sebesar Rp.204.583.400,- Dengan Realisasi sebesar Rp.5.130.000,- atau 97,69%.
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp. 130.020.950,- Dengan Realisasi sebesar Rp.126.330.681,- atau 91,53%.**
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat alokasi sebesar Rp. 2.811.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.807.500,- atau 99,87%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik alokasi sebesar Rp. 63.959.750,- dengan realisasi sebesar Rp.52.273.181,- atau 81,73%.



- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi sebesar Rp. 11.330.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.330.000,- atau 100%.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi sebesar Rp. 59.920.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 59.920.000,- atau 100%.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

1. **Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum** Alokasi Anggaran sebesar Rp. 121.064.670,- Dengan Realisasi sebesar Rp.119.975,- atau 99,10%.
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta alokasi sebesar Rp.121.064.670,- Dengan Realisasi sebesar Rp.119.975.000,- atau 99,10%.
2. **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat** Alokasi Anggaran sebesar Rp. 65.978.300,- Dengan Realisasi sebesar Rp.65.602.700,- atau 99,43%.
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan alokasi sebesar Rp. 28.270.400,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.906.700,- atau 98,71%.
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan alokasi sebesar Rp. 37.707.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 37.696.000,- atau 99,97%.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

1. **Kegiatan Koordinasi Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** Alokasi Anggaran sebesar Rp. 317.892.500,- Dengan Realisasi sebesar Rp.317.536.300,- atau 99,89%.
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa alokasi sebesar Rp.52.117.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 51.952.000,- atau 99,68%.
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan alokasi sebesar Rp.265.775.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 265.775.500,- atau 99,93%.



D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp.163.045.000,- Dengan Realisasi sebesar Rp.162.145.000,- atau 99,45%.**
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia alokasi sebesar Rp. 163.045.000,- dengan realisasi sebesar Rp.162.145.000,- atau 99,45%.

E. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa

- 1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Alokasi Anggaran sebesar Rp. 49.393.600,- Dengan Realisasi sebesar Rp.49.249.500,- atau 99,71%.**
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum alokasi sebesar Rp.37.407.500,- dengan realisasi sebesar Rp.37.348.500,- atau 99,84%.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan alokasi sebesar Rp.11.986.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.901.000,- atau 99,29%.

11.2CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

-

11.3PERMASALAHAN DAN SOLUSI

-

11.4PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Dalam tahun 2025 Kecamatan Rambang Niru memperoleh Penghargaan dan Prestasi sebagai Berikut :

1. Juara I (Satu) Lomba Desa tingkat Provinsi Sumatera Selatan diwakili oleh Desa Lubuk Raman
2. Juara III (Tiga) Lomba Desa tingkat Nasional diwakili oleh Desa Lubuk Raman
3. Peringkat II (Dua) PKK dalam rangka Galeri Pilot Proyek PKK



12. KECAMATAN LUBAI

Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim sebesar **Rp. 4.075.412.756,-** (*Empat Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) Realisasi sebesar **Rp. 3.467.037.737,-** (*Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tigah Puluh Tujuh Rupiah*) atau sebesar 85,07 Persen, untuk Membiayai Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Operasional

Belanja Operasional dialokasikan sebesar **Rp. 3.805.085.156,-** (*Tiga Milyar delapan Ratus lima Juta delapan Puluh lima Ribu Seratus lima Puluh Enam Rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp. 3.212.492.737,-** (*Tiga Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) atau 84,43 Persen yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp. 270.327.600,-** (*Dua Ratus tujuh Puluh Juta tiga Ratus dua Puluh tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp. 254.545.000,-** (*Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*) atau 94,16 Persen yang diarahkan untuk membiaya kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kinerja Kecamatan Benakat Kabupaten Muara Enim.

12.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Pada tahun 2024 Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim melaksanakan sebanyak 6 (Enam) Program, 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 34 (Tiga Puluh Empat) Subkegiatan yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota sebesar **Rp. 3.020.499.756,-** (*Tiga Milyar Dua Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) dengan realisasi sebesar **Rp. 2.424.949.537,-** (*Dua Milyar empat Ratus dua Puluh Empat Juta sembilan Ratus empat Puluh sembilan Ribu lima Ratus tiga Puluh Tiga tujuh Rupiah*) atau sebesar 80,28 Persen, program ini terdiri dari 8 (Delapan) Kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) Subkegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- a. Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar **Rp. 6.255.000,-** (*Enam Juta Dua*



Ratus lima Puluh lima Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 6.255.000,- (Enam Juta Dua Ratus lima Puluh lima Ribu Rupiah)** atau sebesar **100 Persen**. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 2 (Dua) Dokumen yang terdiri dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025 dengan capaian output/keluaran sebesar **100,00 Persen**, guna memenuhi amanat Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

- b. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar **Rp. 4.405.000,- (Empat Juta empat Ratus Lima Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.398.000,- (Empat Juta tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)** atau **99,84 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari sub kegiatan ini berupa 1 (satu) laporan yang terdiri dari Dokumen LKPJ, LPPD, dan PK sebanyak 3 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar **Rp. 2.011.640.686,- (Dua Milyar Sebelas Juta Enam Ratus empat puluh Ribu enam Ratus delapan Puluh Enam Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.625.053.304,- (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh lima Juta Lima Puluh tiga ribu Tiga Ratus empat Rupiah)** atau **80,78 Persen**. Subkegiatan ini untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN yang direncanakan dengan target sebanyak 10 (Sepuluh) orang, dengan realisasi sebanyak 10 (Sepuluh) orang selama 12 (dua belas) bulan atau sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 5.025.000,- (Lima Juta dua puluh lima Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 5.025.000,- (Lima Juta dua puluh lima Ribu Rupiah)** atau **100,00 Persen**. Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 (Satu) Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.



3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 8.181.250,- (Delapan Juta Seratus delapan Puluh satu Ribu dua Ratus lima puluh Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. -,- (-)** atau **0,00** Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah berupa asuransi kendaraan roda empat sebanyak 1 (Satu) unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. SubKegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan anggaran sebesar **Rp. 4.100.000,- (Empat Juta Seratus Ribu Rupiah)** atau **89,61** Persen. Adapun Output/keluaran subkegiatan ini berupa Laporan Barang Milik Daerah sebanyak 1 (Satu) Laporan dengan capaian output sebesar 100 Persen, guna memenuhi amanat Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- a. Subkegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi kelengkapannya dengan anggaran sebesar **Rp. 18.000.000 (Delapan belas Juta Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 0,- (Nol Rupiah)** atau **0,00** Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah Adapun Output/Keluaran dari subkegiatan ini adalah berupa 20 stel pakaian dinas ASN dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.
- b. Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar **Rp. 4.030.000,- (Empat Juta tiga Puluh Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.030.000,- (Empat Juta tiga Puluh Ribu Rupiah)** atau **100** Persen. Adapun Output/keluaran subkegiatan ini adalah terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Kecamatan Lubai dengan capaian output 100 persen.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah.

- a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan kantor dengan anggaran sebesar **Rp. 15.003.300,- (Lima Belas Juta Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 14.994.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah)** atau **99,94** Persen. adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah 10 Paket komponen



- instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan capaian output sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar **Rp. 105.387.600,- (Seratus Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 105.345.000,- (Seratus Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)** atau **99,96** Persen. adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah 13 Paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian output sebesar 100 Persen.
 - c. Subkegiatan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar **Rp. 64.277.420,- (Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Dua Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 63.457.500,- (Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)** atau **98,72** Persen. adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah 5 Paket bahan logistik kantor dengan capaian output sebesar 100 persen.
 - d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar **Rp. 6.770.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 6.770.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)** atau **100,00** Persen. adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah 4 (Empat) paket barang cetak dan penggandaan dengan capaian output sebesar 100 persen.
 - e. Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar **Rp. 52.790.000,- (Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 49.600.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)** atau **93,96** Persen. Adapun output/keluaran sub kegiatan ini adalah 12 (Dua Belas) Laporan Kunjungan Tamu setiap bulannya dengan capaian output 100 Persen.
 - f. Subkegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan anggaran **Rp. 249.800.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 241.291.181,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah)** atau **96,59** Persen. adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah 12 (Dua belas) laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD setiap bulannya dengan capaian output sebesar 100 Persen.



6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- a. Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar **Rp. 149.940.000,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 149.200.000,- (Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)** atau **99,51** Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah 2 (Dua) unit yang terdiri dari 2 (Dua) unit pembangunan councblock dengan capaian output sebesar 100 Persen.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- a. Subkegiatan penyediaan jasa surat menyurat dengan anggaran sebesar **Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Ribu Rupiah)** atau **100,00** Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini adalah 200 (Dua Ratus) lembar Materai dengan capaian output sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar **Rp. 44.939.000,- (Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 28.334.052,- (Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Lima Puluh Dua Rupiah)** atau **63,05** Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa berupa 1 (Satu) jenis terdiri dari Belanja tagihan listrik, selama 12 (Dua belas) bulan. Rendahnya penyerapan keuangan dikarenakan adanya efisiensi penggunaan/pemakaian belanja listrik dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- c. Subkegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan anggaran sebesar **Rp. 0,- (Nol Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 0,- (Nol Rupiah)** atau 0,00 Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 12 (Dua Belas) Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 0,00 persen.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

- a. Subkegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran sebesar **Rp. 33.555.000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 31.112.500,- (Tiga Puluh Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)** atau **92,72** persen. Adapun



output/keluaran subkegiatan ini berupa 5 (Lima) unit kendaraan yang terdiri dari 1 (Unit) Kendaraan Dinas Mobil Camat, 1 (Unit) kendaraan dinas Sekcam, 3 (Tiga) unit kendaraan dinas roda 2 (Dua) dengan capaian output/keluaran sebesar 100 Persen.

- b. Subkegiatan pemeliharaan / rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran sebesar **Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 199.500.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** atau **99,68** persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 4 (Empat) unit pembangunan yang terdiri dari 1 (Satu) unit Pembuatan Nama Depan Kantor , 1 (Satu) Unit Rehab Lantai Kantor, 1 (Satu) Unit Rehab Rumah Dinas dan 1 (Satu) unit rehab ringan gedung kantor dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- c. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar **Rp. 30.400.000,- (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 30.110.000,- (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)** atau **99.05** persen. Adapun Output/keluaran ini berupa 2 (Dua) Unit yaitu Pemeliharaan Printer dan Laptop/Komputer dengan capaian Output/keluaran sebesar 100 Persen

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar **Rp. 310.330.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Juta tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 310.220.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Juta dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)** atau sebesar **100,00** Persen, program ini terdiri dari 2 (Dua) Kegiatan dan 4 (Empat) Subkegiatan sebagai berikut :

1. **Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum.**
 - a. Subkegiatan Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta dengan anggaran sebesar **Rp. 250.00.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 250.00.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Ribu Rupiah)** atau **100** Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 120 (Titik) prasaran dan sarana fasilitas pelayanan umum dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.



2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat.

- a. Subkegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha dengan anggaran sebesar **Rp. 13.060.000,- (Tiga Belas Juta Enam Puluh Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Ribu Rupiah)** atau **99,54** Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 6 (Enam) dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan dengan anggaran sebesar **Rp. 12.310.000,- (Dua Belas Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 12.310.000,- (Dua Belas Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)** atau **100** Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 6 (Enam) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- c. Subkegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan yang lain yang dilimpahkan dengan anggaran sebesar **Rp. 34.960.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 34.910.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)** atau **99.86** Persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 12 (Dua Belas) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Alokasi anggaran program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebesar **Rp. 325.163.700,- (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 248.410.200,- (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Rupiah)** atau **76,40** Persen. Program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 2 (Dua) subkegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

- a. Subkegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dengan anggaran sebesar **Rp. 33.890.200,- (Tiga Puluh Tiga Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 32.090.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah)** atau **94,69** Persen. Adapun output/keluaran berupa 1 (Satu) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100



- persen.
- b. Subkegiatan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dengan anggaran sebesar **Rp. 291.273.500,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 216.320.000,- (Dua Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)** atau **74,27** persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 12 (Dua Belas) lembaga kemasyarakatan yang mengikuti forum musyawarah pembangunan desa dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

D. Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.

Alokasi anggaran program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum sebesar **Rp. 119.674.900,- (Seratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 71.230.000,- (Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** atau **59,52** persen. Program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 1 (Satu) subkegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.

- a. Subkegiatan sinergitas kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan dengan anggaran sebesar **Rp. 119.674.900,- (Seratus Sembilan Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. Rp. 71.230.000,- (Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** atau **75,00** persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 2 (Dua) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Alokasi anggaran program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebesar **Rp. 186.297.400,- (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 181.800.000,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)** atau **71,60** persen. Program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 2 (Dua) subkegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

- a. Subkegiatan Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan



nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara republik Indonesia dengan anggaran sebesar **Rp. 186.297.400,- (Seratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 181.800.000,- (Seratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)** atau 71,60 persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 35 (tiga puluh lima) orang anggota paskibraka yang terlatih dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Alokasi anggaran program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebesar **Rp. 113.447.000,- (Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Tujuh Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 81.228.000,- (Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)** atau 71,60 persen. Program ini terdiri dari 1 (Satu) kegiatan dan 3 (tiga) subkegiatan sebagai berikut :

1. Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Subkegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar **Rp. 79.563.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 61.524.000,- (Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah)** atau 77,33 persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 1 (satu) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- b. Subkegiatan Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan anggaran sebesar **Rp. 14.199.000,- (Empat Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.040.000,- (Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)** atau 50,00 persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 1 (satu) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.
- c. Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar **Rp. 19.685.000,- Sembilan Belas Juta Enam ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)** dengan realisasi sebesar **Rp. 16.664.000,- (Enam Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)** atau 84,65 persen. Adapun output/keluaran subkegiatan ini berupa 1



(satu) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 persen.

12.2CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan masyarakat	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya peran kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan	a) Persentase urusan pemerintahan yang difasilitasi b) PKK Aktif c) Persentase sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum dalam kondisi baik, d) Persentase pelang garan K3 (Ketertiban, ketenteraman dan keindahan) yang ditindak lanjuti,	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai Sakip Kecamatan	BB	CC	CC

12.3PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Beberapa Kendaraan Dinas yang kurang layak	Mengenai adanya beberapa kendaraan dinas yang kurang layak akan diajukan penambahan anggaran pada tahun 2026
2.	Belum adanya sarana angkutan barang roda empat (Pick UP)	Mengenai belum adanya kendaraan angkutan barang akan diajukan penambahan anggaran pada tahun 2026



12.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

1. Juara II Lomba Masak Menu B2SA Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
2. Juara II Pasangan Terbaik Lomba Fashion Show “ Heni Pertiwi Edison Thropy” Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

13. KECAMATAN LEMBAK

Alokasi anggaran belanja Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim sebesar **Rp. 4.950.723.944,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 4.210.200.092** atau **85,04** persen dan kinerja keluaran (output) sebesar **99,03** persen dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Operasional

Belanja Operasi dialokasikan sebesar **Rp. 4.188.387.038,00** terealisasi sebesar **Rp. 3.459.467.592** atau **82,60 persen** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp. 762.336.906** terealisasi sebesar **Rp. 750.732.500** atau **98,48 persen** yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

13.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2025 Kecamatan Lembak Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 30 subkegiatan, antara lain yaitu :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program **Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** sebesar **Rp. 4.169.182.544** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.641.395.092** atau **87,34 persen** dengan capaian kinerja *output* sebesar **100 persen**. Program ini terdiri dari **8 (delapan)** kegiatan dan 21 (dua puluh lima) subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD** dengan anggaran sebesar **Rp. 3.750.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 3.720.000,00** atau sebesar **99,20 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100 % dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
- b. Subkegiatan **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD** dengan anggaran sebesar **Rp. 3.451.864,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 3.390.000,00** atau sebesar **98,21 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100 % dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.



- c. Subkegiatan **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan anggaran **Rp. 1.753.400** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.735.000,00** atau sebesar **98,95 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100 %** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Subkegiatan **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN** dengan anggaran sebesar **Rp. 3.068.340.116** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 2.584.870.071** atau sebesar **84,24 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
 - b. Subkegiatan **Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran SKPD** dengan anggaran sebesar **Rp.3.547.300,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.860.000,00** atau sebesar **52,43 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
3. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - a. Subkegiatan **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD** dengan anggaran sebesar **Rp. 37.600,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 30.000,00** atau sebesar **79,79 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
4. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a. Subkegiatan **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi** dengan anggaran sebesar **Rp. 19.800.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.00** atau sebesar **0 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **0** dengan capaian output/keluaran sebesar **0 persen**.
5. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Subkegiatan **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor** dengan anggaran sebesar **Rp. 4.642.500** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 4.640.000,00** atau sebesar **99,95 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
 - b. Subkegiatan **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor** dengan anggaran sebesar **Rp.150.115.167,00** dan realisasi keuangan



sebesar **Rp. 149.951.500,00** atau sebesar **99,89 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

- c. Subkegiatan **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan** dengan anggaran sebesar **Rp. 7.003.400,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 6.966.000,00** atau sebesar **99,47 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
- d. Subkegiatan **Fasilitasi Kunjungan Tamu** dengan anggaran sebesar **Rp. 11.294.500,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.11.258.000,00** atau sebesar **99,68 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
- e. Subkegiatan **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD** dengan anggaran sebesar **Rp. 75.012.200,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 74,964,914,00** atau sebesar **99,94 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Subkegiatan **Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya** dengan anggaran sebesar **Rp. 240.365.200,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.239.500.000,00** atau sebesar **99,64 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
- b. Subkegiatan **Pengadaan Mebel** dengan anggaran sebesar **Rp.88.886.703,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 78.810.000,00** atau sebesar **98 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Subkegiatan **Penyediaan Jasa Surat Menyurat** dengan anggaran sebesar **Rp. 6.147.900,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 6.140.000,00** atau sebesar **99,87 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
- b. Subkegiatan **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik** dengan anggaran sebesar **Rp. 30.600.000,00** dan realisasi



keuangan sebesar **Rp. 27.470.607,00** atau sebesar **89,77 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

- c. Subkegiatan **Peralatan dan Perlengkapan Kantor** dengan anggaran sebesar **Rp. 11.680.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 11.680.000,00** atau sebesar **100 Persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
- d. Subkegiatan **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor** dengan anggaran sebesar **Rp. 17.120.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 17.120.000,00** atau sebesar **100 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Subkegiatan **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas** dengan anggaran sebesar **Rp. 8.300.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 8.275.000,00** atau sebesar **99,70 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
- b. Subkegiatan **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan** dengan anggaran sebesar **Rp. 17.334.694,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 9.814.000** atau sebesar **56,61 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
- c. Subkegiatan **Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya** dengan anggaran sebesar **Rp.400.000.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 399.200.000,00** atau sebesar **99,80 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Alokasi anggaran untuk Program **Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** sebesar **Rp.400.152.700,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 373.533.000,00** atau **93,35 persen** dengan capaian kinerja *output* sebesar **100 persen**. Program ini terdiri dari 3 (**tiga**) kegiatan dan 4 (empat) subkegiatan sebagai berikut.



1. **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**
 - a. **Subkegiatan Peningkatan di Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan** anggaran sebesar **Rp. 198.730.700** Dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 180.671.000** atau sebesar **90,91 Persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100%** dengan capaian output/Keluaran sebesar **100 Persen**.
2. **Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**
 - a. **Subkegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta** anggaran sebesar **Rp. 150.062..000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 150.062.000,00** atau sebesar **100 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100 %** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
3. **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat**
 - a. **SubKegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha** anggaran sebesar **Rp. 17.120.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 12.840.000,00** atau sebesar **75 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100 %** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
 - b. **SubKegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan** anggaran sebesar **Rp. 17.120.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 12.840.000,00** atau sebesar **75 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100 %** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.
 - c. **SubKegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan** anggaran sebesar **Rp. 17.120.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 17.120.000,00** atau sebesar **100 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100 %** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Alokasi anggaran untuk Program **Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan** sebesar **Rp. 30.568.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp.**



30.172.000,00 atau 98,70 persen dengan capaian kinerja *output* sebesar **100 persen**. Program ini terdiri dari 1 (**satu**) kegiatan dan 1 (**satu**) subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Subkegiatan **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa** anggaran sebesar **Rp.30.568.800,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 30.172.000,00** atau sebesar **98,70 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **100 %** dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen**.

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk Program **Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum** sebesar **Rp. 141.240.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.200.000,00** atau **2,99 persen** dengan capaian kinerja *output* sebesar **100 persen**. Program ini terdiri dari 1 (**satu**) kegiatan dan 1 (**satu**) subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Subkegiatan **Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan** anggaran sebesar **Rp.140.365.200,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp.4.200.000,00** atau sebesar **2,99 persen**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah **30 %** dengan capaian output/keluaran sebesar **30 persen**.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran untuk Program **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** sebesar **Rp.193.954.900,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 160.900.000,00** atau **82,96 persen** dengan capaian kinerja *output* sebesar **100 persen**. Program ini terdiri dari 1 (**satu**) kegiatan dan 1 (**satu**) subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Subkegiatan **Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia** anggaran sebesar **Rp.193.954.900,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 160.900.000,00** atau sebesar **82,96**



persen. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 100 % dengan capaian output/keluaran sebesar **100 persen.**

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Alokasi anggaran untuk Program **Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** sebesar **Rp. 16.500.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp.0** atau **0 persen** dengan capaian kinerja *output* sebesar **0 persen.** Program ini terdiri dari 1 (**satu**) kegiatan dan 1 (**satu**) subkegiatan sebagai berikut.

1. Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Subkegiatan **Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa** anggaran sebesar **Rp.16.500.000,00** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 00** atau sebesar **0 persen.** Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 0 % dengan capaian output/keluaran sebesar **0 persen.**

13.2CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4		5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik
			2	Presentase Urusan Pemerintah yang difasilitasi	90%	90%	100%
			3	Persentase PKK Aktif	90%	90%	100%
			4	Persentase Sarana dan Prasarana asilitas Pelayanan Umum dalam Kondisi	80%	80%	100%
			5	Persentase penyelenggara an K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang	80%	80%	100%
			6	Persentase	90%	90%	100%



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Pemerintahan Desa			
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	1 Nilai SAKIP Kecamatan	BB	BB	BB

13.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 2,55% dikarenakan turunnya harga komoditas terbesar yang menyumbang pertumbuhan ekonomi yaitu sektor perkebunan.	Kedepan harus lebih meningkatkan sektor lainnya seperti industri dan jasa guna meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, tidak hanya mengandalkan sektor perkebunan dan sektor migas saja.

13.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

1. Juara I Karya Tulis Ilmiah Putra MTQ Tingkat Kabupaten Tahun 2025
2. Juara III Tafsir Bahasa Inggris MTQ Tingkat Kabupaten Tahun 2025
3. Juara IV Karya Tulis Ilmiah Putri MTQ Tingkat Kabupaten Tahun 2025
4. Juara IV Khalil Qur'an Kontemporer MTQ Tingkat Kabupaten Tahun 2025
5. Top 3 Inovasi Kategori Kecamatan Tingkat Kabupaten Tahun 2025

14. KECAMATAN KELAKAR

Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim sebesar **Rp. 3.909.672.334,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 3.403.436.227,-** atau **87,05 %**, dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Operasional

Belanja Operasi dialokasikan sebesar **Rp. 3.599.578.845,40-** terealisasi sebesar **Rp. 3.094.436,227,-** atau **85,97 %** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp. 310.093.499,-** terealisasi sebesar **Rp. 309.000.000,-** atau **99,65 %** yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.



14.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Pada tahun 2025 Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 Program dan 14 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan, antara lain :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- a. Sub kegiatan **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD**. Dengan anggaran sebesar Rp. 1.833.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 625.000,- atau sebesar 34,09 %.
- b. Sub kegiatan **Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD**.
Dengan anggaran sebesar Rp. 1.833.500,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- atau sebesar 0 %.
- c. Sub kegiatan **Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD**.
Dengan anggaran sebesar Rp. 1.833.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.417.00 atau sebesar 77,28 %.
- d. Sub kegiatan **Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD**.
Dengan anggaran sebesar Rp. 1.833.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0 %.
- e. Sub kegiatan **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**.
Dengan anggaran sebesar Rp. 389.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0 %.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- a. Sub kegiatan **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**.
Dengan anggaran sebesar Rp. 2.506.236.757,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.306.236.392,- atau sebesar 92,02 %.
- b. Sub kegiatan **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**.
Dengan anggaran sebesar Rp. 1.098.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 678.000,- atau sebesar 61,70 %.
- c. Sub kegiatan **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD**.
Dengan anggaran sebesar Rp. 1.099.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

- a. Sub kegiatan **Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**.
Dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.437.940,- atau sebesar 90,63 %.



4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

- a. Sub kegiatan **Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.**

Dengan anggaran sebesar Rp. 47.208.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 33.644.657,- atau sebesar 71,27 %.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Sub kegiatan **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.**

Dengan anggaran sebesar Rp. 3.985.080,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.842.000,- atau sebesar 46,22 %.

- b. Sub kegiatan **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.**

Dengan anggaran sebesar Rp. 61.558.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 57.234.400,- atau sebesar 92,98 %.

- c. Sub kegiatan **Penyediaan Bahan Logistik Kantor.**

Dengan anggaran sebesar Rp 20.987.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 18.889.400,- atau sebesar 90,00 %.

- d. Sub kegiatan **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.**

Dengan anggaran sebesar Rp. 20.987.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.947.500,- atau sebesar 42,64 %.

- e. Sub kegiatan **Fasilitasi Kunjungan Tamu.**

Dengan anggaran sebesar Rp. 12.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.000.000,- atau sebesar 55,56 %.

- f. Sub kegiatan **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.**

Dengan anggaran sebesar Rp. 184.810.900- dengan realisasi sebesar Rp. 179.358.956,- atau sebesar 97,05 %.

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- a. Sub kegiatan **Pengadaan Mebel.**

Dengan anggaran sebesar Rp 51.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 50.780.000,- atau sebesar 99,18 %

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- a. Sub kegiatan **Penyediaan Jasa Surat Menyurat.**

Dengan anggaran sebesar Rp 4.200.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.200.000,- atau sebesar 100,00 %.

- b. Sub kegiatan **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.**

Dengan anggaran sebesar Rp. 33.995.840,- dengan realisasi sebesar



Rp. 22.319.382,- atau sebesar 65,65 %.

- c. Sub kegiatan **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**. Dengan anggaran sebesar Rp 7.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.900.000,- atau sebesar 65,77 %.
- d. Sub kegiatan **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**. Dengan anggaran sebesar Rp 33.310.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.560.000,- atau sebesar 24,24 %.

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

- a. Sub kegiatan **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**. Dengan anggaran sebesar Rp. 24.679.388,- dengan realisasi sebesar Rp. 17.000.000,- atau sebesar 68,88 %.
- b. Sub kegiatan **Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**. Dengan anggaran sebesar Rp. 266.042.199,- dengan realisasi sebesar Rp. 259.280.000,- atau sebesar 97,46 %.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum.

- a. Sub kegiatan **Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum Yang Melibatkan Pihak Swasta**. Dengan anggaran sebesar Rp. 54.450.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 54.450.000,- atau sebesar 100 %.

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat.

- a. Sub kegiatan **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha**. Dengan anggaran sebesar Rp. 23.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 15.797.500,- atau sebesar 66,66 %.
- b. Sub kegiatan **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Perizinan**. Dengan anggaran sebesar Rp. 22.860.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 19.920.000,- atau sebesar 87,14 %
- c. Sub kegiatan **Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan**. Dengan anggaran sebesar Rp. 37.719.500,- dengan realisasi sebesar



Rp. 20.025.000,- atau sebesar 53,09 %

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan sarana Pelayanan Umum.

- a. Sub kegiatan **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.**
- b. Dengan anggaran sebesar Rp. 39.999.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 39.094.100,- atau sebesar 97,74 %.
- c. Sub kegiatan **Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.**
- d. Dengan anggaran sebesar Rp. 210.067.580,- dengan realisasi sebesar Rp. 144.449.000,- atau sebesar 68,76 %.

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban.

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

- a. Sub kegiatan **Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.**
- b. Dengan anggaran sebesar Rp. 68.912.000,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- atau sebesar 0 %

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

- a. Sub kegiatan **Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.** Dengan anggaran sebesar Rp. 153.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 121.500.000,- atau sebesar 79,41 %.

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

- a. Sub kegiatan **Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.**
Dengan anggaran sebesar Rp. 6.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0 %.



- b. Sub kegiatan **Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**.

Dengan anggaran sebesar Rp. 4.850.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.850.000,- atau sebesar 100 %.

- c. Sub kegiatan **Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan**. Dengan anggaran sebesar Rp. 1.470.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0 %.

14.2CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	Baik	Baik	Baik
	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga dan Kemasyarakatan Desa	Persentase lembaga tingkat desa yang berdaya	90%	90%	100%
		Persentase urusan pemerintah yang difasilitasi	85%	87%	100%
		PKK aktif	100%	100%	100 %
		Persentase sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum dalam kondisi baik	85%	85%	100%
		Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	90%	90%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	CC	B	B



14.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	Sering terjadi pemadaman listrik sehingga mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari.	Pihak terkait agar lebih meningkatkan pelayanan dan kinerja untuk meminimalisir pemadaman listrik.
2	Masih ada beberapa kegiatan yang belum optimal dilaksanakan	Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang belum optimal dilaksanakan

14.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Prestasi yang diterima oleh Kecamatan Kelekar tahun 2025.

1. Juara I Lomba Pembukaan UUD Tahun 1945 dalam rangka HUT Korpri ke-54 Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
2. Juara Harapan I Lomba Pengucapan Panca Prasetya Korpri dalam rangka HUT Korpri ke-54 Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
3. Juara II Qira'at Mujawwad Dewasa Putri Lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an ke 41 Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
4. Juara III Qira'at Mujawwad Dewasa Putra Lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an ke 41 Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
5. Juara III Tilawah Dewasa Putra Lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an ke 41 Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
6. Juara III Murottal Putra Lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an ke 41 Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
7. Juara I Hifzil 10 Juz Putri Lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an ke 41 Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
8. Juara III Hapalan 500 Hadits Bersanad Putra Lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an ke 41 Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
9. Juara Harapan I Hapalan 100 Hadits Bersanad Putra Lomba Musabaqah Tilawatil Qur'an ke 41 Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
10. Juara I Lomba Bintang Vokalis Putra Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
11. Juara Harapan I Lomba Qasidah Rebana Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
12. Juara I Lomba Posyantek Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
13. Juara II Lomba Audit Kearsipan Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025



15. KECAMATAN GELUMBANG

Alokasi belanja Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sebesar **Rp. 6.997.022.677,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 6.295.991.754,00** atau **89,98%** dan kinerja keluaran (*output*) sebesar **100%** dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Operasional

Belanja Operasional dialokasikan sebesar **Rp. 5.773.986.459,00** terealisasi sebesar **Rp. 5.078.361.242,00** atau **87,95%** yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasional.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar **Rp. 1.223.036.218,00** terealisasi sebesar **Rp. 1.217.630.512,00** atau **99,57%** yang diarahkan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

15.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2025 Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 37 subkegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran sebesar **Rp. 4.783.389.342,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.236.973.022,00** atau **88,58%**.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar **Rp. 6.932.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 4.729.900,00** atau **68,23%**.

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.186.200,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 909.400,00** atau **41,60%**.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, alokasi anggaran sebesar **Rp. 2.745.500,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.240.000,00** atau **81,59%**.
- c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, alokasi sebesar **Rp. 2.000.300,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 1.580.500,00** atau **79,01%**.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar **Rp. 3.241.661.259,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.778.108.217,00** atau **85,70%**.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, alokasi anggaran sebesar **Rp. 3.238.486.159,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 2.775.850.217,00** atau **85,71%**.



- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 3.175.100,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.258.000,00 atau 71,12%.
- 3. **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 5.775.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.927.000,00 atau 85,23%.**
 - a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 5.775.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.927.000,00 atau 85,23%.
- 4. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 29.980.700,00 Dengan Realisasi sebesar Rp. 23.760.000,00 atau 79,25%.**
 - a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, alokasi anggaran sebesar Rp. 18.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 16.500.000,00 atau 91,67%.
 - b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, alokasi anggaran sebesar Rp. 11.980.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.260.000,00 atau 60,60%.
- 5. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 374.242.149,00 dengan realisasi sebesar Rp. 342.126.434,00 atau 91,42%.**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, alokasi anggaran sebesar Rp. 8.068.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.045.000,00 atau 99,71%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi anggaran sebesar Rp. 82.666.549,00 dengan realisasi sebesar Rp 78.085.400,00 atau 94,46%.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, alokasi anggaran sebesar Rp. 61.659.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 36.106.098,00 atau 58,56%.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, alokasi anggaran sebesar Rp. 9.845.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.046.800,00 atau 81,73%.
 - e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.529.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.512.500,00 atau 98,92%.



- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, alokasi anggaran sebesar Rp. 210.473.400,00 dengan realisasi sebesar Rp 210.330.636,00 atau 99,93%.
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 599.196.418,00 dengan realisasi sebesar Rp. 595.957.512,00 atau 99,46%.**
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, alokasi anggaran sebesar Rp. 78.186.418,00 dengan realisasi sebesar Rp. 77.857.512,00 atau 99,58%.
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, alokasi anggaran sebesar Rp. 521.010.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 518.100.000,00 atau 99,44%.
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 65.391.116,00 dengan realisasi sebesar Rp. 40.674.050,00 atau 62,20%**
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, alokasi anggaran sebesar Rp. 6.160.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.400.000,00 atau 55,19%.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, alokasi anggaran sebesar Rp. 55.141.116,00 dengan realisasi sebesar Rp. 33.224.050,00 atau 60,25%.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, alokasi anggaran sebesar Rp. 4.090.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.050.000,00 atau 99,02%.
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 460.210.700,00 dengan realisasi sebesar Rp. 446.653.900,00 atau 97,05%.**
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, alokasi anggaran sebesar Rp. 11.518.7000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 10.677.799,00 atau 92,70%.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, alokasi anggaran sebesar Rp. 12.520.600,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.420.000,00 atau 27,31%.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, alokasi anggaran sebesar Rp. 429.791.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 426.576.110,00 atau 99,25%.



- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, alokasi anggaran sebesar Rp. 6.380.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 5.980.000,00 atau 93,73%.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Alokasi anggaran sebesar Rp. 465.135.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 460.144.240,00 atau 98,93%.

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, alokasi anggaran sebesar Rp. 373.068.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 372.179.740,00 atau 99,76%.

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta, alokasi anggaran sebesar Rp. 373.068.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 372.179.740,00 atau 99,76%.

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, alokasi anggaran sebesar Rp. 92.067.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 87.964.500,00 atau 95,54%

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, alokasi anggaran sebesar Rp. 33.915.800,00 dengan realisasi sebesar Rp. 33.791.000,00 atau 99,63%.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, alokasi anggaran sebesar Rp. 32.951.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 32.443.500,00 atau 98,46%.
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, alokasi anggaran sebesar Rp. 25.201.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 21.730.000,00 atau 86,23%.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.398.518.335,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.281.957.092,00 atau 91,67%.

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, alokasi anggaran sebesar Rp. 383.619.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 311.795.835,00 atau 81,28%.

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, alokasi anggaran sebesar Rp. 36.492.500,00 dengan realisasi sebesar Rp. 36.466.000,00 atau 99,93%.



- b. Sub Kegiatan Peningkatan efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, alokasi anggaran sebesar Rp. 347.126.900,00 dengan realisasi sebesar Rp. 275.329.835,00 atau 79,32%.
2. **Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan alokasi, anggaran sebesar Rp. 1.014.898.935,00 dengan realisasi sebesar Rp. 970.161.257,00 atau 95,59%.**
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, alokasi anggaran sebesar Rp. 4.332.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.005.500,00 atau 92,46%.
 - b. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan, alokasi anggaran sebesar Rp. 442.040.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 439.540.000,00 atau 99,43%.
 - c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, alokasi anggaran sebesar Rp. 568.526.835,00 dengan realisasi sebesar Rp. 526.615.757,00 atau 92,63%

D. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran sebesar Rp. 157.423.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 130.648.400,00 atau 82,99%.

1. **Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, alokasi anggaran sebesar Rp. 157.423.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 130.648.400,00 atau 82,99%.**
 - a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, alokasi anggaran sebesar Rp. 157.423.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 130.648.400,00 atau 82,99%.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran sebesar Rp. 149.174.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 143.240.000,00 atau 96,02%.

1. **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah, alokasi anggaran sebesar Rp. 149.174.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 143.240.000,00 atau 96,02%.**
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia



Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, alokasi anggaran sebesar Rp. 136.844.100,00 dengan realisasi sebesar Rp. 133.965.000,00 atau 97,90%.

- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, alokasi anggaran sebesar Rp. 12.30.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.275.000,00 atau 75,22%.

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Alokasi anggaran sebesar Rp. 43.382.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 43.065.000,00 atau 99,27%.

1. **Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, alokasi anggaran sebesar Rp. 43.382.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 43.065.000,00 atau 99,27%.**
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa, alokasi anggaran sebesar Rp. 35.602.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 35.525.000,00 atau 99,78%.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan, alokasi anggaran sebesar Rp. 7.780.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.540.000,00 atau 96,92%



15.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks kepuasan masyarakat	80	90,74	113 %
		Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase urusan Pemerintah yang difasilitasi	90%	100%	111%
			PKK aktif	100 %	100%	100 %
			Persentase sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum dalam kondisi baik	85%	90%	106%
			Persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	90%	100%	111%
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Pemerintahan Desa	95%	100%	105%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	59,95	62,95	105%



15.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Adanya sekolah SD/SMP yang kekurangan ruang kelas akibat banyaknya warga usia sekolah dalam wilayah Kecamatan Gelumbang yang tidak seimbang dengan penambahan ruang kelas SD/SMP	Telah diusulkan dalam Musrenbang Desa-Desa dalam wilayah Kecamatan Gelumbang untuk dijadikan usulan prioritas pada forum OPD
2.	Masih tingginya tingkat pengangguran di Wilayah Kecamatan Gelumbang	Telah diusulkan melalui Musrenbang kegiatan Pelatihan-pelatihan teknis guna membuka Lapangan Pekerjaan baru di Masyarakat
3.	Masih banyaknya Usaha UMKM yang kekurangan Modal usaha sehingga tingkat Kesejahteraan Masyarakat Masih Rendah	Telah diusulkan ke Dinas Koperasi Data Calon Penerima bantuan UEF dan Bantuan barang untuk menunjang usaha telah disalurkan ke Masyarakat yang membutuhkan
4.	Masih kurangnya sarana prasarana ibadah	Telah diusulkan dalam Musrenbang Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Gelumbang dan sebagian ada yang sudah terealisasi
5.	Sering terjadinya perkelahian/tawuran antar remaja	Pengajuan usulan sosialisasi di sekolah-sekolah dan desa dalam Kecamatan Gelumbang
6.	Maraknya pengamen, anak punk dan peminta-minta di wilayah Kecamatan Gelumbang	Peningkatan patroli trantibum
7.	Sering terjadinya Karhutla dalam wilayah Kecamatan Gelumbang	Diadakannya sosialisai dan koordinasi dengan Perusahaan di wilayah Kecamatan Gelumbang
8.	Tingginya jumlah pemohon layanan tidak sebanding dengan ketersediaan SDM pelayanan	Pengaturan pola pelayanan dan pembagian tugas petugas secara efektif untuk mempercepat proses pelayanan
9.	Masih terdapat masyarakat yang belum memahami persyaratan administrasi pelayanan PATEN	Peningkatan sosialisasi persyaratan pelayanan melalui papan informasi bahan cetakan Kantor
10.	Desa sering terlambat melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES)	Membuat jadwal pelaksanaan Musrenbang Desa dengan pendampingan dibagi 2 tim dari Kecamatan Gelumbang
11.	Terlambatnya penyelesaian/ realisasi pembangunan fisik Dana Desa dikarenakan keterlambatan dalam pembuatan RAB karena terbatasnya tenaga yang berkompeten di bidang tersebut	Permohonan Penambahan Pendamping Desa Teknik (PDTI)
12.	Kurangnya SDM dan keterbatasan tenaga terampil terkait pelaporan	Permohonan penambahan tenaga ahli akuntansi



No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
	pertanggungjawaban keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)	

15.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Pada Tahun 2025 Kecamatan Gelumbang memperoleh penghargaan dan prestasi sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Terbaik ke-1 Kategori Kecamatan dalam Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025;
2. Pelaksanaan Pengisian e-Kontrak Teraktif Tahun 2024 Kategori Kecamatan;
3. Juara I Lomba KP-SPAM Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2025 (Desa Segayam);
4. Juara III Lomba Posyantek Desa Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 (Desa Putak);
5. Juara II Kategori Umum pada Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 (Posyantek Kecamatan Gelumbang);
6. Juara II Kategori Sekolah pada Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 (SMK Negeri I Gelumbang);
7. Juara Harapan II Lomba Jingle Gelari Pelangi Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 (TP PKK Kecamatan Gelumbang).

16. KECAMATAN MUARA BELIDA

Secara garis besar pelaksanaan Program kegiatan di Kecamatan Muara Belida Tahun 2025 dengan alokasi belanja sebesar Rp 4.076.370.568 dan terealisasi sebesar Rp 3.754.696.627 atau 92,11% dengan kinerja keluaran (output) sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Operasional

Pada tahun 2025 alokasi belanja operasional Kecamatan Muara Belida sebesar Rp 3.274.370.568, dengan realisasi sebesar Rp 2.956.696.627 atau sebesar 90,29%

B. Belanja Modal

Pada tahun 2025, alokasi belanja modal Kecamatan Muara Belida adalah sebesar Rp 802.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 798.000.000 atau sebesar 99,50%.



16.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Program kegiatan Kecamatan Muara Belida Tahun 2025 terdiri dari 6 Program dan 15 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pagu Anggaran sebesar Rp 3.440.486.189 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 3.166.163.127 atau sebesar 92,03%.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp 15.448.300 dengan Realisasi sebesar Rp 14.899.600 atau sebesar 96,45%

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, alokasi sebesar Rp 5.250.000 dengan realisasi sebesar Rp 4.915.000 atau 93,62%
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD alokasi sebesar Rp 6.748.600 dengan realisasi sebesar Rp 6.637.100 atau sebesar 98,35%
- c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi sebesar Rp 3.449.700 dengan realisasi sebesar Rp 3.347.500 atau sebesar 97,04%

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp 2.186.185.349 Realisasi sebesar Rp 1.970.387.314 atau sebesar 90,13%

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN alokasi sebesar Rp 2.177.010.349 dengan realisasi sebesar Rp 1.961.497.314 atau sebesar 90,10%
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD alokasi sebesar Rp 6.100.000 dengan realisasi sebesar Rp 5.900.000 atau sebesar 96,72%
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD alokasi sebesar Rp 3.075.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.990.000 atau 97,24%

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp 10.000.000 Dengan Realisasi sebesar Rp 0,00 atau 0%

- a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD alokasi sebesar Rp 10.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 0,00 atau 0%

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp 16.900.000 Dengan Realisasi sebesar Rp 4.900.000 atau 28,89%



- a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi alokasi sebesar Rp 12.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 0,- atau 0%
 - b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan sebesar Rp 4.900.000 dengan realisasi sebesar Rp 4.900.000,- atau 100%
5. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp 399.812.540 Dengan Realisasi sebesar Rp 387.850.095 atau sebesar 97,01%**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor alokasi sebesar Rp 4.026.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.975.000 atau sebesar 98,75%
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi sebesar Rp 199.998.090 dengan realisasi sebesar Rp 196.589.994 atau sebesar 98,30%
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor alokasi sebesar Rp 33.462.200 dengan realisasi sebesar Rp 25.415.000 atau sebesar 75,95%
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan alokasi sebesar Rp 2.700.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.511.000 atau sebesar 93,00%
 - e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu alokasi sebesar Rp 10.025.000 dengan realisasi sebesar Rp 9.800.000 atau sebesar 97,76%
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD alokasi sebesar Rp 149.601.250 dengan realisasi sebesar Rp 149.559.101 atau sebesar 99,97%
6. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp 56.000.000 Dengan Realisasi sebesar Rp 55.000.001 atau sebesar 98,21%**
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel alokasi anggaran sebesar Rp 56.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 55.000.001 atau sebesar 98,21%
7. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp 92.260.000 Dengan Realisasi sebesar Rp 75.647.218 atau 81,99%**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat alokasi sebesar Rp 2.600.000 dengan realisasi sebesar Rp 2.600.000 atau 100%
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan



Listrik alokasi sebesar Rp 43.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 38.167.218 atau sebesar 88,76%

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi sebesar Rp 3.860.000 dengan realisasi sebesar Rp 3.850.000 atau 99,74%
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi sebesar Rp 42.800.000 dengan realisasi sebesar Rp 31.030.000 atau 72,50%

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp 663.880.000 Dengan Realisasi sebesar Rp 657.478.899 atau 99,04%

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan alokasi sebesar Rp. 31.380.000 dengan realisasi sebesar Rp 29.139.950 atau 92,86%
- b. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya alokasi sebesar Rp 632.500.000 dengan realisasi sebesar Rp 628.338.949 atau 99,34%

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pagu Anggaran sebesar Rp 109.029.393 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 93.022.000 atau sebesar 85,32%

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Alokasi Anggaran sebesar Rp 38.250.000 Dengan Realisasi sebesar Rp 38.250.000 atau sebesar 100%

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta alokasi sebesar Rp 38.250.000 dengan realisasi sebesar Rp 38.250.000 atau sebesar 100%
- b.

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Alokasi Anggaran sebesar Rp 70.779.393 dengan Realisasi sebesar Rp 54.772.000 atau sebesar 77,38%

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha alokasi sebesar Rp 2.575.500 dengan realisasi sebesar Rp 2.402.000 atau sebesar 93,26%
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan alokasi sebesar Rp 19.888.893 dengan realisasi sebesar Rp 19.600.000 atau sebesar 98,55%



- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan alokasi sebesar Rp 48.315.000 dengan realisasi sebesar Rp 32.770.000 atau 67,83%

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pagu Anggaran sebesar Rp 295.762.636 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 291.869.000 atau 98,68%

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Alokasi Anggaran sebesar Rp 295.762.636 Dengan Realisasi sebesar Rp 291.869.000 atau 98,68%

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa alokasi sebesar Rp 41.310.000 dengan realisasi sebesar Rp 38.585.000 atau 93,40%
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan alokasi sebesar Rp 254.452.636 dengan realisasi sebesar Rp 253.284.000 atau sebesar 99,40%

D. Program Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum

Pagu Anggaran sebesar Rp 5.250.000 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 5.250.000 atau sebesar 100%

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Alokasi Anggaran sebesar Rp 5.250.000 Dengan Realisasi sebesar Rp 5.250.000 atau sebesar 100%

- a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan alokasi sebesar Rp 5.250.000 dengan realisasi sebesar Rp 5.250.000 atau sebesar 100%

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pagu Anggaran sebesar Rp 124.992.250 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 124.747.500 atau sebesar 99,80%

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Alokasi Anggaran sebesar Rp 124.992.250 Dengan Realisasi sebesar Rp 124.747.500 atau sebesar 99,80%

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia alokasi sebesar Rp 124.992.250 dengan realisasi sebesar Rp 124.747.500 atau sebesar 99,80%



F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pagu Anggaran sebesar Rp 100.850.100 dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 73.645.000 atau sebesar 73,02%

1. **Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Alokasi Anggaran sebesar Rp 100.850.100 Dengan Realisasi sebesar Rp 73.645.000 atau sebesar 73,02%**
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum alokasi sebesar Rp 88.250.100 dengan realisasi sebesar Rp 61.165.000 atau sebesar 69,31%
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan alokasi sebesar Rp 12.600.000 dengan realisasi sebesar Rp 12.480.000 atau sebesar 99,05%

16.2CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meingkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	80	80	100
		Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Muara Belida	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80	100
		Meningkatkan Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	80	100
		Meningkatkan kualitas laporan keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	60.50	60.50	100

16.3PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Sulitnya ketersediaan air bersih di kantor Camat Muara Belida	Solusi sementara menggunakan penjernih air



16.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Pada tahun 2025, Kecamatan Muara Belida memperoleh Harapan 3 dalam kegiatan Audit Kearsipan Internal Tingkat Kecamatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Muara Enim

17. KECAMATAN BELIMBING

Pelaksanaan program dan kegiatan di Pemerintah Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim pada tahun anggaran 2025, didasarkan pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi. Anggaran yang dialokasikan dalam APBD merupakan instrumen fiskal utama untuk menggerakkan roda birokrasi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Kecamatan Belimbing.

Anggaran belanja secara keseluruhan diarahkan untuk mendukung visi dan misi daerah melalui pembiayaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Secara garis besar, komposisi anggaran belanja Kecamatan Belimbing dipetakan ke dalam dua kategori utama, yaitu (1) Belanja Operasional yang menjamin keberlangsungan pelayanan administrasi harian, serta (2) Belanja Modal yang difokuskan pada penguatan aset dan sarana prasarana kewilayahan.

A. Belanja Operasional

Realisasi pada sektor Belanja Operasional merupakan representasi dari komitmen untuk menjaga stabilitas pelayanan publik dan keberlangsungan birokrasi di tingkat kecamatan. Selama tahun 2025, Kecamatan Belimbing mengelola pagu operasional sebesar **Rp 4.128.314.657**. Dari jumlah tersebut, realisasi keuangan yang berhasil dicapai adalah sebesar **Rp 3.581.293.651** atau setara dengan **86,75%**.

Anggaran belanja operasional ini telah terserap untuk membiayai kebutuhan esensial yang meliputi:

- 1) Belanja Pegawai: Guna menjamin pemenuhan hak-hak Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan Belimbing agar tetap berdedikasi dalam pelayanan. Terealisasi sebesar **Rp 2.232.164.233** dari pagu **Rp 2.702.219.898**, dengan persentase serapan sebesar **82,60%**.
- 2) Belanja Barang dan Jasa: Mencakup operasional perkantoran seperti konsumsi listrik, penyediaan air, akses internet, alat tulis kantor, serta biaya koordinasi guna memastikan seluruh aduan dan kebutuhan masyarakat dapat terlayani secara cepat. Mencatatkan tingkat efektivitas sebesar **94,60%**, dengan realisasi senilai **Rp 1.349.129.418** dari pagu **Rp 1.426.094.759**.



Secara keseluruhan, kinerja keuangan Kecamatan Belimbing Tahun 2025 dalam melakukan belanja operasional dikategorikan Efisien dan Efektif. Meskipun terdapat sisa anggaran sebesar 13,25%, hal ini lebih merepresentasikan penghematan pada belanja barang dan jasa dibandingkan kegagalan dalam pelaksanaan program. Total realisasi sebesar Rp3.581.293.651 tetap menunjukkan komitmen Kecamatan Belimbing dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara.

B. Belanja Modal

Sementara itu, Belanja Modal dialokasikan sebagai bentuk investasi fisik yang memiliki masa manfaat jangka panjang bagi operasional pemerintahan dan kenyamanan masyarakat. Selama tahun 2025, penyerapan anggaran pada sektor Belanja Modal di Kecamatan Belimbing menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat baik, yaitu mencapai 99,85% dengan total realisasi Rp 572.946.559 dengan anggaran sebesar Rp 573.802.974. Fokus realisasi belanja modal Kecamatan Belimbing tahun 2025 diarahkan pada:

- Penguatan Infrastruktur Pelayanan: Berupa lanjutan paving blok lingkungan gedung kantor, serta sumur galih guna menciptakan standar pelayanan yang lebih humanis dan representatif.
- Pengadaan Sarana Pendukung: Meliputi pengadaan perangkat digital (komputer/printer) untuk mempercepat proses administrasi berbasis IT, serta pengadaan mebel sebagai prasarana pendukung pelayanan.

Adapun rincian komponen alokasi anggaran dan realisasi anggaran belanja modal Kecamatan Belimbing tahun 2025 meliputi:

- 1) **Peralatan dan Mesin**, mencapai efektivitas hampir sempurna sebesar **99,98%**, dengan realisasi **Rp 331.727.993**.
- 2) **Gedung dan Bangunan**, terealisasi sebesar **Rp 199.385.275** atau **99,69%** dari anggaran.
- 3) **Jalan, Jaringan, dan Irigasi**, terserap sebesar **99,60%** dengan realisasi **Rp 41.833.291**, di mana pada tahun sebelumnya (2024) belum terdapat alokasi untuk sektor ini.

Secara kolektif, kinerja keuangan Kecamatan Belimbing Tahun 2025 dalam melakukan belanja modal dikategorikan Sangat Efektif. Tingginya serapan belanja modal (**99,85%**) membuktikan komitmen Kecamatan Belimbing dalam percepatan pembangunan fisik dan pengadaan sarana kerja yang memadai.



17.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Sebagai upaya untuk mengimplementasikan rencana strategis daerah pada tingkat kewilayahan, Pemerintah Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim telah menetapkan serangkaian target kinerja yang bersifat aplikatif dan terukur. Pelaksanaan anggaran yang telah dipaparkan sebelumnya secara teknis dijabarkan ke dalam nomenklatur yang terdiri dari Program, Kegiatan, hingga Sub-Kegiatan yang saling berkesinambungan.

Struktur pelaksanaan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap unit kerja memiliki tanggung jawab yang spesifik dalam mencapai tujuan organisasi.

Program-program tersebut merupakan payung besar yang menaungi berbagai aktivitas pelayanan publik, yang kemudian dirinci menjadi kegiatan-kegiatan operasional dan didukung oleh sub-kegiatan sebagai unit terkecil pelaksanaan di lapangan. Penyusunan rincian ini bertujuan agar seluruh sumber daya, baik personel maupun anggaran, dapat teralokasi secara presisi guna menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.

Pada tahun 2025, Kecamatan Belimbing telah melaksanakan 6 Program, 15 Kegiatan dan 38 Sub-kegiatan yang menjadi urusan kewilayahan wajib. Adapun rincian mengenai pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan di Kecamatan Belimbing pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.937.476.331,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.420.408.739,- atau 86,87%. Program ini terdiri dari 8 (delapan) kegiatan yaitu (1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. (3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. (4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. (5) Administrasi Umum Perangkat Daerah. (6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. (7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. (8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Adapun rincian per subkegiatan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 9.824.900,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.399.900,- atau sebesar 95,67%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 (dua) laporan dengan capaian



output/keluaran sebesar 100%.

- b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 17.241.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.561.500,- atau sebesar 96,06%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD sebanyak 2 (dua) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran sebesar Rp. 3.525.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.301.500,- atau sebesar 93,64%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah dokumen AKIP sebanyak 2 (dua) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran sebesar Rp. 2.702.219.898,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.232.164.233,- atau sebesar 82,60%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah terlaksananya Pembayaran Gaji kepada ASN sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang per bulan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 4.048.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.937.000,- atau sebesar 97,26%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun sebanyak 2 (dua) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 38.139.300,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.835.500,- atau sebesar 96,58%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah laporan keuangan dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran sebanyak 15 (lima belas) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 199.078.500,- atau sebesar 99,54%.



Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah laporan rencana kebutuhan barang milik daerah sebanyak 1 (satu) dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- b. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 15.015.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.696.500,- atau sebesar 97,88%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD sebanyak 2 (dua) dokumen dengan capaian output/ keluaran sebesar 100%.

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan anggaran sebesar Rp. 7.500.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.500.000,- atau sebesar 100%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 1 (satu) orang dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 33.032.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 32.940.000,- atau sebesar 99,72%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan sebanyak 1 (satu) paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 15.499.519,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.457.000,- atau sebesar 73,92%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Yang Dibutuhkan sebanyak 1 (satu) paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 40.389.041,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.189.300,- atau sebesar 57,41%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan sebanyak 2 (dua) Paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 5.539.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.067.000,- atau sebesar 73,42%. Adapun



output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang Yang Disediakan sebanyak 2 (dua) paket dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

- e. Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan anggaran sebesar Rp. 18.865.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.725.000,- atau sebesar 88,66%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Kunjungan Tamu sebanyak 15 (lima belas) notulen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- f. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran sebesar Rp. 104.913.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 104.828.798,- atau sebesar 99,92%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Subkegiatan Pengadaan Mebel, dengan anggaran sebesar Rp 134.080.654,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 134.068.000,- atau sebesar 99,99%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Paket Pengadaan Mebel sebanyak 3 (tiga) unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 197.722.320,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 197.659.993,- atau sebesar 99,97%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin sebanyak 5 (lima) unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 199.385.275,- atau sebesar 99,69%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebanyak 1 (satu) unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan anggaran Rp. 42.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 41.833.291,- atau sebesar 99,60%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung



Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebanyak 1 (satu) unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan anggaran sebesar Rp 3.360.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp 3.300.000,- atau sebesar 98,21%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 12 (dua belas) laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar Rp. 66.901.884,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 53.614.949,- atau sebesar 80,14%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 24 Laporan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 25.680.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.680.000,- atau sebesar 100%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 16 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar **Rp. 27.569.915** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 23.795.500** atau sebesar **86,31%**. Adapun output/ keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan sebanyak 17 Unit dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- b. Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran sebesar **Rp. 10.230.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 10.230.000** atau sebesar **100%**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Terpelihara sebanyak 15 Unit dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan anggaran sebesar **Rp. 14.179.400** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 14.160.000** atau sebesar **99,86%**.



Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah perlengkapan gedung yang terpelihara sebanyak 1 Unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 153.280.200,- dengan realisasi sebesar Rp 151.479.471,- atau 98,83 %. Program tersebut terdiri dari 2 kegiatan yaitu: (1) Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, (2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat. Adapun rincian per subkegiatan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

- a. Subkegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta, dengan anggaran sebesar Rp. 84.500.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 84.174.971 atau sebesar 99,62%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang dipelihara sebanyak 65 unit dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- a. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran sebesar Rp. 16.621.200 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.235.500 atau sebesar 97,68%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Pelayanan Administrasi sebanyak 2 dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%
- b. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan, dengan Pelayanan Non Perizinan dengan anggaran sebesar Rp. 15.592.400 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.965.000 atau sebesar 95,98%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 12 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, dengan anggaran sebesar Rp. 36.566.600 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.104.000 atau sebesar 98,73%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 12 Laporan dengan capaian



output/keluaran sebesar 100%.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 324.444.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 298.495.000,- atau 92,00 %. Program tersebut terdiri dari 1 kegiatan yaitu (1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa. Adapun rincian per subkegiatan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 28.123.200 dan realisasi keuangan sebesar Rp 27.582.600 atau sebesar 98,08%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah jumlah Lembaga Masyarakat yangmberpartisipasi selama Musrenbang sebanyak 6 Lembaga Kemasyarakatan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran sebesar Rp. 296.321.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 296.321.000 atau sebesar 91,43%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 5 Laporan Peningkatan Efektivitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dengan capaian output/keluaran sebesar 100% .

D. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar **Rp 183.117.500,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 183.070.000,-** atau **99,97%**. Program tersebut terdiri dari 1 kegiatan yaitu (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Adapun rincian per subkegiatan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Subkegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran sebesar **Rp. 68.416.200** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 65.700.000,-** atau **96,03%**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 12 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- a. Subkegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah



yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan anggaran sebesar **Rp. 16.436.200** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 16.397.000** atau **99,76%**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 1 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp 183.117.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 183.070.000,- atau 99,97%. Program tersebut terdiri dari 1 kegiatan yaitu (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Adapun rincian per subkegiatan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

- a. Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan anggaran sebesar **Rp. 168.417.500** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 168.370.000** atau sebesar **99,97%**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Peserta pelaksanaan kegiatan Paskibra HUT RI sebanyak 40 orang dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- b. Subkegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dengan anggaran sebesar **Rp. 14.700.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 14.700.000** atau sebesar **100%**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah 2 dokumen Rakor dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.

F. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar **Rp. 18.947.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 18.690.000,-** atau **98,64%**. Program tersebut terdiri dari 1 kegiatan yaitu (1) Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa. Adapun rincian per subkegiatan adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



- a. Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, dengan anggaran sebesar **Rp. 1.945.000** dan realisasi keuangan sebesar **Rp. 1.850.000** atau sebesar **95,12%**. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kades sebanyak 10 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar **100%**.
- b. Subkegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan anggaran sebesar Rp. 8.002.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.840.000 atau sebesar 97,98%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 11 Dokumen dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan, dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp 9.000.000 atau sebesar 100%. Adapun output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan sebanyak 10 Laporan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

17.2CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		5	6	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan	1. Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	1.1	Indeks Kepuasan masyarakat	85	92,53	109 %
			1.2	Persentase urusan pemerintah yang di fasilitasi	100%	100%	100 %
			1.3	Persentase PKK aktif	100%	100%	100 %
			1.4	Persentase sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum dalam kondisi baik	85 %	76 %	90 %
			1.5	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan	100%	100%	100 %



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		5	6	7
				keindahan) yang ditindak lanjuti			
			1.6	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan desa	100%	100%	100 %
		2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	2.1	Nilai SAKIP	59,25	55,30	93%

17.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1	Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM, yang sesuai dengan standar kebutuhan suatu unit kerja	Peningkatan kapasitas SDM aparatur sesuai peran dan fungsinya, melalui pendidikan dan pelatihan teknis
2	Toleransi terhadap resiko pekerjaan masih rendah, sehingga kondisi ini menghambat sifat inovasi dan kreativitas para pegawai yang ada	Memberikan keleluasaan kepada staf untuk berinovasi dan berkreasi dalam rangka meningkatkan kinerjanya sesuai kapasitas
3	Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, baik dari segi kuantitas dan kualitasnya	Peningkatan pemanfaatan teknologi data dan informasi untuk mendukung kegiatan statistik. Serta melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai standar dan kebutuhan
4	Sistem pengendalian dan evaluasi, serta penggunaan dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan pengendalian belum sepenuhnya dijadikan sebagai input bagi kebutuhan perencanaan	Peningkatan pemahaman bersama tentang proses dan mekanisme dalam konsistensi perencanaan dan penganggaran

17.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

-

18. KECAMATAN BELIDA DARAT

Alokasi belanja Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim sebesar Rp 4.218.828.676,- dan telah terealisasi sebesar Rp 3.986.079.812,- atau 94,48% dengan rincian sebagai berikut :



A. Belanja Operasional

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 4.072.236.496,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.840.431.312,- atau 94,31% yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang termasuk komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp 146.592.180,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 145.648.500,- atau 99,36% yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

18.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025 Kecamatan Belida Darat Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 (enam) Program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan, yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 3.544.128.110,- dengan Realisasi sebesar Rp. 3.353.699.812,- atau 94,63 %. Program ini terdiri 8 (delapan) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 17.205.200,- dengan Realisasi sebesar Rp 17.200.00,- atau 99,97%. terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 17.205.200,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 17.200.00,- atau 99,97%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 2.739.488.275,- dengan Realisasi sebesar Rp 2.585.347.830,- atau 94,37 %. terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.730.526.675,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.576.412.830,- atau 94,36 %.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 8.961.600,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 8.935.000,- atau 99,70%.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 5.793.480,- dengan Realisasi sebesar Rp 5.342.500,- atau 92,22%. terdiri dari :



- a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 5.793.480,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.342.500,- atau 92,22%.
- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 14.850.000,- dan tidak terealisasi atau realisasi 0%. terdiri dari :**
 - a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 10.350.000,- dan tidak terealisasi atau realisasi 0%.
 - b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 4.500.000,- dan tidak terealisasi atau realisasi 0%.
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 230.549.682,- dengan Realisasi sebesar Rp 216.496.648,- atau 93,90%. terdiri dari :**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 11.258.907,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 11.210.000,- atau 99,57%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 11.373.612,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 11.345.000,- atau 99,75%.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 6.409.463,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.385.000,- atau 99,62%.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 5.027.400,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.023.500,- atau 99,92%.
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Baha Bacaan dan Peratran Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 11.003.350,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.944.000,- atau 99,46%.
 - f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 15.680.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 15.400.000,- atau 98,21%.
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 169.796.950,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 156.189.148,- atau 91,99%.



6. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 146.592.180,- dengan Realisasi sebesar Rp 145.648.500,- atau 99,36%. terdiri dari :**
- d. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran sebesar Rp. 127.592.180,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 127.500.000,- atau 99,93%.
 - e. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 19.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 18.148.500,- atau 95,52%.
7. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 91.142.493,- dengan Realisasi sebesar Rp 85.910.600,- atau 94,26%. terdiri dari :**
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 6.473.600,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.400.000,- atau 98,86%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 17.998.920,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 17.150.600,- atau 95,29%.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 11.029.973,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 11.000.000,- atau 99,73%.
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 55.640.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 51.360.000,- atau 92,31%.
8. **Kegiatan Pemeliharaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 298.506.800,- dengan Realisasi sebesar Rp 297.753.734,- atau 99,75%. terdiri dari:**
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 76.276.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 76.260.559,- atau 99,98%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 2.230.800,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.193.175,- atau 98,31%.
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 220.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 219.300.000,- atau 99,68%.



B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp 212.494.960,- dengan Realisasi sebesar Rp 207.821.000,- atau 97,80%. Program ini terdiri 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan Alokasi Anggaran Sebesar Rp 29.548.200,- dengan Realisasi sebesar Rp 29.495.000,- atau 99,82%. terdiri dari :**
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 29.548.200,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 29.495.000,- atau 99,82%.
- 2. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Alokasi Anggaran Sebesar Rp 106.694.900,- dengan Realisasi sebesar Rp 103.680.000,- atau 97,17%. terdiri dari :**
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta dengan anggaran sebesar Rp. 106.694.900,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 103.680.000,- atau 97,17%.
- 3. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Alokasi Anggaran Sebesar Rp 76.251.860,- dengan Realisasi sebesar Rp 74.646.000,- atau 97,89%. terdiri dari :**
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan dengan anggaran sebesar Rp. 37.726.560,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 36.125.000,- atau 95,75%.
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan anggaran sebesar Rp. 38.525.300,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 38.521.000,- atau 99,99%.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar Rp 172.197.800,- dengan Realisasi sebesar Rp 167.125.000,- atau 97,05%. Program ini terdiri 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Alokasi Anggaran Sebesar Rp 172.197.800,- dengan Realisasi sebesar Rp 167.125.000,- atau 97,05%. terdiri dari :**
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan



anggaran sebesar Rp. 28.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 23.000.000,- atau 82,14%.

- b. Sub Kegiatan Peningkatan efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 144.197.800,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 144.125.000,- atau 99,95%.

D. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebesar Rp 7.710.500,- dengan Realisasi sebesar Rp 7.705.000,- atau 99,93%. Program ini terdiri 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 7.710.500,- dengan Realisasi sebesar Rp 7.705.000,- atau 99,93%. terdiri dari :**

- a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 7.710.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 7.705.000,- atau 99,93%.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp 130.992.886,- dengan Realisasi sebesar Rp 123.655.000,- atau 94,40% Program ini terdiri 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 130.992.886,- dengan Realisasi sebesar Rp 123.655.000,- atau 94,40%. terdiri dari :**

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan anggaran sebesar Rp. 113.160.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 105.985.000,- atau 93,66%.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 17.832.886,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 17.670.000,- atau 99,09%.



F. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp 151.304.420,- dengan Realisasi sebesar Rp 126.074.000,- atau 83,32%. Program ini terdiri 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 151.304.420,- dengan Realisasi sebesar Rp. 126.074.000,- atau 83,32%. terdiri dari:**
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 127.220.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 103.660.000,- atau 81,48%.
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Masyarakat Desa dengan anggaran sebesar Rp. 8.400.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.400.000,- atau 100%.
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 15.684.420,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.014.000,- atau 89,35%.

18.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik
			Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum dalam kondisi baik	95%	100%	105%
			Persentase Urusan Pemerintah yang Difasilitasi	90%	100%	111%
		Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	100%	100%	100%
			PKK Aktif	100%	100%	100%



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	95%	95%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB	BB	100%

18.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

-

18.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Adapun Penghargaan dan Prestasi yang diraih Kecamatan Belida Darat tahun 2025 sebagai berikut :

1. Juara 1 Lomba Jingle Paaredi Tingkat Kabupaten Muara Enim
2. Juara 2 Lomba Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Berprestasi Tingkat Kabupaten Muara Enim
3. Juara Harapan 2 Lomba masak menu B2SA Tingkat Kabupaten Muara Enim

19. KECAMATAN LUBAI ULU

Alokasi anggaran belanja Kecamatan Lubai Ulu pada tahun 2025 sebesar Rp.4.297.527.716 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.577.297.519 atau 83,24% dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

Alokasi anggaran belanja operasi tahun 2025 sebesar Rp.4.082.560.395, dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.692.065.282 atau 90,44%.

1. Belanja Pegawai

Alokasi anggaran belanja pegawai tahun 2025 sebesar Rp.2.202.015.948,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.761.529.862,00 atau 80,18%.

2. Belanja Barang dan Jasa

Alokasi anggaran belanja barang dan jasa tahun 2025 sebesar Rp.1.577.200.391,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.443.289.014,00 atau 91,51%.



B. Belanja Modal

Alokasi anggaran belanja modal tahun 2025 sebesar Rp.140.00.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 140.00.000 atau 100%.

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

- i. Alokasi anggaran belanja modal peralatan dan mesin tahun 2025 sebesar Rp. Rp.140.00.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. Rp.140.00.000 atau 100%.

19.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Terdiri dari 6 program, 14 kegiatan, 27 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.119.451.916 dengan realisasi sebesar Rp.2.585.128.889 atau 82,87%.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.999.800 dengan realisasi sebesar Rp.4.983.000 atau 81,31%

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.999.800 dengan realisasi sebesar Rp. 4.999.800 atau 99,66%

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.202.015.948 dengan realisasi sebesar Rp.1.761.529.862 atau 80,18%.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.197.015.948 dengan realisasi sebesar Rp.1.756.655.862 atau 79,97%
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 4.674.000 atau 93,48%

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.925.850 dengan realisasi sebesar Rp. 5.766.500 atau 58.1%

- a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.925.850 dengan realisasi sebesar Rp. 5.766.500 atau 58.1%



4. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.234.000 dengan realisasi sebesar Rp. 21.420.00 atau realisasi sebesar 68 %**
 - a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.234.000 dengan realisasi sebesar Rp. 21.420.00 atau realisasi sebesar 68 %
5. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.210.209.808 dengan realisasi sebesar Rp.175.279.866 atau 81,85%**
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.900.000 dengan realisasi sebesar Rp. 11.616.000 atau 96,81 %
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.530.350 dengan realisasi sebesar Rp. 2.479.000 atau 26 %.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 47.635.258 dengan realisasi sebesar Rp. 21.875.320 atau 45,92 %
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.462.000 dengan realisasi sebesar Rp. 6.798.500 atau 91,11 %.
 - e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.173.200 dengan realisasi sebesar Rp. 10.144.000 atau 90,79 %.
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 122.410.000 dengan realisasi sebesar Rp. 122.367.046 atau 99,96 %.
6. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel alokasi anggaran sebesar Rp.80.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 76.500.000 atau 95,63 %
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya alokasi anggaran sebesar Rp.60.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 57.000.000 atau 97 %
7. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.985.808 dengan realisasi sebesar Rp.38.522.036 atau 92,88%**



- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.6.000.000 dengan realisasi sebesar Rp.6.000.000 atau 100%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.985.808 dengan realisasi sebesar Rp. 32.522.036 atau 92,96 %.
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 128.366.700 dengan realisasi sebesar R.104.122.225 atau 80,88%.**
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 45.371.400 dengan alokasi anggaran sebesar dengan realisasi sebesar Rp. 36.020.725 atau 79,39%.
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 64.995.300 dengan realisasi sebesar Rp. 50.791.500 atau 78,15%.
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp.18.00.000 dengan realisasi sebesar Rp. 17.300.000 atau 96,11%.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan alokasi anggaran sebesar Rp.198.382.300 dengan realisasi sebesar Rp.Rp183.486.000 atau 92,49%

- 1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.996.000 dengan realisasi sebesar Rp. 79.750.000 atau 99 %.**
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.996.000 dengan realisasi sebesar Rp. 79.750.000 atau 99, %.
- 2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 73.246.900 dengan realisasi sebesar Rp 68.789.000 atau 91,82 %.**
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.490.000 dengan realisasi sebesar Rp. 30.393.000 atau 99,68%.



- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Non Perizinan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.835.200 dengan realisasi sebesar Rp. 12.350.000 atau 96,22 %.
- c. Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.921.700 dengan realisasi sebesar Rp. 26.046.000 atau 87,05 %.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.837.778.700 dengan realisasi sebesar Rp 693.390.026 atau 82,77%.

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 489.921.800 dengan realisasi sebesar Rp.321.974.630 atau 68,52%.

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.814.600 realisasi sebesar Rp. 39.059.500 atau 98,10 %.
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 797.964.100 dengan realisasi sebesar Rp. 656.033.500 atau 82,21 %.

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 133.827.775 dengan realisasi sebesar Rp. 88.574.000 atau 66,19 %.

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 133.827.775 dengan realisasi sebesar Rp. 88.574.000 atau 66,19 %.

- a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 133.827.775 dengan realisasi sebesar Rp. 88.574.000 atau 66,19 %.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 136.680.400 dengan realisasi sebesar Rp. 135.510.000 atau 99,14 %.



1. **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 136.680.400 dengan realisasi sebesar Rp. 135.510.000 atau 99,14 %.**
 - a. Sub Kegiatan "Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia" dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 136.680.400 dengan realisasi sebesar Rp. 135.510.000 atau 99,14 %.

F. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.200.000 dengan realisasi sebesar Rp. 18.158.000 atau 85,65 %.

1. **Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.21.200.000 dengan realisasi sebesar Rp. 18.158.000 atau 85,65 %.**
 - a. Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa alokasi anggaran sebesar Rp. .21.200.000 dengan realisasi sebesar Rp. 18.158.000 atau 85,65 %.

19.2 INDIKATOR CAPAIAN KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Peran Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Urusan Pemerintah yang difasilitasi	85	90	100
			Persentase Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum dalam Kondisi Baik	85	95	100
			Persentase Pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan, Keindahan)	85	92	100



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
			yang ditindak lanjuti			
			PKK Aktif	100	100	100
			Posyandu Aktif	100	100	100

19.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1	Masih ada beberapa kegiatan yang belum optimal dilaksanakan sehingga belum dapat menyerap dana secara maksimal (anggaran masih ada yang tersisa)	Mengevaluasi terhadap kegiatan yang belum optimal dilaksanakan
2	Kekurangan SDM	Mengajukan usulan penambahan pegawai kecamatan ke BKPSDM

19.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Penghargaan dan prestasi yang diterima Kecamatan Lubai Ulu pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Penghargaan Sebagai Juara 1 Karang Taruna Berprestasi Tingkat Kabupaten Muara Enim tahun 2025.
2. Penghargaan Sebagai Juara 3 MTQ Tingkat Kabupaten Muara Enim tahun 2025.
3. Penghargaan Sebagai Juara 3 TSK Berprestasi Tingkat Kabupaten Muara Enim tahun 2025.
4. Penghargaan Sebagai Juara 3 Jingle Galeri Pelangi Tingkat Kabupaten Muara Enim tahun 2025.
5. Penghargaan Sebagai Juara Harapan 2 Arsip Audit Kearsipan Internal Kabupaten Muara Enim tahun 2025.
6. Penghargaan Sebagai Juara Harapan 2 Lomba B2SA Kabupaten Muara Enim tahun 2025.

20. KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU

Alokasi belanja Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim sebesar Rp. 3.907.728.607,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.668.439.600,- atau 83,92 % dan kinerja keluaran (output) sebesar 100 % dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 3.518.035.774,- terealisasi sebesar Rp. 2.936.103.167,- atau 83,46 % yang diarahkan untuk membiayai belanja



pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang masuk dalam komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp. 255.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 229.319.000,- atau 89,61 % yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi asset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

20.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Pada Tahun 2025 Kecamatan Empat Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim melaksanakan 5 program dan 7 kegiatan, dan 22 sub kegiatan yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Alokasi anggaran untuk program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.3.057.818.958,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.922.921.000,- atau 95,03 % program ini terdiri dari 8 kegiatan, dan 20 subkegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 3.072.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.2.772.800,- atau sebesar 90,24 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.768.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.468.700,- atau sebesar 86,16 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perubahan RKA dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- c. Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.392.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.987.800,- atau sebesar 88,06 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen AKIP dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.384.502.256,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.997.128.436,- atau sebesar 83,75 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.



- b. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.309.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.904.000,- atau sebesar 82,46 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- c. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.132.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.727.500,- atau sebesar 81,01 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 11.769.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas Operasional yang disediakan Jasa Jaminan Milik Daerah dengan capaian output/keluaran sebesar 0 %.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 9.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.200.000,- sebesar 91,11 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- b. Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundangan - undangan dengan anggaran sebesar Rp. 9.464.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 9.464.800,- sebesar 100 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 3.867.900,- dan



- realisasi keuangan sebesar Rp. 3.867.900,- atau sebesar 100 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- b. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 260.865.278,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 233.918.000,- atau sebesar 89,67 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
 - c. Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 15.107.145,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.107.145,- atau 82,13 %. Adapun Output/keluaran dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
 - d. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 1.664.100,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.664.100,- atau sebesar 100 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Paket Barang cetak dan Penggandaan yang disediakan, dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
 - e. Subkegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 16.800.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.800.000 atau sebesar 100 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
 - f. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 189.458.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 189.115.541,- atau sebesar 99,82 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 1.892.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.892.800,- atau sebesar 100 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.



- b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 49.991.376,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.312.275,- atau sebesar 78,64 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah laporan penyediaan jenis komunikasi, sumber Daya Air dan listrik yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- c. Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 13.810.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.810.000,- atau sebesar 100 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- d. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 83.460.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 81.320.000,- atau sebesar 97,44 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Jasa Umum Pelayanan Kantor yang disediakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 18.130.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.532.950,- atau sebesar 85,68 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- b. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 25.666.800,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.279.125,- atau sebesar 67,32 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- c. Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 16.665.200,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.689.000,- atau sebesar 28,14 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah



Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dengan capaian output/keluaran sebesar 28,14 %.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Alokasi anggaran untuk program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp. 104.440.974,- dengan realisasi sebesar Rp. 67.769.350,- atau 64,89 % Program ini terdiri dari 2 Kegiatan, dan 3 Subkegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

- a. Subkegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta dengan anggaran sebesar Rp. 36.066.624,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Prasarana dan fasilitas Pelayanan umum yang dipelihara dengan melibatkan pihak swasta dengan capaian output/keluaran sebesar 0%.

2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- a. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran sebesar Rp. 37.861.350,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 37.256.350,- atau sebesar 98,40 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan anggaran sebesar Rp. 30.513.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.513.000,- atau sebesar 100 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Alokasi anggaran untuk program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar Rp. 269.859.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 243.462.500,- atau 90,22 % Program ini terdiri dari 1 Kegiatan, dan 2 Subkegiatan sebagai berikut :



1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Subkegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan anggaran sebesar Rp. 27.092.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.945.000,- atau sebesar 99,46 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.
- b. Subkegiatan Peningkatan Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 242.767.500,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 216.517.500,- atau sebesar 89,19 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan capaian output/keluaran sebesar 100%.

D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp. 246.435.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 168.519.000,- atau 68,38 % program ini terdiri dari 1 kegiatan, dan 1 subkegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Urusan Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan anggaran sebesar Rp. 246.435.600,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 168.519.000,- atau sebesar 68,38 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

E. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 27.408.445,- dengan realisasi sebesar Rp.



27.408.445,- atau 100 % Program ini terdiri dari 1 kegiatan, dan 2 subkegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a. Subkegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 20.131.700,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.131.700,- atau sebesar 100 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.
- b. Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp.7.276.745,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.7.276.745,- atau sebesar 100 %. Adapun Output/keluaran dari subkegiatan ini adalah Jumlah Desa yang di Fasilitas dengan capaian output/keluaran sebesar 100 %.

20.2CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kerukunan antar Umat Beragama	1. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 2. Meningkatkan Kenyamanan bagi Umat beragama dalam menjalankan ibadah	a. Persentase Penurunan Angka Kriminalitas b. Persentase Konflik bernuasa SARA	95 % 0 %	95 % 0 %	100 % 100 %
2	Meningkatnya Daya Saing Daerah	1. Meningkatkan Inovasi Daerah	a. Indeks Inovasi Daerah	BAIK	BAIK	100 %
3	Meningkatkan Kualitas Layanan kepada masyarakat	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	a. Nilai Kualitas Pelayanan Publik	B	B	100 %
4	Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata	1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur	a. Indeks Profesional Aparatur	BAIK	BAIK	100 %



	Kelola Pemerintah	2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	b. Predikat SAKIP	CC	CC	100 %
		3. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah	c. Indeks Maturitas SPIP	BAIK	BAIK	100 %

20.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Pada Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Empat Petulai Dangku secara keseluruhan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan target renstra yang sudah ditetapkan dan capaian realisasi keuangan 83,92 %. Adapun masalah yang dihadapi untuk mencapai target out put IKU dapat dilihat pada table dibawah ini :

No	Permasalahan	Solusi
1.	Kurang nya Personil di bagian IT	Mengusulkan ke BKPSDM
2.	Kurangnya SDM ASN yg berkompeten	Diklat/Bimtek
3.	Sering terjadi pemadaman listrik sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari	Pihak terkait agar lebih meningkatkan pelayanan dan kinerja sehingga tidak terjadi pemadaman yg terus menerus

20.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Selama Tahun 2025 Kecamatan Empat Petulai Dangku menerima beberapa penghargaan antara lain :

1. TOP 10 Inovasi Daerah Tingkat Kecamatan Lingkup Kabupaten Muara Enim

21. KECAMATAN PANANG ENIM

Perangkat Daerah Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 dengan alokasi belanja sebesar Rp 4.027.304.654,- dan telah terealisasi sebesar Rp 2.953.424.522,- atau 73,34% dan kinerja keluaran sebesar 98% dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Operasional

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp. 3.975.401.554,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.908.734.523,- atau 73,17% yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang termasuk komponen belanja operasi.



B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp 51.903.100,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 44.689.999,- atau 86,10% yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

21.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025 Kecamatan Panang Enim Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 (enam) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 32 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan, yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 3.371.564.354,- dengan Realisasi sebesar Rp. 2.456.777.172,- atau 72,87%. Program ini terdiri 8 (delapan) kegiatan dan 20 (dua puluh limat) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 21.273.900,- dengan Realisasi sebesar Rp 13.348.000,- atau 83,30%. terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 9.255.400,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.568.000,- atau 49,35%. Output/keluaran dari Subkegiatan ini adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD sebesar 90%.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 6.861.700,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.780.000,- atau 98,81%.
- c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 5.156.800,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.000.000,- atau 38,78%.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 2.809.563.266,- dengan Realisasi sebesar Rp 2.058.980.681,- atau 73,28 %. terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.796.783.566,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.050.627.681,- atau 73,32 %.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 8.143.300,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.718.000,- atau 45,66%.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran-SKPD dengan sebesar Rp.



4.636.400,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.635.000,- atau 99,97%.

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 10.969.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 10.685.100,- atau 97,41%. terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 10.969.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.685.100,- atau 97,41%.

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 12.000.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 7.500.000,- atau 62,50%. terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya dengan anggaran sebesar Rp. 9.265.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 8.500.000,- atau 91,70%.
- b. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 56.390.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 24.000.000,- atau 42,60%.
- c. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan anggaran sebesar Rp. 0,- dan tidak terealisasi atau realisasi 0%.

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 400.166.200,- dengan Realisasi sebesar Rp 279.967.466,- atau 69,96%. terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 730.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 730.000,- atau 100%.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 51.903.100,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 44.689.999,- atau 98,46%.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 83.011.600,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 50.576.002,- atau 60,93%.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 4.923.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.105.000,- atau 63,06%.
- e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 5.831.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.700.000,- atau 63,45%.



- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 253.767.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 177.166.465,- atau 69,81%.

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 104.209.800,- dengan Realisasi sebesar Rp 73.640.000,- atau 70,67%. terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 2.760.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.760.000,- atau 100%.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 17.329.800,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 84.120.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 70.880.000,- atau 84,26%.

7. Kegiatan Pemeliharaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 13.382.188,- dengan Realisasi sebesar Rp 12.655.925,- atau 94,57%. terdiri dari:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 13.382.188,- dan telah terealisasi sebesar Rp.12.655.925,- 94,57%.
- b. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 0,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp 70.333.500,- dengan Realisasi sebesar Rp 43.994.900,- atau 62,55%. Program ini terdiri 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Alokasi Anggaran Sebesar Rp 15.366.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 0,- atau 0%. terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta dengan anggaran sebesar Rp. 15.366.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.



2. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Alokasi Anggaran Sebesar Rp 54.967.500,- dengan Realisasi sebesar Rp 43.994.900,- atau 80,04%. terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran sebesar Rp. 17.120.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 14.980.000,- atau 87,50%.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Perizinan dengan anggaran sebesar Rp. 4.275.900,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.906.000,- atau 67,96%.
- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan anggaran sebesar Rp. 33.571.600,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 26.108.900,- atau 77,77%.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar Rp 371.231.800,- dengan Realisasi sebesar Rp 325.404.450,- atau 87,66%. Program ini terdiri 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Alokasi Anggaran Sebesar Rp 371.231.800,- dengan Realisasi sebesar Rp 325.404.450,- atau 87,66%. terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan anggaran sebesar Rp. 17.298.700,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 16.885.000,- atau 97,61%.
- b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 353.933.100,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 308.519.450,- atau 87,17%.

D. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebesar Rp 0,- dengan Realisasi sebesar Rp 0,- atau 0%. Program ini terdiri 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 202.400.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 0,- atau 0%. terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik



Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 0,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp 120.460.700,- dengan Realisasi sebesar Rp 119.893.000,- atau 99,53% Program ini terdiri 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 120.460.700,- dengan Realisasi sebesar Rp 119.893.000,- atau 99,53%. terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan anggaran sebesar Rp. 120.460.700,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 119.893.000,- atau 99,53%.
- b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 0,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.

F. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp 93.714.300,- dengan Realisasi sebesar Rp 7.355.000,- atau 7,85%. Program ini terdiri 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 93.714.300,- dengan Realisasi sebesar Rp. 7.355.000,- atau 7,85%. terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa dengan anggaran sebesar Rp. 12.600.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.
- b. Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp. 0,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,-
- c. Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Femanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan



Batas Desa dengan anggaran sebesar Rp. 71.395.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 0,- atau 0%.

- d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp 9.719.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.355.000,- atau 75,67%.

21.2CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Panang Enim	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	82		
2.		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	70	59,8	90,5

21.3PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Kurangnya Sarana dan Prasarana di Kantor camat Panang Enim seperti Laptop, Printer, dll.	Penambahan 2 printer dan 2 laptop pada akhir tahun 2025.
2.	Tidak ada akses listrik, jaringan internet, dan PDAM di Kantor Camat Panang Enim.	-
3.	Lokasi Kantor Camat Yang Jauh dari Desa.	-

21.4PENGHARGAAN DAN PRESTASI

Adapun Penghargaan dan Prestasi yang diraih Kecamatan Panang Enim tahun 2025 sebagai berikut :

1. Juara 1 Lomba TTG (Teknologi Tepat Guna) Tingkat Kabupaten Muara Enim
2. Juara Harapan 1 Inovasi Tingkat Kabupaten Muara Enim
3. Juara 2 Lomba E-Reporting Tingkat Kabupaten Muara Enim



4. Juara 1 Lomba Masak Menu Ikan Tingkat Kabupaten Muara Enim
5. Juara 2 Lomba masak menu B2SA Tingkat Kabupaten Muara Enim
6. Juara harapan 1 Aku Hartinya PKK Tingkat Kabupaten Muara Enim

22. KECAMATAN SUNGAI ROTAN

Alokasi belanja Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim sebesar Rp 5.301.771.907- dan telah terealisasi sebesar Rp 4.395.247.359,- atau 82,90% dan kinerja keluaran sebesar 99,14% dengan rincian sebagai berikut:

A. Belanja Operasional

Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp 4.551.753.347,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.512.686.141,- atau 99,14% yang diarahkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan lainnya yang termasuk komponen belanja operasi.

B. Belanja Modal

Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp 750.018.560,- dan telah terealisasi sebesar Rp 750.018.560,- atau 100% yang dialokasikan untuk membiayai belanja modal yang menjadi aset Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

22.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025 Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim melaksanakan 6 (enam) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 29 (dua puluh sembilan) Sub Kegiatan, yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 4.510.901.807,- dengan Realisasi sebesar Rp. 3.697.485.970,- atau 90,60%. Program ini terdiri 8 (delapan) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 7.108.900,- dengan Realisasi sebesar Rp 2.604.000,- atau 36,63%. terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 1.883.100,- tidak terealisasi atau realisasi 0%.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 1.135.200,- dan telah terealisasi sebesar Rp 965.000,- atau 85%.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 1.065.000,- tidak terealisasi atau realisasi 0%.



- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 3.025.600,- dan telah terealisasi sebesar Rp 1.640.000,- atau 54,20%.
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 2.889.292.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 2.261.475.916,- atau 78,27%. terdiri dari :**
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.885.137.840,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.261.475.916,- atau 78,38%.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 4.155.000,- tidak terealisasi atau realisasi 0%.
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 5.484.500,- dengan Realisasi sebesar Rp 5.175.500,- atau 94,37%. terdiri dari :**
- a. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 5.484.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.175.500,- atau 94,37%.
- 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 77.065.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 24.110.500,- atau 31,29%. terdiri dari :**
- a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp. 77.065.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 24.110.500,- atau 31,29%.
- 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 669.442.380,- dengan Realisasi sebesar Rp 627.987.238,- atau 93,80%. terdiri dari :**
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 22.067.200,- dan telah terealisasi sebesar Rp 15.845.000,- atau 71,74%.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 348.086.380,- dan telah terealisasi sebesar Rp 344.023.049,- atau 98,83%.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp 42.914.800,- dan telah terealisasi sebesar Rp 34.035.000,- atau 77,50%.



- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran sebesar Rp 9.548.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 5.106.800,- atau 53,49%.
 - e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 16.800.000,- tidak terealisasi atau realisasi 0%.
 - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 229.006.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 228.977.389,- atau 99,99%.
- 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 332.418.500,- dengan Realisasi sebesar Rp 323.072.500,- atau 97,19%. terdiri dari:**
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 332.418.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp 323.072.500,- atau 97,19%.
- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 67.475.652,- dengan Realisasi sebesar Rp 41.537.796,- atau 61,56%. terdiri dari:**
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp 5.692.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp 5.500.000,- atau 96,62%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 49.280.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 34.052.296,- atau 69,10%.
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 12.503.152,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.985.500,- atau 15,88%.
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp 462.614.035,- dengan Realisasi sebesar Rp 431.872.675,- atau 93,35%. terdiri dari:**
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 9.360.000,- dan tidak terealisasi atau realisasi 0%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran sebesar Rp 35.653.975,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 28.005.175,- atau 78,55%.



- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp 417.800.060,- dan telah terealisasi sebesar Rp 403.867.500,- atau 96,71%.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik sebesar Rp 223.895.500,- dengan Realisasi sebesar Rp 208.123.234,- atau 92,96%. Program ini terdiri 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Alokasi Anggaran Sebesar Rp 133.530.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 133.443.934,- atau 99,94%. terdiri dari :**
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta dengan anggaran sebesar Rp 133.530.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 133.443.934,- atau 99,94%.
2. **Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Alokasi Anggaran Sebesar Rp 90.365.500,- dengan Realisasi sebesar Rp 74.679.300,- atau 82,64%. terdiri dari :**
 - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan anggaran sebesar Rp 78.316.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 68.729.300,- atau 87,76%.
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan anggaran sebesar Rp 12.049.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.950.000,- atau 49,38%.

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan sebesar Rp 358.728.900,- dengan Realisasi sebesar Rp 295.172.000,- atau 82,28%. Program ini terdiri 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Alokasi Anggaran Sebesar Rp 358.728.900,- dengan Realisasi sebesar Rp 295.172.000,- atau 82,28%. terdiri dari :**
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan anggaran sebesar Rp. 31. 585.900,- dan telah terealisasi sebesar Rp 30.000.000,- atau 94,98%.



- b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp 327.143.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 285.172.000,- atau 81.06%.

D. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum sebesar Rp 49.400.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 3.000.000,- atau 60,73%. Program ini terdiri 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. **Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Alokasi Anggaran Sebesar Rp 49.400.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 3.000.000,- atau 60,73%. terdiri dari :**
 - b. Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dengan anggaran sebesar Rp. 49.400.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 3.000.000,- atau 60,73%.

E. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp 146.221.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 134.115.000,- atau 91,72%. Program ini terdiri 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:

- 1. **Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 146.221.000,- dengan Realisasi sebesar Rp 134.115.000,- atau 91,72%. terdiri dari :**
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan anggaran sebesar Rp. 146.221.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 134.115.000,- atau 91,72%.

F. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp 12.624.700,- dengan Realisasi sebesar Rp 10.000.000,- atau 79,21%. Program ini terdiri 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:



1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Alokasi Anggaran sebesar Rp. 12.624.700,- dengan Realisasi sebesar Rp 10.000.000,- atau 79,21% terdiri dari:

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar Rp 12.624.700,- dan telah terealisasi sebesar Rp 10.000.000,- atau 79,21%.

22.2CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Sungai Rotan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	Baik	Baik
			Persentase Urusan Pemerintah yang difasilitasi	100%	100%	100%
			PKK Aktif	100%	100%	100%
			Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dalam Kondisi Baik	85%	85%	85%
			Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%
			Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembinaan Pemerintahan Desa	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB	B (69,10)	B (69,10)



22.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

No	Permasalahan	Solusi
1	2	3
1.	Masih rendahnya kualitas SDM yang tersedia dibidangnya yang mampu menyesuaikan dengan dunia kerja yang serba digital.	Ikut pelatihan dan sebagainya untuk meningkatkan kualitas SDM, sehingga mampu beradaptasi dengan dunia kerja yang serba digital.
2.	Kendaraan Dinas Jabatan Sekretaris Camat sudah tidak layak pakai, kendaraan yang sering dipakai untuk menunjang kegiatan operasional kantor, sudah tua sering mogok dan rusak walaupun sudah dilakukan perawatan dan pemeliharaan.	Penghapusan untuk kendaraan dinas lama dan akan dianggarkan pada tahun 2027 untuk kendaraan dinas yang baru.
3.	Penyampaian Pelaporan dan Pertanggungjawaban Desa tidak tepat waktu	Pendampingan dan pembinaan terhadap pemerintah desa lebih intensif
4.	Masih ada Kepala Desa yang ingin mengganti perangkat desa secara sepihak.	Pembinaan bahwa pergantian perangkat desa harus mempedomani Permendagri No.83 Tahun 2015 dan Permendagri no. 67 Tahun 2017, serta Perda Muara Enim No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa.
5.	Masih banyak binatang kaki empat yang berkeliaran di jalan umum desa	Digalakkan himbauan bahwa binatang kaki empat harus dikandangkan sesuai dengan Surat Edaran Bupati Muara Enim No.300/89/Satpol PP-IV/2024 Tgl. 1 Maret 2024 Tentang Penertibah Hewan Ternak Berkaki Empat

22.4 PENGHARGAAN DAN PRESTASI

1. Juara Umum Kedua Lomba MTQ Tingkat Kabupaten di Kecamatan Lubai Ulu.
2. Juara Terbaik Pertama Ahli Gizi Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 oleh Puskesmas Sukarami
3. Juara 3 Pemuda Berprestasi Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
4. Juara 3 Kompetisi Desa dengan Potensi Pariwisata Tahun 2025 Desa Petar Luar
5. Juara 1 Lomba Stand UP2K Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
6. Juara 3 Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
7. Juara 3 Lomba Jingle Paredi Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
8. Juara Harapan 1 Lomba Galeri Pelangi Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025



9. Juara Harapan 1 Lomba Audit Sistem Kearsipan Internal Kategori Kecamatan di Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
10. Juara 3 Lomba Inovasi Daerah Kategori Kecamatan Tingkat Kabupaten Muara Enim
11. Juara 7 Bintang Vokalis Lomba Festival Qasidah Rebana dan Bintang Vokalis Tingkat Kabupaten Muara Enim Tahun 2025



3.7 PROGRAM STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025 merupakan kebijakan prioritas daerah yang dirancang sebagai instrumen percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Muara Enim sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029.

Pelaksanaan Program Strategis Tahun 2025 diarahkan pada:

1. Penguatan perlindungan sosial masyarakat;
2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur);
3. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis desa dan UMKM;
4. Peningkatan konektivitas wilayah dan daya saing daerah; serta
5. Penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif dan partisipatif.

Implementasi program dilakukan secara terintegrasi oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dengan tetap berpedoman pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Secara normatif, pelaksanaan Program Strategis Tahun 2025 berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan daerah, serta kebijakan teknis Kepala Daerah. Berikut disajikan daftar Program Strategis Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025.

Tabel 3.7 Program Strategis yang Ditetapkan

No	Program Strategis	Permasalahan	Tujuan	Sasaran	OPD Penanggung Jawab	Dasar Hukum	Keterkaitan Misi RPJMD
1	Sembako Murah	Inflasi & daya beli rendah	Stabilitas harga	Masyarakat berpenghasilan rendah	Disperindag	UU 23/2014; RPJMD 2025–2029; Perbup APBD 2025	Ekonomi inklusif
2	Berobat & BPJS Gratis	Akses kesehatan belum merata	Jaminan kesehatan universal	Masyarakat miskin	Dinas Kesehatan	UU 40/2004; UU 24/2011; RPJMD 2025–2029	Peningkatan kualitas SDM
3	Seragam & Perlengkapan Sekolah Gratis	Beban biaya pendidikan	Pemerataan akses pendidikan	Siswa SD/SMP	Dinas Pendidikan	UU 20/2003; RPJMD 2025–2029	Peningkatan kualitas SDM
4	Bantuan Kendaraan Operasional Desa	Sarana pelayanan terbatas	Optimalisasi pelayanan desa	Pemerintah desa	DPMD	UU 6/2014; RPJMD 2025–2029	Tata kelola pemerintahan
5	Padat Karya 10.000	Pengangguran	Penciptaan lapangan kerja	Tenaga kerja lokal	Disnaker	UU 13/2003; RPJMD 2025–2029	Ekonomi & infrastruktur



No	Program Strategis	Permasalahan	Tujuan	Sasaran	OPD Penanggung Jawab	Dasar Hukum	Keterkaitan Misi RPJMD
	Lapangan Kerja						
6	Bantuan Operasional Sekolah/ Ponpes/ Ormas	Dukungan kelembagaan terbatas	Penguatan operasional	Sekolah & Ponpes	Disdik/ Bagian Kesra	UU 20/2003; RPJMD 2025–2029	SDM & tata kelola
7	Bantuan Modal Gratis UMKM	Modal usaha terbatas	Penguatan UMKM	Pelaku UMKM	Dinas Koperasi	UU 20/2008; RPJMD 2025–2029	Ekonomi inklusif
8	Pembangunan Tol Muara Enim–Indralaya–Palembang	Konektivitas terbatas	Peningkatan akses wilayah	Masyarakat & dunia usaha	PUPR	UU 38/2004; RPJMD 2025–2029	Infrastruktur unggul
9	Jalan & Jembatan Desa Mulus	Infrastruktur belum merata	Konektivitas desa	Desa	PUPR	UU 23/2014; RPJMD 2025–2029	Infrastruktur merata
10	Bedah Rumah Gratis	Rumah tidak layak huni	Hunian layak	Keluarga miskin	Perkim	UU 1/2011; RPJMD 2025–2029	Kesejahteraan sosial
11	Bebas Pemadaman Listrik & Air Bersih	Gangguan layanan dasar	Layanan utilitas stabil	Rumah tangga	PUPR	UU 30/2009; RPJMD 2025–2029	Infrastruktur & pelayanan
12	PBB Maksimum Rp100.000	Beban pajak masyarakat kecil	Keringanan pajak	Wajib pajak kecil	Bapenda	UU 1/2022; RPJMD 2025–2029	Perlindungan sosial
13	Bantuan Alat Berat/ Replanting	Produktivitas lahan rendah	Optimalisasi pertanian	Petani	Dinas Pertanian	UU 19/2013; RPJMD 2025–2029	Ketahanan pangan
14	Pembangunan Irigasi	Pengairan tidak optimal	Ketersediaan air sawah	Petani	PUPR/ Pertanian	UU 17/2019; RPJMD 2025–2029	Infrastruktur pangan
15	Pupuk Tersedia & Murah	Kelangkaan pupuk	Stabilitas produksi	Petani	Dinas Pertanian	UU 19/2013; RPJMD 2025–2029	Ketahanan pangan
16	Bibit, Benih & Alsintan	Produktivitas rendah	Peningkatan hasil pertanian	Kelompok tani	Dinas Pertanian	UU 19/2013; RPJMD 2025–2029	Ketahanan pangan
17	Mall & Kawasan Industri/Agro politan	Minim pusat ekonomi	Investasi & 10.000 kerja	Dunia usaha & tenaga kerja	DPMPTSP	UU 25/2007; RPJMD 2025–2029	Ekonomi tangguh
18	BLT Kelompok Rentan	Kerentanan sosial	Perlindungan sosial adaptif	Yatim, lansia, disabilitas	Dinas Sosial	UU 11/2009; RPJMD 2025–2029	Perlindungan sosial
19	Bupati Ngantor di Desa	Jarak pelayanan publik	Mendekatkan layanan	Masyarakat desa	Setda	UU 23/2014; RPJMD 2025–2029	Tata kelola responsif
20	Santunan Kematian Rp3.000.000	Beban biaya duka	Bantuan sosial cepat	Ahli waris	Dinas Sosial	UU 11/2009; RPJMD 2025–2029	Perlindungan sosial



3.8. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN MUARA ENIM

TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI MUARA ENIM TAHUN 2024 UNTUK DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2025

No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Komisi I	Dinas Komunikasi dan Informatika	Memberikan pelayanan akses internet di desa Pansus I mendukung Dinas Komunikasi dan Informatika melalui APBD perubahan tahun anggaran 2024 agar dapat melaksanakan pemasangan jaringan internet di seluruh desa/kelurahan dalam Kabupaten Muara Enim, sehingga memberikan manfaat bagi pemerintah desa/kelurahan dalam mengakses internet yang berkualitas. Selanjutnya di tahun 2024 Pansus I merekomendasikan program ini agar dapat diperluas, agar tidak ada lagi di wilayah Kabupaten Muara Enim daerah yang blank spot dan kiranya dinas ini dapat menjeput bola terkait program - program yang ada di pemerintah pusat untuk di terapkan di daerah, khususnya Kabupaten Muara Enim.	1. Bahwa program internet desa pada tahun 2025 telah menjangkau 256 Desa dan Kelurahan yang sudah terpasang internet sebagai solusi alternatif bagi Pemerintah Desa/ Kelurahan untuk dapat mengakses internet yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain itu juga telah dipasang wifi publik di ruang terbuka di Ibu Kota Kecamatan dan beberapa lokasi wisata antara lain : wisata Danau Kemiri Kec. Lubai Ulu, wisata air terjun bedegung Kec. Panang Enim, Kawasan sport center dan taman desa beringin Kec. Lubai, taman wisata Desa talang balai Kec. Belida Darat, Danau Pinang Panjar Kec. Gelumbang. 2. Terkait dengan program yang ada di Pemerintah Pusat, Diskominfo SP telah melaksanakan jemput bola ke Kementerian Komdigi dengan hasil telah dipasang wifi publik di beberapa wilayah di Kabupaten Muara Enim.



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Masih terdapat masyarakat yang belum memahami tentang tata cara dan persyaratan pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sehingga masih ada masyarakat yang harus bolak balik untuk melengkapi persyaratan untuk itu, serta banyaknya inovasi yang telah dilakukan oleh Dinas ini namun masih perlu diperluas dan di tingkatkan lagi agar masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan. Untuk itu Pansus I menyarankan kepada dinas ini agar lebih dapat lagi memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat di desa/Sekolah, pemberitahuan informasi melalui media elektronik dan pemasangan banner, spanduk dan media sosial yang ada di kantor – kantor desa. Agar dinas ini menciptakan inovasi – inovasi baru, serta mengembangkan dan memperluas jangkauan layanan inovasi – inovasi yang telah dilaksanakan guna memudahkan masyarakat	Pada tahun 2025 telah dilakukan sosialisasi terhadap inovasi yang dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi di Kecamatan dalam Kabupaten Enim. Selain itu juga dilaksanakan sosialisasi/publikasi inovasi melalui radio, banner dan leaflet. Telah dilakukan inventarisasi sarana/prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan di seluruh kecamatan.



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			bekerja sama dengan instansi / lembaga pelayanan publik.	
		Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Mengoptimalkan pengangkatan PPPK dan penerimaan CPNS Tahun 2025, sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku, serta dapat ditempatkan sesuai dengan bidang dan tupoksi yang sesuai. Serta mencari solusi terhadap tenaga honor yang belum dapat diangkat menjadi PPPK. selanjutnya dapat mengisi kekosongan - kekosongan di kecamatan - kecamatan seperti tenaga penanganan dan tenaga pemadam kebakaran di setiap kecamatan - kecamatan.	Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah memfasilitasi dengan pengusulan formasi seoptimal mungkin untuk mengakomodir tenaga honorer yang ada dan merekrut CPNS, untuk mengisi kekosongan di Unit Kerja diberikan beberapa opsi, pertama melalui rekrutmen BLUD, Penempatan PPPK Paruh Waktu dan Outsourcing.
		Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Terkait dengan penegak perda ketertiban umum hendaknya dinas ini dapat menjalankan sesuai prosedur dalam penertiban tempat - tempat hiburan malam yang ada di Kabupaten Muara Enim, dan juga dalam penertiban hewan berkaki empat yang masih banyak berkeliaran di dalam wilayah kota Muara Enim khususnya di daerah	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD terkait penegakan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, dinas terkait telah/akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Penegakan yustisi terhadap tempat-tempat hiburan malam. Dinas terkait telah melakukan pelaksanaan yustisi terhadap tempat-tempat hiburan malam. Namun demikian, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			Islamic Senter. kepada dinas terkait dapat mensosialisasikan kepada masyarakat dan bekerja sama dengan pihak – pihak perangkat desa, dan kelurahan.	keterbatasan anggaran serta sarana dan prasarana pendukung, seperti terbatasnya jumlah kendaraan patroli. Selain itu, minimnya jumlah personel Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) turut memengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan pengawasan dan penertiban di lapangan. 2. Penertiban hewan berkaki empat. Dinas terkait telah melakukan upaya penertiban melalui pemberian imbauan kepada masyarakat serta menjalin koordinasi dengan perangkat desa dan kelurahan. Namun dalam pelaksanaannya, imbauan tersebut belum sepenuhnya diindahkan oleh masyarakat. Di samping itu, hingga saat ini belum terdapat Peraturan Daerah khusus yang secara tegas mengatur penindakan terhadap hewan berkaki empat, sehingga upaya penertiban belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan.
		Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu	Dengan masih dibebankan target penerimaan retribusi PBG di dinas ini, sedangkan sesuai dengan ketentuan baik PP No 6 tahun 2021, Permendagri No 138 tahun 2017 maupun Perpres 97 tahun 2014 seharusnya tidak dibebankan target	Masih adanya perangkat daerah teknis yang belum optimal memberikan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Muara Enim, umumnya disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor berikut: 1. Keterbatasan SDM dimana banyak perangkat daerah belum memiliki jumlah pegawai yang



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			penerimaan retribusi untuk itu Pansus I mengusulkan kiranya anggaran target penerimaan retribusi dialihkan ke dinas teknis (Dinas PUPR).	cukup atau kompetensi yang sesuai untuk ditempatkan secara tetap di Mal Pelayanan Publik tanpa mengganggu layanan di kantor induk. 2. Belum semua layanan siap diintegrasikan. Tidak semua layanan teknis mudah dipindahkan ke Mal Pelayanan Publik dikarenakan masih bergantung pada sistem internal yang belum terintegrasi secara digital. 3. Ada organisasi Perangkat Daerah yang menilai jenis layanannya sudah cukup dilayani secara online, sehingga belum dianggap mendesak untuk membuka layanan langsung di Mal Pelayanan Publik.
			Masih adanya pelayanan perizinan dari OPD teknis yang belum bergabung di MPP Kabupaten Muara Enim Pansus I mengharapkan kepada OPD terkait dapat menempatkan petugas pelayanan perizinan OPD teknis di MPP Kabupaten Muara Enim.	Dalam rangka penguatan pelayanan publik melalui komitmen dari OPD/Instansi/BUMN/BUMD dalam melaksanakan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan tugas masing-masing secara terpadu di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Muara Enim agar dapat berjalan maksimal, DPMPTSP Kabupaten Muara Enim sudah melakukan koordinasi sebagai berikut: 1. Melakukan kunjungan langsung ke OPD/Instansi/BUMN/BUMD yang tergabung di MPP.



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
				2. Menyampaikan surat Bupati Muara Enim Nomor: 200.8/182/DPMPTSP-2/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Kegiatan Operasional pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Muara Enim. 3. Menyampaikan surat Bupati Muara Enim Nomor: 500.16.7.2/606/DPMPTSP-4/2023 tanggal 16 Mei 2023 tentang Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Muara Enim 4. Menyampaikan surat Bupati Muara Enim Nomor: 500.16.7.2/878/DPMPTSP/2023 tanggal 28 Juli 2023 tentang Operasional/Pemberian Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Muara Enim. 5. Menyampaikan surat Bupati Muara Enim Nomor: 500/16.7.5/231/DPMPTSP-2/2025 tanggal 27 Maret 2025 tentang Himbauan Pengaktifan Kembali layanan Publik di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Muara Enim. 6. Beberapa kali mengadakan rapat optimalisasi MPP/rapat evaluasi rutin.
		Bagian Hukum Kabupaten Muara Enim	Perlu untuk disesuaikan melalui perubahan maupun pencabutan karna tidak relevan dengan kondisi saat ini. untuk pansus mengharapkan kepada perangkat	Sehubungan dengan evaluasi produk hukum daerah, Bagian Hukum telah menyampaikan kepada perangkat daerah melalui surat Nomor : 180/1325/111/2024 tanggal 18 September 2024 Perihal Evaluasi Produk Hukum Daerah, terkait



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			daerah segera melakukan inventarisasi produk hukum daerah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi baik peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati yang tidak relevan dengan kondisi saat ini untuk dilakukan penyesuaian melalui pembahasan atau pencabutan, hal ini sejalan dengan surat no. 180/1325/III/2024 tanggal 18 September 2024 yang telah disampaikan bagian hukum kepada perangkat daerah penyesuaian produk hukum tersebut berpedoman pada Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah beserta perubahannya yang menyatakan bahwa penyesuaian produk hokum daerah di usulkan oleh kepala perangkat daerah sebagai pemrakarsa penyusun	surat tersebut terdapat perangkat daerah yang menyampaikan hasil tela'ah terhadap produk hukum daerah yang ada di perangkat daerah bersangkutan. Hasil tela'ah tersebut berupa usulan perubahan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, yang akan ditindaklanjuti untuk dibahas dengan perangkat daerah pemrakarsa dan perangkat daerah teknis terkait.



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			produk hukum daerah, serta di dukung dengan anggaran yang memadai pada bagian ini.	
		Organisasi & Tata Laksana Kabupaten Muara Enim	Perlu untuk menyikapi terhadap penyerapan bagian organisasi yang belum optimal sehingga masih terdapat SILPA di tahun 2024, untuk itu Pansus I memandang perlu untuk mengevaluasi kinerja secara menyeluruh dan berkelanjutan pada akhir tahun anggaran serta memetakan penyebab mengapa terjadi SILPA. perlu dilakukan evaluasi yang lebih teliti mempertimbangkan kebutuhan yang lebih akurat, dan berkoordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran. apa bila terhadap silpa yang signifikan, maka pada tahun anggaran berikutnya perlu melakukan penyusunan terutama untuk program - program yang memiliki potensi serapan yang lebih rendah.	Kami sependapat dengan PANSUS I bahwa diperlukan evaluasi pengelolaan anggaran secara menyeluruh dan berkelanjutan, khususnya untuk memetakan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya SILPA. Berikut kami sampaikan adanya SILPA di Bagian Organisasi dan Tata Laksana sebagai berikut : 1. Kegiatan sosialisasi pada kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi narasumber yang ditugaskan untuk menjadi narasumber adalah setara eselon III, sedangkan anggaran untuk narasumber yang dianggarkan setara Eselon II, sehingga serapan belanja honorarium narasumber kurang terserap. 2. Kegiatan koordinasi dan konsultasi lebih banyak dilakukan secara <i>online</i>, sehingga anggaran perjalanan dinas kurang terserap. 3. Terdapat salah satu kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu kegiatan Proses Bisnis, dikarenakan Kegiatan Penyusunan Peta Proses Bisnis akan dilaksanakan setelah RPJMD 2025-2029 ditetapkan, sehingga anggaran proses bisnis tidak direalisasikan.



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
				4. Kurang terserapnya anggaran pada Kegiatan Monitoring, evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dikarenakan lokus pelaksanaan monev yang ditetapkan Kementerian PANRB lebih sedikit daripada lokus yang dianggarkan. Penetapan lokus monev disampaikan oleh Kementerian PANRB setelah APBD-P ditetapkan sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian anggaran. 5. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah sudah diintegrasikan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sesuai Surat Edaran Kemenpan RB Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah, sehingga kegiatan penyampaian laporan secara langsung tidak dilaksanakan (efisiensi perjalanan dinas). Kami juga akan melakukan perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan kebutuhan yang lebih akurat dan reaktif. Kami juga akan lebih memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran.
			Perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelolaan keuangan yang lebih	Kami akan semakin meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan melalui pelatihan dan bimbingan teknis serta secara rutin menganggarkan



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			efektif memerlukan pengelola yang berkompeten untuk itu perlu secara rutin mengadakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM di perangkat daerah. Serta meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap setiap program-program kegiatan.	biaya pelatihan dan bimbingan teknis untuk mendukung peningkatan kemampuan SDM di Perangkat Daerah. Selain itu, kami akan memperkuat monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program dan kegiatan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan anggaran dan peningkatan kinerja.
		Tata Pemerintahan Kabupaten Muara Enim	Menyelesaikan tapal batas wilayah yang ada di dalam Kabupaten Muara Enim dan tapal batas dengan kabupaten - kabupaten tetangga dengan peta wilayah yang ada agar tidak terjadi gejolak di kemudian hari. Selanjutnya Pansus I juga mengusulkan untuk memiliki peta yang diakui oleh pihak yang berkepentingan.	Kabupaten Muara Enim berbatasan langsung dengan 11 Kabupaten/Kota tetangga. Terkait hal tersebut, progres penyelesaiannya adalah sebagai berikut: 1. Telah terbit 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang menjadi acuan batas definitif dan sah secara hukum untuk 9 segmen batas wilayah. 2. Sebanyak 2 segmen batas lainnya saat ini sedang dalam tahap fasilitasi dan proses penyelesaian di Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Kabupaten Muara Enim terus melakukan koordinasi aktif agar kedua segmen ini segera mendapatkan ketetapan hukum. Dalam upaya menertibkan administrasi wilayah internal, Bagian Tata Pemerintahan telah melakukan langkah-langkah teknis sebagai berikut:



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
				1. Telah dilaksanakan pemasangan patok batas antar kecamatan di seluruh titik koordinat yang disepakati dan saat ini proses fisik di lapangan telah dinyatakan selesai. 2. Sebagai tindak lanjut dari selesainya pemasangan patok tersebut, saat ini Bagian Tata Pemerintahan sedang berusaha untuk membuat dan menyusun Peraturan Bupati (Perbup) untuk melegalkan batas-batas kecamatan tersebut agar memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sehubungan dengan harapan DPRD agar Bagian Tata Pemerintahan menyediakan peta tapal batas resmi guna menghindari gejolak di masyarakat, dapat kami sampaikan progres sebagai berikut: 1. Sebagai tindak lanjut nyata dari kegiatan pemasangan patok batas antar kecamatan yang telah selesai dilaksanakan secara fisik di lapangan, Bagian Tata Pemerintahan saat ini telah memiliki Peta Batas Antar Kecamatan. 2. Peta tersebut disusun berdasarkan hasil pengukuran titik koordinat yang telah disepakati dan dituangkan ke dalam Berita Acara kesepakatan antar pihak terkait. Hal ini memastikan bahwa secara teknis, garis batas yang tergambar telah melalui proses verifikasi



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
				bersama untuk meminimalisir potensi sengketa di kemudian hari. 3. Meskipun peta dan berita acara kesepakatan telah tersedia, saat ini dokumen tersebut sedang dalam tahap penyempurnaan administratif untuk disahkan menjadi Peraturan Bupati (Perbup). Pengesahan ini menjadi prioritas kami agar peta tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (<i>legal standing</i>) sebagai rujukan resmi tunggal di Kabupaten Muara Enim. 4. Bagian Tata Pemerintahan berkomitmen untuk segera merampungkan proses legalisasi ini sehingga peta tersebut dapat segera dipublikasikan dan digunakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan sebagai instrumen pencegahan gejolak kewilayahan.
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perlu untuk di tingkatkan lagi bidang ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam peningkatan sarana dan prasarana, fasilitasi kegiatan Paskibraka dan study wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan organisasi dengan anggaran yang memadai.	Pelaksanaan Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan Kode rekening 8.01.02.2.01.003 telah diusulkan dan dianggarkan dalam peningkatan sarana, prasarana, fasilitasi kegiatan Paskibraka dan study wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan organisasi, namun mengingat adanya pengurangan Dana transfer Pusat ke Kabupaten Muara Enim sebanyak 1,2T sehingga pelaksanaan program dimaksud mengalami efisiensi dan untuk



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
				kegiatan study wawasan kebangsaan akan diusulkan kembali pada APBD Perubahan tahun 2026
			Terkait dengan pendirian ormas - ormas / lsm dalam hal ini pansus i memandang perlu agar kiranya dinas ini dapat mendata penerbitan pendirian dan peremajaan data ormas / LSM.	Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan Permohonan Pasal 10 ayat (1) Pengurus Ormas mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Menteri melalui unit layanan administrasi Kementerian dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota.
			Terkait bidang kewaspadaan nasional & penanganan konflik pansus I memandang perlu agar dinas ini untuk berkoordinasi dengan pihak - pihak terkait.	Bahwa Bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Muara Enim telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait melalui Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Muara Enim.
		Camat - Camat SeKabupaten Muara Enim	Mendorong agar tim anggaran Kabupaten Muara Enim untuk dapat ditingkatkan lagi anggaran untuk kecamatan - kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Muara Enim agar dapat menunjang kinerja para camat dalam peningkatan dalam pembangunan di wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Muara Enim, serta dapat meningkatkan pendapatan daerah.	Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyampaikan apresiasi atas rekomendasi DPRD terkait peningkatan alokasi anggaran bagi kecamatan. Pemerintah Daerah memahami bahwa kecamatan memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah. Penetapan alokasi anggaran tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, skala prioritas pembangunan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
				mempertimbangkan kebutuhan dan kinerja masing-masing kecamatan.
2	Komisi II	Dinas Perdagangan	Mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui retribusi pasar.	Terima kasih kepada Pansus II DPRD Kabupaten Muara Enim yang telah menyarankan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi pasar. Pihak eksekutif sependapat dengan masukan Pansus II DPRD dan telah dilakukan beberapa upaya dalam meningkatkan PAD, antara lain: 1. Telah dilaksanakan revitalisasi Gedung C Pasar Muara Enim. 2. b. Telah direncanakan pembangunan tangga penghubung antara Gedung A dan Gedung C, serta dari Gedung A ke Gedung D.
			Menyarankan dalam pembagian Kios/Petak Pasar Muara Enim harus lebih terbuka atau transparan.	Terima kasih kepada Pansus II DPRD Kabupaten Muara Enim yang telah mengingatkan terkait pembagian los/petak secara terbuka dan transparan. Pelaksanaan pemindahan pedagang akan dilakukan sesuai dengan saran Pansus II, dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi data dan sosialisasi kepada pedagang. Hasil penetapan selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati serta ditembuskan kepada DPRD Kabupaten Muara Enim.
			Pasar di Tanjung Enim yang kalau diperhatikan beberapa waktu terakhir ini, terlihat kumuh dan tidak teratur, maka kepada Dinas Perdagangan kiranya dapat	Terkait revitalisasi Pasar Tanjung Enim, pihak eksekutif sependapat dengan masukan Komisi II DPRD Kabupaten Muara Enim. Untuk itu, akan dilakukan koordinasi dengan pihak PT Bukit Asam Tbk terkait rencana revitalisasi Pasar Tanjung Enim,



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			melakukan revitalisasi pasar dengan memperbaiki infrastrukturnya, meningkatkan kebersihan dan menambah fasilitas. Mengingat Tanjung Enim adalah Kota Wisata.	Kecamatan Lawang Kidul, melalui Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), mengingat lahan pasar tersebut merupakan aset tanah dan bangunan eks beheersterrein PT Bukit Asam Tbk.
			Apabila dalam revitalisasi terdapat kendala soal lahan mengingat lahan pasar Tanjung Enim adalah milik PTBA, maka Pansus II siap memfasilitasi untuk perihal tersebut.	Terima kasih atas dukungan Pansus II DPRD Kabupaten Muara Enim yang telah memfasilitasi terkait lahan untuk revitalisasi pasar. Pihak eksekutif bersama Komisi II DPRD Kabupaten Muara Enim telah melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan PT Bukit Asam Tbk. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, aset PT Bukit Asam Tbk berupa lahan tersebut tidak dapat dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
			Dinas Perdagangan yang membidangi pertambangan untuk segera melakukan inventarisasi dan kajian terhadap pemanfaatan panas bumi yang ada di Kabupaten Muara Enim dan dilaporkan ke komisi teknis. Serta turut mengawasi proses program Bupati Muara Enim yang dalam waktu	Kepada Pansus II DPRD Kabupaten Muara Enim, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan masukannya terkait inventarisasi dan kajian terhadap pemanfaatan langsung panas bumi di Kabupaten Muara Enim, serta pengawasan terhadap program Bupati Muara Enim terkait angkutan batu bara yang melintas di jalan umum. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak eksekutif akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			dekat ini bahwa kendaraan angkutan batu bara tidak lagi boleh melewati atau melintas di jalan umum, yang tetap berkoordinasi dengan pihak terkait.	memiliki izin pengusahaan panas bumi, yaitu PT. Pertamina Geothermal Energy, PT. Supreme Energi Rantau Dedap, KPH Semendo, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, serta desa-desa sekitar yang memiliki potensi pemanfaatan panas bumi. Hal ini mengingat lokasi tersebut berada di kawasan hutan lindung, sehingga tidak diperkenankan adanya kegiatan sebelum terpenuhinya perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terdapat potensi yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan, maka akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait pengawasan kendaraan angkutan batu bara di Kabupaten Muara Enim, pihak eksekutif akan terus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan Polres Muara Enim.
		Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	Komoditas tanaman pangan memiliki peranan pokok dalam pemenuhan pangan untuk produksi dan produktivitas tanaman pangan harus dilakukan secara integratif dari hulu hingga hilir. Salah satu kendala yang dihadapi petani adalah pemenuhan kebutuhan sarana produksi. Untuk itu Pansus II meminta kepada	Untuk pemenuhan kebutuhan sarana produksi dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan secara integratif dari Hulu ke hilir Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim telah menindaklanjutinya melalui Sub Kegiatan : 1. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			pemerintah daerah agar dapat menyediakan dan memenuhi kebutuhan bagi petani.	Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B berupa belanja diserahkan kepada masyarakat berupa : Handtraktor (50 unit), Pompa aAir 3 Inch (39 unit) Power Tresher (6 Unit) Traktor Roda 4 (6 Unit), Cultivator (13 Unit), Bed Dryer (2 Unit), Mulsa Plastik (143 Rol), Terpal Jemur (18 Lembar), Lapon Lingakr Besi (500 Unit), Selang Drip Plastik (10 Rol), Handsprayer Eleketrik (25 Unit), Mesin Pemotong Rumput (10 Unit), Alat Irigasi tetes (7 Paket), Pembangunan Gudang Alsintans Brigade Pangan (7 Unit) dan Pembangunan Sumur Bor (2 Unit). 2. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani belanja Barang diserahkan kepada masyarakat berupa Pembangunan Jalan Usaha Tani sepanjang 33.456,12 meter 3. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi Usaha Tani belanja diserahkan kepada masyarakat berupa : Pembangunan irigasi tersier (471,88 M), Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
				(376,76 M) dan Pembangunan Sumur Bor (2 Unit) 4. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian, belanja diserahkan kepada masyarakat berupa : Pembangunan Embung (6 Unit). 5. Penjaminan Kemurnian dan kelestarian SDG Hewan dan tanaman belanja diserahkan kepada masyarakat berupa kegiatan pengembangan Intensifikasi Tanaman padi dan palawija Berupa bantuan Benih Padi Sebar (BR) seluas 2.234 Ha dan bantuan benih padi melalui optimalisasi peningkatan indeks pertanaman seluas 2000 Ha.
			Pembinaan terhadap pelaku usaha yang ada di Kabupaten Muara Enim agar dapat ditingkatkan seperti peningkatan produk-produk olahan dengan harapan masyarakat dapat menerima manfaat seperti program asuh dan program ahli gizi untuk anak-anak sekolah yang ada di Kab. Muara Enim.	Untuk Pembinaan terhadap pelaku usaha yang ada di Kabupaten Muara Enim agar dapat ditingkatkan seperti peningkatan produk-produk olahan dengan harapan masyarakat dapat menerima manfaat maka Dinas Tanaman pangan Hortikultura telah menindaklanjutinya melalui sub kegiatan Pendampingan Unit Usaha dan Produk Hewan berupa kegiatan Sosialisasi produk asal ternak yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) serta higienis



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
				untuk dikonsumsi sebanyak 30 peserta, pengawasan dan pembinaan uni usaha produk hewan sebanyak 1 unit dan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM sebanyak 96 kali.
			Untuk penyaluran pupuk yang bersubsidi dapat dilakukan melalui BUMDES sesuai dengan desa masing-masing.	Untuk Penyaluran Pupuk yang bersubsidi dilaksanakan sesuai dengan Juknis Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Kementerian Pertanian, Pupuk Bersubsidi yang diusulkan melalui Program E-RDKK yang alokasinya ditentukan oleh Kementerian Pertanian RI. Tahun 2025 Alokasi Pupuk Subsidi telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan peternakan Kabupaten Muara Enim Nomor : 500.6.1/428/KPTS/DTPHP/2025 dengan rincian : Urea (1.618,47 Kg) dan NPK (3.161,01 Kg) Untuk 22 Kecamatan sesuai dengan Alokasi yang diterima dari Kementerian Pertanian dan Selanjutnya dilakukan Realokasi untuk mengoptimalkan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Masing-masing Kecamatan.
			Dalam upaya mendorong program dan kegiatan OPD Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan, untuk mendukung terciptanya swasembada pangan, Pansus II mendorong untuk terus	Untuk mendorong dan meningkatkan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan pengairan lainnya, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura telah menganggarkannya pada Tahun 2025 melalui Subkegiatan sebagai berikut :



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			ditingkatkan program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan pengairan lainnya.	1. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan irigasi Usaha Tani belanja diserahkan kepada masyarakat berupa : Pembangunan irigasi tersier (471,88 M), Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah (376,76 M) dan Pembangunan Sumur Bor (2 Unit) 2. Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian, belanja diserahkan kepada masyarakat berupa : Pembangunan Embung (6 Unit).
		Dinas Ketahanan Pangan	Dalam Rangka Memperkuat Ketahanan Pangan Daerah, DPRD Merekomendasikan agar dilakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap daerah rawan pangan di Kabupaten Muara Enim.	Dinas ketahanan Pangan telah melaksanakan pemetaan daerah rawan pangan secara menyeluruh di seluruh kecamatan pada Kabupaten Muara Enim melalui pengumpulan dan analisis data yang mewakili 3 aspek yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.
			Analisis Terhadap Potensi dan Tingkat Kerawanan Pangan serta Pengawasan yang lebih optimal perlu diperkuat sebagai dasar perumusan kebijakan yang tepat.	Melakukan analisis terkait tingkat kerawanan pangan daerah dan melakukan monitoring dan evaluasi kelapangan serta menyusun laporan sebagai perumusan kebijakan ketahanan pangan.



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			Penambahan Anggaran bagi Dinas Ketahanan Pangan pada tahun Anggaran 2025 untuk mendukung pelaksanaan program-program yang lebih efektif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.	Penambahan Anggaran sebesar Rp. 1.868.635.600
		Dinas Perikanan	Pansus II meminta kepada Dinas Perikanan agar dapat meningkatkan PAD dari perikanan khususnya dari kolam-kolam ikan yang ada di sekitar objek wisata air Terjun Curup Tenang.	Kolam-kolam yang ada di objek wisata Air Terjun Curup tenang merupakan bagian dari UPTD Balai Benih Ikan Talang Pangeran Kabupaten Muara Enim yang berfungsi sebagai 1. Pelaksana pengolahan pembudidaya ikan dan penyiapan calon induk ikan unggul 2. Membantu bimbingan langsung kepada unit Pembudidaya Rakyat (UPR) dalam rangka peningkatan produksi dan mutu benih serta peningkatan teknik pembudidaya 3. Sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat dalam pelaksanaan pembudidaya ikan baik pembudidaya maupun pembesaran ikan 4. Sebagai penopang kebutuhan benih ikan apabila benih kekurangan dimasyarakat Dalam rangka peningkatan PAD dilokasi tersebut kami akan berusaha untuk mengelola unit tersebut untuk dapat meningkatkan produktifitas lahan sehingga produksinya dapat maksimal baik pembudidaya maupun pembesarannya dengan cara



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
				melengkapi sarana prasarana yang dibutuhkan oleh kegiatan BBI tersebut.
			Pansus II menyarankan kepada Dinas Perikanan kiranya dapat membuat kolam-kolam percontohan di setiap kecamatan agar kita bisa mengetahui jenis ikan apa yang cocok dipelihara di setiap daerah kecamatan.	Terima kasih atas saran kepada Dinas perikanan untuk dapat membuat kolam-kolam percontohan di setiap kecamatan agar kita bisa mengetahui jenis ikan apa yang cocok di setiap daerah kecamatan. Kami sependapat dengan anggota dewan, dengan adanya kolam-kolam per kecamatan di tengah masyarakat akan cepat mengalokasi masyarakat dalam rangka peningkatan produksi ikan sehingga kebutuhan protein ikan dapat terpenuhi. Rencana yang akan dilakukan adalah dengan melibatkan penyuluh-penyuluh perikanan di wilayah kecamatan agar dapat memilih lokasi pokdakan yang ada untuk dijadikan sebagai tempat percontohan atau sampel di setiap kecamatan sehingga para pemula yang mau berusaha dibidang perikanan dapat belajar lebih dekat
			Terhadap program pengembangan budidaya perikanan dan kegiatan pembinaan, pengembangan perikanan yang optimal, agar target realisasi kinerja tercapai, untuk itu Pansus II menilai diperlukannya penambahan anggaran Dinas Perikanan di tahun 2025 ini.	Terima kasih atas saran yang diberikan kepada dinas perikanan, kami sependapat dengan anggota dewan , untuk mewujudkan Kabupaten Muara Enim dalam menyediakan sumber protein bagi masyarakat dari ikan sehingga tercipta masyarakat yang cerdas diperlukan dukungan anggaran yang mencukupi guna mendukung kinerja dan program yang ada di Dinas Perikanan.



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
				Dinas perikanan mempunyai program strategis yaitu kampung nelayan dan budidaya yang akan disumbangkan di kecamatan Muara Belida dan kecamatan SDL. Serta dapat juga dikembangkan Koperasi Desa Merah Putih Budidaya sistem Proflog
		Dinas Perkebunan	Melakukan upaya yang semaksimal mungkin dalam mendongkrak harga sawit dan karet yang saat ini anjlok.	Upaya maksimal telah dilakukan dengan melaksanakan pendampingan dan fasilitasi peningkatan mutu produk hasil produksi sawit dan karet sehingga sesuai dengan standarisasi yang dibutuhkan oleh pihak pembeli antara lain diberikannya bantuan sarana pasca panen untuk sawit dan karet yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
			Melakukan pendekatan dan kerja sama dengan pihak ketiga dalam upaya meningkatkan harga baik sawit maupun karet masyarakat.	Upaya kerjasama dengan pihak buyer/pembeli telah dilaksanakan dengan melakukan pendekatan dengan melibatkan pihak-pihak buyer/pembeli disetiap aktivitas pelelangan mandiri disetiap Desa-Desa yang melaksanakan lelang mandiri.
			Membantu masyarakat dalam pemenuhan hal-hal yang bersifat administratif dalam kerja sama dengan pihak ketiga maupun pihak lainnya sehingga harga pasaran sawit maupun karet dapat meningkat dan stabil.	Upaya yang dilaksanakan yaitu memfasilitasi buyer/pembeli dari dalam Kabupaten Muara Enim maupun dari luar Kabupaten Muara Enim untuk dapat ikut serta dalam pelelangan mandiri dengan menginformasikan dan menjalin komunikasi intensif dengan mengedepankan asas-asal jual beli yang tidak terikat dan jujur sesuai dengan standarisasi dalam pelaksanaan jual beli produk hasil perkebunan.



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			Dalam program peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan, agar terus melakukan promosi agar komoditi hasil perkebunan dapat diketahui oleh publik di luar Kab. Muara Enim. Untuk itu Pansus II menilai diperlukannya penambahan anggaran Dinas Perkebunan di tahun 2025 ini.	Pada tahun 2025 anggaran meningkat sebesar 158% dibandingkan tahun 2024, sehingga dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk peningkatan produksi komoditas perkebunan.
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Terhadap program kegiatan yang sudah melalui proses <i>detail engineering design</i> (DED) pada tahun anggaran 2024, pansus II menginstruksikan kepada eksekutif untuk segera ditetapkan menjadi kebijakan anggaran tahun 2025.	Kegiatan yang telah dibuatkan DED pada tahun anggaran 2024 telah dilaksanakan pembangunannya pada tahun 2025.
			Pengawasan pekerjaan pembangunan harus ditingkatkan untuk menghasilkan mutu dan kualitas yang baik dan yang tidak kalah penting adalah pengawasan dan PPK yang harus benar-benar turun ke lapangan tidak hanya menerima informasi saja.	Seluruh kegiatan pembangunan dan pemeliharaan telah dilakukan pengawasan untuk memenuhi tanggung jawab.
			Dalam kegiatan pekerjaan kiranya Dinas PUPR dapat menyusun	Pelaksanaan pekerjaan yang ada telah dilaksanakan berdasarkan kurun waktu yang tertera pada



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			waktu pelaksanaan yang baik dan efisien serta ada jeda waktu antara pekerjaan APBD induk dan APBD tambahan.	perjanjian kontrak yang disusun. Adapun terdapat tahapan yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan seperti survey kondisi di lapangan, menyusun laporan pertanggung jawaban kegiatan tahun sebelum, merencanakan anggaran untuk tahun yang akan datang, berkoordinasi dengan Kementerian dan/atau pemerintah daerah provinsi yang juga membutuhkan waktu yang tidak singkat. Namun Dinas PUPR tetap terus berupaya menuntaskan seluruh kegiatan yang direncanakan agar mewujudkan visi dan misi Kabupaten.
			Untuk tanah lokasi kegiatan pekerjaan, Dinas PUPR harus memastikan bahwa tanah tersebut sudah ada surat hibahnya agar tidak ada hambatan bagi penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan.	Memastikan status kepemilikan tanah dan persetujuan pembangunan sudah merupakan tahapan awal sebelum melaksanakan pekerjaan. Kelengkapan surat hibah tentu akan dipastikan agar tidak perlu ada hambatan di kemudian hari.
			Pansus II mengucapkan terima kasih kepada eksekutif atas komitmen pemerintah daerah dalam hal penuntasan jalan Kabupaten Muara Enim ke Lubai. Kendati belum begitu sempurna namun progres pengerjaan di lapangan sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Harapan kami	Sudah dilaksanakan sesuai rekomendasi.



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			pemerintah daerah melalui OPD terkait agar dapat menganggarkan kembali terkait masih ada satu titik badan jalan ± 100 meter yang belum diselesaikan dan beberapa jembatan yang harus diperbaiki, seiring dengan badan jalan dan jembatan yang tidak sesuai dan meminta juga kepada OPD terkait untuk menganggarkan pemasangan rambu-rambu jalan mengingat jalan lintas Kabupaten Muara Enim ke Lubai ini nantinya dapat dijadikan jalan alternatif menuju pintu tol Prabumulih – Palembang. Apalagi nanti seiring berjalannya rencana pembangunan fly over untuk mengatasi kemacetan jalan lintas Muara Enim ke Lubai dapat menjadi solusi pemecahan masalahnya.	
			Tata ruang Perda RT RW merupakan dokumen penting untuk menata kawasan strategis yang akan di desain oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Untuk itu Pansus II meminta	Perda RTRW telah disusun dan diperbaharui apabila terdapat perubahan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan amanat yang berlaku.



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			kepada Bupati untuk memperketat izin penggunaan ruang dan wilayah Kabupaten Muara Enim agar sesuai dengan peraturan daerah sekaligus menertibkan izin sesuai dengan amanat perda RT RW, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.	
		Dinas Lingkungan Hidup	Mengingatkan kembali kepada Bupati untuk mengoptimalkan pendidikan lingkungan hidup mulai sejak dini kepada masyarakat agar menanamkan perilaku hidup yang sehat dan cinta lingkungan.	Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan Pendidikan lingkungan hidup mulai sejak dini melalui program pembinaan dan penilaian sekolah Adiwiyata Tingkat SD dan SMP.
			Mengenai pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH), hal ini sebagai salah satu langkah untuk menghindari alih fungsi lahan produktif dengan tetap mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Muara Enim. Pansus II meminta kepada pemerintah daerah supaya ruang terbuka hijau yang sudah ada agar dijaga perawatan dan kebersihannya serta ditambah dengan sarana dan prasarana yang memadai.	Langkah strategis dalam mencegah alih fungsi lahan produktif serta menjaga kualitas lingkungan hidup daerah. Menanggapi hal tersebut, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Pertama, kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Muara Enim telah ditetapkan secara resmi melalui Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Muara Enim serta Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dengan telah ditetapkannya kawasan tersebut dalam dokumen tata ruang yang berlaku, maka secara normatif alih



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
				fungsi lahan RTH tidak dapat diterbitkan izinnya, kecuali tetap diperuntukkan sebagai RTH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam menjaga konsistensi pemanfaatan ruang serta melindungi kawasan yang memiliki fungsi ekologis. 2. Kedua, terkait pemeliharaan, kebersihan, dan pengelolaan RTH, terdapat pembagian kewenangan antar perangkat daerah. 3. RTH berupa rimba kota atau hutan kota yang berfungsi sebagai kawasan konservasi dan paru-paru kota menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim. 4. Sedangkan taman kota yang dimanfaatkan masyarakat sebagai fasilitas umum atau ruang publik berada dalam kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Diperkimtan). Pembagian kewenangan ini dimaksudkan agar pengelolaan RTH dapat dilakukan secara lebih fokus sesuai dengan karakter dan fungsi masing-masing kawasan. Selanjutnya, melalui Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan RTH,



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
				baik dari aspek perlindungan fungsi ekologis, pemeliharaan vegetasi, maupun peningkatan nilai manfaat lingkungan bagi masyarakat. Upaya tersebut juga akan dilakukan secara sinergis dengan perangkat daerah terkait agar keberadaan RTH tidak hanya terjaga dari sisi luasan, tetapi juga kualitas, kebersihan, dan kenyamanan penggunaannya.
			Banyaknya pengaduan masyarakat perihal air Sungai Enim dan Sungai Lematang yang akhir-akhir ini sangat keruh walaupun tidak di waktu hujan turun, untuk itu Pansus II meminta kepada Dinas lingkungan hidup untuk gerak cepat menyikapi hal tersebut dengan menurunkan tim ke lapangan. Karena air sungai Enim dan Lematang merupakan sumber air baku PDAM yang dikonsumsi oleh masyarakat Muara Enim.	Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pemantauan baik secara langsung yaitu dengan pengambilan dan pengujian sampel air Sungai Enim di laboratorium untuk mengetahui kualitas air Sungai Enim dan secara tidak langsung melalui Pemantauan Online Monitoring (ONLIMO) yang langsung terhubung ke Kementerian Lingkungan Hidup.
			Selama ini pengujian kadar air sungai dilakukan laboratorium di luar Kabupaten Muara Enim sehingga memakan waktu dan biaya, untuk itu Pansus II meminta kepada Dinas lingkungan hidup harus mempunyai laboratorium	UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim sejak 28 Juni 2021 telah mendapat sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor Akreditasi LP-1511-IDN (terlampir) dan pada 26 April 2023 juga mendapat Registrasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			sendiri, tidak lagi mengujinya ke luar agar terciptanya efisiensi waktu dan anggaran serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	dengan Nomor Registrasi 00222/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK. (terlampir). Untuk saat ini Laboratorium sudah bisa melakukan Analisa sebanyak 54 (lima puluh empat) parameter uji dan 3 teknik pengambilan sampel yang sudah terakreditasi. Sehubungan dengan belum selesainya proses pendirian BLUD/UPTD Laboratorium Lingkungan maka dapat kami sampaikan bahwa saat ini Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim, hanya bisa menerima pelayanan pengujian laboratorium untuk kebutuhan internal Dinas sendiri belum bisa melayani pelanggan Eksternal atau dari luar sejak Januari 2024. Dikarenakan belum terbentuknya BLUD pada Laboratorium tersebut. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini sudah proses pendirian BLUD termasuk sudah selesainya 3 (tiga) Peraturan Bupati sebagai syarat BLUD, dan saat ini tinggal menunggu penetapan SK Bupati dan pembuatan Perbup tentang Tarif Layanan.
			Dalam pengawasan AMDAL, Pansus II meminta kepada OPD terkait untuk mengkaji lebih dalam lagi dampak lingkungan yang dilakukan sebelum melaksanakan suatu kegiatan usaha atau proyek.	Telaahan dampak lingkungan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan dilakukan melalui tahapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses AMDAL dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif, mulai dari penyusunan



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
				Kerangka Acuan, Andal, RKL-RPL, hingga penerbitan Persetujuan Lingkungan. Dalam penyusunannya, dokumen AMDAL melibatkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidang lingkungan hidup, serta dikoordinasikan bersama instansi teknis terkait sesuai dengan substansi dampak yang dikaji. Selain itu, proses penyusunan AMDAL juga mewajibkan adanya pelibatan masyarakat, khususnya masyarakat terdampak, pemerhati lingkungan, dan pihak terkait lainnya, guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau proyek yang telah memperoleh Persetujuan Lingkungan, pengawasan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Pengawasan tersebut mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), serta penanganan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan di lapangan dengan dokumen lingkungan yang telah disetujui. Pemerintah Daerah juga membuka ruang partisipasi bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan,



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
				pendapat, maupun informasi apabila diketahui adanya dampak lingkungan yang tidak dikelola sesuai dengan dokumen lingkungan yang telah disahkan. Partisipasi masyarakat ini menjadi bagian penting dalam sistem pengawasan lingkungan yang transparan dan partisipatif. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Muara Enim berkomitmen untuk terus memperkuat kualitas kajian AMDAL serta meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaannya, guna memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan tetap memperhatikan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
		Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Menyusun rencana dan program kerja untuk meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan pemukiman termasuk infrastruktur, ruang terbuka hijau dan fasilitas umum lainnya.	Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman dengan membangun infrastruktur dasar dan ruang terbuka hijau (RTH) memerlukan strategi terpadu yang melibatkan perencanaan yang matang dan kolaborasi berbagai pihak guna menciptakan hunian yang layak dan berkelanjutan.
			Melaksanakan dan mengevaluasi bidang perumahan dan kawasan pemukiman serta mengatur pembangunan dan pemeliharaan perumahan, baik yang bersifat umum maupun khusus.	Evaluasi di bidang perumahan memang penting untuk dilaksanakan secara berkala, hal diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan program yang berjalan tetap relevan, efektif, dan mampu menyelesaikan permasalahan perumahan di masyarakat. Evaluasi dilakukan bersama-sama sesuai tahapan kegiatan tersebut.



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			Menangani urusan terkait penggunaan dan pemanfaatan tanah, termasuk perizinan, pengadaan lahan, dan penyelesaian sengketa tanah.	1. Perizinan: Bidang Pertanahan Dinas Perkimtan senantiasa selalu berkoordinasi dengan OPD Teknis terkait perizinan. 2. Pengadaan Lahan: Bidang Pertanahan akan mengakomodir seluruh usulan pengadaan lahan untuk kepentingan umum dari Dinas/Instansi yang memerlukan tanah. 3. Penyelesaian sengketa tanah: Bidang Pertanahan akan berkoordinasi dengan OPD terkait dalam rangka fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan.
			Menyoroti program bedah rumah Pansus II meminta untuk dilakukan diverifikasi yang lebih mendalam dengan turun ke lapangan agar penerima program bedah rumah adalah masyarakat yang benar-benar membutuhkan sehingga akan tepat sasaran.	Proses verifikasi dan survey yang dilakukan selama ini akan ditingkatkan lagi dengan melibatkan peran serta Pemerintah Desa dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), serta melakukan verifikasi data calon penerima bantuan bedah rumah melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional agar tepat sasaran dan efektif.
3	Komisi III	Bidang Pendapatan Daerah	Untuk melakukan pendataan dan pemetaan bidang apa saja yang dapat meningkatkan dan memaksimalkan pendapatan asli daerah terutama dibidang dana peran serta perusahaan, retribusi dan pajak yang berlaku, serta meningkatkan dan melakukan	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kabupaten Muara Enim melalui Pansus III, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Badan Pendapatan Daerah telah dan akan terus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			sosialisasi kepada perusahaan terkait perda Kab. Muara Enim No. 3 Tahun 2010 tentang Peran Serta Badan Usaha Masyarakat dan Luar Negeri, karena masih banyaknya perusahaan yang belum mengetahui perbedaan bantuan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dengan Dana Peran Serta Perusahaan.	Retribusi Daerah dengan melaksanakan pendataan, pemetaan, serta pemutakhiran data objek dan subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara berkelanjutan. Selain itu, Bapenda melakukan identifikasi dan pemetaan potensi pendapatan daerah yang bersumber dari peran serta perusahaan, retribusi daerah, serta jenis pajak daerah yang berlaku, dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Desa, Pemerintah Kelurahan, serta para pemangku kepentingan lainnya di lingkungan Kabupaten Muara Enim. Sebagai upaya peningkatan kepatuhan dan pemahaman wajib pajak serta badan usaha, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Bapenda juga meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Muara Enim, khususnya terkait ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 3 Tahun 2010 tentang Peran Serta Badan Usaha Masyarakat dan Luar Negeri. Sosialisasi tersebut difokuskan pada pemahaman perbedaan antara dana peran serta perusahaan dengan bantuan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), sehingga pelaksanaan kewajiban perusahaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
				Ke depan, Bapenda juga akan memperkuat koordinasi lintas sektor serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pendataan, pemungutan, dan realisasi PAD, guna memastikan peningkatan pendapatan daerah yang berkelanjutan dan akuntabel.
			Selanjutnya, terkait dengan peraturan pemerintah No. 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merekomendasikan OPD terkait agar melakukan pemetaan dan koordinasi kepada OPD yang ada guna peningkatan pendapatan asli daerah.	Menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kabupaten Muara Enim melalui Pansus III serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Badan Pendapatan Daerah telah dan akan terus melakukan pemetaan kewenangan, potensi, serta mekanisme pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah terkait. Selain itu, Bapenda memperkuat koordinasi dan sinergi lintas OPD melalui penyelarasan kebijakan, pertukaran data, serta harmonisasi pelaksanaan pemungutan agar sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan.
		Bidang Belanja Daerah	Terhadap Bidang Belanja Daerah Pansus III menyoroti masih besarnya SILPA yang ada di kas daerah, kedepannya kepada OPD	Dalam perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			terkait dalam menyusun perencanaan belanja daerah agar dapat dilakukan dengan teliti sehingga kebermanfaatan pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Muara Enim.	
		Bidang Perdagangan	Sesuai perda no. 21 tahun 2019 tentang retribusi pelayanan pasar dan sebagai salah satu penyumbang pendapatan asli daerah hendaknya OPD terkait dapat memaksimalkan potensi yang ada seperti pemanfaatan bangunan kios pasar inpres Muara Enim yang banyak tidak digunakan oleh pemilik kios, kepada OPD terkait agar dapat mencari solusi agar para pemilik kios mau melakukan transaksi keuangan dipasar inpres yang telah dibangun pemerintah kabupaten dengan anggaran yang sangat besar tersebut.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan ESDM Kabupaten Muara Enim pada prinsipnya sejalan dengan rekomendasi yang disampaikan, dan telah melakukan beberapa upaya sebagai berikut: 1. Melakukan pendataan ulang terhadap kios yang tidak aktif dan tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya. 2. Melaksanakan evaluasi kepatuhan pembayaran retribusi sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Memberikan teguran tertulis kepada pemilik kios yang tidak memanfaatkan kios sebagaimana mestinya. 4. Mengkaji kemungkinan penertiban dan penataan kembali kios, termasuk opsi pencabutan hak pemanfaatan sesuai regulasi apabila tetap tidak digunakan. 5. Melakukan pendekatan persuasif serta sosialisasi kepada para pedagang guna



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
				mendorong aktivitas transaksi di Pasar Inpres Muara Enim melalui UPTD Pasar. Ke depan, Dinas Perindag ESDM akan terus meningkatkan pengawasan dan pembinaan agar pemanfaatan kios dapat lebih optimal, sehingga mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah.
		Bidang Perhubungan	Terima kasih kepada dinas perhubungan yang telah melaksanakan rekomendasi dari DPRD terkait penertiban terhadap kendaraan angkutan batubara di jalan SMB II, hendaknya rekomendasi tersebut dapat dijalankan dan dilaksanakan di lapangan karena masih adanya laporan dari masyarakat terkait angkutan batubara yang melakukan parkir secara sembarangan di jalan SMB II.	Dinas Perhubungan Telah Menugaskan Personil untuk Melaksanakan Giat Rutin Penertiban, Peneguran dan Himbauan terhadap Kendaraan Angkutan Batu bara dan Angkutan Barang yang sering Parkir di Sepanjang Jalan SMB II terutama pada Malam Hari.
			Meminta kepada Dinas Perhubungan untuk melakukan pendataan ulang terhadap kendaraan-kendaraan operasional maupun angkutan batubara yang beroperasi di semua perusahaan	Dinas Perhubungan telah menyampaikan Surat Permintaan Data kepada Perusahaan di Wilayah Kabupaten Muara Enim yang Memiliki kendaraan operasional pengangkutan Batubara.



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			dalam wilayah Kabupaten Muara Enim, untuk melakukan mutasi semua pajak kendaraan bermotor ke Kabupaten Muara Enim guna peningkatan pendapatan asli daerah.	
			Selanjutnya untuk dapat melakukan pemetaan dan pendataan terkait tempat-tempat parkir yang ada di Kabupaten Muara Enim untuk peningkatan pendapatan asli daerah sesuai dengan Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ayat 22.	Dinas Perhubungan telah Melaksanakan Peninjauan dan pengecekan Langsung ke Lapangan dan Telah Melaksanakan Pemetaan Terhadap Titik – titik Parkir yang memiliki Potensi dalam Meningkatkan Retribusi (PAD) Pendapatan Asli Daerah .
		Bidang Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Mengapresiasi pelaksanaan dan inovasi yang telah dilakukan dan memberi pandangan untuk selalu meningkatkan pelayanan. Menyarankan supaya Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu untuk melakukan koordinasi dengan dinas teknis agar dapat menempatkan petugas yang berwenang atau pegawai yang memiliki sertifikasi dalam	Terima kasih atas apresiasi Pansus III DPRD Kabupaten Muara Enim atas Inovasi yang diciptakan oleh DPMPTSP terhadap pelayanan publik, semua itu adalah keberhasilan Kabupaten Muara Enim, namun demikian disadari dan diakui dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala terlebih dengan berlakunya PP No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pelayanan perizinan berusaha khususnya pembuatan NIB banyak kendala hal tersebut disebabkan karena perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang sangat



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			peningkatan pelayanan kepada masyarakat sehingga berkas perizinan yang berbelit dapat diselesaikan dengan baik dan cepat. Dalam hal memaksimalkan pendapatan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), agar dikembalikan kepada dinas teknis yaitu Dinas PUPR.	berdampak bagi Kabupaten/Kota tidak hanya Kabupaten Muara Enim namun juga dialami oleh Kabupaten/Kota se - Indonesia. Oleh sebab itu ke depan akan dilakukan perbaikan dengan menugaskan pejabat/staf khususnya yang melakukan pelayanan untuk mengikuti pelatihan dan atau akan lebih meningkatkan konsultasi ke Kementerian teknis. Selanjutnya mengenai saran untuk pengalihan target penerimaan retribusi PBG dari DPMPTSP ke Dinas Teknis, mulai tahun 2026 target penerimaan retribusi PBG sudah dialihkan ke Dinas PUPR.
		Bidang Perusahaan Daerah	Bank Sumsel Babel untuk terus melakukan pembenahan pelayanan kepada nasabah dengan selalu memperbaiki sistem keuangan dan sumber daya manusia.	1. Peningkatan kualitas pelayanan Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim secara berkelanjutan melakukan evaluasi standar pelayanan kepada nasabah, termasuk optimalisasi layanan frontliner, percepatan proses transaksi, serta peningkatan kenyamanan sarana dan prasarana layanan. Kami juga memperkuat penerapan standar layanan prima (Service Excellent) guna memastikan kepuasan dan kepercayaan masyarakat. 2. Pengembangan dan peningkatan kualitas SDM dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM, kami melaksanakan program pelatihan dan pengembangan secara berkala, baik pelatihan teknis perbankan, pelayanan nasabah, maupun



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
				penguatan etika dan integritas kerja. Selain itu, dilakukan pula pembinaan dan evaluasi kinerja pegawai secara berkesinambungan untuk mendorong profesionalisme dan akuntabilitas. 3. Penguatan pengawasan dan disiplin kerja, kami terus meningkatkan pengawasan internal serta penegakan disiplin kerja sesuai dengan ketentuan dan kebijakan perusahaan, guna memastikan seluruh pegawai menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)
			PDAM Lematang Enim harus meningkatkan pelayanan dan kualitas air bersih untuk masyarakat Kabupaten Muara Enim.	Perusahaan umum daerah air minum Lematang Enim terus meningkatkan pelayanan yang lebih baik dalam pelayanan ke masyarakat dan akan menginventarisasi aset-aset yang ada.
			Melakukan inventarisasi aset PDAM yang ada dan layak pakai, sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang cepat kepada masyarakat dengan semakin baik.	Perusahaan umum daerah air minum Lematang Enim akan melaksanakan inventarisasi aset-aset yang ada dan yang tidak layak pakai demi untuk peningkatan pelayanan ke masyarakat.
			Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan : Pansus III mengucapkan selamat kepada Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan yang telah membuka kantor PT. BPR Gerbang	BPR Muara Enim mengucapkan terima kasih banyak kepada DPRD Kab. Muara Enim, seluruh jajaran Pemkab. Muara Enim khususnya Bapak Bupati Muara Enim, Ibu Wakil Bupati yang telah mendukung BPR Muara Enim untuk tumbuh dan



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			Serasan Cabang Prabumulih, sehingga dapat semakin meningkatkan dalam pelayanan kepada nasabah yang melakukan transaksi keuangan.	berkembang lebih baik lagi sehingga lebih maksimal dalam mendukung Pembangunan dan Masyarakat di Kab. Muara Enim
			Berdasarkan laporan neraca keuangan dari BPR Gerbang Serasan dan telah dibayarkannya deviden kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2024, memberikan catatan kepada BPR Gerbang Serasan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama pemberian kredit kepada UMKM sesuai dengan visi dan misi Bupati Muara Enim tahun 2025-2030, dengan melakukan pengembangan teknologi informasi yang diperlukan seperti penggunaan anjungan tunai mandiri sendiri.	BPR Muara Enim berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat khususnya dalam penyaluran kredit untuk UMKM sesuai Visi dan Misi Bupati 2025 - 2030 melalui Program Membara yang bekerjasama dengan dinas Koperasi menyalurkan kredit usaha rakyat dengan subsidi suku bunga murah
			Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Muara Enim harus terus mendukung target kerja yang ada di Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan, sehingga	BPR Muara Enim terus melakukan pengembangan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Kab. Muara Enim. Penyertaan Modal baru diterima BPR Muara Enim di bulan Desember 2025. Pengadaan mesin ATM sendiri adalah salah satu target BPR Muara Enim, namun



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			pelayanan kepada masyarakat dapat terlayani dengan maksimal.	memang masih dalam proses persiapan dan konsolidasi dengan pihak terkait yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) terkait Persyaratan, Perizinan, dan ketentuan lainnya. Pengadaan mesin ATM sendiri akan direalisasikan paling lambat di semester II tahun 2026. Program saat ini yang sedang BPR Muara Enim jalankan untuk mendukung pelayanan tersebut adalah 1. Memberikan fasilitas pinjaman kredit suku bunga murah (subsidi) kepada Masyarakat Kab. Muara Enim dengan program Membara KURDA (Kredit Usaha Rakyat Daerah) dengan suku bunga bekerjasama dengan dinas koperasi, masyarakat akan diberikan fasilitas pinjaman dengan suku Bunga 5%/tahun dimana 2%/tahun dibayarkan oleh Masyarakat dan 3%/tahun dibayarkan melalui subsidi pemerintah dengan target 1000 UMKM dalam 5 tahun 2. BPR Muara Enim dalam meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat akan mengadakan pelayanan Mobil Kas Keliling, dalam pelayanannya Masyarakat tidak perlu lagi datang ke BPR Muara Enim pada setiap keperluannya, BPR Muara Enim akan hadir ditengah-tengah Masyarakat untuk melayani



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
				segala kebutuhan Masyarakat baik Tabungan, Deposito maupun Penyaluran Dana.
		Bidang Keuangan dan Aset Daerah	Melakukan inventarisasi aset bangunan dan tanah pemerintah Kabupaten Muara Enim yang belum tersertifikat sehingga diketahui secara detail mana-mana yang masih menjadi aset dan tanggung jawab serta dapat dilakukan pemeliharaan oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim.	Inventarisasi atau sensus Barang Milik Daerah (BMD) pada tahun 2026 akan dilaksanakan
		Bidang Badan Layanan Umum Daerah	Untuk terus memenuhi mutu dan pelayanan secara maksimal, melakukan pelatihan dan pendidikan teknis terhadap petugas/SDM yang bersertifikat, ini juga berkaitan dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh BPJS untuk dapat dicover oleh BPJS harus menggunakan SDM yang bersertifikat.	RSUD dr. H. Mohamad Rabain Muara Enim telah melakukan upaya peningkatan kompetensi SDM baik tenaga Medis, tenaga Kesehatan, maupun tenaga teknis pada umumnya dengan melakukan Pendidikan dan pelatihan dalam mendukung upaya pemenuhan mutu dan kualitas pelayanan yang maksimal serta memastikan tenaga medis dan tenaga Kesehatan yang ada memiliki kemampuan sesuai pada bidang keahliannya dengan dibuktikan dengan sertifikat yang dimiliki sesuai dengan standar kebutuhan pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia dan BPJS Kesehatan Indonesia.
			Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung baik	Untuk mendukung kenyamanan bagi para pasien, keluarga pasien maupun petugas pelayanan



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			untuk petugas maupun pasien rumah sakit dr. H.M. Rabain Muara Enim sehingga pelayanan yang dilakukan membuat pasien nyaman selama berada di rumah sakit.	Kesehatan, RSUD dr. H. Mohamad Rabain telah melakukan beberapa upaya peningkatan prasarana yang dibutuhkan dengan telah melakukan renovasi dan pemeliharaan Gedung ruang rawat inap pasien yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Muara Enim dan anggaran BLUD Tahun 2025; Kemudian RSUD dr. H. Mohamad Rabain juga telah melakukan upaya pemenuhan sarana pelayanan Kesehatan bagi pasien dengan melakukan pengadaan alat Kesehatan penunjang medis di fasilitas pelayanan Kesehatan bagi pasien yang bersumber dari dana APBD Perubahan Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
			Meningkatkan pemahaman tupoksi masing-masing bagian agar dapat bekerja memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan, salah satunya dengan melakukan survei kepuasan pelanggan terutama di unit-unit pelayanan.	Melakukan pengarahan dan pemberian penjelasan kepada Kepala Unit, Kepala Instalasi agar dapat meningkatkan pemahaman tupoksi dalam bekerja sesuai dengan tugas pokok dan cascading sehingga kinerja baik bermuara pada pencapaian standar pelayanan yang telah ditetapkan.
4	Komisi IV	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Untuk melakukan inventarisasi aset milik Dinas Pendidikan karena banyak ditemui rumah dinas guru dihuni oleh oknum yang tidak punya kapasitas di bidang pendidikan dan atau rumah dinas guru yang sudah disewakan	Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Pansus IV, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan inventarisasi dan verifikasi menyeluruh terhadap seluruh aset berupa rumah dinas guru serta bangunan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, menertibkan pemanfaatan aset yang tidak sesuai peruntukannya, termasuk rumah dinas yang



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			kepada pihak lain yang tidak sesuai peruntukannya. Bahkan banyak bangunan sekolah dasar/sekolah menengah pertama yang belum memiliki sertifikat tanah atas bangunan tersebut. Dengan demikian merekomendasikan agar asset tersebut segera dikembalikan sesuai peruntukannya dan di sertifikatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	dihuni oleh pihak yang tidak berhak atau disewakan kepada pihak lain, serta mengambil langkah administratif dan hukum yang diperlukan untuk pengosongan dan pengembalian aset sesuai fungsi semula, sekaligus mempercepat proses sertifikasi tanah dan bangunan sekolah yang belum memiliki sertifikat dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
			Pola pembangunan yang tidak tuntas pada sarana prasarana sekolah, seperti pembangunan WC atau sanitasi tidak didukung dengan sumur atau sumber air lainnya. Selain itu pembangunan ruang belajar tidak didukung meubeler dan lain-lain. Oleh karena itu merekomendasikan pembangunan tuntas berkelanjutan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan.	Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Pansus IV, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu melakukan inventarisasi dan verifikasi menyeluruh terhadap seluruh aset berupa rumah dinas guru serta bangunan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, menertibkan pemanfaatan aset yang tidak sesuai peruntukannya, termasuk rumah dinas yang dihuni oleh pihak yang tidak berhak atau disewakan kepada pihak lain, serta mengambil langkah administratif dan hukum yang diperlukan untuk pengosongan dan pengembalian aset sesuai fungsi semula, sekaligus mempercepat proses sertifikasi tanah dan bangunan sekolah yang belum memiliki sertifikat dengan berkoordinasi dengan perangkat



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
				daerah dan instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
			Dalam hal pemberian hibah bangunan kepada yayasan pendidikan untuk mempertimbangkan kemampuan finansial dan kemandirian yayasan secara adil, karena sejatinya yayasan adalah satu-satunya badan hukum nonprofit di tanah air Indonesia tercinta ini. Yayasan yang sudah menghimpun dana umat, kemudian masih melakukan pungutan yang besar dalam bentuk: SPP, uang bangunan, infaq, dan lain - lain kepada siswa-siswanya, dan menerima dana BOS dari pemerintah, lalu rutin setiap tahun menerima hibah bangunan dari pemerintah ini tentu sudah menyalahi dan layak untuk dilakukan audit investigatif. Oleh karena itu merekomendasikan hibah bangunan diprioritaskan kepada yayasan yang lemah finansial serta dilakukan sesuai	Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Pansus IV, pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait perlu melakukan evaluasi dan verifikasi secara komprehensif terhadap yayasan pendidikan calon penerima hibah bangunan dengan mempertimbangkan kemampuan finansial, tingkat kemandirian, serta sumber pendanaan yayasan secara objektif dan adil, memprioritaskan pemberian hibah kepada yayasan yang lemah secara finansial, serta memastikan seluruh proses pemberian hibah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan audit dan pengawasan terhadap yayasan yang menerima dana BOS, melakukan pungutan kepada peserta didik, dan secara rutin menerima hibah bangunan dari pemerintah guna menjamin akuntabilitas dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara.



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.	
			Terhadap tenaga pendidikan (Tendik) maupun tenaga administrasi sekolah (TAS) yang sudah lulus P3K tapi belum dilantik agar hak - hak normatif mereka tidak dihentikan selama waktu sebelum pelantikan ini.	Terkait dengan Tendik dan TAS yang telah Lulus PPPK, Hak Tendik dan TAS tetap dipenuhi sampai dengan dilantik sebagai PPPK.
		Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Mohamad Rabain	Ditemukan di beberapa Puskesmas dan Rumah Sakit tersedia alat kesehatan seperti dental care, USG dan lain-lain tidak dapat dioperasikan, karena tidak ada SDM dan sekarang kondisinya ada yang rusak. Oleh karena itu merekomendasikan agar pengadaan alat kesehatan harus diimbangi dengan SDM yang ada. Selain dari pada itu untuk melakukan inventarisasi alat kesehatan dengan spesifikasi kondisinya dan ketersediaan <i>man power</i> (SDM).	Untuk mengatasi masalah alat kesehatan telah dilakukan kalibrasi alat kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit dengan output yaitu terlaksananya kegiatan kalibrasi alat kesehatan sebanyak 843 unit alat kesehatan di 22 puskesmas di Kabupaten Muara Enim dengan hasil kalibrasi 799 LAIK dan 44 Tidak LAIK.
			Mempermudah akses BPJS pada setiap tingkatan fasilitas kesehatan mengingat mobilisasi dan	Untuk mempermudah perpindahan fasilitas kesehatan masyarakat tersebut BPJS kesehatan sudah melakukan beberapa hal:



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			perpindahan penduduk kiranya lebih mempermudah layanan perpindahan fasilitas kesehatan pendudukan.	1. Sosialisasi perpindahan fasilitas kesehatan secara mandiri melalui mobile JKN 2. Petugas puskesmas memfasilitasi layanan perpindahan fasilitas kesehatan bagi masyarakat.
			Untuk peningkatan kompetensi tenaga perawat, seharusnya Dinas Kesehatan menganggarkan pelatihan kompetensi perawat agar kemampuan perawat semakin profesional.	Untuk meningkatkan kompetensi perawat dan tenaga kesehatan telah dilakukan pelatihan-pelatihan sebagai berikut: 1. Pelatihan Tenaga Kesehatan masalah kesehatan jiwa bagi perawat dokter puskesmas. 2. Pelatihan Pelayanan Klaster Usia Produktif dan Lansia. 3. Pelatihan TBC bagi Bidan. 4. Pelatihan program bencana. 5. Pelatihan Program Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM). 6. Pelatihan kader di Puskesmas. 7. Pelatihan Digital Keterampilan Dasar Kader Posyandu. 8. Pelatihan Komunikasi Antar Pribadi.
			Terkait dengan kondisi RSUD di Gelumbang, Semendo, di Lubai Ulu ditemukan belum ada ruang OK yang representatif dan ruang anestesi, maupun tenaga medisnya.	Pembangunan gedung OK RSUD Gelumbang telah direalisasikan melalui pendanaan BKBK, serta dilakukan penyiapan fasilitas pendukung lainnya secara bertahap.



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			Hal ini menghambat pelayanan respons cepat bagi pasien emergency yang membutuhkan tindakan operasi secepatnya, kondisi yang demikian seolah-olah mubazir pembangunan rumah sakit daerah yang menelan biaya besar tersebut. Oleh karena itu merekomendasikan agar segera dibangun fasilitas OK dan anestesi yang representatif berikut dengan tenaga medisnya.	
		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Terhadap KKWT yang tidak termasuk dalam database dan seleksi tahap yang telah dirumahkan untuk dapat dimanfaatkan atau diaktifkan kembali oleh OPD melalui pola khusus sesuai ketentuan yang berlaku.	Melakukan pendataan ulang KKWT yang telah dirumahkan serta berkoordinasi dengan OPD terkait untuk pemanfaatan kembali sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			Agar dilakukan pengisian jabatan struktural yang ada di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yaitu kepala UPT BLK, kepala bidang penataan dan kepala bidang pengelolaan data, info tenaga kerja dan transmigrasi.	Mengusulkan pengisian jabatan struktural kepada BKPSDM sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			Penambahan akses jalan lingkungan kantor Disnaker penghubung antara gedung kantor, asrama dan workshop.	Mengusulkan penambahan akses jalan lingkungan kepada OPD teknis terkait melalui perencanaan dan penganggaran.
			Pembangunan jalan tembus di depan kantor Disnaker, hanya ada satu akses jalan ke Disnaker, SMK 1, SMK 2, dan SMA 3.	Berkoordinasi dengan Dinas PUPR dan instansi terkait untuk perencanaan pembangunan jalan tembus.
			Pemeliharaan sungai untuk meminimalisir banjir akibat luapan Sungai Lematang.	Mengusulkan kegiatan normalisasi dan pemeliharaan sungai kepada OPD teknis dan instansi terkait.
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Merekomendasikan untuk melakukan rehab gedung lama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sekarang di operasionalkan menjadi UPTD PPA untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi korban kekerasan baik perempuan dan anak-anak (UPTD PPA + Rumah Aman). Selain itu menambah tenaga personil untuk Rumah Aman.	1. Mengupayakan permohonan tambahan anggaran rehab gedung lama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) ke TAPD, tetapi sampai dengan Anggaran Tahun 2026 belum terealisasi. 2. Mengupayakan permohonan tambahan anggaran rehab gedung lama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) ke Kemen PPPA melalui Dana DAK Fisik , tetapi tidak diakomodir karena efisiensi anggaran 3. Untuk Penambahan personil UPTD PPA sudah diakomodir dengan Tenaga CPNS dan P3K.
			Mengapresiasi terlaksananya isbat nikah masal di Kabupaten Muara Enim yang telah di rencanakan	Kegiatan Isbat Nikah Tahun 2025 telah dilaksanakan bekerja sama dengan Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Capil, dan Kecamatan se-



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			Dinas PPPA bekerja sama dengan Capil, Pengadilan Agama agar masyarakat yang tidak mempunyai catatan kependudukan (akta nikah) bisa terfasilitas dan dengan adanya catatan kependudukan.	Kabupaten Muara Enim, dengan target 2500 pasangan Pengantin pernikahan pertama yang belum memiliki status kependudukan, yang lolos Verifikasi dari Pengadilan Agama sebanyak 1.556 pasang peserta yang akan diisbatkan, menggunakan APBDP , dan 100 pasang di biayai CSR PTBA.
		Dinas Sosial	Mengapresiasi program PKH Membara sebagai bentuk dukungan untuk mengakomodir masyarakat yang tidak menerima PKH dari pusat, serta memberi catatan bahwa penerima PKH Membara harus tepat sasaran untuk mereka yang layak menerimanya.	Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Pansus IV terkait Program PKH MEMBARA, Dinas Sosial Kabupaten Muara Enim melakukan penguatan ketepatan sasaran melalui verifikasi dan validasi berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) khususnya desil 1-3 oleh pendamping sosial, guna memastikan penerima bantuan merupakan masyarakat miskin dan rentan yang layak menerima bantuan sesuai kriteria sasaran yaitu anak yatim, anak yatim piatu, fakir miskin, lanjut usia, dan/atau penyandang disabilitas berat. Hasil verifikasi sementara menunjukkan sebanyak 5.727 jiwa pada desil 1-5 sehingga dilakukan penyesuaian dan pemeringkatan sesuai kuota 2.000 jiwa. Pemerintah Kabupaten Muara Enim juga mendorong percepatan penyusunan regulasi berupa Perda dan Raperbup PKH MEMBARA sebagai dasar hukum pelaksanaan, menyiapkan mekanisme penyaluran bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan yang diberikan secara non tunai melalui bank penyalur atau kantor pos dengan penyaluran per



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
				semester, serta menyusun monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan program berjalan transparan, akuntabel, dan mendukung visi misi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim 2025–2030 dalam mengakomodir masyarakat miskin yang belum terjangkau bantuan pusat.
			Mengapresiasi pelaksanaan program asuransi kematian dari senilai Rp. 2.500.000,- menjadi Rp. 3.000.000,- dan juga lingkup usia dari sebelumnya 1 sampai dengan 75 tahun dan sekarang di ubah dari 0 sampai dengan meninggal dunia. Kemudian merekomendasikan agar mempermudah persyaratan klaim asuransi tersebut.	Sebagai tindak lanjut atas catatan Pansus IV terkait penyederhanaan persyaratan klaim Santunan Kematian, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melakukan penyesuaian persyaratan administrasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan dan DTSEN Desil 1–5 sehingga masyarakat yang sudah terdaftar tidak lagi dibebani pengurusan dokumen berulang, khususnya SKTM. Mekanisme pengajuan diarahkan cukup melalui identitas ahli waris, surat keterangan kematian dari desa/kelurahan, serta penetapan ahli waris, sementara dokumen lainnya diverifikasi secara internal oleh perangkat daerah. Selain itu, batas waktu pengajuan 30 hari kerja tetap diberlakukan dengan pendampingan dari desa dan kelurahan agar proses klaim lebih cepat, sederhana, dan tidak memberatkan ahli waris sesuai tujuan pemberian santunan.
		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Memperbanyak kegiatan bazar/pameran untuk pelaku	1. Telah dilakukan kegiatan Bazaar dan pameran promosi produk UMK baik dalam skala regional maupun nasional, seperti Gebyar Koperasi dan



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi.	UMK, Sumsel Expo, APKASI serta pameran produk lainnya yang dilaksanakan di kota-kota di Indonesia. 2. Dinas Koperasi, UKM juga memfasilitasi promosi dan penjualan produk secara online melalui inovasi AMBUNG EMAC'S 3. Juga menyediakan ruang konsultasi RUMOR (Rumah Inkubator) Koperasi dan UKM di kantor Dinas Koperasi, UKM.
			Memperbanyak pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKMK agar terdaftar produknya, mendapat akses kemudahan perizinan dan jaringan pemasaran yang luas.	Dinas Koperasi, UKM di tahun 2025 telah menyelenggarakan berbagai pelatihan dan pendampingan bagi Koperasi dan UMK, seperti : 1. Pelatihan Kewirausahaan. 2. Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan. 3. Melaksanakan magang / praktik kerja bagi 5 (lima) orang pengurus koperasi produsen multi pihak tumbuh bersama mandiri Kabupaten Muara Enim ke Koperasi Produsen Induk Sawit Lestari Musi Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin terkait tatacara pengolahan buah kelapa sawit. 4. Melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi SDM KDKMP Wilayah Kabupaten Muara Enim sebanyak 256 KDKMP (512 Peserta).



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
				5. Melaksanakan pendampingan terkait legalitas usaha koperasi dan UMK (NIB, NIK, PIRT, BPOM, Sertifikat Halal, HAKI). 6. Melaksanakan pendampingan terhadap penilaian Kesehatan koperasi mandiri (<i>self assessment</i>). 7. Melaksanakan Sinergi Kemitraan antara KDKMP dengan Bulog, PT. Kimia Farma, dan Bank Mandiri Cabang Muara Enim. 8. Melaksanakan pengawasan kepatuhan koperasi dan KSP/USP koperasi 9. Melaksanakan Sosialisasi Penerapan Peraturan Khusus bagi Pengurus KSP/ USP Koperasi 10. Melaksanakan sosialisasi strategi peningkatan minat gen Z berkoperasi melalui koperasi goes to school sebanyak 12 Sekolah/ 360 peserta.
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Untuk menunjang prestasi olahraga agar Dispora dapat melakukan pembinaan atlet dari usia dini di setiap cabang olahraga.	Pembinaan atlet usia dini sudah dilakukan dengan bekerja sama dengan sekolah- sekolah dan cabor terkait melalui program PPLD dan mengikut sertakan atlet yang berprestasi pada Event POPDA Pembina olahraga tingkat Daerah event Propinsi.
			Mengejar prestasi olahraga juga untuk menggeliatkan perekonomian masyarakat. Meminta Bupati untuk dapat mengadakan event – event olahraga	Pembinaan lebih lanjut akan di koordinasikan kembali dengan cabor-cabor terkait.



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			baik dalam tingkat provinsi maupun nasional di Kabupaten Muara Enim.	
			Terhadap fasilitas olahraga yang sudah ada untuk digunakan dan dirawat agar tidak cepat rusak.	Sependapat dengan usulan Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Fasilitas olahraga yang mengalami kerusakan akan dilakukan perbaikan dan pemeliharaan dengan kondisi sarana prasarana tersebut.
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Menyikapi program kerja Dinas PPKB yang hampir keseluruhan program kegiatan bersumber dari pemerintah pusat maka menyarankan kepada OPD untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan penyajian dan sinkronisasi program - program kegiatan, hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di daerah seperti: masih rendahnya usia perkawinan, masih adanya pasangan usia subur yang tidak KB, masih tingginya angka keluarga prasejahtera. Untuk itu menyarankan kepada OPD terkait meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pada	1. Dinas PPKB akan terus berupaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait penyajian dan sinkronisasi program-program kegiatan, untuk mendukung pelaksanaan program Bangga Kencana, Tahun 2025 DPPKB juga mendapatkan Alokasi DAK Non Fisik dan DAK Fisik Sebesar yang terdiri dari: a. Pengadaan VTP Kit: 1 Unit b. Pengadaan Impant Removal Kit: 10 Unit c. Pengadaan Minilaparotomi/Tubectomi Kit: 4 Unit d. Pengadaan Laparoskopi: 1 Unit e. Pengadaan IUD Kit: 15 Unit f. Pembangunan Balai Penyuluh KB: 2 Balai Penyuluh KB g. Rehab Balai Penyuluh KB: 8 Balai Penyuluh KB h. Kelengkapan Balai Penyuluh KB: 4 Balai Penyuluh KB



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			masyarakat khususnya remaja tentang pendewasaan usia perkawinan, meningkatkan partisipasi untuk meningkatkan program KB, pembinaan secara berkesinambungan pada kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS).	2. Dalam upaya pendewasaan usia perkawinan, maka pada tahun 2025 DPPKB Muara Enim melaksanakan orientasi kepada anggota Pusat Informasi dan Konseling remaja (usia 10-24 tahun dan belum menikah) berupa orientasi tentang kita, orientasi <i>upgrade</i> tentang kita bicara <i>life skill</i> dan kekerasan seksual serta orientasi edukasi gizi dan pencegahan anemia. Kegiatan ini bertujuan untuk mencetak fasilitator tingkat kecamatan yang akan memberikan edukasi kepada remaja dan sebaya yang ada di lingkungannya dalam upaya pendewasaan usia perkawinan dan penyiapan berkehidupan berkeluarga bagi remaja. 3. Sedangkan untuk keluarga yang mempunyai remaja juga akan diselenggarakan orientasi 1001 Cara Bicara Bagi Kader Kelompok Bina Keluarga Remaja yang bertujuan mencetak fasilitator di kecamatan agar dapat menyebarkan KIE tentang komunikasi yang efektif dan pola asuh terhadap remaja dan juga Melaksanakan sosialisasi anti narkoba dalam upaya menekan penggunaan narkoba dan meningkatnya HIV/Aids di Kabupaten Muara Enim. 4. Dalam upaya meningkatkan partisipasi untuk meningkatkan program KB, DPPKB berupaya melaksanakan pembinaan pada 60 faskes yang



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
				pada tahun 2024 hanya 57 faskes. Selain itu, meningkatkan informasi dan edukasi melalui penyuluh KB dan kader terkait program KB dan kesehatan reproduksi terutama pada Pasangan Usia Subur (PUS) sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat kehamilan yang tidak diinginkan. 5. Upaya KIE juga dilaksanakan melalui media cetak berupa leaflet dan spanduk terkait upaya pencegahan stunting, gizi ibu hamil dan menyusui, dan panduan menuju keluarga kecil bahagia dan Sejahtera. 6. Pada Tahun 2025 juga diintensifkan penguatan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKA) melalui fasilitasi pembuatan Nomor Induk Berusaha pada 102 Kelompok dan Pemberian Bantuan Alat Teknologi Tepat Guna untuk 30 Kelompok UPPKA.
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Penambahan pegawai/P3K yang di perlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.	Penambahan Pegawai/P3K telah dilaksanakan sesuai dengan pembukaan formasi yang telah ditetapkan sebanyak 26 Orang.
			Penambahan Perpustakaan Keliling (pusling) agar dapat lebih memperluas pelayanan pada masyarakat dan saat ini dinas	Penambahan Perpustakaan Keliling (Pusling) telah dilakukan dengan penambahan 1 (satu) unit mobil baru, sehingga saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki 2 (dua) unit mobil Pusling.



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			perpustakaan hanya mempunyai satu mobil perpustakaan keliling.	
		Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida)	Pemenuhan tenaga fungsional yang berkompeten dibidangnya menjadi suatu kebutuhan. SDM yang kompeten di Brida sangat penting, karena mereka akan menjadi tulang punggung dalam memajukan ekosistem riset dan inovasi di daerah.	Penerimaan CPNS sesuai kebutuhan.
		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terhadap permasalahan objek wisata atau destinasi wisata alam yang berada di dalam kawasan hutan maka diperlukan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) dan/atau Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA). Untuk itu merekomendasikan untuk segera di bentuk tim pengurusan perizinan tersebut dan perlunya penambahan anggaran khususnya untuk pembangunan dan promosi terhadap objek wisata yang ada di Kabupaten Muara Enim.	1. Untuk Tahun 2023 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengusulkan tenaga teknis. 2. kepariwisataan baik CPNS & PPPK ke Bupati Muara Enim. 3. Terkait Penambahan Anggaran pada Tahun 2023 sudah di alokasikan oleh pemerintahan Kabupaten Muara Enim sesuai dengan kemampuan daerah.



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Untuk menunjang kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan maka diperlukan petugas yang memiliki kompetensi dasar pemadam kebakaran, serta kemampuan penyelamatan. Dan ketersediaan alat pemadam kebakaran, kendaraan, peralatan komunikasi, serta perlengkapan keselamatan yang layak sangat penting. Untuk Itu mengharapkan kepada Dinas Damkar untuk penambahan petugas pemadam kebakaran dan melakukan inventarisasi peralatan dan kendaraan agar tetap dalam kondisi baik. Bahwa personil pemadam kebakaran dan penyelamatan pada beberapa pos di keamanan sangat minim oleh karena itu perlu penambahan personil khususnya yang sudah bersertifikat pemadam dan penyelamatan. Mengingat hal tersebut agar tenaga KKWT yang di rumahkan karena masa kerja kurang dari dua tahun untuk dapat diaktifkan kembali dengan pola	1. Mengusulkan penambahan petugas pemadam melalui mekanisme outsourcing. 2. Merencanakan keikutsertaan petugas PPPK Paruh Waktu (pengalihan dari Satpol PP) dalam Diklat Pemadam I di tahun 2026 guna memperoleh sertifikat kompetensi. 3. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) secara bertahap, meski terkendala efisiensi akibat pengurangan transfer pusat 4. Melakukan inventarisasi peralatan dan kendaraan secara berkala.



No	Komisi	Nama Institusi	Isi rekomendasi	Tindak Lanjut
			yang baru sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.	
		Dinas Penanggulangan Bencana Daerah	Perlu penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim baik struktur organisasi, personil, peralatan maupun anggaran.	Sudah ditindak lanjuti dengan memenuhi semua aspek penguatan kelembagaan BPBD seperti telah disahkannya Perbup No 12 Tahun 2025 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, adanya kegiatan penguatan dan pengembangan kapasitas personil setiap tahunnya untuk dapat meningkatkan kapasitas personil dalam penanggulangan bencana, BPBD juga telah memperkuat peralatan untuk operasi darurat, seperti perahu karet, mesin apung, mobil tangki, tenda pengungsian, alat <i>water rescue</i> dll, selain itu juga terdapat penguatan atau kenaikan anggaran dalam program daerah untuk meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana.
			Merekomendasikan agar segera merealisasikan perda organisasi terkait eselonisasi BPBD dan nomenklatur organisasi.	Sudah ditindak lanjuti dengan memenuhi regulasi hukum dan telah disahkan Perbup No 12 Tahun 2025 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAB III	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
BAB IV	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN
BAB V	PENUTUP
LAMPIRAN	

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dilakukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas Pembantuan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dalam melaksanakan otonomi daerah, selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kabupaten Muara Enim juga melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Provinsi. Alokasi dana APBN Tugas Pembantuan yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanian dan infrastruktur pemukiman.

4.1. Dana Bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

4.1.1 Dasar Hukum

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 434/KPTS/BPKAD/2025 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dan Nomor 637/KPTS/BPKAD/2025 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025.

4.1.2. Jumlah Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan

Pada Tahun 2025, Dana Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim dialokasikan untuk pelaksanaan program-program strategis prioritas provinsi dan prioritas kabupaten. Adapun program-program tersebut yaitu:

1. Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) melalui Dinas Perhubungan sebesar Rp 23.500.000.000,00;
2. Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 27.500.000.000,00;



3. Pelaksanaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat melalui Dinas Kesehatan sebesar Rp 6.000.000.000,00.

Adapun secara terperinci dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

No	Perangkat Daerah Pelaksana	Program/ Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Nilai Kontrak	Realisasi	
						(Rp)	%
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan/Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Desa Talang Nangka – Batas Kab. Pali (Desa Pandan) Kab. Muara Enim	27.500.000.000,00	27.328.000.000,00	5.645.600.000,00	20%
2.	Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat / Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim	6.000.000.000,00	5.925.000.000,00	5.925.000.000,00	100%
3.	Dinas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) / Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Muara Enim	23.500.000.000,00	23.488.000.139,00	23.488.000.139,00	100%
TOTAL				57.000.000.000,00	56.741.000.139,00	35.058.600.139,00	220%

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2025

Sumber dana pada tabel di atas berasal dari Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) dari Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan, dana bantuan ini bersifat *reimburse* dengan tiga tahap penyerahan, yaitu:

1. Tahap I sebesar 30% dari nilai kontrak,



2. Tahap II sebesar 40% dari nilai kontrak, tahap ini baru bisa diajukan bila penggunaan di tahap I sudah mencapai 75%, dan
3. Tahap III sebesar 30% dari nilai kontrak, tahap ini baru bisa diajukan bila penggunaan di tahap II sudah mencapai 75%.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah mengajukan permohonan pencairan tahap I, II, dan III kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada T.A 2025. Namun, realisasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan T.A 2025 hanya Tahap I yaitu 30% dari nilai kontrak pekerjaan pada Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 434/KPTS/BPKAD/2025 sebesar Rp9.975.900.000,00 yang diterima pada RKUD Kab. Muara Enim pada tanggal 31 Desember 2025. Untuk pekerjaan pada Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 637/KPTS/BPKAD/2025 belum ada realisasi pencairan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan telah selesai 100% dan pembayaran kepada pihak ketiga telah terealisasi sebesar 100% dengan menggunakan dana APBD Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Sedangkan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat perpanjangan waktu dikarenakan kondisi cuaca yang hujan terus-menerus sehingga menyebabkan lokasi pekerjaan terendam banjir.

Ada pun rincian dari realisasi Tahap I dari Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan ialah sebagai berikut:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan nilai kontrak sebesar Rp27.328.000.000,00 terealisasi sebesar Rp8.198.400.000,00;
2. Dinas Kesehatan dengan nilai kontrak sebesar Rp5.925.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.777.500.000,00.

4.1.3 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan pelaksanaan program Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 berupa Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) karena anggaran pekerjaan tersebut terdapat pada APBD Perubahan Pemerintah Kabupaten Muara Enim T.A. 2025 tanggal 16 Oktober 2025. Pelaksanaan pekerjaan dimulai pada November 2025 dan jatuh tempo pelaksanaan pekerjaan pada akhir Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa bahwa pengajuan pencairan dilakukan secara bertahap dengan syarat dan dokumen yang harus dipenuhi. Hal tersebut menyebabkan penyampaian dokumen persyaratan pengajuan pencairan BKBK mendekati akhir tahun anggaran sehingga proses pencairan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak tepat waktu.



Solusi yang diharapkan yaitu untuk pekerjaan yang bersumber dari dana BKBK hendaknya dianggarkan pada APBD Induk agar pelaksanaan pekerjaan dan penyampaian pengajuan pencairan dana BKBK ke Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat tepat waktu.

4.2. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Otonomi daerah diselenggarakan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Daerah, sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat selama tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan meliputi :

- a. Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD);
- b. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK);
- c. Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Sinergi);
- d. Pembinaan batas wilayah;
- e. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
- g. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- h. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

4.2.1. Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD)

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kerjasama antar daerah merupakan instrumen yang digunakan untuk meningkatkan hubungan dan keterkaitan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah atau dengan pihak ketiga, dan meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, inovasi serta meningkatkan kapasitas fiskal sekaligus percepatan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat melaksanakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik secara menguntungkan. Untuk



mewujudkan kewenangan tersebut salah satu program/kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim adalah melakukan Kerjasama pembangunan dengan Pemerintah Daerah khususnya daerah Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Muara Enim.

Kerja sama tersebut diselenggarakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang diarahkan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang saling menguntungkan. Kerjasama yang dibangun antara daerah tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik, khususnya pada daerah yang terpencil, daerah perbatasan, dan daerah tertinggal. Disamping itu, dalam upaya percepatan pembangunan di berbagai bidang, Pemerintah Kabupaten Muara Enim senantiasa melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, baik kepada lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah yang meliputi bidang kesehatan, bidang penelitian dan pengembangan, riset dan teknologi, hukum, pembangunan infrastruktur dasar masyarakat, manajemen usaha, pendampingan petani, dan lain-lain.

2. Prinsip dan Proses Kerjasama

Ada pun prinsip kerjasama yang diterapkan dalam pemerintahan Kabupaten Muara Enim adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip dasar dalam menjalin kerjasama antar daerah difokuskan pada substansi yang sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, saling menguntungkan untuk kepentingan bersama berdasarkan kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan pemerintah daerah.
- b. Proses kerjasama daerah dilakukan melalui tahapan antara lain: identifikasi permasalahan, pertemuan awal Kepala Daerah, Studi Kelayakan bersama, negosiasi *indomarco* substansi yang akan dikerjasamakan, penandatanganan keputusan bersama/ MoU/ Perjanjian Kerjasama, penyusunan *master plan/action plan*, pembentukan badan kerjasama, dan operasional.
- c. Badan Kerjasama yang akan dibentuk dapat bersifat permanen dikelola secara profesional dan *ex officio* berdasarkan kedudukan pejabat yang menangani kerjasama. Pembentukan struktur organisasi didasarkan pada petugas yang memiliki kompetensi teknis operasional, kompetensi manajerial sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan, dalam hal ini pemerintah daerah dapat berperan dan melakukan koordinasi antar daerah.



3. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Ada pun kerjasama daerah dengan perangkat daerah lain sepanjang tahun 2025 ialah sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Daftar Kerjasama Kabupaten Muara Enim
dengan Perangkat Daerah Lain**

NO.	MITRA KERJASAMA	MOU	TANGGAL PENETAPAN	JANGKA WAKTU KERJASAMA
1.	PEMERINTAH OGAN ILIR	Kesepakatan Bersama Nomor : 100/10/KSB/TKKSD-01/1/2025 Nomor : 134.4/18/IV/2025 Tentang Pengembangan Pembangunan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik	12 Juni 2025	5 Tahun
2.	PEMERINTAH OGAN KOMERING ULU SELATAN	Kesepakatan Bersama Nomor : 08/PEMKAB-OKUS/MOU/2025 Nomor : 134.4/23/IV/2025 Tentang Pengembangan pembangunan potensi Daerah dan peningkatan Pelayanan Publik	30 Juli 2025	5 Tahun
3.	PEMERINTAH KOTA PALEMBANG	Kesepakatan Bersama Nomor : 415.4/12/KB/IV2025 Nomor : 134.4/26/IV/2025 Tentang Pengembangan Pembangunan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik	29 September 2025	5 Tahun
4.	PEMERINTAH KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU	Kesepakatan Bersama Nomor : 134.4/30/IV/2025 Nomor : 415.4-19 Tahun 2025 Tentang Pengembangan Pembangunan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik	25 September 2025	4 Tahun
5.	PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN	Kesepakatan Bersama Nomor : 415.4/152/KSB/I/2025 Nomor : 134.4/35/IV/2025 Tentang Pemanfaatan Pelayanan Mobil MCU Pemerintah Kabupaten Muara Enim	7 Oktober 2025	5 Tahun
6.	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT	Kesepakatan Bersama Nomor : 134.4/39/IV/2025 Nomor : 100/37/KB/KERJA SAMA-2025 Tentang Pengembangan Pembangunan Potensi Daerah Dan Peningkatan Pelayanan Publik	22 Oktober 2025	5 Tahun
7.	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR	Kesepakatan Bersama Nomor : 134.4/40/IV/2025 Nomor : 100.3.7.1/14/KB.BTD-2025 Tentang Pengembangan Pembangunan	22 Oktober 2025	5 Tahun



NO.	MITRA KERJASAMA	MOU	TANGGAL PENETAPAN	JANGKA WAKTU KERJASAMA
	PROVINSI SUMATERA BARAT	Potensi Daerah Dan Peningkatan Pelayanan Publik		
8.	PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR	Kesepakatan Bersama Nomor : B/180.120.22/409.1.1/NKSB/2025 Nomor : 134.4/41/IV/2025 Tentang Pengembangan Pembangunan Potensi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik	22 Oktober 2025	5 Tahun

4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan-permasalahan pokok dalam pelaksanaan kerjasama pembangunan di daerah perbatasan antara lain ialah salah satu daerah mungkin mendapatkan keuntungan lebih besar dibanding daerah lainnya dalam kerja sama ini, jika kerja sama terkait infrastruktur, ada kemungkinan manfaat hanya dirasakan oleh sebagian wilayah saja, dan tidak adanya sistem monitoring yang jelas untuk mengevaluasi sejauh mana kerja sama ini berdampak positif bagi masyarakat.

Ada pun solusi yang dapat penulis sarankan ialah dengan mencantumkan pembagian manfaat secara adil dan proporsional, melakukan kajian awal mengenai dampak dan manfaat bagi masing-masing daerah sebelum kesepakatan dibuat, dan mengadakan pertemuan koordinasi dengan semua pihak terkait untuk memastikan keadilan dalam implementasi kerja sama.

4.2.2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK)

1. Kebijakan dan Kegiatan

Kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dilakukan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh pemerintah daerah karena berbagai keterbatasan yang dimiliki. Adapun Kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan BUMN/BUMD, dalam upaya pengembangan untuk mempercepat pelayanan, memperbaiki pengelolaan sumberdaya alam dan sarana pelayanan, alih teknologi, memperluas layanan, meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan, dan memacu dinamika sosial masyarakat;
- b. Kerjasama Pemerintahan Daerah dengan LSM/Masyarakat, dikembangkan untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat dan mendorong potensi sosial ekonomi yang dimiliki masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, seperti pengelolaan aset pemerintah daerah oleh masyarakat dan



penyuluhan serta pelestarian kawasan hutan untuk mendorong peningkatan produktivitas; dan

- c. Kerjasama antar daerah yang bersifat masal, berupa Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKSI) dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI). Lembaga tersebut merupakan wadah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendayagunaan sumber daya yang tersedia di daerah.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Kerjasama dengan pihak ketiga telah dilakukan oleh Kabupaten Muara Enim melalui perangkat daerah yang terkait. Kerjasama yang dilakukan, baik kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/ Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)/Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta/Instansi/Lembaga Organisasi Masyarakat yang diimplementasikan melalui pola kemitraan dan dituangkan melalui Perjanjian Kerjasama untuk pengembangan Potensi Daerah sebagai berikut.

**Tabel 4.3 Daftar Kerjasama Kabupaten Muara Enim
dengan Pihak Ketiga**

NO.	MITRA KERJASAMA	MOU	TANGGAL PENETAPAN	JANGKA WAKTU KERJASAMA
1.	INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA	Kesepakatan Bersama Nomor : 27/IT9/HK .07 .00/2025 Nomor : 074/01/IV/2025 Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Iptek, Inovasi, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.	11 Februari 2025	2 Tahun
2.	UNIVERSITAS INDO GLOBAL MANDIRI	Kesepakatan Bersama Nomor : MoU-05/UGM/ 2025 Nomor : 074/ 02 /IV/2025 Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Iptek, Inovasi, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.	11 Februari 2025	2 Tahun
3.	UNIVERSITAS BATURAJA	Kesepakatan Bersama Nomor : SKB/001 /UBR /HM/2025 Nomor : 074/03/IV/2025 Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Iptek, Inovasi, Pengabdian Kepada Masyarakat dan	11 Februari 2025	2 Tahun



NO.	MITRA KERJASAMA	MOU	TANGGAL PENETAPAN	JANGKA WAKTU KERJASAMA
		Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.		
4.	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA PALEMBANG	Kesepakatan Bersama Nomor : 0240/STIK/ MOU/III/2025 Nomor 074/04/IV/2025 Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Iptek, Inovasi, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.	18 Maret 2025	5 Tahun
5.	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PALEMBANG	Kesepakatan Bersama Nomor: HK.03.01/F.XXXII/1622/2025 Nomor : 074/05/IV/2025 Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Iptek, Inovasi, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.	18 Maret 2025	5 Tahun
6.	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AL-MA'ARIF BATURAJA	Kesepakatan Bersama Nomor : 151/STIKES-YDMA/TU-1/III/2025 Nomor : 074/06/IV/2025 Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Iptek, Inovasi, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.	18 Maret 2025	5 Tahun
7.	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG	Kesepakatan Bersama Nomor : B-020/UN-09/5.1/HM.01/03/2025 Nomor : 074/07/IV/2025 Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Iptek, Inovasi, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.	18 Maret 2025	5 Tahun
8.	PURNAPASKIBRA INDONESIA KABUPATEN MUARA ENIM	Kesepakatan Bersama Nomor : 119/08/IV/2025 Nomor : 12/PPI-06.05/IV/2025 Tentang Menumbuh kembangkan pelatihan dan kerja sama dengan organisasi kepemudaan dalam pembangunan di Kabupaten Muara Enim	25 April 2025	5 Tahun
9.	PT.BUKITASAM.TbK dan	Kesepakatan Bersama Nomor : 119/11/IV/2025	14 Mei 2025	5 Tahun



NO.	MITRA KERJASAMA	MOU	TANGGAL PENETAPAN	JANGKA WAKTU KERJASAMA
	PT.BANKRAKYAT INDONESIA (Persero).Tbk dan CABANG MUARAENIM dan PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG CABANG MUARA ENIM PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MUARA ENIM (PERSERODA) KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI KABUPATEN MUARA ENIM KARANG TARUNA KABUPATEN MUARA ENIM	Nomor: T/147.J/0400/HK.03?V/2025 Nomor:B.1295/KC-IV/OPS/5/2025 Nomor:010/MOU /MRE/V/2025 Nomor:012/BPR-MR/PKS/2025 Nomor:19/0013/AKADINME/V/2025 Nomor : 05/KT-ME/2025 Tentang Kolaborasi Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Muara Enim.		
10.	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN dan PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT dan PT. Bukit Asam. Tbk dan PT. Royaltama Mulia Kencana dan PT. Servo Lintas Raya	Kesepakatan Bersama Nomor : 011/KSB/OTDA/I/2025 Nomor : 119/13/IV/2025 Nomor : 04/415.2/KSB/I/2025 Nomor : T/0344/0400/HK.02/V/2025 Nomor : 13.01/MOU/RMUK-PEMDA-PEMPROV/V/2025 Nomor : 160/SLR/EXT/V/2025 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Khusus Pertambangan di Provinsi Sumatera Selatan.	20 Mei 2025	5 Tahun
11.	Provinsi Sumatera Selatan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) PT. Bukit Asam,Tbk	Kesepakatan Bersama Nomor : 012/KSB/OTDA /1/2025 Nomor : 119/14/IV/2025 Nomor : HK 0201-Bbs/1545 Nomor : KL.703/V/2/KA-2025 Nomor : T/034b/0400/HK.02/V/2025 Tentang Pembangunan Flyover pada Perlintasan Sebidang di Kabupaten Muara Enim	20 Mei 2025	3 Tahun



NO.	MITRA KERJASAMA	MOU	TANGGAL PENETAPAN	JANGKA WAKTU KERJASAMA
12.	PT.BUKIT ASAM.Tbk dan BANK SUMSEL BABEL CABANG MUARA ENIM dan PT. PUTRA PERKASA ABADI SITE BUKIT ASAM dan BAZNAZ KABUPATEN MUARA ENIM	Kesepakatan Bersama Nomor : 119/16/IV/2025 Tentang Kolaborasi Penyediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Muara Enim	27 Mei 2025	5 Tahun
13.	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MITRA ADIGUNA	Kesepakatan Bersama Nomor : 590/STIKES/1812/MOU/VI/2025 Nomor : 074/17/IV/2025 Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Iptek, Inovasi, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	4 Juni 2025	5 Tahun
14.	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN ABDI NUSANTARA BEKASI	Kesepakatan Bersama Nomor : 17/MoU/STIKES-AN/VIII/2025 Nomor : 074/25/IV/2025 Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Iptek, Inovasi, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	21 Agustus 2025	5 Tahun
15.	PT.BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MUARA ENIM	Kesepakatan Bersama Nomor : 119/28/IV/2025 Nomor : 17/BPR-ME/PKS/IX/2025 Tentang Pemanfaatan Pelayanan Mobil MCU Pemerintah Kabupaten Muara Enim	22 September 2025	5 Tahun
16.	BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)	Kesepakatan Bersama Nomor : 119/29/IV/2025 Nomor : 05/549-3/8265 Tentang Pemanfaatan Pelayanan Mobil MCU Pemerintah Kabupaten Muara Enim	22 September 2025	5 tahun
17.	PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM	Kesepakatan Bersama Nomor : 119/31/IV/2025	22 September 2025	5 Tahun



NO.	MITRA KERJASAMA	MOU	TANGGAL PENETAPAN	JANGKA WAKTU KERJASAMA
	LEMATANG ENIM PDAM	Nomor : 10/MoU/PDAM-LE/ME/IX/2025 Tentang Pemanfaatan Pelayanan Mobil MCU Pemerintah Kabupaten Muara Enim		
18.	BANK SUMSEL BABEL	Kesepakatan Bersama Nomor : 119/32/IV/2025 Nomor : 029/PKS/MRE/X/2025 Tentang Pemanfaatan Pelayanan Mobil MCU Pemerintah Kabupaten Muara Enim	22 September 2025	5 Tahun
19.	PT.PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL	Kesepakatan Bersama Nomor : 119/33/IV/2025 Nomor : 7KSL/SPK/050/IX/2025 Tentang Pemanfaatan Pelayanan Mobil MCU Pemerintah Kabupaten Muara Enim	22 September 2025	5 Tahun
20.	UNIVERSITAS KADER BANGSA PALEMBANG	Kesepakatan Bersama Nomor : 900.a/BAU/MoU /X/2025 Nomor : 074/36/IV/2025 Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Iptek, Inovasi, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	7 Oktober 2025	5 Tahun
21.	UNIVERSITAS PGRI SILAMPARI	Kesepakatan Bersama Nomor : 584/U.16/2025 Nomor : 074/37/IV/2025 Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Iptek, Inovasi, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	17 Oktober 2025	4 Tahun
22.	UNIVERSITAS GADJAH MADA (UGM)	Kesepakatan Bersama Nomor : 12591/UN1.P/ Dit-KRG/HK.08.00/2025 Nomor: 074/38/IV/ 2025 Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Iptek, Inovasi, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	17 Oktober 2025	5 Tahun
23.	PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG	Kesepakatan Bersama Nomor : 119/42/IV/2025	27 Oktober 2025	5 Tahun



NO.	MITRA KERJASAMA	MOU	TANGGAL PENETAPAN	JANGKA WAKTU KERJASAMA
		Nomor : MoU-24/DS600/HK.03/10/2025 Tentang Pembangunan Infrastruktur Pasca Panen Perum Bulog di Kabupaten Muara Enim		
24.	PT. BANK SYARIAH INDONESIA	Kesepakatan Bersama Nomor : 05/055-3/PKS Nomor : 119/43/IV/2025 Tentang Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan Syariah dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Muara Enim	06 November 2025	5 Tahun
25.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG	Kesepakatan Bersama Nomor : 074/44/IV/2025 Nomor : 1843/H-I/UMP/XI/2025 Tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Iptek, Inovasi, Pengembangan Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia	10 November 2025	2 Tahun
26.	PT.RISET PERKEBUNAN NUSANTARA	Nota Kesepakatan Nomor : 119/48/IV/202 Nomor : 122901/MoU.RPN/XII/2025 Tentang Pengembangan Usaha Tani Komoditas Karet di Kabupaten Muara Enim Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Riset dan Permanfaatan Teknologi Serta Inovasi Uang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan	29 Desember 2025	5 Tahun

3. Permasalahan dan Solusi

Kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama antara Pemerintah dengan pihak ketiga yang telah dilaksanakan, relatif tidak ada permasalahan yang berarti. Hal ini tentunya tidak lepas dari koordinasi, kerjasama dan dukungan dari semua pihak sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan kerjasama, serta komitmen bersama dalam pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati.



4.2.3. Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Sinergi)

1. Kebijakan dan Kegiatan Pemerintah

Kabupaten Muara Enim dalam melaksanakan pemerintahan berdasarkan tugas dan fungsi, senantiasa bekerjasama serta berkoordinasi, baik kepada lembaga legislatif, Unsur Forum Koordinasi Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal lainnya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Muara Enim berjalan baik dan kondusif.

Kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam rangka menjalin hubungan kerjasama yang serasi dengan DPRD Kabupaten Muara Enim, unsur Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Instansi vertikal, antara lain:

- a) Menciptakan iklim yang kondusif dengan DPRD Kabupaten Muara Enim dan jajaran unsur Forum Koordinasi Pemerintah Daerah untuk bersama sama mewujudkan *Good Governance*.
- b) Melaksanakan rapat koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pemerintah Daerah baik yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan maupun yang bersifat insidental sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang di daerah.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi vertikal diantaranya adalah penyusunan Buku Profil Daerah yang dikerjasamakan dengan Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Muara Enim. Selain itu, kerjasama yang dilakukan dengan instansi vertikal yaitu pelaksanaan kegiatan Karya Bhakti Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD), Upaya Khusus (UPSUS) bidang pertanian, dan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) yang diselenggarakan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dengan Komandan Kodim 0404/Muara Enim. Program kegiatan yang dilaksanakan melalui program TMMD meliputi kegiatan fisik dan non fisik. Kegiatan fisik diantaranya pembangunan jalan, jembatan, balai desa, masjid, dan MCK. Sedangkan kegiatan non fisik diantaranya penyuluhan tentang bela negara, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, keagamaan, kesehatan lingkungan dan KB, hukum, dan ketertiban masyarakat. Ada pun jabaran mengenai kerjasama tersebut ialah sebagai berikut:



**Tabel 4.4 Dukungan Program Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Sinergi)**

NO	PIHAK YANG DIAJAK BEKERJASAMA (MITRA KERJASAMA)	LANDASAN KERJASAMA (NO. MOU)	IMPLEMENTASE KERJASAMA (PKS/KEGIATAN/PROGRAM)
1	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	Nota Kesepahaman Nomor : 119/09/IV/2025 Nomor : MOU-19- PW07/3/2025	Sinergi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan di Wilayah Kabupaten Muara Enim
2	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL	Nota Kesepakatan Nomor : 119/10/IV/2025 Nomor : 034/BAZNAS- ME/IV/2025	Optimalisasi Pengumpulan dan Pendistribusian serta dataguna Zakat, Infak & Shodaqah di Kabupaten Muara Enim
3	BADAN GIZI NASIONAL	Nota Kesepakatan Nomor : 415.4/04/IV/2025 Nomor : 119/12/IV/2025	Sinergi dan Kerja Sama Dalam Kegiatan Program Makan Bergizi Gratis
4	KANTOR AGRARIA TATA RUANG DAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN PDAM LEMATANNG ENIM	Nota Kesepakatan Nomor : 119/15/IV/2025 Nomor : 501/SKB.16.03.UP.02/V /2025 Nomor : 04/MOU/PDAM- LE/ME/V/2025	Kolaborasi Penyediaan Sertifikat dan Sarana Air Bersih untuk Rumah Layak Huni di Kabupaten Muara Enim
5	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	Nota Kesepakatan Nomor : NK- 10/MK.I/2025 Nomor : 119/19/IV/2025	Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Keuangan Negara pada Instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim
6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Nota Kesepakatan Nomor : HK.201/2/7/BPSDMP/ 2025 Nomor : 119/20/IV/2025	Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di Kabupaten Muara Enim
7	BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL (BRIN)	Nota Kesepakatan Nomor : 119/21/IV/2025 Nomor : 51/1/KS/07/2025	Sinergi di Bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Inovasi dan Inovasi untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Muara Enim.



NO	PIHAK YANG DIAJAK BEKERJASAMA (MITRA KERJASAMA)	LANDASAN KERJASAMA (NO. MOU)	IMPLEMENTASE KERJASAMA (PKS/KEGIATAN/PROGRAM)
8	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)	Nota Kesepakatan Nomor: 008/1.3.4.HMKS/LPSK /8/2025 Nomor : 119/24/IV/2025	Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Wilayah Kabupaten Muara Enim
9	LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA ENIM	Nota Kesepakatan Nomor : WP.6PK.07.03- 1924 Nomor : 119/45/IV/2025	Penyelenggaraan program pelayanan hokum melalui <i>legal clinic collaboration</i> (LCC)
10	BPJS KESEHATAN CABANG PRABUMULIH	Nota Kesepakatan Nomor : 119/46/IV/202 Nomor : 148/KTR/III- 03/1125	Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Muara Enim
11	KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM	Perjanjian Kerja Sama Nomor : 119/47/IV/2025 Nomor : B- 2279/L.6.15/12/2025	Kerja Sama Dalam Penerapan Pidana Kerja Sosial Bagi Pelaku Tinda Pidana
12	PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM	Nota Kesepakatan Nomor:119/22/IV/2025 Nomor:1087/KPA.W6A 5/HM.2.6/VII/2025	Sinergi Pelayanan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian dan Perkawinan Anak di Kabupaten Muara Enim
13	BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN MUARA ENIM	Nota Kesepakatan Nomor : 119/027/IV/2025 Nomor:B-439/16030/ HK.610/NK/9/2025	Penyediaan, Pemanfaatan dan Pengembangan Data Dan / Atau Informasi Statistik Dalam Rangka Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim
14	Pj. Bupati Ogan Komeriing Ulu	No. 144.4/15/IV/2022	a) Pengawasan dan Penanggulangan kebakaran di daerah perbatasan kabupaten/kota, b) Kerja sama antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah, c) Pemantauan dan Evaluasi terhadap kerja sama yang dilakukan daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, d) Penanggulangan Kebakaran didaerah perbatasan
15	Bupati Ogan Komeriing Ilir		
16	Pj. Bupati Muara Enim		
17	Bupati Lahat		
18	Pj. Bupati Musi Banyuasin		
19	Bupati Banyuasin		
20	Bupati Ogan Komeriing Ulu Timur		
21	Bupati Ogan Komeriing Ulu Selatan		
22	Bupati Ogan Ilir		
23	Bupati Empat Lawang		



NO	PIHAK YANG DIAJAK BEKERJASAMA (MITRA KERJASAMA)	LANDASAN KERJASAMA (NO. MOU)	IMPLEMENTASE KERJASAMA (PKS/KEGIATAN/PROGRAM)
24	Bupati Penungkal Abab Lematang Ilir		kabupaten/kota dapat menindaklanjutinya dengan melakukan pola hubungan kerja sama antar organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi kebakaran di daerah, e) Membangun mekanisme kerja sama antar daerah melalui kerja sama dalam pengawasan dan penanggulangan kebakaran agar dapat ditanggulangi secara bersama-sama, f) Melaksanakan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan nota Kesepakatan Bersama diperlukan komitmen Bersama sehingga agenda penanggulangan kebakaran di daerah perbatasan dapat lebih terarah.
25	Bupati Musi Rawas Utara		
26	Walikota Palembang		
27	Walikota Pagaram		
28	Walikota Lubuklinggau		
29	Walikota Prabumulih		
30	Bupati Musi Rawas		
31	Stakholder (Kantor Urusan Agama), Karang Taruna, Tokoh Agama dan Masyarakat	Peninjauan Ulang Standar Pelayanan Kecamatan Lawang Kidul 29.b/27/KPTS/IV/2025	Standar Pelayanan Publik Kecamatan Lawang Kidul
32	Pusat Penelitian Karet Sembawa Sumatera Selatan	No. 119/04/PKS/ DISBUN/IV/2025 / No.021401/SP-PPK/II/ 2025 Tanggal 28 Februari 2025	Diagnosis dan Pengendalian Serangan Penyakit Jamur Akar Putih pada Tanaman Karet
33	Pusat Penelitian Karet Sembawa Sumatera Selatan	No.119/12/IV/2023 / No.1218/PPK/SPKS- MoU/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023	Pengembangan Usaha Tani Komoditas Karet di Kabupaten Muara Enim melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pemanfaatan Teknologi serta Inovasi yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
34	Badan Standarisasi Instrumen Pertanian	No.119/13/IV/2023 / No.722/HK.220/H/09/	Pengembangan Usaha Tani Subsektor Perkebunan di



NO	PIHAK YANG DIAJAK BEKERJASAMA (MITRA KERJASAMA)	LANDASAN KERJASAMA (NO. MOU)	IMPLEMENTASE KERJASAMA (PKS/KEGIATAN/PROGRAM)
		2023 tanggal 06 September 2023	Kabupaten Muara Enim melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Instrumen dan Pemanfaatan Teknologi serta Inovasi yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
35	Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar	Nomor : 134.4/16/PKS/TPHP/I V/2025	Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan melalui Fasilitas, Pendampingan, Budidaya dan Pemasaran Komoditi Pertanian.
		Nomor: 100.3.7.1/33/PKS/TD- 2025	
36	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Nomor 119/21/VI/2025	Sinergi dibidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan Ilmu Pengetahuandan Teknologi serta Invensi dan Inovasi untuk mrnduung Pembangunan di Kabupaten Muara Enim.
		Nomor : 51/I/KS/07/2025	
37	SMPN 1 Gunung Megang	No. 041/207/DPK- 2/2025	-
		No. 420 /250/SMPN.1 GM/2025	
38	MTS AL Muzakir Ujan Mas	No. 000.4/450/DPK- 2/2025	-
		No. 475/MTS.AM/UJ/IX/2 025	
39	MA. AL Muzakir	No. 000.4/448/DPK- 2/2025	-
		No.440/SK/MA- AM/UJ/XX/2025	
40	SMPN 1 Lubai	No. 000.4/449/DPK- 2/2025	-
		No. 421/2/SMPN 1/2025	
41	SMA Negeri I Lembak	No : 134.4/37/SATPOL PP-IV/2025	Satpol PP memberikan penyuluhan dan pembinaan serta sosialisasi yang bersifat tentatif atau sewaktu-waktu baik yang teragenda maupun bersifat inspeksi.



NO	PIHAK YANG DIAJAK BEKERJASAMA (MITRA KERJASAMA)	LANDASAN KERJASAMA (NO. MOU)	IMPLEMENTASE KERJASAMA (PKS/KEGIATAN/PROGRAM)
			Satpol PP melakukan pengawasan kepada pelajar dalam batas kemampuan institusi.
			Pelajar Mematuhi Perda dan Perkada serta siap menjadi duta perda dan perkada Kab.Muara Enim.
42	SMA Negeri I Gelumbang	No : 134.4/35/SATPOL PP-IV/2025	Satpol PP memberikan penyuluhan dan pembinaan serta sosialisasi yang bersifat tentatif atau sewaktu-waktu baik yang teragenda maupun bersifat inspeksi.
			Satpol PP melakukan pengawasan kepada pelajar dalam batas kemampuan institusi.
			Pelajar Mematuhi Perda dan Perkada serta siap menjadi duta perda dan perkada Kab.Muara Enim.
43	SMK Negeri I Gelumbang	No : 134.4/36/SATPOL PP-IV/2025	Satpol PP memberikan penyuluhan dan pembinaan serta sosialisasi yang bersifat tentatif atau sewaktu-waktu baik yang teragenda maupun bersifat inspeksi.
			Satpol PP melakukan pengawasan kepada pelajar dalam batas kemampuan institusi.
			Pelajar Mematuhi Perda dan Perkada serta siap menjadi duta perda dan perkada Kab.Muara Enim.
44	SMA Negeri I Lawang Kidul	No : 134.4/60/SATPOL PP-IV/2025	Satpol PP memberikan penyuluhan dan pembinaan serta sosialisasi yang bersifat tentatif atau sewaktu-waktu baik yang teragenda maupun bersifat inspeksi.
			Satpol PP melakukan pengawasan kepada pelajar



NO	PIHAK YANG DIAJAK BEKERJASAMA (MITRA KERJASAMA)	LANDASAN KERJASAMA (NO. MOU)	IMPLEMENTASE KERJASAMA (PKS/KEGIATAN/PROGRAM)
			dalam batas kemampuan institusi.
			Pelajar Mematuhi Perda dan Perkada serta siap menjadi duta perda dan perkada Kab.Muara Enim.
45	SMA Negeri I Kecamatan Ujan Mas	No : 134.4/61/SATPOL PP-IV/2025	Satpol PP memberikan penyuluhan dan pembinaan serta sosialisasi yang bersifat tentatif atau sewaktu-waktu baik yang teragenda maupun bersifat inspeksi.
			Satpol PP melakukan pengawasan kepada pelajar dalam batas kemampuan institusi.
			Pelajar Mematuhi Perda dan Perkada serta siap menjadi duta perda dan perkada Kab.Muara Enim.
46	Satpol PP Kab. Lahat	No : 300.1.1/063/SATPOL PP-MUARA ENIM/2025	Mengadakan Kerjasama dalam hal penegakan peraturan daerah (Perda) Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam menjaga kondusifitas di daerah wilayah perbatasan Kabupaten /Kota, Serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Satpol PP.
		No : 346/300.1.1/SATPOL PP - LAHAT/2025	
47	Satpol PP Kota Pagar Alam	No : 300.1.1/59/SATPOL PP-MUARA ENIM/2025	Mengadakan Kerjasama dalam hal penegakan peraturan daerah (Perda) Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam menjaga kondusifitas di daerah wilayah perbatasan Kabupaten /Kota, Serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Satpol PP.
		No : 300.1.1/376/SATPOL PP - PAGAR ALAM/2025	



NO	PIHAK YANG DIAJAK BEKERJASAMA (MITRA KERJASAMA)	LANDASAN KERJASAMA (NO. MOU)	IMPLEMENTASE KERJASAMA (PKS/KEGIATAN/PROGRAM)
48	Satpol PP Kota Palembang	No : 300.1.1/57/SATPOL PP-MUARA ENIM/2025 No : 300.1.1/4050/SATPOL PP – PALEMBANG/2025	Mengadakan Kerjasama dalam hal penegakan peraturan daerah (Perda) Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam menjaga kondusifitas di daerah wilayah perbatasan Kabupaten /Kota, Serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Satpol PP.
49	Poltekpar Palembang	Nomor: 074/001/PKS/DPEK/I V/2024 Nomor NK/1p22/HK.07/PTP.5 /2024	Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Pengembangan Sumber daya Manusia, Riset, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian kerja sama ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran ini, sejauh mungkin para pihak akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50	Karang Asam Festival 2025		Pada festival dan event seperti Karang Asam Festival 2025 (yang masuk dalam agenda nasional Karisma Event Nusantara), Dinas Parekraf bekerja sama dengan pelaku UMKM lokal untuk menghadirkan tenant kuliner dan produk kreatif serta memberi ruang promosi bagi usaha mikro.
51	Perum BULOG Kantor Cabang Lahat	PKS Nomor: 31/DISPERINDAGESD M/2025	Pelaksanaan Kegiatan Sembako Murah Membara Tahun 2025, meliputi penyediaan dan distribusi komoditas kebutuhan



NO	PIHAK YANG DIAJAK BEKERJASAMA (MITRA KERJASAMA)	LANDASAN KERJASAMA (NO. MOU)	IMPLEMENTASE KERJASAMA (PKS/KEGIATAN/PROGRAM)
		Nomor BULOG: PK-002/0601.11.2025	pokok (beras, gula pasir, minyak goreng) bersubsidi pada 22 titik kecamatan di Kabupaten Muara Enim sebagai upaya pengendalian inflasi dan stabilisasi harga bahan pokok
52	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar	PKS Nomor: 134.4/15/PKS/DISPERI NDAG ESDM-2/IV/2025 Nomor: 100.3.7.1/34/PKS/TD-2025	Kerja sama Stabilisasi Harga dan Pendistribusian Kebutuhan Bahan Pangan, meliputi pertukaran data dan informasi perdagangan, misi dagang, temu bisnis, promosi produk unggulan daerah, serta dukungan pengembangan UMKM dan distribusi pangan antardaerah
53	Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat	PKS Nomor: 134.4/15/PKS/DISPERI NDAG ESDM-02/IV/2025 Nomor: 100/38/PKS/KERJA SAMA-2025	Kerja sama Penguatan Bidang Perdagangan, meliputi misi dagang, temu bisnis, pengembangan SDM sektor perdagangan, pertukaran data dan informasi, promosi, pameran, serta pengendalian inflasi daerah melalui sinergi program perdagangan antardaerah
54	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim	900/09/Bapenda-I/2019	Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah secara Online Pemerintah Kabupaten Muara Enim
55	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Muara Enim	900/35/BPKAD-2/2019	
53	PT Pos Indonesia (Persero)	010/MRE/1/B/ 2019 25/REG3/JKRJ/HK/0119	
54	Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim	900/09/Bapenda-I/2019 92/180.2-16.03/1/2019	Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Muara Enim
55	Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim	35/MOU/Bappeda/2019	Kerja Sama di Bidang Pertanahan



NO	PIHAK YANG DIAJAK BEKERJASAMA (MITRA KERJASAMA)	LANDASAN KERJASAMA (NO. MOU)	IMPLEMENTASE KERJASAMA (PKS/KEGIATAN/PROGRAM)
		269/100-16.03/V/2019	
56	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	Kep-329/WPJ.03/ 2019 34/MOU/Bappeda/ 2019	Koordinasi dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi
57	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih	Kep.068/WPJ.03/KP/20 19 970/60/Bapenda- I/PKS/2019	Koordinasi dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pusat, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
58	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Muara Enim	900/43/BapendaI/ 2019	Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Pemerintah Kabupaten Muara Enim secara Online
59	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Muara Enim	900/96/BPKAD-2/ 2019 B.7070-KC-IV/12/ 2019	
60	Bank Sumselbabel Cabang Muara Enim	028/1612/Bapenda- TU/2024 033/PKS/MRE/XI/202 4	Perjanjian Perpanjangan Sewa Sebagian Ruangan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim untuk Kantor Kas dan Mesin ATM PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Muara Enim
61	Lembaga Pelatihan Kerja D'Sakura Cendekia Ogan Komerling Ilir	Nomor: 591/DSC/MOU/II/202 5 Nomor: 560/16/Disnakertrans- ME/2025	Perjanjian Kesepakatan Bersama Antara Lembaga Pelatihan Kerja D'sakura Cendekia Ogan Komerling Ilir Dengan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim Tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pelatihan dan Bimbingan Praseleksi Pemagangan Ke Jepang
62	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan	No. Pihak Kesatu: 500.4.3.11/4794/Dishut. II/2025 No. Pihak Kedua: 074/441/PKS/DISPER KIMTAN- IV/2025	Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pemasangan Jaringan Distribusi Listrik Masuk Desa di Desa Padang Bindu, Desa Aur Duri, Desa Suban Jeriji, Desa Bangun Sari, Desa Pagar Gunung, Desa Sugihan dan Desa Aur Melalui Mekanisme Persetujuan Kerja Sama, Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) di



NO	PIHAK YANG DIAJAK BEKERJASAMA (MITRA KERJASAMA)	LANDASAN KERJASAMA (NO. MOU)	IMPLEMENTASE KERJASAMA (PKS/KEGIATAN/PROGRAM)
			Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.
63	Pokiteknik Keuangan Negara STAN	PRJ-108/PKN/2025 119/18/PKS/BKPSDM /IV/2025	Program Pembibitan Calon Aparatur Sipil Negara Di Bidang Keuangan Negara Melalui Penyelenggaraan Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Program Studi Manajemen Keuangan Negara, dan Program Studi Manajemen Aset Publik Program Sarjana Terapan Penerimaan Tahun 2025
64	Badan Pengelola Usaha Universitas Sriwijaya	100.3.7/825/BKPSDM- 3/2025 0861/UN9/SB2.BPU/20 25	Kegiatan Penelitian Workload Analysis (WLA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Untuk Kebutuhan Tenaga Outsourcing, Driver, Cleaning Service, dan Security di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim
65	Badan Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan	100.3.7/5757/BKPSDM- 4/2025 100.3.7/534.C/Bapelkes. II/XI/2025	Diklat Manajemen Puskesmas Diklat Kader Posyandu Diklat Komunikasi Publik SDM RSUD Diklat Komunikasi Publik SDM Puskesmas Diklat Pemberian Makanan Bayi dan anak Diklat Pencegahan dan pengendalian infeksi
66	Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Sumatera Selatan	100.3.7/754/BKPSDM- 4/2025 0162/B7.11/KP/2025	Diklat Pengembangan Media Pembelajaran Bagi Guru Angkatan I Diklat Pengembangan Media Pembelajaran Bagi Guru Angkatan II Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam melaksanakan layanan Bimbingan dan Konseling.



NO	PIHAK YANG DIAJAK BEKERJASAMA (MITRA KERJASAMA)	LANDASAN KERJASAMA (NO. MOU)	IMPLEMENTASE KERJASAMA (PKS/KEGIATAN/PROGRAM)
			Pembuatan Konten Media Sosial yang Edukatif bagi Guru dan Tenaga Kependidikan.
			Peningkatan Kompetensi Guru dalam mengintegrasikan pendekatan pembelajaran mendalam (Deep Learning) di Kelas.
67	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuk Linggau	893.4/15/BKPSDM-4/2025 800.2.1/117/BKPSDM-LLG/2025	Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan I Tahun 2025 dari Kabupaten Muara Enim
68	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuk Linggau	893.4/15/BKPSDM-4/2025 800.2.1/117/BKPSDM-LLG/2025	Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan I Tahun 2025 dari Kabupaten Muara Enim
69	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuk Linggau	893.4/41/BKPSDM-4/2025 800.2.1/476/BKPSDM-LLG/2025	Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Angkatan I Tahun 2025 dari Kabupaten Muara Enim
70	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuk Linggau	893.4/42/BKPSDM-4/2025 800.2.1/477/BKPSDM-LLG/2025	Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Angkatan II Tahun 2025 dari Kabupaten Muara Enim
71	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuk Linggau	893.4/43/BKPSDM-4/2025 800.2.1/478/BKPSDM-LLG/2025	Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Angkatan III Tahun 2025 dari Kabupaten Muara Enim
72	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuk Linggau	893.4/44/BKPSDM-4/2025 800.2.1/479/BKPSDM-LLG/2025	Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II Angkatan IV Tahun 2025 dari Kabupaten Muara Enim
73	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuk Linggau	893.4/746/BKPSDM-4/2025 800.2.1/503/BKPSDM-LLG/2025	Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan III Tahun 2025 dari Kabupaten Muara Enim
74	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuk Linggau	893.4/747/BKPSDM-4/2025 800.2.1/504/BKPSDM-LLG/2025	Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan III Tahun 2025 dari Kabupaten Muara Enim
75	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuk Linggau	893.4/748/BKPSDM-4/2025 800.2.1/505/BKPSDM-LLG/2025	Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Angkatan III Tahun 2025 dari Kabupaten Muara Enim



NO	PIHAK YANG DIAJAK BEKERJASAMA (MITRA KERJASAMA)	LANDASAN KERJASAMA (NO. MOU)	IMPLEMENTASE KERJASAMA (PKS/KEGIATAN/PROGRAM)
76	Universitas Sriwijaya	Kesepakatan Bersama antara Universitas Sriwijaya dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Iptek, Inovasi, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Nomor: 0051/UN9/MoU/DN/2024 dan Nomor: 074/21/IV/2024	Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Penanaman Modal pada Aplikasi PIR dan Penyusunan Peluang Investasi Industri Pengolahan Daun Serat Nanas di Kabupaten Muara Enim oleh Tim Tenaga Ahli dari Badan Pengelola Usaha (BPU) Universitas Sriwijaya
77	Universitas Sriwijaya	Kesepakatan Bersama antara Universitas Sriwijaya dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Iptek, Inovasi, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Nomor: 0051/UN9/MoU/DN/2024 dan Nomor: 074/21/IV/2024	Penyusunan Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Hilirisasi Kopi di Kabupaten Muara Enim oleh Tim Tenaga Ahli dari Badan Pengelola Usaha Universitas Sriwijaya
78	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan	Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim



NO	PIHAK YANG DIAJAK BEKERJASAMA (MITRA KERJASAMA)	LANDASAN KERJASAMA (NO. MOU)	IMPLEMENTASE KERJASAMA (PKS/KEGIATAN/PROGRAM)
		Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim Nomor: 563/DPMPSTSP-2/2025 dan Nomor: W.6-H.04.05-0243	
79	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Kesepakatan Bersama antara Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Nomor: B-020/Un.09/5.1/HM.01/03//2025 dan Nomor: 074/07/IV/2025 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengembangan Iptek, Inovasi, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tentang Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2025 Nomor: 640/DPMPSTSP-2/2025 dan Nomor: B-1640/UIN.09/IU2/PP.09/10/2025	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Muara Enim 2025-2045 yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RTRW, RDTR) serta arah kebijakan investasi nasional (RPJPN, NSPK dari BKPM / Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku serta sesuai koridor ekonomi wilayah penanaman modal



NO	PIHAK YANG DIAJAK BEKERJASAMA (MITRA KERJASAMA)	LANDASAN KERJASAMA (NO. MOU)	IMPLEMENTASE KERJASAMA (PKS/KEGIATAN/PROGRAM)
80	Universitas Sriwijaya	Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Kerjasama) antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim dengan Badan Pengelola Usaha Universitas Sriwijaya tentang Kegiatan Penilaian TOP 10 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal Sub Sub Kegiatan Penilaian LKPM Tahun 2025 Nomor: 557/DPMPTSP-3/2025 dan Nomor: 0620/UN9/SB2.BPU/2025	Penilaian TOP 10 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Pelaku Usaha Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 pada Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah/Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal Sub Kegiatan Penilaian LKPM Tahun 2025
81	Fakultas Ekonomi dan Hukum Universitas Serasan	Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Kerjasama) antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim dengan Fakultas Ekonomi dan Hukum Universitas Serasan tentang Kegiatan Penilaian TOP 10 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal Sub Sub Kegiatan Penilaian LKPM Tahun 2025 Nomor: 552/DPMPTSP-	Penilaian TOP 10 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Pelaku Usaha Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 pada Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah/Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal Sub Kegiatan Penilaian LKPM Tahun 2025



NO	PIHAK YANG DIAJAK BEKERJASAMA (MITRA KERJASAMA)	LANDASAN KERJASAMA (NO. MOU)	IMPLEMENTASE KERJASAMA (PKS/KEGIATAN/PROGRAM)
		3/2025 dan Nomor: 16.014/UNSAN/VII/20 25	
82	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan	Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak Kerjasama) antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muara Enim dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Kegiatan Penilaian TOP 10 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal Sub Sub Kegiatan Penilaian LKPM Tahun 2025 Nomor: 561/DPMPSTP- 3/2025	Penilaian TOP 10 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Pelaku Usaha Kabupaten Muara Enim Tahun 2025 pada Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah/Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal Sub Sub Kegiatan Penilaian LKPM Tahun 2025
83	Pemkab Muara Enim dengan PT. Bukit Asam Tbk, Bank Sumsel Babel, Bank Perseroda, Kamar Dagang dan Industri Kab. Muara Enim dan Karang Taruna Kab. Muara Enim.	Nomor : 119/11/IV/2025	Kolaborasi Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Muara Enim
84	Universitas Serasan	Nomor 074/027/IV/2024; Nomor 16.008/UNSAN/XI/ 2024	Kajian Optimalisasi Nilai Tambah Kopi Semende sebagai Komoditas Khas Kabupaten Muara Enim
85	Universitas Sriwijaya	Nomor 0051/UN9/MoU/DN/2 024; Nomor 074/21/IV/2024	Kajian Sentra Produksi Ikan Tembakang (<i>Helostoma temminckii</i>) dan Diversifikasi Produk Bernilai Ekonomis



NO	PIHAK YANG DIAJAK BEKERJASAMA (MITRA KERJASAMA)	LANDASAN KERJASAMA (NO. MOU)	IMPLEMENTASE KERJASAMA (PKS/KEGIATAN/PROGRAM)
86	Institut Teknologi Sumatera	Nomor 27/IT9/HK.07.00/2025; Nomor 074/01/IV/2025	Kajian Pengelolaan Sampah Rumah Tangga pada Perumahan di Wilayah Kelurahan Air Lintang dan Desa Muara Lawai Kecamatan Muara Enim
87	Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang	Nomor 074/07/IV/2025; Nomor B- 020/Un.09/5.1/HM.01/ 03/2025	Kajian Peran Perempuan dalam Pembangunan Pemerintahan di Kabupaten Muara Enim
88	Universitas Pendidikan Indonesia	Nomor 074/008/IV/2024; Nomor 296/UN40/HK.07.00/ 2024	Kajian Analisis Rata-rata Lama Sekolah dan Implikasinya terhadap Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Muara Enim
89	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Nomor 119/21/IV/2025; Nomor 51/1/KS/07/2025	Kajian Strategi Pengentasan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem melalui Pendekatan Sosial Kemasyarakatan dan Kebijakan Daerah Pengembangan Sistem Manajemen Pengetahuan untuk Inovasi Daerah
			Pengkajian Teknologi Budidaya Padi Presisi Spesifik Lokasi di Lahan Rawa Lebak Mendukung Muara Enim Lumbung Pangan
			Desa <i>Pilot Project</i> / Desa Percontohan Pengembangan MPS-100
			Pra-Kajian Desa Inovasi Berbasis <i>One Village One Product</i> dengan Pendekatan klaster <i>industry</i>
			Riset Optimalisasi Pembuatan Pupuk Berbahan <i>Fly Ash Bottom Ash</i> (FABA) dan Pendampingan Persiapan Sertifikasi Nasional Indonesia Untuk Produk Pupuk Dengan Bahan FABA
90	Politeknik Transportasi Darat Indonesia – STTD	Nomor : HK.201/12/8/PTDI- STTD/2025 Nomor : 119/1342/DISHUB/IV/	Pemenuhan kebutuhan ASN yang memiliki kompetensi teknis di bidang Transportasi Darat melalui proses Diklat. Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



NO	PIHAK YANG DIAJAK BEKERJASAMA (MITRA KERJASAMA)	LANDASAN KERJASAMA (NO. MOU)	IMPLEMENTASE KERJASAMA (PKS/KEGIATAN/PROGRAM)
		2 025	Kabupaten/Kota Kegiatan : Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
91	UIN Raden Fatah	420/956/Dikbud.ME- 6/2025	Kemitraan Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam
92	SEAMO BIOTROP	420/649/Disdikbud.ME -6/2025	Peningkatan Kualitas Pendidik, Tenaga Kependidikan dan siswa di Bidang Bioteknologi, Lingkungan dan Pertanian Berkelanjutan
93	SEAMEO QITEP	420/034/Dikbud.ME- 6/2025	Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Di Bidang Matematika
94	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	420/397/DISDIKNUD. ME-1/2025	Kerjasama Bidang Pendidikan
95	SEAMEO QITEP IN LANGUAGE	420/648/DISDIKBUD. ME-6/2025	Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan dibidang Bahasa dan Literasi
96	BPJS Kesehatan		Peningkatan Pelayanan Kesehatan
97	Bank Sumsel Babel		Pengelolaan Manajemen Keuangan dan Kas RSUD dr. H. Mohamad Rabain serta kemitraan dalam penunjang urusan kepegawaian.
98	Dinas Kesehatan (Puskesmas di Kecamatan Kabupaten Muara Enim)	400.13.1/63/PKS/DPPK B-2/XI.2025	Kegiatan Pelayanan KB
99	RSUD Dr.H.M. Rabain Muara Enim	400.13.1/89/PKS/DPPK B-2/XI/2025	Kegiatan Pelayanan KB
100	Klinik Polres Muara Enim	400.13.1/97/PKS/DPPK B-2/XI/2025	Kegiatan Pelayanan KB
101	RSU SDL	400.13.1/90/PKS/DPPK B-2/XI/2025	Kegiatan Pelayanan KB
102	RS Karuniah Indah Medika	400.13.1/88/PKS/DPPK B-2/XI/2025	Kegiatan Pelayanan KB
103	Rumkitban 02.09.01	400.13.1/95/PKS/DPPK B-2/XI/2025	Kegiatan Pelayanan KB
104	RSUD Gelumbang	400.13.1/94/PKS/DPPK B-2/XI/2025	Kegiatan Pelayanan KB
105	Polkes 02.10.04	400.13.1/96/PKS/DPPK B-2/XI/2025	Kegiatan Pelayanan KB



NO	PIHAK YANG DIAJAK BEKERJASAMA (MITRA KERJASAMA)	LANDASAN KERJASAMA (NO. MOU)	IMPLEMENTASE KERJASAMA (PKS/KEGIATAN/PROGRAM)
106	Rumah Sakit Bukit Asam Medika	400.13.1/93/PKS/DPPK B-2/XI/2025	Kegiatan Pelayanan KB
107	RS Umum Trijaya Medical Center	400.13.1/92/PKS/DPPK B-2/XI/2025	Kegiatan Pelayanan KB
108	RSUD Lubai Ulu	400.13.1/91/PKS/DPPK B-2/XI/2025	Kegiatan Pelayanan KB
109	BPJS Kesehatan	Nomor: 440/3976/Dinkes II/XII/2025 dan Nomor: 176/KTR/III-03/1225	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Kabupaten Muara Enim dalam Rangka Universal Health Coverage.
110	RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang	Nomor: HK.03.01/D.XVIII/39/2025 dan Nomor: 468/Dinkes-V/I/2025	Pemeriksaan sampel darah tumit pada bayi baru lahir dengan tujuan melakukan skrining kelainan kongenital pada bayi baru lahir jenis pemetiksaannya skrining hypotitoid kongenitaln (SHK) Skrining kelainan ginjal (SHAK) dan skrining kelainan atau defisiensi hormon G6PD hormon posfor.
111	PT. Kenali Indah Sejahtera	Nomor: 71/KIS-MOU/IV/2025	Pengangkutan dan Pemusnahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
112	PT. Informedia Nusantara	Nomor: 440/074/Dinkes-II/I/2025	Call Center PSC 119
113	LPA LASKESI	Nomor: 001/Dinkes-LASKESI/XII/2025	Pelaksanaan Survei Akreditasi Puskesmas
114	RSU Trijaya Tanjung Enim	Nomor: 002/SPK/RSUTMC/I/2025	Program HIV
115	RS Ibu dan Anak Muara Enim	Nomor: 004/PKS/RS-KIM/2025	Program HIV
116	Klinik Amalia Tanjung Enim	Nomor: 004/KA/A/I/2025	Program HIV
117	Lapas Kelas II Muara Enim	Nomor: W6.PAS9PK010703-948	Program HIV
118	Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Enim	Nomor: W6.PK.01.07.03 - 1011 dan Nomor: 440/2270/DINKES-III/VIII/2025	Program Penanggulangan Tuberkulosis di Lapas Kelas IIB Muara Enim Wilayah Kabupaten Muara Enim
119	Madrasah Tsanawiyah Negeri I Muara Enim	Nomor:100.3.7.1/DPPP A-1/2025	



NO	PIHAK YANG DIAJAK BEKERJASAMA (MITRA KERJASAMA)	LANDASAN KERJASAMA (NO. MOU)	IMPLEMENTASE KERJASAMA (PKS/KEGIATAN/PROGRAM)
	(MTS Negeri I Muara Enim)	Nomor:B270/MTs.06.14.01/PP.00.5/01/2025	Pembinaan dan Kerjasama dalam Bidang Pendidikan Menuju Madrasah Ramah Anak
120	Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP)	Nomor:573/DPPPA-5/VIII/2025 Nomor:291/LPPSP/A-2/VIII/2025	Penyusunan Buku Profil Gender dan Buku Profil Anak Kabupaten Muara Enim Tahun 2025
121	SK Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Muara Enim	Nomor:064/KPTS/DPP PA-4/2025	Pembentukan Tim Kegiatan Isbat Nikah Massal Kabupaten Muara Enim
122	Pengadilan Agama Muara Enam I B	Nomor:100.3.7.1/767PKS/DPPPA/IX/2025 Nomor:1463/KPA.W6-A5/HK2-6/IX/2025	Kemitraan Penyelenggaraan Kegiatan Isbat Nikah Terpadu (Isbat Nikah Massal)
123	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ICMI Peduli Muara Enim	Nomor:100.3.7.1/088/DPPPA-3/I/2025 Nomor:07/YLBH-ICMI.ME/I/2025	Pendampingan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
124	Yayasan Mutiara Tanjung Enim	Nomor:100.3.7.1/089/DPPPA-3/I/2025 Nomor:02a/I/YMT/2025	Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
125	Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muara Enim	Nomor:PKS/005/VIII/KA/PC/2024/BNNK Nomor:100/284/DPPPA/2024	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
126	Ikatan Psikolog Klinis Indonesia Wilayah Sumatera Selatan	Nomor:100.3.7.1/1039/DPPPA-3/XII/2025 Nomor:144/IPKIIndonesiaWilayahSumsel/XII/2025	Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah Kabupaten Muara Enim
127	Polisi Resort Muara Enim	Nomor:SP/2/IV/HUK8.1/2025/ResMuaraEnim Nomor:100/3.7.1/199/DPPPA-3/IV/2025	Perlindungan Perempuan dan Anak
128	Lembaga Pemasarakatan Kelasa II B Muara Enim	Nomor: WP.6.UM.01.01-286 Nomor:100.3.7.1/140/DPPPA-3/III/2025	Penanganan Perempuan dan Anak yang Berhadapan



NO	PIHAK YANG DIAJAK BEKERJASAMA (MITRA KERJASAMA)	LANDASAN KERJASAMA (NO. MOU)	IMPLEMENTASE KERJASAMA (PKS/KEGIATAN/PROGRAM)
129	Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Mohamad Rabain	Nomor:100.3.7.1/087/D PPPA-3/I/2025 Nomor:440/03.b/ PKS/ RSUD-4/I/2025	Pelayanan Kesehatan bagi Korban Perempuan dan Anak
130	BPU UNSRI	Kesepakatan Kerjasama antara Pemkab Muara Enim dan Unsri No.0051/UN9/MOU/D N/2024 tanggal 14 Oktober 2024	PKS No. 1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
131	BPU UNSRI	005/UN9/MoU/DN/20 24 dan Nomor 074/21/IV/2024	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG)

3. Permasalahan dan Solusi

Secara umum, pelaksanaan kerjasama dengan instansi vertikal tidak ada kendala atau permasalahan yang berarti. Hal ini tentunya tidak lepas dari koordinasi, kerjasama dan dukungan dari semua pihak mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kerjasama.

4.2.4. Pembinaan Batas Wilayah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah bahwa untuk memantapkan penyelesaian batas wilayah pada tingkat Kabupaten, maka Pemerintah Kabupaten telah membentuk Tim Penyelesaian Batas Daerah (TPBD) Kabupaten Muara Enim yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Muara Enim setiap tahunnya.

A. Realisasi dan Kegiatan

Penataan batas wilayah Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan antara lain melalui penelitian dokumen, pelacakan, pengukuran, pemasangan pilar batas permanen (apabila sepakat), pembuatan peta batas dan deskripsi pilar batas (apabila sepakat). Kabupaten Muara Enim memiliki 11 Segmen batas yang berbatasan dengan kabupaten /Kota lainnya. Segmen batas Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten/Kota yang sudah dalam bentuk Permendagri terdapat 9 Segmen yaitu:



- 1) Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan berbatasan dengan **Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu** (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 102 Tahun 2017)

- Kecamatan Semende Darat Laut

- 2) Kabupaten Muara Enim berbatasan dengan **Kabupaten Lahat** (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2019)

Khusus Segmen batas Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Lahat, Berdasarkan Permendagri No. 111 Tahun 2019, terdapat 7 Sub segmen sebagai berikut:

- Kecamatan Muara Enim
- Kecamatan Ujan Mas
- Kecamatan Lawang Kidul
- Kecamatan Tanjung Agung
- Kecamatan Panang Enim
- Kecamatan Semende Darat Laut
- Kecamatan Semende Darat Tengah

Khusus segmen Kabupaten Muara Enim berbatasan dengan Kabupaten Lahat. Permendagri No. 111 Tahun 2019 diwilayah Kecamatan Muara Enim dengan Merapi Timur Kab. Lahat telah dilaksanakan pemasangan pilar permanen tugu batas sebanyak 12 Tugu/pilar pada tahun 2022 oleh Kabupaten Muara Enim.

- 3) Kabupaten Muara Enim berbatasan dengan **Kabupaten OKU** (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2019) Segmen batas Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten terdapat 7 Sub segmen sebagai berikut:

- Kecamatan Tanjung Agung
- Kecamatan Panang Enim
- Kecamatan Semende Darat Laut
- Kecamatan Semende Darat Tengah
- Kecamatan Semende Darat Ulu
- Kecamatan Lubai Ulu
- Kecamatan Lubai

Khusus Segmen Kabupaten Muara Enim berbatasan dengan Kabupaten OKU (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 65 Tahun 2019) telah dilaksanakan pemasangan Pilar Permanen Tugu batas sebanyak 12 Tugu/pilar pada tahun 2023 oleh Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten OKU di Wilayah Kecamatan Semende Darat Laut dengan Kecamatan Ulu Ogan.



- 4) Kabupaten Muara Enim berbatasan dengan **Musi Rawas** (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 45 tahun 2017) Segmen batas Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Musi Rawas terdapat 2 Sub segmen sebagai berikut:
- Kecamatan Ujan Mas
 - Kecamatan Benakat
- 5) Kabupaten Muara Enim berbatasan dengan **Kabupaten Pali** (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2019) Segmen batas Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Pali, berdasarkan terdapat 6 Sub segmen sebagai berikut:
- Kecamatan Gunung Megang
 - Kecamatan Benakat
 - Kecamatan Belimbing
 - Kecamatan Empat Petulai Dangku
 - Kecamatan Lembak
 - Kecamatan Sungai Rotan
- 6) Kabupaten Muara Enim berbatasan dengan **Kota Palembang** (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 31 Tahun 2018). Segmen batas Kabupaten Muara Enim dengan Kota Palembang terdapat 1 Sub segmen sebagai berikut:
- Kecamatan Muara Belida
- 7) Kabupaten Muara Enim berbatasan dengan **Kabupaten Banyu Asin** (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 95 Tahun 2022). Segmen batas Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Banyu Asin, terdapat 3 Sub segmen sebagai berikut:
- Kecamatan Muara Belida
 - Kecamatan Gelumbang
 - Kecamatan Sungai Rotan

Khusus Segmen Kabupaten Muara Enim berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin. (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 95 Tahun 2022) tahap Proses pemasangan Pilar Permanen Tugu batas sebanyak 36 Tugu/pilar pada tahun 2023 (APBDP 2023) oleh Kabupaten Muara Enim berbatas dengan Kabupaten Banyuasin di Wilayah Kecamatan Muara Belida dengan Kecamatan Rantau Bayur.



- 8) Kabupaten Muara Enim berbatasan dengan **Kota Pagar Alam** (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 133 Tahun 2022) Segmen batas Kabupaten Muara Enim dengan Kota Pagar Alam, terdapat 2 Sub segmen sebagai berikut:
- Kecamatan Semende Darat Tengah
 - Kecamatan Semende Darat Ulu
- 9) Kabupaten Muara Enim berbatasan dengan **Kabupaten Ogan Komeriing Ulu Selatan (OKUS)** (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2022)

Segmen batas Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten /Kota yang dalam tahapan Draf Permendagri ada Dua (2) Segmen yaitu:

1) Kota Prabumulih

Segmen batas Kabupaten Muara Enim dengan Kota Prabumulih (Draf Peraturan Menteri Dalam Negeri No Tahun 2022) terdapat 5 Sub segmen sebagai berikut:

- Kecamatan Empat Petulai Dangku
- Kecamatan Rambang Niru
- Kecamatan Rambang
- Kecamatan Belida Darat
- Kecamatan Lembak

2) Kabupaten Ogan Ilir (OI)

Segmen batas Kabupaten Muara Enim dengan Kabupaten Ogan Ilir (OI) (Dalam proses Peraturan Menteri Dalam Negeri). Terdapat 5 Sub segmen sebagai berikut:

- Kecamatan Muara Belida
- Kecamatan Gelumbang
- Kecamatan Kelekar
- Kecamatan Belida Darat
- Kecamatan Lubai

Khusus Segmen Batas Kecamatan dalam **Kabupaten Muara Enim**

1) Kecamatan Muara Enim

- Kecamatan Muara Enim berbatas dengan Kecamatan Ujan Mas
- Kecamatan Muara Enim berbatas dengan Kabupaten Lahat
- Kecamatan Muara Enim berbatas dengan Kecamatan Lawang Kidul



- Kecamatan Muara Enim berbatas dengan Kecamatan Gunung Megang
- 2) Kecamatan Ujan Mas
- Kecamatan Ujan Mas berbatas dengan Kecamatan Benakat
 - Kecamatan Ujan Mas berbatas dengan Kecamatan Muara Enim
 - Kecamatan Ujan Mas berbatas dengan Kecamatan Gunung Megang
 - Kecamatan Ujan Mas berbatas dengan Kabupaten Musirawas
- 3) Kecamatan Lawang Kidul
- Kecamatan lawang Kidul berbatas dengan Kecamatan Muara Enim
 - Kecamatan lawang Kidul berbatas dengan Kabupaten Lahat
 - Kecamatan lawang Kidul berbatas dengan Kecamatan Rambang Niru
 - Kecamatan lawang Kidul berbatas dengan Kecamatan Tanjung Agung
 - Kecamatan lawang Kidul berbatas dengan Kecamatan Gunung Megang
- 4) Kecamatan Tanjung Agung
- Kecamatan Tanjung Agung berbatas dengan Kecamatan Lawang Kidul
 - Kecamatan Tanjung Agung berbatas dengan Kecamatan Panang Enim
 - Kecamatan Tanjung Agung berbatas dengan Kabupaten OKU
 - Kecamatan Tanjung Agung berbatas dengan Kecamatan Lubai Ulu
- 5) Kecamatan Panang Enim
- Kecamatan Panang Enim berbatas dengan Kecamatan Tanjung Agung
 - Kecamatan Panang Enim berbatas dengan Kecamatan Semende Darat Laut
 - Kecamatan Panang Enim berbatas dengan Kabupaten OKU
 - Kecamatan Panang Enim berbatas dengan Kabupaten Lahat



- 6) Kecamatan Semende Darat Laut
- Kecamatan Semende Darat Laut berbatas dengan Kecamatan Semende Darat Tengah
 - Kecamatan Semende Darat Laut berbatas dengan Kecamatan Panang Enim
 - Kecamatan Semende Darat Laut berbatas dengan Kabupaten Lahat
 - Kecamatan Semende Darat Laut berbatas dengan Kabupaten OKU
- 7) Kecamatan Semende Darat Tengah
- Kecamatan Semende Darat Tengah dengan Kecamatan Semende Darat Laut
 - Kecamatan Semende Darat Tengah dengan Kecamatan Semende Darat Ulu
 - Kecamatan Semende Darat Tengah berbatas dengan Kabupaten Lahat
 - Kecamatan Semende Darat Tengah berbatas dengan Kabupaten OKU
- 8) Kecamatan Semende Darat Ulu
- Kecamatan Semende Darat Ulu berbatas dengan Kecamatan Semende Darat Tengah
 - Kecamatan Semende Darat Ulu berbatas dengan Kabupaten Lahat
 - Kecamatan Semende Darat Ulu berbatas dengan Kabupaten OKUS
 - Kecamatan Semende Darat Ulu berbatas dengan Kabupaten OKU
 - Kecamatan Semende Darat Ulu berbatas dengan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu
 - Kecamatan Semende Darat Ulu berbatas dengan Kota Pagar Alam
- 9) Kecamatan Benakat
- Kecamatan Benakat berbatas dengan Kecamatan Ujan Mas
 - Kecamatan Benakat berbatas dengan Kecamatan Gunung Megang
 - Kecamatan Benakat berbatas dengan Kabupaten Pali
 - Kecamatan Benakat berbatas dengan Kabupaten Musi Rawas



10) Kecamatan Gunung Megang

- Kecamatan Gunung Megang berbatas dengan Kecamatan Benakat
- Kecamatan Gunung Megang berbatas dengan Kecamatan Muara Enim
- Kecamatan Gunung Megang berbatas dengan Kecamatan Belimbing
- Kecamatan Gunung Megang berbatas dengan Kecamatan Rambang Niru
- Kecamatan Gunung Megang berbatas dengan Ujan Mas
- Kecamatan Gunung Megang berbatas dengan Kecamatan Lawang Kidul
- Kecamatan Gunung Megang berbatas dengan Kabupaten Pali

11) Kecamatan Belimbing

- Kecamatan Belimbing berbatas dengan Kecamatan Rambang Niru
- Kecamatan Belimbing berbatas dengan Kecamatan Gunung Megang
- Kecamatan Belimbing berbatas dengan Kecamatan Empat Petulai Dangku
- Kecamatan Belimbing berbatas dengan Kabupaten Pali

12) Kecamatan Rambang Niru

- Kecamatan Rambang Niru berbatas dengan Belimbing
- Kecamatan Rambang Niru berbatas dengan Rambang
- Kecamatan Rambang Niru berbatas dengan Kecamatan Gunung Megang
- Kecamatan Rambang Niru berbatas dengan Kecamatan Lawang Kidul
- Kecamatan Rambang Niru berbatas dengan Kecamatan Tanjung Agung
- Kecamatan Rambang Niru berbatas dengan Lubai Ulu
- Kecamatan Rambang Niru berbatas dengan Empat Petulai Dangku
- Kecamatan Rambang Niru berbatas dengan Kota Prabumulih



13) Kecamatan Rambang

- Kecamatan Rambang berbatas dengan Kecamatan Rambang Niru
- Kecamatan Rambang berbatas dengan Kecamatan Lubai
- Kecamatan Rambang berbatas dengan Kecamatan Lubai Ulu
- Kecamatan Rambang berbatas dengan Kota Prabumulih

14) Kecamatan Lubai

- Kecamatan Lubai berbatas dengan Kecamatan Lubai Ulu
- Kecamatan Lubai berbatas dengan Kecamatan Rambang
- Kecamatan Lubai berbatas dengan Kota Prabumulih
- Kecamatan Lubai berbatas dengan Kecamatan Kabupaten OI
- Kecamatan Lubai berbatas dengan Kabupaten OKU

15) Kecamatan Lubai Ulu

- Kecamatan Lubai Ulu berbatas dengan Kecamatan Lubai
- Kecamatan Lubai Ulu berbatas dengan Kecamatan Rambang
- Kecamatan Lubai Ulu berbatas dengan Kecamatan Tanjung Agung
- Kecamatan Lubai Ulu berbatas dengan Kecamatan Rambang Niru
- Kecamatan Lubai Ulu berbatas dengan Kabupaten OKU

16) Kecamatan Empat Petulai Dangku

- Kecamatan Empat Petulai Dangku berbatas dengan Kecamatan Belimbing
- Kecamatan Empat Petulai Dangku berbatas dengan Kecamatan Rambang Niru
- Kecamatan Empat Petulai Dangku berbatas dengan Kabupaten Pali
- Kecamatan Empat Petulai Dangku berbatas dengan Kota Prabumulih

17) Kecamatan Lembak

- Kecamatan Lembak berbatas dengan Kecamatan Sungai Rotan
- Kecamatan Lembak berbatas dengan Kecamatan Gelumbang
- Kecamatan Lembak berbatas dengan Kecamatan Kelekar
- Kecamatan Lembak berbatas dengan Kecamatan Belide Darat
- Kecamatan Empat Petulai Dangku berbatas dengan Kabupten Pali



- Kecamatan Empat Petulai Dangku berbatas dengan Kota Prabumulih

18) Kecamatan Belide Darat

- Kecamatan Belide Darat berbatas dengan Kecamatan Lembak
- Kecamatan Belide Darat berbatas Dengan Kecamatan Kelekar
- Kecamatan Belide Darat berbatas Dengan Kabupaten OI
- Kecamatan Empat Petulai Dangku berbatas Dengan Kota Prabumulih

19) Kecamatan Sungai Rotan

- Kecamatan Sungai Rotan berbatas dengan Kecamatan Gelumbang
- Kecamatan Sungai Rotan berbatas dengan Kecamatan Lembak
- Kecamatan Sungai Rotan berbatas dengan Kabupaten Pali
- Kecamatan Sungai Rotan berbatas dengan Kabupaten Banyu Asin

20) Kecamatan Gelumbang

- Kecamatan Gelumbang Dengan Kecamatan Sungai Rotan
- Kecamatan Gelumbang Dengan Kecamatan Lembak
- Kecamatan Gelumbang dengan Kecamatan Muara Belida
- Kecamatan Gelumbang dengan Kecamatan Kelekar
- Kecamatan Gelumbang Dengan Kabupaten Banyu Asin
- Kecamatan Gelumbang Dengan Kabupaten OI

21) Kecamatan Kelekar

- Kecamatan Kelekar berbatas Dengan Kecamatan Gelumbang
- Kecamatan Muara Belide berbatas dengan Kecamatan lembak
- Kecamatan Muara Belide berbatas dengan Kecamatan Belide Darat
- Kecamatan Muara Belide berbatas dengan Kabupaten OI

22) Kecamatan Muara Belide

- Kecamatan Muara Belide Dengan Kecamatan Gelumbang
- Kecamatan Muara Belide Dengan Kabupaten Banyu Asin
- Kecamatan Muara Belide Dengan Kota Palembang
- Kecamatan Muara Belide Dengan Kabupaten OI



Khusus Segmen Batas Kelurahan Kecamatan Kabupaten Muara Enim

1) Kecamatan Muara Enim (6 Kelurahan)

- Kelurahan Air Lintang
- Kelurahan Pasa I
- Kelurahan Pasar II
- Kelurahan Pasar III
- Kelurahan Tungkal
- Kelurahan Muara Enim

2) Kecamatan Lawang Kidul (3 Kelurahan)

Kelurahan Pasar Tanjung Enim

- Kelurahan Pasar Tanjung Enim berbatas dengan Desa Tegal Rejo
- Kelurahan Pasar Tanjung Enim berbatas dengan Kelurahan Tanjung Enim Selatan

Kelurahan Tanjung Enim

- Kelurahan Tanjung Enim berbatas dengan Desa Lingga
- Kelurahan Tanjung Enim berbatas dengan Desa Tegal Rejo
- Kelurahan Tanjung Enim berbatas dengan Desa Darmo
- Kelurahan Tanjung Enim berbatas dengan Kelurahan Tanjung Enim Selatan

Kelurahan Tanjung Enim Selatan

- Kelurahan Tanjung Enim Selatan berbatas dengan Kelurahan Tanjung Enim
- Kelurahan Tanjung Enim Selatan berbatas dengan Kelurahan Pasar Tanjung
- Kelurahan Keban Agung Tanjung Enim Selatan berbatas dengan Desa Keban Agung

3) Kecamatan Gelumbang (1 Kelurahan)

Kelurahan Gelumbang

- Kelurahan Gelumbang berbatas dengan Desa Bitis
- Kelurahan Gelumbang berbatas dengan Desa Sukamenang
- Kelurahan Gelumbang berbatas dengan Desa Talang Taling
- Kelurahan Gelumbang berbatas dengan Desa Tambangan Kelekar
- Kelurahan Gelumbang berbatas dengan Desa Embacang kelekar
- Kelurahan Gelumbang berbatas dengan Desa Karang Endah
- Kelurahan Gelumbang berbatas dengan Desa Midar
- Kelurahan Gelumbang berbatas dengan Desa Paya Bakal



B. Permasalahan dan Solusi

Mengingat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, bahwa Penyelesaian perselisihan batas daerah antar kabupaten/kota dalam satu Provinsi dilakukan oleh Gubernur, maka peran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Tim PBD Provinsi Sumatera Selatan sangat diperlukan dalam rangka penyelesaian dan kerjasama perbatasan yang implementasinya memerlukan penanganan secara khusus dan terkoordinasi sesuai kewenangannya, selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan lebih mempercepat baik proses maupun penyelesaian guna mendukung terciptanya iklim kondusif secara politis maupun investasi di daerah perbatasan.

4.2.5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Secara umum bencana yang terjadi di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2025 berupa bencana alam dan bencana non alam. Adapun bencana alam berupa kebakaran pemukiman penduduk atau bangunan serta kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, banjir, angin puting beliung/angin kencang, orang tenggelam, dan bencana alam lainnya.

1. Kebakaran

Sepanjang tahun 2025 telah terjadi 35 bencana kebakaran di Kabupaten Muara Enim, 13 di antaranya merupakan kebakaran rumah dan bangunan, 20 merupakan kebakaran hutan dan lahan, dan 2 di antaranya merupakan jenis kebakaran lainnya.

a. Kebakaran Permukiman/Bangunan

Pada tahun 2025 telah terjadi sebanyak 13 kejadian dan telah ditanggulangi oleh Dinas Pemadam Kebakaran.

**Tabel 4.2 Kejadian Bencana Kebakaran Bangunan
di Kabupaten Muara Enim Tahun 2025**

No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Keterangan
1	Kamis, 13 Maret 2025	Muara Enim	Tungkal	Kebakaran rumah yang terjadi di Rukun Damai RT. 02 RW. 03 Kelurahan Tungkal Kecamatan Muara Enim yang diakibatkan korsleting listrik dari atap rumah
2	Jum'at, 21 Maret 2025	Muara Enim	Muara Enim	Sekira pukul 22.00 WIB TRC BPBD mendapat laporan bahwa telah terjadi kebakaran di kantor ULP Pemda dan Tim langsung



No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Keterangan
				menuju ke lokasi menggunakan R6 Tangki Suplay 4000 L
3	Minggu, 30 Maret 2025	Muara Enim	Pasar III	Pada pukul 01.05 WIB mendapatkan laporan dari warga bahwa telah terjadi kebakaran 1 unit bengkel ban dan 1 unit rumah terdampak di Jl. SMB II Depan Terminal Regional RT. 02 RW. 05 Kelurahan Pasar III
4	Minggu, 30 Maret 2025	Perbatasan Muara Enim - Lahat	Lebuay Bandung Merapi Timur	Sekira pukul 10.08 WIB mendapat info dari DPKP Muara Enim bahwa ada kebakaran di Jalan Lintas Lebuay Bandung yang berbatasan langsung dengan Muara Enim.
5	Jum'at, 11 April 2025	Muara Enim	Pasar I	Pada pukul 04.55 WIB diduga telah terjadi kebakaran api menyambar dari gudang rongsokan beserta isinya. di jalan Veteran Pelita Sari RT. 03 RW. 04 Kelurahan Pasar I Muara Enim.
6	Sabtu, 19 Juli 2025	Lawang Kidul	Berangau Tanjung Enim	Pada pukul 07.30 WIB tim mendapat laporan telah terjadi kebakaran 7 unit rumah di Jalan Berangau Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.
7	Minggu, 24 Agustus 2025	Muara Enim	Tanjung Raja	Sekira Pukul 10.05 WIB dapat laporan bahwa telah terjadi kebakaran rumah di Desa Tanjung Raja Kecamatan Muara Enim tim langsung menuju ke lokasi dengan menggunakan kendaraan R6 Tangki Supply 4000 L menyuplai tangki pemadam DPKP Muara Enim.
8	Senin, 01 September 2025	Ujan Mas	Ulak Bandung	Pada pukul 15.30 WIB BPBD Kab. Muara Enim mendapat laporan dari Damkar Muara Enim bahwa telah terjadi kebakaran rumah di Dusun 4



No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Keterangan
				RT. 02 Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujan Mas. Api berasal dari warga yang sedang memasak air dengan menggunakan kayu bakar.
9	Selasa, 02 September 2025	Muara Enim	Pasar II	Pada pukul 22.15 WIB Tim BPBD mendapat laporan dari warga bahwa telah terjadi kebakaran rumah di Gang Melati Jalan Pramuka III RT. 03 RW. 02 Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim
10	Jum'at, 24 Oktober 2025	Gelumbang	Sigam	Telah terjadi kebakaran rumah hunian pada hari Jum'at, 24 Oktober 2025 pukul 13.00 WIB di Desa Sigam dusun IV RT. 02. Akibat kejadian tersebut Bapak Eko Handoyo mengalami syok berat karena tidak ada yang tersisa
11	Kamis, 06 November 2025	Muara Enim	Muara Enim	Telah terjadi kebakaran rumah hunian pada hari Kamis, 06 November 2025 Pukul 18.59 WIB di Jalan Prasetya RT.02 RW.08 Villa Jasmin Kelurahan Muara Enim. Posisi rumah sedang kosong karena penghuni dari pagi berdagang di Tanjung Enim. Warga setempat a.n Debi melihat api membakar rumah tersebut dan langsung menghubungi posko pemadam kebakaran
12	Sabtu, 08 November 2025	Muara Enim	Muara Enim	Telah terjadi kebakaran rumah hunian pada hari Sabtu, 08 November 2025 Pukul 22.43 WIB di Jalan H. Pangeran Danal Dusun Muara Enim Kampung 3. Pemilik rumah melakukan pembakaran karpet telur untuk mengusir nyamuk dan ditinggal tidur oleh pemilik rumah sehingga menyebabkan kebakaran dari dalam rumah



No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Keterangan
13	Senin, 17 November 2025	Muara Enim	Kepur	Telah terjadi kebakaran rumah hunian pada hari Senin, 17 November 2025 pukul 10.04 WIB di Desa Kepur Dusun I Kecamatan Muara Enim. Pemilik rumah sedang memasak menggunakan tungku kayu tetapi pemilik lupa sedang memasak sehingga ditinggal dan ngobrol di pance bersama warga yang mengakibatkan api dari tungku menyebar dan menyebabkan kebakaran

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muara Enim 2026

b. Kebakaran Hutan dan Lahan

Pada tahun 2025 telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Muara Enim sebanyak 20 kejadian kebakaran yang telah tertangani. Kebakaran tersebut dibagi menjadi beberapa jenis kebakaran yang ditanggulangi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muara Enim dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muara Enim.

Tabel 4.3. Kejadian Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Keterangan
1.	Senin, 30 Juli 2025	Gunung Megang	Tanjung Terang	Terpantau titik api di wilayah Dusun I Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim ditemukan lahan warga membuka kebun. Kondisi : Api Telah Padam
2.	Selasa, 01 Juli 2025	Lawang Kidul	Darmo	Titik koordinat hotspot berada di S -3.85399° E 103.81639° wilayah Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim. Diketahui lokasi tersebut merupakan lokasi area tambang PT. MME (Manambang Muara Enim) yang berupa tumpukan Batubara/Stockpile.



No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Keterangan
3.	Senin, 21 Juli 2025	Rambang Niru-Prabumulih	Gunung Kemala	Titik koordinat hotspot berada di S -3.4131° E 104.14575° wilayah Gunung Kemala Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim yang berbatasan langsung dengan Prabumulih. Dilokasi tidak ditemukan karhutla melainkan sisa pembuangan gas plering Pertamina SP 3 Gunung Kemala.
4.	Selasa, 22 Juli 2025	Muara Enim	Pasar I	Sekira pukul 18.30 WIB dapat laporan bahwa telah terjadi kebakaran di Pelita Sari Kecamatan Muara Enim, tim langsung menuju ke lokasi dengan menggunakan kendaraan R6 tangki supply 4000 L menyuplai tangki pemadam DPKP Muara Enim
5.	Kamis, 24 Juli 2025	Muara Belida	Patra Tani	Titik koordinat hotspot berada di S 3.4280° E 104.34480° wilayah Desa Patra Tani Kecamatan Muara Belida Kabupaten Muara Enim. Kondisi : Api Telah Padam.
6.	Kamis, 24 Juli 2025	Kelekar	Suban Baru	Titik koordinat hotspot berada di S 3.22260° E 104.30180° wilayah Desa Suban Baru Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim. Kondisi : Api Telah Padam.
7.	Sabtu, 26 Juli 2025	Kelekar	Menanti	Titik koordinat hotspot berada di S -3.36381° E 104.45753° wilayah Desa Menanti Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim. Pemilik Lahan : Andi. Kondisi : Api Telah Padam.
8.	Sabtu, 26 Juli 2025	Sungai Rotan	Sukajadi	Titik koordinat hotspot berada di S -3.1035° E 104.1831° wilayah Desa Suka Jadi Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim. Pemilik Lahan : Belum Diketahui. Kondisi : Masih Berasap.



No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Keterangan
9.	Minggu, 27 Juli 2027	Sungai Rotan	Petar Luar	Titik koordinat hotspot berada di S -3.10422° E 104.18336° wilayah Desa Petar Luar Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim. Pemilik Lahan : Belum Diketahui. Kondisi : Masih Berasap.
10	Senin, 28 Juli 2025	Gelumbang	Gaung Talang	Titik koordinat hotspot berada di S -3.306765° E 104.32058° wilayah Desa Gaung Telang Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Setelah dilakukan pengecekan sumber HS tersebut merupakan Flaring Gas dari PT. SRB (Sele Raya Belida).
11	Senin, 28 Juli 2025	Sungai Rotan	Sukajadi dan Petar Lua	Titik koordinat hotspot berada di S -3.10256° E 104.1831° wilayah Desa Suka Jadi dan S -3.10422° E 104.18336° wilayah Desa Petar Luar Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim. Pemilik Lahan : Belum Diketahui. Kondisi : Masih Berasap. Pemadaman hari Ketiga dibantu Satgas Udara 1 unit Helicopter Water Boombing melakukan sebanyak 34x penyiraman.
12	Senin, 04 Agusuts 2025	Gelumbang	Teluk Limau	Titik koordinat hotspot berada di S : -3°08'14.0" E : 104°22'49.0" wilayah Desa Teluk Limau Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Pemilik Lahan : Tanah Adat. Kondisi : Api Sudah Padam.
13	Jum'at, 08 Agustus 2025	Sungai Rotan	Suka Merindu	Titik koordinat hotspot berada di 3°04'05.0"S 104°21'45.0"E wilayah Desa Suka Merindu Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim. Pemilik Lahan : Tidak diketahui. Kondisi : Api Sudah Padam.



No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Keterangan
14	Jum'at, 08 Agustus 2025	Gunung Megang	Tanjung Terang	Titik koordinat hotspot berada di 03°19'42.0" S 104°01'01.0" E wilayah Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim. Pemilik Lahan : Tidak diketahui. Kondisi : Api Sudah Padam.
15	Minggu, 17 Agustus 2025	Sungai Rotan	Suka Dana	Titik koordinat hotspot berada di S 3.202050 E 104.348125 wilayah Desa Suka Dana Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim. Pemilik Lahan : Tidak Diketahui. Kondisi : Api Sudah Padam.
16	Selasa, 23 September 2025	Perbatasan Gelumbang dan Sungai Rotan	Betung dan Suka Dana	Menindak lanjuti terkait laporan dari Patroli Udara telah terjadi bencana Karhutla di Desa Betung Kec. Gelumbang yang berbatasan dengan Desa Suka Dana Kec. Sungai Rotan. Latitude / Longitude : 3°9'29, 442" S 104°20'24, 714" E
17	Sabtu, 27 September 2025	Sunga Rotan	Danau Tampang	Menindak lanjuti terkait laporan dari Patroli Udara bahwa telah terjadi Karhutla di Desa Danau Tampang Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim. Latitude / Longitude 3°7'12" S 104°15'9 E. Melanjutkan pemadaman hari ke 3.
18	Sabtu , 27 Agustus 2025	Perbatasan Gelumbang dan Sungai Rotan	Betung dan Suka Dana	Menindak lanjuti terkait laporan dari Patroli Udara bahwa telah terjadi Karhutla di Desa Betung Kecamatan Gelumbang Perbatasan dengan Desa Suka Dana Kecamatan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim. Latitude / Longitude 3°9'29,442" S 104°20'24,714 E. Melanjutkan pemadaman hari ke 5.
19	Sabtu , 27 Agustus 2025	Empat Petulai Dangku	Desa Baturaja	Menindak lanjuti terkait laporan dari Patroli Udara bahwa telah terjadi Karhutla di Desa Baturaja Kecamatan Empat



No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Keterangan
				Petulai Dangku Kabupaten Muara Enim. Latitude / Longitude -3.38298 S 104.06447 E. BPBD Posko Induk langsung menuju lokasi FS dan melakukan pemadaman.
20	Rabu, 15 Oktober 2025	Ujanmas	Ujanmas Baru	Menindak lanjuti laporan dari perangkat desa Ujan Mas Baru sekira pukul 14.00 WIB telah terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Ujan Mas Baru Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Muara Enim

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muara Enim 2026

c. Kebakaran Lainnya

Jenis kebakaran lainnya yang terjadi di Kabupaten Muara Enim ialah kebakaran mobil yang terjadi sebanyak 2 kali. Ada pun jabaran mengenai kebakaran tersebut ialah:

Tabel 4.4. Kejadian Bencana Kebakaran Lainnya di Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Jenis Kebakaran	Keterangan
1.	Kamis, 10 April 2025	Muara Enim	Jalan Servo KM. 107	Kebakaran Warung Makan dan Gudang Minyak	Pada pukul 18.20 WIB telah terjadi kebakaran api menyambar dari gudang didekat warung makan dan melahap warung makan beserta isinya.
2.	Selasa, 22 Juli 2025	Muara Enim	Pasar I	Kebakaran Pondok	Sekira pukul 18.30 WIB dapat laporan bahwa telah terjadi kebakaran di Pelita Sari Kecamatan Muara Enim, tim langsung menuju ke lokasi dengan menggunakan kendaraan R6 tangki supply 4000 L menyuplai tangki pemadam DPKP Muara Enim

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muara Enim 2026



2. Tanah Longsor

Bencana alam tanah longsor tahun 2025 di Kabupaten Muara Enim terjadi sebanyak 8 kali. Ada pun jabaran mengenai bencana tersebut ialah sebagai berikut:

**Tabel 4.5. Kejadian Bencana Tanah Longsor
di Kabupaten Muara Enim Tahun 2025**

No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Keterangan
1	Kamis, 02 Januari 2025	Muara Enim	Muara Enim	Intensitas curah hujan tinggi dan tidak ada dinding penahan
2	Sabtu, 04 Januari 2025	Muara Enim	Muara Enim	Intensitas curah hujan tinggi dan aliran gorong-gorong yang sudah tidak berfungsi
3	Kamis, 09 Januari 2025	Semende Darat Tengah	Desa Sri Tanjung	Perubahan vegetasi tanah dan tingginya kecepatan angin dan tekanan air hujan dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan tanah longsor
4	Senin, 13 Januari 2025	Lawang Kidul	Lingga	Perubahan vegetasi tanah dan tingginya kecepatan angin dan tekanan air hujan dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan tanah longsor
5	Sabtu, 15 Februari 2025	Muara Enim	Pasar I	Hujan deras di wilayah Kec. Muara Enim yang menyebabkan akses jalan penghubung menuju sekolah MTSN 1 longsor (putus) dan struktur tanah yang masih lembut serta gorong-gorong belum berfungsi secara optimal
6	Jum'at, 07 Maret 2025	Semende Darat Ulu	Segamit	Perubahan vegetasi tanah dan tingginya kecepatan angin dan tekanan air hujan dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan pergerakan tanah
7	Senin, 17 Maret 2025	Lawang Kidul	Lingga	Menurut informasi Kades Lingga pipa PDAM mengalami patah dan bocor di sekitar area jalan dan jembatan. Sudah ditimbun tetapi saat hujan deras longsor terjadi di pinggiran jalan dan jembatan tersebut.



No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Keterangan
8	Selasa, 09 September 2025	Lawang Kidul	Tegal Rejo	Telah terjadi bencana Tanah Longsor pada hari Selasa, 09 September 2025 Pukul 00.30 WIB di Desa Tegal Rejo RT. 01 Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muara Enim 2026

3. Banjir

Bencana alam banjir di Kabupaten Muara Enim terjadi sebanyak 11 kejadian sepanjang tahun 2025. Peristiwa bencana banjir dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 4.6 Kejadian Bencana Banjir
di Kabupaten Muara Enim Tahun 2025**

No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Banjir	Keterangan
1	Kamis, 02 Januari 2025	Muara Enim	Pasar I	Banjir	Saluran drainase / selokan mampet disertai hujan deras
2	Kamis, 09 Januari 2025	Ujan Mas	Desa Tanjung Raman	Banjir	Intensitas hujan yang lebat mengakibatkan banjir di Tanjung Raman pukul 15.30 WIB
3	Kamis, 09 Januari 2025	Muara Enim	Dusun Muara Enim	Banjir	Debit atau TMA sungai Benakat dan sungai Lematang naik meluap dan sedimen serta penyempitan sungai-sungai
4	Jum'at, 10 Januari 2025	Benakat	Pagar Jati	Banjir	Debit atau TMA sungai Benakat dan sungai Lematang naik meluap dan sedimen serta penyempitan sungai-sungai
5	Sabtu, 15 Februari 2025	Muara Enim	Pasar III	Banjir	Debit atau TMA sungai Benakat, sungai Buluran, sungai Belida dan sungai Lematang meluap dan sedimen serta penyempitan sungai-sungai



No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Banjir	Keterangan
6	Senin, 03 Maret 2025	Muara Enim	Pandawa 5	Banjir	Intensitas hujan yang lebat mengakibatkan banjir di Kelurahan Air Lintang Pukul 03.26 WIB
7	Senin, 03 Maret 2025	Muara Enim	Gang Salak	Banjir	Intensitas hujan lebat
8	Jum'at, 07 Maret 2025	Benakat	Padang Bindu	Banjir	Debit atau TMA sungai Benakat dan sungai Lematang naik meluap dan sedimen serta penyempitan sungai-sungai
9	Jum'at, 14 Maret 2025	Muara Belida	Kayu Ara Batu	Banjir	Intensitas hujan yang tinggi wilayah hulu sehingga menyebabkan luapan dari aliran sungai Lematang dan sungai Musi ke area pemukiman warga disekitar pinggiran sungai
10	Sabtu, 05 April 2025	Belida Darat	Babat	Banjir	Hujan deras dengan intensitas tinggi pada hari Sabtu dini hari pukul 03.00 WIB yang mengakibatkan meluapnya aliran sungai Enau di bantaran Desa Babat Kecamatan Belida Darat. Dengan TMA $\pm$ 1 Meter.
11	Jum'at, 11 April 2025	Muara Enim	Muara Lawai	Banjir	Curah hujan tinggi pada hari Jum'at, 11 April 2025 sekira pukul 20.00 WIB. Drainase yang tidak dapat menampung volume air hujan sehingga meluap ke jalan dan sempit menggenangi rumah warga.

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muara Enim 2026



4. Angin Puting Beliung

Bencana angin puting beliung/angin kencang di Kabupaten Muara Enim sepanjang tahun 2025 terjadi sebanyak 2 kali, ada pun jabaran mengenai bencana tersebut ialah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Kejadian Bencana Angin Puting Beliung di Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Keterangan
1	Sabtu, 19 April 2025	Lubai	Air Asam	Pada hari Sabtu, 19 April 2025 sekira pukul 16.00 WIB di Dusun III Desa Air Asam Kec. Lubai Kab. Di Muara Enim telah terjadi bencana alam angin kencang yang mengakibatkan bangunan rumah bagian atap melayang.
2	Minggu, 27 April 2025	Gunung Megang	Lubuk Mumpo	Angin kencang yang terjadi pada hari Minggu, 27 April 2025 sekira pukul 08.00 WIB Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim yang mengakibatkan jembatan gantung miring karena angin kencang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muara Enim 2026

5. Pohon Tumbang

Bencana pohon tumbang di Kabupaten Muara Enim sepanjang tahun 2025 terjadi sebanyak 7 kali, berikut merupakan tabel jabaran mengenai kejadian tersebut.

Tabel 4.7 Kejadian Bencana Pohon Tumbang di Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Keterangan
1	Selasa, 25 Februari 2025	Panang Enim	Lebak Budi	Telah terjadi pohon tumbang yang mengakibatkan jalan lalu lintas terhambat
2	Sabtu, 26 April 2025	Muara Enim	Kepur	TRC BPBD Kab. Muara Enim mendapatkan laporan dari warga sekira pukul 17.50 WIB bahwa telah terjadi pohon tumbang yang menimpa kabel listrik di Jalan lintas depan



No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Keterangan
				Pesantren Radatul Taufik (Kepur) Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim
3	Jum'at, 09 Mei 2025	Muara Enim	Muara Enim	TRC BPBD Kab. Muara Enim mendapatkan laporan dari warga sekira pukul 05.30 WIB bahwa telah terjadi pohon tumbang (akasia) yang mengganggu lalu lintas depan GOR Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim
4	Minggu, 31 Agustus 2025	Muara Enim	Kepur	Berdasarkan laporan dari via Whatsapp telah terjadi pohon tumbang di Jalan Tjiek Agus Kiemas Desa Kepur dekat Kantor Fraksi Partai Nasdem Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim. Titik Koordinat 3°37'45, 816" S 103°45'55, 74" E
5	Selasa, 14 Oktober 2025	Muara Enim	Pasar II	Menindak lanjuti laporan dari warga pada hari Selasa, 14 Oktober 2025 pukul 19.40 WIB di RT 03 RW 07 Kelurahan Pasar II terkait terjadinya pohon tumbang yang menimpa rumah Bapak Marwi.
6	Jum'at, 17 Oktober 2025	Lawang Kidul	Lingga	Hujan disertai angin kencang pada sore hari Jum'at, 17 Oktober 2025 yang terjadi di Desa Lingga Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim menyebabkan pohon yang berada di pinggir jembatan tumbang.
7	Rabu, 04 Desember 2025	Muara Enim	Karang Raja	Menindak lanjuti laporan dari warga setempat bahwa telah terjadi pohon tumbang yang mengganggu lalu lintas di jalan Lingkar Enim 3 Desa Karang Raja Kecamatan Muara Enim dan TRC BPBD Kab. Muara Enim langsung menuju ke lokasi kejadian

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muara Enim 2026



6. Orang Tenggelay

Bencana orang tenggelam di Kabupaten Muara Enim sepanjang tahun 2025 terjadi sebanyak 4 kali, kejadian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 4.8 Kejadian Bencana Orang Tenggelay
di Kabupaten Muara Enim Tahun 2025**

No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Keterangan
1	Selasa, 28 Februari 2025	Panang Enim	Lebak Budi	Menindaklanjuti laporan dari warga terkait telah terjadinya orang hanyut tenggelam
2	Minggu, 16 Maret 2025	Belimbing	Belimbing	Menindak lanjuti laporan dari warga bahwa ada korban orang hanyut tenggelam.
3	Rabu, 23 Juli 2025	Sungai Rotan	Suka Cita	Telah ditemukan pakaian korban Aziz baju dan celana pada hari Rabu, 23 Juli 2025 sekitar pukul 17.35 WIB di pinggir sungai Lematang Desa Suka Cita Kecamatan Sungai Rotan.
4	Senin, 10 November 2025	Muara Belida	Tanjung Baru	Senin, 10 November 2025 sekira pukul 15.00 WIB menurut para saksi korban bersama dua rekannya terjun ke sungai 2 orang selamat 1 hilang tenggelam dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Selasa, 11 November 2025 pukul 19.10 WIB dengan jarak $\pm$ 500 M dari lokasi korban tenggelam

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muara Enim 2026

7. Bencana Lainnya

Kejadian bencana lainnya terjadi sebanyak 5 kali sepanjang tahun 2025 di Muara Enim. Ada pun jabaran mengenai bencana tersebut ialah sebagai berikut:

**Tabel 4.9 Kejadian Bencana Lainnya
di Kabupaten Muara Enim Tahun 2025**

No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jenis Bencana	Keterangan
1.	Rabu, 19 Februari 2025	Muara Enim	Muara Lawai	Jalan Ambblas	Perubahan vegetasi tanah dan tingginya kecepatan angin dan tekanan air hujan dalam beberapa hari terakhir



No.	Waktu Kejadian	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Jenis Bencana	Keterangan
					mengakibatkan pergerakan tanah
2.	Rabu, 25 Juni 2025	Ujan Mas	Ulak Bandung	Pergerakan Tanah	Jalan ambles di Dusun I Desa Ulak Bandung Kecamatan Ujan Mas. Kondisi jalan yang longsor/ ambles berdasarkan pihak desa sudah terjadi bulan November 2024 dan terjadi longsor susulan.
3.	Jum'at, 04 Juli 2025	Tanjung Agung	Pandan Enim	Pergerakan Tanah	Menindaklanjuti laporan masyarakat telah terjadi jalan ambles di Desa Pandan Enim Kecamatan Tanjung Agung. Kondisi jalan berdasarkan informasi dari pihak desa sudah terjadi kurang lebih 12 hari dan terjadi lagi hari Jum'at pukul 18.30 WIB sehingga menyebabkan badan jalan ambles dan berlubang
4.	Kamis, 16 Oktober 2025	Lubai	Beringin	Serangan Binatang Buas	Telah terjadi serangan binatang buas pada hari Kamis, 16 Oktober 2025 sekira pukul 08.30 WIB di Dusun IX Desa Beringin Kecamatan Lubai Kabupaten Muara Enim. Serangan tersebut dicurigai harimau dan memangsa kambing
5.	Sabtu, 08 November 2025	Benakat	Padang Bindu	Longsoran Tebing / Erosi Anak Sungai Benakat	Pergerakan tanah berupa longsoran/ terbis pada tebing dataran anak sungai. Gerusan tersebut berulang terus-menerus dan diperparah potensi curah hujan yang tinggi. Rentang waktu terbis longsor sejak Tahun 2019-2025

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muara Enim 2026

Sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kabupaten Muara Enim guna meringankan beban masyarakat yang mengalami musibah kebakaran hutan dan lahan, banjir dan tanah longsor serta angin puting beliung diberikan bantuan



berupa pakaian dan logistik makanan siap saji. Selanjutnya, terhadap kejadian-kejadian tersebut diatas, beberapa faktor yang menyebabkan kejadian bencana di Kabupaten Muara Enim, diantaranya yaitu terjadinya pembukaan lahan dengan cara dibakar, kurangnya sarana dan prasarana armada penanggulangan bencana, kurangnya petugas Satuan Tugas Penanggulangan Bencana, lokasi pemukiman masyarakat berada di daerah rawan bencana, dan masih kurangnya pelatihan-pelatihan terhadap bencana terutama bagi personil Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di bidang penanggulangan bencana.

4.2.6. Pengelolaan Kawasan Khusus

1. Jenis Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah

- a. Penetapan Kawasan Khusus Agropolitan dengan keputusan Bupati Muara Enim nomor: 576/KPTS/BAPPEDA-PPI/2008 Tanggal 4 Juni 2008 yang menetapkan 5 kawasan agropolitan yaitu:

- 1) Agropolitan Center di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut.
- 2) Agropolitan Distrik di Kecamatan Semende Darat Ulu
- 3) Agropolitan Distrik di Kecamatan Semende Darat Tengah
- 4) Agropolitan Distrik di Kecamatan Semende Darat Laut
- 5) Agropolitan Distrik di Kecamatan Tanjung Agung

Dalam rangka pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Muara Enim, memedomani Master Plan Kawasan Agropolitan yang telah disusun pada tahun 2008 oleh Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Detail Tata Ruang Agropolitan yang telah disusun melalui Bappeda Kabupaten Muara Enim pada tahun 2011. Sejak tahun 2014 dilakukan perjanjian kerjasama dengan Institut Pertanian Bogor dalam upaya pengembangan Agribusiness Development Center (ADC) dengan cara pendampingan kepada petani dalam pelaksanaan pengembangan agribisnis di wilayah agropolitan Kabupaten Muara Enim.

Untuk menunjang pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Muara Enim, beberapa program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah diantaranya yaitu program bantuan bibit, pendampingan dan pembinaan kelompok tani, penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, dan pengadaan sarana dan prasarana pertanian, serta pendampingan dan pengembangan kopi melalui perbaikan sistem budidaya, mutu kopi, kelembagaan dan pemasaran.



- b. Penambangan Batubara oleh PT. Bukit Asam Tbk telah mengubah bentangan lahan, sehingga diperlukan upaya pengendalian dan pemulihan lingkungan bekas tambang, guna pelestarian lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Pemanfaatan lahan bekas tambang telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2004, tanggal 2 Juni 2004 tentang Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang PT. Bukit Asam Tbk di Kabupaten Muara Enim sebagai Taman Hutan Raya Enim (TAHURA ENIM) yang meliputi Kuasa Pertambangan Air Laya seluas 3.628,3 Ha dan Kuasa Pertambangan Bangko Barat seluas 2.011,6 Ha.
- c. Dalam rangka pelestarian peninggalan sejarah yang mempunyai nilai budaya, ilmu pengetahuan dan pengembangan objek wisata, baik wisata potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya alam buatan telah ditetapkan dan diatur dengan peraturan, antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2004 tanggal 2 Juni 2004 tentang Kawasan Wisata Curup Tenang dengan luasan $\pm$ 36 Ha.
- d. Untuk menunjang distribusi arus barang dan pemanfaatan fungsi kawasan pergudangan serta penataan dan ketertiban lalu lintas barang jasa, pemerintah Kabupaten Muara Enim telah mengatur dan menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2004 tanggal 2 Juni 2004 tentang Pergudangan yang berlokasi di sekitar Terminal Regional Muara Enim. Namun dalam perjalanannya masih terdapat masyarakat yang mendirikan bangunan gudang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah. Hal ini secara bertahap akan ditertibkan, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan kelancaran aktivitas distribusi dan arus bongkar muat barang.
- e. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan gagasan PT. Bukit Asam dalam hal pengembangan usaha ke bisnis hilirisasi batubara agar lebih kompetitif usahanya, lebih tinggi nilai tambahnya, dan bisa berperan lebih baik bagi kepentingan nasional secara terintegrasi di mulut tambang. Rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Bukit Asam berada di mulut tambang Tanjung Enim, terletak di dua kecamatan yaitu Kecamatan Lawang Kidul dan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dengan luasan seluas 585 Ha. Peran Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Bukit Asam yaitu membuat Surat Bupati Muara Enim Nomor: 050/767/Bappeda-2/2018 tanggal 30 Mei 2018 perihal Persetujuan Bupati Muara Enim terhadap Usulan Pembentukan KEK Bukit Asam.



Selain hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menetapkan KEK Bukit Asam dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Muara Enim yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Muara Enim, serta mengusulkan mendekatkan trase jalan tol Muara Enim-Simpang Meo yang akan dibangun melalui lokasi KEK Bukit Asam. Serta ikut aktif dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan percepatan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Bukit Asam baik itu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Sampai dengan saat ini, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Bukit Asam dalam tahapan koordinasi untuk pembebasan lahan, pelaksanaan proses pengadaan penyusunan dokumen masterplan dan studi kelayakan Kawasan Ekonomi Khusus Bukit Asam, serta pelaksanaan proses pengadaan penyusunan dokumen AMDAL, ANDALIN dan Izin Lingkungan pada Kawasan Ekonomi Khusus Bukit Asam.

2. Sumber Anggaran

Dalam rangka pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah, pengelolaan kawasan khusus tersebut didanai melalui dana APBD Kabupaten Muara Enim, APBD Provinsi Sumatera Selatan, APBN, dan CSR PKBL perusahaan yang berada di Kabupaten Muara Enim.

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan khusus seperti:

- a) Dalam pengelolaan dan pengembangan kebudayaan, belum tersedianya SDM mempunyai Sejarah/Arkeologi/Purbakala. kompetensi di Bidang Sarana dan prasarana penunjang pengembangan kebudayaan Kabupaten Muara Enim (Laboratorium Budaya, Museum, Studio Audio Visual).
- b) Kawasan Wisata Curup Tenang yang berada di Desa Bedegung Kecamatan Tanjung Agung kondisi lingkungan areal sebagian telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan perkebunan sehingga mempengaruhi debit air terjun dan keindahan Kawasan Objek Wisata Curup Tenang. Selain itu masih kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar Kawasan Wisata Air Terjun Curup Tenang Kecamatan Tanjung Agung dalam hal memberlakukan prinsip SAPTA PESONA (Bersih, Aman, Tertib, Sejuk, Indah, Ramah-tamah dan Kenangan) untuk meningkatkan daya tarik objek Wisata Air Terjun Curup Tenang.



- c) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membangun pergudangan di kawasan khusus yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2004 tanggal 2 Juni 2004 tentang Pergudangan yaitu di kawasan Terminal Regional Muara Enim.

Dalam rangka pengelolaan kawasan khusus Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Telah disusunnya Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan oleh Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Agropolitan serta penyusunan Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan Semende oleh Bappeda Kabupaten Muara Enim.
- 2) Terkait Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2004 tanggal 2 Juni 2004 tentang Pergudangan yaitu di kawasan Terminal Regional Muara Enim. Pemerintah Kabupaten Muara Enim tetap berkomitmen dan secara persuasif memberikan pemahaman kepada masyarakat agar Perda ini dipahami sebagai regulasi, dengan adanya kawasan pergudangan pemilik usaha bisa secara leluasa untuk melakukan bongkar muat barang tanpa harus mengganggu lalu lintas/ketertiban umum. Selain itu untuk sisi keamanan terhadap hal tidak diinginkan yang diakibatkan oleh tidak adanya pengawasan gudang dari pihak berwenang, terutama gudang yang menyimpan bahan-bahan bersifat membahayakan (mudah terbakar, bahan beracun, dll).
- 3) Perlu adanya peningkatan intensitas pemberian penyuluhan secara berkelanjutan terhadap masyarakat yang berada di kawasan Wisata Air Terjun Curup Tenang Kecamatan Tanjung Agung untuk selalu menjaga kawasan agar melaksanakan penerapan prinsip SAPTA PESONA sehingga daya tarik dan potensi pariwisata akan terjaga dan terpelihara dengan baik dan angka kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara akan meningkat.
- 4) Perlu disusun rencana formasi penerimaan PNS guna memenuhi kebutuhan tenaga Bidang Budaya (Sejarah, Arkeologi, Cagar Budaya). Berikutnya perlu dirintis pembangunan Laboratorium Budaya dan Studio Audio Visual.
- 5) Menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 520/KPTS/BAPPEDA/2018 tentang Tim Pendukung Persiapan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bukit Asam



Kabupaten Muara Enim, yang ditetapkan pada tanggal 02 Mei 2018, guna mendukung percepatan realisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bukit Asam.

4.2.7. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan yang terjadi dalam Kabupaten Muara Enim Tahun 2024

Pembangunan bidang politik pada hakikatnya adalah mewujudkan Masyarakat yang berkepribadian, Serasi, Seimbang menuju Masyarakat adil, dan Makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinamika Pembangunan Politik, Demokratisasi dan Fenomena yang berkembang dan tidak terkendali dan dapat mengarah pada disintegrasi bangsa yang dilatar belakangi antara lain oleh Intervensi Politik, ketidakpuasan kelompok Masyarakat yang berkepentingan yang tidak terakomodir dan secara Kasat Mata dapat ditengarai dengan gejala-gejala:

- a) Kesenjangan Pertumbuhan Ekonomi
- b) Hubungan antar Etnik / Suku
- c) Hubungan antar / Inter Agama
- d) Hubungan antara Pemerintahan Daerah dengan Masyarakat dan Legislatif
- e) Performance Pemerintah Daerah
- f) Performance DPRD
- g) Performance Aparatur
- h) Masalah Pertanahan / Hukum
- i) Masalah Perburuhan
- j) Kekerasan Politik
- k) Efektivitas Tenaga Penanganan Konflik
- l) Distribusi Sumber Daya
- m) Tingkat Kriminalitas
- n) Kesenjangan wilayah Perbatasan / Daerah Pinggiran.

2. Perangkat Daerah yang menangani ketenteraman dan ketertiban umum

Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Kabupaten Muara Enim dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun jumlah aparat pelaksana Ketertiban Umum dan jumlah pelanggaran yang terjadi pada tahun 2024- 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 4.10 Tindak Kriminal dan Pelanggaran KAMTIBMAS di Kabupaten Muara Enim Tahun 2024-2025

No.	Uraian	Tahun	
		2024	2025
1.	Curas, Curat, Curanmor	206	199
2.	Penyalahgunaan Narkoba	147	147
3.	Penganiayaan (Ringan, Berat)	35	36
4.	Pembunuhan	3	3
5.	Pengeroyokan	17	23
6.	Penggelapan	30	46
7.	Cabul / Zina	13	2
8.	Penipuan/perbuatan curang	13	16
9.	Perbuatan tidak menyenangkan	5	7
10.	Pembakaran	0	0
11.	Judi	2	2
12.	Perkosaan	0	1
13.	Pemerasan	2	1
14.	Uang Palsu	2	0
15.	Penyerobotan tanah	2	0
16.	Sumpah palsu & ket. palsu	2	0
17.	Pengrusakan	2	4
18.	Lain-lain	74	57
JUMLAH		555	544

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim, 2026

Dalam rangka optimalisasi stabilitas keamanan dan ketertiban Umum, Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah membentuk Tim Yustisi Serasan dengan Keputusan Bupati Muara Enim tanggal Nomor: 131/KPTS/Satpol PP/2022, tentang Tim Koordinasi Pengamanan Gangguan Keamanan dan Ketertiban (Tim Yustisi) Tahun 2022 Kabupaten Muara Enim, yang bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri, Polres Muara Enim, Lembaga Pemasyarakatan kelas II Muara Enim, Pengadilan Negeri Muara Enim, POLRES Muara Enim, KODIM 0404 Muara Enim, SubDenpom Persiapan Muara Enim, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Muara Enim, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Badan Kesbangpol, Badan Pendapatan Daerah, Bagian Hukum Sekretariat, Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Camat se-Kabupaten Muara Enim.



3. Jumlah Pegawai dan Kualifikasi Pendidikan

Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim sebanyak 392 orang dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

**Tabel 4.11 Tindak Kriminal dan Pelanggaran KAMTIBMAS
di Kabupaten Muara Enim Tahun 2025**

No.	Pendidikan Terakhir	Status Pegawai		Jumlah
		PNS	PPPK	
1.	S2	4	-	4
2.	S1	30	-	30
3.	D3	37	-	37
4.	SLTA / SEDERAJAT	46	173	219
5.	SLTP/SEDERAJAT	1	-	1
6.	SD / SEDERAJAT	-	-	-
JUMLAH		118	173	290

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muara Enim, 2026

4. Penanggulangan dan Kendalanya

Secara Umum Urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri dan Perangkat Daerah Satpol PP Kabupaten Muara Enim melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi maupun berkoordinasi dengan instansi daerah / instansi Vertikal didaerah, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan, hal ini disebabkan masih kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana yang mendukung.

5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam rangka Penanggulangan dan Antisipasi Dini kemungkinan-kemungkinan terjadinya konflik di daerah-daerah tertentu, selain mengoptimalkan tugas dan fungsi Tim Yustisi, juga telah dilakukan kerjasama dengan aparat keamanan melalui kegiatan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Muara Enim sesuai dengan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penunjukan Anggota dan Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Muara Enim.



BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAB III	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
BAB IV	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN
BAB V	PENUTUP
LAMPIRAN	

BAB V PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muara Enim Tahun 2025 merupakan instrumen akuntabilitas kepala daerah kepada DPRD Kabupaten Muara Enim dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan laporan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta regulasi turunannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Secara substantif, LKPJ Tahun 2025 menyajikan informasi komprehensif mengenai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diselaraskan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Muara Enim tahun 2025-2029

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim sesuai dengan kewenangannya mencakup 26 urusan wajib dan 7 urusan pilihan, yang dilaksanakan oleh 58 Perangkat Daerah. Secara keseluruhan, penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Muara Enim pada Tahun Anggaran 2025 dapat dikategorikan **BAIK**. Hal ini terlihat dari persentase realisasi capaian kinerja keuangan APBD sebesar **89.54 Persen (Unaudited)**, dengan kinerja output dari 295 program, 826 kegiatan, dan 2422 sub kegiatan. Keberhasilan pemerintah daerah kabupaten Muara Enim juga diukur dari indikator-indikator yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Muara Enim tahun 2025-2029 meliputi 12 (Dua belas) Indikator Kinerja Utama dan 15 (Lima belas) Indikator Kinerja Sasaran. Adapun capaian dari Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran meliputi :

Tabel 5.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	CAPAIAN DALAM PERSENTASE BERDASARKAN TARGET
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,67	73,77	100,13%
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,548	0,381	143,83%
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7,01	5,42	77,31%



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	CAPAIAN DALAM PERSENTASE BERDASARKAN TARGET
4	PDRB Per Kapita	(Rp Juta)	193,73	197,85	102,12%
5	Indeks Gini	Angka	0,307	0,258	84%
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,88	4,13	93,94%
7	Persentase Penduduk Miskin	Persen	9,49	9,45	100,42%
8	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	3,6	3,359	93%
9	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	145,91	168,35	86,87%
10	Indeks Kota Toleran	Indeks	5,41	5,42	100,18%
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	81	74.94	92,46%
12	Indeks Inovasi Daerah	Angka	65,01	79,45	122,21%
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama					100,26 %

Tabel 5.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	CAPAIAN DALAM PERSENTASI BERDASARKAN TARGET
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,39	8,45	100,71%
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,11	12,03	99,33%
	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,73	74,82	100,12%



SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	CAPAIAN DALAM PERSENTASI BERDASARKAN TARGET
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,548	0,381	143,83%
Meningkatnya perekonomian masyarakat berbasis pengembangan potensi daerah	PDRB Per Kapita	(Rp Juta)	193,73	197,85	102,12%
Menurunnya pengangguran dan peningkatan kualitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,88	4,13	93,94%
Meningkatnya perlindungan sosial adaptif	Persentase Penduduk Miskin	Persen	9,49	9,45	100,42%
Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas guna mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	Persen	95,35	95,4	100,05%
	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	96,44	86	89,17%
Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca secara berkelanjutan	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	Ton CO2 Ekuivalen	1.663.921	2.287.005	137%
Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,53	0,47	88,68%
Meningkatnya kerukunan hidup masyarakat	Indeks Kota Toleran	Indeks	5,41	5,42	100,18%
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	77,01	76.69 (B)	99,57%



SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2025	CAPAIAN 2025	CAPAIAN DALAM PERSENTASI BERDASARKAN TARGET
Meningkatnya kapasitas inovasi daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Inovasi Daerah	Angka	65,01	79,45	122,21%
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, profesional dan inovatif	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,61	4,66	101,08%
RATA-RATA INDIKATOR KINERJA SASARAN					107,37%

Dengan rincian capaian jumlah indikator kinerja utama dan indikator Kinerja sasaran sebagai berikut :

**Tabel 5.3 Jumlah Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran
Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025**

INDIKATOR KINERJA	JUMLAH INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUMLAH INDIKATOR KINERJA (<80%)	JUMLAH INDIKATOR KINERJA (80%-100%)
Indikator Kinerja Utama	12	1	11
Indikator Kinerja Sasaran	15	0	15

Secara keseluruhan pada tahun 2025, Indikator Kinerja Utama Kabupaten Muara Enim telah berhasil direalisasikan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar **100,26 persen** dari 12 Indikator Kinerja Utama. Untuk Indikator Kinerja Sasaran, capaian rata-rata kinerja mencapai **107,37 persen** dari 15 indikator. Capaian kinerja ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2025 sesuai dan konsisten dengan RPJMD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2029 dengan kinerja yang sangat baik.



Dengan demikian, pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim pada tahun 2025 selaras dengan RPJMD Kabupaten Muara Enim 2025-2029. Bupati Muara Enim beserta seluruh jajaran Aparatur Pemerintah Kabupaten Muara Enim mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat atas dukungannya terhadap program kerja Pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun 2025.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Muara Enim Tahun 2025 ini disampaikan, dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang dan menjadi bahan kajian serta pembahasan oleh Anggota Dewan Yang Terhormat untuk ditetapkan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAB III	HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
BAB IV	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN
BAB V	PENUTUP
LAMPIRAN	



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	3.500.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	3.500.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	3.500.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	3.500.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	3.500.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	3.500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	3.500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	3.500.000,00
5	BELANJA DAERAH	1.006.357.040.332,90	942.004.992.568,48	93,61	778.862.912.565,00
5.1	BELANJA OPERASI	802.196.028.887,90	742.767.869.126,48	92,59	656.897.192.566,00
5.1.01	Belanja Pegawai	611.767.094.747,00	561.050.946.258,48	91,71	504.573.691.200,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	377.419.165.650,00	347.748.932.865,00	92,14	333.717.517.469,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	305.106.392.678,00	284.658.778.939,00	93,30	273.232.455.397,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	169.610.800.705,00	155.083.660.786,00	91,44	168.864.161.991,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	135.495.591.973,00	129.575.118.153,00	95,63	104.368.293.406,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	30.518.724.948,00	26.661.714.815,00	87,36	25.534.589.468,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.661.600.915,00	14.061.856.332,00	89,79	15.085.417.364,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14.857.124.033,00	12.599.858.483,00	84,81	10.449.172.104,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	256.219.250,00	187.706.270,00	73,26	157.449.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	256.219.250,00	187.706.270,00	73,26	157.449.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.118.481.200,00	12.361.985.270,00	87,56	13.540.576.310,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	14.118.481.200,00	12.361.985.270,00	87,56	13.540.576.310,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.374.049.250,00	7.826.540.600,00	93,46	6.349.027.850,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	386.100.750,00	264.125.000,00	68,41	371.492.850,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7.987.948.500,00	7.562.415.600,00	94,67	5.977.535.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	18.215.628.792,00	15.540.625.905,00	85,31	14.439.316.860,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	7.739.514.537,00	6.918.355.020,00	89,39	7.470.629.940,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.476.114.255,00	8.622.270.885,00	82,30	6.968.686.920,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	816.994.668,00	507.630.817,00	62,13	460.097.609,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	560.098.098,00	507.630.817,00	90,63	460.097.609,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	256.896.570,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.674.864,00	3.950.249,00	31,17	4.004.975,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.902.896,00	1.768.910,00	36,08	2.040.757,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.771.968,00	2.181.339,00	28,07	1.964.218,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	234.347.929.097,00	213.302.013.393,48	91,02	52.103.634.931,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	12.320.858.254,00	10.093.370.128,98	81,92	52.103.634.931,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.689.563.340,00	3.507.118.972,00	74,79	14.004.681.546,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	7.631.294.914,00	6.586.251.156,98	86,31	38.098.953.385,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	37.360.592.843,00	23.271.013.464,50	62,29	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	12.888.233.232,00	5.534.884.964,00	42,95	0,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	24.472.359.611,00	17.736.128.500,50	72,47	0,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	184.666.478.000,00	179.937.629.800,00	97,44	0,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	180.104.978.000,00	176.618.629.800,00	98,06	0,00
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	4.561.500.000,00	3.319.000.000,00	72,76	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	118.752.538.800,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00	0,00	112.937.188.800,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	112.937.188.800,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	5.815.350.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	5.815.350.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	172.198.560.140,90	163.754.635.410,00	95,10	134.374.714.025,00
5.1.02.01	Belanja Barang	77.010.992.403,00	74.896.481.654,00	97,25	34.177.316.865,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	77.010.992.403,00	74.896.481.654,00	97,25	34.177.316.865,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	26.000.000,00	25.898.000,00	99,61	53.375.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	974.097.289,00	780.902.217,00	80,17	956.755.975,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.622.410.985,00	1.518.650.340,00	93,60	1.492.657.690,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	59.123.500,00	52.535.600,00	88,86	47.988.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.100.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.245.835.318,00	1.232.789.300,00	98,95	1.452.554.200,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	68.248.736,00	67.154.599,00	98,40	130.297.500,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	41.600.000,00	41.227.000,00	99,10	96.080.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	17.750.000,00	17.750.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.915.955.000,00	9.673.425.133,00	97,55	62.550.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	59.927.242.000,00	58.904.783.965,00	98,29	27.844.392.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.907.429.500,00	1.581.431.600,00	82,91	1.384.571.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	204.670.000,00	147.165.400,00	71,90	15.803.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	40.500.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	81.100.075,00	81.020.000,00	99,90	46.875.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	36.750.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	732.500.000,00	667.200.000,00	91,09	209.220.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	53.585.000,00	15.575.000,00	29,07	191.707.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	131.345.000,00	88.973.500,00	67,74	108.240.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	27.280.199.264,00	22.299.435.557,00	81,74	35.151.526.152,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.053.743.660,00	12.364.652.688,00	77,02	25.632.417.717,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.823.860.000,00	3.649.400.000,00	95,44	2.942.350.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	141.120.000,00	139.620.000,00	98,94	0,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	5.274.800.000,00	4.575.500.000,00	86,74	17.045.440.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	105.000.000,00	56.655.000,00	53,96	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	279.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	451.140.000,00	345.710.000,00	76,63	1.026.840.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	635.250.000,00	484.970.000,00	76,34	1.049.950.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	26.156.400,00	26.156.400,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	972.949.500,00	961.130.000,00	98,79	875.420.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	438.890.000,00	361.618.000,00	82,39	703.090.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	0,00	0,00	0,00	3.663.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	72.300.000,00	60.900.000,00	84,23	12.750.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	30.500.000,00	17.300.000,00	56,72	24.450.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	303.200.000,00	296.300.000,00	97,72	196.847.500,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	150.000.000,00	149.500.000,00	99,67	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	154.800.000,00	152.150.000,00	98,29	179.750.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.854.500.000,00	196.000.000,00	10,57	635.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	13.360.320,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	62.100.000,00	48.429.700,00	77,99	211.993.625,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	364.217.440,00	216.055.163,00	59,32	169.544.067,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	276.600.000,00	15.500.000,00	5,60	214.554.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	273.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	250.000.000,00	249.500.000,00	99,80	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20.000.000,00	9.478.425,00	47,39	59.275.525,00
5.1.02.02.01.0083	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan guru	195.580.000,00	190.500.000,00	97,40	0,00
5.1.02.02.01.0087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	2.140.000,00	2.140.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	77.040.000,00	74.900.000,00	97,22	0,00
5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	15.240.000,00	15.240.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	1.306.863.600,00	1.255.676.869,00	96,08	374.787.435,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	95.961.600,00	47.980.796,00	50,00	275.822.400,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.210.902.000,00	1.207.696.073,00	99,74	98.965.035,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	492.150.000,00	343.750.000,00	69,85	300.650.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	193.500.000,00	124.350.000,00	64,26	86.600.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	298.650.000,00	219.400.000,00	73,46	214.050.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.961.472.000,00	3.684.165.000,00	93,00	4.344.384.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	759.702.000,00	687.745.000,00	90,53	663.184.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	3.201.770.000,00	2.996.420.000,00	93,59	3.681.200.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.608.160.004,00	3.956.091.000,00	85,85	3.706.537.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.429.577.880,00	1.808.197.000,00	74,42	1.673.478.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.178.582.124,00	2.147.894.000,00	98,59	2.033.059.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	299.060.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	0,00	0,00	299.060.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	857.810.000,00	695.100.000,00	81,03	493.690.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	275.000.000,00	163.100.000,00	59,31	125.860.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	32.500.000,00	22.500.000,00	69,23	13.500.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	550.310.000,00	509.500.000,00	92,58	354.330.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	5.089.218.000,00	5.048.444.000,00	99,20	3.352.667.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	167.320.000,00	140.881.000,00	84,20	209.940.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	100.740.000,00	88.215.000,00	87,57	100.665.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	7.200.000,00	2.200.000,00	30,56	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	30.500.000,00	26.866.000,00	88,09	87.425.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	23.360.000,00	22.150.000,00	94,82	18.590.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	5.520.000,00	1.450.000,00	26,27	3.260.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.921.898.000,00	4.907.563.000,00	99,71	3.142.727.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.921.898.000,00	4.907.563.000,00	99,71	3.142.727.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	5.111.284.520,90	3.856.552.387,00	75,45	5.528.684.127,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.111.284.520,90	3.856.552.387,00	75,45	5.528.684.127,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.111.284.520,90	3.856.552.387,00	75,45	5.528.684.127,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	366.100.000,00	341.400.000,00	93,25	264.050.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	341.300.000,00	320.600.000,00	93,93	209.150.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	341.300.000,00	320.600.000,00	93,93	209.150.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	24.800.000,00	20.800.000,00	83,87	54.900.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	24.800.000,00	20.800.000,00	83,87	54.900.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	55.900.469.881,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	55.900.469.881,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	55.900.469.881,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	57.340.765.953,00	57.312.321.812,00	99,95	0,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	56.833.373.435,00	56.809.369.294,00	99,96	0,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	54.795.123.435,00	54.773.076.294,00	99,96	0,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	2.038.250.000,00	2.036.293.000,00	99,90	0,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	327.795.000,00	323.355.000,00	98,65	0,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	312.795.000,00	308.355.000,00	98,58	0,00
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	179.597.518,00	179.597.518,00	100,00	0,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	134.597.518,00	134.597.518,00	100,00	0,00
5.1.02.89.03.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	18.230.374.000,00	17.962.287.458,00	98,53	17.948.787.341,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	10.077.480.000,00	9.977.140.808,00	99,00	9.681.019.493,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	10.077.480.000,00	9.977.140.808,00	99,00	9.681.019.493,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	10.077.480.000,00	9.977.140.808,00	99,00	9.681.019.493,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	8.152.894.000,00	7.985.146.650,00	97,94	8.267.767.848,00
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	0,00	0,00	0,00	27.600.000,00
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	0,00	0,00	0,00	27.600.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	6.718.994.000,00	6.613.197.000,00	98,43	6.673.038.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	6.718.994.000,00	6.613.197.000,00	98,43	6.673.038.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.433.900.000,00	1.371.949.650,00	95,68	1.567.129.848,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	1.433.900.000,00	1.371.949.650,00	95,68	1.567.129.848,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	802.196.028.887,90	742.767.869.126,48	92,59	656.897.192.566,00
5.2	BELANJA MODAL	204.161.011.445,00	199.237.123.442,00	97,59	121.965.719.999,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.892.876.137,00	105.955.168.493,00	96,42	43.236.520.558,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.166.400.000,00	4.823.200.010,00	93,36	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.166.400.000,00	4.823.200.010,00	93,36	0,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.166.400.000,00	4.823.200.010,00	93,36	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	21.783.937.758,00	21.759.981.165,00	99,89	21.705.147.200,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	512.088.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	512.088.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	21.782.437.758,00	21.758.481.165,00	99,89	21.193.059.200,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	21.461.338.652,00	21.437.466.165,00	99,89	20.732.224.200,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	35.400.000,00	35.400.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	269.296.000,00	269.220.002,00	99,97	440.835.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	16.403.106,00	16.394.998,00	99,95	20.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	354.445.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	354.445.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	354.445.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	39.990.000.000,00	39.821.654.799,00	99,58	378.350.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	39.990.000.000,00	39.821.654.799,00	99,58	378.350.000,00
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	228.000.000,00	216.099.999,00	94,78	378.350.000,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	450.000.000,00	444.754.800,00	98,83	0,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	39.312.000.000,00	39.160.800.000,00	99,62	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	28.056.812.697,00	24.654.678.437,00	87,87	3.772.300.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	27.582.677.000,00	24.185.505.000,00	87,68	2.334.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	27.582.677.000,00	24.185.505.000,00	87,68	2.334.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	474.135.697,00	469.173.437,00	98,95	1.438.300.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	72.850.500,00	70.984.500,00	97,44	0,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	83.085.197,00	82.974.026,00	99,87	238.300.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	318.200.000,00	315.214.911,00	99,06	1.200.000.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	184.850.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	184.850.000,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	0,00	0,00	0,00	184.850.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	16.841.428.358,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	16.841.428.358,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	16.841.428.358,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	14.895.725.682,00	14.895.654.082,00	100,00	0,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	14.871.423.200,00	14.871.351.600,00	100,00	0,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	14.871.423.200,00	14.871.351.600,00	100,00	0,00
5.2.02.89.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	24.302.482,00	24.302.482,00	100,00	0,00
5.2.02.89.03.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	24.302.482,00	24.302.482,00	100,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81.271.125.943,00	80.299.720.600,00	98,80	67.028.719.691,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	67.740.570.943,00	66.837.120.600,00	98,67	58.785.274.691,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	60.466.660.943,00	59.608.284.600,00	98,58	54.465.203.171,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	5.408.562.700,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	52.751.936.943,00	51.929.338.600,00	98,44	45.314.635.471,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	7.714.724.000,00	7.678.946.000,00	99,54	3.742.005.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	7.273.910.000,00	7.228.836.000,00	99,38	4.320.071.520,00
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	3.273.910.000,00	3.270.541.000,00	99,90	4.320.071.520,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	4.000.000.000,00	3.958.295.000,00	98,96	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	13.530.555.000,00	13.462.600.000,00	99,50	8.243.445.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	13.530.555.000,00	13.462.600.000,00	99,50	8.243.445.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	13.530.555.000,00	13.462.600.000,00	99,50	8.243.445.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.997.009.365,00	12.982.234.349,00	99,89	11.700.479.750,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	247.845.000,00	234.423.000,00	94,58	64.950.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	247.845.000,00	234.423.000,00	94,58	64.950.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	0,00	0,00	0,00	64.950.000,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	247.845.000,00	234.423.000,00	94,58	0,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	11.635.529.750,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	11.635.529.750,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	11.635.529.750,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	12.749.164.365,00	12.747.811.349,00	99,99	0,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	12.749.164.365,00	12.747.811.349,00	99,99	0,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	12.749.164.365,00	12.747.811.349,00	99,99	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	204.161.011.445,00	199.237.123.442,00	97,59	121.965.719.999,00
	JUMLAH BELANJA	1.006.357.040.332,90	942.004.992.568,48	93,61	778.862.912.565,00
	SURPLUS/DEFISIT	(1.006.352.040.332,90)	(941.999.992.568,48)	93,61	(778.859.412.565,00)

Kab. Muara Enim, 26 Januari 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. Rusdi Hairullah, M.Si
NIP.197109161991011001



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM
DINAS KESEHATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	43.231.589.925,00	36.711.032.019,00	84,92	33.819.855.942,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	43.231.589.925,00	36.711.032.019,00	84,92	33.819.855.942,00
4.1.02	Retribusi Daerah	43.231.589.925,00	36.439.066.275,00	84,29	139.211.268,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	43.151.589.925,00	36.305.862.041,00	84,14	139.211.268,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	43.151.589.925,00	36.305.862.041,00	84,14	139.211.268,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	40.820.345.735,00	33.477.623.864,00	82,01	0,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	2.331.244.190,00	2.828.238.177,00	121,32	139.211.268,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	80.000.000,00	133.204.234,00	166,51	0,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	80.000.000,00	133.204.234,00	166,51	0,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	80.000.000,00	133.204.234,00	166,51	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	271.965.744,00	0,00	33.680.644.674,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	271.965.744,00	0,00	0,00
4.1.04.15.99	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BLUD, Belanja Barang dan Jasa BLUD, Belanja Modal Tanah BLUD, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD, Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD, serta Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00	271.965.744,00	0,00	0,00
4.1.04.15.99.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BLUD	0,00	271.965.744,00	0,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	33.680.644.674,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	0,00	0,00	33.590.691.386,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	0,00	0,00	33.590.691.386,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	0,00	0,00	0,00	89.953.288,00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	0,00	0,00	0,00	89.953.288,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	43.231.589.925,00	36.711.032.019,00	84,92	33.819.855.942,00
	JUMLAH PENDAPATAN	43.231.589.925,00	36.711.032.019,00	84,92	33.819.855.942,00
5	BELANJA DAERAH	577.202.848.380,83	508.455.960.319,93	88,09	426.969.042.260,16
5.1	BELANJA OPERASI	475.930.819.838,83	416.262.975.142,93	87,46	358.789.060.735,16
5.1.01	Belanja Pegawai	284.500.328.028,00	249.940.014.042,54	87,85	184.007.112.479,03
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	143.937.529.919,00	129.913.820.303,00	90,26	100.720.501.596,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	112.660.451.432,00	104.533.235.766,00	92,79	80.491.443.033,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	79.252.047.361,00	75.619.600.288,00	95,42	71.184.679.167,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	33.408.404.071,00	28.913.635.478,00	86,55	9.306.763.866,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	10.237.353.684,71	8.666.799.587,00	84,66	6.928.348.511,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	7.000.791.360,71	6.427.116.964,00	91,81	6.236.870.929,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.236.562.324,00	2.239.682.623,00	69,20	691.477.582,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	474.595.500,00	465.605.000,00	98,11	530.075.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	474.595.500,00	465.605.000,00	98,11	530.075.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	9.665.929.246,00	7.982.194.850,00	82,58	7.527.269.240,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	9.665.929.246,00	7.982.194.850,00	82,58	7.527.269.240,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.319.430.000,00	2.448.134.300,00	73,75	903.508.250,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.142.260.000,00	661.708.850,00	57,93	339.283.250,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.177.170.000,00	1.786.425.450,00	82,05	564.225.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	7.375.588.685,00	5.688.482.370,00	77,13	4.268.362.380,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	4.564.859.435,00	3.921.180.900,00	85,90	3.724.198.500,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.810.729.250,00	1.767.301.470,00	62,88	544.163.880,00

5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	199.670.000,00	127.640.285,00	63,93	70.270.104,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	199.670.000,00	127.640.285,00	63,93	70.270.104,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.511.371,29	1.728.145,00	38,31	1.225.078,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.581.747,29	1.068.770,00	67,57	1.009.960,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.929.624,00	659.375,00	22,51	215.118,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	124.812.639.913,00	106.850.698.291,00	85,61	69.673.208.391,80
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.961.730.669,00	6.637.906.965,00	74,07	58.642.518.567,80
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.850.268.729,00	5.512.916.322,00	80,48	51.410.437.223,80
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	2.111.461.940,00	1.124.990.643,00	53,28	7.232.081.344,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	16.550.325.134,00	13.500.859.641,00	81,57	7.982.260.649,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	13.881.756.364,00	11.398.106.495,00	82,11	7.188.490.910,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	2.668.568.770,00	2.102.753.146,00	78,80	793.769.739,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	6.386.930.942,00	5.306.996.990,00	83,09	3.048.429.175,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	6.259.316.574,00	5.187.856.229,00	82,88	2.989.842.666,00
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	127.614.368,00	119.140.761,00	93,36	58.586.509,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	91.011.531.168,00	80.988.772.458,00	88,99	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	63.002.221.898,00	59.633.189.705,00	94,65	0,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	28.009.309.270,00	21.355.582.753,00	76,24	0,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.902.122.000,00	416.162.237,00	21,88	0,00
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.902.122.000,00	416.162.237,00	21,88	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	1.827.205.086,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	1.827.205.086,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	1.827.205.086,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	15.750.158.196,00	13.175.495.448,54	83,65	11.786.197.405,23
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	15.750.158.196,00	13.175.495.448,54	83,65	11.786.197.405,23
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	15.750.158.196,00	13.175.495.448,54	83,65	11.786.197.405,23
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	190.930.491.810,83	166.322.961.100,39	87,11	174.260.438.756,13
5.1.02.01	Belanja Barang	37.223.788.133,00	32.913.792.523,20	88,42	32.965.379.874,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.223.788.133,00	32.913.792.523,20	88,42	32.965.379.874,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	118.335.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	344.000.000,00	184.870.500,00	53,74	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	480.949.563,00	309.122.800,00	64,27	343.805.300,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	33.020.000,00	28.604.100,00	86,63	16.000.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	36.900.000,00	27.438.900,00	74,36	20.707.800,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	16.199.308.927,00	14.443.771.832,00	89,16	9.101.062.820,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.380.000,00	1.376.400,00	99,74	0,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	2.090.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	574.240.959,00	438.982.875,00	76,45	637.007.210,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	720.000,00	600.000,00	83,33	30.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.838.383.512,00	1.600.468.444,00	87,06	1.609.225.450,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	31.954.800,00	21.108.000,00	66,06	23.920.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	300.000,00	300.000,00	100,00	7.386.400,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	350.725.085,00	323.389.502,00	92,21	274.795.600,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	724.408.920,00	114.253.860,00	15,77	421.714.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	39.599.000,00	31.895.000,00	80,54	34.308.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	9.053.629.367,00	8.872.963.710,20	98,00	8.630.165.343,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.279.500.000,00	4.257.500.000,00	99,49	7.982.000.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	4.600.000,00	2.100.000,00	45,65	6.280.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	582.885.000,00	435.754.000,00	74,76	531.992.200,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	270.000,00	135.000,00	50,00	4.335.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	25.740.000,00	25.740.000,00	100,00	92.094.500,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.480.040.000,00	1.693.212.600,00	68,27	2.994.370.251,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	139.143.000,00	100.205.000,00	72,02	108.345.000,00

5.1.02.02	Belanja Jasa	109.800.348.750,00	104.502.975.295,00	95,18	105.382.278.685,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.851.963.750,00	13.110.032.037,00	77,80	18.287.616.910,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	879.380.000,00	766.450.000,00	87,16	773.435.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.673.250.000,00	2.092.675.000,00	78,28	3.926.720.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.308.609.600,00	295.339.247,00	22,57	92.435.500,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.857.260.000,00	6.596.520.000,00	83,95	10.994.340.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	79.200.000,00	70.840.000,00	89,44	73.480.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	689.400.000,00	623.199.482,00	90,40	536.858.708,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	35.164.800,00	35.164.800,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	90.000.000,00	79.920.000,00	88,80	26.640.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	150.000.000,00	147.365.920,00	98,24	123.848.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	47.400.000,00	31.050.000,00	65,51	34.325.250,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	99.000.000,00	99.000.000,00	100,00	50.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	199.980.000,00	199.980.000,00	100,00	166.650.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	37.260.000,00	15.365.800,00	41,24	18.095.650,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.491.240.000,00	1.452.693.718,00	97,42	1.262.338.445,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	0,00	0,00	0,00	8.360.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	175.347.500,00	148.783.720,00	84,85	151.668.657,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	145.062.500,00	1.137.500,00	0,78	1.998.500,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	426.683.100,00	0,00	0,00	6.712.300,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	33.666.250,00	22.626.850,00	67,21	34.710.900,00
5.1.02.02.01.0085	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	398.040.000,00	395.900.000,00	99,46	0,00
5.1.02.02.01.0087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	2.140.000,00	2.140.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	8.560.000,00	8.560.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	20.320.000,00	20.320.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	87.767.400.000,00	87.056.348.600,00	99,19	82.831.619.400,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPJS dan BP Kelas 3	87.431.400.000,00	86.894.612.200,00	99,39	82.736.515.400,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPJS dan BP Kelas 3	336.000.000,00	161.736.400,00	48,14	95.104.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	52.600.000,00	42.440.000,00	80,68	51.650.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	14.000.000,00	8.000.000,00	57,14	12.800.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	38.600.000,00	34.440.000,00	89,22	38.850.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.565.595.000,00	3.080.850.000,00	86,40	2.726.194.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	513.767.000,00	373.620.000,00	72,72	725.546.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	3.051.828.000,00	2.707.230.000,00	88,71	1.974.633.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	26.015.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	690.000.000,00	661.113.000,00	95,81	752.449.400,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	40.000.000,00	19.348.000,00	48,37	0,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	650.000.000,00	641.765.000,00	98,73	752.449.400,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	872.790.000,00	552.191.658,00	63,27	732.748.975,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	682.650.000,00	386.151.658,00	56,57	705.728.975,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	190.140.000,00	166.040.000,00	87,33	27.020.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.923.028.437,99	1.360.867.897,00	70,77	789.468.010,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.536.378.437,99	1.154.748.997,00	75,16	720.381.010,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	484.939.602,99	290.369.596,00	59,88	199.620.433,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	25.000.000,00	24.997.000,00	99,99	4.540.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	207.257.835,00	128.540.486,00	62,02	103.670.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	52.660.000,00	29.234.800,00	55,52	15.889.577,00

5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Umum Lainnya	739.831.000,00	672.997.115,00	90,97	380.231.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	26.690.000,00	8.610.000,00	32,26	16.430.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	386.650.000,00	206.118.900,00	53,31	69.087.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	386.650.000,00	206.118.900,00	53,31	69.087.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.920.490.183,84	3.348.902.913,00	85,42	4.944.758.974,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.920.490.183,84	3.348.902.913,00	85,42	4.944.758.974,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.920.490.183,84	3.348.902.913,00	85,42	4.944.758.974,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	108.000.000,00	69.600.000,00	64,44	101.989.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	108.000.000,00	69.600.000,00	64,44	91.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	108.000.000,00	69.600.000,00	64,44	91.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	10.989.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	10.989.000,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	13.488.452.798,00	8.405.789.871,00	62,32	11.849.559.155,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	13.488.452.798,00	8.405.789.871,00	62,32	11.849.559.155,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	13.488.452.798,00	8.405.789.871,00	62,32	11.849.559.155,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	24.466.383.508,00	15.721.032.601,19	64,26	18.227.005.058,13
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	24.466.383.508,00	15.721.032.601,19	64,26	18.227.005.058,13
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	24.466.383.508,00	15.721.032.601,19	64,26	18.227.005.058,13
5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	0,00	0,00	521.509.500,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	500.000.000,00	0,00	0,00	521.509.500,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000,00	0,00	0,00	521.509.500,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000,00	0,00	0,00	521.509.500,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	475.930.819.838,83	416.262.975.142,93	87,46	358.789.060.735,16
5.2	BELANJA MODAL	101.272.028.542,00	92.192.985.177,00	91,03	68.179.981.525,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.606.808.509,00	47.068.013.025,00	87,80	32.554.729.814,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.950.000.000,00	3.704.700.000,00	93,79	3.992.800.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.950.000.000,00	3.704.700.000,00	93,79	3.992.800.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	350.000.000,00	341.400.000,00	97,54	288.800.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	760.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	3.600.000.000,00	3.363.300.000,00	93,43	2.944.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.267.290.860,00	5.020.174.405,00	95,31	2.373.600.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.334.070.500,00	1.184.847.388,00	88,81	1.045.795.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	273.280.500,00	222.277.994,00	81,34	71.170.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.060.790.000,00	962.569.394,00	90,74	974.625.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.933.220.360,00	3.835.327.017,00	97,51	1.327.805.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	877.908.000,00	846.467.717,00	96,42	367.094.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	5.000.000,00	4.995.000,00	99,90	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	2.738.726.160,00	2.717.119.600,00	99,21	352.350.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	274.190.000,00	231.919.700,00	84,58	575.361.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	35.396.200,00	34.825.000,00	98,39	33.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	68.485.000,00	67.821.000,00	99,03	98.800.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	14.985.000,00	14.430.000,00	96,30	56.450.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	14.985.000,00	14.430.000,00	96,30	56.450.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	53.500.000,00	53.391.000,00	99,80	42.350.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	53.500.000,00	53.391.000,00	99,80	42.350.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	30.142.992.153,00	27.503.936.020,00	91,24	20.117.081.248,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	30.142.992.153,00	27.503.936.020,00	91,24	20.117.081.248,00

5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	16.596.901.433,00	14.558.062.315,00	87,72	14.281.009.885,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	1.308.965.000,00	1.154.960.014,00	88,23	0,00
5.2.02.07.01.0003	Belanja Modal Alat Kedokteran Keluarga Berencana	601.712.865,00	513.465.005,00	85,33	0,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	2.000.000.000,00	1.899.400.001,00	94,97	3.420.500.000,00
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	444.794.000,00	409.067.500,00	91,97	0,00
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	7.527.499.361,00	7.371.448.335,00	97,93	93.684.304,00
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	60.000.000,00	48.740.000,00	81,23	0,00
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	1.603.119.494,00	1.548.792.850,00	96,61	2.321.887.059,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	7.989.476.100,00	6.555.316.439,00	82,05	991.954.303,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	7.979.476.100,00	6.545.451.438,00	82,03	991.954.303,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	7.979.476.100,00	6.545.451.438,00	82,03	991.954.303,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	10.000.000,00	9.865.001,00	98,65	0,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	10.000.000,00	9.865.001,00	98,65	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.130.058.800,00	1.046.948.802,00	92,65	1.326.825.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	849.281.900,00	829.189.002,00	97,63	1.077.650.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	849.281.900,00	829.189.002,00	97,63	1.077.650.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	280.776.900,00	217.759.800,00	77,56	249.175.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	280.776.900,00	217.759.800,00	77,56	249.175.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	104.128.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	104.128.000,00
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	0,00	0,00	0,00	104.128.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	3.050.000,00	0,00	0,00	3.755.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	3.050.000,00	0,00	0,00	3.755.000,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	3.050.000,00	0,00	0,00	3.755.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.047.955.596,00	3.169.116.359,00	62,78	3.545.786.263,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.047.955.596,00	3.169.116.359,00	62,78	3.545.786.263,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.047.955.596,00	3.169.116.359,00	62,78	3.545.786.263,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.875.220.033,00	39.885.133.410,00	95,25	31.894.630.151,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	35.944.200.000,00	35.055.454.000,00	97,53	28.231.428.151,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	35.544.200.000,00	34.656.254.000,00	97,50	26.849.528.151,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.200.000.000,00	1.018.250.000,00	84,85	1.048.110.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	33.094.200.000,00	32.399.382.000,00	97,90	25.602.280.151,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.250.000.000,00	1.238.622.000,00	99,09	199.138.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	400.000.000,00	399.200.000,00	99,80	1.381.900.000,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	400.000.000,00	399.200.000,00	99,80	1.381.900.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.000.000.000,00	3.978.334.000,00	99,46	2.099.352.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	4.000.000.000,00	3.978.334.000,00	99,46	2.099.352.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	4.000.000.000,00	3.978.334.000,00	99,46	2.099.352.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.931.020.033,00	851.345.410,00	44,09	1.563.850.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.931.020.033,00	851.345.410,00	44,09	1.563.850.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.931.020.033,00	851.345.410,00	44,09	1.563.850.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.280.000.000,00	4.244.593.842,00	99,17	2.778.190.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	2.985.000.000,00	2.970.834.000,00	99,53	2.778.190.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulungan Bencana Alam	200.000.000,00	198.834.000,00	99,42	2.778.190.000,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	200.000.000,00	198.834.000,00	99,42	2.778.190.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	2.785.000.000,00	2.772.000.000,00	99,53	0,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	2.785.000.000,00	2.772.000.000,00	99,53	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.160.000.000,00	1.157.544.496,00	99,79	0,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.160.000.000,00	1.157.544.496,00	99,79	0,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.160.000.000,00	1.157.544.496,00	99,79	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	100.000.000,00	99.100.000,00	99,10	0,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	100.000.000,00	99.100.000,00	99,10	0,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	100.000.000,00	99.100.000,00	99,10	0,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	35.000.000,00	17.115.346,00	48,90	0,00
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	35.000.000,00	17.115.346,00	48,90	0,00

5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	35.000.000,00	17.115.346,00	48,90	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.510.000.000,00	995.244.900,00	65,91	952.431.560,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.510.000.000,00	995.244.900,00	65,91	952.431.560,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.510.000.000,00	995.244.900,00	65,91	952.431.560,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	1.510.000.000,00	995.244.900,00	65,91	952.431.560,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	101.272.028.542,00	92.192.985.177,00	91,03	68.179.981.525,00
	JUMLAH BELANJA	577.202.848.380,83	508.455.960.319,93	88,09	426.969.042.260,16
	SURPLUS/DEFISIT	(533.971.258.455,83)	(471.744.928.300,93)	88,35	(393.149.186.318,16)

Muara Enim, Januari 2026
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Muara Enim

dr. Eni Zatila, M.K.M
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19710202 200012 2 003

L A P O R A N
REALISASI FISIK, NON FISIK, DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN ANGGARAN 2025
(KEGIATAN BELANJA OPERASIONAL)

Kadaan : Per 31 Desember 2025

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU INDUKATIF (Rp.)	PAGU PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI					
				FISIK (%)	FISIK (Rp.)	NON FISIK (%)	NON FISIK (Rp.)	KEUANGAN	
								(Rp.)	(%)
1	2	8	9	15	16	17	18	17	18
	DINAS/ISTANSI RSUD HM Rabain	230.607.895.201,00	233.739.720.092,37	98,52	88.330.197.966	100,00	144.081.522.126	207.812.801.801,86	88,91
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	113.473.000.000,00	154.906.746.937,37	94,14	21.332.120.012	100,00	132.246.626.925	133.465.294.389,86	86,16
	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	-	-		-		-	-	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-			100,00	-		0,00
	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	-	-		-		-	-	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-			100,00	-		0,00
	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	-	6.060.120.012,00		6.060.120.012			6.039.449.999,00	99,66
3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	-	6.060.120.012,00	100,00	6.060.120.012				
	- Mobil Ambulance RSUD dr.H.Moh.Rabain (ABT)	-	5.010.120.012,00	100,00				4.989.450.000,00	99,59
	- Mobil Jenazah RSUD dr.H.Moh.Rabain (ABT)	-	1.050.000.000,00	100,00				1.049.999.999,00	100,00
	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	113.473.000.000,00	148.846.626.925,37		15.272.000.000		132.246.626.925	127.425.844.390,86	85,61
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		148.846.626.925						
4	Belanja Pegawai BLUD	51.062.850.000,00	72.516.530.650,00			100,00	72.516.530.650	57.504.915.705,00	79,30
5	Belanja Barang dan Jasa BLUD	52.810.150.000,00	59.730.096.275,37			100,00	59.730.096.275	55.511.723.396,86	92,94
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.600.000.000,00	16.600.000.000,00	92,00	15.272.000.000			14.409.205.289,00	86,80
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	117.134.895.201,00	78.832.973.155,00	100,00	66.998.077.954	100,00	11.834.895.201	74.347.507.412,00	94,31
	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM dan UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	117.134.895.201,00	78.832.973.155,00	100,00	66.998.077.954	100,00	11.834.895.201	74.347.507.412,00	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00		10.000.000.000			9.767.358.600	97,67
7	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekrutasi-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	500.000.000			405.105.600	
	- Konsultansi Pengawas Gedung Utama RSUD dr.H.Mohamad Rabain	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00				132.056.700	75,46
	- Konsultansi Pengawas Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD dr.H.Mohamad Rabain	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00				74.292.300	99,06
	- Konsultansi Pengawas Gedung Paviliun RSUD dr.H.Mohamad Rabain	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00				99.433.800	79,55
	- Konsultansi Pengawas Gedung Isolasi RSUD dr.H.Mohamad Rabain	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00				99.322.800	79,46
8	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	100,00	9.500.000.000			9.362.253.000	
	- Gedung Utama RSUD dr.H.Mohamad Rabain	3.325.000.000,00	3.325.000.000,00	100,00				3.282.500.000	98,72
	- Gedung Rawat Inap Kelas III RSUD dr.H.Mohamad Rabain	1.425.000.000,00	1.425.000.000,00	100,00				1.419.000.000	99,58
	- Gedung Paviliun RSUD dr.H.Mohamad Rabain	2.375.000.000,00	2.375.000.000,00	100,00				2.351.753.000	99,02
	- Gedung Isolasi RSUD dr.H.Mohamad Rabain	2.375.000.000,00	2.375.000.000,00	100,00				2.309.000.000	97,22
	Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.600.000.000,00	56.998.077.954,00		56.998.077.954			52.898.829.213	92,81
9	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	2.600.000.000,00	19.866.606.507,00	100,00	19.866.606.507			18.691.723.576	
	- Bed Pasien Hemodialisa	2.600.000.000,00	650.000.000,00	100,00				526.423.000	80,99
	- Bed Pasien (ABT)	-	3.900.000.000,00	100,00				3.900.000.000	100,00
	- Kursi Roda (ABT)	-	240.000.000,00	100,00				231.200.000	96,33
	- Refrigerator Pharmaceutical (ABT)	-	253.668.360,00	100,00				253.668.360	100,00
	- Tensimeter Digital (ABT)	-	186.000.000,00	100,00				185.100.000	99,52
	- Cold Box / Vaccine Carrier (ABT)	-	47.059.140,00	100,00				44.911.000	95,44
	- Monitor Pasien (ABT)	-	2.992.000.000,00	100,00				2.725.097.450	91,08
	- Syringe Pump (ABT)	-	570.000.000,00	100,00				454.500.000	79,74
	- Infus Pump (ABT)	-	540.000.000,00	100,00				463.500.000	85,83
	- Cooler Transport (ABT)	-	74.000.000,00	100,00				36.655.512	49,53
	- Biosafety Cabinet Class III (ABT)	-	718.897.500,00	100,00				622.000.000	86,52
	- Vein Finder (ABT)	-	621.500.000,00	100,00				487.500.000	78,44
	- Stetoskop (ABT)	-	40.863.000,00	100,00				36.363.000	88,99
	- Timbangan Bayi Digital (ABT)	-	44.960.000,00	100,00				40.594.000	90,29
	- Stetoskop Neonatus (ABT)	-	13.621.000,00	100,00				7.516.254	55,18
	- Tiang Infus Standar (ABT)	-	559.100.000,00	100,00				395.815.000	70,80
	- Meja Instrumen (ABT)	-	52.716.750,00	100,00				51.000.000	96,74
	- USG Portable (ABT)	-	900.000.000,00	100,00				900.000.000	100,00
	- Ventilator (ABT)	-	5.615.691.557,00	100,00				5.614.000.000	99,97
	- Termometer Digital (ABT)	-	66.750.000,00	100,00				60.500.000	90,64
	- Lemari Alat (ABT)	-	703.296.000,00	100,00				646.380.000	91,91
	- Lemari Obat (ABT)	-	316.483.200,00	100,00				297.000.000	93,84
	- Medical Compressor (ABT)	-	760.000.000,00	100,00				712.000.000	93,68
10	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	-	1.150.000.000,00	100,00	1.150.000.000			1.150.000.000	
	- Surgical Suction (ABT)	-	1.150.000.000,00	100,00				1.150.000.000	100,00
11	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	-	630.000.000,00	100,00	630.000.000			630.000.000	
	- Audiometer dan Tympanometer (ABT)	-	630.000.000,00	100,00				630.000.000	100,00

12	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	-	800.000.000,00	100,00	800.000.000			680.000.000	
	- Pleura Videoscope (ABT)	-	800.000.000,00	100,00				680.000.000	85,00
13	Belanja Modal Alat Kedokteran Kamar Jenazah / Mortuary	-	710.500.000,00	100,00	710.500.000			538.679.000	
	- Meja Jenazah (ABT)	-	40.000.000,00	100,00				39.160.000	97,90
	- Lemari Pendingin Jenazah (ABT)	-	670.500.000,00	100,00				499.519.000	74,50
14	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	-	752.150.000,00	100,00	752.150.000			715.670.210	
	- Lemari Reagen (ABT)	-	228.150.000,00	100,00				228.000.000	99,93
	- Laminar Air Flow (ABT)	-	78.375.000,00	100,00				78.375.000	100,00
	- Microscope Trinokuler (ABT)	-	46.375.000,00	100,00				45.500.000	98,11
	- Timbangan Digital (ABT)	-	9.250.000,00	100,00				7.381.500	79,80
	- Hematology Analyzer 5 Diff (ABT)	-	280.000.000,00	100,00				253.853.710	90,66
	- Centrifuge (ABT)	-	110.000.000,00	100,00				102.560.000	93,24
15	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (saraf)	-	3.876.150.000,00	100,00	3.876.150.000			3.875.000.000	
	- Transcranial Magnetic Stimulation / TMS (ABT)	-	3.876.150.000,00	100,00				3.875.000.000	99,97
16	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	-	2.922.587.090,00	100,00	2.922.587.090			2.670.000.000	
	- ECG (ABT)	-	635.420.000,00	100,00				550.000.000	86,56
	- Treadmill (ABT)	-	2.287.167.090,00	100,00				2.120.000.000	92,69
17	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	-	20.852.403.000,00	100,00	20.852.403.000			18.971.384.907	
	- CT Scan 128 Slice (ABT)	-	16.750.000.000,00	100,00				14.971.621.421	89,38
	- USG Radiologi (ABT)	-	643.000.000,00	100,00				642.933.486	99,99
	- Diagnostik X-Ray (ABT)	-	3.459.403.000,00	100,00				3.356.830.000	97,03
18	Belanja Modal Alat Kedokteran Patologi Anatomy	-	132.000.000,00	100,00	132.000.000			119.500.000	
	- Lemari Asam (ABT)	-	132.000.000,00	100,00				119.500.000	90,53
19	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	-	5.305.681.357,00	100,00	5.305.681.357			4.856.871.520	
	- Nurse Call Dua Arah (ABT)	-	382.681.357,00	100,00				254.371.520	66,47
	- Plasma Low Temperature Sterilizer (ABT)	-	2.523.000.000,00	100,00				2.420.000.000	95,92
	- Washer Desinfectan (ABT)	-	2.400.000.000,00	100,00				2.182.500.000	90,94
	Pengembangan Rumah Sakit	92.700.000.000,00	-		-			-	
20	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekrutasi - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	2.700.000.000,00	-	0,00				-	0,00
	- Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung RSUD dr.H.Mohamad Rabain	2.700.000.000,00	-						
21	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya - Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	-	-	0,00				-	0,00
	- Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Rumah Sakit RSUD Dr.H.Moh.Rabain Tahap I - Multityear	-	-						
22	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	90.000.000.000,00	-	0,00				-	0,00
	- Pembangunan Gedung Rumah Sakit RSUD Dr.H.Moh.Rabain Tahap I - Multityear	90.000.000.000,00	-						
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	11.834.895.201,00	11.834.895.201,00					11.681.319.599,00	98,70
23	- Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.748.899.650,00	7.748.899.650,00			100,00	7.748.899.650	7.660.615.200,00	98,86
24	- Belanja Obat-Obatan-Obat	4.085.995.551	4.085.995.551,00			100,00	4.085.995.551	4.020.704.399,00	98,40

	Pagu	Realisasi	%
Belanja Operasi	154.081.522.126,37	134.465.317.300,86	87,269
Belanja Modal	79.658.197.966,00	73.347.484.501,00	92,08
	233.739.720.092,37	207.812.801.801,86	88,91



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	319.389.720,00	109.598.781,00	34,32	218.641.454,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	319.389.720,00	109.598.781,00	34,32	218.641.454,00
4.1.02	Retribusi Daerah	319.389.720,00	109.598.781,00	34,32	218.641.454,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	52.250.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	267.139.720,00	109.598.781,00	41,03	218.641.454,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	319.389.720,00	109.598.781,00	34,32	218.641.454,00
	JUMLAH PENDAPATAN	319.389.720,00	109.598.781,00	34,32	218.641.454,00
5	BELANJA DAERAH	845.934.853.149,04	742.955.788.603,32	87,83	814.366.952.157,00
5.1	BELANJA OPERASI	116.793.311.409,18	104.742.453.602,00	89,68	105.310.699.617,00
5.1.01	Belanja Pegawai	10.513.273.291,18	8.088.418.720,00	76,94	6.684.984.575,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.931.226.410,10	4.679.118.951,00	78,89	3.792.338.552,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.582.046.881,08	3.409.299.769,00	74,41	2.892.646.023,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.280.038.118,00	96.654.034.882,00	90,94	91.424.577.042,00
5.1.02.01	Belanja Barang	68.405.292.716,00	66.727.142.862,00	97,55	65.242.054.925,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	25.848.357.792,00	21.220.947.762,00	82,10	15.738.037.811,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3.750.453.610,00	2.317.152.409,00	61,78	7.865.585.228,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.930.734.000,00	2.043.591.849,00	51,99	2.578.899.078,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.345.200.000,00	4.345.200.000,00	100,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	7.201.138.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	7.201.138.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	116.793.311.409,18	104.742.453.602,00	89,68	105.310.699.617,00
5.2	BELANJA MODAL	729.141.541.739,86	638.213.335.001,32	87,53	709.056.252.540,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.470.880.358,17	1.269.955.252,00	86,34	3.339.291.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	1.128.350.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	334.902.400,00	333.860.250,00	99,69	2.023.741.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	473.697.658,17	469.530.000,00	99,12	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	662.280.300,00	466.565.002,00	70,45	187.200.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.669.100.000,00	41.692.963.000,00	57,37	10.043.396.850,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	72.669.100.000,00	41.692.963.000,00	57,37	10.043.396.850,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	655.001.561.381,69	595.250.416.749,32	90,88	695.673.564.690,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	503.136.500.284,00	455.866.769.228,32	90,60	552.380.370.312,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	151.865.061.097,69	139.383.647.521,00	91,78	143.293.194.378,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	729.141.541.739,86	638.213.335.001,32	87,53	709.056.252.540,00
	JUMLAH BELANJA	845.934.853.149,04	742.955.788.603,32	87,83	814.366.952.157,00
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
	SURPLUS/DEFISIT	(845.615.463.429,04)	(742.846.189.822,32)	87,85	(814.148.310.703,00)

Kab. Muara Enim, 23 Januari 2026 PLT. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Suhermansyah, ST, M.Eng.
NIP.197208202005011004



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	21.410.000,00	4.300.000,00	20,08	0,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	21.410.000,00	4.300.000,00	20,08	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	21.410.000,00	4.300.000,00	20,08	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	21.410.000,00	4.300.000,00	20,08	0,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	21.410.000,00	4.300.000,00	20,08	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	21.410.000,00	4.300.000,00	20,08	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	21.410.000,00	4.300.000,00	20,08	0,00
5	BELANJA DAERAH	249.752.354.737,60	197.238.065.389,00	78,97	214.437.385.062,99
5.1	BELANJA OPERASI	77.880.369.624,60	72.865.234.670,00	93,56	100.530.558.472,00
5.1.01	Belanja Pegawai	7.220.569.246,60	5.836.358.993,00	80,82	5.368.020.675,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.293.757.742,60	3.300.066.995,00	76,85	2.971.050.668,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.277.828.640,00	2.634.053.843,00	80,35	2.332.952.244,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	334.006.975,60	218.407.499,00	65,39	203.805.196,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	239.132.500,00	125.440.000,00	52,45	165.970.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	91.635.000,00	77.780.000,00	84,88	78.150.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	119.146.000,00	95.195.000,00	79,89	61.465.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	223.365.827,00	146.505.660,00	65,59	125.938.380,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.507.500,00	2.645.665,00	31,09	2.733.730,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	135.300,00	39.328,00	29,06	36.118,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.926.811.504,00	2.536.291.998,00	86,65	2.396.970.007,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.926.811.504,00	2.536.291.998,00	86,65	2.396.970.007,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.834.800.378,00	36.496.375.677,00	91,61	58.567.524.797,00
5.1.02.01	Belanja Barang	22.978.964.133,00	22.441.615.667,00	97,66	29.066.675.718,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.978.964.133,00	22.441.615.667,00	97,66	29.066.675.718,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	10.904.140.525,00	8.706.447.055,00	79,84	26.063.506.862,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.929.166.525,00	8.016.822.860,00	80,74	25.798.902.968,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	121.974.000,00	95.045.415,00	77,92	85.163.194,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	115.000.000,00	34.200.000,00	29,73	26.000.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	600.000.000,00	493.628.780,00	82,27	14.840.700,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis s	138.000.000,00	66.750.000,00	48,36	138.600.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	2.597.170.320,00	2.528.735.697,00	97,36	441.770.489,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	538.024.250,00	491.281.697,00	91,31	354.570.489,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.859.146.070,00	1.838.454.000,00	98,88	87.200.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	199.000.000,00	99,50	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.854.525.400,00	2.358.117.258,00	82,60	2.439.001.728,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.854.525.400,00	2.358.117.258,00	82,60	2.439.001.728,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	500.000.000,00	461.460.000,00	92,29	556.570.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	500.000.000,00	461.460.000,00	92,29	556.570.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	30.825.000.000,00	30.532.500.000,00	99,05	36.595.013.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kema	30.825.000.000,00	30.532.500.000,00	99,05	36.595.013.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat	30.825.000.000,00	30.532.500.000,00	99,05	36.595.013.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	77.880.369.624,60	72.865.234.670,00	93,56	100.530.558.472,00
5.2	BELANJA MODAL	171.871.985.113,00	124.372.830.719,00	72,36	113.906.826.590,99
5.2.01	Belanja Modal Tanah	61.975.000.000,00	17.527.346.000,00	28,28	10.194.664.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	61.975.000.000,00	17.527.346.000,00	28,28	10.194.664.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	51.275.000.000,00	12.157.804.000,00	23,71	6.801.806.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	10.700.000.000,00	5.369.542.000,00	50,18	3.392.858.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.873.659.210,00	3.833.126.800,00	98,95	1.215.870.800,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.750.000.000,00	2.719.408.500,00	98,88	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.750.000.000,00	2.719.408.500,00	98,88	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.037.532.510,00	1.029.133.300,00	99,19	193.170.800,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	31.280.000,00	31.124.400,00	99,50	16.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.006.252.510,00	998.008.900,00	99,18	177.170.800,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	802.400.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	250.000.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	549.500.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	86.126.700,00	84.585.000,00	98,20	220.300.000,00

5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	69.630.000,00	69.630.000,00	100,00	151.600.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	16.496.700,00	14.955.000,00	90,65	68.700.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.713.344.424,00	19.137.848.000,00	88,13	15.921.741.897,25
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	21.513.344.424,00	18.938.848.000,00	88,03	15.523.507.897,25
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	21.513.344.424,00	18.938.848.000,00	88,03	15.523.507.897,25
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	200.000.000,00	199.000.000,00	99,50	398.234.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	200.000.000,00	199.000.000,00	99,50	398.234.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.309.981.479,00	83.874.509.919,00	99,48	86.574.549.893,74
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	39.958.941.500,00	39.767.048.000,00	99,51	39.530.916.781,74
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	39.958.941.500,00	39.767.048.000,00	99,51	39.530.916.781,74
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	23.778.750.000,00	23.674.798.000,00	99,56	16.692.711.640,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan F	0,00	0,00	0,00	197.500.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	23.778.750.000,00	23.674.798.000,00	99,56	16.495.211.640,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	20.572.289.979,00	20.432.663.919,00	99,32	30.350.921.472,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	20.572.289.979,00	20.432.663.919,00	99,32	30.350.921.472,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	171.871.985.113,00	124.372.830.719,00	72,36	113.906.826.590,99
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	249.752.354.737,60	197.238.065.389,00	78,97	214.437.385.062,99
	SURPLUS/DEFISIT	(249.730.944.737,60)	(197.233.765.389,00)	78,97	(214.437.385.062,99)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(249.730.944.737,60)	(197.233.765.389,00)	78,97	(214.437.385.062,99)

Kab. Muara Enim, 24 Februari 2026
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

Hermin Eko Purwanto, S.T., M.T.
NIP.197310262005011004



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	20.212.105.652,40	17.310.099.044,00	85,64	12.592.143.371,00
5.1	BELANJA OPERASI	19.508.595.549,40	16.624.949.112,00	85,22	11.680.471.141,00
5.1.01	Belanja Pegawai	11.805.144.075,66	9.818.276.631,00	83,17	3.396.015.744,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.425.810.339,66	5.227.508.194,00	81,35	1.556.913.221,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.821.311.598,00	4.244.190.720,00	88,03	1.195.006.015,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.002.818.098,00	2.506.232.720,00	83,46	1.195.006.015,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.818.493.500,00	1.737.958.000,00	95,57	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	650.668.772,05	310.577.450,00	47,73	132.521.586,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	396.079.682,05	174.755.530,00	44,12	132.521.586,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	254.589.090,00	135.821.920,00	53,35	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	170.470.825,00	134.400.000,00	78,84	125.820.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	170.470.825,00	134.400.000,00	78,84	125.820.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	286.754.000,00	262.590.000,00	91,57	28.380.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	154.775.000,00	138.030.000,00	89,18	28.380.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	131.979.000,00	124.560.000,00	94,38	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	492.593.598,00	275.123.580,00	55,85	73.216.620,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	285.935.886,00	147.374.700,00	51,54	73.216.620,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	206.657.712,00	127.748.880,00	61,82	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.906.753,68	552.080,00	14,13	1.952.304,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.906.753,68	552.080,00	14,13	1.952.304,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	104.792,93	74.364,00	70,96	16.696,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	56.995,13	42.612,00	74,76	16.696,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	47.797,80	31.752,00	66,43	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.379.333.736,00	4.590.768.437,00	85,34	1.839.102.523,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.385.793.920,00	3.773.410.997,00	86,04	1.504.885.855,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.183.891.704,00	2.582.082.631,00	81,10	1.504.885.855,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.201.902.216,00	1.191.328.366,00	99,12	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	896.592.926,00	733.369.186,00	81,80	334.216.668,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	683.689.622,00	522.512.814,00	76,43	334.216.668,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	212.903.304,00	210.856.372,00	99,04	0,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	96.946.890,00	83.988.254,00	86,63	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	73.893.666,00	60.963.910,00	82,50	0,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	23.053.224,00	23.024.344,00	99,87	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.703.451.473,74	6.806.672.481,00	88,36	8.284.455.397,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.284.453.975,00	1.100.088.485,00	85,65	1.279.304.240,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.284.453.975,00	1.100.088.485,00	85,65	1.279.304.240,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	233.090.000,00	164.526.825,00	70,59	184.965.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	2.450.000,00	81,67	480.000,00

5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	5.310.000,00	1.810.000,00	34,09	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	195.535.375,00	187.006.860,00	95,64	217.054.600,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	110.756.800,00	98.506.800,00	88,94	167.631.640,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12.320.000,00	11.000.000,00	89,29	11.720.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	22.938.000,00	22.336.000,00	97,38	53.483.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	17.640.800,00	16.439.000,00	93,19	17.550.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	189.000.000,00	189.000.000,00	100,00	108.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	23.625.000,00	14.945.000,00	63,26	1.725.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	461.638.000,00	382.468.000,00	82,85	516.695.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	4.015.020.356,00	3.496.653.204,00	87,09	5.100.589.135,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.418.520.356,00	3.075.298.204,00	89,96	5.049.973.135,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.300.000,00	8.400.000,00	90,32	6.600.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	6.000.000,00	5.000.000,00	83,33	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	132.080.000,00	124.460.000,00	94,23	198.120.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.400.000,00	2.000.000,00	83,33	1.200.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.004.400.000,00	2.737.660.000,00	91,12	4.639.520.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	76.500.000,00	76.500.000,00	100,00	108.900.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	9.660.000,00	4.459.250,00	46,16	2.904.750,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	72.828.000,00	66.042.029,00	90,68	53.326.777,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.024.000,00	4.980.000,00	55,19	1.800.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	51.750.000,00	22.347.100,00	43,18	24.366.608,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	300.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	43.178.356,00	22.349.825,00	51,76	7.235.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	0,00	0,00	0,00	50.616.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	0,00	0,00	0,00	50.616.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0009	Belanja Sewa Loader	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	95.000.000,00	94.905.000,00	99,90	0,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	95.000.000,00	94.905.000,00	99,90	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	494.500.000,00	326.450.000,00	66,02	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	494.500.000,00	326.450.000,00	66,02	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	767.521.060,00	739.162.786,00	96,31	698.846.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	446.041.060,00	418.340.786,00	93,79	516.845.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	344.630.000,00	344.365.786,00	99,92	396.185.000,00

5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	1.241.060,00	1.200.000,00	96,69	1.200.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.320.000,00	7.200.000,00	98,36	24.700.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.640.000,00	8.575.000,00	99,25	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.760.000,00	8.650.000,00	98,74	14.600.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.450.000,00	3.450.000,00	100,00	8.160.000,00
5.1.02.03.02.0451	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	72.000.000,00	44.900.000,00	62,36	72.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	321.480.000,00	320.822.000,00	99,80	182.001.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	321.480.000,00	320.822.000,00	99,80	182.001.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.636.456.082,74	1.470.768.006,00	89,88	1.185.316.022,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.636.456.082,74	1.470.768.006,00	89,88	1.185.316.022,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.636.456.082,74	1.470.768.006,00	89,88	1.177.079.622,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	8.236.400,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	19.508.595.549,40	16.624.949.112,00	85,22	11.680.471.141,00
5.2	BELANJA MODAL	703.510.103,00	685.149.932,00	97,39	911.672.230,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	703.510.103,00	685.149.932,00	97,39	366.355.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.500.000,00	2.450.000,00	98,00	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	2.500.000,00	2.450.000,00	98,00	0,00
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	2.500.000,00	2.450.000,00	98,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	404.462.275,00	389.512.889,00	96,30	161.340.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	45.728.400,00	44.606.000,00	97,55	105.630.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	15.900.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	45.728.400,00	44.606.000,00	97,55	89.730.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	358.733.875,00	344.906.889,00	96,15	55.710.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	293.706.775,00	282.666.894,00	96,24	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	41.127.100,00	38.850.000,00	94,46	29.850.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	23.900.000,00	23.389.995,00	97,87	25.860.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	84.390.000,00	82.869.499,00	98,20	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	54.390.000,00	53.454.499,00	98,28	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	6.390.000,00	6.174.499,00	96,63	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	48.000.000,00	47.280.000,00	98,50	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	30.000.000,00	29.415.000,00	98,05	0,00
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	30.000.000,00	29.415.000,00	98,05	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	186.157.828,00	184.637.543,00	99,18	197.455.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	141.652.428,00	140.637.543,00	99,28	171.895.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	141.652.428,00	140.637.543,00	99,28	171.895.000,00

5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	44.505.400,00	44.000.000,00	98,86	25.560.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	44.505.400,00	44.000.000,00	98,86	25.560.000,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	20.000.000,00	19.980.000,00	99,90	0,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	20.000.000,00	19.980.000,00	99,90	0,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	20.000.000,00	19.980.000,00	99,90	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	6.000.000,00	5.700.001,00	95,00	0,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	6.000.000,00	5.700.001,00	95,00	0,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	6.000.000,00	5.700.001,00	95,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	7.560.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	7.560.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.560.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	326.249.730,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	326.249.730,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	326.249.730,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	141.849.730,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00	34.800.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	149.600.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	219.067.500,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	0,00	0,00	0,00	219.067.500,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	219.067.500,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	0,00	0,00	0,00	219.067.500,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	703.510.103,00	685.149.932,00	97,39	911.672.230,00
	JUMLAH BELANJA	20.212.105.652,40	17.310.099.044,00	85,64	12.592.143.371,00
	SURPLUS/DEFISIT	(20.212.105.652,40)	(17.310.099.044,00)	85,64	(12.592.143.371,00)

Kab. Muara Enim, 19 Januari 2026
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Dedi Suryanto Fuadi, S.H.
NIP.197610252005011007



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	20.236.489.757,20	17.593.177.481,00	86,93	19.570.029.721,00
5.1	BELANJA OPERASI	16.679.880.257,20	14.053.033.099,00	84,25	10.891.292.721,00
5.1.01	Belanja Pegawai	10.941.195.031,20	9.098.460.202,00	83,15	5.596.261.064,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.975.822.306,20	4.959.055.222,00	82,98	2.876.108.773,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.544.600.051,50	4.012.562.408,00	88,29	2.285.972.412,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	499.632.936,45	332.938.450,00	66,63	211.425.530,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	118.896.000,00	95.615.000,00	80,41	84.520.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	50.472.000,00	23.700.000,00	46,95	34.200.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	303.877.500,00	230.255.000,00	75,77	108.605.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	450.836.533,00	259.661.910,00	57,59	147.591.960,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.318.010,00	4.262.032,00	58,24	3.757.516,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	189.275,25	60.422,00	31,92	36.355,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.965.372.725,00	4.139.404.980,00	83,36	2.720.152.291,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.105.344.697,00	3.442.107.794,00	83,84	2.238.635.617,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	698.866.350,00	558.405.005,00	79,90	481.516.674,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	161.161.678,00	138.892.181,00	86,18	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.738.685.226,00	4.954.572.897,00	86,33	5.295.031.657,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.009.478.852,00	880.905.044,00	87,26	1.258.172.220,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.009.478.852,00	880.905.044,00	87,26	1.258.172.220,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.463.999.530,00	2.150.616.712,00	87,28	2.429.652.448,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.503.870.730,00	1.257.735.652,00	83,63	1.469.126.968,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	279.628.800,00	279.036.060,00	99,78	192.925.480,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	54.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	653.500.000,00	586.845.000,00	89,80	713.600.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	507.752.144,00	484.845.163,00	95,48	260.135.387,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	461.536.144,00	438.902.913,00	95,09	214.235.387,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	46.216.000,00	45.942.250,00	99,40	45.900.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.757.454.700,00	1.438.205.978,00	81,83	1.347.071.602,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.757.454.700,00	1.438.205.978,00	81,83	1.347.071.602,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	16.679.880.257,20	14.053.033.099,00	84,25	10.891.292.721,00
5.2	BELANJA MODAL	3.556.609.500,00	3.540.144.382,00	99,53	8.678.737.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.326.494.500,00	3.310.806.203,00	99,52	8.678.737.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.000.000.000,00	1.995.000.000,00	99,75	7.310.000.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.000.000.000,00	1.995.000.000,00	99,75	7.175.000.000,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	601.550.000,00	592.475.503,00	98,49	742.669.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	297.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	601.550.000,00	592.475.503,00	98,49	445.669.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	372.500.000,00	372.037.700,00	99,87	153.050.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	62.500.000,00	62.237.700,00	99,58	73.405.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	310.000.000,00	309.800.000,00	99,93	19.645.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.500.000,00	2.450.000,00	98,00	2.040.000,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	2.500.000,00	2.450.000,00	98,00	2.040.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	69.944.500,00	69.375.000,00	99,18	19.988.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	69.944.500,00	69.375.000,00	99,18	19.988.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	280.000.000,00	279.468.000,00	99,81	443.490.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	280.000.000,00	279.468.000,00	99,81	443.490.000,00

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	230.115.000,00	229.338.179,00	99,66	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	230.115.000,00	229.338.179,00	99,66	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	230.115.000,00	229.338.179,00	99,66	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	3.556.609.500,00	3.540.144.382,00	99,53	8.678.737.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	20.236.489.757,20	17.593.177.481,00	86,93	19.570.029.721,00
	SURPLUS/DEFISIT	(20.236.489.757,20)	(17.593.177.481,00)	86,93	(19.570.029.721,00)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(20.236.489.757,20)	(17.593.177.481,00)	86,93	(19.570.029.721,00)

Kab. Muara Enim, 24 Februari 2026
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Arman Sarijaya, S.H., M.Si.
NIP.197110232006041005



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	11.748.539.945,00	7.249.878.323,00	61,70	7.277.047.384,00
5.1	BELANJA OPERASI	10.839.376.945,00	6.355.872.495,00	58,63	6.812.647.384,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.460.968.815,00	3.261.542.579,00	50,48	2.421.807.697,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.076.015.503,00	1.755.989.022,00	43,08	1.289.001.489,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.652.729.514,02	1.427.861.560,00	53,82	1.030.815.253,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.079.008.594,46	1.020.410.860,00	49,08	921.892.860,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	573.720.919,56	407.450.700,00	71,01	108.922.393,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	746.651.871,50	131.145.562,00	17,56	107.203.266,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	623.276.563,25	100.043.480,00	16,05	93.684.074,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	123.375.308,25	31.102.082,00	25,20	13.519.192,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	159.069.750,00	47.880.000,00	30,10	44.100.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	159.069.750,00	47.880.000,00	30,10	44.100.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	9.929.875,00	9.390.000,00	94,56	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8.070.625,00	7.725.000,00	95,71	0,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.859.250,00	1.665.000,00	89,55	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	74.901.875,00	56.428.750,00	75,33	42.340.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	40.242.125,00	32.210.000,00	80,04	36.050.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	34.659.750,00	24.218.750,00	69,87	6.290.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	408.036.006,00	82.504.485,00	20,21	63.729.600,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	326.976.300,00	59.022.300,00	18,05	55.546.140,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	81.059.706,00	23.482.185,00	28,96	8.183.460,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	23.764.834,40	758.204,00	3,19	797.762,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	16.242.068,30	758.204,00	4,66	797.762,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	7.522.766,10	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	931.777,08	20.461,00	2,19	15.608,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	911.931,80	14.151,00	1,55	13.708,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	19.845,28	6.310,00	31,79	1.900,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.384.953.312,00	1.505.553.557,00	63,12	1.132.806.208,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.916.703.144,00	1.234.952.135,00	64,43	945.774.995,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.680.728.436,00	998.985.470,00	59,43	860.682.697,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	235.974.708,00	235.966.665,00	99,99	85.092.298,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	280.641.120,00	83.110.057,00	29,61	187.031.213,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	259.898.184,00	62.368.120,00	23,99	161.492.957,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	20.742.936,00	20.741.937,00	99,99	25.538.256,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	187.609.048,00	187.491.365,00	99,93	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	119.228.052,00	119.111.369,00	99,90	0,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	68.380.996,00	68.379.996,00	99,99	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.378.408.130,00	3.094.329.916,00	70,67	4.390.839.687,00
5.1.02.01	Belanja Barang	991.771.782,99	457.565.766,00	46,13	947.039.784,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	991.771.782,99	457.565.766,00	46,13	947.039.784,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	512.324.025,00	78.330.560,00	15,28	91.135.600,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.367.214,00	1.365.500,00	99,87	0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.200.000,00	1.144.000,00	95,33	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	110.923.866,99	77.995.406,00	70,31	199.814.100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	65.064.927,00	55.473.900,00	85,25	96.726.400,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	12.346.000,00	9.340.000,00	75,65	3.060.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15.657.800,00	15.610.300,00	99,69	17.719.584,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.158.800,00	12.118.200,00	99,66	8.744.900,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	1.600.000,00	832.500,00	52,03	13.600.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan	48.200.400,00	46.870.400,00	97,24	44.961.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	625.000,00	0,00	0,00	562.500,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	24.215.000,00	23.690.000,00	97,83	29.801.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	44.535.000,00	9.190.000,00	20,63	114.234.700,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00	11.700.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	133.753.750,00	117.805.000,00	88,07	143.380.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	107.500.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	64.100.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.691.883.400,00	1.125.027.355,00	66,49	1.814.147.767,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.235.508.000,00	814.524.726,00	65,92	1.227.466.767,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, P	30.150.000,00	13.635.000,00	45,22	60.700.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	213.000.000,00	87.300.000,00	40,98	105.075.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	458.480.000,00	376.640.000,00	82,14	670.890.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	84.240.000,00	27.280.000,00	32,38	52.890.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	50.000.000,00	30.000.000,00	60,00	177.600.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.800.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	3.479.520,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	18.500.000,00	12.762.250,00	68,98	13.632.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	99.635.880,00	69.730.851,00	69,98	92.751.492,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.722.600,00	4.780.000,00	71,10	6.570.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	100.000.000,00	99.855.600,00	99,85	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	71.920.000,00	1.861.025,00	2,58	4.607.775,00
5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Ker	85.600.000,00	85.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Ker	5.080.000,00	5.080.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	75.431.400,00	75.112.629,00	99,57	77.516.000,00

5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	75.431.400,00	75.112.629,00	99,57	77.516.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	140.000.000,00	56.000.000,00	40,00	20.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	140.000.000,00	56.000.000,00	40,00	20.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.444.000,00	3.440.000,00	99,88	12.135.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	5.135.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	3.444.000,00	3.440.000,00	99,88	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis s	237.500.000,00	175.950.000,00	74,08	477.030.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	237.500.000,00	175.950.000,00	74,08	422.280.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	54.750.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	698.687.500,00	616.872.227,00	88,29	475.203.132,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	378.687.500,00	297.523.182,00	78,56	420.203.132,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	135.000.000,00	133.979.875,00	99,24	308.985.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	83.497.500,00	32.376.057,00	38,77	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	55.050.000,00	49.451.750,00	89,83	60.607.632,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	20.730.152,00	20.574.500,00	99,24	9.265.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	22.999.848,00	22.930.500,00	99,69	14.200.500,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	34.750.000,00	24.350.500,00	70,07	9.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal	26.660.000,00	13.860.000,00	51,98	11.245.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Pe	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	320.000.000,00	319.349.045,00	99,79	55.000.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ged	320.000.000,00	319.349.045,00	99,79	55.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	996.065.447,01	894.864.568,00	89,83	1.154.449.004,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	996.065.447,01	894.864.568,00	89,83	1.154.449.004,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	996.065.447,01	894.864.568,00	89,83	994.976.876,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	159.472.128,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	10.839.376.945,00	6.355.872.495,00	58,63	6.812.647.384,00
5.2	BELANJA MODAL	909.163.000,00	894.005.828,00	98,33	464.400.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	809.163.000,00	804.405.828,00	99,41	381.400.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	356.000.000,00	355.222.128,00	99,78	66.700.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	65.000.000,00	64.935.000,00	99,90	66.700.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	65.000.000,00	64.935.000,00	99,90	66.700.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	259.500.000,00	258.787.150,00	99,72	0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	145.000.000,00	144.989.950,00	99,99	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	56.000.000,00	55.500.000,00	99,10	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	58.500.000,00	58.297.200,00	99,65	0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	31.500.000,00	31.499.978,00	99,99	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	31.500.000,00	31.499.978,00	99,99	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	147.000.000,00	146.464.500,00	99,63	180.300.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	147.000.000,00	146.464.500,00	99,63	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	47.000.000,00	46.675.500,00	99,30	0,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Uk	100.000.000,00	99.789.000,00	99,78	0,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	180.300.000,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	180.300.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	306.163.000,00	302.719.200,00	98,87	134.400.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	244.000.000,00	240.870.000,00	98,71	119.500.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	244.000.000,00	240.870.000,00	98,71	119.500.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	62.163.000,00	61.849.200,00	99,49	14.900.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	60.463.000,00	60.162.000,00	99,50	14.900.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.700.000,00	1.687.200,00	99,24	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
5.2.05.01.06	Belanja Modal Three Dimensional Artifacts and Realita	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
5.2.05.01.06.0001	Belanja Modal Three Dimensional Artifacts And Realita	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	89.600.000,00	89,60	60.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	89.600.000,00	89,60	60.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	89.600.000,00	89,60	60.000.000,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	100.000.000,00	89.600.000,00	89,60	60.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	909.163.000,00	894.005.828,00	98,33	464.400.000,00
	JUMLAH BELANJA	11.748.539.945,00	7.249.878.323,00	61,70	7.277.047.384,00
	SURPLUS/DEFISIT	(11.748.539.945,00)	(7.249.878.323,00)	61,71	(7.277.047.384,00)

Kab. Muara Enim, 10 Februari 2026
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Abdurrozieq Putra, ST, MT
NIP.196908141998031003



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM
DINAS SOSIAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	21.589.034.029,00	18.986.654.169,71	87,94	22.101.402.123,00
5.1	BELANJA OPERASI	12.377.716.029,00	9.923.525.181,00	80,17	14.797.587.123,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.022.930.274,00	3.327.180.612,00	82,70	2.900.151.762,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.118.837.075,00	1.750.312.122,00	82,60	1.466.181.001,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.626.525.295,00	1.384.954.440,00	85,14	1.130.950.428,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.171.453.153,80	931.597.840,00	79,52	1.041.249.678,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	455.072.141,20	453.356.600,00	99,62	89.700.750,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	159.779.508,48	121.862.721,00	76,26	114.836.528,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	123.334.623,00	92.845.531,00	75,27	108.108.968,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	36.444.885,48	29.017.190,00	79,61	6.727.560,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	104.301.444,00	84.630.000,00	81,13	96.650.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	104.301.444,00	84.630.000,00	81,13	96.650.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	51.800.000,00	36.400.000,00	70,27	37.500.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	51.800.000,00	36.400.000,00	70,27	37.500.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	54.964.275,00	46.622.500,00	84,82	23.750.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	25.914.755,00	17.865.000,00	68,93	18.570.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	29.049.520,00	28.757.500,00	98,99	5.180.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	113.557.770,27	71.931.165,00	63,34	59.384.400,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	86.283.021,93	49.173.180,00	56,99	55.835.820,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	27.274.748,34	22.757.985,00	83,43	3.548.580,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.877.823,00	3.893.323,00	49,42	3.095.207,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.727.298,00	3.893.323,00	50,38	3.095.207,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	150.525,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	30.959,25	17.973,00	58,05	14.438,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.765,34	11.130,00	59,31	13.446,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	12.193,91	6.843,00	56,11	992,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.904.093.199,00	1.576.868.490,00	82,81	1.433.970.761,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.904.093.199,00	1.576.868.490,00	82,81	1.433.970.761,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.563.476.026,00	1.243.479.675,00	79,53	1.371.190.914,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	340.617.173,00	333.388.815,00	97,87	62.779.847,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.354.785.755,00	6.596.344.569,00	78,95	11.897.435.361,00
5.1.02.01	Belanja Barang	2.323.214.732,00	1.906.954.937,00	82,08	1.888.085.664,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.323.214.732,00	1.906.954.937,00	82,08	1.888.085.664,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	34.199.500,00	33.899.955,00	99,12	27.579.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.708.800,00	1.948.050,00	71,91	2.197.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.180.800,00	1.568.000,00	8,17	5.602.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	417.290.307,00	342.357.203,00	82,04	503.007.014,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	411.177.725,00	286.237.526,00	69,61	164.985.700,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.595.200,00	3.210.000,00	89,28	4.210.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	19.898.400,00	15.553.393,00	78,16	15.687.500,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15.091.500,00	14.822.610,00	98,21	9.645.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	8.370.000,00	8.370.000,00	100,00	67.079.500,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan	935.550.000,00	931.053.700,00	99,51	884.741.250,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	442.812.500,00	261.263.500,00	59,00	197.686.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan	0,00	0,00	0,00	5.665.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan	11.340.000,00	4.671.000,00	41,19	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.099.923.125,00	2.234.067.611,00	72,06	7.523.395.254,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.631.252.125,00	1.839.671.611,00	69,91	1.930.712.004,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, dan	84.800.000,00	71.070.000,00	83,80	73.100.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana	184.800.000,00	99.400.000,00	53,78	179.900.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	459.000.000,00	412.200.000,00	89,80	432.450.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	643.600.000,00	415.800.000,00	64,60	543.600.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	375.060.000,00	177.040.000,00	47,20	321.450.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	361.200.000,00	307.200.000,00	85,04	83.200.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	62.160.000,00	35.840.000,00	57,65	64.690.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	38.520.000,00	17.120.000,00	44,44	38.520.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	110.000.000,00	109.890.000,00	99,90	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	11.400.000,00	9.900.000,00	86,84	3.600.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	450.000,00	417.284,00	92,72	422.284,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	23.184.000,00	12.510.625,00	53,96	13.330.025,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	150.164.400,00	82.134.452,00	54,69	84.064.320,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.372.000,00	6.372.000,00	100,00	6.372.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	31.200.000,00	14.365.900,00	46,04	14.366.900,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	18.441.725,00	18.411.350,00	99,83	9.146.475,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	0,00	0,00	0,00	5.275.616.250,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	5.275.616.250,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.920.000,00	3.500.000,00	27,08	17.550.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	8.920.000,00	3.500.000,00	39,23	14.550.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	150.901.000,00	122.401.000,00	81,11	70.937.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7.701.000,00	7.701.000,00	100,00	20.537.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	143.200.000,00	114.700.000,00	80,09	50.400.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000,00	98.370.000,00	98,37	0,00

5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa De	100.000.000,00	98.370.000,00	98,37	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis s	204.850.000,00	170.125.000,00	83,04	228.580.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	168.250.000,00	143.425.000,00	85,24	193.030.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	36.600.000,00	26.700.000,00	72,95	35.550.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	344.090.000,00	341.718.070,00	99,31	254.515.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	344.090.000,00	341.718.070,00	99,31	254.515.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	309.810.000,00	307.881.020,00	99,37	238.335.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	10.000.000,00	9.582.050,00	95,82	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	9.150.000,00	9.125.000,00	99,72	12.130.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Persona	11.680.000,00	11.680.000,00	100,00	1.050.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Pe	3.450.000,00	3.450.000,00	100,00	3.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.587.557.898,00	2.113.603.951,00	81,68	2.231.439.443,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.587.557.898,00	2.113.603.951,00	81,68	2.231.439.443,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.587.557.898,00	2.113.603.951,00	81,68	2.214.264.443,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	17.175.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	12.377.716.029,00	9.923.525.181,00	80,17	14.797.587.123,00
5.2	BELANJA MODAL	9.211.318.000,00	9.063.128.988,71	98,39	7.303.815.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.307.420.000,00	1.258.606.900,00	96,26	921.465.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	800.240.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	800.240.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	253.890.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	546.350.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.060.500.000,00	1.017.448.300,00	95,94	78.750.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	45.000.000,00	44.500.000,00	98,88	34.415.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	16.940.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	45.000.000,00	44.500.000,00	98,88	17.475.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.015.500.000,00	972.948.300,00	95,80	44.335.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	674.500.000,00	636.618.300,00	94,38	44.335.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	240.000.000,00	239.760.000,00	99,90	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	101.000.000,00	96.570.000,00	95,61	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.000.000,00	9.723.600,00	97,23	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	10.000.000,00	9.723.600,00	97,23	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	10.000.000,00	9.723.600,00	97,23	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	236.920.000,00	231.435.000,00	97,68	42.475.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	236.920.000,00	231.435.000,00	97,68	17.500.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	236.920.000,00	231.435.000,00	97,68	17.500.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	24.975.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	24.975.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.903.898.000,00	7.804.522.088,71	98,74	6.382.350.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	7.528.898.000,00	7.432.025.000,00	98,71	6.111.900.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.528.898.000,00	7.432.025.000,00	98,71	6.111.900.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	7.328.898.000,00	7.242.500.000,00	98,82	6.111.900.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	200.000.000,00	189.525.000,00	94,76	0,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	200.000.000,00	198.000.000,00	99,00	0,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	200.000.000,00	198.000.000,00	99,00	0,00
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	200.000.000,00	198.000.000,00	99,00	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	175.000.000,00	174.497.088,71	99,71	270.450.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	175.000.000,00	174.497.088,71	99,71	270.450.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	175.000.000,00	174.497.088,71	99,71	270.450.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	9.211.318.000,00	9.063.128.988,71	98,39	7.303.815.000,00
	JUMLAH BELANJA	21.589.034.029,00	18.986.654.169,71	87,94	22.101.402.123,00
	SURPLUS/DEFISIT	(21.589.034.029,00)	(18.986.654.169,71)	87,95	(22.101.402.123,00)

Kab. Muara Enim, 4 Februari 2026
KEPALA DINAS SOSIAL

Lido Septontoni, S.H., M.Si.
NIP.196610241992031006



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.505.000.000,00	4.362.711.792,00	174,16	3.629.075.700,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.505.000.000,00	4.362.711.792,00	174,16	3.629.075.700,00
4.1.02	Retribusi Daerah	2.505.000.000,00	4.362.711.792,00	174,16	3.629.075.700,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.000.000,00	8.860.000,00	177,20	16.880.000,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5.000.000,00	8.860.000,00	177,20	16.880.000,00
4.1.02.02.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5.000.000,00	8.860.000,00	177,20	16.880.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.500.000.000,00	4.353.851.792,00	174,15	3.612.195.700,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2.500.000.000,00	4.353.851.792,00	174,15	3.612.195.700,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2.500.000.000,00	4.353.851.792,00	174,15	3.612.195.700,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.505.000.000,00	4.362.711.792,00	174,16	3.629.075.700,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.505.000.000,00	4.362.711.792,00	174,16	3.629.075.700,00
5	BELANJA DAERAH	12.633.074.392,80	11.429.477.064,00	90,47	12.317.886.669,00
5.1	BELANJA OPERASI	11.902.602.758,80	10.705.536.062,00	89,94	11.583.729.669,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.519.824.578,80	5.878.219.413,00	90,16	5.271.621.040,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.871.103.106,80	3.356.799.330,00	86,71	2.957.148.958,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.858.920.278,00	2.555.946.080,00	89,40	2.227.012.348,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.348.900.168,00	2.133.021.380,00	90,81	2.137.311.562,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	510.020.110,00	422.924.700,00	82,92	89.700.786,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	326.209.357,10	283.001.577,00	86,75	257.164.448,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	254.806.541,70	247.859.793,00	97,27	247.745.864,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	71.402.815,40	35.141.784,00	49,22	9.418.584,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	125.921.250,00	65.575.000,00	52,08	75.310.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	125.921.250,00	65.575.000,00	52,08	75.310.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	256.100.822,00	207.760.000,00	81,12	202.660.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	256.100.822,00	207.760.000,00	81,12	202.660.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	87.538.500,00	73.317.500,00	83,75	47.265.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	56.508.250,00	46.715.000,00	82,67	42.085.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	31.030.250,00	26.602.500,00	85,73	5.180.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	208.685.472,00	166.909.995,00	79,98	145.564.200,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	159.744.036,00	139.336.080,00	87,22	138.973.980,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	48.941.436,00	27.573.915,00	56,34	6.590.220,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.681.028,00	4.252.672,00	55,37	2.141.210,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.681.028,00	4.252.672,00	55,37	2.141.210,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	46.399,70	36.506,00	78,68	31.752,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	34.425,65	28.055,00	81,49	29.605,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	11.974,05	8.451,00	70,58	2.147,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.648.721.472,00	2.521.420.083,00	95,19	2.314.472.082,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.648.721.472,00	2.521.420.083,00	95,19	2.314.472.082,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.252.785.696,00	2.214.867.149,00	98,32	2.244.060.346,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	395.935.776,00	306.552.934,00	77,42	70.411.736,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.382.778.180,00	4.827.316.649,00	89,68	6.312.108.629,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.552.698.580,00	1.484.422.914,00	95,60	2.063.820.141,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.271.557.480,00	1.203.723.914,00	94,67	2.063.820.141,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.379.000,00	3.379.000,00	100,00	198.000.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	7.425.600,00	7.200.000,00	96,96	6.750.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	271.778.320,00	261.335.484,00	96,16	326.036.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	87.957.300,00	80.906.000,00	91,98	123.507.550,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.735.800,00	7.730.000,00	99,93	6.000.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	117.329.460,00	99.665.219,00	84,94	92.429.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	40.070.600,00	39.268.566,00	98,00	38.879.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00	0,00	7.680.000,00

5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	133.000.000,00	130.848.045,00	98,38	242.578.091,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	184.000.000,00	183.993.600,00	100,00	366.368.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	366.540.400,00	339.015.000,00	92,49	515.382.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.575.000,00	1.575.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	22.790.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	50.766.000,00	48.808.000,00	96,14	117.420.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	281.141.100,00	280.699.000,00	99,84	0,00
5.1.02.01.04.0542	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	281.141.100,00	280.699.000,00	99,84	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.687.173.880,00	1.227.057.593,00	72,73	1.738.286.970,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	768.751.000,00	660.651.878,00	85,94	848.189.720,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	49.800.000,00	26.800.000,00	53,82	13.350.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	23.100.000,00	8.400.000,00	36,36	23.100.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	21.800.000,00	21.800.000,00	100,00	224.960.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	56.160.000,00	47.600.000,00	84,76	71.400.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	47.600.000,00	47.600.000,00	100,00	121.070.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.720.000,00	18.720.000,00	100,00	28.080.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	62.000.000,00	62.000.000,00	100,00	57.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	53.500.000,00	53.500.000,00	100,00	77.040.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	8.560.000,00	8.560.000,00	100,00	25.680.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	165.000.000,00	164.923.800,00	99,95	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	45.011.000,00	29.603.250,00	65,77	21.190.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	170.000.000,00	136.701.559,00	80,41	146.207.120,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.000.000,00	5.640.000,00	70,50	7.200.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.000.000,00	17.746.844,00	98,59	17.640.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	19.360.000,00	8.916.425,00	46,06	14.272.100,00
5.1.02.02.01.0087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	2.140.000,00	2.140.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	38.522.880,00	38.255.715,00	99,31	195.492.450,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	93.960.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	63.892.800,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	38.522.880,00	38.255.715,00	99,31	37.639.650,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	35.600.000,00	9.100.000,00	25,56	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	35.600.000,00	9.100.000,00	25,56	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	844.300.000,00	519.050.000,00	61,48	694.604.800,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	793.300.000,00	490.650.000,00	61,85	590.454.800,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	6.000.000,00	2.000.000,00	33,33	25.200.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	45.000.000,00	26.400.000,00	58,67	78.950.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.092.914.420,00	1.070.879.972,00	97,98	431.776.341,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	294.914.420,00	276.879.972,00	93,88	234.776.341,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	31.972.500,00	24.638.944,00	77,06	11.536.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	200.290.000,00	196.845.028,00	98,28	148.040.341,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14.680.000,00	8.166.000,00	55,63	17.530.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	14.021.920,00	13.830.000,00	98,63	16.520.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	27.740.000,00	27.400.000,00	98,77	24.600.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.210.000,00	6.000.000,00	96,62	16.550.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	798.000.000,00	794.000.000,00	99,50	197.000.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	798.000.000,00	794.000.000,00	99,50	197.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.049.991.300,00	1.044.956.170,00	99,52	2.078.225.177,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.049.991.300,00	1.044.956.170,00	99,52	2.078.225.177,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.049.991.300,00	1.044.956.170,00	99,52	2.078.225.177,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	11.902.602.758,80	10.705.536.062,00	89,94	11.583.729.669,00
5.2	BELANJA MODAL	730.471.634,00	723.941.002,00	99,11	734.157.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	730.471.634,00	723.941.002,00	99,11	689.157.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	544.711.134,00	541.365.999,00	99,39	582.684.500,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	116.698.400,00	115.329.000,00	98,83	163.900.000,00

5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	116.698.400,00	115.329.000,00	98,83	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	163.900.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	428.012.734,00	426.036.999,00	99,54	418.784.500,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	272.586.834,00	271.728.000,00	99,68	136.050.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	17.625.900,00	17.549.999,00	99,57	20.359.500,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	137.800.000,00	136.759.000,00	99,24	262.375.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	185.760.500,00	182.575.003,00	98,29	106.472.500,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	152.910.000,00	152.625.000,00	99,81	87.500.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	152.910.000,00	152.625.000,00	99,81	87.500.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	32.850.500,00	29.950.003,00	91,17	18.972.500,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	32.850.500,00	29.950.003,00	91,17	18.972.500,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	730.471.634,00	723.941.002,00	99,11	734.157.000,00
	JUMLAH BELANJA	12.633.074.392,80	11.429.477.064,00	90,47	12.317.886.669,00
	SURPLUS/DEFISIT	(10.128.074.392,80)	(7.066.765.272,00)	69,77	(8.688.810.969,00)

Kab. Muara Enim, 13 Januari 2026 **KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Eddy Irson, ST., M.Si.
NIP.197005281996031



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	20.512.613.748,10	15.511.693.574,00	75,62	12.302.023.215,00
5.1	BELANJA OPERASI	12.779.408.268,10	10.617.658.578,00	83,08	9.613.347.184,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.434.124.707,00	4.255.577.199,00	78,31	4.149.761.911,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.023.256.869,00	2.290.282.998,00	75,76	2.132.856.995,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.235.488.312,50	1.850.803.460,00	82,79	1.653.098.028,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.826.544.740,00	1.513.696.360,00	82,87	1.630.672.828,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	408.943.572,50	337.107.100,00	82,43	22.425.200,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	233.540.527,95	100.788.509,00	43,16	124.793.302,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	190.207.249,20	86.044.573,00	45,24	124.793.302,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	43.333.278,75	14.743.936,00	34,02	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	125.490.750,00	108.990.000,00	86,85	115.640.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	125.490.750,00	108.990.000,00	86,85	115.640.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	186.012.500,00	89.960.000,00	48,36	137.585.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	186.012.500,00	89.960.000,00	48,36	137.585.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	78.031.656,00	55.458.750,00	71,07	26.200.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	48.964.250,00	34.015.000,00	69,47	24.905.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	29.067.406,00	21.443.750,00	73,77	1.295.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	135.672.284,00	79.933.575,00	58,92	69.885.300,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	100.954.136,00	63.295.080,00	62,70	69.378.360,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	34.718.148,00	16.638.495,00	47,92	506.940,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	28.904.180,00	4.319.680,00	14,94	5.630.829,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	28.904.180,00	4.319.680,00	14,94	5.630.829,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	116.658,55	29.024,00	24,88	24.536,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	75.059,70	21.997,00	29,31	23.955,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	41.598,85	7.027,00	16,89	581,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.410.867.838,00	1.965.294.201,00	81,52	2.016.904.916,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.410.867.838,00	1.965.294.201,00	81,52	2.016.904.916,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.152.064.656,00	1.723.479.349,00	80,08	1.999.330.207,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	258.803.182,00	241.814.852,00	93,44	17.574.709,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.345.283.561,10	6.362.081.379,00	86,61	5.463.585.273,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.659.362.853,00	1.512.773.534,00	91,17	1.005.297.850,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.659.362.853,00	1.512.773.534,00	91,17	1.005.297.850,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	75.000.000,00	72.729.136,00	96,97	49.295.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	285.106.869,00	236.171.912,00	82,84	238.370.550,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	192.214.972,00	169.191.886,00	88,02	141.855.300,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.560.900,00	5.460.000,00	98,19	4.800.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	47.940.752,00	46.332.000,00	96,64	29.119.500,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	50.848.360,00	50.140.000,00	98,61	8.522.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan	120.000.000,00	84.976.000,00	70,81	64.200.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	868.816.000,00	834.022.600,00	96,00	459.885.500,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	13.875.000,00	13.750.000,00	99,10	7.950.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.659.508.960,00	2.356.500.236,00	88,61	2.377.198.241,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.684.098.560,00	1.485.122.264,00	88,18	1.327.991.131,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, dan	477.400.000,00	468.160.000,00	98,06	277.500.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	190.000.000,00	153.500.000,00	80,79	100.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	13.500.000,00	4.500.000,00	33,33	2.565.667,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	30.280.500,00	5.607.598,00	18,52	5.522.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	37.440.000,00	37.440.000,00	100,00	56.160.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	49.200.000,00	47.600.000,00	96,75	122.680.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	172.000.000,00	159.000.000,00	92,44	90.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	172.938.000,00	172.200.000,00	99,57	16.050.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	22.470.000,00	22.470.000,00	100,00	60.990.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	16.500.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0,00	0,00	0,00	35.970.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	13.500.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	7.500.000,00	5.000.000,00	66,67	3.996.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	171.600.000,00	171.428.400,00	99,90	171.428.400,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	42.780.000,00	16.679.000,00	38,99	7.337.750,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	224.130.060,00	161.541.498,00	72,07	126.108.634,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.000.000,00	950.000,00	95,00	5.640.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	44.300.000,00	37.044.068,00	83,62	106.730.650,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	0,00	0,00	0,00	90.665.355,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.560.000,00	5.001.700,00	47,36	15.646.675,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	90.160.400,00	79.500.000,00	88,18	75.096.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	90.160.400,00	79.500.000,00	88,18	75.096.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	81.500.000,00	49.600.000,00	60,86	22.760.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	81.500.000,00	49.600.000,00	60,86	22.760.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	385.500.000,00	347.257.972,00	90,08	564.340.500,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	5.135.000,00	5.000.000,00	97,37	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	50.945.000,00	40.000.000,00	78,52	77.500.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	329.420.000,00	302.257.972,00	91,75	486.840.500,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	95.000.000,00	94.600.000,00	99,58	94.860.600,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang	95.000.000,00	94.600.000,00	99,58	94.860.600,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	323.250.000,00	300.420.000,00	92,94	292.150.010,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	188.250.000,00	185.050.000,00	98,30	179.850.000,00

5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	63.500.000,00	59.500.000,00	93,70	41.750.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	71.500.000,00	55.870.000,00	78,14	70.550.010,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	80.640.000,00	79.575.000,00	98,68	37.725.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	80.640.000,00	79.575.000,00	98,68	37.725.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	40.000.000,00	39.780.000,00	99,45	16.675.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga	17.840.000,00	17.370.000,00	97,37	6.850.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal	10.950.000,00	10.950.000,00	100,00	7.300.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan	10.350.000,00	9.975.000,00	96,38	6.900.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.234.071.748,10	1.965.726.558,00	87,99	2.035.164.182,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.234.071.748,10	1.965.726.558,00	87,99	2.035.164.182,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.234.071.748,10	1.965.726.558,00	87,99	2.035.164.182,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	711.700.000,00	447.506.051,00	62,88	8.200.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	24.200.000,00	19.606.051,00	81,02	8.200.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	24.200.000,00	19.606.051,00	81,02	8.200.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	687.500.000,00	427.900.000,00	62,24	0,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	687.500.000,00	427.900.000,00	62,24	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	12.779.408.268,10	10.617.658.578,00	83,08	9.613.347.184,00
5.2	BELANJA MODAL	7.733.205.480,00	4.894.034.996,00	63,29	2.688.676.031,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.828.605.480,00	2.574.034.996,00	91,00	2.025.519.500,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.117.847.480,00	1.872.727.984,00	88,43	1.566.214.500,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	882.536.000,00	838.670.000,00	95,03	518.306.500,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	169.206.000,00	169.190.000,00	99,99	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	713.330.000,00	669.480.000,00	93,85	518.306.500,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.235.311.480,00	1.034.057.984,00	83,71	1.047.908.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	572.633.000,00	538.217.988,00	93,99	432.440.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	446.678.480,00	408.139.996,00	91,37	391.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	216.000.000,00	87.700.000,00	40,60	224.468.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	201.116.000,00	198.348.001,00	98,62	195.000.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	201.116.000,00	198.348.001,00	98,62	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	108.000.000,00	107.896.000,00	99,90	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	93.116.000,00	90.452.001,00	97,14	0,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	195.000.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00	12.100.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	509.642.000,00	502.959.011,00	98,69	252.205.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	425.000.000,00	420.031.006,00	98,83	212.605.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	425.000.000,00	420.031.006,00	98,83	212.605.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	84.642.000,00	82.928.005,00	97,98	39.600.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	84.642.000,00	82.928.005,00	97,98	39.600.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.904.600.000,00	2.320.000.000,00	47,30	663.156.531,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	4.904.600.000,00	2.320.000.000,00	47,30	663.156.531,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	4.904.600.000,00	2.320.000.000,00	47,30	663.156.531,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	4.904.600.000,00	2.320.000.000,00	47,30	663.156.531,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	7.733.205.480,00	4.894.034.996,00	63,29	2.688.676.031,00
	JUMLAH BELANJA	20.512.613.748,10	15.511.693.574,00	75,62	12.302.023.215,00
	SURPLUS/DEFISIT	(20.512.613.748,10)	(15.511.693.574,00)	75,62	(12.302.023.215,00)

Kab. Muara Enim, 9 Januari 2026
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Vivi Mariani, S.Si., M.Bmd., A.Pt
NIP.197603312000122003



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM
DINAS KETAHANAN PANGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	18.243.261.857,00	16.018.517.328,00	87,81	10.395.104.158,00
5.1	BELANJA OPERASI	17.812.473.457,00	15.596.444.628,00	87,56	10.091.675.158,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.172.254.384,00	3.976.229.449,00	76,88	3.469.251.241,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.877.887.840,00	2.215.556.320,00	76,99	1.855.245.201,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.176.413.745,25	1.720.236.080,00	79,04	1.415.804.662,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.660.969.450,00	1.281.258.180,00	77,14	1.306.882.308,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	515.444.295,25	438.977.900,00	85,16	108.922.354,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	216.037.194,20	162.287.630,00	75,12	134.756.426,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	145.281.005,00	118.824.074,00	81,79	122.006.098,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	70.756.189,20	43.463.556,00	61,43	12.750.328,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	96.997.250,00	94.710.000,00	97,64	75.745.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	96.997.250,00	94.710.000,00	97,64	75.745.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	157.850.000,00	79.720.000,00	50,50	122.220.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	157.850.000,00	79.720.000,00	50,50	122.220.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	79.189.000,00	58.358.750,00	73,70	31.980.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	44.843.750,00	30.315.000,00	67,60	25.690.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	34.345.250,00	28.043.750,00	81,65	6.290.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	134.067.096,00	91.919.085,00	68,56	67.712.700,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	85.508.616,00	61.412.160,00	71,82	60.398.280,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	48.558.480,00	30.506.925,00	62,83	7.314.420,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	17.220.000,00	8.301.016,00	48,21	7.008.006,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	17.220.000,00	8.301.016,00	48,21	7.008.006,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	113.554,55	23.759,00	20,92	18.407,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	97.230,55	16.044,00	16,50	16.882,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	16.324,00	7.715,00	47,26	1.525,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.294.366.544,00	1.760.673.129,00	76,74	1.614.006.040,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.294.366.544,00	1.760.673.129,00	76,74	1.614.006.040,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.969.230.522,00	1.446.610.456,00	73,46	1.528.868.324,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	325.136.022,00	314.062.673,00	96,59	85.137.716,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.959.219.073,00	11.376.015.179,00	95,12	6.622.423.917,00
5.1.02.01	Belanja Barang	8.328.892.095,00	8.173.236.062,00	98,13	3.982.305.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	8.328.892.095,00	8.173.236.062,00	98,13	3.982.305.600,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	6.194.000,00	6.194.000,00	100,00	4.452.500,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	35.006.000,00	34.818.000,00	99,46	38.976.600,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	6.283.800,00	6.283.800,00	100,00	4.111.900,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.090.000,00	5.090.000,00	100,00	3.678.500,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	90.000.000,00	87.055.000,00	96,73	114.800.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	230.352.500,00	169.227.694,00	73,46	178.045.300,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	134.840.600,00	111.129.600,00	82,42	117.944.600,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.040.000,00	4.500.000,00	89,29	2.230.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	22.712.695,00	18.559.400,00	81,71	9.092.700,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.037.800,00	9.945.800,00	99,08	9.822.800,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	37.769.200,00	29.796.000,00	78,89	57.110.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	7.432.321.500,00	7.395.943.468,00	99,51	3.312.163.700,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	13.000.000,00	7.914.000,00	60,88	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	211.444.000,00	198.528.000,00	93,89	122.002.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	67.500.000,00	67.299.300,00	99,70	7.875.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	15.000.000,00	14.652.000,00	97,68	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.490.860.635,00	1.265.926.718,00	84,91	996.756.550,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.110.663.135,00	953.456.718,00	85,85	842.709.550,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	95.600.000,00	56.800.000,00	59,41	77.800.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	57.000.000,00	55.500.000,00	97,37	49.500.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	72.000.000,00	69.000.000,00	95,83	42.300.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	159.000.000,00	111.075.600,00	69,86	130.700.300,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	95.400.000,00	83.400.000,00	87,42	15.300.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	95.200.000,00	95.200.000,00	100,00	156.910.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	42.800.000,00	42.800.000,00	100,00	64.200.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	35.840.000,00	35.840.000,00	100,00	51.360.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	5.600.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	62.500.000,00	42.500.000,00	68,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	100.000.000,00	98.235.000,00	98,24	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	19.753.000,00	12.714.833,00	64,37	12.678.056,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	17.210.625,00	16.081.000,00	93,44	8.463.250,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	69.429.635,00	53.469.335,00	77,01	46.533.244,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	16.099.200,00	16.095.300,00	99,98	10.570.500,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	4.900.000,00	4.860.000,00	99,18	4.030.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	14.430.675,00	6.385.650,00	44,25	16.764.200,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.400.500,00	7.347.000,00	99,28	7.008.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	7.400.500,00	7.347.000,00	99,28	7.008.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	45.740.000,00	27.850.000,00	60,89	15.975.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	18.500.000,00	18.500.000,00	100,00	6.900.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	9.740.000,00	9.350.000,00	96,00	9.075.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	55.001.000,00	44.334.000,00	80,61	14.914.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	42.701.000,00	40.134.000,00	93,99	5.134.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	12.300.000,00	4.200.000,00	34,15	9.780.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	272.056.000,00	232.939.000,00	85,62	116.150.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	7.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	239.056.000,00	199.939.000,00	83,64	109.150.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	541.150.000,00	540.086.000,00	99,80	226.729.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.150.000,00	41.150.000,00	100,00	26.950.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	16.200.000,00	16.200.000,00	100,00	16.200.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.600.000,00	14.600.000,00	100,00	7.300.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.350.000,00	10.350.000,00	100,00	3.450.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	500.000.000,00	498.936.000,00	99,79	199.779.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	500.000.000,00	498.936.000,00	99,79	199.779.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.575.516.343,00	1.374.266.399,00	87,23	1.387.432.767,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.575.516.343,00	1.374.266.399,00	87,23	1.387.432.767,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.575.516.343,00	1.374.266.399,00	87,23	1.201.929.650,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	185.503.117,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.800.000,00	22.500.000,00	98,68	29.200.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.800.000,00	22.500.000,00	98,68	29.200.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	22.800.000,00	22.500.000,00	98,68	29.200.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	681.000.000,00	244.200.000,00	35,86	0,00
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	681.000.000,00	244.200.000,00	35,86	0,00
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	681.000.000,00	244.200.000,00	35,86	0,00
5.1.04.01.01.0001	Belanja Subsidi kepada BUMN	681.000.000,00	244.200.000,00	35,86	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	17.812.473.457,00	15.596.444.628,00	87,56	10.091.675.158,00
5.2	BELANJA MODAL	430.788.400,00	422.072.700,00	97,98	303.429.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	430.788.400,00	422.072.700,00	97,98	103.650.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	240.788.400,00	238.145.700,00	98,90	34.950.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	36.728.400,00	36.075.000,00	98,22	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	36.728.400,00	36.075.000,00	98,22	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	204.060.000,00	202.070.700,00	99,03	34.950.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	68.310.000,00	66.600.000,00	97,50	34.950.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	15.000.000,00	14.985.000,00	99,90	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	13.500.000,00	13.486.500,00	99,90	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	107.250.000,00	106.999.200,00	99,77	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	50.000.000,00	49.395.000,00	98,79	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	50.000.000,00	49.395.000,00	98,79	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	50.000.000,00	49.395.000,00	98,79	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	140.000.000,00	134.532.000,00	96,09	68.700.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	140.000.000,00	134.532.000,00	96,09	68.700.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	140.000.000,00	134.532.000,00	96,09	68.700.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	199.779.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	199.779.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	199.779.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	199.779.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	430.788.400,00	422.072.700,00	97,98	303.429.000,00
	JUMLAH BELANJA	18.243.261.857,00	16.018.517.328,00	87,81	10.395.104.158,00
	SURPLUS/DEFISIT	(18.243.261.857,00)	(16.018.517.328,00)	87,81	(10.395.104.158,00)

Kab. Muara Enim, 2 Januari 2026

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris	
Pengolah Data dan Informasi	

Ir. Hj. SYAMSIAH, M.Si

NIP 196605231993032002



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	558.672.540,00	787.358.500,00	140,93	516.381.250,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	558.672.540,00	787.358.500,00	140,93	516.381.250,00
4.1.02	Retribusi Daerah	558.672.540,00	787.358.500,00	140,93	516.381.250,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	558.672.540,00	787.358.500,00	140,93	516.381.250,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	558.672.540,00	787.358.500,00	140,93	516.381.250,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	558.672.540,00	787.358.500,00	140,93	516.381.250,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	558.672.540,00	787.358.500,00	140,93	516.381.250,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	558.672.540,00	787.358.500,00	140,93	516.381.250,00
5	BELANJA DAERAH	37.271.249.801,63	31.107.968.616,00	83,46	19.853.838.246,00
5.1	BELANJA OPERASI	24.523.334.921,63	18.543.738.075,00	75,61	17.661.458.246,00
5.1.01	Belanja Pegawai	11.484.052.559,63	10.004.609.576,00	87,11	6.460.863.511,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.984.887.647,63	6.160.884.993,00	88,20	3.693.298.550,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.356.431.912,05	4.822.438.440,00	90,03	2.841.009.596,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.069.345.824,55	2.720.495.340,00	88,63	2.728.883.646,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	2.287.086.087,50	2.101.943.100,00	91,90	112.125.950,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	564.297.338,73	482.368.347,00	85,48	307.380.792,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	363.060.351,53	298.943.087,00	82,33	302.895.752,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	201.236.987,20	183.425.260,00	91,14	4.485.040,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	181.537.750,00	145.530.000,00	80,16	144.740.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	181.537.750,00	145.530.000,00	80,16	144.740.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	152.880.800,00	120.064.000,00	78,53	137.926.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	152.880.800,00	120.064.000,00	78,53	137.926.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	270.272.000,00	242.998.750,00	89,90	87.700.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	97.774.750,00	84.715.000,00	86,64	81.225.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	172.497.250,00	158.283.750,00	91,76	6.475.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	425.819.917,65	339.993.795,00	79,84	170.114.580,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	228.937.339,55	167.072.940,00	72,97	166.566.000,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	196.882.578,10	172.920.855,00	87,82	3.548.580,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	33.465.516,10	7.416.449,00	22,16	4.385.471,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	33.465.516,10	7.416.449,00	22,16	4.385.471,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	182.413,10	75.212,00	41,23	42.111,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	122.606,40	36.956,00	30,14	40.096,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	59.806,70	38.256,00	63,96	2.015,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.397.464.912,00	3.843.724.583,00	87,40	2.762.124.961,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.383.020.816,00	3.836.513.354,00	87,53	2.753.194.585,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.707.766.184,00	2.586.030.213,00	95,50	2.665.808.933,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.675.254.632,00	1.250.483.141,00	74,64	87.385.652,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	7.818.570,00	4.589.170,00	58,69	8.930.376,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	7.818.570,00	4.589.170,00	58,69	8.930.376,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	6.625.526,00	2.622.059,00	39,57	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	6.625.526,00	2.622.059,00	39,57	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obje	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	101.700.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	101.700.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	101.700.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.039.282.362,00	8.539.128.499,00	65,48	11.200.594.735,00
5.1.02.01	Belanja Barang	4.872.758.350,00	3.230.551.378,00	66,29	2.684.796.324,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.672.758.350,00	3.031.551.378,00	64,87	2.684.796.324,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	135.712.100,00	117.759.700,00	86,77	62.225.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	51.591.600,00	51.492.900,00	99,80	166.245.700,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.794.429.200,00	1.685.347.638,00	60,31	1.440.102.824,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00	62.842.500,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	62.650.000,00	62.354.128,00	99,52	53.393.600,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	959.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kan	85.389.582,00	54.018.700,00	63,26	150.091.800,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	182.884.100,00	47.011.900,00	25,70	68.231.200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.693.000,00	4.480.000,00	66,93	5.370.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kant	204.912.818,00	166.051.200,00	81,03	246.971.200,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.576.650,00	0,00	0,00	8.025.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan u	92.715.000,00	4.560.000,00	4,91	237.919.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan	875.028.900,00	774.120.002,00	88,46	86.194.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	119.593.000,00	40.573.350,00	33,92	34.884.000,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	19.968.000,00	10.752.000,00	53,84	9.360.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	31.655.400,00	13.029.860,00	41,16	46.780.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	6.160.500,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapita	200.000.000,00	199.000.000,00	99,50	0,00
5.1.02.01.04.0511	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangu	200.000.000,00	199.000.000,00	99,50	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.347.474.860,00	3.385.063.356,00	63,30	5.337.441.158,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.616.900.360,00	2.758.816.356,00	59,75	5.045.700.758,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pe	31.300.000,00	12.100.000,00	38,65	18.150.000,00

5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	125.970.000,00	97.533.200,00	77,42	174.738.800,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	190.920.000,00	111.772.800,00	58,54	196.560.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	53.590.000,00	11.455.000,00	21,37	35.670.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	357.946.650,00	348.960.960,00	97,48	289.278.180,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	105.840.000,00	34.057.600,00	32,17	74.500.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	51.360.000,00	17.028.800,00	33,15	39.590.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	48.200.000,00	22.500.000,00	46,68	7.009.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	99.800.000,00	99.733.500,00	99,93	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.200.000,00	400.000,00	33,33	0,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	74.967.000,00	70.617.090,00	94,19	66.840.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	3.037.896.000,00	1.689.957.600,00	55,62	3.911.120.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	9.840.960,00	5.424.012,00	55,11	5.544.512,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	48.576.000,00	18.922.500,00	38,95	26.984.250,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	157.080.000,00	151.432.827,00	96,40	137.449.993,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	22.800.000,00	5.588.200,00	24,50	8.069.700,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	30.000.000,00	26.872.000,00	89,57	20.786.573,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	4.500.000,00	3.000.000,00	66,66	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	118.673.750,00	11.457.975,00	9,65	31.168.750,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	36.000.000,00	9.562.292,00	26,56	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	5.440.000,00	5.440.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.484.500,00	5.347.000,00	97,49	193.190.400,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	0,00	0,00	0,00	193.190.400,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	5.484.500,00	5.347.000,00	97,49	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	59.900.000,00	40.700.000,00	67,94	86.550.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	59.900.000,00	40.700.000,00	67,94	86.550.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	575.000.000,00	571.200.000,00	99,33	0,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa De	100.000.000,00	99.700.000,00	99,70	0,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingku	475.000.000,00	471.500.000,00	99,26	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis s	90.190.000,00	9.000.000,00	9,97	12.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	60.190.000,00	9.000.000,00	14,95	12.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.356.849.152,00	772.654.614,00	56,94	1.172.455.935,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.272.935.152,00	689.216.614,00	54,14	1.038.913.935,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excav	292.337.952,00	206.395.049,00	70,60	500.161.844,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat B	62.585.400,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Dara	338.992.500,00	64.327.065,00	18,97	72.595.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Dara	371.100.000,00	371.392.000,00	100,07	381.152.091,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Dara	25.690.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Dara	105.999.300,00	23.887.500,00	22,53	11.058.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	6.600.000,00	0,00	0,00	63.987.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	12.200.000,00	12.030.000,00	98,60	4.040.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	3.000.000,00	950.000,00	31,66	0,00
5.1.02.03.02.0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratori	35.000.000,00	2.700.000,00	7,71	1.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Persona	14.600.000,00	3.940.000,00	26,98	1.500.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Pe	4.830.000,00	3.595.000,00	74,43	1.900.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	83.914.000,00	83.438.000,00	99,43	133.542.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ged	83.914.000,00	83.438.000,00	99,43	133.542.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.417.700.000,00	1.126.859.151,00	79,48	1.907.967.818,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.417.700.000,00	1.126.859.151,00	79,48	1.907.967.818,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.417.700.000,00	1.126.859.151,00	79,48	1.907.967.818,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pih	44.500.000,00	24.000.000,00	53,93	97.933.500,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	44.500.000,00	24.000.000,00	53,93	97.933.500,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	44.500.000,00	24.000.000,00	53,93	97.933.500,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	24.523.334.921,63	18.543.738.075,00	75,61	17.661.458.246,00
5.2	BELANJA MODAL	12.747.914.880,00	12.564.230.541,00	98,55	2.192.380.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.747.914.880,00	12.564.230.541,00	98,55	2.192.380.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	7.207.682.000,00	7.147.545.000,00	99,16	0,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	7.207.682.000,00	7.147.545.000,00	99,16	0,00
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	3.350.000.000,00	3.332.475.000,00	99,47	0,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	3.857.682.000,00	3.815.070.000,00	98,89	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.459.841.600,00	5.365.681.041,00	98,27	1.477.380.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.181.862.600,00	5.093.065.041,00	98,28	1.279.380.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	114.920.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.737.862.600,00	4.655.726.000,00	98,26	661.000.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	444.000.000,00	437.339.041,00	98,49	503.460.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	277.979.000,00	272.616.000,00	98,07	198.000.000,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Baran	277.979.000,00	272.616.000,00	98,07	198.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	25.241.280,00	0,00	0,00	102.000.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	25.241.280,00	0,00	0,00	61.750.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	25.241.280,00	0,00	0,00	56.900.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.850.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	40.250.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	32.450.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	40.150.000,00	39.960.000,00	99,52	339.600.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	40.150.000,00	39.960.000,00	99,52	339.600.000,00
5.2.02.08.07.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	0,00	0,00	0,00	71.100.000,00
5.2.02.08.07.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lain	40.150.000,00	39.960.000,00	99,52	268.500.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	15.000.000,00	11.044.500,00	73,63	273.400.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	223.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00	0,00	223.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	15.000.000,00	11.044.500,00	73,63	50.400.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	15.000.000,00	11.044.500,00	73,63	50.400.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	12.747.914.880,00	12.564.230.541,00	98,55	2.192.380.000,00

	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	37.271.249.801,63	31.107.968.616,00	83,46	19.853.838.246,00
	SURPLUS/DEFISIT	(36.712.577.261,63)	(30.320.610.116,00)	82,58	(19.337.456.996,00)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(36.712.577.261,63)	(30.320.610.116,00)	82,58	(19.337.456.996,00)

Kab. Muara Enim, 25 Februari 2026
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alfarizal, S.H., M.H.
NIP.196708101995031003



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
31 Desember 2024 Sampai 30 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	11.346.401.488,90	9.117.289.988,00	80,35	10.260.270.326,00
5.1	BELANJA OPERASI	10.797.439.688,90	8.583.966.491,00	79,50	9.180.804.926,00
5.1.01	Belanja Pegawai	7.421.307.348,90	5.919.581.793,00	79,76	5.211.509.516,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.291.681.375,90	2.958.292.610,00	89,87	2.545.072.589,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.450.566.650,00	2.298.485.613,00	93,79	1.959.828.972,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.924.148.000,00	1.864.797.160,00	96,92	1.767.656.734,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	526.418.650,00	433.688.453,00	82,38	192.172.238,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	281.706.858,90	230.549.394,00	81,84	202.574.100,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	204.774.183,50	190.944.765,00	93,25	180.410.420,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	76.932.675,40	39.604.629,00	51,48	22.163.680,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	118.889.750,00	113.965.000,00	95,86	112.210.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	118.889.750,00	113.965.000,00	95,86	112.210.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	174.209.000,00	103.040.000,00	59,15	96.600.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	174.209.000,00	103.040.000,00	59,15	96.600.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	90.791.000,00	74.595.600,00	82,16	56.630.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	59.530.500,00	47.805.000,00	80,30	45.115.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	31.260.500,00	26.790.600,00	85,70	11.515.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	168.763.947,00	134.755.515,00	79,85	114.496.020,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	117.432.651,00	105.660.780,00	89,98	99.794.760,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	51.331.296,00	29.094.735,00	56,68	14.701.260,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.708.522,00	2.869.082,00	42,77	2.704.713,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.708.522,00	2.869.082,00	42,77	2.704.713,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	45.648,00	32.406,00	70,99	28.784,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.249,00	23.499,00	77,69	24.209,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	15.399,00	8.907,00	57,84	4.575,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.129.625.973,00	2.961.289.183,00	71,71	2.662.836.927,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.272.922.450,00	2.408.186.357,00	73,58	2.153.745.024,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.766.915.634,00	2.093.622.395,00	75,67	2.007.639.371,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	506.006.816,00	314.563.962,00	62,17	146.105.653,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	198.112.586,00	178.567.989,00	90,13	509.091.903,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	198.112.586,00	178.567.989,00	90,13	465.273.431,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	0,00	0,00	0,00	43.818.472,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	658.590.937,00	374.534.837,00	56,87	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	518.061.905,00	286.482.117,00	55,30	0,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	140.529.032,00	88.052.720,00	62,66	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objek	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.376.132.340,00	2.664.384.698,00	78,92	3.969.295.410,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.403.644.734,00	1.007.568.868,00	71,78	1.410.477.750,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.403.644.734,00	1.007.568.868,00	71,78	1.410.477.750,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.856.400,00	1.800.000,00	96,96	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.605.000,00	1.994.000,00	17,18	25.239.400,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.200.200,00	1.750.000,00	79,54	1.750.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	5.720.000,00	5.720.000,00	100,00	54.940.300,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	250.680.494,00	200.131.725,00	79,84	272.646.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	278.384.760,00	254.710.100,00	91,50	218.563.150,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.720.000,00	6.700.000,00	99,70	4.280.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	21.249.300,00	16.420.000,00	77,27	16.894.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.968.700,00	12.345.000,00	95,19	12.345.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	793.129.880,00	495.273.043,00	62,45	762.404.400,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	17.660.000,00	10.725.000,00	60,73	21.975.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	19.440.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	967.928.650,00	812.989.172,00	83,99	1.103.102.773,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	822.190.000,00	677.099.333,00	82,35	923.603.720,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, dan	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	32.400.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	4.000.000,00	1.800.000,00	45,00	2.700.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	361.520.000,00	343.350.000,00	94,97	517.310.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	770.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	51.360.000,00	42.800.000,00	83,33	64.200.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	47.080.000,00	26.750.000,00	56,82	46.010.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	18.000.000,00	7.231.141,00	40,17	7.256.195,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	19.205.000,00	14.534.750,00	75,68	10.186.750,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	170.510.000,00	147.792.417,00	86,68	161.581.900,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	29.520.000,00	5.400.000,00	18,29	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	95.205.000,00	67.235.200,00	70,62	59.395.900,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.080.000,00	9.405.825,00	77,86	10.562.975,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	2.140.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	71.313.650,00	68.849.839,00	96,55	68.922.053,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	71.313.650,00	68.849.839,00	96,55	68.922.053,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	26.425.000,00	21.040.000,00	79,62	8.850.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	23.625.000,00	18.640.000,00	78,90	7.050.000,00

5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	2.800.000,00	2.400.000,00	85,71	800.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	32.027.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00	32.027.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis s	48.000.000,00	46.000.000,00	95,83	69.700.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	37.500.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	33.000.000,00	31.000.000,00	93,94	32.200.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	136.782.856,00	121.099.000,00	88,53	164.760.450,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	86.782.856,00	71.349.000,00	82,22	114.960.450,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	55.000.000,00	50.679.000,00	92,14	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	10.582.856,00	10.240.000,00	96,76	15.140.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	0,00	0,00	0,00	44.390.450,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Persona	7.300.000,00	7.080.000,00	96,99	7.080.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Pe	6.900.000,00	3.350.000,00	48,55	48.350.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.750.000,00	99,50	49.800.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ged	50.000.000,00	49.750.000,00	99,50	49.800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	867.776.100,00	722.727.658,00	83,29	1.290.954.437,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	867.776.100,00	722.727.658,00	83,29	1.290.954.437,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	867.776.100,00	722.727.658,00	83,29	1.231.741.340,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	59.213.097,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	10.797.439.688,90	8.583.966.491,00	79,50	9.180.804.926,00
5.2	BELANJA MODAL	548.961.800,00	533.323.497,00	97,15	1.079.465.400,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	548.961.800,00	533.323.497,00	97,15	1.079.465.400,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	395.392.000,00	388.565.496,00	98,27	435.470.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	220.000.000,00	213.803.498,00	97,18	180.950.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	220.000.000,00	213.803.498,00	97,18	180.950.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	175.392.000,00	174.761.998,00	99,64	254.520.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	164.892.000,00	164.369.999,00	99,68	115.095.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	28.975.500,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	30.949.500,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	7.500.000,00	7.391.999,00	98,56	72.500.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	153.569.800,00	144.758.001,00	94,26	643.995.400,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	59.254.000,00	57.742.000,00	97,45	458.757.500,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	59.254.000,00	57.742.000,00	97,45	458.757.500,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	94.315.800,00	87.016.001,00	92,26	185.237.900,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	94.315.800,00	87.016.001,00	92,26	185.237.900,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	548.961.800,00	533.323.497,00	97,15	1.079.465.400,00
	JUMLAH BELANJA	11.346.401.488,90	9.117.289.988,00	80,35	10.260.270.326,00
	SURPLUS/DEFISIT	(11.346.401.488,90)	(9.117.289.988,00)	80,35	(10.260.270.326,00)

Kab. Muara Enim, 26 Januari 2026
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Drs. H. Risman Effendi, M.Si.
NIP.196805071990091001



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	44.453.551.059,40	40.285.538.571,00	90,62	39.148.529.989,00
5.1	BELANJA OPERASI	43.832.778.786,40	39.673.313.571,00	90,51	38.601.406.989,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.270.058.186,40	4.872.933.249,00	77,71	4.175.441.515,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.569.548.146,87	2.734.436.006,00	76,60	2.277.947.143,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.631.620.606,45	2.135.315.701,00	81,14	1.769.039.507,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.122.382.361,45	1.634.837.560,00	77,02	1.637.691.914,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	509.238.245,00	500.478.141,00	98,27	131.347.593,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	330.286.805,75	212.764.965,00	64,41	174.510.926,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	269.828.140,15	169.169.091,00	62,69	160.158.798,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	60.458.665,60	43.595.874,00	72,10	14.352.128,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	133.280.750,00	46.760.000,00	35,08	61.560.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	133.280.750,00	46.760.000,00	35,08	61.560.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	180.697.250,00	137.600.000,00	76,14	123.620.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	180.697.250,00	137.600.000,00	76,14	123.620.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	91.618.557,50	72.027.500,00	78,61	48.805.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	59.522.057,50	40.495.000,00	68,03	41.220.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	32.096.500,00	31.532.500,00	98,24	7.585.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	188.139.936,35	125.630.595,00	66,77	95.956.500,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	147.164.700,35	92.190.660,00	62,64	86.614.320,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	40.975.236,00	33.439.935,00	81,61	9.342.180,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.798.374,73	4.304.076,00	31,19	4.428.439,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	13.798.374,73	4.304.076,00	31,19	4.428.439,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	105.866,09	33.169,00	31,33	26.771,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	53.660,79	23.753,00	44,26	24.107,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	52.205,30	9.416,00	18,03	2.664,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.700.510.039,53	2.138.497.243,00	79,18	1.889.334.372,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.700.510.039,53	2.138.497.243,00	79,18	1.889.334.372,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.245.570.907,13	1.780.275.031,00	79,27	1.807.138.623,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	454.939.132,40	358.222.212,00	78,74	82.195.749,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.562.720.600,00	34.800.380.322,00	92,64	34.425.965.474,00
5.1.02.01	Belanja Barang	22.032.227.257,00	21.146.042.498,00	95,97	20.738.021.256,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	22.032.227.257,00	21.146.042.498,00	95,97	20.738.021.256,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	13.066.500,00	12.983.850,00	99,36	15.080.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	449.303.816,00	393.783.897,00	87,64	498.820.600,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.062.000,00	270.000,00	25,42	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	492.902.020,00	432.315.905,00	87,70	257.698.300,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.511.600,00	5.680.000,00	87,22	5.800.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	60.530.751,00	56.912.000,00	94,02	45.604.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	17.694.000,00	17.295.000,00	97,74	23.290.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	399.360.000,00	389.487.400,00	97,52	323.057.500,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	18.995.010.370,00	18.562.512.246,00	97,72	18.865.671.856,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.368.195.000,00	1.046.211.000,00	76,46	702.999.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakisan Olahraga	208.591.200,00	208.591.200,00	100,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	10.014.270.243,00	8.602.730.823,00	85,90	8.391.080.198,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.119.593.193,00	1.511.793.723,00	71,32	1.747.276.170,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	380.830.000,00	121.530.000,00	31,91	157.700.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	30.480.000,00	20.320.000,00	66,66	30.480.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertibn Umum, dan Perlindungan Masyarakat	192.000.000,00	129.500.000,00	67,44	0,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	437.400.000,00	434.150.000,00	99,25	432.250.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	396.440.000,00	255.920.000,00	64,55	533.790.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	209.795.343,00	203.940.000,00	97,20	200.040.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	119.040.000,00	64.240.000,00	53,96	100.200.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	106.500.000,00	80.000.000,00	75,11	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	5.000.000,00	0,00	0,00	75.500.000,00
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	39.000.000,00	21.832.845,00	55,98	24.137.587,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	9.200.000,00	2.188.500,00	23,78	4.171.750,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	143.055.000,00	136.606.178,00	95,49	138.399.283,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.000.000,00	3.655.000,00	45,68	18.580.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	14.612.850,00	12.891.200,00	88,21	6.527.550,00

5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	7.480.000,00	91,66	0,00
5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	5.080.000,00	2.540.000,00	50,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	4.239.679.050,00	4.087.650.350,00	96,41	3.786.845.978,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.180.475.050,00	4.036.325.784,00	96,55	3.728.011.968,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	59.204.000,00	51.324.566,00	86,69	58.834.010,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.295.010.000,00	810.182.650,00	62,56	328.600.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	248.500.000,00	200.000.000,00	80,48	117.400.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.027.560.000,00	591.232.650,00	57,53	187.150.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	18.950.000,00	18.950.000,00	100,00	24.050.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	324.400.000,00	276.810.000,00	85,32	977.690.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.540.000,00	15.270.000,00	74,34	29.540.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	303.860.000,00	261.540.000,00	86,07	948.150.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.171.938.000,00	1.092.944.100,00	93,25	642.643.050,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	760.516.500,00	683.377.050,00	89,85	448.478.050,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	411.421.500,00	409.567.050,00	99,54	194.165.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	863.650.000,00	823.350.000,00	95,33	908.025.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	60.000.000,00	48.000.000,00	80,00	66.925.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	448.900.000,00	420.600.000,00	93,69	676.100.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	354.750.000,00	354.750.000,00	100,00	165.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	785.790.000,00	775.982.817,00	98,75	474.915.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	385.790.000,00	377.615.000,00	97,88	386.765.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	242.550.000,00	237.390.000,00	97,87	252.055.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	27.000.000,00	26.725.000,00	98,98	58.360.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	52.000.000,00	51.995.000,00	99,99	11.970.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	26.840.000,00	26.710.000,00	99,51	24.350.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.950.000,00	4.900.000,00	98,98	9.600.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	22.100.000,00	21.120.000,00	95,56	18.880.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.350.000,00	8.775.000,00	84,78	11.550.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	398.367.817,00	99,59	88.150.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	400.000.000,00	398.367.817,00	99,59	88.150.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	4.301.433.100,00	3.847.624.184,00	89,44	4.444.449.020,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.301.433.100,00	3.847.624.184,00	89,44	4.444.449.020,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.301.433.100,00	3.847.624.184,00	89,44	4.444.449.020,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	429.000.000,00	428.000.000,00	99,76	377.500.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	429.000.000,00	428.000.000,00	99,76	377.500.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	429.000.000,00	428.000.000,00	99,76	377.500.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	43.832.778.786,40	39.673.313.571,00	90,51	38.601.406.989,00
5.2	BELANJA MODAL	620.772.273,00	612.225.000,00	98,62	547.123.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	620.772.273,00	612.225.000,00	98,62	547.123.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	42.959.220,00	41.062.500,00	95,58	155.600.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	29.639.220,00	29.572.500,00	99,77	9.500.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	29.639.220,00	29.572.500,00	99,77	9.500.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	13.320.000,00	11.490.000,00	86,26	146.100.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	13.320.000,00	11.490.000,00	86,26	33.300.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	66.800.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	34.743.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	34.743.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	8.325.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	26.418.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	577.813.053,00	571.162.500,00	98,84	332.030.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	533.135.553,00	526.485.000,00	98,75	332.030.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	533.135.553,00	526.485.000,00	98,75	332.030.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	44.677.500,00	44.677.500,00	100,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	44.677.500,00	44.677.500,00	100,00	0,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	24.750.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	24.750.000,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	0,00	0,00	0,00	24.750.000,00
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
	JUMLAH BELANJA MODAL	620.772.273,00	612.225.000,00	98,62	547.123.000,00
	JUMLAH BELANJA	44.453.551.059,40	40.285.538.571,00	90,62	39.148.529.989,00
	SURPLUS/DEFISIT	(44.453.551.059,40)	(40.285.538.571,00)	90,62	(39.148.529.989,00)

Kab. Muara Enim, 9 Februari 2026
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Firmansyah Hamid, S.E.
NIP.197007252008011001



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM
AS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	31.679.456.605,54	30.339.235.882,00	95,77	20.917.312.761,00
5.1	BELANJA OPERASI	25.413.044.605,54	24.180.227.985,00	95,15	18.840.667.761,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.716.302.552,59	3.488.937.092,00	93,88	3.060.257.803,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.041.711.203,59	1.862.894.041,00	91,24	1.561.934.798,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.529.194.476,00	1.455.807.960,00	95,20	1.180.745.228,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.187.683.100,00	1.148.507.260,00	96,70	1.158.320.028,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	341.511.376,00	307.300.700,00	89,98	22.425.200,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	172.976.084,59	111.083.332,00	64,22	105.394.014,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	122.758.714,00	94.732.826,00	77,17	103.151.494,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	50.217.370,59	16.350.506,00	32,56	2.242.520,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	91.106.750,00	88.550.000,00	97,19	81.530.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	91.106.750,00	88.550.000,00	97,19	81.530.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	91.903.200,00	86.730.000,00	94,37	109.032.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	91.903.200,00	86.730.000,00	94,37	109.032.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	51.414.875,00	44.518.750,00	86,59	23.220.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	28.609.000,00	24.535.000,00	85,76	21.925.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	22.805.875,00	19.983.750,00	87,63	1.295.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	97.696.117,00	70.681.920,00	72,35	56.415.180,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	63.984.305,00	54.532.260,00	85,23	54.821.940,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	33.711.812,00	16.149.660,00	47,91	1.593.240,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.320.000,00	5.501.568,00	75,16	5.583.678,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.320.000,00	5.501.568,00	75,16	5.583.678,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	99.701,00	20.511,00	20,57	14.698,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	51.520,00	15.075,00	29,26	14.132,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	48.181,00	5.436,00	11,28	566,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.674.591.349,00	1.626.043.051,00	97,10	1.440.723.005,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.674.591.349,00	1.626.043.051,00	97,10	1.440.723.005,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.432.841.823,00	1.406.818.286,00	98,18	1.421.051.955,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	241.749.526,00	219.224.765,00	90,68	19.671.050,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	57.600.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	57.600.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	57.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.696.742.052,95	20.691.290.893,00	95,37	15.780.409.958,00
5.1.02.01	Belanja Barang	5.706.885.046,98	5.317.048.854,00	93,17	3.189.590.612,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	5.706.885.046,98	5.317.048.854,00	93,17	3.189.590.612,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	307.000.000,00	296.546.000,00	96,59	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	358.663.955,98	271.470.468,00	75,69	628.553.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	475.635.886,00	406.311.186,00	85,42	475.164.400,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.144.000,00	7.020.000,00	98,26	4.860.000,00
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	70.401.019,00	41.981.088,00	59,63	58.460.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	24.412.800,00	20.103.710,00	82,35	25.843.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Survenir/Cendera Mata	21.250.000,00	20.400.000,00	96,00	13.650.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	30.000.000,00	29.759.944,00	99,20	957.326.212,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.118.502,00	6.095.000,00	99,62	23.729.500,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.444.118.580,00	1.404.242.986,00	97,24	143.900.500,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	1.866.700.000,00	1.837.934.972,00	98,46	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.045.440.304,00	930.183.500,00	88,98	671.228.600,00

5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	50.000.000,00	45.000.000,00	90,00	171.200.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	15.675.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	13.558.435.241,02	12.963.728.955,00	95,61	10.182.550.894,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10.373.043.495,02	9.990.914.855,00	96,32	7.960.516.276,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	307.500.000,00	279.700.000,00	90,96	225.625.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	42.600.000,00	42.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	250.500.000,00	246.815.000,00	98,53	116.200.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	526.520.000,00	492.980.000,00	93,63	819.250.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	101.880.000,00	94.530.000,00	92,79	143.800.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	6.326.102.780,00	6.271.125.000,00	99,13	4.470.970.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	394.400.000,00	357.821.440,00	90,73	168.680.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	194.400.000,00	162.000.000,00	83,33	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	49.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	33.000.000,00	29.500.000,00	89,39	36.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	9.000.000,00	1.396.772,00	15,52	1.356.772,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	47.319.465,00	7.728.000,00	16,33	6.656.750,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	246.497.000,02	117.172.665,00	47,54	94.218.829,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.540.000,00	9.500.000,00	99,58	12.648.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.789.200.000,00	1.787.110.000,00	99,88	1.785.710.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	43.224.250,00	39.575.978,00	91,56	22.900.925,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	2.140.000,00	2.140.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0089	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	2.140.000,00	2.140.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	5.080.000,00	5.080.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	342.129.950,00	267.864.100,00	78,29	103.704.618,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	86.976.000,00	72.950.400,00	83,87	0,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	108.720.000,00	91.188.000,00	83,87	0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	146.433.950,00	103.725.700,00	70,83	103.704.618,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	46.500.000,00	46.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	645.025.000,00	632.720.000,00	98,09	306.705.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	50.405.000,00	40.000.000,00	79,36	15.405.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	594.620.000,00	592.720.000,00	99,68	291.300.000,00
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	98.550.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00	0,00	98.550.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.151.736.796,00	2.025.730.000,00	94,14	1.713.075.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	115.000.000,00	74.480.000,00	64,77	70.125.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	2.036.736.796,00	1.951.250.000,00	95,80	1.642.950.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.282.260.000,00	1.269.905.367,00	99,04	624.316.536,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	182.260.000,00	177.092.067,00	97,16	225.396.436,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	130.000.000,00	129.965.591,00	99,97	170.746.436,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	25.000.000,00	24.985.000,00	99,94	34.080.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	13.060.000,00	9.114.000,00	69,79	11.720.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.300.000,00	7.166.666,00	98,17	4.800.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.900.000,00	5.860.810,00	84,94	4.050.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.100.000.000,00	1.092.813.300,00	99,35	398.920.100,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	1.100.000.000,00	1.092.813.300,00	99,35	398.920.100,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.110.911.764,95	1.108.277.717,00	99,76	1.703.081.916,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.110.911.764,95	1.108.277.717,00	99,76	1.703.081.916,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.110.911.764,95	1.108.277.717,00	99,76	1.703.081.916,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	38.250.000,00	32.330.000,00	84,52	80.870.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	38.250.000,00	32.330.000,00	84,52	80.870.000,00

5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	38.250.000,00	32.330.000,00	84,52	80.870.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	25.413.044.605,54	24.180.227.985,00	95,15	18.840.667.761,00
5.2	BELANJA MODAL	6.266.412.000,00	6.159.007.897,00	98,29	2.076.645.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	766.412.000,00	753.379.897,00	98,30	1.215.645.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	650.068.000,00	641.929.896,00	98,75	270.455.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	180.000.000,00	179.789.000,00	99,88	166.055.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	80.000.000,00	79.800.000,00	99,75	166.055.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	100.000.000,00	99.989.000,00	99,99	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	470.068.000,00	462.140.896,00	98,31	58.900.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	160.000.000,00	159.000.000,00	99,38	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	222.156.000,00	219.140.880,00	98,64	49.900.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	87.912.000,00	84.000.016,00	95,55	0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	45.500.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	150.890.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	150.890.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	100.890.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	116.344.000,00	111.450.001,00	95,79	794.300.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	70.000.000,00	67.200.000,00	96,00	768.700.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	70.000.000,00	67.200.000,00	96,00	768.700.000,00
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	46.344.000,00	44.250.001,00	95,48	25.600.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	46.344.000,00	44.250.001,00	95,48	25.600.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.500.000.000,00	5.405.628.000,00	98,28	861.000.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	5.500.000.000,00	5.405.628.000,00	98,28	861.000.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.500.000.000,00	5.405.628.000,00	98,28	861.000.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	4.500.000.000,00	4.427.000.000,00	98,38	0,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.000.000.000,00	978.628.000,00	97,86	0,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	861.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	6.266.412.000,00	6.159.007.897,00	98,29	2.076.645.000,00
	JUMLAH BELANJA	31.679.456.605,54	30.339.235.882,00	95,77	20.917.312.761,00
	SURPLUS/DEFISIT	(31.679.456.605,54)	(30.339.235.882,00)	95,77	(20.917.312.761,00)

Kab. Muara Enim, 13 Januari 2026 **KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA**
BERENCANA

H. Rinaldo, S.STP.,M.Si
NIP.197709191996021001



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM DINAS PERHUBUNGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	635.600.000,00	572.397.000,00	90,06	587.822.500,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	635.600.000,00	572.397.000,00	90,06	587.822.500,00
4.1.02	Retribusi Daerah	635.600.000,00	572.397.000,00	90,06	587.822.500,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	407.200.000,00	387.830.000,00	95,24	364.165.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	407.200.000,00	387.830.000,00	95,24	364.165.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	407.200.000,00	387.830.000,00	95,24	364.165.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	228.400.000,00	184.567.000,00	80,81	223.657.500,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	84.000.000,00	52.250.000,00	62,20	80.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	84.000.000,00	52.250.000,00	62,20	80.000.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	55.400.000,00	37.700.000,00	68,05	58.620.000,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	55.400.000,00	37.700.000,00	68,05	58.620.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	81.000.000,00	90.910.000,00	112,23	84.562.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	81.000.000,00	90.910.000,00	112,23	84.562.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	8.000.000,00	3.707.000,00	46,34	475.500,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	8.000.000,00	3.707.000,00	46,34	475.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	635.600.000,00	572.397.000,00	90,06	587.822.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN	635.600.000,00	572.397.000,00	90,06	587.822.500,00
5	BELANJA DAERAH	82.557.750.472,34	76.741.640.322,00	92,96	17.594.795.793,00
5.1	BELANJA OPERASI	42.945.963.865,34	37.316.631.628,00	86,89	14.195.981.793,00
5.1.01	Belanja Pegawai	7.503.846.765,84	5.825.699.420,00	77,64	4.625.404.195,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.672.522.513,72	3.262.632.432,00	69,83	2.541.497.692,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.600.083.531,00	2.575.556.555,00	71,54	1.986.102.147,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.365.271.140,00	1.782.643.580,00	75,37	1.797.739.884,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.234.812.391,00	792.912.975,00	64,21	188.362.263,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	387.345.231,00	236.138.879,00	60,96	192.995.822,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	244.312.467,00	176.199.877,00	72,12	175.566.012,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	143.032.764,00	59.939.002,00	41,91	17.429.810,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	205.687.433,00	178.470.000,00	86,77	154.500.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	205.687.433,00	178.470.000,00	86,77	154.500.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	39.606.000,00	26.325.000,00	66,47	38.640.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	39.606.000,00	26.325.000,00	66,47	38.640.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	131.927.750,00	90.105.000,00	68,30	51.180.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	58.097.000,00	37.600.000,00	64,72	37.680.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	73.830.750,00	52.505.000,00	71,12	13.500.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	204.693.156,00	152.353.575,00	74,43	114.785.700,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	129.161.070,00	101.098.320,00	78,27	100.156.860,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	75.532.086,00	51.255.255,00	67,86	14.628.840,00
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	103.104.490,00	3.644.651,00	3,53	3.265.093,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	43.290.834,00	3.644.651,00	8,42	3.265.093,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	59.813.656,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	74.922,72	38.772,00	51,75	28.930,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	40.276,00	23.832,00	59,17	25.940,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	34.646,72	14.940,00	43,12	2.990,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.831.324.252,12	2.563.066.988,00	90,53	2.083.906.503,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.831.324.252,12	2.563.066.988,00	90,53	2.083.906.503,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.137.642.956,12	1.992.796.697,00	93,22	1.954.430.390,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	693.681.296,00	570.270.291,00	82,21	129.476.113,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.442.117.099,50	31.490.932.208,00	88,85	9.570.577.598,00
5.1.02.01	Belanja Barang	2.530.092.533,50	1.320.357.992,00	52,19	1.172.114.940,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.468.392.533,50	1.259.507.792,00	51,03	1.112.234.940,00

5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.889.200,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	954.313.000,00	451.744.425,00	47,34	292.619.240,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	62.500.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	157.607.390,00	127.672.237,00	81,01	207.659.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	73.535.419,00	67.043.600,00	91,17	65.855.300,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.159.800,00	4.340.000,00	84,11	3.330.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	49.638.409,00	49.631.500,00	99,99	55.073.500,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	618.362.588,00	27.848.980,00	4,50	18.517.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	40.245.727,50	36.945.000,00	91,80	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	38.085.000,00	37.712.250,00	99,02	37.710.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	447.556.000,00	375.569.800,00	83,92	368.970.400,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	61.700.000,00	60.850.200,00	98,62	59.880.000,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	61.700.000,00	60.850.200,00	98,62	59.880.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	28.663.710.659,00	25.985.627.143,00	90,66	4.455.727.572,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	27.457.810.159,00	25.066.126.799,00	91,29	3.621.310.642,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25.000.000,00	21.000.000,00	84,00	27.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	2.017.170.000,00	1.919.940.000,00	95,18	3.106.425.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.750.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	36.000.000,00	18.000.000,00	50,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	209.500.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	9.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	444.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	59.100.300,00	37.923.250,00	64,17	34.202.700,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	147.768.826,00	126.063.827,00	85,31	130.703.154,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10.808.000,00	9.950.000,00	92,06	10.600.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	85.070.000,00	66.959.115,00	78,71	66.603.638,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	31.339.033,00	29.689.258,00	94,74	23.276.150,00
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	25.000.000.000,00	22.800.241.349,00	91,20	0,00
5.1.02.02.01.0086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	9.360.000,00	9.360.000,00	100,00	0,00
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	204.704.250,00	198.125.000,00	96,79	175.008.930,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	204.704.250,00	198.125.000,00	96,79	175.008.930,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	645.560.000,00	536.610.000,00	83,12	609.550.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	336.000.000,00	334.800.000,00	99,64	418.500.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	34.800.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	288.560.000,00	180.810.000,00	62,66	156.250.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	355.636.250,00	184.765.344,00	51,95	49.858.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	272.549.250,00	118.861.344,00	43,61	2.560.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	19.100.000,00	7.100.000,00	37,17	4.050.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	63.987.000,00	58.804.000,00	91,90	43.248.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.979.266.216,00	1.925.687.378,00	97,29	2.306.630.100,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.721.842.216,00	1.669.554.900,00	96,96	2.232.184.100,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	176.228.000,00	176.190.000,00	99,98	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	293.350.000,00	256.185.000,00	87,33	450.061.500,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	37.110.000,00	37.085.000,00	99,93	36.488.000,00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	98.600.000,00	98.390.400,00	99,79	103.407.600,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	3.354.216,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	29.385.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	6.100.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.300.000,00	7.300.000,00	100,00	7.300.000,00

5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00	5.300.000,00
5.1.02.03.02.0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	1.089.500.000,00	1.080.004.500,00	99,13	1.594.142.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	257.424.000,00	256.132.478,00	99,50	74.446.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	167.424.000,00	166.580.197,00	99,50	0,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	90.000.000,00	89.552.281,00	99,50	74.446.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.258.547.691,00	2.254.759.695,00	99,83	1.631.604.986,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.258.547.691,00	2.254.759.695,00	99,83	1.631.604.986,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.258.547.691,00	2.254.759.695,00	99,83	1.631.604.986,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.500.000,00	4.500.000,00	42,86	4.500.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.500.000,00	4.500.000,00	42,86	4.500.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	10.500.000,00	4.500.000,00	42,86	4.500.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	42.945.963.865,34	37.316.631.628,00	86,89	14.195.981.793,00
5.2	BELANJA MODAL	39.611.786.607,00	39.425.008.694,00	99,53	3.398.814.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.298.789.230,00	2.284.308.188,00	99,37	2.151.633.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.500.000,00	1.360.000,00	90,67	20.112.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	1.500.000,00	1.360.000,00	90,67	20.112.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	1.500.000,00	1.360.000,00	90,67	20.112.000,00
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	647.710.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	647.710.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	602.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	45.710.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	209.436.530,00	207.175.950,00	98,92	34.650.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	209.436.530,00	207.175.950,00	98,92	34.650.000,00
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	209.436.530,00	207.175.950,00	98,92	34.650.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	43.880.000,00	41.239.902,00	93,98	93.600.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	25.200.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	43.880.000,00	41.239.902,00	93,98	68.400.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	68.400.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	37.080.000,00	35.094.901,00	94,65	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.800.000,00	6.145.001,00	90,37	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	40.000.000,00	39.780.000,00	99,45	29.800.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	40.000.000,00	39.780.000,00	99,45	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	40.000.000,00	39.780.000,00	99,45	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00
5.2.02.06.04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	0,00	0,00	0,00	19.900.000,00
5.2.02.06.04.0001	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System	0,00	0,00	0,00	19.900.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	41.067.900,00	40.286.640,00	98,10	216.900.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	41.067.900,00	40.286.640,00	98,10	188.900.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	41.067.900,00	40.286.640,00	98,10	188.900.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	5.770.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	5.770.000,00
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.770.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.962.904.800,00	1.954.465.696,00	99,57	1.103.091.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.962.904.800,00	1.954.465.696,00	99,57	1.103.091.000,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	173.200.000,00	172.050.000,00	99,34	0,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	1.479.704.800,00	1.473.815.376,00	99,60	1.103.091.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	310.000.000,00	308.600.320,00	99,55	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.138.762.000,00	1.134.906.214,00	99,66	1.247.181.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.138.762.000,00	1.134.906.214,00	99,66	1.247.181.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.138.762.000,00	1.134.906.214,00	99,66	1.247.181.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	211.132.000,00	210.788.969,00	99,84	0,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	114.230.000,00

5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	28.889.000,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	138.000.000,00	138.000.000,00	100,00	0,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	789.630.000,00	786.117.245,00	99,56	1.011.799.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	17.889.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	74.374.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.174.235.377,00	36.005.794.292,00	99,53	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	36.174.235.377,00	36.005.794.292,00	99,53	0,00
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	36.174.235.377,00	36.005.794.292,00	99,53	0,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	36.174.235.377,00	36.005.794.292,00	99,53	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	39.611.786.607,00	39.425.008.694,00	99,53	3.398.814.000,00
	JUMLAH BELANJA	82.557.750.472,34	76.741.640.322,00	92,96	17.594.795.793,00
	SURPLUS/DEFISIT	(81.922.150.472,34)	(76.169.243.322,00)	92,98	(17.006.973.293,00)

Kab. Muara Enim, 5 Januari 2026
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

H. Junaidi, S.H.,M.Hum.,M.Si.
NIP.197106131994031001



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	454.287.369,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00	454.287.369,00
4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	454.059.301,76
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	454.059.301,76
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	454.059.301,76
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	454.059.301,76
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	228.067,24
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	228.067,24
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0,00	0,00	0,00	228.067,24
4.1.04.13.01.0013	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	228.067,24
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	454.287.369,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	454.287.369,00
5	BELANJA DAERAH	31.030.215.335,45	29.948.437.286,00	96,51	27.357.025.071,10
5.1	BELANJA OPERASI	27.148.540.635,45	26.091.478.510,00	96,11	26.055.666.151,10
5.1.01	Belanja Pegawai	5.630.254.249,45	5.408.872.048,00	96,07	4.171.934.145,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.092.380.061,45	2.969.221.235,00	96,02	2.178.754.347,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.340.978.212,68	2.293.041.940,00	97,95	1.637.273.420,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.781.420.623,50	1.769.525.140,00	99,33	1.516.025.434,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	559.557.589,18	523.516.800,00	93,56	121.247.986,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	231.482.703,60	193.321.889,00	83,51	153.773.516,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	164.137.350,00	154.908.067,00	94,38	145.312.868,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	67.345.353,60	38.413.822,00	57,04	8.460.648,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	112.611.625,00	110.050.000,00	97,73	100.310.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	112.611.625,00	110.050.000,00	97,73	100.310.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	167.898.100,00	164.342.000,00	97,88	154.357.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	167.898.100,00	164.342.000,00	97,88	154.357.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	85.171.093,75	78.223.750,00	91,84	40.390.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	50.096.875,00	44.855.000,00	89,54	33.090.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	35.074.218,75	33.368.750,00	95,14	7.300.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	146.430.428,88	126.137.535,00	86,14	90.525.000,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	103.986.086,00	92.335.500,00	88,80	83.500.260,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	42.444.342,88	33.802.035,00	79,64	7.024.740,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.737.524,11	4.067.066,00	52,56	2.100.441,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.667.150,68	4.067.066,00	53,05	2.100.441,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	70.373,43	37.055,00	52,65	24.970,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	29.725,00	24.453,00	82,26	21.857,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	40.648,43	12.602,00	31,00	3.113,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.537.874.188,00	2.439.650.813,00	96,13	1.993.179.798,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.537.874.188,00	2.439.650.813,00	96,13	1.993.179.798,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.124.894.744,00	2.064.357.022,00	97,15	1.901.330.808,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	412.979.444,00	375.293.791,00	90,87	91.848.990,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.518.286.386,00	20.682.606.462,00	96,12	21.663.737.006,10
5.1.02.01	Belanja Barang	1.548.204.949,00	1.501.213.089,00	96,96	1.488.730.770,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.548.204.949,00	1.501.213.089,00	96,96	1.488.730.770,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.870.000,00	12.600.000,00	97,90	13.330.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	129.839.600,00	128.597.199,00	99,04	180.265.520,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	837.134.550,00	831.586.650,00	99,34	830.996.650,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9.533.000,00	9.460.000,00	99,23	8.440.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	37.461.099,00	37.348.000,00	99,70	61.117.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	23.236.400,00	23.180.000,00	99,76	31.191.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	344.607.400,00	309.780.240,00	89,89	191.349.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	153.522.900,00	148.661.000,00	96,83	172.041.600,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	16.748.722.850,00	15.966.530.729,00	95,33	16.279.832.749,10
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	16.559.126.500,00	15.789.981.229,00	95,36	16.120.995.392,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	295.800.000,00	294.600.000,00	99,59	494.100.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	89.000.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	100.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	143.080.000,00	138.940.000,00	97,11	236.150.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	59.360.000,00	57.760.000,00	97,30	92.990.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	397.000.000,00	373.000.000,00	93,95	334.600.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	27.280.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0,00	0,00	0,00	25.680.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	210.000.000,00	209.950.000,00	99,98	58.830.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pementasan	5.652.500.000,00	5.633.441.022,00	99,66	5.477.466.962,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.800.000,00	1.235.812,00	68,66	1.276.812,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	8.452.500,00	6.101.250,00	72,18	4.358.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	132.000.750,00	131.923.557,00	99,94	122.863.768,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.574.000,00	13.530.000,00	99,68	13.030.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.581.573.350,00	8.867.545.338,00	92,55	9.131.841.950,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	983.500,00

5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.345.900,00	10.414.250,00	84,35	10.543.900,00
5.1.02.02.01.0086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga	2.540.000,00	2.540.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	121.571.350,00	113.274.500,00	93,18	36.175.857,10
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	121.571.350,00	113.274.500,00	93,18	36.175.857,10
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	21.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	68.025.000,00	63.275.000,00	93,02	101.661.500,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	19.125.000,00	19.125.000,00	100,00	25.500.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	48.900.000,00	44.150.000,00	90,29	76.161.500,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.226.404.387,00	1.221.196.141,00	99,58	1.054.582.788,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	860.604.387,00	856.853.141,00	99,56	362.295.555,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor P	207.194.387,00	206.783.140,00	99,80	272.405.855,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda	15.000.000,00	14.987.000,00	99,91	14.924.700,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	91.500.000,00	90.945.000,00	99,39	22.250.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	21.960.000,00	21.850.000,00	99,50	21.900.000,00
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi La	500.000.000,00	497.628.001,00	99,53	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	14.600.000,00	14.565.000,00	99,76	14.600.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.350.000,00	10.095.000,00	97,54	10.215.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	365.800.000,00	364.343.000,00	99,60	632.587.233,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kant	330.800.000,00	329.743.000,00	99,68	632.587.233,00
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golon	35.000.000,00	34.600.000,00	98,86	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	59.700.000,00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	0,00	0,00	0,00	59.700.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.994.954.200,00	1.993.666.503,00	99,94	2.831.590.699,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.994.954.200,00	1.993.666.503,00	99,94	2.831.590.699,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.994.954.200,00	1.993.666.503,00	99,94	2.831.590.699,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	219.995.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indone	0,00	0,00	0,00	219.995.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat	0,00	0,00	0,00	219.995.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki	0,00	0,00	0,00	219.995.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	27.148.540.635,45	26.091.478.510,00	96,11	26.055.666.151,10
5.2	BELANJA MODAL	3.881.674.700,00	3.856.958.776,00	99,36	1.301.358.920,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.881.674.700,00	3.856.958.776,00	99,36	1.301.358.920,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	288.800.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	288.800.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	288.800.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	117.500.000,00	115.073.475,00	97,93	496.028.720,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	98.500.000,00	96.475.630,00	97,94	206.060.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	4.615.730,00	92,31	4.460.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	93.500.000,00	91.859.900,00	98,25	201.600.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	19.000.000,00	18.597.845,00	97,88	289.968.720,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	5.000.000,00	4.730.245,00	94,60	226.968.720,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	14.000.000,00	13.867.600,00	99,05	3.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	114.340.000,00	113.558.550,00	99,32	155.890.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	114.340.000,00	113.558.550,00	99,32	133.390.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4.240.000,00	4.107.000,00	96,86	11.400.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	106.350.000,00	105.721.950,00	99,41	110.850.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	3.750.000,00	3.729.600,00	99,46	11.140.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.000.000,00	3.885.000,00	97,13	0,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	4.000.000,00	3.885.000,00	97,13	0,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	4.000.000,00	3.885.000,00	97,13	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.645.834.700,00	3.624.441.751,00	99,41	360.640.200,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	199.352.000,00	192.415.501,00	96,52	154.749.700,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	199.352.000,00	192.415.501,00	96,52	154.749.700,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.446.482.700,00	3.432.026.250,00	99,58	205.890.500,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	38.407.700,00	37.982.000,00	98,89	15.000.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	3.408.075.000,00	3.394.044.250,00	99,59	190.890.500,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	3.881.674.700,00	3.856.958.776,00	99,36	1.301.358.920,00
	JUMLAH BELANJA	31.030.144.962,02	29.948.437.286,00	96,51	27.357.025.071,10
	SURPLUS/DEFISIT	(31.030.144.962,02)	(29.948.437.286,00)	96,51	(26.902.737.702,10)

Kab. Muara Enim, 31 Desember 2025
NAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN

Ardian Arifanardi, AP., M.Si.
NIP.197407201993111001



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	16.344.240.103,00	14.504.673.848,00	88,74	11.467.815.353,00
5.1	BELANJA OPERASI	14.624.440.103,00	12.821.565.418,00	87,67	10.170.732.853,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.997.348.043,00	5.056.697.695,00	84,31	4.494.470.690,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.346.089.573,00	2.731.362.401,00	81,62	2.365.016.757,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.476.987.933,02	2.068.619.660,00	83,51	1.763.042.964,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.024.702.168,52	1.706.636.560,00	84,29	1.650.916.964,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	452.285.764,50	361.983.100,00	80,03	112.126.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	315.424.042,33	198.534.882,00	62,94	174.090.774,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	194.399.422,33	173.638.442,00	89,32	174.090.774,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	121.024.620,00	24.896.440,00	20,57	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	118.889.750,00	115.990.000,00	97,56	109.130.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	118.889.750,00	115.990.000,00	97,56	109.130.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	220.990.000,00	178.120.000,00	80,60	188.020.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	220.990.000,00	178.120.000,00	80,60	188.020.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	60.480.125,00	49.358.750,00	81,61	29.645.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	36.833.375,00	27.055.000,00	73,45	23.170.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	23.646.750,00	22.303.750,00	94,32	6.475.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	139.742.284,40	114.333.012,00	81,81	96.173.760,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	100.400.119,40	94.218.357,00	93,84	93.639.060,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	39.342.165,00	20.114.655,00	51,12	2.534.700,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	13.509.180,20	6.377.023,00	47,20	4.889.354,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12.275.990,40	6.377.023,00	51,94	4.889.354,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.233.189,80	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	66.258,05	29.074,00	43,87	24.905,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	49.081,10	21.721,00	44,25	22.012,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	17.176,95	7.353,00	42,80	2.893,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.651.258.470,00	2.325.335.294,00	87,70	2.129.453.933,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.651.258.470,00	2.325.335.294,00	87,70	2.129.453.933,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.336.239.480,00	2.066.159.465,00	88,43	2.044.014.806,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	315.018.990,00	259.175.829,00	82,27	85.439.127,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.612.092.060,00	7.764.867.723,00	90,16	5.676.262.163,00
5.1.02.01	Belanja Barang	4.228.741.145,00	3.851.510.876,00	91,07	2.017.223.189,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.228.741.145,00	3.851.510.876,00	91,07	2.017.223.189,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	304.073.080,00	253.929.970,00	83,50	261.481.127,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	285.577.915,00	226.334.761,00	79,25	291.803.162,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	263.638.400,00	223.226.300,00	84,67	221.818.400,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	16.395.200,00	15.500.000,00	94,53	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	29.669.600,00	29.406.000,00	99,11	29.605.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	45.924.350,00	45.750.000,00	99,62	7.233.500,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	13.153.600,00	11.874.000,00	90,27	16.633.400,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	170.790.000,00	104.426.745,00	61,14	59.607.250,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan	2.590.946.000,00	2.496.935.100,00	96,37	699.516.350,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	36.400.000,00	34.460.000,00	94,67	31.985.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	466.173.000,00	409.668.000,00	87,87	387.328.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	6.000.000,00	0,00	0,00	10.212.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.833.535.650,00	1.436.145.104,00	78,32	1.660.204.975,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	725.246.850,00	572.699.604,00	78,96	611.952.075,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, dan	235.380.000,00	183.780.000,00	78,07	187.000.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	30.480.000,00	20.320.000,00	66,66	15.240.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	2.250.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	15.240.000,00	0,00	0,00	15.240.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	117.750.000,00	92.010.000,00	78,14	167.630.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	12.800.000,00	12.000.000,00	93,75	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21.630.000,00	20.560.000,00	95,05	20.980.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	4.500.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	26.500.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00	22.500.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	4.482.500,00	4.172.100,00	93,07	6.187.570,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	8.625.000,00	8.625.000,00	100,00	7.137.750,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	76.079.250,00	74.623.185,00	98,08	91.405.467,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.597.000,00	9.440.000,00	98,36	9.390.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.200.000,00	3.690.419,00	70,96	19.255.113,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	54.233.100,00	9.728.900,00	17,93	9.536.175,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	38.390.800,00	38.206.500,00	99,51	38.264.900,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	38.390.800,00	38.206.500,00	99,51	38.264.900,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	359.980.000,00	273.980.000,00	76,10	355.575.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.880.000,00	1.880.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	111.000.000,00	25.000.000,00	22,52	91.400.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	247.100.000,00	247.100.000,00	100,00	264.175.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	395.618.000,00	295.659.000,00	74,73	395.198.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	70.618.000,00	55.079.000,00	77,99	66.443.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	325.000.000,00	240.580.000,00	74,02	328.755.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis s	314.300.000,00	255.600.000,00	81,32	259.215.000,00

5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	22.500.000,00	15.750.000,00	70,00	0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	243.800.000,00	209.350.000,00	85,86	250.340.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	48.000.000,00	30.500.000,00	63,54	8.875.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	148.059.848,00	135.900.000,00	91,78	29.419.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	33.059.848,00	21.400.000,00	64,73	29.419.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	29.559.848,00	18.050.000,00	61,06	29.419.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	3.500.000,00	3.350.000,00	95,71	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	115.000.000,00	114.500.000,00	99,56	0,00
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ged	115.000.000,00	114.500.000,00	99,56	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.731.755.417,00	1.671.311.743,00	96,50	1.939.414.999,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.731.755.417,00	1.671.311.743,00	96,50	1.939.414.999,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.731.755.417,00	1.671.311.743,00	96,50	1.939.414.999,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pih	670.000.000,00	670.000.000,00	100,00	30.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak L	640.000.000,00	640.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak L	640.000.000,00	640.000.000,00	100,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04.04	Belanja Subsidi kepada Koperasi	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04.04.01	Belanja Subsidi kepada Koperasi	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04.04.01.0001	Belanja Subsidi kepada Koperasi	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	14.624.440.103,00	12.821.565.418,00	87,67	10.170.732.853,00
5.2	BELANJA MODAL	1.719.800.000,00	1.683.108.430,00	97,86	1.297.082.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	930.800.000,00	926.926.430,00	99,58	802.881.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	685.800.000,00	682.848.530,00	99,56	371.006.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	34.000.000,00	33.778.250,00	99,34	158.781.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	42.061.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	34.000.000,00	33.778.250,00	99,34	116.720.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	651.800.000,00	649.070.280,00	99,58	212.225.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	121.850.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	21.540.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	68.835.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	651.800.000,00	649.070.280,00	99,58	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	71.075.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	46.075.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	46.075.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	245.000.000,00	244.077.900,00	99,62	360.800.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	175.000.000,00	174.270.000,00	99,58	258.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	175.000.000,00	174.270.000,00	99,58	258.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	70.000.000,00	69.807.900,00	99,72	102.800.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	70.000.000,00	69.807.900,00	99,72	0,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	88.850.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	13.950.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	789.000.000,00	756.182.000,00	95,84	494.201.500,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	89.000.000,00	88.427.000,00	99,35	494.201.500,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	89.000.000,00	88.427.000,00	99,35	494.201.500,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	494.201.500,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	89.000.000,00	88.427.000,00	99,35	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	700.000.000,00	667.755.000,00	95,39	0,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	700.000.000,00	667.755.000,00	95,39	0,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	700.000.000,00	667.755.000,00	95,39	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.719.800.000,00	1.683.108.430,00	97,86	1.297.082.500,00
	JUMLAH BELANJA	16.344.240.103,00	14.504.673.848,00	88,74	11.467.815.353,00
	SURPLUS/DEFISIT	(16.344.240.103,00)	(14.504.673.848,00)	88,74	(11.467.815.353,00)

Kab. Muara Enim, 6 Februari 2026
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Husin Aswadi, SE.,M.M.
NIP.197006191996031002



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.200.000.000,00	3.440.440.164,00	286,70	1.380.323.587,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.200.000.000,00	3.440.440.164,00	286,70	1.380.323.587,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.200.000.000,00	3.440.440.164,00	286,70	1.380.323.587,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.200.000.000,00	3.440.440.164,00	286,70	1.380.323.587,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.200.000.000,00	3.440.440.164,00	286,70	1.380.323.587,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.200.000.000,00	3.440.440.164,00	286,70	1.380.323.587,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.200.000.000,00	3.440.440.164,00	286,70	1.380.323.587,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.200.000.000,00	3.440.440.164,00	286,70	1.380.323.587,00
5	BELANJA DAERAH	13.309.411.493,73	11.000.336.962,00	82,65	11.069.180.245,00
5.1	BELANJA OPERASI	12.760.981.493,73	10.467.569.877,00	82,03	10.314.354.345,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.751.777.555,30	5.692.885.814,00	84,32	4.631.434.198,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.290.637.345,20	2.641.165.236,00	80,26	2.141.174.208,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.346.011.780,23	2.009.602.980,00	85,66	1.583.399.708,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.016.683.012,23	1.697.862.580,00	84,19	1.583.399.708,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	329.328.768,00	311.740.400,00	94,66	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	297.602.584,80	193.100.336,00	64,89	163.847.096,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	251.496.558,40	173.737.784,00	69,08	163.847.096,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	46.106.026,40	19.362.552,00	42,00	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	65.497.500,00	49.275.000,00	75,23	53.550.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	65.497.500,00	49.275.000,00	75,23	53.550.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	296.780.519,25	213.545.000,00	71,95	226.870.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	296.780.519,25	213.545.000,00	71,95	226.870.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	71.347.938,80	53.730.000,00	75,31	22.430.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	49.756.438,80	33.350.000,00	67,03	22.430.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	21.591.500,00	20.380.000,00	94,39	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	189.676.743,50	113.628.582,00	59,91	85.817.700,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	155.282.231,50	95.377.140,00	61,42	85.817.700,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	34.394.512,00	18.251.442,00	53,06	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	23.663.524,12	8.256.492,00	34,89	5.236.352,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	23.280.588,22	8.256.492,00	35,47	5.236.352,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	382.935,90	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	56.754,50	26.846,00	47,30	23.352,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	52.254,50	22.356,00	42,78	23.352,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.500,00	4.490,00	99,78	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.461.140.210,10	3.051.720.578,00	88,17	2.490.259.990,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.780.168.116,10	2.492.197.715,00	89,64	2.038.873.768,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.538.926.072,10	2.271.271.631,00	89,46	2.038.873.768,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	241.242.044,00	220.926.084,00	91,58	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	97.350.694,00	65.441.206,00	67,22	451.386.222,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	97.350.694,00	65.441.206,00	67,22	451.386.222,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	583.621.400,00	494.081.657,00	84,66	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	524.750.652,00	439.850.687,00	83,82	0,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	58.870.748,00	54.230.970,00	92,12	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.009.203.938,43	4.774.684.063,00	79,46	5.682.920.147,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.064.432.375,00	782.674.040,00	73,53	988.273.300,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.064.432.375,00	782.674.040,00	73,53	988.273.300,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.495.000,00	7.122.000,00	95,02	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	18.600.000,00	7.095.000,00	38,15	12.435.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	11.621.319,00	10.378.500,00	89,31	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	45.580.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	265.991.517,00	224.379.590,00	84,36	334.414.700,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	394.211.147,00	292.526.200,00	74,21	389.695.600,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.488.000,00	4.900.000,00	89,29	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	54.287.124,00	52.745.000,00	97,16	30.609.500,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	43.451.318,00	43.342.000,00	99,75	39.633.500,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	30.750.000,00	10.375.000,00	33,74	11.250.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	6.650.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.138.700,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	208.398.250,00	117.810.750,00	56,53	98.495.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00	0,00	6.110.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	18.000.000,00	9.000.000,00	50,00	8.400.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.859.993.285,00	2.421.042.888,00	84,65	2.489.452.166,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.353.048.485,00	2.070.638.952,00	88,00	2.156.610.145,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	50.100.000,00	28.300.000,00	56,49	61.600.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	84.240.000,00	56.160.000,00	66,67	69.000.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	244.680.000,00	159.920.000,00	65,36	355.730.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	725.200.000,00	718.200.000,00	99,03	430.200.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	385.184.785,00	385.088.000,00	99,97	385.184.772,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	345.866.500,00	345.600.000,00	99,92	345.866.472,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	123.300.000,00	86.816.326,00	70,41	54.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	20.020.800,00	7.116.100,00	35,54	7.116.100,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	43.999.200,00	1.867.200,00	4,24	5.060.250,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	307.088.000,00	268.529.476,00	87,44	269.305.756,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.369.200,00	4.280.000,00	97,96	3.610.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	0,00	0,00	0,00	93.920,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	0,00	0,00	0,00	158.300.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	19.000.000,00	8.761.850,00	46,12	9.042.875,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	148.519.800,00	119.909.650,00	80,74	124.763.041,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	148.519.800,00	119.909.650,00	80,74	124.763.041,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	210.675.000,00	102.619.286,00	48,71	121.493.980,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	10.270.000,00	0,00	0,00	5.135.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	15.405.000,00	15.405.000,00	100,00	30.810.000,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	185.000.000,00	87.214.286,00	47,14	84.948.980,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	147.750.000,00	127.875.000,00	86,55	86.585.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	147.750.000,00	127.875.000,00	86,55	62.085.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	548.747.200,00	441.287.209,00	80,42	228.518.912,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	361.547.200,00	255.887.209,00	70,78	163.118.912,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	159.787.200,00	110.390.189,00	69,09	57.663.912,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	15.000.000,00	14.951.020,00	99,67	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	12.000.000,00	11.910.200,00	99,25	7.500.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	53.000.000,00	42.350.000,00	79,91	37.135.900,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	13.260.000,00	12.610.800,00	95,10	12.809.100,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	36.500.000,00	29.760.000,00	81,53	20.760.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	72.000.000,00	33.915.000,00	47,10	27.250.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	187.200.000,00	185.400.000,00	99,04	65.400.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	87.200.000,00	86.200.000,00	98,85	65.400.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	100.000.000,00	99.200.000,00	99,20	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.536.031.078,43	1.129.679.926,00	73,55	1.976.675.769,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.536.031.078,43	1.129.679.926,00	73,55	1.976.675.769,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.536.031.078,43	1.129.679.926,00	73,55	1.944.147.447,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	32.528.322,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	12.760.981.493,73	10.467.569.877,00	82,03	10.314.354.345,00
5.2	BELANJA MODAL	548.430.000,00	532.767.085,00	97,14	754.825.900,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	548.430.000,00	532.767.085,00	97,14	205.235.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	112.910.000,00	100.560.000,00	89,06	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	112.910.000,00	100.560.000,00	89,06	0,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	112.910.000,00	100.560.000,00	89,06	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	156.720.000,00	156.360.985,00	99,77	102.715.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	14.365.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	14.365.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	146.720.000,00	146.360.985,00	99,76	88.350.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	131.720.000,00	131.360.985,00	99,73	83.400.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	278.800.000,00	275.846.100,00	98,94	46.520.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	185.000.000,00	184.815.000,00	99,90	46.520.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	185.000.000,00	184.815.000,00	99,90	46.520.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	93.800.000,00	91.031.100,00	97,05	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	93.800.000,00	91.031.100,00	97,05	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	499.602.900,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	499.602.900,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	499.602.900,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	499.602.900,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	49.988.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	49.988.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	49.988.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	0,00	0,00	49.988.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	548.430.000,00	532.767.085,00	97,14	754.825.900,00
	JUMLAH BELANJA	13.309.411.493,73	11.000.336.962,00	82,65	11.069.180.245,00
	SURPLUS/DEFISIT	(12.109.411.493,73)	(7.559.896.798,00)	62,43	(9.688.856.658,00)

Kab. Muara Enim, 27 Januari 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

M. Tarmizi Ismail, S.E., M.Si.

NIP.197109232000031004



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	742.000.000,00	482.126.500,00	64,98	470.155.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	742.000.000,00	482.126.500,00	64,98	470.155.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	742.000.000,00	482.126.500,00	64,98	470.155.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	742.000.000,00	482.126.500,00	64,98	470.155.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	742.000.000,00	482.126.500,00	64,98	470.155.000,00
5	BELANJA DAERAH	72.755.603.011,30	65.153.657.805,00	89,55	50.773.026.891,00
5.1	BELANJA OPERASI	62.743.724.531,30	55.265.716.804,00	88,08	30.217.310.754,00
5.1.01	Belanja Pegawai	7.590.437.024,53	5.605.888.115,00	73,85	4.636.106.578,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.353.291.506,77	36.859.832.689,00	87,03	23.834.169.917,00
5.1.05	Belanja Hibah	12.799.996.000,00	12.799.996.000,00	100,00	1.747.034.259,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	62.743.724.531,30	55.265.716.804,00	88,08	30.217.310.754,00
5.2	BELANJA MODAL	10.011.878.480,00	9.887.941.001,00	98,76	20.555.716.137,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	962.278.480,00	954.794.001,00	99,22	1.200.042.500,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.549.600.000,00	8.484.070.000,00	99,23	19.271.158.637,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	350.000.000,00	349.344.000,00	99,81	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000,00	99.733.000,00	66,49	84.515.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	10.011.878.480,00	9.887.941.001,00	98,76	20.555.716.137,00
	JUMLAH BELANJA	72.755.603.011,30	65.153.657.805,00	89,55	50.773.026.891,00
	SURPLUS/DEFISIT	(72.013.603.011,30)	(64.671.531.305,00)	89,80	(50.302.871.891,00)

Kab. Muara Enim, 12 Januari 2026
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Syarifudin, AP., M.Si
NIP.197302181993111001



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	14.148.996.019,55	13.123.636.935,00	92,75	9.995.832.066,00
5.1	BELANJA OPERASI	11.774.529.519,55	10.771.816.285,00	91,48	9.668.882.066,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.305.311.397,55	5.640.619.624,00	89,46	5.328.348.061,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.600.239.071,75	3.061.657.347,00	85,04	2.829.717.721,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.760.987.980,00	2.404.927.740,00	87,10	2.201.664.922,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.337.378.400,00	2.014.694.940,00	86,19	2.114.377.722,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	423.609.580,00	390.232.800,00	92,12	87.287.200,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	253.493.150,00	195.735.394,00	77,22	183.666.212,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	192.182.200,00	167.258.530,00	87,03	178.284.164,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	61.310.950,00	28.476.864,00	46,45	5.382.048,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	155.461.750,00	108.430.000,00	69,75	101.570.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	155.461.750,00	108.430.000,00	69,75	101.570.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	200.909.000,00	158.080.000,00	78,68	183.480.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	200.909.000,00	158.080.000,00	78,68	183.480.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	67.522.500,00	65.273.750,00	96,67	46.375.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	42.260.750,00	40.905.000,00	96,79	41.230.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	25.261.750,00	24.368.750,00	96,47	5.145.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	151.806.804,00	122.498.430,00	80,69	107.978.220,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	112.251.000,00	98.925.720,00	88,13	103.922.700,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	39.555.804,00	23.572.710,00	59,59	4.055.520,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.000.000,00	6.675.874,00	66,76	4.952.266,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.000.000,00	6.675.874,00	66,76	4.952.266,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	57.887,75	36.159,00	62,46	31.101,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	30.712,75	27.601,00	89,87	29.363,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	27.175,00	8.558,00	31,49	1.738,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.705.072.325,80	2.578.962.277,00	95,34	2.498.630.340,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.705.072.325,80	2.578.962.277,00	95,34	2.498.630.340,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.382.498.885,80	2.296.647.424,00	96,40	2.431.268.478,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	322.573.440,00	282.314.853,00	87,52	67.361.862,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.469.218.122,00	5.131.196.661,00	93,82	4.340.534.005,00
5.1.02.01	Belanja Barang	3.227.855.632,00	3.149.181.442,00	97,56	1.846.987.980,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.227.855.632,00	3.149.181.442,00	97,56	1.846.987.980,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	15.200.000,00	15.200.000,00	100,00	14.592.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	3.418.035,00	2.125.000,00	62,17	2.000.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	39.697.744,00	37.043.662,00	93,31	39.097.428,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	174.887.354,00	138.397.530,00	79,14	236.119.452,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	93.418.188,00	79.022.800,00	84,59	104.933.600,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.550.000,00	3.550.000,00	100,00	3.550.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	29.447.707,00	21.557.000,00	73,20	24.728.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	9.337.700,00	8.035.000,00	86,05	10.552.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.233.000,00	2.250.000,00	53,15	2.700.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.760.479.904,00	2.753.480.450,00	99,75	1.272.086.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	94.186.000,00	88.520.000,00	93,98	136.629.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	806.277.102,00	598.202.419,00	74,19	648.455.060,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	495.719.602,00	331.429.478,00	66,86	423.891.810,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	32.230.000,00	28.900.000,00	89,67	32.250.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	40.240.000,00	33.560.000,00	83,40	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	91.440.000,00	60.960.000,00	66,67	105.145.909,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	77.040.000,00	51.360.000,00	66,67	77.040.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	71.400.000,00	28.880.000,00	40,45	71.400.000,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	23.712.000,00	23.712.000,00	100,00	23.104.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	0,00

5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00	0,00	0,00	24.937.500,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	7.500.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	5.982.600,00	492.244,00	8,23	562.489,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	23.598.000,00	6.164.000,00	26,12	6.882.750,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	74.999.835,00	48.176.375,00	64,24	52.459.454,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	17.250.000,00	16.642.734,00	96,48	16.583.985,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	10.327.167,00	5.082.125,00	49,21	6.025.723,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	48.552.500,00	47.798.441,00	98,45	33.363.250,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	48.552.500,00	47.798.441,00	98,45	33.363.250,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	41.110.000,00	22.800.000,00	55,46	24.750.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	41.110.000,00	22.800.000,00	55,46	24.750.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	64.145.000,00	62.100.000,00	96,81	80.900.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	35.945.000,00	35.000.000,00	97,37	35.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	28.200.000,00	27.100.000,00	96,10	40.900.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	96.750.000,00	74.100.000,00	76,59	85.550.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	55.000.000,00	33.650.000,00	61,18	45.350.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	41.750.000,00	40.450.000,00	96,89	40.200.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	60.000.000,00	59.974.500,00	99,96	0,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	60.000.000,00	59.974.500,00	99,96	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	51.802.288,00	36.425.000,00	70,32	53.430.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	51.802.288,00	36.425.000,00	70,32	28.430.000,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	4.472.288,00	3.300.000,00	73,79	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.980.000,00	10.320.000,00	93,99	5.275.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	36.350.000,00	22.805.000,00	62,74	15.080.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	8.075.000,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
5.1.02.03.05.0001	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.193.033.100,00	1.169.137.800,00	98,00	1.630.910.965,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.193.033.100,00	1.169.137.800,00	98,00	1.630.910.965,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.193.033.100,00	1.169.137.800,00	98,00	1.630.910.965,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	190.250.000,00	178.250.000,00	93,69	160.750.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	190.250.000,00	178.250.000,00	93,69	160.750.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	190.250.000,00	178.250.000,00	93,69	160.750.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	11.774.529.519,55	10.771.816.285,00	91,48	9.668.882.066,00
5.2	BELANJA MODAL	2.374.466.500,00	2.351.820.650,00	99,05	326.950.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.814.466.500,00	1.795.353.150,00	98,95	326.950.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	850.000.000,00	849.999.150,00	100,00	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	850.000.000,00	849.999.150,00	100,00	0,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	850.000.000,00	849.999.150,00	100,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	691.125.000,00	675.528.999,00	97,74	11.500.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	115.000.000,00	113.923.000,00	99,06	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	115.000.000,00	113.923.000,00	99,06	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	576.125.000,00	561.605.999,00	97,48	11.500.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	576.125.000,00	561.605.999,00	97,48	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	34.000.000,00	33.800.000,00	99,41	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	34.000.000,00	33.800.000,00	99,41	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	34.000.000,00	33.800.000,00	99,41	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	239.341.500,00	236.025.001,00	98,61	315.450.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	239.341.500,00	236.025.001,00	98,61	135.450.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	239.341.500,00	236.025.001,00	98,61	135.450.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	380.000.000,00	379.034.000,00	99,75	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	380.000.000,00	379.034.000,00	99,75	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	380.000.000,00	379.034.000,00	99,75	0,00

5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	380.000.000,00	379.034.000,00	99,75	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	180.000.000,00	177.433.500,00	98,57	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	180.000.000,00	177.433.500,00	98,57	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	180.000.000,00	177.433.500,00	98,57	0,00
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	180.000.000,00	177.433.500,00	98,57	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	2.374.466.500,00	2.351.820.650,00	99,05	326.950.000,00
	JUMLAH BELANJA	14.148.996.019,55	13.123.636.935,00	92,75	9.995.832.066,00
	SURPLUS/DEFISIT	(14.148.996.019,55)	(13.123.636.935,00)	92,75	(9.995.832.066,00)

Kab. Muara Enim, 7 Januari 2026

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

H. Shofyan Aripanca, S.Kom.,
M.Si.



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM
DINAS PERIKANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	130.000.000,00	130.255.000,00	100,19	126.500.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	130.000.000,00	130.255.000,00	100,19	126.500.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	130.000.000,00	130.255.000,00	100,19	126.500.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	130.000.000,00	130.255.000,00	100,19	126.500.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	130.000.000,00	130.255.000,00	100,19	126.500.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	130.000.000,00	130.255.000,00	100,19	126.500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	130.000.000,00	130.255.000,00	100,19	126.500.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	130.000.000,00	130.255.000,00	100,19	126.500.000,00
5	BELANJA DAERAH	23.187.911.273,00	19.769.811.327,00	85,25	19.056.037.074,00
5.1	BELANJA OPERASI	22.423.770.623,00	19.014.876.327,00	84,79	18.256.908.074,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.552.074.308,00	4.428.498.969,00	67,58	3.385.742.339,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.847.188.989,00	2.420.498.755,00	62,91	1.745.874.312,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.633.109.720,00	1.940.165.820,00	73,68	1.362.072.798,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.002.714.712,00	1.402.450.820,00	70,02	1.317.222.398,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	630.395.008,00	537.715.000,00	85,29	44.850.400,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	380.251.956,00	149.987.690,00	39,44	118.314.840,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	291.652.956,00	115.315.140,00	39,53	116.072.320,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	88.599.000,00	34.672.550,00	39,13	2.242.520,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	193.725.000,00	104.065.000,00	53,71	109.810.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	193.725.000,00	104.065.000,00	53,71	109.810.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	292.166.000,00	57.820.000,00	19,79	63.090.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	292.166.000,00	57.820.000,00	19,79	63.090.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	101.538.805,00	70.422.500,00	69,35	27.565.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	49.658.805,00	34.895.000,00	70,26	24.975.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	51.880.000,00	35.527.500,00	68,48	2.590.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	215.933.847,00	94.236.525,00	43,64	60.470.700,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	150.687.327,00	63.729.600,00	42,29	58.949.880,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	65.246.520,00	30.506.925,00	46,75	1.520.820,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	29.780.561,00	3.774.744,00	12,67	4.532.758,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	20.531.761,00	3.774.744,00	18,38	4.532.758,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	9.248.800,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	683.100,00	26.476,00	3,87	18.216,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	64.050,00	18.403,00	28,73	17.502,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	619.050,00	8.073,00	1,30	714,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.704.885.319,00	2.008.000.214,00	74,23	1.626.268.027,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.704.885.319,00	2.008.000.214,00	74,23	1.626.268.027,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.236.396.323,00	1.628.770.275,00	72,83	1.591.115.085,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	468.488.996,00	379.229.939,00	80,94	35.152.942,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.871.696.315,00	14.586.377.358,00	91,90	14.871.165.735,00
5.1.02.01	Belanja Barang	11.847.973.432,00	11.221.912.306,00	94,71	10.724.106.329,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.847.973.432,00	11.221.912.306,00	94,71	10.724.106.329,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	57.279.552,00	55.696.470,00	97,23	44.601.795,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	20.459.889,15	14.635.320,00	71,53	17.331.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	302.300.000,00	298.145.000,00	98,62	273.225.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	99.900.000,00	50.353.250,00	50,40	79.086.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	249.059.450,85	176.458.119,00	70,84	227.369.700,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	307.498.417,00	204.070.620,00	66,36	193.947.700,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.751.076,00	6.280.000,00	71,76	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.154.620,00	1.206.296,00	38,23	2.201.400,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	48.699.123,00	33.637.250,00	69,07	27.462.650,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	11.430.713,00	9.577.600,00	83,78	11.246.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	358.316.737,00	327.423.676,00	91,37	255.144.644,00

5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	9.603.610.043,00	9.286.989.205,00	96,70	8.855.530.440,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	650.671.011,00	633.375.250,00	97,34	587.952.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	126.842.800,00	124.064.250,00	97,80	144.007.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.114.300.473,00	1.560.219.140,00	73,79	2.019.707.266,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.634.038.016,00	1.124.430.070,00	68,81	1.569.015.896,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	107.957.000,00	102.000.000,00	94,48	98.400.000,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	52.800.000,00	45.850.000,00	86,83	33.110.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	311.280.000,00	198.960.000,00	63,91	444.480.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	137.160.000,00	81.280.000,00	59,25	186.560.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	82.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	178.880.000,00	25.680.000,00	14,35	102.720.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	5.000.000,00	2.750.000,00	55,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	492.000.000,00	492.000.000,00	100,00	424.800.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	19.980.000,00	19.980.000,00	100,00	19.980.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	11.404.800,00	427.284,00	3,74	427.284,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	40.250.000,00	13.185.750,00	32,75	8.719.750,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	120.000.025,00	102.777.761,00	85,64	96.260.771,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	35.520.000,00	21.100.000,00	59,40	19.600.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	17.250.000,00	6.024.150,00	34,92	6.001.900,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	0,00	0,00	0,00	119.800.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	8.156.191,00	1.535.125,00	18,82	8.156.191,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	13.600.000,00	10.880.000,00	80,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	22.035.387,00	21.600.000,00	98,02	0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	22.035.387,00	21.600.000,00	98,02	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	29.748.000,00	29.748.000,00	100,00	29.748.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	29.748.000,00	29.748.000,00	100,00	29.748.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	179.729.070,00	170.516.070,00	94,87	189.143.370,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	77.075.070,00	77.075.070,00	100,00	79.179.370,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	102.654.000,00	93.441.000,00	91,02	109.964.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	248.750.000,00	213.925.000,00	86,00	231.800.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	112.000.000,00	105.800.000,00	94,46	108.550.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	69.250.000,00	46.625.000,00	67,32	72.450.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	67.500.000,00	61.500.000,00	91,11	50.800.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	367.854.200,00	327.089.019,00	88,91	274.756.500,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	167.854.200,00	133.007.786,00	79,24	80.956.500,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	145.121.400,00	110.572.786,00	76,19	58.514.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	16.250.400,00	16.030.000,00	98,64	16.042.500,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.482.400,00	6.405.000,00	98,80	6.400.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	194.081.233,00	97,04	193.800.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	194.081.233,00	97,04	193.800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.528.068.210,00	1.463.656.893,00	95,78	1.852.595.640,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.528.068.210,00	1.463.656.893,00	95,78	1.852.595.640,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.528.068.210,00	1.463.656.893,00	95,78	1.852.595.640,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	22.423.770.623,00	19.014.876.327,00	84,79	18.256.908.074,00
5.2	BELANJA MODAL	764.140.650,00	754.935.000,00	98,79	799.129.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	253.540.650,00	246.375.600,00	97,17	600.930.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	19.980.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	19.980.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	0,00	0,00	0,00	19.980.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	338.100.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	338.100.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	338.100.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	89.277.300,00	86.913.000,00	97,35	151.200.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	36.297.000,00	34.410.000,00	94,80	6.900.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	36.297.000,00	34.410.000,00	94,80	6.900.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	52.980.300,00	52.503.000,00	99,09	144.300.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	9.856.800,00	9.768.000,00	99,09	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	43.123.500,00	42.735.000,00	99,09	50.300.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	94.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	16.633.350,00	16.539.000,00	99,43	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	16.633.350,00	16.539.000,00	99,43	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	16.633.350,00	16.539.000,00	99,43	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	147.630.000,00	142.923.600,00	96,81	91.650.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	122.100.000,00	117.398.706,00	96,14	57.300.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	122.100.000,00	117.398.706,00	96,14	57.300.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	25.530.000,00	25.524.894,00	99,98	34.350.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	25.530.000,00	25.524.894,00	99,98	34.350.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	510.600.000,00	508.559.400,00	99,60	198.199.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	510.600.000,00	508.559.400,00	99,60	198.199.000,00

5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	510.600.000,00	508.559.400,00	99,60	198.199.000,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	510.600.000,00	508.559.400,00	99,60	198.199.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	764.140.650,00	754.935.000,00	98,79	799.129.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	23.187.911.273,00	19.769.811.327,00	85,25	19.056.037.074,00
	SURPLUS/DEFISIT	(23.057.911.273,00)	(19.639.556.327,00)	85,17	(18.929.537.074,00)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(23.057.911.273,00)	(19.639.556.327,00)	85,17	(18.929.537.074,00)

Kab. Muara Enim, 25 Februari 2026
KEPALA DINAS PERIKANAN
DR. Fredy Febriansyah, S.STP., M.Si.
NIP.198502022003121001



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	220.000.000,00	313.175.000,00	142,35	232.280.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	220.000.000,00	313.175.000,00	142,35	232.280.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	220.000.000,00	313.175.000,00	142,35	232.280.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	220.000.000,00	313.175.000,00	142,35	232.280.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	220.000.000,00	313.175.000,00	142,35	232.280.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	220.000.000,00	313.175.000,00	142,35	232.280.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	220.000.000,00	313.175.000,00	142,35	232.280.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	220.000.000,00	313.175.000,00	142,35	232.280.000,00
5	BELANJA DAERAH	17.580.562.277,00	13.241.385.271,00	75,32	15.934.897.038,00
5.1	BELANJA OPERASI	13.093.945.077,00	8.832.251.322,00	67,45	8.687.804.538,00
5.1.01	Belanja Pegawai	7.018.424.459,90	3.975.244.333,00	56,64	3.549.340.210,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.036.684.540,62	2.153.727.158,00	53,35	1.856.047.370,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.021.041.455,90	1.687.054.040,00	55,84	1.425.531.612,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.130.762.305,90	1.193.698.540,00	56,02	1.316.609.212,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	890.279.150,00	493.355.500,00	55,42	108.922.400,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	371.553.955,54	143.657.168,00	38,66	121.126.314,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	220.925.217,69	110.345.752,00	49,95	111.964.018,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	150.628.737,85	33.311.416,00	22,11	9.162.296,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	139.427.450,78	100.460.000,00	72,05	102.690.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	139.427.450,78	100.460.000,00	72,05	102.690.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	199.274.990,63	79.800.000,00	40,05	110.440.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	199.274.990,63	79.800.000,00	40,05	110.440.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	89.521.431,18	52.263.750,00	58,38	24.650.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34.043.562,43	20.580.000,00	60,45	18.360.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	55.477.868,75	31.683.750,00	57,11	6.290.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	202.455.562,43	86.885.895,00	42,92	67.060.920,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	130.197.783,23	59.601.660,00	45,78	61.774.260,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	72.257.779,20	27.284.235,00	37,76	5.286.660,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.939.717,73	3.581.724,00	27,68	4.527.778,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.469.985,60	3.581.724,00	31,23	4.527.778,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	1.469.732,13	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	469.976,43	24.581,00	5,23	20.746,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	77.112,05	16.660,00	21,60	19.318,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	392.864,38	7.921,00	2,02	1.428,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.981.739.919,28	1.821.517.175,00	61,09	1.693.292.840,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.981.739.919,28	1.821.517.175,00	61,09	1.693.292.840,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.314.999.960,00	1.469.403.011,00	63,47	1.608.862.171,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	666.739.959,28	352.114.164,00	52,81	84.430.669,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.075.520.617,10	4.857.006.989,00	79,94	5.138.464.328,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.191.009.925,60	889.473.919,00	74,68	920.967.038,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.191.009.925,60	889.473.919,00	74,68	920.967.038,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	14.632.200,00	7.992.000,00	54,62	14.400.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.375.000,00	0,00	0,00	820.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	600.000,00	600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	20.340.000,00	15.389.600,00	75,66	11.245.000,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	7.956.000,00	7.140.000,00	89,74	7.140.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	322.745.875,00	240.471.726,00	74,51	226.902.588,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	241.574.789,60	198.577.700,00	82,20	142.267.650,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.550.400,00	3.550.000,00	99,99	3.310.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9.848.000,00	8.238.000,00	83,65	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	199.639.261,00	168.066.900,00	84,19	87.229.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	23.000.000,00	17.197.000,00	74,77	9.096.300,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Umum	30.530.000,00	9.824.993,00	32,18	37.095.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan	83.007.000,00	69.350.000,00	83,55	28.500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	178.141.400,00	102.466.000,00	57,52	112.754.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.895.000,00	1.935.000,00	39,53	18.117.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	8.175.000,00	8.175.000,00	100,00	87.730.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	10.000.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	18.000.000,00	9.500.000,00	52,78	75.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	46.642.500,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	2.718.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.839.779.827,00	2.127.872.468,00	74,93	1.771.252.899,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.857.186.127,00	1.260.241.468,00	67,86	1.277.425.399,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, dan	80.600.000,00	56.650.000,00	70,29	51.900.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	86.000.000,00	62.800.000,00	73,02	13.500.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, dan	4.800.000,00	3.200.000,00	66,67	4.800.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	6.000.000,00	5.400.000,00	90,00	1.500.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	273.000.000,00	225.000.000,00	82,42	74.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	598.545.725,00	386.090.000,00	64,50	491.390.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	24.130.000,00	9.630.000,00	39,91	276.310.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	99.000.000,00	0,00	0,00	65.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	123.755.162,00	78.600.000,00	63,51	4.400.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	13.700.000,00	10.450.000,00	76,28	4.200.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	49.000.000,00	39.900.000,00	81,43	9.500.000,00

5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	8.800.000,00	8.000.000,00	90,91	13.800.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	86.750.000,00	74.937.500,00	86,38	101.400.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	103.000.000,00	86.500.000,00	83,98	43.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.485.000,00	2.219.750,00	49,49	3.783.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	254.442.240,00	191.016.460,00	75,07	102.694.374,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	22.218.000,00	7.410.058,00	33,35	9.522.150,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.900.000,00	7.757.700,00	60,14	6.725.875,00
5.1.02.02.01.0086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	4.680.000,00	4.680.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	24.405.700,00	14.890.000,00	61,01	11.542.500,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	24.405.700,00	14.890.000,00	61,01	11.542.500,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	683.040.000,00	647.190.000,00	94,75	266.900.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	8.000.000,00	7.000.000,00	87,50	49.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	675.040.000,00	640.190.000,00	94,84	217.900.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	126.948.000,00	90.091.000,00	70,97	183.260.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	43.648.000,00	41.241.000,00	94,49	53.916.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	83.300.000,00	48.850.000,00	58,64	129.344.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis s	148.200.000,00	115.460.000,00	77,91	32.125.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	9.200.000,00	6.960.000,00	75,65	6.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	130.000.000,00	99.500.000,00	76,54	26.125.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	173.225.250,00	173.159.000,00	99,96	609.599.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	138.225.300,00	138.175.000,00	99,96	146.320.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	117.385.300,00	117.335.000,00	99,96	132.060.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	2.900.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Persona	6.570.000,00	6.570.000,00	100,00	5.840.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Pe	5.520.000,00	5.520.000,00	100,00	5.520.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.999.950,00	34.984.000,00	99,95	463.279.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ged	34.999.950,00	34.984.000,00	99,95	0,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ged	0,00	0,00	0,00	387.834.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ged	0,00	0,00	0,00	75.445.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.746.755.614,50	1.541.751.602,00	88,26	1.788.645.391,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.746.755.614,50	1.541.751.602,00	88,26	1.788.645.391,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.746.755.614,50	1.541.751.602,00	88,26	1.756.998.065,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	31.647.326,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pih	124.750.000,00	124.750.000,00	100,00	48.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	124.750.000,00	124.750.000,00	100,00	48.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	124.750.000,00	124.750.000,00	100,00	48.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	13.093.945.077,00	8.832.251.322,00	67,45	8.687.804.538,00
5.2	BELANJA MODAL	4.486.617.200,00	4.409.133.949,00	98,27	7.247.092.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.173.707.700,00	1.162.230.349,00	99,02	2.039.338.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	548.177.700,00	540.699.999,00	98,64	489.326.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	548.177.700,00	540.699.999,00	98,64	489.326.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	548.177.700,00	540.699.999,00	98,64	437.280.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00	52.046.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	174.660.000,00	173.376.500,00	99,27	1.047.785.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	20.000.000,00	19.980.000,00	99,90	4.005.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	20.000.000,00	19.980.000,00	99,90	4.005.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	154.660.000,00	153.396.500,00	99,18	1.043.780.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	39.960.000,00	39.600.000,00	99,10	669.300.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	114.700.000,00	113.796.500,00	99,21	99.500.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	266.580.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	30.870.000,00	28.181.052,00	91,29	97.520.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	30.870.000,00	28.181.052,00	91,29	97.520.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1.942.500,00	1.875.012,00	96,53	27.520.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	28.927.500,00	26.306.040,00	90,94	70.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	420.000.000,00	419.972.798,00	99,99	345.100.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	343.000.000,00	342.982.798,00	99,99	304.600.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	343.000.000,00	342.982.798,00	99,99	304.600.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	77.000.000,00	76.990.000,00	99,99	40.500.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	40.500.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	77.000.000,00	76.990.000,00	99,99	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	0,00	0,00	59.607.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	59.607.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	59.607.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.486.909.500,00	2.436.349.000,00	97,97	4.721.504.500,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.486.909.500,00	2.436.349.000,00	97,97	4.721.504.500,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.486.909.500,00	2.436.349.000,00	97,97	4.645.604.500,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.793.335.000,00	1.746.549.000,00	97,39	3.919.420.500,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	134.604.000,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	350.000.000,00	349.000.000,00	99,71	0,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	343.574.500,00	340.800.000,00	99,19	0,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/B	0,00	0,00	0,00	391.810.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00	199.770.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	75.900.000,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	0,00	0,00	0,00	75.900.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	826.000.000,00	810.554.600,00	98,13	421.250.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	260.000.000,00	259.000.000,00	99,62	0,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan P	260.000.000,00	259.000.000,00	99,62	0,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan P	260.000.000,00	259.000.000,00	99,62	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	511.000.000,00	510.999.600,00	100,00	0,00
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	511.000.000,00	510.999.600,00	100,00	0,00
5.2.04.03.06.0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	511.000.000,00	510.999.600,00	100,00	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	55.000.000,00	40.555.000,00	73,74	421.250.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	55.000.000,00	40.555.000,00	73,74	421.250.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	55.000.000,00	40.555.000,00	73,74	421.250.000,00

5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/C	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen,	0,00	0,00	0,00	65.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	4.486.617.200,00	4.409.133.949,00	98,27	7.247.092.500,00
	JUMLAH BELANJA	17.580.562.277,00	13.241.385.271,00	75,32	15.934.897.038,00
	SURPLUS/DEFISIT	(17.360.562.277,00)	(12.928.210.271,00)	74,47	(15.702.617.038,00)

Kab. Muara Enim, 26 Januari 2026
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Kandar Budizon, S.Kom., M.M.
NIP.197512252005011008



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	160.575.000,00	68.829.700,00	42,86	76.319.400,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	160.575.000,00	68.829.700,00	42,86	76.319.400,00
4.1.02	Retribusi Daerah	160.575.000,00	68.829.700,00	42,86	76.319.400,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	160.575.000,00	68.829.700,00	42,86	76.319.400,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	160.575.000,00	68.829.700,00	42,86	76.319.400,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	160.575.000,00	68.829.700,00	42,86	76.319.400,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	160.575.000,00	68.829.700,00	42,86	76.319.400,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	160.575.000,00	68.829.700,00	42,86	76.319.400,00
5	BELANJA DAERAH	92.090.407.172,92	81.950.453.533,00	88,98	67.272.138.799,00
5.1	BELANJA OPERASI	87.567.584.932,92	78.527.663.843,00	89,67	64.953.336.501,00
5.1.01	Belanja Pegawai	29.268.982.622,93	23.487.317.435,00	80,24	20.027.390.821,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	16.694.512.378,93	12.881.853.783,00	77,16	10.702.162.835,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	12.314.206.706,53	9.957.058.720,00	80,85	8.134.534.527,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	8.055.065.581,15	6.784.896.220,00	84,23	6.671.579.900,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	4.259.141.125,38	3.172.162.500,00	74,47	1.462.954.627,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.497.428.331,00	868.667.045,00	58,01	729.499.898,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	812.296.655,25	618.547.831,00	76,14	610.036.246,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	685.131.675,75	250.119.214,00	36,50	119.463.652,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	257.278.280,00	164.290.000,00	63,85	163.860.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	257.278.280,00	164.290.000,00	63,85	163.860.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	1.444.354.750,00	1.025.100.000,00	70,97	1.095.440.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.444.354.750,00	1.025.100.000,00	70,97	1.095.440.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	373.410.900,00	280.506.250,00	75,11	130.445.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	133.471.400,00	75.445.000,00	56,52	40.050.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	239.939.500,00	205.061.250,00	85,46	90.395.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	676.837.937,40	553.687.110,00	81,80	413.663.040,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	445.961.936,40	342.474.180,00	76,79	318.285.900,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	230.876.001,00	211.212.930,00	91,48	95.377.140,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	130.801.919,25	32.397.315,00	24,76	34.604.365,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	130.801.919,25	32.397.315,00	24,76	34.604.365,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	193.554,75	147.343,00	76,12	116.005,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	140.758,25	97.330,00	69,14	90.758,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	52.796,50	50.013,00	94,72	25.247,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	12.574.470.244,00	10.605.463.652,00	84,34	9.317.067.986,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	12.574.470.244,00	10.605.463.652,00	84,34	9.317.067.986,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	9.368.779.604,00	8.401.896.965,00	89,67	8.240.182.582,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3.205.690.640,00	2.203.566.687,00	68,73	1.076.885.404,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obje	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	8.160.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.298.602.309,99	55.040.346.408,00	94,41	44.925.945.680,00
5.1.02.01	Belanja Barang	52.104.254.165,00	49.623.422.644,00	95,23	38.176.493.269,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	51.879.254.165,00	49.424.147.499,00	95,26	38.176.493.269,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	50.332.850,00	47.840.000,00	95,04	15.005.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	443.607.700,00	396.409.288,00	89,36	340.905.730,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	66.560.000,00	56.711.500,00	85,20	164.330.200,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	377.050.100,00	371.208.000,00	98,45	274.686.100,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	30.704.000,00	29.795.000,00	97,03	48.300.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	548.900.400,00	538.381.480,00	98,08	395.589.716,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	21.800.000,00	21.319.770,00	97,79	0,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	16.052.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kan	242.958.145,00	186.729.636,00	76,85	257.080.190,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	271.511.730,00	253.426.800,00	93,33	190.472.300,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.097.000,00	4.880.000,00	80,03	5.840.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kant	76.316.660,00	75.907.660,00	99,46	28.438.900,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	25.715.400,00	25.705.900,00	99,96	19.292.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapar	20.462.500,00	19.277.500,00	94,20	114.522.900,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cend	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan u	168.572.500,00	148.185.650,00	87,90	154.015.650,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	199.990.100,00	171.954.540,00	85,98	261.414.200,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan	48.800.451.180,00	46.709.117.975,00	95,71	35.504.105.483,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	22.000.000,00	20.350.000,00	92,50	23.419.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	232.500.000,00	179.250.000,00	77,09	130.010.000,00

5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lain	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	70.243.900,00	47.621.800,00	67,79	138.395.900,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	178.505.000,00	95.100.000,00	53,27	68.875.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	24.975.000,00	24.975.000,00	100,00	5.775.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	13.968.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapita	225.000.000,00	199.275.145,00	88,56	0,00
5.1.02.01.04.0105	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengola	225.000.000,00	199.275.145,00	88,56	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.279.570.750,00	2.693.562.608,00	82,13	3.986.856.597,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.800.009.250,00	2.429.267.061,00	86,75	3.159.779.022,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pe	13.200.000,00	13.200.000,00	100,00	28.350.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	0,00	0,00	0,00	38.400.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	0,00	0,00	0,00	27.940.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	116.600.000,00	108.260.000,00	92,84	92.382.400,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	32.450.000,00	29.299.000,00	90,28	69.875.600,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.538.020.000,00	1.414.005.300,00	91,93	1.298.990.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	389.540.000,00	334.860.000,00	85,96	766.000.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	25.940.000,00	18.720.000,00	72,16	15.110.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	18.800.000,00	18.800.000,00	100,00	19.600.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.800.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	34.240.000,00	25.680.000,00	75,00	115.440.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	77.040.000,00	17.120.000,00	22,22	67.410.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fum	167.400.000,00	167.400.000,00	100,00	173.400.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	691.200,00	539.494,00	78,05	378.981,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	28.868.450,00	15.853.000,00	54,91	11.990.450,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	187.599.600,00	187.590.212,00	99,99	183.649.969,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	13.920.000,00	12.800.000,00	91,95	10.850.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	73.100.000,00	31.453.180,00	43,02	33.071.547,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	50.000.000,00	14.026.875,00	28,05	22.940.075,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Ker	13.640.000,00	11.500.000,00	84,31	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	50.422.500,00	38.191.547,00	75,74	32.197.575,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	50.422.500,00	38.191.547,00	75,74	32.197.575,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	15.700.000,00	12.650.000,00	80,57	9.700.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	15.700.000,00	12.650.000,00	80,57	9.700.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	212.539.000,00	78.404.000,00	36,88	151.274.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	20.539.000,00	15.404.000,00	74,99	27.674.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	192.000.000,00	63.000.000,00	32,81	123.600.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	285.746.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa De	0,00	0,00	0,00	99.178.500,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa De	0,00	0,00	0,00	99.067.500,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Per	0,00	0,00	0,00	87.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis s	200.900.000,00	135.050.000,00	67,22	348.160.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	90.900.000,00	77.900.000,00	85,69	243.250.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	110.000.000,00	57.150.000,00	51,95	104.910.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	507.239.468,00	456.286.117,00	89,95	394.973.039,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	322.239.468,00	272.344.517,00	84,51	319.055.039,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Dara	208.550.000,00	191.729.017,00	91,93	252.037.709,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	31.000.000,00	29.573.000,00	95,39	27.777.330,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	52.289.468,00	37.400.000,00	71,52	25.060.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Al	2.000.000,00	1.892.500,00	94,62	1.920.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Persona	14.600.000,00	7.300.000,00	50,00	5.760.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Pe	13.800.000,00	4.450.000,00	32,24	6.500.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	120.000.000,00	119.173.100,00	99,31	75.918.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Ged	120.000.000,00	119.173.100,00	99,31	75.918.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	65.000.000,00	64.768.500,00	99,64	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan	65.000.000,00	64.768.500,00	99,64	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.407.537.926,99	2.267.075.039,00	94,16	2.367.622.775,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.407.537.926,99	2.267.075.039,00	94,16	2.367.622.775,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.407.537.926,99	2.267.075.039,00	94,16	2.367.622.775,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	87.567.584.932,92	78.527.663.843,00	89,67	64.953.336.501,00
5.2	BELANJA MODAL	4.522.822.240,00	3.422.789.690,00	75,67	2.318.802.298,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.033.326.700,00	1.943.276.249,00	64,06	755.273.779,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	659.000.000,00	642.360.000,00	97,47	0,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	650.000.000,00	633.810.000,00	97,50	0,00
5.2.02.01.01.0001	Belanja Modal Tractor	650.000.000,00	633.810.000,00	97,50	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	9.000.000,00	8.550.000,00	95,00	0,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	9.000.000,00	8.550.000,00	95,00	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	328.720.000,00	301.499.999,00	91,71	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	328.720.000,00	301.499.999,00	91,71	0,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	328.720.000,00	301.499.999,00	91,71	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.279.945.000,00	275.890.500,00	21,55	239.300.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.279.945.000,00	275.890.500,00	21,55	239.300.000,00
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	54.945.000,00	54.945.000,00	100,00	15.300.000,00
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	45.000.000,00	43.567.500,00	96,81	0,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	1.180.000.000,00	177.378.000,00	15,03	224.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	357.658.900,00	317.376.750,00	88,73	260.693.779,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	60.000.000,00	48.507.000,00	80,84	49.995.782,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	48.507.000,00	80,84	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	49.995.782,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	297.658.900,00	268.869.750,00	90,32	210.697.997,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	257.468.900,00	229.131.750,00	88,99	129.499.997,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	8.880.000,00	8.436.000,00	95,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	23.310.000,00	23.310.000,00	100,00	81.198.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.000.000,00	7.992.000,00	99,90	0,00

5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	408.002.800,00	406.149.000,00	99,54	205.280.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	280.302.800,00	280.275.000,00	99,99	154.250.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	280.302.800,00	280.275.000,00	99,99	154.250.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	127.700.000,00	125.874.000,00	98,57	51.030.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	126.000.000,00	125.874.000,00	99,90	51.030.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	900.000.000,00	890.256.691,00	98,91	1.503.958.519,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	900.000.000,00	890.256.691,00	98,91	1.503.958.519,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	400.000.000,00	397.096.591,00	99,27	1.309.022.922,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	129.779.385,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	120.000.000,00	117.822.450,00	98,18	0,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	280.000.000,00	279.274.141,00	99,74	829.827.529,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	349.416.008,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	500.000.000,00	493.160.100,00	98,63	194.935.597,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	500.000.000,00	493.160.100,00	98,63	194.935.597,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	589.495.540,00	589.256.750,00	99,95	59.570.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	489.495.540,00	489.362.428,00	99,97	0,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan P	489.495.540,00	489.362.428,00	99,97	0,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	489.495.540,00	489.362.428,00	99,97	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	100.000.000,00	99.894.322,00	99,89	59.570.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	100.000.000,00	99.894.322,00	99,89	59.570.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	100.000.000,00	99.894.322,00	99,89	59.570.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	4.522.822.240,00	3.422.789.690,00	75,67	2.318.802.298,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	92.090.407.172,92	81.950.453.533,00	88,98	67.272.138.799,00
	SURPLUS/DEFISIT	(91.929.832.172,92)	(81.881.623.833,00)	89,06	(67.195.819.399,00)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(91.929.832.172,92)	(81.881.623.833,00)	89,06	(67.195.819.399,00)

Kab. Muara Enim, 25 Februari 2026
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

Ulii Amri, Sp.,MM
NIP.197007031995031002



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



DINAS PERKEBUNAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	23.000.000,00	23.021.600,00	100,09	43.874.450,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.000.000,00	23.021.600,00	100,09	43.874.450,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	23.000.000,00	23.021.600,00	100,09	43.874.450,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	23.000.000,00	23.021.600,00	100,09	43.874.450,00
	JUMLAH PENDAPATAN	23.000.000,00	23.021.600,00	100,09	43.874.450,00
5	BELANJA DAERAH	40.696.495.916,08	36.022.759.083,00	88,52	20.736.974.262,00
5.1	BELANJA OPERASI	32.602.164.116,08	28.224.986.925,00	86,57	20.102.445.262,00
5.1.01	Belanja Pegawai	8.383.418.973,08	7.355.193.154,00	87,74	6.515.731.848,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.218.745.143,00	20.869.793.771,00	86,17	13.586.713.414,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	32.602.164.116,08	28.224.986.925,00	86,57	20.102.445.262,00
5.2	BELANJA MODAL	8.094.331.800,00	7.797.772.158,00	96,34	634.529.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.894.326.800,00	7.597.959.158,00	96,25	267.100.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.005.000,00	199.813.000,00	99,90	367.429.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	8.094.331.800,00	7.797.772.158,00	96,34	634.529.000,00
	JUMLAH BELANJA	40.696.495.916,08	36.022.759.083,00	88,52	20.736.974.262,00
	SURPLUS/DEFISIT	(40.673.495.916,08)	(35.999.737.483,00)	88,51	(20.693.099.812,00)

Kab. Muara Enim, 26 Januari 2026
KEPALA DINAS PERKEBUNAN

Isdrin, S.T.
NIP.196909141996031002

PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN SERTA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	1.852.953.768,00	1.900.101.000,00	102,54	1.666.700.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.852.953.768,00	1.900.101.000,00	102,54	1.666.700.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	1.852.953.768,00	1.900.101.000,00	102,54	1.666.700.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.820.736.000,00	1.884.301.000,00	103,49	1.654.700.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.820.736.000,00	1.884.301.000,00	103,49	1.654.700.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	143.280.000,00	156.950.000,00	109,54	155.434.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	1.022.616.000,00	978.509.000,00	95,69	891.253.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	654.840.000,00	748.842.000,00	114,35	608.013.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	32.217.768,00	15.800.000,00	49,04	12.000.000,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	32.217.768,00	15.800.000,00	49,04	12.000.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	32.217.768,00	15.800.000,00	49,04	12.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.852.953.768,00	1.900.101.000,00	102,54	1.666.700.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.852.953.768,00	1.900.101.000,00	102,54	1.666.700.000,00
5	BELANJA DAERAH	44.434.555.039,34	43.017.483.666,00	96,81	24.612.186.687,00
5.1	BELANJA OPERASI	15.703.379.739,34	14.561.944.626,00	92,73	12.350.640.687,00
5.1.01	Belanja Pegawai	7.244.489.138,50	6.730.479.523,00	92,90	4.734.160.860,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.261.580.614,50	3.888.963.535,00	91,26	2.600.693.026,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.193.799.550,00	3.056.229.680,00	95,69	1.981.897.394,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.956.673.360,00	1.848.388.180,00	94,47	1.869.771.422,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.237.126.190,00	1.207.841.500,00	97,63	112.125.972,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	387.297.288,40	280.134.057,00	72,33	214.350.438,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	212.210.803,40	177.510.123,00	83,65	198.652.798,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	175.086.485,00	102.623.934,00	58,61	15.697.640,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	155.482.250,00	140.510.000,00	90,37	137.970.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	155.482.250,00	140.510.000,00	90,37	137.970.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	109.764.000,00	89.820.000,00	81,83	101.320.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	109.764.000,00	89.820.000,00	81,83	101.320.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	143.711.000,00	126.998.750,00	88,37	45.275.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	53.971.500,00	42.315.000,00	78,40	38.800.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	89.739.500,00	84.683.750,00	94,37	6.475.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	263.825.651,00	190.392.172,00	72,17	115.509.900,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	124.023.542,00	99.867.180,00	80,52	105.371.100,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	139.802.109,00	90.524.992,00	64,75	10.138.800,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.620.563,50	4.827.919,00	63,35	4.341.914,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.620.563,50	4.827.919,00	63,35	4.341.914,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	80.311,60	50.957,00	63,45	28.380,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	41.841,60	27.968,00	66,84	25.808,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	38.470,00	22.989,00	59,76	2.572,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.982.908.524,00	2.841.515.988,00	95,26	2.133.467.834,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.982.908.524,00	2.841.515.988,00	95,26	2.133.467.834,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.105.472.430,00	2.039.917.365,00	96,89	2.045.986.694,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	877.436.094,00	801.598.623,00	91,36	87.481.140,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.948.140.600,84	7.626.337.103,00	95,95	7.616.479.827,00
5.1.02.01	Belanja Barang	2.570.789.553,00	2.495.097.327,00	97,06	1.911.941.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.898.789.553,00	1.827.097.327,00	96,22	1.566.941.400,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	77.868.957,00	76.653.500,00	98,44	11.280.000,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.336.000,00	1.336.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	31.787.688,00	31.577.000,00	99,34	53.980.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	78.273.640,00	77.606.000,00	99,15	90.600.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	173.515.770,00	146.589.707,00	84,48	217.191.750,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	314.516.677,00	298.221.620,00	94,82	347.465.150,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.096.700,00	4.730.000,00	92,81	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	42.322.271,00	39.883.500,00	94,24	42.564.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	76.692.200,00	76.521.500,00	99,78	67.466.500,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	549.900,00	396.500,00	72,10	3.490.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.730.000,00	3.112.000,00	65,79	4.550.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	917.664.000,00	916.808.000,00	99,91	545.384.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	124.850.750,00	105.412.000,00	84,43	74.595.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	7.425.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	45.425.000,00	45.250.000,00	99,61	41.000.000,00

5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	672.000.000,00	668.000.000,00	99,40	345.000.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	345.000.000,00
5.1.02.01.04.0521	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	672.000.000,00	668.000.000,00	99,40	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.456.357.970,00	3.219.786.645,00	93,16	3.118.583.303,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.163.517.970,00	1.970.107.645,00	91,06	1.858.371.578,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	20.700.000,00	20.700.000,00	100,00	59.250.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	112.800.000,00	74.250.000,00	65,82	0,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	400.000,00	400.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	321.720.000,00	294.720.000,00	91,61	488.940.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	151.360.000,00	112.320.000,00	74,21	171.690.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	26.400.000,00	23.400.000,00	88,64	17.400.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	395.600.000,00	345.678.164,00	87,38	589.471.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	165.520.000,00	146.000.000,00	88,21	233.880.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	460.428.000,00	459.734.250,00	99,85	0,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	12.150.000,00	11.900.000,00	97,94	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	36.735.178,00	34.785.023,00	94,69	11.845.541,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	20.537.010,00	19.970.790,00	97,24	11.913.858,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	254.762.882,00	252.792.343,00	99,23	188.291.429,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	17.280.000,00	13.320.000,00	77,08	14.040.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17.124.900,00	10.137.075,00	59,19	1.649.750,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	141.840.000,00	105.590.000,00	74,44	68.250.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	88.000.000,00	51.750.000,00	58,81	38.700.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	38.840.000,00	38.840.000,00	100,00	22.500.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	0,00	0,00	0,00	7.050.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	220.850.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	220.850.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.000.000.000,00	993.339.000,00	99,33	790.261.725,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	0,00	0,00	0,00	345.262.725,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	993.339.000,00	99,33	444.999.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	51.000.000,00	50.750.000,00	99,51	180.850.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	39.000.000,00	39.000.000,00	100,00	176.500.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	12.000.000,00	11.750.000,00	97,92	4.350.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	102.730.500,00	97.937.117,00	95,33	75.988.964,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	92.730.500,00	87.937.117,00	94,83	75.988.964,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	68.910.500,00	68.217.117,00	98,99	62.538.964,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	19.520.000,00	16.800.000,00	86,07	9.150.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.920.000,00	2.920.000,00	100,00	2.920.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.818.262.577,84	1.813.516.014,00	99,74	2.494.966.160,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.818.262.577,84	1.813.516.014,00	99,74	2.494.966.160,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.818.262.577,84	1.813.516.014,00	99,74	2.198.927.967,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	296.038.193,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	510.750.000,00	205.128.000,00	40,16	0,00
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	510.750.000,00	205.128.000,00	40,16	0,00
5.1.04.01.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	510.750.000,00	205.128.000,00	40,16	0,00
5.1.04.01.01.0001	Belanja Subsidi kepada BUMN	510.750.000,00	205.128.000,00	40,16	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	15.703.379.739,34	14.561.944.626,00	92,73	12.350.640.687,00
5.2	BELANJA MODAL	28.731.175.300,00	28.455.539.040,00	99,04	12.261.546.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	796.175.300,00	746.441.040,00	93,75	1.470.503.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	524.175.300,00	476.500.000,00	90,90	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	524.175.300,00	476.500.000,00	90,90	0,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	524.175.300,00	476.500.000,00	90,90	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	148.073.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	148.073.000,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	0,00	0,00	0,00	48.889.000,00
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	0,00	0,00	0,00	99.184.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	205.000.000,00	202.941.040,00	99,00	1.132.880.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	87.600.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	54.600.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	33.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	205.000.000,00	202.941.040,00	99,00	1.045.280.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	88.780.000,00

5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	205.000.000,00	202.941.040,00	99,00	928.500.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	189.550.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	165.700.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	165.700.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	23.850.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	23.850.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.935.000.000,00	27.709.098.000,00	99,19	10.791.043.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	27.935.000.000,00	27.709.098.000,00	99,19	10.791.043.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	27.935.000.000,00	27.709.098.000,00	99,19	10.791.043.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	665.000.000,00	659.796.000,00	99,22	989.440.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	26.470.000.000,00	26.253.882.000,00	99,18	9.801.603.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	800.000.000,00	795.420.000,00	99,43	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	28.731.175.300,00	28.455.539.040,00	99,04	12.261.546.000,00
	JUMLAH BELANJA	44.434.555.039,34	43.017.483.666,00	96,81	24.612.186.687,00
	SURPLUS/DEFISIT	(42.581.601.271,34)	(41.117.382.666,00)	96,56	(22.945.486.687,00)



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM

SEKRETARIAT DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	115.350.644.829,00	102.872.288.865,00	89,18	91.218.626.115,00
5.1	BELANJA OPERASI	95.606.934.829,00	83.997.376.962,00	87,85	75.843.281.115,00
5.1.01	Belanja Pegawai	26.273.693.000,00	23.592.919.793,00	89,79	21.106.245.008,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	11.254.189.587,00	10.205.629.946,00	90,68	8.378.495.015,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	8.520.048.210,25	7.987.412.820,00	93,74	6.454.104.693,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	7.009.097.165,25	6.551.579.820,00	93,47	6.233.056.293,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.510.951.045,00	1.435.833.000,00	95,02	221.048.400,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	955.123.399,30	739.555.873,00	77,43	647.201.328,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	772.035.630,10	657.695.503,00	85,18	637.270.168,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	183.087.769,20	81.860.370,00	44,71	9.931.160,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	401.656.500,00	360.900.000,00	89,85	319.210.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	401.656.500,00	360.900.000,00	89,85	319.210.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	454.026.150,00	337.678.000,00	74,37	381.015.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	454.026.150,00	337.678.000,00	74,37	381.015.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	315.558.750,00	302.238.000,00	95,77	195.620.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	214.881.750,00	208.385.000,00	96,97	182.855.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	100.677.000,00	93.853.000,00	93,22	12.765.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	585.953.841,00	460.717.935,00	78,62	367.024.560,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	438.702.255,00	384.260.520,00	87,59	358.623.840,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	147.251.586,00	76.457.415,00	51,92	8.400.720,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	21.656.331,20	17.020.013,00	78,59	14.230.524,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	21.656.331,20	17.020.013,00	78,59	14.230.524,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	166.405,25	107.305,00	64,48	88.910,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	108.599,15	83.836,00	77,19	84.399,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	57.806,10	23.469,00	40,59	4.511,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	12.667.936.470,00	11.683.025.629,00	92,22	10.319.761.423,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.957.886.667,00	8.453.648.105,00	94,37	7.361.189.205,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.870.786.691,00	7.432.280.359,00	94,42	7.187.869.129,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.087.099.976,00	1.021.367.746,00	93,95	173.320.076,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.848.235.801,00	1.464.942.047,00	79,26	2.732.341.031,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.848.235.801,00	1.464.942.047,00	79,26	2.655.329.112,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	0,00	0,00	0,00	77.011.919,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi	118.600.286,00	108.927.969,00	91,84	226.231.187,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi	118.600.286,00	108.927.969,00	91,84	226.231.187,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.743.213.716,00	1.655.507.508,00	94,96	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.320.418.848,00	1.268.998.819,00	96,10	0,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	422.794.868,00	386.508.689,00	91,41	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obje	0,00	0,00	0,00	1.164.150.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	1.164.150.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	1.164.150.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	180.696.229,00	139.758.736,00	77,34	0,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.619.266,16	46.800.000,00	82,65	0,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.619.266,16	46.800.000,00	82,65	0,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.359.601,20	4.680.000,00	63,59	0,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.359.601,20	4.680.000,00	63,59	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	84.240.000,00	83,62	0,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	84.240.000,00	83,62	0,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.344.596,00	3.476.160,00	65,04	0,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.344.596,00	3.476.160,00	65,04	0,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.489.256,15	561.136,00	16,08	0,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.489.256,15	561.136,00	16,08	0,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.834,93	1.440,00	78,47	0,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.834,93	1.440,00	78,47	0,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.610.031,36	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.610.031,36	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	133.660,80	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	133.660,80	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	400.982,40	0,00	0,00	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	400.982,40	0,00	0,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/	2.170.870.714,00	1.564.505.482,00	72,06	1.243.838.570,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	2.170.870.714,00	1.564.505.482,00	72,06	1.243.838.570,00

5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	2.170.870.714,00	1.564.505.482,00	72,06	1.243.838.570,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	69.036.911.829,00	60.110.553.669,00	87,07	54.406.671.107,00
5.1.02.01	Belanja Barang	24.323.314.900,00	22.445.507.654,00	92,27	16.436.332.387,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.323.314.900,00	22.445.507.654,00	92,27	16.436.332.387,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	399.037.504,00	354.314.750,00	88,79	384.897.050,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	11.475.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	25.000.000,00	24.880.000,00	99,52	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.816.780.000,00	1.757.068.300,00	96,71	1.245.300.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	7.600.000,00	0,00	0,00	5.960.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.800.571.387,00	2.361.267.725,00	84,31	2.462.014.667,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.537.223.228,00	2.421.463.214,00	95,43	2.112.173.850,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	50.640.900,00	36.580.000,00	72,23	37.320.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.815.000,00	6.400.000,00	93,91	73.500.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	827.482.241,00	734.829.978,00	88,80	682.186.500,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	620.217.400,00	596.411.454,00	96,16	255.613.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera	181.280.600,00	179.280.000,00	98,89	179.000.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk	735.565.400,00	710.582.260,00	96,60	758.370.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan	242.700.000,00	241.907.850,00	99,67	137.990.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.584.000.000,00	1.342.198.183,00	84,73	928.352.670,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.310.974.000,00	1.771.745.000,00	76,66	1.622.306.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.000.000.000,00	4.989.583.400,00	99,79	4.494.410.150,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	594.402.200,00	580.050.000,00	97,58	361.316.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	8.000.000,00	7.800.000,00	97,50	7.800.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	16.000.000,00	15.700.000,00	98,12	15.700.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	3.926.340.000,00	3.795.298.140,00	96,66	15.200.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	142.496.090,00	44.600.000,00	31,29	44.600.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	12.000.000,00	11.900.000,00	99,16	11.900.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	2.910.200,00	2.870.000,00	98,61	2.870.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	257.500.000,00	253.400.000,00	98,40	309.560.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	217.778.750,00	205.377.400,00	94,30	276.517.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	19.766.454.605,00	15.199.727.203,00	76,89	14.537.432.988,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.734.484.005,00	9.924.365.664,00	84,57	10.251.684.218,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, dan	3.664.800.000,00	3.268.750.000,00	89,19	2.870.150.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	29.900.000,00	25.500.000,00	85,28	455.900.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	800.650.000,00	641.230.000,00	80,08	1.385.410.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	213.120.000,00	175.112.100,00	82,16	332.730.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	50.240.000,00	50.240.000,00	100,00	196.340.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.693.000.000,00	1.670.000.000,00	98,64	1.700.500.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	953.400.000,00	115.560.000,00	12,12	515.740.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	218.000.000,00	198.000.000,00	90,82	89.500.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	300.000.000,00	255.400.005,00	85,13	384.045.900,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	70.000.000,00	40.000.000,00	57,14	40.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan	360.000.000,00	307.326.000,00	85,36	166.528.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	111.000.000,00	108.000.000,00	97,29	72.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	80.469.840,00	69.811.778,00	86,75	57.375.935,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	526.665.500,00	525.237.200,00	99,72	390.060.625,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	1.415.980.065,00	1.409.790.385,00	99,56	1.059.790.076,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	317.841.000,00	305.061.500,00	95,97	305.486.500,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	47.250.000,00	17.200.000,00	36,40	87.400.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	10.000.000,00	7.927.596,00	79,27	14.746.182,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	163.347.600,00	111.749.100,00	68,41	127.981.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	702.000.000,00	615.650.000,00	87,69	0,00
5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	4.280.000,00	4.280.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	2.540.000,00	2.540.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	853.886.600,00	784.136.539,00	91,83	610.293.770,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	853.886.600,00	784.136.539,00	91,83	610.293.770,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.913.800.000,00	1.594.540.000,00	40,74	983.450.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.017.500.000,00	364.000.000,00	18,04	389.200.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.896.300.000,00	1.230.540.000,00	64,89	594.250.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.731.084.000,00	1.597.235.000,00	92,26	1.315.960.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	20.540.000,00	20.540.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	140.794.000,00	135.660.000,00	96,35	110.540.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.569.750.000,00	1.441.035.000,00	91,80	1.205.420.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan	1.533.200.000,00	1.299.450.000,00	84,75	1.376.045.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.507.200.000,00	1.293.450.000,00	85,81	1.320.045.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	26.000.000,00	6.000.000,00	23,07	56.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3.161.266.224,00	2.586.150.343,00	81,80	1.714.272.034,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	977.898.224,00	897.812.600,00	91,81	620.726.500,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	282.348.224,00	273.900.000,00	97,00	235.100.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	57.650.000,00	52.309.000,00	90,73	47.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	183.600.000,00	173.818.000,00	94,67	185.620.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	397.500.000,00	342.106.300,00	86,06	102.490.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal	29.200.000,00	28.211.000,00	96,61	28.916.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Personal	27.600.000,00	27.468.300,00	99,52	21.600.500,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.183.368.000,00	1.688.337.743,00	77,32	1.093.545.534,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	898.380.000,00	826.849.537,00	92,03	419.924.172,00
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	29.988.000,00	24.864.000,00	82,91	0,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	240.000.000,00	227.400.000,00	94,75	192.383.215,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	800.000.000,00	454.562.800,00	56,82	399.803.663,00
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung	215.000.000,00	154.661.406,00	71,93	81.434.484,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	20.307.376.100,00	18.486.428.210,00	91,03	19.942.011.954,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.307.376.100,00	18.486.428.210,00	91,03	19.942.011.954,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20.307.376.100,00	18.486.428.210,00	91,03	19.940.001.954,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	1.478.500.000,00	1.392.740.259,00	94,19	1.776.621.744,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak	1.478.500.000,00	1.392.740.259,00	94,19	1.776.621.744,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.478.500.000,00	1.392.740.259,00	94,19	1.776.621.744,00

5.1.05	Belanja Hibah	296.330.000,00	293.903.500,00	99,18	330.365.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kema	296.330.000,00	293.903.500,00	99,18	330.365.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat	296.330.000,00	293.903.500,00	99,18	330.365.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Be	296.330.000,00	293.903.500,00	99,18	330.365.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	95.606.934.829,00	83.997.376.962,00	87,85	75.843.281.115,00
5.2	BELANJA MODAL	19.743.710.000,00	18.874.911.903,00	95,59	15.375.345.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.356.510.000,00	18.490.476.903,00	95,52	14.748.645.000,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	34.000.000,00	17.404.800,00	51,19	78.540.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	34.000.000,00	17.404.800,00	51,19	78.540.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	34.000.000,00	17.404.800,00	51,19	78.540.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	8.975.000.000,00	8.638.999.999,00	96,25	9.523.960.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	8.975.000.000,00	8.638.999.999,00	96,25	9.523.960.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.100.000.000,00	6.777.200.000,00	95,45	6.436.960.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	2.432.500.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	175.000.000,00	163.499.999,00	93,42	0,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.700.000.000,00	1.698.300.000,00	99,90	654.500.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.531.010.000,00	8.072.822.761,00	94,62	3.596.605.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.071.600.000,00	1.055.584.700,00	98,50	388.400.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	451.600.000,00	445.365.300,00	98,61	264.200.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	620.000.000,00	610.219.400,00	98,42	124.200.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7.459.410.000,00	7.017.238.061,00	94,07	3.208.205.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	4.354.000.000,00	4.220.384.169,00	96,93	891.300.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	29.200.000,00	28.800.002,00	98,63	45.620.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	915.000.000,00	881.825.499,00	96,37	888.665.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.113.210.000,00	1.874.048.390,00	88,68	1.295.320.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	48.000.000,00	12.180.001,00	25,37	87.300.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	295.000.000,00	290.115.000,00	98,34	313.990.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	295.000.000,00	290.115.000,00	98,34	313.990.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	15.000.000,00	14.955.000,00	99,70	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	280.000.000,00	275.160.000,00	98,27	313.990.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.521.500.000,00	1.471.134.343,00	96,68	1.235.550.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.306.500.000,00	1.263.125.893,00	96,68	698.850.000,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00	198.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.306.500.000,00	1.263.125.893,00	96,68	500.850.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	215.000.000,00	208.008.450,00	96,74	536.700.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	215.000.000,00	208.008.450,00	96,74	173.700.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	363.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	387.200.000,00	384.435.000,00	99,28	526.800.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	387.200.000,00	384.435.000,00	99,28	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	387.200.000,00	384.435.000,00	99,28	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	387.200.000,00	384.435.000,00	99,28	0,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	526.800.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	526.800.000,00
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	0,00	0,00	0,00	526.800.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	99.900.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	99.900.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	99.900.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	0,00	0,00	99.900.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	19.743.710.000,00	18.874.911.903,00	95,59	15.375.345.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	115.350.644.829,00	102.872.288.865,00	89,18	91.218.626.115,00
	SURPLUS/DEFISIT	(115.350.644.829,00)	(102.872.288.865,00)	89,18	(91.218.626.115,00)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(115.350.644.829,00)	(102.872.288.865,00)	89,18	(91.218.626.115,00)

Kab. Muara Enim, 24 Februari 2026
KEPALA SEKRETARIAT DAERAH

Ir. Yulius, M.Si.
NIP.196707101993031010



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM

SEKRETARIAT DPRD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	79.627.367.446,00	70.507.122.992,00	88,54	82.313.624.346,00
5.1	BELANJA OPERASI	74.181.179.482,00	66.674.284.490,00	89,88	80.574.109.346,00
5.1.01	Belanja Pegawai	32.810.304.613,00	31.148.070.492,00	94,93	30.442.816.311,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.758.628.396,30	3.001.184.269,00	79,84	2.484.498.157,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.789.765.487,05	2.414.770.500,00	86,55	1.940.848.950,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.113.381.725,05	1.776.725.000,00	84,07	1.794.762.164,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	676.383.762,00	638.045.500,00	94,33	146.086.786,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	358.936.878,00	198.814.183,00	55,38	182.569.100,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	252.837.732,40	161.672.743,00	63,94	176.738.548,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	106.099.145,60	37.141.440,00	35,00	5.830.552,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	130.799.018,00	56.475.000,00	43,17	94.320.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	130.799.018,00	56.475.000,00	43,17	94.320.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	106.272.000,00	80.920.000,00	76,14	90.140.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	106.272.000,00	80.920.000,00	76,14	90.140.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	117.133.500,00	108.403.750,00	92,54	62.320.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	73.143.500,00	66.320.000,00	90,67	53.690.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	43.990.000,00	42.083.750,00	95,66	8.630.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	214.163.292,00	139.969.755,00	65,35	109.643.880,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	145.538.100,00	104.212.380,00	71,60	103.415.760,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	68.625.192,00	35.757.375,00	52,10	6.228.120,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	41.373.968,10	1.793.768,00	4,33	4.626.657,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.708.999,40	1.793.768,00	23,26	4.626.657,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	33.664.968,70	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	184.253,15	37.313,00	20,25	29.570,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	35.523,15	25.526,00	71,85	25.878,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	148.730,00	11.787,00	7,92	3.692,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.900.694.244,70	2.187.323.489,00	75,40	1.923.773.874,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.900.694.244,70	2.187.323.489,00	75,40	1.923.773.874,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.407.401.666,30	1.736.490.952,00	72,13	1.811.225.410,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	493.292.578,40	450.832.537,00	91,39	112.548.464,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	25.757.861.972,00	25.566.442.734,00	99,25	25.641.424.280,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	100,00	1.003.170.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	100,00	1.003.170.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	154.481.200,00	123.944.100,00	80,23	126.291.900,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	154.481.200,00	123.944.100,00	80,23	126.291.900,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200,00	134.339.100,00	85,87	133.325.220,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200,00	134.339.100,00	85,87	133.325.220,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	100,00	85.974.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	100,00	85.974.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	100,00	1.454.596.500,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	100,00	1.454.596.500,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	125.149.500,00	125.149.500,00	100,00	104.291.250,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	125.149.500,00	125.149.500,00	100,00	104.291.250,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	29.780.100,00	14.433.300,00	48,46	11.205.600,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	29.780.100,00	14.433.300,00	48,46	11.205.600,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.938.000.000,00	100,00	7.938.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.938.000.000,00	100,00	7.938.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.984.500.000,00	100,00	1.308.300.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.984.500.000,00	100,00	1.308.300.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	129.157.060,00	102.978.126,00	79,73	99.750.886,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	129.157.060,00	102.978.126,00	79,73	99.750.886,00

5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.548.769.412,00	5.523.216.108,00	99,53	5.885.953.924,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	110.369.412,00	88.586.796,00	80,26	80.316.548,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	4.800.000,00	2.057.328,00	42,86	2.059.344,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.200.000,00	6.171.984,00	85,72	6.178.032,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	5.426.400.000,00	5.426.400.000,00	100,00	5.797.400.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.074.000.000,00	7.074.000.000,00	100,00	7.159.500.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.074.000.000,00	7.074.000.000,00	100,00	7.159.500.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	71.715.000,00	0,00	0,00	331.065.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	71.715.000,00	0,00	0,00	331.065.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	393.120.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	393.120.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	393.120.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.370.874.869,00	35.526.213.998,00	85,87	50.131.293.035,00
5.1.02.01	Belanja Barang	2.552.029.940,00	2.317.138.860,00	90,79	1.983.787.930,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.552.029.940,00	2.317.138.860,00	90,79	1.983.787.930,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	1.732.800,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9.858.000,00	9.000.000,00	91,29	7.700.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	3.600.000,00	2.820.000,00	78,33	2.700.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	212.815.810,00	142.672.190,00	67,04	181.784.900,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	219.966.400,00	157.973.850,00	71,81	209.799.900,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9.839.000,00	5.450.000,00	55,39	4.100.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	91.229.230,00	77.017.350,00	84,42	30.686.330,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	43.578.000,00	19.995.540,00	45,88	16.574.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	85.250.000,00	85.164.750,00	99,90	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.108.540.000,00	1.072.039.880,00	96,70	575.825.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	28.260.000,00	28.222.800,00	99,86	8.695.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	0,00	28.440.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	191.403.000,00	191.308.500,00	99,95	186.750.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	0,00	0,00	193.500.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	201.474.000,00	179.820.000,00	89,25	195.750.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	166.216.500,00	165.834.000,00	99,76	164.250.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	180.000.000,00	179.820.000,00	99,90	175.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.870.544.949,00	3.232.190.348,00	83,50	2.927.442.597,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.790.998.449,00	2.342.919.491,00	83,94	2.108.708.617,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.100.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	278.166.024,00	185.444.016,00	66,66	535.560.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.441.081.650,00	1.275.750.000,00	88,52	1.006.500.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	243.360.000,00	210.720.000,00	86,58	0,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	51.360.000,00	51.360.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	691.200,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	96.876.000,00	83.852.000,00	86,55	68.952.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	466.619.400,00	413.111.350,00	88,53	345.691.442,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	130.740.000,00	91.900.000,00	70,29	123.406.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10.436.250,00	7.495.200,00	71,81	7.494.700,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	34.567.925,00	23.286.925,00	67,36	21.103.975,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	181.046.500,00	174.320.857,00	96,28	179.571.980,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	181.046.500,00	174.320.857,00	96,28	179.571.980,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	298.200.000,00	99,40	128.750.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	300.000.000,00	298.200.000,00	99,40	128.750.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	598.500.000,00	416.750.000,00	69,63	510.412.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	450.000.000,00	268.250.000,00	59,61	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	148.500.000,00	148.500.000,00	100,00	510.412.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	865.876.480,00	789.211.340,00	91,14	802.901.005,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	619.048.480,00	543.759.260,00	87,83	618.499.605,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	407.930.000,00	407.536.101,00	99,90	44.009.891,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	475.059.714,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40.370.000,00	36.596.459,00	90,65	0,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.100.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	22.050.000,00	6.200.000,00	28,11	800.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	107.098.480,00	77.920.000,00	72,75	80.040.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.300.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.950.000,00	9.568.200,00	87,38	4.864.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	10.350.000,00	5.938.500,00	57,37	6.626.000,00

5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	246.828.000,00	245.452.080,00	99,44	184.401.400,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	246.828.000,00	245.452.080,00	99,44	184.401.400,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	34.082.423.500,00	29.187.673.450,00	85,63	44.417.161.503,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.082.423.500,00	29.187.673.450,00	85,63	44.417.161.503,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.082.423.500,00	29.187.673.450,00	85,63	44.417.161.503,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	74.181.179.482,00	66.674.284.490,00	89,88	80.574.109.346,00
5.2	BELANJA MODAL	5.446.187.964,00	3.832.838.502,00	70,37	1.739.515.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.346.187.964,00	2.808.738.502,00	64,62	1.739.515.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.405.940.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.405.940.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.405.940.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.731.537.964,00	2.600.114.002,00	95,18	1.690.415.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.100.000.000,00	1.096.125.000,00	99,64	10.100.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.100.000.000,00	1.096.125.000,00	99,64	10.100.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.631.537.964,00	1.503.989.002,00	92,18	1.680.315.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	91.500.000,00	91.420.500,00	99,91	1.129.620.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	205.000.000,00	204.722.002,00	99,86	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.335.037.964,00	1.207.846.500,00	90,47	550.695.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	32.000.000,00	31.968.000,00	99,90	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	32.000.000,00	31.968.000,00	99,90	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	32.000.000,00	31.968.000,00	99,90	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	176.710.000,00	176.656.500,00	99,96	49.100.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	176.710.000,00	176.656.500,00	99,96	49.100.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	176.710.000,00	176.656.500,00	99,96	49.100.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.100.000.000,00	1.024.100.000,00	93,10	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.100.000.000,00	1.024.100.000,00	93,10	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.100.000.000,00	1.024.100.000,00	93,10	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.100.000.000,00	1.024.100.000,00	93,10	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	5.446.187.964,00	3.832.838.502,00	70,37	1.739.515.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	79.627.367.446,00	70.507.122.992,00	88,54	82.313.624.346,00
	SURPLUS/DEFISIT	(79.627.367.446,00)	(70.507.122.992,00)	88,54	(82.313.624.346,00)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(79.627.367.446,00)	(70.507.122.992,00)	88,54	(82.313.624.346,00)

Kab. Muara Enim, 24 Februari 2026
KEPALA SEKRETARIAT DPRD

Drs. Edi Sudanto, M.M.
NIP.197409211993021001



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	27.222.164.139,00	24.900.703.841,27	91,47	117.178.991.897,00
5.1	BELANJA OPERASI	26.379.281.113,00	24.070.737.908,00	91,24	116.664.761.897,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.250.784.880,00	3.452.584.075,00	81,22	3.098.165.974,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.426.032.300,00	1.871.938.257,00	77,16	1.606.913.022,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.791.243.428,00	1.443.206.336,00	80,57	1.201.117.792,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.524.228.038,00	1.214.884.436,00	79,70	1.178.692.592,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	267.015.390,00	228.321.900,00	85,50	22.425.200,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	187.365.631,00	139.547.263,00	74,47	131.623.918,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	150.996.589,00	127.124.033,00	84,19	131.623.918,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	36.369.042,00	12.423.230,00	34,15	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	103.391.750,00	67.594.800,00	65,37	79.590.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	103.391.750,00	67.594.800,00	65,37	79.590.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	148.379.000,00	92.680.000,00	62,46	94.200.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	148.379.000,00	92.680.000,00	62,46	94.200.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	53.083.750,00	43.143.750,00	81,27	25.610.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	37.534.500,00	28.920.000,00	77,04	24.315.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	15.549.250,00	14.223.750,00	91,47	1.295.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	133.332.462,00	82.106.175,00	61,58	70.754.340,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	109.133.319,00	71.188.860,00	65,23	70.247.400,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	24.199.143,00	10.917.315,00	45,11	506.940,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.149.934,00	3.640.385,00	39,78	4.001.024,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.149.934,00	3.640.385,00	39,78	4.001.024,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	86.345,00	19.548,00	22,63	15.948,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	58.094,00	15.532,00	26,73	15.367,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	28.251,00	4.016,00	14,21	581,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.824.752.580,00	1.580.645.818,00	86,62	1.491.252.952,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.824.752.580,00	1.580.645.818,00	86,62	1.491.252.952,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.645.830.134,00	1.415.361.305,00	85,99	1.473.632.245,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	178.922.446,00	165.284.513,00	92,37	17.620.707,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.860.787.833,00	4.516.395.359,00	92,91	5.758.462.378,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.571.533.083,00	1.488.421.680,00	94,71	1.482.745.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.571.533.083,00	1.488.421.680,00	94,71	1.482.745.500,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.496.600,00	2.165.100,00	86,72	9.126.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	5.802.000,00	5.802.000,00	100,00	5.700.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	49.650.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	263.356.974,00	240.160.700,00	91,19	346.737.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	201.155.840,00	177.526.400,00	88,25	133.421.300,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.846.500,00	7.610.000,00	96,98	11.027.600,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	117.013.039,00	116.116.000,00	99,23	78.940.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.906.330,00	14.624.000,00	98,10	14.226.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	7.611.800,00	7.610.000,00	99,97	11.210.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.200.000,00	2.170.000,00	98,63	2.570.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	52.664.500,00	37.324.500,00	70,87	56.838.500,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	399.812.500,00	391.550.500,00	97,93	342.678.100,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	25.533.500,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	0,00	0,00	12.487.500,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	12.242.000,00	12.050.000,00	98,43	12.600.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	484.425.000,00	473.712.480,00	97,78	365.700.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.614.560.050,00	1.456.921.548,00	90,23	1.569.443.347,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	879.204.550,00	756.964.472,00	86,09	1.001.682.347,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	55.150.000,00	45.475.000,00	82,45	38.400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	175.350.000,00	143.400.000,00	81,77	221.900.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	165.600.000,00	162.800.000,00	98,30	178.500.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	19.800.000,00	19.800.000,00	100,00	10.800.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	116.800.000,00	116.800.000,00	100,00	228.590.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.400.000,00	10.400.000,00	100,00	12.800.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00	6.210.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	33.250.000,00	33.250.000,00	100,00	21.225.000,00

5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	130.700.000,00	105.750.000,00	80,91	188.700.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	34.500.000,00	34.500.000,00	100,00	16.500.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	6.000.000,00	5.722.074,00	95,36	5.674.804,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	6.900.000,00	2.213.000,00	32,07	2.409.750,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	96.333.300,00	60.578.273,00	62,88	53.144.218,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.440.000,00	1.560.000,00	20,96	4.830.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.581.250,00	6.316.125,00	50,20	11.998.575,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	22.201.500,00	20.803.076,00	93,70	20.116.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	22.201.500,00	20.803.076,00	93,70	20.116.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	119.650.000,00	119.150.000,00	99,58	97.400.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	108.000.000,00	108.000.000,00	100,00	90.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	11.650.000,00	11.150.000,00	95,70	7.400.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	385.304.000,00	364.304.000,00	94,54	343.745.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	31.304.000,00	31.304.000,00	100,00	45.245.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	354.000.000,00	333.000.000,00	94,06	298.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	208.200.000,00	195.700.000,00	93,99	106.500.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	178.200.000,00	178.200.000,00	100,00	95.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	30.000.000,00	17.500.000,00	58,33	11.500.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	159.020.000,00	125.537.109,00	78,94	210.261.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	159.020.000,00	125.537.109,00	78,94	128.161.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	139.290.000,00	114.698.609,00	82,34	0,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	89.864.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.627.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	15.470.000,00	8.468.500,00	54,74	17.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.190.000,00	2.100.000,00	95,89	5.840.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.070.000,00	270.000,00	13,04	4.830.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	82.100.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	82.100.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.515.674.700,00	1.445.515.022,00	95,37	2.496.012.531,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.515.674.700,00	1.445.515.022,00	95,37	2.496.012.531,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.515.674.700,00	1.445.515.022,00	95,37	2.496.012.531,00
5.1.05	Belanja Hibah	17.267.708.400,00	16.101.758.474,00	93,24	107.808.133.545,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	15.464.220.000,00	14.298.270.074,00	92,46	106.097.874.939,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000.000,00	13.834.050.074,00	92,22	106.041.694.939,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000.000,00	13.834.050.074,00	92,22	106.041.694.939,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	464.220.000,00	464.220.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	464.220.000,00	464.220.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	56.180.000,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	56.180.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.803.488.400,00	1.803.488.400,00	100,00	1.710.258.606,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.803.488.400,00	1.803.488.400,00	100,00	1.710.258.606,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.803.488.400,00	1.803.488.400,00	100,00	1.710.258.606,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	26.379.281.113,00	24.070.737.908,00	91,24	116.664.761.897,00
5.2	BELANJA MODAL	842.883.026,00	829.965.933,27	98,46	514.230.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	717.883.026,00	710.514.050,00	98,97	492.230.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	560.049.526,00	554.066.950,00	98,93	227.250.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	13.700.000,00	10.450.000,00	76,27	47.700.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	35.200.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	13.700.000,00	10.450.000,00	76,27	12.500.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	546.349.526,00	543.616.950,00	99,49	179.550.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	35.349.526,00	35.292.450,00	99,83	140.050.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	35.500.000,00

5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	511.000.000,00	508.324.500,00	99,47	4.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.450.000,00	3.700.000,00	83,14	29.500.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	4.450.000,00	3.700.000,00	83,14	29.500.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4.450.000,00	3.700.000,00	83,14	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	153.383.500,00	152.747.100,00	99,58	223.680.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	122.000.000,00	121.711.500,00	99,76	206.280.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	122.000.000,00	121.711.500,00	99,76	206.280.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	31.383.500,00	31.035.600,00	98,89	17.400.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	31.383.500,00	31.035.600,00	98,89	17.400.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.000.000,00	24.865.408,27	99,46	22.000.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	25.000.000,00	24.865.408,27	99,46	22.000.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	25.000.000,00	24.865.408,27	99,46	22.000.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	25.000.000,00	24.865.408,27	99,46	22.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000,00	94.586.475,00	94,58	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	100.000.000,00	94.586.475,00	94,58	0,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	100.000.000,00	94.586.475,00	94,58	0,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	100.000.000,00	94.586.475,00	94,58	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	842.883.026,00	829.965.933,27	98,46	514.230.000,00
	JUMLAH BELANJA	27.222.164.139,00	24.900.703.841,27	91,47	117.178.991.897,00
	SURPLUS/DEFISIT	(27.222.164.139,00)	(24.900.703.841,27)	91,47	(117.178.991.897,00)

Kab. Muara Enim, 4 Februari 2026
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Holika, S.Sos., M.Si.
NIP.196605121986031007



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	20.212.666.979,00	17.429.692.065,00	86,23	16.145.907.953,00
5.1	BELANJA OPERASI	17.482.079.604,00	14.929.092.120,00	85,39	15.298.307.953,00
5.1.01	Belanja Pegawai	7.324.807.277,00	6.151.274.980,00	83,97	5.554.141.735,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.366.074.922,00	3.001.765.626,00	89,17	2.612.178.651,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.452.132.107,70	2.320.035.620,00	94,61	1.960.028.679,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.003.845.692,70	1.907.849.320,00	95,20	1.895.956.686,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	448.286.415,00	412.186.300,00	91,94	64.071.993,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	235.044.787,80	188.615.443,00	80,24	179.820.080,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	167.623.395,80	157.347.607,00	93,86	171.298.504,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	67.421.392,00	31.267.836,00	46,37	8.521.576,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	119.173.750,00	115.990.000,00	97,32	109.130.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	119.173.750,00	115.990.000,00	97,32	109.130.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	230.400.000,00	195.986.840,00	85,06	220.500.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	230.400.000,00	195.986.840,00	85,06	220.500.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	68.963.262,50	62.046.012,00	89,96	33.750.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	42.802.250,00	35.885.000,00	83,83	30.050.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	26.161.012,50	26.161.012,00	99,99	3.700.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	170.371.704,00	113.842.663,00	66,82	104.864.160,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	105.976.704,00	89.655.960,00	84,59	99.577.500,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	64.395.000,00	24.186.703,00	37,55	5.286.660,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	89.722.341,00	5.214.782,00	5,81	4.057.860,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	39.688.993,00	5.214.782,00	13,13	4.057.860,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	50.033.348,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	266.969,00	34.266,00	12,83	27.872,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	103.869,00	27.501,00	26,47	26.610,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	163.100,00	6.765,00	4,14	1.262,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.958.732.355,00	3.149.509.354,00	79,55	2.941.963.084,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.138.053.921,00	2.413.414.857,00	76,90	2.359.944.488,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.828.159.544,00	2.118.111.338,00	74,89	2.311.987.919,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	309.894.377,00	295.303.519,00	95,29	47.956.569,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	237.747.608,00	237.747.608,00	100,00	582.018.596,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	237.747.608,00	237.747.608,00	100,00	567.789.131,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	0,00	0,00	0,00	14.229.465,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	582.930.826,00	498.346.889,00	85,48	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	501.066.626,00	421.015.360,00	84,02	0,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	81.864.200,00	77.331.529,00	94,46	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.157.272.327,00	8.777.817.140,00	86,41	9.744.166.218,00
5.1.02.01	Belanja Barang	2.293.110.061,00	1.869.384.548,00	81,52	2.041.910.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.293.110.061,00	1.869.384.548,00	81,52	2.041.910.400,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	82.390.000,00	80.650.000,00	97,88	64.523.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	56.416.600,00	39.385.000,00	69,81	116.670.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	7.000.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	519.909.185,00	423.315.548,00	81,42	498.321.800,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	746.489.800,00	677.117.000,00	90,70	806.245.600,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.530.000,00	4.500.000,00	99,33	4.550.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	46.065.476,00	45.296.000,00	98,32	54.910.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	44.659.000,00	44.021.000,00	98,57	39.430.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	8.100.000,00	5.400.000,00	66,66	5.400.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	29.520.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	770.550.000,00	535.700.000,00	69,52	415.340.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.359.189.412,00	2.686.624.614,00	79,97	3.254.385.464,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.963.135.012,00	2.329.079.241,00	78,60	2.629.565.266,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	453.500.000,00	339.600.000,00	74,88	417.100.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	192.750.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	275.400.000,00	227.530.000,00	82,61	361.890.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	139.083.012,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.430.600.000,00	1.275.600.000,00	89,16	1.164.100.000,00

5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	68.480.000,00	59.920.000,00	87,50	89.880.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	70.000.000,00	50.000.000,00	71,42	49.500.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	9.407.000,00	3.048.000,00	32,40	2.137.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	387.855.000,00	286.468.720,00	73,85	275.162.142,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	57.600.000,00	39.820.000,00	69,13	36.405.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	31.400.000,00	23.226.796,00	73,97	13.410.499,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	17.810.000,00	13.865.725,00	77,85	17.230.125,00
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	154.354.400,00	137.795.373,00	89,27	130.508.190,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	154.354.400,00	137.795.373,00	89,27	130.508.190,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	45.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	45.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00	346.650.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	105.000.000,00	105.000.000,00	100,00	84.150.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00	262.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	91.700.000,00	69.750.000,00	76,06	102.662.008,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	54.500.000,00	43.950.000,00	80,64	91.062.008,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	21.200.000,00	10.800.000,00	50,94	11.600.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	16.000.000,00	15.000.000,00	93,75	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	797.836.954,00	709.425.872,00	88,91	505.825.850,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	298.024.954,00	250.210.872,00	83,95	150.920.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	142.130.000,00	105.657.872,00	74,33	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.500.000,00	2.093.000,00	19,93	0,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	11.500.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	52.544.954,00	50.300.000,00	95,72	58.200.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.540.000,00	20.540.000,00	100,00	22.290.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	36.310.000,00	35.620.000,00	98,09	34.000.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	11.730.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	499.812.000,00	459.215.000,00	91,87	354.905.850,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	399.812.000,00	399.275.000,00	99,86	305.905.850,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	100.000.000,00	59.940.000,00	59,94	49.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.687.135.900,00	3.492.382.106,00	94,71	3.922.044.504,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.687.135.900,00	3.492.382.106,00	94,71	3.922.044.504,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.687.135.900,00	3.492.382.106,00	94,71	3.922.044.504,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	20.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	17.482.079.604,00	14.929.092.120,00	85,39	15.298.307.953,00
5.2	BELANJA MODAL	2.730.587.375,00	2.500.599.945,00	91,57	847.600.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.720.587.375,00	2.500.599.945,00	91,91	847.600.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.400.000.000,00	1.247.199.998,00	89,08	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.400.000.000,00	1.247.199.998,00	89,08	0,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.400.000.000,00	1.247.199.998,00	89,08	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	974.908.000,00	929.109.943,00	95,30	634.750.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	531.468.000,00	530.136.000,00	99,74	583.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	531.468.000,00	530.136.000,00	99,74	583.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	443.440.000,00	398.973.943,00	89,97	51.750.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	364.900.000,00	322.227.944,00	88,30	9.950.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	63.540.000,00	62.826.000,00	98,87	41.800.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15.000.000,00	13.919.999,00	92,79	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	14.900.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	14.900.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	14.900.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	345.679.375,00	324.290.004,00	93,81	197.950.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	345.679.375,00	324.290.004,00	93,81	88.500.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	286.489.375,00	280.790.003,00	98,01	88.500.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	59.190.000,00	43.500.001,00	73,49	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	109.450.000,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	0,00	0,00	0,00	5.950.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	103.500.000,00

5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	2.730.587.375,00	2.500.599.945,00	91,57	847.600.000,00
	JUMLAH BELANJA	20.212.666.979,00	17.429.692.065,00	86,23	16.145.907.953,00
	SURPLUS/DEFISIT	(20.212.666.979,00)	(17.429.692.065,00)	86,23	(16.145.907.953,00)

Kab. Muara Enim, 4 Februari 2026
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Drs. Emran Tabrani, M.Si.
NIP.196803081989091002



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	3.767.250.195.921,03	3.586.788.064.194,48	95,21	3.637.190.304.961,53
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	56.700.520.365,03	80.015.926.663,11	141,12	105.524.268.601,89
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.552.719.027,07	26.552.719.027,07	100,00	31.147.873.242,38
4.1.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	12.091.543.010,00	12.091.543.010,00	100,00	14.319.747.760,00
4.1.03.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	12.091.543.010,00	12.091.543.010,00	100,00	14.319.747.760,00
4.1.03.01.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	12.091.543.010,00	12.091.543.010,00	100,00	14.319.747.760,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	14.461.176.017,07	14.461.176.017,07	100,00	16.828.125.482,38
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	14.269.168.802,77	14.269.168.802,77	100,00	16.828.125.482,38
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	14.269.168.802,77	14.269.168.802,77	100,00	16.828.125.482,38
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	192.007.214,30	192.007.214,30	100,00	0,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	192.007.214,30	192.007.214,30	100,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	30.147.801.337,96	53.463.207.636,04	177,34	74.376.395.359,51
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	522.696.168,00	261,35	479.740.223,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	220.158.100,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	220.158.100,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	522.696.168,00	0,00	259.582.123,00
4.1.04.01.03.0044	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempati Tinggal-Rumah Negara Golongan III	0,00	522.696.168,00	0,00	259.582.123,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.01.05.0071	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	399.000.000,00	209.672.800,00	52,55	175.000.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	399.000.000,00	209.672.800,00	52,55	175.000.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	399.000.000,00	209.672.800,00	52,55	175.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	12.200.000.000,00	17.493.588.462,00	143,39	21.688.217.995,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	12.000.000.000,00	17.208.789.398,00	143,41	21.474.415.837,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	12.000.000.000,00	17.208.789.398,00	143,41	21.474.415.837,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	200.000.000,00	284.799.064,00	142,40	213.802.158,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	200.000.000,00	284.799.064,00	142,40	213.802.158,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	0,00	1.599.296.009,00	0,00	16.615.028.351,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	1.599.296.009,00	0,00	16.615.028.351,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	1.599.296.009,00	0,00	16.615.028.351,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	7.452.276.978,11	0,00	12.684.107.459,18
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	7.452.276.978,11	0,00	12.684.107.459,18
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	7.452.276.978,11	0,00	12.684.107.459,18
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	17.199.999.999,96	26.120.479.944,93	151,86	22.699.936.080,33
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1.122.683.140,00	1.392.916.617,90	124,07	6.169.509.316,92
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	1.122.683.140,00	1.392.916.617,90	124,07	6.169.509.316,92
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	366.871.410,00	472.331.987,56	128,75	327.520.137,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	312.184.250,00	354.666.153,00	113,61	170.474.700,00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	48.627.160,00	109.890.834,56	225,99	153.902.437,00

4.1.04.15.08.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	6.060.000,00	7.775.000,00	128,30	2.403.000,00
4.1.04.15.08.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN-Tunjangan Fungsional Umum PNS	0,00	0,00	0,00	740.000,00
4.1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	120.805.570,50	206.735.092,05	171,13	584.222.980,44
4.1.04.15.09.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	120.100.570,50	206.030.092,05	171,55	584.222.980,44
4.1.04.15.09.0076	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	705.000,00	705.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.10	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	100.974.750,00
4.1.04.15.10.0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	470.000,00
4.1.04.15.10.0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	100.504.750,00
4.1.04.15.11	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	414.131.193,00	526.635.716,00	127,17	4.080.210.180,00
4.1.04.15.11.0015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD-Tunjangan Perumahan DPRD	350.656.193,00	446.585.716,00	127,36	3.544.710.180,00
4.1.04.15.11.0016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Transportasi DPRD-Tunjangan Transportasi DPRD	63.475.000,00	80.050.000,00	126,11	535.500.000,00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	994.776.209,38	1.187.705.315,81	119,39	468.525.432,64
4.1.04.15.15.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	18.833.340,00
4.1.04.15.15.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00	0,00	4.550.000,00
4.1.04.15.15.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	140.054.850,00	146.865.350,00	104,86	0,00
4.1.04.15.15.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	400.000,00	0,00	200.000,00
4.1.04.15.15.0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	0,00	19.486.250,00	0,00	17.218.200,00
4.1.04.15.15.0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	6.560.000,00	9.028.600,00	137,63	0,00
4.1.04.15.15.0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	100.295.001,00	121.893.634,00	121,54	119.437.625,00
4.1.04.15.15.0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	26.902.200,00	45.073.800,00	167,55	23.796.500,00
4.1.04.15.15.0027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.812.000,00	5.506.000,00	303,86	8.050.000,00
4.1.04.15.15.0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	110.000,00	710.000,00	645,45	500.000,00
4.1.04.15.15.0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.693.359,00	36.267.943,00	471,42	14.411.608,00
4.1.04.15.15.0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	133.190.199,00	141.358.199,00	106,13	8.579.300,00
4.1.04.15.15.0034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	460.000,00	9.250.000,00	2.010,87	3.565.000,00
4.1.04.15.15.0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat	0,00	970.400,00	0,00	1.053.000,00
4.1.04.15.15.0039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	175.927.534,38	231.569.488,81	131,63	135.941.955,64

4.1.04.15.15.0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Natura dan Pakan-Natura	0,00	6.160.585,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	368.836.997,00	380.230.997,00	103,09	110.403.904,00
4.1.04.15.15.0055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	0,00	0,00	1.985.000,00
4.1.04.15.15.0077	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Paskibraka	32.934.069,00	32.934.069,00	100,00	0,00
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	551.945.250,00	898.036.883,99	162,70	552.504.241,00
4.1.04.15.16.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.200.000,00	2.200.000,00	100,00	27.405.000,00
4.1.04.15.16.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	353.721.500,00	353.721.500,00	100,00	102.000.000,00
4.1.04.15.16.0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pendidikan	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	19.600.000,00
4.1.04.15.16.0020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Penanganan Sosial	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.1.04.15.16.0026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
4.1.04.15.16.0030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	300.000,00	2.850.000,00	950,00	0,00
4.1.04.15.16.0043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Penulisan dan Penerjemahan	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
4.1.04.15.16.0047	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Penyelenggaraan Acara	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
4.1.04.15.16.0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00	10.264.000,00	0,00	150.000,00
4.1.04.15.16.0060	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	33.750,00	33.750,00	100,00	1.040.241,00
4.1.04.15.16.0061	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	103.000,00	0,00	0,00	2.553.700,00
4.1.04.15.16.0063	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0,00	7.159.000,00	0,00	6.700.000,00
4.1.04.15.16.0065	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Penambahan Daya	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.567.000,00	1.567.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.16.0071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Lembur	0,00	0,00	0,00	69.000,00
4.1.04.15.16.0157	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	46.680.000,00	46.680.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.16.0158	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin-Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	294.036.300,00
4.1.04.15.16.0671	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	34.680.000,00	34.680.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.16.0905	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	59.500.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0919	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00	223.673.633,99	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0922	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	75.460.000,00	116.008.000,00	153,73	0,00
4.1.04.15.16.0985	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Beasiswa Pendidikan PNS-Beasiswa Tugas Belajar S1	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00

4.1.04.15.16.0988	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.16.0989	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Sosialisasi	27.400.000,00	27.400.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	28.452.400,00	127.456.406,00	447,96	162.929.267,72
4.1.04.15.17.0070	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin- Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	14.300.000,00	14.300.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.17.0152	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin- Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.780.000,00	3.333.514,00	88,19	7.825.000,00
4.1.04.15.17.0156	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin- Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	6.630.000,00	6.630.000,00	100,00	14.000.000,00
4.1.04.15.17.0440	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin- Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.742.400,00	3.742.400,00	100,00	300.000,00
4.1.04.15.17.0444	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin- Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Personal Computer	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.17.0545	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	2.872.000,00	0,00	17.398.452,72
4.1.04.15.17.0554	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	95.578.492,00	0,00	66.579.573,00
4.1.04.15.17.0555	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
4.1.04.15.17.0560	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	9.557.000,00
4.1.04.15.17.0574	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.311.900,00
4.1.04.15.17.0577	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	7.715.000,00
4.1.04.15.17.0580	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	0,00	0,00	27.242.342,00
4.1.04.15.17.0582	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.1.04.15.18	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	23.600.000,00	23.600.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.18.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Hadiah yang Bersifat Perlombaan	23.600.000,00	23.600.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.29	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Koperasi	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.29.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Subsidi kepada Koperasi	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.433.550.270,00	12.144.566.419,61	163,38	19.524.905,00

4.1.04.15.34.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.126.350.270,00	11.625.703.328,00	163,14	14.524.905,00
4.1.04.15.34.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	307.200.000,00	518.863.091,61	168,90	5.000.000,00
4.1.04.15.35	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS	30.960.000,00	30.960.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.35.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	30.960.000,00	30.960.000,00	100,00	0,00
4.1.04.15.37	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00
4.1.04.15.37.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	0,00	0,00	12.700.000,00
4.1.04.15.42	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	0,00	1.100.000,00	0,00	556.757,00
4.1.04.15.42.0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Electric Generating Set	0,00	0,00	0,00	556.757,00
4.1.04.15.42.0023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Pompa	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.46	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.997.297,30	27.163.239,30	271,71	57.336.974,00
4.1.04.15.46.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	12.050.000,00
4.1.04.15.46.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	12.018.742,00	0,00	30.881.806,00
4.1.04.15.46.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Mebel	9.597.297,30	3.797.297,30	39,57	1.781.060,00
4.1.04.15.46.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	11.347.200,00	0,00	3.300.000,00
4.1.04.15.46.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	3.266.000,00
4.1.04.15.46.0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	400.000,00	0,00	0,00	6.058.108,00
4.1.04.15.47	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	11.342.080,00	0,00	2.000.000,00
4.1.04.15.47.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.1.04.15.47.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	0,00	11.342.080,00	0,00	0,00
4.1.04.15.49	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.49.0081	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00
4.1.04.15.51	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer	0,00	27.112.897,00	0,00	20.939.640,00
4.1.04.15.51.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	0,00	21.883.333,00	0,00	14.241.108,00
4.1.04.15.51.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	5.229.564,00	0,00	6.698.532,00
4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	89.055.706,51	107.264.716,99	120,45	667.907.956,23
4.1.04.15.61.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	18.209.010,68	0,00	432.477.737,67
4.1.04.15.61.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	155.378.281,14

4.1.04.15.61.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	89.055.706,51	89.055.706,31	100,00	52.864.712,47
4.1.04.15.61.0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0,00	0,00	0,00	25.767.724,95
4.1.04.15.61.0036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	0,00	0,00	1.419.500,00
4.1.04.15.64	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	17.087.152,00	0,00	0,00
4.1.04.15.64.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Tugu/Tanda Batas-Pagar	0,00	17.087.152,00	0,00	0,00
4.1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	5.598.861.561,61	8.243.929.176,03	147,24	9.185.624.051,67
4.1.04.15.65.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	5.598.861.561,61	8.220.003.057,12	146,82	9.017.471.830,23
4.1.04.15.65.0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	23.926.118,91	0,00	168.152.221,44
4.1.04.15.66	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	393.336.711,66	649.162.964,69	165,04	281.949.490,71
4.1.04.15.66.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	121.328.157,90	188.242.548,67	155,15	0,00
4.1.04.15.66.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	0,00	0,00	0,00	191.075.996,34
4.1.04.15.66.0028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	202.150.866,78	320.634.728,12	158,61	0,00
4.1.04.15.66.0029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	28.661.383,47	89.089.384,39	310,83	60.873.494,37
4.1.04.15.66.0048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	41.196.303,51	51.196.303,51	124,27	30.000.000,00
4.1.04.15.68	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jaringan	13.773.280,00	18.773.280,00	136,30	0,00
4.1.04.15.68.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	13.773.280,00	18.773.280,00	136,30	0,00
4.1.04.15.84	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.1.04.15.84.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.1.04.15.87	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.87.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	148.801.338,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	148.801.338,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	145.301.338,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.16.06.0002	Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga	500.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.16.06.0006	Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	65.197.274,00	0,00	34.365.251,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	65.197.274,00	0,00	34.365.251,00
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	65.197.274,00	0,00	34.365.251,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	56.700.520.365,03	80.015.926.663,11	141,12	105.524.268.601,89
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.704.855.450.212,00	3.497.837.500.489,76	94,41	3.524.646.144.599,22
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.384.409.910.660,00	3.178.794.712.284,00	93,92	3.198.030.938.052,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	2.968.307.640.052,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	0,00	0,00	0,00	1.988.077.195.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	552.985.545.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	50.557.243.000,00

4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	989.419.000,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0,00	0,00	0,00	29.446.293.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	0,00	0,00	30.577.731.000,00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	12.760.258.000,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	0,00	0,00	3.681.573.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	0,00	0,00	1.294.476.299.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.120.498.000,00
4.2.01.01.01.0014	DBH Sawit	0,00	0,00	0,00	11.482.336.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	0,00	0,00	676.353.374.468,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	0,00	0,00	0,00	544.838.517.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	0,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	0,00	0,00	0,00	18.089.113.468,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	0,00	0,00	0,00	64.380.300.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	35.399.055.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	0,00	11.646.389.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	0,00	0,00	62.807.794.258,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0,00	0,00	0,00	2.498.166.200,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	0,00	0,00	0,00	12.012.429.570,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	0,00	0,00	0,00	13.805.157.951,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	2.419.182.350,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	8.772.492.995,00
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	0,00	16.727.172.500,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	0,00	0,00	0,00	6.573.192.692,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	0,00	0,00	241.069.276.326,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00	88.387.936.099,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00	2.405.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	0,00	0,00	0,00	107.116.626.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00	0,00	6.941.000.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	7.074.438.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenak	0,00	0,00	0,00	1.570.250.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	20.847.380.597,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	0,00	0,00	6.576.585.130,00
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	150.060.500,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.157.007.732.660,00	1.990.938.325.299,00	92,30	0,00
4.2.01.07.01	DBH Pajak	716.118.255.380,00	536.206.307.300,00	74,88	0,00
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	669.338.054.220,00	502.405.314.100,00	75,06	0,00
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	45.495.708.060,00	32.773.438.600,00	72,04	0,00
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.284.493.100,00	1.027.554.600,00	80,00	0,00
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	1.436.449.211.280,00	1.450.291.751.999,00	100,96	0,00
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	6.125.420.450,00	6.447.811.000,00	105,26	0,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	38.800.474.000,00	40.286.705.000,00	103,83	0,00
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	6.394.049.110,00	6.558.365.000,00	102,57	0,00
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	6.394.039.050,00	6.700.304.000,00	104,79	0,00
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	1.377.488.909.920,00	1.388.556.354.999,00	100,80	0,00
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	454.204.000,00	908.407.000,00	200,00	0,00
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	792.114.750,00	833.805.000,00	105,26	0,00
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	4.440.266.000,00	4.440.266.000,00	100,00	0,00
4.2.01.07.03.0001	DBH Sawit	4.440.266.000,00	4.440.266.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	697.632.943.380,00	675.777.451.987,00	96,87	0,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	473.992.405.000,00	506.856.679.528,00	106,93	0,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	473.992.405.000,00	506.856.679.528,00	106,93	0,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	223.640.538.000,00	168.920.772.459,00	75,53	0,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	119.204.837.000,00	64.485.071.459,00	54,10	0,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	47.967.748.000,00	47.967.748.000,00	100,00	0,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	54.467.953.000,00	54.467.953.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	313.730.831.000,00	303.035.048.002,00	96,59	0,00
4.2.01.09.01	DAK Fisik	15.494.164.000,00	15.276.835.998,00	98,60	0,00
4.2.01.09.01.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	399.965.000,00	396.566.592,00	99,15	0,00
4.2.01.09.01.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	559.845.000,00	543.532.911,00	97,09	0,00
4.2.01.09.01.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	228.000.000,00	216.099.999,00	94,78	0,00
4.2.01.09.01.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	6.458.899.000,00	6.350.782.000,00	98,33	0,00
4.2.01.09.01.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	4.301.000.000,00	4.239.410.000,00	98,57	0,00
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	3.546.455.000,00	3.530.444.496,00	99,55	0,00
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	298.236.667.000,00	287.758.212.004,00	96,49	0,00

4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	89.325.200.000,00	89.205.407.997,00	99,87	0,00
4.2.01.09.02.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.239.000.000,00	2.239.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	400.660.000,00	174.507.667,00	43,56	0,00
4.2.01.09.02.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	7.081.200.000,00	6.983.397.000,00	98,62	0,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.502.800.000,00	1.437.729.498,00	95,67	0,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	12.211.579.000,00	9.602.666.725,00	78,64	0,00
4.2.01.09.02.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	15.391.375.000,00	10.619.331.912,00	69,00	0,00
4.2.01.09.02.0036	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tunjangan Profesi Guru	156.978.574.000,00	155.756.419.300,00	99,22	0,00
4.2.01.09.02.0037	DAK Non Fisik-Tunjangan Guru ASN Daerah-Tambahan Penghasilan Guru	3.390.000.000,00	2.227.500.000,00	65,71	0,00
4.2.01.09.02.0039	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	8.694.125.000,00	8.480.977.905,00	97,55	0,00
4.2.01.09.02.0040	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	285.834.000,00	285.834.000,00	100,00	0,00
4.2.01.09.02.0043	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian	556.320.000,00	565.440.000,00	101,64	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	3.168.371.506.660,00	2.969.750.825.288,00	93,73	2.968.307.640.052,00
4.2.01.05	Dana Desa	216.038.404.000,00	209.043.886.996,00	96,76	223.347.712.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	216.038.404.000,00	209.043.886.996,00	96,76	223.347.712.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	216.038.404.000,00	209.043.886.996,00	96,76	223.347.712.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	6.375.586.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	6.375.586.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	6.375.586.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	216.038.404.000,00	209.043.886.996,00	96,76	229.723.298.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	320.445.539.552,00	319.042.788.205,76	99,56	326.615.206.547,22
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	227.074.260.132,00	270.312.003.785,76	119,04	305.300.417.867,22
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	227.074.260.132,00	270.312.003.785,76	119,04	305.300.417.867,22
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	7.346.374.928,00	7.532.669.093,00	102,54	23.079.758.099,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.710.347.417,00	6.840.880.037,00	101,95	23.460.160.208,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	177.733.244.614,00	221.131.537.690,76	124,42	221.111.978.878,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.671.787.639,00	1.864.350.212,00	111,52	906.141.291,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	33.612.505.534,00	32.942.566.753,00	98,01	36.742.379.391,22
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	93.371.279.420,00	48.730.784.420,00	52,19	21.314.788.680,00
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	93.371.279.420,00	48.730.784.420,00	52,19	21.314.788.680,00
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	93.371.279.420,00	48.730.784.420,00	52,19	21.314.788.680,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	320.445.539.552,00	319.042.788.205,76	99,56	326.615.206.547,22
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	3.704.855.450.212,00	3.497.837.500.489,76	94,41	3.524.646.144.599,22
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.694.225.344,00	8.934.637.041,61	156,91	7.019.891.760,42
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.548.000.000,00	2.229.469.761,00	144,02	727.192.879,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.548.000.000,00	2.229.469.761,00	144,02	727.192.879,00
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	1.548.000.000,00	2.229.469.761,00	144,02	727.192.879,00
4.3.01.04.01.0001	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	1.548.000.000,00	2.229.469.761,00	144,02	727.192.879,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.146.225.344,00	6.705.167.280,61	161,72	6.292.698.881,42
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0,00	950.852.792,61	0,00	6.292.698.881,42
4.3.03.01.02	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	0,00	950.852.792,61	0,00	6.292.698.881,42
4.3.03.01.02.0005	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia	0,00	950.852.792,61	0,00	6.292.698.881,42
4.3.03.06	Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi	4.146.225.344,00	5.754.314.488,00	138,78	0,00
4.3.03.06.01	Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi	4.146.225.344,00	5.754.314.488,00	138,78	0,00
4.3.03.06.01.0001	Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi	4.146.225.344,00	5.754.314.488,00	138,78	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.694.225.344,00	8.934.637.041,61	156,90	7.019.891.760,42
	JUMLAH PENDAPATAN	3.767.250.195.921,03	3.586.788.064.194,48	95,20	3.637.190.304.961,53
5	BELANJA DAERAH	663.569.429.721,20	623.023.668.831,84	93,89	567.157.947.198,00
5.1	BELANJA OPERASI	91.511.190.151,20	62.603.742.427,84	68,41	58.640.412.648,00
5.1.01	Belanja Pegawai	71.502.373.320,76	46.799.948.651,00	65,45	41.841.184.668,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	67.480.658.822,76	43.255.765.436,00	64,10	36.858.244.556,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.779.737.749,40	2.704.159.838,00	46,79	2.442.007.023,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	3.344.048.149,40	2.335.615.038,00	69,84	2.442.007.023,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	2.435.689.600,00	368.544.800,00	15,13	0,00

5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	296.044.986,00	213.896.870,00	72,25	215.708.960,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	235.048.442,00	189.082.782,00	80,44	215.708.960,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	60.996.544,00	24.814.088,00	40,68	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	169.211.625,00	153.250.000,00	90,57	156.310.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	169.211.625,00	153.250.000,00	90,57	156.310.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	83.255.100,00	45.040.000,00	54,10	66.480.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	83.255.100,00	45.040.000,00	54,10	66.480.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	107.923.625,00	102.831.800,00	95,28	78.155.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	82.763.625,00	79.471.800,00	96,02	78.155.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	25.160.000,00	23.360.000,00	92,85	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	220.690.904,00	141.146.580,00	63,96	133.759.740,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	181.294.424,00	120.868.980,00	66,67	133.759.740,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	39.396.480,00	20.277.600,00	51,47	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.225.000,00	3.149.614,00	34,14	2.300.117,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.225.000,00	3.149.614,00	43,59	2.300.117,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	92.250,00	41.468,00	44,95	38.724,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	72.250,00	34.992,00	48,43	38.724,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	20.000,00	6.476,00	32,38	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	55.322.339.644,36	35.607.417.600,00	64,36	30.059.015.675,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	35.555.215.454,36	22.800.655.592,00	64,13	23.109.754.579,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	19.767.124.190,00	12.806.762.008,00	64,79	6.949.261.096,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.490.000.000,00	1.071.207.915,00	71,89	926.117.331,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	730.000.000,00	661.047.396,00	90,55	672.708.409,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	760.000.000,00	410.160.519,00	53,97	253.408.922,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	4.002.137.939,00	3.213.623.751,00	80,30	2.778.351.986,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.500.000.000,00	1.983.142.190,00	79,33	2.018.125.223,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.502.137.939,00	1.230.481.561,00	81,92	760.226.763,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.021.714.498,00	3.544.183.215,00	88,13	3.324.685.112,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.177.670.051,00	2.847.239.833,00	89,60	2.638.771.842,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.834.935.635,00	2.582.957.497,00	91,11	2.638.771.842,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	342.734.416,00	264.282.336,00	77,11	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	344.364.090,00	305.217.899,00	88,63	685.913.270,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	344.364.090,00	305.217.899,00	88,63	685.913.270,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	499.680.357,00	391.725.483,00	78,40	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	397.134.045,00	322.314.866,00	81,16	0,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	102.546.312,00	69.410.617,00	67,69	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	1.658.255.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	991.130.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	991.130.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	667.125.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0,00	0,00	0,00	667.125.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.008.816.830,44	10.208.879.623,00	78,48	9.313.906.257,00
5.1.02.01	Belanja Barang	3.242.299.329,00	2.442.726.637,00	75,34	2.480.937.850,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.242.299.329,00	2.442.726.637,00	75,34	2.480.937.850,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	33.297.000,00	18.652.000,00	56,02	31.372.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	284.250.000,00	276.206.250,00	97,17	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	15.000.000,00	9.350.640,00	62,34	0,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	3.500.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	650.232.927,00	440.345.153,00	67,72	705.756.150,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.183.382.588,00	1.057.221.114,00	89,34	1.125.705.700,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	27.291.500,00	11.320.000,00	41,48	22.400.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	107.664.100,00	100.464.000,00	93,31	104.900.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	34.377.214,00	33.459.500,00	97,33	35.836.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	25.140.000,00	12.188.000,00	48,48	32.473.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	168.080.000,00	146.778.980,00	87,33	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	709.084.000,00	333.241.000,00	47,00	417.995.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	4.982.805.564,00	4.295.409.646,00	86,20	2.220.477.272,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.666.100.564,00	4.150.198.686,00	88,94	2.064.248.577,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.186.200.000,00	1.128.200.000,00	95,11	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	340.835.450,00	251.000.000,00	73,64	91.800.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	295.850.000,00	208.800.000,00	70,58	499.700.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	2.000.000,00	400.000,00	20,00	800.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	352.800.000,00	315.800.000,00	89,51	258.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	111.760.000,00	102.160.000,00	91,41	89.390.000,00

5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	150.800.000,00	124.080.000,00	82,28	348.320.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	112.500.000,00	79.715.000,00	70,86	57.260.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	116.681.400,00	116.400.000,00	99,76	90.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	96.740.000,00	70.990.000,00	73,38	117.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	77.760.000,00	61.960.000,00	79,68	88.440.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	42.735.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	12.400.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	31.038.500,00	16.539.500,00	53,29	19.309.750,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	329.961.500,00	293.444.186,00	88,93	301.360.612,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	11.400.000,00	0,00	0,00	6.939.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	173.000.000,00	151.350.000,00	87,49	313.140,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	31.133.714,00	25.600.000,00	82,23	47.881.075,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	1.233.240.000,00	1.203.760.000,00	97,61	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	125.625.000,00	90.210.960,00	71,81	109.128.695,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	125.625.000,00	90.210.960,00	71,81	109.128.695,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	146.080.000,00	55.000.000,00	37,65	42.100.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	146.080.000,00	55.000.000,00	37,65	42.100.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	45.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	45.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.523.432.325,00	1.290.927.572,00	84,74	1.780.906.314,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	506.098.925,00	406.150.572,00	80,25	267.862.004,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	257.178.925,00	217.360.772,00	84,52	170.964.804,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	27.750.000,00	0,00	0,00	21.546.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	48.800.000,00	47.855.000,00	98,06	52.535.200,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.640.000,00	8.500.000,00	98,38	13.716.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	29.930.000,00	26.917.500,00	89,93	4.600.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	13.800.000,00	3.808.000,00	27,59	4.500.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	120.000.000,00	101.709.300,00	84,76	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	892.333.400,00	865.777.000,00	97,02	1.513.044.310,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	468.333.400,00	452.615.000,00	96,64	1.513.044.310,00
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	274.000.000,00	264.774.000,00	96,63	0,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	150.000.000,00	148.388.000,00	98,93	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.000.000,00	19.000.000,00	76,00	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	25.000.000,00	19.000.000,00	76,00	0,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.260.279.612,44	2.179.815.768,00	66,86	2.831.584.821,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.260.279.612,44	2.179.815.768,00	66,86	2.831.584.821,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.260.279.612,44	2.179.815.768,00	66,86	2.831.584.821,00
5.1.03	Belanja Bunga	7.000.000.000,00	5.594.914.153,84	79,93	7.485.321.723,00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	7.000.000.000,00	5.594.914.153,84	79,93	7.485.321.723,00
5.1.03.04.06	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang	7.000.000.000,00	5.594.914.153,84	79,93	7.485.321.723,00
5.1.03.04.06.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang	7.000.000.000,00	5.594.914.153,84	79,93	7.485.321.723,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	91.511.190.151,20	62.603.742.427,84	68,41	58.640.412.648,00
5.2	BELANJA MODAL	1.045.838.400,00	1.009.003.527,00	96,48	1.097.657.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	845.838.400,00	811.412.327,00	95,93	1.080.657.500,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	30.000.000,00	28.993.200,00	96,64	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	30.000.000,00	28.993.200,00	96,64	0,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	30.000.000,00	28.993.200,00	96,64	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	62.238.400,00	45.367.630,00	72,89	871.007.500,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	13.238.400,00	13.220.100,00	99,86	635.183.500,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	13.238.400,00	13.220.100,00	99,86	635.183.500,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	49.000.000,00	32.147.530,00	65,61	235.824.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	213.984.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	40.500.000,00	32.147.530,00	79,38	21.840.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	32.900.000,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	0,00	0,00	32.900.000,00

5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	0,00	0,00	0,00	32.900.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	753.600.000,00	737.051.497,00	97,80	176.750.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	555.000.000,00	552.613.500,00	99,57	66.750.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	555.000.000,00	552.613.500,00	99,57	66.750.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	198.600.000,00	184.437.997,00	92,87	110.000.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	198.600.000,00	184.437.997,00	92,87	110.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	197.591.200,00	98,80	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	200.000.000,00	197.591.200,00	98,80	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	200.000.000,00	197.591.200,00	98,80	0,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	200.000.000,00	197.591.200,00	98,80	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.045.838.400,00	1.009.003.527,00	96,47	1.097.657.500,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	603.038.711,00	12,06	720.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	603.038.711,00	12,06	720.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	603.038.711,00	12,06	720.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	603.038.711,00	12,06	720.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	603.038.711,00	12,06	720.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00	603.038.711,00	12,06	720.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	566.012.401.170,00	558.807.884.166,00	98,73	506.699.877.050,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	38.181.085.729,00	38.181.085.729,00	100,00	22.333.351.461,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	19.556.761.334,00	19.556.761.334,00	100,00	10.211.887.154,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	19.556.761.334,00	19.556.761.334,00	100,00	10.211.887.154,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	19.556.761.334,00	19.556.761.334,00	100,00	10.211.887.154,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	18.624.324.395,00	18.624.324.395,00	100,00	12.121.464.307,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	18.624.324.395,00	18.624.324.395,00	100,00	12.121.464.307,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	18.624.324.395,00	18.624.324.395,00	100,00	12.121.464.307,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	527.831.315.441,00	520.626.798.437,00	98,64	484.366.525.589,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	527.831.315.441,00	520.626.798.437,00	98,64	484.366.525.589,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	527.831.315.441,00	520.626.798.437,00	98,64	484.366.525.589,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	26.772.870.475,00	26.562.870.475,00	99,22	4.420.766.494,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	216.038.404.000,00	209.043.886.996,00	96,76	223.347.712.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	285.020.040.966,00	285.020.040.966,00	100,00	256.598.047.095,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	566.012.401.170,00	558.807.884.166,00	98,72	506.699.877.050,00
	JUMLAH BELANJA	663.569.429.721,20	623.023.668.831,84	93,88	567.157.947.198,00
	SURPLUS/DEFISIT	3.103.680.766.199,83	2.963.764.395.362,64	95,49	3.070.032.357.763,53
6	PEMBIAYAAN DAERAH	632.081.631.766,00	634.271.631.769,37	100,35	654.021.770.083,21
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	650.550.147.898,00	650.550.147.898,41	100,00	660.300.286.213,21
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	650.550.147.898,00	650.550.147.898,41	100,00	560.300.286.213,21
6.1.01.05	Penghematan Belanja	650.550.147.898,00	650.550.147.898,41	100,00	560.300.286.213,21
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	650.550.147.898,00	650.550.147.898,41	100,00	560.300.286.213,21
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	650.550.147.898,00	650.550.147.898,41	100,00	560.300.286.213,21
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	100.000.000.000,00
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	100.000.000.000,00
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	100.000.000.000,00
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	100.000.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	650.550.147.898,00	650.550.147.898,41	100,00	660.300.286.213,21
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.468.516.132,00	16.278.516.129,04	88,14	6.278.516.130,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	12.190.000.000,00	10.000.000.000,00	82,03	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	12.190.000.000,00	10.000.000.000,00	82,03	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	12.190.000.000,00	10.000.000.000,00	82,03	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	12.190.000.000,00	10.000.000.000,00	82,03	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	6.278.516.132,00	6.278.516.129,04	100,00	6.278.516.130,00
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	6.278.516.132,00	6.278.516.129,04	100,00	6.278.516.130,00
6.2.03.01.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	6.278.516.132,00	6.278.516.129,04	100,00	6.278.516.130,00
6.2.03.01.01.0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	6.278.516.132,00	6.278.516.129,04	100,00	6.278.516.130,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.468.516.132,00	16.278.516.129,04	88,14	6.278.516.130,00

	PEMBIAYAAN NETTO	632.081.631.766,00	634.271.631.769,36	100,34	654.021.770.083,20
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	3.735.762.397.965,83	3.598.036.027.132,00	96,31	3.724.054.127.846,73

Kab. Muara Enim, 27 Januari 2026

PLT. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

M. Tarmizi Ismail, S.E., M.Si.
NIP.197109232000031004



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	76.607.558.662,01	67.313.437.067,00	87,87	38.306.018.453,00
5.1	BELANJA OPERASI	22.618.079.557,01	19.472.973.267,00	86,09	15.905.203.453,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.521.182.086,01	6.226.958.035,00	95,49	5.714.382.087,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.334.081.034,01	3.159.526.599,00	94,76	2.888.335.172,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.551.738.205,60	2.457.450.920,00	96,30	2.234.134.802,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.177.884.625,60	2.093.835.120,00	96,14	2.110.473.222,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	373.853.580,00	363.615.800,00	97,26	123.661.580,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	288.665.761,33	253.043.712,00	87,66	238.284.422,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	242.719.357,33	219.029.234,00	90,24	227.593.910,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	45.946.404,00	34.014.478,00	74,03	10.690.512,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	104.826.750,00	102.270.000,00	97,56	98.490.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	104.826.750,00	102.270.000,00	97,56	98.490.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	126.308.700,00	112.896.000,00	89,38	108.216.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	126.308.700,00	112.896.000,00	89,38	108.216.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	93.300.625,00	83.312.500,00	89,29	70.978.700,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	70.063.875,00	60.735.000,00	86,69	63.643.700,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	23.236.750,00	22.577.500,00	97,16	7.335.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	157.888.273,50	145.002.945,00	91,84	133.325.220,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	126.266.080,50	121.013.820,00	95,84	125.503.860,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	31.622.193,00	23.989.125,00	75,86	7.821.360,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	11.295.471,30	5.517.225,00	48,84	4.872.304,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.295.471,30	5.517.225,00	48,84	4.872.304,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	57.247,28	33.297,00	58,16	33.724,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	44.664,38	26.844,00	60,10	30.629,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	12.582,90	6.453,00	51,28	3.095,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.187.101.052,00	3.067.431.436,00	96,25	2.826.046.915,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.516.159.013,00	2.459.931.951,00	97,77	2.251.031.385,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.209.735.465,00	2.197.279.196,00	99,44	2.156.173.250,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	306.423.548,00	262.652.755,00	85,72	94.858.135,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	207.492.376,00	194.553.351,00	93,76	575.015.530,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	207.492.376,00	194.553.351,00	93,76	546.530.955,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	0,00	0,00	0,00	28.484.575,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	463.449.663,00	412.946.134,00	89,10	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	387.934.505,00	341.146.124,00	87,94	0,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	75.515.158,00	71.800.010,00	95,08	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.096.897.471,00	13.246.015.232,00	82,29	10.190.821.366,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.354.539.314,00	1.179.321.825,00	87,06	982.332.821,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.354.539.314,00	1.179.321.825,00	87,06	982.332.821,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	27.275.000,00	1.273.500,00	4,67	4.823.900,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.327.000,00	4.470.000,00	70,65	1.980.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	474.239.242,00	444.906.225,00	93,81	515.553.821,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	140.661.424,00	120.245.100,00	85,49	104.532.100,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.940.000,00	8.460.000,00	77,33	8.300.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	43.220.000,00	27.824.000,00	64,38	23.735.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	35.822.588,00	33.053.000,00	92,27	98.373.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	186.119.060,00	180.030.000,00	96,73	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	135.000.000,00	131.400.000,00	97,33	3.750.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	294.935.000,00	227.660.000,00	77,19	210.965.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	10.320.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	11.417.548.840,00	9.205.767.862,00	80,63	5.327.708.579,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.829.994.447,00	1.495.971.352,00	52,86	1.586.204.109,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	146.250.000,00	138.300.000,00	94,56	175.300.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	12.500.000,00	1.500.000,00	12,00	2.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	106.200.000,00	92.550.000,00	87,15	0,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	8.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	22.600.000,00	20.800.000,00	92,04	12.600.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	45.720.000,00	28.880.000,00	63,17	40.920.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	1.500.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	726.000.000,00	462.499.500,00	63,71	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	97.640.000,00	84.080.000,00	86,11	123.720.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	78.890.000,00	69.680.000,00	88,33	61.920.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	247.687.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	99.500.000,00	86.450.000,00	86,88	0,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	1.020.000.000,00	220.500.000,00	21,62	615.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	5.000.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	20.700.000,00	10.582.000,00	51,12	8.793.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	311.941.497,00	210.329.517,00	67,43	209.459.152,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	28.800.000,00	13.090.000,00	45,45	14.650.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	86.400.000,00	38.691.360,00	44,78	38.510.707,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.252.950,00	8.438.975,00	68,87	12.244.250,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	162.730.636,00	138.892.775,00	85,35	113.025.495,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	162.730.636,00	138.892.775,00	85,35	113.025.495,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	49.140.000,00	25.065.000,00	51,01	176.950.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	17.500.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	27.200.000,00	21.065.000,00	77,44	91.850.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	83.000.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.440.000,00	4.000.000,00	90,09	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.532.415.000,00	1.385.401.000,00	90,41	1.045.065.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	10.270.000,00	9.550.000,00	92,99	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	117.200.000,00	72.600.000,00	61,95	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.404.945.000,00	1.303.251.000,00	92,76	1.045.065.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.172.478.757,00	1.009.587.735,00	86,11	345.123.975,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	1.172.478.757,00	1.009.587.735,00	86,11	345.123.975,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.840.000.000,00	2.540.000.000,00	89,44	1.440.000.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	100.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	60.000.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	2.400.000.000,00	2.100.000.000,00	87,50	1.280.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.830.790.000,00	2.610.850.000,00	92,23	621.340.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.275.530.000,00	1.055.590.000,00	82,76	621.340.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.555.260.000,00	1.555.260.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	381.839.217,00	308.827.803,00	80,88	276.514.090,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	235.047.217,00	172.408.803,00	73,35	194.744.090,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	150.371.400,00	100.573.803,00	66,88	121.184.090,00
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	7.548.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	39.121.417,00	34.585.000,00	88,40	34.210.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	22.688.400,00	22.050.000,00	97,19	23.850.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	15.318.000,00	15.200.000,00	99,23	13.200.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	96.792.000,00	86.580.000,00	89,45	81.770.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	96.792.000,00	86.580.000,00	89,45	81.770.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	50.000.000,00	49.839.000,00	99,68	0,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	50.000.000,00	49.839.000,00	99,68	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.927.970.100,00	2.538.097.742,00	86,68	3.604.265.876,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.927.970.100,00	2.538.097.742,00	86,68	3.604.265.876,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.927.970.100,00	2.538.097.742,00	86,68	3.604.265.876,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	14.000.000,00	93,33	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.000.000,00	14.000.000,00	93,33	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	15.000.000,00	14.000.000,00	93,33	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	22.618.079.557,01	19.472.973.267,00	86,09	15.905.203.453,00
5.2	BELANJA MODAL	53.989.479.105,00	47.840.463.800,00	88,61	22.400.815.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	251.320.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	251.320.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	58.320.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	58.320.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	193.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.689.479.105,00	47.740.619.300,00	88,92	22.149.495.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	53.689.479.105,00	47.740.619.300,00	88,92	22.149.495.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	53.689.479.105,00	47.740.619.300,00	88,92	22.149.495.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	53.689.479.105,00	47.740.619.300,00	88,92	22.149.495.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	99.844.500,00	99,84	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	99.844.500,00	99,84	0,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	100.000.000,00	99.844.500,00	99,84	0,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	100.000.000,00	99.844.500,00	99,84	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	53.989.479.105,00	47.840.463.800,00	88,61	22.400.815.000,00
	JUMLAH BELANJA	76.607.558.662,01	67.313.437.067,00	87,87	38.306.018.453,00
	SURPLUS/DEFISIT	(76.607.558.662,01)	(67.313.437.067,00)	87,87	(38.306.018.453,00)

Kab. Muara Enim, 2 Januari 2026



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



INSPEKTORAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	31.486.041.567,65	22.771.806.318,00	72,32	19.837.098.691,00
5.1	BELANJA OPERASI	26.422.331.967,65	18.215.249.301,00	68,93	18.322.672.191,00
5.1.01	Belanja Pegawai	14.063.260.495,65	12.797.797.627,00	91,00	12.072.029.363,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.736.145.877,65	5.257.013.693,00	91,64	5.264.987.947,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	4.113.308.805,00	3.914.417.540,00	95,16	3.881.344.986,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.023.832.455,00	3.827.123.540,00	95,11	3.881.344.986,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	89.476.350,00	87.294.000,00	97,56	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	483.353.050,80	368.603.252,00	76,25	388.028.340,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	430.943.652,80	364.591.284,00	84,60	388.028.340,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	52.409.398,00	4.011.968,00	7,65	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	160.791.750,00	73.170.000,00	45,50	108.990.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	160.791.750,00	73.170.000,00	45,50	108.990.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	686.545.000,00	649.204.500,00	94,56	640.010.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	686.545.000,00	649.204.500,00	94,56	640.010.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	32.041.500,00	24.115.000,00	75,26	22.075.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	26.096.500,00	18.315.000,00	70,18	22.075.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	5.945.000,00	5.800.000,00	97,56	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	231.153.777,00	209.583.480,00	90,66	206.686.680,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	224.918.415,00	205.238.280,00	91,25	206.686.680,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.235.362,00	4.345.200,00	69,68	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	28.254.965,50	17.860.590,00	63,21	17.797.721,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	28.254.965,50	17.860.590,00	63,21	17.797.721,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	697.029,35	59.331,00	8,51	55.220,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	694.622,65	57.591,00	8,29	55.220,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.406,70	1.740,00	72,29	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.327.114.618,00	7.540.783.934,00	90,55	6.807.041.416,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.858.369.482,00	5.463.404.571,00	93,25	5.458.698.217,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5.795.533.498,00	5.401.759.354,00	93,20	5.458.698.217,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	62.835.984,00	61.645.217,00	98,10	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.231.672.576,00	1.885.279.271,00	84,47	1.348.343.199,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.231.672.576,00	1.885.279.271,00	84,47	1.348.343.199,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	237.072.560,00	192.100.092,00	81,03	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	206.789.176,00	162.454.245,00	78,56	0,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	30.283.384,00	29.645.847,00	97,89	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.359.071.472,00	5.417.451.674,00	43,83	6.250.642.828,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.082.981.765,00	554.673.916,00	51,21	347.904.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.082.981.765,00	554.673.916,00	51,21	347.904.600,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.424.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	388.126.275,00	281.771.234,00	72,59	186.288.700,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12.000.000,00	11.838.150,00	98,65	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	199.171.800,00	107.625.682,00	54,03	62.102.500,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.000.000,00	3.500.000,00	70,00	3.000.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15.746.490,00	12.908.600,00	81,97	10.342.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	15.673.200,00	7.843.000,00	50,04	8.106.400,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	30.000.000,00	29.942.250,00	99,80	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	399.840.000,00	99.245.000,00	24,82	58.065.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.566.202.207,00	1.431.026.838,00	55,76	1.102.503.477,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.421.858.957,00	483.977.838,00	34,03	517.918.027,00

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	501.200.000,00	79.600.000,00	15,88	95.500.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	447.240.000,00	144.090.000,00	32,21	96.060.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	50.800.000,00	47.600.000,00	93,70	64.910.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	35.560.000,00	18.720.000,00	52,64	43.260.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	90.100.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	8.560.000,00	8.560.000,00	100,00	20.330.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	25.680.000,00	25.680.000,00	100,00	38.520.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	5.000.000,00	4.610.000,00	92,20	2.500.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	18.000.000,00	13.456.560,00	74,75	12.628.148,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	12.650.000,00	7.468.000,00	59,03	6.272.250,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	181.347.500,00	112.750.753,00	62,17	111.579.579,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.050.000,00	10.992.000,00	91,21	10.992.000,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	17.490.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	16.181.457,00	10.450.525,00	64,58	10.866.050,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	197.073.250,00	104.795.000,00	53,17	61.007.450,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	197.073.250,00	104.795.000,00	53,17	61.007.450,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	55.270.000,00	45.000.000,00	81,41	10.270.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	10.270.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	10.270.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	100.000.000,00	99.900.000,00	99,90	0,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	100.000.000,00	99.900.000,00	99,90	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	792.000.000,00	697.354.000,00	88,04	513.308.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	792.000.000,00	697.354.000,00	88,04	513.308.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	624.979.000,00	455.190.730,00	72,83	445.274.357,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	439.480.000,00	271.390.730,00	61,75	311.796.142,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	310.860.000,00	180.821.730,00	58,16	242.645.392,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	34.150.750,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	30.500.000,00	24.150.000,00	79,18	21.000.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	50.000.000,00	47.969.000,00	95,93	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	21.900.000,00	14.100.000,00	64,38	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	26.220.000,00	4.350.000,00	16,59	4.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	185.499.000,00	183.800.000,00	99,08	133.478.215,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	185.499.000,00	183.800.000,00	99,08	133.478.215,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	8.084.908.500,00	2.976.560.190,00	36,81	4.354.960.394,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.084.908.500,00	2.976.560.190,00	36,81	4.354.960.394,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.084.908.500,00	2.976.560.190,00	36,81	4.354.960.394,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	26.422.331.967,65	18.215.249.301,00	68,93	18.322.672.191,00
5.2	BELANJA MODAL	5.063.709.600,00	4.556.557.017,00	89,98	1.514.426.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.063.709.600,00	2.930.201.767,00	95,64	1.084.926.500,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00	68.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.120.880.000,00	2.006.230.000,00	94,59	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	2.120.880.000,00	2.006.230.000,00	94,59	0,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.120.880.000,00	2.006.230.000,00	94,59	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	606.998.800,00	603.456.270,00	99,41	791.636.500,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	483.102.000,00	480.438.270,00	99,44	63.024.000,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	90.000.000,00	89.529.270,00	99,47	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	42.684.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	393.102.000,00	390.909.000,00	99,44	20.340.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	123.896.800,00	123.018.000,00	99,29	609.612.500,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	305.576.500,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	8.000.000,00	7.800.000,00	97,50	258.800.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	107.105.600,00	106.560.000,00	99,49	44.500.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	8.791.200,00	8.658.000,00	98,48	736.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	119.000.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	24.500.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	94.500.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	39.970.000,00	39.405.000,00	98,58	7.500.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	29.970.000,00	29.637.000,00	98,88	7.500.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	29.970.000,00	29.637.000,00	98,88	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	10.000.000,00	9.768.000,00	97,68	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	10.000.000,00	9.768.000,00	97,68	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	295.860.800,00	281.110.497,00	95,01	217.790.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	227.500.000,00	219.780.999,00	96,60	140.700.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	227.500.000,00	219.780.999,00	96,60	140.700.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	68.360.800,00	61.329.498,00	89,71	77.090.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	52.560.800,00	46.399.998,00	88,27	77.090.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	15.800.000,00	14.929.500,00	94,49	0,00

5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.000.000.000,00	1.626.355.250,00	81,31	429.500.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	2.000.000.000,00	1.626.355.250,00	81,31	429.500.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	2.000.000.000,00	1.626.355.250,00	81,31	429.500.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.000.000.000,00	1.626.355.250,00	81,31	429.500.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	5.063.709.600,00	4.556.557.017,00	89,98	1.514.426.500,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	31.486.041.567,65	22.771.806.318,00	72,32	19.837.098.691,00
	SURPLUS/DEFISIT	(31.486.041.567,65)	(22.771.806.318,00)	72,32	(19.837.098.691,00)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(31.486.041.567,65)	(22.771.806.318,00)	72,32	(19.837.098.691,00)

Kab. Muara Enim, 24 Februari 2026
KEPALA INSPEKTORAT
Fera Sari, S.H., M.H.
NIP.197110101998032012



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



BADAN PENDAPATAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	196.142.039.329,00	197.155.787.585,33	100,51	128.646.008.950,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	196.142.039.329,00	197.155.787.585,33	100,51	128.646.008.950,00
4.1.01	Pajak Daerah	195.567.613.344,00	196.145.452.042,33	100,29	127.905.669.439,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.300.000.000,00	1.776.398.758,00	136,64	422.539.794,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.031.572.200,00	1.620.616.539,00	157,10	355.319.858,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.031.572.200,00	1.620.616.539,00	157,10	355.319.858,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	214.100.000,00	146.092.219,00	68,23	64.277.436,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	214.100.000,00	146.092.219,00	68,23	64.277.436,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	53.525.000,00	9.690.000,00	18,10	2.515.000,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	53.525.000,00	9.690.000,00	18,10	2.515.000,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	802.800,00	0,00	0,00	427.500,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	802.800,00	0,00	0,00	427.500,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	650.000.000,00	812.191.165,00	124,95	746.705.304,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	650.000.000,00	812.191.165,00	124,95	746.705.304,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	650.000.000,00	812.191.165,00	124,95	746.705.304,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	53.525.000,00	57.110.000,00	106,69	66.572.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	53.525.000,00	57.110.000,00	106,69	66.572.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	53.525.000,00	57.110.000,00	106,69	66.572.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	25.500.000.000,00	23.726.473.907,75	93,04	29.395.307.417,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	25.500.000.000,00	23.726.473.907,75	93,04	29.395.307.417,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	25.500.000.000,00	23.726.473.907,75	93,04	29.395.307.417,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	13.000.000.000,00	14.379.797.565,00	110,61	13.010.845.021,00
4.1.01.15.01	PBBP2	13.000.000.000,00	14.379.797.565,00	110,61	13.010.845.021,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	13.000.000.000,00	14.379.797.565,00	110,61	13.010.845.021,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	14.500.000.000,00	6.100.463.465,00	42,07	14.733.476.432,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	2.189.250.000,00	4.280.078.332,00	195,50	5.209.561.427,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	2.189.250.000,00	4.280.078.332,00	195,50	5.209.561.427,00
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	12.310.750.000,00	1.820.385.133,00	14,78	9.523.915.005,00
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	12.310.750.000,00	1.820.385.133,00	14,78	9.523.915.005,00
4.1.01.18	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	0,00	1.629.276.258,00	0,00	0,00
4.1.01.18.01	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	0,00	1.629.276.258,00	0,00	0,00
4.1.01.18.01.0001	Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan [(I),MBLB]	0,00	1.629.276.258,00	0,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	64.969.255.000,00	77.193.755.882,58	118,81	69.530.223.471,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	18.562.457.800,00	23.453.911.037,58	126,35	19.312.675.901,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	7.563.457.800,00	7.595.044.017,58	100,41	6.900.122.492,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	10.999.000.000,00	15.858.867.020,00	144,18	12.412.553.409,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	42.900.000.000,00	49.766.050.986,00	116,00	46.508.179.251,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	34.500.000.000,00	39.651.959.512,00	114,93	37.719.072.104,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	8.400.000.000,00	10.114.091.474,00	120,40	8.789.107.147,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	2.456.797.200,00	2.651.647.707,00	107,93	2.888.407.395,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	2.410.109.110,00	2.542.787.557,00	105,50	2.739.633.496,00
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen	46.688.090,00	79.393.500,00	170,05	105.193.882,00
4.1.01.19.03.0010	PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel	0,00	29.466.650,00	0,00	43.580.017,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	350.000.000,00	410.130.415,00	117,18	74.633.500,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	350.000.000,00	410.130.415,00	117,18	74.633.500,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	700.000.000,00	912.015.737,00	130,28	746.327.424,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	263.265.900,00	291.886.992,00	110,87	285.565.788,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	100.000.000,00	2.650.000,00	2,65	3.870.000,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	10.000.000,00	4.374.792,00	43,74	7.272.625,00
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	2.000.000,00	18.655.951,00	932,79	2.844.540,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distekotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	324.734.100,00	594.448.002,00	183,05	446.774.471,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	31.706.762.903,00	34.206.709.516,00	107,88	0,00
4.1.01.20.01	Opsen PKB	31.706.762.903,00	34.206.709.516,00	107,88	0,00
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	31.706.762.903,00	34.206.709.516,00	107,88	0,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	43.888.070.441,00	36.263.275.525,00	82,62	0,00
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	43.888.070.441,00	36.263.275.525,00	82,62	0,00
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	43.888.070.441,00	36.263.275.525,00	82,62	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	574.425.985,00	1.010.335.543,00	175,88	740.339.511,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	574.425.985,00	1.010.335.543,00	175,88	740.339.511,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	6.495.208,00

4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	6.495.208,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	515.516.144,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	515.516.144,00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	4.615.364,00
4.1.04.12.08.0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0,00	0,00	0,00	2.161.450,00
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	1.690.650,00
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	0,00	0,00	4.719,00
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	0,00	0,00	758.545,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	20.621.500,00	2.970.794,00	14,40	2.949.450,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	12.967.425,00	2.878.286,00	22,19	2.949.450,00
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	5.352.500,00	92.508,00	1,72	0,00
4.1.04.12.09.0003	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker	2.141.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.09.0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	160.575,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	12.947.908,00
4.1.04.12.10.0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	12.947.908,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	269.265,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	269.265,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.605.750,00	2.745.363,00	170,97	1.066.909,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.605.750,00	2.745.363,00	170,97	1.066.909,00
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	11.135,00	70.300,00	631,34	5.200,00
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	11.135,00	70.300,00	631,34	5.200,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	38.687.616,00	10.065.236,00	26,01	648.684,00
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	38.687.616,00	10.065.236,00	26,01	648.684,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.204.000,00	89.753.720,00	975,15	89.809.598,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	9.204.000,00	89.753.720,00	975,15	89.809.598,00
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	20.577.838,00	76.721.609,00	372,83	106.015.781,00
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	5.612.137,00	74.933.194,00	1.335,19	27.036.599,00
4.1.04.12.16.0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	14.965.701,00	1.788.415,00	11,95	78.979.182,00
4.1.04.12.19	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	231.481.346,00	659.494.841,00	284,90	0,00
4.1.04.12.19.0001	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	177.265.870,00	162.915.490,00	91,90	0,00
4.1.04.12.19.0002	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering	0,00	483.545.670,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0003	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	124.575,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0004	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	36.000,00	1.730.805,00	4.807,79	0,00
4.1.04.12.19.0005	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	1.766.568,00	1.696.714,00	96,04	0,00
4.1.04.12.19.0014	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel	0,00	2.731.267,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0016	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	36.000,00	41.939,00	116,49	0,00
4.1.04.12.19.0019	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	5.225.233,00	1.305.569,00	24,98	0,00
4.1.04.12.19.0025	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan	5.225.233,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0026	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	2.090.094,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0028	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	8.708.722,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.19.0029	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	31.003.051,00	5.527.387,00	17,82	0,00
4.1.04.12.20	Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	245.793.200,00	165.827.680,00	67,46	0,00
4.1.04.12.20.0001	Pendapatan Denda Opsen PKB	245.793.200,00	165.827.680,00	67,46	0,00
4.1.04.12.21	Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.443.600,00	2.686.000,00	41,68	0,00
4.1.04.12.21.0001	Pendapatan Denda Opsen BBNKB	6.443.600,00	2.686.000,00	41,68	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	196.142.039.329,00	197.155.787.585,33	100,51	128.646.008.950,00
5	BELANJA DAERAH	29.385.667.357,70	24.652.896.676,19	83,89	24.274.812.540,34
5.1	BELANJA OPERASI	27.420.831.657,70	22.754.447.676,19	82,98	21.398.648.704,82
5.1.01	Belanja Pegawai	18.371.307.379,20	14.652.490.267,00	79,75	12.071.998.717,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.300.466.270,20	6.223.486.674,00	85,24	4.874.583.387,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5.539.824.590,00	4.990.322.640,00	90,08	3.866.246.658,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	4.314.052.830,00	3.819.783.540,00	88,54	3.843.821.458,00

5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.225.771.760,00	1.170.539.100,00	95,49	22.425.200,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	632.641.681,40	426.841.631,00	67,46	348.110.962,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	462.328.971,00	342.710.659,00	74,12	348.110.962,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	170.312.710,40	84.130.972,00	49,39	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	403.962.750,00	298.620.000,00	73,92	285.710.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	403.962.750,00	298.620.000,00	73,92	285.710.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	85.400.000,00	66.220.000,00	77,54	72.660.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	85.400.000,00	66.220.000,00	77,54	72.660.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	231.292.000,00	168.248.750,00	72,74	95.905.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	151.335.000,00	92.985.000,00	61,44	94.610.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	79.957.000,00	75.263.750,00	94,13	1.295.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	389.576.148,00	267.284.115,00	68,60	201.689.700,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	265.390.332,00	197.923.860,00	74,57	201.182.760,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	124.185.816,00	69.360.255,00	55,85	506.940,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	17.594.609,00	5.875.047,00	33,39	4.205.910,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	17.594.609,00	5.875.047,00	33,39	4.205.910,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	174.491,80	74.491,00	42,69	55.157,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	131.704,00	51.142,00	38,83	54.576,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	42.787,80	23.349,00	54,56	581,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	11.070.841.109,00	8.429.003.593,00	76,13	3.874.975.019,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	0,00	0,00	0,00	3.874.975.019,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	0,00	0,00	0,00	3.857.230.516,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	0,00	0,00	0,00	17.744.503,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	5.699.288.149,00	4.661.165.893,00	81,78	0,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	4.818.835.363,00	3.823.184.348,00	79,33	0,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	880.452.786,00	837.981.545,00	95,17	0,00
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.371.552.960,00	3.767.837.700,00	70,14	0,00
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	41.101.605,00	31.342.230,00	76,25	0,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	25.532.219,00	25.532.219,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet	2.632.288,00	2.632.189,00	99,99	0,00
5.1.01.02.06.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	789.656.239,00	789.656.239,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	628.257.771,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	710.690.625,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	2.764.051.815,00	2.764.051.715,00	99,99	0,00
5.1.01.02.06.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	2.807.704,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	22.909.595,00	18.156.857,00	79,25	0,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	16.901.442,00	9.014.102,00	53,33	0,00
5.1.01.02.06.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	80.269.837,00	42.810.579,00	53,33	0,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	52.172.531,00	5.684.356,00	10,89	0,00
5.1.01.02.06.0038	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal	3.966.203,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	6.021.563,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0042	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	1.152.126,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0043	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	23.584.453,00	11.785.939,00	49,97	0,00
5.1.01.02.06.0048	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	12.000.000,00	1.562.500,00	13,02	0,00
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	100.359.375,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0051	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	75.003.844,00	65.127.050,00	86,83	0,00

5.1.01.02.06.0057	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	481.725,00	481.725,00	100,00	0,00
5.1.01.02.06.0062	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	3.322.440.311,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	3.184.471.586,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	65.775.154,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	417.410.202,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	14.673.009,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	8.419.936,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	931.369.780,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	374.593,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	22.700.428,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	1.811.484,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	0,00	0,00	716.352.780,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	172.500.000,00
5.1.01.03.01.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu ([I],PBJT)	0,00	0,00	0,00	833.084.220,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	137.968.725,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	3.184.761,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	0,00	0,00	2.921.547,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	0,00	0,00	0,00	5.622.788,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	0,00	0,00	0,00	15.282.802,00
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	350.371,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	6.214.556,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	0,00	0,00	0,00	749.294,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	8.492.056,00
5.1.01.03.02.0028	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Usaha Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.400.550,00
5.1.01.03.02.0032	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	0,00	0,00	0,00	93.750.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.049.524.278,50	8.101.957.409,19	89,52	9.326.649.987,82
5.1.02.01	Belanja Barang	1.856.589.703,50	1.593.375.022,00	85,82	1.412.349.023,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.856.589.703,50	1.593.375.022,00	85,82	1.412.349.023,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.623.500,00	22.115.270,00	97,75	34.418.568,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	100.221.130,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	381.699.046,00	336.101.838,00	88,05	292.688.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	991.200,00	980.000,00	98,87	980.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.090.648.085,00	968.988.014,00	88,84	679.322.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	15.934.400,00	7.244.300,00	45,46	24.178.825,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot	107.051.490,00	105.413.000,00	98,46	116.543.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	35.638.280,00	28.666.000,00	80,43	41.949.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	51.900.000,00	42.246.600,00	81,40	8.000.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	903.000,00	900.000,00	99,66	900.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	30.000.000,00	29.970.000,00	99,90	83.028.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	119.200.702,50	50.750.000,00	42,57	30.120.000,00

5.1.02.02	Belanja Jasa	2.643.475.297,00	2.014.487.486,00	76,20	3.139.897.810,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.189.098.797,00	1.704.756.908,00	77,87	2.784.916.722,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.050.000,00	2.450.000,00	60,49	3.550.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	95.250.000,00	0,00	0,00	22.500.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.200.000,00	400.000,00	33,33	0,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	365.360.000,00	319.150.000,00	87,35	590.840.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	980.400.000,00	763.280.000,00	77,85	1.559.120.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	200.000.000,00	146.160.000,00	73,08	124.120.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	58.800.000,00	23.828.920,00	40,52	36.539.065,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	28.750.000,00	7.150.950,00	24,87	7.936.500,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	201.245.150,00	201.194.988,00	99,97	197.963.507,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	30.222.000,00	27.888.000,00	92,27	22.066.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	199.800.000,00	196.000.000,00	98,09	196.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	19.341.647,00	12.574.050,00	65,01	24.281.650,00
5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	2.140.000,00	2.140.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	2.540.000,00	2.540.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	169.736.500,00	126.186.578,00	74,34	160.886.088,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	169.736.500,00	126.186.578,00	74,34	160.886.088,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	10.270.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00	0,00	10.270.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	60.000.000,00	32.620.000,00	54,36	2.560.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	60.000.000,00	32.620.000,00	54,36	2.560.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	224.640.000,00	150.924.000,00	67,18	181.265.000,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	224.640.000,00	150.924.000,00	67,18	181.265.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	1.354.739.278,00	1.346.556.196,19	99,39	639.656.608,82
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	229.739.278,00	228.404.828,00	99,41	114.666.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	120.045.000,00	119.961.286,00	99,93	10.910.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	9.000.000,00	8.472.883,00	94,14	44.300.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	23.334.278,00	23.310.000,00	99,89	20.650.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	10.250.000,00	10.000.000,00	97,56	9.406.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	21.330.000,00	21.069.859,00	98,78	29.400.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	45.780.000,00	45.590.800,00	99,58	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.125.000.000,00	1.118.151.368,19	99,39	524.990.608,82
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.125.000.000,00	1.118.151.368,19	99,39	178.289.117,17
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	197.950.000,00
5.1.02.03.03.0063	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	0,00	0,00	0,00	148.751.491,65
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.194.720.000,00	3.147.538.705,00	98,52	4.134.746.546,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.194.720.000,00	3.147.538.705,00	98,52	4.134.746.546,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.194.720.000,00	3.147.538.705,00	98,52	4.134.746.546,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	27.420.831.657,70	22.754.447.676,19	82,98	21.398.648.704,82
5.2	BELANJA MODAL	1.964.835.700,00	1.898.449.000,00	96,62	2.876.163.835,52
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.964.835.700,00	1.898.449.000,00	96,62	2.448.534.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.100.000.000,00	1.055.200.000,00	95,92	608.200.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.100.000.000,00	1.055.200.000,00	95,92	608.200.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	608.200.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.100.000.000,00	1.055.200.000,00	95,92	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	654.985.700,00	636.781.500,00	97,22	716.404.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	149.000.000,00	136.743.750,00	91,77	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	104.000.000,00	93.307.500,00	89,71	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	45.000.000,00	43.436.250,00	96,52	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	505.985.700,00	500.037.750,00	98,82	716.404.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	414.985.700,00	409.947.750,00	98,78	630.804.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	91.000.000,00	90.090.000,00	99,00	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	85.600.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	699.300.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	699.300.000,00

5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	699.300.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	209.850.000,00	206.467.500,00	98,38	424.630.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	149.850.000,00	149.295.000,00	99,62	89.280.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	149.850.000,00	149.295.000,00	99,62	89.280.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	60.000.000,00	57.172.500,00	95,28	335.350.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	60.000.000,00	57.172.500,00	95,28	205.900.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	129.450.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	377.980.235,52
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	377.980.235,52
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	377.980.235,52
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	188.985.338,59
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	188.994.896,93
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	49.649.600,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	0,00	0,00	0,00	49.649.600,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	49.649.600,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	0,00	0,00	49.649.600,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.964.835.700,00	1.898.449.000,00	96,62	2.876.163.835,52
	JUMLAH BELANJA	29.385.667.357,70	24.652.896.676,19	83,89	24.274.812.540,34
	SURPLUS/DEFISIT	166.756.371.971,30	172.502.890.909,14	103,45	104.371.196.409,66

Kab. Muara Enim, 5 Februari 2026
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Feri Sonevel, SE
NIP.196811161989031004



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	11.456.435.862,00	8.687.275.637,00	75,82	7.777.197.505,00
5.1	BELANJA OPERASI	11.115.481.402,00	8.379.948.032,00	75,38	7.137.876.583,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.380.853.191,00	3.405.359.325,00	77,73	2.625.419.714,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.601.200.882,00	1.848.832.059,00	71,07	1.430.291.480,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.764.317.839,00	1.383.115.800,00	78,39	1.025.799.858,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	217.587.978,00	118.361.223,00	54,39	97.544.664,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	108.147.750,00	94.710.000,00	87,57	81.175.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	309.960.000,00	137.900.000,00	44,48	150.150.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	50.207.375,00	36.637.500,00	72,97	15.800.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	136.797.017,00	69.885.300,00	51,08	54.604.680,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	14.088.575,00	8.201.305,00	58,21	5.201.189,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	94.348,00	20.931,00	22,18	16.089,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.779.652.309,00	1.556.527.266,00	87,46	1.195.128.234,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.779.652.309,00	1.556.527.266,00	87,46	1.195.128.234,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.734.628.211,00	4.974.588.707,00	73,86	4.512.456.869,00
5.1.02.01	Belanja Barang	1.186.574.142,00	856.808.597,00	72,20	861.701.800,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.186.574.142,00	856.808.597,00	72,20	861.701.800,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.717.401.669,00	1.886.355.541,00	69,41	1.997.706.687,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.319.231.969,00	1.572.345.460,00	67,79	1.839.159.797,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	55.814.700,00	55.724.121,00	99,83	54.531.890,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	212.450.000,00	148.050.960,00	69,68	19.300.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	46.905.000,00	30.500.000,00	65,02	48.340.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	83.000.000,00	79.735.000,00	96,06	36.375.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	694.033.900,00	670.780.700,00	96,64	322.696.722,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	94.033.900,00	72.580.700,00	77,18	177.554.549,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	600.000.000,00	598.200.000,00	99,70	145.142.173,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.943.118.500,00	1.400.643.869,00	72,08	1.250.351.660,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.943.118.500,00	1.400.643.869,00	72,08	1.250.351.660,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	193.500.000,00	160.000.000,00	82,68	80.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	193.500.000,00	160.000.000,00	82,68	80.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	11.115.481.402,00	8.379.948.032,00	75,38	7.137.876.583,00
5.2	BELANJA MODAL	340.954.460,00	307.327.605,00	90,13	639.320.922,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	340.954.460,00	307.327.605,00	90,13	390.471.422,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	36.000.000,00	35.700.000,00	99,16	0,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	36.000.000,00	35.700.000,00	99,16	0,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	60.511.822,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	60.511.822,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	145.327.960,00	115.940.555,00	79,77	271.525.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	65.000.000,00	37.075.055,00	57,03	198.700.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	62.327.960,00	61.327.500,00	98,39	72.825.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	18.000.000,00	17.538.000,00	97,43	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	46.614.000,00	45.143.700,00	96,84	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	45.489.000,00	44.178.000,00	97,11	0,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	1.125.000,00	965.700,00	85,84	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	113.012.500,00	110.543.350,00	97,81	58.434.600,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	97.700.000,00	95.404.500,00	97,65	48.354.600,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	15.312.500,00	15.138.850,00	98,86	10.080.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	199.300.000,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	199.300.000,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	0,00	0,00	0,00	199.300.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	49.549.500,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	49.549.500,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	49.549.500,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	340.954.460,00	307.327.605,00	90,13	639.320.922,00
	JUMLAH BELANJA	11.456.435.862,00	8.687.275.637,00	75,82	7.777.197.505,00
	SURPLUS/DEFISIT	(11.456.435.862,00)	(8.687.275.637,00)	75,83	(7.777.197.505,00)

Kab. Muara Enim, 6 Februari 2026
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Panca Surya Diharta, SH



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	4.441.345.666,13	4.050.798.641,00	91,20	4.179.915.281,87
5.1	BELANJA OPERASI	3.698.366.778,13	3.312.148.641,00	89,55	3.320.591.672,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.650.033.123,00	2.266.374.804,00	85,52	2.024.439.558,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.504.763.466,75	1.263.776.319,00	83,98	1.101.474.173,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.152.028.261,75	969.406.860,00	84,14	844.174.964,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	141.721.885,00	113.641.871,00	80,18	99.304.166,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	83.580.000,00	77.640.000,00	92,89	77.990.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.085.625,00	5.040.000,00	99,10	5.040.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	35.489.504,00	30.108.750,00	84,83	18.895.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	83.904.576,00	67.423.020,00	80,35	55.111.620,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.910.052,00	501.448,00	17,23	946.701,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	43.563,00	14.370,00	32,98	11.722,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.145.269.656,25	1.002.598.485,00	87,54	920.925.385,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.145.269.656,25	1.002.598.485,00	87,54	920.925.385,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.048.333.655,13	1.045.773.837,00	99,75	1.296.152.114,00
5.1.02.01	Belanja Barang	396.028.255,13	395.129.950,00	99,77	461.765.050,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	396.028.255,13	395.129.950,00	99,77	461.765.050,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	349.482.300,00	348.133.365,00	99,61	475.031.796,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	251.001.800,00	250.053.389,00	99,62	319.981.809,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	7.400.500,00	6.999.976,00	94,58	6.999.987,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.580.000,00	9.580.000,00	100,00	45.300.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	47.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	69.500.000,00	69.500.000,00	100,00	55.250.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	50.357.500,00	50.188.000,00	99,66	45.421.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	50.357.500,00	50.188.000,00	99,66	45.421.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	207.215.600,00	207.072.522,00	99,93	289.584.268,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	207.215.600,00	207.072.522,00	99,93	289.584.268,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.250.000,00	45.250.000,00	100,00	24.350.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	36.500.000,00	36.500.000,00	100,00	15.600.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	8.750.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.698.366.778,13	3.312.148.641,00	89,55	3.320.591.672,00
5.2	BELANJA MODAL	742.978.888,00	738.650.000,00	99,41	859.323.609,87
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.000.000,00	176.150.000,00	98,96	430.268.880,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	49.000.000,00	48.500.000,00	98,97	103.720.880,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	18.000.000,00	17.960.000,00	99,77	27.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	31.000.000,00	30.540.000,00	98,51	76.720.880,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	90.750.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	90.750.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	129.000.000,00	127.650.000,00	98,95	235.798.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	115.000.000,00	113.950.000,00	99,08	142.790.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	14.000.000,00	13.700.000,00	97,85	93.008.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	401.678.888,00	399.700.000,00	99,50	429.054.729,87
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	401.678.888,00	399.700.000,00	99,50	429.054.729,87
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	401.678.888,00	399.700.000,00	99,50	429.054.729,87
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	163.300.000,00	162.800.000,00	99,69	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	163.300.000,00	162.800.000,00	99,69	0,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	163.300.000,00	162.800.000,00	99,69	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	742.978.888,00	738.650.000,00	99,41	859.323.609,87
	JUMLAH BELANJA	4.441.345.666,13	4.050.798.641,00	91,20	4.179.915.281,87
	SURPLUS/DEFISIT	(4.441.345.666,13)	(4.050.798.641,00)	91,21	(4.179.915.281,87)

Kab. Muara Enim, 5 Februari 2026
KEPALA KECAMATAN SEMENDE DARAT ULU

Dani Rapiko, SSTP.
NIP.198308302001121001



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



KECAMATAN SEMENDE DARAT TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	4.628.419.286,00	4.351.017.490,00	94,01	3.552.539.576,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.701.619.286,00	3.428.639.490,00	92,63	3.037.509.576,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.935.692.714,00	1.746.224.044,00	90,21	1.264.291.568,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.765.926.572,00	1.682.415.446,00	95,27	1.773.218.008,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.701.619.286,00	3.428.639.490,00	92,63	3.037.509.576,00
5.2	BELANJA MODAL	926.800.000,00	922.378.000,00	99,52	515.030.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	287.800.000,00	287.478.000,00	99,89	394.680.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	639.000.000,00	634.900.000,00	99,36	120.350.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	926.800.000,00	922.378.000,00	99,52	515.030.000,00
	JUMLAH BELANJA	4.628.419.286,00	4.351.017.490,00	94,01	3.552.539.576,00
	SURPLUS/DEFISIT	(4.628.419.286,00)	(4.351.017.490,00)	94,01	(3.552.539.576,00)

Kab. Muara Enim, 23 Januari 2026



Kecamatan SEMENDE DARAT TENGAH

Zulpikar, S.Ag., M.M.
NIP. 197601212007011007



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM KECAMATAN SEMENDE DARAT LAUT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	4.380.593.603,50	3.759.356.243,00	85,81	3.445.742.273,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.403.570.403,50	2.785.183.043,00	81,83	2.676.890.373,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.356.252.254,50	1.839.300.988,00	78,06	1.431.427.614,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.417.624.012,50	978.363.369,00	69,01	713.863.829,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.099.429.366,40	776.363.660,00	70,61	551.475.690,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	810.998.860,00	534.875.760,00	65,95	529.050.490,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	288.430.506,40	241.487.900,00	83,72	22.425.200,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	120.617.699,10	75.315.010,00	62,44	62.983.462,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	83.505.807,00	60.122.698,00	71,99	62.983.462,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	37.111.892,10	15.192.312,00	40,93	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	84.952.000,00	53.340.000,00	62,78	53.500.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	84.952.000,00	53.340.000,00	62,78	53.500.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.166.000,00	5.040.000,00	97,56	7.380.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.166.000,00	5.040.000,00	97,56	7.380.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	30.637.250,00	25.808.750,00	84,23	8.925.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	13.058.500,00	10.185.000,00	77,99	7.630.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	17.578.750,00	15.623.750,00	88,87	1.295.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	71.820.028,00	40.899.195,00	56,94	28.171.380,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	45.839.353,00	27.447.180,00	59,87	27.664.440,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	25.980.675,00	13.452.015,00	51,77	506.940,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.966.207,00	1.585.292,00	31,92	1.422.604,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.966.207,00	1.585.292,00	31,92	1.422.604,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	35.462,00	11.462,00	32,32	5.693,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	26.026,00	7.287,00	27,99	5.112,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.436,00	4.175,00	44,24	581,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	938.628.242,00	860.937.619,00	91,72	714.843.785,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	938.628.242,00	860.937.619,00	91,72	714.843.785,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	765.441.110,00	688.229.311,00	89,91	697.227.242,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	173.187.132,00	172.708.308,00	99,72	17.616.543,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	2.720.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.047.318.149,00	945.882.055,00	90,31	1.245.462.759,00
5.1.02.01	Belanja Barang	389.689.864,00	382.663.700,00	98,19	450.781.700,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	389.689.864,00	382.663.700,00	98,19	450.781.700,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	25.999.166,00	25.460.000,00	97,92	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	15.730.200,00	15.577.000,00	99,02	15.680.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	36.922.750,00	36.922.000,00	99,99	31.450.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	34.207.173,00	33.089.000,00	96,73	58.497.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.894.975,00	11.708.200,00	90,79	12.239.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	4.900.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.824.700,00	8.768.000,00	99,35	13.955.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	70.603.400,00	70.420.000,00	99,74	70.538.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	13.145.000,00	12.905.000,00	98,17	13.145.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	97.362.500,00	93.814.500,00	96,35	161.377.700,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	51.000.000,00	51.000.000,00	100,00	51.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	481.235.885,00	388.202.293,00	80,66	537.252.522,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	335.535.885,00	265.252.293,00	79,05	337.802.522,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	2.100.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	107.000.000,00	84.530.000,00	79,00	128.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	30.480.000,00	20.320.000,00	66,66	30.480.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	60.960.000,00	45.720.000,00	75,00	60.960.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.475.000,00	5.475.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25.680.000,00	17.120.000,00	66,66	25.680.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	25.680.000,00	17.120.000,00	66,66	25.680.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	34.000.000,00	34.000.000,00	100,00	34.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	5.000.000,00	4.500.000,00	90,00	4.500.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	15.000.010,00	14.627.293,00	97,51	14.102.522,00

5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.160.000,00	2.160.000,00	100,00	1.900.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.420.875,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.080.000,00	4.080.000,00	4.080.000,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.550.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	11.550.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	23.350.000,00	23.350.000,00	100,00	79.350.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	74.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.350.000,00	5.350.000,00	100,00	5.350.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	9.000.000,00	75,00	52.500.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00	40.500.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	12.000.000,00	9.000.000,00	75,00	12.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	98.800.000,00	90.600.000,00	91,70	67.600.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	98.800.000,00	90.600.000,00	91,70	67.600.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	38.760.000,00	38.484.000,00	99,28	68.500.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.760.000,00	38.484.000,00	99,28	68.500.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	30.000.000,00	29.724.000,00	99,08	59.800.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.760.000,00	8.760.000,00	100,00	8.700.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	104.132.400,00	104.082.062,00	99,95	155.428.537,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	104.132.400,00	104.082.062,00	99,95	155.428.537,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	104.132.400,00	104.082.062,00	99,95	155.428.537,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	33.500.000,00	32.450.000,00	96,86	33.500.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	33.500.000,00	32.450.000,00	96,86	33.500.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	33.500.000,00	32.450.000,00	96,86	33.500.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.403.570.403,50	2.785.183.043,00	81,83	2.676.890.373,00
5.2	BELANJA MODAL	977.023.200,00	974.173.200,00	99,70	768.851.900,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.023.200,00	52.023.200,00	100,00	270.849.900,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	248.021.900,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	248.021.900,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	169.151.900,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	61.870.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	25.023.200,00	25.023.200,00	100,00	5.328.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	25.023.200,00	25.023.200,00	100,00	5.328.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	10.038.200,00	10.038.200,00	100,00	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	14.985.000,00	14.985.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	5.328.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	925.000.000,00	922.150.000,00	99,69	498.002.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	925.000.000,00	922.150.000,00	99,69	498.002.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	625.000.000,00	623.350.000,00	99,73	498.002.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	625.000.000,00	623.350.000,00	99,73	249.500.000,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	173.652.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	0,00	0,00	0,00	74.850.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	300.000.000,00	298.800.000,00	99,60	0,00
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	225.000.000,00	224.000.000,00	99,55	0,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	75.000.000,00	74.800.000,00	99,73	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	977.023.200,00	974.173.200,00	99,70	768.851.900,00
	JUMLAH BELANJA	4.380.593.603,50	3.759.356.243,00	85,81	3.445.742.273,00
	SURPLUS/DEFISIT	(4.380.593.603,50)	(3.759.356.243,00)	85,82	(3.445.742.273,00)

Kab. Muara Enim, 4 Februari 2026

KEPALA KECAMATAN SEMENDE DARAT LAUT

Hasbullah Yusuf, S.H.
NIP.197409011993031001



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM KECAMATAN TANJUNG AGUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	5.043.617.972,15	4.834.759.646,40	95,86	4.435.020.883,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.183.185.936,15	3.986.436.646,40	95,30	3.500.536.333,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.223.952.006,16	2.065.011.574,40	92,85	1.636.255.870,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.207.015.772,16	1.099.137.018,40	91,06	852.843.509,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	943.390.462,28	879.759.960,00	93,26	677.388.612,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	654.754.309,94	618.748.060,00	94,50	613.316.612,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	288.636.152,34	261.011.900,00	90,43	64.072.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	97.149.041,45	76.354.155,40	78,59	64.974.656,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	57.822.614,48	55.208.625,40	95,48	56.837.512,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	39.326.426,97	21.145.530,00	53,77	8.137.144,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	65.167.329,13	61.600.000,00	94,53	54.040.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	65.167.329,13	61.600.000,00	94,53	54.040.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	34.916.437,51	32.168.750,00	92,13	18.745.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	16.674.000,00	15.435.000,00	92,57	15.045.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	18.242.437,51	16.733.750,00	91,73	3.700.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	65.213.196,98	48.521.400,00	74,40	36.861.780,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	34.037.220,00	32.226.900,00	94,68	32.009.640,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	31.175.976,98	16.294.500,00	52,27	4.852.140,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	758.152,57	722.050,00	95,24	824.586,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	758.152,57	722.050,00	95,24	824.586,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	421.152,24	10.703,00	2,54	8.875,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.370,45	7.297,00	64,18	7.760,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	409.781,79	3.406,00	0,83	1.115,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.016.936.234,00	965.874.556,00	94,98	777.992.361,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.016.936.234,00	965.874.556,00	94,98	777.992.361,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	811.336.234,00	779.087.702,00	96,03	727.636.628,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	205.600.000,00	186.786.854,00	90,85	50.355.733,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	5.420.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	5.420.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	5.420.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.959.233.929,99	1.921.425.072,00	98,07	1.864.280.463,00
5.1.02.01	Belanja Barang	829.169.116,00	816.160.000,00	98,43	808.265.362,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	829.169.116,00	816.160.000,00	98,43	808.265.362,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	54.136.100,00	54.094.000,00	99,92	59.387.500,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	19.646.000,00	11.950.000,00	60,83	18.120.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	16.540.000,00	16.500.000,00	99,76	19.555.862,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	87.062.536,00	86.742.000,00	99,63	84.725.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	54.560.200,00	54.510.000,00	99,91	59.836.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.480.000,00	4.480.000,00	100,00	4.480.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	18.444.180,00	18.420.000,00	99,87	23.000.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	62.257.600,00	62.220.000,00	99,94	68.924.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	39.000.000,00	38.925.000,00	99,81	26.802.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	70.500.000,00	70.485.000,00	99,98	9.800.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	3.408.000,00	3.404.000,00	99,88	5.487.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	245.249.500,00	244.349.000,00	99,63	251.813.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.389.000,00	1.380.000,00	99,35	0,00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	8.442.000,00	8.400.000,00	99,50	8.400.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	34.474.000,00	30.721.000,00	89,11	34.055.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	14.050.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	34.000.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	3.750.000,00	3.750.000,00	100,00	0,00

5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	75.830.000,00	75.830.000,00	100,00	75.830.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	557.085.660,00	537.070.198,00	96,41	603.709.473,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	295.751.160,00	283.378.598,00	95,82	371.225.473,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	23.850.000,00	21.600.000,00	90,57	9.600.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	23.800.000,00	23.800.000,00	100,00	21.700.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	60.990.000,00	60.990.000,00	100,00	108.070.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.720.000,00	18.720.000,00	100,00	28.080.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	25.680.000,00	25.680.000,00	100,00	38.920.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	7.250.000,00	7.250.000,00	100,00	11.310.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	23.540.000,00	19.260.000,00	81,82	43.870.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.190.000,00	17.120.000,00	94,12	38.520.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	19.500.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	10.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	800.000,00	800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.005.000,00	352.500,00	35,07	395.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	37.106.160,00	34.199.223,00	92,17	33.077.473,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.200.000,00	2.986.875,00	71,12	6.783.000,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.480.000,00	7.480.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	2.140.000,00	2.140.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	5.484.500,00	5.170.000,00	94,27	5.184.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	5.484.500,00	5.170.000,00	94,27	5.184.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	73.650.000,00	70.500.000,00	95,72	72.300.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	54.400.000,00	54.400.000,00	100,00	60.200.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	19.250.000,00	16.100.000,00	83,64	12.100.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	57.000.000,00	57.000.000,00	100,00	48.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	48.000.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	125.200.000,00	121.021.600,00	96,66	107.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	86.200.000,00	85.800.000,00	99,54	16.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	0,00	0,00	0,00	83.500.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	39.000.000,00	35.221.600,00	90,31	7.500.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	39.189.264,00	39.096.537,00	99,76	30.040.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	39.189.264,00	39.096.537,00	99,76	30.040.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.979.264,00	8.951.537,00	99,69	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.550.000,00	2.550.000,00	100,00	2.500.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.000.000,00	11.955.000,00	99,63	13.040.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	15.660.000,00	15.640.000,00	99,87	8.000.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	431.639.889,99	426.948.337,00	98,91	371.615.628,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	431.639.889,99	426.948.337,00	98,91	371.615.628,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	431.639.889,99	426.948.337,00	98,91	371.615.628,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	102.150.000,00	102.150.000,00	100,00	50.650.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	59.750.000,00	59.750.000,00	100,00	50.650.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	59.750.000,00	59.750.000,00	100,00	50.650.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	42.400.000,00	42.400.000,00	100,00	0,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	42.400.000,00	42.400.000,00	100,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	4.183.185.936,15	3.986.436.646,40	95,30	3.500.536.333,00
5.2	BELANJA MODAL	860.432.036,00	848.323.000,00	98,59	934.484.550,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	296.233.200,00	292.147.000,00	98,62	453.274.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	92.233.200,00	90.800.000,00	98,45	249.650.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	15.000.000,00	14.700.000,00	98,00	4.000.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	15.000.000,00	14.700.000,00	98,00	4.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	77.233.200,00	76.100.000,00	98,53	245.650.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	32.833.200,00	32.400.000,00	98,68	124.400.000,00

5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	17.400.000,00	16.800.000,00	96,55	46.750.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.000.000,00	26.900.000,00	99,63	74.500.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	204.000.000,00	201.347.000,00	98,70	178.624.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	162.000.000,00	161.300.000,00	99,57	128.640.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	162.000.000,00	161.300.000,00	99,57	128.640.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	42.000.000,00	40.047.000,00	95,35	49.984.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	42.000.000,00	40.047.000,00	95,35	49.984.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	528.320.000,00	521.100.000,00	98,63	481.210.550,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	433.320.000,00	426.900.000,00	98,52	422.210.550,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	273.320.000,00	271.900.000,00	99,48	301.210.550,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	273.320.000,00	271.900.000,00	99,48	184.248.000,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00	60.962.550,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	56.000.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	160.000.000,00	155.000.000,00	96,88	121.000.000,00
5.2.03.01.02.0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	160.000.000,00	155.000.000,00	96,88	121.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	95.000.000,00	94.200.000,00	99,16	59.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	95.000.000,00	94.200.000,00	99,16	59.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	95.000.000,00	94.200.000,00	99,16	59.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.878.836,00	35.076.000,00	97,76	0,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	35.878.836,00	35.076.000,00	97,76	0,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	35.878.836,00	35.076.000,00	97,76	0,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	35.878.836,00	35.076.000,00	97,76	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	860.432.036,00	848.323.000,00	98,59	934.484.550,00
	JUMLAH BELANJA	5.043.617.972,15	4.834.759.646,40	95,86	4.435.020.883,00
	SURPLUS/DEFISIT	-5.043.617.972,15	-4.834.759.646,40	95,86	-4.435.020.883,00

Kab. Muara Enim, 22 Januari 2026
KEPALA KECAMATAN TANJUNG AGUNG

H. CHOLID TRI AQUARIAN, S. STP., M.Si.
NIP.197901291998021001



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



KECAMATAN LAWANG KIDUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	9.398.712.856,10	8.234.190.337,00	87,61	8.130.630.251,00
5.1	BELANJA OPERASI	8.223.912.856,10	7.068.069.837,00	85,95	7.649.730.251,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.072.867.327,10	4.013.141.474,00	79,11	3.344.581.868,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.104.466.781,10	2.333.745.559,00	75,17	1.877.030.529,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.314.148.874,50	1.823.865.160,00	78,81	1.454.232.311,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.910.296.322,00	1.430.583.960,00	74,89	1.412.585.518,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	403.852.552,50	393.281.200,00	97,38	41.646.793,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	277.347.311,60	198.455.750,00	71,55	169.775.108,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	219.487.054,00	168.191.750,00	76,63	163.944.556,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	57.860.257,60	30.264.000,00	52,31	5.830.552,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	186.345.000,00	149.100.000,00	80,01	139.275.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	186.345.000,00	149.100.000,00	80,01	139.275.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	61.808.375,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	61.808.375,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	80.028.560,05	45.555.000,00	56,92	23.725.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	44.445.224,00	19.085.000,00	42,94	21.320.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	35.583.336,05	26.470.000,00	74,39	2.405.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	172.620.968,95	113.554.560,00	65,78	87.483.360,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	126.939.332,00	87.193.680,00	68,69	83.717.520,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	45.681.636,95	26.360.880,00	57,71	3.765.840,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	12.059.000,00	3.190.087,00	26,45	2.518.507,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	12.059.000,00	3.190.087,00	26,45	2.518.507,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	108.691,00	25.002,00	23,00	21.243,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	63.775,00	18.622,00	29,20	20.308,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	44.916,00	6.380,00	14,20	935,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.968.400.546,00	1.679.395.915,00	85,32	1.465.751.339,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.968.400.546,00	1.679.395.915,00	85,32	1.465.751.339,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.643.356.546,00	1.402.813.234,00	85,36	1.431.992.878,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	325.044.000,00	276.582.681,00	85,09	33.758.461,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.151.045.529,00	3.054.928.363,00	96,95	4.305.148.383,00
5.1.02.01	Belanja Barang	601.049.823,00	599.004.900,00	99,66	1.598.876.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	601.049.823,00	599.004.900,00	99,66	1.598.876.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	12.366.000,00	12.366.000,00	100,00	40.262.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	123.675.188,18	123.656.900,00	99,99	143.025.100,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	18.134.465,82	18.104.000,00	99,83	19.313.200,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.726.500,00	6.726.000,00	99,99	6.000.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	21.803.000,00	21.803.000,00	100,00	17.116.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	134.898.419,00	134.895.000,00	100,00	344.950.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	682.890.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	155.571.250,00	153.579.000,00	98,72	177.444.700,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00	0,00	76.000.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00	22.750.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	69.125.000,00	69.125.000,00	100,00	69.125.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.076.335.500,00	1.984.777.603,00	95,59	2.262.341.626,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.791.535.500,00	1.718.563.803,00	95,93	2.009.007.626,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00	19.500.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	306.250.000,00	306.250.000,00	100,00	293.400.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.163.640.000,00	1.163.640.000,00	100,00	1.284.060.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	89.580.000,00	65.580.000,00	73,21	127.560.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	48.940.000,00	36.170.000,00	73,91	91.800.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	10.700.000,00	8.560.000,00	80,00	12.840.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	38.780.000,00	24.610.000,00	63,46	64.200.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	60.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	19.200.000,00	6.854.855,00	35,70	13.055.074,00

5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.800.000,00	1.773.199,00	98,51	1.751.100,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	40.776.000,00	35.405.038,00	86,83	34.841.452,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.369.500,00	2.220.711,00	50,82	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.000.000,00	10.413.800,00	86,78	5.184.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	12.000.000,00	10.413.800,00	86,78	5.184.000,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	15.000.000,00	12.000.000,00	80,00	0,00
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	15.000.000,00	12.000.000,00	80,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	26.300.000,00	26.300.000,00	100,00	45.050.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	26.300.000,00	26.300.000,00	100,00	15.050.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	231.500.000,00	217.500.000,00	93,95	203.100.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	172.000.000,00	172.000.000,00	100,00	195.600.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	19.500.000,00	19.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	40.000.000,00	26.000.000,00	65,00	7.500.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	22.237.500,00	22.237.500,00	100,00	41.250.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.237.500,00	22.237.500,00	100,00	26.250.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	22.237.500,00	22.237.500,00	100,00	24.450.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	451.422.706,00	448.908.360,00	99,44	402.680.757,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	451.422.706,00	448.908.360,00	99,44	402.680.757,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	451.422.706,00	448.908.360,00	99,44	402.680.757,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	8.223.912.856,10	7.068.069.837,00	85,95	7.649.730.251,00
5.2	BELANJA MODAL	1.174.800.000,00	1.166.120.500,00	99,26	480.900.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.000.000,00	77.430.500,00	99,27	132.300.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	87.300.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	87.300.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	87.300.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	10.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	10.000.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	10.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	70.000.000,00	69.430.500,00	99,19	30.000.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	45.000.000,00	44.733.000,00	99,41	22.500.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	45.000.000,00	44.733.000,00	99,41	22.500.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	25.000.000,00	24.697.500,00	98,79	7.500.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	25.000.000,00	24.697.500,00	98,79	7.500.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	996.800.000,00	989.090.000,00	99,23	348.600.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	996.800.000,00	989.090.000,00	99,23	348.600.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	996.800.000,00	989.090.000,00	99,23	348.600.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	996.800.000,00	989.090.000,00	99,23	348.600.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.000.000,00	99.600.000,00	99,60	0,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	100.000.000,00	99.600.000,00	99,60	0,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	100.000.000,00	99.600.000,00	99,60	0,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	100.000.000,00	99.600.000,00	99,60	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.174.800.000,00	1.166.120.500,00	99,26	480.900.000,00
	JUMLAH BELANJA	9.398.712.856,10	8.234.190.337,00	87,61	8.130.630.251,00
	SURPLUS/DEFISIT	(9.398.712.856,10)	(8.234.190.337,00)	87,61	(8.130.630.251,00)

Kab. Muara Enim, 13 Januari 2026
PLT. KEPALA KECAMATAN LAWANG KIDUL

Yudha Pratama, SSTP., M.M.
NIP.198601152004121001



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM

KECAMATAN MUARA ENIM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	14.657.744.360,00	13.014.833.157,00	88,79	12.719.893.907,00
5.1	BELANJA OPERASI	13.109.734.360,00	11.476.223.157,00	87,53	11.076.313.907,00
5.1.01	Belanja Pegawai	6.904.795.925,10	5.706.988.323,00	82,65	4.743.852.808,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.049.822.944,10	3.387.736.507,00	83,65	2.784.100.766,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.044.035.981,00	2.735.232.407,00	89,85	2.240.888.068,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.492.143.911,00	2.215.219.360,00	88,88	2.196.037.668,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	551.892.070,00	520.013.047,00	94,22	44.850.400,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	362.023.626,00	217.912.366,00	60,19	189.387.574,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	282.676.376,20	184.957.570,00	65,43	184.005.526,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	79.347.249,80	32.954.796,00	41,53	5.382.048,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	264.202.000,00	209.460.000,00	79,28	186.460.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	264.202.000,00	209.460.000,00	79,28	186.460.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	124.040.000,00	74.706.850,00	60,22	47.135.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	84.232.625,00	38.750.000,00	46,00	44.545.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	39.807.375,00	35.956.850,00	90,32	2.590.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	229.986.023,00	148.098.900,00	64,39	118.261.860,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	168.687.924,00	117.030.720,00	69,37	115.220.220,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	61.298.099,00	31.068.180,00	50,68	3.041.640,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	25.440.733,00	2.289.774,00	9,00	1.936.673,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	25.440.733,00	2.289.774,00	9,00	1.936.673,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	94.581,10	36.210,00	38,28	31.591,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	69.668,80	28.517,00	40,93	30.987,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	24.912,30	7.693,00	30,88	604,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.854.972.981,00	2.319.251.816,00	81,23	1.959.752.042,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.854.972.981,00	2.319.251.816,00	81,23	1.959.752.042,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.477.069.623,00	1.959.427.697,00	79,10	1.927.158.937,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	377.903.358,00	359.824.119,00	95,21	32.593.105,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.204.938.434,90	5.769.234.834,00	92,97	6.332.461.099,00
5.1.02.01	Belanja Barang	2.498.033.434,90	2.370.113.390,00	94,87	2.604.627.400,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	2.498.033.434,90	2.370.113.390,00	94,87	2.604.627.400,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	45.500.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	110.000.000,00	103.617.000,00	94,19	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	29.845.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	314.225.163,00	281.493.590,00	89,58	354.793.200,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	142.315.451,90	138.609.600,00	97,39	127.704.500,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	8.700.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	55.642.720,00	49.559.900,00	89,06	62.274.700,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	7.012.500,00	6.990.000,00	99,67	14.574.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	33.600.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.050.000.000,00	1.033.590.000,00	98,43	1.182.690.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	482.589.000,00	444.003.700,00	92,00	533.455.500,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	219.600.000,00	198.372.000,00	90,33	179.990.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	84.648.600,00	82.677.600,00	97,67	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	24.000.000,00	23.200.000,00	96,66	31.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.194.342.000,00	2.891.256.006,00	90,51	3.091.359.986,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.896.945.000,00	2.637.685.569,00	91,05	2.746.761.266,00

5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	61.500.000,00	61.500.000,00	100,00	37.950.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	18.000.000,00	10.800.000,00	60,00	11.700.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	168.000.000,00	150.000.000,00	89,28	149.500.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1.356.720.000,00	1.311.600.000,00	96,67	1.292.300.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	88.240.000,00	72.060.000,00	81,66	105.890.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	40.640.000,00	20.320.000,00	50,00	54.080.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	846.000.000,00	802.200.000,00	94,82	784.780.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	77.040.000,00	68.480.000,00	88,88	115.560.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	59.920.000,00	34.240.000,00	57,14	89.880.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	6.152.200,00	3.108.900,00	50,53	7.810.050,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	41.832.000,00	17.007.000,00	40,65	19.854.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	106.048.800,00	73.610.861,00	69,41	67.185.741,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.762.000,00	2.220.000,00	59,01	3.060.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	6.500.000,00	4.610.583,00	70,93	0,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.450.000,00	1.788.225,00	15,61	5.211.475,00
5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	2.140.000,00	2.140.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.969.000,00	5.484.437,00	49,99	5.482.720,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	10.969.000,00	5.484.437,00	49,99	5.482.720,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.200.000,00	11.200.000,00	100,00	10.400.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	10.400.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	95.878.000,00	72.536.000,00	75,65	117.416.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	71.878.000,00	60.536.000,00	84,22	30.536.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00	74.880.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	24.000.000,00	12.000.000,00	50,00	12.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	179.350.000,00	164.350.000,00	91,63	211.300.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	167.350.000,00	152.350.000,00	91,03	193.300.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	18.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	91.070.000,00	87.110.000,00	95,65	150.060.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	91.070.000,00	87.110.000,00	95,65	82.660.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	67.160.000,00	67.160.000,00	100,00	67.160.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.430.000,00	9.600.000,00	77,23	6.500.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.030.000,00	6.900.000,00	85,92	6.600.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.450.000,00	3.450.000,00	100,00	2.400.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	67.400.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	67.400.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	409.493.000,00	408.755.438,00	99,81	474.413.713,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	409.493.000,00	408.755.438,00	99,81	474.413.713,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	409.493.000,00	408.755.438,00	99,81	299.881.513,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	174.532.200,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	13.109.734.360,00	11.476.223.157,00	87,53	11.076.313.907,00
5.2	BELANJA MODAL	1.548.010.000,00	1.538.610.000,00	99,39	1.643.580.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	268.010.000,00	263.365.000,00	98,26	949.570.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	161.460.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	161.460.000,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	161.460.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	7.350.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	7.350.000,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	0,00	0,00	7.350.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	156.760.000,00	154.940.000,00	98,83	509.575.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	58.260.000,00	57.520.000,00	98,72	74.360.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	58.260.000,00	57.520.000,00	98,72	66.460.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	98.500.000,00	97.420.000,00	98,90	435.215.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	93.500.000,00	92.570.000,00	99,00	284.650.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	5.000.000,00	4.850.000,00	97,00	97.340.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	53.225.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	30.000.000,00	29.720.000,00	99,06	27.050.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	30.000.000,00	29.720.000,00	99,06	27.050.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	30.000.000,00	29.720.000,00	99,06	27.050.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	81.250.000,00	78.705.000,00	96,86	244.135.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	55.000.000,00	54.755.000,00	99,55	150.135.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	55.000.000,00	54.755.000,00	99,55	150.135.000,00

5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	26.250.000,00	23.950.000,00	91,23	94.000.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	8.000.000,00	7.970.000,00	99,62	86.050.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	16.000.000,00	15.980.000,00	99,87	7.950.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.080.000.000,00	1.075.545.000,00	99,58	594.185.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	1.080.000.000,00	1.075.545.000,00	99,58	528.285.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.080.000.000,00	1.075.545.000,00	99,58	528.285.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	1.080.000.000,00	1.075.545.000,00	99,58	528.285.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	65.900.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	65.900.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00	65.900.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	199.700.000,00	99,85	0,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	200.000.000,00	199.700.000,00	99,85	0,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	200.000.000,00	199.700.000,00	99,85	0,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	200.000.000,00	199.700.000,00	99,85	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	99.825.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	99.825.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	99.825.000,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	0,00	0,00	0,00	99.825.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.548.010.000,00	1.538.610.000,00	99,39	1.643.580.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	14.657.744.360,00	13.014.833.157,00	88,79	12.719.893.907,00
	SURPLUS/DEFISIT	(14.657.744.360,00)	(13.014.833.157,00)	88,79	(12.719.893.907,00)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(14.657.744.360,00)	(13.014.833.157,00)	88,79	(12.719.893.907,00)

Kab. Muara Enim, 24 Februari 2026
KEPALA KECAMATAN MUARA ENIM

Elvik Fransiska, S. STP., M.Si
NIP.197805181996121001



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



KECAMATAN UJAN MAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	4.215.273.075,00	3.563.263.660,00	84,53	3.438.206.118,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.856.987.233,00	3.208.521.818,00	83,19	2.961.684.954,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.717.821.861,00	2.205.055.296,00	81,13	1.814.285.095,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.139.165.372,00	1.003.466.522,00	88,09	1.147.399.859,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.856.987.233,00	3.208.521.818,00	83,19	2.961.684.954,00
5.2	BELANJA MODAL	358.285.842,00	354.741.842,00	99,01	476.521.164,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.831.842,00	114.741.842,00	97,38	139.621.164,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	240.454.000,00	240.000.000,00	99,81	287.150.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	49.750.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	358.285.842,00	354.741.842,00	99,01	476.521.164,00
	JUMLAH BELANJA	4.215.273.075,00	3.563.263.660,00	84,53	3.438.206.118,00
	SURPLUS/DEFISIT	(4.215.273.075,00)	(3.563.263.660,00)	84,53	(3.438.206.118,00)

Kab. Muara Enim, 13 Januari 2026
PLT. KEPALA KECAMATAN UJAN MAS

Hasman Hadi, S.IP
NIP.196809141989031003



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM KECAMATAN BENAKAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	3.601.275.922,20	3.180.601.416,00	88,32	3.521.476.872,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.335.071.922,20	2.919.231.416,00	87,53	2.832.800.872,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.619.279.007,20	2.235.184.353,00	85,34	1.946.342.036,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	715.792.915,00	684.047.063,00	95,56	886.458.836,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.335.071.922,20	2.919.231.416,00	87,53	2.832.800.872,00
5.2	BELANJA MODAL	266.204.000,00	261.370.000,00	98,18	688.676.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.204.000,00	180.620.000,00	97,52	124.240.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81.000.000,00	80.750.000,00	99,69	404.700.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	159.736.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	266.204.000,00	261.370.000,00	98,18	688.676.000,00
	JUMLAH BELANJA	3.601.275.922,20	3.180.601.416,00	88,32	3.521.476.872,00
	SURPLUS/DEFISIT	(3.601.275.922,20)	(3.180.601.416,00)	88,32	(3.521.476.872,00)

Kab. Muara Enim, 6 Januari 2026
KEPALA KECAMATAN BENAKAT

Abu Yamin, S.H.
NIP.197908162008011004



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM

KECAMATAN GUNUNG MEGANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	4.961.576.178,00	4.170.223.491,00	84,05	3.793.511.148,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.536.919.906,00	3.751.624.091,00	82,69	3.537.558.828,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.840.098.713,00	2.169.051.645,00	76,37	1.623.871.451,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.623.285.788,00	1.213.977.589,00	74,78	888.051.617,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.246.722.629,00	945.166.420,00	75,81	674.875.830,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	928.875.254,00	659.627.960,00	71,01	610.803.830,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	317.847.375,00	285.538.460,00	89,83	64.072.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	129.799.764,00	102.832.197,00	79,22	89.948.906,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	99.266.909,00	78.158.197,00	78,73	81.811.762,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	30.532.855,00	24.674.000,00	80,81	8.137.144,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	83.564.500,00	76.020.000,00	90,97	59.640.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	83.564.500,00	76.020.000,00	90,97	59.640.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	50.139.500,00	28.378.750,00	56,59	15.885.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	29.772.750,00	10.185.000,00	34,20	12.185.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	20.366.750,00	18.193.750,00	89,33	3.700.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	108.636.113,00	60.615.540,00	55,79	47.217.840,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	79.962.428,00	41.569.080,00	51,98	42.365.700,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	28.673.685,00	19.046.460,00	66,42	4.852.140,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.333.125,00	951.062,00	21,94	475.531,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.333.125,00	951.062,00	21,94	475.531,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	90.157,00	13.620,00	15,10	8.510,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	80.000,00	7.739,00	9,67	7.395,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10.157,00	5.881,00	57,90	1.115,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.216.812.925,00	955.074.056,00	78,48	735.819.834,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.216.812.925,00	955.074.056,00	78,48	735.819.834,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	987.486.104,00	750.172.585,00	75,96	686.179.398,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	229.326.821,00	204.901.471,00	89,34	49.640.436,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.696.821.193,00	1.582.572.446,00	93,26	1.913.687.377,00
5.1.02.01	Belanja Barang	555.360.289,00	498.875.828,00	89,82	616.137.600,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	555.360.289,00	498.875.828,00	89,82	616.137.600,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	34.767.000,00	21.832.960,00	62,79	25.142.100,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	17.277.316,00	15.777.000,00	91,31	16.578.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	51.004.636,00	36.957.668,00	72,45	57.412.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	16.366.667,00	10.827.200,00	66,15	15.137.500,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.600.000,00	5.000.000,00	89,28	4.510.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.073.100,00	3.032.000,00	98,66	3.024.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	104.905.000,00	104.891.000,00	99,98	104.891.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15.000.000,00	3.942.500,00	26,28	10.807.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	209.062.100,00	206.842.000,00	98,93	286.556.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.737.000,00	1.611.500,00	92,77	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.845.200,00	462.000,00	16,23	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	6.360.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	7.250.000,00	3.300.000,00	45,51	1.750.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	21.600.000,00	19.600.000,00	90,74	15.450.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	3.672.270,00	3.600.000,00	98,03	7.320.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	61.200.000,00	61.200.000,00	100,00	61.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	476.442.000,00	427.107.858,00	89,64	623.032.860,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	355.710.000,00	325.907.858,00	91,62	431.432.860,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.100.000,00	7.200.000,00	88,88	5.850.000,00

5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	12.600.000,00	12.600.000,00	100,00	12.600.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	81.320.000,00	73.830.000,00	90,78	120.910.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	44.400.000,00	44.400.000,00	100,00	81.840.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.720.000,00	18.720.000,00	100,00	25.680.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	17.120.000,00	17.120.000,00	100,00	25.680.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00	4.500.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	101.200.000,00	92.700.000,00	91,60	84.100.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	9.000.000,00	1.623.750,00	18,04	3.825.250,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	42.000.000,00	41.429.583,00	98,64	21.715.260,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	0,00	0,00	0,00	34.850.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.000.000,00	1.394.525,00	27,89	3.882.350,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	2.140.000,00	2.140.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	10.032.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	10.032.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	17.800.000,00	17.800.000,00	100,00	55.200.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	12.800.000,00	12.800.000,00	100,00	51.400.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	3.800.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	48.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	80.900.000,00	71.400.000,00	88,25	88.400.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	63.900.000,00	63.900.000,00	100,00	73.400.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	17.000.000,00	7.500.000,00	44,11	15.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	413.588.104,00	406.409.000,00	98,26	307.562.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.108.234,00	14.109.000,00	70,16	8.362.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	533.576,00	533.000,00	99,89	4.792.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	5.984.658,00	5.976.000,00	99,85	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.760.000,00	5.850.000,00	66,78	2.190.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.830.000,00	1.750.000,00	36,23	1.380.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	393.479.870,00	392.300.000,00	99,70	299.200.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	393.479.870,00	392.300.000,00	99,70	299.200.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	206.130.800,00	204.879.760,00	99,39	323.154.917,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	206.130.800,00	204.879.760,00	99,39	323.154.917,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	206.130.800,00	204.879.760,00	99,39	323.154.917,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00	43.800.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00	43.800.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	45.300.000,00	45.300.000,00	100,00	43.800.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	4.536.919.906,00	3.751.624.091,00	82,69	3.537.558.828,00
5.2	BELANJA MODAL	424.656.272,00	418.599.400,00	98,57	255.952.320,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	164.656.272,00	161.949.400,00	98,35	255.952.320,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	120.056.872,00	118.249.400,00	98,49	61.452.320,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	2.000.000,00	1.800.000,00	90,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.000.000,00	1.800.000,00	90,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	118.056.872,00	116.449.400,00	98,63	61.452.320,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	23.056.872,00	22.799.400,00	98,88	15.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	35.000.000,00	34.150.000,00	97,57	46.452.320,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	60.000.000,00	59.500.000,00	99,16	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	194.500.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	194.500.000,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	0,00	0,00	0,00	194.500.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	44.599.400,00	43.700.000,00	97,98	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	44.599.400,00	43.700.000,00	97,98	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	44.599.400,00	43.700.000,00	97,98	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	260.000.000,00	256.650.000,00	98,71	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	260.000.000,00	256.650.000,00	98,71	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	260.000.000,00	256.650.000,00	98,71	0,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	260.000.000,00	256.650.000,00	98,71	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	424.656.272,00	418.599.400,00	98,57	255.952.320,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	4.961.576.178,00	4.170.223.491,00	84,05	3.793.511.148,00
	SURPLUS/DEFISIT	(4.961.576.178,00)	(4.170.223.491,00)	84,05	(3.793.511.148,00)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(4.961.576.178,00)	(4.170.223.491,00)	84,05	(3.793.511.148,00)

Kab. Muara Enim, 24 Februari 2026
KEPALA KECAMATAN GUNUNG MEGANG

Hendri Desta Kesuma, AP., M.Si.
NIP.197312281995011001



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM KECAMATAN RAMBANG NIRU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	4.500.354.548,00	3.929.648.329,00	87,32	4.034.279.456,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.337.838.748,00	3.767.678.329,00	86,86	3.880.746.456,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.956.832.372,00	2.411.710.307,00	81,56	2.109.241.760,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.736.868.996,00	1.386.595.814,00	79,83	1.165.888.567,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.310.147.385,85	1.101.572.260,00	84,08	906.589.921,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.114.499.820,60	911.819.460,00	81,81	861.739.521,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	195.647.565,25	189.752.800,00	96,99	44.850.400,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	163.513.776,65	107.899.778,00	65,99	101.119.480,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	135.614.555,65	93.263.314,00	68,77	95.737.432,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	27.899.221,00	14.636.464,00	52,46	5.382.048,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	91.748.160,00	72.240.000,00	78,74	76.020.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	91.748.160,00	72.240.000,00	78,74	76.020.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	2.555.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2.555.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	55.143.080,00	38.065.000,00	69,03	24.281.850,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	41.722.450,00	25.375.000,00	60,82	21.691.850,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	13.420.630,00	12.690.000,00	94,56	2.590.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	109.577.633,60	65.467.680,00	59,75	56.342.760,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	89.895.842,00	53.156.280,00	59,13	53.301.120,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	19.681.791,60	12.311.400,00	62,55	3.041.640,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.106.173,00	1.337.261,00	32,57	1.523.714,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.106.173,00	1.337.261,00	32,57	1.523.714,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	77.786,90	13.835,00	17,79	10.842,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	46.971,00	10.633,00	22,64	10.238,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	30.815,90	3.202,00	10,39	604,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.219.963.376,00	1.025.114.493,00	84,03	943.353.193,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.219.963.376,00	1.025.114.493,00	84,03	943.353.193,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.078.600.474,00	891.107.089,00	82,62	908.095.664,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	141.362.902,00	134.007.404,00	94,80	35.257.529,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.381.006.376,00	1.355.968.022,00	98,19	1.771.504.696,00
5.1.02.01	Belanja Barang	483.462.176,00	479.664.700,00	99,21	608.472.220,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	483.462.176,00	479.664.700,00	99,21	608.472.220,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.340.100,00	3.300.000,00	98,80	3.318.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	4.539.550,00	4.450.000,00	98,03	5.615.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	12.634.388,00	12.595.000,00	99,69	21.285.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	62.766.200,00	61.243.600,00	97,57	74.068.800,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	25.128.500,00	24.443.600,00	97,27	19.258.920,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.811.200,00	2.807.500,00	99,87	2.810.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	7.300.200,00	7.300.000,00	100,00	7.082.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	114.952.038,00	113.825.000,00	99,02	110.527.500,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	23.000.000,00	23.000.000,00	100,00	23.000.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	23.100.000,00	23.100.000,00	100,00	23.100.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	117.765.000,00	117.475.000,00	99,75	218.712.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	15.900.000,00	15.900.000,00	100,00	25.970.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	6.000.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	62.225.000,00	62.225.000,00	100,00	62.225.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	376.658.500,00	357.109.828,00	94,81	495.642.198,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	219.208.500,00	209.389.828,00	95,52	255.842.198,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	8.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.720.000,00	18.720.000,00	100,00	28.080.000,00

5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	25.680.000,00	25.680.000,00	100,00	38.520.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	1.530.000,00	1.500.000,00	98,04	1.020.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	34.240.000,00	34.240.000,00	100,00	51.360.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	25.680.000,00	25.680.000,00	100,00	38.520.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	24.100.000,00	24.100.000,00	100,00	16.875.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	7.866.000,00	4.342.750,00	55,21	3.892.650,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	56.093.750,00	51.527.078,00	91,86	54.574.548,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.798.750,00	5.100.000,00	75,01	3.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	52.950.000,00	51.450.000,00	97,17	80.550.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	43.500.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	43.950.000,00	42.450.000,00	96,59	37.050.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	48.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	48.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	90.500.000,00	82.270.000,00	90,91	111.250.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	9.650.000,00	2.420.000,00	25,08	15.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	80.850.000,00	79.850.000,00	98,76	96.250.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	210.662.000,00	210.262.000,00	99,81	209.763.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.330.000,00	11.330.000,00	100,00	11.330.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.880.000,00	4.880.000,00	100,00	4.880.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.380.000,00	4.380.000,00	100,00	4.380.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	2.070.000,00	2.070.000,00	100,00	2.070.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	199.332.000,00	198.932.000,00	99,80	198.433.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	199.332.000,00	198.932.000,00	99,80	198.433.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	246.223.700,00	244.931.494,00	99,48	393.627.278,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	246.223.700,00	244.931.494,00	99,48	393.627.278,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	246.223.700,00	244.931.494,00	99,48	352.619.278,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	41.008.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	64.000.000,00	64.000.000,00	100,00	64.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	64.000.000,00	64.000.000,00	100,00	64.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	64.000.000,00	64.000.000,00	100,00	64.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	4.337.838.748,00	3.767.678.329,00	86,86	3.880.746.456,00
5.2	BELANJA MODAL	162.515.800,00	161.970.000,00	99,66	153.533.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	162.515.800,00	161.970.000,00	99,66	153.533.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	58.795.100,00	58.460.000,00	99,43	153.533.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	36.728.400,00	36.550.000,00	99,51	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	36.728.400,00	36.550.000,00	99,51	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	22.066.700,00	21.910.000,00	99,29	124.033.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	16.616.700,00	16.530.000,00	99,48	124.033.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	3.000.000,00	2.980.000,00	99,33	0,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.450.000,00	2.400.000,00	97,96	0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	31.080.000,00	31.030.000,00	99,84	0,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	31.080.000,00	31.030.000,00	99,84	0,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	31.080.000,00	31.030.000,00	99,84	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	72.640.700,00	72.480.000,00	99,78	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	36.293.700,00	36.210.000,00	99,77	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	36.293.700,00	36.210.000,00	99,77	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	36.347.000,00	36.270.000,00	99,79	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	36.347.000,00	36.270.000,00	99,79	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	162.515.800,00	161.970.000,00	99,66	153.533.000,00
	JUMLAH BELANJA	4.500.354.548,00	3.929.648.329,00	87,32	4.034.279.456,00
	SURPLUS/DEFISIT	(4.500.354.548,00)	(3.929.648.329,00)	87,32	(4.034.279.456,00)



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM

KECAMATAN LUBAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	4.075.412.756,00	3.467.037.737,00	85,07	4.003.335.295,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.805.085.156,00	3.212.492.737,00	84,42	3.760.735.295,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.011.640.686,00	1.625.053.304,00	80,78	1.320.475.243,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.168.272.101,00	832.640.491,00	71,27	672.901.261,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	879.045.412,00	655.815.920,00	74,60	524.681.693,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	607.286.041,00	446.061.620,00	73,45	460.609.700,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	271.759.371,00	209.754.300,00	77,18	64.071.993,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	98.127.795,00	65.985.934,00	67,24	53.441.496,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	54.308.298,00	41.994.942,00	77,32	44.471.416,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	43.819.497,00	23.990.992,00	54,74	8.970.080,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	75.609.000,00	39.620.000,00	52,40	41.370.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	75.609.000,00	39.620.000,00	52,40	41.370.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	6.366.000,00	5.040.000,00	79,17	7.380.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.366.000,00	5.040.000,00	79,17	7.380.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	39.619.750,00	22.768.750,00	57,46	13.970.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	16.895.500,00	8.995.000,00	53,23	10.270.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	22.724.250,00	13.773.750,00	60,61	3.700.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	63.872.694,00	42.293.280,00	66,21	29.981.880,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	32.448.934,00	24.333.120,00	74,98	24.188.280,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	31.423.760,00	17.960.160,00	57,15	5.793.600,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.572.500,00	1.107.163,00	19,86	2.067.631,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.572.500,00	1.107.163,00	19,86	2.067.631,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	58.950,00	9.444,00	16,02	8.561,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	35.250,00	5.425,00	15,39	7.082,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	23.700,00	4.019,00	16,95	1.479,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	843.368.585,00	792.412.813,00	93,95	647.573.982,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	843.368.585,00	792.412.813,00	93,95	647.573.982,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	655.290.805,00	644.294.134,00	98,32	597.354.335,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	188.077.780,00	148.118.679,00	78,75	50.219.647,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.793.444.470,00	1.587.439.433,00	88,51	2.440.260.052,00
5.1.02.01	Belanja Barang	781.857.470,00	699.981.700,00	89,52	768.443.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	781.857.470,00	699.981.700,00	89,52	768.443.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.187.000,00	0,00	0,00	8.816.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	12.980.974,00	12.873.000,00	99,16	11.830.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	23.493.976,00	23.490.000,00	99,98	24.800.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	42.414.100,00	41.623.500,00	98,13	31.724.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	72.001.500,00	51.732.200,00	71,84	71.939.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	6.010.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	40.721.120,00	40.705.000,00	99,96	38.717.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	226.603.300,00	226.594.000,00	99,99	212.124.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	36.000.000,00	13.860.000,00	38,50	8.195.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	750.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	182.620.500,00	158.534.000,00	86,81	204.700.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.110.000,00	4.000.000,00	97,32	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	44.900.000,00	39.495.000,00	87,96	69.813.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	2.775.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	18.375.000,00	18.375.000,00	100,00	10.500.000,00

5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	62.700.000,00	62.700.000,00	100,00	61.200.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	443.237.000,00	363.856.552,00	82,09	556.439.259,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	217.355.750,00	174.406.552,00	80,24	298.299.259,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.750.000,00	550.000,00	11,57	250.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	13.500.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	68.480.000,00	57.780.000,00	84,37	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	34.240.000,00	34.240.000,00	100,00	51.360.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.600.000,00	700.000,00	19,44	123.230.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.900.000,00	700.000,00	14,28	700.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	19.260.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0,00	0,00	0,00	25.680.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	38.400.000,00	38.400.000,00	100,00	36.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	44.939.500,00	28.334.052,00	63,04	26.319.259,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.546.250,00	202.500,00	7,95	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.181.250,00	0,00	0,00	5.590.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	8.181.250,00	0,00	0,00	5.590.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	33.400.000,00	25.900.000,00	77,54	70.650.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	13.500.000,00	6.000.000,00	44,44	61.500.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	19.900.000,00	19.900.000,00	100,00	9.150.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	44.400.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00	32.400.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	172.300.000,00	151.550.000,00	87,95	137.500.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	154.300.000,00	151.550.000,00	98,21	137.500.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	230.400.000,00	229.610.000,00	99,65	780.120.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.400.000,00	30.110.000,00	99,04	12.820.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.000.000,00	2.800.000,00	93,33	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.880.000,00	4.800.000,00	98,36	0,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	12.500.000,00	12.490.000,00	99,92	7.300.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	7.020.000,00	7.020.000,00	100,00	5.520.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.500.000,00	99,75	767.300.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	199.500.000,00	99,75	767.300.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	300.750.000,00	273.891.181,00	91,06	301.657.793,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	300.750.000,00	273.891.181,00	91,06	301.657.793,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	300.750.000,00	273.891.181,00	91,06	301.657.793,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	37.200.000,00	20.100.000,00	54,03	33.600.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	37.200.000,00	20.100.000,00	54,03	33.600.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	37.200.000,00	20.100.000,00	54,03	33.600.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.805.085.156,00	3.212.492.737,00	84,42	3.760.735.295,00
5.2	BELANJA MODAL	270.327.600,00	254.545.000,00	94,16	242.600.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.387.600,00	105.345.000,00	87,50	242.600.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	52.468.000,00	52.460.000,00	99,98	131.800.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4.968.000,00	4.960.000,00	99,83	39.500.000,00
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	0,00	0,00	39.500.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.968.000,00	4.960.000,00	99,83	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	47.500.000,00	47.500.000,00	100,00	92.300.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	21.300.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	21.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	26.000.000,00	26.000.000,00	100,00	50.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	14.985.000,00	14.985.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	14.985.000,00	14.985.000,00	100,00	0,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	14.985.000,00	14.985.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	37.934.600,00	37.900.000,00	99,90	110.800.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	23.934.600,00	23.900.000,00	99,85	75.800.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	23.934.600,00	23.900.000,00	99,85	75.800.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	35.000.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	35.000.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149.940.000,00	149.200.000,00	99,50	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	149.940.000,00	149.200.000,00	99,50	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	149.940.000,00	149.200.000,00	99,50	0,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	149.940.000,00	149.200.000,00	99,50	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	270.327.600,00	254.545.000,00	94,16	242.600.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00

	JUMLAH BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	4.075.412.756,00	3.467.037.737,00	85,07	4.003.335.295,00
	SURPLUS/DEFISIT	(4.075.412.756,00)	(3.467.037.737,00)	85,07	(4.003.335.295,00)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(4.075.412.756,00)	(3.467.037.737,00)	85,07	(4.003.335.295,00)

Kab. Muara Enim, 24 Februari 2026
KEPALA KECAMATAN LUBAI
Wien Wierma Putra, S.STP., M.Si.
NIP.198111112001121002



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM

KECAMATAN RAMBANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	5.129.898.529,00	4.299.254.790,00	83,80	4.230.103.245,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.778.638.529,00	3.951.214.805,00	82,68	3.982.228.245,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.704.927.189,00	2.339.293.120,00	86,48	1.967.680.698,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.687.242.404,00	1.349.063.583,00	79,95	1.059.025.018,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.356.883.579,00	1.066.697.040,00	78,61	829.926.274,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	893.069.179,00	765.365.460,00	85,70	765.854.274,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	463.814.400,00	301.331.580,00	64,96	64.072.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	134.252.000,00	110.759.926,00	82,50	87.850.086,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	94.000.000,00	78.005.886,00	82,98	79.712.942,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	40.252.000,00	32.754.040,00	81,37	8.137.144,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	69.454.000,00	60.200.000,00	86,67	57.470.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	69.454.000,00	60.200.000,00	86,67	57.470.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	7.380.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.040.000,00	5.040.000,00	100,00	7.380.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	41.559.625,00	39.148.750,00	94,19	24.140.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	22.190.000,00	20.235.000,00	91,18	20.440.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	19.369.625,00	18.913.750,00	97,64	3.700.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	74.000.000,00	66.409.140,00	89,74	51.273.360,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	53.000.000,00	47.290.260,00	89,22	46.421.220,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	21.000.000,00	19.118.880,00	91,04	4.852.140,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.000.000,00	790.249,00	13,17	972.395,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.000.000,00	790.249,00	13,17	972.395,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	53.200,00	18.478,00	34,73	12.903,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	28.500,00	12.521,00	43,93	11.788,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	24.700,00	5.957,00	24,11	1.115,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.017.684.785,00	990.229.537,00	97,30	908.655.680,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.017.684.785,00	990.229.537,00	97,30	908.655.680,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	802.684.785,00	777.286.697,00	96,83	858.243.542,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	215.000.000,00	212.942.840,00	99,04	50.412.138,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.073.711.340,00	1.611.921.685,00	77,73	2.014.547.547,00
5.1.02.01	Belanja Barang	791.647.520,00	614.571.208,00	77,63	619.543.464,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	791.647.520,00	614.571.208,00	77,63	619.543.464,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	22.952.800,00	15.310.000,00	66,70	19.711.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.300.000,00	1.290.000,00	7,91	6.269.464,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.800.000,00	1.513.500,00	84,08	0,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	25.400.000,00	9.396.208,00	36,99	13.780.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	71.170.200,00	65.009.500,00	91,34	67.013.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	22.703.300,00	15.116.000,00	66,58	16.255.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.207.300,00	5.000.000,00	96,01	5.600.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	16.987.420,00	14.629.000,00	86,11	7.082.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	70.505.000,00	70.462.000,00	99,93	75.678.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	41.642.500,00	6.575.000,00	15,78	13.950.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	359.429.000,00	288.695.000,00	80,32	256.355.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	31.050.000,00	22.875.000,00	73,67	57.675.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	27.000.000,00	23.700.000,00	87,77	22.425.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	79.500.000,00	75.000.000,00	94,33	57.750.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	699.999.820,00	470.561.291,00	67,22	708.749.366,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	514.699.820,00	342.261.291,00	66,49	473.277.366,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	61.000.000,00	20.000.000,00	32,78	4.000.000,00

5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	0,00	0,00	0,00	22.500.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00	25.200.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	175.200.000,00	96.630.000,00	55,15	176.000.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	54.280.000,00	39.040.000,00	71,92	91.330.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	48.720.000,00	21.750.000,00	44,64	14.850.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	25.680.000,00	25.680.000,00	100,00	38.520.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	17.120.000,00	17.120.000,00	100,00	25.680.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	27.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	15.500.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	41.999.820,00	31.399.466,00	74,76	31.493.866,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.500.000,00	1.441.825,00	96,12	1.203.500,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.000.000,00	0,00	0,00	5.472.000,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	8.000.000,00	0,00	0,00	5.472.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	42.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	11.000.000,00	91,66	41.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	12.000.000,00	11.000.000,00	91,66	11.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	163.500.000,00	115.500.000,00	70,64	147.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	148.500.000,00	100.500.000,00	67,67	117.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	30.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	329.320.000,00	309.980.500,00	94,12	411.145.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	29.320.000,00	11.700.000,00	39,90	11.700.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.760.000,00	8.400.000,00	65,83	10.850.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	16.560.000,00	3.300.000,00	19,92	850.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	300.000.000,00	298.280.500,00	99,42	399.445.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	300.000.000,00	298.280.500,00	99,42	399.445.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	227.344.000,00	216.808.686,00	95,36	267.909.717,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	227.344.000,00	216.808.686,00	95,36	267.909.717,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	227.344.000,00	216.808.686,00	95,36	267.909.717,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.400.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	25.400.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	25.400.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	4.778.638.529,00	3.951.214.805,00	82,68	3.982.228.245,00
5.2	BELANJA MODAL	351.260.000,00	348.039.985,00	99,08	247.875.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	166.260.000,00	164.939.985,00	99,20	247.875.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	29.500.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	75.000.000,00	74.939.985,00	99,91	144.250.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	75.000.000,00	74.939.985,00	99,91	144.250.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	45.000.000,00	44.969.985,00	99,93	78.300.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	30.000.000,00	29.970.000,00	99,90	51.200.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	14.750.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	0,00	0,00	0,00	14.725.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	0,00	0,00	0,00	14.725.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	4.875.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	0,00	0,00	0,00	9.850.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	91.260.000,00	90.000.000,00	98,61	59.400.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	73.260.000,00	72.000.000,00	98,28	59.400.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	73.260.000,00	72.000.000,00	98,28	59.400.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	185.000.000,00	183.100.000,00	98,97	0,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	185.000.000,00	183.100.000,00	98,97	0,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	185.000.000,00	183.100.000,00	98,97	0,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	100.000.000,00	99.100.000,00	99,10	0,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	85.000.000,00	84.000.000,00	98,82	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	351.260.000,00	348.039.985,00	99,08	247.875.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	5.129.898.529,00	4.299.254.790,00	83,80	4.230.103.245,00
	SURPLUS/DEFISIT	(5.129.898.529,00)	(4.299.254.790,00)	83,80	(4.230.103.245,00)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM

KECAMATAN LEMBAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	4.950.723.944,00	4.210.200.092,00	85,04	3.829.462.090,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.588.387.038,00	3.858.667.592,00	84,09	3.339.692.090,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.068.340.116,00	2.584.870.071,00	84,24	2.210.678.831,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.832.760.746,00	1.465.430.864,00	79,95	1.240.413.299,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.431.565.832,00	1.190.227.360,00	83,14	1.001.422.464,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.185.140.700,00	960.488.660,00	81,04	937.350.464,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	246.425.132,00	229.738.700,00	93,22	64.072.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	123.352.020,00	94.262.104,00	76,41	85.190.254,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	104.129.972,00	78.748.936,00	75,62	82.050.726,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	19.222.048,00	15.513.168,00	80,70	3.139.528,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	108.702.500,00	77.480.000,00	71,27	74.060.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	108.702.500,00	77.480.000,00	71,27	74.060.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	8.826.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.386.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	57.345.125,00	41.260.125,00	71,95	27.990.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	42.855.000,00	26.770.000,00	62,46	24.290.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	14.490.125,00	14.490.125,00	100,00	3.700.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	100.814.289,00	60.611.745,00	60,12	50.766.420,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	83.608.660,00	47.435.100,00	56,73	47.797.200,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	17.205.629,00	13.176.645,00	76,58	2.969.220,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.099.285,00	1.570.954,00	74,83	968.821,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.099.285,00	1.570.954,00	74,83	968.821,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	55.695,00	18.576,00	33,35	15.340,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	35.700,00	14.086,00	39,45	13.707,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	19.995,00	4.490,00	22,45	1.633,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.235.579.370,00	1.119.439.207,00	90,60	970.265.532,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.235.579.370,00	1.119.439.207,00	90,60	970.265.532,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.008.515.004,00	914.762.060,00	90,70	919.945.310,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	227.064.366,00	204.677.147,00	90,14	50.320.222,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.520.046.922,00	1.273.797.521,00	83,79	1.129.013.259,00
5.1.02.01	Belanja Barang	472.074.722,00	436.662.000,00	92,49	550.248.900,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	472.074.722,00	436.662.000,00	92,49	550.248.900,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.315.200,00	2.550.000,00	24,72	11.880.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	15.584.694,00	15.539.000,00	99,70	3.720.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.227.164,00	16.008.000,00	98,64	36.088.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	37.969.400,00	35.381.000,00	93,18	30.058.900,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,00	0,00	0,00	5.560.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	18.030.164,00	18.029.000,00	99,99	17.700.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	124.704.500,00	124.702.000,00	99,99	154.262.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	143.018.000,00	126.620.000,00	88,53	204.530.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.634.500,00	1.633.000,00	99,90	600.000,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	7.541.100,00	7.500.000,00	99,45	13.100.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	64.050.000,00	55.700.000,00	86,96	59.750.000,00

5.1.02.02	Belanja Jasa	429.580.000,00	240.790.607,00	56,05	423.105.542,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	277.780.000,00	136.190.607,00	49,02	269.180.542,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	128.400.000,00	0,00	0,00	107.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	51.360.000,00	42.800.000,00	83,33	77.040.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	17.120.000,00	17.120.000,00	100,00	25.680.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0,00	0,00	0,00	25.680.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	17.600.000,00	17.600.000,00	100,00	17.600.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	30.600.000,00	27.470.607,00	89,77	14.980.542,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00	41.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	36.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	5.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	34.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	10.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	122.300.000,00	81.100.000,00	66,31	78.425.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	107.300.000,00	81.100.000,00	75,58	78.425.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	511.680.000,00	510.580.000,00	99,78	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.680.000,00	11.680.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.880.000,00	4.880.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	500.000.000,00	498.900.000,00	99,78	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	500.000.000,00	498.900.000,00	99,78	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	90.962.200,00	85.564.914,00	94,06	139.908.817,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	90.962.200,00	85.564.914,00	94,06	139.908.817,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	90.962.200,00	85.564.914,00	94,06	139.908.817,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.750.000,00	200.000,00	1,26	15.750.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.750.000,00	200.000,00	1,26	15.750.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	15.750.000,00	200.000,00	1,26	15.750.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	4.588.387.038,00	3.858.667.592,00	84,09	3.339.692.090,00
5.2	BELANJA MODAL	362.336.906,00	351.532.500,00	97,01	489.770.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	221.971.706,00	211.732.500,00	95,38	101.070.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	190.273.406,00	180.097.500,00	94,65	21.710.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	190.273.406,00	180.097.500,00	94,65	21.710.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	107.500.000,00	107.392.500,00	99,90	21.710.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	82.773.406,00	72.705.000,00	87,83	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	31.698.300,00	31.635.000,00	99,80	79.360.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	31.698.300,00	31.635.000,00	99,80	10.500.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	31.698.300,00	31.635.000,00	99,80	10.500.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	68.860.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	68.860.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.365.200,00	139.800.000,00	99,59	388.700.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	140.365.200,00	139.800.000,00	99,59	388.700.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	140.365.200,00	139.800.000,00	99,59	388.700.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	140.365.200,00	139.800.000,00	99,59	189.900.000,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	0,00	0,00	198.800.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	362.336.906,00	351.532.500,00	97,01	489.770.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	4.950.723.944,00	4.210.200.092,00	85,04	3.829.462.090,00
	SURPLUS/DEFISIT	(4.950.723.944,00)	(4.210.200.092,00)	85,04	(3.829.462.090,00)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(4.950.723.944,00)	(4.210.200.092,00)	85,04	(3.829.462.090,00)

Kab. Muara Enim, 24 Februari 2026
KEPALA KECAMATAN LEMBAK

Didi Haryanto, S.Kom.
NIP.198205242008031001



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM KECAMATAN KELEKAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	3.909.672.344,40	3.403.436.227,00	87,05	3.846.893.469,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.599.578.845,40	3.094.436.227,00	85,97	3.226.684.969,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.506.236.757,40	2.306.236.392,00	92,02	1.682.408.948,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.435.503.999,40	1.274.680.415,00	88,80	850.517.203,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.070.732.758,00	1.031.555.977,00	96,34	831.891.745,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.093.342.088,00	788.199.835,00	72,09	1.544.276.021,00
5.1.02.01	Belanja Barang	349.354.848,00	268.753.900,00	76,93	639.318.300,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	412.115.840,00	211.267.322,00	51,26	696.440.115,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	58.200.000,00	55.525.000,00	95,40	3.800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	229.421.400,00	208.403.613,00	90,84	195.717.606,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	44.250.000,00	44.250.000,00	100,00	9.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.599.578.845,40	3.094.436.227,00	85,97	3.226.684.969,00
5.2	BELANJA MODAL	310.093.499,00	309.000.000,00	99,65	620.208.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.200.000,00	105.345.000,00	99,19	121.155.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	80.700.000,00	79.980.000,00	99,11	59.500.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	25.500.000,00	25.365.000,00	99,47	61.655.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	203.893.499,00	203.655.000,00	99,88	499.053.500,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	168.893.499,00	168.787.000,00	99,94	499.053.500,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	35.000.000,00	34.868.000,00	99,62	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	310.093.499,00	309.000.000,00	99,65	620.208.500,00
	JUMLAH BELANJA	3.909.672.344,40	3.403.436.227,00	87,05	3.846.893.469,00
	SURPLUS/DEFISIT	(3.909.672.344,40)	(3.403.436.227,00)	87,05	(3.846.893.469,00)

Kab. Muara Enim, 4 Januari 2026
PLT. KEPALA KECAMATAN KELEKAR

Muhtarimin, S.Pd.,M.Si
NIP. 197011151991041001



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



KECAMATAN GELUMBANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	6.997.022.677,00	6.295.991.754,00	89,98	6.830.647.184,00
5.1	BELANJA OPERASI	5.773.986.459,00	5.078.361.242,00	87,95	5.670.172.184,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.238.486.159,00	2.775.850.217,00	85,71	2.204.081.813,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.535.500.300,00	2.302.511.025,00	90,81	3.466.090.371,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	5.773.986.459,00	5.078.361.242,00	87,95	5.670.172.184,00
5.2	BELANJA MODAL	1.223.036.218,00	1.217.630.512,00	99,56	1.160.475.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	186.038.218,00	185.230.512,00	99,57	277.775.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.036.998.000,00	1.032.400.000,00	99,56	882.700.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.223.036.218,00	1.217.630.512,00	99,56	1.160.475.000,00
	JUMLAH BELANJA	6.997.022.677,00	6.295.991.754,00	89,98	6.830.647.184,00
	SURPLUS/DEFISIT	(6.997.022.677,00)	(6.295.991.754,00)	89,98	(6.830.647.184,00)

Kab. Muara Enim, 13 Januari 2026
KEPALA KECAMATAN GELUMBANG

Herry Mulyawan, S.P.
NIP.197205081999031003



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM KECAMATAN SUNGAI ROTAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	5.301.771.907,00	4.395.850.691,00	82,91	4.639.647.970,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.232.880.967,00	3.350.806.842,00	79,16	3.466.491.970,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.885.137.840,00	2.261.475.916,00	78,38	1.897.119.955,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.764.200.312,00	1.223.812.611,00	69,37	1.014.865.418,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.381.002.280,00	981.467.560,00	71,07	821.043.792,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.088.000.000,00	733.572.460,00	67,42	756.971.792,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	293.002.280,00	247.895.100,00	84,61	64.072.000,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	136.400.000,00	86.035.204,00	63,08	70.003.388,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	92.400.000,00	75.656.996,00	81,88	70.003.388,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	44.000.000,00	10.378.208,00	23,59	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	62.000.000,00	60.200.000,00	97,10	48.300.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	62.000.000,00	60.200.000,00	97,10	48.300.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	5.040.032,00	5.040.000,00	100,00	7.200.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	5.040.032,00	5.040.000,00	100,00	7.200.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	62.840.000,00	35.523.750,00	56,53	25.475.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	40.840.000,00	19.530.000,00	47,82	21.775.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	22.000.000,00	15.993.750,00	72,70	3.700.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	110.100.000,00	54.876.255,00	49,84	42.510.540,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	65.100.000,00	43.307.160,00	66,52	41.062.140,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	45.000.000,00	11.569.095,00	25,71	1.448.400,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.516.000,00	654.022,00	11,86	320.096,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.516.000,00	654.022,00	11,86	320.096,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.302.000,00	15.820,00	1,22	12.602,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	714.000,00	11.021,00	1,54	10.948,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	588.000,00	4.799,00	0,82	1.654,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.120.937.528,00	1.037.663.305,00	92,57	882.254.537,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.120.937.528,00	1.037.663.305,00	92,57	882.254.537,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	906.250.768,00	860.700.171,00	94,97	831.967.833,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	214.686.760,00	176.963.134,00	82,43	50.286.704,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.347.743.127,00	1.089.330.926,00	80,83	1.569.372.015,00
5.1.02.01	Belanja Barang	561.721.588,00	463.320.766,00	82,48	564.314.364,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	561.721.588,00	463.320.766,00	82,48	564.314.364,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.444.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	25.138.600,00	7.100.000,00	28,24	17.200.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	25.308.388,00	25.285.000,00	99,91	20.210.364,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	69.712.400,00	62.694.800,00	89,93	108.326.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	36.006.000,00	12.457.800,00	34,60	50.438.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	29.214.000,00	25.919.200,00	88,72	12.599.600,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	121.773.200,00	117.288.966,00	96,32	86.829.900,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	22.200.000,00	13.200.000,00	59,46	9.600.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.575.000,00	1.575.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	149.200.000,00	123.650.000,00	82,88	180.460.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.000.000,00	6.000.000,00	50,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	7.500.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	57.650.000,00	57.650.000,00	100,00	57.650.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	402.516.487,00	330.848.805,00	82,20	607.328.669,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	333.631.987,00	273.298.805,00	81,92	447.583.419,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00	900.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	0,00

5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	31.400.000,00	24.000.000,00	76,43	183.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	53.550.000,00	47.600.000,00	88,89	105.490.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0,00	0,00	0,00	12.840.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0,00	0,00	0,00	12.840.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	32.000.000,00	31.999.968,00	100,00	20.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	24.900.000,00	22.400.000,00	89,96	23.600.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	400.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	128.200.000,00	99.100.000,00	77,30	41.400.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.485.000,00	1.113.250,00	24,82	816.250,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	44.795.000,00	36.465.412,00	81,41	29.847.169,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.641.987,00	2.720.175,00	58,60	0,00
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	5.484.500,00	5.200.000,00	94,81	5.145.250,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	5.484.500,00	5.200.000,00	94,81	5.145.250,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	12.150.000,00	12.150.000,00	100,00	67.600.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	57.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	8.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	650.000,00	650.000,00	100,00	2.600.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	46.000.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	36.000.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	10.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	39.250.000,00	28.200.000,00	71,85	41.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	25.000.000,00	22.500.000,00	90,00	24.000.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	14.250.000,00	5.700.000,00	40,00	17.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	12.503.152,00	1.985.500,00	15,88	14.780.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12.503.152,00	1.985.500,00	15,88	14.780.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.513.152,00	1.000.000,00	13,31	8.100.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	4.990.000,00	985.500,00	19,75	6.680.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	302.901.900,00	251.075.855,00	82,89	315.148.982,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	302.901.900,00	251.075.855,00	82,89	315.148.982,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	302.901.900,00	251.075.855,00	82,89	315.148.982,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	68.100.000,00	42.100.000,00	61,82	67.800.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	68.100.000,00	42.100.000,00	61,82	67.800.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	68.100.000,00	42.100.000,00	61,82	67.800.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	4.232.880.967,00	3.350.806.842,00	79,16	3.466.491.970,00
5.2	BELANJA MODAL	1.068.890.940,00	1.045.043.849,00	97,77	1.173.156.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	318.872.380,00	318.103.849,00	99,76	187.200.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	257.385.680,00	256.787.449,00	99,77	70.400.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	50.000.000,00	49.999.999,00	100,00	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	49.999.999,00	100,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	207.385.680,00	206.787.450,00	99,71	70.400.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	176.385.680,00	175.824.000,00	99,68	55.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	11.000.000,00	10.983.450,00	99,85	15.400.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20.000.000,00	19.980.000,00	99,90	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.950.000,00	4.884.000,00	98,67	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	4.950.000,00	4.884.000,00	98,67	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	4.950.000,00	4.884.000,00	98,67	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	56.536.700,00	56.432.400,00	99,82	82.600.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	43.286.700,00	43.223.400,00	99,85	82.600.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	43.286.700,00	43.223.400,00	99,85	82.600.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	13.250.000,00	13.209.000,00	99,69	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	13.250.000,00	13.209.000,00	99,69	0,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	34.200.000,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	0,00	0,00	0,00	34.200.000,00
5.2.02.13.01.0003	Belanja Modal Sumur Lainnya	0,00	0,00	0,00	34.200.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	750.018.560,00	726.940.000,00	96,92	985.956.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	750.018.560,00	726.940.000,00	96,92	985.956.000,00

5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	750.018.560,00	726.940.000,00	96,92	985.956.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	417.600.060,00	403.867.500,00	96,71	330.270.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	181.993.500,00	181.000.000,00	99,45	267.820.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	150.425.000,00	142.072.500,00	94,45	387.866.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.068.890.940,00	1.045.043.849,00	97,77	1.173.156.000,00
	JUMLAH BELANJA	5.301.771.907,00	4.395.850.691,00	82,91	4.639.647.970,00
	SURPLUS/DEFISIT	(5.301.771.907,00)	(4.395.850.691,00)	82,91	(4.639.647.970,00)

KEPALA KECAMATAN SUNGAI ROTAN

Candra Firmansyah, S.E., M.Si.

NIP.197807042011011006



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM

KECAMATAN MUARA BELIDA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	4.076.370.568,00	3.749.410.227,00	91,97	3.485.156.333,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.274.370.568,00	2.954.959.089,00	90,24	2.950.128.833,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.177.010.349,00	1.956.210.914,00	89,85	1.683.355.692,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.209.226.709,00	1.090.552.875,00	90,18	883.643.004,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	918.785.276,60	853.243.268,00	92,86	687.394.897,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	624.467.596,60	576.648.568,00	92,34	623.322.904,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	294.317.680,00	276.594.700,00	93,97	64.071.993,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	114.497.528,40	91.960.571,00	80,31	71.747.628,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	73.145.748,40	63.109.233,00	86,27	62.777.548,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	41.351.780,00	28.851.338,00	69,77	8.970.080,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	63.140.000,00	55.660.000,00	88,15	61.600.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	63.140.000,00	55.660.000,00	88,15	61.600.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.920.000,00	5.040.000,00	63,63	7.380.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	7.920.000,00	5.040.000,00	63,63	7.380.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	29.298.500,00	27.613.750,00	94,24	14.185.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	10.377.000,00	10.120.000,00	97,52	10.485.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	18.921.500,00	17.493.750,00	92,45	3.700.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	72.221.258,40	55.473.720,00	76,81	39.686.160,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	40.040.604,40	33.820.140,00	84,46	33.892.560,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	32.180.654,00	21.653.580,00	67,28	5.793.600,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.285.981,90	1.546.535,00	47,06	1.637.933,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.285.981,90	1.546.535,00	47,06	1.637.933,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	78.163,70	15.031,00	19,23	11.386,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	66.851,80	9.103,00	13,61	9.907,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	11.311,90	5.928,00	52,40	1.479,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	967.783.640,00	865.658.039,00	89,44	799.712.688,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	967.783.640,00	865.658.039,00	89,44	799.712.688,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	747.556.880,00	666.763.246,00	89,19	749.973.371,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	220.226.760,00	198.894.793,00	90,31	49.739.317,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.097.360.219,00	998.748.175,00	91,01	1.266.773.141,00
5.1.02.01	Belanja Barang	358.903.969,00	345.794.100,00	96,34	467.016.300,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	358.903.969,00	345.794.100,00	96,34	467.016.300,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	16.348.800,00	11.575.000,00	70,80	6.100.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	16.380.000,00	16.350.000,00	99,81	25.170.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	101.046.093,00	93.801.000,00	92,82	121.468.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.544.986,00	15.008.100,00	96,54	13.623.300,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.998.090,00	3.790.000,00	94,79	6.450.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	16.776.000,00	16.725.000,00	99,69	30.330.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.940.000,00	4.900.000,00	99,19	4.900.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	21.000.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	94.270.000,00	94.045.000,00	99,76	173.475.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	7.500.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	58.500.000,00	58.500.000,00	100,00	52.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	430.645.000,00	346.017.168,00	80,34	470.431.200,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	279.670.000,00	219.042.168,00	78,32	260.281.200,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	10.500.000,00	10.500.000,00	100,00	10.500.000,00

5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	83.000.000,00	56.000.000,00	67,46	65.800.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	10.160.000,00	10.160.000,00	100,00	19.050.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	33.960.000,00	18.720.000,00	55,12	34.430.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	28.680.000,00	16.910.000,00	58,96	28.680.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	17.120.000,00	17.120.000,00	100,00	25.680.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	25.500.000,00	25.500.000,00	100,00	18.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	21.500.000,00	21.500.000,00	100,00	21.500.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	750.000,00	750.000,00	100,00	750.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	43.000.000,00	38.167.218,00	88,76	32.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.000.000,00	1.214.950,00	40,49	2.241.200,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	34.725.000,00	32.725.000,00	94,24	70.900.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	14.700.000,00	14.700.000,00	100,00	50.700.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	20.025.000,00	18.025.000,00	90,01	20.200.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	39.000.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	0,00	0,00	27.000.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	94.250.000,00	82.250.000,00	87,26	100.250.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	82.250.000,00	82.250.000,00	100,00	100.250.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	86.360.000,00	85.537.806,00	99,04	3.800.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	86.360.000,00	85.537.806,00	99,04	3.800.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	82.500.000,00	81.687.806,00	99,01	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.860.000,00	3.850.000,00	99,74	3.800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	160.701.250,00	160.649.101,00	99,96	264.775.641,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	160.701.250,00	160.649.101,00	99,96	264.775.641,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	160.701.250,00	160.649.101,00	99,96	264.775.641,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.750.000,00	60.750.000,00	100,00	60.750.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.750.000,00	60.750.000,00	100,00	60.750.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	60.750.000,00	60.750.000,00	100,00	60.750.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.274.370.568,00	2.954.959.089,00	90,24	2.950.128.833,00
5.2	BELANJA MODAL	802.000.000,00	794.451.138,00	99,05	535.027.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	252.000.000,00	247.799.995,00	98,33	210.398.500,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	91.000.000,00	89.500.000,00	98,35	210.398.500,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	149.398.500,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	149.398.500,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	91.000.000,00	89.500.000,00	98,35	61.000.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	56.000.000,00	55.000.001,00	98,21	61.000.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	35.000.000,00	34.499.999,00	98,57	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	25.000.000,00	24.500.000,00	98,00	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	25.000.000,00	24.500.000,00	98,00	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	25.000.000,00	24.500.000,00	98,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	136.000.000,00	133.799.995,00	98,38	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	136.000.000,00	133.799.995,00	98,38	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	136.000.000,00	133.799.995,00	98,38	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	550.000.000,00	546.651.143,00	99,39	324.629.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	550.000.000,00	546.651.143,00	99,39	324.629.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	550.000.000,00	546.651.143,00	99,39	324.629.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	550.000.000,00	546.651.143,00	99,39	0,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	0,00	0,00	0,00	127.538.000,00
5.2.03.01.01.0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	0,00	0,00	0,00	197.091.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	802.000.000,00	794.451.138,00	99,05	535.027.500,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	4.076.370.568,00	3.749.410.227,00	91,97	3.485.156.333,00
	SURPLUS/DEFISIT	(4.076.370.568,00)	(3.749.410.227,00)	91,97	(3.485.156.333,00)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(4.076.370.568,00)	(3.749.410.227,00)	91,97	(3.485.156.333,00)

KAB. MUARA ENIM
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN
BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja						Total Belanja		
		Operasi			Modal					
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	UNSUR KEWILAYAHAN	4.128.314.657	3.581.293.651	86,75	573.802.974	572.946.559	99,85	4.702.117.631	4.154.240.210	88,35
	KECAMATAN	4.128.314.657	3.581.293.651	86,75	573.802.974	572.946.559	99,85	4.702.117.631	4.154.240.210	88,35
	Kecamatan Belimbing	4.128.314.657	3.581.293.651	86,75	573.802.974	572.946.559	99,85	4.702.117.631	4.154.240.210	88,35
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.363.673.357	2.847.462.180	84,65	573.802.974	572.946.559	99,85	3.937.476.331	3.420.408.739	86,87
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.591.600	29.262.900	95,66	-	-	-	30.591.600	29.262.900	95,66
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.824.900	9.399.900	95,67	-	-	-	9.824.900	9.399.900	95,67
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17.241.000	16.561.500	96,06	-	-	-	17.241.000	16.561.500	96,06
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.525.700	3.301.500	93,64	-	-	-	3.525.700	3.301.500	93,64
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.744.407.198	2.272.936.733	82,82	-	-	-	2.744.407.198	2.272.936.733	82,82
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.702.219.898	2.232.164.233	82,60	-	-	-	2.702.219.898	2.232.164.233	82,60
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.048.000	3.937.000	97,26	-	-	-	4.048.000	3.937.000	97,26
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	38.139.300	36.835.500	96,58	-	-	-	38.139.300	36.835.500	96,58
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	215.015.400	213.775.000	99,42	-	-	-	215.015.400	213.775.000	99,42
7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	200.000.000	199.078.500	99,54	-	-	-	200.000.000	199.078.500	99,54
7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.015.400	14.696.500	97,88	-	-	-	15.015.400	14.696.500	97,88
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.500.000	7.500.000	100,00	-	-	-	7.500.000	7.500.000	100,00
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.500.000	7.500.000	100,00	-	-	-	7.500.000	7.500.000	100,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.237.960	193.207.098	88,53	-	-	-	218.237.960	193.207.098	88,53
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33.032.000	32.940.000	99,72	-	-	-	33.032.000	32.940.000	99,72
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.499.519	11.457.000	73,92	-	-	-	15.499.519	11.457.000	73,92
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.389.041	23.189.300	57,41	-	-	-	40.389.041	23.189.300	57,41
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.539.400	4.067.000	73,42	-	-	-	5.539.400	4.067.000	73,42
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.865.000	16.725.000	88,66	-	-	-	18.865.000	16.725.000	88,66
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.913.000	104.828.798	99,92	-	-	-	104.913.000	104.828.798	99,92
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	573.802.974	572.946.559	99,85	573.802.974	572.946.559	99,85
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	-	-	-	134.080.654	134.068.000	99,99	134.080.654	134.068.000	99,99
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	197.722.320	197.659.993	99,97	197.722.320	197.659.993	99,97
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	200.000.000	199.385.275	99,69	200.000.000	199.385.275	99,69
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	42.000.000	41.833.291	99,60	42.000.000	41.833.291	99,60
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.941.884	82.594.949	86,09	-	-	-	95.941.884	82.594.949	86,09
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.360.000	3.300.000	98,21	-	-	-	3.360.000	3.300.000	98,21
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.901.884	53.614.949	80,14	-	-	-	66.901.884	53.614.949	80,14
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25.680.000	25.680.000	100,00	-	-	-	25.680.000	25.680.000	100,00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	51.979.315	48.185.500	92,70	-	-	-	51.979.315	48.185.500	92,70
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.569.915	23.795.500	86,31	-	-	-	27.569.915	23.795.500	86,31
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.230.000	10.230.000	100,00	-	-	-	10.230.000	10.230.000	100,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.179.400	14.160.000	99,86	-	-	-	14.179.400	14.160.000	99,86
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	153.280.200	151.479.471	98,83	-	-	-	153.280.200	151.479.471	98,83
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	84.500.000	84.174.971	99,62	-	-	-	84.500.000	84.174.971	99,62
7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	84.500.000	84.174.971	99,62	-	-	-	84.500.000	84.174.971	99,62

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	68.780.200	67.304.500	97,85	-	-	-	68.780.200	67.304.500	97,85
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	16.621.200	16.235.500	97,68	-	-	-	16.621.200	16.235.500	97,68
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	15.592.400	14.965.000	95,98	-	-	-	15.592.400	14.965.000	95,98
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	36.566.600	36.104.000	98,73	-	-	-	36.566.600	36.104.000	98,73
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	324.444.200	298.495.000	92,00	-	-	-	324.444.200	298.495.000	92,00
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	324.444.200	298.495.000	92,00	-	-	-	324.444.200	298.495.000	92,00
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	28.123.200	27.582.600	98,08	-	-	-	28.123.200	27.582.600	98,08
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	296.321.000	270.912.400	91,43	-	-	-	296.321.000	270.912.400	91,43
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	84.852.400	82.097.000	96,75	-	-	-	84.852.400	82.097.000	96,75
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	68.416.200	65.700.000	96,03	-	-	-	68.416.200	65.700.000	96,03
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	68.416.200	65.700.000	96,03	-	-	-	68.416.200	65.700.000	96,03
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	16.436.200	16.397.000	99,76	-	-	-	16.436.200	16.397.000	99,76
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	16.436.200	16.397.000	99,76	-	-	-	16.436.200	16.397.000	99,76
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	183.117.500	183.070.000	99,97	-	-	-	183.117.500	183.070.000	99,97
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	183.117.500	183.070.000	99,97	-	-	-	183.117.500	183.070.000	99,97
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	168.417.500	168.370.000	99,97	-	-	-	168.417.500	168.370.000	99,97
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	14.700.000	14.700.000	100,00	-	-	-	14.700.000	14.700.000	100,00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.947.000	18.690.000	98,64	-	-	-	18.947.000	18.690.000	98,64
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.947.000	18.690.000	98,64	-	-	-	18.947.000	18.690.000	98,64
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1.945.000	1.850.000	95,12	-	-	-	1.945.000	1.850.000	95,12
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.002.000	7.840.000	97,98	-	-	-	8.002.000	7.840.000	97,98
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	9.000.000	9.000.000	100,00	-	-	-	9.000.000	9.000.000	100,00
	Jumlah	4.128.314.657	3.581.293.651	86,75	573.802.974	572.946.559	99,85	4.128.314.657	3.581.293.651	86,75

PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM KECAMATAN BELIDA DARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	4.218.828.676,00	3.986.079.812,00	94,48	3.817.445.282,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.072.236.496,00	3.840.431.312,00	94,31	3.692.065.282,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.730.526.675,00	2.576.412.830,00	94,36	2.248.776.268,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.657.264.038,00	1.503.252.052,00	90,71	1.178.522.597,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.236.972.523,00	1.187.147.384,00	95,97	910.468.941,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	144.120.936,00	111.456.638,00	77,34	104.329.824,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	99.980.000,00	80.570.000,00	80,59	76.020.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	14.995.000,00	5.040.000,00	33,61	7.380.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	50.507.000,00	40.864.058,00	80,91	21.760.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	84.476.823,00	76.348.785,00	90,38	56.994.540,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19.027.380,00	1.808.602,00	9,51	1.556.826,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.184.376,00	16.585,00	0,23	12.466,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.073.262.637,00	1.073.160.778,00	99,99	1.070.253.671,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.073.262.637,00	1.073.160.778,00	99,99	1.070.253.671,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.341.709.821,00	1.264.018.482,00	94,21	1.443.289.014,00
5.1.02.01	Belanja Barang	383.748.298,00	357.478.500,00	93,15	299.252.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	383.748.298,00	357.478.500,00	93,15	299.252.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	446.356.550,00	395.690.275,00	88,65	500.987.200,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	391.506.550,00	360.690.275,00	92,13	410.644.700,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	0,00	0,00	0,00	5.342.500,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	28.000.000,00	23.000.000,00	82,14	45.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	40.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	14.850.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	304.905.973,00	304.160.559,00	99,76	425.450.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	84.905.973,00	84.860.559,00	99,95	8.550.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	220.000.000,00	219.300.000,00	99,68	416.900.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	169.699.000,00	169.689.148,00	99,99	209.799.814,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	169.699.000,00	169.689.148,00	99,99	209.799.814,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00	7.800.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00	7.800.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	4.072.236.496,00	3.840.431.312,00	94,31	3.692.065.282,00
5.2	BELANJA MODAL	146.592.180,00	145.648.500,00	99,36	125.380.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	146.592.180,00	145.648.500,00	99,36	125.380.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	70.380.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	0,00	0,00	0,00	70.380.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	127.592.180,00	127.500.000,00	99,93	10.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	127.592.180,00	127.500.000,00	99,93	10.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	19.000.000,00	18.148.500,00	95,52	45.000.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	19.000.000,00	18.148.500,00	95,52	45.000.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	146.592.180,00	145.648.500,00	99,36	125.380.000,00
	JUMLAH BELANJA	4.218.828.676,00	3.986.079.812,00	94,48	3.817.445.282,00
	SURPLUS/DEFISIT	(4.218.828.676,00)	(3.986.079.812,00)	94,48	(3.817.445.282,00)

Kab. Muara Enim, 22 Januari 2026 **KEPALA KECAMATAN BELIDA DARAT**

Zulchaidir Sidik, S.STP, M.Si
NIP.198408162002121001



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM

KECAMATAN LUBAI ULU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	4.849.488.708,00	3.827.046.778,00	78,91	3.577.297.519,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.709.488.708,00	3.693.546.778,00	78,42	3.243.112.519,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.996.037.267,00	2.254.807.151,00	75,25	1.756.855.862,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.924.767.441,00	1.250.204.172,00	64,95	939.764.152,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.525.215.560,00	992.993.160,00	65,10	730.511.286,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.163.708.780,00	709.908.760,00	61,00	666.439.311,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	361.506.780,00	283.084.400,00	78,30	64.071.975,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	155.919.687,00	93.000.901,00	59,64	76.008.902,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	129.135.901,00	72.405.919,00	56,06	69.601.702,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	26.783.786,00	20.594.982,00	76,89	6.407.200,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	85.800.000,00	64.820.000,00	75,54	63.980.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	85.800.000,00	64.820.000,00	75,54	63.980.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.581.500,00	10.010.000,00	64,24	8.596.850,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15.581.500,00	10.010.000,00	64,24	8.596.850,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	48.004.500,00	31.508.750,00	65,63	16.880.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	24.213.500,00	13.330.000,00	55,05	13.180.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	23.791.000,00	18.178.750,00	76,41	3.700.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	83.729.873,00	56.523.810,00	67,50	43.307.160,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	62.300.000,00	42.076.020,00	67,53	40.410.360,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	21.429.873,00	14.447.790,00	67,41	2.896.800,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	10.495.278,00	1.335.359,00	12,72	470.259,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	10.495.278,00	1.335.359,00	12,72	470.259,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	21.043,00	12.192,00	57,93	9.695,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	17.350,00	8.794,00	50,68	9.328,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3.693,00	3.398,00	92,01	367,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.071.269.826,00	1.004.602.979,00	93,77	817.091.710,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.071.269.826,00	1.004.602.979,00	93,77	817.091.710,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	851.529.641,00	800.621.424,00	94,02	767.289.897,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	219.740.185,00	203.981.555,00	92,82	49.801.813,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.713.451.441,00	1.438.739.627,00	83,96	1.486.256.657,00
5.1.02.01	Belanja Barang	778.427.583,00	670.932.320,00	86,19	495.320.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	778.427.583,00	670.932.320,00	86,19	495.320.000,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	34.075.300,00	29.401.500,00	86,28	24.759.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	40.806.000,00	8.199.320,00	20,09	7.425.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	60.844.358,00	50.448.000,00	82,91	65.703.500,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	46.859.375,00	36.400.000,00	77,67	28.305.500,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	8.480.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.680.550,00	3.039.000,00	64,92	20.533.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	49.395.000,00	48.766.000,00	98,72	57.795.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	18.600.000,00	8.065.000,00	43,36	11.207.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	422.287.200,00	389.099.500,00	92,14	181.362.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	12.634.800,00	9.864.000,00	78,07	14.450.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.995.000,00	4.400.000,00	88,08	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	11.750.000,00	11.750.000,00	100,00	0,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	0,00	0,00	0,00	11.400.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	65.500.000,00	65.500.000,00	100,00	63.900.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	614.229.858,00	493.224.261,00	80,29	639.812.740,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	450.004.008,00	364.046.761,00	80,89	465.401.240,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	16.660.000,00	16.660.000,00	100,00	15.000.000,00

5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	111.280.000,00	77.040.000,00	69,23	128.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	52.960.000,00	52.960.000,00	100,00	85.860.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	59.120.000,00	57.580.000,00	97,39	56.440.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	25.680.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0,00	0,00	0,00	35.240.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	56.000.000,00	27.000.000,00	48,21	24.000.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	25.000.000,00	12.500.000,00	50,00	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	65.800.000,00	63.400.000,00	96,35	59.850.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	34.985.808,00	32.522.036,00	92,95	28.514.240,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.058.200,00	1.244.725,00	24,60	5.817.000,00
5.1.02.02.01.0086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	2.140.000,00	2.140.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	9.925.850,00	5.377.500,00	54,17	5.766.500,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	9.925.850,00	5.377.500,00	54,17	5.766.500,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	95.800.000,00	72.800.000,00	75,99	73.700.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	25.000.000,00	2.000.000,00	8,00	65.800.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	70.800.000,00	70.800.000,00	100,00	7.900.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	85.920.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0,00	0,00	0,00	85.920.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	22.500.000,00	15.000.000,00	66,66	9.025.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	22.500.000,00	15.000.000,00	66,66	9.025.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	65.980.000,00	53.746.000,00	81,45	72.600.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65.980.000,00	53.746.000,00	81,45	72.600.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	33.580.000,00	30.036.000,00	89,44	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	18.000.000,00	17.300.000,00	96,11	14.850.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.950.000,00	6.410.000,00	58,53	12.750.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	194.814.000,00	169.837.046,00	87,17	232.773.917,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	194.814.000,00	169.837.046,00	87,17	232.773.917,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	194.814.000,00	169.837.046,00	87,17	232.773.917,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.000.000,00	51.000.000,00	85,00	45.750.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.000.000,00	51.000.000,00	85,00	45.750.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	60.000.000,00	51.000.000,00	85,00	45.750.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	4.709.488.708,00	3.693.546.778,00	78,42	3.243.112.519,00
5.2	BELANJA MODAL	140.000.000,00	133.500.000,00	95,35	334.185.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	140.000.000,00	133.500.000,00	95,35	215.985.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	80.000.000,00	76.500.000,00	95,62	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	80.000.000,00	76.500.000,00	95,62	0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	80.000.000,00	76.500.000,00	95,62	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	60.000.000,00	57.000.000,00	95,00	215.985.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	60.000.000,00	57.000.000,00	95,00	118.390.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	60.000.000,00	57.000.000,00	95,00	118.390.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	0,00	97.595.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	97.595.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	118.200.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	118.200.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	118.200.000,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	118.200.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	140.000.000,00	133.500.000,00	95,35	334.185.000,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	4.849.488.708,00	3.827.046.778,00	78,91	3.577.297.519,00
	SURPLUS/DEFISIT	(4.849.488.708,00)	(3.827.046.778,00)	78,91	(3.577.297.519,00)
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(4.849.488.708,00)	(3.827.046.778,00)	78,91	(3.577.297.519,00)



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM



KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	3.773.935.774,00	3.165.422.167,00	83,87	3.668.439.600,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.518.035.774,00	2.936.103.167,00	83,45	3.165.187.100,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.384.502.256,00	1.997.128.436,00	83,75	1.886.057.804,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.307.935.699,00	1.138.860.862,00	87,07	1.020.992.201,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.005.856.772,50	914.208.888,00	90,88	803.163.695,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	764.718.627,10	680.605.220,00	89,00	739.091.720,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	241.138.145,40	233.603.668,00	96,87	64.071.975,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	125.686.324,20	87.305.022,00	69,46	81.489.282,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	82.528.495,00	67.374.298,00	81,63	74.505.434,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	43.157.829,20	19.930.724,00	46,18	6.983.848,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	77.661.750,00	54.740.000,00	70,48	71.120.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	77.661.750,00	54.740.000,00	70,48	71.120.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	32.803.500,00	30.378.750,00	92,60	18.940.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.160.000,00	15.145.000,00	88,25	15.240.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	15.643.500,00	15.233.750,00	97,38	3.700.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	60.050.664,00	51.291.465,00	85,41	44.393.460,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	45.523.212,00	37.151.460,00	81,60	40.844.880,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	14.527.452,00	14.140.005,00	97,33	3.548.580,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.861.261,00	927.217,00	15,81	1.876.635,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.861.261,00	927.217,00	15,81	1.876.635,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	15.427,30	9.520,00	61,70	9.129,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8.281,00	6.439,00	77,75	8.492,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7.146,30	3.081,00	43,11	637,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.076.566.557,00	858.267.574,00	79,72	863.705.603,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.076.566.557,00	858.267.574,00	79,72	863.705.603,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	904.982.449,00	691.958.531,00	76,46	813.502.592,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	171.584.108,00	166.309.043,00	96,92	50.203.011,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.133.533.518,00	938.974.731,00	82,83	1.279.129.296,00
5.1.02.01	Belanja Barang	394.544.742,00	328.489.840,00	83,25	379.109.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	394.544.742,00	328.489.840,00	83,25	379.109.500,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	7.645.200,00	989.000,00	12,93	0,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	14.401.200,00	14.160.000,00	98,32	6.530.000,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	18.250.600,00	14.065.000,00	77,06	13.805.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.609.890,00	29.857.490,00	97,54	38.079.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.325.350,00	13.325.350,00	100,00	15.066.500,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.892.800,00	1.892.800,00	100,00	1.884.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	8.565.278,00	5.979.000,00	69,80	4.790.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	31.134.524,00	3.867.900,00	12,42	29.980.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	44.329.300,00	35.579.300,00	80,26	18.705.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39.620.000,00	36.915.000,00	93,17	38.220.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	110.070.600,00	97.774.000,00	88,82	138.355.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	74.700.000,00	74.085.000,00	99,17	73.695.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	497.605.376,00	373.959.350,00	75,15	619.804.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	246.136.376,00	214.859.350,00	87,29	450.404.500,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00	2.500.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	128.400.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	18.190.000,00	18.190.000,00	100,00	38.520.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	41.730.000,00	41.730.000,00	100,00	64.200.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.420.000,00	2.320.000,00	42,80	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	51.360.000,00	51.360.000,00	100,00	102.720.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	29.960.000,00	27.820.000,00	92,85	51.360.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	22.400.000,00	22.400.000,00	100,00	17.400.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	700.000,00	700.000,00	100,00	700.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	49.991.376,00	39.312.275,00	78,63	34.372.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.145.000,00	4.587.075,00	41,15	1.432.500,00
5.1.02.02.01.0086	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga teknis	2.140.000,00	2.140.000,00	100,00	0,00

5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	11.769.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	11.769.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	81.400.000,00	37.800.000,00	46,43	57.250.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	47.500.000,00	4.500.000,00	9,47	35.250.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	33.900.000,00	33.300.000,00	98,23	22.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	36.000.000,00	12.000.000,00	33,33	34.000.000,00
5.1.02.02.05.0041	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	10.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	122.300.000,00	109.300.000,00	89,37	78.150.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	113.300.000,00	101.100.000,00	89,23	78.150.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	9.000.000,00	8.200.000,00	91,11	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	13.810.000,00	13.810.000,00	100,00	10.090.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.810.000,00	13.810.000,00	100,00	10.090.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.320.000,00	7.320.000,00	100,00	3.600.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	6.490.000,00	6.490.000,00	100,00	6.490.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	198.773.400,00	193.915.541,00	97,55	259.325.296,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	198.773.400,00	193.915.541,00	97,55	259.325.296,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	198.773.400,00	193.915.541,00	97,55	259.325.296,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	10.800.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	10.800.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	28.800.000,00	28.800.000,00	100,00	10.800.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.518.035.774,00	2.936.103.167,00	83,45	3.165.187.100,00
5.2	BELANJA MODAL	255.900.000,00	229.319.000,00	89,61	503.252.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	255.900.000,00	229.319.000,00	89,61	104.962.500,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	70.900.000,00	58.640.000,00	82,70	104.962.500,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	30.712.500,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	30.712.500,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	70.900.000,00	58.640.000,00	82,70	74.250.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	34.900.000,00	23.240.000,00	66,59	74.250.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	36.000.000,00	35.400.000,00	98,33	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	185.000.000,00	170.679.000,00	92,25	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	135.000.000,00	125.679.000,00	93,09	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	135.000.000,00	125.679.000,00	93,09	0,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	50.000.000,00	45.000.000,00	90,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	50.000.000,00	45.000.000,00	90,00	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	398.290.000,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	199.163.000,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0,00	0,00	0,00	199.163.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	0,00	0,00	0,00	199.163.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	199.127.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	199.127.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	0,00	0,00	0,00	199.127.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	255.900.000,00	229.319.000,00	89,61	503.252.500,00
	JUMLAH BELANJA	3.773.935.774,00	3.165.422.167,00	83,87	3.668.439.600,00
	SURPLUS/DEFISIT	(3.773.935.774,00)	(3.165.422.167,00)	83,88	(3.668.439.600,00)

Kab. Muara Enim, 6 Februari 2026
PLT. KEPALA KECAMATAN EMPAT PETULAI DANGKU

Sabriansyah, S.H.
NIP.196806281994031010



PEMERINTAHAN KAB. MUARA ENIM KECAMATAN PANANG ENIM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA DAERAH	4.027.304.654,00	3.002.906.988,00	74,56	2.634.107.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	3.978.304.654,00	2.960.336.989,00	74,41	2.560.007.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.796.783.566,00	2.108.625.049,00	75,39	1.688.263.158,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.647.415.683,00	1.138.645.319,00	69,12	888.438.898,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.255.968.850,00	890.182.920,00	70,88	686.978.964,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	144.662.563,00	101.094.309,00	69,88	76.881.540,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	110.976.000,00	53.340.000,00	48,06	60.550.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	52.947.250,00	34.038.750,00	64,29	18.490.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	80.423.210,00	58.551.570,00	72,80	44.321.040,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.152.500,00	1.426.286,00	66,26	1.208.353,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	285.310,00	11.484,00	4,03	9.001,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.149.367.883,00	969.979.730,00	84,39	799.144.260,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.149.367.883,00	969.979.730,00	84,39	799.144.260,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	680.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	680.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.181.521.088,00	851.711.940,00	72,09	871.743.842,00
5.1.02.01	Belanja Barang	475.720.388,00	318.514.350,00	66,95	347.606.250,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	475.720.388,00	318.514.350,00	66,95	347.606.250,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	352.405.300,00	246.561.025,00	69,97	293.286.500,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	207.436.300,00	122.175.925,00	58,90	173.636.500,00
5.1.02.02.02	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	10.969.000,00	10.685.100,00	97,41	0,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	46.850.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	42.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	104.000.000,00	83.700.000,00	80,48	30.800.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	258.145.400,00	191.386.565,00	74,14	200.851.092,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	258.145.400,00	191.386.565,00	74,14	200.851.092,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	95.250.000,00	95.250.000,00	100,00	30.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	95.250.000,00	95.250.000,00	100,00	30.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	3.978.304.654,00	2.960.336.989,00	74,41	2.560.007.000,00
5.2	BELANJA MODAL	49.000.000,00	42.569.999,00	86,88	74.100.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.000.000,00	42.569.999,00	86,88	74.100.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	49.000.000,00	42.569.999,00	86,88	30.100.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	35.000.000,00	28.589.999,00	81,69	24.400.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	14.000.000,00	13.980.000,00	99,86	5.700.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	49.000.000,00	42.569.999,00	86,88	74.100.000,00
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
	JUMLAH BELANJA	4.027.304.654,00	3.002.906.988,00	74,56	2.634.107.000,00
	SURPLUS/DEFISIT	(4.027.304.654,00)	(3.002.906.988,00)	74,56	(2.634.107.000,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN
MUARA ENIM**